

BUKU II

DOKUMEN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 660 / 240 / DLHK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Safrizal ZA, M.Si

Jabatan : PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Dengan ini menyatakan bahwa penetapan isu prioritas lingkungan hidup pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah didasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan. Adapun isu prioritas lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal
2. Alih Fungsi Lahan
3. Penurunan Kualitas Air
4. Tata Kelola Pertambangan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 28 Juni 2024

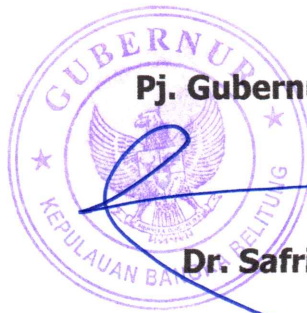


Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,

Dr. Safrizal ZA, M.Si

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Dokumen IKPLHD ini. Kami berharap dokumen ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana sebagai referensi dalam perencanaan program pembangunan ataupun untuk keperluan positif lainnya dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, 28 Juni 2024



Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,

Dr. Safrizal ZA, M.Si



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SURAT PERNYATAAN

NOMOR: 660/241 /DLHK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Safrizal ZA, M.Si

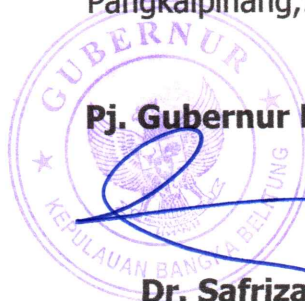
Jabatan : PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Dengan ini menyatakan bahwa inovasi sebagai berikut:

1. Semarak Babel
2. Kompos Blok Babel
3. Sedekah Pohon
4. Agro Eduwisata
5. Literasi Lingkungan
6. Pembangkit Listrik Tenaga Surya *Rooftop*
7. Pelet Sampah
8. *Eco Brick* Sampah
9. Pembuatan BBM dengan Teknologi Pirolisis Sampah
10. Si Terbit DLHK
11. Kampung Keluarga Cikar
12. Kampung Bebas Malaria
13. Si Centing (Siap Cegah Stunting)

merupakan inovasi yang berasal dari inisiatif kami selaku kepala daerah atau pengembangan dari inisiatif masyarakat/LSM/ Organisasi Perangkat Daerah di wilayah kami.

Pangkalpinang, 28 Juni 2024



Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,

Dr. Safrizal ZA, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33418
Telp/Fax. (0717) 436975, email : dlhk@babelprov.go.id, website : dlhk.babelprov.go.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Edi Kurniadi, S.ST., M.M
NIP : 19730518 200212 1 004
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Menyatakan bahwa:

1. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disusun oleh tim pokja dan tim penyusun Dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Proses penyusunan dilaksanakan secara partisipatif melibatkan berbagai unsur dan pihak berkepentingan seperti tim pokja, akademisi, LSM dan masyarakat.
3. Dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 disusun berdasarkan data dan informasi tahun 2022 - 2023 dan data-data yang diperoleh pada saat dokumen disusun, validitas data dilakukan dan data yang digunakan dikeluarkan oleh wali data dan tertera pada sumber data dalam Dokumen IKPLHD.

Mengetahui,
Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung



Dr. Safrizal ZA, M.Si

Pangkalpinang, Juni 2024

Yang membuat pernyataan,
Plh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



EDI KURNIADI, S.ST., M.M



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Dokumen IKPLHD ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup dan sebagai sarana untuk menyajikan data dan informasi mengenai kondisi Lingkungan hidup di daerah. Dokumen IKPLHD juga berguna sebagai bahan untuk melakukan penilaian dan menentukan prioritas masalah, serta membuat rekomendasi dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan.

Dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berisi data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di antaranya adalah kondisi dan kualitas lingkungan hidup, tekanan-tekanan yang dialami antara lain terhadap terhadap tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, perkotaan serta tata kelola, gambaran aktivitas perekonomian penduduk, dampak-dampak lingkungan yang timbul, dan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan ataupun direncanakan akan dilaksanakan. Informasi yang tersaji dalam Dokumen IKPLHD ini dilengkapi dengan grafik dan peta yang diharapkan bisa memperjelas penyajian informasi.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Dokumen IKPLHD ini. Kami berharap dokumen ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana sebagai referensi dalam perencanaan program pembangunan ataupun untuk keperluan positif lainnya dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, 28 Juni 2024



Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,

Dr. Safrizal ZA, M.Si



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ISU PRIORITAS DIKPLHD TAHUN 2024	i
SURAT PERNYATAAN INOVASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	ii
PAKTA INTEGRITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.1. Latar Belakang.....	I-1
I.2. Profil Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-3
I.2.1 Karakteristik Wilayah	I-3
I.2.2 Karakteristik Bentang Lahan	I-14
I.2.3 Potensi Unggulan Daerah	I-17
I.3. Proses Perumusan Isu Prioritas dan Penyusunan Dokumen.....	I-23
I.4. Maksud dan Tujuan.....	I-26
I.5. Ruang Lingkup Penulisan.....	I-27
BAB II ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT, DAN RESPONSE	
ISU LINGKUNGAN HIDUP	II-1
II.I Tata Guna Lahan.....	II-5
II.1.1 Driving Force	II-8
II.1.1.1 Peningkatan Jumlah Penduduk	II-8
II.1.1.2 Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang yang belum optimal	II-10
II.1.2 Pressure	II-11
II.1.2.1 Alih Fungsi lahan	II-11
II.1.2.4 Eksploitasi Lahan.....	II-46
II.1.3 State.....	II-50
II.1.3.1 Kondisi Eksisting Penutup Lahan.....	II-53
II.1.3.2 Kondisi Pesisir dan Laut.....	II-58
II.1.3.3 Lahan Kritis.....	II-67
II.1.3.4 Erosi dan Sedimentasi.....	II-78
II.1.3.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	II-79



II.1.4 Impact	II-83
II.1.4.1 Penurunan Daya Dukung Lahan.....	II-84
II.1.4.2 Peningkatan Emisi GRK dan Perubahan Iklim.....	II-85
II.1.4.3 Perubahan Garis Pantai	II-92
II.1.4.4 Peningkatan Bencana Karhutla	II-94
II.1.4.5 Penurunan Keanekaragaman Hayati.....	II-95
II.1.5 Response	II-100
II.1.5.1 Pengendalian Pemanfaatan Ruang	II-101
II.1.5.2 Pengendalian Pemanfaatan Fungsi Kawasan Hutan.....	II-113
II.1.5.3 Pengendalian Kerusakan Lahan.....	II-117
II.1.5.4 Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.....	II-126
II.1.5.5 Pelestarian Keanekaragaman Hayati.....	II-137
II.1.5.6 Sosialisasi, Edukasi dan Peningkatan Kapasitas.....	II-139
II.2 Kualitas Air	II-142
II.2.1 Driving Force	II-143
II.2.1.1 Konsumsi Air.....	II-143
II.2.1.2 Aktivitas Ekonomi.....	II-146
II.2.2 Pressure	II-148
II.2.2.1 Air Limbah Domestik.....	II-148
II.2.2.2 Air Limbah Industri	II-151
II.2.3 State.....	II-154
II.2.3.1 IKA dan IKAL.....	II-154
II.2.3.2 Kualitas Air	II-158
II.2.3.3 Ketersediaan Air	II-161
II.2.3.4 Sumber Air Minum.....	II-164
II.2.4 Impact	II-165
II.2.4.1 Penurunan Kesehatan Masyarakat.....	II-165
II.2.4.2 Kerugian Ekonomi.....	II-166
II.2.4.3 Kerugian ekologi.....	II-167
II.2.4.4 Konflik Sosial.....	II-170
II.2.5 Respons	II-172
II.2.5.1 Perencanaan dalam RPJMD.....	II-172
II.2.5.2 Pengolahan Air Limbah.....	II-173
II.2.5.3 Pendidikan dan Penyadartahuan.....	II-175
II.2.5.4 Penyediaan Prasarana Air Bersih.....	II-176



II.2.5.5. Konservasi Air.....	II-177
II.2..5.6 Rehabilitasi DAS.....	II-179
II.3 Kualitas Udara.....	II-182
II.3.1 Faktor Pendorong (Driving Force)	II-184
II.3.1.1 Pertambahan Penduduk dan Tingkat Ekonomi.....	II-184
II.3.1.2 Aktivitas dan Mobilitas Masyarakat.....	II-185
II.3.2 Tekanan (Pressure).....	II-187
II.3.2.1 Kenaikan Penggunaan Bahan Bakar	II-187
II.3.2.2 Kenaikan Konsentrasi Gas Rumah Kaca	II-188
II.3.3 Kondisi (State).....	II-189
II.3.3.1 Potensi Kenaikan Gas Pencemar Udara	II-189
II.3.3.2 Indeks Kualitas Udara	II-195
II.3.4 Dampak (Impact)	II-200
II.3.4.1 Perubahan Suhu Udara	II-201
II.3.4.2 Perubahan Iklim	II-203
II.3.5 Respon (Response)	II-203
II.3.4.1 Program Penghijauan.....	II-203
II.3.4.2 Program Kampung Iklim.....	II-206
II.3.4.3 Peningkatan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum....	II-209
II.IV Risiko Bencana.....	II-211
II.4.1 Driving force.....	II-215
II.4.1.1 Letak Geografis.....	II-215
II.4.1.2 Kondisi Geologi.....	II-217
II.4.1.3 Peningkatan Jumlah Penduduk.....	II-221
II.4.1.4 Climate Change dan El Nino.....	II-224
II.4.2 Pressure	II-227
II.4.2.1 Penanganan Sampah yang Tidak Ramah Lingkungan.....	II-229
II.4.2.2 Lahan Kritis Akibat Tambang Tidak Berkelanjutan.....	II-238
II.4.3 State.....	II-238
II.4.3.1 Kejadian Karhuta Tahun 2023.....	II-239
II.4.3.2 Menurunnya Indeks Kualitas Air.....	II-240
II.4.4 Impact	II-241
II.4.4.1 Isu Kesehatan Masyarakat Terkait Karhutla	II-242
II.4.4.2 Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Karhutla	II-242



II.4.5 Rensponses	II-246
II.4.5.1 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	II-246
II.4.5.2 Tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana	II-253
II.4.5.3 Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan	II-254
II.4.5.6 Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	II-255
II.4.5.7 Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	II-257
II.5 Perkotaan.....	II-273
II.5.1 Driving forces	II-275
II.5.1.1 Kependudukan.....	II-278
II.5.1.2 Tingkat Pendidikan.....	II-281
II.5.1.3 Perekonomian	II-285
II.5.1.4 Kebijakan Pengelolaan Perkotaan	II-289
II.5.2 Pressures	II-289
II.5.2.1 Alih fungsi lahan untuk kegiatan antropogenik.....	II-289
II.5.2.2 Pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat.....	II-291
II.5.2.3 Kegiatan transportasi	II-296
II.5.2.4 Konsumsi energi	II-299
II.5.3 States	II-302
II.5.3.1 Tutupan lahan terbangun.....	II-303
II.5.3.2 Kondisi akses air minum dan sanitasi	II-305
II.5.3.4 Kondisi air dan udara	II-308
II.5.3.5 Kondisi pangan.....	II-313
II.5.3.6 Kondisi persampahan.....	II-314
II.5.4 Impacts.....	II-317
II.5.4.1 Over capacity landfill.....	II-319
II.5.4.2 Kawasan kumuh	II-322
II.5.4.4 Banjir dan genangan air	II-324
II.5.5 Responses.....	II-329
II.5.5.1 Respon pada driving forces	II-331
II.5.5.2 Respon pada pressures	II-337
II.5.5.3 Respon pada states	II-344
II.5.5.4 Respon pada impacts.....	II-364
II.6 Tata Kelola.....	II-372
II.6.1 Driving Force	II-375
II.6.1.1 Perizinan	II-375



II.6.1.2 Produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup.....	II-383
II.6.1.4 Pendapatan Asli Daerah	II-384
II.6.2 Pressure.....	II-385
II.6.2.1 Pengaduan Masyarakat	II-385
II.6.2.1 Konflik manusia dengan satwa liar	II-387
II.6.2.1 Kearifan Lokal	II-389
II.6.3 State.....	II-390
II.6.3.1 Jumlah personel dalam pengelolaan lingkungan hidup	II-390
II.6.3.1 Jumlah lembaga masyarakat/komunitas pengelolaan lingkungan hidup	II-394
II.6.4 Impact	II-397
II.6.4.1 Status pengaduan.....	II-397
II.6.5 Response	II-400
II.6.5.1 Pengawasan.....	II-400
II.6.5.2 Program yang diinisiasi masyarakat	II-402
II.6.5.3 Penghargaan lingkungan hidup.....	II-409
BAB III ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	III-1
III.1 Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup	III-7
III.2 Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal	III-7
III.3 Alih Fungsi Lahan.....	III-8
III.4 Penurunan Kualitas Air	III-11
III.5 Tata Kelola Pertambangan.....	III-14
BAB IV INOVASI LINGKUNGAN HIDUP.....	IV-1
IV.1. Inovasi Pengelolaan Lahan	IV-1
IV.2. Inovasi Persampahan	IV-20
IV.3. Inovasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS EBT.....	IV-31
IV.3. Inovasi Fuel Card dan BBM Dinas ESDM Babel.....	IV-32

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN I PENGOLAHAN DATA ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN II TABEL DATA ALAM DIKPLHD TAHUN 2024

LAMPIRAN III PETA TEMATIK

LAMPIRAN IV SK TIM POKJA PENYUSUN DIKPLHD

LAMPIRAN V DOKUMENTASI TAHAPAN PENYUSUNAN

LAMPIRAN VI CURICULLUM VITAE TIM PENYUSUN





DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Luas Wilayah Daratan dan Persebaran Penduduk di.....	I-4
Tabel 1. 2 Pulau-pulau Bernama Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	I-5
Tabel 1. 3 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2021-2023	I-7
Tabel 1. 4 Ketinggian Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) menurut Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	I-8
Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	I-12
Tabel 1. 6 Kepadatan Penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-13
Tabel 1. 7 Karakteristik Bentang Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-15
Tabel 1. 8 Perkembangan Luas Kawasan Hutan	I-18
Tabel 2.1. 1 Trend Jumlah Penduduk Sepanjang Tahun 2020-2024.....	II-9
Tabel 2.1. 2 Luas Kawasan Lindung dan Budidaya dan Penutup Lahan Eksistingnya..	II-18
Tabel 2.1. 3 Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian	II-20
Tabel 2.1. 4 Luasan Hutan Berdasarkan Fungsinya.....	II-34
Tabel 2.1. 5 Luas Wilayah Darat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-51
Tabel 2.1. 6 Pola Ruang Revisi RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044	II-51
Tabel 2.1. 7 Alokasi Pemanfaatan Ruang Laut Dalam RZWP3K.....	II-53
Tabel 2.1. 8 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama.....	II-53
Tabel 2.1. 9 Dinamika Perubahan Luasan Penutup Lahan Tahun 2018-2022	II-57
Tabel 2.1. 10 Perbandingan Luas Lahan Kritis Tahun 2018 dan 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-70
Tabel 2.1. 11 Luasan lahan kritis berdasarkan wilayah administrasi	II-70
Tabel 2.1. 12 Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering	II-72
Tabel 2.1. 13 Tingkat Emisi GRK Sektorial tahun 2021.....	II-91
Tabel 2.1. 14 Status Keanekaragaman Hayati di Provinsi	II-96
Tabel 2.1. 15 Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang Revisi RTRWP.....	II-102
Tabel 2.1. 16 Realisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh BPDAS Baturusa Cerucuk Tahun 2023	II-108
Tabel 2.1. 17 Realisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berdasarkan Data DLHK Prov Kep Babel Tahun 2023	II-118
Tabel 2.1. 18 Progress IGRK Kabupaten/Kota	II-129





Tabel 2.1. 19 Aksi Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Aksara periode tahun 2018-2022	II-131
Tabel 2.1. 20 Usulan Lokasi Proklamasi Tahun 2023	II-136
Tabel 2.1. 21 Lokasi Pengambilan Data Dan Informasi Kehati	II-139
Tabel 2.1. 22 Penangkaran Satwa	II-140
Tabel 2.2. 1 Beberapa indikator kualitas air yang umum digunakan.....	II-142
Tabel 2.2. 2 Persentase rumah tangga dalam pengelolaan limbah tinja	II-145
Tabel 2.2. 3 Status mutu sungai yang mengalir di kawasan pemukiman padat penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-149
Tabel 2.2. 4 Beban pencemaran air dari beberapa industri.....	II-152
Tabel 2.2. 5 Rekap status mutu air sungai tahun 2023	II-152
Tabel 2.2. 6 Kualitas air sumur.....	II-159
Tabel 2.2. 7 Kualitas air hujan tahun 2023.....	II-160
Tabel 2.2. 8 Ketersediaan Air Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-163
Tabel 2.2. 9 Pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan pengolahan air limbah	II-170
Tabel 2.2. 10 Realisasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan.....	II-180
Tabel 2.3. 1 Konsentrasi Gas Pencemar NO ₂ dan SO ₂ di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2023.....	II-192
Tabel 2.3. 2 Perhitungan Indeks Kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	II-195
Tabel 2.3. 3 Kategori Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	II-197
Tabel 2.3. 4 Lokasi Proklamasi yang terdaftar secara reguler	II-207
Tabel 2.3. 5 Lokasi Proklamasi yang Terdaftar melalui Dana REDD+ GCF Output 2.....	II-208
Tabel 2.4. 1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota	II-222
Tabel 2.4. 2 Anggaran dan Program Pengelolaan Lingkungan	II-247
Tabel 2.4. 3 Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020-2023.....	II-255
Tabel 2.4. 4 Kegiatan/Program yang Diinisiasi Masyarakat	II-261
Tabel 2.4. 5 Daftar Lokasi Proklamasi Tahun 2017-2022	II-268
Tabel 2.4. 6 Daftar Lokasi Proklamasi yang Diusulkan Tahun 2023.....	II-269
Tabel 2.4. 7Daftar Lokasi Proklamasi yang Diusulkan Tahun 2024.....	II-271
Tabel 2.5. 1 Penduduk, Pertumbuhan, dan Kepadatannya Tahun 2023.....	II-279
Tabel 2.5. 2 Persebaran Penduduk Perkotaan Tahun 2023.....	II-280
Tabel 2.5. 3 Rata-rata Lama Sekolah di Kepulauan Bangka Belitung	II-285
Tabel 2.5. 4 Jenis Pengeluaran Penduduk Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2023	II-294



Tabel 2.5. 5 Jenis Kendaraan Bermotor Tahun 2023 (unit).....	II-296
Tabel 2.5. 6 Panjang Jalan Di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung 2021-2023	II-297
Tabel 2.5. 7 Proporsi Tutupan Lahan untuk Kegiatan Utama Perekonomian	II-304
Tabel 2.5. 8 Perbandingan IKP Tahun 2021 dan 2022	II-313
Tabel 2.5. 9 Jumlah timbulan sampah di ibukota Kabupaten tahun 2022 dan 2023 .	II-314
Tabel 2.5. 10 TPA Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-317
Tabel 2.5. 11 Sektor Informal Dalam Pengelolaan Sampah	II-320
Tabel 2.5. 12 Kawasan Kumuh Wewenang Provinsi	II-323
Tabel 2.5. 13 Kawasan Kumuh di Pangkalpinang	II-323
Tabel 2.5. 14 Jumlah Total Kejadian Bencana Menurut Jenisnya	II-326
Tabel 2.5. 15 Daftar Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi 2023.....	II-340
Tabel 2.5. 16 Penerima Adipura Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-341
Tabel 2.5. 17 Daftar Hasil Pengawasan Kategori “Tidak Taat” Tahun 2023.....	II-343
Tabel 2.5. 18 Kebijakan Daerah Menanggapi Timbulan Sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-343
Tabel 2.5. 19 Fasilitas TPS 3R Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-349
Tabel 2.5. 20 Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah.....	II-350
Tabel 2.5. 21 Daftar Bank Sampah Di Kepulauan Bangka Belitung.....	II-352
Tabel 2.5. 22 Daftar Bank Sampah Penerima Penghargaan Tahun 2023	II-355
Tabel 2.5. 23 Workshop Penumbuhan kesadaran keluarga untuk Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	II-357
Tabel 2.5. 24 Daftar peserta workshop peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis Masyarakat	II-358
Tabel 2.5. 25 Pembatasan sampah pada Ibukota Kabupaten/Kota dengan jumlah sampah dibatasi 3 terbanyak (<i>top three</i>)	II-368
Tabel 2.5. 26 Fasilitas pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang.....	II-371
Tabel 2.6. 1 Perusahaan Yang Memiliki Izin Limbah B3.....	II-379
Tabel 2.6. 2 Perusahaan Yang Sudah Memiliki Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu..	II-381
Tabel 2.6. 3 Perusahaan Yang Memiliki Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam (IUPJLWA)	II-382
Tabel 2.6. 4 Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-383
Tabel 2.6. 5 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	II-384
Tabel 2.6. 6 Pengaduan Masyarakat Terkait Permasalahan Lingkungan	II-386



Tabel 2.6. 7 Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan tahun 2023	II-393
Tabel 2.6. 8 Daftar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-395
Tabel 2.6. 9 Data Status Pengaduan Masyarakat Tahun 2023	II-399
Tabel 2.6. 10 Jenis Kasus Aduan Masyarakat	II-399
Tabel 2.6. 11 Agenda Kegiatan Yang Sudah Terselenggara oleh BECAK Babel.....	II-403
Tabel 2.6. 12 Tren Pencapaian ADIPURA Tahun 2014 – 2023	II-410
Tabel 2.6. 13 Daftar Peraihan Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2023.....	II-411
Tabel 2.6. 14 Daftar Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional	II-412
Tabel 2.6. 15 Daftar Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri.....	II-413
Tabel 2.6. 16 Daftar Inovasi Bank Sampah	II-418
Tabel 2.6. 17 Hasil Penilaian Bank Sampah	II-419
Tabel 2.6. 18 Daftar Lokasi ProKlim	II-425



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-3
Gambar 1. 2 Persentase Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-5
Gambar 1. 3 Wilayah DAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-9
Gambar 1. 4 Peta Kondisi Geologi Di Kepulauan Bangka Belitung	I-11
Gambar 1. 5 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-13
Gambar 1. 6 Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di	I-14
Gambar 1. 7 Peta Bentang Lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-16
Gambar 1. 8 Pertumbuhan Produksi Perikanan.....	I-20
Gambar 1. 9 Peta Sebaran Pariwisata Unggulan	I-23
Gambar 2.1. 1 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-5
Gambar 2.1. 2 Kerangka Pikir DPSIR Tata Guna Lahan	II -7
Gambar 2.1. 3 Kondisi Kependudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II -8
Gambar 2.1. 4 Perbandingan luasan kawasan lindung dan budidaya pada RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044.....	II -12
Gambar 2.1. 5 Perubahan Penutup Lahan Tahun 2021-2022 dalam Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044.....	II -13
Gambar 2.1. 6 Perubahan Penutup/Penggunaan Lahan Tahun 2021-2022 dalam Pola Ruang Kawasan Lindung RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044	II -15
Gambar 2.1. 7 Penutup Lahan Hutan yang Berubah Sepanjang 2021-2022 dalam Pola Ruang Kawasan Budidaya RTRW	II-17
Gambar 2.1. 8 Kawasan Pertanian dalam Pola Ruang RTRW	II-20
Gambar 2.1. 9 Pola Sebaran Areal Pertambangan Timah dari Citra Sentinel 2A MSI RGB 832 Perekaman 4 Sseptember 2023	II-22
Gambar 2.1.10 Perubahan Penutup Lahan Tahun 2021 Menjadi Pertambangan Di Tahun 2022 Terhadap Ketentuan Khusus Pertambangan	II-23
Gambar 2.1.11 Penutup lahan pertambangan yang mulai berubah menjadi perkebunan di Kabupaten Bangka	II-24
Gambar 2.1.12 Peningkatan luasan Perkebunan tahun 2016 – 2022	II-24
Gambar 2.1. 13 Perubahan Penutup Lahan Menjadi Perkebunan Di Tahun 2022 Terhadap Pola Ruang Pertanian dan Perkebunan Rakyat.....	II-26
Gambar 2.1. 14 Persebaran tambak udang di pesisir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Perekaman Citra Planetscope	II-27



Gambar 2.1. 15 Tambak Udang Vaname Di Kabupaten Bangka	II-28
Gambar 2.1. 16 Perbandingan luasan tambak tahun 2018 – 2022	II-29
Gambar 2.1. 17 Tambak Udang Vaname Eksisting di Kabupaten Belitung Timur Berdasarkan Citra Planetscope Perekaman 18 Desember 2022	II-30
Gambar 2.1. 18 Tambak Udang Vaname Eksisting di Kabupaten Belitung Timur.....	II-30
Gambar 2.1. 19 Trend Peningkatan Luasan Penutup Lahan Permukiman	II-32
Gambar 2.1. 20 Perubahan Penutup Lahan Tahun 2021 Menjadi Permukiman Di Tahun 2022 Terhadap Pola Ruang Permukiman.....	II-33
Gambar 2.1. 21 Persentase Fungsi Kawasan Hutan	II-35
Gambar 2.1. 22 Alih Fungsi Lahan Menjadi Pertambangan di Tahun 2022 yang berada dalam Fungsi Kawasan Hutan.....	II-37
Gambar 2.1. 23 KelasPertanian Lahan Kering Campur Semak dalam Kawasan Hutan Produksi.....	II-38
Gambar 2.1. 24 Alih Fungsi Lahan Menjadi Permukiman Di Tahun 2022 Yang Berada Di Dalam Fungsi Kawasan Hutan	II-39
Gambar 2.1. 25 Sebaran lahan gambut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-40
Gambar 2.1. 26 Aktivitas Penambangan di dalam lahan gambut.....	II-41
Gambar 2.1. 27 Kerusakan Lahan Gambut di Kabupaten/Kota.....	II-42
Gambar 2.1. 28 Perbandingan Hotspot yang Teridentifikasi Sepanjang Tahun 2022 Berdasarkan Citra Satelit Aqua,	II-43
Gambar 2.1. 29 Karhutla pada malam hari di Kecamatan Koba,	II-44
Gambar 2.1. 30 Perubahan luasan penutup hutan tahun 2015 – 2022	II-45
Gambar 2.1. 31 Degradasi Hutan tahun 2015-2021	II-46
Gambar 2.1. 32 Wilayah Izin Pertambangan Mineral Logam	II-47
Gambar 2.1. 33 Bentang Alam di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-48
Gambar 2.1. 34 Formasi Geologi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-48
Gambar 2.1. 35 Lokasi Beberapa IUP Mineral Non Logam Kuarsa	II-49
Gambar 2.1. 36 Izin Penambangan Mineral Non Logam Sepanjang Tahun 2022.....	II-50
Gambar 2.1. 37 Kenampakan Pertanian Lahan Kering Campur Semak	II-55
Gambar 2.1. 38 Perkebunan di Kabupaten Bangka	II-55
Gambar 2.1. 39 Penutup Lahan Pertambangan di Kabupaten Bangka Tengah	II-56
Gambar 2.1. 40 Mangrove di Desa Belo Laut Kabupaten Bangka Barat	II-59
Gambar 2.1. 41 Persebaran Mangrove di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-60
Gambar 2.1. 42 Lokasi Mangrove dengan Status Baik di Kabupaten Bangka Barat....	II-61
Gambar 2.1. 43 Kondisi Mangrove di Pulau Kayuanak di Kabupaten Bangka	II-62
Gambar 2.1. 44 Ekosistem Terumbu Karang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..	II-63
Gambar 2.1. 45 Terumbu Karang Tertutup Sedimen di Pulau Ketawai	II-64



Gambar 2.1. 46 Ekosistem Lamun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-65
Gambar 2.1. 47 Ekosistem Lamun di Pulau Ketawai di Kabupaten Bangka Tengah	II-66
Gambar 2.1. 48 Aktivitas Penambangan Ilegal di Teluk Kelabat Dalam Juni 2024	II-66
Gambar 2.1. 49 Peta Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-68
Gambar 2.1. 50 Tingkat kekritisan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-69
Gambar 2.1. 51 Lahan Kritis di Wilayah TWA Permisan	II-71
Gambar 2.1. 52 Wilayah DAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-76
Gambar 2.1. 53 Citra Multitemporal Tahun 2021-2022 di Wilayah DAS Diniang Kabupaten Bangka.....	II-76
Gambar 2.1. 54 Penutup Lahan Pertambangan dalam wilayah DAS	II-77
Gambar 2.1. 55 Sedimentasi di Muara Jelitik	II-79
Gambar 2.1. 56 Raport Nilai IKL Tahun 2023	II-80
Gambar 2.1. 57 Trend Nilai IKL di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-82
Gambar 2.1. 58 Kenampakan Tanah di Sekitar Lokasi Penambangan Pasir Kuarsa Kabupaten Belitung Timur	II-85
Gambar 2.1. 59 (a) Kondisi Bumi Tanpa GRK suhu -18°C (b) dengan GRK suhu 15°C	II-85
Gambar 2.1. 60 Konsentrasi CO ₂ di atmosfer tahun 2021.....	II-87
Gambar 2.1. 61 Konsentrasi CO ₂ di atmosfer tahun 2022.....	II-88
Gambar 2.1. 62 Tren kenaikan suhu udara sepanjang 2019-2023	II-88
Gambar 2.1. 63 Temperatur Udara Sepanjang Tahun 2023.....	II-89
Gambar 2.1. 64 Emisi dan Serapan sepanjang Tahun 2020-2021	II-92
Gambar 2.1. 65 Perubahan Garis Pantai Akresi.....	II-93
Gambar 2.1. 66 Trend akresi di salah satu pesisir timur pulau Bangka berdasarkan...	II-94
Gambar 2.1. 67 Perubahan Garis Pantai Abrasi	II-95
Gambar 2.1. 68 Salah Satu Lokasi Kejadian Karhutla di Kabupaten Belitung Timur	II-95
Gambar 2.1. 69 Seekor Buaya yang Berkonflik dengan Manusia Ditangkap di Kabupaten Bangka Selatan	II-99
Gambar 2.1. 70 Rencana Pola Ruang Revisi RTRW Provinsi Kepulauan	II-101
Gambar 2.1. 71 Rekomendasi KLHS di Jalan Kolektor Primer	II-105
Gambar 2.1. 72 Rekomendasi KLHS di Kawasan Permukiman	II-107
Gambar 2.1. 73 Rekomendasi KLHS di Kawasan Hutan Produksi	II-107
Gambar 2.1. 74 Rekomendasi KLHS di Kawasan Hutan Produksi	II-110
Gambar 2.1. 75 KLHS di Kawasan Hutan Produksi	II-111
Gambar 2.1. 76 Alur Proses Pengaduan Melalui Lapor.Pak	II-112
Gambar 2.1. 77 Plang Larangan Penambangan Timah secara Ilegal di Sekitar Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-113
Gambar 2.1. 78 Penertiban Tambang Timah Di Teluk Kelabat, 23 Juli 2022	II-113



Gambar 2.1. 79 Sosialisasi dan Inventarisasi Keterlanjuran Kegiatan Terbangun di Dalam Kawasan Hutan oleh KPHP Jebu Bembang Antan dan KPHP Rambat Menduyung, 10 Februari 2023	II-115
Gambar 2.1. 80 Sosialisasi dan Inventarisasi Keterlanjuran Kegiatan Terbangun di Dalam Kawasan Hutan	II-115
Gambar 2.1. 81 Verifikasi Lapangan Keterlanjuran Kegiatan Terbangun di Dalam Kawasan Hutan oleh KPHP Jebu Bembang Antan	II-116
Gambar 2.1. 82 Hasil Inventarisasi Kegiatan Terbangun Dalam Kawasan Hutan di KPHP Sigambir Kotawaringin dan KPHP Sungai Sembulan.....	II-116
Gambar 2.1. 83 Rencana Rehabilitasi Lahan Tahun 2023	II-117
Gambar 2.1. 84 Contoh Progress Reklamasi di Air Lekok Mapur	II-117
Gambar 2.1. 85 Salah Satu Lokasi Usulan Semarak Babel 2024.....	II-120
Gambar 2.1. 86 Lokasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	II-121
Gambar 2.1. 87 Pembahasan Pemanfaatan FABA dalam Reklamasi Lahan Bekas Tambang di Rumah Dinas Gubernur	II-122
Gambar 2.1. 88 Penggunaan Kompos Block Untuk Lahan Bekas Tambang.....	II-123
Gambar 2.1. 89 Upaya Penegakan Hukum Aktivitas Tambang Ilegal di Hutan Lindung Sembulan, Pantai Batu Ampar, Desa Penagan, Kabupaten Bangka 24 Agustus 2022	II-125
Gambar 2.1. 90 Upaya Penegakan Hukum Aktivitas Pembukaan Kebun di dalam Hutan Produksi Sungai Sembulan, 7 November 2022	II-126
Gambar 2.1. 91 Dokumentasi rapat koordinasi dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan dan pelaporan inventarisasi emisi GRK 2022	II-130
Gambar 2.1. 92 Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Rendah Karbon Di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung	II-134
Gambar 2.1. 93 Tahapan pelaksanaan ProKlim.....	II-136
Gambar 2.1. 94 Lokasi Survei Pengambilan Data dan Informasi Kehati	II-139
Gambar 2.1. 95 Sosialisasi Pencegahan Karhutla	II-140
Gambar 2.2. 1 Kerangka pikir DPSIR Framework kualitas air	II-143
Gambar 2.2. 2 Kelimpahan mikroplastik di DAS Baturusa	II-151
Gambar 2.2. 3 Sebaran Lokasi pengambilan sampel kualitas air sungai tahun 2023. II-	155
Gambar 2.2. 4 Trend IKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-156
Gambar 2.2. 5 Sebaran lokasi pemantauan kualitas air laut tahun 2023.....	II-157
Gambar 2.2. 6 Indeks kualitas air laut tahun 2023	II-158
Gambar 2.2. 7 Curah hujan pada tiga stasiun pengamatan tahun 2023	II-162
Gambar 2.2. 8 Jumlah rumah tangga berdasarkan sumber air minum.....	II-165
Gambar 2.2. 9 Ikan kaca dan kura-kura air tawar di temukan di Belitung Timur.....	II-169



Gambar 2.2. 10 Jaringan irigasi di Desa Badau, Kabupaten Belitung.....	II-177
Gambar 2.2. 11 Konservasi air yang dilakukan masyarakat	II-179
Gambar 2.3. 1 Skema DPSIR Kualitas Udara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ...	II-184
Gambar 2.3. 2 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dasar harga konstan menurut Lapangan Usaha	II-185
Gambar 2.3. 3 Pertumbuhan Kendaraan Bermotor	II-186
Gambar 2.3. 4 Konsumsi Bahan Bakar Sektor Transportasi Provinsi Kepulauan	II-187
Gambar 2.3. 5 Emisi GRK Sektor Energi (Industri Energi dan Transportasi).....	II-189
Gambar 2.3. 6 Sumber pencemar gas NO ₂ dan SO ₂ di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	II-190
Gambar 2.3. 7 Profil Gas Pencemar NO ₂ per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	II-191
Gambar 2.3. 8 Profil Gas Pencemar SO ₂ per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	II-192
Gambar 2.3. 9 Profil Gas NO ₂ berdasarkan Titik Pantau Provinsi.....	II-193
Gambar 2.3. 10 Profil Gas NO ₂ berdasarkan Titik Pantau Provinsi Kepulauan.....	II-194
Gambar 2.3. 11 Hubungan Indeks Kualitas Udara dan Konsentrasi Pencemar	II-196
Gambar 2.3. 12 Perubahan Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-198
Gambar 2.3. 13 Hubungan Indeks Kualitas Udara dengan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-199
Gambar 2.3. 14 Hubungan Indeks Kualitas Udara dengan Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-200
Gambar 2.3. 15 Profil Suhu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	II-201
Gambar 2.3. 16 Suhu 5 Tahunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-202
Gambar 2.3. 17 Aksi – Aksi Program Penghijauan di Bangka Belitung	II-202
Gambar 2.3. 18 Perhitungan Penurunan Emisi GRK melalui SPECTRUM	II-206
Gambar 2.4. 1 Jenis bencana sepanjang tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-212
Gambar 2.4. 2 Kerangka DPSIR Risiko Bencana Tahun 2023.....	II-213
Gambar 2.4. 3 Letak Geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-216
Gambar 2.4. 4 Perbandingan Luas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam satuan persen	II-216
Gambar 2.4. 5 Sabuk Timah Asia Tenggara melewati Wilayah Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung hingga ke Kalimantan Bagian Timur.	II-218
Gambar 2.4. 6 Sebaran potensi timah yang berasosiasi dengan batuan granit di Pulau Bangka.....	II-218



Gambar 2.4. 7 Potensi timah yang berasosiasi dengan granit di Pulau Belitung.	II-219
Gambar 2.4. 8 Curah hujan rata-rata bulanan wilayah Provinsi Kepulauan	II-225
Gambar 2.4. 9 Hasil tumpang susun titik karhutla dengan data kawasan hutan.....	II-228
Gambar 2.4. 10 Hasil tumpang susun titik karhutla, data kawasan hutan, dan peta penutup lahan tahun 2022	II-229
Gambar 2.4. 11 Hasil pengukuran IPKLH berdasarkan 4 dimensi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-230
Gambar 2.4. 12 Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2024 (y-on-y) dalam persen	II-232
Gambar 2.4. 13 Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2024 (q-to-q) dalam persen.....	II-233
Gambar 2.4. 14 Peta Penutup Lahan Pertambangan Tahun 2019	II-235
Gambar 2.4. 15 Peta Penutup Lahan Pertambangan Tahun 2020	II-235
Gambar 2.4. 16 Peta Penutup Lahan Pertambangan Tahun 2021	II-236
Gambar 2.4. 17 Tumpang Susun Peta Penutup Lahan Pertambangan Tahun 2021 dengan Peta Kawasan Hutan SK.6614/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021	II-236
Gambar 2.4. 18 Peta lahan kritis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta luas per status lahan	II-238
Gambar 2.4. 19 Persentase perbandingan kejadian bencana karhutla Tahun 2023 ..	II-239
Gambar 2.4. 20 Titik karhutla yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, dan Kota Pangkalpinang.....	II-239
Gambar 2.4. 21 Tren nilai IKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-241
Gambar 2.4. 22 Peta Indikatif Jasa Lingkungan Pengatur Iklim	II-244
Gambar 2.4. 23 Peta Indikatif Jasling Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir	II-245
Gambar 2.4. 24 Peta Indikatif Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam	II-246
Gambar 2.4. 25 Kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana: Penanganan.....	II-259
Gambar 2.4. 26 Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.....	II-259
Gambar 2.4. 27 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana bagi Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Belitung.....	II-260
Gambar 2.5. 1 Sistem Wilayah Nodal Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-275
Gambar 2.5. 2 Kerangka DPSIR Analisis Perkotaan.....	II-278
Gambar 2.5. 3 Tren Pertambahan Penduduk di Kepulauan Bangka Belitung.....	II-279
Gambar 2.5. 4 IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2023	II-282





Gambar 2.5. 5 Tren IPM di Tujuh Kabupaten/Kota 2020-2023	II-283
Gambar 2.5. 6 PDRB ADHB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2023	II-286
Gambar 2.5. 7 Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha 2010-2023.....	II-288
Gambar 2.5. 8 Tren Pertumbuhan Komponen Utama PDRB ADHK 2010-2023	II-288
Gambar 2.5. 9 Tutupan Lahan untuk Aktivitas Lapangan Usaha Utama 2012-2022..	II-290
Gambar 2.5. 10 Nilai IPKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-292
Gambar 2.5. 11 Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 (Rupiah)	II-293
Gambar 2.5. 12 Komposisi Sampah Tahun 2021-2023	II-295
Gambar 2.5. 13 Konsumsi Listrik dan Jumlah Pelanggan PLN Tahun 2016-2023.....	II-300
Gambar 2.5. 14 Persebaran Pelanggan Listrik di Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023	II-300
Gambar 2.5. 15 Konsumsi Listrik Per Kapita Tahun 2016-2022.....	II-300
Gambar 2.5. 16 Konsumsi Energi Listrik dan Pertumbuhan Ekonomi 2016-2022	II-302
Gambar 2.5. 17 Persentase Lahan Terbangun Di Kabupaten/Kota	II-303
Gambar 2.5. 18 Akses Penduduk Terhadap Air Minum Layak 2019-2023 (%).....	II-306
Gambar 2.5. 19 Akses Sanitasi Layak 2019-2023 (%).....	II-307
Gambar 2.5. 20 Distribusi Indikasi Jasa Lingkungan Penyediaan Air di Pangkalpinang dan Enam Kabupaten Tahun 2021.....	II-308
Gambar 2.5. 21 Perbandingan IKA Kota Pangkalpinang dengan Keenam Kabupaten Tahun 2020-2023	II-309
Gambar 2.5. 22 Perbandingan IKU Pangkalpinang dan Kab. Bangka dengan Wilayah Lainnya Tahun 2020-2023.....	II-310
Gambar 2.5. 23 Perbandingan Tren Pertumbuhan Ekonomi dengan Tren IKLH Tahun 2020-2023	II-312
Gambar 2.5. 24 IKPS Wilayah Perkotaan Di Kepulauan Bangka Belitung	II-316
Gambar 2.5. 25 Kepadatan Penduduk dan Pengangguran Terbuka Tahun 2023	II-318
Gambar 2.5. 26 Distribusi Indikasi Jasa Lingkungan Tata Aliran Air dan Pengendalian Banjir di Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.....	II-325
Gambar 2.5. 27 Emisi Sektor Limbah	II-328
Gambar 2.5. 28 Emisi Sektor Energi	II-329
Gambar 2.5. 29 Jumlah Pasangan Subur Peserta KB.....	II-332
Gambar 2.5. 30 Persetujuan Validasi KLHS RPJPD 2025-2045 dan KLHS RTRW 2024-2044 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-334
Gambar 2.5. 31 Ilustrasi Perencanaan Sistem Pusat Permukiman Di Dalam RTRW ..	II-336
Gambar 2.5. 32 Jumlah Penerima PROPER sesuai Kategori Tahun 2023	II-342
Gambar 2.5. 33 Ilustrasi Peta FSVA Kepulauan Bangka Belitung.....	II-345



Gambar 2.5. 34 Target Penanganan dan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya Di Kepulauan Bangka Belitung	II-348
Gambar 2.5. 35 Penyuluhan Di Sekolah	II-356
Gambar 2.5. 36 Sosialisasi Bank Sampah	II-359
Gambar 2.5. 37 Sosialisasi Bank sampah berkolaborasi dengan Sekolah MAN Insan Cendikia (MAN ICE)	II-359
Gambar 2.5. 38 Kunjungan Belajar tentang pengelolaan sampah	II-360
Gambar 2.5. 39 Jumat bersih bersama PUPRPRKP Bangka Belitung dan sekolah	II-360
Gambar 2.5. 40 Template siaran penyuluhan kerjasama RRI – DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-361
Gambar 2.5. 41 Tepung maggot dan maggot kering	II-362
Gambar 2.5. 42 Minyak maggot dan tepung maggot yang sudah dikemas	II-363
Gambar 2.5. 43 Hasil Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah Di Pulau Belitung Tahun 2023	II-367
Gambar 2.6. 1 Kerangka DPSIR Tata Kelola	II-374
Gambar 2.6. 2 Jumlah izin lingkungan/persetujuan lingkungan yang diterbitkan dari tahun 2019 hingga 2023	II-377
Gambar 2.6. 3 Jumlah izin lingkungan yang sudah diterbitkan berdasarkan jenis usaha/kegiatan tahun 2023	II-378
Gambar 2.6. 4 Perbandingan PAD Tahun 2022 dan 2023	II-378
Gambar 2.6. 5 Sumber Penghasilan Pajak Tahun 2022 dan 2023	II-385
Gambar 2.6. 6 Situs Crocodile Attack Database	II-388
Gambar 2.6. 7 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-391
Gambar 2.6. 8 Jumlah Pegawai DLHK Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-391
Gambar 2.6. 9 Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-393
Gambar 2.6. 10 SOP Proses pengaduan masyarakat	II-398
Gambar 2.6. 11 Hasil Pengawasan Tahun 2021 s.d 2023	II-400
Gambar 2.6. 12 Kegiatan Pengawasan Lingkungan yang dilakukan oleh DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-401
Gambar 2.6. 13 Kabupaten yang Meraih Anugerah Adipura Katagori Kota Kecil pada Tahun 2024	II-411
Gambar 2.6. 14 Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2022 - 2023	II-413
Gambar 2.6. 15 (a) <i>orchidarium anggrek</i> , (b) <i>Peresmian orchidarium</i>	II-420
Gambar 2.6. 16 Peraihan Kategori PROPER Tahun 2023	II-422



Gambar 2.6. 17 PT.Timah Tbk (atas), PT Sahabat Mewah makmur (bawah) Meraih Proper Emas, 2023	II-422
Gambar 2.6. 18 Kegiatan Proklamasi Babel	II-424
Gambar 2.6. 19 Penghargaan Proklamasi Perkategori Tahun 2022 s.d 2023	II-425
Gambar 2.6. 20 Model Kolaborasi Pentahelix dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	II-429
Gambar 2.6. 21 Kegiatan Pelayanan Publik pada Acara Gule Kabung, 2023.....	II-430
Gambar 3. 1 Formulir Penilaian Isu Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024.....	III-4
Gambar 3. 2 Perbandingan Nilai Keempat Kriteria dalam Isu Prioritas Lingkungan Hidup	III-6
Gambar 3. 3 Tren IKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	III-12
Gambar 3. 4 Indeks Kualitas Air Laut Tahun 2023	III-13
Gambar 3. 5 Praktik Tata kelola Pertambangan Berkelanjutan.....	III-15
Gambar 4. 1 Visualisasi Skematik Inovasi Pengelolaan Lahan	IV-2
Gambar 4. 2 Jejaring Inovasi SEMARAK BABEL	IV-3
Gambar 4. 3 Berbagai Aksi Gerakan SEMARAK BABEL.....	IV-4
Gambar 4. 4 Surat Keputusan Gubernur Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Menanam satu Juta Pohon Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	IV-7
Gambar 4. 5 Rencana RTnRL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	IV-8
Gambar 4. 6 Penanaman yang dilakukan dalam program SEMARAK BABEL.....	IV-9
Gambar 4. 7 Lokasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	IV-10
Gambar 4. 8 Tren Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IV-11
Gambar 4. 9 Kontribusi Luasan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai Tahun 2022.....	IV-11
Gambar 4. 10 Realisasi Penanaman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2023.	IV-12
Gambar 4. 11 Aplikasi "Si Terbit DLHK" dan proses pengecekan dan pemantauan penggunaan lahan	IV-13
Gambar 4. 12 Proses Pembuatan Kompos Babel.....	IV-14
Gambar 4. 13 MOU Kegiatan Literasi Lingkungan	IV-17
Gambar 4.14 Kegiatan Sedekah Pohon	IV-18
Gambar 4.15 Reklamasi PT. Timah Air Jangkang	IV-19
Gambar 4. 16 Reklamasi Lahan Pasca Tambang Dengan Tanaman Produktif	IV-20
Gambar 4. 17 Visualisasi Skematik Inovasi Persampahan	IV-20
Gambar 4.18 Jejaring Inovasi Pelet Sampah	IV-25
Gambar 4.19 Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam MOU antara PLN dengan Pemprov Babel Tahun 2019	IV-25
Gambar 4.20 Proses Pembuatan Sampah.....	IV-26



Gambar 4.21 Proses Pembuatan Pelet Sampah dan Tindak lanjut MOU	IV-27
Gambar 4. 22 Pelatihan Pembuatan Ecobrick Sekolah	IV-28
Gambar 4. 23 Layout Pelaksanaan Coastal Cleanup	IV-28
Gambar 4. 24 Coastal Clean Up.....	IV-29
Gambar 4. 25 Sebaran Bank Sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	IV-29
Gambar 4. 26 PLTS Rooftop di Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	IV-31
Gambar 4. 27 Aplikasi <i>Feul Card</i> BBM	IV-32



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan dengan berbagai potensi sumber daya alam yang dimiliki baik kekayaan sumber daya alam pesisir, pertanian, perkebunan serta berbagai potensi mineral tambang terutama timah dengan berbagai mineral ikutannya. Sebagai provinsi yang memiliki berbagai potensi sumber daya alam tentunya terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaannya di satu sisi tuntutan pemenuhan ekonomi daerah namun di sisi yang lain terdapat potensi kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Keberhasilan pembangunan sering diukur dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi namun tetap harus memperhatikan lingkungan sebagai daya dukung dan faktor pembangunan berkelanjutan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang aspek keberlanjutan pembangunan menjadi fokus dan tantangan yang harus dipersiapkan sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi arah pembangunan yang tidak hanya fokus terhadap peningkatan perekonomian daerah namun tetap menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sosial masyarakat.

Jika dilihat struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh sektor primer seperti sektor pertanian dan pertambangan serta sektor sekunder seperti industri pengolahan. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa visi provinsi adalah *Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai wilayah Agri-Bahari yang maju dan berwawasan Lingkungan, Didukung oleh Sumber Daya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera*. Dalam rangka mencapai visi tersebut, salah



satunya dicapai dengan misi pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.

Potensi Permasalahan lingkungan kedepan akan semakin meningkat dengan berbagai aktivitas pembangunan, eksploitasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, perkembangan industry. Permasalahan lingkungan yang dihadapi sekarang dan akan datang tidak bisa diselesaikan dengan tinjauan teknis semata, namun juga dibutuhkan tinjauan kondisi sosial masyarakat karenanya kajian tentang lingkungan hidup dan arah kebijakan yang diambil merupakan kajian interdisipliner karena fenomena lingkungan berkaitan dengan kondisi geografis, biologis, teknologi, politik dan sosial budaya sehingga peranan data- data tersebut sangat dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang penting dan mempunyai kewajiban menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkan informasi tentang kondisi lingkungan hidup yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, isu lingkungan yang sedang *booming*, penyebab dan dampak permasalahannya serta respon pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup tersebut.

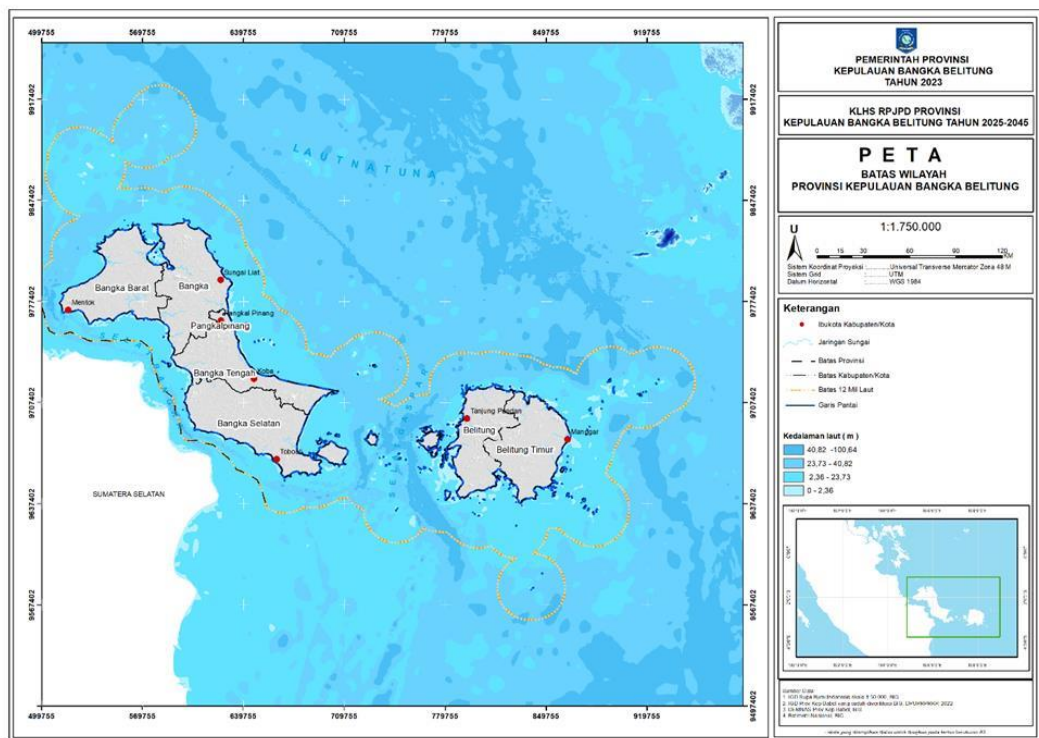
Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun sebagai langkah awal dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penyediaan data dan informasi lingkungan hidup yang pada tahap selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengedepankan lingkungan pada setiap pembangunannya yang bermuara pada pembangunan berkelanjutan.

I.2. Profil Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.2.1 Karakteristik Wilayah

1. Administrasi Wilayah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000, terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Bangka, Belitung dan 1 (satu) Kota yaitu Pangkalpinang. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 telah dibentuknya 4 (empat) kabupaten baru yaitu Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota dengan peta wilayah administrasinya dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1. 1 Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: DPUPRPRKP Prov Kep Babel, 2022; BIG, data diolah

Wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi wilayah darat yang terdiri atas tujuh kabupaten/kota dengan luas wilayah



total mencapai 1.669.255,8 ha dan wilayah laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang totalnya mencapai 4.254.946,8 ha. Ketujuh Kabupaten/Kota yang merupakan bagian wilayah darat dalam perencanaan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044 adalah Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Adapun luasan masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Luas Wilayah Daratan dan Persebaran Penduduk di Kepulauan Bangka Belitung

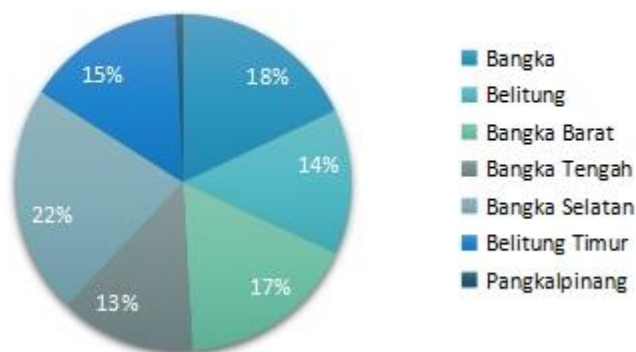
No.	Kabupaten	Luas (ha)
1	Bangka	302.669,09
2	Bangka Barat	285.153,7
3	Bangka Selatan	359.727,7
4	Bangka Tengah	225.590,8
5	Belitung	226.976,8
6	Belitung Timur	258.688,3
7	Pangkalpinang	10.449,4
Total		1.669.255,8

Sumber: DPUPRPRKP Prov Kep Babel, 2023

Tabel 1.1 menunjukkan luas wilayah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki proporsi luas wilayah yang relatif seimbang. Dengan total luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung luas lautan dan daratan seperti yang terlihat di atas maka dapat dilihat persentase luas wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada gambar berikut.



Persentase Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Gambar 1. 2 Persentase Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka, 2024)

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah wilayah administrasi kecamatan paling banyak yaitu Kabupaten Bangka dan Kabupaten Selatan dengan jumlah masing-masing kabupaten tersebut sebanyak 8 kecamatan sementara itu kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah administrasi kecamatan yaitu Kabupaten Belitung sebanyak 5 kecamatan. Adapun jumlah pulau terbesar yaitu berada di Kabupaten Belitung dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 165 pulau.

Tabel 1. 2 Pulau-pulau Bernama Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten	Jumlah	Keterangan
Bangka	78	Tersebar di Kecamatan Mendobarat, Sungailiat, Riau Silip, Belinyu dan Kecamatan Merawang.
Bangka Barat	94	Tersebar di Kecamatan Jebus dan Tempilang.
Bangka Tengah	24	Terdapat di Kecamatan Koba, Lubuk Besar, Pangkalan Baru dan Kecamatan Sungai Selan.
Bangka Selatan	62	Tersebar di Kecamatan Toboali, Pulau Besar dan Simpang Rimba.
Belitung	165	Tersebar di Kecamatan Tanjung Pandan, Sijuk, Badau dan Membalong.
Belitung Timur	152	Tersebar di Kecamatan Dendang, Gantung, Manggar, dan Kecamatan Kelapa Kampit.
Total	575	

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 Tahun 2017
Bangka Belitung dalam Provinsi Bangka Belitung dalam angka 2024



2. Letak Geografis

Secara geografis, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan, terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Pulau Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh, sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Pulau Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya. Letak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan Selat Bangka di sebelah barat, Selat Karimata di sebelah timur, Laut Natuna di sebelah utara, dan Laut Jawa di Sebelah Selatan.

3. Klimatologi

Iklim tropis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipengaruhi oleh angin musim yang mempengaruhi pola maupun siklus melaut para nelayan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami bulan basah selama 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) bulan sepanjang tahun dan bulan kering selama 4 bulan berturut-turut. Terdapat tiga titik stasiun pengamatan unsur iklim di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir, Stasiun Meteorologi H.A.S. Hanandjoeddin, dan Stasiun Klimatologi Koba. Menurut Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), suhu udara rata-rata di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 berkisar di angka 28,92°C. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Untuk rata-rata kelembaban udara sebesar 79,26 persen dengan kelembaban minimum sebesar 35 persen dan maksimum 100 persen. Jumlah curah hujan tertinggi tercatat sebesar 1.710 m3/tahun dan hari hujan tercatat sebanyak 200 hari. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 200 hari hujan. Walaupun jumlah hari



hujan menurut, namun rata-rata suhu udara tahun 2023 lebih panas dari tahun sebelumnya yaitu 3,7 persen penyinaran matahari. Hal ini sejalan dengan kelembaban udara rata-rata yang cenderung menurun di tahun 2023.

Tabel 1. 3 Pengamatan Rata-rata Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2021-2023

Unsur Iklim	2021	2022	2023
Suhu (°C)	28,2	28,7	28,92
Kelembaban (%)	82,3	83,3	79,26
Kecepatan Angin (m/det)	3,3	3,1	3,41
Tekanan Udara (mbar)	1.007,9	1.007,4	1.008,41
Jumlah Curah Hujan (mm)	3.012,9	3.026,7	1.710
Jumlah Hari Hujan (hari)	234	234	200
Penyinaran Matahari (%)	4,5	3,7	3,7

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2024

4. Topografi

Keadaan topografi di Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan dataran rendah, lembah, dan sebagian kecil pegunungan dan perbukitan. Profil wilayah pada umumnya beragam mulai dari daratan, bergelombang berbukit, hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen dan tersebar di pulau Bangka, sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung maupun rawa yang terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka. Adapun wilayah rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah. Secara lebih detail ketinggian wilayah tiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara lebih detail ketinggian wilayah tiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 1.4.



Tabel 1. 4 Ketinggian Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Tinggi Wilayah (mdpl)
Kabupaten Bangka	± 25
Kabupaten Belitung	± 10
Kabupaten Bangka Barat	± 50
Kabupaten Bangka Tengah	± 25
Kabupaten Bangka Selatan	± 25
Kabupaten Belitung Timur	± 7
Kota Pangkalpinang	± 25

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2024

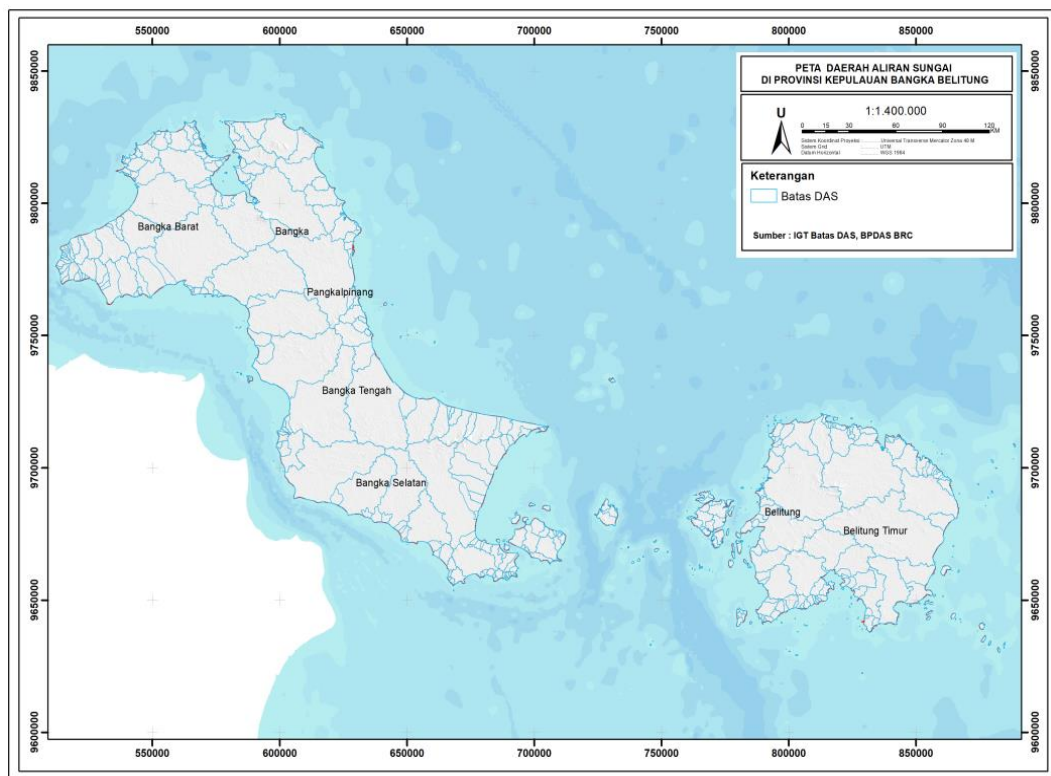
Berdasarkan kondisi ketinggian rata-rata dari tiap wilayah di pulau Bangka dan pulau Belitung yaitu berkisar 25-50 meter dari atas permukaan laut sehingga secara keseluruhan dapat dilihat bahwa kondisi topografi wilayah kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dataran rendah atau datar. Titik tertinggi di Pulau Bangka yaitu berada di puncak Gunung Maras dengan ketinggian 699 meter sementara di Pulau Belitung titik tertinggi yaitu di puncak Gunung Tajam dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

5. Hidrologi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (*Sunda Shelf*) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka.



Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, disebutkan bahwa jumlah keseluruhan DAS yaitu sebanyak 433 buah dengan rincian 357 DAS sudah mempunyai nama sedangkan sisanya 76 DAS belum mempunyai nama. Berdasarkan klasifikasinya, ada sekitar 162 DAS yang dipulihkan daya dukungnya serta 271 DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya. Sementara itu jika berdasarkan IGT batas DAS yang mengacu pada data SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.304/Menlhk/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Peta Batas Daerah Aliran Sungai maka Wilayah DAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas 863 DAS yang dapat dilihat pada Gambar 1.3 di bawah ini.



Gambar 1. 3 Wilayah DAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: Informasi Geospasial Tematik Batas DAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPDAS Baturusa Cerucuk 2022

Ada beberapa sungai besar yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu antara lain: Sungai Baturusa, Sungai Kepoh,



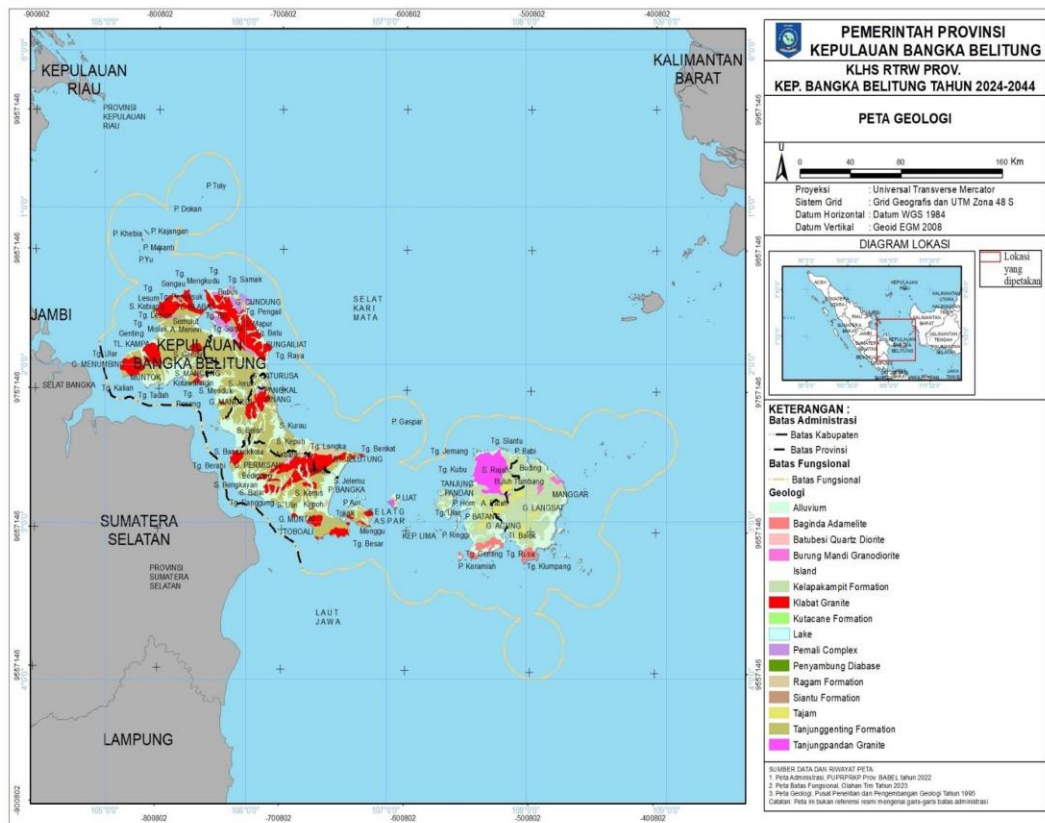
Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau yang berada di Pulau Bangka sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cecuruk, Sungai Buding, Sungai Balok, Sungai Manggar dan Sungai Lenggang.

6. Geologi

Pulau Bangka dan Belitung termasuk bagian tengah dari "*Tin Mayor South East Asian Tin Belt*" dengan tipe *granit main range* yang mempunyai ciri-ciri megakristal (terutama *K-Feldspar*) dan terjadi mineralisasi timah beserta mineral ikutannya. Granit ini umumnya terdiri atas granit biotit dan granit muskovit yang semuanya merupakan tipe sedimen tipe S yang diperkirakan umurnya Trias (Sumber: Arsip PT.Koba Tin: *Survey dan Geology Department*, 2007). Oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki cadangan timah terbesar di Indonesia yang berpotensi sebagai modal dasar pembangunan. Terdapat pula mineral-mineral ikutan timah seperti *Zircon* (ZrSiO_4), *Monazite* ($(\text{Ce, La, Dy})\text{PO}_4$ (ThSiO_2)), *Hematite* (Fe_2O_3), *Pyrite* (FeS_2), *Ilmenite* (FeTiO_3), dan *Xenotime* (YPO_4). Sedangkan secara geologis mineralisasi timah di Indonesia terikat pada sabuk granit (*granitebelt*) Asia Tenggara yang memanjang dari Yunan (China) melalui Myanmar, Thailand, Semenanjung Melaka sampai pada Kepulauan Indonesia terutama di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Singkep dan Pulau Karimun. Selain produk timah dan mineral ikutannya, ada pula produk tambang lainnya seperti pasir kuarsa (SiO_2), material Kaolin, dan *bilitonite* (dikenal dengan nama "satam"). Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya. Sedangkan Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca.



Formasi batuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh Tanjung Genting Formation dengan persentase mencapai 30,36% dari luas keseluruhan, kemudian diikuti oleh Alluvium sebesar 25,38%, Klabat Granite sebesar 15,22%, Kelapakampit Formation 14,96%, dan batuan lainnya. Formasi batuan yang paling sedikit menyusun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Penyambung Diabase dan Siantu Formation, yaitu masing-masing hanya sebesar 0,02% dari luas keseluruhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Formasi batuan Penyambung Diabase hanya ada di Kabupaten Bangka Barat seluas 317,0 ha, dan formasi Siantu hanya berada di Kabupaten Belitung seluas 259,7 ha. Batuan Tanjung Genting paling luas berada di Kabupaten Bangka Selatan seluas 151.398,8 ha. Alluvium terluas berada di Kabupaten Bangka Selatan seluas 121.871,4 ha. Formasi batuan Klabat Granit terluas berada di Kabupaten Bangka Selatan seluas 74.552,6 ha



Gambar 1. 4 Peta Kondisi Geologi Di Kepulauan Bangka Belitung
Sumber : KLHS RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



7. Jumlah Penduduk

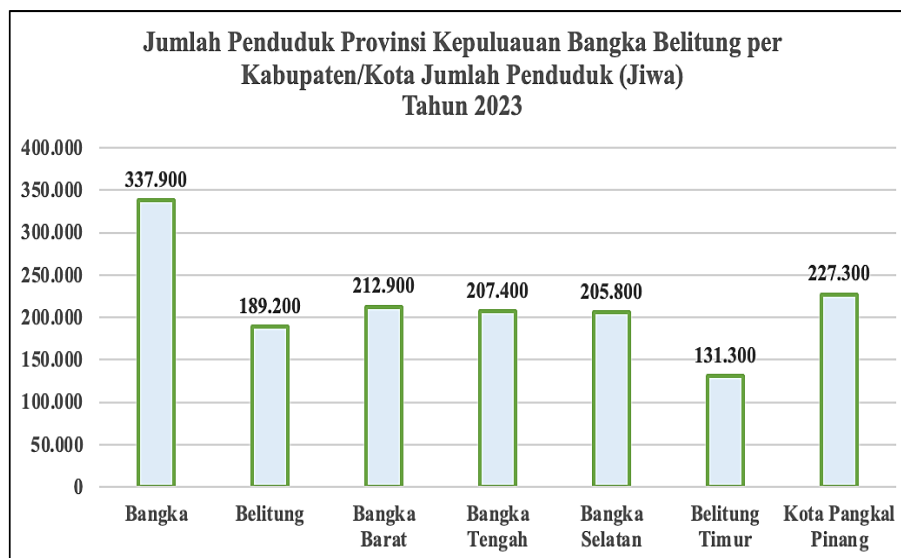
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS RI), jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 1.511.890 jiwa pada tahun 2023 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar rata-rata 1,31%. Data jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Bangka	337.900
Belitung	189.200
Bangka Barat	212.900
Bangka Tengah	207.400
Bangka Selatan	205.800
Belitung Timur	131.300
Kota Pangkal Pinang	227.300
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.511.900

(Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2024)

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Bangka dengan jumlah penduduk sebanyak 337.900 jiwa, sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk paling kecil adalah Kabupaten Belitung Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 131.300 jiwa. Grafik jumlah penduduk per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. 5 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2024

Kepadatan penduduk rata-rata per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 90,58 jiwa/km², namun persebaran kepadatan penduduk di provinsi ini cenderung tidak merata. Kota Pangkalpinang yang adalah ibu kota provinsi, juga telah menjadi wilayah terpadat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini kemungkinan disebabkan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di Kota Pangkalpinang yang menjadi faktor migrasi masuk dan menyebabkan tingginya tingkat kepadatan di kota tersebut. Data kepadatan penduduk di Provinsi Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 6 Kepadatan Penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk per km ²
Bangka	112,02
Belitung	83,33
Bangka Barat	59,16
Bangka Tengah	91,79
Bangka Selatan	72,18
Belitung Timur	50,71
Kota Pangkal Pinang	2.174,63
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	90,58

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2024



Grafik kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. 6 Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2024

1.2.2. Karakteristik Bentang Lahan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada 14 jenis bentang alam, yaitu Dataran fluvial bermaterial alluvium, Dataran fluviomarin bermaterial alluvium, Dataran marin berpasir bermaterial alluvium, Dataran organik bermaterial gambut, Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan metamorfik, Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat, Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat, Dataran struktural plutonik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku dalam, Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik, Lembah sungai bermaterial alluvium, Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik, Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat, Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan



sedimen karbonat dan non karbonat, Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam. Jenis bentang alam yang mendominasi di wilayah kajian dan wilayah perencanaan adalah karakteristik bentang alam Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat dengan luasan 728.684 Ha. Wilayah yang memiliki luasan Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat tertinggi adalah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas 197.742,5 Ha. Selengkapnya, tabulasi luas masing-masing bentang alam di wilayah kajian dan wilayah perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

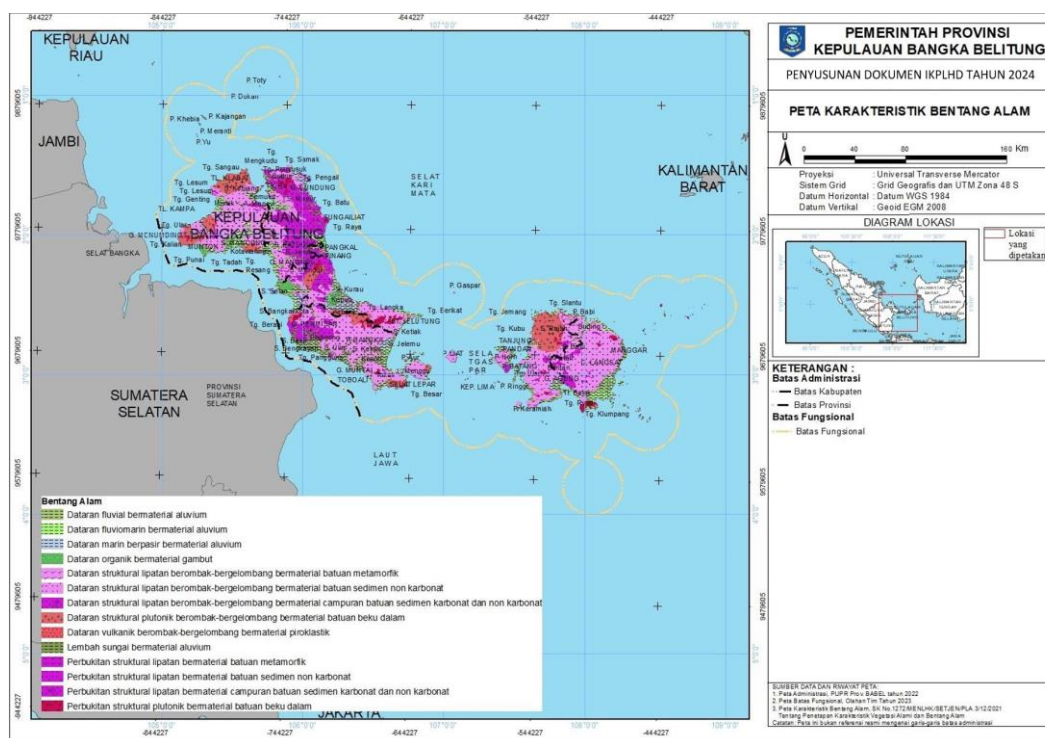
Tabel 1. 7 Karakteristik Bentang Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Karakteristik Bentang Alam	Bangka	Bangka Barat	Bangka Selatan	Bangka Tengah	Belitung	Belitung Timur	Pangkajene	Jumlah
Tidak Ada Data	1.153,5	297,0	147,1	125,8	150,0	163,2	3,7	2.040,4
Dataran fluvial bermaterial aluvium	7.133,7	7.169,4	45.771,0	10.856,8	9.514,7	20.456,7	2.607,2	103.509,5
Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	25.738,3	26.999,4	16.574,8	13.665,0	15.494,9	21.605,6	1.255,7	121.333,7
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	6.444,7	3.867,4	6.796,7	24.984,6	6.633,0	1.090,4		49.816,8
Dataran organik bermaterial gambut	3.608,1	7.362,7		17.516,8		812,2	182,6	29.482,4
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan metamorfik	22.646,0	9.330,0			44.042,8	5.129,3		81.148,1
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	59.949,3	146.730,2	197.742,5	75.319,6	68.995,5	179.754,3	192,7	728.684
Dataran struktural lipatan	144.636,1			18.182,3			5.148,6	167.967,0



berombak-bergelombang bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat								
Dataran struktural plutonik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku dalam	1.604,6	67.252,5	24.062,5	20.220,0	61.569,7	395,1		175.104,4
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	217,1							217,1

Sumber: SK Menlhk 1272/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Vegetasi pada Skala 1:250.000



Gambar 1. 7 Peta Bentang Lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: SK Menlhk 1272/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Vegetasi pada Skala 1:250.000, KLHK 2023



1.2.3. Potensi Unggulan Daerah

1. Potensi Pertanian

Potensi sektor pertanian yang dapat dikembangkan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah durian, jeruk, nanas, cempedak, manggis, duku, salak, rambutan, dan pisang. Dari sektor perkebunan, potensi perkebunan yang dapat dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain lada, kelapa sawit, karet, cengkeh, dan coklat. Luas lahan sawah dan lahan ladang yang berpotensi ditanami padi hanya berkisar 25.058 ha dan 27.435 ha. Sementara itu, luas lahan sawah yang telah memiliki irigasi hanya 4.234 ha. Potensi pertanian juga dapat terlihat Pertanian di Kepulauan Bangka Belitung memiliki identitas mendunia melalui produk lada putih. Meskipun baru dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat, lada Kepulauan Bangka Belitung memiliki aroma dan rasa khas sehingga dijadikan standar dalam perdagangan internasional. Meskipun demikian, luas area perkebunan rakyat untuk komoditas lada terus mengalami penurunan sejak tahun 2019 dari 52.688,05 ha menjadi 41.749,90 ha di tahun 2023. Produksi lada di perkebunan rakyat juga mengalami penurunan dari 33.457,64 ton pada tahun 2019 menjadi 24.848,84 ton di tahun 2023. Selain lada, masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung juga berkebun karet untuk diambil getahnya dan kelapa sawit. Pada tahun 2023 produksi karet dari perkebunan rakyat sebesar 45.197,64 ton. Sementara itu, produksi kelapa sawit pada tahun 2023 sebesar 213.514,95 ton.

Potensi lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat besar untuk pengembangan kawasan pertanian, sebagai contoh terdapat lahan yang tidak diusahakan sebesar 6% dari potensi yang ada dan masih terdapat lahan lainnya yang juga belum dimanfaatkan sebesar 23%. Gambaran tersebut berarti bahwa upaya pengembangan pembangunan sektor pertanian masih sangat dimungkinkan melalui



perluasan areal tanam dengan penambahan bahan baku lahan dan optimalisasi lahan yang ada.

2. Potensi Kehutanan

Berdasarkan data kawasan hutan dari Direktorat Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terbaru tahun 2021, SK.6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sampai Dengan Tahun 2020, dapat diketahui bahwa status kawasan hutan yang ada di wilayah kajian dan wilayah perencanaan terdiri atas Area Penggunaan Lain (APL), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Konversi (HPK), Taman Hutan Rakyat (TAHURA), Taman Nasional (TN), dan Taman Wisata Alam (TWA). Sebagian besar wilayah kajian ada pada kawasan APL seluas 1.007.872,7 Ha, HP seluas 435.151,3 Ha, dan HL seluas 185.497,1 Ha. Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat perubahan luas kawasan hutan karena adanya beberapa kebijakan perubahan penggunaan lahan. Tabel I.6 menyajikan luas kawasan hutan berdasarkan beberapa penetapan.

Tabel 1. 8 Perkembangan Luas Kawasan Hutan
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Status Kawasan Hutan	Bangka	Bangka Barat	Bangka Selatan	Bangka Tengah	Belitung	Belitung Timur	Pangkalpinang	Jumlah
Tidak Ada Data	1.129,9	296,9	146,9	125,8	158,5	162,1	3,7	1.449,1
APL	208.679,8	168.202,0	226.836,0	94.469,7	141.097,3	159.907,6	10.445,7	1.007.872,7
HL	16.633,5	29.092,5	25.621,1	30.285,4	40.690,5	43.174,3	-	185.497,1
HP	60.269,7	78.795,9	103.975,6	94.682,4	41.983,4	55.444,2	-	435.151,3
HPK	24,2	190,3	-	-	476,4	-	-	690,8
Tahura	-	3.356,7	-	6.028,3	2.570,4	-	-	11.955,4
TN	15.931,2	1.270,7	-	-	-	-	-	17.202,0
TWA	-	3.949,6	3.148,0	-	-	-	-	7.097,6
Jumlah	302.668,3	285.154,5	359.727,7	225.591,7	226.976,5	258.688,3	10.449,4	1.669.256,8

Keterangan:

KSA/KPA

: Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam



HL : Hutan Lindung
HPT : Hutan Produksi Terbatas
HP : Hutan Produksi
HPK : Hutan Produksi Konversi
Sumber : BPKHTL Wilayah XIII Pangkalpinang

Hutan produksi difokuskan untuk menghasilkan beberapa jenis komoditas kehutanan, yaitu berupa kayu dan produk turunannya. Hutan produksi yang ada di Pulau Bangka dan Pulau Belitung menghasilkan beberapa jenis produk yang meliputi kayu persegi (*wood block*), moulding, kayu glondongan (*logs*), kayu tiang poles (*wood production*), kayu junjung (*climbing pole*), kayu bakar (*fire wood*), serta arang (*charcoal*). Kegiatan reboisasi hutan yang ada di Pulau Bangka dan Belitung berdasarkan data statistik juga telah dilakukan. Sejak tahun 2000 kegiatan penanaman kembali kawasan hutan telah dilakukan. Pada tahun tersebut pengadaan bibit reboisasi direncanakan untuk lahan kawasan seluas 1.710 hektar dimana 260 hektar di Pulau Bangka dan 1.350 hektar di Pulau Belitung.

3. Potensi Pesisir, Kelautan dan Perikanan

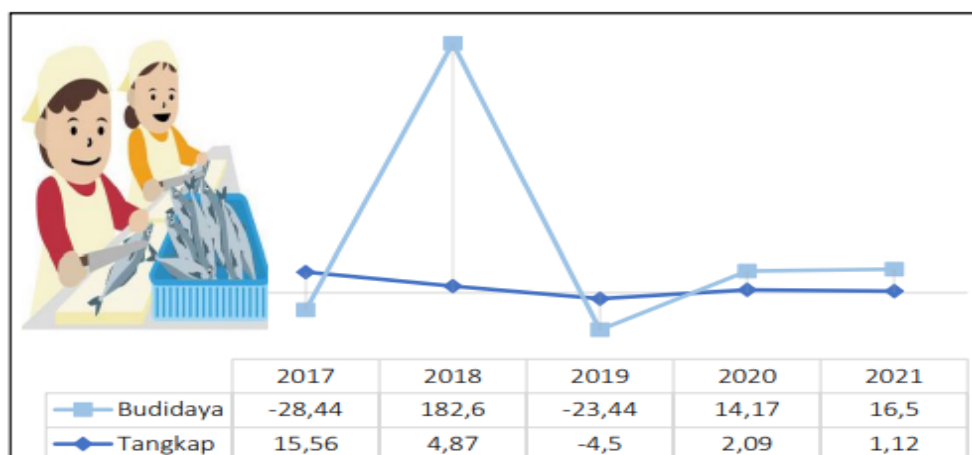
Wilayah Kepulauan Bangka Belitung menyimpan dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar, baik perikanan pantai maupun perikanan laut. Kondisi desa-desa pantai di wilayah ini di sepanjang pantainya merupakan alam yang memiliki karakteristik pantai berpasir, pantai berlumpur, pantai berbatu, mangrove, hutan pantai, semak belukar dan permukiman. Pantai berpasir umumnya dikembangkan sebagai daerah wisata terutama disebabkan keindahan alam yang diselingi oleh batu granit. Desa pantai berlumpur terutama yang berada di muara dan disebabkan oleh buangan limbah pertambangan dan perkebunan. Sedangkan desa pantai yang dihiasi oleh hutan mangrove merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya ikan, udang, kepiting dan berbagai biota laut lainnya.

Perkembangan produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif. Produksi perikanan tangkap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 222.789 ton menjadi 223.680,33 ton pada tahun 2019 dan 228.980,33 ton pada tahun 2018 kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 225.292 ton. Demikian pula dengan produksi perikanan budidaya, pada tahun 2018 tercatat sebesar 9.340,93 ton turun menjadi 7.150,663 ton pada tahun 2019 dan naik pada tahun 2020 menjadi 8.164,26 dan pada tahun 2021 sebesar 9.512,118 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara kuantitas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Produksi yang meningkat secara signifikan berasal dari komoditas udang vaname untuk budidaya air payau, komoditas lele untuk budidaya air tawar dan kerang darah (kekerangan) untuk kegiatan budidaya laut.

Pertumbuhan Produksi Perikanan



Gambar 1. 8 Pertumbuhan Produksi Perikanan

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya DKP Prov. Kep. Babel Tahun 2021

4. Potensi Pertambangan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi bahan tambang yang cukup besar berupa timah dan merupakan penghasil utama timah di Indonesia. Potensi pertambangan lainnya terdapat di 6 (enam) wilayah kabupaten kecuali Kota Pangkalpinang di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. potensi pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung saat ini masih cukup besar.



Dari 10 (sepuluh) potensi sumber daya alam, diketahui potensi sumber daya terbanyak yaitu bijih timah sebesar 9.970.982.967,54 ton, disusul bijih monasit yaitu sebesar 6.384.384.512,00 ton sedangkan logam perak merupakan mineral dengan potensi paling kecil yaitu sebesar 1.531,67 ton. Sementara itu pada mineral non logam, pasir kuarsa menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 690.424.868 ton, disusul granit sebesar 528.553.883 ton.

5. Potensi Perindustrian dan Perdagangan

Secara umum industri yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini masih didominasi oleh industri dengan skala rumah tangga. Industri yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah industri kerajinan yang dapat menunjang sektor pariwisata seperti kerajinan pewter, akar bahar, batu satam, renda, kopiah resam, dan rotan. Saat ini, industri menengah yang dikelola antara lain industri kaolin, batu granit, pembuatan batu bata yang berasal dari bahan galian golongan C. Selain itu, terdapat juga industri pengolahan karet, kelapa sawit, pengolahan kayu dan pendukung usaha perikanan, yaitu pabrik es. Peluang pengembangan industri berbasis hasil perkebunan sangat berpotensi untuk dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6. Potensi Pariwisata

Pariwisata menjadi sektor unggulan bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan merupakan sektor yang diharapkan dapat menggantikan sektor pertambangan. Sektor pariwisata diharapkan menjadi *multiplayer Effect* bagi sektor-sektor lainnya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi pariwisata yang besar diantaranya daya Tarik wisata alam, budaya, maupun sejarah menjadikan provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai destinasi unggulan nasional setelah Bali dan Lombok.

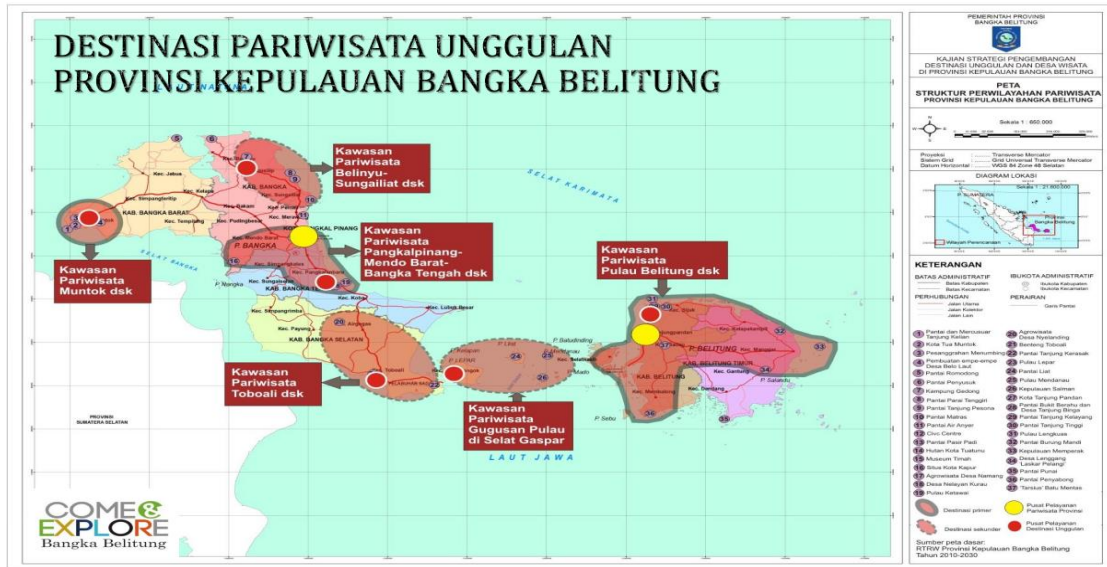


Dalam Konteks kepariwisataan regional dan nasional, potensi bahari dan geowisata kepulauan Bangka Belitung merupakan daya Tarik yang dapat dikembangkan untuk menjadikan provinsi Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata unggulan. Kekayaan sosial dan budaya masyarakat pesisir yang sangat terkait dengan bahari dan geowisata dan sumber daya alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jika dikembangkan secara terintegrasi sebagai desa wisata dapat menjadikan daya Tarik wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Potensi di bidang kepariwisataan yang sangat dominan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wisata pantai. Hal ini dikarenakan wilayah Bangka Belitung merupakan daerah kepulauan dan memiliki garis pantai yang cukup panjang, yaitu kurang lebih 1.200 km dengan hamparan pantai pasir putih, panorama yang indah, air yang jernih, dan di beberapa tempat dihiasi berbagai formasi batuan beraneka ragam bentuk yang sangat menarik untuk dikembangkan.

Potensi wisata lainnya yang dapat dikembangkan adalah wisata budaya seperti upacara-upacara Rebo Kasan, Buang Jong, Ceriak Nerang, Perang Ketupat, Sepintu Sedulang, dan Sembahyang Kubur. Wisata sejarah juga dapat menjadi objek wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti Batu Balai, Wisma Ranggalang, Vihara Dewi Kwan In, Phak Kak Liam dan Klenteng China Jebus. Secara terperinci, jumlah jenis objek wisata yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

- ▪ Wisata Alam : 56 Objek
- ▪ Wisata Budaya : 45 Objek
- ▪ Wisata Sejarah : 8 Objek
- ▪ Agro Wisata : 20 Objek



Gambar 1. 9 Peta Sebaran Pariwisata Unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.3. Proses Perumusan Isu Prioritas dan Penyusunan Dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dimulai dengan pembentukan Tim Kelompok Kerja yang susunannya terdiri dari perwakilan beberapa perangkat daerah terkait, perwakilan perguruan tinggi, dan perwakilan dari lembaga masyarakat, serta pembentukan Tim Penyusun Dokumen yang susunan keanggotaannya berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembentukan Tim Kelompok Kerja dan Tim Penyusun Dokumen ini dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Tugas Tim Kelompok Kerja di antaranya adalah menetapkan isu prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup daerah, menginventarisasi data terbaru dari *stakeholder* terkait yang diperlukan untuk penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024, mendiskusikan hasil tahapan penyusunan yang dilakukan Tim Penyusun dalam sebuah *focus group discussion*. Adapun tugas Tim Penyusun meliputi kegiatan menginput dan menganalisis data status lingkungan hidup daerah yang telah diinventarisasi oleh Tim



Kelompok Kerja menggunakan metode *Driving Force – Pressure – State – Impact – Response (DPSIR)*, mengidentifikasi data dan mengevaluasi dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, menyusun Buku Ringkasan Eksekutif dan Buku Laporan Utama Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Tim Kelompok Kerja. Untuk efektifitas penyusunan dan pelaksanaan Dokumen IKPLHD dilakukan secara virtual termasuk identifikasi isu prioritas yang menggunakan aplikasi *google form*.

Tahapan yang dilalui dalam Penyusunan Dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Pembentukan Tim Kelompok Kerja dan Tim Penyusun Dokumen IKPLHD yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/224/DLHK/2024;
2. Pelaksanaan *workshop* dan Sosialisasi Penyusunan Dokumen IKPLHD yang diikuti oleh Tim Kelompok Kerja Penyusun Dokumen IKPLHD provinsi dan Perwakilan dari kabupaten/kota dilanjutkan dengan penarikan isu prioritas yang dilakukan secara virtual menggunakan zoom meeting dan aplikasi google form;
3. Identifikasi data-data yang diperlukan untuk penyusunan Dokumen IKPLHD sesuai pedoman penyusunan yang terbaru;
4. Pelaksanaan FGD ke-1 untuk melakukan analisis cepat terhadap data-data yang telah ada dengan metode DPSIR secara singkat, dilanjutkan dengan identifikasi dan penyaringan isu;
5. Pengelompokan isu dan pengolahan isu dengan;
6. Melakukan analisis dengan metode DPSIR;
7. Pendokumentasian dan penulisan Dokumen IKPLHD;
8. Pengiriman Dokumen IKPLHD;
9. Penginputan data ke dalam sistem informasi lingkungan hidup di aplikasi data alam;



10. FGD untuk menyampaikan hasil penyusunan Dokumen IKPLHD kepada Tim Kelompok Kerja, dan mempublikasikan Dokumen IKPLHD Tahun 2024 yang telah tersusun.

Perumusan isu prioritas dilakukan dengan melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* yang melibatkan Tim Kelompok Kerja. Perumusan Isu Prioritas dimulai dengan menyajikan data-data terkait yang telah dikumpulkan kepada Tim Kelompok Kerja serta melakukan analisis cepat terhadap data-data tersebut dengan metode *Driving Force – Pressure – State – Impact – Response*. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis cepat tersebut peserta FGD mengidentifikasi isu-isu lingkungan, ekonomi, dan sosial yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, kemudian dilakukan diskusi dan pengelompokan isu-isu tersebut. Selanjutnya, daftar isu hasil FGD dinilai menggunakan skala dengan rentang nilai 1–10. Semakin besar nilai yang diberikan, maka isu tersebut semakin diprioritaskan. Penilaian dilakukan oleh responden yang berasal dari berbagai instansi terkait, dengan menggunakan fasilitas *google form* (https://bit.ly/ISU_IKPLHD2024). Kriteria yang digunakan untuk pertimbangan saat dilakukan penilaian adalah:

1. *Urgency* (isu yang dinilai mendesak untuk segera diselesaikan atau ditangani),
2. *Seriousness* (isu yang dinilai menimbulkan dampak serius dan membahayakan),
3. *Growth* (isu yang dinilai terus berkembang dan sulit dicegah),
4. *Rationally* (isu yang dinilai bersifat rasional untuk diselesaikan dengan waktu dan sumber daya yang tersedia).

Daftar isu hasil FGD yang dilakukan penilaian terdiri atas isu-isu lingkungan hidup berikut:

1. Alih Fungsi Lahan,
2. Erosi Dan Sedimentasi,
3. Penurunan Kualitas Air,
4. Peningkatan Konsumsi Energi Fosil,



5. Penurunan Kualitas Udara,
6. Bencana Akibat Cuaca Ekstrem (Banjir, Angin Kencang/Putting Beliung),
7. Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal,
8. Masalah Ketahanan Pangan,
9. Tata Kelola Pertambangan,
10. Degradasi Ekosistem Pesisir Dan Laut,
11. Pengelolaan LB3 Belum Optimal

Berdasarkan kesepakatan bersama Tim Kelompok Kerja, maka ditetapkan empat isu dengan peringkat tertinggi menjadi isu prioritas. Keempat jenis isu prioritas yang ditetapkan tersebut adalah :

- 1. Pengelolaan Sampah Yang Belum Optimal,**
- 2. Alih Fungsi Lahan**
- 3. Penurunan Kualitas Air,**
- 4. Tata Kelola Pertambangan**

Pembahasan lebih lanjut mengenai perumusan isu prioritas tercantum dalam Bab III.

I.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari dilaksanakannya penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menyediakan informasi lingkungan hidup. Tujuan dilaksanakannya penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Menyediakan data dan informasi mengenai status lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbaru dan bisa diakses



- publik atau pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai bentuk akuntabilitas publik;
2. Menyediakan informasi kinerja yang menggambarkan keberhasilan kinerja pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
 3. Menyediakan data dan informasi lingkungan hidup sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan dan memperbaiki kualitas lingkungan yang telah rusak.

1.5. Ruang Lingkup Penulisan

Lingkup penulisan dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ini dibatasi pada data dan informasi lingkungan hidup yang terkait dengan status lingkungan hidup di Kepulauan Bangka Belitung, serta informasi terkait yang menggambarkan kinerja daerah Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Ruang lingkup Dokumen IKPLHD dengan metode analisis DPSIR meliputi :

1. Faktor-faktor pendorong (*driving forces*) yang memotivasi aktivitas yang merubah kondisi lingkungan, baik unsur ekonomi maupun sosial beserta analisisnya;
2. Faktor-faktor tekanan (*pressure*) yang memicu aktivitas-aktivitas yang menyebabkan perubahan kondisi lingkungan;
3. Keadaan atau status kondisi lingkungan (*state*);
4. Dampak (*impact*) yang timbul akibat perubahan kondisi lingkungan;
5. Tanggapan (*respons*) dan inovasi yang dilaksanakan oleh berbagai pihak untuk mencegah, menanggulangi, atau mengurangi dampak negatif yang muncul;
6. Rekomendasi-rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Dokumen IKPLHD terdiri dari dua buku, yaitu Buku Ringkasan Eksekutif dan Buku Utama IKPLHD. Buku Utama Dokumen IKPLHD terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut.

1. Bagian Awal, terdiri dari :
 - 1) Halaman Judul.
 - 2) Halaman Surat Pernyataan.
 - 3) Kata Pengantar.
 - 4) Daftar Isi.
 - 5) Daftar Tabel.
 - 6) Daftar Gambar.
 - 7) Daftar Lampiran.
2. Bagian Utama, terdiri dari :
 - 1) Bab I Pendahuluan
 - 2) Bab II Analisis dengan DPSIR
 - 3) Bab III Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah
 - 4) Bab IV Inovasi Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 5) Bab V Penutup
3. Bagian Akhir, terdiri dari :
 - 1) Daftar Pustaka
 - 2) Lampiran



BAB II

***ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT, DAN RESPONSE* ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

Permasalahan lingkungan hidup yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas waktu bersifat sangat kompleks sehingga seringkali tidak dapat diatasi hanya dengan penelitian dan keputusan ilmiah, maupun keputusan pemangku kepentingan. Pendekatan cara berpikir yang digunakan harus menggunakan pendekatan suatu sistem yang bisa menghubungkan antar masalah yang luas dan mengambil keputusan dengan cara yang terstruktur. Salah satu cara penyelesaian masalah yang menggunakan pendekatan sistem adalah metode kerangka kerja *Driving force – Pressure – State – Impact – Response (DPSIR)* yang bisa digunakan untuk menghubungkan antar isu lingkungan yang kompleks.

DPSIR adalah sistem kerangka kerja yang mengasumsikan hubungan sebab-akibat antar komponen yang saling berinteraksi dari sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan. Metode DPSIR telah banyak diaplikasikan untuk pemecahan berbagai macam persoalan, terutama masalah lingkungan. *Driving force* adalah faktor-faktor yang menjadi motivasi dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Driving force* memiliki distribusi secara spasial dengan luasan dan intensitas yang berbeda-beda, bisa secara global, regional, ataupun lokal. *Driving force* menggambarkan perkembangan sosial, demografi, dan ekonomi dalam masyarakat. *Driving force* ekonomi mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya seperti pangan, tempat tinggal, air, kesehatan, keamanan, budaya, bahan baku, dan infrastruktur. Beberapa jenis *driving force* di bidang ekonomi, di antaranya adalah: Sektor yang memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku, seperti pertanian, perkebunan, budidaya perairan, perikanan, dan pertambangan;



1. Sektor yang memenuhi kebutuhan air, seperti pasokan air minum (perusahaan air minum, industri rumahan isi ulang air minum, dll.) dan irigasi;
2. Sektor yang memenuhi kebutuhan pakaian dan tempat tinggal, seperti perumahan (konstruksi, real estate, dll.), tekstil dan pakaian jadi;
3. Sektor yang memenuhi kebutuhan kesehatan, seperti *health care*, rumah sakit, farmasi, kosmetik, dan pengolahan limbah;
4. Sektor yang memenuhi kebutuhan budaya, seperti pariwisata, pendidikan, informasi, dan organisasi sosial;
5. Sektor yang memenuhi kebutuhan keamanan, seperti pertahanan dan keamanan nasional, dan administrasi publik;
6. Sektor yang memenuhi kebutuhan infrastruktur, seperti manufaktur, perdagangan, konstruksi, keuangan, asuransi, dan utilitas.

Driving force sosial mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan hubungan sosial, kesejahteraan sosial, pemerintahan, dan identitas budaya. *Driving force* sosial secara umum meliputi rangkaian sosial, komunitas, dan karakteristik politik yang mempengaruhi struktur dan fungsi sektor ekonomi, serta bertindak sebagai penentu utama kesehatan manusia. Misalnya, kurangnya keadilan atau pemerintahan yang represif dapat mempengaruhi kemampuan sektor ekonomi untuk berfungsi dengan baik atau bahkan bisa membatasi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Beberapa jenis *driving force* di bidang sosial, di antaranya adalah:

1. Hubungan sosial, seperti hubungan antar agama, organisasi kemasyarakatan, dan hubungan pernikahan;
2. Kesejahteraan sosial, seperti akses untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan;
3. Pemerintahan, seperti bentuk pemerintahan, pola pemungutan suara dalam pemilihan umum, dan regulasi-regulasi dalam pemerintahan;



4. Identitas budaya, seperti etnik budaya, keyakinan/kepercayaan yang dianut, dan hukum-hukum adat atau kearifan lokal yang ada di wilayah tertentu.

Pressure didefinisikan sebagai aktivitas manusia yang timbul akibat *driving force* sosial dan ekonomi yang mendorong perubahan lingkungan atau perilaku manusia yang bisa mempengaruhi lingkungan. *Pressure* bisa digolongkan menjadi *environmental pressure* dan *human behavior pressure*. Beberapa hal yang bisa menjadi *environmental pressure* di antaranya adalah perubahan tutupan lahan atau penggunaan lahan, emisi limbah dan polutan, dan aktivitas-aktivitas manusia yang merubah atau memanipulasi kondisi lingkungan, seperti pengerukan, penambangan, pergerakan kapal, penangkapan ikan, dan deforestasi. Beberapa hal yang bisa menjadi *human behavior pressure* di antaranya adalah karakter dan tindakan manusia yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan, gaya hidup, serta mobilitas penduduk.

State menggambarkan kondisi lingkungan, baik lingkungan yang alami maupun lingkungan buatan (misalnya kuantitas dan kualitas komponen fisik, kimia, dan biologis) dan kondisi manusia (misalnya kepadatan penduduk, persebaran penduduk, status ekonomi, kesehatan masyarakat, dan karakteristik individu). Proses kimia, fisik, dan biologis, serta aktivitas/tindakan manusia saling berinteraksi memberikan tekanan dan mempengaruhi berbagai komponen lingkungan hidup yang dapat diukur kondisinya melalui parameter-parameter yang berkaitan.

Impact didefinisikan sebagai dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan kondisi lingkungan hidup. Perubahan kualitas maupun kuantitas lingkungan ini berdampak pada kesejahteraan manusia, termasuk berdampak juga pada kemampuan layanan jasa lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Beberapa jenis *impact* terhadap lingkungan, di antaranya adalah penurunan kemampuan layanan jasa penyediaan (air, pangan, serat), jasa pengaturan (iklim, kualitas air, pengolahan limbah, dll.), jasa estetika dan budaya, jasa pendukung



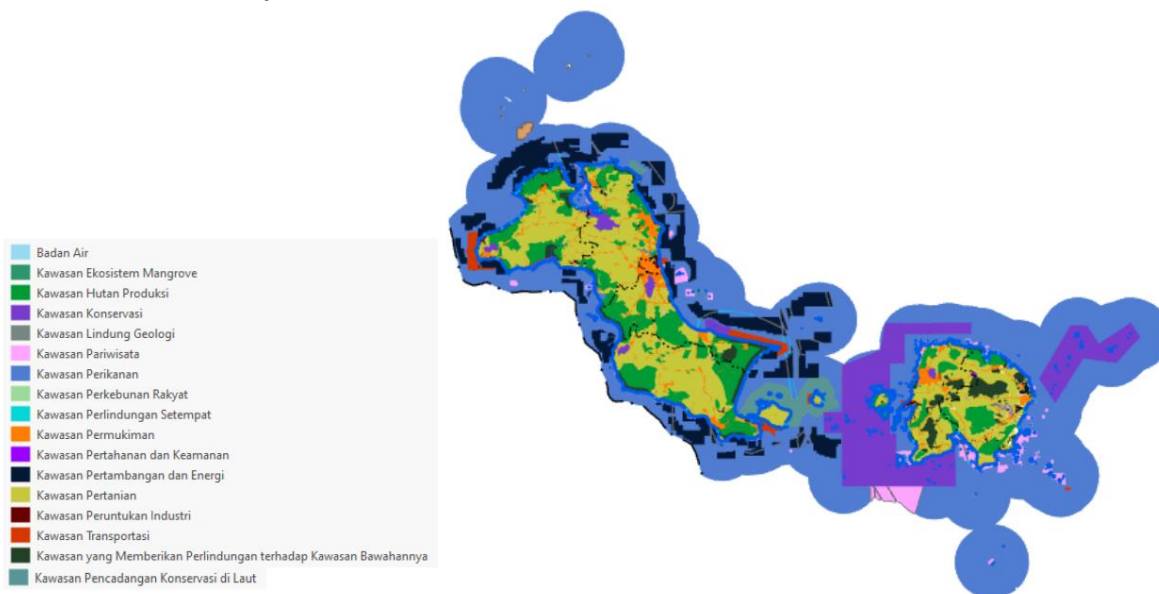
(produksi primer, unsur hara, dll.). Beberapa jenis *impact* terhadap kesejahteraan manusia, di antaranya berpengaruh terhadap produktivitas, pendapatan, biaya kesehatan, keamanan, serta kebahagiaan.

Response adalah tindakan yang diambil oleh suatu kelompok atau individu dalam masyarakat dan pemerintah untuk mencegah, mengganti rugi, memperbaiki atau beradaptasi dengan perubahan keadaan lingkungan, serta untuk memodifikasi perilaku manusia yang berkontribusi terhadap munculnya dampak atau resiko. Di dalam metode DPSIR, *response* bisa berupa upaya untuk mengontrol atau mengendalikan *driving force, pressure, state*, ataupun *impact*. Contohnya, penerapan beberapa kebijakan dan teknologi pendukung, manajemen sumber daya alam dan lahan, monitoring kualitas lingkungan, valuasi lingkungan, dan kompensasi terhadap kerugian yang timbul.



II.I Tata Guna Lahan

Tata Guna Lahan (*land use planning*) adalah serangkaian kajian pengaturan penggunaan lahan baik di permukaan daratan maupun lautan (Jayadinata, 2009). Dalam pengaturan penggunaan lahan tersebut disesuaikan dengan fungsi- fungsi tertentu misalnya fungsi pemukiman, perkebunan, industri dan sebagainya. Dalam rencana tata ruang wilayah secara umum fungsi dalam tata guna lahan terdiri atas fungsi lindung dan fungsi budidaya. Tujuan dari tata guna lahan adalah untuk mempengaruhi, mengontrol atau mengarahkan perubahan dalam penggunaan lahan, sehingga ditujukan untuk penggunaan yang paling menguntungkan, dengan tetap menjaga kualitas lingkungan dan mendorong pelestarian sumber daya lahan. Tata guna lahan juga perlu direncanakan sebaik-baiknya agar fungsi-fungsi yang direncanakan dapat saling menunjang keberadaannya.



Gambar 2.1. 1 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Dalam pembahasan tata guna lahan tidak terlepas dari definisi lahan itu sendiri. Secara pengertian lahan dapat diartikan sebagai penutup biofisik di permukaan bumi yang dapat diamati dinamikanya (BSN, 2014). Lahan bersifat dinamik artinya cenderung untuk mengalami perubahan baik yang



disebabkan oleh aktivitas alam maupun antropogenik. Lahan mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan pembangunan di suatu wilayah untuk itulah diperlukan upaya merencanakan penggunaan lahan tersebut agar sesuai dengan peruntukan atau fungsi-fungsi tertentu melalui kaidah tata guna lahan.

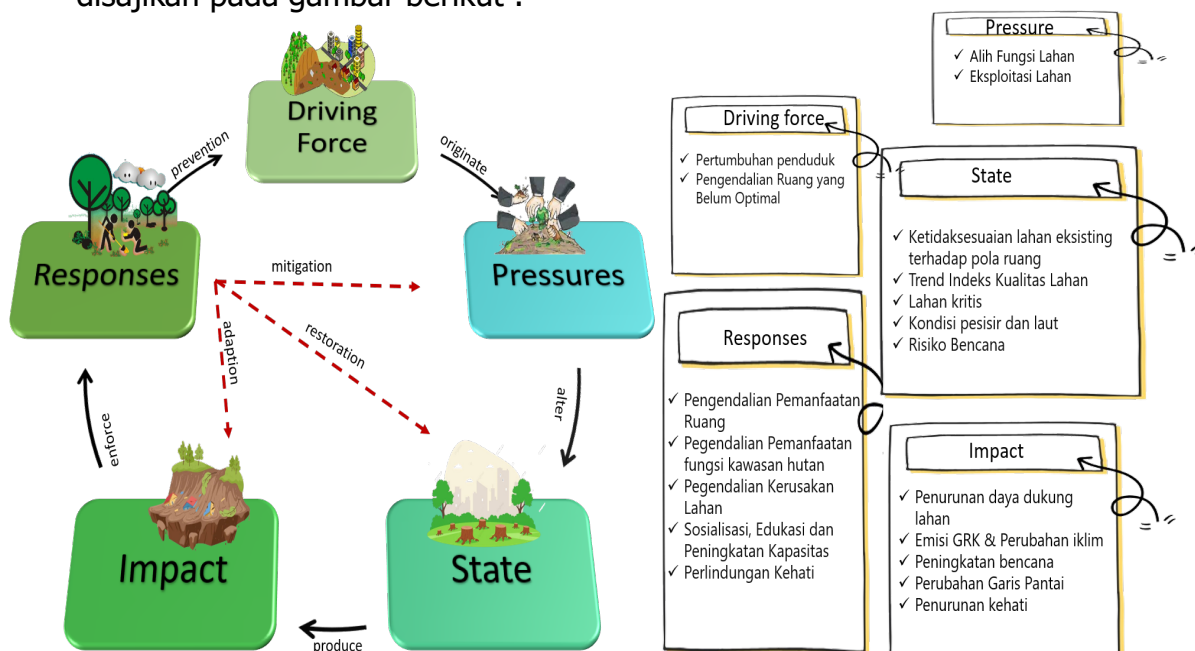
Dikeluarkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diganti dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta selanjutnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang mengharuskan seluruh Daerah di Indonesia melakukan revisi rencana tata ruangnya baik yang di darat maupun di laut.

Ruang darat yang dulu hanya diatur oleh RTRW dan laut yang dulu diatur oleh RZWP-3-K mengharuskan terjadi integrasi antara dua produk tata ruang tersebut. Selain integrasi antara tata ruang darat dan laut, terbitnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang juga mengakibatkan perubahan nomenklatur alokasi ruang baik itu pada pola maupun struktur ruang. Dengan demikian, revisi RTRW menjadi sebuah keharusan bagi setiap daerah di Indonesia agar menyesuaikan dengan peraturanperaturan terbaru. Provinsi Kep. Bangka Belitung sebagai bagian dari Indonesia juga diharuskan melakukan revisi terhadap RTRW-nya. Perubahan batas antar Provinsi (kewenangan di laut), perubahan batas antar kabupaten, perubahan garis pantai, relevansi RTRW lama dengan



kondisi sekarang yang diatur di Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, perubahan Peta Status Kawasan Hutan dan dinamika pemanfaatan ruang darat dan laut yang cepat berubah mengharuskan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan revisi RTRW. Selain itu, revisi RTRW ini merupakan usaha untuk memperbaiki ketidaksesuaian ruang yang telah diatur penyelesaiannya di Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.

Sub bab ini akan membahas mengenai tata guna lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dalam implementasinya tidak terlepas dari beberapa permasalahan yang akan coba dianalisis mulai dari faktor pemicunya hingga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menyikapi permasalahan tersebut. Adapun tabel utama dalam analisis ini merupakan tabel ke 1 hingga 17 tabel data alam serta didukung oleh data penunjang terkait lainnya. Kerangka pikir analisis DPSIR tata guna lahan disajikan pada gambar berikut .



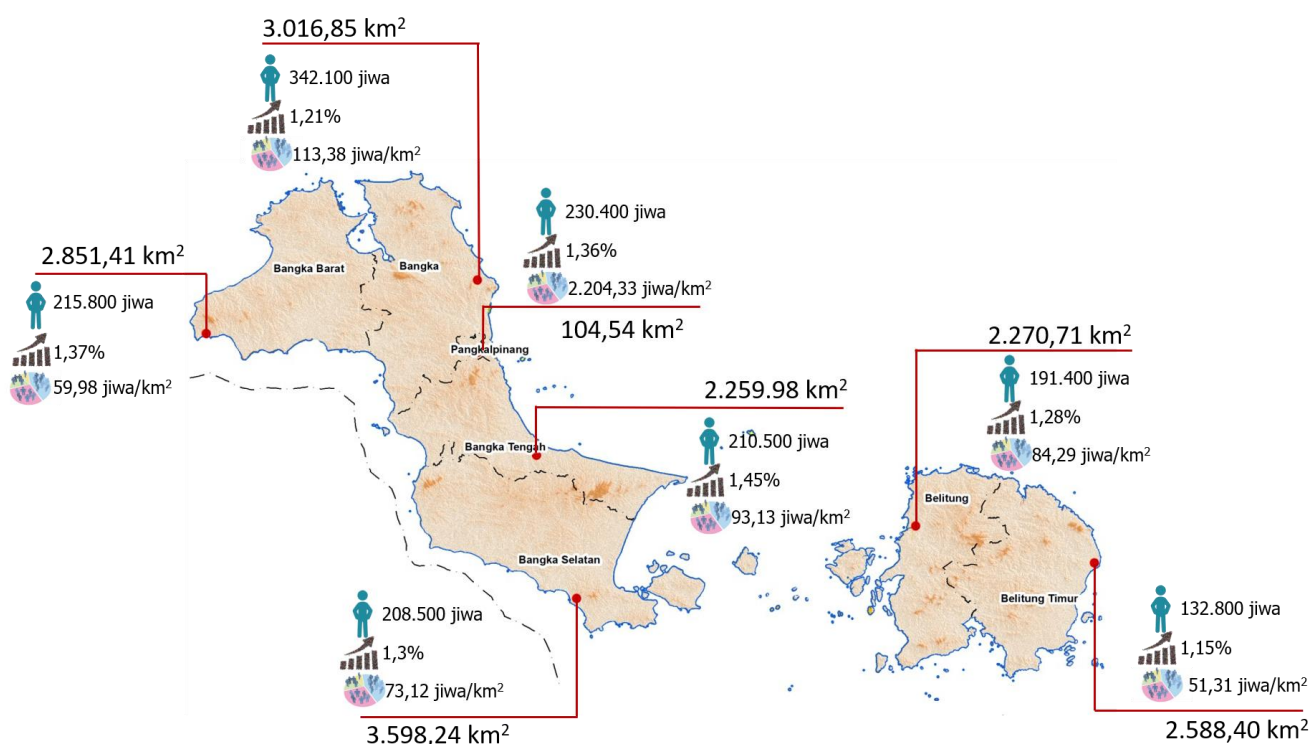
Gambar 2.1. 2 Kerangka Pikir DPSIR Tata Guna Lahan
Sumber: Analisis, 2024



II.1.1 Driving force

II.1.1.1 Peningkatan Jumlah Penduduk

Dalam kondisi normal jumlah penduduk bersifat dinamis artinya selalu berubah setiap waktu dengan kecenderungan mengalami peningkatan. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2020 jumlah penduduk di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebesar 1.455.700 jiwa sementara pada tahun 2024 jumlah penduduk meningkat menjadi 1.531.500 jiwa.



Gambar 2.1. 3 Kondisi Kependudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Berdasarkan jumlahnya, pada tahun 2024 jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Bangka yaitu sebanyak 342.100 jiwa dengan luasan wilayah sebesar 113,38 km² sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kabupaten Belitung Timur yaitu sebanyak 127.018 jiwa yang tersebar pada wilayah dengan luasan paling kecil yaitu 104,54 km². Di sisi lain berdasarkan kepadatannya terlihat bahwa Kota Pangkalpinang mempunyai tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yaitu 2.204,33 km² sedangkan



Kabupaten Belitung Timur dengan luasan mencapai 2.588,40 km² hanya memiliki kepadatan sebesar 51,31 jiwa saja per kilometer persegi. Dari data ini saja bisa terlihat seperti apa pesatnya perkembangan kota Pangkalpinang dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tidak terlepas dari perannya sebagai ibukota provinsi sekaligus sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis.

Jika ditinjau secara timeseries, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir khususnya tahun 2020 hingga 2024, jumlah penduduk cenderung mengalami trend peningkatan seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1. 1 Trend Jumlah Penduduk Sepanjang Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bangka	3.016,85	326.300	329.900	334.300	337.900	342.100
2	Belitung	2.270,71	182.100	184.000	186.300	189.200	191.400
3	Bangka Barat	2.851,41	204.600	206.700	209.400	212.900	215.800
4	Bangka Tengah	2.259,98	198.900	201.800	205.500	207.400	210.500
5	Bangka Selatan	3.598,24	198.200	200.300	202.300	205.800	208.500
6	Belitung Timur	2.588,40	127.000	128.500	130.500	131.300	132.800
7	Pangkalpinang	104,54	218.600	221.900	226.300	227.300	230.400

Sumber: BPS Prov Kep Babel, 2024

Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Pangkalpinang terlihat dari trend jumlah penduduk di atas. Sepanjang tahun 2022 hingga 2023 terdapat penambahan jumlah penduduk sekitar 4.400 jiwa sementara kabupaten lainnya hanya sekitar 2.700 hingga 3.000 jiwa saja. Sementara itu pada rentang waktu tahun 2023 hingga 2024 pertumbuhan penduduk paling banyak berada di Kabupaten Bangka dengan penambahan sebesar 4.200 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk ini diantaranya merupakan hasil kontribusi dari bertambahnya jumlah kelahiran serta perpindahan penduduk. Tingginya angka pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan tingkat kepadatan penduduknya. Dengan lahan yang cenderung terbatas sementara kebutuhan akan permukiman terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kecenderungan masalah



dalam tata guna lahan khususnya alih fungsi lahan tidak dapat dihindari. Hal ini diperkuat dengan hasil analisis spasial tumpang susun antara penutup lahan KLHK tahun 2021-2022 yang menunjukkan adanya peningkatan luasan permukiman sebesar 13.024 hektar. Angka ini tentunya dapat terus meningkat kedepannya jika tidak dilakukan pengendalian terhadap tata ruang.

II.1.1.2 Pengendalian dan Pengawasan terhadap Tata Ruang yang belum optimal

Mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya sedangkan II - 15 penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Kenyataan yang terjadi di lapangan terkait dengan permasalahan diatas menandakan bahwa penggunaan dan pemanfaatan ruang terhadap RTRW belum konsisten dengan peraturan tentang penataan ruang dimana masih dijumpai adanya pelanggaran terhadap penataan ruang dan hal ini sekaligus membuktikan masih lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap tata ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Suatu daerah bisa saja telah memiliki perencanaan tata ruang yang baik namun demikian jika tidak memperhatikan aspek pengendalian dan pengawasan maka tetap saja akan menimbulkan banyak persoalan salah satunya terkait permasalahan ketidaksesuaian peruntukan lahan yang disebutkan pada tabel diatas. Aspek pengendalian dan pengawasan ini adalah tahapan yang bersifat krusial dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pada pasal 147 PP Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa pelaksanaan pengendalian pemanfaatan tata ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya



penataan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap tata ruang ini menjadi salah satu *driving force* dalam tata guna lahan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II.1.2 Pressure

II.1.2.1 Alih Fungsi lahan

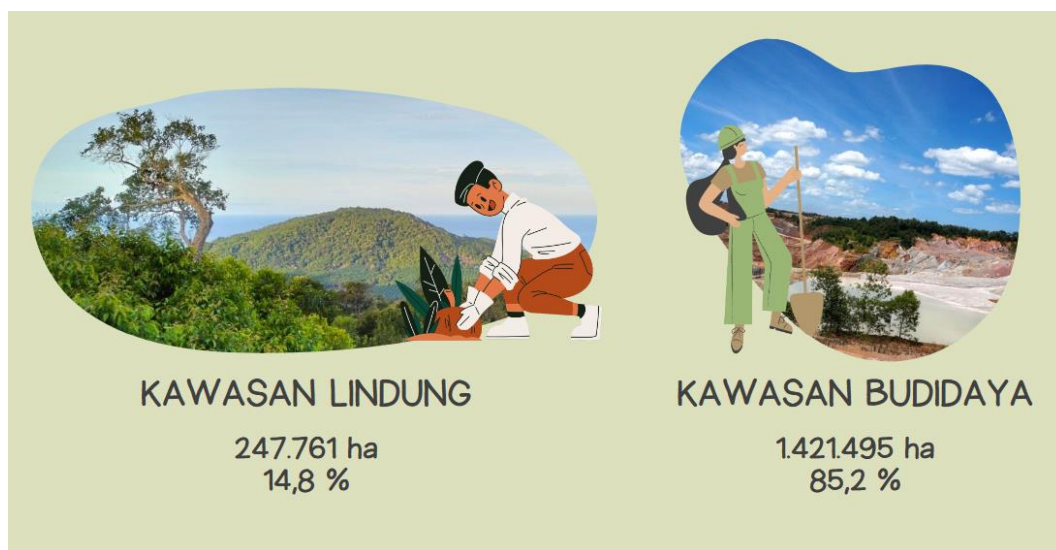
Alih fungsi lahan sering dipersamakan dengan istilah perubahan penutup lahan, namun demikian sebetulnya kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda. Perubahan penutup lahan didefinisikan sebagai peralihan suatu penutup lahan menjadi penutup lahan lainnya dalam kurun waktu tertentu (Kaspi, 2019) sedangkan alih fungsi lahan yaitu perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang kemudian berdampak terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi ini dapat berdampak positif jika perubahannya dikembalikan sesuai dengan fungsi semulanya dan sebaliknya berdampak negatif jika diubah menjadi fungsi lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Namun demikian terhadap kedua jenis dampak tersebut, alih fungsi lahan sendiri lebih dipandang bermakna negatif bagi lingkungan. Dalam bahasan sub tata guna lahan ini, peralihan fungsi tersebut dievaluasi dengan cara membandingkan kondisi eksisting saat ini dengan fungsi keruangan yang diatur dalam Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah serta fungsi kawasan hutannya.

A. Alih Fungsi Lahan Terhadap Tata Ruang

Mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota bahwa pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Pada tahun 2023 Provinsi



Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan proses penyusunan revisi tata ruang yang sekaligus menggabungkan pola ruang darat dan laut dalam suatu kesatuan ruang yang terintegrasi dan saat ini sedang dalam tahapan penetapan, namun demikian pembahasan alih fungsi lahan ini selanjutnya ditekankan hanya pada pola ruang darat saja. Berdasarkan informasi geospasial tematik pola ruang RTRW integrasi tersebut, perbandingan porsi luasan kawasan lindung dan kawasan budidaya pada pola ruang darat digambarkan sebagai berikut.



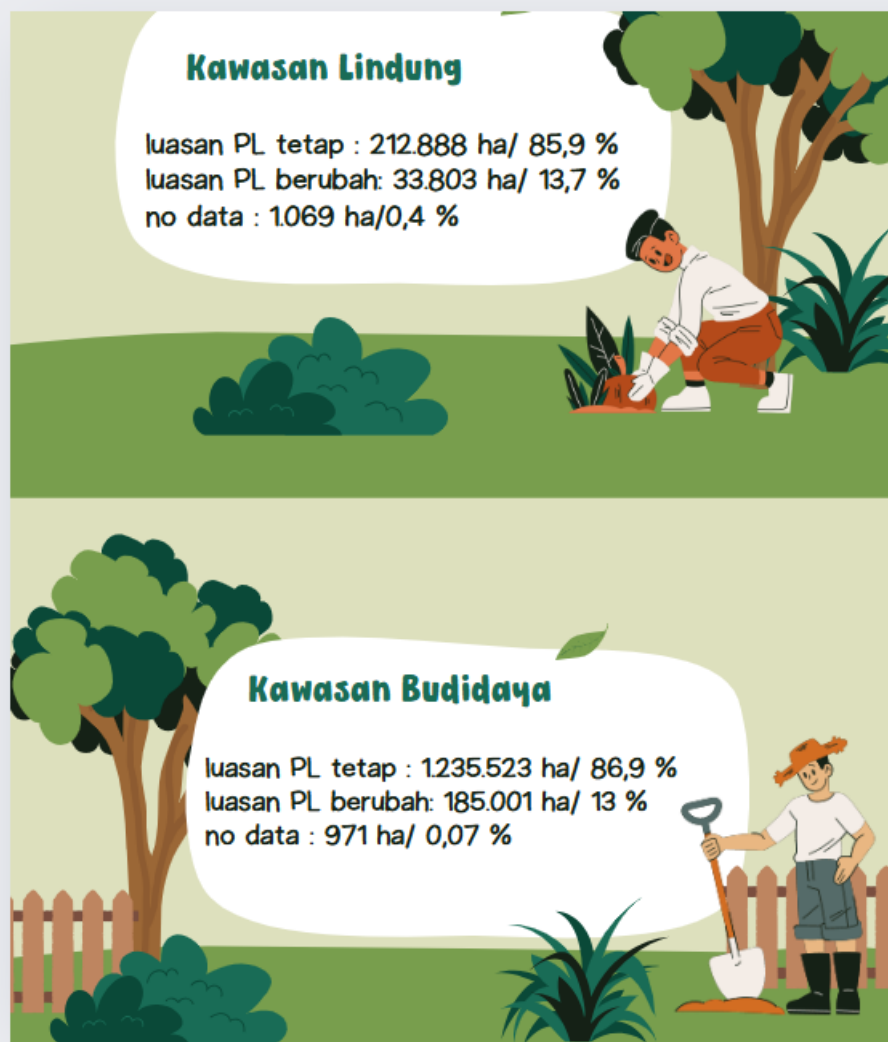
Gambar 2.1. 4 Perbandingan luasan kawasan lindung dan budidaya pada RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044

Sumber: IGT Pola Ruang RTRW Prov Kep Babel 2024-2044, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - 2023

Dari gambar di atas terlihat perbandingan antara pola ruang kawasan lindung dan budidaya yaitu 14,8 % dan 85,2 %. 19,6% dan 80,4%. Jika dibandingkan dengan pola ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034 pada persentase kawasan lindung sebesar 19,6 % maka terlihat adanya penurunan luasan porsi kawasan tersebut sebesar 4,8 %. Dari persentase porsi luas kawasan lindung dan budidaya tersebut selanjutnya penting untuk dilihat seperti apa kesesuaian penutup lahannya dengan kawasan yang ditempati karena berdasarkan pengertiannya bahwa kawasan lindung ditujukan pada kelestarian sementara kawasan budidaya ditujukan pada pemanfaatan.



Alih fungsi lahan terhadap peruntukan sesuai tata ruang dianalisis menggunakan metode tumpang susun data spasial penutup lahan KLHK skala 1:250.000 tahun 2021 dan 2022 (sebagai catatan bahwa penutup lahan tahun 2023 belum dirilis pada saat dokumen ini disusun) serta data spasial pola ruang revisi tata ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga diperoleh informasi lokasi dan luasan penutup lahan yang mengalami perubahan serta perbandingannya terhadap peruntukan tata ruangnya.



Gambar 2.1. 5 Perubahan Penutup/Penggunaan Lahan Tahun 2021-2022 dalam Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044

Sumber: IGT Pola Ruang RTRW Prov Kep Babel 2024-2044, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; IGT Penutup Lahan Skala 1:250.000 Tahun 2021 dan 2022, BPKHTL XIII Pangkalpinang, data diolah 2024

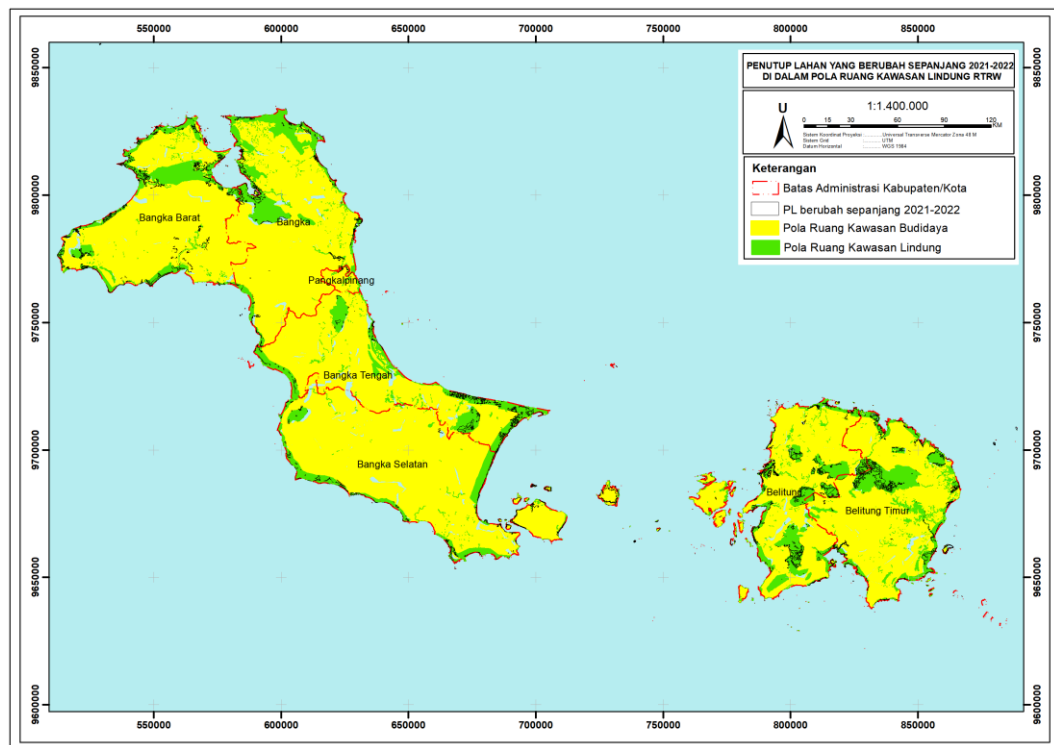


Gambar diatas memperlihatkan bahwa dinamika perubahan penutup lahan sepanjang tahun 2021-2022 terhadap pola ruang RTRW masih terus terjadi. Dari sisi kawasan lindung ada sekitar 85,9% yang tidak mengalami perubahan; 13,7% mengalami perubahan serta tidak ada data sebesar 0,4%. Hasil analisis spasial menunjukkan dari porsi 13,7% tersebut, penutup lahan yang paling banyak mengalami perubahan yaitu perkebunan yang dominan berubah menjadi pertanian lahan kering campur semak serta pertanian lahan kering campur semak yang dominan berubah menjadi belukar dengan distribusi secara spasial masing paling besar semua dominansi perubahan tersebut terjadi di Kabupaten Belitung. Perubahan penutup lahan perkebunan menjadi pertanian lahan kering campur semak sebesar 3.324 hektar dapat dianalisis sebagai perubahan yang diakibatkan karena penggolongan kelas penutup lahan karena mengacu pada junis penafsiran citra bahwa kelas pertanian lahan kering campur semak merupakan campuran areal pertanian, perkebunan, semak dan belukar sedangkan perubahan kelas penutup lahan pertanian lahan kering campur semak menjadi belukar yang didominasi berada di Kabupaten Belitung seluas 868 hektar dapat dianalisis sebagai ladang berpindah yang selanjutnya ditinggalkan sehingga mengalami suksesi kembali ke kondisi alaminya sebagai belukar, hal ini membawa dampak positif dalam artian mengembalikan penutup lahan kepada fungsinya sebagai kawasan lindung.

Sementara itu dari ilustrasi gambar sebelumnya dapat dilihat bahwa penutup lahan di dalam pola ruang budidaya yang mengalami perubahan yaitu sebesar 185.001 ha atau sekitar 13%. Hasil analisis spasial menunjukkan penutup lahan yang paling banyak mengalami perubahan di dalam pola ruang budidaya ini juga didominasi oleh perkebunan yang mengalami perubahan kelas menjadi pertanian lahan kering campur semak serta pertanian lahan kering campur semak yang berubah menjadi belukar dengan distribusi spasial didominasi terjadi di Kabupaten Belitung. Hakikatnya setiap pola ruang telah dirancang sesuai dengan fungsi dan



peruntukannya dan idealnya penutup/penggunaan lahannya tentunya harus berkesesuaian dengan masing-masing fungsi dalam pola ruang tersebut.



Gambar 2.1. 6 Perubahan Penutup/Penggunaan Lahan Tahun 2021-2022 dalam Pola Ruang Kawasan Lindung RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044
Sumber: IGT Pola Ruang RTRW Prov Kep Babel 2024-2044, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; IGT Penutup Lahan Skala 1:250.000 Tahun 2021 dan 2022, BPKHTL XIII Pangkalpinang, data diolah 2024

Gambar diatas memperlihatkan pola sebaran penutup lahan yang mengalami perubahan sepanjang tahun 2021-2022 di dalam kawasan lindung RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara administrasi perubahan ini terjadi di semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan porsi luasan perubahan yang berbeda-beda. Wilayah yang mengalami perubahan penutup lahan sepanjang tahun 2021-2022 paling besar yaitu di Kabupaten Belitung dengan estimasi luasan 11.748 hektar dan paling sedikit terjadi di Kota Pangkalpinang dengan luasan 64 hektar. Dari data tersebut diketahui bahwa dinamika perubahan penutup lahan yang terjadi di dalam kawasan lindung di Kabupaten Belitung pesat terjadi jika dibandingkan pada kurun waktu satu tahun sebelumnya



yaitu tahun 2020-2021 dimana perubahan ini paling banyak terjadi di Kabupaten Bangka Tengah dengan estimasi luasan sekitar 10.500 hektar. hektar. Dari perubahan ini akan dicermati apakah sifatnya positif atau negatif sesuai dengan fungsi ruang yang ditempati.

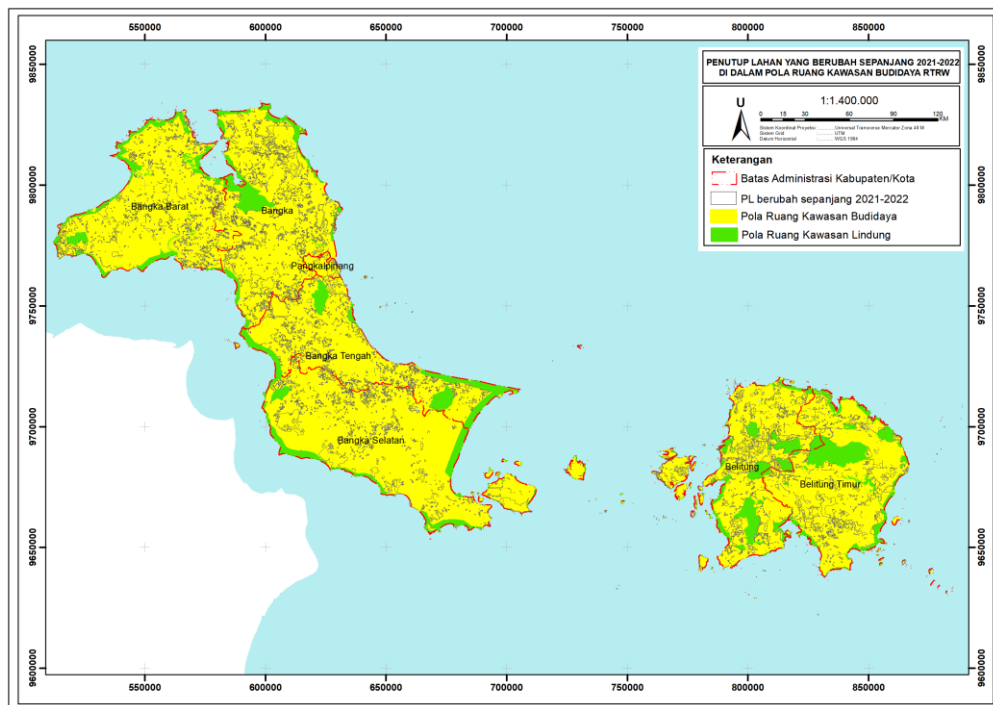
Berdasarkan hasil analisis spasial diketahui bahwa sepanjang tahun 2021 hingga 2022 penutup lahan belukar yang berada di kawasan lindung paling banyak mengalami konversi menjadi penutup lahan lainnya dengan perkiraan konversi seluas 4.493 hektar sedangkan luasan belukar yang tidak mengalami perubahan atau tetap yaitu seluas 24.073 hektar. Luasan belukar yang cenderung tetap ini mengalami penurunan dari kurun waktu setahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020-2021 seluas 32.428 hektar. Dari luasan 4.493 hektar yang berubah tersebut secara garis besar terkonversi menjadi permukiman seluas 22,8 hektar; perkebunan seluas 70 hektar; pertambangan seluas 379 hektar; pertanian lahan kering campur semak seluas 1.608 hektar; sawah seluas 12,6 hektar; tambak seluas 27,1 hektar serta beberapa penutup lahan lainnya. Dalam juknis KLHK penafsiran citra pada resolusi sedang untuk update penutup lahan nasional disebutkan definisi belukar yaitu seluruh kenampakan areal/kawasan yang didominasi oleh vegetasi rendah yang berada pada lahan kering yang berpotensi untuk mengalami regenerasi menjadi hutan sehingga alih fungsi lahan belukar dalam kawasan lindung berarti sama saja dengan mengurangi potensi munculnya ekosistem hutan baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Alih fungsi lahan tidak hanya terjadi di pola ruang kawasan lindung namun terjadi pula di kawasan budidaya. Hasil analisis spasial memperlihatkan sekitar 185.001 hektar penutup lahan yang mengalami dinamika perubahan. Dari luasan tersebut, kelas hutan yang berada di dalam kawasan budidaya turut mengalami konversi dan berdasarkan hasil analisis spasial menunjukkan semua kelas penutup lahan hutan yang ada di dalam kawasan budidaya mengalami konversi dengan rincian masing-masing hutan rawa sekunder yang paling banyak mengalami konversi yaitu sekitar 2.298 hektar diikuti oleh hutan lahan kering sekunder seluas 1.793



hektar; hutan rawa primer 253 hektar; hutan mangrove sekunder seluas 1.563 hektar; hutan mangrove primer seluas 241 hektar serta hutan lahan kering primer seluas 15,3 hektar. Perubahan penutup lahan hutan yang terjadi ini tentunya sangat disayangkan karena akan membawa dampak negatif bagi keseimbangan lingkungan dan akan membutuhkan waktu yang lama untuk suksesi suatu ekosistem hutan.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034 bahwa kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan namun demikian keberadaan penutup lahan hutan dalam kawasan budidaya harus mendapat perhatian penting untuk meminimalisir potensi deforestasi maupun degradasi hutan yang terus terjadi yang akan berdampak pada terganggunya keseimbangan lingkungan.



Gambar 2.1. 7 Penutup Lahan Hutan yang Berubah Sepanjang 2021-2022 dalam Pola Ruang Kawasan Budidaya RTRW

Sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2021 dan 2022, BPKHTL wilayah XIII; Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024-2044, DPUPRPRKP ; Batas Administrasi Kemendagri 050-145 Tahun 2022 (data diolah 2024)



Pada gambar diatas terlihat persebaran lokasi penutup lahan hutan yang mengalami perubahan sepanjang tahun 2021-2022 dalam pola ruang kawasan budidaya RTRW di semua wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan luasnya, perubahan paling banyak terjadi di wilayah Kabupaten Bangka dengan perkiraan sebesar 1.639 hektar dan penutup lahan hutan yang banyak terkonversi dalam kawasan ini yaitu hutan rawa sekunder. Sementara itu penutup lahan hutan kering sekunder yang berada dalam kawasan budidaya paling banyak terkonversi di wilayah Kabupaten Belitung dengan luas sekitar 470 hektar.

Pola ruang RTRW berdasarkan kondisi penutup lahan eksistingnya disajikan pada Tabel 2.1. 2 berikut.

Tabel 2.1. 2 Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Beserta Penutup Lahan Eksistingnya

Nama Kawasan		Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
			Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
Kawasan Lindung	Kawasan Lindung terhadap Kawasan Bawahannya	185.885	168.897	1.262	14.259	1.468
	Kawasan Perlindungan Setempat	1.850	1.021	5	42	782
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	39.658	34.912	120	1.665	2.961
	Kawasan Rawan Bencana (ketentuan khusus)	1.423.950	1.273219	51.402	87.591	11.518
	Kawasan Lindung Geologi	2.622	2.249	5	132	235
	Kawasan Lindung Lainnya	19.980	16.394	188	522	2.875
Kawasan Budidaya		1.421.495	1.202.131	50.648	155.339	5.948

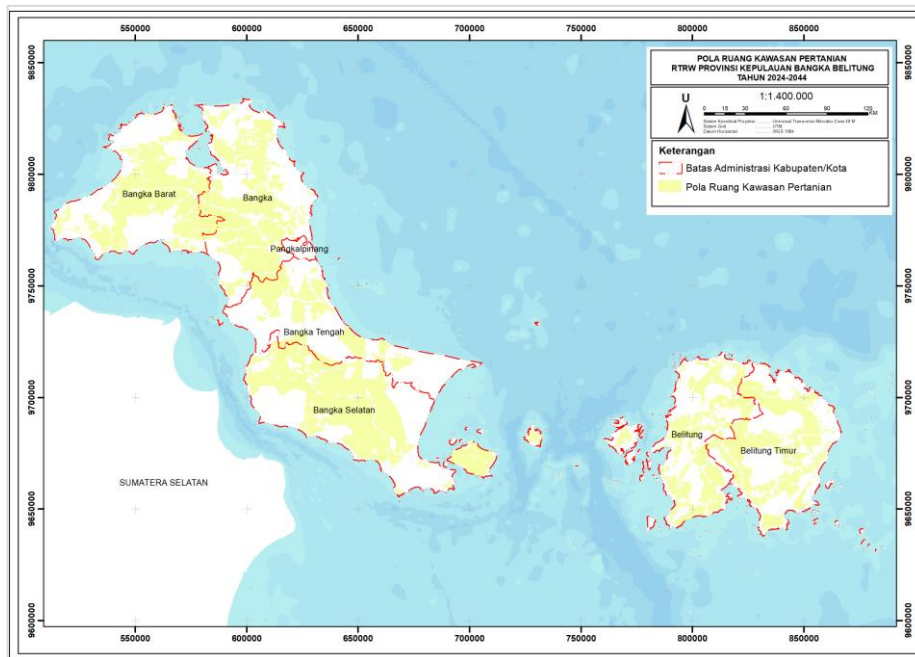
Sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2022, BPKHTL wilayah XIII; Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024-2044, DPUPRPRKP (data diolah 2024)



Dari data diatas secara umum terlihat bahwa kawasan lindung dengan mengecualikan ketentuan khusus kawasan rawan bencana yang eksisting penutup lahannya bervegetasi yaitu seluas 223.471 ha atau setara dengan 89,4% dari luas keseluruhan kawasan tersebut. Secara angka persentase ini tidak mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan dengan persentase penutup lahan eksisting tahun 2021 terhadap pola ruang RTRW tahun 2014-2034. Di sisi lain luasan tanah terbuka yang berada di dalam pola ruang lindung mempunyai luasan yang cukup besar yaitu sekitar 16.620 hektar atau setara dengan 6,65% dari keseluruhan luasan pola ruang lindung tanpa memasukkan ketsus rawan bencana. Dari kelas tanah terbuka tersebut, kelas pertambangan mendominasi luasan tersebut di atas selain lahan terbuka.

1. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Secara umum, lahan pertanian yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas lahan pertanian basah atau sawah, lahan pertanian kering serta lahan pertanian kering campur semak atau kebun campuran. Berdasarkan data spasial pola ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024-2044, kawasan peruntukan pertanian mempunyai luasan sekitar 776.464 hektar atau mengalami peningkatan sebesar 284.474 hektar dari pola ruang RTRW sebelumnya. Dalam definisinya mengacu pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota disebutkan bahwa kawasan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pola ruang kawasan pertanian dalam pola ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044 diperlihatkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1. 8 Kawasan Pertanian dalam Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034

Sumber: Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024-2044, DPUPRPRKP (data diolah 2024)

Jika dibandingkan dengan kondisi eksistingnya maka penutup lahan yang ada di dalam kawasan ini tidak semuanya sesuai dengan pola ruang tersebut dan di kawasan tersebut tidak terlepas dari adanya dinamika perubahan lahan seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. 3 Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian

No.	Jenis PenggunaanBaru	Luas Lama (Ha)	Luas Baru (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Permukiman	19.814	2.207
2.	Industri	0	0
3.	Tanah kering	0	0
4.	Perkebunan	61.352	230.220
5.	Semak belukar	33.241	53.042
6.	Tanah kosong	0	0
7.	Perairan/kolam	4.330	493
8.	Lahan Terbuka	1.449	3.474
9.	Tambak	457	173
10.	Pertambangan	50.562	54.312

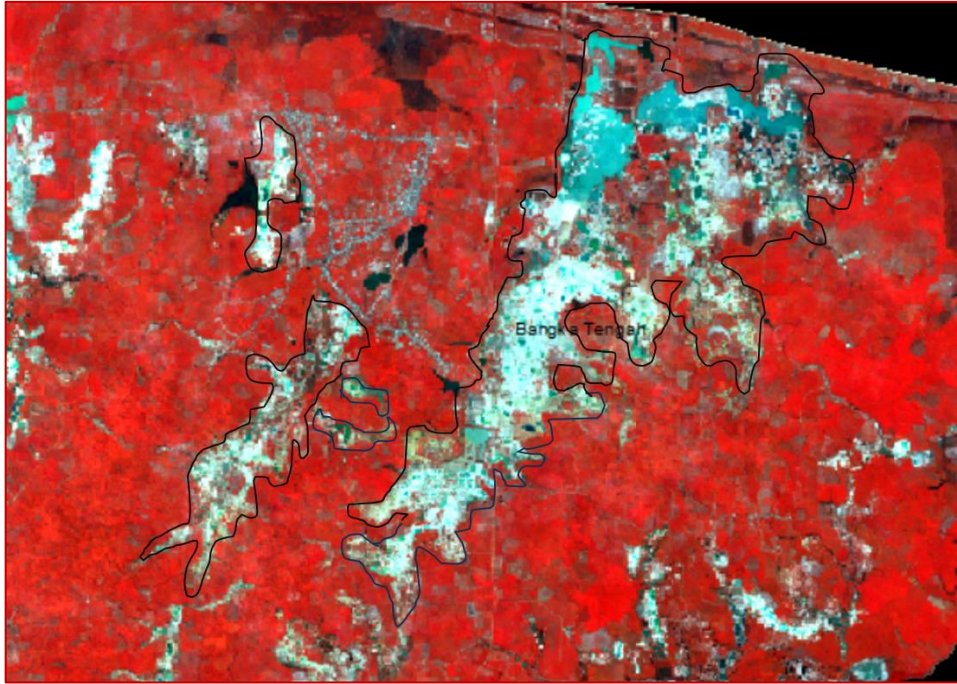
Sumber: IGT Pola Ruang Kawasan Pertanian RTRW Prov Kep Bangka Belitung Tahun 2014-2034, IGT Penutup Lahan Tahun 2020 dan 2021- BPKH Wil XIII Pangkalpinang, data diolah (luas lama) ; IGT Pola Ruang RTRW 2024-2044, IGT Penutup Lahan Tahun 2022 - BPKHTL XIII Pangkalpinang (luas baru)



Dari tabel di atas terlihat adanya penurunan luasan permukiman yang sangat signifikan dari 19.814 hektar menjadi 2.207 hektar yang disebabkan karena pada kolom luas lama menggunakan pola ruang RTRW tahun 2014-2034 sedangkan kolom luas baru sudah menggunakan pola ruang RTRW tahun 2024-2044, dalam artian ada perubahan luasan pola ruang pertanian yang berdampak pada turunnya luas eksisting permukiman yang sudah dikeluarkan dr kawasan permukiman. Selain itu terdapat peningkatan luasan perkebunan yang naik secara signifikan dari 61.352 hektar menjadi 230.220 hektar, dari hasil analisis sepertinya kenaikan luasan perkebunan tersebut dikarenakan dalam pola ruang RTRW terbaru, kawasan pertanian berisi kegiatan perkebunan juga sehingga penutup lahan perkebunan yang tumpang tindih dengan pola ruang kawasan pertanian pada akhirnya akan dikelompokkan sebagai bagian dari kawasan pertanian.

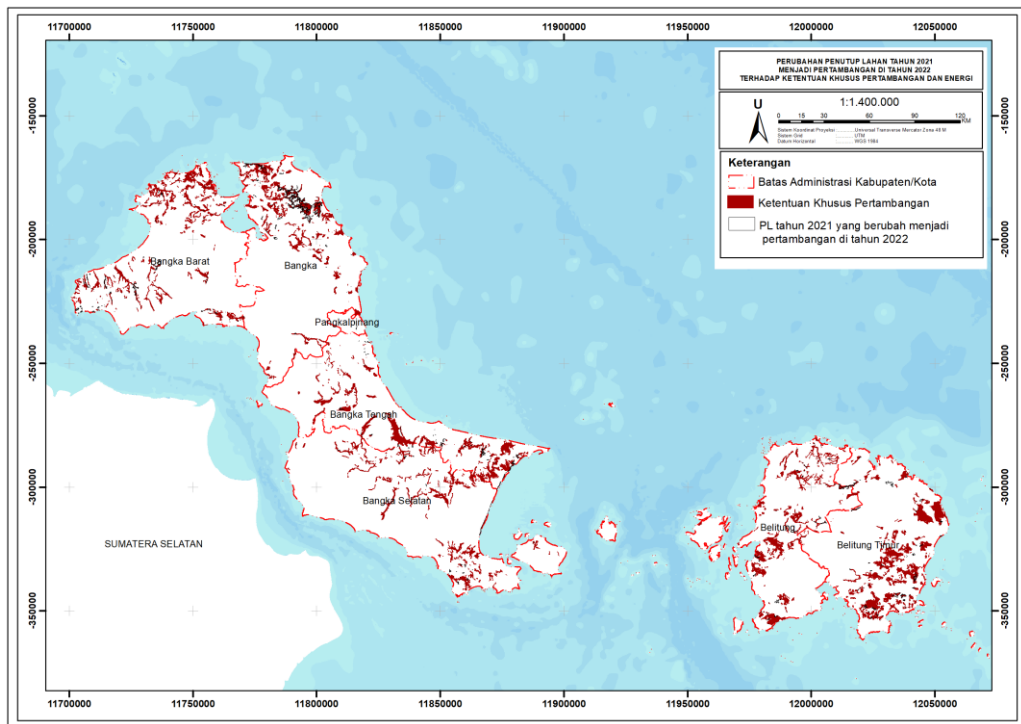
2. Alih Fungsi Lahan Menjadi Pertambangan

Kepulauan Bangka Belitung sangat terkenal dengan potensi mineral timahnya. Faktor ekonomi terkait dengan besarnya keuntungan yang didapatkan dari sektor ini membuat banyaknya penutup lahan utamanya yang bervegetasi yang beralih fungsi menjadi lahan pertambangan illegal. Selain itu aktivitas penambangan illegal juga berlangsung di lahan reklamasi yang seharusnya steril dari kegiatan tersebut. Melalui interpretasi citra secara visual, terlihat aktivitas penambangan membentuk pola spasial memanjang mengikuti jaringan sungai yang memang dibutuhkan saat proses pencucian bijih timah yang sekaligus membawa lumpur hasil proses penambangan tersebut ke arah hilir sungai sehingga mengakibatkan terjadinya sedimentasi atau pendangkalan sungai.



Gambar 2.1. 9 Pola Sebaran Areal Pertambangan Timah dari Citra Sentinel 2A MSI RGB 832 Perekaman 4 Sseptember 2023
Sumber: esa copernicus, diakses tahun 2024

Berdasarkan analisis spasial tumpang susun penutup lahan tahun 2021 dan 2022 diketahui bahwa terdapat kenaikan luasan lahan pertambangan sebesar 5.602 hektar yang didominasi berada di wilayah Kabupaten Bangka. Sementara itu jika dikaitkan dengan permasalahan alih fungsi lahan maka selanjutnya analisis spasial perubahan penutup lahan tersebut perlu dibandingkan dengan pola ruangnya. Dalam pola ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024-2044, pola ruang kawasan pertambangan dan energi yang ditampilkan berupa void dengan unit pemetaan terkecil sesuai dengan teknis pemetaan pada skala 1:250.000 yaitu seluas 156,25 hektar sedangkan di luar itu selanjutnya masuk dalam ketentuan khusus pertambangan dan energi. Jika selanjutnya perubahan penutup lahan tahun 2021-2022 dibandingkan dengan ketentuan khusus tersebut maka dapat diketahui apakah lokasi alih fungsi lahan menjadi pertambangan tersebut sudah memenuhi kesesuaian pola ruangnya atau tidak.



Gambar 2.1. 10 Perubahan Penutup Lahan Tahun 2021 Menjadi Pertambangan Di Tahun 2022 Terhadap Ketentuan Khusus Pertambangan Dan Energi
sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2022, BPKHTL wilayah XIII; Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024-2044, DPUPRPRKP

Gambar di atas memperlihatkan sebaran alih fungsi lahan di tahun 2021 menjadi pertambangan di tahun 2022 terhadap ketentuan khusus pertambangan dan energi dan secara perhitungan diperoleh informasi luasan alih fungsi lahan di tahun 2021 menjadi pertambangan di tahun 2022 yang berada di luar lokasi ketentuan khusus pertambangan dan energi yaitu sebesar 1.623 hektar sehingga dapat diindikasikan terjadi ketidaksesuaian antara eksisting penutup lahan terhadap pola ruangnya.

3. Alih fungsi lahan menjadi perkebunan

Hingga saat ini kelapa sawit masih menjadi komoditas utama sektor perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Produktivitasnya menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya perusahaan kelapa sawit skala besar serta peningkatan produksinya. Penambahan luas kebun sawit tersebut membuktikan minat masyarakat mengembangkan sektor sawit cukup besar

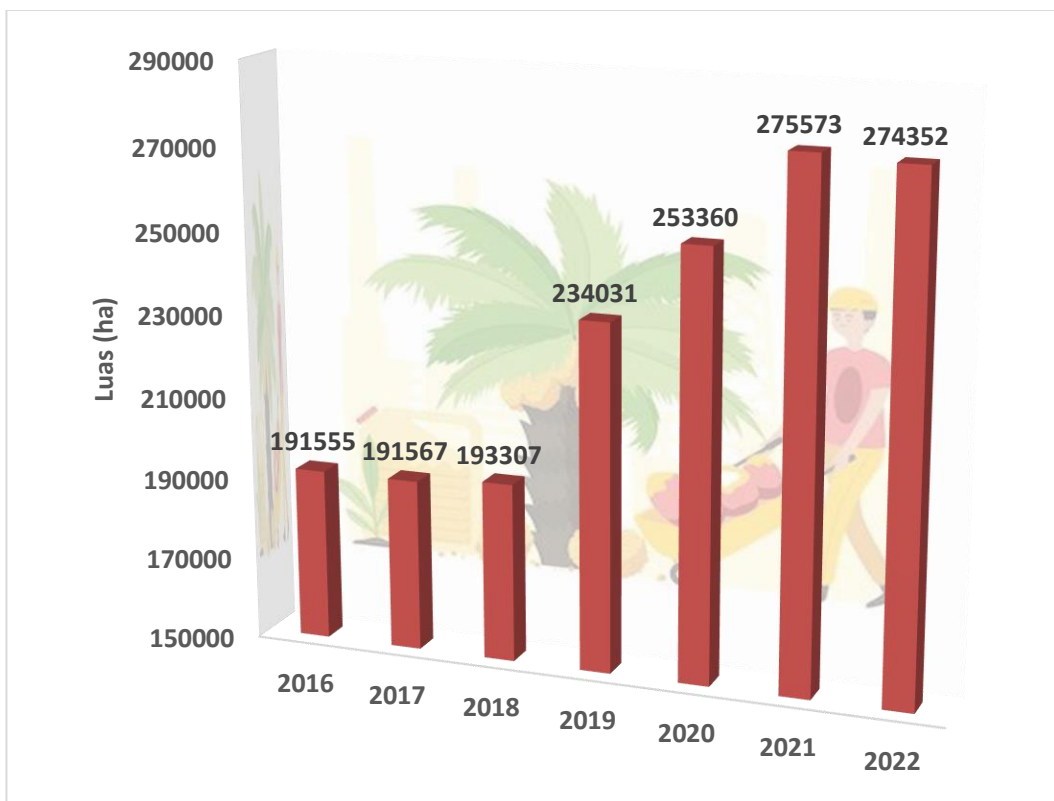


yang didorong oleh asumsi investasi ekonomi masa depan yang berkelanjutan. Hal ini dibuktikan pula oleh signifikannya realisasi investasi pada tahun 2022 yang mencapai 8,17 triliun dimana salah satu sektor yang mendominasi yaitu sektor perkebunan.



Gambar 2.1. 11 Penutup lahan pertambangan yang mulai berubah menjadi perkebunan di Kabupaten Bangka

Sumber: CSRT Maxar – Google Earth, diakses 2022



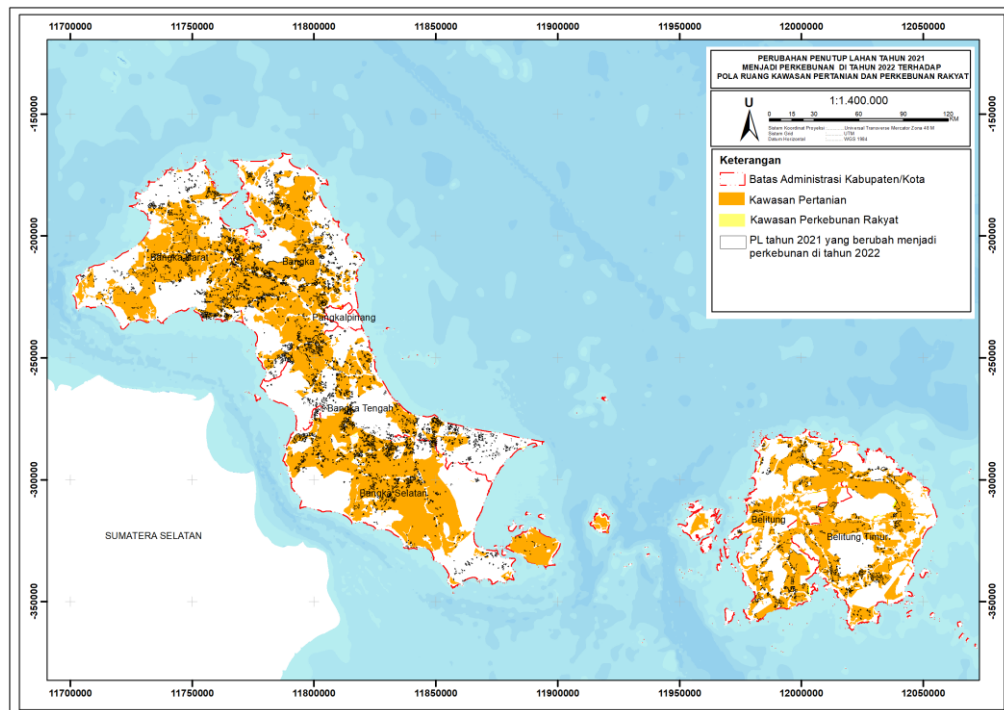
Gambar 2.1. 12 Peningkatan luasan Perkebunan tahun 2016 – 2022

Sumber: IGT penutup lahan tahun 2016-2021, BPKHTL wilayah XIII Pangkalpinang(data diolah)



Sepanjang tahun 2016- 2022 terjadi dinamika perubahan luasan perkebunan. Antara tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi peningkatan luasan yang signifikan dari perkebunan yaitu mencapai 40.724 hektar. Sementara itu antara tahun 2020 ke 2021, perkebunan meningkat luasannya hingga mencapai 22.213 hektar. Peningkatan luasan perkebunan ini merupakan hasil alih fungsi penutup lahan yang sebagian besar didominasi oleh perubahan pertanian lahan kering campur semak sebesar 12.845 hektar; belukar sebesar 7.807 hektar, belukar rawa sebesar 2.488 hektar, lahan terbuka sebesar 2.763 hektar; pertambangan sebesar 3.145 hektar serta beberapa penutup lahan lainnya. Namun di sisi lain terdapat pula konversi perkebunan menjadi pertambangan sekitar 921 hektar mengindikasikan terjadinya peralihan mata pencaharian dimana penambangan dipandang lebih cepat menghasilkan dibandingkan berkebun.

Selanjutnya jika melihat rentang waktu tahun 2021 ke 2022 maka justru terlihat terhadap penurunan luasan perkebunan seluas 1.221 hektar yang disebabkan peralihan penutup lahannya menjadi pertambangan, permukiman maupun pertanian lahan kering, namun demikian pada bahasan ini akan tetap dianalisis seberapa luas alih fungsi lahan menjadi perkebunan jika dibandingkan dengan pola ruang peruntukannya.

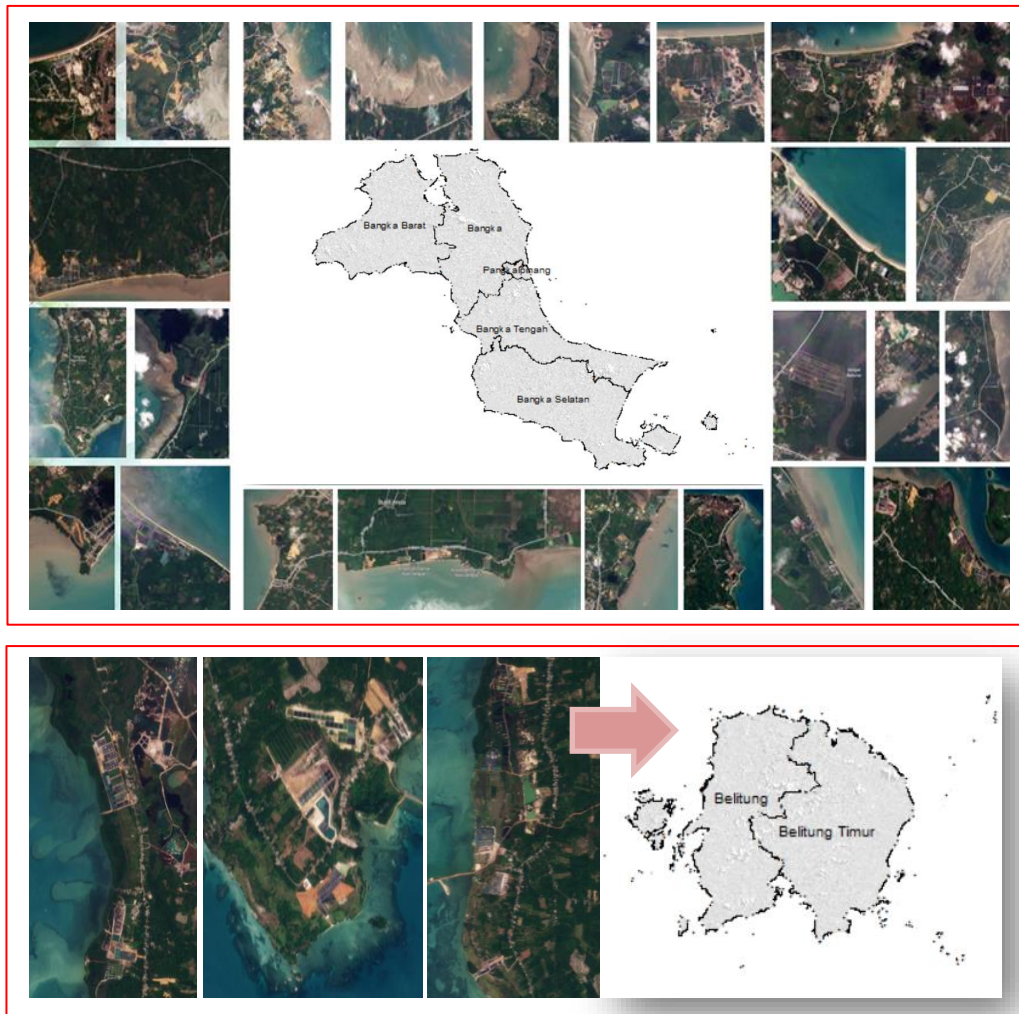


Gambar 2.1. 13 Perubahan Penutup Lahan Tahun 2021 Menjadi Perkebunan Di Tahun 2022 Terhadap Pola Ruang Pertanian dan Perkebunan Rakyat
Sumber: DPUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, data diolah 2023

Berdasarkan pola ruangnya yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan diatur dalam 2 macam pola ruang yaitu pola ruang pertanian dan pola ruang perkebunan rakyat dengan total luasan mencapai 778.062 hektar. Alih fungsi lahan di tahun 2021 menjadi lahan perkebunan di tahun 2022 terhadap pola ruang kawasan perkebunan rakyat dan pertanian diperlihatkan sebarannya pada gambar di atas. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis spasial diperoleh informasi luasan alih fungsi lahan di tahun 2021 menjadi perkebunan di tahun 2022 yang berada di luar lokasi pola ruang kawasan perkebunan rakyat dan pertanian yaitu sebesar 16.298 hektar sehingga dapat diindikasikan terjadi ketidaksesuaian antara eksisting penutup lahan terhadap pola ruangnya.



4. Alih Fungsi Lahan menjadi Tambak di Wilayah Pesisir



Gambar 2.1. 14 Persebaran tambak udang di pesisir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Perekaman Citra PlanetScope
Sumber: planetlabs, diakses tahun 2022-2023

Kegiatan budidaya udang vaname di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dipandang mempunyai prospek keuntungan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi pengajuan izin memang terdapat penurunan namun demikian untuk diketahui bahwa faktanya banyak kegiatan budidaya udang vaname yang sudah eksisting di lapangan namun belum mengurus perizinan. Dari segi perekonomian, adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah namun di sisi lain, dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut harus



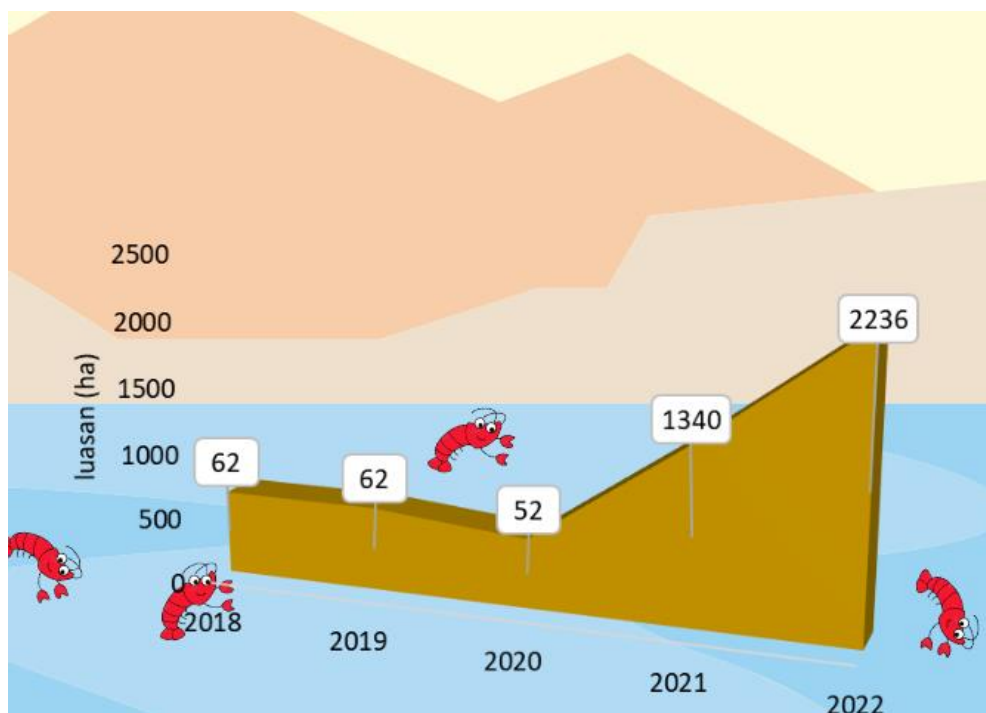
mendapatkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekosistem pesisir.

Dengan semakin bertambahnya jenis usaha/ kegiatan tersebut sementara ketersediaan ruang sesuai dengan peruntukannya cenderung terbatas maka pelanggaran terhadap penataan ruang merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Alih fungsi lahan berkenaan dengan massifnya perkembangan usaha budidaya udang vaname ini menjadi salah satu *pressure* terhadap lingkungan.



Gambar 2.1. 15 Tambak Udang Vaname Di Kabupaten Bangka
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Berdasarkan data spasial penutup lahan KLHK, dalam rentang waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 luasan tambak udang cenderung mengalami peningkatan terutama di Pulau Bangka. Adapun perbandingan luasan tambak tiap tahunnya disajikan pada Gambar 2.1. 16 berikut ini



Gambar 2.1. 16 Perbandingan luasan tambak tahun 2018 – 2022
Sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2018-2021, BPKHTL wilayah XIII (data diolah)

Luasan tambak mulai terlihat meningkat secara signifikan dalam rentang tahun 2020 hingga 2021 dengan kenaikan luasan mencapai 818 hektar dan pada rentang tahun 2021-2022 peningkatan kembali terjadi hingga mencapai 896 hektar. Peningkatan luasan tambak di tahun 2021 merupakan hasil perubahan penutup lahan lainnya yang didominasi oleh perubahan belukar seluas 175,4 hektar; hutan rawa sekunder seluas 100,6 hektar; pertanian lahan kering campur semak seluas 187,46 hektar; belukar rawa seluas 92,4 hektar serta beberapa penutup lahan lainnya. Hutan mangrove sekunder merupakan salah satu kelas penutup lahan yang turut mengalami konversi menjadi tambak walaupun jumlahnya tidak terlalu besar yaitu seluas kira-kira 11,04 hektar. Angka ini dapat saja bertambah semakin besar jika pengawasan terhadap izin usaha atau kegiatan tidak diperketat. Dengan bertambahnya luasan tersebut sekaligus menandakan kontribusi tambak dalam deforestasi hutan khususnya di wilayah pesisir.

Tahun 2022 kenaikan luasan tambak merupakan kontribusi dari mulai maraknya aktivitas budidaya udang vaname di Pulau Belitung. Hasil



identifikasi dan interpretasi citra planetscope pada perekaman desember 2022 sudah terlihat 10 lokasi eksisting tambak udang vaname di Pulau Belitung khususnya di Desa Tanjung Kelumpang Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur dengan perkiraan luasan hasil deliniasi sebesar ± 152 hektar.



Gambar 2.1. 17 Tambak Udang Vaname Eksisting di Kabupaten Belitung Timur Berdasarkan Citra Planetscope Perekaman 18 Desember 2022
Sumber: planetlabs, 2023

Dari gambar diatas terlihat indikasi alih fungsi lahan tambak di kawasan sempadan pantai yang merupakan kawasan perlindungan setempat (gambar 2.1.17). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21/Permen-KP/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai bahwa lebar sempadan pantai minimal 100 meter ke arah darat.



Gambar 2.1. 18 Tambak Udang Vaname Eksisting di Kabupaten Belitung Timur Di Wilayah Sempadan Pantai
Sumber: citra planetscope perekaman 18 Desember 2022, planetlabs, 2023



Pemanfaatan ruang di wilayah pesisir untuk kegiatan budidaya udang vaname idealnya harus memperhatikan kesesuaian lokasi berdasarkan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam penataan ruang. Namun demikian kenyataan yang ada di lapangan justru kebalikannya. Kegiatan tambak tersebut beberapa diantaranya telah merambah hingga masuk ke wilayah sempadan pantai yang merupakan kawasan perlindungan setempat menurut rencana tata ruang ataupun berekspansi hingga memasuki kawasan hutan lindung. Ditambah lagi tidak semua tambak yang sudah eksisting mempunyai perizinan yang jelas khususnya di bidang lingkungan. Hal ini merupakan salah satu tantangan dalam upaya monitoring atau pengawasan terhadap kegiatan tersebut karena ketidaklengkapan data pemrakarsa maupun lokasi kegiatan.

H. Alih Fungsi Lahan Permukiman

Dalam beberapa tahun terakhir permukiman cenderung mengalami peningkatan luasan seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Peningkatan drastis lebih dari 13.000 ditunjukkan dalam rentang waktu tahun 2021 ke 2022. Hal ini menandakan pesatnya kebutuhan akan lahan terbangun sekaligus trend peningkatan pertumbuhan penduduk. Dengan terbatasnya lahan yang tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk tersebut harus menjadi perhatian yang serius apalagi negara kita diprediksi akan mengalami bonus demografi di tahun 2045 yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%nya dalam usia produktif (15-64) sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif (usia di bawah 14 tahun) dan diatas 64 tahun.



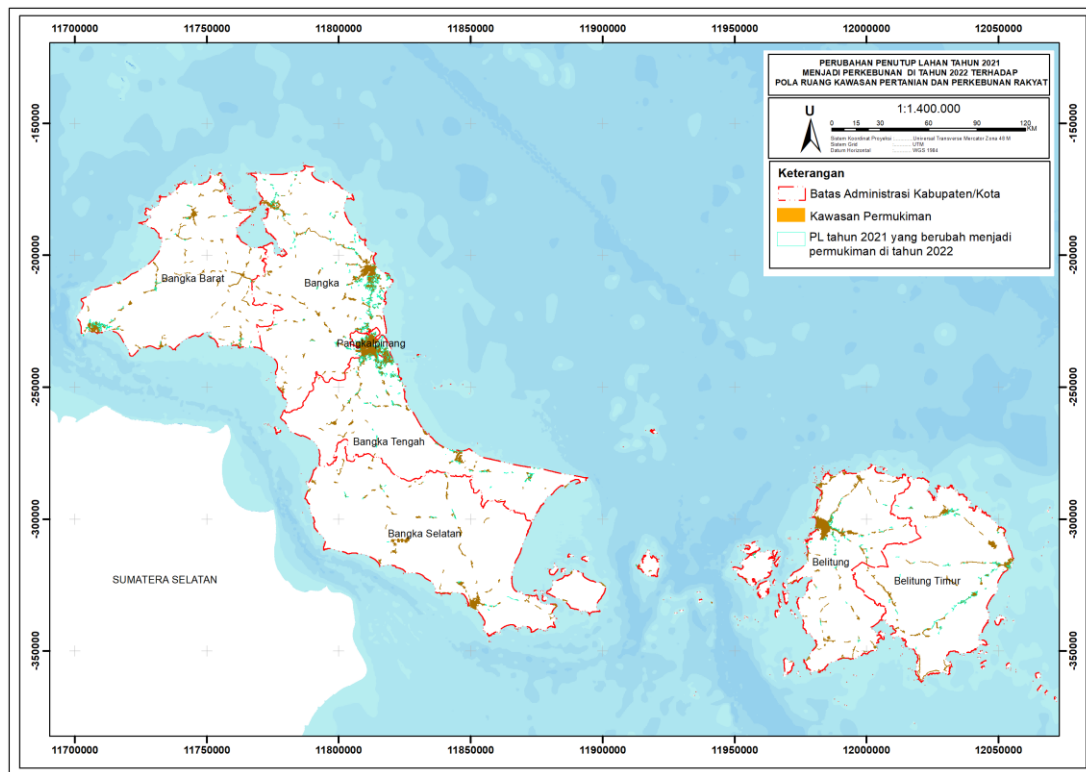
Gambar 2.1. 19 Trend Peningkatan Luasan Penutup Lahan Permukiman Tahun 2018-2022

Sumber: IGT Penutup Lahan Tahun 2018-2022, BKHTL Wilayah XIII, data diolah 2023

Sementara itu berdasarkan jumlahnya, pola ruang permukiman dalam revisi RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024-2044 mempunyai luasan sebesar 151.410,2 hektar. Berdasarkan hasil analisis spasial perubahan penutup lahan tahun 2021-2022 dengan pola ruang RTRW tersebut maka diketahui terdapat sekitar 1.204 hektar alih fungsi lahan menjadi permukiman di tahun 2022 yang terjadi di luar pola ruang permukiman. Dari angka tersebut paling tinggi alih fungsi lahannya terjadi di Kota Pangkalpinang yaitu sebesar 344 hektar, disusul Kabupaten Bangka sebesar 341 hektar dan sejumlah kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Informasi ini menunjukkan tingginya permintaan lahan terbangun di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka sekaligus menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap pola ruangnya dan beberapa pola ruang lain yang tidak berkesesuaian yaitu pola ruang kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan pertanian hingga kawasan ekosistem mangrove. Distribusi spasial alih fungsi lahan



menjadi permukiman di tahun 2022 terhadap pola ruang kawasan permukiman diperlihatkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1. 20 Perubahan Penutup Lahan Tahun 2021 Menjadi Permukiman Di Tahun 2022 Terhadap Pola Ruang Permukiman

Sumber: DPUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, data diolah 2023

B. Alih Fungsi Lahan Terhadap Kawasan Hutan

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan dibedakan menjadi fungsi lindung, fungsi produksi dan fungsi konservasi. Luas kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan fungsinya disajikan pada tabel 2.1.4 di bawah ini.



Tabel 2.1. 4 Luasan Hutan Berdasarkan Fungsinya

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1.	Hutan Produksi	435.892,06
2.	Hutan Lindung	186.426,25
3.	Taman Nasional	17.244,84
4.	Taman Wisata Alam	7.155,11
5.	Taman Buru	
6.	Cagar Alam	
7.	Suaka Margasatwa	
8.	Taman Hutan Raya	11.953,89

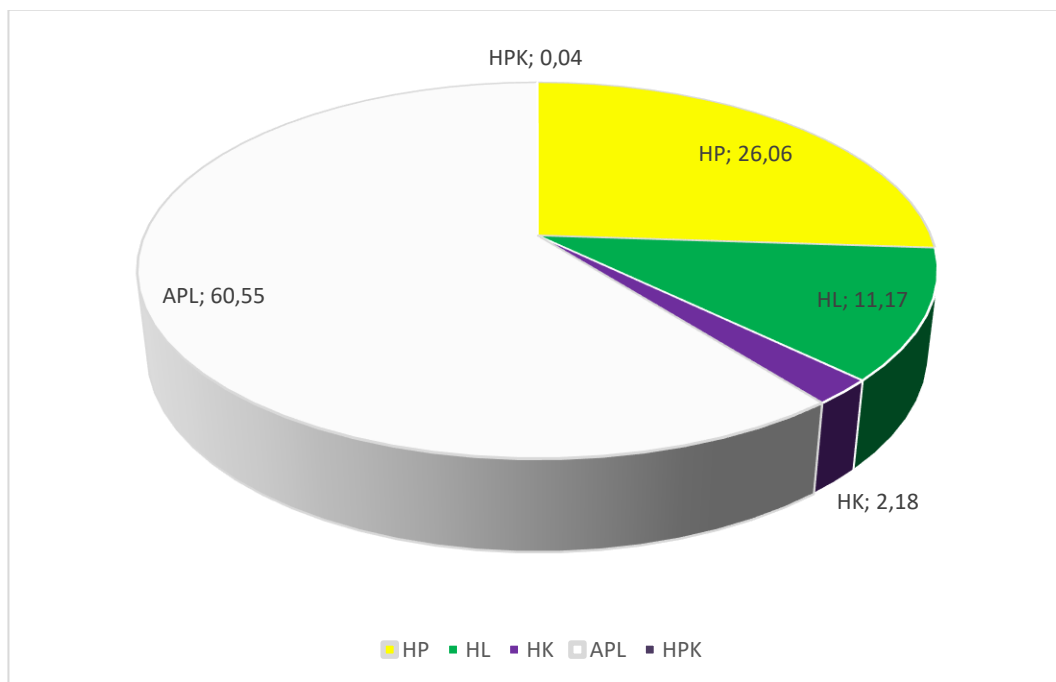
Sumber: IGT Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai SK 6614/MENLHK/KUH/PLA/10/2021, BPKTL XIII Pangkalpinang 2022

Jika dilihat dari tabel di atas, hutan produksi mempunyai luasan yang paling besar dibandingkan kawasan hutan lindung dan hutan konservasi dengan persentase sekitar 26,06% dari luas keseluruhan kawasan hutan yang tentu saja telah memperhitungkan luasan areal penggunaan lain didalamnya sementara untuk porsi hutan produksi yang dapat dikonversi, hutan lindung dan hutan konservasi masing-masing berada pada kisaran persentase 0,04%; 11,2 % dan 2,18%. Fungsi hutan produksi terbagi atas hutan produksi tetap dengan luasan sekitar 435.197 hektar serta hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luasan sekitar 695 hektar. selain itu terdapat areal penggunaan lain menempati porsi luasan sekitar 60,55% dari luasan keseluruhan kawasan hutan.

Jika dibandingkan dengan data pemutakhiran kawasan hutan hingga tahun 2018, terdapat kenaikan luasan hutan produksi maupun hutan lindung masing-masing sekitar 2.819 hektar dan 895 hektar. Peningkatan luasan khususnya di dalam kawasan hutan lindung merupakan hal positif dalam penataan kawasan hutan, dan sejatinya kawasan hutan dengan fungsi lindung dan konservasi seharusnya berupa penutup lahan hutan namun demikian alih fungsi lahan terus terjadi sehingga kondisi eksisting



penutup lahan di beberapa wilayah sudah tidak merepresentasikan fungsi dari kawasan hutan itu sendiri.



Gambar 2.1. 21 Persentase Fungsi Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

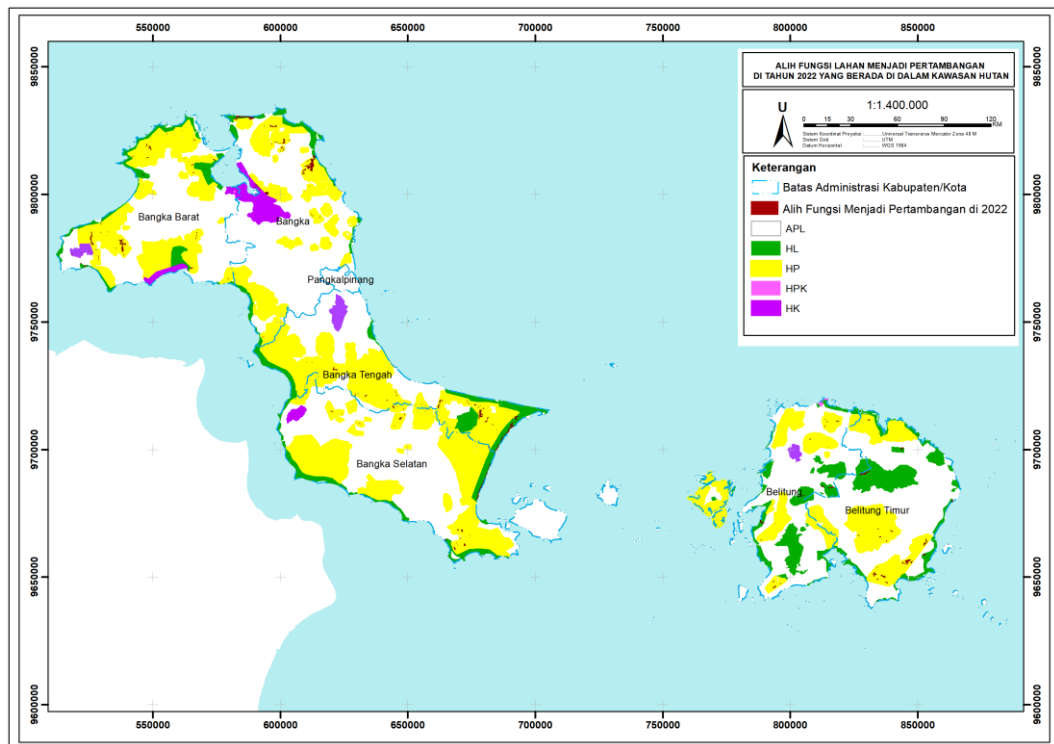
Sumber: : IGT Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai SK 6614/MENLHK/KUH/PLA/10/2021, BPKHTL XIII Pangkalpinang 2022

Mengacu pada Gambar 2.1.21 di atas, sepanjang tahun 2021-2022, perubahan penutup lahan paling banyak terjadi di kawasan Area Penggunaan Lain (APL) yaitu seluas 139.108 hektar atau setara dengan 8,33% yang dilanjutkan dengan perubahan penutup lahan dalam kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 44.780 hektar atau setara dengan 2,68%; pada kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 24.405 hektar atau setara dengan 1,46%; pada kawasan Hutan Konservasi (HK) seluas 3.7.61 hektar atau setara dengan 0,22% serta pada kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 88,4 hektar atau setara dengan 0,005%. Persentase luasan tersebut diatas jika dibandingkan porsi perubahan penutup lahan terhadap luas kawasan hutan dan areal penggunaan lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kondisi eksisting penutup lahan saat ini banyak yang tidak merepresentasikan fungsi



kawasan hutannya. Hasil analisis spasial memperlihatkan adanya indikasi kegiatan antropogenik manusia yang merambah masuk ke dalam hutan. Dalam rentang waktu tahun 2021-2022 diantaranya terjadi peningkatan luasan lahan permukiman dan pertambangan. Terhadap aktivitas pertambangan, dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa dalam rentang waktu tahun 2021-2022 telah terjadi alih fungsi lahan menjadi lahan terbuka pertambangan yang berada di dalam kawasan hutan dengan total luasan mencapai 3.676 hektar pada perhitungan luasan polygon menggunakan proyeksi *cylindrical equal area*. Dari luasan tersebut, alih fungsi ini banyak terjadi di dalam fungsi hutan produksi yaitu seluas 2.415 hektar; hutan lindung seluas 1.236 hektar; hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 1,04 hektar serta merambah hingga hutan konservasi seluas 24 hektar. Berdasarkan PermenLHK 7/2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan pasal 373 disebutkan bahwa kegiatan pertambangan mineral dan batubara dilakukan dengan ketentuan: a. dalam Kawasan Hutan Produksi dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan/atau penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah; b. dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan tertentu. Ketentuan tertentu ini diantaranya berkenaan dengan izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Dengan demikian jelas bahwa alih fungsi lahan menjadi pertambangan di tahun 2022 terutama yang berada dalam fungsi hutan lindung maupun hutan konservasi adalah kegiatan ilegal serta yang berada di dalam fungsi hutan produksi juga dapat bersifat ilegal jika tidak memenuhi sejumlah ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan dimaksud. berdasarkan sebarannya secara administrasi, praktek alih fungsi lahan menjadi pertambangan yang merambah hingga ke dalam fungsi kawasan hutan ini sebagian besar didominasi terjadi di wilayah Kabupaten Bangka. Visualisasi spasial persebaran alih fungsi lahan ini diperlihatkan pada gambar berikut ini.



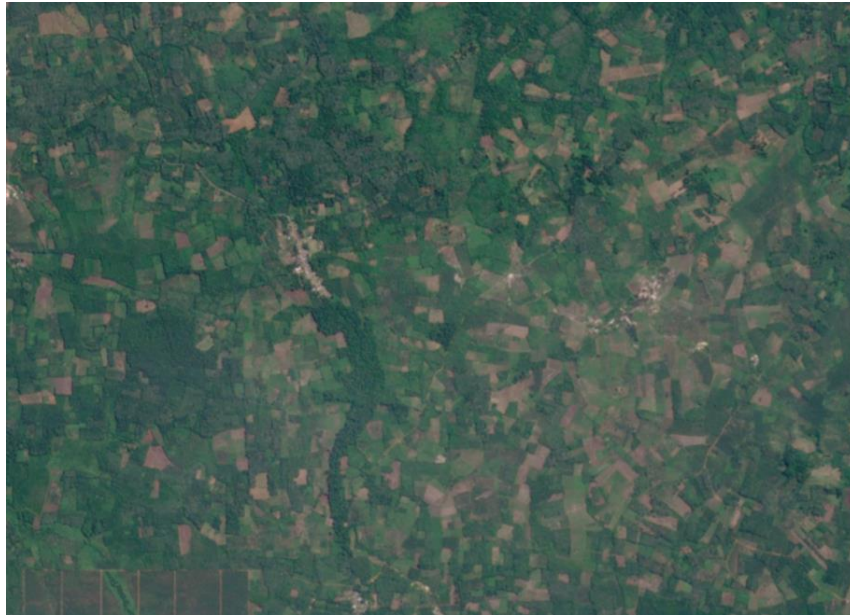
Gambar 2.1. 22 Alih Fungsi Lahan Menjadi Pertambangan di Tahun 2022 yang berada dalam Fungsi Kawasan Hutan

Sumber: IGT Penutup Lahan KLHK tahun 2021 dan 2022; IGT Fungsi Kawasan Hutan SK MenLHK 6614/2021, data diolah 2024

Sementara itu jika melihat riwayat timeseries sebelumnya, hasil analisis spasial dan simulasi secara sederhana tentang kondisi penutup lahan setelah perubahan terhadap fungsi kawasan hutan memperlihatkan sejumlah dinamika perubahan penutup lahan yang terjadi sepanjang tahun 2020-2021 menghasilkan angka kesesuaian sebesar 70% terhadap fungsi kawasan dan artinya sebesar 30% luasan penutup lahan tidak sesuai dengan fungsi kawasan hutannya yang ditempatinya. Jika dikonversi dalam luasan maka dari sekitar total luasan 1,677 juta hektar, sekitar 496.719 hektar diantaranya tidak saling berkesesuaian antara penutup lahan dan fungsi kawasan hutannya. Dari luasan 496.719 hektar tersebut, 43,2% nya merupakan penutup lahan pertanian lahan kering campur semak. Hal ini sekaligus menandakan kegiatan ladang berpindah maupun pembukaan kebun campuran banyak dilakukan di dalam fungsi kawasan hutan khususnya hutan produksi. Simulasi sederhana ini mengabaikan kelas



penutup lahan tubuh air dan rawa yang dianggap sesuai berada di kawasan areal penggunaan lain.



Gambar 2.1. 23 Pertanian Lahan Kering Campur Semak dalam Kawasan Hutan Produksi
Sumber: Citra PlanetScope RGB 321 Perekaman Juli 2022, Planetlabs 2023

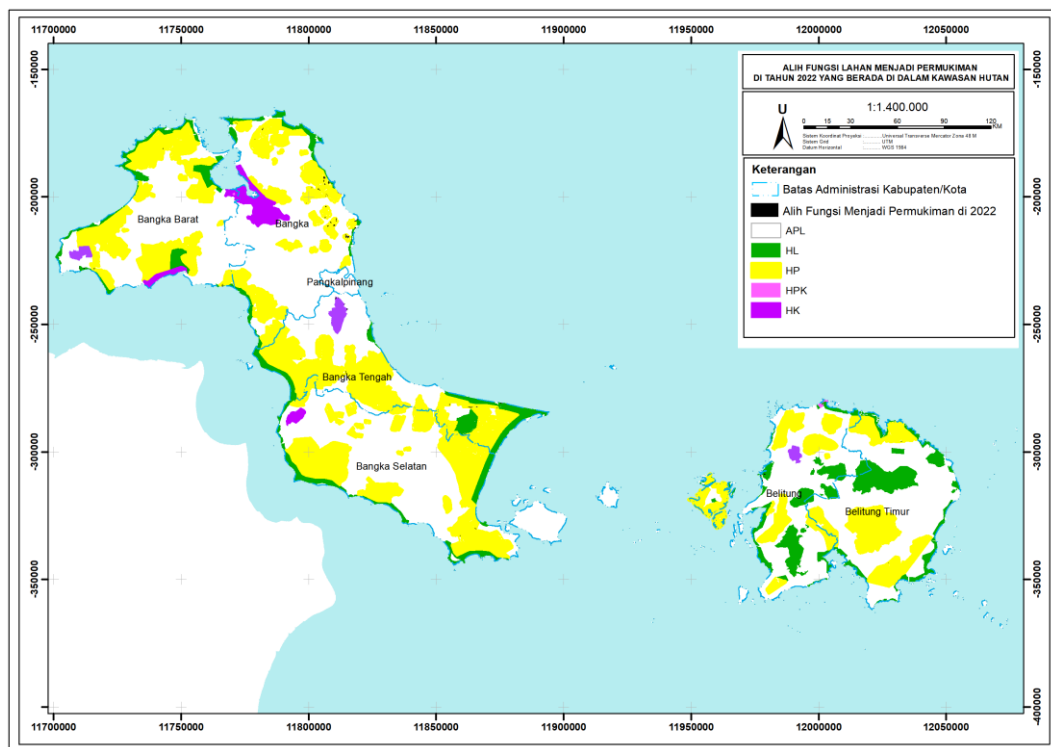
Selanjutnya, hasil analisis spasial juga memperlihatkan kesesuaian kelas penutup lahan hutan yang mengalami perubahan sepanjang 2020-2021 di dalam kawasan hutan dan areal penggunaan lain sebesar 89% sehingga luasan penutup lahan hutan yang tidak berkesesuaian terhadap fungsi kawasannya yaitu sebesar 11%. Diantara kesemua kelas penutup lahan hutan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kelas hutan lahan kering sekunder mempunyai tingkat ketidaksesuaian paling besar yaitu mencapai 17.450 hektar karena lokasinya berada di areal penggunaan lain atau APL yang rawan untuk dialihfungsikan terutama untuk kegiatan berusaha.

Sementara itu alih fungsi lahan menjadi pertambangan maupun perkebunan serta permukiman yang berada di dalam kawasan hutan hingga kini terus terjadi yang dapat dilihat dari hasil tumpang susun data spasial penutup lahan tahun 2020 – 2021 dan data spasial kawasan hutan bahwa aktivitas pertambangan yang merambah hingga masuk ke dalam kawasan



hutan lindung yaitu seluas 14.680 hektar bahkan hingga ke hutan konservasi seluas 1.719 hektar.

Selain pertambangan, alih fungsi lahan menjadi permukiman di tahun 2022 juga terindikasi masuk hingga ke dalam kawasan hutan. Berdasarkan hasil analisis spasial penutup lahan tahun 2021-2022 serta fungsi kawasan hutan sesuai SK MenLHK 6614/2021 terdapat sekitar 253 hektar alih fungsi lahan menjadi permukiman di tahun 2022 yang berada di dalam fungsi kawasan hutan. Dari luasan tersebut, fungsi hutan yang paling banyak terganggu adalah hutan produksi seluas 130 hektar disusul hutan lindung 99 hektar serta hutan konservasi dalam hal ini wilayah taman nasional seluas 24,5 hektar. Persebaran alih fungsi lahan menjadi permukiman di tahun 2022 yang berada di dalam fungsi kawasan hutan tersebut disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.1. 24 Alih Fungsi Lahan Menjadi Permukiman Di Tahun 2022 Yang Berada Di Dalam Fungsi Kawasan Hutan

Sumber: IGT Penutup Lahan KLHK tahun 2021 dan 2022; IGT Fungsi Kawasan Hutan SK MenLHK 6614/2021, data diolah 2024

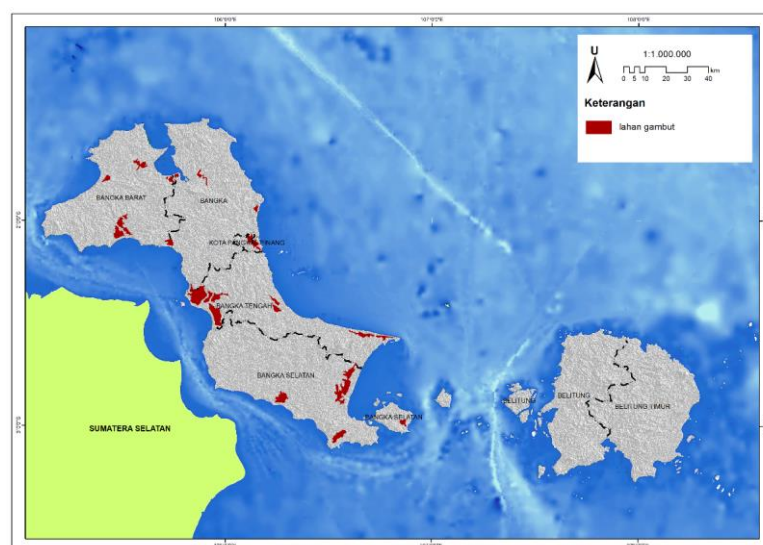
Di sisi lain, adanya permukiman dalam kawasan hutan turut menjadi salah satu bukti bahwa alih fungsi lahan dalam kawasan hutan terus terjadi.



Sekitar 1.270 hektar permukiman berada di dalam kawasan hutan lindung dan 42 hektar berada dalam kawasan hutan konservasi. Maraknya aktivitas manusia yang merambah hingga masuk ke dalam kawasan hutan terutama yang sifatnya melanggar ketentuan seperti penambangan secara terbuka, penebangan pohon secara liar, pembukaan lahan dengan cara dibakar dan sebagainya tentunya menjadi tekanan yang berat bagi lingkungan.

C. Alih Fungsi Lahan Gambut

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut disebutkan bahwa gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi secara tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, lahan gambut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebar di 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bangka Barat, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, serta Kota Pangkalpinang dengan total luasan hampir mencapai 45 ribu hektar dengan kedalaman rata-rata kurang dari 3 meter atau terkategori gambut dangkal (Gambar 2.1.25).



Gambar 2.1. 25 Sebaran lahan gambut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: BBSLDP Kementerian Pertanian-2012, data diperoleh tahun 2020



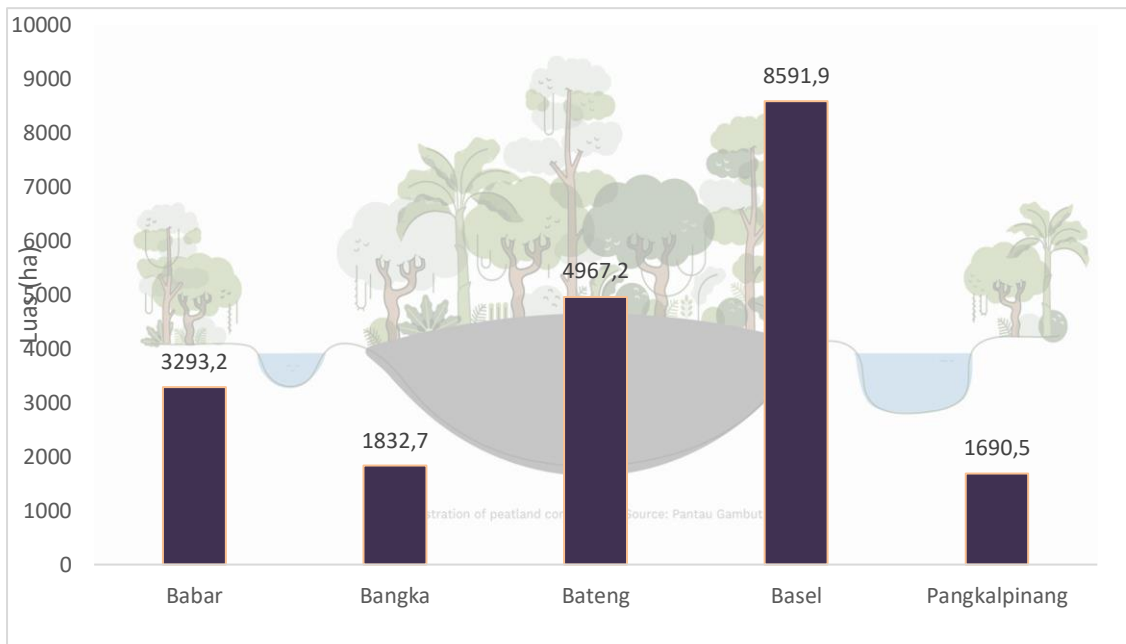
Hasil analisis spasial antara peta sebaran lahan gambut dengan peta penutup lahan tahun 2022 memperlihatkan alih fungsi lahan juga turut terjadi di lahan gambut dengan perkiraan luasan sekitar 20.376 hektar yang beralih fungsi menjadi lahan pertambangan, perkebunan, pertanian lahan kering, permukiman hingga tambak. Hal ini berarti kerusakan akibat alih fungsi lahan tersebut sudah hampir mencapai 50% dari luas lahan gambut yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2.1. 26 Aktivitas Penambangan di dalam lahan gambut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Kementerian Pertanian, 2012; CSRT Maxar Tech via google earth, diakses 2023

Secara administrasi, Kabupaten Bangka Selatan merupakan wilayah dengan kerusakan gambut terluas yaitu sebesar 8.592 hektar atau mengalami peningkatan luasan kerusakan sebesar 329 hektar dari tahun sebelumnya dengan luasan kerusakan sebesar 8.263 hektar. Secara rinci luasan kerusakan akibat alih fungsi lahan gambut di masing-masing kabupaten/kota disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 2.1. 27 Kerusakan Lahan Gambut di Kabupaten/Kota
Sumber: IGT penutup lahan BPKH wilayah XIII tahun 2021, peta lahan gambut Kementan, data diolah

Hasil analisis tumpang susun antara data spasial penutup lahan tahun 2022 dengan peta lahan gambut yang dikeluarkan oleh Kementan diketahui bahwa secara umum kerusakan lahan gambut yang terjadi di wilayah Kabupaten di Pulau Bangka disebabkan karena aktivitas yang berlangsung diatasnya dalam bentuk perkebunan, pertambangan, ladang berpindah atau pertanian lahan kering campur semak atau lahan terbuka diusahakan sedangkan di kota Pangkalpinang, pengembangan lahan terbangun untuk pemukiman maupun kegiatan budidaya udang vaname turut berkontribusi terhadap terjadinya kerusakan lahan gambut di wilayah tersebut. Alih fungsi lahan gambut menjadi lahan perkebunan diindikasikan spesifik merujuk pada komoditas kelapa sawit yang memang membutuhkan banyak air dalam budidayanya sementara itu alih fungsi lahan gambut menjadi permukiman merupakan salah satu bukti bahwa terbatasnya lahan di kota Pangkalpinang sementara kebutuhan lahan untuk permukiman yang terus meningkat menjadikan ekspansi ke lahan gambut tidak dapat dihindari.



D. Pembukaan Lahan dengan Cara Bakar



Gambar 2.1. 28 Perbandingan Hotspot yang Teridentifikasi Sepanjang Tahun 2022 (kiri) dan tahun 2023 (kanan) Berdasarkan Citra Satelit Aqua, NOAA20, SNPP, dan MODIS
Sumber: brin.go.id, diakses 2024

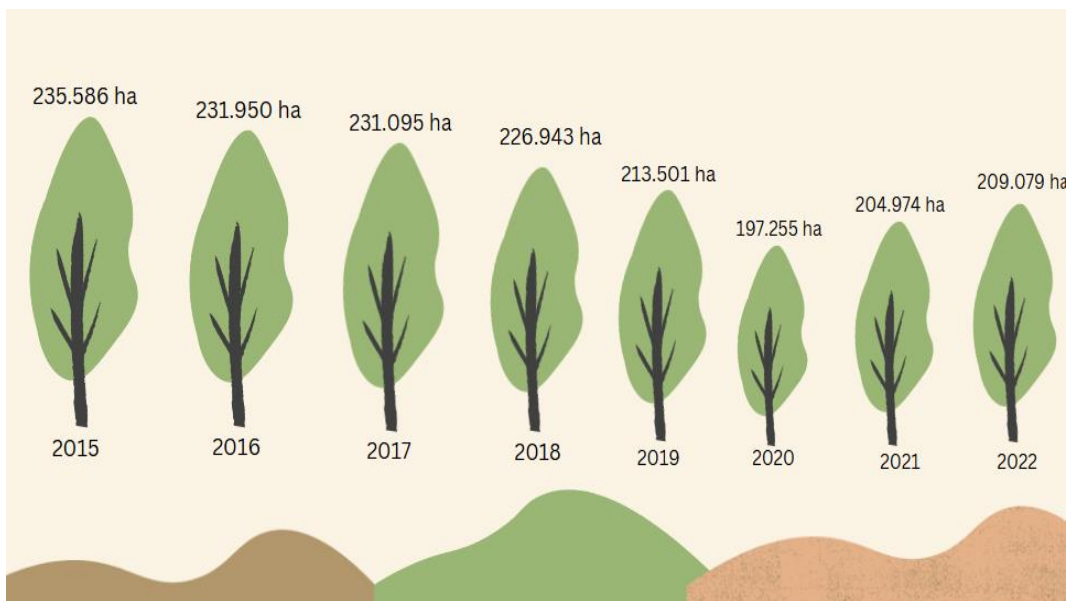
Pembukaan lahan dengan cara dibakar merupakan salah satu cara mengalih fungsi lahan yang banyak terjadi di wilayah di Indonesia termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan kebun baru karena dipandang lebih ekonomis daripada menggunakan alat berat yang biayanya lebih tinggi. Sepanjang tahun 2023, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat lebih dari 900 kejadian karhutla, sedangkan pada gambar di atas dapat kita lihat perbandingan lokasi sebaran hotspot atau titik panas yang terindikasi dari citra satelit Aqua, S.NPP, NOAA-20 pada tingkat kepercayaan tinggi yang diunduh dari laman brin.go.id. Faktor musim kemarau serta El Nino tidak dapat dilepaskan dari penyebab tingginya karhutla yang terjadi tahun 2023 namun demikian terdapat indikasi kesengajaan dalam bencana ini diantaranya yaitu kejadian karhutla yang terjadi di malam hari dimana secara suhu udara menjadi lebih dingin daripada siang hari namun justru terjadi kebakaran. Pola pikir masyarakat dalam membuka lahan baru dengan cara dibakar memang masih terus terjadi. Praktik ini masih dipandang cukup efektif dalam mengalih fungsikan lahan karena tidak membutuhkan biaya yang relatif besar dibandingkan dengan penggunaan alat berat.



Gambar 2.1. 29 Karhutla pada malam hari di Kecamatan Koba,
Kabupaten Bangka Tengah
Sumber: Bangkapos, 7 Agustus 2023

Deforestasi dan Degradasi Hutan

Deforestasi dan degradasi pada hakikatnya merupakan bentuk alih fungsi penutup lahan hutan yang sengaja ditempatkan pada pokok sub bahasan tersendiri di luar pembahasan alih fungsi lahan yang telah disampaikan sebelumnya. Hal yang menjadi pertimbangan yaitu tidak semua penutup lahan hutan berada dalam kawasan lindung baik itu secara tata ruang maupun status fungsi kawasan hutan. Deforestasi adalah perubahan dari hutan menjadi non hutan sedangkan degradasi adalah penurunan kualitas hutan yang ditandai dengan terjadinya perubahan dari kelas hutan primer menjadi hutan tipe sekunder. Secara umum ditinjau dari data spasial penutup lahan tahun 2020-2021, hutan terlihat mengalami perkembangan positif yang ditandai oleh kenaikan luasan sebesar 7.719 hektar yaitu pada tahun 2020 sebesar 197.255 hektar menjadi 204.974 hektar di tahun 2021. Namun demikian karena penutup lahan cenderung untuk mengalami perubahan sering dengan perkembangan wilayah dan perekonomian maka deforestasi maupun degradasi hutan hampir tidak dapat dihindari.



Gambar 2.1. 30 Perubahan luasan penutup hutan tahun 2015 – 2022

Sumber: IGT penutup lahan Prov Kep Babel Skala 1:250.000 Tahun 2015-2021, BPKHTL wil XIII, (data diolah)

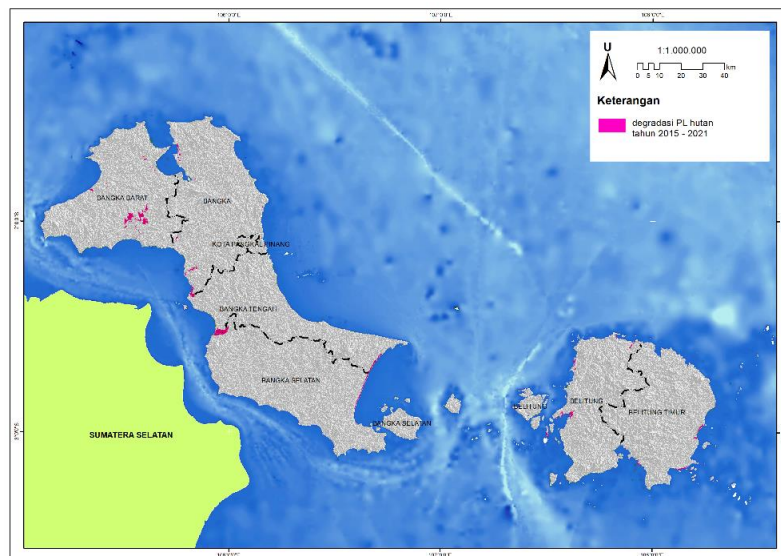
Deforestasi merupakan proses penurunan luasan hutan sebagai akibat alih fungsi menjadi lahan non hutan seperti infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan dan perkebunan (Wahyuni, Herpita & Suranto, 2021). Dari gambar di atas terlihat secara time series perubahan luas penutup lahan hutan sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2022 yang secara umum menunjukkan adanya penurunan luasan dari tahun 2015 hingga 2020, dan selanjutnya dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2022 trend kenaikan luasan hutan mulai terjadi.

Hasil analisis spasial antara 2 data penutup lahan digital tahun 2015 dan tahun 2021 diketahui bahwa secara umum dalam kurun tahun 2015 ke 2021 telah terjadi deforestasi hutan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luasan sekitar 62.378 hektar namun demikian jika melihat luasan penutup lahan hutan setiap tahunnya maka selisih pengurangan luas hutan tidak mencapai angka 62.378 hektar, hal ini disebabkan karena dinamika perubahan penutup lahan tiap tahunnya dan memungkinkan semak belukar berkembang menjadi hutan sekunder jika tidak diganggu oleh manusia.



Selanjutnya dalam rentang waktu tahun 2021 hingga 2022 terjadi peningkatan luasan hutan sebesar 4.105 hektar, namun dengan kenaikan luasan tersebut tidak dapat serta merta dianggap bahwa tidak terjadi kasus deforestasi ataupun degradasi kawasan hutan. Lebih detil hasil analisis spasial tersebut menunjukkan sebetulnya telah terjadi deforestasi di semua jenis penutup lahan hutan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dari kesemuanya, hutan mangrove sekunder yang paling banyak mengalami deforestasi yaitu seluas 4.149 hektar. Di sisi lain suksesi belukar banyak terjadi sehingga meningkatkan luasan hutan lahan kering sekunder. Hal ini salah satunya yang membuat naiknya luasan penutup lahan hutan di tahun 2022.

Degradasi hutan merupakan penurunan kualitas penutup lahan dari penutup lahan hutan yang masih alami atau primer menjadi hutan sekunder. Kelas penutup hutan primer sesuai dengan klasifikasi penutup lahan oleh KLHK yaitu terdiri atas hutan lahan kering primer, hutan mangrove primer dan hutan rawa primer. Diantara penutup lahan tersebut, hutan mangrove primer yang paling banyak mengalami degradasi hutan. Secara administrasi, Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah yang paling banyak mengalami degradasi hutan dalam rentang tahun 2015 ke 2021.



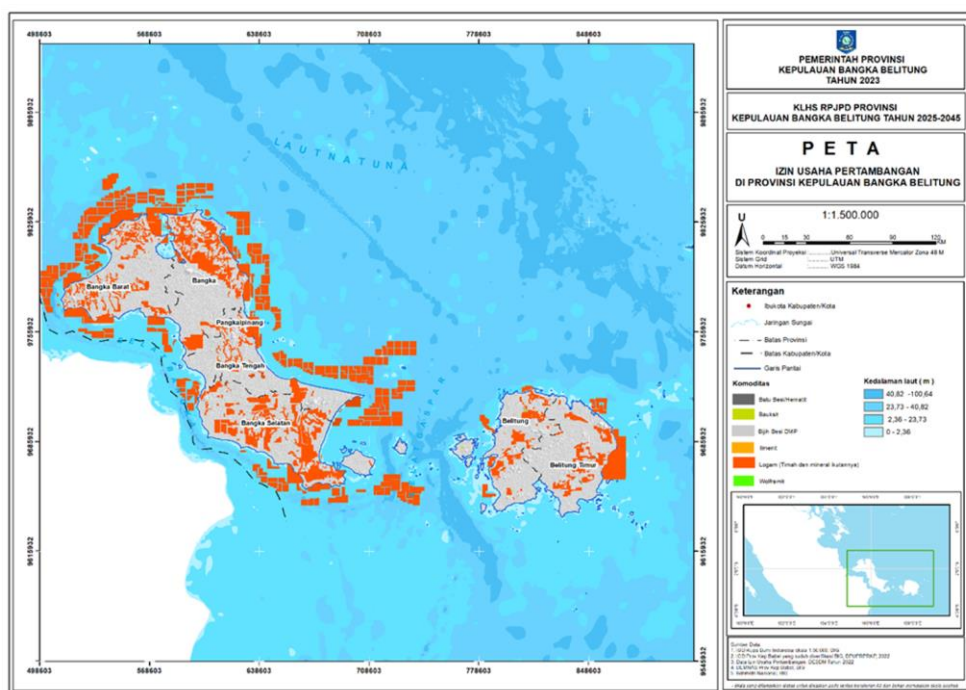
Gambar 2.1. 31 Degradasi Hutan tahun 2015-2021

Sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2015 dan 2021, BPKHTL wilayah XIII (data diolah)



II.1.2.2 Eksploitasi Lahan

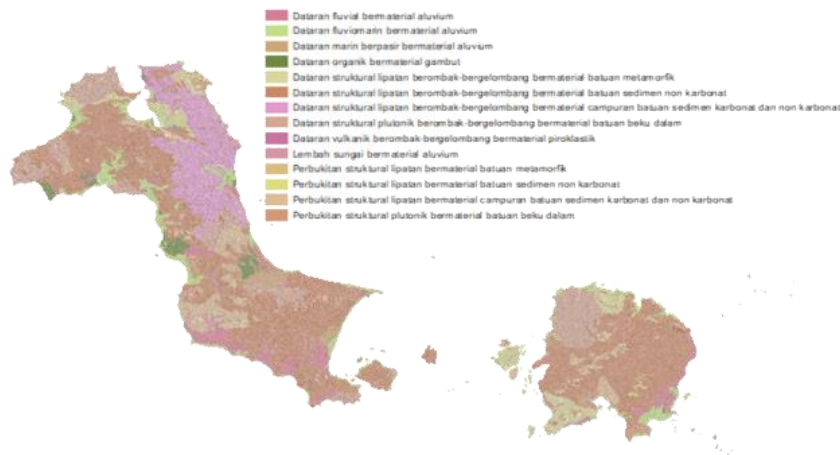
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak lama telah dikenal sebagai salah satu produsen timah terbesar di dunia dengan potensi cadangan timah alluvial yang tersebar di hampir seluruh wilayah administrasi kabupaten/kota. Disamping timah, terdapat pula potensi mineral bahan galian non logam lainnya yang sebagian besar didominasi oleh pasir bangunan, pasir kuarsa, granit serta tanah liat.



Gambar 2.1. 32 Wilayah Izin Pertambangan Mineral Logam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

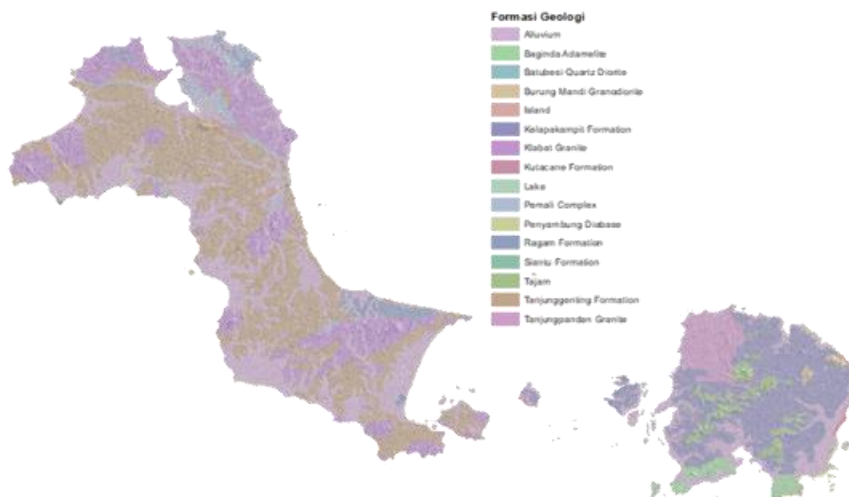
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Potensi mineral ini dapat diindikasikan dari kondisi tanah, geologi hingga bentang alam wilayah. Berdasarkan bentang alamnya (Gambar 2.1.42), wilayah Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh jenis bentang alam dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat dengan luasan mencapai 729.113 hektar atau setara dengan 43,7% dari luas total wilayah menurut hasil analisis spasial tersebut.



Gambar 2.1. 33 Kondisi Bentang Alam di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: IGT Bentang Alam sesuai dengan SK 1272/2021 KLHK, 2022

Tipikal bentang alam ini terbentuk di atas struktur tektonik kulit bumi berupa lipatan yang mempunyai relief berombak hingga bergelombang dan tersusun atas batuan sedimen non karbonat seperti batu pasir, tanah liat, atau jenis lainnya.



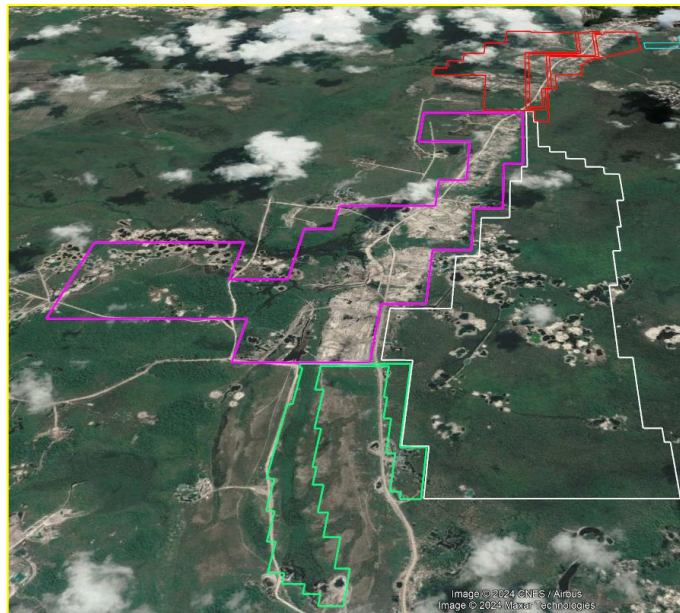
Gambar 2.1. 34 Formasi Geologi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, DPUPRPRKP

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditandatangani pada tanggal 11 April 2022, pemerintah pusat resmi mendelegasikan sejumlah kewenangan terkait



perizinan pertambangan ke daerah. Dengan adanya kebijakan ini maka pemerintah provinsi memiliki kewenangan izin usaha pertambangan mineral non logam setelah sebelumnya kewenangan tersebut ditarik ke pemerintah pusat melalui revisi UU Minerba atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam pasal 2 disebutkan pendelegasian meliputi pemberian sertifikat dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan serta pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan. Pemberian standar ini meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan di bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan serta reklamasi pasca tambang. Selanjutnya pemberian izin salah satunya terdiri atas izin usaha pertambangan (IUP) dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan, berada dalam satu provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil.



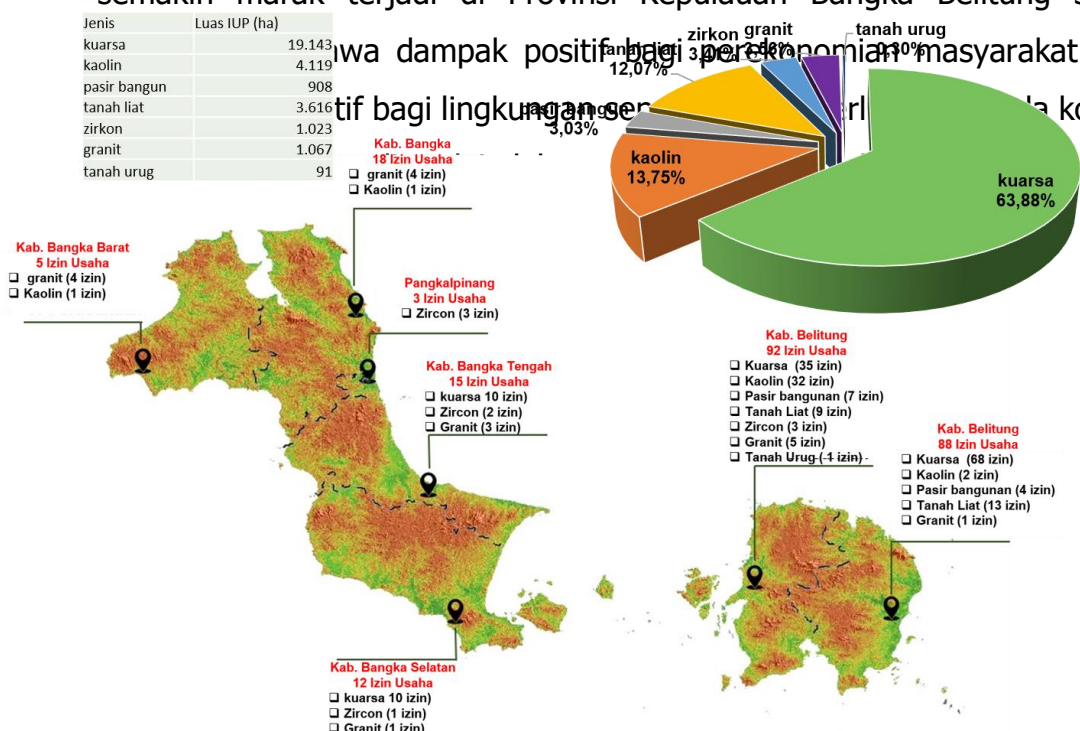
Gambar 2.1. 35 Lokasi Beberapa IUP Mineral Non Logam Kuarsa di Kabupaten Belitung Timur

Sumber: CSRT – Maxar Tech, Google Earth diakses 2024; IUP Mineral Kuarsa, DLHK Prov Kep Babel 2023



Pendelegasian ini memicu angin segar bagi pelaku usaha pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengurus perizinan di daerah tanpa harus melalui proses yang cukup panjang di pemerintah pusat. Sebagai imbas dari adanya kebijakan tersebut terlihat adanya peningkatan pengurusan izin usaha pertambangan mineral non logam sepanjang tahun 2022 yang didominasi oleh mineral pasir kuarsa. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Eksplorasi mineral baik logam maupun non logam yang saat ini semakin marak terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain itu dampak positif bagi perekonomian masyarakat juga terlihat bagi lingkungan.



Gambar 2.1. 36 Sebaran Izin Penambangan Mineral Non Logam Sepanjang Tahun 2022
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

II.1.3 State

Wilayah RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi wilayah darat dan laut dengan total keseluruhan luasan mencapai 5.924.202,6 hektar. Rinciannya yaitu wilayah darat yang terdiri atas tujuh kabupaten/kota dengan luas wilayah total mencapai 1.669.255,8 ha dan



wilayah laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang luasnya mencapai 4.254.946,8 ha. Ketujuh Kabupaten/Kota yang merupakan bagian wilayah darat dalam perencanaan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044 adalah Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Adapun luasan masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. 5 Luas Wilayah Darat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Luas (ha)
1.	Bangka	302.669,09
2.	Bangka Barat	285.153,7
3.	Bangka Selatan	359.727,7
4.	Bangka Tengah	255.590,8
5.	Belitung	226.976,8
6.	Belitung Timur	258.688,3
7.	Pangkalpinang	10.449,4

Sumber: Batas Administrasi RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPUPRPRKP tahun 2022

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun revisi tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengintegrasikan wilayah darat dan laut. Selanjutnya pembagian pola ruang darat dan laut dalam revisi tata ruang tersebut diperlihatkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. 6 Pola Ruang Revisi RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044

Pola Ruang	Luas (ha)
Badan Air	3.050,1
Kawasan Cagar Budaya	102,2
Kawasan Ekosistem Mangrove	17.475,7
Kawasan Hutan Produksi	435.851,7
Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Konservasi	19,1



Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pariwisata	27,1
Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perikanan	4,2
Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Transportasi	0,8
Kawasan Konservasi	570.828,1
Kawasan Konservasi/Kawasan Pariwisata	28,0
Kawasan Konservasi/Kawasan Perikanan	85,9
Kawasan Lindung Geologi	2.672,9
Kawasan Pariwisata	159.046,2
Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	92.682,2
Kawasan Perikanan	2.925.390,1
Kawasan Perkebunan Rakyat	1.597,8
Kawasan Perlindungan Setempat	1.872,9
Kawasan Permukiman	151.410,2
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	851,5
Kawasan Pertambangan dan Energi	538.412,8
Kawasan Pertanian	776.464,5
Kawasan Peruntukan Industri	8.051,2
Kawasan Transportasi	51.196,2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	186.266,1
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Konservasi	2,6
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pariwisata	127,6
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan	515,8
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertambangan dan Energi	62,5
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Transportasi	106,6
Jumlah	5.924.202,6

Sumber: IGT Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044, DPUPRPRKP tahun 2023

Integrasi pola ruang darat dan laut ini telah mengakomodir alokasi ruang laut seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 – 2040 atau dengan kata lain bahwa tidak ada perubahan alokasi ruang di wilayah laut dan terhadap indikasi perubahan garis pantai maka istilah yang digunakan adalah penyesuaian ruang laut. Berdasarkan peraturan tersebut, rencana alokasi ruang pada RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 4.259.119,352 ha dengan pembagian alokasi ruang meliputi Kawasan Pemanfaatan Umum seluas 3.442.413,189 ha; Kawasan Konservasi seluas



627.612.93 ha; serta Alur Laut dengan luasan 189.093.23 ha. Rincian alokasi ruang di dalam RZWP3K terlihat pada Tabel 2.1.5 berikut ini.

Tabel 2.1. 7 Alokasi Pemanfaatan Ruang Laut Dalam RZWP3K

Alokasi ruang	Zona	Luas (ha)
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	138327,1
	Pelabuhan	49638,78
	Pertambangan	477077,6
	Perikanan Budidaya	185627,6
	Perikanan Tangkap	2591,38
	Industri	310,26
Kawasan Konservasi		627.612,9
Alur Laut		189.093,2
Luas Keseluruhan		425.119

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

II.1.3.1 Kondisi Eksisting Penutup Lahan

Hasil tumpang susun data spasial penutup lahan skala 1:250.000 tahun 2022 yang merupakan data termutakhir yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Bulan Juni 2024 dengan data spasial batas administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 memperlihatkan kondisi eksisting penutup lahan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1.8 berikut.

Tabel 2.1. 8 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama

No.	Kabupaten/	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bangka	13.329	1.123	163.949	55.953	25.162	3.427
2	Bangka Barat	9.296	1.423	148.155	55.066	35.435	1.531
3	Bangka Selatan	7.472	8.289	231.225	26.461	38.015	4.344



4	Bangka Tengah	8.341	61	110.973	39.697	23.041	516
5	Belitung	11.107	143	94.224	44.03	40.965	825
6	Belitung Timur	9.465	730	88.109	53.224	44.917	5.200
7	Kota Pangkal Pinang	5.789	0	3.355	5	574	497
	Jumlah	64.799	11.769	839.991	274.434	208.110	16.340

Sumber: IGT Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Skala 1:250.000 Tahun 2022cdf; Batas Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termutakhir sesuai Kepmendagri 050-145 Tahun 2022

Pada tabel diatas terlihat bahwa lahan kering mendominasi penutup/penggunaan lahan utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luasan mencapai 839.991 hektar atau setara dengan 53,2% dari total luasan penggunaan lahan pada tabel diatas. Jika dibandingkan dengan penutup lahan tahun sebelumnya yaitu 2021 maka terdapat penurunan luasan sebesar 29.967 hektar. Lahan kering yang dimaksud pada tabel diatas terdiri atas penutup lahan semak belukar, pertanian lahan kering serta pertanian lahan kering campur semak dengan porsi luasan terbesar berada di Kabupaten Bangka Selatan dan paling sedikit tentu saja di Kota Pangkalpinang. Dari ketiga jenis penutup lahan tersebut, kelas pertanian lahan kering campur semak mempunyai porsi luasan paling besar di semua kabupaten di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sekaligus menandakan bahwa sebagian besar masyarakat khususnya lokal memanfaatkan pekarangan dan tanah yang dimiliki untuk ditanami dengan vegetasi budidaya campuran ataupun pemanfaatan semak belukar untuk dijadikan ladang berpindah.



Gambar 2.1. 37 Kenampakan Pertanian Lahan Kering Campur Semak di Kabupaten Bangka

Sumber: Citra Planetscope perekaman 17 Agustus 2023

Lahan perkebunan merupakan penggunaan lahan utama terbesar kedua setelah lahan kering dengan luas mencapai 274.434 hektar dengan lokasi persebaran paling banyak di Kabupaten Bangka. Berdasarkan data timeseries tahun 2016 hingga tahun 2022, penutup lahan perkebunan menunjukkan tren kenaikan luasan dari tahun ke tahunnya.



Gambar 2.1. 38 Perkebunan di Kabupaten Bangka

Sumber: CSRT – Airbus perekaman Januari 2024, diakses melalui Google Earth, 2024



Penutup lahan terbesar ketiga setelah lahan kering dan lahan perkebunan yaitu lahan hutan. Kelas penutup lahan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada klasifikasi lahan KLHK terdiri atas hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer serta hutan rawa sekunder dengan luas total mencapai 208.110 hektar atau setara dengan 13,2% dari total luasan penggunaan lahan utama pada tabel diatas. Wilayah administrasi dengan penutup lahan hutan terluas berada di Kabupaten Belitung Timur dengan luasan mencapai 44.917 hektar.

Selanjutnya kelas lahan non pertanian yang terdiri atas kelas penutup lahan permukiman, pertambangan serta lahan terbuka menempati urutan keempat penggunaan lahan utama setelah lahan kering dan lahan perkebunan dengan luasan sebesar 226.604 hektar (14,4%). Dari beberapa kelas penutup lahan tersebut, luasan terbesar didominasi oleh pertambangan yang memang menjadi penunjang sektor perekonomian dengan melimpahnya cadangan sumber daya mineral logam dan non logam terutama timah, kaolin serta pasir kuarsa. Secara administrasi, Kabupaten Belitung Timur merupakan wilayah dengan luasan lahan non pertanian terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2.1. 39 Penutup Lahan Pertambangan di Kabupaten Bangka Tengah

Sumber: Citra PlanetScope Perekaman 16 Oktober 2023, Planetlabs diakses 2024



Dari sejumlah penutup/penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sawah mempunyai luasan paling kecil yaitu sebesar 11.769 hektar saja. Hal ini menandakan pertanian lahan basah bukan merupakan mata pencaharian masyarakat lokal yang utama dan bahan pangan khususnya beras masih mengandalkan suplai dari luar pulau.

Tabel 2.1. 9 Dinamika Perubahan Luasan Penutup Lahan Tahun 2018-2022

Kelas Tutupan Lahan	Luasan Penutup Lahan (ha)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Hutan Lahan Kering Primer	600,38	531,4	486,4	487	472
Hutan Lahan Kering Sekunder	113.693,50	101.828,4	83.887,9	87.155	88.070
Hutan mangrove primer	33.797,41	33.647,1	22.789,1	25.406	27.382
Hutan rawa primer	596,05	550,9	277,4	379	215
Belukar	295.434,88	298.426,0	306.131,8	153.918	156.943
Perkebunan	194.548,81	234.031,0	253.359,8	275.573	274.352
Permukiman	33.174,72	35.462,0	38.845,9	41.634	54.658
Lahan Terbuka	75.630,75	75.368,1	8.381,3	8.203	9.858
Savana	7.080,022	7.055,6	7.423,6	8.731	13.433
Tubuh Air	5.598,81	5.652,4	11.945,7	4.748	3.861
Hutan Mangrove sekunder	33.391,82	32.403,3	40.665,5	40.468	44.372
Hutan rawa sekunder	44.621,88	44.539,9	49.148,8	50.146	47.512
Belukar rawa	58.005,27	54.421,5	73.472,0	77.736	76.563
Pertanian Lahan Kering	58.111,87	54.938,6	56.855,2	52.731	37.163
Pertanian Lahan campur semak	556.362,38	530.689,0	544.496,3	663.321	645.851
Sawah	1.762,78	1.762,8	4.705,2	7.727	11.771
Tambak	628,38	628,4	522,2	1.336	2.236
Bandara	146,08	257,3	257,3	257	268
Transmigrasi	2.416,80	2.416,8	2.416,8	374	-
Pertambangan	144.783,81	146.426,2	155.168,3	156.399	162.002
Rawa	10.964,11	10.556,1	10.673,1	10.486	10.235
Total luasan data spasial (ha)	1.671.592,9	1.671.592,9	1.671.592,9	1.669.255,8	1.669.255,8

Sumber: IGT penutup lahan Prov. Kep Babel Tahun 2018-2022, BPKHTL Wilayah XIII

Secara umum dalam dinamika perubahan luasan penutup lahan terdapat 3 kategori analisis yaitu tren kenaikan luasan penutup lahan, tren penurunan luasan penutup lahan serta luasan penutup lahan yang tidak mengalami perubahan dari



tahun ke tahun atau cenderung tetap. Berdasarkan data yang ditampilkan diatas, tren kecenderungan penurunan luasan penutup lahan diantaranya dialami oleh penutup lahan Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Rawa Primer, Hutan Rawa Sekunder, Belukar, Transmigrasi, serta Pertanian Lahan Kering. Selanjutnya tren kenaikan luasan penutup lahan dialami oleh penutup lahan permukiman, pertambangan, hutan sekunder, hutan mangrove sekunder, sawah, serta Pertanian Lahan Kering Campur Semak. Sementara penutup lahan yang cenderung tidak berubah yaitu Bandara serta Rawa.

Dari data diatas juga dapat dilihat bahwa peningkatan luasan dalam rentang waktu lima tahun terakhir mayoritas dialami oleh kelas penutup lahan yang sifatnya buatan atau non alami. Sedangkan penurunan luasan dialami oleh kebalikannya yaitu penutup lahan alami. Dari sini dapat disimpulkan bahwa peranan manusia dalam proses perubahan penutup lahan sangat besar dalam kaitannya dengan peningkatan taraf perekonomian dibandingkan dengan proses perubahan yang secara alami terjadi pada penutup lahan tersebut yang tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berubah menjadi penutup lahan alami lainnya.

II.1.3.2 Kondisi Pesisir dan Laut

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu dari lima provinsi kepulauan di Indonesia yang dimana memiliki area laut dan pesisir yang relatif cukup luas. Wilayah laut didefinisikan sebagai wilayah perairan yang memiliki karakteristik air garam/asin dan merupakan wilayah pemisah antara dua pulau atau lebih. Menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No 3 Tahun 2020, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, sedangkan perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.



A. Kondisi Mangrove

Mangrove adalah ekosistem hutan bakau yang hidup di perairan pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut. Ekosistem ini sangat penting karena memiliki peran krusial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir. Mangrove berfungsi sebagai tempat berlindung bagi berbagai spesies laut, mengurangi dampak banjir dengan menyerap air, menyimpan karbon dari atmosfer serta mencegah erosi pantai.



Gambar 2.1. 40 Mangrove di Desa Belo Laut Kabupaten Bangka Barat
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

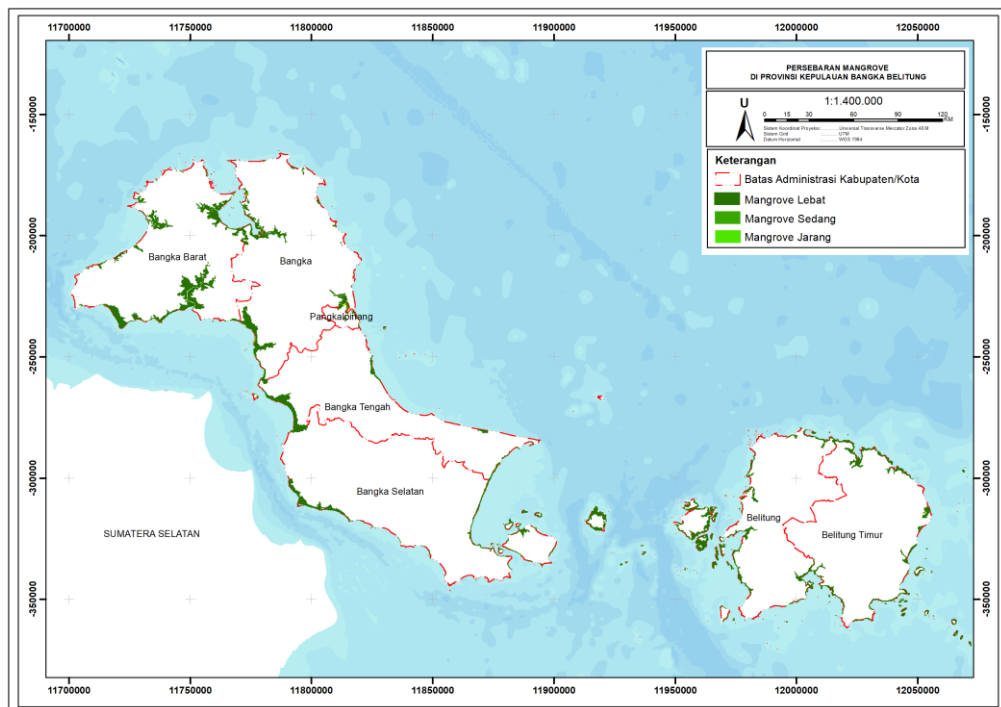
Berdasarkan dokumen awal RZWP-3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 disebutkan bahwa hasil analisis citra dan survei menunjukkan bahwa variasi jenis mangrove banyak ditemukan di Kabupaten Bangka Barat. Hasil survei di seluruh Kabupaten Bangka Barat ditemukan jenis *Rhizophora apiculata*, *Sonneratia alba*, *Rhizophora stylosa*, *Rhizophora mucronata*, *Bruguera gymnoriza*, *Bruguera cylindrical*, *Bruguera sp*, *Xylocarpus granatum*, *Sonneratia caseolaris*, *Avicennia alba*, *Avicennia marina* dan *Avicennia sp*. Dari kesemua jenis tersebut, jenis *Rhizophora apiculata* dan *Avicennia alba* yang paling mendominasi.

Sementara itu hasil survei lapangan di wilayah pesisir Kabupaten Belitung ditemukan 6 jenis mangrove yang dominan yaitu *Avicennia alba*,



Rhizophora apiculata, *Sonneratia alba*, *Rhizophora mucronata*, *Xylocarpus granatum* dan *Bruguiera gymnoriza* sedangkan di Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh jenis *Rhizophora apiculata*, *Rhizophora mucronata* dan *Lumnitzera littorea*.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove menyatakan bahwa salah satu upaya pengendalian untuk melindungi mangrove dari kerusakan adalah dengan mengetahui adanya tingkat kerusakan berdasarkan kriteria baku kerusakannya. Kriteria status mangrove baik yaitu yang berada pada kerapatan sangat padat dan sedang sementara itu status rusak jika kerapatan mangrove berada pada kelas jarang. Kriteria mangrove sangat padat terdiri atas penutupan $\geq 75\%$ dengan kerapatan ≥ 1500 pohon/hektar. Sementara itu kriteria sedang terdiri atas penutupan $\geq 50 - < 75\%$ dengan kerapatan $\geq 1000 - < 1500$ pohon/hektar sedangkan kriteria jarang terdiri atas penutupan $< 50\%$ dengan kerapatan < 1000 pohon/hektar.

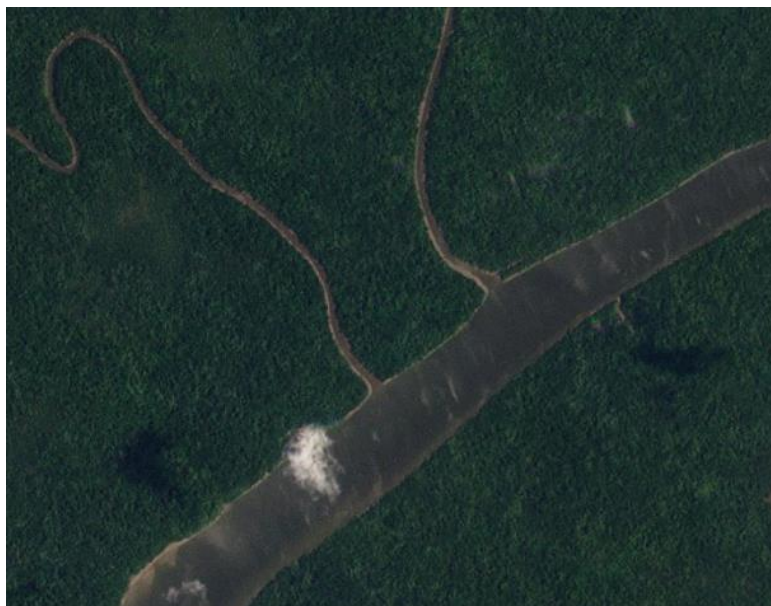


Gambar 2.1. 41 Persebaran Mangrove di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: BPDAS Baturusa Cerucuk 2024



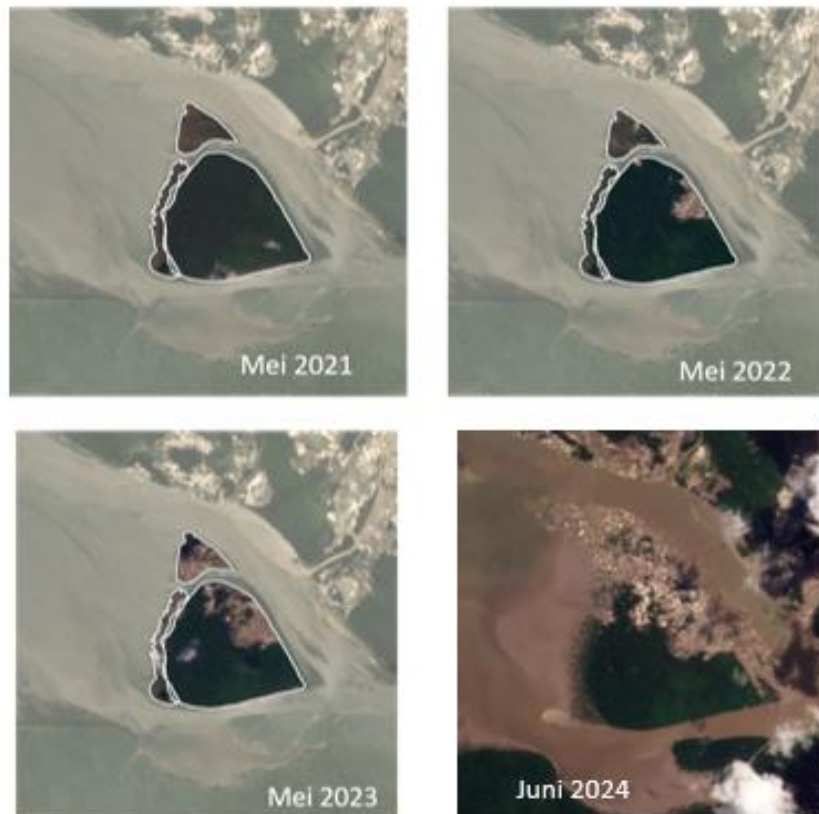
Gambar di atas memperlihatkan persebaran hutan mangrove berdasarkan informasi geospasial tematik mangrove yang berasal dari Balai Pengelolaan Aliran Sungai Baturusa Cerucuk tahun 2024, terdapat sekitar 65.401 hektar hutan mangrove yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1.51 berikut. Kriteria Baku Kerusakan Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 KepmenLH Nomor 201 Tahun 2004 merupakan cara untuk menentukan status kondisi mangrove yang diklasifikasikan Baik (tingkat kerapatan lebat dan sedang) serta kondisi Rusak (tingkat kerapatan jarang) dan berdasarkan ketentuan tersebut maka secara umum status kondisi mangrove di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terkategori baik yang ditandai oleh dominasi luasan hutan mangrove dengan persentase tutupan diatas 75% dan tingkat kerapatan diatas 1500 pohon/hektar dengan luasan mencapai 64247,9 hektar; kerapatan sedang yaitu seluas 857,7 hektar serta kerapatan jarang atau berstatus rusak sekitar 295,9 hektar. Secara administrasi, Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah yang memiliki luasan mangrove dengan status baik sekaligus status rusak yang paling besar yaitu masing-masing seluas 20.089 hektar dan sekitar 106,9 hektar.



Gambar 2.1. 42 Lokasi Mangrove dengan Status Baik di Kabupaten Bangka Barat
Sumber: IGT Mangrove, BPDAS Baturusa Cerucuk 2024



Walaupun secara luasan telah terjadi peningkatan, namun demikian di sisi lain ancaman alih fungsi hutan mangrove menjadi bentuk lain masih dimungkinkan terjadi apalagi jika statusnya berada di luar kawasan hutan. Mengambil contoh pada lokasi yang sama diatas, berdasarkan perekaman citra secara timeseries pada tahun 2021 hingga 2023 dengan menggunakan sumber data citra Maxar perekaman Bulan April 2021 yang diakses di Google Earth serta citra Planetscope resolusi spasial 3 m perekaman masing-masing bulan Mei 2021, Mei 2022 serta Mei 2023 yang difokuskan pada area of interest lokasi mangrove tersebut, terlihat adanya perubahan yang cukup signifikan yang mempengaruhi status kondisi mangrove di lokasi tersebut seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut.



Gambar 2.1. 43 Kondisi Mangrove di Pulau Kayuanak di Kabupaten Bangka Melalui Data Citra Multitemporal

Sumber: IGT Mangrove, BPDAS Baturusa Cerucuk, Citra Planetscope 2021-2024, planetlabs

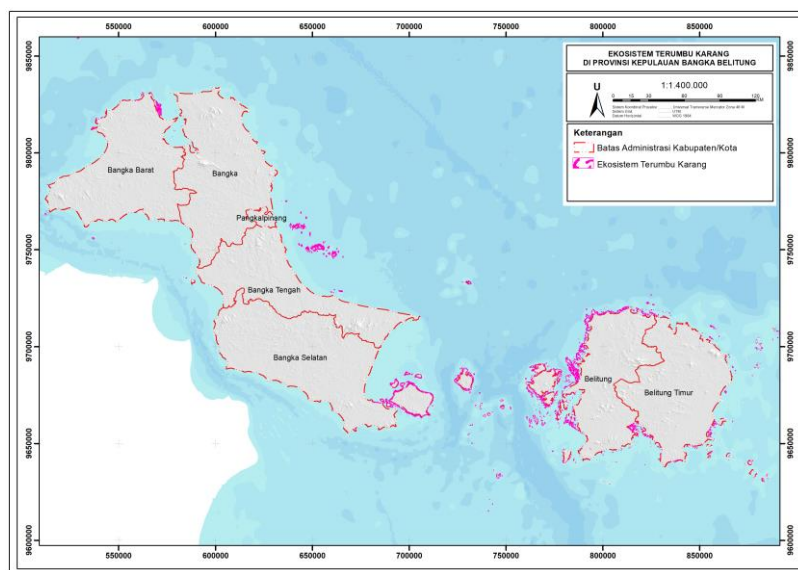
Data citra multitemporal di atas memperlihatkan terjadinya perubahan penutup hutan mangrove di Pulau Kayuanak Kabupaten Bangka. Pada bulan Mei tahun 2021 kondisinya masih terjaga dengan baik dan di



bulan Mei tahun 2022 mulai terlihat adanya pembukaan lahan di lokasi tersebut yang selanjutnya semakin luas deforestasi yang terjadi hingga dapat dilihat di perekaman citra terupdate di bulan Juni 2024 dimana hampir setengah pulau yang berisi hutan mangrove tersebut beralih fungsi menjadi lahan terbuka penambangan sehingga dapat disimpulkan sementara bahwa perubahan penutup lahan mangrove di lokasi tersebut sekaligus menambah luasan mangrove dengan status rusak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya dan Kabupaten Bangka pada khususnya. Hal ini mempertegas bahwa alih fungsi lahan khususnya hutan hingga saat ini terus marak terjadi. Kecepatan pengrusakan hutan yang tidak seimbang dengan kecepatan pemulihan menjadi tantangan besar dalam masalah tata guna lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Kondisi Terumbu Karang dan Lamun

Terumbu karang merupakan salah satu potensi sumber daya alam di wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang penting untuk dijaga kelestariannya. Organisme ini berperan besar sebagai benteng alami dalam menahan abrasi pantai seperti halnya kawasan hutan mangrove. Selain itu kondisi terumbu karang dapat mengindikasikan kualitas lingkungan perairan dimana organisme ini berada.



Gambar 2.1. 44 Ekosistem Terumbu Karang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: IGT Ekosistem Pesisir Terumbu Karang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Berdasarkan hasil analisis data pada dokumen awal RZWP-3-K Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang bahwa luas ekosistem terumbu karang yaitu sebesar 17.744,85 hektar dengan sebaran lokasi seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.1.54 di atas. Dari luasan tersebut, 12.474,54 hektar terkategori baik dan 5.270,31 hektar terkategori rusak. Secara pesentase masing-masing yaitu 70% dan 30%. Hasil pengukuran di 23 titik di wilayah perairan Pulau Bangka menunjukkan rata-rata pesentase *live coral* sebesar 33% dan pengamatan tutupan terumbu karang di perairan Pulau Belitung yang dilakukan di 37 lokasi titik menunjukkan rata-rata pesentase *live coral* sebesar 49%. Aktivitas pembangunan dermaga serta penambangan timah di pesisir dan laut membuat laju sedimentasi meningkat dan hal ini berbahaya karena butiran sediment dapat menutupi polip karang hingga menimbulkan kerusakan hingga kematian karang di wilayah tersebut. Rusaknya ekosistem terumbu karang pada akhirnya akan berdampak negatif bagi lingkungan khususnya di wilayah pesisir.



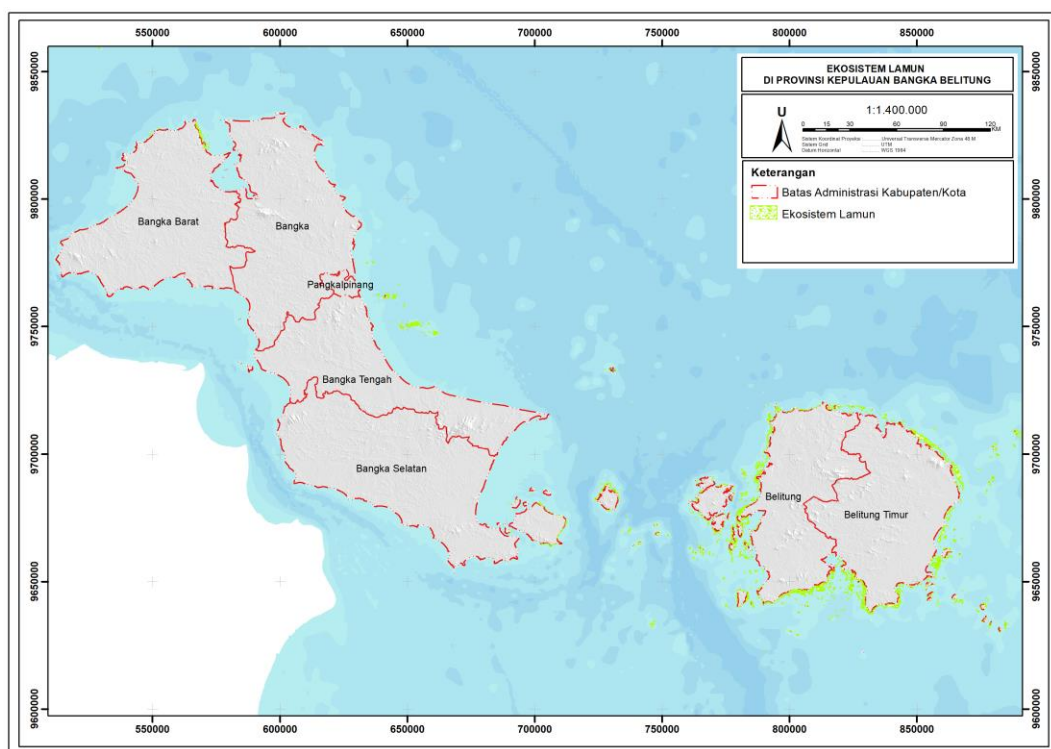
Gambar 2.1. 45 Terumbu Karang Tertutup Sedimen di Pulau Ketawai Kabupaten Bangka Tengah

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Selain terumbu karang, terdapat pula ekosistem lamun yang tersebar hampir di seluruh pesisir wilayah Pulau Belitung serta di pesisir timur Pulau



Bangka dengan luasan sekitar 11.646,90 hektar (Gambar 2.1.56). Di kalangan masyarakat lokal Kepulauan Bangka Belitung, ekosistem lamun (*seagrass*) tidak terlalu populer jika dibandingkan dengan ekosistem pesisir lainnya seperti mangrove ataupun terumbu karang. Namun demikian sejumlah riset telah membuktikan bahwa keberadaan ekosistem lamun ini sama pentingnya dengan kedua ekosistem yang telah disebutkan sebelumnya dalam bersinergi menjaga keseimbangan lingkungan hidup di wilayah pesisir. Lamun bersama halnya dengan mangrove berperan utama dalam memperangkap sedimen yang mempengaruhi kejernihan air laut serta menyimpan karbon yang sangat potensial.



Gambar 2.1. 46 Ekosistem Lamun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: IGT Ekosistem Pesisir Terumbu Karang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan dokumen awal RZWP-3-K disebutkan bahwa kondisi lamun di Pulau Bangka berdasarkan kriteria baku KepmenLH Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan Dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun masuk dalam kondisi buruk dengan status kurang kaya atau kurang sehat sedangkan persentase tutupan lamun di Pulau



Belitung menunjukkan % cover lamun yang merata dan masuk dalam kondisi <29% dan masuk kategori rusak dengan status miskin namun khususnya di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung persentase tutupan lamunnya dikategorikan baik atau sehat.



Gambar 2.1. 47 Ekosistem Lamun di Pulau Ketawai di Kabupaten Bangka Tengah
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

C. Aktivitas Tambang Laut



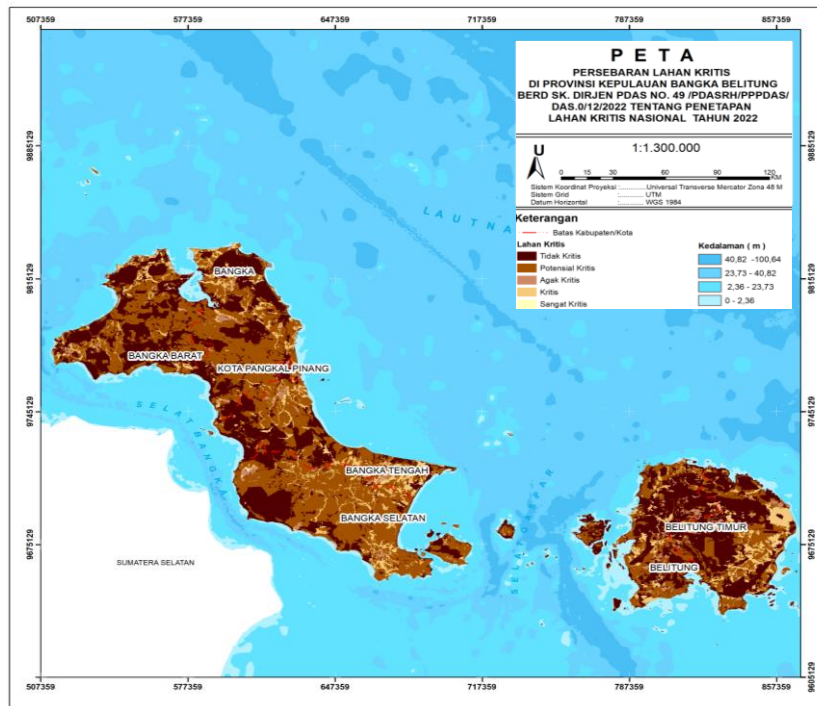
Gambar 2.1. 48 Aktivitas Penambangan Ilegal di Teluk Kelabat Dalam Juni 2024
Sumber: Citra PlanetScope, planetlabs diakses 2024



Diantara alokasi pemanfaatan ruang laut seperti yang tertuang di dalam RZWP3K, zona pertambangan yang mempunyai porsi luasan 477.077,6 hektar mayoritas selalu menjadi pembahasan. Seperti yang telah diketahui bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam mineral khususnya timah. Sifat mineral yang *unrenewable resources* serta eksploitasi yang sudah berlangsung sejak lama tentu saja membuat cadangan timah di daratan menurun hingga akhirnya penambangan beralih ke wilayah perairan laut. Kegiatan ini pada akhirnya menimbulkan ancaman bagi kelestarian ekosistem laut sekaligus kesejahteraan para nelayan terutama jika dilaksanakan tidak di dalam alokasi ruang yang telah ditetapkan. Gambar 2.1.58 merupakan contoh aktivitas penambangan mineral timah secara ilegal yang berlangsung di wilayah perairan Teluk Kelabat Dalam, Kabupaten Bangka. Secara zonasi RZWP-3-K, kawasan tersebut merupakan sebab alokasi ruang di kawasan tersebut merupakan zona perikanan budidaya. Persinggungan antara kepentingan mata pencaharian memunculkan konflik di pesisir antara nelayan dan pelaku tambang.

II.I.3.3 Lahan Kritis

Tekanan atau *pressure* yang diberikan kepada lahan dalam bentuk alih fungsi lahan serta eksploitasi lingkungan secara terus menerus dan tidak diimbangi oleh pengelolaan yang optimal mengarah pada terjadinya perubahan kondisi biofisik lingkungan seperti yang terlihat pada saat ini melalui banyaknya lahan yang mengalami degradasi atau dikenal dengan istilah lahan kritis. Berdasarkan PermenLHK 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan disebutkan bahwa Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air Daerah Aliran Sungai (DAS).



Gambar 2.1. 49 Peta Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: IGT Lahan Kritis sesuai SK. 49/2022, BPDAS Baturusa Cerucuk

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial Nomor : P. 4/V-Set/2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis, kategori lahan kritis terdiri atas tidak kritis, potensial kritis, agak kritis, kritis hingga sangat kritis. Parameter penilaian tingkat kekritisan lahan yang berada pada kawasan lindung tidak sama dengan penilaian di kawasan budidaya. Pada kawasan lindung, penilaian dikaitkan dengan fungsi perlindungan sumber daya hutan dalam hal ini penutup lahan vegetasi, tanah dan air, faktor kemiringan lereng, tingkat erosi serta manajemen pengelolaan kawasan. Sementara itu penilaian tingkat kekritisan lahan di kawasan budidaya selain tetap mempertimbangkan parameter kelerengan, tingkat erosi, jenis batuan juga menitikberatkan pada fungsi produksi dan pelestarian sumberdaya lahan itu untuk kepentingan produktivitas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Nomor SK. 49/PPDASRH/PPDAS/DAS.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022, luasan lahan



kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 167.065 hektar. Rincian luasan per kategori berdasarkan hasil analisis spasial disajikan pada Gambar 2.1.50 berikut.



Gambar 2.1. 50 Tingkat kekritisan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: IGT lahan kritis SK. 49/PDASRH/PPDAS/DAS.0/12/2022, BPDAS BRC 2023

Dilihat dari gambar diatas, lahan dengan kategori potensial kritis mendominasi tingkat kekritisan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luasan sekitar 788.830 hektar atau setara dengan 47,3% dari luas total wilayah berdasarkan analisis spasial, sedangkan lahan kategori sangat kritis mempunyai luasan paling kecil yaitu sebesar 1.299 hektar atau setara dengan persentase 0,08%. Jika dibandingkan dengan hasil *review* lahan kritis sebelumnya pada SK.306/Menlhk/PDASHL/DAS.0/7/2018 maka terdapat perubahan luasan signifikan pada beberapa dua kategori lahan, selengkapnya pada Tabel berikut.



Tabel 2.1. 10 Perbandingan Luas Lahan Kritis Tahun 2018 dan 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kategori	Luasan pada tahun (hektar)	
	2018	2022
Tidak Kritis	460.693	672.868
Potensial kritis	798.136	788.830
Agak kritis	393.379	40130
Kritis	20.438	165.804
Sangat Kritis	248	1.299

Sumber: IGT Lahan Kritis SK.306/MENLHK/PDASHL/ DAS .0/7 / 2018 dan SK.49/PDASRH/PPDDAS/DAS.0/12/2022, BPDAS BRC 2023

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa dalam rentang tahun 2018 hingga 2022 terjadi perubahan luasan untuk setiap kategorinya dimana secara umum terlihat adanya peningkatan maupun penurunan. Peningkatan terjadi pada kategori lahan tidak kritis sebesar 212.175 hektar yang sifatnya positif sedangkan peningkatan yang bersifat negatif terjadi pada kategori lahan kritis sebesar 145.366 hektar serta lahan sangat kritis sebesar 1.051 hektar.

Selanjutnya penurunan luasan terjadi pada lahan kategori agak kritis secara signifikan yaitu seluas 353.249 hektar. Peningkatan luasan yang bersifat positif menandakan terjadinya perbaikan kualitas lahan terutama dari segi penutup lahannya sebagai parameter dengan bobot paling besar dalam penentuan tingkat kekritisan lahan. Sementara itu peningkatan yang bersifat negatif berkorelasi dengan penurunan luasan yang terjadi sangat signifikan yang artinya peningkatan luasan lahan kritis merupakan hasil konversi dari menurunnya kualitas lahan yang tadinya agak kritis.

Tabel 2.1. 11 Luasan lahan kritis berdasarkan wilayah administrasi

No.	Kabupaten/Kota	Kritis (Ha)		Sangat Kritis (Ha)		Potensial Kritis (Ha)		Agak Kritis (Ha)		Tidak Kritis (Ha)	
		Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	8	4	203	19	30	127	3	4	52	61,33
2	Bangka Barat	10.134	1.456	0	0	26.678	98.287	1.613	1.456	77,95	59.194
3	Bangka Selatan	17.682	4.741	323	20	65.857	173.372	2.738	4.741	53.125	38.41
4	Bangka Tengah	20.213	2.406	696	3	44.022	58.811	3.673	2.406	55.773	20.373

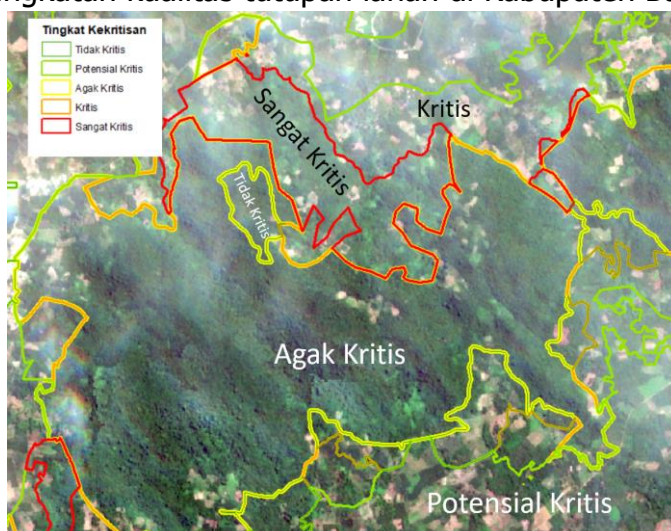


5	Belitung	7.828	2.223	0	0	25.347	49.316	5.984	2.223	45.389	75.907
6	Belitung Timur	9.307	2.561	34	0	21.696	63.588	4.144	2.561	65.025	64.581
7	Pangkalpinang	0	1,2	0	0	0	5.018	0	1,2	0	4.255

Sumber: IGT Lahan Kritis tahun 2022 BPDAS BRC. 2023; IGT Fungsi Kawasan Hutan. BPKHTL XIII; Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Adanya peningkatan luasan lahan kategori kritis yang sangat signifikan menandakan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun sebelum *review* terbaru, aktivitas antropogenik semakin massif terjadi. Selanjutnya tentu saja peningkatan lahan kritis akan berpengaruh terhadap nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara administrasi, luasan lahan kritis di masing-masing kabupaten kota dapat terlihat pada Tabel 2.1.7 di atas.

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat kekritisan lahan “kritis” dan “sangat kritis” sebagian besar terjadi di dalam kawasan hutan sedangkan pada lahan dengan kategori “potensi kritis” serta “agak kritis” sebagian besar terjadi diluar kawasan hutan. Jika ditinjau per kategori hutan dan non hutan maka Kabupaten Bangka Tengah menjadi wilayah dengan luasan lahan kritis dan sangat kritis di dalam kawasan hutan terbesar dibandingkan wilayah kabupaten/kota lainnya sedangkan pada *review* lahan kritis sebelumnya kabupaten dengan luasan lahan kategori kritis dan sangat kritis dalam kawasan hutan yaitu Kabupaten Bangka Selatan. Hal ini menandakan adanya peningkatan kualitas tutupan lahan di Kabupaten Bangka Selatan.



Gambar 2.1. 51 Lahan Kritis di Wilayah TWA Permisan

Sumber: Sentinel 2A MSI RGB 432 Perekaman Februari 2023 – esa copernicus, diakses 2023



Gambar diatas menunjukkan kondisi eksisting lahan yang berlokasi di sekitar Taman Wisata Alam Bukit Permisan terhadap tingkat kekritisannya, dari perekaman citra Sentinel 2A perekaman bulan Februari Tahun 2023 terlihat hampir sebagian besar kawasan Bukit Permisan terkategori agak kritis, hanya sebagian kecil luasan saja yang terkategori tidak kritis bahkan terdapat pula lahan dengan kategori kritis dan sangat kritis di wilayah ini. Dengan statusnya sebagai hutan konservasi tentunya hal ini harus mendapatkan penanganan yang serius dari semua pihak yang terkait termasuk elemen masyarakat dalam menjaga keberlangsungan hutan konservasi ini. Dari citra tersebut dapat pula dilihat bahwa aktivitas pertanian lahan kering campur semak mendominasi wilayah kaki bukit hingga ke lereng tengah yang berkontribusi terhadap tingkat kekritisannya.

Tanah sebagai salah satu komponen lahan memiliki banyak fungsi dalam kehidupan. Di samping sebagai ruang hidup. tanah memiliki fungsi produksi. yaitu antara lain sebagai penghasil biomassa. seperti bahan makanan. serat. kayu. dan bahan obat-obatan. Selain itu. tanah juga berperan sebagai penjaga kelestarian lingkungan sehingga sudah seharusnya daya dukungnya dipertahankan. Agar tanah dapat bermanfaat secara berkelanjutan maka kegiatan pengendalian kerusakan tanah sangat penting untuk dilaksanakan seperti yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Bangka Tengah pada tabel 2.1.8.

Tabel 2.1. 12 Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering

No	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a	Perkebunan Karet di Desa Air Mesu. Kabupaten Bangka Tengah				
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	< 40 %	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	71 % pasir*	Melebihi
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1.4 g/cm ³	0.5 g/cm ³	Tidak
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-



No	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6		Derajat Pelulusan air	< 0.7 cm/jam; > 8.0 cm/jam	-	-
7		pH (H ₂ O) 1 : 2.5	< 4.5 ; > 8.5	5.0	Melebihi
8		Daya Hantar Listrik /DHL	> 4.0 mS/cm	0.030	Melebihi
9		Redoks	< 200 mV	491	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1.08 x 10 ⁷	Melebihi
b	Perkebunan Singkong di Desa Puput. Kabupaten Bangka Tengah				
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	0	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	70 % pasir*	Melebihi
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1.4 g/cm ³	0.5 g/cm ³	Tidak
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6		Derajat Pelulusan air	< 0.7 cm/jam; > 8.0 cm/jam	-	-
7		pH (H ₂ O) 1 : 2.5	< 4.5 ; > 8.5	4.8	Melebihi
8		Daya Hantar Listrik /DHL	> 4.0 mS/cm	0.090	Melebihi
9		Redoks	< 200 mV	500	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1.96 x 10 ⁷	Melebihi
c	Perkebunan Kopi di Desa Teru. Kabupaten Bangka Tengah				
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	0	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	52 % pasir*	Melebihi
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1.4 g/cm ³	0.5 g/cm ³	Tidak
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6		Derajat Pelulusan air	< 0.7 cm/jam; > 8.0 cm/jam	-	-
7		pH (H ₂ O) 1 : 2.5	< 4.5 ; > 8.5	5.0	Melebihi
8		Daya Hantar Listrik /DHL	> 4.0 mS/cm	0.050	Melebihi
9		Redoks	< 200 mV	489	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1.14 x 10 ⁷	Melebihi
d	Perkebunan Lada di Desa Pinang Sebatang. Kabupaten Bangka Tengah				
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	37.50%	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	33 % pasir*	Melebihi
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1.4 g/cm ³	0.5 g/cm ³	Tidak
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6		Derajat Pelulusan air	< 0.7 cm/jam; > 8.0 cm/jam	-	-
7		pH (H ₂ O) 1 : 2.5	< 4.5 ; > 8.5	4.5	Melebihi



No	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Perkebunan Singkong di Desa Perlang. Kabupaten Bangka Tengah	Daya Hantar Listrik /DHL	> 4.0 mS/cm	0.063	Melebihi
9		Redoks	< 200 mV	496	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1.52 x 10 ⁷	Melebihi
e					
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	18.75%	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	69 % pasir*	Melebihi
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1.4 g/cm ³	0.5 g/cm ³	Tidak
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6		Derajat Pelulusan air	< 0.7 cm/jam; > 8.0 cm/jam	-	-
7		pH (H ₂ O) 1 : 2.5	< 4.5 ; > 8.5	4.8	Melebihi
8	Hutan Taman Industri Bangkanea di Desa Perlang. Kabupaten Bangka Tengah	Daya Hantar Listrik /DHL	> 4.0 mS/cm	0.036	Melebihi
9		Redoks	< 200 mV	457	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	2.76 x 10 ⁷	Melebihi
f					
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	12.50%	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	49 % pasir*	Melebihi
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1.4 g/cm ³	0.5 g/cm ³	Tidak
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6		Derajat Pelulusan air	< 0.7 cm/jam; > 8.0 cm/jam	-	-
7		pH (H ₂ O) 1 : 2.5	< 4.5 ; > 8.5	4.8	Melebihi
8		Daya Hantar Listrik /DHL	> 4.0 mS/cm	0.029	Melebihi
9		Redoks	< 200 mV	426	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1.36 x 10 ⁷	Melebihi

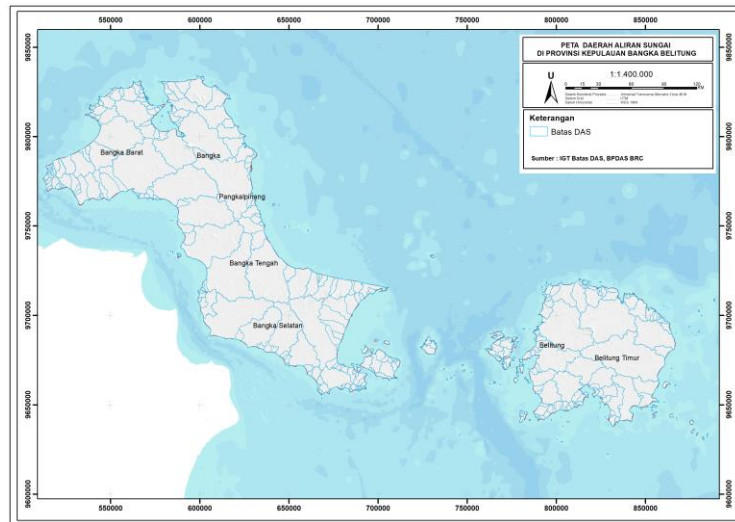
Sumber: Inventarisasi dan Pengelolaan Lahan Kritis Kabupaten Bangka Tengah. DLH Kabupaten Bangka Tengah. 2021

Dari kegiatan inventarisasi lahan kritis pada beberapa lokasi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah. terlihat bahwa parameter ketebalan solum. komposisi fraksi. pH H₂O. daya hantar listrik. redoks serta jumlah mikroba pada masing-masing lokasi telah melebihi baku mutunya sesuai PP nomor 150 tahun 2000 tentang Baku Mutu Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.



Komposisi fraksi yang sudah melebihi baku mutu mengindikasikan banyaknya kandungan pasir dalam tanah tersebut sehingga sulit untuk menyimpan unsur hara maupun air. Dari kesemua lokasi pengambilan sampel juga diketahui bahwa ketebalan solum yaitu diatas 20 cm. Mengacu pada PP 150 Tahun 2000. ketebalan solum merupakan sebagai jarak vertikal dari permukaan tanah sampai ke lapisan yang membatasi keleluasaan perkembangan sistem perakaran. Aktivitas land clearing terutama pada kegiatan pertambangan secara terbuka pada umumnya mengupas bagian top soil tanah yang kemudian berperan besar dalam menurunnya ketebalan solum tanah.

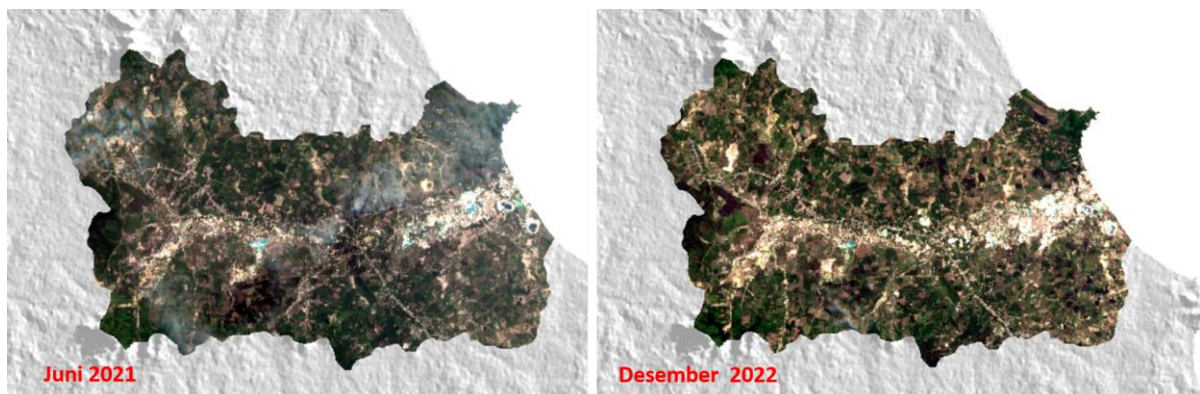
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa lahan kritis sangat berkaitan dengan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS). Peningkatan kegiatan eksploitasi sumber daya alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan semakin berpengaruh terhadap perubahan ekosistem DAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di satu sisi kegiatan tersebut berkontribusi positif utamanya di sektor perekonomian namun di sisi lain eksploitasi SDA seringkali mengakibatkan ketidakseimbangan kondisi ekosistem. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, disebutkan bahwa jumlah keseluruhan DAS yaitu sebanyak 433 buah dengan rincian 357 DAS sudah mempunyai nama sedangkan sisanya 76 DAS belum mempunyai nama. Berdasarkan klasifikasinya, ada sekitar 162 DAS yang dipulihkan daya dukungnya serta 271 DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya. Sementara itu mengacu pada SK MenLHK Nomor 304 tahun 2018 tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat sekitar 863 DAS. Wilayah DAS sesuai dengan SK 304/2018 tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1.52 di bawah ini.



Gambar 2.1. 52 Wilayah DAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: peta penutup lahan tahun 2021 BPKH Wil XIII dan peta lahan kritis BPDASHL, data diolah

Aktivitas antropogenik seperti pertambangan, perkebunan, pengembangan permukiman serta aktivitas lainnya di dalam wilayah DAS secara berlebihan dan terus menerus akan menurunkan daya dukung dan daya tampungnya terutama yang berkenaan dengan fungsi tata kelola aliran air, biodiversitas serta pencegahan terhadap bencana. Aktivitas pertambangan hingga saat ini dipandang memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya kerusakan daerah aliran sungai. Menurut Dubey et al.(2006) dalam Priasty (2014), kegiatan penambangan menyebabkan terjadinya perubahan besar pada landscape dan berdampak negatif pada ekologi karena hilangnya flora and fauna serta kesuburan tanah, menyebabkan erosi, menurunkan kualitas air dan menghancurkan komunitas mikrobial.



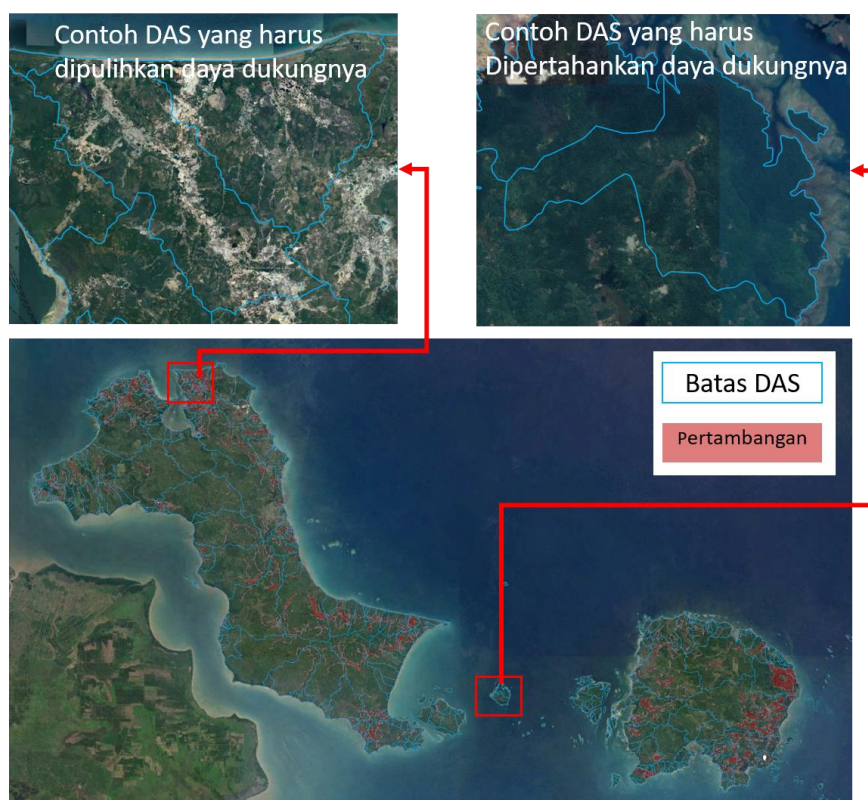
Gambar 2.1. 53 Citra Multitemporal Tahun 2021-2022 di Wilayah DAS Diniang Kabupaten Bangka

Sumber: Citra Sentinel 2A MSI Perekam Juni 2021 dan Desember 2022, Esa Copernicus



Gambar di atas memperlihatkan perubahan penutup lahan terutama pertambangan di dalam wilayah DAS Diniang yang ditandai oleh pola memanjang teratur mengikuti pola aliran sungai dengan warna putih hingga kecoklatan dan terdapat tubuh air di dalam pola tersebut dengan kecenderungan penambahan luasan penutup lahan pertambangan hingga ke arah pesisir timur.

Dengan kembali maraknya aktivitas penambangan timah khususnya yang bersifat ilegal sekaligus menjadi ancaman bertambahnya daerah aliran sungai yang akan mengalami penurunan fungsi hidrologi dan ekologisnya. DAS dengan kondisi penutup lahannya berupa lahan pertambangan merupakan jenis DAS yang harus dipulihkan daya dukungnya sedangkan DAS yang kondisi penutup lahannya masih berupa vegetasi alami harus dipertahankan daya dukungnya. Sebaran penutup lahan pertambangan pada daerah aliran sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlihatkan pada Gambar 2.1.54 berikut.



Gambar 2.1. 54 Penutup Lahan Pertambangan dalam wilayah DAS

Sumber: IGT penutup lahan Prov Kep Babel, BPKH wil XIII; IGT Batas DAS, BPDAS BRC (data diolah)



Berdasarkan hasil analisis tumpang susun antara informasi geospasial tematik batas DAS terhadap penutup lahan pertambangan tahun 2021 diketahui bahwa aktivitas ini berlangsung di dalam 202 daerah aliran sungai yang persebarannya dapat dilihat pada gambar diatas. DAS Linggang yang terletak di Kabupaten Belitung Timur merupakan daerah dimana terdapat aktivitas penambangan terbesar yaitu seluas 13.140 hektar. Luas DAS Linggang itu sendiri yaitu sekitar 73.570 hektar sehingga jika dipersentasekan aktivitas tersebut yaitu sekitar 17,9%. Angka ini belum ditambah dengan alih fungsi lahan menjadi perkebunan atau lahan terbangun yang berpengaruh negatif terhadap fungsi daerah aliran sungai. Upaya pemulihan terhadap DAS sangatlah penting dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk mengembalikan daya dukungnya yang semakin menurun terutama karena aktivitas manusia.

II.1.3.4 Erosi dan Sedimentasi

Erosi dan sedimentasi saat ini masih banyak ditemukan di sejumlah daerah aliran sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Erosi dan sedimentasi adalah dua peristiwa yang memiliki keterkaitan yang erat dimana sedimentasi merupakan proses akhir yang terjadi setelah adanya erosi. Diantara kedua peristiwa ini faktor transportasi menjadi penghubung prosesnya. Proses erosi diawali dengan pengelupasan partikel tanah akibat tetesan air hujan. Semakin tinggi intensitas hujan akan mempercepat lepasnya partikel tanah. Selanjutnya terjadi proses transportasi atau pengangkutan artikel tanah tersebut oeh aliran air permukaan yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kemiringan lereng, penutup lahan dan debit aliran sungai hingga ke arah hilir sungai.



Gambar 2.1. 55 Sedimentasi di Muara Jelitik

Sumber: Palentscope 2022-2024, Planetlabs

Dengan kontur yang cenderung lebih datar daripada di hulu, debit aliran mulai berkurang dan disinilah mulai terjadi proses sedimentasi atau pengendapan partikel akibat erosi sebelumnya (Sabri, 2017). Alih fungsi lahan yang terjadi di daerah hulu terutama akibat proses penambangan berkontribusi tinggi dalam menambah laju sedimentasi di hilir sungai yang akhirnya akan menyebabkan pendangkalan sungai seperti halnya yang terjadi di Muara Jelitik (Gambar 2.1.64).

II.1.3.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

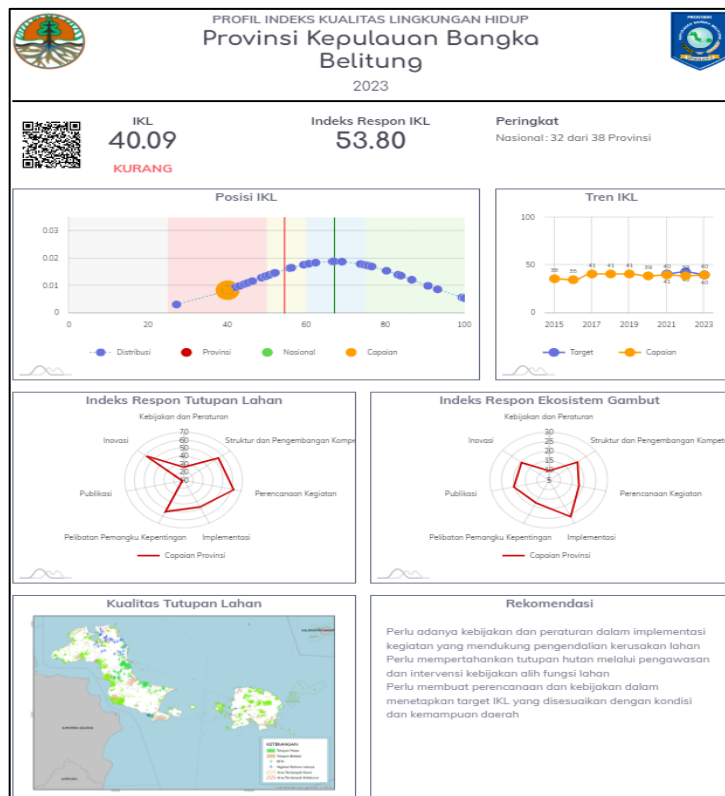
Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.

Berdasarkan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan disebutkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dijadikan indeks kinerja pengelolaan lingkungan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024. Mempertimbangkan RPJMD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan



nasional maka RPJMD perlu memasukkan IKLH sebagai indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) direpresentasikan melalui gabungan indeks tutupan lahan dan ekosistem gambut dengan faktor pembobot sebesar 0,133. Secara umum lokasi pemantauan kualitas tutupan lahan meliputi kawasan hutan dan areal penggunaan lain sedangkan lokasi pemantauan kualitas ekosistem gambut mencakup ekosistem gambut dengan fungsi lindung dan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya. Lebih rinci hasil pengumpulan data tutupan lahan terdiri atas wilayah tutupan hutan dalam hal ini hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer serta hutan rawa sekunder; wilayah tutupan belukar dan belukar rawa di kawasan hutan; wilayah tutupan belukar dan belukar rawa pada kemiringan lereng lebih besar sama dengan 25% (dua puluh lima persen) yang berada di sempadan pada areal penggunaan lain; ruang terbuka hijau; tutupan lahan dari kegiatan rehabilitasi lahan. Sementara itu ruang terbuka hijau seperti telah disebutkan di atas meliputi: kebun raya, taman kehati, hutan kota, taman hutan raya, median jalan, sabuk hijau, jalur di bawah tegangan listrik, sempadan sungai; daerah penyangga; kebun binatang, arboretum, taman rekreasi dan atau pepohonan lainnya yang relevan. Selanjutnya hasil pengumpulan data kualitas Ekosistem Gambut berupa Areal terdampak kanal; Areal bekas kebakaran; Tutupan Lahan; Tinggi muka air tanah; dan Areal yang terekspos sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut.



Gambar 2.1. 56 Raport Nilai IKL Tahun 2023

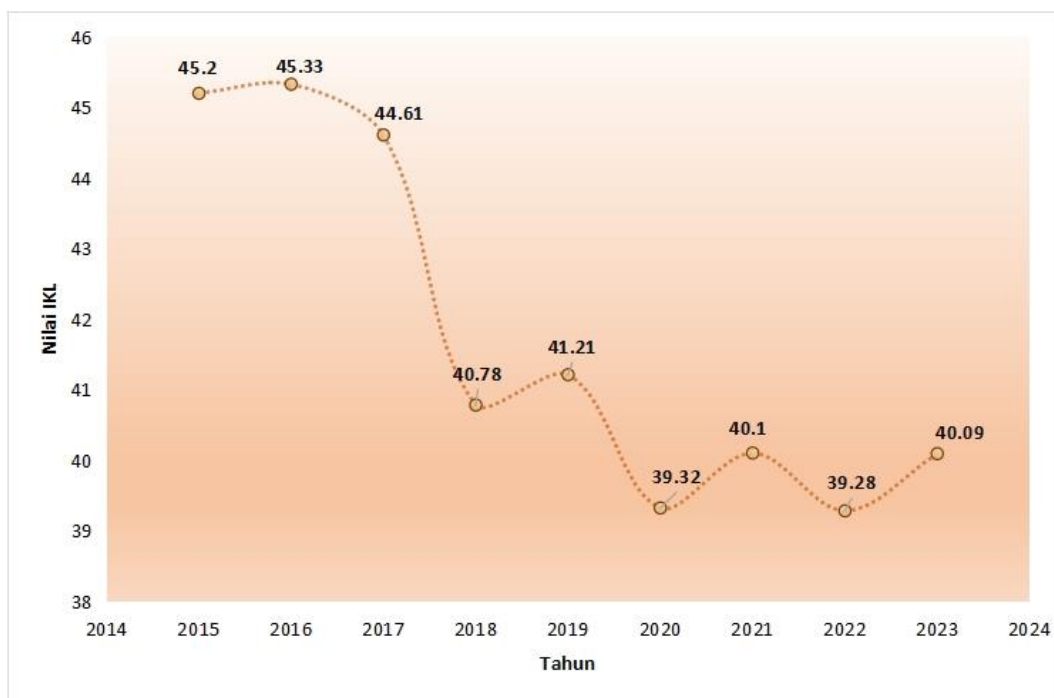
Sumber: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh>, diakses tahun 2023

Berdasarkan raport IKLH tahun 2023 yang diakses melalui laman <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh>, nilai IKL yaitu sebesar 40,09 (Gambar 2.1.56) sedangkan nilai indeks respon lahan yaitu sebesar 53,80. Hal ini membuat Bangka Belitung berada di peringkat 32 dari 38 provinsi. Jika dilihat dari grafik nilai IKTL/IKL di bawah ini, dalam rentang waktu tahun 2015-2023 terjadi dinamika perubahan nilai indeks namun secara umum menunjukkan trend penurunan, seperti yang terlihat pada rentang tahun 2017-2018 dimana terjadi penurunan angka IKTL yang sangat signifikan. Sementara itu jika membandingkan data pada tiga tahun terakhir yaitu 2021-2023 terjadi penurunan nilai indeks di tahun 2022 sebesar 0,82 poin dari 20,1 menjadi 39,28 yang dipengaruhi oleh konversi semak belukar menjadi penutup lahan lainnya sebanyak lebih dari 30 ribu hektar. Perubahan positif ditunjukkan pada tahun 2023 yang ditandai dengan peningkatan nilai IKL sebesar 0,81 poin dari 39,28 menjadi 40,09. Hasil



analisis spasial menunjukkan bahwa peningkatan ini merupakan kontribusi dari penambahan luasan belukar/belukar rawa yang naik kelas menjadi hutan.

Walaupun terjadi peningkatan nilai IKL di tahun 2023 namun jika dibandingkan dengan target IKL yang telah direvisi, tetap saja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat mencapai target tersebut. Jika secara sederhana mensimulasikan perhitungan IKL dengan mengabaikan faktor koreksi kanal gambut maka untuk menaikkan IKL dari 39,28 di tahun 2022 menjadi target 40,55 maka paling tidak dibutuhkan penambahan luasan penutup lahan hutan sebesar ± 11.900 hektar atau ± 19.800 hektar luas belukar/belukar rawa dalam kawasan hutan atau ± 19.800 hektar luas RTH atau ± 19.800 hektar luas rehabilitasi hutan dan lahan dalam waktu 1 (satu) tahun.



Gambar 2.1. 57 Trend Nilai IKL di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



Berdasarkan raport IKL dapat dilihat porsi aspek-aspek penentu perhitungan yaitu diantaranya kebijakan dan peraturan, struktur dan pengembangan kompetensi, perencanaan kegiatan, implementasi, pelibatan pemangku kepentingan, publikasi, serta inovasi. Dari kesemua aspek tersebut, aspek paling rendah yaitu publikasi sedangkan aspek paling tinggi adalah perencanaan kegiatan dan inovasi. Dari informasi ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan kegiatan terutama yang berkenaan dengan inovasi di bidang pencegahan atau pengendalian kerusakan lahan telah berjalan cukup baik namun demikian publikasi ke masyarakat juga merupakan hal penting sekaligus sebagai edukasi untuk dapat menjaga lingkungan yang keberlanjutan. Sementara itu pada Indeks Respon Ekosistem Gambut yang telah dihimpun dalam Gambut Lestari, implementasi pengendalian pencegahan kerusakan telah berjalan cukup baik namun kebijakan dan peraturan merupakan aspek pokok yang sampai dengan hari ini belum ada payung hukumnya dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan gubernur tentang pencegahan dan pengendalian kerusakan ekosistem gambut. Secara keseluruhan Provinsi Bangka Belitung berada di peringkat 32 dari 38 provinsi dengan nilai indeks respon IKL 53,80.

II.1.4 Impact

Aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan dan terkendali dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lahan mengarah pada terjadinya perubahan tata guna lahan seperti yang terlihat kondisinya saat ini hingga pada akhirnya perubahan tersebut akan berdampak kepada manusia dan lingkungannya. Dampak yang ditimbulkan terkait permasalahan dalam tata guna lahan secara garis besar terdiri atas dampak terhadap lingkungan, sosial ekonomi hingga dampak terhadap kesehatan masyarakat.



II.1.4.1 Penurunan Daya Dukung Lahan

Daya dukung merupakan kapasitas maksimum lingkungan untuk menopang populasi tertentu atau aktivitas manusia tanpa mengalami degradasi atau kerusakan yang sifatnya tidak dapat diperbaharui sedangkan daya tampung berkaitan dengan kemampuan lingkungan untuk menyerap atau menyerap atau menangani tekanan dan dampak dari aktivitas manusia atau faktor-faktor lingkungan lainnya tanpa menyebabkan dampak negatif yang tidak dapat diperbaharui.

Secara spesifik, konsep mendasar dari daya dukung lahan yaitu perbandingan antara ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) dari lahan itu sendiri. Hal penting yang harus dipahami bahwa supply lahan bersifat terbatas sedangkan demandnya cenderung terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah. Banyaknya eksploitasi lahan secara berlebihan maupun alih fungsi lahan berkenaan dengan aktivitas pertambangan, perkebunan maupun lahan terbangun dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir menyebabkan terjadinya perubahan daya dukung lahan.

Pengaruh eksploitasi lahan secara terus menerus yang berdampak pada penurunan daya dukung lahan bisa terlihat pada hasil uji tingkat kesuburan tanah dari aktivitas penambangan di Pulau Bangka yang tergolong rendah yang ditandai oleh tingginya fraksi pasir dengan karakteristik sifat kimia pH rendah serta kandungan unsur hara seperti karbon, nitrogen, fosfor, kalsium, magnesium, kalium serta natrium yang sangat rendah (Asmarhansyah, 2015). Hal ini menyebabkan lahan bekas penambangan timah bukan merupakan media tanam yang ideal sehingga harus dilakukan upaya treatment atau pemulihan untuk meningkatkan kualitas lahan.



Gambar 2.1. 58 Kenampakan Tanah di Sekitar Lokasi Penambangan Pasir Kuarsa Kabupaten Belitung Timur

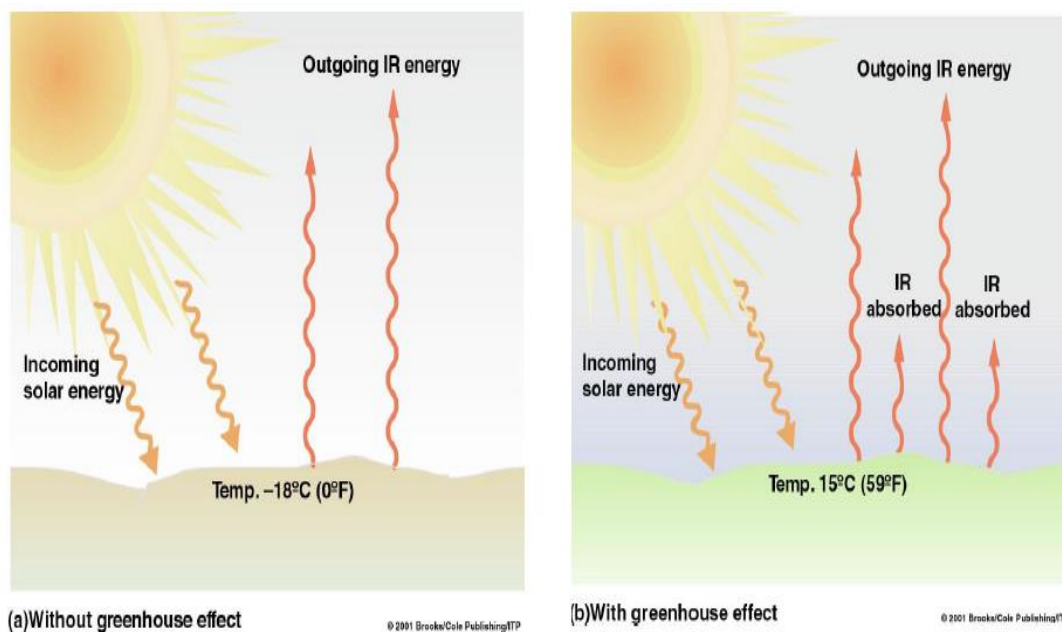
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

II.1.4.2 Peningkatan Emisi GRK dan Perubahan Iklim

Kenaikan suhu udara dan perubahan iklim adalah dua fenomena yang erat kaitannya. Perubahan iklim mengacu pada perubahan pola cuaca dalam jangka waktu yang panjang di seluruh dunia sementara itu kenaikan suhu udara adalah salah satu aspek dari perubahan iklim. Fenomena ini secara luas dikaitkan dengan pemanasan global. Aktivitas manusia dalam pembukaan lahan berupa deforestasi yaitu proses penebangan hutan secara besar-besaran maupun konversi lahan yang mencakup perubahan penutup/penggunaan lahan dari hutan atau ekosistem alami menjadi lahan terbuka diusahakan maupun lahan terbangun berkontribusi terhadap peningkatan konsentrasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekaligus kenaikan suhu daratan hingga ke perubahan iklim. Aktivitas ini berkontribusi melalui penurunan penyerapan karbon akibatnya banyaknya penebangan yang menghilangkan vegetasi yang berperan sebagai penyimpan karbondioksida yang diserap dari udara dalam bentuk stok karbon biomassa serta melalui proses pembukaan lahan dengan cara pembakaran sehingga karbon yang



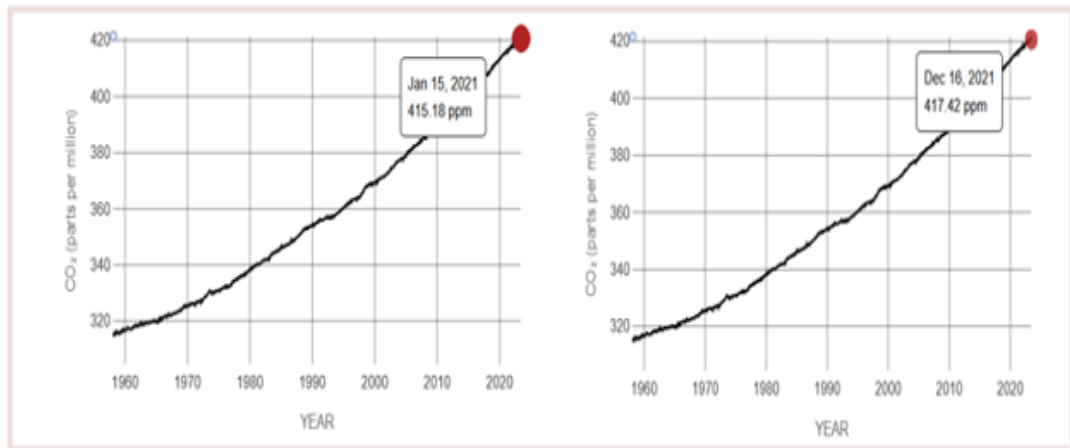
telah disimpan dalam vegetasi dilepaskan kembali ke atmosfer dalam bentuk gas karbondioksida.



Gambar 2.1. 59 (a) Kondisi Bumi Tanpa GRK suhu -18°C (b) dengan GRK suhu 15°C
Sumber : Brooks/Cole Publishing

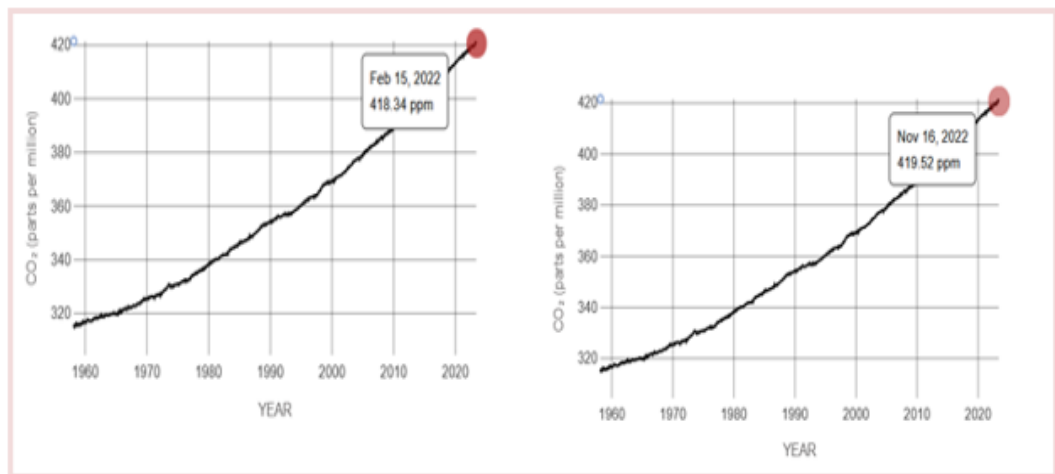
Pada dasarnya gas rumah kaca diperlukan untuk menjaga suhu bumi tetap hangat dan menyerap radiasi matahari sehingga hanya sedikit yang mencapai permukaan bumi dan sebagian besar radiasinya akan dipantulkan kembali ke atmosfer. Tanpa adanya gas rumah kaca maka suhu bumi akan sangat dingin yaitu -18°C , suhu ini terlalu rendah untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Menurut data yang diperoleh dari *National Aeronautics and Space Administration* (NASA), konsentrasi CO_2 di atmosfer terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2021 konsentrasi CO_2 berada pada kisaran 415,18 ppm – 417,42 ppm. Kemudian mengalami kenaikan di tahun 2022 yaitu 418,34 ppm – 419,52 ppm. Pada gambar 2.4.1.1. terlihat bahwa terjadi peningkatan konsentrasi setiap tahunnya. Bahkan NASA menyebutkan bahwa kenaikan ini meningkat sekitar 50% jika dibandingkan pada awal era industri tahun 1750.



Gambar 2.1. 60 Konsentrasi CO₂ di atmosfer tahun 2021

Sumber : NASA, 2023



Gambar 2.1. 61 Konsentrasi CO₂ di atmosfer tahun 2022

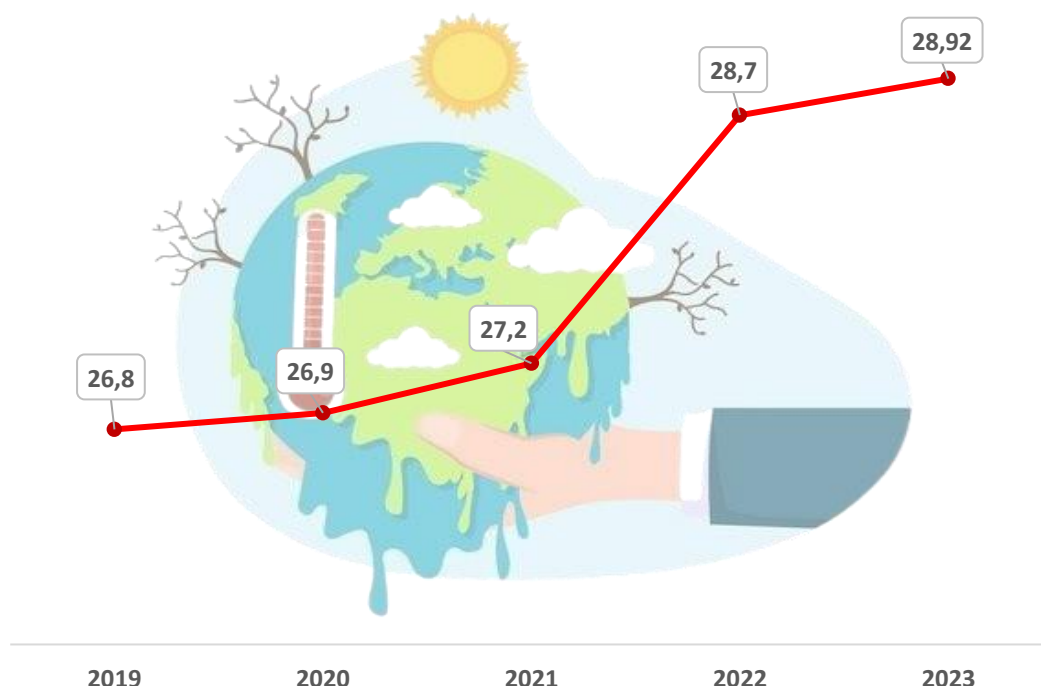
Sumber : NASA, 2023

Pada tahun 2021, NOAA merilis bahwa bulan Juli 2021 adalah bulan terpanas di dunia sejak pencatatan modern dimulai 142 tahun lalu. (noaa.gov, 2021). Perkembangan terakhir seperti yang disampaikan dalam laporan terbaru World Meteorological Organization (WMO) yang dirilis pada tanggal 12 Januari 2023 menyatakan bahwa tahun 2022 menjadi tahun terpanas secara global. Kenaikan suhu yang tercatat mencapai 1,15 °C lebih tinggi dari suhu sepanjang periode pra industri pada rentang tahun 1850 – 1900. Tingginya suhu global pada tahun 2022 ini sekaligus menegaskan bahwa delapan tahun terakhir sejak tahun 2015 adalah rekor suhu bumi



terpanas sepanjang sejarah dengan kenaikan suhu bumi naik diatas 1 derajat (WMO, 2023).

Berkenaan dengan parameter suhu udara yang erat kaitannya dengan perubahan iklim, dalam rentang waktu tahun 2017 hingga 2022 terlihat adanya trend fluktuasi suhu udara seperti yang terlihat pada Gambar 2.1.62 di bawah ini.



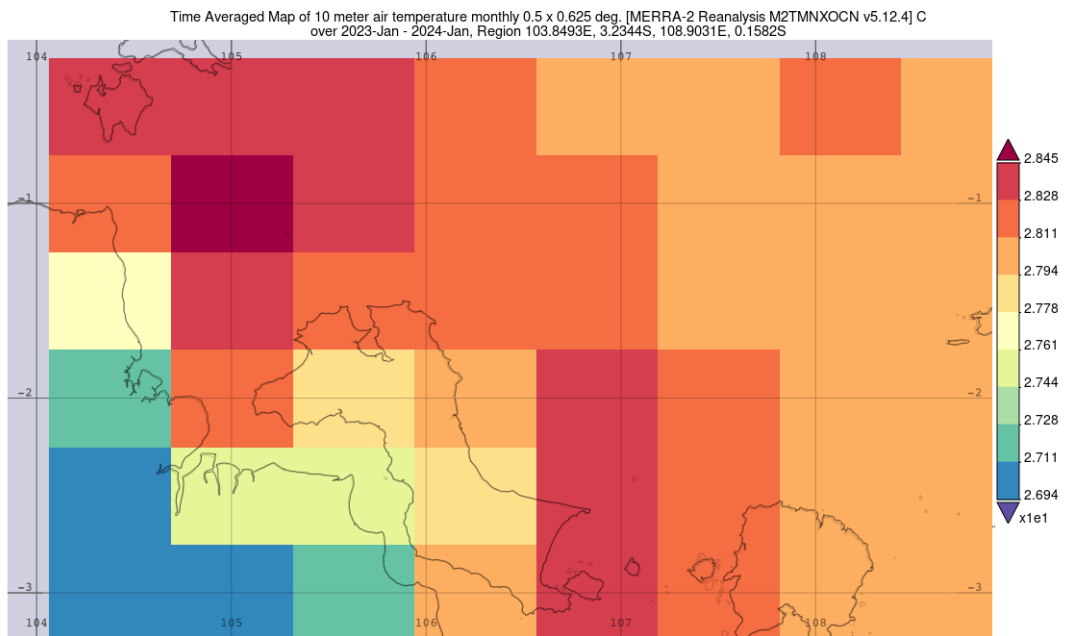
Gambar 2.1. 62 Tren kenaikan suhu udara sepanjang 2019-2023 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Data Online BMKG, diakses 2023; Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir, 2024

Dari gambar diatas terlihat bahwa rerata suhu udara pada kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan trend kenaikan. Kenaikan signifikan sebesar 1,5 °C terlihat rentang waktu tahun 2021-2022. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh BMKG dari 91 stasiun BMKG menunjukkan suhu permukaan rata-rata Indonesia pada tahun 2022 lebih tinggi 0,9°C jika dibandingkan dengan periode tahun 1981- 2010 (Badan Meteorologi dan Geofisika, 2023). Sementara itu pada rentang waktu 2022 hingga 2023 juga terjadi kenaikan suhu udara rata-rata sebesar 0,22 °C. dengan trend suhu



yang cenderung mengalami peningkatan ini tentunya meningkatkan ancaman terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat lebih dari 900 kejadian karhutla sepanjang tahun 2023 dan data ini artinya berkorelasi dengan salah satu faktor penyebab tingginya karhutla yaitu peningkatan suhu udara rata-rata. Gambar di bawah ini menampilkan visualisasi spasial rerata suhu udara pada ketinggian 10 meter sepanjang bulan Januari 2023 hingga Januari 2024 yang berasal dari The Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications (MERRA) , diolah dari situs giovanni, NASA. Berdasarkan analisis tersebut, sepanjang tahun 2023 tersebut terlihat rerata suhu udara di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada kisaran 27,8°C hingga 28,3 °C. Tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan antara data ini dengan data yang dikeluarkan oleh BMKG pada visualisasi grafik di atas yang tentu saja salah satunya dipengaruhi oleh sumber data, resolusi serta metode analisis yang dipergunakan.



Gambar 2.1. 63 Temperatur Udara Sepanjang Tahun 2023

Sumber: <https://giovanni.gsfc.nasa.gov/>, data diolah 2024

Berkenaan dengan emisi GRK, Pemerintah Indonesia telah memperbarui janjinya dalam mengurangi emisi karbon melalui dokumen



Nationally Determined Contribution (NDC) terbaru yang dinamai Enhanced NDC dan sudah didaftarkan ke UNFCCC pada September 2022. NDC adalah komitmen negara-negara yang terlibat dalam Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi karbon dan beradaptasi dengan perubahan iklim dan komitmen ini pada umumnya diperbaharui setiap lima tahun sekali. Dalam dokumen NDC pertama tahun 2016, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Kemudian dalam Enhanced NDC baru, target penurunan emisi karbon naik menjadi 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,2% dengan bantuan internasional. Dalam skenario normal atau *business as usual*, emisi karbon Indonesia pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai 2.869 juta ton karbondioksida ekuivalen (Mton CO_{2e}) dan dengan adanya Enhanced NDC, pemerintah telah menargetkan emisi karbon Indonesia pada tahun 2030 menjadi 1.953 Mton CO_{2e} dengan usaha sendiri atau menjadi 1,632 Mton CO₂ dengan bantuan internasional.

Salah satu sektor utama yang menjadi target penurunan gas rumah kaca adalah perubahan lahan karena sektor ini merupakan penyumbang emisi GRK terbesar. Secara nasional, emisi GRK tertinggi berasal dari praktek deforestasi dan alih fungsi lahan yaitu sebesar 60 – 70% yang dipicu oleh aktivitas eksplorasi dan eksploitasi pertambangan dan sumber daya alam lainnya (Den Elzen, et. al, 2013). Aktivitas alih fungsi lahan khususnya areal hutan menjadi areal pertambangan, pertanian, perkebunan dan pemukiman menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Hilangnya vegetasi mempengaruhi siklus karbon dimana kemampuan menyerap karbondioksida (CO₂) pada proses fotosintesis mengalami penurunan yang mengakibatkan berkurangnya biomassa dan karbon tanah. Meningkatnya konsentrasi GRK seperti karbondioksida (CO₂), metana (CH₄) dan dinitrogen oksida (N₂O) yang dihasilkan dari aktivitas manusia menyebabkan semakin meningkatnya radiasi matahari yang terperangkap di atmosfer dan menyebabkan naiknya suhu bumi. Secara umum komponen GRK terbagi menjadi enam yaitu



karbondioksida (CO_2), metana (CH_4), dinitrogen oksida (N_2O), hidrofluorokarbon (HFC_5), perfluorokarbon (PFC_5) dan sulfurheksafluorida (SF_6) namun dari semua jenis gas tersebut yang paling banyak kandungannya adalah CO_2) sedangkan gas lainnya memiliki kandungan yang sedikit.

Pada tahun 2021, tingkat emisi GRK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar sebesar 4.160,09 Ggram CO_2e , meningkat sebanyak 1.460,59 Ggram dari hasil inventarisasi tahun 2020 sebelumnya. Tingkat emisi tahunan ini menunjukkan terjadinya kecendrungan peningkatan emisi GRK. Dibandingkan dengan emisi tahun 2010 yang merupakan *base year* inventarisasi, tingkat emisi tahun 2021 meningkat sebanyak 1880,80 Ggram CO_2e . Tingkat emisi paling tinggi berasal dari sektor energi, sedangkan sektor kehutanan sudah menunjukkan terjadinya serapan emisi, meskipun serapan emisi GRK tahun 2021 lebih rendah dari pada serapan emisi pada tahun 2020. Emisi GRK yang dihasilkan setiap sektor yang diinventarisasi adalah sebagai berikut :

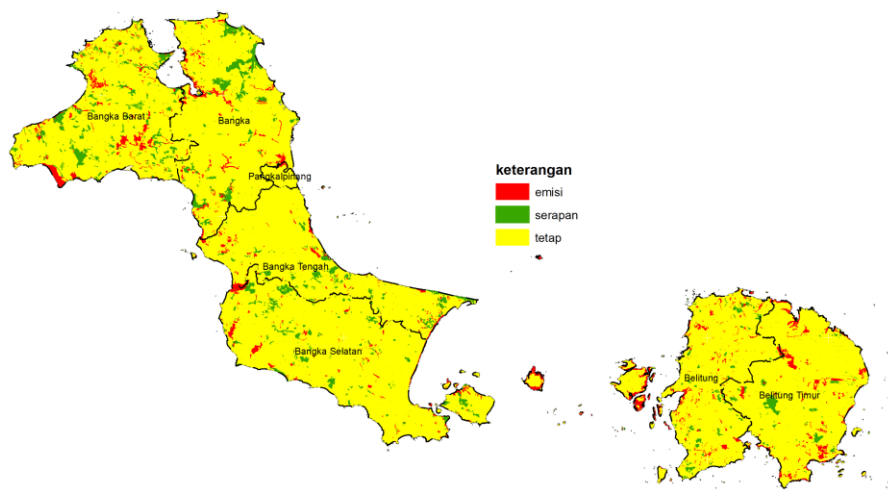
Tabel 2.1. 13 Tingkat Emisi GRK Sektoral tahun 2021

NO.	SEKTOR	EMISI (Ggram CO_2e)
1	Energi	3.491,68
2	IPPU	0,97
3	Pertanian	318,82
4	Kehutanan	-148,15
5	Limbah	496,77
Emisi Total		4.160,09

Berdasarkan tabel di atas jika menggunakan pendekatan perubahan penutup lahan sepanjang tahun 2020-2021 dan faktor emisi dapat diketahui berapa besar stok karbonnya. Hasil analisis tersebut menghasilkan informasi yang berkesesuaian dengan tabel di atas pada sektor kehutanan dimana pada tahun 2021 nilai stok karbonnya lebih tinggi atau dapat dikatakan sudah mengalami serapan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Gambar 2.1.64 di bawah ini memperlihatkan pola emisi dan



serapan berdasarkan asumsi bahwa perubahan penutup lahan vegetasi menjadi non vegetasi sifatnya adalah mengemisikan; perubahan penutup lahan non vegetasi menjadi vegetasi bersifat menyerap; penutup lahan yang tidak mengalami perubahan artinya bersifat tetap atau dalam artian tidak terjadi emisi ataupun serapan serta penutup lahan vegetasi menjadi penutup lahan lainnya yang masih bervegetasi maka akan dibandingkan berdasarkan data stok karbon masing-masing penutup lahannya. Data penutup lahan yang dipergunakan yaitu peta penutup lahan skala 1:250.000 tahun 2020 dan 2021 yang berasal dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIII Pangkalpinang.



Gambar 2.1. 64 Emisi dan Serapan sepanjang Tahun 2020-2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: IGT Penutup lahan skala 1:250.000 KLHK Tahun 2020-2021, Faktor Emisi KLHK (data diolah 2023)

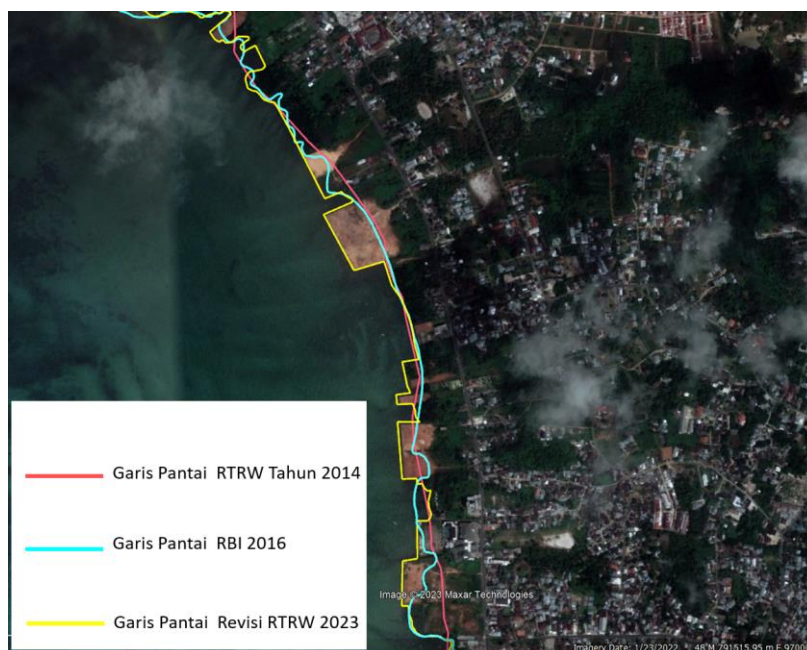
II.1.4.3 Perubahan Garis Pantai

Perubahan garis pantai dipengaruhi oleh faktor alami maupun faktor non alami/buatan. Faktor alami yaitu berupa akresi dan abrasi pantai. Dalam definisinya, akresi adalah penambahan daratan diluar garis pantai yang disebabkan oleh proses sedimentasi dari daratan atau sungai menuju arah laut (Muchlisin, et.al., 2011). Proses sedimentasi di daratan dapat disebabkan oleh pembukaan areal lahan, limpasan air tawar dengan volume yang besar karena hujan yang berkepanjangan dan proses transport sedimen dari badan sungai menuju laut. Akresi pantai juga dapat



menyebabkan terjadi pendangkalan secara merata ke arah laut yang lambat laun akan membentuk suatu dataran berupa delta atau tanah timbul. Tanah timbul ini menjadi salah satu isu dalam pembahasan revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Abrasi merupakan kebalikan dari proses akresi yaitu proses pengikisan yang terjadi akibat aktivitas gelombang, arus dan pasang surut sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan daratan (Damaywanti, 2013). Selain faktor alami, perubahan garis pantai dapat disebabkan pula oleh faktor antropogenik berupa kegiatan reklamasi. Reklamasi pantai adalah kegiatan pengurukan atau penambahan material di wilayah pesisir pantai yang bertujuan untuk memperluas wilayah daratan.



Gambar 2.1. 65 Perubahan Garis Pantai Akresi

Sumber: IGD Garis Pantai RTRW tahun 2014; IGD Revisi RTRW Tahun 2023; RBI Garis Pantai 2016; Citra Maxar diakses via Google Earth 2023

Gambar diatas merupakan salah satu contoh terjadinya perubahan garis pantai akibat kegiatan reklamasi di salah satu pesisir pantai di Kabupaten Belitong yang menimbulkan akresi sehingga terdapat penambahan luasan daratan sekaligus penambahan panjang garis pantai terutama di lokasi yang mengalami reklamasi tersebut.



Selain akresi karena faktor buatan berupa reklamasi, terdapat pula kegiatan penambangan yang membawa sedimen ke muara sungai juga akan berdampak pada terjadinya tanah timbul yang trend perubahannya diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Warna garis biru adalah garis pantai yang secara lambat laun mengalami perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dalam mengubah tata guna lahan di wilayah hulu salah satunya yang berkenaan dengan aktivitas pertambangan seperti yang telah disebutkan sebelumnya.



Gambar 2.1. 66 Trend akresi di salah satu pesisir timur pulau Bangka berdasarkan Pengamatan citra multitemporal

Sumber: CSRT – Maxar, Google Earth diakses tahun 2022

Sementara itu perubahan garis pantai yang terkait dengan abrasi atau pengikisan di pantai mengakibatkan garis pantai mengalami kemunduran ke arah darat sekaligus menyebabkan luasan daratan juga terus berkurang.



Gambar 2.1. 67 Perubahan Garis Pantai Abrasi

Sumber: IGD Garis Pantai Revisi RTRW Tahun 2023; RBI Garis Pantai 2016; Citra Maxar diakses via Google Earth 2023



II.1.4.4 Peningkatan Bencana Karhutla

Berdasarkan data BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karhutla merupakan kejadian bencana alam yang mendominasi sepanjang tahun 2023 dengan jumlah mencapai 944 titik lokasi kejadian. Dari sejumlah lokasi tersebut, estimasi luasan yang terbakar yaitu sekitar 2.057 hektar dan jumlah penduduk yang terdampak dari kejadian karhutla tersebut mencapai 3.290 jiwa. Lamanya periode musim kemarau di tahun 2023 dan efek El Nino merupakan faktor utama penyebab dari tingginya angka karhutla tersebut namun demikian faktor perubahan penutup lahan dengan cara dibakar juga tidak dapat dilepaskan dari salah satu penyebab terjadinya karhutla ini. Salah satu indikasinya terlihat dari kejadian karhutla yang berlangsung berulang di lokasi yang sama pada waktu yang berbeda.



Gambar 2.1. 68 Salah Satu Lokasi Kejadian Karhutla di Kabupaten Belitung Timur
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

I.1.4.5 Penurunan Keanekaragaman Hayati

Sejumlah tekanan yang dibebankan kepada lingkungan khususnya lahan oleh aktivitas antropogenik manusia baik dalam bentuk alih fungsi dan eksploitasi lahan yang berorientasi jangka pendek turut berdampak



pada kelangsungan keanekaragaman hayati yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.1. 14 Status Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
1	2	3	4	5	6	7
Tumbuhan	<i>Tristania whiteana</i> <i>Griff</i>	Pelawan air	ya			
Tumbuhan	<i>Tristannia obovata</i>	pelawan sungon	ya			
Tumbuhan	<i>Tristania maingayi</i>	pelawan merah	ya			
Tumbuhan	<i>Cantleya corniculata</i> <i>Howard</i>	Bedaru				
Tumbuhan	<i>Hopea sangal</i>	Cengal				
Tumbuhan	<i>Rhodemnia sp</i>	Kayu Batu				
Tumbuhan	<i>Palaquium spp</i>	Nyato				
Tumbuhan	<i>Ficus benamina</i>	Beringin				
Tumbuhan	<i>Ternanila catappa</i>	Ketapang				
Tumbuhan	<i>Schima wallichii</i>	Seru				
Tumbuhan	<i>Macaranga gigantean</i>	Mahang				
Tumbuhan	<i>Durio zibethinus</i>	Durian				
Tumbuhan	<i>Melaleuca leucacendra</i>	Gelam				
Tumbuhan	<i>Calophyllum inophyllum</i>	Bintangur				
Tumbuhan	<i>Nepenthes sp</i>	Kantong semar				
Tumbuhan	<i>Melastoma affine</i>	Karamunting				
Tumbuhan	<i>Imperata cylindrical</i>	Alang-alang				
Tumbuhan	<i>Rhizophora sp</i>	Bakau				
Tumbuhan	<i>Bruguiera sp</i>	Putut				
Tumbuhan	<i>Sonneratia sp</i>	Perepat				
Tumbuhan	<i>Avicenia sp</i>	Api-api				
Tumbuhan	<i>Syzigium bankense</i>	Pratima				
Mamalia	<i>Macaca fascicularis</i>	Monyet Ekor			Tidak	Ya
Mamalia	<i>Sus scrofa</i>	Babi hutan			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Varanus sp</i>	Biawak			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya muara			Ya	Tidak
Mamalia	<i>Cephalopacus bancanus</i>	Mentilin	Ya		Ya	Tidak
Mamalia	<i>Nycticebus bancanus</i>	Kukang	Ya		Ya	Tidak
Reptilia	<i>Varanus dumerilii</i>	Biawak Dumeril			Tidak	Ya



Reptilia	<i>Naja sumatrana</i>	Kobra Sumatera			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Naja sputarix</i>	Kobra Jawa			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Varanus rudicollis</i>	Biawak Serunai			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Gekko gekko</i>	Tokek Rumah			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Cyclemys dentata</i>	Kura-kura bergerigi			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Notochelys platynota</i>	Kura-kura punggung datar			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Siebenrockiella crassicolis</i>	Kura-kura pipi putih			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Ahaetulla prasina</i>	Ular Gadung			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Acrochordus javanicus</i>	Ular Kadus Jawa			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Bungarus candidus</i>	Ular Weling			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Craspedocephalus borneensis</i>	Ular Punai Kalimantan			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Craspedocephalus puniceus</i>	Ular Bandotan Pohon			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Reticulated phyton</i>	Ular Sanca Kembang			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Phyton brongersmai</i>	Ular Gedang Merah			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Dendrelaphis pictus</i>	Ular Tambang			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Enhydryn enhydryn</i>	Ular Air Pelangi			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Gonyosoma oxycephalum</i>	Ular Bajing			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Homalopsis buccata</i>	Ular Air Belang			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Lycodon capucinus</i>	Ular Cecak			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Ptyas korros</i>	Ular Koros			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Cryptelytrops albolabris</i>	Ular Bangkai Laut			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Trimeresurus hageni</i>	Ular Beludak Hagen			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Trimeresurus popeiorum</i>	Ular Beludak Pope			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Trimeresurus sumatranus</i>	Ular Punai Sumatera			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Tropidolaemus wagleri</i>	Ular Bandotan Candi			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Xenochrophis vittatus</i>	Ular Kisik			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Eutropis multifasciata</i>	Kadal Kebun			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Takydromus sexlineatus</i>	Kadal Rumput			Tidak	Ya



Reptilia	<i>Draco melanopogon</i>	Kadal Meluncur Berjanggut Hitam			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Draco obscurus</i>	Kadal Terbang			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Gonocephalus chameleontinus</i>	Bunglon Hutan			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Gonocephalus kuhlii</i>	Kadal Agamid			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Hemidactylus platyurus</i>	Cicak Rumah			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Cyrtodactylus consobrinus</i>	Tokek Berjari Peters			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Gehyra mutilata</i>	Cecak Gula			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Gekko smithi</i>	Tokek Hutan			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Hemidactylus frenatus</i>	Cecak Kayu			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Gecko kuhlii</i>	Tokek Terbang Kuhi			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Duttaphynus melanostictus</i>	Bangkong Kolong			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Fejervarya cancrivora</i>	Kodok Sawah			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Fejervarya limnocharis</i>	Kodok Tegalan			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Kaloula baleata</i>	Belentung			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Kaloul pulchra</i>	Belentung Kembang			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Occidozyga lima</i>	Bancet Hijau			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Polypedates coletti</i>	Katak Pohon Coletti			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Polypedates leucomystax</i>	Katak Pohon Bergaris			Tidak	Ya

Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, 2024

Hasil analisis spasial perubahan penutup lahan tahun 2021 dan 2022 menunjukkan peningkatan luasan pertambangan dan seperti yang telah diketahui bahwa aktivitas penambangan ini kebanyakan terjadi di sekitar wilayah jaringan sungai yang merupakan habitat buaya. Hal ini selanjutnya didukung oleh data dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, tercatat sebanyak delapan konflik antara buaya dan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini tidak terlepas dari rusaknya habitat alami buaya tersebut yang utamanya disebabkan oleh aktivitas manusia.



Gambar 2.1. 69 Seekor Buaya yang Berkonflik dengan Manusia Ditangkap di Kabupaten Bangka Selatan

Sumber: pos belitung tanggal 16 Oktober 2023

Penambangan laut menggunakan kapal keruk atau kapal isap sangat potensial merusak ekosistem laut. Pasir yang dikeruk kemudian dipisahkan antara bijih timah, pasir dan lumpur kemudian limbahnya dibuang ke laut mengakibatkan air laut menjadi keruh karena lumpur halus yang tercampur pada kolom perairan dan sedimennya menutupi terumbu karang sehingga menyebabkan terumbu karang menjadi rusak bahkan mati. Penambangan timah dengan menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP) menghasilkan limbah yang disebut tailing dengan rata-rata 250 m³/jam, dan TI apung masyarakat juga menghasilkan tailing dengan rata-rata 20 m³/jam. Maka dampak yang ditimbulkan dari satu KIP saja setara dengan 12 TI apung masyarakat yang tersebar hampir di seluruh perairan Bangka.

Perairan Pemuja di Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu wilayah yang terdampak kegiatan penambangan timah di laut, terlihat dari banyaknya KIP dan TI apung yang berada di sekitar pulau. Kondisi terumbu karang di Pulau Pemuja berada pada kategori rusak dimana tutupan karang yang hidup hanya sebesar 16,50%. Tingginya kadar lumpur (*silt*) di perairan yaitu sebesar 48,698%. Sedangkan nilai tutupan *Turf Alga* juga tinggi sebesar 19,967% hal ini mengindikasikan bahwa terumbu karang terdampak oleh sedimentasi lumpur. *Turf Alga* merupakan kelompok



makroalga bentik yang banyak menyebabkan kerusakan karang. Sedimentasi lumpur menjadi substrat yang sesuai bagi alga tersebut. Nilai tutupan karang hidup di Pulau Pemuja yang paling tinggi adalah jenis *Coral Massive* (CM) dengan nilai 10,233% kemudian *Coral Encrusting* (CE) 2,167%, *Coral Branching* (CB) 2,0%, *Acropora Digitate* 1,60% dan yang nilainya paling rendah adalah *Coral Mussrom* (CMR) sebesar 0,5%. Hal yang sama juga terjadi di Karang Malang Duyung, terjadi perubahan kondisi terumbu dari kategori baik menjadi rusak. Nilai IMK sebesar 0,15% mengindikasikan bahwa masih banyak terumbu karang. Terdapat tutupan lumpur sebesar 10,833% dan karang mati (*Dead Coral*) sebesar 0,8333% (Syari, Nugraha, & Hudatwi, 2022)

Rusaknya terumbu akan mengakibatkan berkurangnya sumber daya ikan di perairan Bangka Belitung karena terumbu karang merupakan habitat dan tempat berkembang biak ikan. Terumbu karang sangat penting untuk keberlangsungan dan keseimbangan biota-biota pada ekosistem laut karena menjadi tempat hidup bagi spesies tumbuhan laut, hewan laut dan mikroorganisme laut lainnya. Ekosistem terumbu sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan hidupnya terutama suhu, salinitas, sedimentasi dan eutrofikasi.

II.1.5 Response

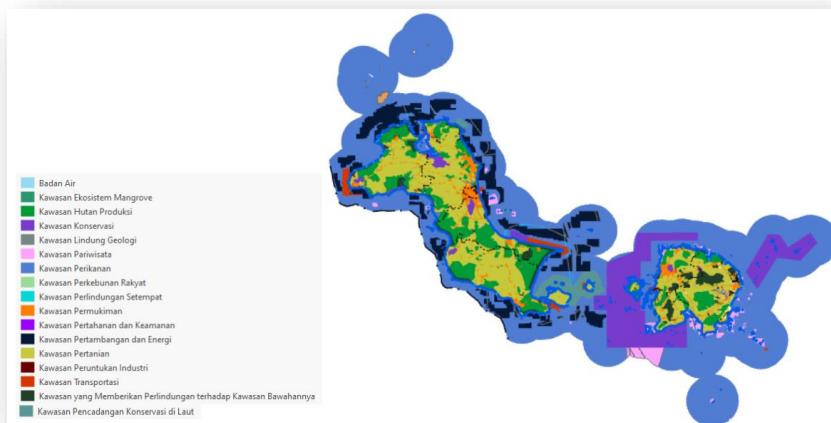
Kondisi lingkungan saat ini (*state*) merupakan refleksi dari tekanan (*pressure*) yang dibebankan kepada lingkungan secara terus menerus. Hal ini tidak terlepas dari faktor penyebab (*driving force*) yang membuat tekanan itu terus terjadi. Dampak (*impact*) yang ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan menjadi ancaman bagi kelangsungan ekosistem untuk itulah diperlukan sejumlah upaya (*responses*) untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang lebih besar.



II.1.5.1 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

A. Revisi Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 mulai melaksanakan kegiatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor 11 Tahun 2021** tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sesuai ketentuan. Revisi RTRWP dan integrasinya dengan RZWP3K juga sekaligus mengakomodasi dinamika yang berkembang seputar pemanfaatan ruang darat dan laut.



Gambar 2.1. 70 Rencana Pola Ruang Revisi RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Salah satu bagian penting dalam penyusunan revisi RTRWP yaitu mengenai arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi indikasi



arahan zonasi pola ruang dan struktur ruang provinsi; penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang; arahan pemberian insentif dan disinsentif serta arahan pengenaan sanksi. Beberapa indikasi arahan zonasi pada kawasan lindung diperlihatkan pada Tabel 2.1.15 berikut.

Tabel 2.1. 15 Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang Revisi RTRWP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kawasan Perlindungan Setempat		
Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
<ol style="list-style-type: none"> 1. cagar budaya dan ekosistem mangrove; 2. kegiatan hutan lindung dan lindung gambut; 3. kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan; 4. pengendalian dan pemeliharaan ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim; 5. kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; 2. kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan; 3. kegiatan perhutanan sosial; 4. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dan kegiatan kerja sama pembangunan jalan strategis; 5. kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, wisata terbatas, dan/atau perdagangan karbon di ekosistem gambut; 6. kegiatan pemanfaatan areal puncak kubah gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. pertanian, perikanan, dan permukiman, beserta jaringan prasarana sarana pendukungnya yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan; 8. kegiatan pertahanan dan keamanan; 9. kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di hutan lindung; 2. kegiatan mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; 3. menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; 4. merusak akuifer air tanah, dan mengubah bentang alam, termasuk membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam; 5. kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan hutan lindung dan kawasan lindung gambut.
Kawasan Konservasi		
Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan suaka alam, pelestarian alam, suaka margasatwa Laut, taman wisata alam Laut, kegiatan konservasi pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kegiatan konservasi maritim, dan kegiatan konservasi perairan; dan 2. kegiatan perlindungan dan pengamanan serta pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; 3. pembangunan dan pengembangan koridor satwa liar; 4. perlindungan mutlak habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut; 5. perlindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; 6. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; 7. transportasi perairan dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. rehabilitasi ekosistem Laut, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya; 9. pengawasan kawasan konservasi; 10. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; 11. kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam, koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, energi angin, energi panas matahari, dan energi panas bumi, wisata alam terbatas, pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk menunjang budi daya, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah, penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan yang diambil dari alam atau secara buatan; 2. sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada angka 1; 3. kegiatan pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh Masyarakat secara tradisional; 4. kegiatan keagamaan dan/atau adat-budaya, serta pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah; 5. kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan, perhutanan sosial berupa kemitraan kehutanan dan pembangunan jalan strategis; 6. pembangunan prasarana dan sarana; 7. pendirian dan/ atau penempatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, peruntukan industri, dan permukiman; 2. kegiatan yang merusak bentang alam, dan/atau merubah fungsi kawasan konservasi; 3. kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan konservasi di Laut; 4. kegiatan yang mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya; 5. kegiatan yang mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya; 6. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem; 7. pengambilan terumbu karang; 8. pembuangan sampah, limbah, atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran; 9. pertambangan terbuka, pembuangan (dumping), dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 10. kegiatan lain yang mengurangi nilai dan/atau mengganggu dan mengubah fungsi kawasan konservasi.



	<p>bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari dan pelayaran;</p> <p>8. pemanfaatan sumber daya ikan;</p> <p>9. wisata bahari dan pemanfaatan jasa lingkungan;</p> <p>10. pembangunan fasilitas umum;</p> <p>11. pemanfaatan air Laut selain energi;</p> <p>12. pembangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di Perairan Pesisir;</p> <p>13. penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	
Kawasan Pertanian		
Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
<ol style="list-style-type: none"> kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; kegiatan pembukaan dan pengolahan lahan, perbenihan dan perbibitan tanaman/ternak, penanaman benih, perlindungan tanaman dari organisme pengganggu, pemeliharaan kawasan pertanian, serta kegiatan panen dan pascapanen; perlindungan, pelestarian, pengayaan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya genetik hortikultura dan ternak asli atau lokal; penyediaan kawasan pengembalaan umum, penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian tumbuhan pakan ternak, serta pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; dan penelitian untuk pengembangan kawasan pertanian; perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan KP2B; perlindungan dan pelestarian fungsi lindung ekosistem gambut; kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan; 	<ol style="list-style-type: none"> kegiatan perlindungan setempat, perkebunan rakyat, perikanan, industri, pariwisata, serta pertahanan dan keamanan; perhutanan sosial; kegiatan pertambangan dan energi harus mempunyai jarak aman dengan kawasan pertanian yang sudah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kegiatan integrasi atau tumpang sari antara kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan dengan kegiatan perikanan, pariwisata, dan/atau kehutanan yang mendukung fungsi kawasan pertanian; permukiman perdesaan, sarana dan prasarana, pelayanan jasa pemerintahan, dan pelayanan sosial yang terintegrasi dengan kawasan pertanian dan untuk petani atau pekerja pertanian; kegiatan penyediaan prasarana budi daya kawasan pertanian; kegiatan pengolahan, distribusi, perdagangan, pemasaran, dan usaha wisata agro yang didukung penyediaan prasarana dan sarana penunjang; alih fungsi lahan KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi tidak dapat dilakukan untuk kepentingan umum atau terjadi bencana atau proyek strategis nasional; alih fungsi kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 	<ol style="list-style-type: none"> alih fungsi KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi; alih fungsi kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik; kegiatan perkebunan di kawasan perlindungan setempat pada sempadan sungai bertanggul, kegiatan peternakan di kawasan cagar budaya dan kawasan ekosistem mangrove, serta kegiatan menggembala ternak di kawasan sekitar danau atau waduk; kegiatan yang merusak irigasi dan prasarana kawasan pertanian, mengurangi kesuburan tanah, merusak lahan, membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; kegiatan menebang, perusakan atau penghilangan pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik; pertambangan di KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi, kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik; kegiatan lain yang mengganggu dan mengubah fungsi kawasan pertanian.
Kawasan Pertambangan Minerba		
Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
<ol style="list-style-type: none"> pertambangan mineral dan/atau batubara meliputi pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan pertambangan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, dan pembangkitan tenaga listrik; kegiatan pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di Wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara; kegiatan pertambangan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, dan prasarana pendukung pertambangan di Wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara; pertambangan tanah jarang di Pulau Kecil dengan luas di atas 10.000 	<ol style="list-style-type: none"> kegiatan pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi di kawasan pelestarian alam hanya untuk pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, Kawasan Lindung geologi tanpa melakukan kegiatan penggalian dan pengeboran, kawasan ekosistem mangrove, kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan; kegiatan pertambangan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, dan prasarana pendukung pertambangan di: 	<ol style="list-style-type: none"> kegiatan pertambangan eksplorasi di kawasan konservasi, Kawasan Lindung geologi, kawasan cagar budaya, serta kawasan pertahanan dan keamanan yang sudah ada; kegiatan pertambangan operasi produksi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> kawasan konservasi Wilayah darat dan Perairan Pesisir, kawasan pencadangan konservasi di Laut, kawasan cagar alam geologi terutama situs warisan geologi, kawasan imbuhan air tanah, cagar budaya, dan kawasan ekosistem mangrove; KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi; kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik; dan kawasan perikanan kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, serta kawasan pertahanan



<p>(sepuluh) hektare; 5. kegiatan lain yang selaras, tidak mengganggu, dan mengubah fungsi kawasan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan bawah tanah; 4. kawasan perlindungan setempat dengan menjaga dimensi palung sungai, tidak merubah batas badan danau atau waduk, dan mempunyai jarak aman dengan badan air; 5. kawasan perkebunan rakyat; 6. kawasan pertanian, kecuali KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi, kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik; dan 7. kawasan hutan produksi, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, serta kawasan pertahanan dan keamanan; 8. kegiatan pertambangan operasi produksi wajib mempunyai jarak aman terhadap: 9. kawasan cagar alam geologi terutama situs warisan geologi, kawasan imbuhan air tanah, cagar budaya, dan kawasan ekosistem mangrove; 10. KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi, kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik; 11. Kawasan Permukiman termasuk sarana pelayanan umum dan prasarana; dan 12. kawasan perikanan, kawasan pariwisata, serta kawasan pertahanan dan keamanan, guna mengurangi dampak negatif langsung dari kegiatan pertambangan; 13. pertambangan tanah jarang di Pulau Kecil dengan luas antara 100 (seratus) sampai dengan 10.000 (sepuluh) hektar. 	<p>dan keamanan yang sudah ada;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. pertambangan mineral dan batubara di Pulau Kecil dengan luas di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektare; 4. pertambangan tanah jarang di Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 (seratus) hektare; 5. pengambilan pasir laut di di Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 (seratus) hektare, kawasan ekosistem mangrove, kawasan terumbu karang, dan Pulau Kecil yang menyebabkan pengurangan luasan lebih dari 6. pertambangan yang mengganggu dan mengubah daya tarik wisata; 7. perpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi di kawasan pariwisata; 8. perpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi di Kawasan Permukiman perkotaan; 9. pertambangan tanpa izin, tidak mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan, mengurangi standar dan baku mutu lingkungan, menurunkan kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air, tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertambangan mineral dan batubara .
---	---	--

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

B. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044

Penyusunan KLHS telah diamanatkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pasal 2. Perubahan atau revisi pada Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) di dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini mengharuskan Pemerintah Daerah menyusun KLHS. Salah satu *output* penting dari dokumen ini berupa rekomendasi terhadap materi muatan teknis RTRW yaitu tujuan, kebijakan, strategi, struktur ruang, pola ruang dan program. Rekomendasi ini merumuskan arahan untuk perbaikan kebijakan, rencana, dan/atau program dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka



Kawasan Hutan Lindung. Rekomendasi yang dilakukan dengan memanfaatkan diluar dari kawasan hutan lindung dengan pendekatan kedekatan spasial. Lokasi yang dimaksud umumnya yaitu area penggunaan lainnya (APL).

- Rekomendasi di Pola Ruang Kawasan Permukiman

Berdasarkan hasil analisis pengaruh dan rumusan alternatif penyempurnaan, maka dirumuskan rekomendasi untuk kawasan permukiman sebagai berikut:

- Mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan infrastruktur hijau dan mendorong peningkatan efektifitas penggunaan bahan bakar dan sumber energi yang dapat meningkatkan perubahan iklim.
- Penundaan rencana pembangunan infrastruktur permukiman yang mendukung penurunan emisi GRK dan adaptasi perubahan iklim Dengan penerapan penggunaan teknologi non-emisi gas rumah kaca dan/atau teknologi ramah lingkungan.
- Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30% pada kawasan yang dimanfaatkan melalui reboisasi dan reklamasi, pemanfaatan sempadan sungai dan pantai, serta pemaksimalan RTH privat.
- Terhadap luasan yang tumpang tindih dengan PIPPIB gambut salah satunya yaitu di Kabupaten Bangka dengan luasan 318 ha, direkomendasikan untuk dijadikan kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya sampai dengan dilakukan klarifikasi lapangan dalam bentuk survei lahan gambut yang mengacu pada SNI 7925:2019 yang dilaksanakan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian dengan melibatkan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkalpinang serta akademisi dibidang gambut.

Gambar 2.1. 72 Rekomendasi KLHS di Kawasan Permukiman

Sumber: Dokumen KLHS Revisi Tata Ruang Prov Kep Babel Tahun 2024-2044, DLHK Kep Babel 2023

- Rekomendasi KLHS di Kawasan Hutan Produksi

Gambar 2.1. 73 Rekomendasi KLHS di Kawasan Hutan Produksi

Sumber: Dokumen KLHS Revisi Tata Ruang Prov Kep Babel Tahun 2024-2044, DLHK Kep Babel 2023



Lokasi pola ruang kawasan hutan produksi seluas 165 ha di Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat yang direpresentasikan pada titik tengah koordinat poligon $X = 544994,2$ dan $Y = 9798926,9$. Rumusan rekomendasi pada area sesuai gambar di atas:

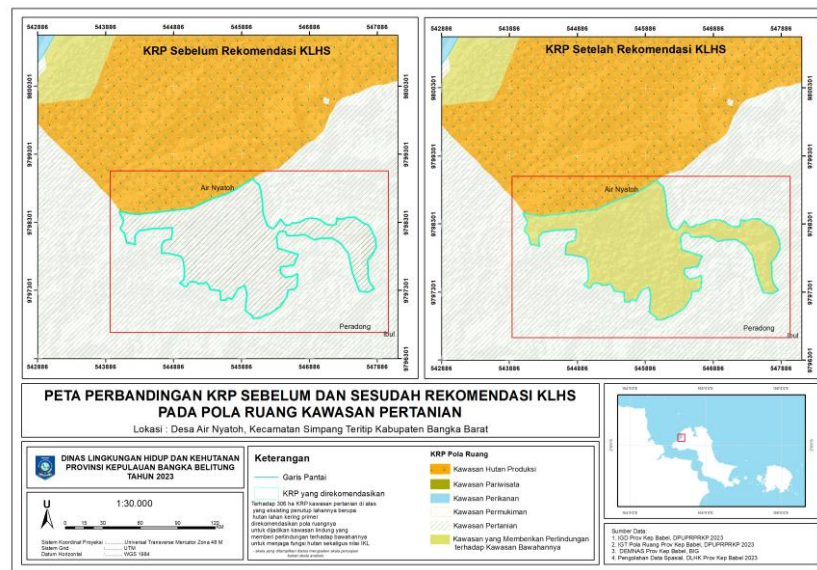
- Perubahan fungsi kawasan hutan HP ke HL untuk perlindungan hutan lahan kering primer sekaligus dalam rangka menjaga nilai IKL yang kecenderungannya terus menurun karena degradasi dan deforestasi penutup lahan hutan
 - Kawasan Hutan Produksi Tumpang Tindih dengan Penutup Lahan Hutan Mangrove Primer dan Arahkan Prioritas FOLU Net Sink (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
 - Lokasi seluas 165 ha tidak direkomendasikan untuk dijadikan sebagai pola ruang kawasan hutan produksi berdasarkan informasi geospasial tematik data penutup lahan tahun 2022 bahwa di lokasi tersebut merupakan hutan lahan kering primer dan diperkuat oleh hasil perekaman citra Planetscope tanggal 7 Oktober 2023 (sesuai dengan arahan FOLU Net Sink, lokasi tersebut merupakan prioritas penerapan pengayaan hutan alam).
 - Kawasan yang tidak direkomendasikan sebagai kawasan hutan produksi ini selanjutnya direkomendasikan menjadi kawasan lindung melalui mekanisme perubahan fungsi kawasan hutan dilihat dari kondisi eksistingnya yang berperan sebagai wilayah perlindungan air tanah dan direkomendasikan untuk pengajuan perubahan fungsi kawasan hutan dari hutan produksi menjadi hutan lindung dalam rangka perlindungan hutan alam primer sebagai wilayah perlindungan air tanah, kehati serta menjaga turunnya nilai indeks kualitas lahan.
- Rekomendasi KLHS di Kawasan Pertanian

Berdasarkan hasil kajian sebelumnya, sebagian lokasi kawasan pertanian seluas 306 ha di Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang



Teritip Kabupaten Bangka Barat yang direpresentasikan pada titik tengah koordinat poligon $X = 545647,4$ dan $Y = 9797973,2$, tumpang tindih dengan hutan lahan kering primer. Beberapa rekomendasi yang dirumuskan adalah:

- Lokasi seluas 306 ha tidak direkomendasikan untuk dijadikan sebagai pola ruang kawasan pertanian karena data penutup lahan tahun 2022 di lokasi tersebut merupakan hutan lahan kering primer dan diperkuat oleh hasil perekaman citra Planetscope tanggal 7 Oktober 2023 seperti yang diperlihatkan pada gambar di atas yang menunjukkan konsistensi penutup lahan hutan tersebut serta sesuai dengan arahan FOLU Net Sink bahwa lokasi tersebut merupakan prioritas pencegahan deforestasi mineral.
- Kawasan yang tidak direkomendasikan sebagai kawasan pertanian ini selanjutnya direkomendasikan menjadi kawasan lindung melalui mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan dari Area Penggunaan Lain menjadi Hutan Lindung dilihat dari kondisi eksistingnya yang berperan sebagai wilayah perlindungan air tanah dan direkomendasikan untuk pengajuan perubahan fungsi kawasan hutan dari hutan produksi menjadi hutan lindung dalam rangka perlindungan hutan alam primer sebagai wilayah perlindungan air tanah, kehati serta menjaga turunnya nilai indeks kualitas lahan.



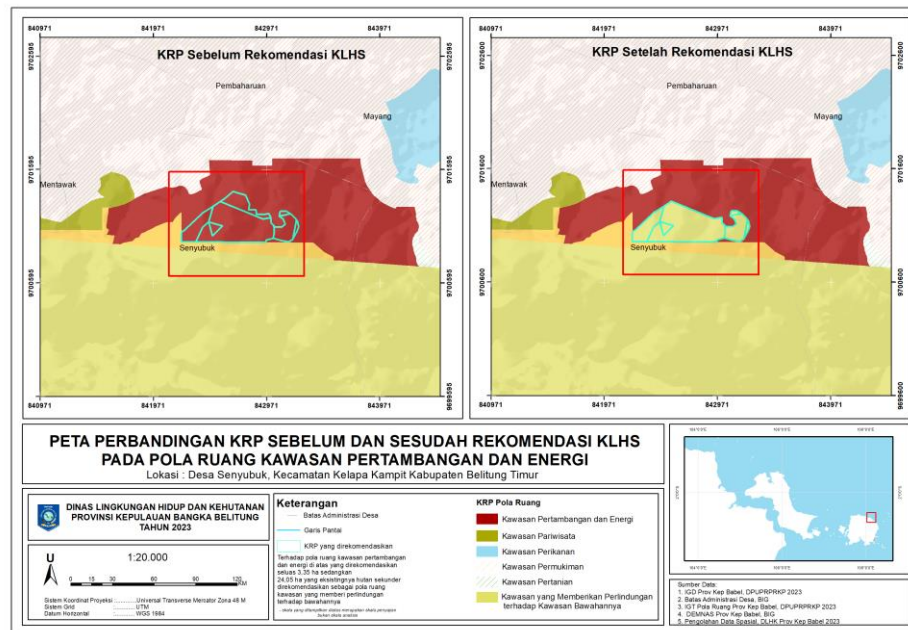
Gambar 2.1. 74 Rekomendasi KLHS di Kawasan Hutan Produksi
Sumber: Dokumen KLHS Revisi Tata Ruang Prov Kep Babel Tahun 2024-2044, DLHK Kep Babel 2023

- Rekomendasi KLHS di Kawasan Pertambangan dan Energi

Hasil kajian/analisis sebelumnya menemukan adanya tumpang tindih kawasan pertambangan dengan Penutup Lahan Hutan Lahan Kering Sekunder dan Arahkan Hutan Prioritas FOLU Net Sink (Pencegahan deforestasi mineral), sebagaimana terlihat pada gambar berikut. Lokasi kawasan pertambangan energi seluas 27,4 ha di Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur yang direpresentasikan pada titik tengah koordinat poligon X = 175419,3 dan Y = 9701138,3. Rekomendasi yang dirumuskan untuk area pada gambar berikut ini yaitu dilakukan minimize 3,35 ha yang dipertahankan sebagai kawasan pertambangan dan energi sedangkan 24,05 ha tidak direkomendasikan sebagai kawasan pertambangan dan energi karena IGT penutup lahan tahun 2022 didominasi oleh hutan lahan kering sekunder dan diperkuat oleh hasil perekaman citra PlanetScope tanggal 24 September 2023 yang menunjukkan konsistensi penutup lahan hutan kerapatan sedang serta sesuai dengan arahan FOLU Net Sink bahwa lokasi tersebut



merupakan prioritas pencegahan deforestasi mineral. Kawasan yang tidak direkomendasikan sebagai kawasan pertambangan dan energi itu selanjutnya direkomendasikan menjadi kawasan lindung dilihat dari kondisi eksistingnya yang berperan sebagai wilayah perlindungan air tanah.



Gambar 2.1. 75 KLHS di Kawasan Hutan Produksi

Sumber: Dokumen KLHS Revisi Tata Ruang Prov Kep Babel Tahun 2024-2044, DLHK Kep Babel 2023

C. Pembuatan Portal Layanan Pengaduan Khusus Terkait Pertambangan Ilegal

Sebagai salah satu bentuk peran serta aktif dari masyarakat dalam meminimalisir maraknya aktivitas penambangan timah secara ilegal maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuat layanan pengaduan terkait aktivitas tersebut secara online yang diberi nama "LAPOR PAK" atau Layanan Aspirasi Pengaduan secara Online dan Responsif dalam pelayanan publik melalui website <https://lapor.babelprov.go.id>.

Dibukanya layanan pengaduan ini juga sejalan dengan pembentukan satuan tugas khusus penambangan ilegal. Diharapkan dengan adanya layanan tersebut dapat sebesar mungkin meminimalisir terjadinya kegiatan-



kegiatan penambangan yang tidak mempunyai izin. Alur proses dalam portal "LAPOR PAK" ditampilkan pada gambar 2.1. 76 berikut ini.

The image shows the LAPOR YAK! web portal. The top banner features the logo and text: "LAPOR YAK! LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN SECARA ONLINE DAN RESPONSIF DALAM PELAYANAN PUBLIK". Below this, a quote states: "Sampaikan aspirasi, pengaduan, masukan maupun saran Anda untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik". A call to action says "Laporkan melalui WhatsApp ke nomor +62821-8064-0997". The bottom right of the banner shows the URL "lapor.babelprov.go.id".

The main content area is divided into two sections. The left section is the "Formulir Pengaduan" (Complaint Form) with fields for: "Nama Lengkap (*)", "N.LK (*)", "No. HP (*)", "Laporan Anda (*)", "Lokasi", "Lampiran File/Foto", and a "Lapor Yaki!" button. The right section is titled "ALUR MEKANISME LAPOR YAK!" and lists four steps: 1. Masyarakat/pelapor pertama kali mengirimkan informasi lokasi (share location) ke nomor +62821-8064-0997. 2. Pelapor akan menerima balasan WA berupa kode angka. 3. Pelapor kemudian mengirimkan foto kejadian/pesan teks/dokumen lainnya dengan wajib memuliskan kode angka tersebut dengan format (kode angka) jangan lupa tanda kurung diikuti pesan yang ingin disampaikan. Misal, jika kode angka yang diterima dari sistem adalah 5, maka format penulisan caption/keterangan: (5) Lapor kejadian saat ini seperti foto, pesan teks, atau dokumen lainnya. 4. Selanjutnya sistem mengirimkan konfirmasi, dan akan tersimpan dan tampil pada web https://lapor.babelprov.go.id/. The bottom right of this section also shows the URL "lapor.babelprov.go.id".

Gambar 2.1. 76 Alur Proses Pengaduan Melalui Lapor.Pak
Sumber: Diskominfo – Babelprov.go.id, diakses 2023

D. Upaya Preventif Terhadap Aktivitas Penambangan Timah Ilegal

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan upaya preventif terhadap aktivitas penambangan timah di perairan laut melalui kegiatan patroli tim pengawasan keselamatan dan keamanan wilayah laut ke sejumlah wilayah perairan yang terindikasi terdapat aktivitas penambangan ilegal tersebut. Melalui kegiatan ini dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku tambang untuk dapat sesegera mungkin mengurus perizinan secara legal sekaligus himbauan untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut sebelum mendapat tindakan tegas. Langkah preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka



Belitung ini hanyalah salah satu cara dalam memberantas pertambangan timah laut secara ilegal yang sudah berdampak negatif baik terhadap ekosistem lingkungan maupun terhadap mata pencaharian nelayan.



Gambar 2.1. 77 Plang Larangan Penambangan Timah secara Ilegal di Sekitar Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Kompas 28 Desember 2022, diakses 2023



Gambar 2.1. 78 Penertiban Tambang Timah Di Perairan Teluk Kelabat, 23 Juli 2022

Sumber: Antaranews, diakses 2023

II.1.5.2 Pengendalian Pemanfaatan Fungsi Kawasan Hutan

A. Inventarisasi Keterlanjuran Kegiatan Terbangun Dalam Kawasan Hutan

Kebijakan pembangunan di bidang kehutanan mengamanatkan bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi hutan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan menjaga fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan, seluruh kegiatan usaha di dalam



Kawasan hutan wajib memiliki perizinan berusaha di bidang kehutanan, persetujuan Menteri, kerja sama, atau kemitraan di bidang kehutanan dengan ancaman sanksi pidana bagi siapapun yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan analisis pada bagian *pressure* khususnya sub alih fungsi lahan diketahui adanya kegiatan perkebunan, pertambangan, pertanian hingga permukiman yang berada di dalam kawasan hutan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat terobosan kebijakan baru dengan menerapkan prinsip *ultimum remedium* yaitu mengedepankan pengenaan Sanksi Administratif sebelum dikenai sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak kesehatan, keselamatan, dan atau lingkungan.

Terkait dengan sanksi administratif dimaksud, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan sebagai turunan UU Cipta Kerja telah mengatur substansi tata caranya yang terdiri atas :

1. Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan;
2. tata cara penyelesaian terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang memiliki izin lokasi dan atau izin usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan;
3. tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap kegiatan usaha di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan;
4. tata cara perhitungan denda administratif;
5. PNPB yang berasal dari denda administratif
6. paksaan pemerintah

Berkenaan dengan implementasi peraturan tersebut sekaligus mengatasi permasalahan maraknya kegiatan perkebunan, pertambangan bahkan permukiman yang eksisting berada di dalam kawasan hutan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan



Hidup dan Kehutanan khususnya Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/ Produksi (KPHL/KPHP) telah mulai melakukan langkah awal berupa sosialisasi sekaligus pendataan kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan dan belum memiliki perizinan. Melalui kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam rangka untuk mendapatkan legalitas kegiatannya yang sudah terlanjur terbangun di kawasan hutan. Legalitas ini sangat penting agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.



Gambar 2.1. 79 Sosialisasi dan Inventarisasi Keterlanjuran Kegiatan Terbangun di Dalam Kawasan Hutan oleh KPHP Jebu Bembang Antan dan KPHP Rambat Menduyung, 10 Februari 2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

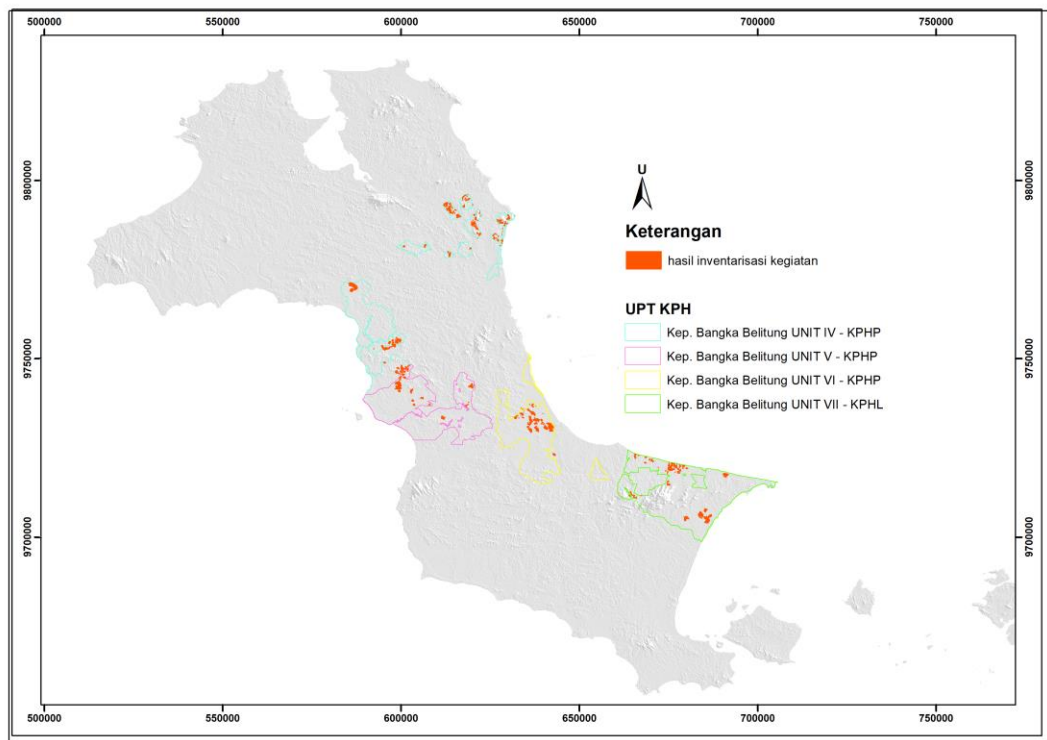


Gambar 2.1. 80 Sosialisasi dan Inventarisasi Keterlanjuran Kegiatan Terbangun di Dalam Kawasan Hutan oleh KPHP Sungai Sembulan, 28 Februari 2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



Gambar 2.1. 81 Verifikasi Lapangan Keterlanjuran Kegiatan Terbangun di Dalam Kawasan Hutan oleh KPHP Jebu Bembang Antan
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

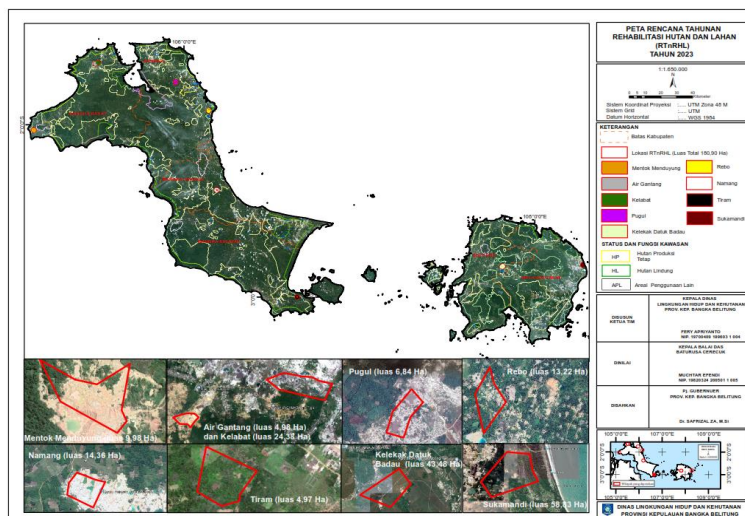


Gambar 2.1. 82 Hasil Inventarisasi Kegiatan Terbangun Dalam Kawasan Hutan di UPT KPHP Sigambir Kotawaringin dan UPT KPHP Sungai Sembulan
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



II.1.5.3 Pengendalian Kerusakan Lahan

A. Rehabilitasi Hutan dan Lahan



Gambar 2.1. 83 Rencana Rehabilitasi Lahan Tahun 2023

Sumber: DLHK Prov Kep Babel, 2024

Berdasarkan PermenLHK 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dinyatakan pengertian Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yaitu upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan merupakan sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan beberapa perangkat daerah terkait di beberapa wilayah kabupaten/kota dengan jumlah total bibit yang ditanam sebanyak 125.044 buah. Adapun jenis bibit yang paling banyak ditanam yaitu jenis kopi.



Gambar 2.1. 84 Contoh Progress Reklamasi di Air Lekok Mapur

Sumber: CSRT Maxar – Google Earth, diakses 2024



Rekapitulasi rehabilitasi hutan dan lahan sepanjang tahun 2023 yang telah dilaksanakan oleh BPDAS Baturusa Cerucuk disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. 16 Realisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh BPDAS Baturusa Cerucuk Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi Penanaman	Penghijauan				Reboisasi		
			Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Jumlah Pohon Hidup (batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bangka Selatan	Desa Payung, Kec. Payung	60	60	64000	17941			
2	Bangka Selatan	Desa Payung, Kec. Payung	25	25	30000	13880			
3	Bangka Tengah	Desa Puput, Kec. Simpang Katis	50	50	60000	21089			
4	Bangka Tengah	Desa Celuak, Kec. Simpang Katis	25	25	30000	6220			
5	Bangka Tengah	Desa Namang, Kec. Namang	25	25	30000	12344			
6	Bangka	Desa Pugul, Kec. Riau Silip	25	25	30000	4310			
7	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau					150	150	165000
8	Belitung Timur	Desa Dendang, Kec. Nyuruk					40	40	44000
9	Belitung Timur	Desa Simpang Renggang, Kec. Simpang Tiga					30	30	33000

Sumber: BPDAS Baturusa Cerucuk, 2024

Sedangkan rekapitulasi rehabilitasi hutan dan lahan sepanjang tahun 2023 berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlihatkan sebagai berikut.

Tabel 2.1. 17 Realisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berdasarkan Data DLHK Prov Kep Babel Tahun 2023

NO	KEGIATAN	REALISASI PENANAMAN	
		LUAS (Ha)	JUMLAH BATANG
1	2	3	4
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Sumber dana		
1	APBD :		



	- Mangrove	4	13.2
	- Darat	80,31	16.061
2	Kebun Bibit Rakyat (KBR) BPDAS	125	137.5
3	RHL BPDAS	70	77
4	Pembagian Bibit BPDAS	38	15
5	Persemaian BPDAS	104	65
6	RHL Sumber Dana Perimbangan Keuangan (DAK Kehutanan dan DBH DR)	-	-
7	Reklamasi Hutan Bekas Tambang (Rehabilitasi DAS)	1.971	2.168.100
8	Hutan Rakyat	-	-
9	Hutan Kota	-	-
10	Penghijauan Lingkungan (APBD, APBN DAN DAK)	-	-
11	PBPH		
	- Inhutani	2.650,00	30.265.434
	- Agrindo Persada Lestari	1,00	400
	- Bangun Rimba Sejahtera	19,02	25.354
	- Istana Kawi Kencana	483,22	251.237
	- Indo Sukses Lestari Makmur	49,76	24.012
	- Hutan Lestari Raya	14,65	21.131
12	Lain-lain		
	- Kepolisian	7,20	4.5
	- Instansi dan Lembaga Lain	3,25	3.578
	TOTAL	5.619,91	33.087.507,00

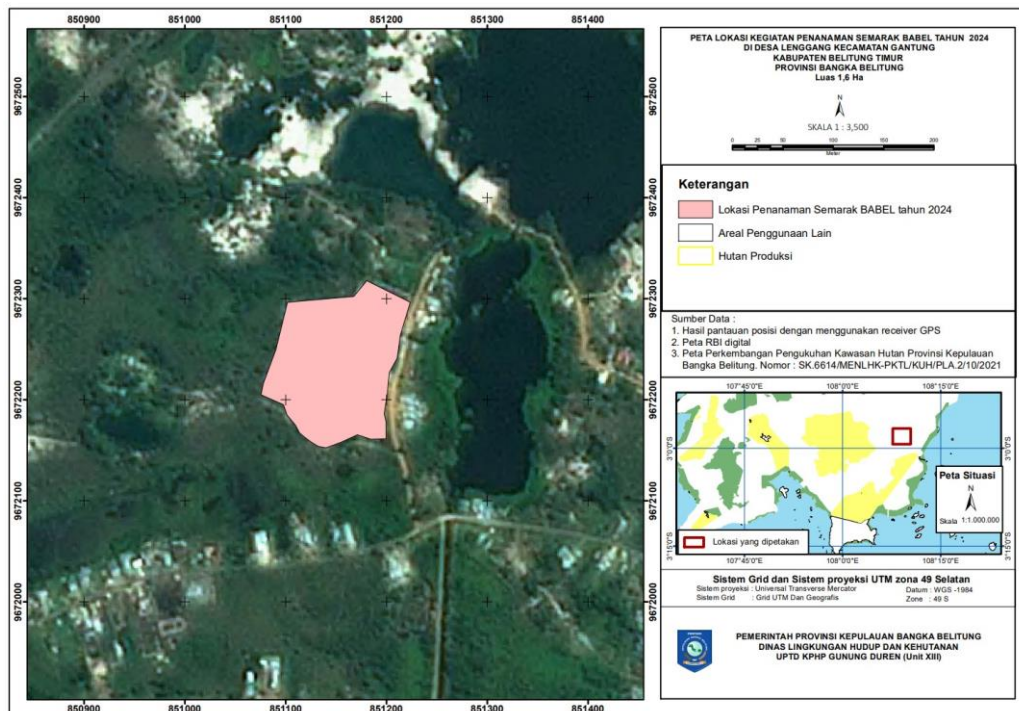
Sumber: DLHK Prov Kep Babel, 2024

B. Semarak Babel

Program SEMARAK BABEL atau Semangat Menanam Rakyat Bangka Belitung merupakan inisiasi Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka melestarikan lingkungan, meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup khususnya indeks kualitas lahan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus melanjutkan program Hijau Biru Babelku yang telah dilaksanakan oleh pj gubernur sebelumnya. Selain melakukan berbagai upaya perbaikan kualitas tutupan lahan dengan *leading Sector* Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Babel Menanam) dengan melakukan penanaman di lahan kritis, program ini juga menyasar pada peningkatan komoditas pertanian untuk mengatasi inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya melakukan penanaman bibit cabe dan buah-buahan



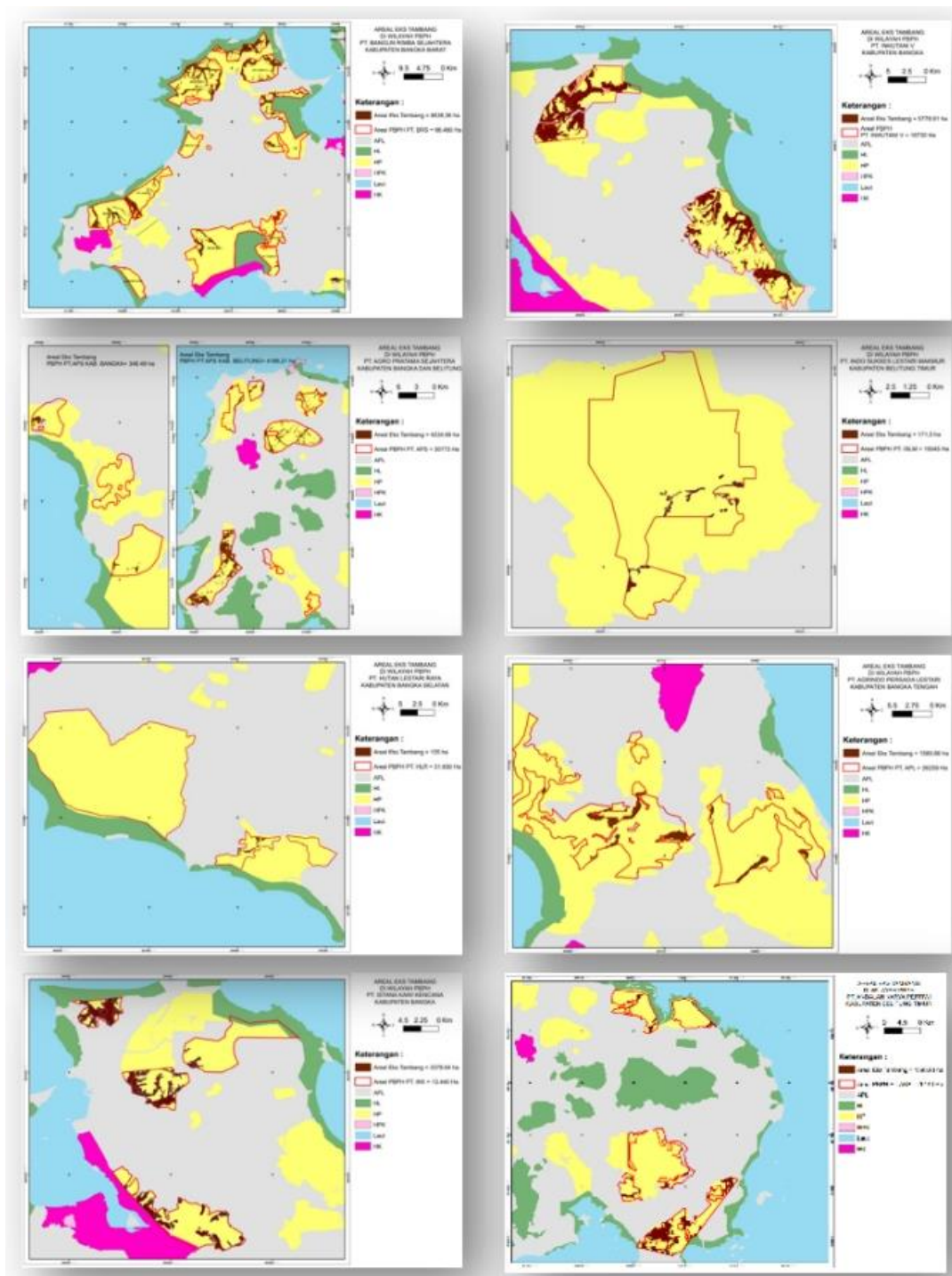
secara massif dengan *leading Sector* Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (untuk Babel Berkebun).



Gambar 2.1. 85 Salah Satu Lokasi Usulan Semarak Babel 2024

Sumber: DLHK Prov Kep Babel, 2024

Lokasi penanaman Babel Menanam 1 Juta Pohon tahun 2024 oleh pemegang PBPH yaitu pada areal konsesi PBPH sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024, areal lahan kritis serta areal bekas pertambangan dengan mekanisme penanaman yang berasal dari benih biji, stek maupun penanaman oleh pemegang PBPH dengan melibatkan masyarakat setempat. Dari luasan PBPH tersebut di atas, terkait dengan lokasi penanaman Babel Menanam 1 Juta Pohon di tahun 2024 masih menunggu data lokasi tanam dari pemegang PBPH. Komitmen dari semua pihak sangat penting dalam menyukseskan pelaksanaan program ini.



Gambar 2.1. 86 Lokasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: DLHK Prov Kep Babel, 2024



C. Pemanfaatan FABA untuk reklamasi area bekas tambang

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan direktorat jenderal ketenagalistrikan serta direktorat jenderal mineral dan batubara sepakat untuk melaksanakan optimalisasi serta mendorong pemanfaatan FABA (*fly ash bottom ash*) dari PLTU berbahan bakar batubara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai material pengisi (*backfilling*) di bekas lubang tambang pada kegiatan reklamasi dan pasca tambang.



Gambar 2.1. 87 Rapat Pembahasan Pemanfaatan FABA dalam Reklamasi Lahan Bekas Tambang di Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: antaranews tanggal 27 Juli 2022

Pemanfaatan FABA yang sudah dikeluarkan dari kategori limbah B3 sudah memiliki dasar hukum yaitu antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada pasal 465 ayat 2 huruf a dan b serta Peraturan Menteri LHK Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Beracun dan Berbahaya pasal 21 ayat 2 huruf a dan b yang menyatakan bahwa penimbunan limbah non B3 dapat dilakukan pada fasilitas penimbunan limbah B3 berupa: penimbunan akhir



limbah non B3 dan penempatan di area bekas tambang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat mendukung pemanfaatan FABA ini sebagai bentuk perbaikan lahan bekas tambang yang akan berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas lingkungan.

D. Pemanfaatan Kompos Block

Salah satu kendala yang dihadapi dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah rendahnya ketersediaan unsur hara yang ada di lokasi penanaman yang tidak terlepas dari kekritisian lahan yang terjadi akibat sejumlah aktivitas yang berlangsung di permukaan hingga ke dalam tanah seperti pertambangan. Pengembalian keadaan lahan kepada kondisi awal memerlukan waktu yang lama, karena rusak komponen-komponen tanah, kandungan bahan organik yang rendah juga menyebabkan rendahnya aktivitas dan populasi mikroba. Untuk itu dibutuhkan unsur hara yang menunjang agar pertumbuhan tanaman dapat optimal sesuai dengan jenis tanaman yang direkomendasikan.



Gambar 2.1. 88 Penggunaan Kompos Block Untuk Lahan Bekas Tambang
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi ketersediaan unsur hara melalui pemberian pupuk dasar atau pupuk tambahan media tanam dengan menggunakan pupuk dasar atau pupuk organik dan pupuk anorganik yang bersifat slow release. Penggunaan kompos block dalam rehabilitasi hutan dan lahan (Gambar 2.1.90) dengan komposisi terdiri dari 30 % Serat fiber / Jongkos janjang kosong, 30 % Abu Boiler, 30 % Solid sawit dan 10 % lainnya berupa , Enzim cair dan jelly sangat banyak manfaatnya seperti saat tanaman di lakukan penanaman sudah tersedia unsur hara yang akan di konsumsi oleh tanaman, penanaman lebih praktis, biaya pemupukan lebih murah, pemeliharaan tanaman lebih mudah dan efektifitas pemupukan lebih efisien serta secara teknis Efektivitas dan efisiensi pemupukan dapat dicapai dengan mengacu lima tepat pemupukan yaitu tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat sasaran (Suriah, 2022).

E. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selain upaya preventif berupa sosialisasi ataupun pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan berusaha , upaya represif penegakan hukum sangat dipandang perlu untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang lebih besar akibat tekanan-tekanan yang diberikan kepada lahan akibat aktivitas antropogenik yang terindikasi melanggar undang-undang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama aparat penegak hukum terus aktif melaksanakan penertiban aktivitas tambang timah ilegal untuk mencegah kerusakan lingkungan serta kawasan hutan yang lebih luas lagi. Sepanjang tahun 2022, Polres Belitung Timur masuk ke dalam jumlah tertinggi se Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam hal penindakan kasus ilegal mining/ tambang ilegal. Angka tersebut jauh meningkat dibanding tahun 2021, bahkan meningkat hingga 355 persen yang sebelumnya 9 kasus kini meningkat menjadi 32 kasus (Belitung



Tribunnews, 2022). Beberapa dokumentasi terkait penegakan hukum tersebut diantaranya yaitu:

- Direktorat Polairud Polda Bangka Belitung mengamankan tersangka penambangan ilegal yang merambah Hutan Lindung Sembulan, Pantai Batu Ampar, Desa Penagan, Kabupaten Bangka 24 Agustus 2022. Penangkapan bermula dari pengaduan masyarakat terkait adanya aktivitas penambangan ilegal di lokasi tersebut. Tim kemudian menemukan aktivitas tambang ilegal dengan alat TI Sebu di perairan tersebut dengan jumlah ponton sekitar 200 unit (Bangkapos.com, 2023).



Gambar 2.1. 89 Upaya Penegakan Hukum Aktivitas Tambang Ilegal di Hutan Lindung Sembulan, Pantai Batu Ampar, Desa Penagan, Kabupaten Bangka 24 Agustus 2022

Sumber: Bangkapos.com, diakses 2023

- Penetapan Tersangka Kasus Perambahan Hutan Produksi Sungai Sembulan

Hasil patroli pengamanan hutan gabungan yang terdiri dari Balai Gakkum LHK Sumatera, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UPT KPHP Sigambir Kotawaringin, Babinsa Desa Penagan, Bhabinkamtibmas Desa Penagan dan PT. Agro Pratama



Sejahtera menemukan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang diperkirakan berumur kurang dari satu tahun serta bangunan pondok kerja yang berlokasi dalam hutan produksi Sungai Sembulan. Selanjutnya penyidik menjerat tersangka dengan pasal 50 ayat (3) huruf a Jo. Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada paragraf 4 pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 7,5 milyar (<https://gakkum.menlhk.go.id>)



Gambar 2.1. 90 Upaya Penegakan Hukum Aktivitas Pembukaan Kebun di dalam Hutan Produksi Sungai Sembulan, 7 November 2022

Sumber: <https://gakkum.menlhk.go.id/>

II.1.5.4 Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Konferensi Perubahan Iklim Glasgow (COP 26) yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober – 12 November 2021 di Glasgow, Skotlandia telah menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Dokumen *Glasgow Climate Change Pact* (GCP). Glasgow Climate Pact menegaskan rencana untuk menjaga kenaikan suhu global tidak melebihi 1,5 derajat Celsius, mengurangi laju deforestasi, mengurangi penggunaan batubara secara



bertahap dan target pengurangan emisi metana. Kesepakatan ini juga mendesak pengurangan emisi serta penggunaan energi terbarukan dan pendanaan bagi negara-negara berkembang.

Komitmen Indonesia direfleksikan dalam dokumen nasional yaitu Updated Nationally Determined Contribution (NDC) dan Long-term strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050). Dokumen NDC memuat target komitmen Indonesia dalam penurunan emisi GRK dan peningkatan ketahanan iklim dan dalam dokumen LTS-LCCR memuat visi dan formulasi kebijakan pengendalian perubahan iklim dalam jangka panjang. Dalam menghadapi perubahan iklim maka upaya adaptasi dan mitigasi menjadi sangat penting dilakukan dan mendesak untuk menghindari bencana dan kerugian yang lebih besar akibat terjadinya perubahan iklim.

Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim yang sudah terjadi atau diperkirakan terjadi di masa depan. Adaptasi perubahan iklim sangat relevan dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) terutama pada tujuan SDGs 2 (Pemberantasan Kelaparan) serta SDGs 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat) sedangkan mitigasi perubahan iklim mencakup upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global. Program dan kegiatan mitigasi sangat berkaitan erat dengan SDGs tujuan 7 (Energi Terbarukan dan Terjangkau); SDGs 11 (Kota yang Berkelanjutan) serta SDGs 13 (Tindakan terhadap Perubahan Iklim). Beberapa program dalam upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim yang telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya yaitu:



A. Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Sumber penghasil gas rumah kaca sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti alih fungsi lahan, penggunaan energi listrik yang berlebihan, penggunaan pestisida dan pupuk kimia, kotoran ternak dari peternakan, kebakaran hutan dan lahan, illegal logging, pengelolaan sampah yang tidak terkelola dengan baik dan lain-lain. Oleh sebab itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan inventarisasi gas rumah kaca (IGRK). Penyelenggaraan IGRK adalah proses yang berkesinambungan dalam memperoleh data dan informasi terkait tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi GRK dari berbagai sumber emisi dan penyerapnya. Dengan memahami sumber emisi dan jumlah emisi yang dihasilkan maka pemerintah daerah dapat mengidentifikasi sektor mana yang berkontribusi pada masalah perubahan iklim sehingga dapat mengembangkan strategi dan perencanaan mitigasi yang tepat.

Update data GRK dilakukan setiap tahun dan pelaporannya juga dilakukan setiap tahun mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Inventarisasi GRK juga berlaku pada usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan para pelaku usaha yang berpotensi mengeluarkan emisi GRK. Hal ini tertuang dalam pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.

DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menyampaikan laporan IGRK tahun 2021 tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Maret 2022 yang memuat profil GRK mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2020 yang perhitungannya diproses melalui aplikasi signsmart. Laporan tersebut sudah mendapat *review* sesuai dengan surat yang diterima dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: S.18/IGAS/IGRK/PPI.2/2/2023 tanggal 7 Februari 2023. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk tim koordinasi dan tim



kelompok kerja berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/461/DLHK/2022. Tim ini selain melibatkan pegawai DLHK juga instansi terkait yang terlibat dalam pengumpulan data aktivitas yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Badan Pusat Statistik.

Untuk meningkatkan kapasitas pemahaman serta pengetahuan dalam melakukan inventarisasi termasuk melakukan update data dan informasi dengan menggunakan aplikasi berbasis web yakni signsmart, maka dilaksanakan rapat koordinasi dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan dan pelaporan inventarisasi emisi GRK tahun 2022 dengan mengundang tim pokja dan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota. Pada kegiatan tersebut dilakukan evaluasi pada masing-masing kabupaten/kota terkait pelaporan IGRK dan pengisian data pada aplikasi signsmart karena kabupaten/kota juga mempunyai kewajiban yang sama untuk menyampaikan laporan IGRK ke provinsi selaku pembina.

Tabel 2.1. 18 Progress IGRK Kabupaten/Kota

Kabupaten/kota	IGRK	Tahun 2021	Tahun 2022
Pangkalpinang	Signsmart	√	√
	Laporan	x	-
Bangka	Signsmart	√	√
	Laporan	x	-
Bangka Tengah	Signsmart	x	√
	Laporan	x	-
Bangka Barat	Signsmart	√	√
	Laporan	√	-
Bangka Selatan	Signsmart	x	x
	Laporan	x	-
Belitung	Signsmart	x	√
	Laporan	x	-
Belitung Timur	Signsmart	x	x
	Laporan	x	-

Ket: √ = sudah melakukan X = belum melakukan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi kepulauan Bangka Belitung, 2022



Terhadap kabupaten/kota yang belum secara rutin menyampaikan laporan IGRK dan melakukan pengisian data di *signsmart*, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan pembinaan secara berkala.



Tahun	No.	Nama Kabupaten/Kota	Input Energi	Input IPPU	Input Pertanian	Input Kehutanan	Input Limbah
2021	1.	KAB. BANGKA	23 %	0 %	100 %	0 %	67 %
	2.	KAB. BANGKA BARAT	34 %	0 %	0 %	0 %	34 %
	3.	KAB. BANGKA SELATAN	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	4.	KAB. BANGKA TENGAH	56 %	0 %	100 %	50 %	100 %
	5.	KAB. BELITUNG	67 %	0 %	100 %	0 %	50 %
	6.	KAB. BELITUNG TIMUR	12 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	7.	PANGKAL PINANG	34 %	43 %	64 %	50 %	100 %

Gambar 2.1. 91 Dokumentasi rapat koordinasi dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan dan pelaporan inventarisasi emisi GRK tahun 2022
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Komitmen terhadap pengendalian perubahan iklim nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca diimplementasikan pemerintah provinsi dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 36 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK). Diharapkan dokumen ini menjadi pedoman dalam menyusun RPJPD, RPJMD dan RTRW provinsi/kabupaten/kota yang selanjutnya menjadi masukan dan dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Untuk mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan perlu dukungan sistem pemantauan yang baik untuk dapat mengevaluasi kinerja dari aksi mitigasi yang dilakukan. Oleh sebab itu Kementerian PPN/Bappenas membentuk sebuah sistem pemantauan evaluasi dan pelaporan aksi mitigasi atau yang disebut PEP berbasis web. Aplikasi ini dinamakan AKSARA yang berguna sebagai alat bantu dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja dari



pembangunan rendah karbon (PRK) di daerah dengan koordinatonya adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda). Kegiatan pelaksanaan dan pemantauan aksi PRK terbagi menjadi kelompok kerja (pokja) berdasarkan sektor, dimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pokja sektor berbasis lahan dan sektor limbah. Berikut ini beberapa aksi yang sudah dilakukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan pembangunan rendah karbon yang diinput melalui *platform* aksara.

Tabel 2.1. 19 Aksi Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaporkan melalui Aksara periode tahun 2018-2022

No.	Nama Kegiatan	Tahun Kegiatan	Bidang PPRK	Potensi Serapan Emisi (ton CO ₂ eq)	Status Pelaporan
1.	Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS)	2022	Lahan kategori peningkatan cadangan karbon	9,34	Dilaporkan tanggal 2 Maret 2023
2.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas hortikultura (cabai besar)	2022	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	57,20	Disetujui tanggal 15 Februari 2023
3.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas hortikultura (cabai kecil)	2022	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	28,60	Disetujui tanggal 15 Februari 2023
4.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas hortikultura (bawang merah)	2022	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	18,99	Disetujui tanggal 15 Februari 2023
5.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas perkebunan (lada)	2022	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	366,67	Disetujui tanggal 24 Februari 2022
6.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas hortikultura (cabai besar)	2022	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	5,87	Disetujui tanggal 24 Februari 2022
7.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas hortikultura (cabai kecil)	2022	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	2,93	Disetujui tanggal 24 Februari 2022
8.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas hortikultura (bawang merah)	2022	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	0,29	Disetujui tanggal 24 Februari 2022



No.	Nama Kegiatan	Tahun Kegiatan	Bidang PPRK	Potensi Serapan Emisi (ton CO ₂ eq)	Status Pelaporan
9.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas hortikultura (durian)	2022	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	20,17	Disetujui tanggal 24 Februari 2022
10.	Melaksanakan penyaluran benih padi bersertifikat	2020	Lahan kategori varietas padi rendah emisi	1.151,43	Perlu direvisi tanggal 8 Maret 2021
11.	Peningkatan penerapan pengelolaan tanaman terpadu tanaman pangan (GP-PTT)	2020	Lahan kategori pengelolaan tanaman terpadu (PTT)	182,46	Disetujui tanggal 1 Maret 2021
12.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas perkebunan	2020	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	249,33	Perlu revisi tanggal 8 Maret 2021
13.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas tanaman pangan	2020	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	2,05	Perlu revisi tanggal 8 Maret 2021
14.	Melaksanakan penyaluran benih padi bersertifikat	2019	Lahan kategori varietas padi rendah emisi	4.389,84	Dilaporkan tanggal 1 Maret 2021
15.	Peningkatan penerapan pengelolaan tanaman terpadu tanaman pangan (GP-PTT)	2019	Lahan kategori pengelolaan tanaman terpadu	355,80	Disetujui tanggal 1 Maret 2021
16.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas perkebunan	2019	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	548,53	Disetujui tanggal 1 Maret 2021
17.	Bantuan UPPO mendukung budidaya padi organik	2019	Lahan kategori unit pengolah pupuk organik (UPPO)	2.903,43	Disetujui tanggal 1 Maret 2021
18.	Rehabilitasi hutan dan lahan	2020	Lahan kategori peningkatan cadangan karbon	4.780,48	Disetujui tanggal 9 Maret 2021
19.	Pemberian bibit tanaman produktif kepada masyarakat	2019	Lahan kategori peningkatan cadangan karbon	2.290,86	Disetujui tanggal 18 Maret 2020
20.	Peningkatan penerapan pengelolaan tanaman terpadu tanaman pangan (GP-PTT)	2018	Lahan kategori pengelolaan tanaman terpadu (PTT)	364,92	Disetujui tanggal 18 November 2019
21.	Melaksanakan penyaluran benih bersertifikat	2018	Lahan kategori varietas padi rendah emisi	2.398,82	Disetujui tanggal 18 November 2019
22.	Bantuan UPPO mendukung budidaya padi organik	2018	Lahan kategori unit pengolah	2.568,42	Disetujui tanggal 20



No.	Nama Kegiatan	Tahun Kegiatan	Bidang PPRK	Potensi Serapan Emisi (ton CO ₂ eq)	Status Pelaporan
			pupuk organik (UPPO)		Desember 2019
23.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas hortikultura	2018	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	44,0	Disetujui tanggal 18 November 2019
24.	Penggunaan pupuk organik dalam kegiatan penanaman komoditas perkebunan	2018	Lahan kategori penggunaan pupuk organik	491,33	Disetujui tanggal 18 November 2019

Sumber: https://pprk.bappenas.go.id/aksara/dashboard/kegiatan_mitigasi_v2/

Perencanaan pembangunan rendah karbon bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi GRK dan intensitas emisi GRK serta meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Kapasitas sumber daya alam termasuk emisi GRK dan intensitas emisi GRK, tutupan lahan dan air menjadi faktor penentu dalam merumuskan kebijakan dan menetapkan target pembangunan rendah karbon. Salah satu implementasi pembangunan rendah karbon di Bangka Belitung yang didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui dana perwakilan perubahan iklim Indonesia (ICCTF) adalah pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai taman wisata mangrove dalam upaya rehabilitasi ekosistem dan sekuestrasi karbon kawasan Belitung Mangrove Park (BMP) di Desa juru Seberang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Proyek ini memberikan dampak bagi masyarakat lokal dalam konservasi mangrove dan manfaat ekonomi dari ekowisata mangrove. Dari proyek ini terjadi pemulihan 50 hektar ekosistem bakau dan 150 hektar ekosistem hutan peisisir dengan potensi penurunan emisi sebesar 220.200 tCO₂ eq/tahun.



Gambar 2.1. 92 Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Rendah Karbon Di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
Sumber : Bappenas, 2020

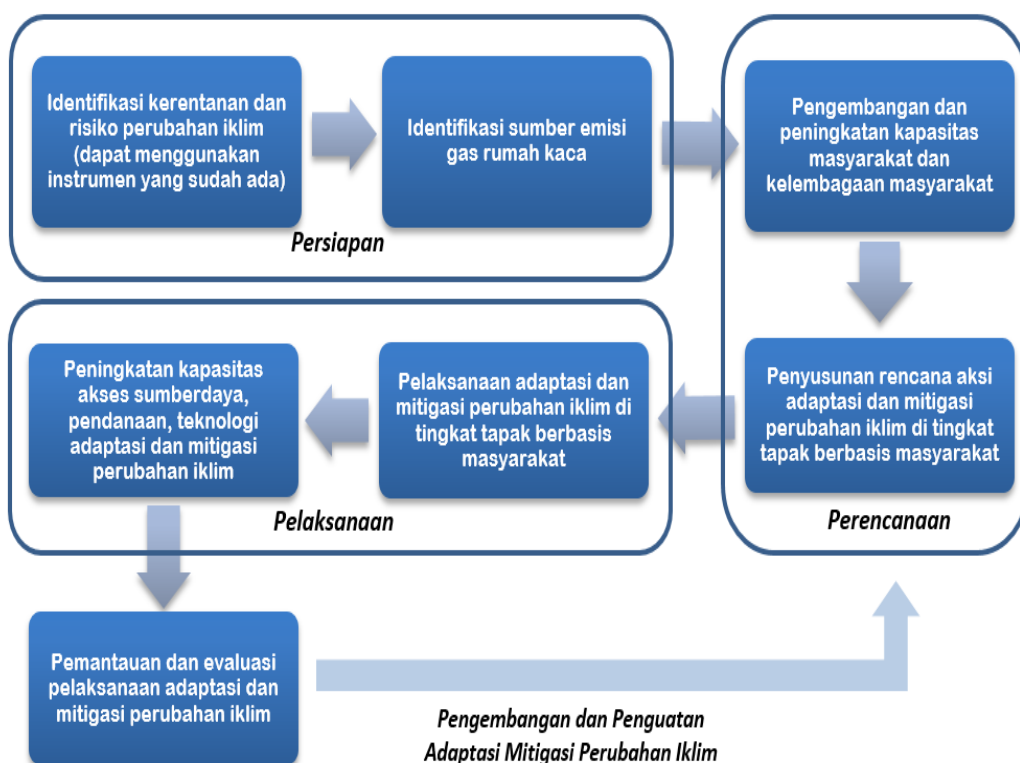
B. Program Kampung Iklim (Proklim)

Indonesia menyatakan komitmennya untuk dapat menjaga suhu rata-rata global agar tidak melebihi dari 2 derajat celcius yang sudah disepakati dalam Paris Agreement tahun 2015 dengan menyelenggarakan program berwawasan iklim yang melibatkan seluruh pihak termasuk masyarakat dalam melakukan kegiatan adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap dampak yang terjadi serta mitigasi untuk mengurangi emisi GRK melalui penerapan pola hidup rendah emisi dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu strategi nasional dalam upaya pengendalian perubahan iklim tersebut dalah dengan mendorong kerjasama multi pihak dalam memperkuat adaptasi dan mitigasi perubalan di tingkat tapak yaitu dengan penyelenggaraan Program Kampung Iklim (ProKlim). ProKlim merupakan program nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang memadukan upaya adaptasi dan mitigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi serta lembaga non pemerintah untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak



perubahan iklim dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Pelaksanaan ProKlim juga memperkuat pengembangan daerah perkotaan yang ramah lingkungan dan membangun masyarakat yang lebih tahan terhadap perubahan iklim serta memiliki pola hidup rendah emisi karbon.

Pendataan adaptasi dan mitigasi dilaksanakan melalui pendekatan aksi lokal yang bersifat bottom-up dimana pendekatan ini mendorong banyak pihak dalam mengumpulkan dan menyampaikan informasi mengenai factor penyebab kerentanan, dampak perubahan iklim, sumber penghasil emisi GRK dan kegiatan lainnya yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Kampung iklim yang dibentuk pada lokasi dengan batas administrative minimal setingkat RW, atau dusun dan maksimal setingkat kelurahan atau desa atau wilayah administratif yang setara. Tahapan ProKlim dimulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan serta pengembangan dan penguatan aksi seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2.1. 93 Tahapan pelaksanaan ProKlim

Sumber : Perdirjen PPI, 2017

Tabel 2.1. 20 Usulan Lokasi ProKlim Tahun 2023

No.	LOKASI PROKLIM	NOMOR REGISTRASI	NILAI	KATEGORI
A. PENERIMA PIAGAM KATEGORI PRATAMA				
1	ProKlim Desa Mapur, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF	11-PK-III-2023-13542	48,26%	Pratama
2	ProKlim Dusun I Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF	11-PK-III-2023-13405	49,73%	Pratama
3	Dusun Belit Desa Dendang Kecamatan Kelapa kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung_GCF	11-PK-IV-2023-14143	29,15%	Pratama
4	ProKlim Desa Tebing Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF	11-PK-III-2023-13406	21,95%	Pratama
5	ProKlim Dusun Kemang Masam Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF	11-PK-III-2023-13441	32,27%	Pratama
6	ProKlim Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Paritiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF	11-PK-III-2023-13439	42,99%	Pratama
7	ProKlim Desa Beruas Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF	11-PK-III-2023-13437	30,39%	Pratama
8	ProKlim RW 003, Desa Serdang, Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF	11-PK-IV-2023-14345	25,79%	Pratama
9	ProKlim Dusun 4, Desa Nangka, Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF	11-PK-IV-2023-14014	36,35%	Pratama
10	ProKlim Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF	11-PK-III-2023-13603	37,33%	Pratama
11	ProKlim Desa Terong Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF	11-PK-III-2023-13601	40,02%	Pratama
12	ProKlim Desa Kacang Butor Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF	11-PK-III-2023-13596	43,38%	Pratama
13	ProKlim Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF	11-PK-III-2023-13589	45,07%	Pratama
14	ProKlim Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-15603	47,18 %	Pratama
15	ProKlim Desa Jangkang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF	11-PK-III-2023-13638	45,09%	Pratama



B. PENERIMA PIAGAM KATEGORI MADYA				
1	Proklam Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF	11-PK-III-2023-13550	61,22%	Madya
2	Proklam Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF	11-PK-III-2023-13759	58,95%	Madya
3	Proklam Desa Karya Makmur, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-15783	55,85 %	Madya
4	Proklam Dusun 2 Air Tepala, Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-15846	66,33 %	Madya
5	Proklam Dusun 6 Sidomulyo, Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-15757	68,83 %	Madya
6	Proklam Desa Air Limau, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-15858	66,61 %	Madya
7	Proklam Dusun Namang Timur Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF	11-PK-IV-2023-14010	73,88%	Madya
8	Proklam Dusun Timur Desa Puput Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF	11-PK-IV-2023-13991	51,19%	Madya
9	Proklam Desa Lampur, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-14882	64,70 %	Madya
10	Proklam Dusun Sampur, Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-15329	66,72 %	Madya
11	Proklam RW 03 Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-14958	57,04 %	Madya
12	Proklam RW 01 Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-14960	57,06 %	Madya
13	Proklam Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-14961	62,28 %	Madya
14	Proklam Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-12974	57,85 %	Madya
15	Proklam Desa Seliu, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-15712	60,58 %	Madya
16	Proklam Desa Limbongan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF	11-PK-III-2023-12895	58,07%	Madya
17	Proklam RW 02, Kelurahan Pasir Garam, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-15418	67,29 %	Madya
C. PENERIMA SERTIFIKAT KATEGORI UTAMA				
1	Proklam Dusun 2 Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF	11-PK-IV-2023-14027	76,10%	Utama
2	Proklam RW 01. Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11-PK-V-2023-15486	76,07 %	Utama
D. PENERIMA PENGHARGAAN PENDUKUNG PROKLIM				
	NAMA LEMBAGA PENDUKUNG	NAMA LOKASI PROKLIM YANG DIDUKUNG		
1.	PT. Timah Tbk	Desa Air Limau, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
2.	PT. Refined Bangka Tin	Dusun 2 Air Tepala, Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka.		
3.		Dusun 6 Sidomulyo, Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
4.	PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Pangkal Balam	RW 01. Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		

II.1.5.7. Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Keberadaan keanekaragaman hayati harus terjaga untuk menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan. Perlindungan keanekaragaman hayati menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam dan ekosistem. Keanekaragaman hayati tiap-tiap daerah menunjukkan kekhasannya tersendiri baik tumbuhan, tanaman maupun satwa dan merupakan asset bagi daerah untuk memberikan peluang yang besar dari pemanfaatan keanekaragaman hayati dan bagian-bagiannya.



A. Penyusunan Dokumen Profil KEHATI

Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melibatkan berbagai perangkat di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas ESDM, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dan lembaga Kementerian seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resort Konversasi Insitu 17, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIII Pangkalpinang, dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari berbagai organisasi masyarakat yang peduli pada keanekaragaman hayati yaitu Alobi *Foundations*, Flora Fauna Bangka, Bangka Flora *Society*, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Yayasan Sayang Ikan Endemik Babel, Yayasan Sayang Babel dan perguruan tinggi antara lain Universitas Bangka Belitung, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung serta para tenaga ahli yang kompeten di bidangnya.

Dengan tersusunnya Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan sebagai gambaran keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencakup tingkatan ekosistem, spesies, dan tingkatan dalam spesies atau genetik baik yang alami maupun yang telah dibudidayakan, sebagai kekuatan tawar pada saat komponen keanekaragaman hayati akan diakses oleh pemohon dan sebagai dasar serta acuan bagi pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, penyusunan strategi dan rancang tindak pengelolaan atau kegiatan pemanfaatan keanekaragaman hayati dengan cara dan tingkat yang tidak menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati sehingga potensinya dapat terjaga untuk pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

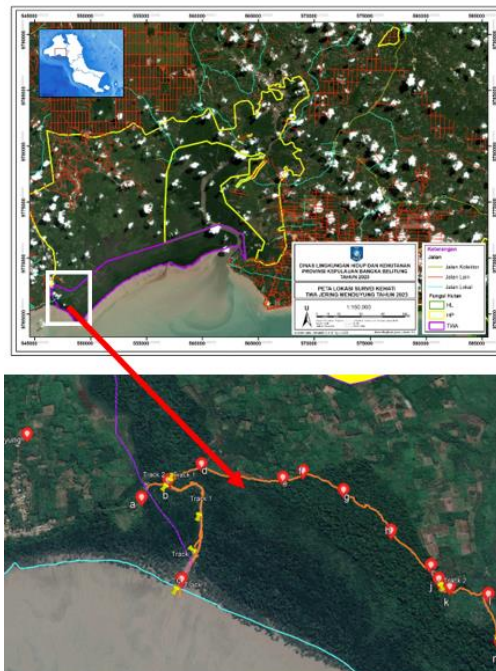


Dalam penyusunan dokumen tersebut ada 9 lokasi pengambilan data dan informasi keanekaragaman hayati yang tersebar di kabupaten/kota yang mewakili wilayah daratan, perairan darat dan laut. Berikut ini lokasi inventarisasi dan pengambilan data dan informasi keanekaragaman hayati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.1. 21 Lokasi Pengambilan Data Dan Informasi Kehati

No.	Lokasi	Kabupaten/Kota
1.	Kawasan Hutan Pelawan	Bangka Tengah
2.	Pulau Lengkuas	Belitung
3.	Tebat Rasau dan Gunung Lumut	Belitung Timur
4.	Pulau Kelapan	Bangka Selatan
	Taman Nasional Gunung Maras	Bangka
6.	Pulau Ketugar	Bangka Tengah
7.	Taman Wista Alam Gunung Permisan	Bangka Selatan
8.	Taman Wisata Alam Jering Menduyung	Bangka Barat
9.	Kebun Raya	Pangkalpinang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi kepulauan Bangka Belitung, 2023



Gambar 2.1. 94 Lokasi Survei Pengambilan Data dan Informasi Kehati Di TWA Jering Menduyung, Kabupaten Bangka Barat

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



B. Penangkaran Tumbuhan dan Satwa

Dengan semakin berkurangnya penutup lahan alami dalam hal ini merujuk ke hutan akibat alih fungsi lahan dalam bentuk deforestasi maupun degradasi serta eksploitasi lahan secara berlebihan telah berdampak pada terjadinya penurunan keanekaragaman hayati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu penangkaran yang berdasarkan Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Beberapa penangkaran yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan tahun penerbitan izin penangkaran dalam 2 tahun terakhir yaitu:

Tabel 2.1. 22 Penangkaran Satwa

No.	Nama Perusahaan	SK	Jenis Satwa yang Ditangkarkan
1	PT. Timah Tbk	SK.845/KSDAE/SET.3/KSA.2/8/2021 Tanggal 4 Agustus 2021	Rusa Sambar (Rusa unicolor) dan Kijang (Muntiacus muntjak)

Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, 2024

II.1.5.5 Sosialisasi, Edukasi dan Peningkatan Kapasitas

- Sosialisasi Pencegahan Karhutla



Gambar 2.1. 95 Sosialisasi Pencegahan Karhutla

Sumber: pos belitung tanggal 27 Mei 2023



Sepanjang tahun 2023, kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang paling banyak terjadi, untuk itu sebagai salah satu upaya mitigasi bencana ini diadakan sosialisasi pencegahan karhutla yang rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bersinergi dengan organisasi perangkat daerah terkait. Dengan dilaksanakan kegiatan seperti ini dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus meningkatkan keterampilan personil di lapangan.



II.2 Kualitas Air

Kualitas air adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik air secara kimia, fisika maupun biologi, yang seringkali dihubungkan dengan tujuan penggunaan air tersebut (Diersing, 2009). Kualitas air sangat dipengaruhi oleh kondisi alamiah air itu sendiri maupun aktivitas makhluk hidup disekitarnya. Untuk itu perlu diberikan standar tertentu untuk menilai karakteristik air dengan tujuan yang sama. Pemerintah Indonesia telah memiliki acuan kualitas air sesuai dengan tujuan penggunaannya, baik untuk air bersih, air permukaan bahkan air limbah industri. Beberapa indikator kualitas air yang biasa digunakan di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 2.2. 1 Beberapa indikator kualitas air yang umum digunakan

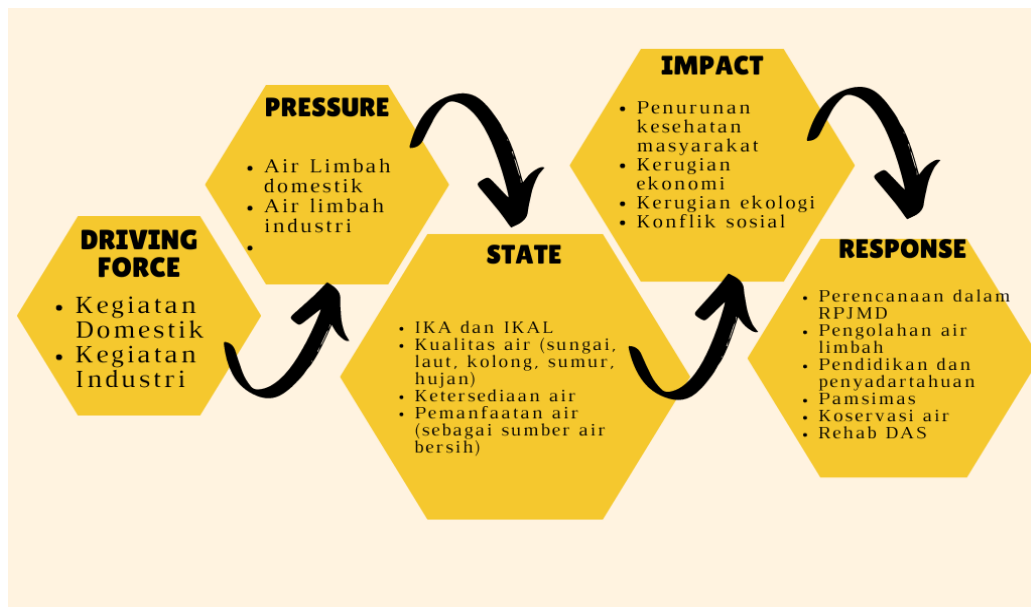
No.	Indikator Fisika	Indikator Kimia	Indikator Biologi
1.	Suhu	pH	Bakteri koliform
2.	Elektrokonduktivitas	BOD	<i>Escherichia coli</i>
3.	Padatan terlarut	COD	Mollusca
4.	Padatan tersuspensi	DO	Ephemenoptera
5.	Bau	Kesadahan	Trichptera
6.	Warna	Logam berat	
7.		Nitrat	
8.		Fospat	

Ketersediaan air bagi manusia memberikan berbagai manfaat, yang dikenal dengan konsep jasa lingkungan. Jasa Lingkungan adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem. Jasa lingkungan ini dikelompokkan ke dalam empat macam manfaat yaitu manfaat penyediaan (*provisioning*), produksi pangan dan air; manfaat pengaturan (*regulating*) pengendalian iklim dan penyakit; manfaat pendukung (*supporting*), seperti siklus nutrien dan polinasi tumbuhan; serta manfaat kultural (*cultural*), spiritual dan rekreasional. Sistem klasifikasi jasa



lingkungan tersebut menggunakan standar dari Millenium Ecosystem Assessment (2005).

Bervariasinya kondisi dan bentang alam serta aktivitas masyarakat menyebabkan kualitas air yang beragam dan sangat mudah berubah, sehingga kualitas air menjadi kajian kompleks yang perlu diperhatikan dalam lingkup lingkungan hidup. Selain itu, tingginya jasa lingkungan yang didapatkan dari sumberdaya ini mengharuskan kita untuk menjaga kualitas air agar tetap baik sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Sifat air yang dinamis dan permintaan yang tinggi, sehingga perlu dilakukan analisa terhadap kualitas air, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satunya dengan menggunakan *DPSIR framework*. Dalam kerangka pikir *DPSIR framework* ini perlu dianalisa hal-hal yang menjadi *driving force pressure, state, impact* dan *responses* terhadap kualitas air, sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar 2.2. 1 Kerangka pikir DPSIR Framework kualitas air

II.2.1 Driving force

II.2.1.1 Aktivitas Domestik



Aktivitas domestic adalah aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari di rumah tangga. Dalam hubungannya dengan kualitas air, aktivitas domestic dapat diartikan sebagai aktivitas sehari-hari di rumah yang menggunakan air. Peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan bertambahnya kepadatan populasi, dan meningkatkan pula jumlah hunian masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk ini mendorong terjadinya peningkatan kebutuhan terhadap air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk keperluan konsumsi, maupun mandi dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan bahwa jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 1.511.890 jiwa. Jumlah ini menunjukkan terjadinya pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1,31% dari tahun 2022. Peningkatan jumlah penduduk ini akan menyebabkan peningkatan permintaan berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk peningkatan permintaan (*demand*) terhadap air bersih yang merupakan salah satu kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia.

Menurut Badan Standar Nasional Indonesia (BSNI) dalam Suheri et al. (2019) kebutuhan air penduduk perkotaan sebesar 120 liter/hari/kapita, dan kebutuhan air penduduk pedesaan sebesar 60 liter/hari/kapita. Selain itu UNESCO sendiri pada tahun 2002 telah menetapkan hak dasar manusia atas air yaitu sebesar 60 liter/orang/hari, bahkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 05 tahun 2022 disebutkan bahwa kebutuhan air untuk keperluan domestic sebesar 200 liter/orang/hari. Dari informasi ini, dapat diketahui bahwa kebutuhan air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 berkisar antara 90.713.400 liter/hari hingga 302.378.000 liter/hari. Dari jumlah ini, dapat dibayangkan besarnya kebutuhan air bersih yang diperlukan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.

Siklus hidrologi menyebabkan ketersediaan air di bumi selalu konstan, artinya ketersediaan air tidak mengalami penambahan maupun



pengurangan, namun kualitas air mengalami terus perubahan (Rohmawati Y dan Kustomo, 2020). Salah satu penyebab perubahan kualitas air berasal dari aktivitas antropogenik yang terjadi disekitar sumber air, termasuk diantaranya adalah aktivitas domestic.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 menyebutkan bahwa air limbah domestik adalah air limbah yang merupakan hasil dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah domestik berasal dari air limbah dapur, kamar mandi, toilet, cucian dan lain-lain. Air limbah domestik dibedakan menjadi *black water* yaitu limbah domestik yang mengandung tinja dan urin, dan *grey water* yang tidak mengandung tinja dan urin. Secara khusus, karakteristik limbah domestik diantaranya secara fisik memiliki zat padat, bau, suhu, warna dan kekeruhan. Sedangkan secara kimiawi limbah domestik terdiri dari bahan organik, DO (*Dissolved Oxygen*), BOD (*Biological Oxygen Demand*), COD (*Chemical Oxygen Demand*), pH dan logam berat (www.universaleco.id).

Dalam publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2023 yang diterbitkan oleh BPS Republik Indonesia menyatakan bahwa 98,23% - 98,31% rumah tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengelola air limbah domestik *blackwater* melalui septic tank. Secara detail persentase rumah tangga dalam pengolahan limbah tinja ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.2. 2 Persentase rumah tangga dalam pengelolaan limbah tinja

No.	Tipe Pengelolaan	2023	2022
1	Tangki Septik - Desa	98,31	92,74
2	Cubluk - Desa	2,05	0,87
3	Ipal Terpusat - Desa	0,36	1,28
4	Sungai - Desa	0,5	0,45
5	Kolam Sawah - Desa	0,5	0,45
6	Lubang - Desa	0,83	16,95
7	Pantai Kebun - Desa	0	0,41
8	Biodigester + CH ₄ Rec - Desa	0	0
9	Tangki Septik - Kota	98,23	95,54



No.	Tipe Pengelolaan	2023	2022
10	Cubluk - Kota	2,06	0,7
11	Ipal Terpusat - Kota	0,63	0,37
12	Sungai - Kota	0,89	1,37
13	Kolam Sawah - Kota	0,89	1,37
14	Lubang - Kota	0,03	2,6
15	Pantai Kebun - Kota	0,23	0,12
16	Biodiegester + CH4 Rec - Kota	0	0

Menurut Chandra (2007), secara umum air limbah domestic dikelola melalui cara-cara berikut :

1. Pembuangan umum, yaitu melalui tempat penampungan air limbah yang terletak di halaman
2. Digunakan untuk menyiram tanaman kebun
3. Dibuang ke lapangan peresapan
4. Dialirkan ke saluran terbuka
5. Dialirkan ke saluran tertutup atau selokan.

Pengelolaan air limbah dengan cara-cara diatas cenderung dilakukan untuk limbah domestic tipe *grey water* yang tidak mengandung tinja dan urin. Meskipun kondisi dilapangan menunjukkan bahwa *grey water* secara umum masih dialirkan melalui saluran terbuka maupun saluran tertutup hingga memasuki media lingkungan, terutama sungai maupun air permukaan lainnya tanpa melalui pengolahan yang memadai sebelumnya. Sehingga memperburuk kualitas air permukaan terutama sungai yang berada di tengah pemukiman masyarakat.

II.2.1.1 Aktivitas Ekonomi

Performa ekonomi suatu daerah biasanya digambarkan dalam PDRB atau produk domestic regional bruto. Pada tahun 2023, PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp102,64 triliun. Ekonomi pada tahun 2023 juga tumbuh positif sebesar 4,38%. Perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun



2023 ini berasal dari sector pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 19,49%, sector pertambangan dan penggalian sebesar 7,64%, industri pengolahan/ *manufacturing* sebesar 21,15% dan lain-lain (BPS, 2024).

Secara umum perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat bergantung dari sector pertanian dalam arti luas, termasuk didalamnya ada kegiatan perikanan serta sector ekstraksi mineral dan turunannya. Hal ini linear dengan dokumen izin lingkungan yang dikeluarkan pada tahun 2023, yang di dominasi oleh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan kedua sector tersebut.

Kegiatan ekonomi ini tidak terlepas dari bagian usaha masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhannya. Meskipun operasional kegiatan-kegiatan perekonomian juga memberikan dampak terhadap kualitas air. Kegiatan sector pertanian khususnya perkebunan skala besar yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dominasi oleh perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, serta pengolahan *crumb rubber*, sedangkan kegiatan perikanan di dominasi oleh kegiatan budidaya udang vaname melalui tambak intensif hingga super intensif, serta pengolahan ikan. Sektor pertambangan dan turunannya di dominasi oleh tambang dan peleburan timah, serta pasir kuarsa.

Pada tahun 2023, produksi minyak kelapa sawit dan turunannya sebesar 247.865 ton (BPS, 2024). Secara teoritis konsumsi air pada industri pengolahan kelapa sawit adalah 1,3 ton/ton TBS, namun konsumsi air faktual di pabrik adalah sebesar 2,27 ton/ton TBS (Sari et. al, 2011). Sehingga konsumsi air pada tahun 2023 pada industri kelapa sawit di Bangka Belitung berkisar antara 108.928,456 - 190.205,842 ton. Sedangkan air limbah yang dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit berkisar antara 50-60% dari kebutuhan air proses tersebut. Selain industri pengolahan kelapa sawit, jenis industri lain yang terdapat di Bangka Belitung, seperti pengolahan karet, budidaya udang dengan tambak intensif dan superintensif, pengolahan ikan dan industri perhotelan termasuk jenis



usaha yang membutuhkan air dalam jumlah yang relative besar, sehingga volume limbah cair yang dihasilkan juga besar.

Kegiatan ekonomi merupakan suatu keharusan bagi masyarakat, dan secara makro sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu daerah. Namun eksploitasi terhadap sumberdaya alam, termasuk penggunaan air dalam mendukung proses industri dapat menimbulkan dampak negative yaitu meningkatnya air limbah dari sector industri. Apabila limbah cair industri ini tidak dikelola dengan benar, tentu akan menurunkan kualitas air, baik air tawar maupun air laut.

II.2.2 Pressure

II.2.2.1 Air Limbah Domestik

Besarnya kebutuhan air untuk keperluan domestic akan menghasilkan air limbah yang besar pula. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa limbah cair domestic mempengaruhi 72,7% hingga 80% dari pencemaran sungai (Rahayu, Juwana, Marganingrum; 2018). Penelitian lain bahkan menyebutkan bahwa 50% - 80% penggunaan air bersih akan menjadi air limbah. Sehingga dengan kebutuhan harian air bersih untuk kegiatan domestic masyarakat pada tahun 2023, maka berpotensi menghasilkan air limbah sebesar 45.456.700 liter/hari sampai dengan 241.902.400 liter/hari.

Pada beberapa lokasi tertentu, masih dijumpai IPAL domestic yang masih berfungsi dengan baik. Misalnya yang terdapat di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah. IPAL ini langsung terhubung dengan saluran pembuangan air dari toilet beberapa rumah tangga disekitarnya dan masih dimanfaatkan warga hingga saat ini, meskipun tidak dilakukan perawatan terhadap IPAL tersebut. Namun jumlah dan kapasitas IPAL domestic yang tersedia saat ini masih belum memadai dan tidak tersebar pada banyak lokasi. Minimnya fasilitas pengolahan air limbah (IPAL) domestic pada kawasan pemukiman masyarakat menyebabkan air limbah domestic yang



dihasilkan tidak dikelola dengan baik, bahkan langsung memasuki badan air melalui saluran drainage umum.

Kualitas air pada beberapa sungai yang mengalir disekitar pemukiman padat penduduk, misalnya Sungai Pedindang dan Sungai Rangkui di Kota Pangkalpinang, dan Sungai Kurau di Kabupaten Bangka Tengah, menunjukkan bahwa status mutu air pada sungai-sungai tersebut masuk dalam kategori cemar ringan. Hasil pemantauan kualitas air pada sungai-sungai ini seringkali menunjukkan bahwa parameter BOD, COD dan DO melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Nilai BOD yang tinggi dan DO yang rendah merupakan indikasi terjadinya pencemaran bahan organik. Sedangkan sungai yang berada jauh dari kawasan pemukiman penduduk memiliki nilai indeks pencemar yang lebih rendah, dan masih memenuhi baku mutu air kelas 1 dan kelas 2, misalnya Sungai Selindung di Pangkalpinang, Sungai Kayu Besi dan Sungai Limbung di Bangka, Sungai Kubu di Belitung, dan lain-lain. Status mutu air menunjukkan tingkat kondisi mutu air sumber air dalam kondisi cemar atau kondisi baik dengan membandingkan dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Perbedaan kualitas air sungai ini menunjukkan bahwa air limbah dari kegiatan domestik berpengaruh negative terhadap kualitas air. Tabel dibawah ini menunjukkan status mutu air pada beberapa sungai yang mengalir di kawasan pemukiman padat penduduk.

Tabel 2.2. 3 Status mutu beberapa sungai yang mengalir di kawasan pemukiman padat penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	KODE LOKASI	Lokasi	NILAI IP	STATUS MUTU
1	A4-BB-71-009	Pedindang III	3.24	CEMAR RINGAN
2	A4-BB-71-009	Pedindang III	3.73	CEMAR RINGAN
3	A4-BB-71-009	Pedindang III	3.71	CEMAR RINGAN
4	A4-BB-71-008	Pedindang II	2.92	CEMAR RINGAN
5	A4-BB-71-008	Pedindang II	3.86	CEMAR RINGAN
6	A4-BB-71-008	Pedindang II	3.79	CEMAR RINGAN
7	A4-BB-71-007	Pedindang I	3.38	CEMAR RINGAN
8	A4-BB-71-007	Pedindang I	3.84	CEMAR RINGAN
9	A4-BB-71-007	Pedindang I	3.63	CEMAR RINGAN
10	A4-BB-71-006	Rangkui 3	6.99	CEMAR SEDANG



NO	KODE LOKASI	Lokasi	NILAI IP	STATUS MUTU
11	A4-BB-71-006	Rangkui 3	2.98	CEMAR RINGAN
12	A4-BB-71-006	Rangkui 3	2.52	CEMAR RINGAN
13	A4-BB-71-005	Rangkui 2	2.62	CEMAR RINGAN
14	A4-BB-71-005	Rangkui 2	1.32	CEMAR RINGAN
15	A4-BB-71-005	Rangkui 2	1.86	CEMAR RINGAN
16	A4-BB-71-004	Rangkui 1	2.34	CEMAR RINGAN
17	A4-BB-71-004	Rangkui 1	2.84	CEMAR RINGAN
18	A4-BB-71-004	Rangkui 1	1.96	CEMAR RINGAN
19	A4-BB-04-022	Sungai kurau hulu	2.04	CEMAR RINGAN
20	A4-BB-04-022	Sungai kurau hulu	1.44	CEMAR RINGAN
21	A4-BB-04-023	Sungai kurau tengah	1.02	CEMAR RINGAN
22	A4-BB-04-023	Sungai kurau tengah	1.27	CEMAR RINGAN
23	A4-BB-04-024	Sungai kurau hilir	0.71	MEMENUHI
24	A4-BB-04-024	Sungai kurau hilir	1.14	CEMAR RINGAN

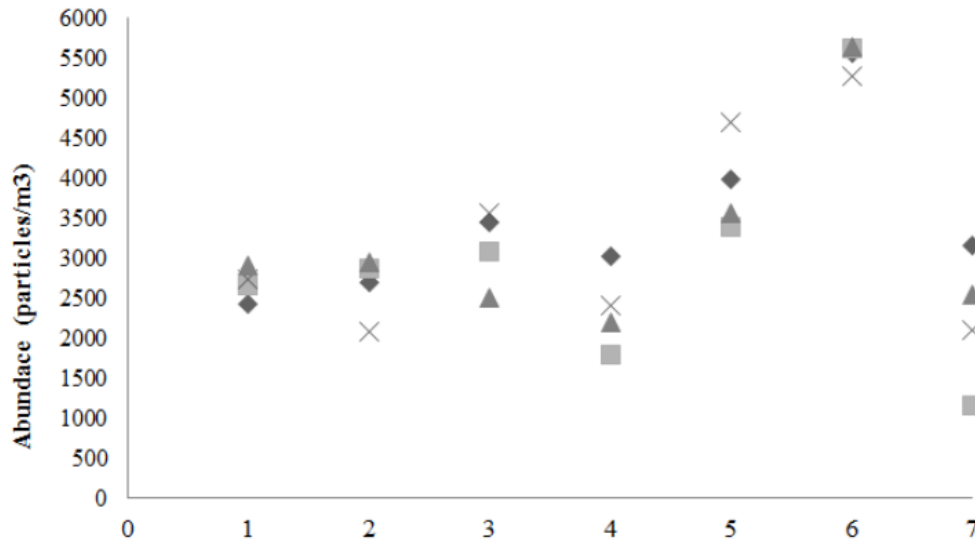
Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/ika/indeks>

Air limbah domestic selain mengandung bahan-bahan organik dan non-organik, juga mengandung partikel mikroplastik yaitu partikel plastik dengan diameter < 5 mm (Lambert & Wagner 2017). Sejak tahun 1970-an mikroplastik telah ditemukan pada sebagian besar badan air baik samudra, laut, danau, dan sungai (Masura *et al.* 2015). Partikel mikroplastik dapat ditemukan dalam produk perawatan pribadi, diantaranya pasta gigi, kosmetik, sabun, maupun dari serat sintetis yang selanjutnya dapat lolos akibat kegiatan pencucian kain atau pakaian (Setiadewi *et al.*, 2024). Penggunaan produk-produk tersebut dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan partikel mikroplastik dapat ditemukan bersama air limbah domestic dan memasuki media perairan.

Penelitian yang dilakukan di DAS Baturusa menunjukkan bahwa kelimpahan mikroplastik paling tinggi ditemukan di muara Sungai Rangkui sebanyak 5520 partikel/m³. Partikel mikroplastik lebih banyak ditemukan pada sungai yang dekat dengan pemukiman masyarakat, misalnya pada muara Sungai Rangkui, Sungai Pangkalbalam dan Sungai Baturusa (Riskiana, 2021). Partikel mikroplastik juga dilaporkan ditemukan di Sungai Sukal dan Kolong Telabik, di Kabupaten Bangka Barat. Partikel mikroplastik



pada beberapa sungai di DAS Baturusa dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.2. 2 Kelimpahan mikroplastik di DAS Baturusa

Keterangan : 1. Sungai Mabet; 2. Sungai Limbung; 3. Sungai Baturusa
4. Muara Sungai Selindung 5. Sungai Pangkalbalam
6. Muara Sungai Rangkui 7. Sungai Selindung

II.2.2.2 Air Limbah Industri

Sumberdaya air dalam sektor industri digunakan sebagai bahan baku penolong yang dimanfaatkan sebagai air proses, air umpan boiler (*boiler feed water*) dan air pendingin atau *coolant* serta untuk keperluan sanitasi. Industri pengolahan kelapa sawit merupakan salah satu jenis industri yang banyak terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Produksi minyak kelapa sawit dan turunannya sebesar 247.865 ton pada tahun 2023, diperkirakan akan menghasilkan air limbah sebesar 54464,23 – 114123,5 ton. Namun, karena kandungan nutrient dalam limbah cair pengolahan kelapa sawit masih terbilang tinggi, maka air limbah ini di kelola dengan menerapkan sistem *land application* dengan mengembalikan air limbah ke lahan perkebunan kelapa sawit itu sendiri.



Meskipun telah menerapkan sistem *land application*, air limbah dari pengolahan kelapa sawit akan menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berupa methane (CH_4) yang cukup tinggi. Emisi GRK dari limbah cair industri dihasilkan dari limbah cair organik. Hasil inventarisasi GRK yang dilakukan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa emisi GRK yang dihasilkan dari limbah cair industri sebesar 278,15 Gg CO_2 equivalen atau setara dengan 278.150 ton CO_2 equivalen. Emisi GRK ini dihasilkan dari limbah industri kelapa sawit (CPO), *crumb rubber* atau karet remah, dan industri tapioca. Sedangkan air limbah domestik pada tahun 2022 menghasilkan emisi GRK sebesar 151,90 Gg CO_2 equivalen.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai limbah dari industri yang memasuki ke badan lingkungan, terutama air maka dapat digunakan pendekatan beban pencemaran. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah. Diasumsikan bahwa beban pencemaran inilah yang selanjutnya memasuki media perairan. Data beban pencemaran ini berasal dari beberapa laporan perusahaan yang telah disampaikan dengan mengecualikan beban pencemaran dari industri pengolahan kelapa sawit yang telah menerapkan *land application*, meskipun beban pencemaran sesungguhnya yang memasuki badan air jauh lebih besar table dibawah ini.

Tabel 2.2. 4 Beban pencemaran air dari beberapa industri

No	Perusahaan	Beban Pencemaran 2023 (Ton/periode)			
		BOD	COD	ML	NH3N
1	PLTD Padang			10,14	
2	PLTD Koba	--	63,33	4,02	--
3	PLTD Muntok		236,33	76,74	
4	PLTD Pilang		14980,34	749,09	535,18
5	PLTD Toboali		199,76	6,07	
6	PT. PLN - PLTU 4Babel			6067,96	
7	PT. Karini Utama	3,48	10,42		
8	Pertamina TBBM Pangkalbalam	2064,84	7356,95	27659,27	
9	PLTG Suge			0,15	
10	BW Suite	714562,87	2332652,43	13041,18	
11	JUMLAH	716.631,19	2.355.499,56	47.614,62	535,18

Sumber : Laporan Proper periode Juli 2022-Juni 2023



Kegiatan industri budidaya udang vanamei melalui tambak intensif maupun super intensif juga mulai menunjukkan adanya dampak negative terhadap kualitas air, terutama pada sekitar lokasi outlet pembuangan limbah cair. Beberapa laporan di media massa mengenai dugaan pencemaran air laut oleh limbah tambak udang misalnya terjadi di Desa Kurau, Kabupaten Bangka Tengah dan pesisir Pantai Pasir Kuning Tempilang, Kabupaten Bangka Barat (<https://regional.kompas.com/read/>), serta di sekitar Pantai Jibur, Kabupaten Bangka Selatan (<https://www.detik.com/sumbagsel/berita>). Limbah cair dari tambak udang mengandung sisa pakan dan kotoran udang yang dibudidayakan. Sedangkan kita tahu bahwa pakan udang memiliki kandungan nitrat dan fosfat yang cukup tinggi. Pencemaran nitrat dan fosfat di media perairan dapat menyebabkan terjadinya eutrofikasi, yaitu pencemaran air yang disebabkan oleh pengkayaan nutrient (terutama nitrogen dan fosfat) yang tidak seimbang. Eutrofikasi ini selanjutnya akan menimbulkan *alga blooming* pada perairan, bahkan pada kondisi yang lebih serius dapat menyebabkan menipisnya oksigen terlarut dalam air (DO) sehingga akan mengganggu ekosistem perairan, bahkan menyebabkan kematian bagi biota perairan.

Selain industri-industri besar, air limbah juga dihasilkan dari kegiatan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) yang tersebar pada berbagai wilayah. Kegiatan UMKM yang menghasilkan air limbah dalam jumlah yang besar misalnya pencucian mobil dan motor dan kegiatan laundry. Selain itu, kegiatan tambang timah ilegal yang banyak dilakukan disekitar aliran sungai juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas air sungai yang berasal dari air limbah yang memasuki badan air. Penurunan kualitas air yang berasal dari kegiatan-kegiatan ini terindikasi dari banyaknya lokasi pemantauan sungai yang melebihi baku mutu untuk parameter TSS dan amoniak.



II.2.3 State

II.2.3.1 IKA dan IKAL

Air merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, oleh karenanya air harus seyogianya tersedia dengan kualitas yang baik dan dalam kuantitas yang memadai. Untuk mengetahui kualitas air pada suatu daerah maka harus tersedia suatu bentuk ukuran yang seragam sehingga dapat mempermudah komunikasi public mengenai kualitas air. Di Indonesia kualitas air dinyatakan dalam indeks kualitas air (IKA).

Indeks kualitas air (IKA) memberikan nilai tunggal yang mengekspresikan keseluruhan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air. IKA merupakan indeks yang tidak mempunyai satuan dan kisaran skor antara 0-100 yang menunjukkan kualitas air (Budi kurniawan, 2018). IKA pada tahun 2023 dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang tata cara pemilihan lokasi, metode pengambilan data dan perhitungan indeks kualitas air. Perhitungan IKA menggunakan 8 parameter kualitas air yaitu: derajat keasaman (pH), Oksigen terlarut (DO), Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), Kebutuhan oksigen kimia (COD), padatan tersuspensi total (TSS), Total fosfat (T Phosfat), nitrat dan fecal coli.

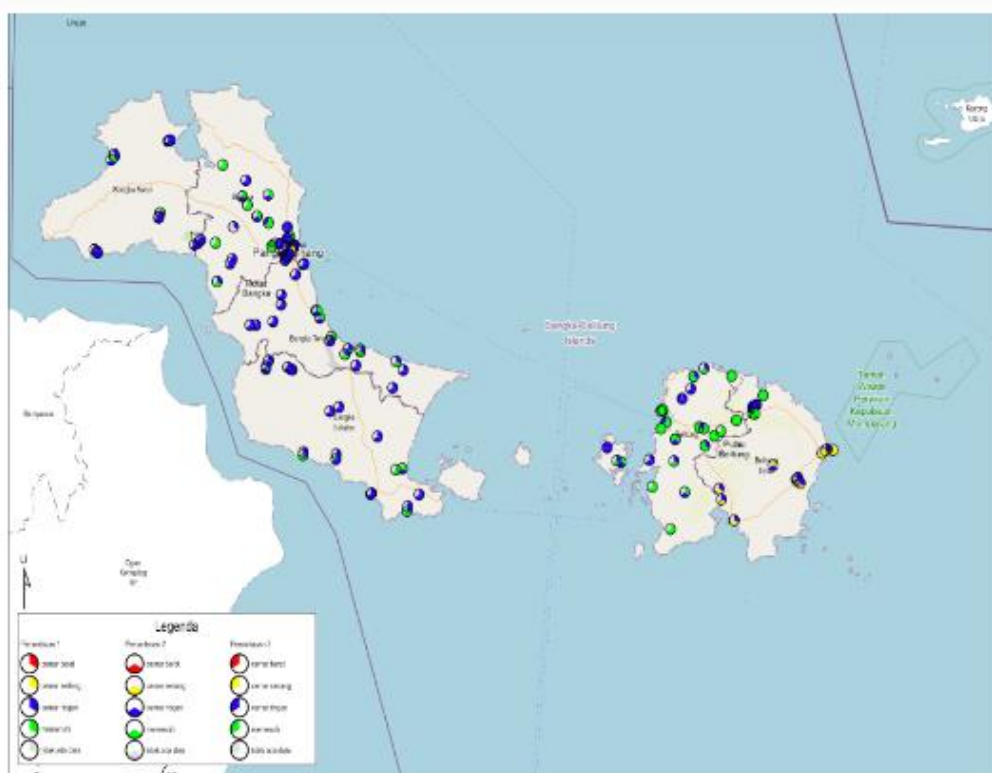
Nilai IKA Provinsi merupakan hasil rerata dari IKA seluruh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, sedangkan Nilai IKA kabupaten/kota merupakan hasil rerata dari IKA seluruh badan air pada wilayah administrasinya. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai IKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari 307 titik lokasi pengambilan sampel pada sungai di Bangka Belitung. Berdasarkan kewenangannya, dua sungai diantaranya adalah sungai kewenangn provinsi yang diambil sebanyak delapan lokasi sampling yaitu Sungai Baturusa dan Sungai Cerucuk. Status mutu air pada 307 lokasi pengambilan contoh uji kualitas air sungai tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini, sedangkan

lokasi pengambilan contoh uji kualitas air sungai disajikan dalam gambar 2.2.3.

Tabel 2.2. 5 Rekap satu mutu air sungai tahun 2023

No	Kelas Air	Memenuhi	Cemar Ringan	Cemar Sedang	Cemar Berat
1	KELAS-1	18	245	43	1
2	KELAS-2	107	186	14	0
3	KELAS-3	154	139	14	0
4	KELAS-4	151	150	6	0

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/ika/indeks>

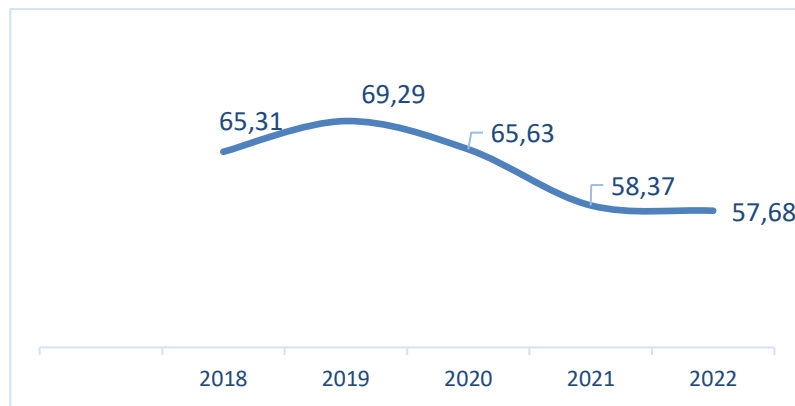


Gambar 2.2. 3 Sebaran Lokasi pengambilan sampel kualitas air sungai tahun 2023

Setelah mendapatkan status mutu sungai, nilai tersebut kemudian di transformasikan kedalam indeks kualitas air (IKA). Pada tahun 2023, IKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 57,43 dan masuk kategori sedang (50-70). Angka ini sedikit lebih rendah dari target IKA tahun 2023 yaitu 60 poin. IKA 2023 juga menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. IKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tren



penurunan (Gambar 2.2.4), penurunan kualitas air ini dipengaruhi banyaknya parameter pemantauan yang melebihi baku mutu. Parameter yang banyak melebihi baku mutu antara lain adalah parameter BOD, COD, TSS, DO dan amoniak. BOD dan COD yang melebihi baku mutu dapat mengindikasikan terjadinya pencemaran bahan organik di perairan (Ulfah A, et al., 2017). Namun perlu penelusuran lebih lanjut mengenai sumber pencemar ini.



Gambar 2.2. 4 Trend IKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

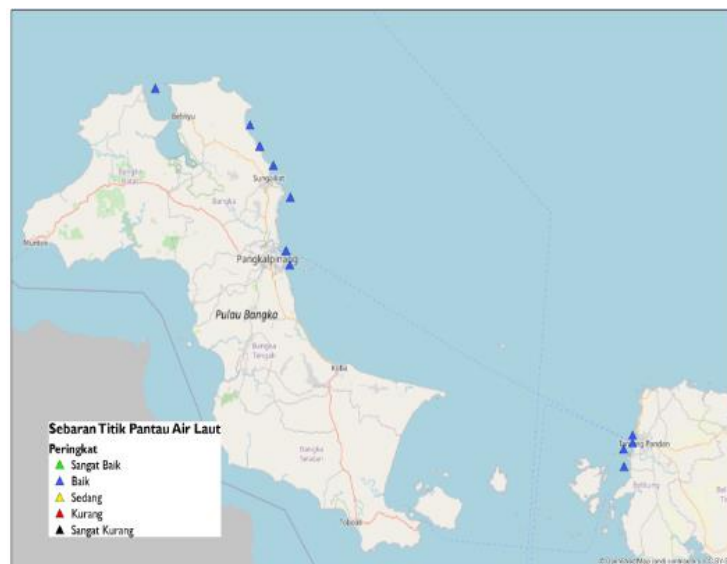
Sebagai provinsi yang berupa kepulauan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas wilayah laut yang dominan daripada wilayah daratan. Laut merupakan sumberdaya air yang penting bagi kehidupan masyarakat. Berbagai kegiatan dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat di laut, misalnya kegiatan ekowisata, eksploitasi sumberdaya perikanan laut, bahan baku pada budidaya udang, bahkan kegiatan pertambangan timah di laut atau *off shore mining*. Kegiatan-kegiatan ini memberikan dampak baik secara ekonomi maupun ekologi. Untuk mengetahui kualitas air laut maka perlu dilakukan pemantauan secara berkala terhadap air laut. Pemantauan kualitas air laut ini memberikan gambaran mengenai kualitas air laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berbagai kegiatan di pesisir laut akan menimbulkan berbagai jenis bahan pencemar di laut, hal tersebut akan mengakibatkan degradasi



lingkungan di wilayah pesisir dan ekosistem di sekitarnya. Sehingga, masuknya zat - zat organik dan anorganik ke badan air secara berlebihan, berdampak buruk pada perairan laut dan menyebabkan penurunan kualitas air laut secara fisik, kimia dan biologi (Hamuna *et al.* 2018).

Pada tahun 2023, pemantauan kualitas air laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan pada sebelas lokasi dengan frekuensi dua kali pemantauan. Terdapat beberapa lokasi pemantauan yang tidak dipantau pada tahun 2023 in karena berbagai kendala. Sebaran lokasi pemantauan kualitas air laut ini dapat dilihat pada Gambar dibawah ini. Lokasi pemantauan air laut tahun ini mewakili kawasan wisata bahari dan biota laut, sedangkan kawasan yang mewakili pelabuhan dan disekitar kegiatan industri tidak dipantau.

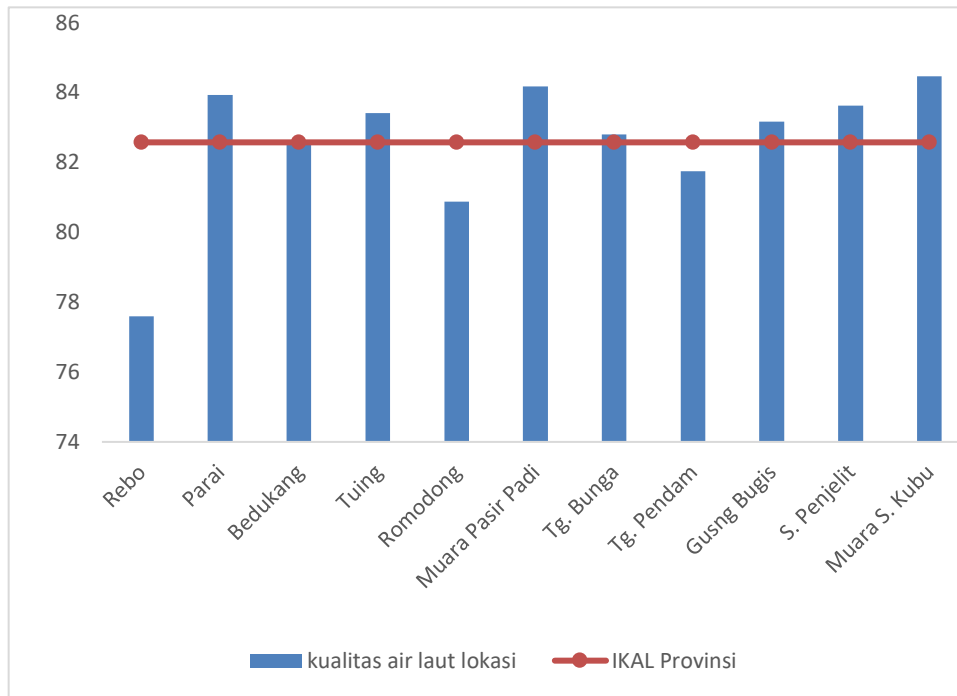


Gambar 2.2. 5 Sebaran lokasi pemantauan kualitas air laut tahun 2023

Pemantauan kualitas air laut dilakukan menggunakan lima parameter yaitu TSS, DO, minyak lemak, ammonia total dan ortophosfat dan disandingkan dengan baku mutu sesuai peruntukannya. Hasil pemantauan kualitas air laut ini menunjukkan bahwa kualitas air laut pada lokasi pemantauan masih berada pada kondisi baik (70 – 90), dengan nilai IKAL provinsi yang merupakan rerata dari kualitas air laut dari semua lokasi pemantauan sebesar 82,57. Hasil pemantauan kualitas air laut ini



menunjukkan penurunan 2,45 poin dari tahun sebelumnya. Indeks kualitas air laut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.2. 6 Indeks kualitas air laut tahun 2023

Meskipun kualitas air laut di Bangka Belitung masih menunjukkan nilai yang baik, namun berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat di pesisir pantai, termasuk kegiatan budidaya udang vaname yang meningkat pesat berpotensi menyebabkan terjadinya degradasi kualitas air laut di masa mendatang. Selain itu kegiatan masyarakat di daratan juga memberikan andil bagi menurunnya kualitas laut. Limpasan air hujan dan air limbah yang miskin pengelolaan membawa partikel sampah, bahan pencemar kimiawi, bahkan pathogen kedalam laut. Masuknya nutrisi yang berlebihan dapat mengganggu ekosistem laut dan berdampak buruk bagi terumbu karang dan organisme laut lainnya (Diersing N, 2009).

II.2.3.2 Kualitas Air

Sebagai negara tropis, Indonesia dikarunai dengan banyak sumber air. Masyarakat masih menggunakan sumur sebagai salah satu cara untuk mendapatkan air bersih. Di Bangka Belitung penggunaan sumur masih



banyak ditemukan, baik berupa sumur gali maupun penggunaan sumur bor yang dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Penggunaan air sumur sebagaimsumber air bersih harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Secara fisik air yang bersih dapat dilihat dari warnanya yang bening dan tidak berbau, namun tentu saja uji kualitas air yang tepat perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas air sumur, terutama sumur yang digunakan sebagai sumber air bersih.

Penggunaan sumur sebagai sumber air bersih juga perlu diwaspadai, terutama pada daerah perkotaan dan pemukiman padat penduduk. Kepadatan penduduk yang tinggi terkadang membuat letak sumur memiliki jarak yang kurang ideal dengan septic tank. SNI 2398:2017 pun mengatur jarak minimal yang aman antara lokasi tempat pengolahan septic tanc dengan sumur dan bangunan. Jarak minimal sumur resapan septic tank dengan sumur air bersih adalah 10 meter, dengan bangunan atau rumah 1,5 meter, dan dengan sumur resapan air hujan 5 meter.

Hasil pemantau kualitas air sumur pada beberapa lokasi menunjukkan bahwa air sumur memiliki pH netral. Hasil pemantuan kualitas air sumur dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.2. 6 Kualitas air sumur

No	Lokasi Sumur/Titik Pantau	pH	BOD (mg/L)	DO (mg/L)
1	Desa Jangkang Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Desa Jangkang, Dendang	6,55	< 2,00	3,32
2	Desa Jangkang Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Desa Jangkang, Dendang	7,28	< 2,00	3,16
3	Desa Jangkang Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Desa Jangkang, Dendang	7	< 2,00	2,53
4	Desa Jangkang Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Desa Jangkang Dendang	7,00	< 2,00	3,75



Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Hujan biasanya terjadi sepanjang tahun dengan dengan intensitas beragam. Masyarakat Bangka Belitung memiliki kearifan local yaitu kebiasaan memanen air hujan, baik dilakukan di rumah-rumah warga maupun di ladang atau kebun. Air hujan ini selanjutnya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Pemanenan air hujan ini dilakukan dengan cara sederhana, kebiasaan ini muncul karena curah hujan yang memadai dan kualitas hujan yang masih baik. Selain sebagai salah satu bentuk kearifan local, pemanenan air hujan menjadi sumber air bersih, bahkan juga direkomendasikan oleh UNEP.

Pada tahun 2023, terjadinya el nino menyebabkan hujan cenderung jarang terjadi, sehingga uji kualitas air hujan hanya dapat dilakukan pada akhir tahun ketika hujan lebih sering turun. Hasil uji kualitas air hujan dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.2. 7 Kualitas air hujan tahun 2023

Lokasi Pemantauan	Waktu Pemantauan	pH	DHL ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	SO ₄ (mg/L)	NO ₃ (mg/L)	NH ₄ (mg/L)	Kesadahan (total) (mg/L)
Kota Pangkalpinang	Jan						
Kota Pangkalpinang	Feb						
Kota Pangkalpinang	Mar						
Kota Pangkalpinang	Apr						
Kota Pangkalpinang	Mei						
Kota Pangkalpinang	Jun						
Kota Pangkalpinang	Jul			-			
Kota Pangkalpinang	Ags	-	-	-	-	-	
Kota Pangkalpinang	Sep	-	-	-	-	-	
Kota Pangkalpinang	Okt	-	-	3,42	-	-	31,6
Kota Pangkalpinang	Nop	5,63	25,1	6,60	0,600	0,177	27,1



Kota Pangkalpinang	Des	5,29	13,1		0,157	0,157	
-----------------------	-----	------	------	--	-------	-------	--

Analisa kualitas air hujan menunjukkan pH air hujan kurang dari 6. Nilai pH ini belum memenuhi baku mutu dalam Peraturan Menteri kesehatan Nomor 32 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan pemandian Umum yang mensyaratkan pH 6,5-8,5 sebagai salah satu parameter kimia dalam standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air untuk keperluan higiene sanitasi. Nilai pH air hujan sangat tergantung pada konsentrasi gas CO₂ di udara. CO₂ di udara dapat berasal dari emisi kendaraan maupun udara emisi yang berasal dari kegiatan industri dan aktivitas lainnya. Pertambahan moda transportasi kendaraan bermotor dan kegiatan industri di suatu daerah dapat mengakibatkan pencemaran sulfur dan nitrogen menjadi tinggi sehingga nilai pH menjadi asam (Untari & Kusnadi, 2015). Parameter kunci lainnya dalam menilai kualitas air hujan yaitu kesadahan masih dibawah ambang bakumutu. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum yang mensyaratkan kesadahan kurang dari 500 mg/l.

II.2.3.3 Ketersediaan Air

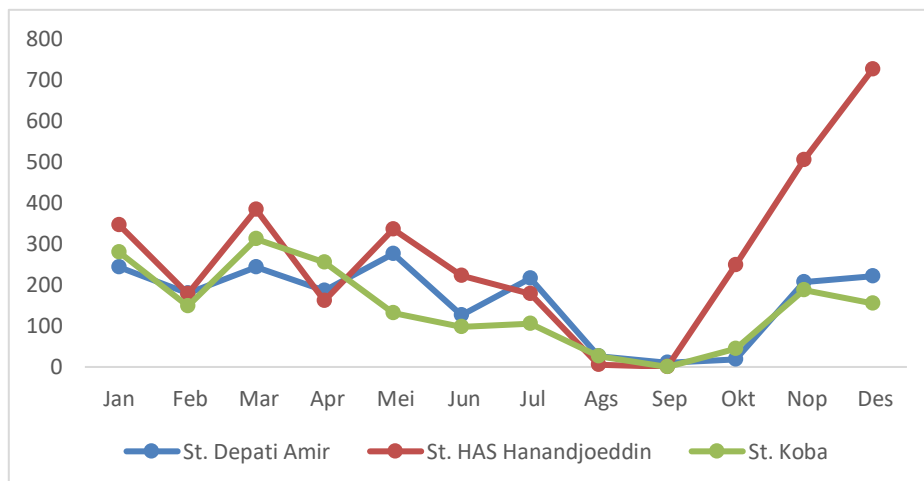
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi yang berupa kepulauan memiliki banyak sumber air, baik air tawar maupun laut. Air tawar diperoleh dari air permukaan berupa sungai dan kolong, serta air tanah dan air laut. Sebagai daerah kepulauan, terdapat banyak sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan dua DAS utama yaitu DAS Baturusa dan DAS Cerucuk. Terdapat 2412 sungai di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan panjang mencapai 10546,84 km Terdapat pula sungai besar pada setiap kabupaten/kota yaitu Sungai Rangkui yang membelah Kota Pangkalpinang, Sungai Kurau dan Sungai Selan yang berada di Kabupaten Bangka Tengah, Sungai Bangka Kota dan



Sungai Kepoh di Kabupaten Bangka Selatan, Sungai Semenduk di Kabupaten Bangka, Sungai Mancung berada pada Kabupaten Bangka Barat, Sungai Cerucuk di Kabupaten Belitung dan Sungai Lenggang di Kabupaten Belitung Timur. Sungai-sungai tersebut merupakan sumber air bersih bagi masyarakat disekitarnya untuk keperluan sehari-hari.

Sumber air permukaan lain yang banyak terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah kolong. Kolong adalah istilah lokal untuk lubang bekas galian tambang timah yang menampung air hujan. Kolong biasanya dikelompokkan berdasarkan umur kolong menjadi kolong muda (0-5 tahun), kolong menengah (6-20 tahun) dan kolong tua yaitu kolong yang berumur lebih dari 20 tahun. Pendataan yang dilakukan terhadap 69 kolong yang dimanfaatkan masyarakat di Bangka Belitung yang diketahui bahwa kolong tersebut dengan luas total 2.623 Ha dan volume kolong sebesar 95.362.250 m³.

Sebagai daerah tropis hujan terjadi sepanjang tahun di wilayah Indonesia. Pada tahun 2023, curah hujan sebesar 6994,6 mm. Pengukuran curah hujan dilakukan pada tiga lokasi yaitu Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang dan Stasiun Meteorologi Kelas III Hanandjoedin Tanjung Pandan Kabupaten Belitung serta Stasiun Klimatologi Koba - Bangka Belitung. Curah hujan yang terukur pada stasiun pengukuran tersebut pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.2. 7 Curah hujan pada tiga stasiun pengamatan tahun 2023



Dari gambar diatas diketahui bahwa pada tahun 2023, curah hujan sangat rendah di semua stasiun klimatologi terutama pada bulan Agustus, September hingga Oktober, dan curah hujan kembali meningkat drastic pada bulan nopember dan desember, meskipun peningkatan curah huja di stasiun Klimatologi HAS Hanandjoeddin sudah mulai terjadi pada buan oktober. Rendahnya curah hujan pada tahun 2023, merupakan dampak dari el nino yang melanda seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Bangka Belitung.

Musim kering yang cukup panjang yag terjadi pada triwulan II hingga triwulan IV tahun 2023 memberikan dampak pada ketersediaan air bagi masyarakat. Masyarakat pada wilayah-wilayah tertentu mengalami kekurangan pasokan air bersih, misalnya di Bangka Barat, Pangkalpinang, Belitung dan Bangka Tengah.

Dalam dokumen DDDTLH Berbasis Jasa Lingkungan (DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022) dinayatakan bahwa cakupan air bersih dapat berasal dari air permukaan, air tanah, dan air hujan di wilayah ekosistem tersebut. Fungsi penyedia air bersih dipengaruhi oleh keberadaan faktor lapisan tanah, curah hujan, jenis bebatuan dengan daya serap tinggi, ekoregion, penggunaan lahan dan kepadatan vegetasi. Provinsi Bangka Belitung memiliki kondisi hutan dan faktor pendukung penyedia air bersih yang masih terjaga. Meskipun demikian, perlu adanya perhatian khusus di kabupaten-kabupaten yang memiliki trend penurunan luasan kelas jasa Penyedia Air Bersih. Ketersediaan air bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditunjukkan pada table dibawah ini.

Tabel 2.2. 8 Ketersediaan Air Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten	2006	2021
Kab. Bangka	472.205.741,18	456.416.773,28
Kab. Bangka Barat	449.802.100,32	436.460.337,86
Kab. Bangka Selatan	601.998.799,37	585.123.008,61

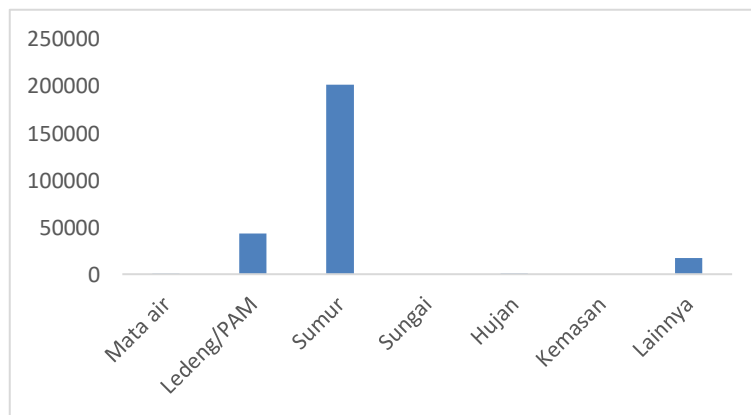


Kab. Bangka Tengah	352.491.745,31	343.118.983,31
Kab. Belitung	358.169.210,44	346.202.774,36
Kab. Belitung Timur	401.886.261,39	382.175.105,45
Kota Pangkalpinang	13.704.058,94	13.272.491,87
Grand Total	2.650.257.916,95	2.562.788.557,22

II.2.4.4 Sumber Air Minum

Kualitas air sungai yang tidak memenuhi baku mutu air kelas 1 yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih, berarti mengurangi pasokan air bersih yang dapat digunakan untuk keperluan domestic. Hal tersebut menyebabkan masyarakat harus mencari sumber air bersih lainnya, termasuk menggunakan air minum dalam kemasan sebagai salah satu alternative lainnya. Sebagian besar masyarakat memilih menggunakan air minum kemasan. Air minum kemasan yang digunakan penduduk mayoritas adalah produk AMDK lokal yang berasal dari mata air maupun air tanah, sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memenuhi keperluan air minum. Termasuk dalam kategori sumber air minum lainnya yang digunakan adalah air tanah yang diperoleh melalui sumur bor yang semakin banyak digunakan masyarakat.

Data BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa pada tahun 2023 63,33% rumah tangga menggunakan air minum kemasan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, meskipun jumlah rumah tangga yang menggunakan sumur dan ledeng/PAM sebagai sumber air bersih juga mengalami peningkatan. Tingginya jumlah rumah tangga yang menggunakan air kemasan mengindikasikan rendahnya kualitas sumber air baik air sungai maupun air sumur. Sehingga masyarakat perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Jumlah kepala keluarga dan sumber air minum yang digunakan ditunjukkan dalam gambar dibawah ini.





Gambar 2.2. 8 Jumlah rumah tangga berdasarkan sumber air minum yang digunakan

II.2.4 Impact

II.2.4.1 Penurunan Kesehatan Masyarakat

Tingginya kebutuhan air bagi manusia menunjukkan betapa air merupakan kebutuhan esensial bagi makhluk itu, air juga merupakan tempat hidup bagi biota akuatik. Bahkan untuk dijadikan sebagai air konsumsi harus memenuhi baku mutu yang sangat ketat sehingga tidak mengganggu kesehatan konsumen air tersebut. Kualitas air yang buruk akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, salah satunya adalah penyebaran penyakit yang dapat menular melalui air atau *water borne disease*. Kontaminasi patogen yang terbawa pada air dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh patogen tersebut merupakan perhatian utama mengenai kualitas air di seluruh dunia.

Kontaminasi fecal terhadap air dinilai melalui penghitungan bakteri indikator fecal (FIB) seperti *Escherichia coli*, Fecal coli dan Total coliform. Kontaminasi fecal coli dalam perairan menunjukkan keberadaan bakteri coli yang berasal dari kotoran (*faeces*) baik hewan maupun manusia dan merupakan bakteri pathogen bagi manusia (Effendi, 2003), sedangkan Total coliform adalah gabungan antara *E.coli* dan Fecal coli. Oleh karena itulah baku mutu air minum melalui Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 tahun 2010 mensyaratkan parameter E. coli dan Total coliform adalah 0.

Keberadaan pathogen yang diindikasikan oleh parameter E. Coli dan Fecal coli pada air menunjukkan kualitas air buruk. Dampak pathogen dalam air, terutama air bersih adalah terjadinya penyakit gastrointestinal dan penyakit kulit, diantaranya adalah diare, hepatitis A, demam tifoid, dan kolera. Transmisi atau penyebaran penyakit ini terjadi saat menggunakan air yang terinfeksi untuk minum, menyiapkan makanan, dan mencuci



pakaian. Mayoritas penyakit yang ditularkan melalui air di seluruh dunia terutama menyerang anak-anak karena sanitasi yang buruk dan lemahnya kekebalan tubuh.

Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Sekitar 844 juta orang bahkan tidak mempunyai layanan dasar air minum, dan sekitar 159 juta orang bergantung pada air permukaan, sangat rentan mengaami waterborne disease ini (<https://www.news-medical.net/health/Water-Borne-Diseases.aspx>). Bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diare merupakan salah satu keluhan kesehatan yang sering dialami oleh masyarakat (BPS, 2024). Pada anak dan lansia, diare dapat menyebabkan dehidrasi dan mengganggu penyerapan nutrisi.

II.2.4.2 Kerugian Ekonomi

Kebutuhan masyarakat terhadap air dengan kualitas baik akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, sehingga mendorong peningkatan sumberaya ekonomi untuk memenuhinya. Pada dasarnya air merupakan barang public (*common goods*), namun meningkatnya kebutuhan air dan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas air sehingga manusia mulai berpikir dan memandang air sebagai barang ekonomi (*economic goods*). Penurunan kuantitas dan kualitas air tentu memerlukan adanya upaya pencegahan, penanganan dan pembaharuan (Lestari et al. 2021).

Kualitas air yang tidak memadai untuk digunakan sebagai sumber air bersih juga menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Kerugian ekonomi bagi masyarakat berrsumber dari peningkatan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air. Tingginya persentase rumah tangga yang menggunakan air kemasan mengindikasikan rendahnya kualitas sumber air baik air sungai maupun air sumur. Berkurangnya jumlah air bersih akibat pencemaran pada sumber air tanah merupakan kerugian bagi masyarakat. Masyarakat akan melakukan berbagai tindakan pencegahan dalam upaya menghindari kemungkinan dampak negatif dari pencemaran air tanah yang



terjadi. Beberapa tindakan pencegahan yang mereka lakukan akan menyebabkan peningkatan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh kualitas dan kuantitas air yang lebih baik (Syaukat dan Niella, 2012). Salah satu contoh adalah peristiwa el Nino yang terjadi pada tahun 2023 lalu, yang menyebabkan kekeringan dan kekurangan pasokan air, sehingga mengharuskan masyarakat membeli air untuk keperluan sehari-hari yang menyebabkan peningkatan biaya yang tidak sedikit.

Salah satu komponen terbesar yang memerlukan pembiayaan dalam pengelolaan air ini adalah biaya eksternalitas, operasional dan perawatan. Termasuk dalam komponen ini adalah biaya pengelolaan kualitas air agar sesuai dengan kebutuhan kelompok penerima manfaat. Dengan demikian, kualitas sumber air akan sangat berpengaruh terhadap biaya, karena air dengan kualitas yang rendah, atau tidak memenuhi baku mutu air akan memerlukan biaya yang lebih besar dalam pengelolaannya.

II.2.4.3 Kerugian Ekologi

Paradigma yang menempatkan lingkungan sebagai obyek eksploitasi telah membawa kerusakan lingkungan yang fatal dan berujung kepada berbagai bencana alam yang sangat merugikan. Kerugian ini mungkin tidak terasa sekarang, namun bisa dibayangkan apabila lingkungan hidup di bumi ini terutama di negara kita semakin rusak, tentu saja akan banyak kerugian yang diderita oleh manusia secara keseluruhan, bisa saja alam rusak, bencana alam terjadi, manusia kehabisan sumber daya alam, efek rumah kaca dan kerugian-kerugian itu akan berdampak jauh lebih besar dibandingkan kerugian ekonomis yang diderita (Wicaksana, 2020)

Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan dayaguna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari



sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam (*natural resources depletion*). Penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan lintas generasi, sehingga air tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan tetap berfungsi secara ekologis.

Jasa Ekosistem (*ecosystem services*) adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem. Semakin rendah jasa ekosistem sungai, maka akan semakin rendah kemampuan sungai tersebut untuk mendukung kehidupan manusia, dan makhluk hidup lain (Widiarto, 2019). Air bersih merupakan salah satu manfaat yang diperoleh dari fungsi ekosistem, sehingga perubahan kualitas air akan berdampak terhadap jasa ekosistem penyediaan air bersih. Jasa ekosistem penyediaan air bersih memberikan makna bahwa semakin tinggi kelas jasa ekosistem penyediaan air di suatu daerah maka akan semakin bagus kemampuan daerah tersebut dalam mendukung ketersediaan air bersih, dan sebaliknya.

Rustiadi, et al. (2011) bahwa pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pertumbuhan PDRB memang sebagai tolak ukur pembangunan suatu wilayah yang paling operasional, namun seringkali mengabaikan dimensi lingkungan (ekologi), seperti deplesi SDA, degradasi, dan kerusakan lingkungan. Salah satu komponen. Indikator krugia ekologis ini diantaranya adalah biaya polusi air yang biasanya dikaitkan dengan biaya pengolahan air bersih, biaya rehabilitasi lahan kritis, kerugian bencana, menipisnya sumberdaya yag tidak terbarukan (*depletion unrenewable resource*) dan deplesi hutan (Margiyono et al., 2019)

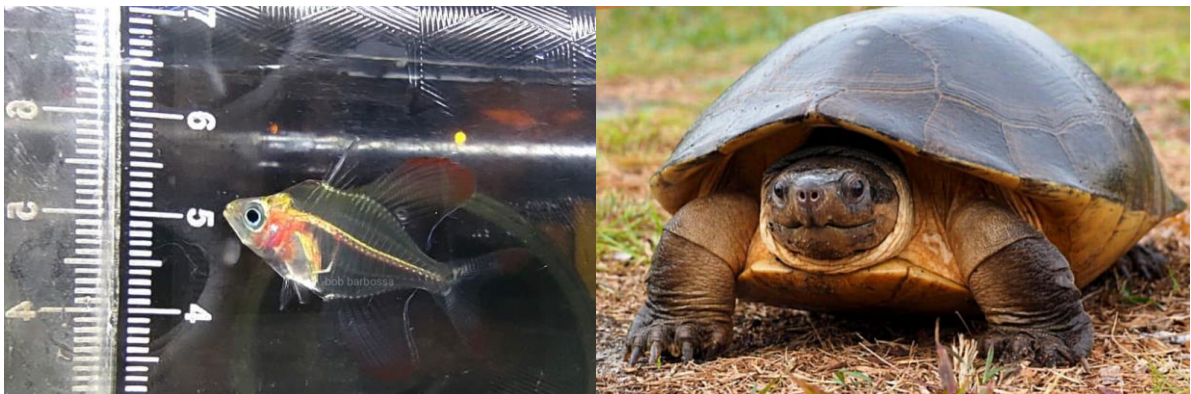
Sungai sebagai salah satu ekosistem menyediakan jalur air yang mengalir melalui berbagai jenis lingkungan, membentuk jaringan yang menghubungkan daratan dengan lautan. Sungai dengan berbagai komponennya mulai dari substrat, kolom air, hingga riparian memiliki spesies khas tersendiri. Ekosistem sungai menyediakan habitat yang kaya



akan keanekaragaman hayati. Terdapat berbagai spesies ikan, amfibi, serangga air, moluska, dan tumbuhan air. Keberagaman hayati ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menopang rantai makanan.

Pencemaran air disungai menyebabkan terjadinya perubahan kondisi sungai akibat aktivitas manusia. Apabila kondisi ini terus berlangsung dan tidak diperhatikan, maka akan menyebabkan hilangnya sumber air bersih dan rusaknya ekosistem air (Khotimah dan Nasruddin, 2022). Perubahan kondisi fisik dan kimia perairan tersebut dapat mengubah keragaman komunitas makhluk hidup di sungai. Polutan atau bahan pencemar merupakan *stressor* bagi organisme-organisme tertentu (Merliyana, 2017).. Hal tersebut dapat terjadi karena setiap spesies mempunyai batas toleransinya masing-masing, dan tidak semua organisme mampu bertahan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

Kerusakan ekosistem sungai salah satunya ditandai dengan menurunnya keanekaragaman hayati disungai tersebut. Wawancara dengan masyarakat setempat menyatakan bahwa pada saat ini banyak jenis-jenis ikan local yang mulai langka dan sulit ditemukan. Beberapa jenis biota perairan yang mulai sulit ditemukan di perairan misalnya Ikan Tilan (*Mastacembelus sp*), Ikan Baung Rasau (*Hemibagrus nemurus*), Ikan Tempala Biji Batu (*Parosphromenus bintan*), Ikan Seluang (*Rasbora einthovenii*), Ikan Belido putih (*Notopterus notopterus*), kura-kura air tawar dan lain-lain.



Gambar 2.2. 9 Ikan kaca dan kura-kura air tawar yang di temukan di Belitung Timur



II.2.4.4 Konflik sosial

Eksplorasi sumberdaya air untuk berbagai kepentingan, terutama dibidang industri menimbulkan limbah cair dalam umlah yang tdak sedikit. Limbah cair yang dihasilkan tentu membutuhkan pengolahan yang tepat agar air limbah yang memasuki media lingkungan sesuai dengan bakumutu yang dipersyaratkan. Pengolahan air limbah yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai persoalan, termasuk konflik social dengan masyarakat sekitar.

Pada tahun 2023, DLHK Kepulauan Bangka Belitung menerima beberapa pengaduan dari masyarakat yang berasal dari keluhan masyarakat terhadap limbah cair kegiatan usaha. Selain disampaikan kepada instansi lingkungan hidup di daerah, aduan ini juga beredar di berbagai media massa, baik cetak maupun online. Berita mengenai aduan masyarakat terhadap kegiatan usaha ini menarik perhatian masyarakat sehingga mudah tersebar, dan menimbulkan kerugian bagi pihak industri itu sendiri. Bagi pemilik usaha, aduan dan berita seperti ini dapat menimbulkan stigma negative bagi industri, serta dapat berimplikasi hukum. Misalnya pemberian sanksi administrasi dari instansi lingkungan hidup dan tindak lanjutnya oleh penegak hukum.

Pengaduan yang dilakukan masyarakat sehubungan dengan air limbah ini didominasi oleh keluhan terhadap bau yang ditimbulkan oleh limbah tambak udang yang diduga karena pengolahan air limbah yang tidak memadai. Terhadap aduan-aduan tersebut telah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tabel berikut adalah daftar pengaduan masyarakat yang diterima DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berhubungan dengan pengolahan air limbah.

Tabel 2.2. 9 Pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan pengolahan air limbah



No. (1)	Pihak yang Mengadukan (2)	Masalah Yang Diadukan (3)	Progres Pengaduan (4)
1	DPD Gerakan pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM-Gempur) -02 Januari 2023	Pencemaran air akibat adanya aktifitas tambak udang (berupa intrusi air asin ke sumber air/sumur warga di Dusun tegek, Desa Benteng Kota kecamatan Tempilang Kab. Bangka Barat	Verifikasi dan sudah dilakukan penyelesaian dengan penggantian air bersih dan pengurusan air yang tercemar
2	Surat dari Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S873/PPSALHK/PDW/GKM .0/5/2023 tanggal 18 Mei 2023 Tentang Dukungan Pengawasan - 18 Mei 2023	Dugaan pemanfaatan sumber air baku di Hutan Lindung Gunung Tajam secara Ilegal oleh perusahaan Air Minum dalam kemasan PT. Agunta di Kabupaten Belitung	Sudah dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan Kementerian LHK
3	CV. Mulia Asri Sukhitata Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka - 25 Mei 2023	Laporan Pengaduan Pencemaran Limbah Tambak Dugaan Pencemaran limbah tambak udang di Jalan Lintas Timur Desa Rebo Kecamatan Sungai Liat yang diduga dilakukan oleh Tambak Udang (berupa pembiaran kelalaian oleh pengelola tambak udang sehingga terjadi kebocoran IPAL	Sudah dilakukan verifikasi aduan lapangan. Saat ini dalam proses pemeriksaan
4	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan - Juli 2023	aktivitas Tambak Udang CV. Samudera Terus Jaya berdasarkan aduan yang beroperasi di Temayang Desa Rias Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dengan dugaan tidak melakukan pengelolaan lingkungan (IPAL) dalam pengelolaan limbahnya	Sudah Dilakukan verifikasi dan pengambilan sampel air limbah
5	Surat dari Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S1374/PPSALHK/PDW/GK M.0/7/2023 tanggal 28 Juli 2023 Tentang Permohonan Informasi	Aduan dari PT. APS (Agro Pratama Sejahtera) terkait pembukaan yang dilakukan oleh oknum masyarakat warga Dusun Bukit Luwi, Desa Penagan, kecamatan mendo Barat yang digunakan untuk Kebun Sawit di lokasi di duga masuk ke dalam kawasan Hutan produksi Sungai Sembulan dan termasuk dalam areal IUPHHK HTI PT. APS diperkirakan seluas 1000 Ha	Tercatat



No. (1)	Pihak yang Mengadukan (2)	Masalah Yang Diadukan (3)	Progres Pengaduan (4)
6	Laporan dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Komisi III - Oktober 2023	Laporan terkait pencemaran tambak Udang di Desa Tanjung Kelumpang Kabupaten Belitung Timur Kecamatan Simpang Pesak Kabupten Belitung Timur	Sudah dilaksanakan verifikasi
7	Laporan masyarakat	Aduan terkait permasalahan sawit di sempadan sungai PT. Sahabat Mewah dan Makmur (SMM) di Jangkang, Kec. Dendang, Kabupaten Belitung Timur	Sudah dilaksanakan verifikasi

II.2. Response

II.2.5.1 Perencanaan dalam RPJMD

Sejak tahun 2023, sudah diketahui bersama bahwa Indonesia akan mengadakan pemilihan umum serentak, dan diikuti dengan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Setelah itu, maka akan didapatkan Pemimpin baru untuk lima tahun yang akan datang. Untuk menghadapi hal tersebut pemerintah juga menyiapkan serangkaian perencanaan pembangunan, yang nantinya akan diselaraskan dengan visi misi pemimpin terpilih. Perencanaan pembangunan tersebut di susun dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dokumen perencanaan yang disusun ini tentu saja merupakan turunan dari dokumen perencanaan Nasional, sehingga memiliki arah pembangunan yang sama dengan perencanaan pembangunan nasional.

RPJPD dan RPJMD yang disusun pada dasarnya merupakan jawaban bagi *triple planetary crisis* yaitu tiga krisis utama yang dihadapi masyarakat di bumi ini. Salah satu krisis tersebut adalah polusi, termasuk diantaranya adalah polusi air. Dengan mengusung prinsip pembangunan keberlanjutan, dokumen perencanaan ini diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan tersebut. Dalam dokumen perencanaan ini selanjutnya dirumuskan 45 indikator pembangunan. Salah satunya adalah indeks kualitas



lingkungan hidup (IKLH). Dan salah satu komponen IKLH tersebut adalah indeks kualitas air (IKA).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri telah menetapkan target IKLH, beserta komponennya. Penentuan target ini bertujuan agar para pemangku kepentingan memiliki arah yang sama dalam menentukan kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai target tersebut. Sehingga pada saat pemimpin daerah baru telah terpilih, juga akan memiliki komitmen yang sama untuk mencapai target tersebut.

II.2.5.2 Pengolahan Air Limbah

Pengolahan air limbah merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha. Kewajiban ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 05 tahun 2022 yang menyatakan bahwa “penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan wajib melakukan Pengolahan Air Limbah sebelum dibuang ke media air”. Atas kewajiban ini, pemerintah juga telah menetapkan baku mutu air limbah yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai dengan jenis usahanya, serta telah menetapkan sanksi yang akan dikenakan apabila kewajiban pengolahan air limbah tersebut tidak dipenuhi.

Sejak usaha budidaya udang banyak bermunculan, maka Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan acuan khusus baku mutu limbah cair tambak udang yaitu Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang pedoman pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan tambak udang,. Sehingga usaha budidaya udang di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu kepada aturan tersebut. Kewajiban pengolahan air limbah ini juga merupakan komitmen dari pelaku usaha itu sendiri, yang dicantumkan dalam dokumen perizinan lingkungan yang dimiliki oleh setiap pelaku usaha.

Kewajiban pengolahan air limbah ini juga tentu akan diawasi oleh instansi berwenang, yaitu DHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang



juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat. Selain itu, pengolahan air limbah oleh dunia usaha/industri juga diawasi langsung oleh KLHK sebagai lembaga negara di bidang lingkungan hidup. Saat ini pelaporan dan pengawasan yang dilakukan oleh KLHK juga terpnatau secara online melalui aplikasi SIMPEL (system informasi dan pelaporan).

Pengolahan air limbah domestic merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Meskipun kondisi pada saat ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperlihatkan bahwa pengolahan air limbah domestic masih sangat terbatas. Keterbatasan ini disebabkan akrena unit IPAL domestic yang masih sangat terbatas dan kapasitas IPAL domestic itu sendiri yang masih kecil. Pada saat ini beberapa IPAL domestic yang telah dibangun tidak semuanya masih beroperasi dengan baik. Banyak diantara IPAL yang sudah dibangun tidak lagi berfungsi dengan baik, namu beberapa IPAL yang masih berfungsi juga tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Beberapa IPAL domestic yang masih beroperasi diantaranya adalah IPAL komunal di RW.01 Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah dan IPAL komunal di RW.02 Kelurahan Sungai Daeng, Kabupaten Bangka Barat.

Selain membangun IPAL komunal untuk mengelola air limbah domestic, khususnya black water dari masyarakat, pemerintah juga membarikan bantuan septictank kepada jamban warga yang belum dilengkapi septictank, misalnya yang dilakukan di Kota Pangkalpinang. Hal ini bertujuan agar buangan dari toilet yang trmasuk air limbah domestic jenis black water tidak lagi masuk dan mencemari media air. Pengolahan air limbah domestic ini tent masih harus ditingkatkan dan disebarluaskan agar lebih banyak rumah tangga yang terlayani oleh IPAL komunal. Selain itu juga perlu dilakukan perawatan terhadap IPAL komunal yang sudah dibangun .



II.2.5.3 Pendidikan dan Penyadartahuan

Kegiatan pendidikan dan penyadartahuan dilakukan oleh DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan informasi tentang pengelolaan lingkungan, khususnya mengenai pengelolaan sampah secara baik dan benar, pelestarian ekosistem hutan, serta pengelolaan air limbah industry, dan lain-lain. Kegiatan pendidikan dan penyadartahuan ini dilakukan kepada generasi muda, siswa-siswa di sekolah, masyarakat umum dan LSM. Kegiatan ini juga seringkali dirangkaikan dengan aksi peduli lingkungan misalnya penanaman pohon, *world clean up day*, *coastal clean up* dan lain-lain. Pada tahun 2022, kegiatan penyadartahuan ini cukup intens dilakukan diberbagai tempat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan seringkali dilaksanakan bersamaan dengan program Pj. Gubernur yaitu Gule Kabong.

Program-program pendidikan dan penyadartahuan ini juga dilakukan terhadap komunitas, misalnya melalui kegiatan penumbuhan kesadaran lingkungan hidup yang menyasar rumah tangga, melalui program kegiatan peningkatan budaya lingkungan hidup sehat (PBLHS) ke sekolah-sekolah melalui Program Adiwiyata, juga disampaikan kepada lembaga masyarakat di tingkat tapak melalui Program Kampung Iklim (Proklam). Selain menyampaikan informasi dan *brain storming* mengenai penohlhan air limbah domestic kepada kelompok sasaran, program ini juga mengajarkan pengolahan limbah yang aplikatif dimasyarakat, misalnya dengan pembuatan eco-enzym dari limbah kulit buah yang data dimanfaatkan sebagai pestisida maupun pupuk cair.

Penyadartahuan bgi dunia usaha dilakukan sejalan dengan kegiatan pengawasan dan pembinaan. Hal-hal yang disampaikan yaitu mengenai kewajiban industri dalam mengolah limbah sesuai dengan ketentuan yang



berlaku. Hal ini perlu terus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran akan kewajiban industri dalam mengolah limbah cair yang dihasilkan.

II.2.5.4 Penyediaan Prasarana Air Bersih

Sebagai respon terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih, dimasyarakat secara swadaya memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan air kemasan, meskipun hal tersebut akan meningkatkan pengeluaran rutin rumah tangga. Kebutuhan air bagi masyarakat bukan hanya untuk keperluan domestic, beberapa wilayah yang memiliki potensi pertanian juga membutuhkan air untuk pengairan di lahan pertanian.

Pemerintah daerah melalui instansi terkait berusaha untuk membangun berbagai prasana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Respon pemerintah terhadap masalah kekurangan air bersih bagi keperluan masyarakat misalnya dengan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS). Pamsimas yang dibangun terdiri dari penyediaan sumber air yaitu sumur bor, penampungan air dan instalasi perpipaan. Pamsimas ini dapat dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Pada wilayah yang memiliki potensi pertanian, air untuk kebutuhan pertanian seringkali menjadi masalah, terutama pada saat musim kering. Meskipun secara tradisional pertanian di Bangka Belitung masih banyak yang menerapkan system tadah hujan, namun beberapa lokasi pemerintah berusaha menyiapkan sarana bagi pengairan pertanian. Sarana yang disiapkan pemerintah misalnya dengan pembangunan embung dan jaringan irigasi.

Embung atau cekungan penampung (retention basin) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran



air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air disekitarnya. Embung digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, estetika, hingga pengairan. Pembangunan embung ini telah dilakukan di Desa Air Jangkang, Kabupaten Bangka Tengah, Embung Desa Kacang Butor, Kabupaten Belitung, Embung Jernang, Desa Batu Betumpang Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan jaringan irigasi yang telah dibangun diantaranya adalah irigasi Desa Belilik, Bangka Tengah, irigasi Desa Badau, Kabupaten Belitung Irigasi di Desa Rias, Kabupaten Bangka Selatan.



Gambar 2.2. 10 Jaringan irigasi di Desa Badau, Kabupaten Belitung

II.2.5.5 Konservasi Air

Konservasi sumber daya air merupakan implementasi atau upaya penerapan hemat air yang berguna sebagai pengurangan konsumsi air yang berlebih dan bertujuan masih tersedianya kualitas dan kuantitas yang cukup untuk tercukupinya rasa kebutuhan akan air dalam jangka hidup yang dekat maupun yang akan datang. Konservasi sumber daya air sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan dan keberadaan sumber daya air, termasuk daya dukung, daya tampung, dan fungsinya. Konservasi sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, serta



pengendalian pencemaran air, dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai, dan dipakai sebagai acuan dalam perencanaan tata ruang (PUSDIKLAT SDAK, 2017). Tujuan utama dilakukannya konservasi air ialah melestarikan air bersih dengan kegiatan sederhana dalam kehidupan sehari-hari ialah mengurangi penggunaan air di rumah, sampai membangun sumur resapan air di perkarangan rumah. Upaya-upaya konservasi air di Bangka Belitung dilakukan oleh berbagai pihak sesuai dengan kapasitasnya. Upaya konservasi air di perumahan dan pemukiman masyarakat dilakukan dengan membuat biopori dan sumur resapan di halaman rumah, serta dengan melakukan penghematan penggunaan air untuk keperluan domestic. Kegiatan ini juga merupakan salah satu poin penilaian dalam program kampung iklim (Proklim). Konservasi air ini juga mulai banyak dilakukan di sekolah-sekolah misalnya dengan prilaku hemat air dan pemanfaatan kembali air bekas.

Konservasi air juga dilakukan secara sukarela oleh masyarakat. Masyarakat yang sudah menyadari pentingnya menjaga kecukupan air yang bersih secara swadaya berupa melakukan konservasi dengan menjaga sumber-sumber air. Hal ini dilakukan dengan melarang kegiatan-kegiatan pertambangan disekitar mata air. Selain itu juga masyarakat melakukan *re-stocking* ikan local di sungai tertentu.



Gambar 2.2. 11 Konservasi air yang dilakukan masyarakat

II.2.5.6 Rehabilitasi DAS

Terjadinya perubahan tutupan lahan hutan menjadi area pertambangan, perkebunan, pemukiman dan tambak yang akan berdampak terhadap kualitas air. Pohon dan tanaman di hutan berfungsi untuk menyerap air hujan dan menahan tanah agar tidak tergerus air. Pengalihfungsian hutan akan berakibat pada terganggunya system hidrologi. Ketika terjadi penebangan pohon, akar humus kehilangan penahannya, lapisan tanah akan terkikis menyebabkan gangguan sistem hidrologi dan dapat menimbulkan bencana hidrologis banjir dan longsor. Gangguan system hidrologis ini dapat menurunkan kualitas air permukaan, karena terjadinya peningkatan sedimentasi di perairan (Kusumaningrum, 2018).

Penanaman Rehabilitasi DAS adalah penanaman di dalam dan di luar kawasan hutan yang merupakan salah satu kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dan pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan akibat tukar menukar kawasan hutan sebagai



upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi DAS sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai. kegiatan rehabitasi hutan dan lahan ini disusun berdasarkan kondisi biofisik dan sosial ekonomi serta budaya masyarakat setempat dalam satuan unit Ekosistem DAS. Bebrapa lokasi yang sudah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini menunjukkan hasil yang cukup baik.

Pada tahun 2023, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara simultan, baik oleh DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun oleh UPT KLHK yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Realisasi kegiatan rehabilitasi DAS pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.2. 10 Realisasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan

No.	Lokasi Penanaman	Penghijauan				Reboisasi		
		Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Jumlah Pohon Hidup (batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
1	Desa Payung, Kec. Payung	60	60	64000	17941			
2	Desa Payung, Kec. Payung	25	25	30000	13880			
3	Desa Puput, Kec. Simpang Katis	50	50	60000	21089			
4	Desa Celuak, Kec. Simpang Katis	25	25	30000	6220			
5	Desa Namang, Kec. Namang	25	25	30000	12344			
6	Desa Pugul, Kec. Riau Silip	25	25	30000	4310			
7	Desa Badau, Kec. Badau					150	150	165000
8	Desa Dendang, Kec. Nyuruk					40	40	44000
9	Desa Simpang Renggang, Kec. Simpang Tiga					30	30	33000



II.3 Kualitas Udara

Kualitas udara suatu wilayah umumnya dinilai dari konsentrasi parameter pencemaran udara yang terukur lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai baku mutu udara nasional. Nilai baku mutu udara nasional ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lampiran IV). Peraturan tersebut menjabarkan parameter, waktu pengukuran, baku mutu, dan sistem pengukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas udara ambien. Udara ambien merupakan udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya (PP 22 Tahun 2021). Hasil pengukuran udara ambien dinyatakan dalam nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) yang standar perhitungannya mengacu pada kondisi rata-rata konsentrasi NO_2 dan SO_2 sesuai dengan standar WHO yaitu $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ untuk NO_2 dan $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ untuk SO_2 .

Pencemar udara yang berkontribusi terhadap indeks kualitas udara ambien bersumber dari kegiatan ekonomi manusia berupa konsumsi energi terutama energi fosil yang meliputi sektor transportasi, industri dan domestik (perkantoran maupun perumahan). Sektor transportasi merupakan sumber aktivitas utama manusia yang memiliki potensi terbesar dalam menurunkan kualitas udara ambien di suatu wilayah. Penggunaan bahan bakar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berbasiskan energi fosil minyak bumi dan batu bara. Pada sektor transportasi, energi fosil menyumbang lebih dari 37% emisi gas dalam penurunan kualitas udara (DIKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023). Penggunaan energi fosil akan meningkatkan parameter utama yaitu SO_2 , NO_2 , oksidan serta partikulat yang berperan penting dalam menurunkan kualitas udara ambien dan berpotensi menyebabkan pencemaran udara.



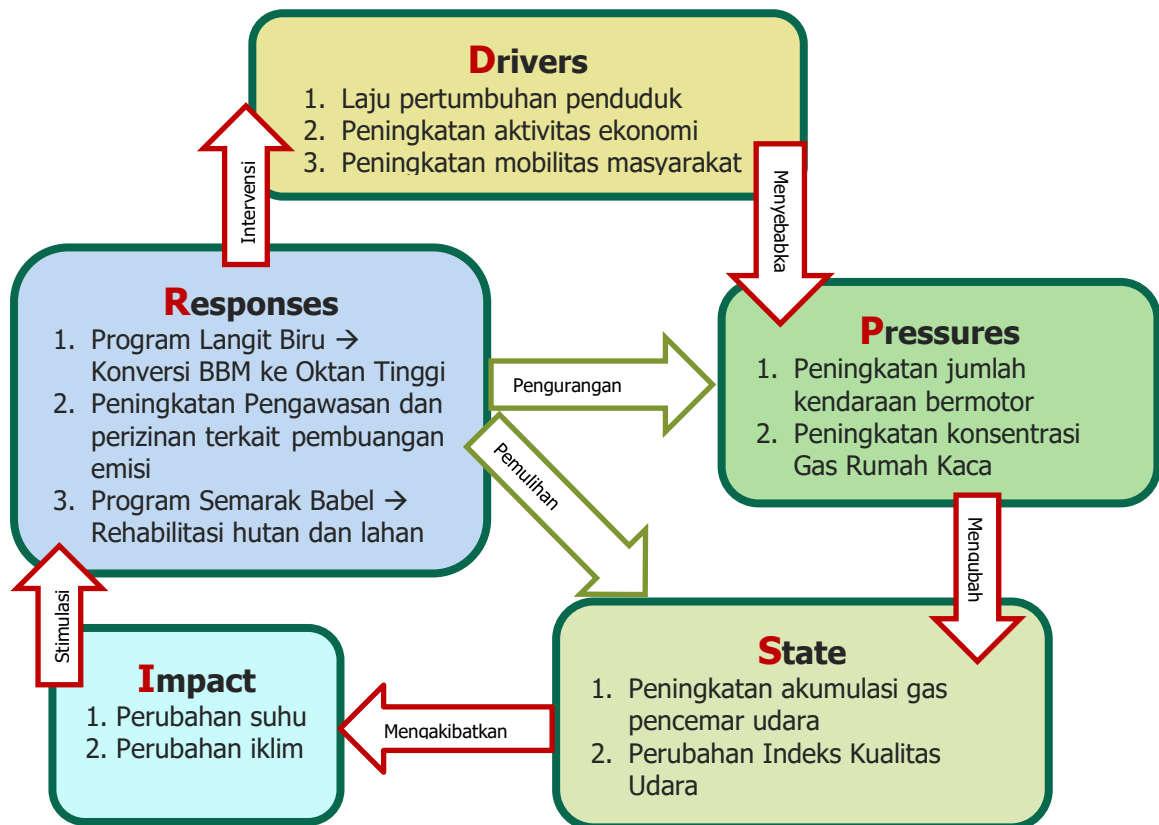
Pencemaran udara adalah masuk/dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu ambien yang telah ditetapkan (Permen LHK No. 5, 2021). Untuk mengetahui tingkat pencemaran udara, dapat dilakukan kuantifikasi zat pencemar udara dengan metode perhitungan kualitas udara. Salah satu metode perhitungan adalah Indeks Kualitas Udara yang dihitung menggunakan parameter gas pencemar yang dominan pada udara yaitu SO_2 dan NO_2 . Pencemaran udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar bersumber dari aktifitas pembakaran energi fosil pada sektor transportasi dan industri. Penggunaan bahan bakar minyak beroktan rendah cenderung menghasilkan tingkat polusi udara yang lebih tinggi daripada bahan bakar minyak beroktan tinggi.

Selain penurunan kualitas udara yang dihitung dari parameter SO_2 dan NO_2 , peningkatan aktivitas pembakaran baik dari aktivitas industri dan perumahan akan turut menyumbang peningkatan emisi gas yang dilepaskan ke udara ambien. Dampak lain selain menurunkan kualitas udara ambien, pelepasan gas ke udara ambien juga akan meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berdampak pada peningkatan suhu rata-rata tahunan. Aktivitas yang menghasilkan emisi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih didominasi oleh kegiatan transportasi, pembangkit listrik, dan emisi yang berasal dari cerobong pembakaran pabrik. Industri spesifik pada wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh aktivitas peleburan timah pada smelter dan emisi boiler yang berasal dari pabrik CPO serta pembangkit listrik (PLTD) dan PLTU berbahan bakar batu bara.

Penurunan kualitas udara dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia. Kualitas udara yang baik menjadi kebutuhan vital yang wajib dijaga melalui pengendalian kualitas udara. Langkah awal untuk mengendalikan kualitas udara melalui perhitungan indeks kualitas udara. Penyusunan dan perhitungan indeks kualitas udara dapat difungsikan sebagai:



- Pelaporan kualitas udara yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara perkotaan.
- Memberikan informasi kualitas udara sehingga dapat dilakukan langkah preventif dalam mengendalikan kualitas udara perkotaan.



Gambar 2.3. 1 Alur Skematik DPSIR Kualitas Udara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

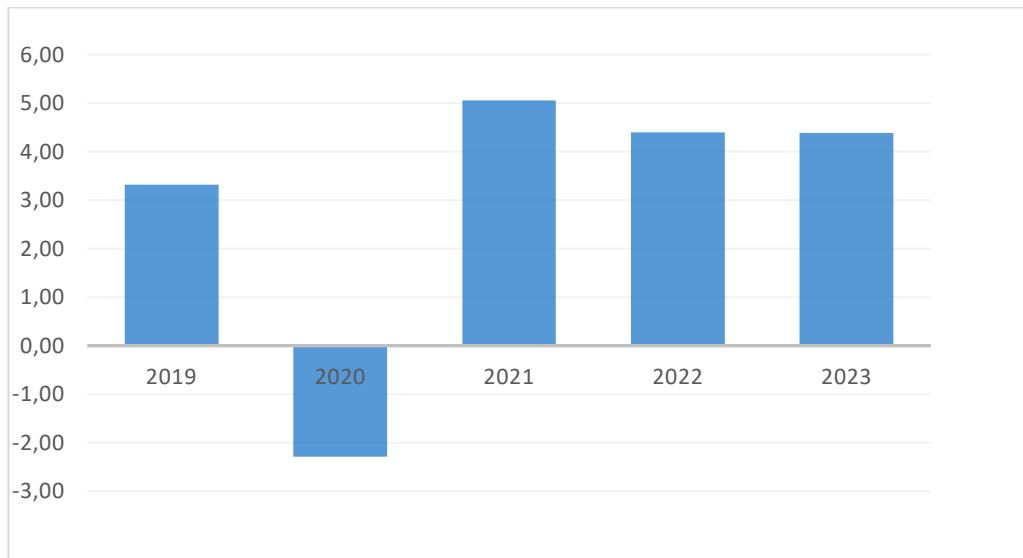
II.3.1 Driving force

II.3.1.1 Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Ekonomi

Kuantitas pencemar udara di suatu wilayah ditentukan oleh jumlah penduduk serta ragam dan intensitas kegiatan yang dilakukan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka intensitas kegiatan ekonomi juga akan meningkat terutama aktifitas produksi. Peningkatan aktifitas produksi pasti akan dibarengi dengan peningkatan konsumsi energi sebagai faktor utama dalam kegiatan



produksi. Peningkatan aktivitas ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari data BPS terutama peningkatan PDRB menurut lapangan usaha. Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan data BPS selama 5 tahun terakhir mengalami perlambatan dari tahun 2022 sebesar 0,66 dan tahun 2023 sebesar 0,016. Nilai perlambatan pada tahun 2022-2023 lebih kecil seiring dengan perbaikan perekonomian pasca pandemi covid.



Gambar 2.3. 2 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dasar harga konstan menurut Lapangan Usaha

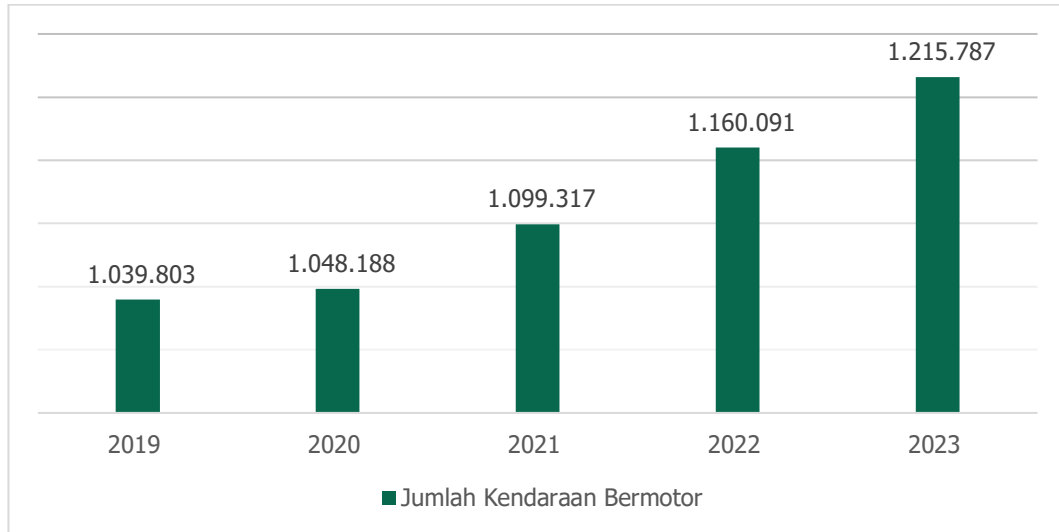
Sumber: Biro Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

II.3.1.2 Peningkatan Mobilitas Masyarakat

Mobilisasi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin meningkat setiap tahun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk serta ragam dan intensitas kegiatan yang dilakukan. Preferensi masyarakat yang cenderung menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum semakin akan mendorong produksi gas pencemar yang dapat menekan kualitas udara ambien. Ketersediaan transportasi umum yang kurang menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan mode transportasi pribadi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peningkatan angka kepemilikan dan



penggunaan kendaraan pribadi juga dipengaruhi pertumbuhan PDRB yang menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat pada kendaraan bermotor.



Gambar 2.3. 3 Pertumbuhan Kendaraan Bermotor
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: Biro Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

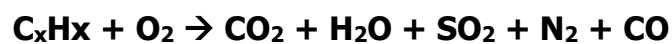
Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan walaupun terjadi pelambatan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan tetapi terjadi kenaikan kepemilikan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2023. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 4,8% dibandingkan kenaikan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2021 ke 2022 yaitu sebesar 5,53%. Jika disimpulkan hubungan antara kenaikan kendaraan bermotor dengan laju pertumbuhan PDRB maka didapatkan nilai korelasi sebesar 0,913 dan berarti hubungan antara kepemilikan kendaraan bermotor dengan laju pertumbuhan PDRB pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat tinggi, sedangkan nilai determinasi sebesar 0,834 mengindikasikan peningkatan kepemilikan kendaraan pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipengaruhi oleh laju pertumbuhan PDRB sebesar 83,4%.



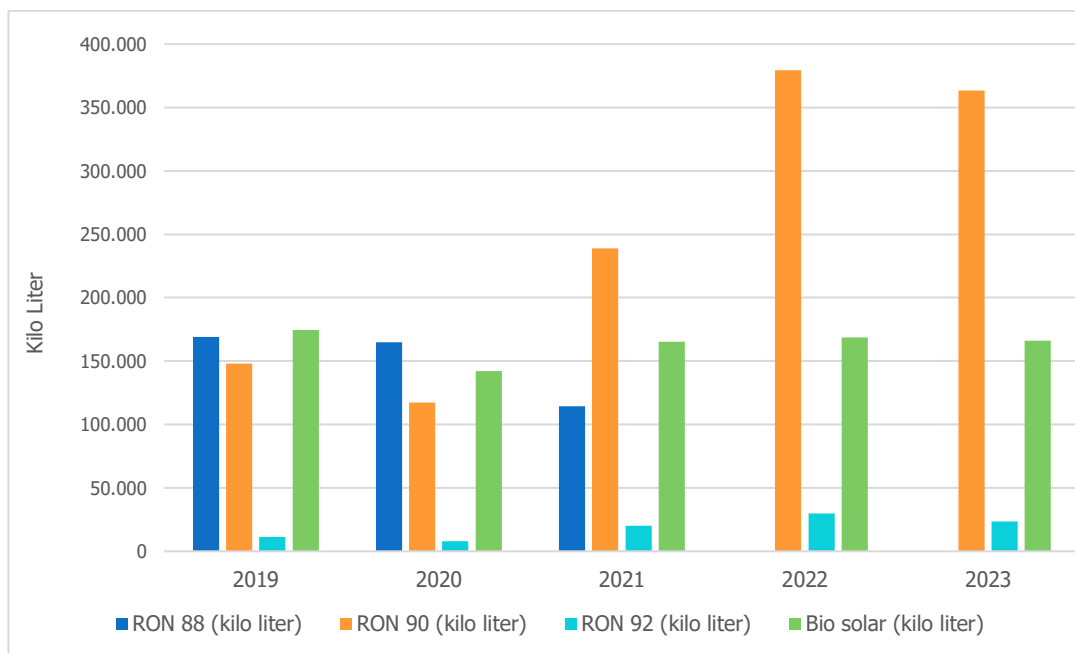
II.3.2 Pressure

II.3.2.1 Kenaikan Penggunaan Bahan Bakar

Penggunaan bahan bakar fosil baik bahan cair seperti bensin, minyak tanah ataupun solar akan menghasilkan gas pencemar udara seperti SO₂ dan NO_x. Sedangkan penggunaan bahan bakar padat seperti batu bara pada pembangkit listrik akan menghasilkan zat pencemar udara ditambah dengan peningkatan produksi gas rumah kaca. Secara umum proses pembakaran sempurna bahan bakar fosil ditunjukkan dengan reaksi berikut:



Kenaikan jumlah kendaraan bermotor akan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah bahan bakar yang digunakan. Peningkatan jumlah bahan bakar fosil yang digunakan akan menghasilkan sumber emisi sehingga menjadi faktor utama dalam menurunkan kualitas udara ambien. Tekanan dalam penggunaan energi berlebihan khususnya penggunaan bahan bakar fosil pada sektor transportasi akan berdampak besar dalam menjaga kualitas udara ambien perkotaan.



Gambar 2.3. 4 Konsumsi Bahan Bakar Sektor Transportasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Biro Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

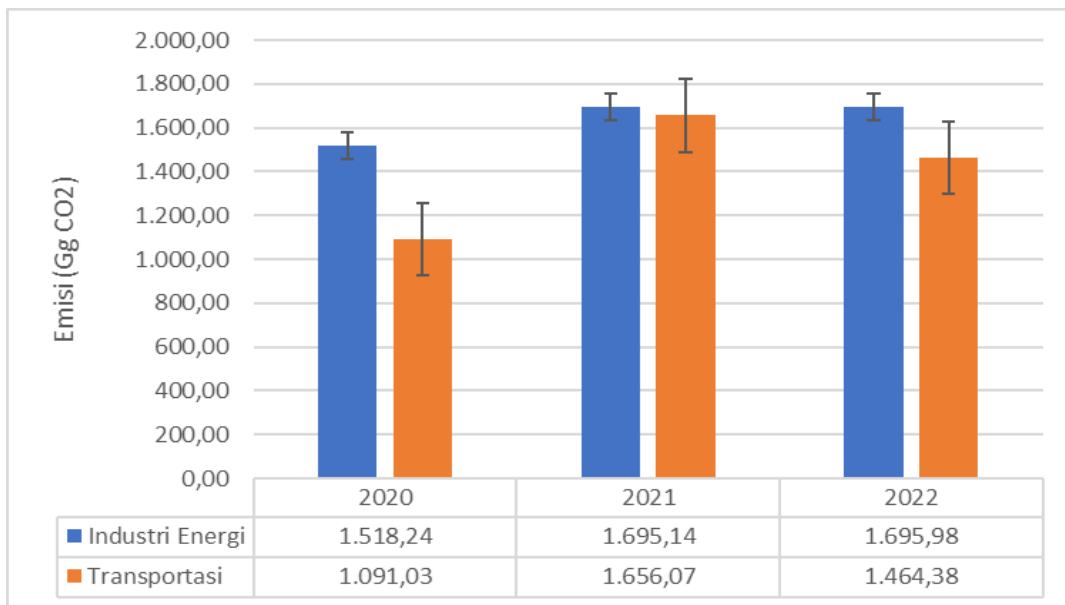


Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tentu akan meningkatkan penggunaan bahan bakar khususnya bensin dan solar pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan analisis data konsumsi bahan bakar pada sektor transportasi, preferensi masyarakat terhadap penggunaan bahan bakar yang tertinggi adalah bahan bakar Pertalite (Ron 90). Sedangkan untuk penggunaan Ron diatas 90 masih sedikit namun cenderung meningkat selama 5 tahun terakhir.

Selain pertambahan jumlah kendaraan bermotor, peningkatan aktivitas ekonomi juga mendorong peningkatan aktivitas industri. Peningkatan aktivitas industri tentu akan berdampak pada penggunaan listrik sebagai sumber tenaga. Pembangkit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat tergantung dari pembangkit yang berasal dari tenaga fosil seperti PLTU maupun PLTD. Selain pertumbuhan jenis industri baru seperti tambak udang ataupun pengolahan mineral logam ataupun nonlogam, pengembangan wilayah pemukiman dan perkantoran juga akan menambah kapasitas PLN dalam menyediakan kebutuhan listrik pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II.3.2.2 Kenaikan Konsentrasi Gas Rumah Kaca

Sektor energi masih menjadi penyumbang emisi terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya dari aktivitas penggunaan bahan bakar untuk pembangkit listrik dan penggunaan bahan bakar untuk transportasi. Berdasarkan data hasil inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui <https://signsmart.menlhk.go.id/>.



Gambar 2.3. 5 Emisi GRK Sektor Energi (Industri Energi dan Transportasi)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: <https://signsmart.menlhk.go.id/>, 2024

Emisi yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar pembangkit listrik mengalami peningkatan 0,54 Gg CO₂ pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 khususnya ada peningkatan penggunaan HSD untuk PLTD yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan untuk emisi yang dihasilkan dari transportasi mengalami penurunan sebesar 191,69 Gg CO₂ pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021, hal ini dapat dilihat adanya penghapusan penggunaan RON 88 (premium) sudah beralih ke RON 90 (pertalite) cukup memberikan dampak pada penurunan emisi GRK yang ditimbulkan dari penggunaan bahan bakar untuk kegiatan transportasi.

II.3.3 Kondisi (State)

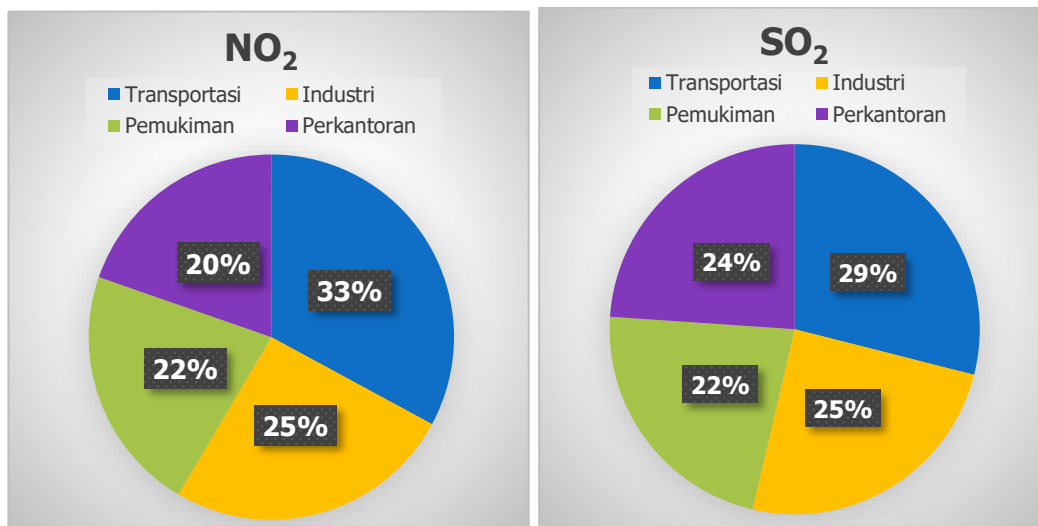
II.3.3.1 Potensi Kenaikan Gas Pencemar Udara

Sektor transportasi merupakan kegiatan yang berpotensi menyumbang emisi paling signifikan dalam penentuan indeks kualitas udara ambien. Pemantauan kualitas udara ambien dari sumber transportasi dapat



diketahui dengan pengambilan sampel pada lokasi pemantauan jalan raya. Emisi yang berasal dari sumber pembakaran pada kendaraan bermotor akan menghasilkan gas pencemar seperti SO_2 , NO_2 , HC dan partikulat khususnya untuk kendaraan dengan bahan bakar solar. Kegiatan pemantauan kualitas udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan teknik *passive sampler* yang dilakukan pada empat sektor kegiatan yang mewakili aktivitas perkotaan yaitu perumahan, perkantoran, industri, dan jalan raya. Parameter yang dipantau adalah SO_2 dan NO_2 sebagai parameter pencemar dominan penentu indeks kualitas udara.

Hasil pemantauan kualitas udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023, untuk sumber emisi gas NO_2 diperoleh data sektor transportasi menyumbang 33%, sektor industri menyumbang 25% serta pemukiman menyumbang 22% sedangkan perkantoran menyumbang 20%. Sedangkan sumber emisi untuk gas SO_2 dari sektor transportasi menyumbang 29%, sektor industri 25%, sektor perkantoran 24%, dan sektor pemukiman 22%.

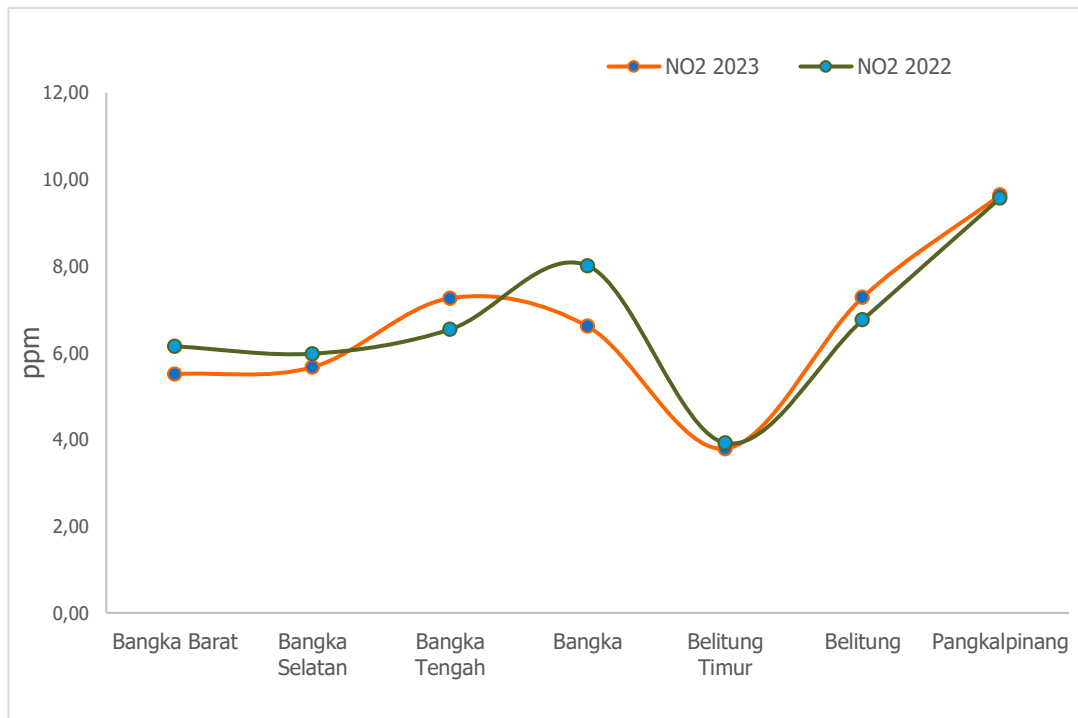


Gambar 2.3. 6 Sumber pencemar gas NO_2 dan SO_2 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

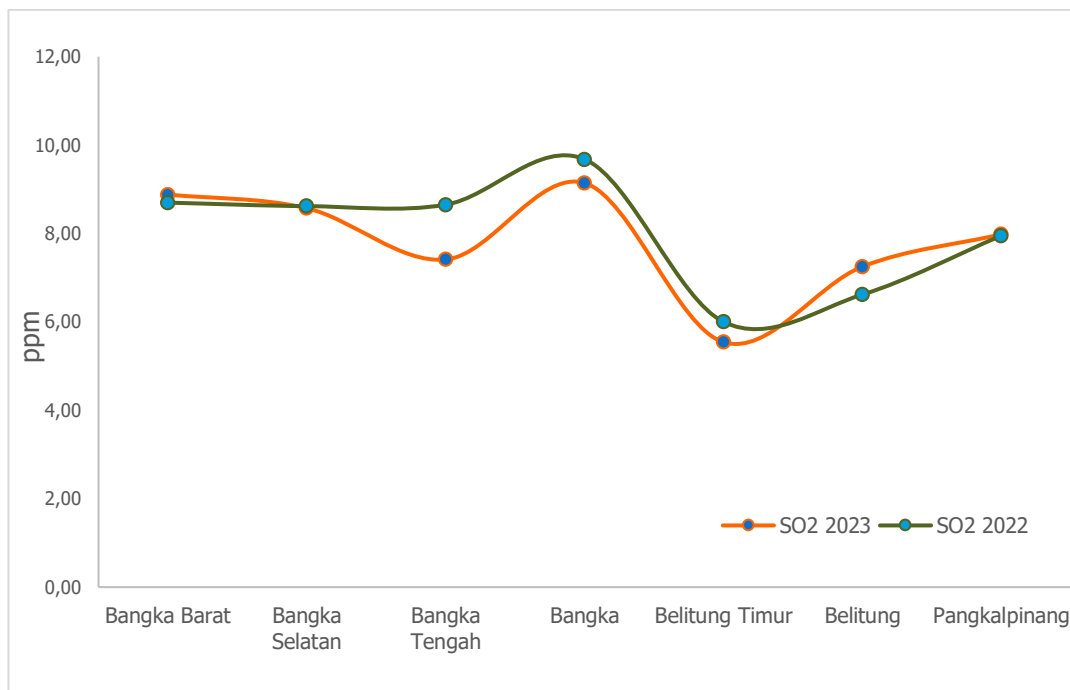
Gambar diatas menunjukkan bahwa gas penyumbang penurunan indeks kualitas udara ambien didominasi oleh sektor transportasi. Berdasarkan data pada tabel 2.3.3 menunjukkan peningkatan jumlah



kendaraan bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,8% dari tahun 2022. Jenis kendaraan ini meliputi kendaraan sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Jika di breakdown data gas pencemar yang dihasilkan pada masing masing kabupaten/kota untuk periode 2022 dan 2023 akan menunjukkan beberapa kenaikan maupun penurunan. Konsentrasi gas SO_2 dan NO_2 di udara ambien akan menentukan tinggi atau rendahnya indeks kualitas udara perkotaan. Semakin tinggi konsentrasi gas pencemar maka akan semakin rendah Indeks Kualitas Udara perkotaan dan sebaliknya semakin rendah konsentrasi gas pencemar yang berada di udara ambien maka semakin tinggi nilai Indeks Kualitas Udara suatu perkotaan.



Gambar 2.3. 7 Profil Gas Pencemar NO_2 per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023



Gambar 2.3. 8 Profil Gas Pencemar SO₂ per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

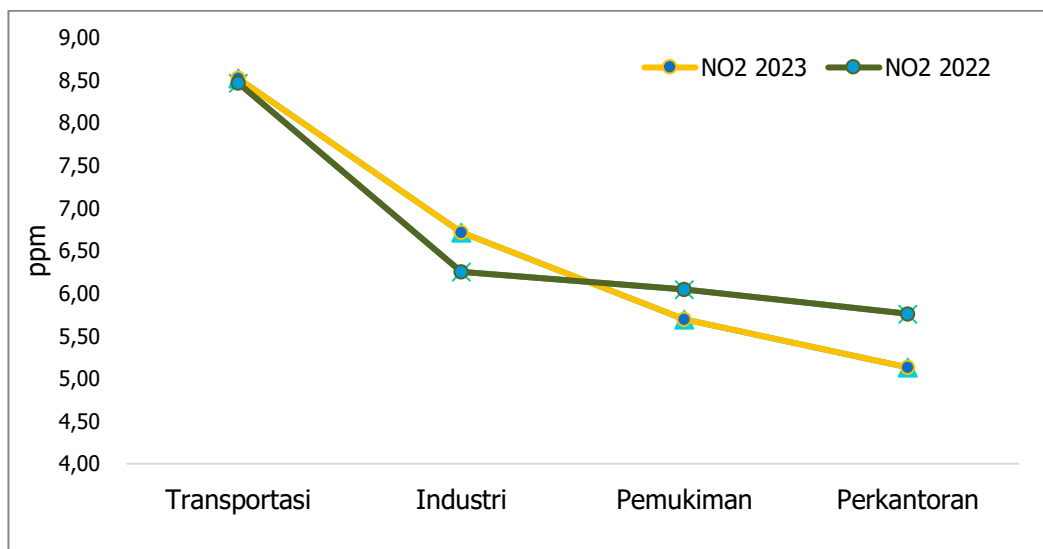
Tabel 2.3. 1 Konsentrasi Gas Pencemar NO₂ dan SO₂ di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2023

Kab/Kota	NO ₂ (ppm)		Selisih	SO ₂ (ppm)		Selisih	IKU	
	2022	2023		2022	2023		2022	2023
Bangka Barat	6.15	5.51	-0.64	8.70	8.88	0.18	89.20	89.40
Bangka Selatan	5.98	5.67	-0.31	8.62	8.57	-0.05	89.43	89.72
Bangka Tengah	6.54	7.26	0.72	8.65	7.41	-1.24	89.00	90.22
Bangka	8.01	6.61	-1.40	9.68	9.14	-0.54	86.55	88.27
Belitung Timur	3.92	3.79	-0.13	6.00	5.54	-0.46	94.50	95.23
Belitung	6.76	7.28	0.52	6.62	7.25	0.63	91.67	90.43
Pangkalpinang	9.57	9.64	0.07	7.95	7.98	0.03	87.87	87.78
Rerata Provinsi	6.70	6.54	-0.17	8.03	7.82	-0.21	89.75	90.15

Hasil analisis data konsentrasi gas pencemar SO₂ dan NO₂ di beberapa kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun



2023 sebagian besar mengalami penurunan. Konsentrasi rerata provinsi untuk gas NO_2 dan SO_2 pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 masing-masing turun sebesar 0,17 ppm dan 0,21 ppm. Terdapat empat kabupaten yang mengalami penurunan konsentrasi gas NO_2 yaitu Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur. Sedangkan kabupaten yang mengalami kenaikan konsentrasi gas pencemar NO_2 yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Belitung. Untuk gas pencemar SO_2 juga terjadi peningkatan konsentrasi yang paling tinggi di Kabupaten Belitung sebesar 0,63 ppm dan terendah terjadi pada Kota Pangkalpinang sebesar 0,03 ppm. Penurunan gas pencemar SO_2 terjadi di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 1,24 ppm, Kabupaten Bangka 0,54 ppm, dan Kabupaten Belitung Timur 0,46 ppm.

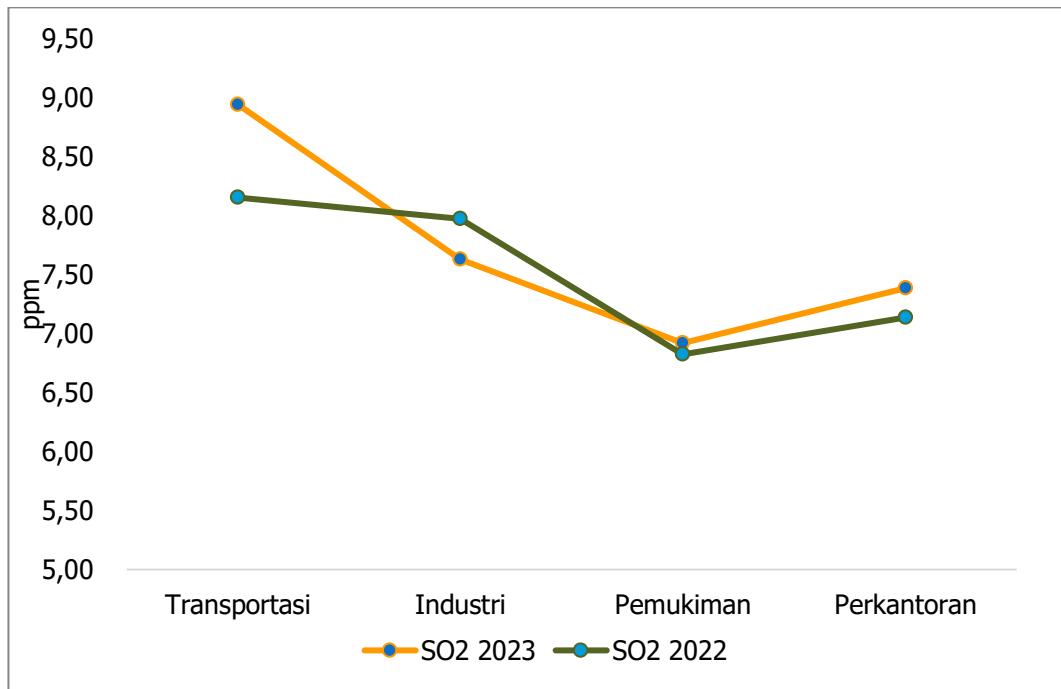


Gambar 2.3. 9 Profil Gas NO_2 berdasarkan Titik Pantau Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gambar di atas menunjukkan titik pantau konsentrasi gas pencemar NO_2 pada sektor transportasi cenderung konstan atau mengalami sedikit kenaikan sebesar 0.05 ppm. Jika dibandingkan dengan sektor industri konsentrasi gas NO_2 pada titik pantau sektor industri naik sebesar 0,46 ppm,



sedangkan untuk titik pantau pada sektor pemukiman dan perkantoran mengalami penurunan masing masing sebesar 0,35 ppm dan 0,63 ppm.



Gambar 2.3. 10 Profil Gas NO₂ berdasarkan Titik Pantau Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan titik pantau sumber konsentrasi gas pencemar SO₂ tahun 2023 pada hampir semua sektor titik pemantauan mengalami kenaikan nilai gas pencemar dibandingkan dengan tahun 2022. Kenaikan nilai gas pencemar mulai dari yang paling tinggi yaitu sektor transportasi sebesar 0,79 ppm, perkantoran 0,25 ppm, dan pemukiman sebesar 0,10 ppm. Titik pantau yang mengalami penurunan konsentrasi nilai gas pencemar adalah sektor industri dengan nilai penurunan konsentrasi sebesar 0,35 ppm. Kenaikan nilai konsentrasi gas pencemar ini merupakan indikasi terjadinya peningkatan konsumsi energi bahan bakar fosil yang masih digunakan pada terutama pada sektor transportasi. Sedangkan pada sektor perkantoran kenaikan nilai konsentrasi gas pencemar merupakan dampak peningkatan penggunaan kendaraan bermotor.



II.3.3.2 Indeks Kualitas Udara

Perubahan konsentrasi gas pencemar yang diakibatkan oleh pembakaran baik pada sektor transportasi maupun energi dapat menentukan Indeks Kualitas Udara (IKU) ambien di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perhitungan Indeks Kualitas Udara Ambien dihitung menggunakan parameter gas yang dominan yaitu SO_2 dan NO_2 . Standar perhitungan IKU mengacu pada kondisi rata rata konsentrasi NO_2 dan SO_2 sesuai dengan standar WHO yaitu $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ untuk NO_2 dan $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ untuk SO_2 . IKU dihitung berdasarkan dari pemantauan passive sampler yang dilakukan pada 4 jenis kegiatan yang mewakili aktivitas kota yaitu perumahan, perkantoran, industri dan jalan raya. Parameter yang dipantau adalah SO_2 dan NO_2 sebagai parameter penentu indeks kualitas udara.

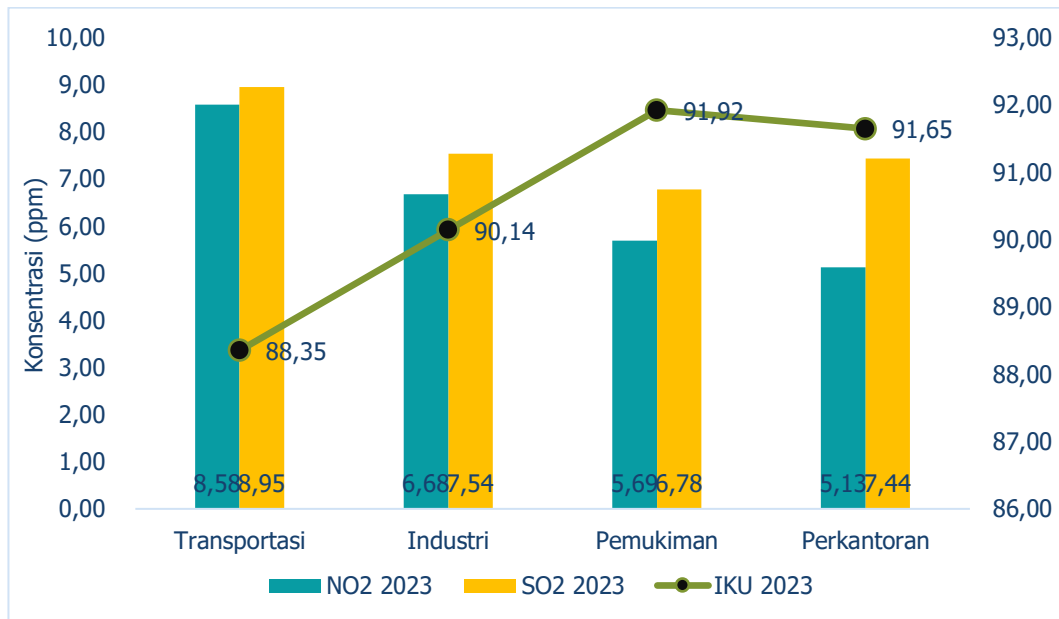
Tabel 2.3. 2 Perhitungan Indeks Kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Parameter	Rerata pemantauan	Baku mutu	Index
NO_2	6.54	40	0.163429
SO_2	7.82	20	0.391214
Tanpa PM 2.5			
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)			0.277321
Indeks Kualitas Udara			90.15

Indeks Kualitas Udara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan hasil pemantauan Passive Sampler yang dilakukan selama 28 hari dalam satu tahun dan dilakukan pada 4 kegiatan yang mewakili suatu perkotaan yaitu transportasi, industri, perumahan, dan perkantoran serta mewakili musim hujan dan musim kemarau didapatkan nilai pelaporan IKU untuk tahun 2023 sebesar 90,15. Nilai ini naik 0,40 poin dibandingkan nilai IKU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 yaitu 89,75. Peningkatan nilai IKU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat



disebabkan beberapa faktor diantaranya menurunnya konsentrasi gas pencemar pada beberapa kabupaten/kota.

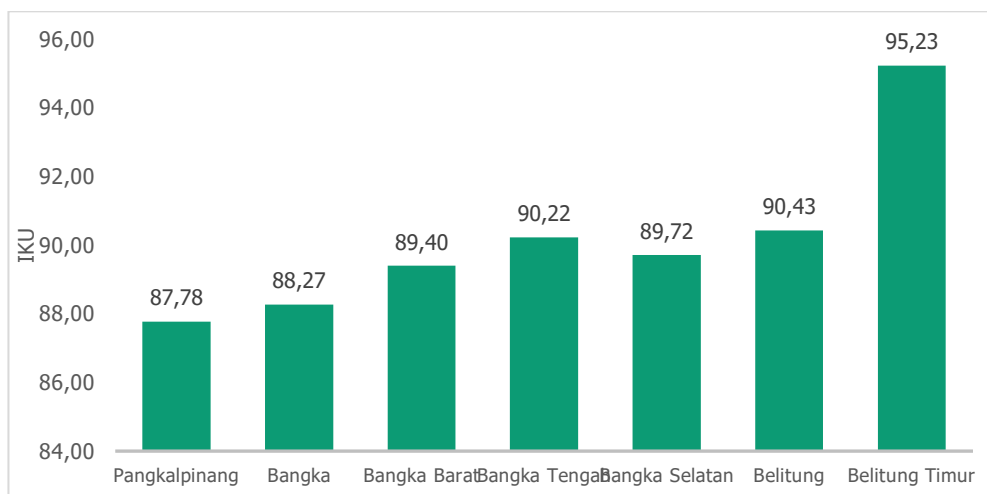


Gambar 2.3. 11 Hubungan Indeks Kualitas Udara dan Konsentrasi Pencemar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi gas pencemar pada udara ambien maka indeks kualitas udara akan semakin kecil. Untuk sektor transportasi gas pencemar dominan adalah gas NO_2 sedangkan untuk sektor lainnya gas pencemar dominan adalah SO_2 . Gas pencemar NO_2 memiliki bobot pencemar lebih tinggi daripada gas SO_2 sehingga jika gas pencemar NO_2 tinggi di udara ambien maka indeks kualitas udara suatu daerah akan signifikan turun dibandingkan jika suatu daerah memiliki gas pencemar SO_2 yang lebih tinggi. Berdasarkan nilai korelasi antara konsentrasi NO_2 dibandingkan dengan nilai Indeks Kualitas Udara didapatkan nilai $-0,97$. Ini artinya semakin besar nilai NO_2 maka semakin kecil nilai indeks kualitas udara. Untuk nilai determinasi hubungan antara gas NO_2 dengan indeks kualitas udara didapatkan nilai $94,5\%$, sehingga dapat diartikan bahwa konsentrasi NO_2 sangat mempengaruhi nilai IKU. Untuk gas pencemar SO_2 juga terdapat hubungan yang kuat antara konsentrasi gas pencemar dengan IKU sebesar



88,9%. Nilai korelasi negatif yang didapatkan dari masing masing zat pencemar menunjukkan bahwa semakin besar nilai gas pencemar maka akan menurunkan indeks kualitas udara suatu wilayah.



Gambar 2.3.11 Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

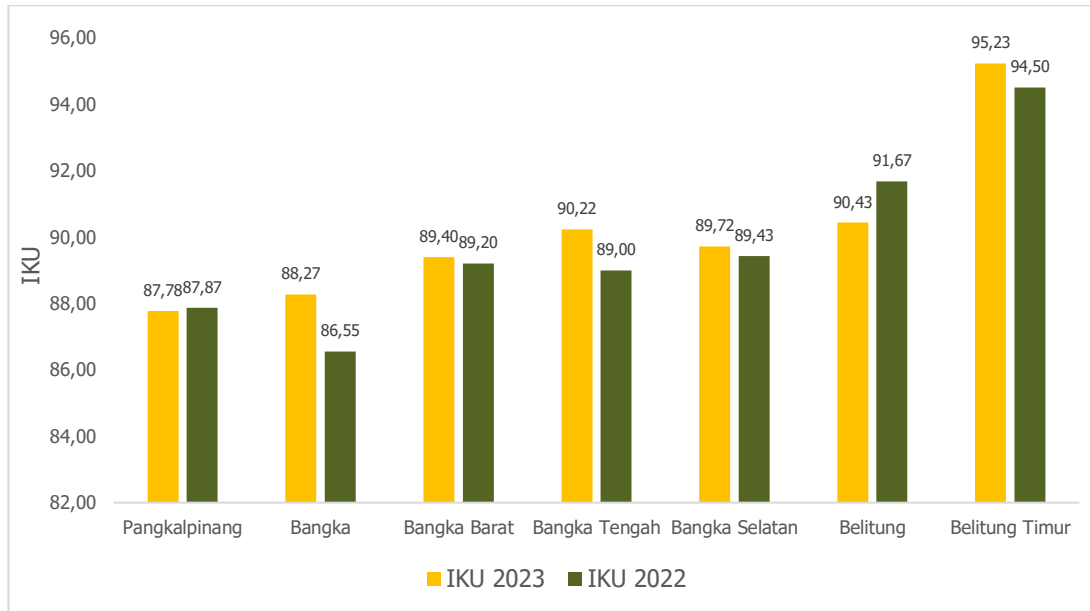
Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Kota Pangkalpinang memiliki indeks kualitas udara terendah yaitu 87,78 dibandingkan dengan kabupaten lainnya, sedangkan Kabupaten Belitung Timur merupakan kabupaten dengan indeks kualitas udara tertinggi yaitu sebesar 95,23.

Tabel 2.3. 3 Kategori Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

No.	Predikat	Nilai IKU	Jumlah Kabupaten	Kabupaten/Kota
1.	Sangat Baik	$IKU > 91$	1	Belitung Timur
2.	Baik	$81 \leq IKU \leq 91$	6	Bangka, Pangkalpinang, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung
3.	Cukup Baik	$71 \leq IKU \leq 81$	-	
4.	Kurang Baik	$61 \leq IKU \leq 71$	-	
5.	Sangat Kurang Baik	$51 < IKU \leq 61$	-	
6.	Waspada	$IKU \leq 51$	-	

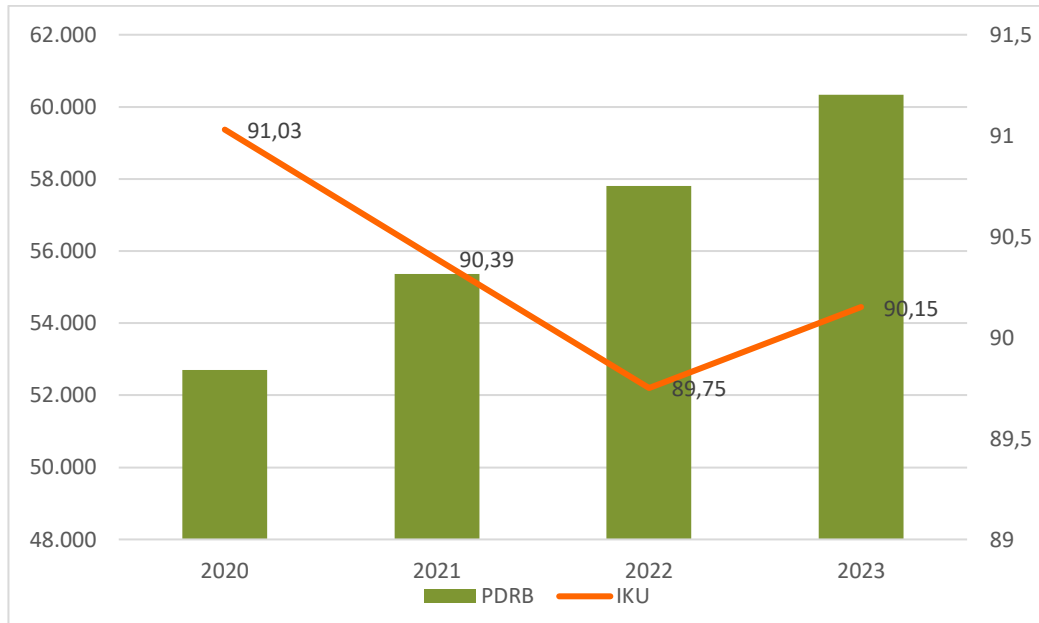


Berdasarkan tabel diatas dari 7 kabupaten/kota yang berada pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya terdapat 1 kabupaten yang berada pada predikat sangat baik pada indeks kualitas udara tahun 2024 dan 6 kabupaten lainnya berada pada peringkat baik.



Gambar 2.3. 12 Perubahan Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

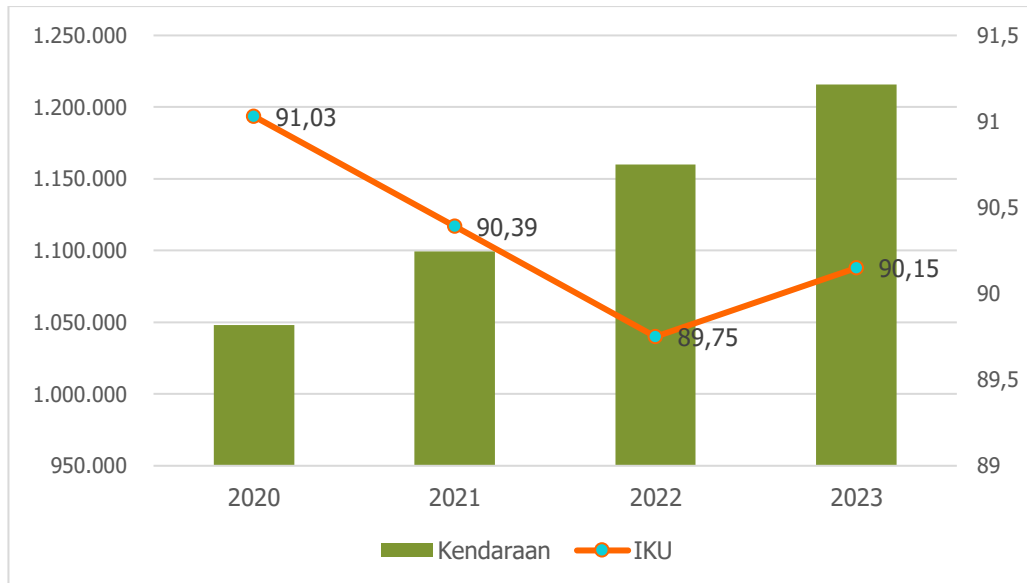
Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua kabupaten/kota yang mengalami penurunan nilai indeks kualitas udara dibanding tahun sebelumnya yaitu Kabupaten Belitung sebesar 1,24 poin dan Kota Pangkalpinang sebesar 0,09 poin. Sedangkan lima kabupaten lainnya mengalami kenaikan indeks kualitas udara masing-masing kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Bangka sebesar 1,72 poin, Kabupaten Bangka Tengah 1,22 poin, Kabupaten Belitung Timur 0,73 poin, Kabupaten Bangka Selatan 0,28 poin, dan Kabupaten Bangka Barat 0,19 poin. Kenaikan indeks kualitas udara pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat dipengaruhi oleh laju PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kenaikan jumlah kendaraan bermotor.



Gambar 2.3. 13 Hubungan Indeks Kualitas Udara dengan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan gambar diatas dapat dianalisis bahwa kenaikan PDRB akan menurunkan indeks kualitas udara pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Analisis berdasarkan nilai korelasi didapatkan sebesar $-0,913$, nilai minus menunjukkan arah korelasi negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PDRB maka indeks kualitas udara akan semakin kecil. Untuk nilai determinasinya didapatkan sebesar $83,4\%$. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh PDRB terhadap indeks kualitas udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat tinggi. Penurunan laju PDRB pada Tahun 2023 sebesar $3,16\%$ mampu meningkatkan indeks kualitas udara sebesar $0,4$ poin.

Perhitungan analisis korelasi antara jumlah kendaraan bermotor dengan IKU sebesar $-0,786$. Artinya adanya korelasi yang cukup kuat antara jumlah kendaraan bermotor dengan indeks kualitas udara pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Korelasi ini berbanding terbalik artinya semakin tinggi jumlah kendaraan bermotor maka semakin kecil indeks kualitas udara. Untuk nilai determinasi antara indeks kualitas udara dengan jumlah kendaraan bermotor sebesar $61,7\%$ artinya jumlah kendaraan bermotor masih berpengaruh kuat untuk menentukan indeks kualitas udara.



Gambar 2.3. 14 Hubungan Indeks Kualitas Udara dengan Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan data diatas, hasil analisis data pada tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh negatif terhadap indeks kualitas udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun pada tahun 2023, peningkatan jumlah kendaraan justru berpengaruh positif terhadap indeks kualitas udara. Nilai IKU tahun 2023 menunjukkan walaupun terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor, terjadi perbaikan kualitas udara karena adanya penurunan konsentrasi gas pencemar di udara. Hal ini merupakan dampak peningkatan preferensi masyarakat dalam penggunaan BBM beroktan tinggi sehingga dapat mengurangi konsentrasi gas pencemar udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II.3.4 Dampak (Impact)

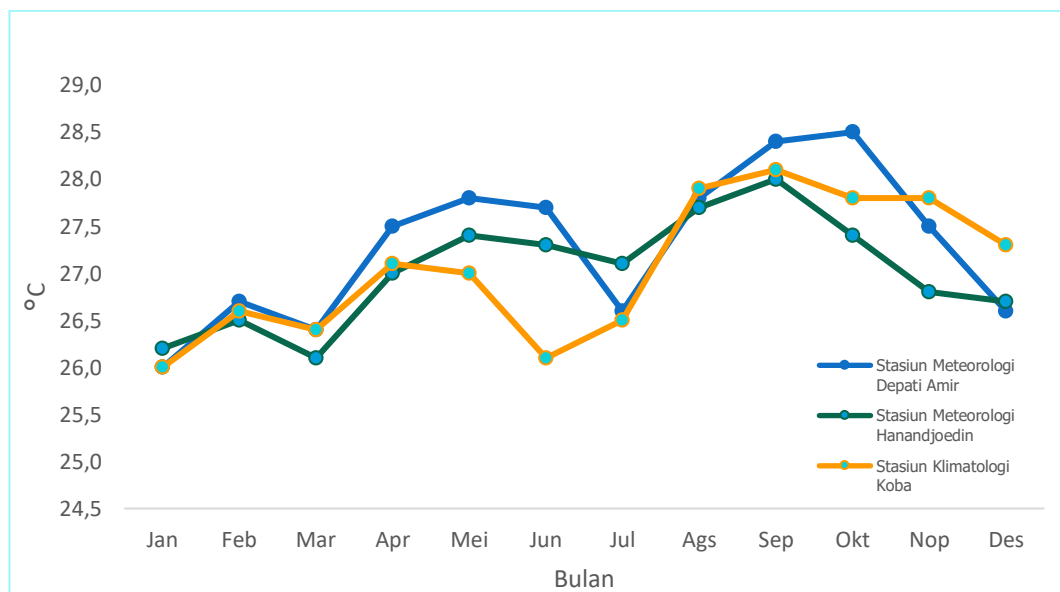
Peningkatan konsentrasi zat pencemar pada udara ambien dapat meningkatkan potensi peningkatan gas rumah kaca (GRK) yang ditandai dengan perubahan/pergeseran musim dan meningkatnya suhu. Sebaran gas SO_2 dan NO_2 yang dihasilkan dari proses pembakaran mesin industri,



pembangkit listrik dan kendaraan bermotor merupakan sumber polutan utama yang menjadi zat pencemar pada udara ambien perkotaan. Tekanan penambahan beban pencemaran akan menurunkan kualitas udara perkotaan, sehingga akan menyebabkan penurunan kesehatan masyarakat.

II.3.4.1 Perubahan Suhu Udara

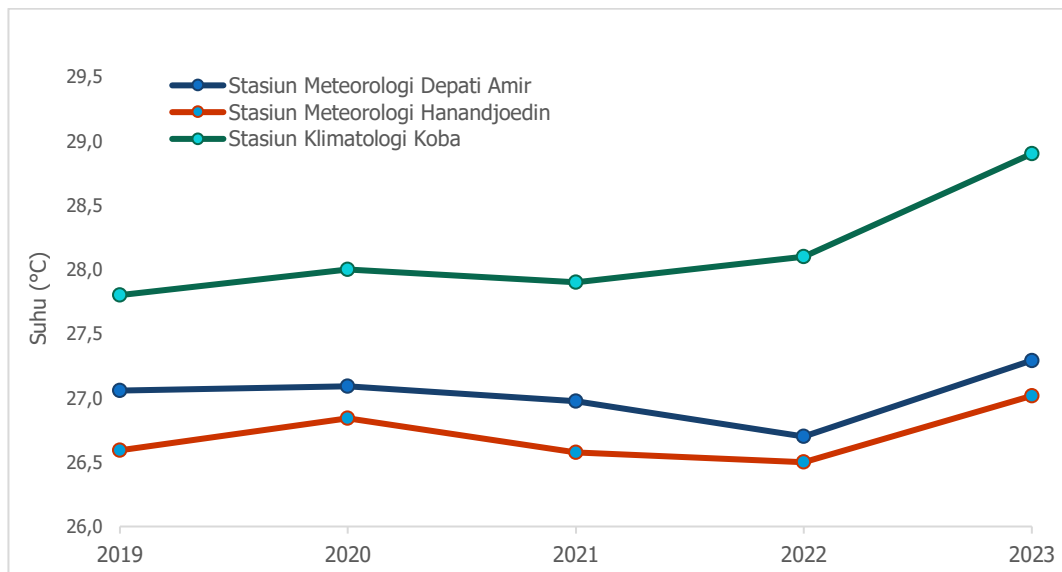
Pergeseran musim hujan dan musim kemarau menjadi faktor penentu dalam keterwakilan data pemantauan udara. Hal ini disebabkan pada fase angin barat (musim hujan) angin akan mengandung banyak uap air dan lebih bersih sehingga hasil pemantauan udara ambien yang berupa gas NO_2 dan SO_2 akan cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan angin timur (musim kemarau). Pada musim kemarau udara akan bersifat kering dan cenderung akan berisi partikel debu, sehingga menyebabkan kualitas udara ambien cenderung akan lebih buruk. Tidak beraturannya musim hujan dan musim kemarau akan sangat mempengaruhi hasil pemantauan yang dilakukan dengan passive sampler dengan jumlah hari pemantauan yang minimal (28 data). Pada tahun 2023 DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak melakukan pemantauan secara manual aktif.



Gambar 2.3. 15 Profil Suhu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023



Gambar di atas menunjukkan hasil pemantauan suhu udara rata-rata bulanan selama tahun 2023 yang dilakukan oleh tiga stasiun pemantauan meteorologi yaitu Stasiun Meteorologi Depati Amir Kota Pangkalpinang, Stasiun Meteorologi HAS Hanandjoeddin Tanjungpandan Kabupaten Belitung, dan Stasiun Meteorologi Koba Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan Tabel 37 data alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 didapatkan bahwa suhu rata-rata pada Kota Pangkalpinang sebesar $27,3^{\circ}\text{C}$, Kabupaten Belitung sebesar $27,0^{\circ}\text{C}$, dan Kabupaten Bangka Tengah sebesar 27°C . Suhu rata-rata tertinggi dicapai pada September, sedangkan suhu rata-rata terendah pada bulan Januari.



Gambar 2.3. 16 Profil Suhu Rata Rata 5 Tahunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Data pada gambar di atas menunjukkan suhu rata-rata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertinggi berada di Kota Pangkalpinang dan yang terendah di Kabupaten Belitung. Jika dihubungkan dengan nilai indeks kualitas udara, maka indeks kualitas udara pada Kota Pangkalpinang selalu lebih kecil daripada indeks kualitas udara di Kabupaten Belitung. Sehingga dapat disimpulkan hubungan indeks kualitas udara di suatu wilayah akan berbanding terbalik dengan suhu udaranya. Semakin tinggi



nilai indeks kualitas udara maka akan semakin rendah suhu udara di wilayah tersebut.

II.3.4.2 Perubahan Iklim

Perubahan iklim sering disebut sebagai peralihan cuaca. Ciri -ciri perubahan iklim diantaranya terjadi kekeringan menjadi lebih lama dan lebih ekstrem di seluruh dunia dan permukaan laut naik, mengancam masyarakat pesisir dan ekosistem muara. Mengacu pengumuman BMKG bahwa musim kemarau pada tahun 2023 akan lebih kering dari tiga tahun sebelumnya, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2023 mengalami peningkatan, begitu juga kejadian banjir ROB dimana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan wilayah kepulauan berpotensi terhadap banjir ROB di beberapa titik lokasi saat bulan November hingga Desember permukaan air laut tampak meningkat dan gelombang laut cukup tinggi.

II.3.5 Respon (Response)

Berdasarkan *driving force, pressure, state dan impact* yang terjadi maka pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama perangkat daerah terkait melakukan langkah-langkah untuk mencegah penurunan kualitas udara perkotaan. Laju penambahan emisi yang menjadi sumber polutan utama dalam menentukan kualitas udara ambien merupakan tantangan dalam meningkatkan kualitas udara. Untuk menambah kualitas data yang akan digunakan dalam perhitungan IKU maka dilakukan beberapa kegiatan/program yang mendukung dalam pemuktahiran data pemantauan.

II.3.5.1 Program Penghijauan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menerus berupaya melakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui berbagai



program penghijauan. Program penghijauan dilakukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan khususnya kualitas tutupan lahan akibat aktivitas pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada periode kepemimpinan PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bapak Suganda Pandapotan Pasaribu mencanangkan program bertemakan 'Gule Kabung (Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung)' yang merupakan salah satu bentuk program penghijauan melanjutkan program 'Hijau Biru Babelku' yang diinisiasi PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode sebelumnya yaitu Bapak Ridwan Djamaluddin.

Program 'Gule Kabung' mendapat apresiasi melalui penghargaan Indonesia Award 2023 kategori *Excellent Award for Initiative Strategic* yaitu inisiatif yang luar biasa oleh kepala daerah dalam menjalankan strategi untuk mendorong kemajuan daerah. Program ini melibatkan seluruh lembaga pemerintah baik pusat ataupun daerah, lembaga non pemerintah, serta seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat pelaksanaan program, Gubernur berpartisipasi langsung melakukan aksi penanaman tanaman buah di pekarangan rumah guna meningkatkan ketahanan pangan dan mencegah stunting di Desa sekaligus meningkatkan area hijau di pemukiman, aksi penanaman 10.000 bibit pohon yang ditanam secara serentak diseluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bentuk program penghijauan lain yang dicanangkan pemerintah daerah berupa dukungan dan himbauan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menanam sayur mayur dan buah-buahan di perkarangan kantor guna mendukung program Budidaya Lahan Upaya Ekonomis, Gerakan Reflikasi Ekosistem Elok Natural "BLUE GREEN". Selain pemerintah daerah, program penghijauan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga diinisiasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui kegiatan Penanaman Pohon "Polri Lestarikan Negeri, dan Penghijauan Sejak dini" yang dilakukan di lahan bekas pertambangan timah.



Gambar 2.3. 17 Aksi – Aksi Program Penghijauan di Bangka Belitung

Berbagai bentuk program penghijauan yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan perbaikan terhadap kualitas lingkungan terutama tutupan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui peningkatan tutupan lahan, diharapkan mampu meminimalisir emisi pencemar udara terutama gas rumah kaca pada lahan-lahan terbuka. Untuk jangka panjangnya melalui program penghijauan perbaikan tutupan lahan dapat berkontribusi terhadap perbaikan kualitas lingkungan yang menyebabkan perubahan iklim dunia.



II.3.5.2 Pengembangan Aksi Pogram Kampung Iklim (ProKlim)

Upaya bersama dalam rangka meningkatkan kualitas udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menggerakkan masyarakat di tingkat tapak baik ditingkat Desa/Kelurahan atau minimal setingkat Dusun/Rukun Warga dengan memberikan pemahaman, sosialisasi serta membentuk kampung iklim yang masyarakat Desa/Kelurahan atau setingkat Dusun/Rukun Warga telah melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan, diantaranya aksi mitigasi berupa penghijauan ataupun perlindungan area hijau di Desa ProKlim (Program Kampung Iklim – KLHK). Pada tahun 2023 yang lalu terbentuk 34 lokasi ProKlim dan 2 lokasi ProKlim masuk kategori Utama. Dari 2 lokasi Kategori Utama tersebut berdasarkan hasil perhitungan penurunan emisi gas rumah kaca dari ProKlim ini yang aplikasi Sistem Perhitungan Reduksi Emisi secara Cepat, Tepat dan Responsibel untuk Masyarakat (SPECTRUM) Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim KLHK diperoleh penurunan emisi GRK sebesar 96,6 Ton CO₂e.



Gambar 2.3. 18 Perhitungan Penurunan Emisi GRK melalui SPECTRUM

Pada tahun 2024 ini, sudah terbentuk 37 Lokasi ProKlim dengan rincian 17 lokasi yang didaftarkan melalui SRN-PPI secara reguler dan 20 lokasi yang didaftarkan melalui SRN-PPI dengan bantuan anggaran REDD+ GCF Indonesia Tahap 2.



Tabel 2.3. 4 Lokasi Proklam yang terdaftar secara reguler

No.	LOKASI PROKLIM	NILAI	KATEGORI
1	Proklam Desa Pemali, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _ PT. Timah Tbk (Reguler)	67,75 %	Madya
2	Proklam Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	61,29 %	Madya
3	Proklam Desa Paku, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _ PT. Timah Tbk Wilayah Bangka Selatan (Reguler)	59,88 %	Madya
4	Proklam Dusun 02, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - PT. Timah, Tbk (Reguler)	65,40 %	Madya
5	Proklam Desa Mempaya, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	65,57 %	Madya
6	Proklam Lingkungan Sidodadi Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	60,65 %	Madya
7	Proklam Dusun Sadap, Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	73, 31 %	Madya
8	Proklam Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	60,72 %	Madya
9	Proklam Dusun 4 Pasir Putih, Desa Batu Betumpang, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	60,49 %	Madya
10	Proklam Desa Suak Gual, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	51,93 %	Madya
11	Proklam Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	60,10 %	Madya
12	Proklam RW 03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	53,67 %	Madya
13	Proklam Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	55,06 %	Madya
14	Proklam Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - PT. Timah, Tbk - TB. Batu Besi (Reguler)	79,31 %	Utama
15	Proklam RW.002 Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung - Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Pangkal Balam (Reguler)	82,18 %	Utama
16	Proklam Desa Lintang, Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	76,10 %	Utama



17	ProKlim Dusun Namang Barat Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	77,60 %	Utama
----	--	---------	-------

Tabel 2.3. 5 Lokasi ProKlim yang Terdaftar melalui bantuan Dana REDD+ GCF Output 2

No.	LOKASI PROKLIM	NILAI	KATEGORI
1	ProKlim Lingkungan Nelayan II, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _GCF 02	62,24 %	Madya
2	Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _GCF 02	63,22 %	Madya
3	Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _GCF 02	58,42 %	Madya
4	Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _GCF 02	63,19 %	Madya
5	Dusun 07, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _GCF 02	42,83 %	Pratama
6	RW 001, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _GCF 02	57,19 %	Madya
7	RW 02, Kelurahan Menjelang, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _GCF 02	30,95 %	Pratama
8	RW 003, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _GCF 02	48,13 %	Pratama
9	Dusun 02, Kelurahan Air Belo, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _GCF 02	37,30 %	Pratama
10	Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _GCF 02	67,19 %	Madya
11	Desa Keposang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _GCF 02	60,65 %	Madya
12	Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _GCF 02	60,34 %	Madya
13	Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _GCF 02	62,48 %	Madya
14	Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _GCF 02	54,64 %	Madya
15	Desa Simpang Rusa, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _GCF 02 Rev	68,36 %	Madya
16	Desa Perpat, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _GCF 02	52,80 %	Madya



17	Desa Simpang Tiga, Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _GCF 02	76,50 %	Madya (Potensi Utama)
18	Desa Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _GCF 02	76,40 %	Madya (Potensi Utama)
19	Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Grimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _GCF 02	66,44 %	Madya
20	Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _GCF 02	51,90 %	Madya

Dari 2 tabel Lokasi ProKlim yang telah teregistri dalam SRN-PPI KLHK ada 6 lokasi ProKlim yang berpotensi masuk kategori ProKlim Utama, meskipun data SPECTRUM dari 6 lokasi ProKlim tersebut telah diambil saat pengumpulan data lapangan namun total penurunan emisi GRK nya baru dapat diketahui setelah validasi data oleh Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim - KLHK dan data tersebut baru dapat diperoleh akhir tahun 2024. Dengan demikian upaya pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pembinaan dan menggerakkan potensi masyarakat tingkat tapak untuk terus-menerus melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim mengalami peningkatan sehingga potensi penurunan emisi GRK melalui Program Kampung Iklim KLHK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II.3.5.2 Peningkatan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum

Sebagai upaya pemerintah untuk menjamin terjaganya kualitas udara ambien pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara aktif memberikan pembinaan kepada *stakeholder* untuk mentaati aturan yang berlaku dibidang lingkungan hidup. Pembinaan yang dilakukan bagi pelaku usaha berupa kewajiban melengkapi seluruh perizinan usahanya. Bentuk perizinan diantaranya persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi yang sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan dan Persetujuan



Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Persyaratan ini berlaku untuk usaha yang melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi mengeluarkan emisi baik aktivitas pembakaran dari proses utama produksi maupun dari aktivitas pendukung kegiatan produksi. Persyaratan ini sebagai salah upaya pengelolaan dan perhitungan beban emisi yang akan dilepaskan ke udara oleh kegiatan industri yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan pengawasan dan pemantauan terhadap industri ini dilakukan khusus terhadap emisi cerobong yang ditekankan pada kesesuaian metode teknis pengukuran emisi secara manual dan fasilitas sampling yang ada di cerobong. Kesesuaian metode dan cara sampling yang baik akan memberikan gambaran data beban pencemaran yang dihasilkan semakin sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data beban pencemaran yang didapatkan dari laporan setiap industri dapat dijadikan tolak ukur beban pencemaran gas di udara ambien perkotaan.

Perlindungan kawasan hutan yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti mangrove yang menjadi sumber cadangan karbon yang mampu mengikat emisi terbuang ke alam dari aktivitas industri, transportasi guna meningkatkan kualitas udara terus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama-sama dengan aparat penegakan hukum. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa patroli oleh satgas Gakkum pada daerah-daerah yang berpotensi terjadinya kegiatan kerusakan akibat kegiatan tambang ilegal maupun pembalakan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu.



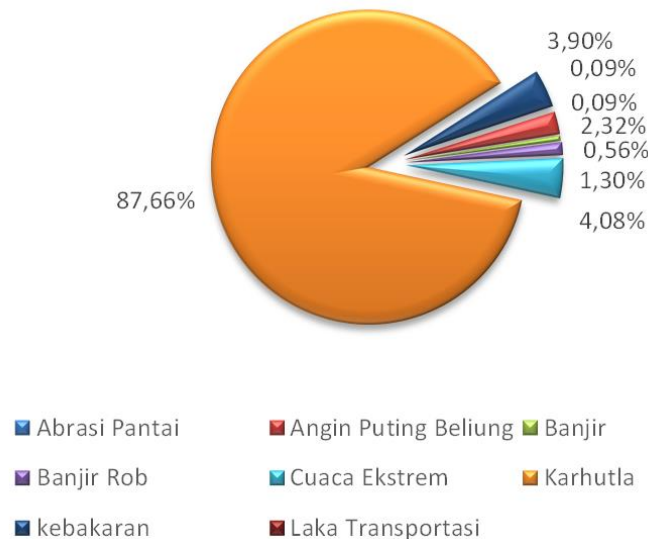
II.4 Risiko Bencana

Risiko bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, didefinisikan sebagai potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Babel) telah menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2026 yang merupakan pemutakhiran dari Kajian Risiko Bencana sebelumnya yang disusun pada periode tahun 2015-2020. Dokumen yang menginformasikan tingkat risiko bencana dengan komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana ini dapat dimonitoring dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu jika terjadi kondisi ekstrem yang menyebabkan perubahan signifikan terhadap parameter-parameter risiko bencana tersebut. Selain memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, hadirnya dokumen ini juga merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup yang menjadi salah satu misi dalam mewujudkan visi **Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi**. Dalam misi ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana, dengan kata lain tujuannya adalah untuk menurunkan risiko bencana (Perubahan RPJMD Babel, 2019).

Sementara itu meskipun upaya meningkatkan kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana merupakan salah satu sasaran



pembangunan, namun berdasarkan penilaian kapasitas pada Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2026 menyatakan bahwa secara keseluruhan ketahanan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi potensi bencana masih memiliki indeks kapasitas daerah sebesar 0,31 yang menunjukkan tingkat kapasitas daerah masih rendah. Sejalan dengan hal tersebut, hasil perhitungan indeks risiko bencana dalam Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023 oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga masih menempatkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung peringkat ke tiga provinsi berisiko paling tinggi dengan skor 155,61 setelah Provinsi Sulawesi Barat dan Maluku, meskipun hal ini cukup menggembirakan setelah sebelumnya pada tahun 2022 juga menempati peringkat ke tiga namun dengan skor 158,52, yang artinya Indeks Risiko Bencana berhasil turun sebesar 2,91 poin.



Gambar 2.4. 1 Jenis bencana yang terjadi sepanjang tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: BPBD Babel, 2024, diolah

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir terhitung mulai tahun 2021 kejadian bencana dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang didokumentasikan oleh BPBD Babel terus meningkat, tahun 2021 tercatat sebanyak 144 kejadian bencana, meningkat di tahun 2022 terjadi 263



kejadian, serta tahun 2023 naik signifikan sebanyak 1.077 kejadian bencana. Kejadian bencana tahun 2023 mencakup 8 (delapan) jenis bencana yaitu abrasi pantai, angin puting beliung, banjir, banjir rob, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebakaran, serta kecelakaan transportasi (gambar 2.4.1). Dari banyaknya jenis bencana yang terjadi, kebakaran hutan dan lahan yang selanjutnya disingkat karhutla menempati urutan pertama bencana dengan frekuensi tertinggi hingga 87,66 persen yaitu sebanyak 942 kali kejadian, diikuti oleh bencana cuaca ekstrem 4,08 persen (44 kejadian) dan kejadian kebakaran 3,90 persen (42 kejadian) di tempat kedua dan ketiga.



Gambar 2.4. 2 Kerangka DPSIR Risiko Bencana Tahun 2023

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Didasarkan dari data dan informasi kebencanaan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, pembahasan risiko bencana akan didominasi pada jenis bencana dengan frekuensi kejadian tertinggi yang dilihat dari sisi lingkungan hidup serta faktor lain yang menjadi permasalahan dan penyebab baik faktor pendorong, penekan, kondisi



terkini, dampak-dampak yang terjadi, serta hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi atau meminimalkan permasalahan lingkungan hidup oleh *stakeholders* yaitu pemerintah, swasta, serta masyarakat melalui kerangka kerja model *driving force-pressure-state-impact-respon* yang dibangun pada gambar 2.4.2.

Model *driving force-pressure-state-impact-respon* yang sering disebut dengan DPSIR *framework* ini mengadopsi *United Nations Environment Program* (UNEP) yang merupakan pengembangan dari model *pressure-state-respon* (PSR). Metode ini juga telah digunakan secara luas dan dikembangkan lebih lanjut oleh *European Environment Agency* (EEA). Menurut *United State Environment Protection Agency* (USEPA), 2015, kerangka DPSIR mampu menggambarkan dan mengkomunikasikan secara komprehensif berbagai permasalahan yang sangat kompleks. Bahkan seorang peneliti di Taiwan, Hsiang-Chieh Lee, pada 2013 mengembangkan dan membangun kerangka kerja DPSIR sebagai model untuk menganalisis risiko bencana di daerah Lusan Hot Spring, Taiwan, meskipun pada umumnya DPSIR dimanfaatkan dalam menganalisis permasalahan lingkungan dengan komponennya yang mendeskripsikan bagaimana manusia mempengaruhi lingkungannya. Lee berkesimpulan bahwa model DPSIR ini dapat membantu peneliti mengeksplorasi penyebab bencana dan memeriksa manajemen risiko bencana dari sudut pandang berbeda.

Di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memanfaatkan model DPSIR secara luas untuk menggambarkan hubungan sebab akibat antara berbagai komponen dalam pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, lingkungan, serta sosial dan dinilai sangat relevan dalam pembahasan hubungan sebab akibat permasalahan lingkungan hidup, mempermudah para pengambil kebijakan untuk mengikuti informasi yang kompleks, dan selanjutnya dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup secara sistematis (KLHK, 2021).



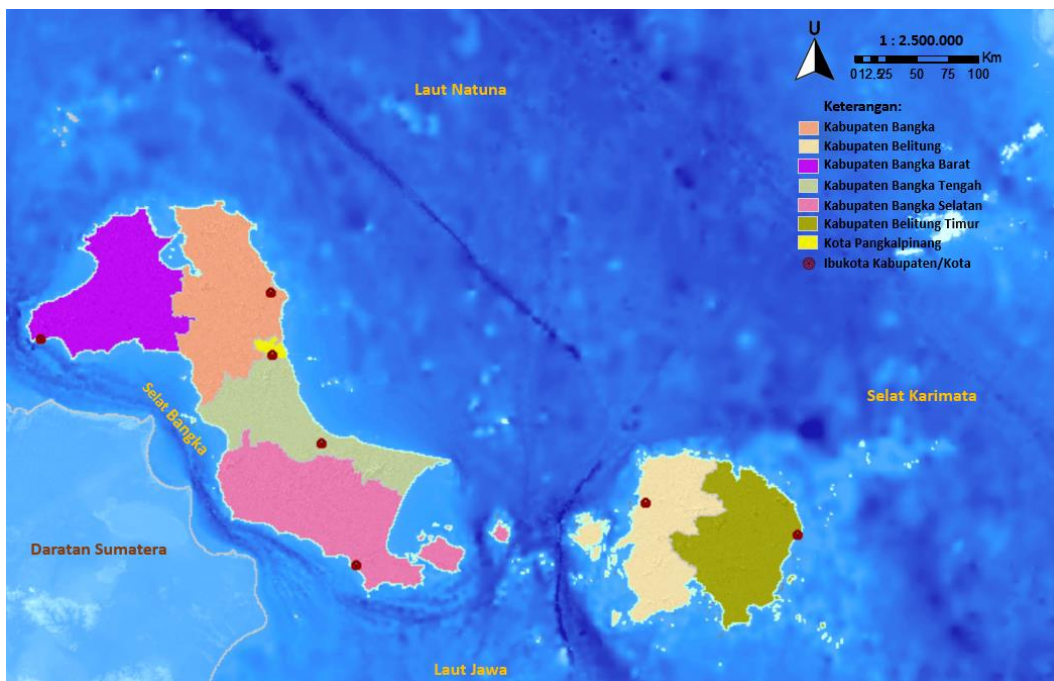
II.4.1 Driving force

Driving force atau faktor pendorong merupakan penyebab potensial terjadinya permasalahan lingkungan yang kompleks dan sebagai pemicu tekanan (*pressure*). Pada analisis risiko bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, sebagai *driving force* adalah letak geografis, kondisi geologi, peningkatan jumlah penduduk, serta perubahan iklim.

II.4.1.1 Letak Geografis

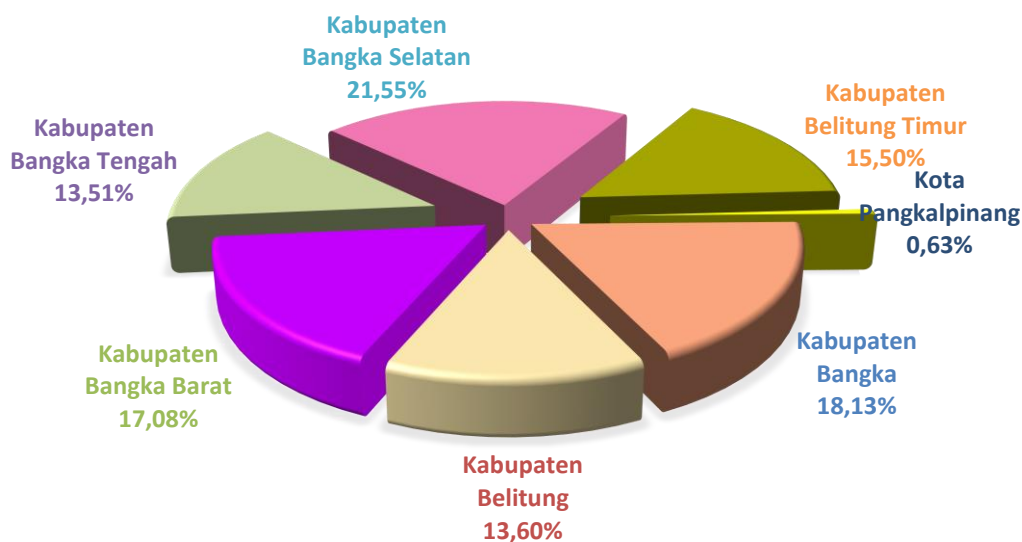
Menempati posisi astronomis 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas total mencapai 5.924.202,6 Ha. Meskipun demikian, provinsi ini didominasi oleh wilayah perairan laut dengan luas daratan kurang lebih 1.669.255,8 Ha, hanya seluas 28,2 persen dan selebihnya yang 79,90 persen atau kurang lebih 4.254.946,8 Ha merupakan wilayah lautan (KLHS RPJD Babel, 2023). Terangkum dalam dokumen perencanaan terbaru Tahun 2023 bahwa wilayah daratan selain terdiri dari 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, provinsi kepulauan ini juga memiliki 575 (lima ratus tujuh puluh lima) pulau kecil yang tersebar disekitar dua pulau utama tersebut dengan penduduk mayoritas menempati dua pulau besar yang terbagi dalam wilayah administrasi berupa 6 kabupaten dan 1 kota dengan luas wilayah terbesar yaitu Kabupaten Bangka Selatan, 359.727,7 Ha dan luas wilayah terkecil adalah Kota Pangkalpinang, 10.449,4 Ha.

Berdasarkan posisi geografis, berdekatan dengan Pulau Sumatera, batas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka, sebelah Timur dengan Selat Karimata, sebelah Utara dengan Laut Natuna, serta sebelah Selatan dengan Laut Jawa. Kondisi geografis dan wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diamati pada gambar 2.4.3 sedangkan perbandingan luasan masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada *pie chart* gambar 2.4.4.



Gambar 2.4. 3 Letak Geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: DPUPRPRKP Babel, 2023, diolah. Disclaimer: Peta pada kertas A4



Gambar 2.4. 4 Perbandingan Luas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam satuan persen

Sumber: DPUPRPRKP Babel, 2023, diolah

Namun letak geografis dengan daratan yang dikelilingi lautan ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal pengelolaan sampah. Hasil studi Manajemen Persampahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2018 menyatakan faktor pengangkutan yang harus melewati



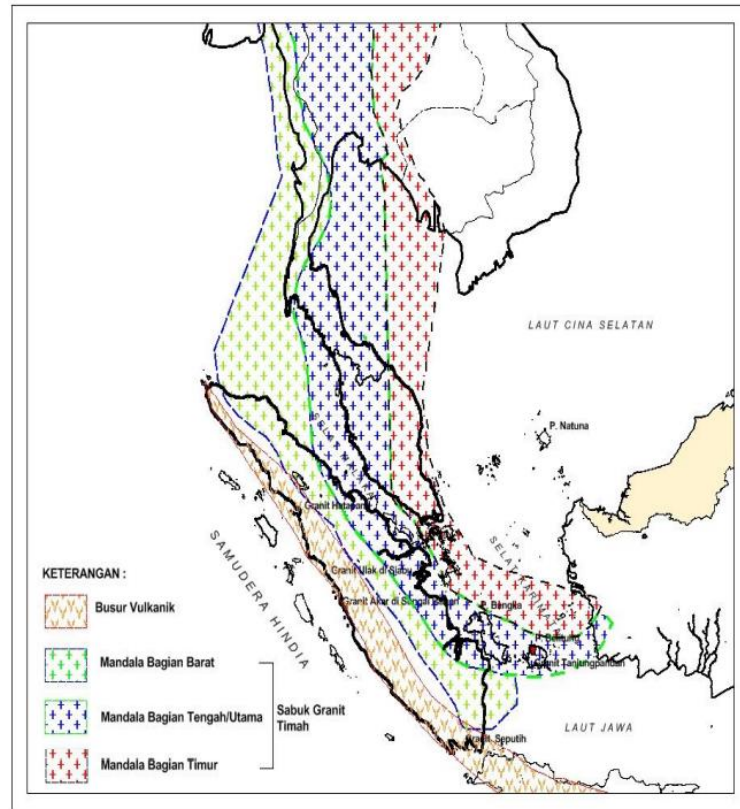
lautan menjadi kendala dalam pola bisnis persampahan, tidak semudah seperti wilayah yang mayoritas merupakan daratan. Persoalan biaya menjadi salah satu kendala yang dipandang tidak sepadan dengan nilai jual sampah. Masalah lain yang disebabkan adanya perairan yang luas membuat masyarakat lebih permisif untuk membuang sampah ke laut.

Hasil pengamatan terhadap penyebab karhutla di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 sebanyak 4 persen karena efek samping pembakaran sampah oleh warga. Menurut penelitian oleh Institut Teknologi Surabaya (ITS) pada tahun 2015 kebiasaan masyarakat membakar sampah terjadi karena masih bingung dan belum mengetahui tempat membuang sampah dan hanya ingin agar sampah keluar dari rumah mereka, padahal mengelola sampah dengan cara dibakar sangat berisiko karena dapat mengenai objek lainnya selain mencemari udara dan gangguan kesehatan.

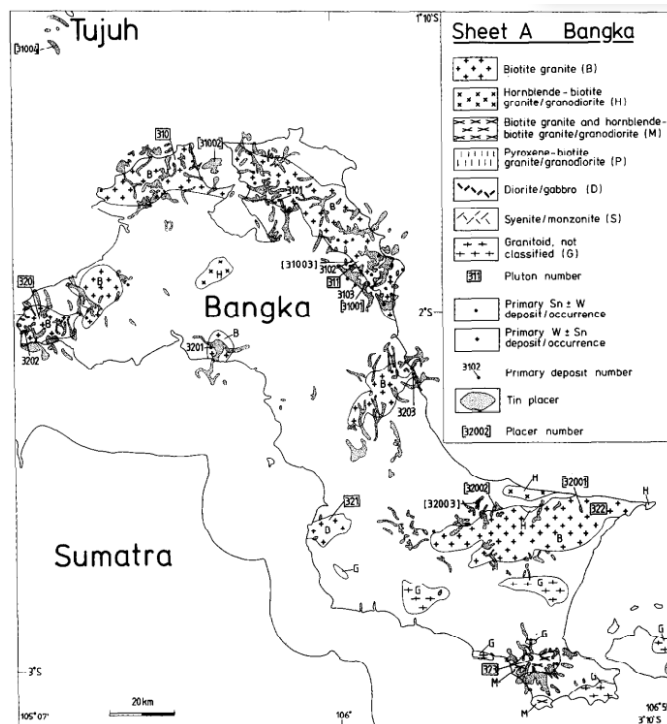
II.4.1.2 Kondisi Geologi

Indonesia bersama Malaysia, Thailand, serta Myanmar menjadi salah satu dari *The Southeast Asian Tin Belt* yaitu daerah penting penghasil timah (Gambar 2.4.5). Daerah-daerah ini menurut Schwartz, dkk, 1995 dalam tulisannya bahwa secara keseluruhan memproduksi setara dengan 54% timah dunia sejak tahun 1800 an. Lebih lanjut dalam penelitiannya Schwartz, dkk juga telah memetakan sebaran potensi timah yang berasosiasi dengan batuan granit di Pulau Bangka dan Pulau Belitung (Gambar 2.4.6 dan 2.4.7).

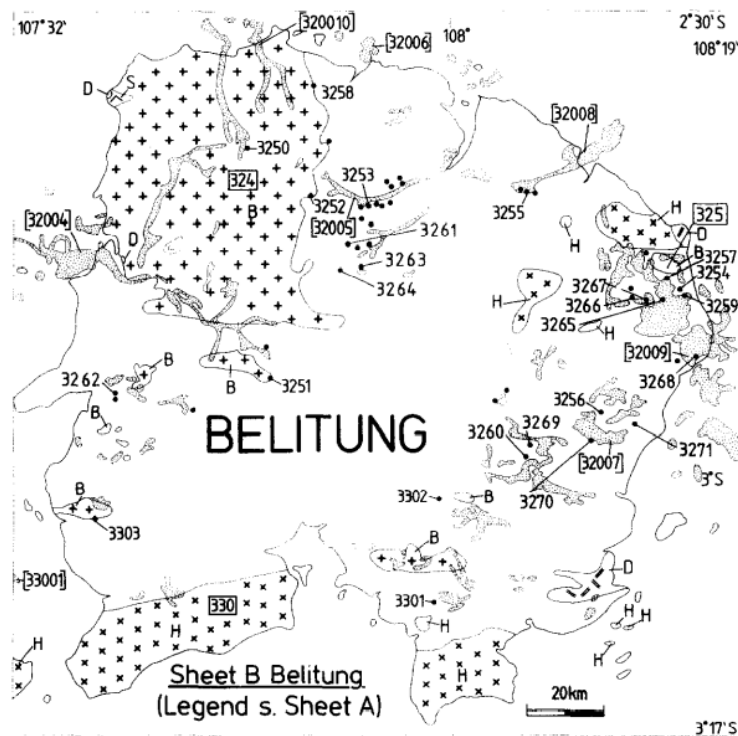
Selain sebagai pembawa logam timah, batuan granit beku juga membawa mineral logam Rare Earth Elements (REE) atau yang dikenal sebagai Logam Tanah Jarang (LTJ) seperti monasit, xenotim, dan zirkon (Syafrizal, dkk, 2019). Menurut Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 2019 diketahui LTJ terutama terpusat pada wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan sebagian Kalimantan Barat.



Gambar 2.4. 5 Sabuk Timah Asia Tenggara melewati Wilayah Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung hingga ke Kalimantan Bagian Timur.
Sumber: Badan Geologi Kementerian ESDM, 2019 dimodifikasi dari Cobing, 1992.



Gambar 2.4. 6 Sebaran potensi timah yang berasosiasi dengan batuan granit di Pulau Bangka.
Sumber: Schwarz, dkk, 1995



Gambar 2.4. 7 Sebaran potensi timah yang berasosiasi dengan batuan granit di Pulau Belitung.

Sumber: Schwarz, dkk, 1995

Lebih jauh menurut Kementerian ESDM, *The Southeast Asian Tin Belt* akan menjadi prioritas dalam pengembangan sumber daya LTJ bersama dengan penyelidikan penambangan timah dunia yang melewati wilayah Indonesia termasuk Pulau Bangka dan Belitung. Jalur tengah yang terdiri dari batuan granit sebagai sumber utama logam timah, monasit, xenotim, dan zirkon, yang terbentuk akibat tumbukan tektonik periode Trias Akhir merupakan potensi strategis yang dapat memberikan kontribusi besar akan pemenuhan kebutuhan bahan galian LTJ di masa mendatang.

Potensi bahan tambang melimpah merupakan salah satu kekayaan daerah sebagai modal pembangunan, namun jika pemanfaatannya tidak memperhatikan keberlanjutan akan memberikan dampak negatif. Risdawati Ahmad, dkk, 2022 mengidentifikasi dampak pertambangan timah di Desa Lampur, Kabupaten Bangka Tengah khususnya tambang inkonvensional (TI) menjadi 2 (dua) yaitu dampak sosial dan dampak lingkungan:

a. Dampak sosial:



- Munculnya dua kubu masyarakat Desa Lampur dalam merespon keberadaan TI. Kelompok protambang yang memiliki asumsi bahwa masyarakat desa bukan lagi hanya sebagai penonton dalam pemanfaatan sumber daya alam daerahnya namun juga dapat terlibat secara langsung. Yang termasuk kelompok ini adalah orang-orang yang diuntungkan dengan keberadaan TI seperti penambang, pengusaha, bahkan jaringan mafia. Kelompok kedua yang kontra adalah golongan yang menganggap TI sebagai penyumbang kerusakan ekologis terbesar di wilayah Bangka Belitung dan menganggap keberadaan TI belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lampur, terdiri dari para aktivis, akademisi, dan pejabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - Transformasi profesi masyarakat dari petani, nelayan, buruh bangunan yang berpenghasilan rendah menjadi penambang TI yang menghasilkan uang dalam waktu cukup singkat.
 - Meningkatnya angka putus sekolah di Desa Lampur karena banyak anak yang meninggalkan sekolah untuk menambang, bahkan salah satu sekolah mengeluhkan semakin berkurangnya jumlah murid di sekolah tersebut.
 - Timbulnya konflik sosial yang disebabkan oleh aktivitas penambangan yang dekat dengan permukiman penduduk, kerap dilakukan pada malam hari ketika waktu istirahat. Selain itu terjadi konflik perebutan lahan diantara sesama penambang TI.
 - Komposisi masyarakat Desa Lampur bersifat heterogen, meskipun hal ini telah terjadi sejak awal adanya PT. Timah. Telah terjadi migrasi baik oleh masyarakat Bangka Belitung sendiri maupun dari wilayah di luar Bangka Belitung.
- b. Dampak lingkungan:
- Terjadi kerusakan wilayah hutan karena para penambang mulai membuka lahan-lahan dihutan. Ekspansi ini dilakukan karena



ketersediaan timah di lokasi sebelumnya mulai berkurang sehingga perlu menambang di lokasi baru.

- Rusaknya sumber mata air di Desa Lampur karena proses penambangan menggunakan alat semprot untuk membasahi tanah, menyebabkan aliran air bercampur lumpur mengalir ke sumber mata air masyarakat sehingga air yang semula bersih menjadi keruh.
- Munculnya penyakit malaria yang menyerang masyarakat setempat akibat kolong bekas tambang timah yang belum direklamasi menjadi sarang nyamuk. Sebagian besar penderita penyakit ini adalah para pendatang yang merupakan penambang dan tinggal di *camp* area pertambangan.

II.4.1.3 Peningkatan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang meningkat dapat menjadi tanda adanya perputaran ekonomi yang tinggi, karena setiap orang membutuhkan berbagai macam kebutuhan dari kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, tempat tinggal, bahkan kebutuhan rohani seperti rekreasi. Dengan kata lain kebutuhan manusia sangat banyak dan tidak terbatas, sementara kebutuhan akan terpenuhi jika cadangan sumber daya alam masih pada posisi yang cukup. Menurut pandangan Malthus yang kita kenal dengan Teori Malthus bahwa pertumbuhan penduduk merupakan deret ukur sedangkan pertumbuhan bahan makanan merupakan deret hitung, sehingga menurut Suparmoko, 2014 pemenuhan kebutuhan manusia yang terus bertambah jenis dan jumlahnya pada akhirnya akan memberikan pengaruh berkurangnya produktivitas sumber daya alam yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan. Degradasi lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan kemudian memicu berbagai permasalahan lingkungan hidup diantaranya menurunnya kualitas air bersih, udara, maupun tanah, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim.



Dalam tulisannya, Katherina, 2017 fokus terhadap risiko bencana yang terkait terhadap 3 (tiga) faktor yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas, bahwa perubahan yang terjadi akibat pertumbuhan jumlah penduduk diterjemahkan dalam peningkatan eksposur (keterpaparan) dan kerentanan terhadap dampak dari bencana alam. Katherina juga menyadur hasil penelitian Rogelio dan Sanahuj, 2012 yang mengidentifikasi hubungan antara peningkatan jumlah penduduk dan risiko bencana alam menjadi 2 (dua) jenis, yaitu langsung dan tidak langsung. Hubungan langsung (*direct*) terlihat saat eksposur risiko meningkat, baik dalam hal ukuran populasi dan aktivitasnya, sehingga semakin banyak jumlah orang yang menetap pada daerah risiko, semakin tinggi probabilitas korban manusia akibat bencana. Sedangkan hubungan tidak langsung dicermati sebagai bagaimana suatu populasi dan aktivitas yang mereka lakukan terhadap lingkungannya berpengaruh terhadap cuaca ekstrem terkait perubahan iklim. Hal ini diketahui merupakan proses efek kumulatif bertahap dan sifatnya global, yang dampaknya tidak selalu terlihat nyata pada wilayah aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan Gas Rumah Kaca (GRK) dan faktor lain yang menentukan perubahan iklim, akan tetapi dampaknya dapat mempengaruhi ekosistem dunia.

Tabel 2.4. 1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1	Kabupaten Bangka	3.026,691	337.900	112,02
2	Kabupaten Belitung	2.269,768	189.200	83,33
3	Kabupaten Bangka Barat	2.851,537	212.900	59,16
4	Kabupaten Bangka Tengah	2.255,908	207.400	91,79
5	Kabupaten Bangka Selatan	3.597,277	205.800	72,18
6	Kabupaten Belitung Timur	2.269,768	131.300	50,71
7	Kota Pangkalpinang	104,494	227.300	2.174,63
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		16.692,258	1.511.800	90,58

Sumber: BPS, 2024, diolah

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2024) melaporkan jumlah penduduk provinsi ini terus meningkat. Dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 1,31 persen, jumlah



penduduk meningkat dari 1.494.621 jiwa menjadi 1.511.800 jiwa di Tahun 2023. Dengan 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, sebaran penduduk paling banyak berada di Kabupaten Bangka yaitu 337.900 jiwa atau 22,37 persen diikuti oleh Kota Pangkalpinang 227.300 jiwa atau sebanyak 15,14 persen penduduk tersebar di ibukota provinsi ini. Jumlah sebaran penduduk paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Belitung Timur sebanyak 131.300 jiwa atau 8,73 persen. Sedangkan kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 mencapai 90,58 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Pangkalpinang sebesar 2.174,63 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Belitung Timur sebesar 50,71 jiwa/km². Perbandingan kepadatan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disajikan pada tabel 2.4.1.

II.4.1.4 *Climate Changes* dan Fenomena El Nino

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2023 mengungkapkan bahwa perubahan iklim secara nyata telah terbukti meningkatkan frekuensi kejadian bencana yang sangat signifikan. Pada tingkat global, sejak tahun 1961, tren kenaikan anomali suhu rata-rata global berbanding lurus dengan peningkatan frekuensi kejadian bencana. Hal yang sama dengan data bencana di Indonesia, tren kenaikan jumlah kejadian bencana alam mengalami kenaikan hingga 82% pada kurun waktu tahun 2010 hingga 2022, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan anomali suhu rata-rata baik di tingkat global maupun nasional menyebabkan meningkatnya frekuensi kejadian bencana, terutama bencana hidrometeorologi. Lebih lanjut menurut BNPB, permasalahan utama yaitu adanya peningkatan jumlah penduduk yang memberi tekanan pada lingkungan di hilir, dan alih fungsi lahan baik secara sistematis maupun ilegal, yang mengurangi kapasitas daya serap, baik karbon maupun air mulai dari hulu hingga hilir. Aktivitas manusia meningkatkan emisi gas rumah kaca dalam bentuk pembuangan asap kendaraan, pabrik maupun lainnya, sehingga menjadikan kualitas udara tidak sehat. Sedangkan alih



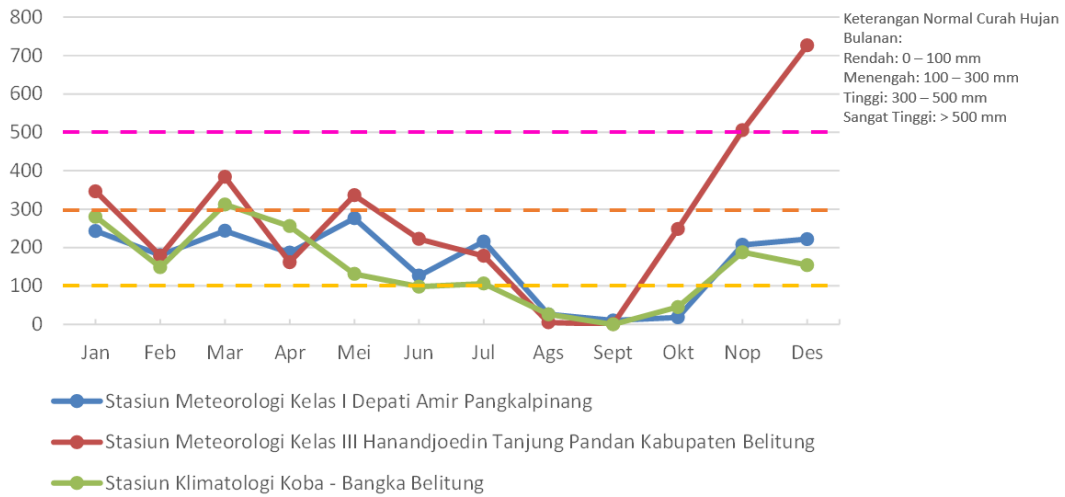
fungsi lahan biasanya menyebabkan pengurangan vegetasi yang menyebabkan berkurangnya kemampuan alam dalam menyerap karbon dan meningkatkan kerentanan banjir dan longsor karena air tidak terserap secara optimal. Peningkatan suhu global memicu tren kenaikan tinggi muka laut, terlihat dari peningkatan frekuensi kejadian banjir dari laut (rob) yang diperparah jika terjadi kerusakan ekosistem pesisir. Kenaikan frekuensi kejadian kebakaran hutan pada tahun 2023 membuat beberapa daerah sudah menetapkan status siaga darurat. Data KLHK menunjukkan bahwa luas lahan terdampak karhutla khususnya lahan gambut berbanding lurus dengan emisi karbon yang dilepaskan, contohnya pada tahun 2019, dari 1.64 juta Ha lahan terbakar melepaskan 624 juta ton emisi karbon ke udara.

Salah satu dampak pemanasan global dan terganggunya keseimbangan iklim pada tahun 2023 berupa fenomena pemanasan suhu muka air laut di Samudera Pasifik melebihi kondisi normal atau anomali yang dikenal dengan El Nino (BMKG, 2023). El Nino sebagai salah satu fenomena global hasil interaksi atmosfer dan laut yang terjadi di Samudera Pasifik dan menjadi *climate driver* memiliki berpengaruh besar terhadap iklim di Indonesia dikarenakan secara geografis letaknya berada di antara Benua Asia dan Australia, serta Samudera Hindia dan Pasifik sehingga pertukaran massa udara dan interaksi antara atmosfer dan laut di wilayah tersebut (BRIN, 2023). Air hangat dari timur dan tengah Samudera Pasifik terus bergeser ke timur menyebabkan penguapan, awan, serta hujan ikut bergeser dari wilayah Indonesia dan meningkatkan risiko kekeringan serta memanjangkan musim kemarau dan cuaca panas yang pada akhirnya meningkatkan risiko kekeringan dan risiko karhutla.

Menurut BMKG Babel (2023) tiga kombinasi fenomena alam yaitu El Nino, musim kemarau yang lebih lama, serta sifat hujan membuat potensi karhutla dan kekeringan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 menjadi lebih tinggi. Data curah hujan perbulan yang diperoleh dari stasiun pengamatan BMKG yaitu Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang, Stasiun Meteorologi Kelas III Hanandjoedin Tanjung



Pandan Kabupaten Belitung, dan Stasiun Klimatologi Koba - Bangka Belitung.



Gambar 2.4. 8 Curah hujan rata-rata bulanan wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir, 2024, diolah

Data dari Stasiun Klimatologi Koba curah hujan rata-rata bulanan berada pada kategori rendah hingga tinggi dengan kategori menengah yang mendominasi yaitu pada bulan Januari, Februari, bulan Maret sempat masuk kategori tinggi, dilanjutkan bulan April hingga Juli kembali pada kategori rendah, pada bulan Agustus hingga Oktober berada pada kategori rendah, bulan November-Desember kembali kepada kategori menengah. Sedangkan data pada Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang curah hujan rata-rata bulanan pada tahun 2023 pada kategori rendah hinggamenengah yang mendominasi. Curah hujan rata-rata bulanan di Kota Pangkalpinang dan sekitarnya berada pada kategori rendah di bulan Agustus hingga Oktober. Pada Stasiun Meteorologi Kelas III Hanandjoedin Tanjungpandan terekam curah hujan rata-rata bulanan tahun 2023 ada pada kategori rendah hingga sangat tinggi lebih dari 500 mm. Kategori menengah merupakan kategori mayoritas pada bulan-bulan Februari, April, Juni, Juli, dan Oktober. Kategori rendah hanya pada bulan Agustus dan September, kategori tinggi pada bulan Januari, Maret, dan Mei.



Pulau Belitung dan sekitarnya mengalami curah hujan rata-rata bulanan sangat tinggi pada bulan November-Desember tahun 2023.

Dari data tren curah hujan rata-rata bulanan wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terlihat pada bulan Agustus dan September merupakan bulan-bulan dengan curah hujan yang rendah, bahkan Stasiun Klimatologi Koba merekam pada bulan September curah hujan rata-rata bulanan adalah 0. Hal ini didukung oleh analisis suhu udara pada bulan September merupakan puncak tertinggi suhu udara di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menembus hingga 35°C. Kondisi kering akibat fenomena EL Nino, membuat banyak wilayah di Bangka Belitung tidak mendapatkan suplai pasokan curah hujan. Monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) dari BMKG Stasiun Klimatologi Bangka Belitung pada 20 September 2023 menunjukkan kekeringan dengan kategori sangat Panjang (31-60 hari tanpa hujan) dirasakan di lokasi titik pengamatan Mentok dan Tempilang (Kabupaten Bangka Barat), Pugul (Kabupaten Bangka), Air Gegas, Rias, Sadai, Serdang, Tepus, Batu Betumpang (Kabupaten Bangka Selatan), Membalong, Bukit Indah, Pegantungan, Badau, Tanjung Pandan, Perawas, Tungkusan (Kabupaten Belitung). Sedangkan kekeringan dengan kategori Panjang (21-30 hari tanpa hujan) dirasakan di lokasi titik pengamatan Belinyu. Kekeringan dengan kategori Menengah (11 -20 hari tanpa hujan) terjadi di titik pengamatan Tempilang (Kabupaten Bangka Barat), Mapur, Rukam, Bakam (Kabupaten Bangka), Lubuk Besar, Koba, Batu Beriga (Kabupaten Bangka Tengah), Desa Bukit Terap, Payung, Desa Jelutung, Desa Nyelanding (Kabupaten Bangka Selatan), Sijuk, Pangkalalang, Sungai Samak (Kabupaten Belitung), Air Asam (Kabupaten Belitung Timur). Hal ini sangat mempengaruhi kejadian bencana meteorologi terutama karhutla di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tren Bencana hidrometeorologi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk banjir dan banjir rob, angin puting beliung, cuaca ekstrem, abrasi pantai serta karhutla frekuensinya terus meningkat setiap tahunnya. Telah dirangkum pada dokumen IKPLHD sebelumnya dari Tahun



2021 terdapat 107 kejadian bencana hidrometeorologi, meningkat menjadi 212 kejadian, serta pada Tahun 2023 meningkat tajam menjadi 1.077 kejadian yang 942 diantaranya merupakan karhutla.

II.4.2 Pressure

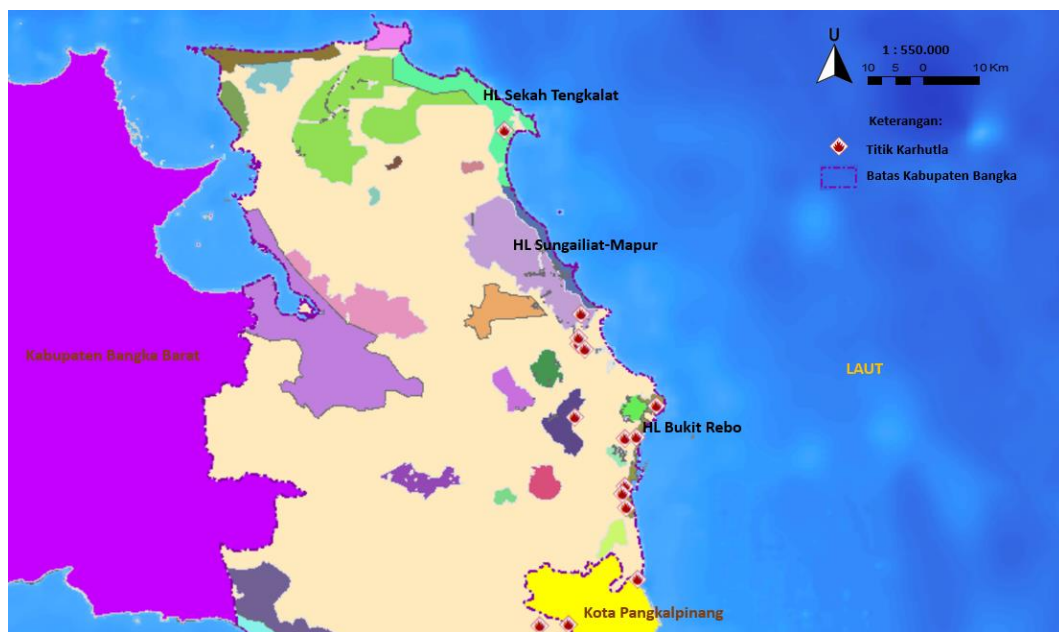
Bencana, seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. *Pressure* atau tekanan merupakan faktor-faktor pemicu terjadinya *state* atau dalam hal ini adalah kejadian bencana. Identifikasi faktor pemicu dalam analisis DPSIR risiko bencana adalah aktivitas antropogenik sebagai akibat pertumbuhan penduduk, yaitu Perambahan Hutan Menjadi Tempat Aktivitas Masyarakat, Penanganan Sampah Tidak Ramah Lingkungan, serta Lahan Kritis Akibat Aktivitas Tambang yang Tidak Berkelanjutan. Manusia sebagai aktor pembangunan sangat berperan penting terhadap kualitas lingkungan. Tingginya laju pertumbuhan yang tidak dapat diimbangi dengan penyediaan berbagai kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, papan, serta fasilitas seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, lingkungan, serta lapangan kerja dapat menyebabkan kualitas penduduk suatu daerah dalam kondisi rendah.

II.4.2.1 Perambahan Hutan Menjadi Tempat Aktivitas Masyarakat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) mengungkap penyebab utama bencana karhutla tahun 2023 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 90 persen adalah karena ulah manusia. Aktivitas masyarakat yang sangat berisiko menyebabkan karhutla berupa pembukaan lahan dengan cara dibakar, pembakaran sampah, serta membuang puntung rokok secara sembarangan yang diperparah oleh cuaca



musim kemarau. Sebanyak 40 kejadian karhutla pada Bulan Agustus 2023 juga disebutkan oleh Damkar Kabupaten Bangka Tengah sebagai *human error* atau kelalaian manusia terutama dengan tujuan untuk pembukaan lahan yang kemudian meluas ke lahan lain sekitarnya. Di Kabupaten Bangka Barat, hingga bulan September 2023 terjadi 145 kejadian kebakaran menghancurkan 247 Ha membuat Kabupaten Bangka Barat berstatus Siaga Darurat dengan penyebab prosedur pembukaan lahan untuk kepentingan perkebunan dan pertanian yang kurang tepat ditambah dengan pembuangan puntung rokok sembarang oleh masyarakat (BPBD Kabupaten Bangka Barat, 2023). Lebih lanjut, pada Oktober 2023 Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Polda Babel) mengamankan seorang pelaku penyebab karhutla di Kabupaten Belitung yang terbukti memilih cara praktis untuk membuka lahan dengan cara dibakar.

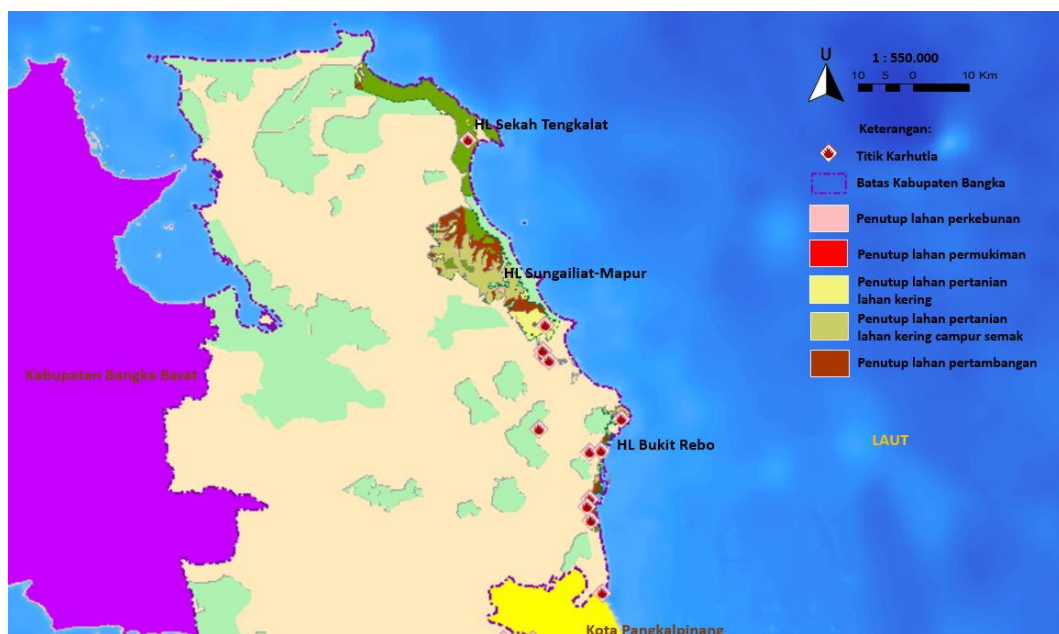


Gambar 2.4. 9 Hasil tumpang susun titik karhutla dengan data kawasan hutan
Sumber: BPBD Babel (2024), KLHK (2021), diolah. Disclaimer: Peta pada kertas A4

Hasil tumpang susun beberapa titik karhutla di Kabupaten Bangka dengan data kawasan hutan SK.6614/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 bahwa terdapat titik karhutla berada pada kawasan hutan (gambar 2.4.9). Jika dihubungkan dengan penyebab kebakaran dalam banyak kasus adalah



perbuatan manusia maka hal ini dapat diartikan adanya aktivitas kegiatan manusia di wilayah tersebut. Hasil tumpang susun peta kawasan hutan dengan peta penutupan lahan tahun 2022 yang diperoleh dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKHTL) Wilayah XIII Pangkalpinang menunjukkan pada lokasi sekitar karhutla yang berada dalam kawasan hutan terdapat permukiman, aktivitas perkebunan, pertanian dan ladang, serta pertambangan. Kegiatan masyarakat di wilayah hutan dan lahan akan memiliki potensi terjadinya karhutla menjadi lebih tinggi.



Gambar 2.4. 10 Hasil tumpang susun titik karhutla, data kawasan hutan, dan peta penutup lahan tahun 2022

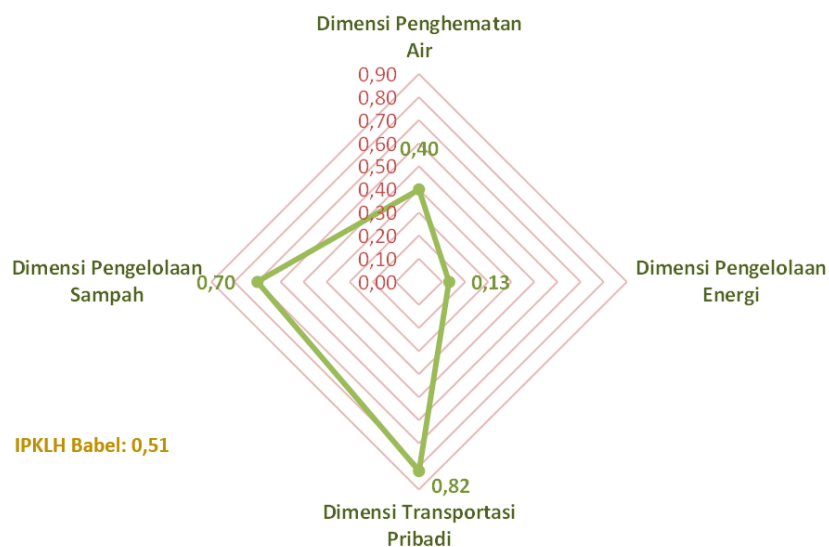
Sumber: BPBD Babel (2024), KLHK (2021), BPKHTL Wil. XIII (2023) diolah. Disclaimer: Peta pada kertas A4

II.4.2.2 Penanganan Sampah Tidak Ramah Lingkungan

Persoalan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menjadi perhatian serius dan menjadi salah satu isu yang diangkat dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah tahun 2024. Selain sering menjadi penyebab bencana banjir akibat terhambatnya aliran air, sampah juga menjadi penyebab bencana lingkungan karena dapat mencemari air, tanah, udara, berkontribusi terhadap perubahan iklim, hingga bencana longsor seperti yang terjadi pada 21 Februari 2005 di TPA Leuwigajah, Cimahi dan mengubur 157 orang. Hasil pengamatan data



penyebab karhutla di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023, sebanyak 4 persen karena pembakaran sampah oleh masyarakat yang kemudian apinya membesar dan menjalar menimbulkan kebakaran terhadap hutan atau lahan disekelilingnya. Membakar sampah adalah aktivitas yang sangat umum dilakukan oleh masyarakat, dan kegiatan ini dipilih sebagai salah satu pengolahan sampah karena dinilai lebih praktis dan membuat sampah tidak menumpuk. Menurut survey oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2023 mengelola sampah dengan cara dibakar dilakukan oleh sekitar 57 persen rumah tangga di Indonesia. Padahal pengolahan sampah dengan cara dibakar telah banyak menghasilkan cerita buruk, mulai dari bencana seperti kebakaran rumah dan lahan, hingga masalah kesehatan bagi orang yang terhirup asap hasil pembakaran sampah tersebut. Menurut penelitian dari Institut Teknologi Surabaya, masyarakat melakukan pembakaran sampahnya karena tidak mengetahui tempat membuang sampah. Lebih lanjut, pada tahun 2022 *Waste 4 Change*, yaitu sebuah organisasi non pemerintah yang fokus pada masalah persampahan, salah satu alasan masyarakat memutuskan untuk membakar sampah karena minimnya informasi mengenai penanganan dan pengolahan sampah yang baik.



Gambar 2.4. 11 Hasil pengukuran IPKLH berdasarkan 4 dimensi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: BPS (2018), diolah



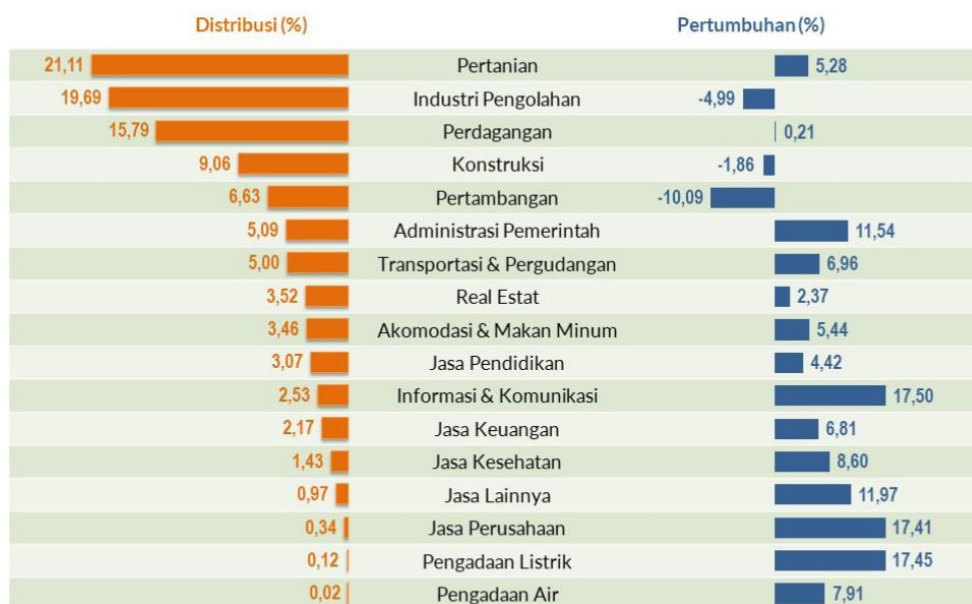
Dalam laporannya tahun 2018 BPS melakukan pengukuran tingkat ketidakpedulian wilayah di Indonesia terhadap lingkungan hidup dengan rentang nilai 0 s.d 1. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan bahwa wilayah tersebut semakin tidak peduli terhadap lingkungan, namun sebaliknya semakin rendah angka indeks berarti wilayah tersebut semakin peduli terhadap lingkungan. Dari 4 komponen dimensi, masing-masing nilai untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu dimensi penghematan air nilai 0,4, dimensi pengelolaan energi nilai 0,13, dimensi transportasi pribadi nilai 0,82, serta dimensi pengelolaan sampah nilai 0,70, nilai Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) secara keseluruhan sebesar 0,51 (gambar 2.4.10). Sehingga terlihat dimensi yang dominan adalah dimensi transportasi pribadi dan dimensi pengelolaan sampah. Dimensi pengelolaan sampah memiliki indikator pemilihan sampah, penanganan terhadap sampah, perlakuan terhadap barang bekas, dan membawa tas belanja sendiri. Penanganan terhadap sampah memiliki 2 kategori yaitu ramah lingkungan atau tidak ramah lingkungan. Ramah lingkungan jika penanganan sampah dengan diangkut petugas, dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), didaur ulang, dibuat kompos/pupuk, dan disetor ke bank sampah. Tidak ramah lingkungan manakala penanganan sampah dibuang ke sungai/got/selokan, dibakar, ditimbun/dikubur, dibuang sembarangan, atau lainnya. Sehingga tingginya nilai pada dimensi pengelolaan sampah yang berarti ketidakpeduliannya juga tinggi sudah termasuk penanganan sampah yang tidak ramah lingkungan yaitu dengan cara dibakar.

II.4.2.3 Lahan Kritis Akibat Aktivitas Tambang yang Tidak Berkelanjutan

Dalam Berita Resmi Statistik terbaru mengenai pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2024 yang dirilis oleh BPS pada Mei 2024, Pertambangan dan Penggalan masih menjadi salah satu kontributor utama dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut



lapangan usaha atas dasar harga berlaku. Namun jenis lapangan usaha ini jika dibandingkan y-on-y mengalami kontraksi paling dalam sebesar 10,09 persen, diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan yang terkontraksi sebesar 4,99 persen, serta lapangan usaha Konstruksi yang terkontraksi sebesar 1,86 persen. Kemudian secara q-to-q yaitu Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2024 Terhadap Triwulan IV-2023 jenis lapangan usaha ini juga mengalami kontraksi sebesar 20,22 persen, diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan yang terkontraksi sebesar 13,20 persen; serta lapangan usaha Konstruksi yang terkontraksi sebesar 12,63 persen. Pada triwulan I-2024 yang merupakan awal tahun anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan belum banyak disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini menyebabkan tidak adanya ekspor logam timah ke luar negeri selama bulan Januari-Februari sehingga berpengaruh terhadap penurunan signifikan pada produksi logam timah maupun bijih timah sebagai bahan baku logam timah secara q-to-q.



Gambar 2.4. 12 Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2024 (y-on-y) dalam persen
Sumber: BPS (2024)



Gambar 2.4. 13 Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2024 (q-to-q) dalam persen.

Sumber: BPS (2024)

Mengutip ulasan dari Universitas Bangka Belitung (UBB), 2024, timah sebagai salah satu hasil pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dominator terbesar dalam penentu fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang terlihat dari sejarah pertumbuhan ekonomi, sedikit sentiment terhadap penurunan harga komoditas timah akan menimbulkan gelombang pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut menurut UBB pertumbuhan ekonomi di provinsi ini sebesar hampir 80 persen masih didorong oleh konsumsi dan masyarakat yang bekerja secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas penambangan timah, sudah pasti akan berdampak secara ekonomi. Sementara itu harga rata-rata timah yang menjadi tulang punggung dan pendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari *London Metal Exchange* (LME) mengalami penurunan signifikan di tahun 2023 sebanyak 17,2 persen jika dibandingkan pada tahun 2022 dimana rata-rata tahun 2022 sebesar US\$31.382 menjadi US\$25.972 di tahun 2023. Penurunan harga ini memberi dampak arus pendapatan yang diterima oleh masyarakat dan berdampak pula pada kemampuan konsumsi atau daya beli masyarakat dan pertumbuhan

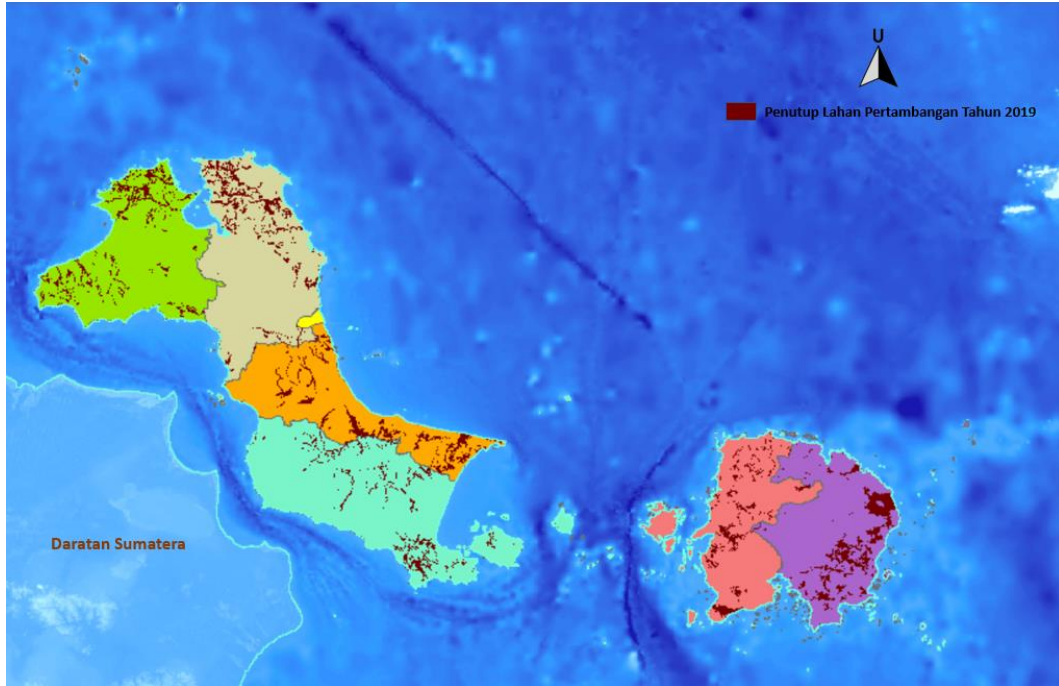


ekonomi daerah. Ekspor utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang 60 persen adalah komoditas timah memberi pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi, sehingga ketika ekspor mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi akan melambat. Namun seiring telah diterbitkannya RKAB baik milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta lainnya pada awal tahun 2024 maka geliat sektor pertimahan kembali berjalan sehingga perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali bersemangat.

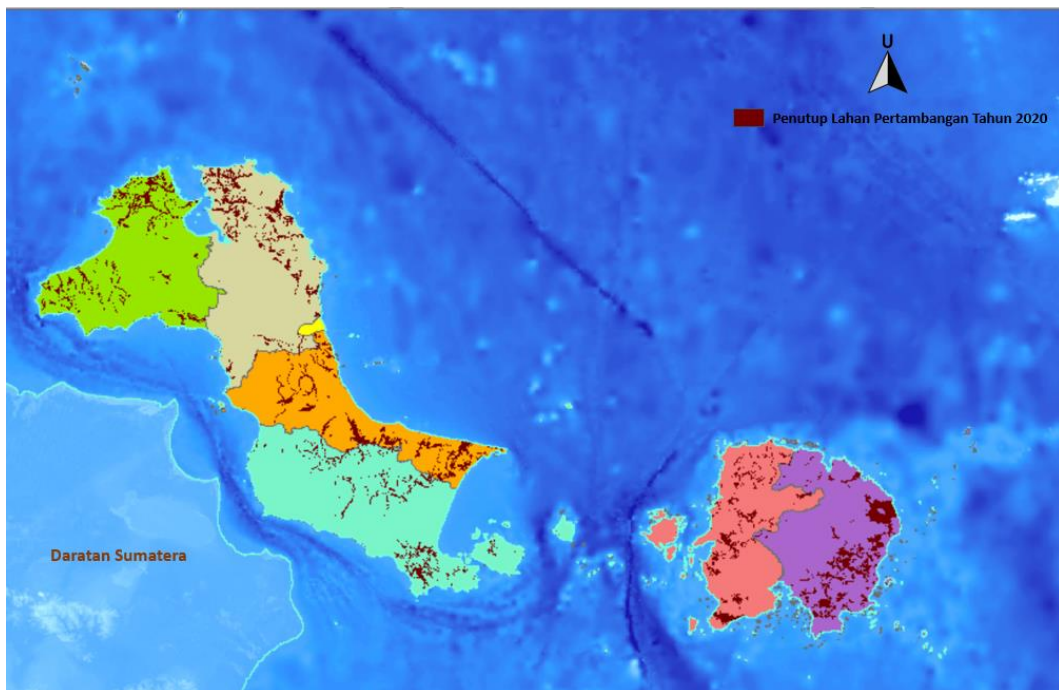
Sangat jelas bahwa sektor pertambangan memiliki potensi besar untuk menimbulkan dampak positif pembangunan terhadap ekonomi masyarakat dari aspek peningkatan nilai tambah, pemerataan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta penyerapan tenaga kerja dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Namun, penambangan yang tidak mengikuti ketentuan teknis pertambangan yang tidak berkelanjutan dapat menimbulkan dampak ke lingkungan yang merugikan.

Analisis spasial terhadap luas penutup lahan pertambangan pada peta penutup lahan series tahun 2019 hingga tahun 2021 dari BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang menunjukkan luas dan sebaran penutup lahan pertambangan terus bertambah setiap tahunnya. Lokasi penutup lahan pertambangan tersebut menyebar dengan keterdapatan merata pada setiap kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terkadang bahkan telah merambah masuk dalam kawasan hutan. Tumpang susun penutup lahan pertambangan dengan peta kawasan hutan menurut SK.6614/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 pada gambar 2.4.16.

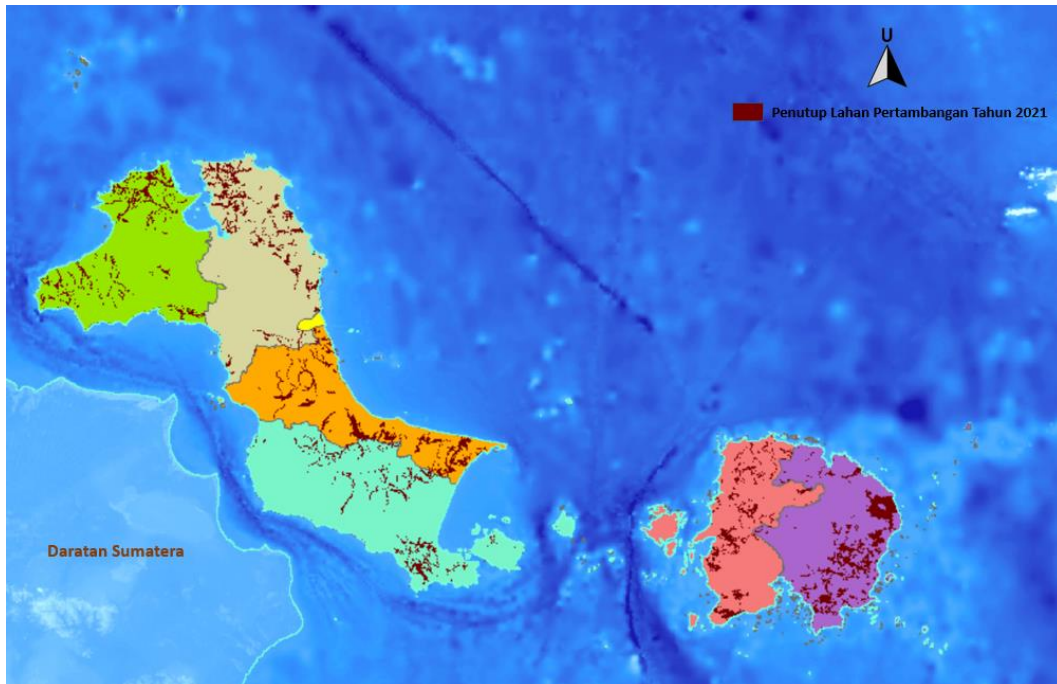
Hasil pengolahan data BPKH Wilayah XIII diperoleh luas penutup lahan pertambangan tahun 2019 (gambar 2.4.13) yaitu 146.426,21 Ha, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 5,97 persen menjadi seluas 155.168,33 Ha (gambar 2.4.14), dan pada tahun 2021 penutup lahan pertambangan kembali mengalami kenaikan sebesar 1,02 persen menjadi seluas 156.758,62 Ha (gambar 2.4.15).



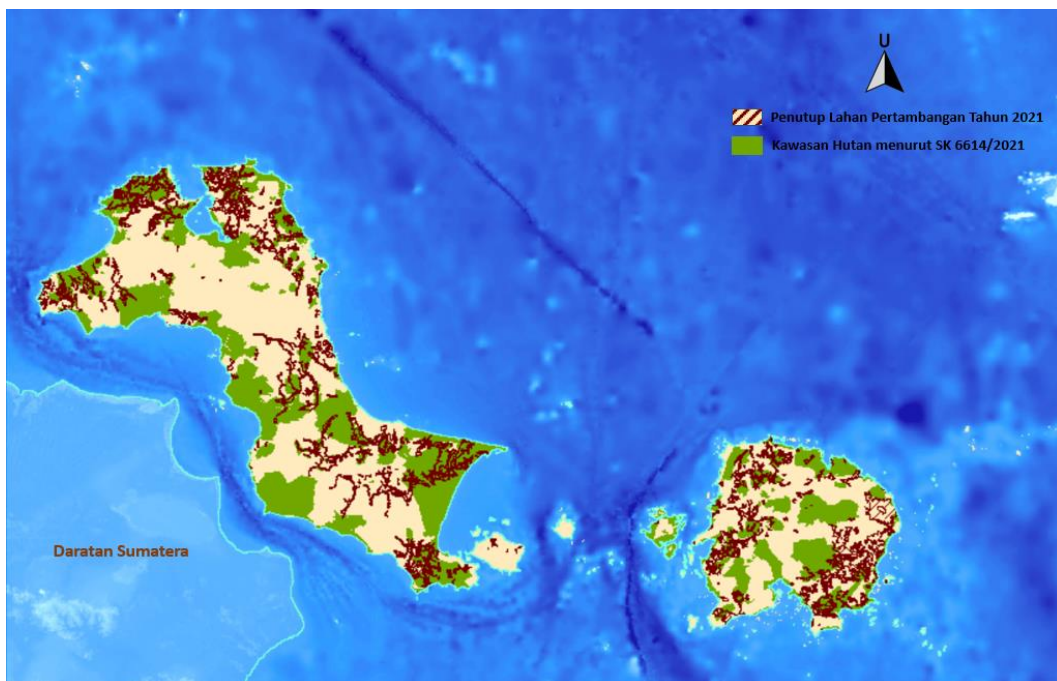
Gambar 2.4. 14 Peta Penutup Lahan Pertambangan Tahun 2019
Sumber: BPKH Wilayah XIII, 2020, diolah



Gambar 2.4. 15 Peta Penutup Lahan Pertambangan Tahun 2020
Sumber: BPKH Wilayah XIII, 2021, diolah



Gambar 2.4. 16 Peta Penutup Lahan Pertambangan Tahun 2021
Sumber: BPKHTL Wilayah XIII, 2022, diolah



Gambar 2.4. 17 Tumpang Susun Peta Penutup Lahan Pertambangan Tahun 2021 dengan Peta Kawasan Hutan SK.6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sampai Dengan Tahun 2020

Sumber: BPKH Wilayah XIII, 2022, SK 6614/2021, diolah

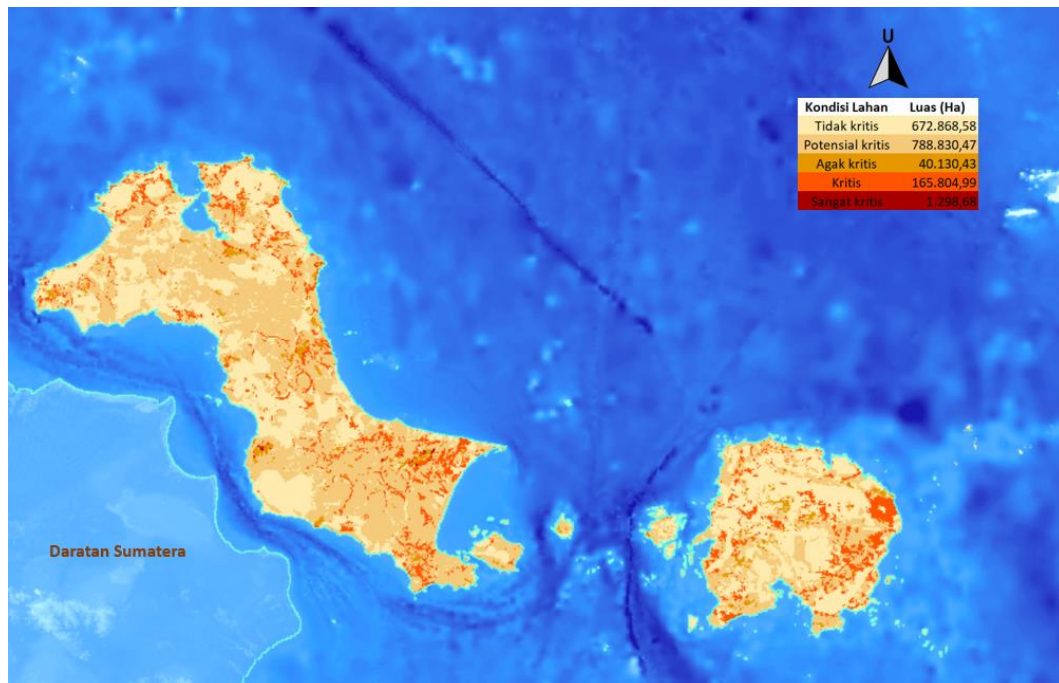


Selain meninggalkan jejak unik berupa lubang bekas galian tambang yang tidak direklamasi dengan bentuk menyerupai kolam atau danau yang kemudian terisi air hujan disebut kulong atau lubang camuy yang sesungguhnya merupakan perubahan laskap permukaan tanah, konsekuensi lain berupa degradasi lingkungan yang tidak dapat dihindari. Kerusakan hutan diikuti dengan pencemaran air sungai terlihat nyata dari warna air yang keruh akibat tingginya kandungan Total Suspended Solid (TSS). Aktivitas pertambangan bijih timah di daerah hulu memicu pendangkalan di laut sehingga mengganggu aktivitas di alur pelabuhan nelayan. Sementara tekanan dari arah laut akibat penggunaan kapal keruk atau kapal isap yang terlalu dekat ke pantai akan merusak ekosistem karena limbah hasil pemisahan pasir dan bijih timah berupa lumpur yang dibuang ke laut akan menjadi sedimen yang menutup terumbu karang dan menyebabkan kematian terumbu karang tersebut. Hal akan berujung pada berkurangnya sumber daya ikan di wilayah perairan karena tempat hidup dan tempat berkembang biaknya rusak. Akibatnya tangkapan nelayan juga berkurang hingga kehilangan mata pencarian dan berpotensi menambah angka kemiskinan.

Lebih lanjut mengenai sisi lain dampak pertambangan pada permukaan tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan degradasi lahan dan menurunnya kualitas tanah karena lapisan paling atas sudah tidak ada, maka kemampuan untuk menahan air menjadi rendah mengakibatkan miskinnya unsur hara yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman terhambat dan selanjutnya diikuti dengan produktivitas yang menurun. Tailing timah bersifat sangat porous, tekstur kasar (pasir) dengan kapasitas memegang air rendah serta kapasitas tukar kation tergolong sangat rendah, pH tanah sangat masam, kadar C-organik, hara N, P, K, dan kejenuhan basa sangat rendah, serta kadar besi cukup tinggi yang berpotensi meracuni tanaman. Lahan yang telah mengalami atau dalam proses kerusakan kimia, fisik, dan biologi yang dapat mengganggu atau kehilangan fungsinya di dalam lingkungan dikenal



dengan sebutan lahan kritis. Kondisi lahan kritis merusak tata air dan lingkungan sekitarnya diikuti penurunan tingkat kesuburan tanah, berkurangnya ketersediaan sumber air pada musim kemarau, membuat pepohonan meranggas, mati dan mengering sangat potensial sebagai bahan bakar di musim kemarau. Penggambaran lahan kritis menggunakan data yang diperoleh dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk (BPDAS-BRC) tahun 2022 dapat diamati pada gambar 2.4.17.



Gambar 2.4. 18 Peta lahan kritis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta luas per status lahan

Sumber: BPDAS-BRC, 2022, diolah

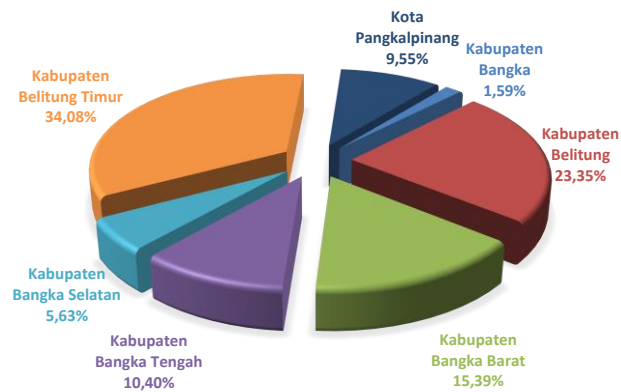
II.4.3 State

State dipengaruhi oleh *pressure* dan menjadi kondisi atau status lingkungan. State atau kondisi saat ini adalah Kejadian Bencana Karhutla Sepanjang Tahun 2023, Menurunnya Indeks Kualitas Air, serta Terjadinya Kabut Asap Akibat Karhutla. Data kebencanaan tahun 2023 diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Babel), Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan memanfaatkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI BNPB), serta dukungan informasi yang dikumpulkan dari berbagai media massa online.



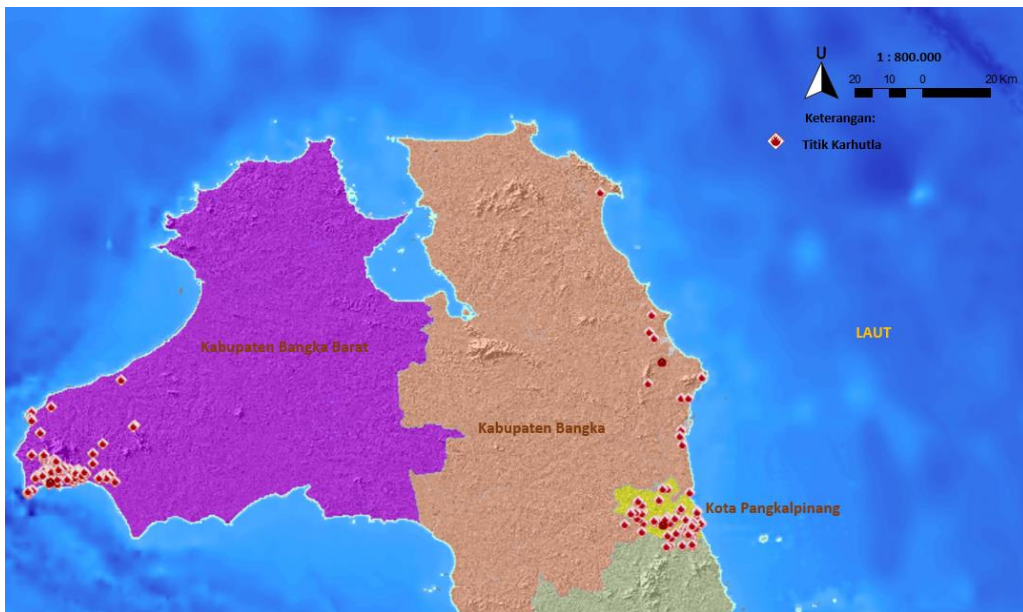
II.4.3.1 Kejadian Bencana Karhutla Sepanjang Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023 frekuensi kejadian bencana karhutla sebanyak 942 kejadian, menjadi yang tertinggi dari seluruh kejadian bencana yang berjumlah 1077 kejadian. Daerah dengan frekuensi bencana karhutla tinggi berlokasi di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 321 kejadian, diikuti oleh 220 kejadian di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat 145 kejadian, Kabupaten Bangka Tengah 98 kejadian, Kabupaten Bangka Selatan 53 kejadian, Kota Pangkalpinang 90 kejadian, Kabupaten Bangka hanya mengalami 15 kali kejadian karhutla (Gambar 2.4.18)



Gambar 2.4. 19 Persentase perbandingan kejadian bencana karhutla Tahun 2023

Sumber: BPBD Babel, 2024, diolah



Gambar 2.4. 20 Titik karhutla yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, dan Kota Pangkalpinang

Sumber: BPBD Babel, 2024, diolah

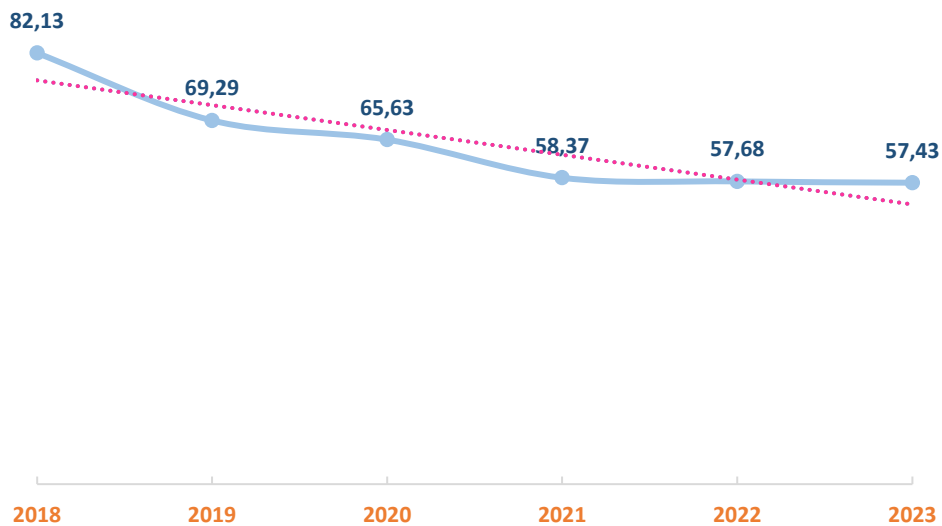


Selain dukungan musim kemarau panjang dan sedikitnya curah hujan sehingga membuat udara yang kering, BPBD Babel, 2024 dalam laporannya mencatat bahwa penyebab karhutla di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pembakaran sampah, pembakaran oleh oknum tidak bertanggung jawab, karena pembuangan puntung rokok sembarangan, pembukaan dan pembersihan lahan dengan cara dibakar, serta penyebab lain yang tidak diketahui.

Kerugian akibat bencana karhutla yang terjadi sepanjang tahun 2023 diperkirakan sejumlah 150 miliar (BPBD Babel, 2024). Hal ini sudah termasuk dengan biaya lingkungan karena terputusnya rantai ekosistem dan waktu pemulihan lahan yang dapat mencapai puluhan tahun untuk kembali seperti semula. Belum terhitung flora dan fauna yang hilang akibat kebakaran tersebut. Total luas lahan terbakar dari seluruh kejadian bencana karhutla tercatat sebesar 2.057,62 Ha, sedangkan KK terdampak sejumlah 1.700 KK atau 3.290 jiwa.

II.4.3.2 Menurunnya Indeks Kualitas Air

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di suatu wilayah menyisakan dampak terhadap lingkungan, salah satunya terhadap daur hidrologi, karena terbakarnya hutan dan lahan berdampak pada hilangnya kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap air hujan. Selain itu setelah karhutla debu dan sisa pembakaran dapat terbawa erosi arus air ke sungai, menyebabkan aliran sungai terganggu hingga pendangkalan sungai. Kualitas air yang digambarkan melalui Indeks Kualitas Air (IKA) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu tahun 2020 s.d tahun 2023 memiliki tren terus menurun. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi tutupan lahan pertambangan baik yang telah ditinggalkan maupun yang masih aktif. Hasil perhitungan IKA tahun 2023 menunjukkan penurunan 0,25 poin dari 57,68 pada tahun 2022 ke angka 57,43 (gambar 2.4.20).



Gambar 2.4. 21 Tren nilai IKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: DLHK Babel, 2024, KLHK, 2024, diolah

II.4.4 Impact

Impact atau dampak adalah perubahan pada *state* yang dapat berdampak pada kesehatan manusia, ekologi, atau biaya (Lee, 2013). Sunarti, dkk, 2017 dalam menganalisis tentang bencana terkait penambangan menyebutkan dampak bencana akibat kegiatan PETI di daerah Merangin, Jambi sebagai berikut:

- Terhadap manusia: gangguan pola penghidupan masyarakat, kesehatan, kesejahteraan, bahkan kemiskinan;
- Pada sisi sosial: perubahan pola interaksi masyarakat;
- Pada sisi ekonomi: kerugian finansial;
- Pada sisi budaya: kemerosotan kearifan lokal masyarakat, dan dapat terjadi konflik sosial.

Soulisa, 2019, pada penelitian mengenai perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Negeri Hema Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pasca bencana banjir Wae Ela membagi dampak menjadi tiga tingkatan:

- pada tingkat makro, akibat bencana banjir pendapatan dan penghasilan masyarakat turun secara drastis karena hilangnya mata pencaharian,



serta banyak harta benda yang hanyut akibat banjir dan mereka harus memulai hidup yang baru;

- pada tingkat mezo, terjadi perubahan pada kelompok masyarakat yang tidak terkena langsung, namun mereka harus menampung saudara mereka yang terkena musibah bencana;
- pada tingkat mikro, terjadi perubahan pola interaksi masyarakat antara satu dengan yang lain karena korban banjir harus tinggal di tenda pengungsian dan harus berhadapan dengan model hidup yang sebelumnya mereka alami, sehingga dapat mempengaruhi pola hidup individu masyarakat.

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

II.4.4.1 Isu Kesehatan Masyarakat Terkait Karhutla

Terkait dengan bencana karhutla dan cuaca ekstrem yang terjadi selama tahun 2023, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dinkes Babel) mengumumkan adanya peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada bulan Agustus 2023 sebanyak 8.567 kasus dengan 3.104 kasus diantaranya dialami oleh balita, sisanya adalah kasus ISPA yang diderita masyarakat diatas umur 5 tahun. Kasus ISPA dikatakan meningkat karena dibandingkan pada bulan Juli ditahun yang sama terdapat 7.837 orang. Data tersebut menurut Dinkes Babel merupakan hasil rekapitulasi seluruh Puskesmas di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II.4.4.2 Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan

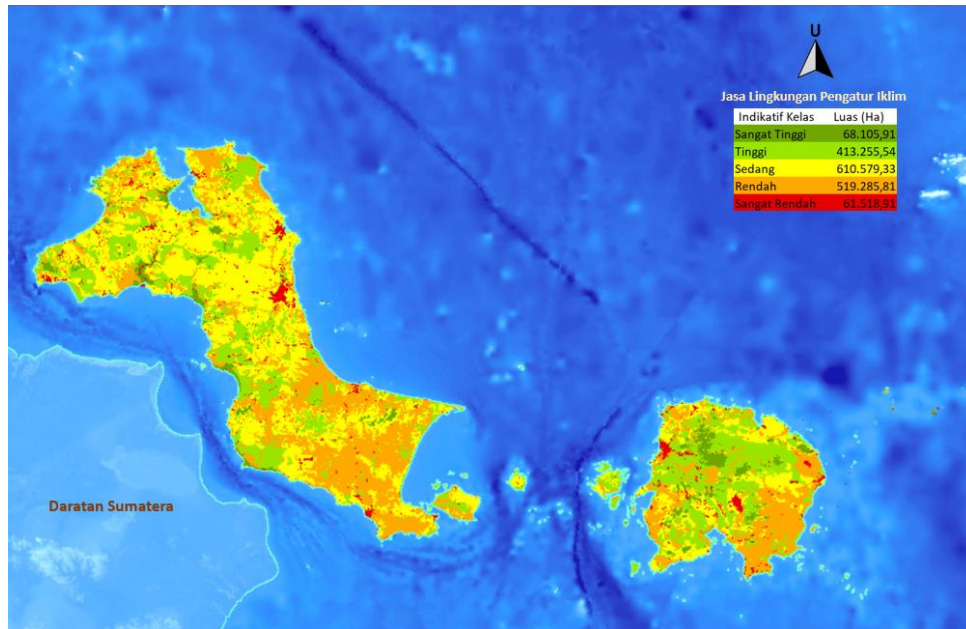


hidup di hutan, selain itu kebakaran hutan dan lahan berpotensi menurunkan jasa lingkungan akibat lenyapnya vegetasi alami.

Menurut Schneiders dan Muller (2017) dalam KLHK, 2019, jasa lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh fungsi ekologisnya. Fungsi ekologis yang selanjutnya disebut sebagai fungsi lingkungan hidup inilah yang ketika dimanfaatkan akan menghasilkan jasa lingkungan. Jasa lingkungan hidup maupun fungsi lingkungan hidup akan terbentuk sesuai dengan karakteristik wilayah yang dipengaruhi oleh karakteristik bentang alam, vegetasi alami serta penggunaan lahannya. Sedangkan karakteristik bentang alam dan vegetasi alami merupakan cerminan dari karakteristik masing-masing ekoregion yang terbentuk dari geomorfologi dan morfogenesis serta ciri lainnya. Kondisi jasa lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan bencana dilihat dari jasa lingkungan pengatur iklim, jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir, serta jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana.

a. Jasa lingkungan pengatur iklim

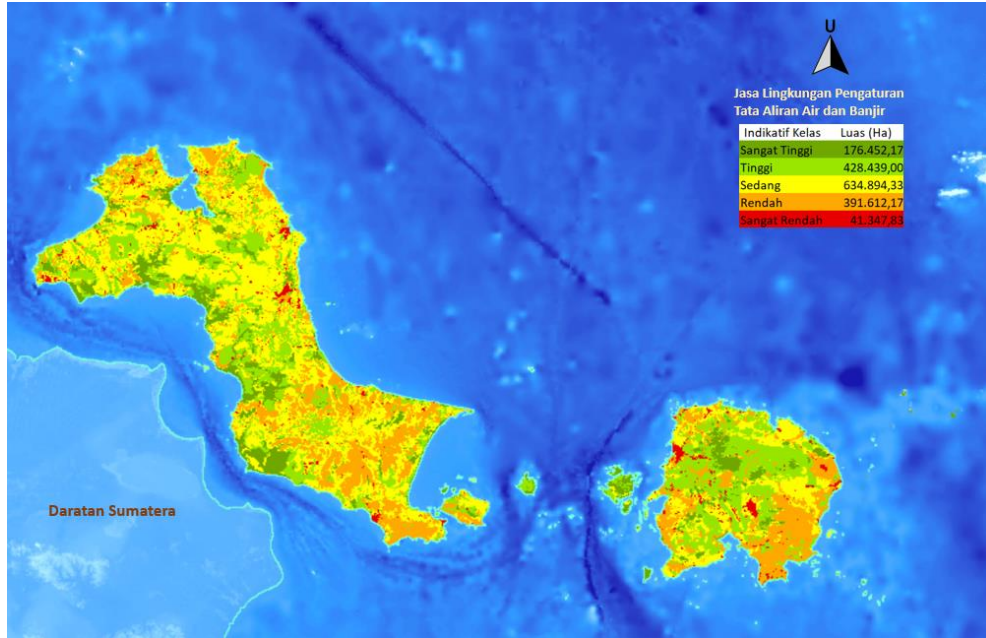
Jasa lingkungan pengatur iklim memiliki fungsi pengaruh ekosistem terhadap iklim lokal dan global melalui tutupan lahan dan proses yang dimediasi secara biologis, dipengaruhi oleh kondisi lahan yang bervegetasi. Peta indikatif jasa lingkungan pengatur iklim terlihat didominasi oleh indikatif kelas sedang 36,50 persen atau seluas 610.579 Ha dan yang paling sedikit luasannya adalah indikatif kelas sangat rendah sejumlah 61.518,91 Ha, sekitar 3,68 persen. Sedangkan indikatif kelas sangat tinggi seluas 68.105,91 Ha (4,07 persen), indikatif kelas tinggi dengan luasan sebesar 413.255,54 Ha (24,70 persen), serta indikatif kelas rendah seluas 519.285,81 Ha (31,04 persen), gambar 2.4.21.



Gambar 2.4. 22 Peta Indikatif Jasa Lingkungan Pengatur Iklim
Sumber: DLHK Babel, 2022

b. Jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir

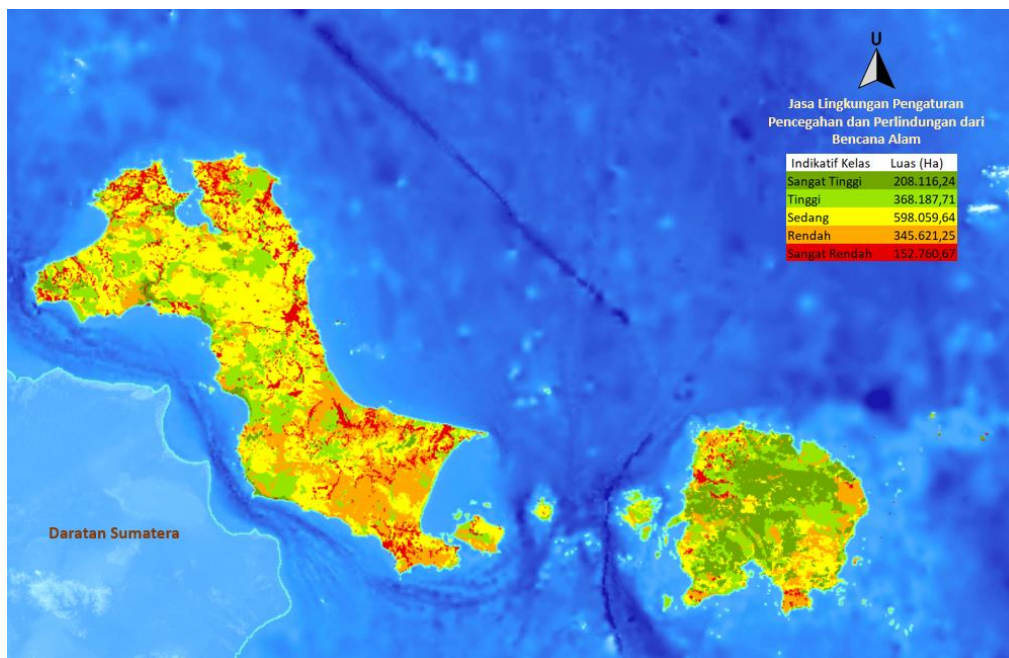
Fungsi jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir mempertimbangkan peran bentang alam dan penutup lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala dengan indikator keadaan kapasitas infiltrasi yaitu litologi, topografi, curah hujan, vegetasi, tutupan lahan dan retensi air yaitu vegetasi, topografi, dan litologi. Peta indikatif jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir didominasi oleh indikatif kelas sedang seluas 634.894,33 Ha (37,96 persen) dan luasan paling kecil luasannya adalah indikatif kelas sangat rendah seluas 41.347,83 Ha (2,47 persen). Indikatif kelas sangat tinggi seluas 176.452,17 Ha (10,55 persen), indikatif kelas tinggi dengan luas 428.439,00 Ha (25,61 persen), serta indikatif kelas rendah dengan luas 391.612,17 Ha atau 24,41 persen dari seluruh luas daratan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2.4. 23 Peta Indikatif Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir
Sumber: DLHK Babel, 2022

c. Jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam.

Jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam dilihat dari struktur alam yang berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, longsor, badai, gempabumi, banjir dan tsunami dengan indikator karakteristik bentangalam, vegetasi, dan penutup lahan. Pada peta indikatif jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam, luasan didominasi oleh indikatif kelas sedang 598.059,64 Ha (35,75 persen). Sedangkan luasan paling kecil ada pada indikatif kelas sangat rendah 152.760,67 Ha (9,13 persen), selanjutnya indikatif kelas sangat tinggi seluas 208.116,24 Ha (12,44 persen), indikatif kelas tinggi dengan luas sebesar 368.187,71 Ha (22,01 persen), serta kelas indikatif rendah seluas 345.621,25 Ha (20,66 persen) dari luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2.4. 24 Peta Indikatif Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam
Sumber: DLHK Babel, 2022

II.4.5 Responses

II.4.5.1 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pengelolaan lingkungan hidup erat kaitannya dengan kejadian bencana baik bencana alam, maupun bencana non alam, serta bencana yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan kebencanaan yang dihubungkan dengan Pilar Lingkungan Hidup pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) disajikan pada tabel 2.4.2. Terwujudnya anggaran pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan bentuk sinergi kemitraan antara legislatif dan eksekutif bersama saling mendukung dan berkontribusi dalam koridor sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.



Tabel 2.4. 2 Anggaran dan Program Pengelolaan Lingkungan

No.	Uraian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Perangkat Daerah	Program	Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2023
				Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Anggaran (Rp.)
1	Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	60.545.982.263,00	34.143.043.750,00	120.839.726.023,00
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.336.461.059,00	1.512.891.160,00	30.582.464.550,00
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	139.228.000,00	62.348.841,00	802.372.487,00
		Bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	32.519.078.155,00	22.778.750.383,00	47.718.101.313,00
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	0,00	7.533.062.000,00	249.998.500,00
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	0,00	598.720.000,00	2.854.343.719,00
		Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	0,00	42.497.359,00	368.339.000,00
		Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	730.278.110,00	4.334.204.024,00	4.052.180.980,00



2	Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	Bidang Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	6.728.824.898,00	3.856.983.362,00	5.519.963.016,00
		Bidang Sosial	Program Penanganan Bencana	745.697.700,00	12.143.000,00	1.003.856.600,00
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	0,00	12.211.000,00	15.022.400,00
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	4.840.000,00	89.246.801,00	488.997.560,00
		Bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	292.500.431.937,00	105.160.574.193,00	166.254.819.099,00
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	902.968.157,00	2.189.146.293,00	1.803.624.000,00
			Program Penatagunaan Tanah	230.738.390,00	0,00	0,00
			Program Penataan Bangunan Gedung	6.714.178.706,00	0,00	18.725.350.348,00
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	389.446.133,00	1.198.950.000,00	1.556.619.288,00
			Program Pengembangan Perumahan	0,00	441.089.873,00	718.298.000,00
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	2.654.672.652,00	3.369.709.414,00	3.885.909.734,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0,00	0,00	473.991.619,00



		Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	57.682.560,00	935.240.200,00	1.142.609.500,00
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			131.500.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			584.869.836,00
		Bidang Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	6.923.367.605,00	3.304.005.398,00	20.483.822.006,00
		Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Program Pembinaan Sejarah	0,00	0,00	257.995.800,00
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	17.173.992,00	62.921.822,00	79.998.100,00
			Program Pengelolaan Permuseuman	1.305.000,00	0,00	29.999.600,00
		Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	253.694.479,00	43.066.276,00	318.955.700,00
			Program Perlindungan Khusus Anak	148.926.500,00	54.815.286,00	317.763.600,00
		Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.256.206.722,00	8.979.034.713,00	8.882.975.064,00



			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	521.910.790,00	1.126.518.512,00	1.305.992.616,00
3	Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal	248.613.781,00	253.218.368,00	429.955.000,00
		Bidang Layanan Pengadaan	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	1.407.767.968,00	1.146.878.098,00	2.138.031.165,00
		Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.532.953.873,00	440.007.106,00	1.090.835.500,00
			Program Pemasaran Pariwisata	1.363.818.526,00	586.704.381,00	1.293.246.100,00
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	695.941.267,00	301.334.832,00	1.273.613.024,00
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.682.895.683,00	1.524.682.609,00	1.520.376.200,00
		Bidang Perindustrian	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	0,00	19.269.987,00	131.974.500,00
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	53.831.972,00	81.740.561,00	333.499.700,00
		Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	19.023.891,00	54.003.600,00	309.777.020,00
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	55.494.400,00	55.205.240,00	101.999.600,00



			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	0,00	0,00	72.499.900,00
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	0,00	0,00	30.650.000,00
4	Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	23.141.770,00	0,00	83.600.000,00
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	35.116.400,00	69.737.006,00	449.892.700,00
		Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	7.380.000,00	41.825.564,00	401.000.000,00
			Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	146.307.000,00	41.877.000,00	109.975.000,00
		Bidang Pengembangan dan Penelitian	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	394.514.251,00	491.287.692,00	195.000.000,00
5	Tujuan 14. Ekosistem Lautan	Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil	920.423.000,00	138.998.209,00	1.240.710.380,00
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	48.083.878.526,00	7.014.397.422,00	11.633.954.173,00
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.262.318.435,00	352.835.056,00	773.437.800,00



			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	3556037711,00	430.450.316,00	1.168.852.003,00
6	Tujuan 15. Ekosistem Daratan	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan	3.328.205.301,00	1.496.468.538,00	5.797.080.620,00
			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	400.275.051,00	88.247.669,00	417.840.400,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0,00	0,00	229.228.800,00
			Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	643.419.240,00	82.148.000,00	729.963.454,00
			Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	289.211.871,00	138.340.129,00	513.988.500,00
				490.473.663.725,00	216.690.831.043,00	473.921.441.597,00

Sumber: Bakuda Babel, 2023



II.4.5.2 Tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana

Adanya Kajian Risiko Bencana, dapat diketahui tingkat bahaya dan kerentanan untuk semua jenis potensi bencana yang dapat terjadi di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya dapat diidentifikasi dan dievaluasi kondisi kerentanan untuk dapat dianalisis dan diestimasi kemungkinan timbulnya potensi bahaya yang dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa serta kerugian harta, benda, mata pencaharian, dan kerusakan lingkungan berikut mitigasinya. Selain itu dengan telah disusunnya Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka tersedia data spasial risiko bencana yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup dengan metode tumpang susun, sehingga dalam perencanaan-perencanaan pembangunan dapat diketahui lokasi-lokasi kerawanan bencana dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kajian Risiko Bencana ini telah dimanfaatkan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* (2022), KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2043, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan pemutakhiran Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Beberapa peta risiko bencana disajikan dalam gambar-gambar berikut.

II.4.5.3 Melibatkan Unsur Bidang Kebencanaan pada Proses Validasi KLHS Kabupaten/Kota dan Berbagai Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup

Salah satu tahapan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun oleh Kabupaten/Kota adalah validasi KLHS yang dilaksanakan oleh Gubernur sesuai kewenangannya melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam pelaksanaannya terdapat proses pravalidasi yaitu berupa penyampaian masukan dan saran terhadap KLHS tersusun. Agar memenuhi



unsur komprehensif atau menyeluruh terhadap pelaksanaan KLHS oleh Kabupaten Kota, aspek kebencanaan juga merupakan salah satu unsur penilaian. Tim Kelompok Kerja Validasi KLHS Kabupaten Kota yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung keanggotaannya melibatkan unsur terkait seperti dari BPBD, Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian Daerah (Bappelitbangda), serta unsur kehutanan yaitu dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XIII.

Instansi Bidang Kebencanaan juga dilibatkan dalam keanggotaan tim kelompok kerja penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2043, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan pemutakhiran Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), agar mendapatkan saran masukan serta bahan pertimbangan dari sisi kebencanaan.

II.4.5.4 Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan

Pengawasan terhadap izin lingkungan dilaksanakan sebagai upaya pengendalian dalam pemanfaatan dan/atau eksploitasi sumber daya alam seperti bahan tambang, pariwisata, serta kegiatan yang berpotensi menghasilkan pencemaran terhadap lingkungan. Sepanjang tahun 2023 telah dilakukan kegiatan pengawasan terhadap 100 pemrakarsa yang memiliki izin lingkungan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 6 persen diantaranya tidak beroperasi. Sebanyak 23 persen memperoleh hasil tidak taat dan memperoleh Sanksi Administratif Paksaan dari Pemerintah. Selebihnya mendapat kategori taat bahkan memperoleh peringkat dalam Proper baik Proper Biru, Hijau, maupun Emas.



II.4.5.5 Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam bidang pengelolaan persampahan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki produk hukum melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan gubernur ini menetapkan target pengurangan dan target penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga tingkat provinsi hingga per tahun hingga tahun 2025. Diharapkan target pengelolaan sampah dapat mencapai 100 persen melalui pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen. Disadari bersama bahwa lingkungan dan pembangunan merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan, sehingga Gubernur bersama DPRD bersinergi dalam harmonisasi membuat kebijakan yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Produk hukum bidang lingkungan lainnya terangkum dalam tabel 2.4.3.

Tabel 2.4. 3 Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020-2023

No.	Jenis Produk	Nomor dan Tanggal	Tentang	Dokumen
1.	Peraturan Daerah	Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 27 April 2020	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040	Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040
2.	Peraturan Daerah	Nomor 10 Tanggal 30 Desember 2020	Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i>	-



No.	Jenis Produk	Nomor dan Tanggal	Tentang	Dokumen
3.	Peraturan Daerah	Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021	Perlindungan Lingkungan Geologi Dan Pengembangan Taman Bumi (<i>Geopark</i>)	-
4.	Peraturan Gubernur	Nomor 32 Tanggal 20 Mei Tahun 2020	Pedoman Pengendalian Pencemaran Air Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Budidaya Tambak Udang	-
5.	Peraturan Gubernur	Nomor 37 Tanggal 29 Mei 2020	Pedoman Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-
6.	Peraturan Gubernur	Nomor 48 Tanggal 16 Juli 2020	Pedoman Umum Program Pengembangan Rumah Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease 19</i> (Covid-19) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020	-
7.	Peraturan Gubernur	Nomor 52 Tanggal 27 Juli 2020	Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022	-
8.	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	Nomor 2 Tanggal 27 Februari 2023	Pengelolaan Wilayah Konservasi Keanekaragaman Hayati	-

Sumber: JDIH Babel, 2022



II.4.5.6 Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penegakan hukum terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan terus dilaksanakan. Terkait dengan bencana kebakaran hutan dan lahan yang merugikan negara baik dari sisi keuangan maupun lingkungan serta keselamatan masyarakat, pada bulan Oktober 2023 Mapolres Belitung telah menahan seorang terduga pelaku pembakaran lahan dengan tujuan pembukaan lahan yang menyebabkan terjadinya karhutla.

Aksi Penegakan Hukum lain yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah terhadap pelaku perambahan illegal di Kawasan Hutan Lindung Sungai Sembulan, dan pelaku terancam hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebanyak 7,5 miliar. Terduga pelaku memiliki peran penting dalam perambahan hutan illegal sebagai yang memberi perintah dan memfasilitasi perambahan Hutan Lindung Sungai Sembulan Desa Penagan.

II.4.5.7 Program SEMARAK BABEL

Program SEMARAK BABEL (Semangat Menanam Rakyat Bangka Belitung) diinisiasi oleh Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung **BAPAK Dr. SAFRIZAL ZA,M.Si.** yang berangkat dari kerusakan lingkungan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta upaya untuk peningkatan kualitas tutupan lahan serta program untuk mengurangi inflasi daerah. Menurut Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung gerakan SEMARAK BABEL ini selain melakukan berbagai upaya perbaikan kualitas tutupan lahan dengan *Leading Sector* Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Babel Menanam) dengan melakukan penanaman di lahan kritis, juga dilakukan penanaman komoditas pertanian untuk mengatasi inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya melakukan penanaman bibit cabe dan buah-buahan secara massif dengan *Leading Sector* Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (untuk Babel Berkebun). Sejak di *launching* program ini berbagai pihak dilibatkan secara aktif diantaranya Bupati dan Walikota, Kapolda, Danrem serta jajarannya, dan peran serta



masyarakat secara massif sehingga inovasi yang di inisiasi Gubernur ini dapat diterapkan secara inklusif bagi perbaikan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung.

II.4.5.8 Peningkatan Kapasitas Kebencanaan

Menurut Ratnasari dan Wildawati, 2022, faktor ancaman dan kerentanan terkait risiko bencana merupakan dua hal yang sifatnya sulit untuk diubah, terkait dengan anggaran dan sosial ekonomi masyarakat. Satu faktor yang lebih memungkinkan dilakukan adalah kapasitas, baik itu kapasitas masyarakat maupun pemerintah. Peningkatan kapasitas menjadi upaya yang realistis dalam mengurangi risiko bencana.

Kapasitas merupakan kekuatan dan sumber daya yang ada pada tiap individu dan lingkungan yang mampu mencegah, melakukan mitigasi, siap menghadapi dan pulih dari akibat bencana dengan cepat. Lebih jauh menurut Ratnasari dan Wildawati, 2022, berdasarkan fakta dari kejadian bencana, yang menyelamatkan masyarakat dari bencana, lebih dari 96% adalah dirinya sendiri, keluarga, tetangga dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu untuk memperkecil risiko bencana yang ditimbulkan adalah dengan cara meningkatkan kemampuan/kapasitas untuk menghadapi ancaman bencana dengan cara mengurangi tingkat kerentanan. Pelibatan masyarakat tidak lagi sebagai objek dalam bencana, tetapi sudah menjadi subjek yang berdaya. Karena itu BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan upaya penanggulangan bencana dengan melaksanakan peningkatan kapasitas bidang kebencanaan seluas-luasnya kepada *stakeholder* dan lintas sektor.



Gambar 2.4. 25 Kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana: Penanganan Bencana Banjir.
Sumber: BPBD Babel, 2023



Gambar 2.4. 26 Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Sumber: BPBD Babel, 2023



Gambar 2.4. 27 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana bagi Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Belitung.

Sumber: BPBD Babel, 2023

II.4.5.9 Gerakan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Organisasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Beberapa kegiatan oleh masyarakat/organisasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan berupa gerakan lingkungan hidup terangkum dalam tabel 2.4.4 berikut.



Tabel 2.4. 4 Kegiatan/Program yang Diinisiasi Masyarakat

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
1	Pengolahan Sampah Organik dan Anorganik harian di Markas BECAK-BABEL	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
2	Budidaya Maggot Black Soldier Fly di Markas BECAK-BABEL	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
3	Pembinaan Rutin Komunitas dan Pemuda Peduli Lingkungan	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
4	Pembinaan dan Pendampingan Gerakan Sedekah Sampah AL-Bina Bangka Desa Sempan	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
5	Edukasi Pendidikan dan Sekolah Adiwiyata (Pengolahan Sampah / Perubahan Iklim / Peduli Lingkungan)	BECAK BABEL	Pelajar	2023-2024
6	Edukasi Masyarakat Pengelolaan Sampah rutin berkala	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
7	Aksi Bersih Pantai / Cleanup rutin berkala	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
8	Penghijauan / Penanaman / Rehabilitasi Lahan	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
9	Aksi Bersih Masjid (SIMAS) dan Bantuan peralatan kebersihan di 30 masjid	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
10	Pelestarian Lingkungan dan Edukasi Masyarakat di Pulau Nangka - Bangka Tengah 2023	BECAK BABEL	Penduduk Pulau	2023-2024



No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
11	Pelestarian Lingkungan dan Edukasi Masyarakat di Pulau Semujur - Bangka Tengah 2023	BECAK BABEL	Penduduk Pulau	2023-2024
12	Pelestarian Lingkungan dan Edukasi Masyarakat di Pulau Tinggi - Bangka Selatan 2024	BECAK BABEL	Penduduk Pulau	2023-2024
13	Pemasangan 1000 Lubang Resapan Biopori di Kabupaten Bangka 2023	BECAK BABEL dan BWS Babel	Pelajar	2023-2024
14	Pemasangan 1000 Lubang Resapan Biopori di Kota Pangkalpinang Bangka 2024	BECAK BABEL dan BWS Babel	Pelajar	2023-2024
15	Rembuk Sampah dan Pembentukan Forum Pelajar Peduli Sampah tingkat SLTA se-Sungailiat	BECAK BABEL	Pelajar	2023-2024
16	Peringatan Hari Peduli Sampah 2023 Aksi bersih sungai di Sungailiat	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
17	Peringatan Hari Peduli Sampah 2024 Aksi bersih muara di pesisir nelayan Sungailiat	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
18	"Green Employee Involvement" Aksi bersih sampah memperingati HLH Sedunia 2024	BECAK BABEL dan PT PLN UIW Babel	Karyawan PLN	2023-2024



No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
19	Peringatan World Cleanup Day, Aksi bersih sampah di Pantai Temberan Kab. Bangka 2023	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
20	Sosialisasi dan Edukasi Proklam (Program Kampung Iklim) di Desa Zed Kab. Bangka 2023	BECAK BABEL dan KEMENDES PDDT	Masyarakat Pedesaan	2023-2024
21	Sosialisasi dan Edukasi Proklam (Program Kampung Iklim) di Desa Gunung Muda Kab. Bangka 2024	BECAK BABEL dan KEMENDES PDDT	Masyarakat Pedesaan	2023-2024
22	Sosialisasi dan Edukasi Proklam (Program Kampung Iklim) di Desa Balun Ijuk Kab. Bangka 2024	BECAK BABEL dan KEMENDES PDDT	Masyarakat Pedesaan	2023-2024
23	Sosialisasi dan Edukasi Proklam (Program Kampung Iklim) di Desa Pagarawan Kab. Bangka 2024	BECAK BABEL dan KEMENDES PDDT	Masyarakat Pedesaan	2023-2024
24	Sosialisasi dan Edukasi Proklam (Program Kampung Iklim) di Desa Kimak Kab. Bangka 2024	BECAK BABEL dan KEMENDES PDDT	Masyarakat Pedesaan	2023-2024
25	Pembuatan dan Penyerahan Drop Box Bank Sampah di Sungailiat 2023	BECAK BABEL dan DLH Bangka	Pelajar	2023-2024
26	Kemah Tingkat Dasar Relawan Lingkungan 2023-2024	BECAK BABEL	Pemuda/Mahasiswa	2023-2024



No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
27	Pelatihan SDM Pokdarwis Desa Air Anyir terkait Pengolahan ekowisata dan sampah pantai	BECAK BABEL dan PJBS PLTU Bangka	Masyarakat Pesisir	2023-2024
28	Pelatihan Ketahanan Pangan Kelompok Ternak Bebek Desa Air Anyir	BECAK BABEL dan PJBS PLTU Bangka	Masyarakat Pesisir	2023-2024
29	Pelatihan Pembuatan PUPUK dari limbah FABA di Desa Namang-Bangka Tengah	BECAK BABEL dan PJBS PLTU Bangka	Masyarakat Pesisir	2023-2024
30	Pelatihan Masyarakat Pesisir pengolahan sumberdaya kelautan dan perikanan Desa Air Anyir	BECAK BABEL dan PJBS PLTU Bangka	Masyarakat Pesisir	2023-2024
31	Gerakan Qurban minim sampah	BECAK BABEL dan BKPRMI Bangka	Masyarakat	2023-2024
32	Sosialisasi Gerakan Sedekah Sampah dan Barang bekas	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
33	Festival Tanjung Sunor Lestari, Peringatan Hari Mangrove Se-Dunia di Teluk Kelabat Dalam	BECAK BABEL	Kelompok Nelayan	2023-2024
34	Edukasi mitigasi dan pelaporan bencana bersama petabencana.id	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
35	Pembentukan Masyarakat Peduli Sungai dan Kulong Kabupaten Bangka 2023	KPS BECAK BABEL dan BWS Babel	Masyarakat	2023-2024



No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
36	Pembentukan Forum Peduli Sungai dan Kulong Kabupaten Bangka Tengah 2023	KPS BECAK BABEL dan BWS Babel	Masyarakat	2023-2024
37	Aksi Pembagian 4000 tumbler (botol air minum) kurangi sampah plastik	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
38	Pelatihan Eco-Brick di sekolah dan Kampus	BECAK BABEL	Pelajar/Mahasiswa	2023-2024
39	Sosialisasi Peduli Sampah dan Peduli Sungai di Kelurahan Kenanga	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
40	Peringatan Hari Sungai Internasional (Susur Sungai dan Penghijauan sepadan Sungai) 2023	KPS BECAK BABEL dan BWS Babel	Masyarakat	2023-2024
41	Peringatan Hari Ari Sedunia (Penanaman Pohon di sepadan sungai dan kolong) 2024	KPS BECAK BABEL dan BWS Babel	Masyarakat	2023-2024
42	Pemetaan potensi sampah Laut Kep. Bangka Belitung bersama TKNPSL	BECAK BABEL dan TKNPSL	Instansi Pemerintah dan Swasta	2023-2024
43	Penerbitan Buku "BSF, Integrated Urban Farming Ramah Lingkungan" 2023	BECAK BABEL dan PT RBT	Masyarakat	2023-2024



No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
44	Pelatihan Perikanan Tangkap Kepiting Remangok ramah lingkungan Desa Pagarawan	BECAK BABEL	Kelompok Nelayan dan Pokdakan	2023-2024
45	Ngupi Bekisah "Kaderisasi Generasi Peduli Lingkungan melalui Adiwiyata" SDN 24 Sungailiat 2023	BECAK BABEL	Pelajar	2023-2024
46	Jambore Relawan Lingkungan III FORDAS Babel 2023	BECAK BABEL	Pemuda/Mahasiswa	2023-2024
47	Kampanye Earth Hour di Bangka Belitung	BECAK BABEL	Pemuda/Mahasiswa	2023-2024
48	Kampanye dan MOU Pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan di Pantai Temberan	BECAK BABEL dan UMBB	Masyarakat Pesisir	2023-2024
49	Penanaman 3000 Magrove di Lintas Timur Bangka	BECAK BABEL dan UBB	Masyarakat	2023-2024
50	Sosialisasi Relevansi Hukum Lingkungan dalam Pelestarian Lingkungan	BECAK BABEL dan UBB	Pelajar	2023-2024
51	Beasiswa Kader Konservasi Relawan Lingkungan Prodi KSDA Unmuh Babel 2024	FKPDAS Babel, UMBB, BECAK Babel	Pemuda/Mahasiswa	2023-2024
52	Ngupi Bekisah "Spirit World Water Forum dan Isu Lingkungan-Tambang Bangka" 2024	MLH PW Muhammadiyah Babel	Pemuda/Mahasiswa	2023-2024



No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
53	kumpul dan kelola sampah plastik (grebek sampah) di lingkungan sidodadi, Sungailiat Kab.Bangka	ibu siti januarsih dan masyarakat	masyarakat	2022-2024
55	Budidaya Maggot Black Soldier Fly di Bukit Besar Girimaya Pangkalpinang	Bapak Didit Kelompok Sahabat BSF farms	Masyarakat	2022-2024
56	Aktif membantu menangani bencana seperti karhutla, laka laut, orang hilang/tenggelam, evakuasi bencana, penyediaan air bersih pada musim kemarau	Bapak M. Achin, Laskar Sekaban	Masyarakat	2011-2024

Sumber: DLHK Babel, 2024 dan dari berbagai sumber.



II.4.5.10 Pelaksanaan Program Kampung Iklim

Program Kampung Iklim atau disingkat ProKlim telah dilaksanakan mulai tahun 2017 hingga sekarang (Tahun 2024). ProKlim dikenal oleh masyarakat sebagai program yang memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi untuk mendukung target penurunan emisi GRK nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim berbasis tapak/administrative, namun sejak tahun 2023 ProKlim bertransformasi menjadi program yang berbasis komunitas. Program Kampung Iklim yang telah dilaksanakan beserta lokasinya dapat dilihat pada tabel 2.4.5.

Tabel 2.4. 5 Daftar Lokasi ProKlim Tahun 2017-2022

No.	LOKASI PROKLIM
A.	PENERIMA PIAGAM KATEGORI PRATAMA
1	Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3	Dusun Tanjung Ratu, Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Terantang Tiga, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5	Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung – dlhk prov. kep. babel
6	Dusun Selumar, Desa Selumar, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung – dlh kab. belitung
7	Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung – dlhk prov. kep. babel
8	Lingkungan Jelitik, Kelurahan Jelitik, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung – dlhk prov. kep. babel
9	Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung – bksda sumatera selatan
10	Desa Tuik, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung – bksda sumatera selatan
11	Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung – dlhk prov. kep. babel
12	Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung – dlh kab. bangka barat



13	Desa Mentigi, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung – dlh kab. belitung
14	Desa Jangkang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
B.	PENERIMA PIAGAM KATEGORI MADYA
1	Lingkungan Teluk Uber, Kelurahan Jelitik, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung – dlhk prov. kep. babel

Tabel 2.4. 6 Daftar Lokasi ProKlim yang Diusulkan Tahun 2023

No.	LOKASI PROKLIM
A.	PENERIMA PIAGAM KATEGORI PRATAMA
1	ProKlim Desa Mapur, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF
2	ProKlim Dusun I Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF
3	Dusun Belit Desa Dendang Kecamatan Kelapa kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung_GCF
4	ProKlim Desa Tebing Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF
5	ProKlim Dusun Kemang Masam Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF
6	ProKlim Dusun Rambat Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF
7	ProKlim Desa Beruas Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF
8	ProKlim RW 003, Desa Serdang, Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF
9	ProKlim Dusun 4, Desa Nangka, Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF
10	ProKlim Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF
11	ProKlim Desa Terong Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF
12	ProKlim Desa Kacang Butor Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF
13	ProKlim Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF
14	ProKlim Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15	ProKlim Desa Jangkang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF
B.	PENERIMA PIAGAM KATEGORI MADYA



1	Proklim Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF
2	Proklim Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF
3	Proklim Desa Karya Makmur, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Proklim Dusun 2 Air Tepala, Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5	Proklim Dusun 6 Sidomulyo, Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	Proklim Desa Air Limau, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7	ProKlim Dusun Namang Timur Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF
8	ProKlim Dusun Timur Desa Puput Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF
9	ProKlim Desa Lampur, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10	Proklim Dusun Sampur, Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11	ProKlim RW 03 Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12	ProKlim RW 01 Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13	ProKlim Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14	Proklim Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15	Proklim Desa Seliu, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16	ProKlim Desa Limbongan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF
17	Proklim RW 02, Kelurahan Pasir Garam, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
C.	PENERIMA SERTIFIKAT KATEGORI UTAMA
1	ProKlim Dusun 2 Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung_GCF
2	Proklim RW 01. Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tabel 2.4. 7Daftar Lokasi ProKlim yang Diusulkan Tahun 2024

No.	LOKASI PROKLIM
A.	PENERIMA PIAGAM KATEGORI MADYA
1	ProKlim Desa Pemali, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _ PT. Timah Tbk (Reguler)
2	ProKlim Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)
3	ProKlim Desa Paku, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _ PT. Timah Tbk Wilayah Bangka Selatan (Reguler)
4	ProKlim Dusun 02, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - PT. Timah, Tbk (Reguler)
5	ProKlim Desa Mempaya, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)
6	ProKlim Lingkungan Sidodadi Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)
7	ProKlim Dusun Sadap, Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)
8	ProKlim Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)
9	ProKlim Dusun 4 Pasir Putih, Desa Batu Betumpang, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)
10	ProKlim Desa Suak Gual, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)
11	ProKlim Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)
12	ProKlim RW 03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)
13	ProKlim Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)
14	ProKlim Desa Lintang, Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)
B.	PENERIMA SERTIFIKAT KATEGORI UTAMA
1	ProKlim Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - PT. Timah, Tbk - TB. Batu Besi (Reguler)
2	ProKlim RW.002 Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung - Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Pangkal Balam (Reguler)
3	ProKlim Dusun Namang Barat Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)
C.	LOKASI YANG DIDAFTARKAN OLEH LEMBAGA LAIN
1	ProKlim Dusun Telang Dalam Desa Gunung Muda Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	ProKlim Dusun Sinchong Desa Gunung Muda Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3	ProKlim Dusun Gunung Muda Desa Gunung Muda Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	ProKlim Dusun 1 Desa Zed Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5	ProKlim Dusun 3 Desa Zed Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	ProKlim Dusun 4 Desa Zed Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



II.4.5.11 Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB)

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas dalam memahami kebijakan dan strategi optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas, Memahami konsep dasar Kampung Keluarga Berkualitas, Memahami pengorganisasian penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, Memahami mekanisme kerja penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, Memahami pencatatan dan pelaporan Kampung Keluarga Berkualitas dan Memahami monitoring dan evaluasi Kampung Keluarga Berkualitas.

Kampung keluarga berkualitas merupakan program inovatif dari pemerintah daerah setempat dengan melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam penanganan kasus stunting.



II.5 Perkotaan

Secara administrasi, wilayah dapat berupa nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Secara fungsional, wilayah dapat berupa kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu. Di dalam peraturan perundang-undangan perkotaan didefinisikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (Kustiwan, 2014). Pemaknaan perkotaan dalam definisi tersebut sejalan dengan pengertian kota yang sering menjadi acuan di Indonesia, yaitu tempat di mana konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadinya pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya.

Kota berdasarkan fungsinya dapat diklasifikasikan sebagai *Administrative Towns* (Kota administratif), *Cultural Towns* (Kota Budaya), *Industrial Towns* (Kota Industri), *Trade and Transport Towns* (Kota Perdagangan dan Transportasi), dan *Defense Town* (Kota pertahanan) (Živković, 2020). Kota Administratif merupakan kota yang berfungsi sebagai ibukota negara dan sebagai pusat kantor pemerintahan. Kota budaya merupakan kota dengan fungsi budaya atau agama atau pendidikan atau rekreasi. Kota Industri merupakan kota yang berkembang karena adanya industri. Kota Perdagangan dan Transportasi merupakan kota-kota yang terkenal sebagai pusat perdagangan dan pengembangan moda transportasi. Kota Pertahanan merupakan kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan militer.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kota administratif terdiri atas ibukota-ibukota kabupaten/kota atau provinsi seperti Pangkalpinang, Mentok, Koba, Toboali, Sungailiat, Tanjungpandan, dan Manggar yang berfungsi sebagai pusat pelayanan administratif sehingga kantor-kantor pelayanan terkumpul di wilayah-wilayah tersebut. Kota budaya dapat



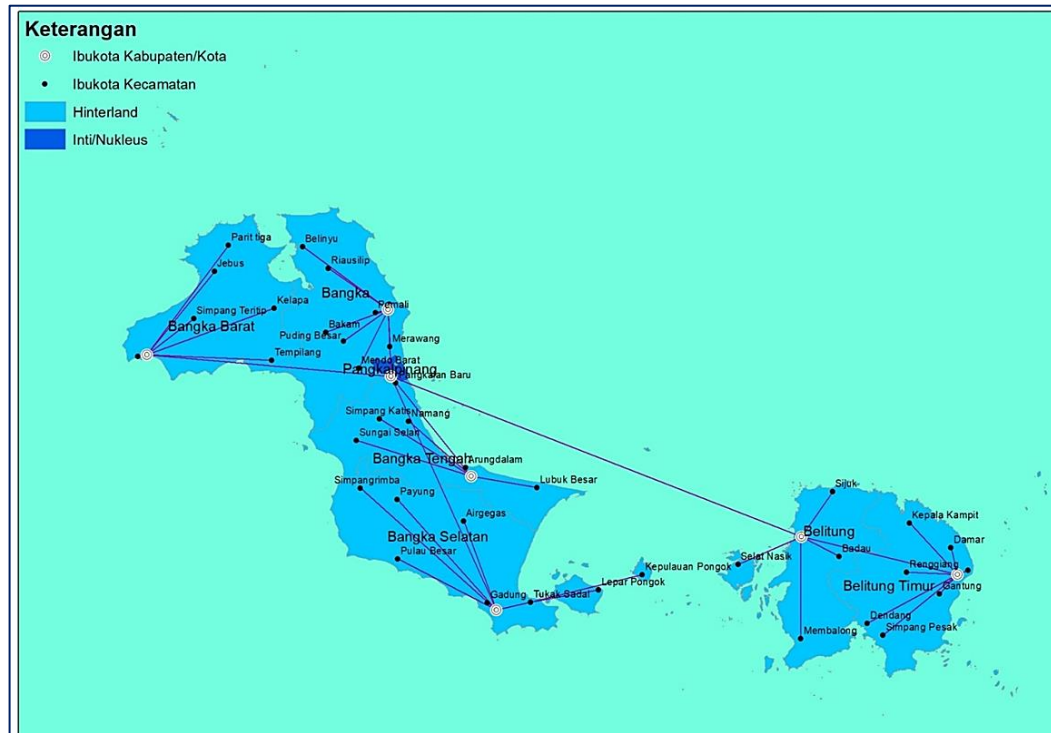
ditemukan di Kota Mentok yang banyak ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah dari masa lalu. Hal ini dicirikan dari bentuk bangunan yang arsitekturnya dari masa lampau yang masih banyak.

Berdasarkan konsep wilayah nodal yang merupakan konsep wilayah fungsional dengan asumsi bahwa suatu wilayah diumpamakan sebagai suatu “sel hidup” yang mempunyai plasma dan inti, inti (pusat simpul) merupakan pusat-pusat pelayanan atau pemukiman, sedangkan plasma adalah daerah belakang (*periphery/hinterland*) yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan mempunyai hubungan fungsional. Konsep wilayah nodal lebih berfokus pada peran pengendalian pengaruh pusat serta hubungan ketergantungan pusat (*nucleus*) dan elemen-elemen sekelilingnya (tidak terlalu mempermasalahkan batas wilayah). Pusat wilayah berfungsi sebagai tempat terkonsentrasinya penduduk (permukiman), pusat pelayanan terhadap daerah *hinterland*, pasar bagi komoditas-komoditas pertanian maupun industri, dan lokasi pemusatan industri manufaktur. Daerah *hinterland* berfungsi sebagai pemasuk bahan-bahan mentah atau bahan baku, pemasok tenaga kerja melalui proses urbanisasi dan *communting*, daerah pemasaran barang dan jasa industri manufaktur, dan penjaga keseimbangan ekologis.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menurut konsep nodal, Kota Pangkalpinang adalah pusat wilayah (inti) yang memiliki *hinterland* seperti kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Kabupaten-kabupaten *hinterland* juga memiliki inti, seperti Kabupaten Bangka memiliki pusat/inti di Kecamatan Sungailiat, sedangkan *hinterland*-nya adalah Kecamatan disekitarnya seperti Kecamatan Belinyu, Merawang, Mendo Barat, Bakam, Puding Besar dan Riau Silip. Wilayah-wilayah *hinterland* tersebut mendukung kegiatan di kawasan inti untuk bahan mentah seperti pasir timah yang nanti akan dilebur di kawasan inti, hasil perkebunan seperti tandan sawit, lada, karet dan lain-lain yang akan diolah menjadi barang setengah jadi di kawasan inti, hasil-hasil pertanian pangan dan hortikultura seperti padi yang diolah dikawasan inti untuk menjadi beras ataupun sayuran yang langsung dijual



ke kawasan inti. Gambar berikut menyajikan jaringan Sistem Wilayah Nodal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2.5. 1 Sistem Wilayah Nodal Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: (DLHK, 2024)

Pembangunan perkotaan, sesuai faktanya adalah tindakan memperbaiki kondisi kehidupan yang diperlukan untuk beristirahat dan bekerja, untuk fasilitas kesehatan dan pendidikan, untuk berbagai pertukaran dan penyediaan makanan, untuk perpindahan penduduk antara tempat tinggal dan tempat kerja mereka. Konstruksi, pembangunan, dan pertumbuhan perkotaan terbentuk oleh berbagai macam faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang saling berinteraksi, mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan menimbulkan konsekuensi pada ekologi, spesies, populasi, fungsi ekosistem, hingga kesehatan dan kesejahteraan penduduk kota (Parris, 2016). Pembangunan perkotaan yang identik dengan penghilangan tutupan vegetasi dan peningkatan area lahan terbangun yang kedap air cenderung mengganggu keberadaan habitat alami yang telah ada sebelumnya. Fragmentasi dan isolasi habitat oleh jalan dan infrastruktur



perkotaan lainnya cenderung membatasi penyebaran individu dari satu bidang habitat ke bidang habitat lainnya (Parris, 2016). Selain itu, pembangunan infrastruktur perkotaan juga dapat mengganggu berbagai fungsi ekosistem sehingga kemampuan alam untuk menyediakan layanan atau jasa lingkungan semakin menurun. Bertambahnya lapisan kedap air sudah dipastikan mengganggu berbagai siklus alami yang ada di alam, seperti siklus hidrologi (Septriana et al., 2020), siklus hara, dan siklus-siklus alami lainnya. Berbagai dampak negatif pada lingkungan yang berpotensi muncul akibat terganggunya berbagai siklus tersebut, di antaranya adalah banjir atau kekeringan, berkurangnya persediaan air bersih, berkurangnya kesuburan tanah, dan hilang atau musnahnya suatu spesies.

Berbagai konsekuensi akibat pembangunan perkotaan juga terjadi pada aspek ekonomi dan sosial-budaya penduduk di perkotaan. Pembangunan perkotaan pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup penduduk yang semakin meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas ekonomi yang lengkap di perkotaan telah menarik banyak penduduk untuk tinggal di wilayah perkotaan sehingga terjadi fenomena urbanisasi yang menyebabkan kepadatan penduduk di perkotaan (*urban area*) jauh lebih tinggi daripada daerah pedesaan (*rural area*). Kondisi tersebut menyebabkan tuntutan kebutuhan dan gaya hidup yang lebih tinggi di perkotaan sehingga berdampak pada aspek ekonomi dan sosial-budaya di perkotaan. Selain kondisi perekonomian yang lebih maju, konsekuensi negatif juga terjadi di daerah perkotaan, seperti dampak-dampak negatif yang telah disebutkan di atas, pencemaran udara, kepadatan lalu lintas, pengangguran, munculnya area kumuh, hingga tindakan kriminalitas.

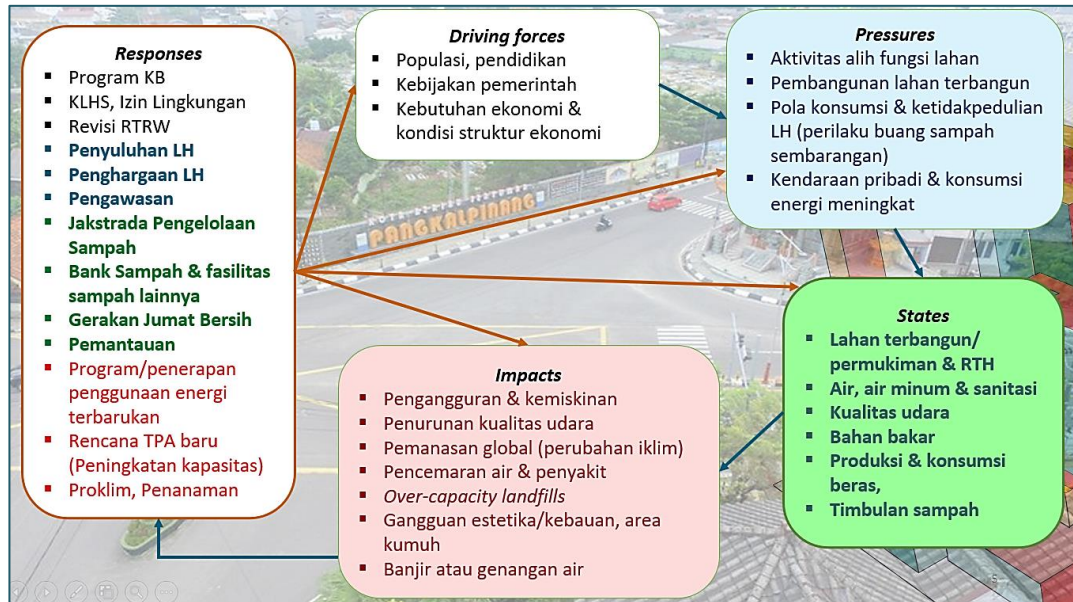
Kota-kota di negara-negara berkembang menyadari permasalahan urbanisasi yang serius bukan saja karena tidak diterapkannya konsep pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, namun juga karena tidak memadainya kebijakan-kebijakan pengelolaan kota yang diperlukan oleh



masyarakat. Hal tersebut menyebabkan menjamurnya kawasan tidak terstruktur di sekitar kota, tanpa layanan perkotaan yang diperlukan untuk operasionalnya seperti jaringan air minum, listrik, dan sistem jalan raya.

Dalam rangka mengoptimalkan pengendalian pembangunan perkotaan di Kepulauan Bangka Belitung, maka analisis masalah perkotaan diperlukan untuk memahami berbagai macam penyebab, kondisi terkini, dampak-dampak yang ditimbulkan, maupun berbagai upaya yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil analisis dan pemahaman tersebut, maka berbagai macam alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah perkotaan dapat dirumuskan.

Kerangka DPSIR menentukan rantai hubungan sebab akibat antara faktor sosial ekonomi (*driving forces*) yang mendorong aktivitas antropogenik yang memberi tekanan (*pressures*) pada kondisi lingkungan atau keadaan (*states*), dan memberikan konsekuensi pada lingkungan (*impacts*) sehingga perlu dilakukan tindakan (*responses*) untuk meningkatkan keadaan tersebut (Ramos et al., 2018). Berdasarkan pertimbangan tersebut, analisis masalah perkotaan di Kepulauan Bangka Belitung dilakukan menggunakan kerangka DPSIR. Gambar berikut menyajikan secara ringkas kerangka DPSIR yang digunakan untuk analisis perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2.5. 2 Kerangka DPSIR Analisis Perkotaan

II.5.1 Driving Forces

Faktor sosial ekonomi yang selalu menjadi *driving forces* dalam masalah perkotaan, di antaranya adalah jumlah penduduk dan pertumbuhannya, tingkat pendidikan, kebutuhan ekonomi, dan struktur ekonomi daerah. Selain itu, sebagaimana dideskripsikan di bagian sebelumnya, berbagai kebijakan pengelolaan kota yang kurang memadai juga menjadi salah satu faktor pendorong yang akhirnya menyebabkan perubahan kondisi lingkungan di perkotaan (bukan hanya berdampak positif, namun juga memiliki dampak ikutan yang negatif).

II.5.1.1 Kependudukan

Jumlah penduduk semakin meningkat dari tahun ke tahun, meskipun laju pertumbuhannya melambat. Penduduk yang semakin padat ini memiliki kebutuhan yang semakin meningkat sehingga menyebabkan peningkatan berbagai macam aktivitas antropogenik (kegiatan ekonomi). Jumlah penduduk, pertumbuhan, dan kepadatannya di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.



Tabel 2.5. 1 Penduduk, Pertumbuhan, dan Kepadatannya Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
Bangka	3.016,85	337,9	1,21	112
Belitung	2.270,71	189,2	1,33	83
Bangka Barat	2.851,41	212,9	1,36	75
Bangka Tengah	2.259,98	207,4	1,44	92
Bangka Selatan	3.598,24	205,8	1,31	57
Belitung Timur	2.588,40	131,3	1,14	51
Pangkalpinang	104,54	227,3	1,36	2.174
Kep. Bangka Belitung	16.690,13	1.511,8	1,31	91

Sumber: (BPS, 2024)

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Bangka memiliki jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, namun jika dibandingkan dengan luas daerah, maka penduduk terpadat ada di ibukota provinsi, yaitu Pangkalpinang. Pertumbuhan penduduk tertinggi juga terjadi di Pangkalpinang. Fenomena ini terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, di mana kota selalu menjadi pusat berbagai macam kegiatan sosial-ekonomi dan menarik penduduk untuk pindah ke kota. Kondisi ini juga sama seperti pola urbanisasi yang umumnya terjadi di negara-negara berkembang (Horvat et al., 2018).

Berdasarkan konsep nodal sebagaimana tergambar dalam Gambar 2.5. 1, wilayah-wilayah inti di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandai dengan titik-titik pusat pertumbuhan ekonomi, yaitu Kota Pangkalpinang yang merupakan ibukota provinsi dan kota-kota yang ada di keenam kabupaten. Perbandingan luas wilayah perkotaan yang merupakan titik pusat pertumbuhan ekonomi/perkembangan wilayah beserta persebaran penduduknya di berbagai wilayah perkotaan tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 2.5. 2 Persebaran Penduduk Perkotaan Tahun 2023

Ibukota Kabupaten/Kota	Luas Ibukota (km ²)	Luas Total (km ²)	Persentase Luas Ibukota (%)	Penduduk Di Perkotaan (Jiwa)	Persentase Penduduk Perkotaan (%)
Pangkalpinang	104,54	104,54	100	226.297	100%
Sungailiat	146,44	3.016,85	4,8	97.087	29%
Koba	391,59	2.259,98	17,3	45.232	22%
Toboali	98,42	3.598,24	2,7	81.240	39%
Muntok	505,94	2.851,41	17,7	54.239	25%
Tanjungpandan	891,05	2.270,70	39,2	108.105	57%
Manggar	229	2.588,82	8,85	40.035	30%

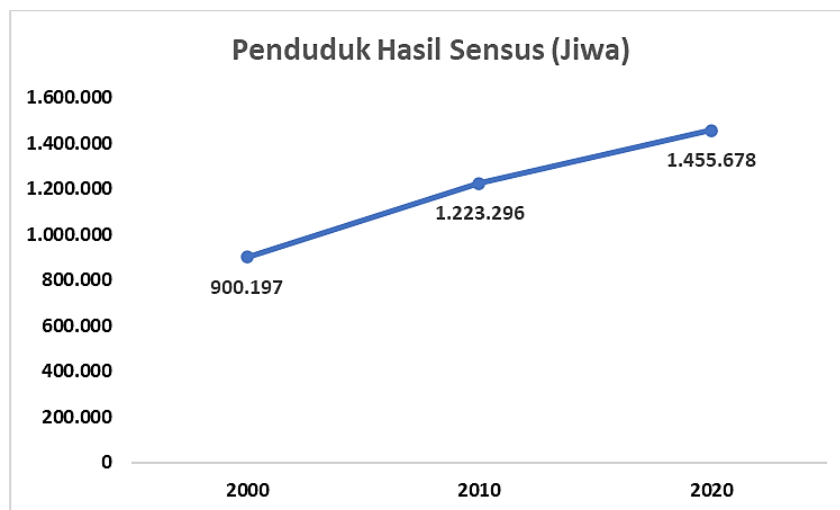
Sumber: (BPS, 2024; SIPSN, 2023b)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat fenomena sebuah perkotaan, yaitu penggunaan lahan yang tidak terlalu besar dari suatu wilayah, namun memiliki jumlah penduduk yang relatif lebih besar dari wilayah lainnya dalam suatu kabupaten/kota. Berdasarkan data yang disajikan, tingkat kepadatan penduduk di Ibukota Kabupaten/Kota tertinggi ada di Kota Pangkalpinang yang juga merupakan ibukota dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Fenomena ini terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, di mana kota selalu menjadi pusat dari berbagai macam kegiatan sosial-ekonomi dan menarik penduduk untuk pindah ke perkotaan.

Kota diklasifikasikan berdasarkan jumlah penduduknya. Kategori kota kecil adalah kota dengan penduduk berjumlah 20.000–50.000 jiwa, kota sedang dengan jumlah penduduk 50.000–100.000 jiwa, Kota Besar dengan jumlah penduduk 100.000–1.000.000 jiwa, kota metropolitan dengan jumlah penduduk 1.000.000–5.000.000 jiwa dan Kota megapolitan dengan jumlah penduduk diatas 5.000.000 jiwa. Berdasarkan kategori ini Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan dikategorikan sebagai kota besar, Muntok, Sungailiat dan Toboali dikategorikan sebagai kota sedang, sementara Manggar dan Koba dikategorikan sebagai kota kecil.



Jika dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya, maka jumlah penduduk dan kepadatannya di Kepulauan Bangka Belitung semakin meningkat, meskipun laju pertumbuhannya semakin rendah. Kenaikan jumlah dan kepadatan penduduk ini menjadi faktor pendorong berbagai macam aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin bertambah, bukan lagi sekedar kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Gambar berikut menyajikan tren pertambahan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan hasil sensus penduduk sepuluh tahunan. Terlihat bahwa populasi semakin meningkat, sementara laju pertumbuhan penduduk semakin melambat.



Gambar 2.5. 3 Tren Pertambahan Penduduk di Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: (BPS, 2002, 2010, 2021a), data telah diolah kembali

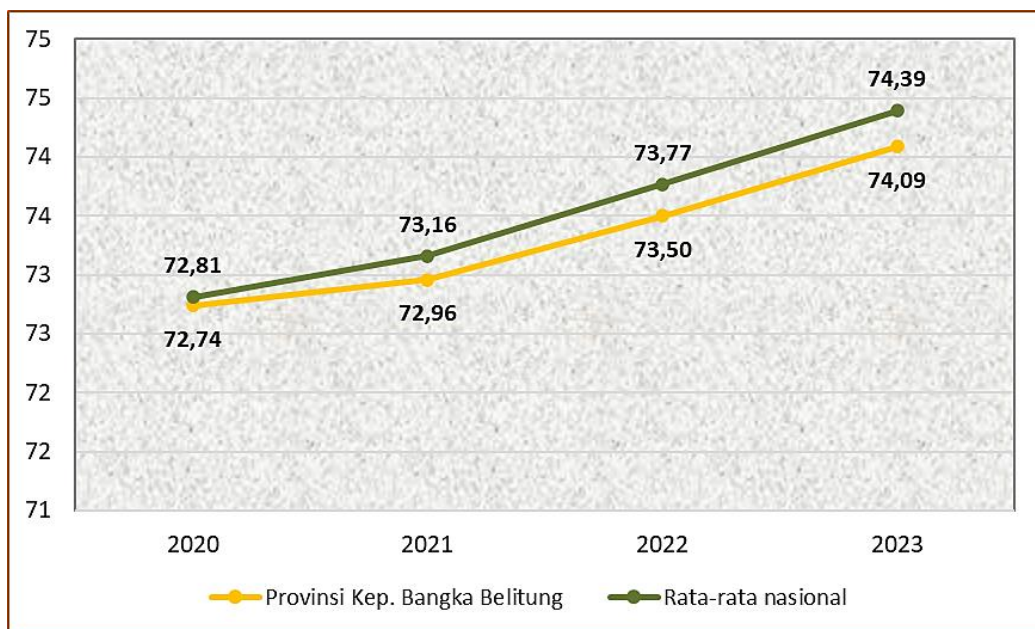
II.5.1.2 Tingkat pendidikan

Pertambahan jumlah penduduk harus diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu modal pembangunan agar aktivitas ekonomi yang dilakukan berlangsung secara berkelanjutan. Kondisi SDM ini menjadi salah satu faktor pendorong terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Kualitas SDM yang menjalankan roda perekonomian dan pembangunan akan menentukan sifat kegiatan ekonomi yang dilakukan,



apakah bersifat merusak lingkungan ataukah bersifat produktif dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kualitas SDM sering menjadi tantangan utama di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, yang pada dasarnya adalah investasi tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi/kesejahteraan penduduk (Yuliansyah, 2021). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran gabungan dari pencapaian rata-rata suatu negara/daerah dalam tiga aspek dasar pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup (WHO, 2011). Dengan demikian, IPM adalah salah satu bentuk capaian pembangunan kualitas SDM. Kondisi capaian kualitas SDM ini dapat menjadi faktor pendorong berbagai macam aktivitas antropogenik untuk pembangunan ekonomi. Gambar berikut menyajikan tren IPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama empat tahun terakhir.



Gambar 2.5. 4 IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2023

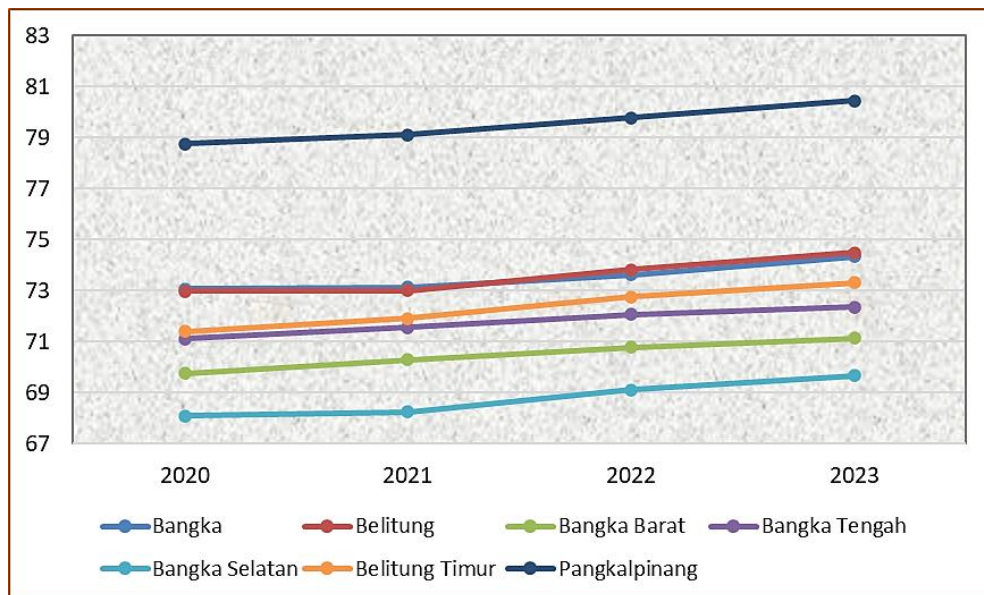
Sumber: (BPS, 2024), data telah diolah kembali

Pada gambar di atas, terlihat bahwa IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kecenderungan untuk meningkat, akan tetapi selalu ada di bawah rata-rata IPM nasional, bahkan *gap*-nya semakin besar. Kondisi



ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan manusia di Kepulauan Bangka Belitung.

Persebaran tren nilai IPM di tujuh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disajikan pada gambar berikut. Terlihat bahwa nilai IPM tertinggi ada di Kota Pangkalpinang yang merupakan ibukota provinsi, kemudian disusul Kabupaten Bangka yang penduduknya paling besar dan berbatasan langsung dengan Kota Pangkalpinang, serta Kabupaten Belitung yang ibukota kabupatennya, yaitu Tanjungpandan, merupakan pusat kegiatan perekonomian di Pulau Belitung.



Gambar 2.5. 5 Tren IPM di Tujuh Kabupaten/Kota 2020-2023

Sumber: (BPS, 2024), data telah diolah kembali

Pada gambar di atas terlihat bahwa persebaran nilai IPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejalan dengan konsep wilayah perkotaan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu konsep nodal. Kota Pangkalpinang yang merupakan ibukota provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi diiringi dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya, termasuk fasilitas pendidikan serta perkembangan kondisi sosial-budaya di perkotaan, memiliki nilai IPM tertinggi, jauh di atas wilayah lainnya. Dalam hal ini, Kota



Pangkalpinang adalah inti atau pusat wilayah dalam konsep nodal. Kabupaten Bangka dengan penduduk terbesar (berdasarkan definisi kota yang dianut masyarakat luas di Indonesia, maka Bangka termasuk wilayah perkotaan), yang lokasinya berbatasan langsung dengan Pangkalpinang, memiliki perkembangan yang lebih pesat daripada daerah lainnya karena menjadi daerah *hinterland* yang aktivitasnya langsung terhubung dengan pusat/inti. Begitu juga dengan Belitung yang ibukotanya, Tanjungpandan, merupakan wilayah perkotaan dengan perkembangan yang lebih pesat daripada daerah lainnya di Pulau Belitung. Sebaliknya, Bangka Selatan yang ibukotanya jauh dari inti/pusat provinsi cenderung memiliki IPM yang rendah. Pola persebaran nilai IPM ini patut menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan di daerah.

Dimensi penyusun IPM terdiri atas:

- Umur panjang dan hidup sehat yang diindikasikan dengan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir,
- Pengetahuan yang diilustrasikan dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,
- Standar hidup layak yang diindikasikan dengan pengeluaran riil per kapita.

Di antara ketiga dimensi penyusun IPM, dimensi pengetahuan memegang peranan sangat penting dalam rangka menjalankan aktivitas perekonomian. Berikut ini adalah ilustrasi dimensi pengetahuan di Kepulauan Bangka Belitung yang diindikasikan dengan rata-rata lama sekolah. Di antara tujuh kabupaten/kota, rata-rata lama sekolah terbesar dari tahun ke tahun ada di Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah di Pangkalpinang yaitu 10,13 tahun (setingkat dengan SMA), sementara rata-rata lama sekolah provinsi pada tahun 2021 adalah 8,08 tahun (setingkat dengan SMP). Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas pendidikan (aspek sosial-budaya) di perkotaan cenderung lebih baik daripada daerah lainnya. Kondisi ini juga menjadi faktor pendorong yang mengarahkan ke perubahan/dampak yang positif di wilayah perkotaan.



Tabel 2.5. 3 Rata-rata Lama Sekolah di Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bangka	7,96	8,19	8,2	8,23	8,24	8,25
Belitung	8,1	8,11	8,15	8,41	8,46	8,47
Bangka Barat	6,89	7,06	7,18	7,21	7,22	7,44
Bangka Tengah	6,71	6,79	6,8	7,13	7,19	7,2
Bangka Selatan	5,96	6,12	6,36	6,42	6,67	6,71
Belitung Timur	7,95	8	8,14	8,15	8,22	8,47
Kota Pangkalpinang	9,76	9,77	9,78	9,8	9,92	10,13
Kepulauan Bangka Belitung	7,62	7,78	7,84	7,98	8,06	8,08

Sumber: (BPS, 2022)

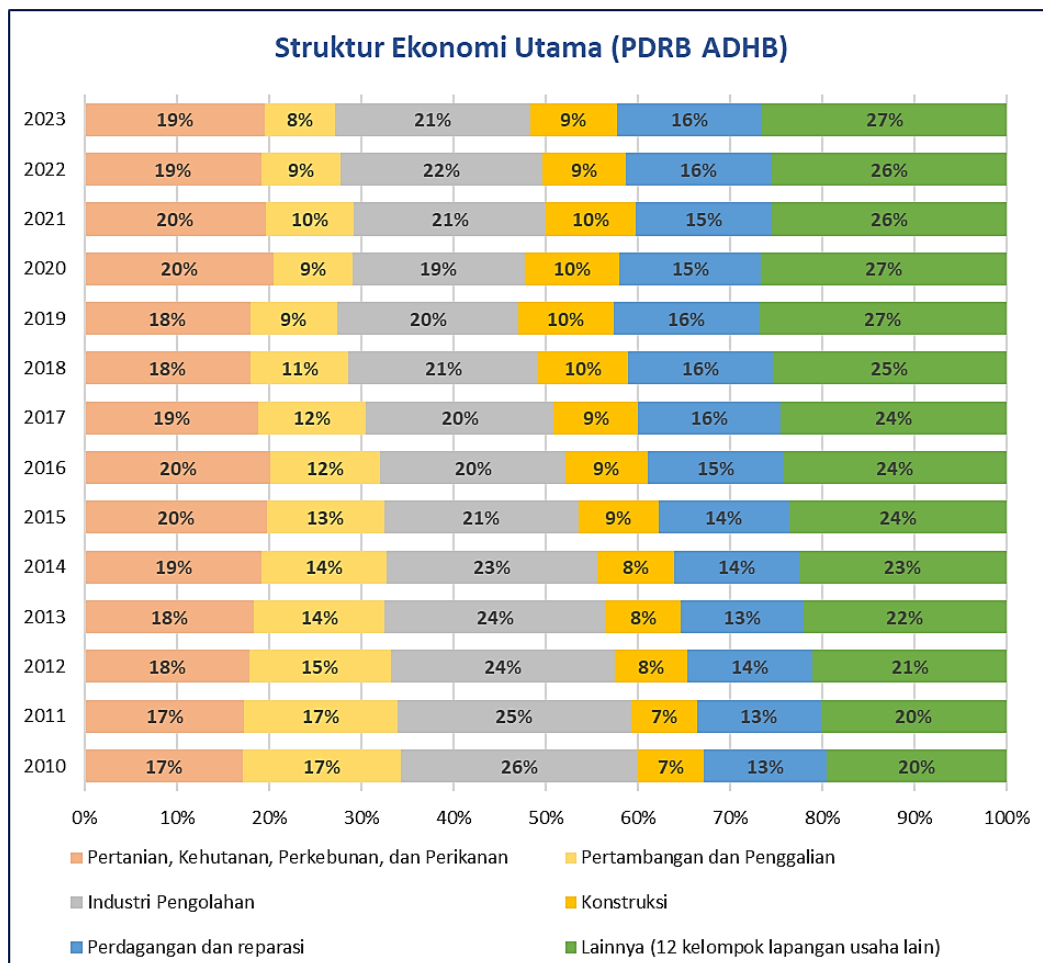
Secara nasional, rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu ada di bawah rata-rata lama sekolah nasional sehingga patut menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi. Kondisi pendidikan ini perlu menjadi perhatian khusus karena menjadi faktor pendorong yang tak terlihat, yang akan mengarahkan roda perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung.

II.5.1.3 Perekonomian

Faktor pendorong lainnya adalah faktor ekonomi yang diilustrasikan dengan kondisi struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi provinsi. Berikut ini adalah kondisi struktur ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010-2023 yang diilustrasikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha. Pada gambar berikut terlihat bahwa struktur ekonomi utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun ke tahun selalu didominasi oleh lima kelompok lapangan usaha, yaitu kelompok pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan; kelompok industri pengolahan; kelompok pertambangan dan penggalian, kelompok perdagangan dan



reparasi; serta kelompok konstruksi/bangunan. Struktur ekonomi ini menggambarkan aktivitas ekonomi yang dominan dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2.5. 6 PDRB ADHB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2023

Sumber: (BPS, 2024), data telah diolah kembali

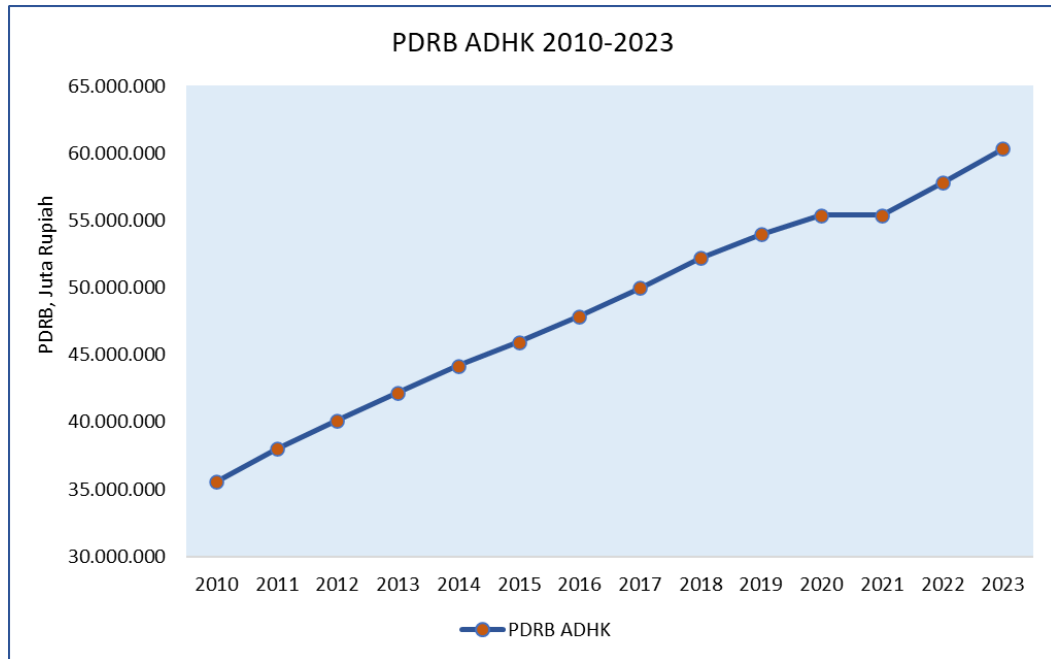
Terlihat pada gambar di atas bahwa tren kelompok pertambangan dan penggalian cenderung semakin menurun persentasenya meskipun selalu masuk ke dalam lima komponen utama PDRB. Tren penurunan ini juga terjadi pada persentase kelompok industri pengolahan yang salah satunya mengolah produk pertambangan. Di sisi lain, kelompok pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan; kelompok perdagangan dan reparasi; serta kelompok konstruksi/bangunan cenderung sedikit meningkat. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran kondisi



perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung yang mulai bergeser dari sektor pertambangan ke sektor lainnya. Kedua belas kelompok lapangan usaha lainnya yang komponennya dalam PDRB lebih kecil adalah: 1) transportasi dan pergudangan; 2) pengadaan listrik dan gas; 3) pengadaan air; 4) penyediaan akomodasi dan makan minum; 5) informasi dan komunikasi; 6) *real estate*; 7) administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; 8) jasa keuangan; 9) jasa perusahaan; 10) jasa pendidikan; 11) jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta 12) jasa lainnya. Kedua belas kelompok lapangan usaha lainnya ini juga memiliki peran dalam upaya pergeseran perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung yang memperlihatkan tren diversifikasi lapangan usaha agar tidak terlalu bergantung pada aktivitas pertambangan.

Kondisi perekonomian di atas menjadi faktor pendorong dilakukannya berbagai macam aktivitas antropogenik (aktivitas ekonomi) dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sehingga menyebabkan berbagai perubahan kondisi pada lingkungan. Faktor ekonomi ini mengilustrasikan kebutuhan pembangunan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor pendorong yang dapat menentukan apakah aktivitas ekonomi yang dilakukan memang bersifat efektif dan berkelanjutan atau justru bersifat eksploitatif dan cenderung merusak lingkungan.

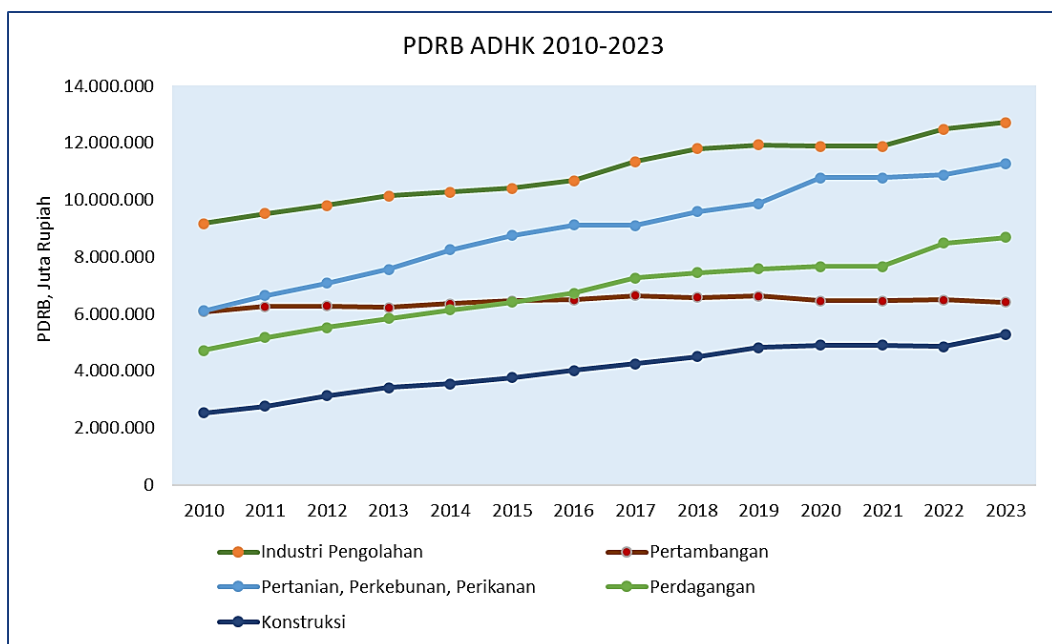
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diindikasikan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha. Tren pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui tren PDRB ADHK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disajikan pada gambar berikut. Terlihat pada gambar berikut bahwa pertumbuhan PDRB ADHK dari tahun 2020 ke tahun 2021 sedikit menurun/melambat yang disebabkan oleh adanya dampak pandemi covid-19 yang berdampak luas pada berbagai aktivitas perekonomian penduduk.



Gambar 2.5. 7 Tren Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha 2010-2023

Sumber: (BPS, 2024), telah diolah kembali

Pertumbuhan komponen PDRB ADHK menurut lapangan usaha pada 5 kelompok lapangan usaha utama dapat disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.5. 8 Tren Pertumbuhan Komponen Utama PDRB ADHK 2010-2023

Sumber: (BPS, 2024), telah diolah kembali



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB pada kelompok pertambangan cenderung mengalami perlambatan dan terlampaui oleh PDRB kelompok perdagangan sejak tahun 2016 hingga saat ini. Pada tahun terakhir, yaitu tahun 2023, PDRB kelompok pertambangan mengalami penurunan. Kondisi ini memiliki implikasi positif dan negatif pada kondisi sosial dan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di satu sisi, kondisi ini dapat menjadi momentum untuk mengembangkan sektor-sektor perekonomian selain pertambangan, sekaligus memperbaiki lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Di sisi lain, kondisi ini menimbulkan tekanan ekonomi yang luar biasa pada masyarakat Kepulauan Bangka Belitung yang selama ini terbiasa bergantung pada pertambangan.

II.5.1.4 Kebijakan pengelolaan perkotaan

II.5.2 *Pressures*

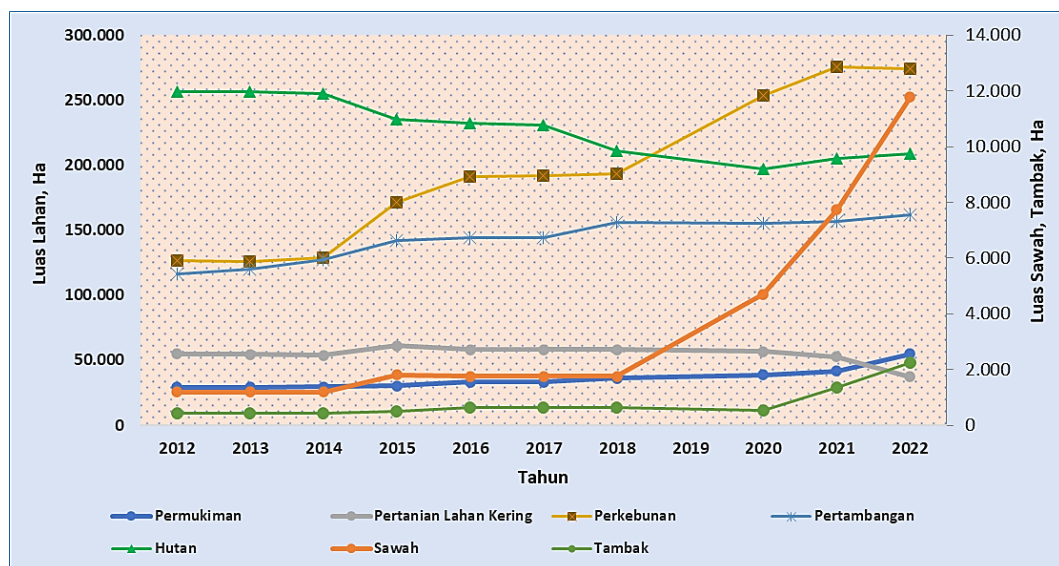
Aktivitas antropogenik untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk menjadi *pressure* (tekanan) pada kondisi lingkungan. Kegiatan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung yang dominan dapat dilihat pada struktur ekonomi berdasarkan komponen PDRB ADHB seperti yang telah disajikan sebelumnya. Ada lima komponen lapangan usaha utama di Kepulauan Bangka Belitung, yang sesuai persentasenya dalam PDRB ADHB pada tahun 2023, dapat diurutkan: 1) kelompok industri pengolahan/manufaktur; 2) kelompok pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan; 3) kelompok perdagangan dan reparasi; 4) kelompok konstruksi/bangunan; dan 5) kelompok pertambangan dan penggalan.

II.5.2.1 Alih fungsi lahan untuk kegiatan antropogenik

Aktivitas antropogenik di kelima lapangan usaha utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergambarkan dalam histori data penutup lahan, yang didominasi oleh penutup lahan perkebunan, pertanian, dan pertambangan. Industri pengolahan yang ada di provinsi ini juga didominasi



oleh industri pengolahan bijih logam timah (smelter) dan industri makanan, terutama industri *crude palm oil* (CPO) yang mengolah produk perkebunan kelapa sawit. Lapangan usaha yang masih sangat bergantung pada kegiatan ekstraksi sumber daya alam menimbulkan berbagai aktivitas alih fungsi lahan. Berikut ini disajikan tren tutupan lahan yang mewakili aktivitas perekonomian utama, yang menunjukkan adanya kesesuaian antara penggunaan lahan dengan struktur lapangan usaha utama di Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2.5. 9 Tutupan Lahan untuk Aktivitas Lapangan Usaha Utama 2012-2022

Sumber: (DLHK, 2024), telah diolah kembali

Berdasarkan gambar di atas, dapat diamati bahwa tren tutupan hutan semakin menurun, sementara tutupan lahan untuk kegiatan perekonomian semakin meningkat, kecuali tutupan pertanian lahan kering yang semakin menurun pada dua tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan adanya alih fungsi lahan hutan untuk kegiatan perekonomian. Pertambahan luas yang cukup besar terlihat pada tutupan lahan perkebunan. Tutupan lahan pertambangan juga meningkat, namun tidak sebesar peningkatan pada lahan perkebunan. Tutupan lahan untuk permukiman juga semakin meningkat, yang dapat dipahami karena beriringan dengan pertumbuhan penduduk yang memerlukan lahan



permukiman atau lahan terbangun lainnya yang semakin luas. Peningkatan luas permukiman/lahan terbangun di perkotaan didorong oleh kepadatan penduduk yang semakin besar dan faktor sosial-ekonomi lainnya, seperti proyek-proyek pembangunan untuk fasilitas publik dan bisnis. Permukiman yang semakin padat akan menyebabkan munculnya berbagai masalah di perkotaan, seperti timbunan sampah, kawasan kumuh, keterbatasan air bersih & fasilitas sanitasi.

Kebutuhan pangan penduduk yang semakin meningkat juga mendorong aktivitas produksi pangan yang tergambarkan dengan tutupan lahan untuk tambak, sawah, dan pertanian lahan kering. Perubahan tutupan lahan untuk bahan pangan tersebut sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah provinsi dalam upaya penyediaan pangan yang akan mempengaruhi ketahanan pangan daerah.

Tutupan pertanian lahan kering yang cenderung menurun juga mengindikasikan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan jenis lainnya. Alih fungsi lahan pertanian menjadi jenis lahan lainnya akan berpengaruh pada produksi pertanian dan kondisi ketahanan pangan daerah. Ketahanan pangan adalah kondisi di mana semua atau sebagian besar penduduk dalam suatu populasi memiliki akses harian yang cukup terhadap pangan bergizi untuk hidup aktif dan sehat (Miller & Spoolman, 2016). Alih fungsi lahan pertanian akan berpotensi mengurangi kemampuan daerah untuk memproduksi pangan. Kebutuhan pangan adalah salah satu kebutuhan pokok yang bersifat strategis dan harus dipenuhi karena menyangkut kesejahteraan masyarakat.

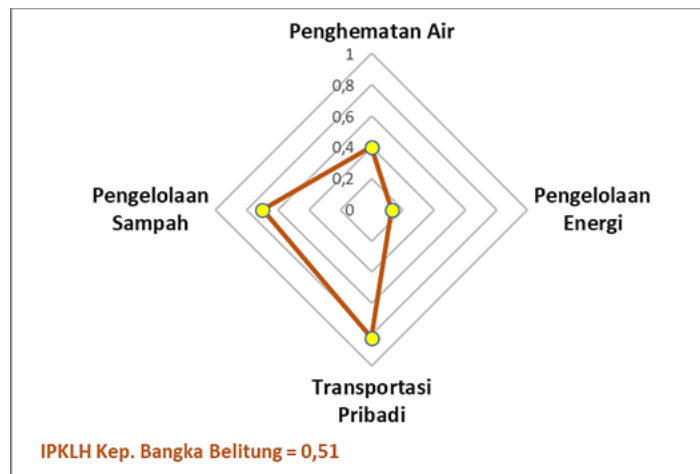
II.5.2.2 Pola konsumsi dan gaya hidup penduduk

Kepadatan penduduk yang diiringi dengan pergeseran gaya hidup, kondisi kesejahteraan yang meningkat, dan ketidakpedulian pada lingkungan mendorong aktivitas konsumsi dengan pola yang kurang bertanggung jawab pada lingkungan, seperti konsumsi produk dengan kemasan yang *non-degradable*, contohnya bahan plastik. Pola konsumsi



yang tidak bertanggung jawab lainnya adalah perilaku membuang sampah sembarangan dan tidak ada kesadaran untuk mengurangi sampah ataupun mengelola sampah yang dihasilkan.

Dalam rangka mengukur perilaku peduli lingkungan dengan pendekatan kerangka kerja *Department for Environment Food and Rural Affairs* (DEFRA), pada tahun 2018 BPS membentuk Indikator Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) yang dibentuk oleh empat dimensi utama, yaitu dimensi pengelolaan air, transportasi pribadi, pengelolaan energi, dan pengelolaan sampah. Nilai IPKLH ada pada rentang 0–1, dengan tingkat ketidakpedulian lingkungan semakin tinggi apabila indeks mendekati 1. Nilai IPKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 0,51. Berikut ini adalah nilai indeks masing-masing dimensi dalam IPKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu penghematan air (0,40), pengelolaan energi (0,13), transportasi pribadi (0,82), dan pengelolaan sampah (0,80).



Gambar 2.5. 10 Nilai IPKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

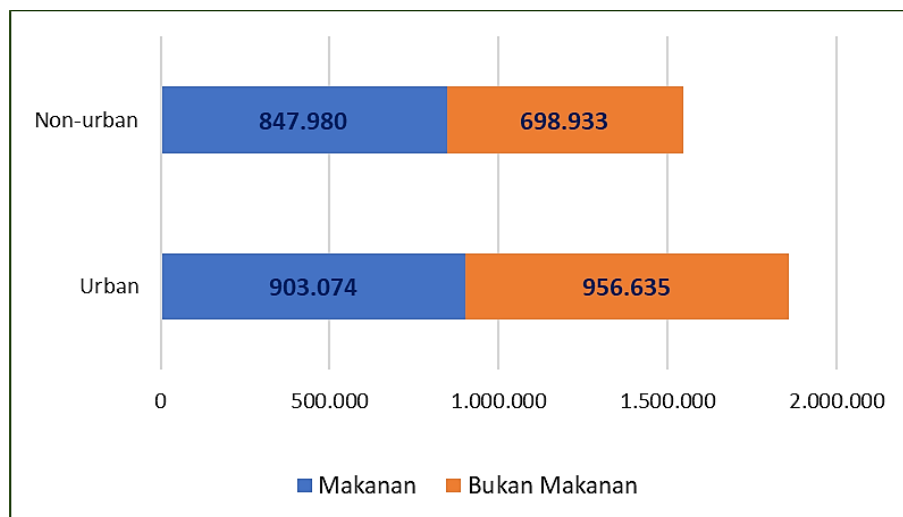
Sumber: (BPS, 2018)

Berdasarkan nilai indeks pada masing-masing dimensi tersebut, dapat dilihat bahwa ketidakpedulian lingkungan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung yang tinggi ada pada dimensi transportasi pribadi dan pengelolaan sampah. Hal ini sangat sesuai dengan realitas bahwa sebagian besar masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung menggunakan kendaraan



pribadi, serta masalah kesadaran membuang sampah pada tempatnya dan pengelolaannya yang belum selesai hingga saat ini.

Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023, lebih dari setengahnya (50,93%) adalah pengeluaran makanan dan 49,07% sisanya adalah pengeluaran non-makanan. Rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp. 1.727.550 per kapita sebulan, lebih tinggi dari rata-rata pengeluaran penduduk Indonesia. Penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghabiskan sekitar setengah dari pengeluarannya untuk konsumsi bahan makanan, baik di perkotaan maupun perdesaan.



Gambar 2.5. 11 Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 (Rupiah)

Sumber: (BPS, 2024)

Pada gambar di atas terlihat bahwa penduduk perkotaan (urban) memiliki jumlah pengeluaran yang lebih besar daripada penduduk di pedesaan (non-urban), baik pengeluaran bahan makanan maupun bukan makanan. Data ini mengindikasikan kondisi perekonomian yang lebih baik di daerah perkotaan. Selain itu, sebagian besar pengeluaran penduduk di perkotaan (51,44%) digunakan untuk konsumsi bukan makanan, sementara penduduk di pedesaan, sebagian besar pengeluarannya (54,82%) digunakan untuk konsumsi bahan makanan. Kondisi ini



menandakan adanya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi dan beragam selain kebutuhan pokok (pangan) di perkotaan, seperti jasa, *fashion* (mode), rekreasi, dan pendidikan. Jenis konsumsi pengeluaran di perkotaan dan pedesaan secara lebih lengkap tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5. 4 Jenis Pengeluaran Penduduk Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2023

Komoditas Pengeluaran	Urban	Non-urban	Urban + Non-urban
Makanan			
Padi-padian	80.440	93.590	85.996
Umbi-umbian	8.200	7.295	7.818
Ikan/udang/cumi/kerang	114.023	104.331	109.928
Daging	56.504	45.935	52.039
Telur dan susu	57.668	45.443	52.502
Sayur-sayuran	76.603	73.850	75.440
Kacang-kacangan	12.004	9.648	11.009
Buah-buahan	44.396	38.571	41.935
Minyak dan kelapa	17.505	17.238	17.392
Bahan minuman	20.519	22.781	21.475
Bumbu-bumbuan	23.100	26.509	24.540
Konsumsi lainnya	22.180	20.170	21.330
Makanan dan minuman jadi	244.917	211.783	230.918
Rokok	125.015	130.836	127.475
Jumlah makanan	903.074	847.980	879.797
Bukan makanan			
Perumahan & fasilitas rumah tangga	510.519	385.644	457.758
Aneka barang dan jasa	191.461	131.394	166.082
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	50.192	41.564	46.547
Barang tahan lama	100.111	64.229	84.950
Pajak, pungutan, dan asuransi	80.085	52.614	68.478
Keperluan pesta dan upacara kenduri	24.267	23.488	23.938
Jumlah bukan makanan	956.635	698.933	847.753
Jumlah/Total	1.859.710	1.546.912	1.727.550

Sumber: (BPS, 2024)

Gaya hidup masyarakat perkotaan banyak dipengaruhi oleh modernisasi dan perkembangan teknologi dan cenderung memiliki gaya hidup yang konsumtif, hedonis dan materialistis (Muryanti, 2022). Komoditi makanan dengan andil terbesar terhadap pengeluaran konsumsi per kapita



sebulan adalah makanan/minuman jadi, rokok, ikan/udang/cumi/kerang, dan padi-padian. Konsumsi rokok yang cukup besar (jumlah pengeluaran melebihi pengeluaran untuk makanan pokok beras/padi-padian) menunjukkan adanya gaya hidup yang kurang sehat. Di sisi lain, konsumsi ikan/udang/cumi/kerang yang cukup tinggi memiliki pengaruh yang baik bagi pemenuhan kebutuhan gizi di Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan daerah kepulauan dengan hasil laut yang menjadi salah satu penopang perekonomian.

Konsumsi makanan/minuman jadi mengindikasikan adanya gaya hidup praktis yang cenderung mengonsumsi makanan/minuman dalam kemasan. Hal ini juga berpotensi menimbulkan sampah kemasan makanan/minuman yang sebagian besar berbahan plastik sehingga berpengaruh pada jenis sampah yang dominan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Konsumsi bahan makanan yang cukup tinggi menyebabkan timbulan sampah organik/sisa makanan yang juga cukup tinggi di Bangka Belitung. Berikut ini adalah jenis timbulan sampah di Kepulauan Bangka Belitung menurut data SIPSN tahun 2023.



Gambar 2.5. 12 Komposisi Sampah Tahun 2021-2023

Sumber: (SIPSN, 2023a)

Berdasarkan gambar di atas, komposisi sampah terbesar dari tahun ke tahun adalah sisa makanan yang merupakan sampah organik dan dari



proses dekomposisinya yang bersifat anaerobik berpotensi mengemisikan gas metana yang memiliki potensi pemanasan global yang sangat besar dibandingkan gas karbondioksida. Komposisi sampah terbesar ke dua adalah sampah plastik. Data ini sejalan dengan pola pengeluaran konsumsi penduduk yang lebih dari setengahnya untuk bahan makanan, sementara makanan/minuman dalam kemasan (plastik) memiliki porsi terbesar dalam pengeluaran bahan makanan.

II.5.2.3 Kegiatan transportasi

Berdasarkan Gambar 2.5. 10, indeks ketidakpedulian lingkungan terbesar penduduk di Kepulauan Bangka Belitung ada pada komponen penggunaan kendaraan pribadi, kemudian pengelolaan sampah. Penggunaan kendaraan bermotor pribadi di Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dibandingkan dengan penggunaan kendaraan umum. Tabel berikut menyajikan data jenis dan jumlah kendaraan bermotor di Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023.

Tabel 2.5. 5 Jenis Kendaraan Bermotor Tahun 2023 (unit)

Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor
2019	77.559	1.169	43.946	917.129
2020	78.504	1.173	44.189	924.322
2021	81.599	1.186	45.495	971.047
2022'	85.621	1.195	47.399	1.025.876
2023	96.449	1.262	51.494	1.066.582

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung (diolah dari Samsat Online)

Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak delapan orang termasuk untuk pengemudi, yang beratnya paling tinggi 3.500 kg. Berdasarkan definisi tersebut, jenis kendaraan bermotor pribadi dalam tabel di atas adalah jenis mobil penumpang dan sepeda motor. Pada tabel di atas terlihat bahwa



semua jenis kendaraan bermotor selalu mengalami kenaikan jumlahnya setiap tahun, khususnya sepeda motor yang pada tahun 2023 berjumlah 1.066.582 unit dan mobil penumpang yang pada tahun 2023 berjumlah 96.449 unit. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan rendahnya penggunaan kendaraan umum, selain menandakan kemampuan ekonomi penduduk, juga menandakan ketidakpedulian penduduk dalam pemanfaatan transportasi umum. Penggunaan kendaraan pribadi yang semakin meningkat berpotensi meningkatkan emisi kendaraan yang mencemari udara, khususnya di perkotaan yang lalu lintasnya cukup padat.

Selain itu, jumlah kendaraan umum yang sangat terbatas juga menandakan kurangnya fasilitas publik (termasuk infrastruktur, sarana-prasarana) yang disediakan pemerintah, termasuk juga tata kelola sistem transportasinya. Hal tersebut berpengaruh pada lemahnya daya tarik penduduk dalam penggunaan transportasi publik. Aspek keterjangkauan (kemudahan untuk mengakses) dan biaya transportasi publik yang relatif mahal menjadi alasan sebagian besar masyarakat di Bangka Belitung untuk lebih memilih kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Selain faktor gaya hidup, faktor perhitungan ekonomi juga mempengaruhi keputusan masyarakat dalam pemilihan jenis transportasi.

Penggunaan kendaraan pribadi yang cukup tinggi menyebabkan kemacetan di jalan-jalan tertentu pada jam sibuk, khususnya jalan di area perkotaan. Sebaliknya, kondisi jalan-jalan di area non-urban hampir selalu lancar. Secara umum, kemacetan di Bangka Belitung jarang terjadi sehingga semakin mendorong penduduk pada penggunaan kendaraan pribadi. Sebagai gambaran fasilitas transportasi di Kepulauan Bangka Belitung, berikut ini disajikan data jalan tahun 2021-2023.

Tabel 2.5. 6 Panjang Jalan Di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung 2021-2023

Kabupaten/Kota	Tahun	Jenis Jalan (km)			Total (km)
		Nasional	Provinsi	Kabupaten/Kota	
Bangka	2021		141	735	876
	2022		125	735	860
	2023		125	735	860



Kabupaten/Kota	Tahun	Jenis Jalan (km)			Total (km)
		Nasional	Provinsi	Kabupaten/Kota	
Belitung	2021		186	666	852
	2022		135	666	801
	2023		135	666	801
Bangka Barat	2021		111	701	812
	2022		111	809	920
	2023		111	809	920
Bangka Tengah	2021		132	441	573
	2022		149	441	590
	2023		168	441	609
Bangka Selatan	2021		123	634	757
	2022		123	634	757
	2023		103	634	737
Belitung Timur	2021		115	481	596
	2022		166	752	918
	2023		166	752	918
Pangkalpinang	2021		43	403	446
	2022		43	403	446
	2023		43	403	446
Provinsi	2021	600	851	4,332	5,783
	2022	599	851	4,441	5.891
	2023	599	851	4,441	5,891

Sumber: (BPS, 2024)

Berdasarkan tabel di atas secara umum dapat dibaca bahwa panjang jalan di berbagai kabupaten/kota yang ada di Bangka Belitung cenderung bertambah panjangnya, kecuali pada data jalan nasional yang berkurang 1 km, dan data jalan provinsi di Kabupaten Belitung dan Bangka Selatan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya faktor kerusakan jalan ataupun perubahan jenis jalan. Meskipun Kota Pangkalpinang memiliki total panjang jalan terpendek di antara ketujuh kabupaten/kota, akan tetapi wilayah Pangkalpinang yang sempit dengan kepadatan penduduk yang tinggi menjadikan aktivitas transportasi menjadi sibuk/padat. Kondisi ini berpengaruh pada kondisi udara yang ada di area perkotaan Pangkalpinang.

Semakin padat aktivitas transportasi, terutama penggunaan kendaraan bermotor yang mayoritas (hampir semuanya) berbahan bakar fosil, emisi hasil pembakaran bahan bakar kendaraan akan semakin meningkat yang tentu saja berpotensi mengubah kualitas (mencemari)

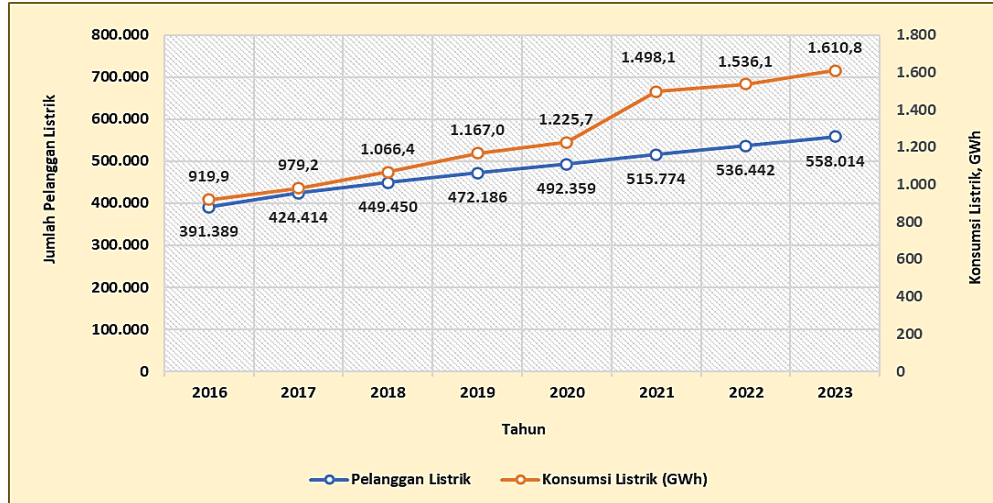


udara di perkotaan yang padat lalu lintasnya. Pada tahun 2023, penggunaan bahan bakar fosil (bensin dan solar) meningkat dari tahun sebelumnya, meskipun ada sejumlah kendaraan yang sudah menggunakan sumber energi listrik. Berdasarkan data dari Samsat *Online*, pada tahun 2023 terdapat sebanyak 112 sepeda motor dan 21 mobil yang menggunakan bahan bakar listrik.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka penggunaan kendaraan pribadi yang semakin meningkat menjadi faktor tekanan pada kondisi lingkungan perkotaan yang berpotensi menimbulkan perubahan kualitas udara, kemacetan, hingga dampak yang lebih luas terkait perubahan iklim. Penggunaan listrik sebagai sumber energi juga masih terbatas dan belum menjamin apakah sumber energi listrik yang digunakan adalah sumber energi yang berkelanjutan. Sebagian besar energi listrik di Kepulauan Bangka Belitung disediakan menggunakan bahan bakar fosil yang tidak berkelanjutan.

II.5.2.4 Konsumsi energi

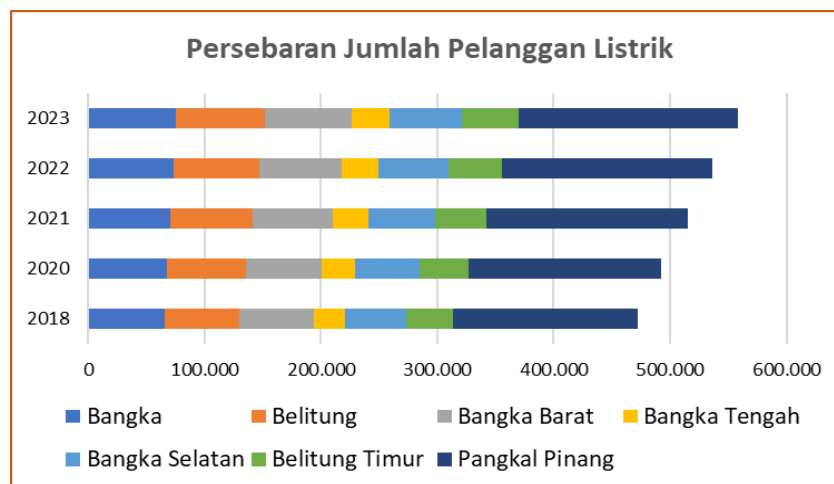
Aktivitas antropogenik lainnya yang memberikan tekanan pada kondisi lingkungan adalah konsumsi energi. Konsumsi energi yang semakin meningkat menandakan adanya aktivitas perekonomian yang juga semakin meningkat, meskipun terkadang konsumsi energi yang semakin meningkat tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang sepadan sehingga konsumsi energi menjadi tidak efisien. Konsumsi energi yang terlihat jelas peningkatannya akibat penambahan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi adalah konsumsi energi listrik. Konsumsi listrik per kapita sering dijadikan sebagai indikator kemajuan suatu wilayah karena diasumsikan bahwa listrik tersebut digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang memberikan nilai tambah ekonomi (RUED, 2019).



Gambar 2.5. 13 Konsumsi Listrik dan Jumlah Pelanggan PLN Tahun 2016-2023

Sumber: PLN, 2021; (BPS, 2020, 2021b, 2023, 2024), data telah diolah kembali

Di atas adalah gambar yang menyajikan tren konsumsi listrik dan jumlah pelanggan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) sejak tahun 2016 hingga tahun 2023. Pada gambar di atas terlihat adanya tren kenaikan konsumsi energi listrik yang lebih tajam daripada pertambahan jumlah pelanggan listrik. Kondisi tersebut menandakan adanya konsumsi yang lebih besar pada setiap pelanggan listrik. Sebagai ilustrasi persebaran penggunaan energi listrik di wilayah Bangka Belitung, berikut ini tersaji data persebaran pelanggan listrik.



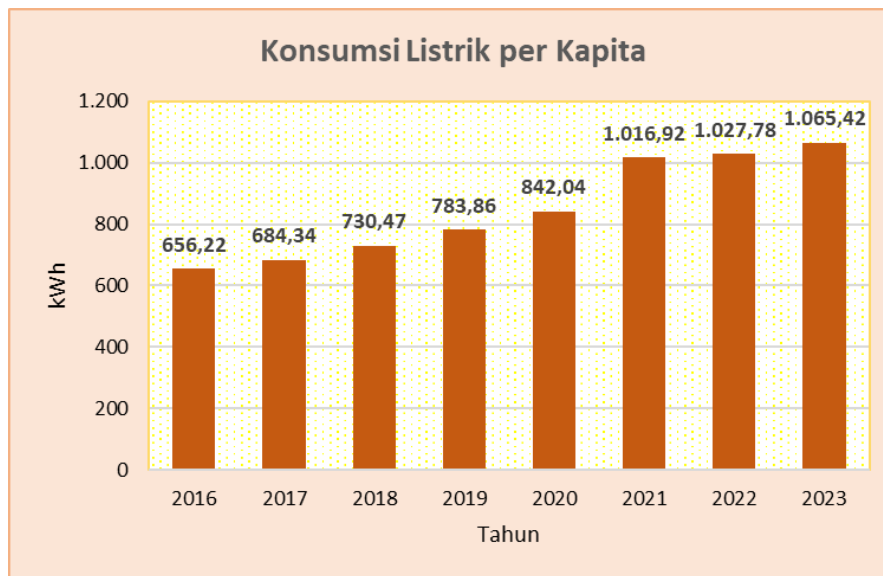
Gambar 2.5. 14 Persebaran Pelanggan Listrik di Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023

Sumber: (BPS, 2024), telah diolah kembali



Pada gambar di atas terlihat bahwa jumlah pelanggan listrik di perkotaan Pangkalpinang jauh lebih besar daripada daerah lainnya, disusul kemudian Kabupaten Bangka yang berbatasan langsung dengan Pusat Pangkalpinang. Konsumsi listrik yang tinggi di daerah perkotaan menandakan adanya aktivitas ekonomi yang padat.

Konsumsi listrik per pelanggan yang semakin besar menandakan adanya aktivitas antropogenik yang lebih banyak yang dilakukan oleh pelanggan. Berikut ini tersaji data konsumsi listrik per kapita yang membandingkan data konsumsi listrik dengan jumlah penduduk. Data berikut dapat digunakan untuk melihat kemajuan aktivitas ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung yang dilihat berdasarkan pendekatan konsumsi listrik per kapita.



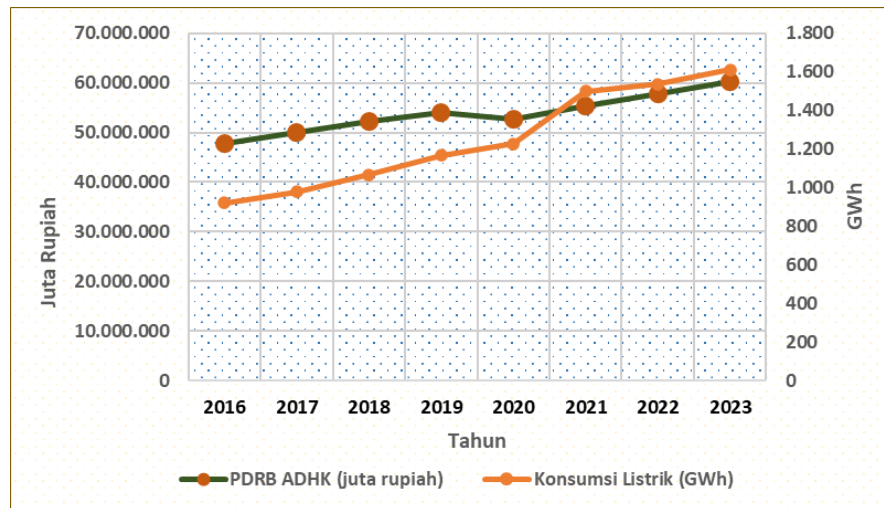
Gambar 2.5. 15 Konsumsi Listrik Per Kapita Tahun 2016-2022

Sumber: PLN, 2021; (BPS, 2020, 2021b, 2023, 2024), data telah diolah kembali

Berdasarkan gambar di atas, konsumsi listrik per kapita yang semakin meningkat menandakan kemajuan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun demikian, peningkatan konsumsi listrik tersebut jika tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi, maka tidak akan efisien atau justru menandakan adanya pemborosan energi. Pada gambar berikut tersaji



perbandingan tren konsumsi listrik dengan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung yang diindikasikan dengan PDRB ADHK.



Gambar 2.5. 16 Konsumsi Energi Listrik dan Pertumbuhan Ekonomi 2016-2022

Sumber: PLN, 2021; (BPS, 2020, 2021b, 2023, 2024), data telah diolah kembali

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa laju kenaikan konsumsi energi listrik lebih cepat daripada laju pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung, khususnya sejak tahun 2020. Kondisi tersebut menandakan adanya pemborosan energi karena kenaikan konsumsi energi tidak dibarengi dengan produktivitas ekonomi. Kondisi ini tentu menjadi tekanan bagi kondisi lingkungan maupun kondisi sosial masyarakat, karena aktivitas antropogenik yang besar dan menimbulkan tekanan pada lingkungan ternyata tidak terlalu produktif meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

II.5.3 State

Berbagai macam aktivitas antropogenik yang telah dideskripsikan sebelumnya memberikan tekanan pada kondisi lingkungan, termasuk juga kondisi sosial-ekonomi Kepulauan Bangka Belitung. Penduduk yang semakin padat, khususnya di area perkotaan memerlukan kecukupan pangan dan tempat tinggal yang ketersediaan lahannya semakin terbatas. Penduduk

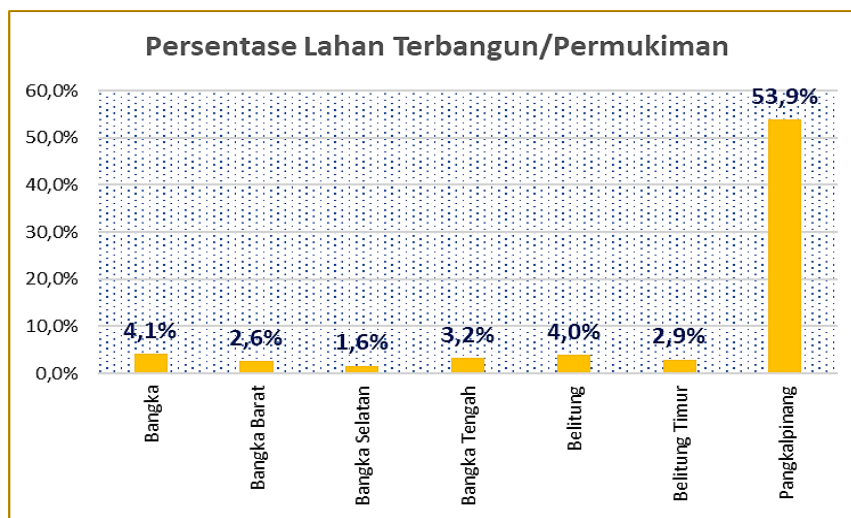


juga memerlukan pekerjaan yang layak untuk mencukupi kebutuhan yang semakin bertambah dan beragam.

Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi sebuah keharusan dalam aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, sehingga sesuai dengan kapasitas daya dukung (*carrying capacity*) yang terbatas. Pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan *carrying capacity* berpotensi menimbulkan dampak-dampak negatif yang justru akan menghambat roda pembangunan.

II.5.3.1 Tutupan lahan terbangun

Seiring dengan terus berkembangnya lanskap perkotaan, pengembangan lahan terbangun memiliki pengaruh penting dalam pembentukan karakter masyarakat dan lingkungan perkotaan. Proses konstruksi dan pengembangan lahan telah mengalami perubahan signifikan selama bertahun-tahun, beradaptasi dengan teknologi baru, kebutuhan masyarakat, dan pertimbangan lingkungan. Pada masa ini, penting untuk menerapkan praktik berkelanjutan dalam pengembangan lahan. Berikut ini adalah data proporsi lahan terbangun dari luas wilayah di ketujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan data penutup lahan terakhir tahun 2022.



Gambar 2.5. 17 Persentase Lahan Terbangun Di Kabupaten/Kota

Sumber: Peta Penutup Lahan 2022 (telah diolah kembali)



Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa luas lahan terbangun di ibukota provinsi (yang merupakan inti/pusat dalam konsep nodal), Pangkalpinang, memiliki proporsi lebih dari setengah luas wilayahnya. Proporsi lahan terbangun ini jauh lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah di sekitarnya yang merupakan daerah *hinterland*. Kondisi ini tidak terlepas dari upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang relatif sangat padat dibandingkan daerah-daerah sekitarnya, termasuk kebutuhan tempat tinggal/permukiman. Tabel berikut ini menyajikan data proporsi tutupan lahan yang lebih lengkap untuk berbagai macam kegiatan antropogenik yang merupakan lapangan kerja utama, yang dibandingkan dengan luas wilayah masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 2.5. 7 Proporsi Tutupan Lahan untuk Kegiatan Utama Perekonomian (Ha, %)

Kabupaten/Kota	Bandara	Lahan Terbangun	Perkebunan	Pertambangan	Pertanian Lahan Kering	Sawah	Tambak
Bangka		12.259,6	55.983,1	29.907,1	11.328,8	1.123,7	806,6
		4,1%	18,6%	9,9%	3,8%	0,4%	0,3%
Bangka Barat		7.372,0	55.105,3	24.330,1	6.021,3	1.423,8	201,8
		2,6%	19,3%	8,5%	2,1%	0,5%	0,1%
Bangka Selatan		5.697,1	26.467,5	21.244,5	7.987,9	8.291,6	798,8
		1,6%	7,4%	5,9%	2,2%	2,3%	0,2%
Bangka Tengah	92,1	7.193,8	39.709,5	25.974,7	2.190,2	60,9	224,2
	0,0%	3,2%	17,6%	11,5%	1,0%	0,0%	0,1%
Belitung	175,5	8.974,3	43.962,2	21.949,0	5.633,2	142,7	
	0,1%	4,0%	19,4%	9,7%	2,5%	0,1%	0,0%
Belitung Timur		7.551,8	53.120,2	38.463,5	4.014,4	728,7	
		2,9%	20,5%	14,9%	1,6%	0,3%	0,0%
Pangkalpinang		5.625,2	4,7	171,0			206,0
		53,9%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%	2,0%

Sumber: Peta Penutup Lahan 2022 (telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui proporsi penutup lahan untuk kegiatan pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan, lahan terbangun/permukiman, dan bandara. Di keenam kabupaten, porsi terbesar



tutupan lahan adalah untuk kegiatan perkebunan, sementara di perkotaan Pangkalpinang, porsi terbesar adalah lahan terbangun/permukiman.

Dengan meningkatnya penekanan pada keberlanjutan, model pengembangan lahan seharusnya dirancang untuk meminimalkan dampak lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan yang terus meningkat. Layanan pengembangan *real estate* yang profesional memiliki andil penting dalam perubahan ini, yang seharusnya menawarkan solusi inovatif yang menyeimbangkan tujuan pembangunan dengan keberlanjutan ekologi. Keputusan yang diambil saat perencanaan ruang dan lahan akan membentuk lanskap perkotaan di masa depan sehingga perlu adanya penguatan aspek keberlanjutan dalam perencanaannya. Praktik pengembangan lahan perkotaan ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap tatanan sosial dan alam.

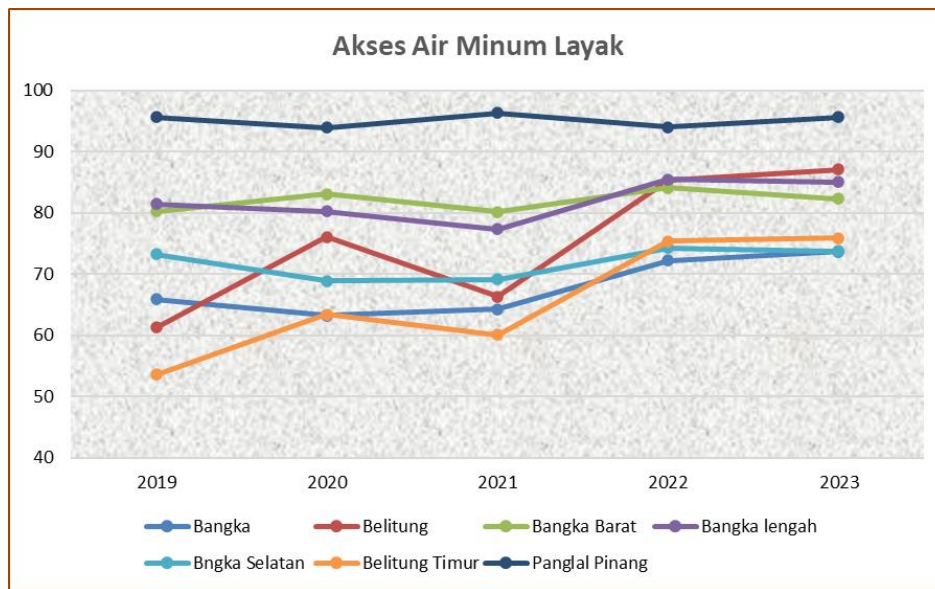
II.5.3.2 Kondisi akses air minum dan sanitasi

Air dan sanitasi perkotaan mengacu pada pengelolaan air yang disediakan untuk konsumsi manusia, serta pengolahan dan pembuangan kotoran manusia dan limbah yang memadai di lingkungan perkotaan. Pengelolaan air dan sanitasi perkotaan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan dampak pasokan air dan pembuangan serta pengolahan limbah terhadap air permukaan dan air tanah, sehingga dapat mencegah penularan penyakit. Hal ini juga berorientasi pada peningkatan efisiensi penggunaan air dan perlindungan sumber air untuk menciptakan kawasan perkotaan yang berketahanan dan berkelanjutan, selain menganalisis penggunaan sumber air alternatif, termasuk air hujan dan air limbah yang telah diolah. Memiliki akses terhadap air dan sanitasi merupakan hak asasi manusia dan merupakan prioritas pembangunan karena kurangnya akses terhadap layanan air dan sanitasi berdampak pada martabat manusia dan kesehatan masyarakat (Sosa-Rodriguez et al., 2020).

Air akan menjadi salah satu sumber daya utama bagi pembangunan perkotaan berkelanjutan. Air diperlukan untuk hampir semua aktivitas



manusia (keperluan rumah tangga, pertanian, industri, rekreasi) dan air juga mempunyai fungsi ekosistem yang penting. Sumber air minum layak yaitu sumber air minum utama yang digunakan meliputi ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan (BPS, 2024). Berikut ini adalah persebaran kondisi akses terhadap air minum layak bagi penduduk di ketujuh kabupaten/kota, yang diindikasikan dengan persentase penduduk dengan akses air minum layak.



Gambar 2.5. 18 Akses Penduduk Terhadap Air Minum Layak 2019-2023 (%)

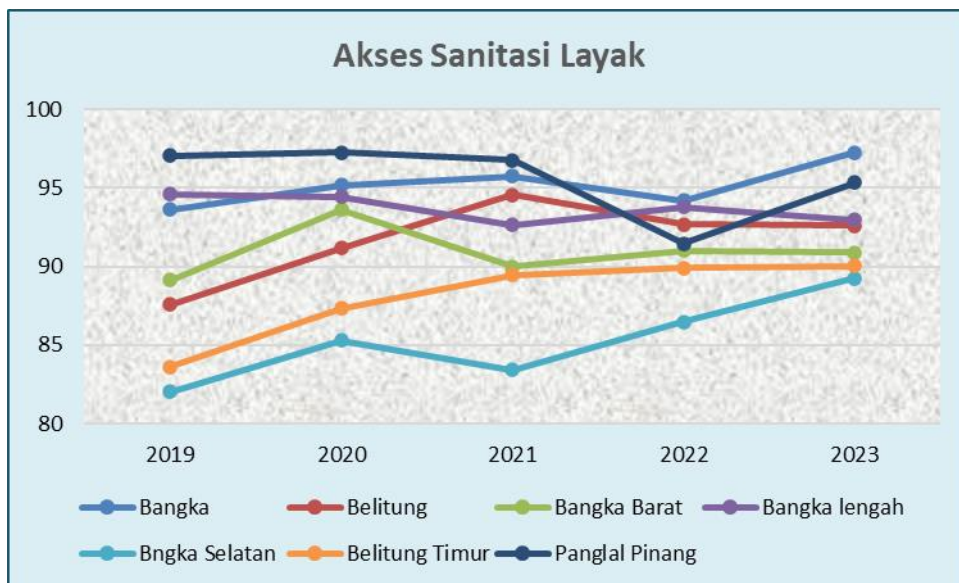
Sumber: (BPS, 2024)

Pada gambar di atas dapat diamati bahwa terdapat peningkatan akses air minum layak yang cukup tinggi di Pulau Belitung (Kabupaten Belitung dan Belitung Timur) yang mengindikasikan adanya upaya dari pemerintah beserta masyarakat/*stakeholder* lainnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang pelayanan air minum layak. Di perkotaan Pangkalpinang, akses air minum layak oleh penduduk cenderung



stabil selama 5 tahun terakhir, yaitu berkisar 93-96%. Angka ini adalah yang paling tinggi dibandingkan daerah-daerah lain di sekitarnya, yang mengindikasikan pelayanan air minum layak yang lebih baik di perkotaan.

Sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset leher angsa, pembuangan tinja dengan *septic tank* atau Instalasi/Sistem Pembuangan Air Limbah (IPAL), yang digunakan untuk rumah tangga sendiri atau bersama rumah tangga lain tertentu (BPS, 2024). Berikut ini adalah persentase penduduk dengan kondisi akses terhadap sanitasi layak di ketujuh kabupaten/kota.



Gambar 2.5. 19 Akses Sanitasi Layak 2019-2023 (%)

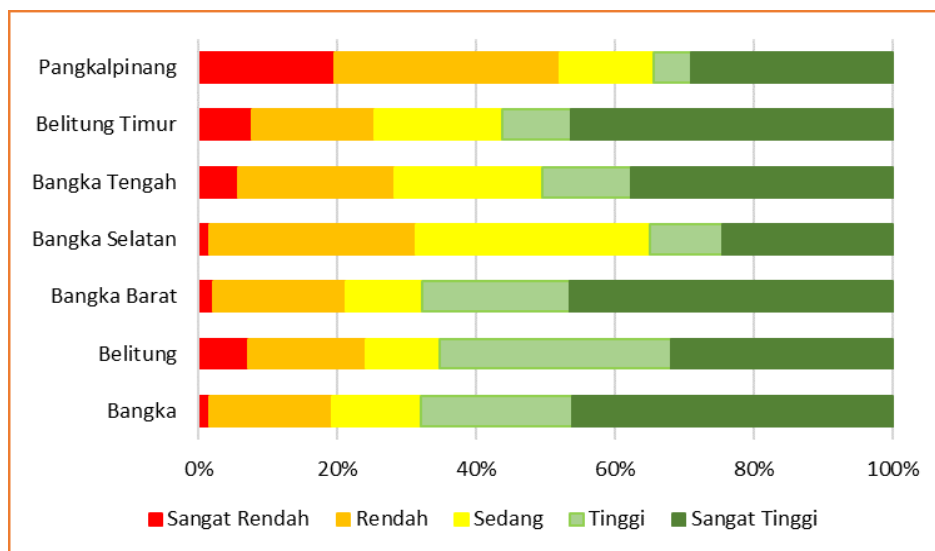
Sumber: (BPS, 2024)

Berdasarkan gambar di atas, dapat diamati bahwa tren akses sanitasi layak oleh penduduk di Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur cenderung meningkat, sementara akses sanitasi layak di Kota Pangkalpinang justru memiliki kecenderungan menurun. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah bencana banjir/genangan air yang sering melanda wilayah perkotaan Pangkalpinang, yang mengindikasikan adanya permasalahan pada sistem hidrologi.



II.5.3.3 Kondisi air dan udara

Selain kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kondisi aspek lingkungan/ekologi juga terpengaruh oleh adanya aktivitas antropogenik. Lingkungan perkotaan dengan tutupan lahan terbangun atau permukiman yang padat serta kurangnya area dengan tutupan vegetasi akan berpengaruh pada kondisi *ecosystem services* (jasa lingkungan). Sebagai gambaran, berikut ini tersaji secara ringkas kondisi indikatif jasa lingkungan penyediaan air di tujuh kabupaten/kota.



Gambar 2.5. 20 Distribusi Indikasi Jasa Lingkungan Penyediaan Air di Pangkalpinang dan Enam Kabupaten Tahun 2021

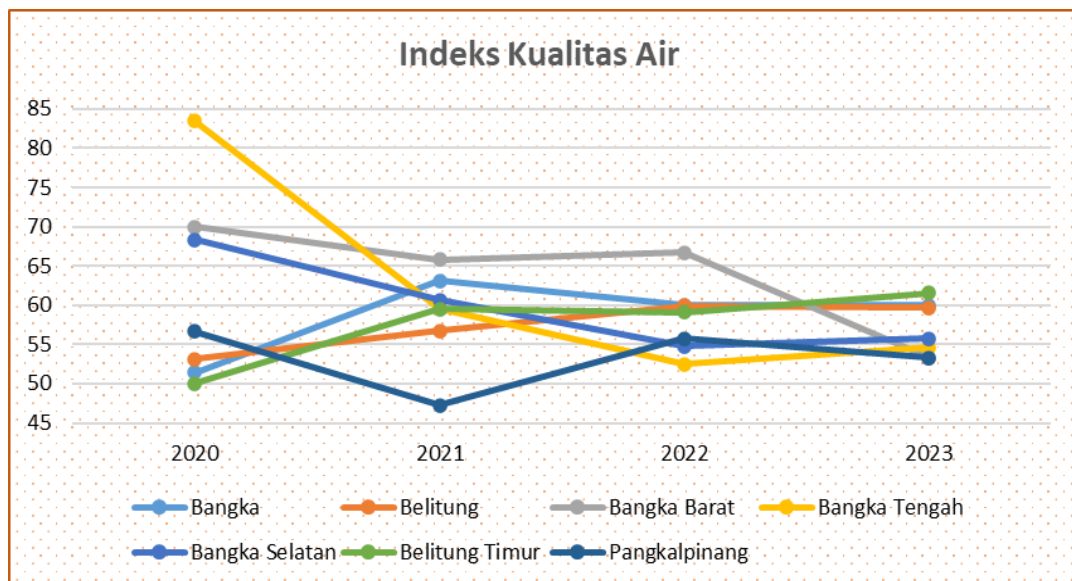
Sumber: DDDTLH Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2022 (data telah diolah kembali)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan luas wilayahnya, Pangkalpinang memiliki persentase luas area dengan jasa penyediaan air kelas sangat rendah dan kelas rendah yang paling besar dibandingkan 6 kabupaten lainnya. Kondisi tersebut dapat memberikan gambaran tentang kondisi jasa lingkungan di Pangkalpinang yang proporsi lahan terbangunnya cukup besar. Di antara tujuh kabupaten/kota, Pangkalpinang memiliki luas wilayah yang paling kecil, tetapi kepadatan penduduk dan proporsi area terbangunnya adalah yang paling besar. Hal tersebut berdampak pada ekologi di perkotaan Pangkalpinang sehingga



menurunkan kemampuan lingkungan untuk memberikan layanan/jasa, atau dengan kata lain lingkungan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Kondisi jasa penyediaan air yang memiliki kecenderungan rendah akan menimbulkan semakin banyak masalah jika kualitas air buruk. Sebagai ilustrasi, berikut ini adalah data indikasi kualitas air di ketujuh kabupaten/kota di Bangka Belitung yang disajikan dalam bentuk data Indeks Kualitas Air (IKA). IKA menjadi indikator penting dalam pembangunan di suatu wilayah, khususnya di perkotaan, karena kualitas air yang baik berpengaruh pada kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk. Sebagai ilustrasi kondisi air di perkotaan, dibandingkan dengan daerah-daerah lain, berikut ini tersaji gambar tren IKA di ketujuh kabupaten/kota.



Gambar 2.5. 21 Perbandingan IKA Kota Pangkalpinang dengan Keenam Kabupaten Tahun 2020-2023

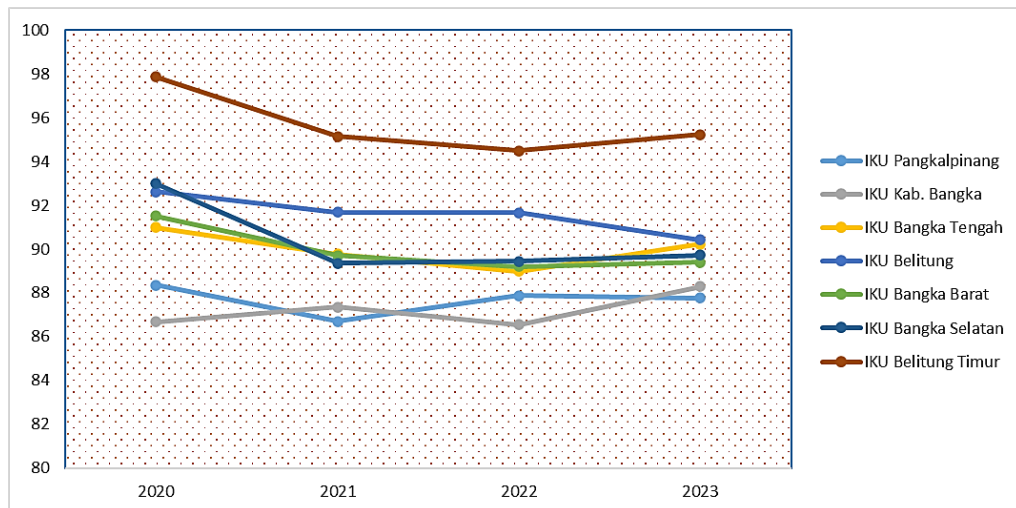
Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2024

Pada gambar di atas terlihat bahwa IKA di Pangkalpinang yang seluruh wilayahnya termasuk area perkotaan, memiliki kecenderungan menurun, lebih rendah daripada keenam kabupaten. Penurunan IKA yang cukup besar juga terjadi di Bangka Tengah yang berbatasan langsung dengan perkotaan Pangkalpinang.



Kondisi lingkungan lainnya yang dipengaruhi oleh tekanan dari aktivitas antropogenik di perkotaan adalah ketersediaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang semakin terbatas. Di area ibukota provinsi (Kota Pangkalpinang), realisasi RTH hingga tahun 2022 masih mencapai 11% luas kota, sedangkan perencanaan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah 20,30% (Marlianto, 2022). Berbagai penyebab terbatasnya lahan untuk RTH ini, di antaranya adalah pembangunan permukiman yang semakin meningkat dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lahan mereka sebagai RTH. Kondisi ini terlihat jelas pada tren lahan permukiman/lahan terbangun di Kepulauan Bangka Belitung yang semakin naik, sebagaimana disajikan pada bagian sebelumnya.

Permukiman penduduk di wilayah perkotaan memerlukan RTH yang cukup untuk mengontrol kualitas dan suhu udara, resapan air, meredam kebisingan, maupun menciptakan suasana teduh dan nyaman bagi penduduk perkotaan. Kondisi kualitas udara di Kepulauan Bangka Belitung secara umum dapat ditandai dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) yang menjadi salah satu komponen dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Berikut ini tersaji tren nilai IKU di ketujuh kabupaten/kota yang ada di Bangka Belitung selama empat tahun terakhir (tahun 2020-2023).



Gambar 2.5. 22 Perbandingan IKU Pangkalpinang dan Kab. Bangka dengan Wilayah Lainnya Tahun 2020-2023

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2024



Pada gambar di atas terlihat jelas bahwa area perkotaan (Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka) dengan penduduk yang padat memiliki nilai IKU yang cenderung lebih rendah daripada IKU di daerah lainnya. Tren IKU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kualitas udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meskipun nilai IKU tersebut masih tergolong baik. Berkebalikan dengan Pangkalpinang, Kabupaten Belitung Timur yang bukan termasuk area yang berdekatan dengan inti/pusat kota Pangkalpinang, memiliki IKU yang paling tinggi.

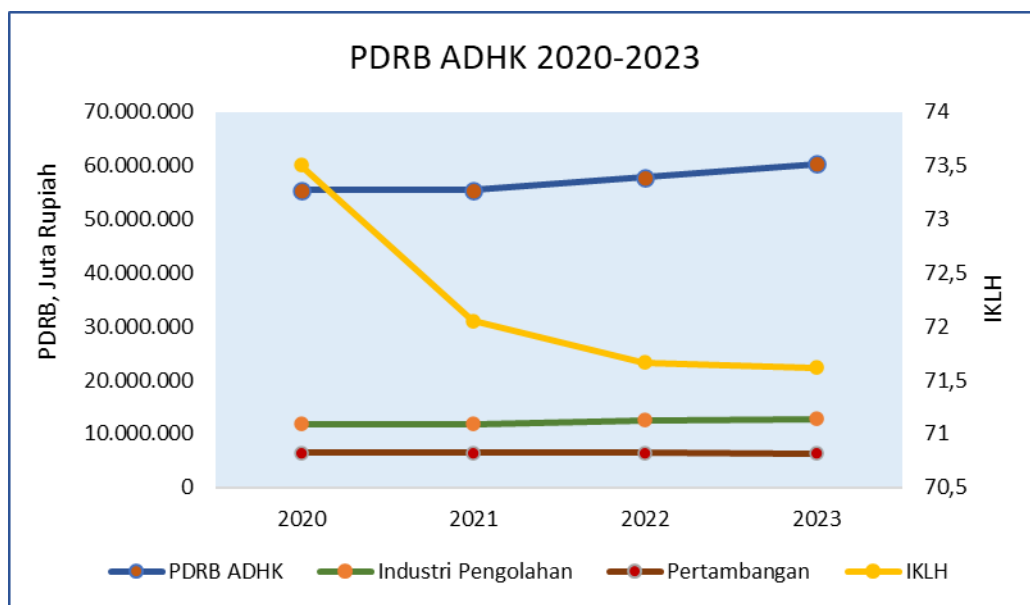
Selain faktor RTH, kualitas udara juga dipengaruhi oleh berbagai macam aktivitas antropogenik lainnya, seperti emisi dari proses pembakaran bahan bakar di kegiatan industri, pembangkit listrik, kendaraan bermotor, maupun rumah tangga. Sebagaimana pembahasan pada bagian sebelumnya, penggunaan kendaraan pribadi di Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat disertai dengan ketidakpedulian penduduk tentang dampak perilaku penggunaan kendaraan pribadi. Hal tersebut memberikan tekanan pada kondisi lingkungan, khususnya kondisi kualitas udara. Bahan bakar kendaraan bermotor sebagian besar adalah bahan bakar fosil (bensin) sehingga cenderung tidak berkelanjutan.

Pada tahun 2023, sebanyak 112 sepeda motor dan 21 mobil di Bangka Belitung telah berbasis listrik, akan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya menjamin keberlanjutan lingkungan jika listrik tersebut diproduksi dari sumber energi fosil. Berikut ini disajikan kondisi jenis bahan bakar yang digunakan di unit pembangkit listrik. Sebagian besar bahan bakar yang digunakan di pembangkit listrik adalah batubara. Konsumsi energi listrik yang semakin meningkat di Bangka Belitung dipenuhi dari pembangkit-pembangkit listrik tersebut. Peningkatan konsumsi energi listrik yang tidak dibarengi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi menandakan adanya pemborosan energi (Fandari et al., 2014). Sebagaimana tersaji sebelumnya pada Gambar 2.5. 16, konsumsi energi listrik yang meningkat di Bangka Belitung tidak seimbang dengan



pertumbuhan ekonominya. Kondisi tersebut akan semakin parah jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas lingkungan.

Sebagai ilustrasi untuk membandingkan kualitas lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi, berikut ini tersaji gambar tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Tren PDRB ADHK dianggap dapat mewakili tren pertumbuhan ekonomi yang terjadi.



Gambar 2.5. 23 Perbandingan Tren Pertumbuhan Ekonomi dengan Tren IKLH Tahun 2020-2023

Sumber: (BPS, 2024), DLHK Babel 2024, data telah diolah

Pada gambar di atas dapat diamati bahwa pertumbuhan PDRB ADHK yang terjadi dibarengi dengan kemerosotan nilai IKLH. Hal ini mengindikasikan aktivitas perekonomian yang tidak berkelanjutan. Pada gambar juga dapat diamati bahwa kelompok industri pengolahan dan pertambangan memiliki andil dalam pertumbuhan PDRB. Praktik pengelolaan berkelanjutan sangat diperlukan di sektor industri pengolahan dan pertambangan, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air dan udara, agar terjadi peningkatan IKLH, khususnya pada komponen IKA dan IKU.



II.5.3.4 Kondisi pangan

Sebagai gambaran kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pengembangan area perkotaan, kondisi ketahanan pangan juga menjadi hal yang esensial dalam pembangunan. Tekanan dari adanya alih fungsi lahan pertanian dan konsumsi beras penduduk yang cenderung tinggi mempengaruhi kondisi ketahanan pangan di Kepulauan Bangka Belitung. Ketahanan pangan dipengaruhi oleh banyak faktor, yang dapat dikelompokkan menjadi faktor ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan (baik dalam hal akses fisik maupun ekonomi), kualitas pemanfaatan (utilitas) pangan, dan stabilitas pangan (FAO, 2009; Pujiati *et al.*, 2020). Ketahanan pangan di Indonesia diindikasikan dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang ditentukan dengan mengacu pada faktor-faktor tersebut (*affordability, availability, quality & safety, dan sustainability & adaptation*).

Jika dilihat dari faktor ketersediaan pangan (*availability*), tentunya ketersediaan pangan di Kepulauan Bangka Belitung sangat terbatas dan bergantung pada daerah lain untuk memenuhi suplai di dalam daerah. Hal ini dikarenakan lahan pertanian (khususnya pertanian padi yang menjadi sumber makanan pokok) yang terbatas, bahkan terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan peruntukan lainnya. Sebaliknya, faktor keterjangkauan (*affordability*) yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat di Bangka Belitung cukup tinggi (persentase penduduk miskin lebih rendah dari angka kemiskinan nasional). Berikut ini adalah perbandingan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 dan 2022.

Tabel 2.5. 8 Perbandingan IKP Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit IKP
2021	41,56	92,08	78,14	73,22
2022	36,38	92,47	77,54	71,71

Sumber: (Suwignyo *et al.*, 2022), data telah diolah



Pada tabel di atas dapat diamati bahwa IKP Bangka Belitung tahun 2022 menurun dari tahun sebelumnya, khususnya pada aspek ketersediaannya. Penurunan juga terjadi pada aspek pemanfaatan, meskipun tidak sebesar penurunan pada aspek ketersediaan. Kondisi ketahanan pangan ini juga sangat dipengaruhi oleh ketergantungan penduduk pada beras sebagai makanan pokok.

II.5.3.5 Kondisi persampahan

Timbulan sampah yang dihasilkan hampir diseluruh wilayah Bangka Belitung mengalami kenaikan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, dengan rata-rata timbulan sampah 0,4 kg/jiwa/perhari, kecuali Kota Pangkalpinang, dimana rata-rata timbulan sampah yang dihasilkan adalah 0,7 kg/jiwa/perhari. Jangkauan pelayanan penanganan sampah masyarakat di ibukota kabupaten dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum 100%, walaupun sudah ada daerah yang sudah melayani seluruh wilayahnya, yaitu Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Tentu hal ini harus menjadi perhatian karena menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu.

Tabel 2.5. 9 Jumlah timbulan sampah di ibukota Kabupaten tahun 2022 dan 2023

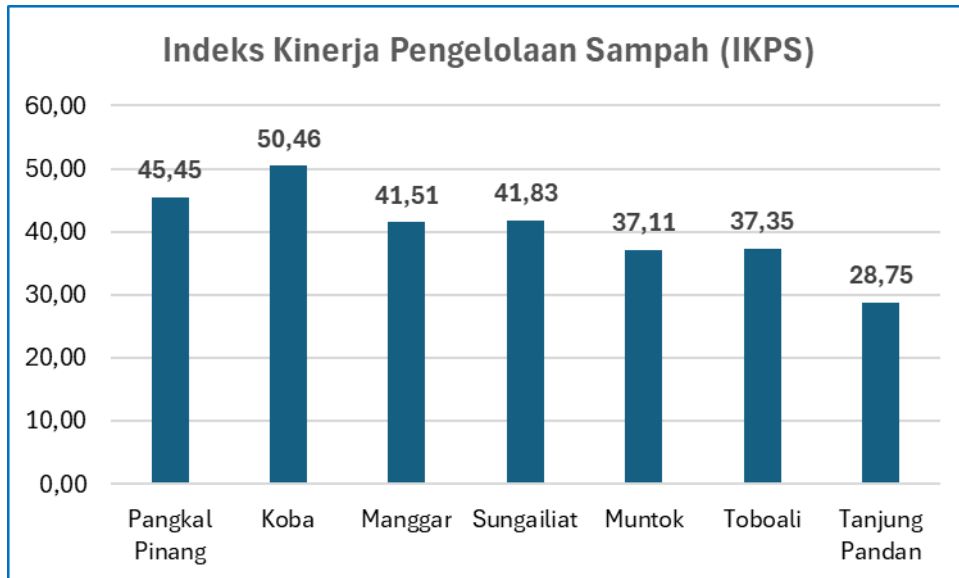
Kabupaten	Lokasi	Jumlah Penduduk Ibukota	Timbulan Sampah (m ³ /hari) (2022)	Timbulan Sampah (m ³ /hari) (2023)	Persen wilayah yang terlayani
Bangka	Sungailiat	97.087	108	110	100
Belitung	Tanjungpandan	108.105	117	122	53,7
Bangka Barat	Mentok	54.239	61	59	43,9
Bangka Tengah	Koba	45.232	50	51	99,74



Kabupaten	Lokasi	Jumlah Penduduk Ibukota	Timbulan Sampah (m ³ /hari) (2022)	Timbulan Sampah (m ³ /hari) (2023)	Persen wilayah yang terlayani
Bangka Selatan	Toboali	81.240	91	94	-
Belitung Timur	Manggar	40.035	56	68,5	46,8
Pangkalpinang	Pangkalpinang	226.297	462	462	100

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi kegiatan pengurangan sampah dan kegiatan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah dapat dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, atau pemanfaatan kembali sampah sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan: pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Berdasarkan data SIPSN terakhir tahun 2023, capaian pengelolaan sampah di ketujuh wilayah kabupaten/kota berkisar antara 71% hingga 76%. Kondisi ini masih jauh dari target dalam Jakstrada.

Sebagai ukuran kinerja pemerintah dalam pengelolaan sampah, telah dikembangkan suatu ukuran Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS). Nilai IKPS ditentukan berdasarkan kategori kebijakan, sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, sosialisasi dan pemahaman, *acceptability* dan implementasi, capaian output, efisiensi anggaran, *outcome*, dan dampak yang ditimbulkan dalam pengelolaan persampahan. Berikut ini adalah data IKPS di ketujuh ibukota kabupaten/kota madya yang ada di Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2.5. 24 IKPS Wilayah Perkotaan Di Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: DLHK Babel, 2024

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa dalam hal pengelolaan sampah perkotaan, kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memiliki IKPS paling tinggi, disusul kemudian pemerintah Kota Pangkalpinang. Kategori penilaian terendah di semua wilayah perkotaan tersebut ada pada kategori kebijakan dan kategori *acceptability* & implementasi. Kondisi ini sesuai dengan fakta di lapangan, yang salah satunya tercermin pada penerimaan dan pendapat masyarakat tentang pembangunan TPA regional yang hingga saat ini sulit terealisasi karena kurangnya penerimaan dari masyarakat. Di perkotaan Pangkalpinang sendiri, kategori yang nilainya rendah selain kebijakan dan *acceptability* & implementasi adalah faktor anggaran, kemudian sarana prasarana.

Pada tahun 2023 telah terjadi 14 kebakaran pada TPA di Indonesia yang disebabkan oleh ledakan gas metana. Peningkatan suhu udara yang ekstrem serta kelembaban yang tinggi menjadi pemicu utama ledakan di TPA. Akibatnya, gas metana yang dihasilkan dari aktivitas pembusukan sampah di TPA menjadi lebih mudah terbakar dan menyebabkan kebakaran yang sulit untuk dikendalikan. Kejadian ini tentunya menimbulkan bencana kedaruratan sampah di setiap daerah, sehingga TPA memegang peranan



penting dalam pengendalian dampak-dampak negatif akibat timbunan sampah yang tidak terkelola.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah sebanyak 8 (delapan) buah TPA dengan kondisi terdapat 3 (tiga) TPA yang sudah *over-capacity* yaitu TPA Parit Enam di Kota Pangkalpinang, TPA Air Belo di Kabupaten Bangka Barat, dan TPA Simpang Jongkong di Kabupaten Bangka Tengah. Kondisi TPA yang sudah melebihi kapasitas di beberapa tempat terutama di Kota Pangkalpinang yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pusat kegiatan perekonomian di Pulau Bangka dan juga dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta lokasi TPA yang cukup dekat dengan landasan penerbangan Bandara Depati Amir, menjadikan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang menjadi sorotan publik.

Tabel 2.5. 10 TPA Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Lokasi	Nama TPA	Luas TPA (Ha)	Kapasitas (m ³)	Volume Eksisting (m ³)
Bangka	Kenanga	Kenanga	4,95	540.000	125.925
Bangka	Belinyu	Belinyu	1,2	300.000	19.710
Bangka Selatan	Kepoh	Junjung Besaoh	11	80.000	85.350
Bangka Selatan	Kepoh	Junjung Besaoh	5	47.375	340
Bangka Tengah	Koba	Simpang Jongkong	40	70.000	90.000
Bangka Barat	Muntok	Air Belo	4,2	115.875	140.919
Pangkalpinang	Pangkalpinang	Parit Enam	4,9	216.000	>216.000
Belitung	Tanjungpandan	Gunung Sadai	8,5	500.000	305.220
Belitung Timur	Manggar	Trafo Mayang	12	120.000	33.000

Sumber: DLH Kabupaten/Kota, 2023

II.5.4 *Impacts*

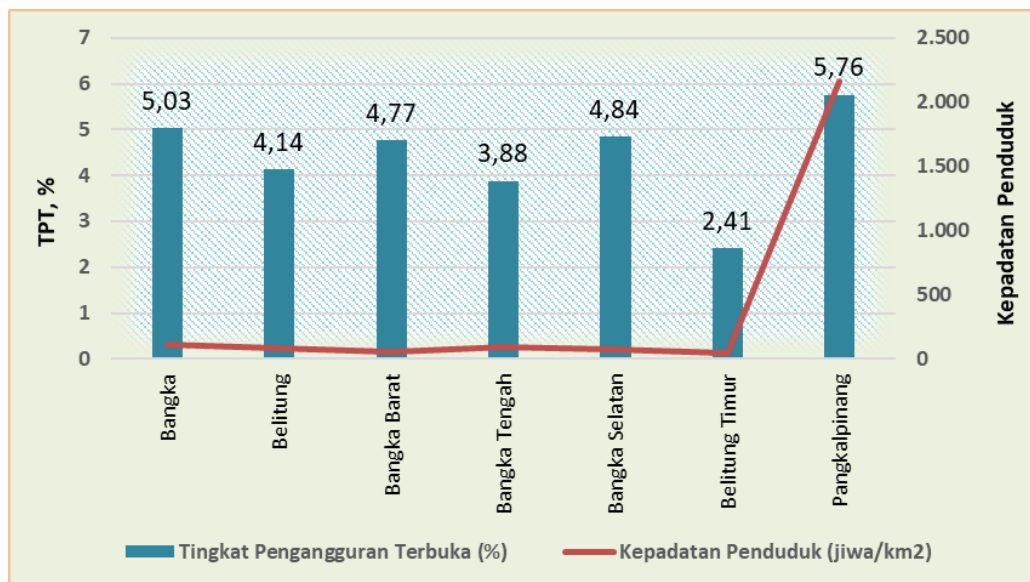
Beberapa *impacts* (dampak) yang timbul akibat berbagai macam perubahan kondisi lingkungan maupun kondisi sosial ekonomi di perkotaan yang disebabkan oleh aktivitas antropogenik, di antaranya adalah



pengangguran, penurunan kualitas udara, pencemaran air, masalah kesehatan masyarakat, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang melebihi kapasitasnya, gangguan estetika dan kebauan, banjir atau genangan air, hingga memperparah masalah pemanasan global. Berikut ini dibahas beberapa dampak tersebut.

II.5.4.1 Pengangguran

Penduduk yang semakin padat di perkotaan memerlukan pekerjaan yang layak untuk mencukupi kebutuhan yang semakin bertambah dan beragam, namun karena ketersediaan lapangan kerja yang terbatas ataupun kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai, maka muncul fenomena pengangguran. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di setiap kabupaten/kota dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut. Pada gambar tersebut terlihat bahwa TPT tertinggi ada di Pangkalpinang yang merupakan wilayah ibukota provinsi (pusat aktivitas ekonomi dan perkembangan wilayah dalam konsep nodal) memiliki penduduk paling padat di antara kabupaten lainnya, dengan perbedaan yang cukup tajam.



Gambar 2.5. 25 Persebaran Kepadatan Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023

Sumber: (BPS, 2024), data telah diolah kembali



Nilai TPT menunjukkan perbandingan dalam bentuk persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai TPT di Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun tiga tahun terakhir, sejak tahun 2021, TPT mulai menunjukkan tren menurun meskipun tren keseluruhan masih menunjukkan tren yang meningkat. Pada gambar di atas dapat diamati bahwa tingkat pengangguran terbuka di perkotaan Pangkalpinang paling tinggi dibandingkan keenam kabupaten lainnya. Hal ini menjadi salah satu fenomena umum, yaitu kepadatan penduduk yang sangat tinggi berdampak negatif memunculkan pengangguran.

II.5.4.2 *Over-capacity landfills*

Over-capacity yang terjadi pada beberapa TPA kabupaten/kota dan perilaku masyarakat yang tidak peduli lingkungan memberikan dampak negatif dan juga dampak positif bagi lingkungan. Dampak negatif yang ditimbulkan memiliki *multiplier effect*, yang artinya jika permasalahan sampah ini tidak teratasi, maka akan memberikan pengaruh negatif hampir pada semua aspek sosial-ekonomi maupun lingkungan. Salah satu dampak negatif tersebut yaitu ketidaknyamanan masyarakat akibat timbulnya bau dan pemandangan yang tidak menyenangkan dari tumpukan sampah yang ada di TPA dan area sekitarnya, juga dari tempat-tempat pembuangan sampah (*illegal*) yang tidak seharusnya ada. Ketidaknyamanan yang dialami masyarakat terutama dari masyarakat di sekitar TPA secara terus menerus dapat menimbulkan mal-adaptasi yaitu adaptasi yang diakibatkan oleh pembiaran terhadap keadaan yang secara umum tidak baik. Dampak lebih jauh dari buruknya pengelolaan sampah adalah akan terjadi pencemaran tanah, air tanah, udara, bibit penyakit serta akan berkontribusi terhadap perubahan iklim akibat terbentuknya gas metana oleh degradasi sampah organik, yang juga dapat mengakibatkan suatu



ledakan di TPA yang dapat merenggut korban jiwa seperti kasus yang terjadi pada TPA Leuwigajah.

Tingginya timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat selain memberikan dampak negatif, ternyata ada dampak positif yang dapat ditimbulkan. Perubahan pola pikir masyarakat yang memandang sampah bukan hanya sebagai sisa dari suatu kegiatan namun paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Hal ini dapat membuka peluang kerja yang memanfaatkan sampah-sampah yang bernilai ekonomi. Sektor informal juga memberikan kontribusi dalam pengelolaan sampah dibalik pemanfaatan sampah yang mereka lakukan. Berikut data pengepul/sektor informal yang memanfaatkan sampah bernilai ekonomi sebagai sumber penghasilan, sebagaimana yang dilakukan pengepul sampah. Dalam hal ini, pihak pengepul sampah turut berperan dalam pengelolaan timbulan sampah. Berikut ini tersaji data berbagai sektor informal dalam pengelolaan sampah di Bangka Belitung.

Tabel 2.5. 11 Sektor Informal Dalam Pengelolaan Sampah

No.	Nama Pengepul	Jenis	Kabupaten/Kota
1	PENGEPUL "NURKATI"	Pengepul	Kab. Bangka
2	Pengepul CV KARAMATA JAYA	Pengepul	Kab. Bangka
3	PENGEPUL "JUKI"	Pengepul	Kab. Bangka
4	Pengepul CV MANDIRI MAJU BERSAMA	Pengepul	Kab. Bangka
5	Pengepul CV GLOBE	Pengepul	Kab. Bangka
6	Lapak LAPAS AGUS CIK HAMDANI	Lapak	Kab. Bangka
7	Pengepul Kasek	Pengepul	Kab. Bangka Selatan
8	Lapak SAHRON	Lapak	Kab. Bangka Selatan
9	Lapak MUSA	Lapak	Kab. Bangka Selatan
10	Pengepul HJ. YATI	Pengepul	Kab. Bangka Selatan
11	Pengepul SIMIN	Pengepul	Kab. Bangka Selatan
12	Pengepul IPIN	Pengepul	Kab. Bangka Selatan



No.	Nama Pengepul	Jenis	Kabupaten/Kota
13	Lapak SAHDIA	Lapak	Kab. Bangka Selatan
14	Pengepul ABUN	Pengepul	Kab. Bangka Selatan
15	Lapak UDIN	Lapak	Kab. Bangka Selatan
16	Lapak RAUDI	Lapak	Kab. Bangka Selatan
17	Lapak ENDI	Lapak	Kab. Bangka Selatan
18	Pengepul ABOT	Pengepul	Kab. Bangka Selatan
19	Pengepul H. SENA	Pengepul	Kab. Bangka Tengah
20	Lapak musa	Lapak	Kab. Bangka Tengah
21	Lapak UDANG	Lapak	Kab. Bangka Tengah
22	Lapak nibung	Lapak	Kab. Bangka Tengah
23	Lapak WARTIN	Lapak	Kab. Bangka Tengah
24	Lapak TARMIDI	Lapak	Kab. Bangka Tengah
25	Lapak NUSI ARMAN	Lapak	Kab. Bangka Tengah
26	engepul Keriting	Pengepul	Kab. Bangka Tengah
27	Pengepul Hasanah	Pengepul	Kota Pangkal Pinang
28	Lapak kiki	Lapak	Kota Pangkal Pinang
29	IKATAN PEMULUNG INDONESIA (IPI) KABUPATEN BELITUNG	Pengepul	Kab. Belitung
30	Lapak Hendri	Lapak	Kab. Bangka Tengah
31	Bangka Recycle	Pengepul	Kota Pangkal Pinang
32	Rumah Maggot	Lapak	Kota Pangkal Pinang
33	Alwan	Pengepul	Kab. Belitung Timur
34	Yus	Pengepul	Kab. Belitung Timur
35	Mohkamad	Pengepul	Kab. Belitung Timur
36	Yunan	Pengepul	Kab. Belitung Timur
37	lapak Pak Asri	Lapak	Kab. Bangka Selatan
38	lapak tarkim	Lapak	Kab. Bangka Selatan
39	pengepul Warno	Pengepul	Kab. Bangka Selatan
40	pengepul dede	Pengepul	Kab. Bangka Selatan
41	Tina	Pengepul	Kab. Bangka Tengah
42	Pengepul Ajid	Pengepul	Kab. Bangka Tengah
43	Pengepul Imam	Pengepul	Kab. Bangka Tengah
44	Lapak Sarno	Lapak	Kab. Bangka Tengah
45	Lapak Muklis	Lapak	Kab. Bangka Tengah
46	Lapak Sunari Anwar	Lapak	Kab. Bangka Tengah



No.	Nama Pengepul	Jenis	Kabupaten/Kota
47	Soleh Udin	Pengepul	Kab. Belitung Timur
48	Jon	Pengepul	Kab. Belitung Timur
49	Diman	Pengepul	Kab. Belitung Timur
50	Dedi Aik Lanci	Pengepul	Kab. Belitung Timur
51	SLAMET	Pengepul	Kab. Bangka Barat
52	Jual Beli Barang Rongsokan	Pengepul	Kab. Bangka Barat

II.5.4.3 Kawasan kumuh

Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya. Kekurangansiapan untuk mengantisipasi kecepatan dan dinamika pertumbuhan fisik dan fungsional kawasan perkotaan menyebabkan kawasan kumuh tumbuh sejalan dengan berkembangnya pusat-pusat kegiatan ekonomi. Gangguan estetika dan kebauan akibat pengelolaan sampah yang kurang tepat atau tidak optimal dapat memperparah kondisi area kumuh di perkotaan.

Berikut ini tersaji data kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi dalam pengelolaannya.



Tabel 2.5. 12 Kawasan Kumuh Wewenang Provinsi

No	Kab/Kota	Kawasan Kumuh Provinsi		Luas (Ha)
		Kecamatan	Kel/Desa	
1	Belitung	Tanjung Pandan	Parit	12,7
			Air Saga	10,29
2	Bangka Barat	Tempilang	Air Lintang	10
3	Bangka	Belinyu	Mantung	10,97
		Sungailiat	Sungailiat (Nelayan 2)	10,17
4	Belitung Timur	Gantung	Gantung (Trans Danau Nujau)	13,86
5	Pangkalpinang	Rangkui	Keramat (RT007-RW003)	12,5
		Rangkui	Parit Lalang (RT001-RW001)	10,3
			Parit Lalang (RT002-RW003)	12,5
6	Bangka Selatan	Lepar	Penutuk	10,32
		Kepulauan Pongok	Pongok	11,53
7	Bangka Tengah	Tidak Terdapat Kawasan Kumuh Provinsi		
JUMLAH				125,14

Sumber: (PUPRPRKP, 2023)

Berdasarkan data di atas, dapat dibaca bahwa kawasan kumuh terluas yang menjadi kewenangan provinsi ada di wilayah Kota Pangkalpinang. Hal ini merupakan dampak negatif dari berbagai kegiatan ekonomi yang padat di area perkotaan, serta pembangunan perkotaan yang tidak berkelanjutan. Pada awal tahun 2022, ada kawasan kumuh di Pangkalpinang seluas 85,30 Ha yang tersebar di enam kelurahan. Berikut ini tersaji tabulasi data luasan area kumuh di keenam kelurahan tersebut.

Tabel 2.5. 13 Kawasan Kumuh di Pangkalpinang

Kecamatan	Kelurahan	Luas Area Kumuh (Ha)
Rangkui	Keramat	12,5
	Parit Lalang	32,09
	Bintang	3,94
	Pintu Air	7,74
Taman Sari	Kejaksaan	18,13
Gabek	Selindung	10,9
Total		85,3

Sumber: (Disperkim Pangkalpinang, 2022)



Beberapa area di atas dapat dikategorikan kumuh karena beberapa kriteria. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, kriteria kekumuhan dilihat dari kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi proteksi kebakaran. Pada berbagai kriteria tersebut, terlihat bahwa kondisi pengelolaan sampah menjadi salah satu kriteria dalam penentuan tingkat kekumuhan.

Secara historis, pada tahun 2014 ada 20 kelurahan (196,2 hektar) di Pangkalpinang yang memiliki kawasan kumuh. Pada tahun 2018, kawasan kumuh di Pangkalpinang berkurang menjadi 187,89 hektar, kemudian tahun 2021 turun lagi menjadi 150,09 hektar. Kemudian, pada tahun 2022 kawasan kumuh ini turun menjadi 85,30 hektar. Pada tahun 2024 ini, sisa kawasan kumuh di Kota Pangkalpinang seluas 27,43 hektar yang berlokasi di Kelurahan Kejaksaan (18,13 ha) dan Kelurahan Paritlalang (10,3 ha) (Hasanah, 2024).

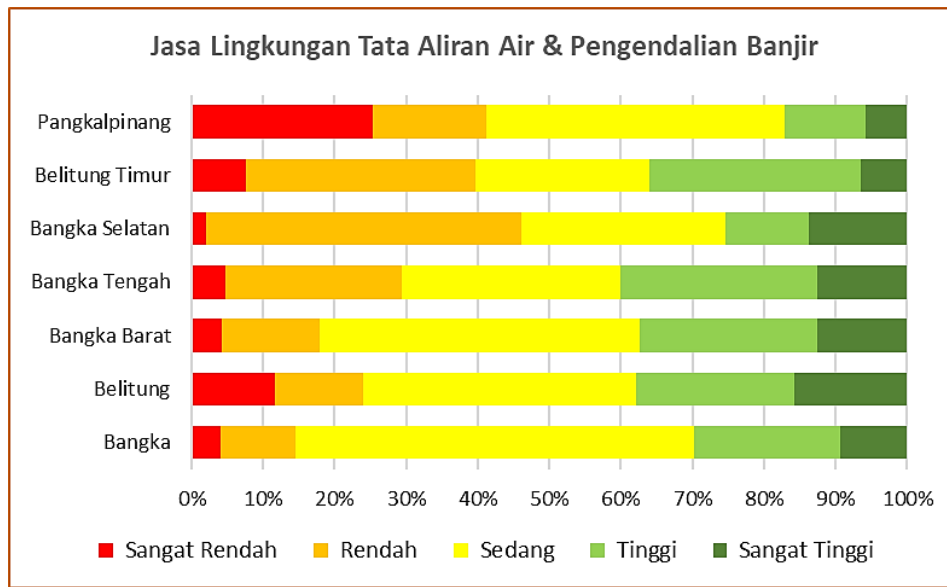
Pembangunan kota yang berkelanjutan menjadi alternatif solusi masalah kepadatan permukiman di wilayah perkotaan. Pengembangan lahan perkotaan yang berkelanjutan tidak hanya menjamin efisiensi penggunaan sumber daya lahan di perkotaan, namun juga berkontribusi untuk menciptakan kondisi permukiman masyarakat yang lebih sehat dan layak huni.

II.5.4.4 Banjir dan genangan air

Banjir adalah salah satu tanda terganggunya sistem hidrologi di suatu daerah. Pembangunan di perkotaan yang cenderung memperbanyak fragmentasi, memperluas area yang kedap air, serta mengurangi lahan bervegetasi menyebabkan berbagai siklus alam tidak berfungsi dengan baik, termasuk siklus air. Pembangunan perkotaan menyebabkan sistem hidrologi mengalami perubahan drastis sehingga jasa lingkungan



pengendalian banjir juga terganggu. Perencanaan pembangunan perkotaan harus didesain sedemikian rupa agar dapat mengendalikan tata aliran air, mencegah banjir & bencana lainnya, sehingga menjadi kota yang berkelanjutan. Berikut ini tersaji kondisi indikatif jasa lingkungan pengatur tata aliran air dan pengendalian banjir di tujuh kabupaten/kota.



Gambar 2.5. 26 Distribusi Indikasi Jasa Lingkungan Tata Aliran Air dan Pengendalian Banjir di Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Sumber: DDDTLH Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2022 (data telah diolah kembali)

Berdasarkan gambar di atas, indikasi jasa lingkungan tata aliran air dan pengendalian banjir di Kota Pangkalpinang memiliki luasan kelas sangat rendah yang terbanyak dibandingkan keenam kabupaten. Hal tersebut adalah salah satu kondisi yang timbul akibat pembangunan di perkotaan yang tidak disertai dengan perencanaan pengendalian banjir yang baik.

Secara umum, sistem drainase merupakan serangkaian bangunan air yang berfungsi mengurangi dan membuang kelebihan air (banjir) dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan dengan optimal, namun seringkali fungsi vital ini terganggu karena menurunnya kualitas drainase akibat sampah rumah tangga (Ardana et al., 2023). Kapasitas saluran drainase yang belum memadai, pembangunan pemukiman di sepanjang saluran drainase yang dapat mengurangi luas



penampang basah saluran, serta ditemukannya sampah rumah tangga pada saluran drainase dan buangan tanah/pasir merupakan permasalahan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Berikut ini adalah data jumlah kejadian bencana pada tahun 2023 di Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat bahwa kejadian bencana yang sering terjadi adalah bencana cuaca ekstrim, kebakaran, dan banjir. Bencana banjir sering terjadi saat musim penghujan. Pada tahun-tahun sebelumnya, bencana banjir adalah jenis bencana yang paling sering terjadi.

Tabel 2.5. 14 Jumlah Total Kejadian Bencana Menurut Jenisnya

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian
banjir	20
kebakaran	31
puting beliung	16
cuaca ekstrim	42
abrasi pantai	1
transportasi	1

Sumber: BPBD Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2024

II.5.4.5 Pemanasan global

Berdasarkan tabel sebelumnya terlihat bahwa bencana cuaca ekstrim, banjir, dan puting beliung termasuk jenis bencana yang sering terjadi di Kepulauan Bangka Belitung. Jenis-jenis bencana tersebut merupakan bentuk akibat dari perubahan iklim yang terjadi, yang terakumulasi dalam jangka panjang. Perubahan iklim adalah isu global yang disebabkan oleh pemanasan global yang terjadi dalam jangka panjang, serta menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia.

Suhu rata-rata tahunan di Kepulauan Bangka Belitung yang semakin meningkat disebabkan adanya pemanasan global yang dampaknya dirasakan di berbagai sektor kehidupan dan bersifat *multiplier effect*. Karena dampaknya yang tidak terbatas oleh ruang (lintas negara) dan terakumulasi dalam jangka panjang, maka perubahan iklim menjadi isu



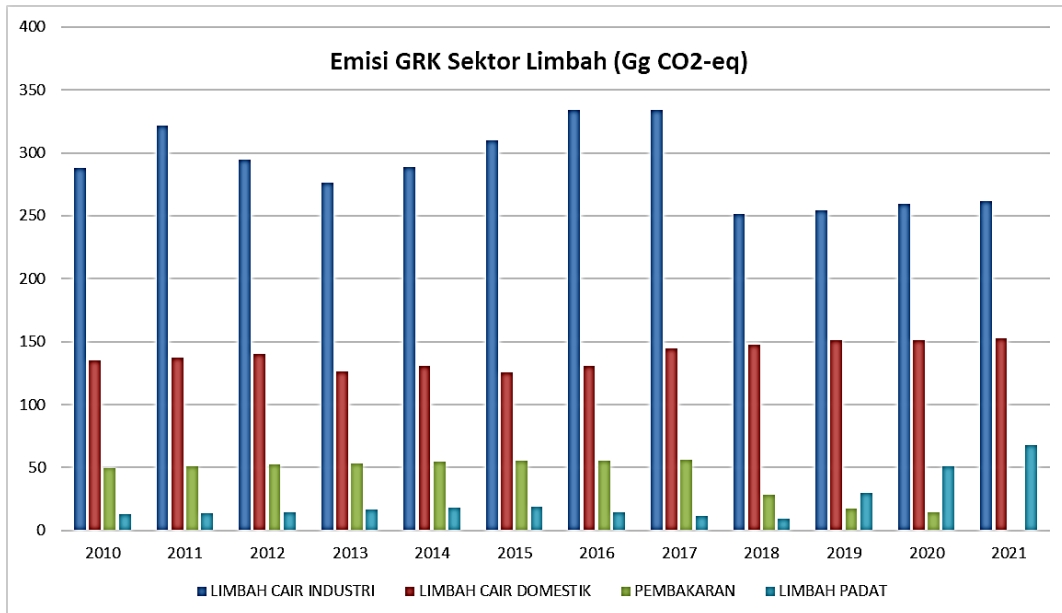
global yang dihadapi semua negara. Dampak perubahan iklim yang dirasakan di suatu wilayah dapat berasal dari aktivitas antropogenik yang mengemisikan Gas Rumah Kaca (GRK) di wilayah lain ataupun dalam wilayah itu sendiri.

Emisi GRK dapat timbul akibat sampah yang tidak terkelola, khususnya sampah organik. TPA yang seharusnya berfungsi sebagai tempat pemrosesan akhir, jika dioperasikan dengan cara *open dumping*, maka akan berfungsi sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Dengan demikian, TPA yang memiliki timbunan sampah dalam jumlah besar (terutama sampah organik) memiliki potensi untuk mengalami proses degradasi anaerobik dan menghasilkan gas-gas penyebab pemanasan global, seperti gas metana. Jenis emisi GRK yang memiliki nilai *Global Warming Potential* (GWP) paling besar dari sektor pengelolaan sampah & limbah adalah gas metana (CH_4) yang timbul dari proses degradasi anaerobik timbunan limbah padat organik ataupun limbah perkotaan yang tidak diolah (dibuang ke laut, sungai, dan badan air lainnya). Gas metana juga dapat diemisikan dari sistem pengelolaan limbah yang sengaja memproduksi gas metana untuk energi atau dari sistem pengomposan limbah padat. Selain itu, pemrosesan sampah dan limbah juga mengemisikan gas karbon dioksida (CO_2) dan dinitrogen oksida (N_2O) yang juga merupakan jenis GRK. Gas N_2O berasal dari kegiatan pengomposan/pembakaran limbah padat dan proses biologi limbah cair perkotaan, sementara gas karbon dioksida berasal dari pembakaran limbah padat.

Emisi sektor limbah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdata bersumber dari limbah cair industri, hasil pembakaran, limbah cair rumah tangga, dan limbah padat. Gambar berikut menyajikan tren kecenderungan emisi sektor limbah dari berbagai sumber tersebut. Pada gambar berikut terlihat bahwa emisi sektor limbah yang paling besar komponennya adalah emisi dari limbah cair industri yang kecenderungannya semakin menurun karena berbagai penerapan teknologi pemrosesan limbah dan proses pengawasan dari pemerintah. Pada gambar



juga dapat dilihat bahwa limbah rumah tangga (domestik), khususnya limbah padat semakin meningkat emisinya. Kondisi ini sejalan dengan fakta pertambahan jumlah penduduk & aktivitasnya, serta pola hidup penduduk yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.



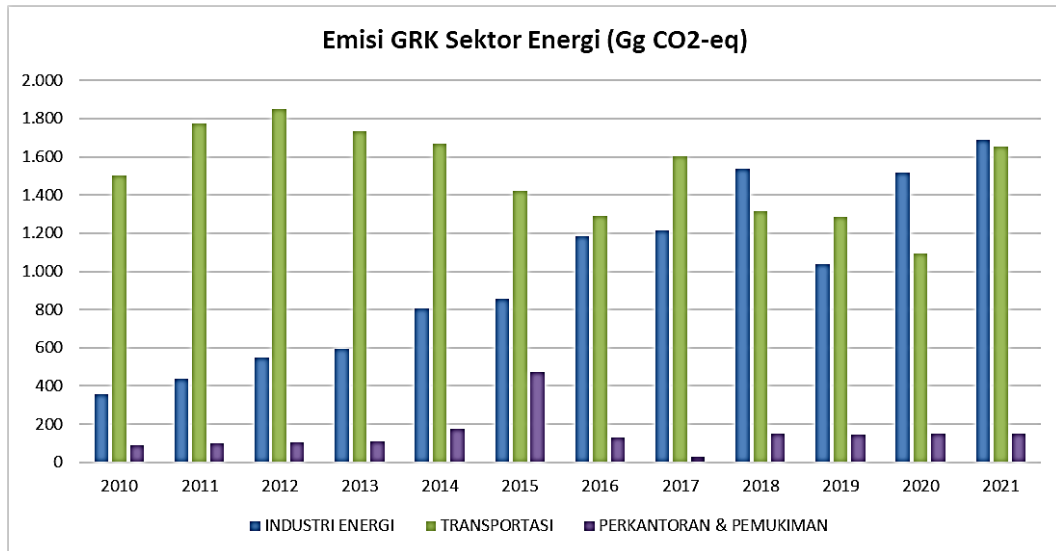
Gambar 2.5. 27 Emisi Sektor Limbah

Sumber: (SignSmart, 2022b), data diolah kembali

Selain emisi dari sektor limbah, sumber GRK pada aktivitas perkotaan juga timbul dari hasil penggunaan energi. Konsumsi energi memang sebanding dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, akan tetapi di sisi lain menghasilkan emisi yang justru menyebabkan lingkungan (termasuk aspek ekonomi itu sendiri) tidak berkelanjutan. Berikut ini adalah gambar yang menyajikan tren emisi sektor energi di Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan jenis sumbernya. Pada gambar berikut terlihat bahwa penyumbang terbesar emisi sektor energi adalah aktivitas transportasi. Hal ini mendukung adanya fakta bahwa penduduk di Kepulauan Bangka Belitung memiliki kecenderungan yang sangat tinggi untuk menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Selain itu, emisi dari pembangkit listrik juga semakin meningkat karena adanya tuntutan produksi listrik yang semakin besar sesuai dengan konsumsi energi listrik para pelanggan listrik. Kondisi



ini semakin memperkuat hasil analisis sebelumnya, bahwa konsumsi energi listrik di Kepulauan Bangka Belitung semakin tinggi, termasuk konsumsi per kapitanya. Hal ini tidak terjadi pada penggunaan energi di permukiman dan perkantoran karena sebagian besar telah beralih ke LPG yang lebih berkelanjutan sebagai bahan bakar dalam rumah tangga.



Gambar 2.5. 28 Emisi Sektor Energi

Sumber: (SignSmart, 2022a)

II.5.5 Responses

Permasalahan keberlanjutan wilayah perkotaan saat ini sedang menjadi isu terkini, dan pembangunan kota berkelanjutan telah menjadi topik penting di tingkat pemangku kebijakan. Sehubungan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan oleh berbagai wilayah perkotaan, indikator keberlanjutan perkotaan (*urban sustainability indicator frameworks*) memiliki posisi penting dalam perencanaan pembangunan perkotaan. Indikator seperti ini memungkinkan keberlanjutan diukur dan dinilai dengan jelas. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian keberlanjutan (*sustainability assessment*) di tingkat lokal untuk wilayah perkotaan sangat diperlukan dan penting sebagai kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan penilaian terhadap indikator-indikator keberlanjutan, pembahasan dari rumusan



abstrak ke tujuan-tujuan spesifik yang memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan oleh berbagai *stakeholder* ataupun pemangku kebijakan (Michalina et al., 2021). Dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan, penting untuk menerapkan pemantauan terhadap proses pengambilan keputusan sehingga pihak yang bertanggung jawab dan pembuat kebijakan dapat merancang perubahan yang diperlukan. Berikut ini adalah beberapa contoh indikator perkotaan yang berkelanjutan.

- a) Penggunaan Lahan yang Efisien,
- b) Keanekaragaman Lingkungan Alam & Ekosistem Fungsional,
- c) Perubahan Iklim & Pembangunan Rendah Karbon,
- d) Manajemen Polusi, Limbah dan Sampah.
- e) Akses terhadap perumahan dan layanan yang terjangkau,
- f) Transportasi Hemat Karbon dan Ramah Lingkungan,
- g) Penggunaan Sumber Daya yang Efisien,
- h) Kesehatan,
- i) Keamanan,
- j) Perekonomian yang Terdiversifikasi dan Kompetitif,
- k) Akses terhadap Pendidikan, Pekerjaan, dan Pelatihan,
- l) Akses terhadap Modal dan Kredit,
- m) Akses terhadap rekreasi umum dan ruang terbuka,
- n) Akses ke berbagai pilihan transportasi.

Berdasarkan beberapa indikator kota berkelanjutan di atas, aspek efisiensi penggunaan sumber daya memiliki peranan yang sangat penting, baik sumber daya lahan, air, maupun energi. Selain itu, kota berkelanjutan juga memperhatikan kemudahan akses pada transportasi, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan berbagai kegiatan ekonomi yang terdiversifikasi, sementara kelestarian lingkungan tetap dijaga. Beberapa indikator tersebut penting bagi pemerintah provinsi untuk merumuskan berbagai upaya sebagai bentuk respon pada berbagai permasalahan sosial-lingkungan di perkotaan.



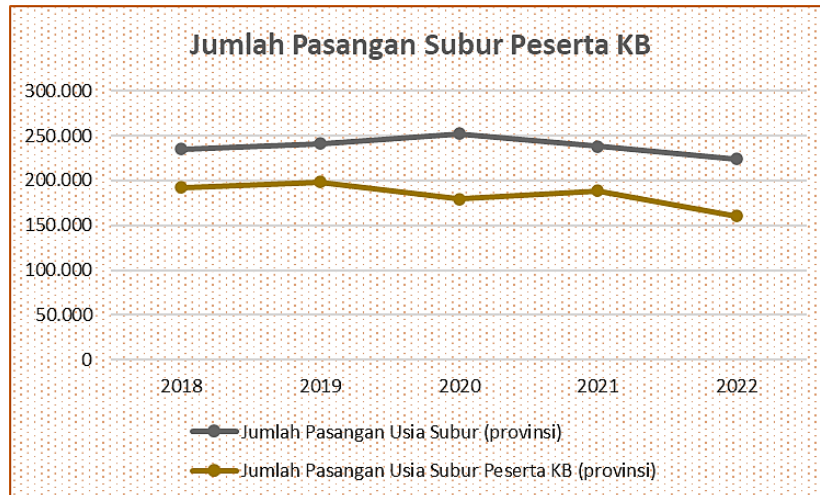
Respon yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap permasalahan di perkotaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu respon pada bagian hulu permasalahan, yaitu pada unsur *driving forces*, respon pada unsur *pressures*, respon pada unsur *states*, dan respon langsung pada *impacts*.

II.5.5.1 Respon pada *driving forces*

Respon masalah perkotaan pada unsur *driving forces* dapat dilakukan dengan pengendalian jumlah penduduk dan memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok penduduk, serta perencanaan matang yang memastikan kebijakan pembangunan telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Respon pada unsur *driving forces* memang tidak secara langsung terlihat sebagai solusi suatu dampak yang timbul, tetapi cukup efektif sebagai pencegahan masalah dari awal. Berikut ini disajikan beberapa hal yang menjadi respon pemerintah daerah pada unsur *driving forces*.

a. Program Keluarga Berencana (KB)

Pada tahun 2023, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpartisipasi untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 (PPK23), yang berlangsung sejak tanggal 1 hingga 31 Juli 2023. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menduduki peringkat tertinggi nasional dalam progres PPK23 sampai saat ini (Arif, 2023). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi untuk menyukseskan program KB. Berikut ini tersaji data terakhir jumlah pasangan subur dan jumlah pasangan subur peserta KB. Pada gambar berikut terlihat bahwa jumlah pasangan subur setiap tahun semakin berkurang, akan tetapi yang menjadi peserta KB juga semakin berkurang. Upaya yang lebih besar dari pemerintah untuk sosialisasi dan implementasi program KB secara lebih masif diperlukan untuk menyukseskan program KB dan mengontrol jumlah penduduk.



Gambar 2.5. 29 Jumlah Pasangan Subur Peserta KB

Sumber: (SDI, 2023), data telah diolah

Di wilayah perkotaan Pangkalpinang, Wali Kota Pangkalpinang menerima penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN pada tahun 2021. Penghargaan tersebut diterima sebagai wujud apresiasi atas prestasi menonjol dan komitmen serta kepemimpinan wali kota dalam upaya menggerakkan program KB. Penghargaan ini juga diterima oleh Bupati Bangka (Hardi, 2021).

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Dokumen Persetujuan Lingkungan

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan yang mengatur Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, KLHS didefinisikan sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Berbagai materi KRP di provinsi diwajibkan KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi di dalamnya, seperti

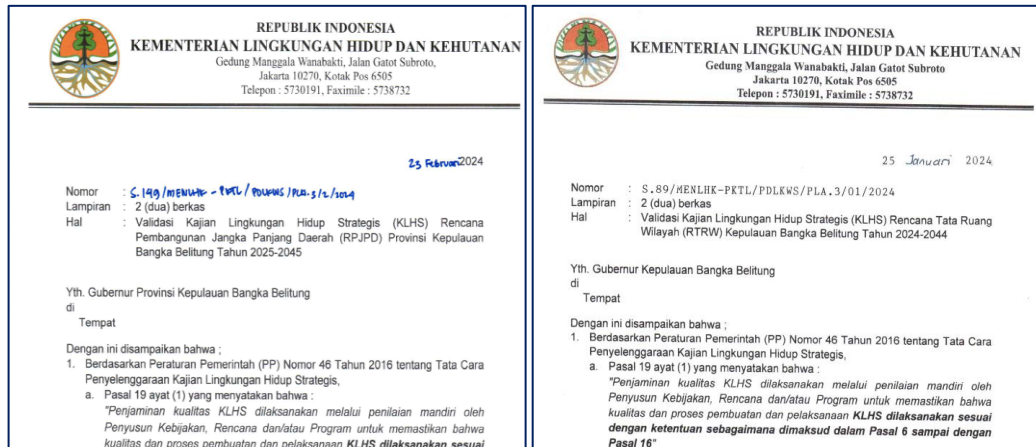


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan KRP lainnya yang berdampak/berisiko pada lingkungan hidup.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan berbagai jenis KLHS sejak diterapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 pada tahun 2017, yaitu KLHS RPJMD 2017-2022 dan perubahannya, KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), KLHS Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Sadai, dan KLHS Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate*. KLHS RPJPD 2025-2045, dan KLHS RTRW 2024-2044 yang merevisi RTRW sebelumnya serta mengintegrasikan tata ruang laut dan darat. Pada tahun 2024 ini, pemerintah provinsi menyelenggarakan KLHS RPJMD yang merupakan perencanaan periode pertama dalam RPJPD 2025-2045, yaitu untuk RPJMD periode 2025-2029. Berbagai macam penyelenggaraan KLHS tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah provinsi untuk mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam pembangunan.

KLHS RPJMD dilakukan untuk memastikan diintegrasikannya prinsip pembangunan berkelanjutan yang terindikasikan dengan berbagai indikator tujuan pembangunan berkelanjutan, meliputi pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum & tata kelola. Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ini sangat penting dalam pembangunan sebuah wilayah perkotaan. Sejalan dengan pemerintah provinsi, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga menyelenggarakan KLHS RPJMD.

Pemerintah provinsi juga melakukan pembinaan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan KLHS, termasuk melakukan proses validasi KLHS yang disusun kabupaten/kota. Pada tahun 2024, pemerintah provinsi sedang menyelenggarakan kegiatan validasi KLHS RPJMD dan RTRW kabupaten/kota. Pembinaan ini juga dilakukan untuk menjalankan fungsi koordinatif pemerintah provinsi pada wilayah administratif di dalam wilayah provinsi.



Gambar 2.5. 30 Persetujuan Validasi KLHS RPJPD 2025-2045 dan KLHS RTRW 2024-2044 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penyelenggaraan KLHS adalah salah satu metode untuk mengendalikan dampak lingkungan sejak dari hulu kegiatan. Berbagai dampak muncul karena adanya kebijakan atau pembangunan dari pemerintah yang kurang terencana dengan baik, terutama terkait aspek lingkungannya. Instrumen KLHS menjadi instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan bersama dengan instrumen lainnya seperti Amdal, UKL-UPL, perizinan, dan tata ruang.

Pada level proyek, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan melalui berbagai jenis dokumen lingkungan yang menjadi syarat persetujuan lingkungan. Sejak tahun 2002 hingga 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pemrosesan dokumen lingkungan untuk berbagai jenis usaha dan/atau kegiatan sebanyak lebih dari 200 dokumen lingkungan, baik dalam bentuk Amdal, UKL-UPL, DELH, DPLH, maupun adendum berbagai dokumen tersebut. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan dan/atau usaha terencana dengan baik aspek pengelolaan lingkungannya sehingga dampak-dampak negatif dapat diminimalkan dan dampak-dampak positif dapat dimaksimalkan.



c. Revisi RTRW

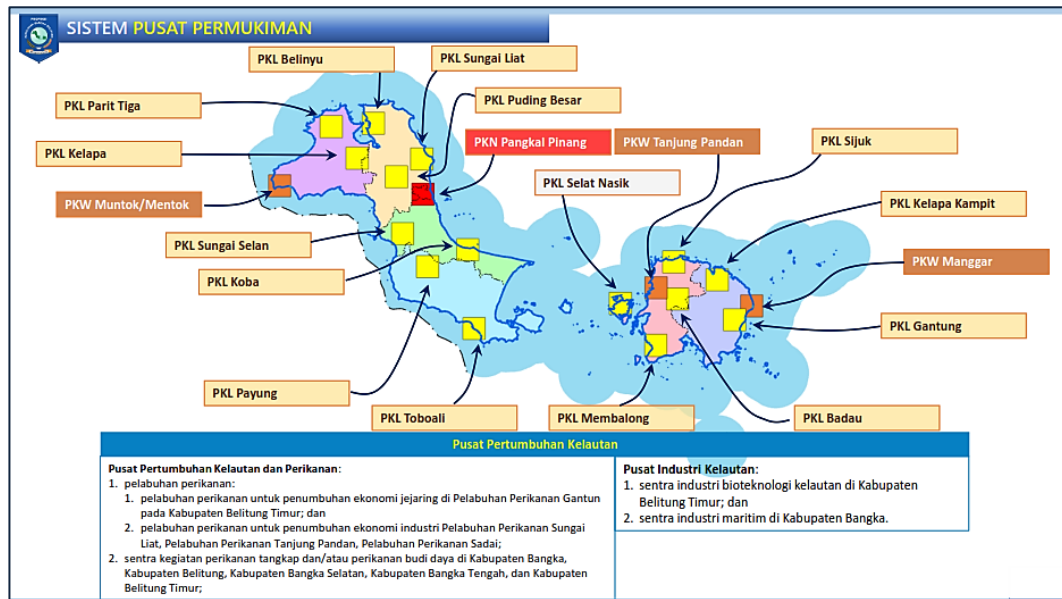
Pada tahun 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun RTRW yang direvisi dari RTRW sebelumnya. Proses penyusunan RTRW yang mengintegrasikan tata ruang darat dan laut ini dibarengi dengan proses KLHS. Revisi RTRW dilakukan karena berbagai pertimbangan, yaitu perlunya penyesuaian dengan peraturan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang kemudian pada tahun 2023 ini ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta aturan-aturan turunannya (Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 dan 14 Tahun 2021). Selain itu, integrasi tata ruang darat dan laut serta perubahan nomenklatur alokasi ruang perlu diselesaikan mengacu pada peraturan terbaru, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021).

Selain dasar-dasar regulasi yang mendasari revisi RTRW di atas, revisi RTRW ini menjadi salah satu bentuk respon pemerintah daerah pada berbagai isu pembangunan berkelanjutan. Penataan kembali tata ruang di darat dan di laut yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui proses KLHS dapat digunakan sebagai instrumen untuk mematangkan perencanaan pembangunan wilayah, bersamaan dengan penyusunan RPJPD dan RPJMD pada tahun selanjutnya. Revisi RTRW ini juga dilakukan di pemerintah kabupaten/kota karena adanya berbagai penyesuaian pola ruang.

Penataan kembali tata ruang ini menjadi bentuk upaya untuk menyelesaikan masalah perkotaan dengan mengevaluasi kembali kebijakan, rencana, dan program pembangunan yang telah ada, termasuk tata ruang permukiman dan bangunan infrastruktur lainnya, peruntukan ruang untuk RTH, maupun ruang untuk kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya yang menjadi penyumbang utama PDRB di Kepulauan Bangka Belitung, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan, pertambangan, serta sektor pariwisata yang potensinya cukup besar di Kepulauan Bangka



Belitung. Penataan kembali pola ruang dan struktur ruang ini diharapkan dapat mengendalikan berbagai macam aktivitas ekonomi selanjutnya untuk jangka panjang.



Gambar 2.5. 31 Ilustrasi Perencanaan Sistem Pusat Permukiman Di Dalam RTRW

Sumber: RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung 2024-2044

Gambar di atas menyajikan ilustrasi perencanaan titik-titik lokasi yang menjadi pusat permukiman. Pembangunan sistem pusat permukiman menjadi bentuk perwujudan upaya untuk memenuhi kebutuhan permukiman penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya. Perencanaan ini tentu saja harus memperhatikan proyeksi populasi penduduk hingga 20 tahun ke depan, sesuai dengan periode perencanaan ruang. Selain itu, kapasitas daya dukung lingkungan, efisiensi penggunaan lahan, dan fungsi wilayah perkotaan yang dibangun tentu saja juga menjadi pertimbangan utama. Sistem pusat permukiman di Bangka Belitung terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Pangkalpinang, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Mentok, Tanjungpandan, dan Manggar, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang tersebar di keenam kabupaten, Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan (PPKP), serta Pusat Industri Kelautan. Sistem pusat



permukiman seperti ini terpadu/terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan penduduk, seperti perindustrian dan perdagangan.

II.5.5.2 Respon pada *pressures*

Berdasarkan pembahasan unsur *pressures* sebelumnya, berbagai aktivitas antropogenik yang menjadi tekanan pada kondisi lingkungan perkotaan adalah aktivitas alih fungsi lahan, pembangunan permukiman, pola konsumsi yang tidak disertai dengan kepedulian lingkungan, penggunaan kendaraan pribadi, dan konsumsi energi yang semakin meningkat. Beberapa respon pada unsur *pressures* yang telah dilakukan pemerintah provinsi, di antaranya meliputi berbagai kegiatan untuk pengendalian aktivitas-aktivitas antropogenik tersebut.

a. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Peningkatan kapasitas masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan, hingga perkuliahan/pengajaran. Peningkatan kapasitas masyarakat diharapkan dapat memperbaiki pola pikir dan perilaku masyarakat agar lebih peduli lingkungan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk kegiatan-kegiatan berikut ini:

- a) Fasilitasi perjanjian kerja sama sekolah dan swasta (perusahaan) di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung Timur, dan Kabupaten Bangka dalam persemaian bibit asam menggunakan sampah/bekas wadah plastik dan penanaman di lokasi yang membutuhkan penghijauan (tahun 2018).
- b) Perjanjian kerja sama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT Sahabat Mewah dan Makmur pada tahun 2019-2020 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup Bagi Sekolah di Kabupaten Belitung Timur, dan tahun 2020 tentang Pendidikan Saka



Kalpataru Bagi Siswa-Siswi Pramuka di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ruang lingkup kerja sama mencakup upaya pembinaan dan pendidikan Saka Kalpataru, di antaranya adalah pendidikan Krida 3R (Reduce, Reuse, Recycle), Krida Perubahan Iklim, dan Krida Konservasi Keanekaragaman Hayati bagi siswa-siswi pramuka di Kabupaten Belitung Timur.

- c) Pelatihan pengolahan sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos organik dan kompos cair, di kabupaten/kota (tahun 2019).
- d) Sosialisasi dan Pelatihan Bank Sampah (tahun 2019) yang dilaksanakan merata pada tujuh kabupaten/kota. Materi yang disampaikan yaitu cara mendirikan bank sampah, mengaktifkan kembali bank sampah yang pasif, dan cara memilah sampah menjadi sampah bernilai ekonomis.
- e) Gerakan bersih laut dan pantai kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan dalam Pelaksanaan World Cleanup Day (WCD) Tahun 2020.
- f) Penyuluhan/edukasi tentang lingkungan hidup, khususnya tentang sampah kepada sekolah maupun masyarakat yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun (dimulai tahun 2020).
- g) Pembinaan dan pendampingan pada kelompok peduli lingkungan hidup di Desa Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat (tahun 2021). Masyarakat Desa Tanjung, mendapatkan beberapa program CSR dari Unmet PT Timah wilayah Mentok, diantaranya program pembibitan, penanganan sampah (pembuatan kompos) dan peternakan.
- h) Dilaksanakan lomba bank sampah tingkat provinsi pada tahun 2022.
- i) Pembinaan sekolah adiwiyata provinsi menuju adiwiyata nasional. Pembinaan sekolah adiwiyata ini juga dilaksanakan rutin setiap tahun. Pada tahun 2022 ada lima sekolah yang dibina dan mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata nasional yaitu SMPN 1 Kelapa, SMPN 6 Tanjungpandan, SDN 30 Pangkalpinang, SDN 37 Pangkalpinang, dan SDN 23 Tanjungpandan;



- j) Program Gubernur “HIJAU BIRU BABELKU” dengan melaksanakan gerakan bersih pantai di beberapa lokasi pantai dan penanaman di berbagai titik area tanam di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tahun 2022/2023).
- k) Workshop pengelolaan sampah dan penanaman pohon bersama pramuka (tahun 2022/2023).
- l) Program “GULE KABUNG” yang langsung turun ke lapangan untuk mengetahui permasalahan dan komunikasi secara langsung kepada masyarakat, dengan melibatkan berbagai perangkat daerah terkait. DLHK mendapatkan tugas untuk memberikan penyuluhan & edukasi kepada masyarakat di kabupaten/kota, di antaranya materi tentang bank sampah, *eco-brick*, dan *eco-enzym*.
- m) Aksi bersih sampah dalam rangka peringatan hari lingkungan hidup tahun. Aksi ini juga dilakukan pada hari-hari tertentu lainnya.
- n) Dukungan pada praktisi akademisi yang peduli lingkungan untuk menerapkan ilmu yang dipelajari di masyarakat, seperti dukungan pelaksanaan kuliah umum, dukungan program kemanusiaan (praktik merdeka belajar kampus merdeka) untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

b. Penghargaan lingkungan hidup

Pada tahun 2023, jenis penghargaan lingkungan yang diberikan oleh pemerintah provinsi ataupun gubernur terdiri atas penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi, Bank Sampah Terbaik, serta Pemuda Pelopor Bidang Pengelolaan SDA, Lingkungan, dan Pariwisata. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi diberikan pada 6 sekolah tingkat SD, 7 sekolah tingkat SMP, dan 1 sekolah tingkat SMA yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Adiwiyata adalah salah satu program yang dilakukan pemerintah untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah untuk melestarikan lingkungan. Sekolah Adiwiyata berperan dalam pembentukan sikap dan karakter siswa dan warga sekolah terhadap lingkungan. Hal ini



diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, serta kurikulum hijau yang mengintegrasikan materi lingkungan ke dalam program pembelajaran. Penghargaan Sekolah Adiwiyata ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan memotivasi warga sekolah untuk berperilaku peduli lingkungan. Berikut ini adalah daftar 14 sekolah yang mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi tahun 2023.

Tabel 2.5. 15 Daftar Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi 2023

No.	Sekolah Penerima Penghargaan	Tahun
1	SMPN 1 Tanjungpadan Kabupaten Belitung	2023
2	SMP Keluarga Universal Kabupaten Belitung	2023
3	SMPN 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat	2023
4	SMPN 4 Mentok Kabupaten Bangka Barat	2023
5	MIS AL Islah Mentok Kabupaten Bangka Barat	2023
6	SDN 10 Pemali Kabupaten Bangka	2023
7	SMA Negeri 3 Pangkalpinang	2023-2027
8	SMP Negeri 1 Pemali	2023-2027
9	SMP Negeri Koba	2023-2027
10	SMP Negeri Tanjungpandan	2023-2027
11	SD Negeri 24 Sungailiat	2023-2027
12	SD Negeri 1 Koba	2023-2027
13	SD Negeri 8 Sungailiat	2023-2027
14	SD Negeri 9 Mendo Barat	2023-2027

Selain penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi oleh gubernur, ada 2 sekolah yang mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional dan 2 sekolah yang mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan Adiwiyata ini menjadi respon pemerintah daerah pada pola perilaku penduduk yang kurang atau tidak peduli pada lingkungan, sehingga diharapkan dapat mengurangi *pressure* (tekanan) pada lingkungan. Selai itu, 2 kabupaten di



Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Bangka Selatan dan Belitung Timur mendapatkan penghargaan Adipura.

Penghargaan lainnya yang diberikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah Bank Sampah Terbaik I, II, dan III. Penghargaan pada bank sampah ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk mengaktifkan kembali bank sampah dan mengoperasikannya secara konsisten, meningkatkan inovasi, meningkatkan aktivitas pengelolaan sampah, dan menabung di bank sampah.

Penghargaan lainnya adalah penghargaan Adipura yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Bangka Selatan, dan Belitung Timur. Program Adipura dapat dikatakan cukup berhasil untuk menilai pengelolaan sampah di Indonesia per tahun. Berikut ini daftar penerimaan penghargaan Adipura di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.5. 16 Penerimaan Penghargaan Adipura Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kota	Tahun							Jenis Kota
	2015	2016	2017	2018	2019	2022	2023	
Pangkalpinang	-	-	Piagam Adipura	-	-	-		Sedang
Sungailiat, Kab. Bangka	-	-	Adipura	Adipura	Adipura	Adipura		Kecil
Tanjungpandan, Kab. Belitung	-	-	-	-	-	-		Kecil
Toboali, Kab. Bangka Selatan	-	Piagam Adipura	Adipura	Adipura	Adipura	Adipura	Adipura	Kecil
Muntok, Kab. Bangka Barat	-	-	-	-	Piagam Adipura	-		Kecil
Koba, Kab. Bangka Tengah	Piagam Adipura	-	Adipura	Adipura	Adipura	-		Kecil
Manggar, Kab. Belitung Timur	-	Piagam Adipura	Piagam Adipura	-	Adipura	Piagam Adipura	Adipura	Kecil

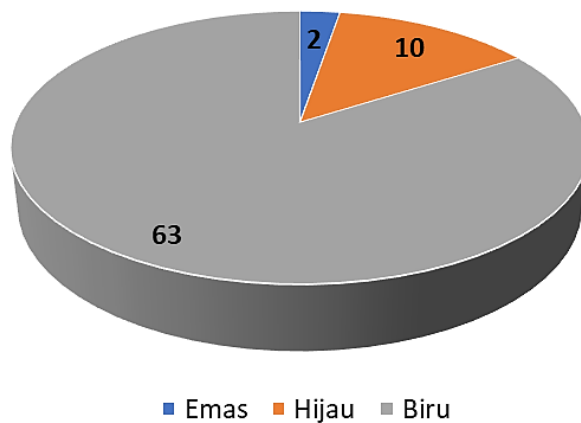
Sumber: DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022



Dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2017–2023, jumlah kota yang mendapat Piala Adipura semakin bertambah. Tahun 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan penilaian Adipura karena kondisi pandemi COVID-19.

Selain penghargaan-penghargaan di atas, ada juga penghargaan PROPER yang diterima oleh 75 perusahaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada awalnya, sebagai salah satu instrumen penataan hukum lingkungan yang bersifat sukarela, PROPER memiliki peran dalam upaya pengendalian dampak lingkungan, terutama dengan pengendalian pencemaran oleh perusahaan, melalui pendekatan secara lunak (sukarela). Seiring berjalannya waktu, keikutsertaan perusahaan dalam PROPER menjadi wajib jika telah ditunjuk. Diharapkan agar PROPER dapat memotivasi perusahaan untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan.

Jumlah Penerima PROPER Menurut Kategorinya



Gambar 2.5. 32 Jumlah Penerima PROPER sesuai Kategori Tahun 2023

Penyelenggaraan PROPER adalah salah satu respon pemerintah pada pola perilaku penduduk, dalam hal ini perusahaan, agar taat pada hukum lingkungan, atau bahkan berperan aktif dalam upaya perlindungan lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan energi, ataupun penurunan emisi GRK. Penerapan instrumen PROPER ini tentu akan lebih



efektif jika dipadukan dengan instrumen lainnya, seperti instrumen *command and control* dan instrumen ekonomi lingkungan.

c. Pengawasan

Selain penghargaan lingkungan hidup, pengawasan dan penegakan hukum penting dilakukan untuk mengendalikan perilaku dengan meningkatkan ketaatan pada hukum lingkungan. Pengawasan dan penegakan hukum termasuk ke dalam ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pengawasan pelaksanaan izin/persetujuan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 dilaksanakan pada 100 perusahaan/kegiatan/usaha. Sebanyak 24 perusahaan/kegiatan/usaha “tidak taat” dan mendapatkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, sementara 76 sisanya “taat”. Berikut ini adalah data persebaran perusahaan yang dari hasil pengawasan memiliki kategori “tidak taat”.

Tabel 2.5. 17 Daftar Hasil Pengawasan Kategori “Tidak Taat” Tahun 2023

No.	Lokasi	Nama Perusahaan/Pemrakarsa
1	Kab. Bangka	PT Fajar Berseri
2	Kab. Bangka	PT Fenyen Agro Lestari
3	Kab. Bangka	PT. Bangka Asindo Agri
4	Kab. Bangka	PT. Tata Hampanan Eka Persada
5	Kab. Bangka	PT. Rahardja Wirasakti Jaya Mandiri
6	Kab. Bangka	PT Sinar Baturusa Prima
7	Kab. Bangka Tengah	PT Grand Cirindo (Novotel Bangka Hotel & Convention Centre)
8	Kab. Bangka Tengah	PT. ShrimpiDaya Lestari
9	Kab. Bangka Tengah	PT. Swarna Nusa Sentosa
10	Kab. Bangka Tengah	PT. Bangka Prima Tin
11	Kab. Bangka Tengah	Hotel Aston Soll Marina
12	Kab. Bangka Tengah	PT. Agrindo Persada Lestari
13	Kab. Bangka Barat	PT Bumi Permai Lestari
14	Kab. Bangka Barat	PT Mutiara Agro Sejahtera
15	Kab. Bangka Barat	PT Payung Mitra Jaya Mandiri
16	Kab. Bangka Selatan	PT Sari Bumi Mulia
17	Kab. Bangka Selatan	PT. Samudera Berhasil Bersama
18	Kab. Belitung	PT Belitung Permai Abadi/BW Suite Belitung



No.	Lokasi	Nama Perusahaan/Pemrakarsa
19	Kab. Belitung	PT Hatika Wisata Makmur (Hotel Grand Hatika)
20	Kab. Belitung	PT Pertamina Patra Niaga - Regional Sumbagsel Fuel Terminal Tanjung Pandan Belitung
21	Kab. Belitung	PT.Talu Belitung Resort _Hotel Santika
22	Kab. Belitung Timur	PT. Babel Inti Perkasa
23	Kab.Belitung Timur	PT. Indomakmur Alam Raya
24	Kota Pangkal Pinang	PT Dok dan Perkapalan Air Kantung Unit Galangan Selindung

Kegiatan pengawasan yang dilakukan rutin setiap tahun pada berbagai kegiatan/usaha bertujuan untuk mengetahui tingkat ketaatan pelaku usaha dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup. Dokumen lingkungan seharusnya menjadi acuan bagi para pelaku usaha/kegiatan dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Berbagai aspek seperti pengendalian pencemaran air, pemenuhan standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah, pengendalian pencemaran udara, pemenuhan baku mutu emisi, dan pengelolaan limbah B3 seringkali menjadi poin penting dalam pengawasan.

Banyaknya jumlah pelaku usaha yang tidak taat mengindikasikan potensi pencemaran lingkungan yang semakin meningkat, baik pencemaran air, udara, laut, maupun lahan. Dengan demikian, instrumen pengawasan izin/persetujuan lingkungan ini sangat penting sebagai bentuk respon pemerintah pada berbagai kegiatan ekonomi yang terus meningkat agar dapat dilakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

II.5.5.3 Respon pada *state*

Berdasarkan kondisi lingkungan maupun sosial-ekonomi perkotaan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka dapat diidentifikasi berbagai respon yang dilakukan pemerintah provinsi pada kondisi tersebut. Pada kondisi pangan yang ada, pemerintah provinsi melaksanakan beberapa respon, di antaranya adalah pengalokasian kawasan hutan untuk program *food estate* yang dibarengi dengan Kajian Lingkungan Hidup



Strategis (KLHS), perbaikan tata kelola cadangan pangan pemerintah daerah, pengelolaan risiko ketahanan pangan, peningkatan sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan produktivitas lahan tanaman pangan (khususnya sawah), serta berpartisipasi dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA).



Gambar 2.5. 33 Ilustrasi Peta FSVA Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: <https://fsva.badanpangan.go.id/>

Dalam rangka menanggapi kondisi persampahan, berikut ini adalah beberapa respon yang telah dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung.

a. Kebijakan dan peraturan daerah

Sebagai bentuk respon pada kondisi timbulan sampah yang tidak terkelola ataupun belum dikelola dengan tepat, pemerintah daerah di wilayah Kepulauan Bangka Belitung merumuskan kebijakan dan peraturan daerah. Berikut ini beberapa kebijakan daerah yang telah dirumuskan dan masih berlaku.

Tabel 2.5. 18 Kebijakan Daerah Menanggapi Timbulan Sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Jenis Kebijakan	Nomor dan Tanggal	Tentang
1.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	Nomor 48 Tahun 2019 Tanggal 22 Juli 2019	Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



No.	Jenis Kebijakan	Nomor dan Tanggal	Tentang
	Surat Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	Nomor 660/0191/DLHK Tanggal 26 April 2023	Gerakan Jumat Bersih dan Babel Menanam
2.	Kabupaten Bangka		
	Peraturan Bupati Bangka	Nomor 43 tahun 2018 Tanggal 13 Agustus 2018	Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Bangka
	Peraturan Bupati Bangka	Nomor 42 tahun 2020	Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai
3.	Kabupaten Belitung		
	Peraturan Bupati Belitung	Nomor 59 Tahun 2022	Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
	Peraturan Bupati Belitung	Nomor 15 tahun 2021 Tanggal 11 Juni 2021	Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
	Peraturan Bupati Belitung	Nomor 23 Tahun 2019	Tata Cara Penerapan Sanksi Pelanggaran atas Larangan Membuang Sampah Tidak Pada Tempat yang Telah Ditentukan atau Disediakan
	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung	Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 17 Desember 2015	Pengelolaan Sampah
4.	Kabupaten Bangka Tengah		
	Peraturan Bupati Bangka Tengah	Nomor 52 tahun 2018 Tanggal 13 Agustus 2018	Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Bangka Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah	Nomor 4 Tahun 2013 Tanggal 24 Mei 2013	Pengelolaan Sampah
5.	Kabupaten Bangka Barat		
	Peraturan Bupati Bangka Barat	Nomor 99 Tahun 2018 Tanggal 30 Oktober 2018	Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Bangka Barat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat	Nomor 3 tahun 2012 Tanggal 17 April 2012	Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan
6.	Kabupaten Bangka Selatan		
	Peraturan Bupati	Nomor 51 Tahun 2018 Tanggal 12 Oktober 2018	Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bangka Selatan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
7.	Kabupaten Belitung Timur		
	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Nomor 9 Tahun 2020	Retribusi Jasa Umum



No.	Jenis Kebijakan	Nomor dan Tanggal	Tentang
	Peraturan Bupati Belitung Timur	Nomor 36 Tahun 2018	Kebijakan dan Strategi Kabupaten Belitung Timur dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Nomor 8 Tahun 2014 Tanggal 20 Oktober 2014	Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan
8.	Kota Pangkalpinang		
	Peraturan WaliKota Pangkalpinang	Nomor 101 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019	Kebijakan dan Strategi Kota Pangkalpinang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
	Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang	Nomor 6 Tahun 2013 Tanggal 28 November 2013	Pengelolaan Sampah

Sumber: JDIH Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dokumen Jakstrada akan menjadi dasar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengevaluasi program Penghargaan Adipura dengan melihat bagaimana komitmen dan keseriusan kota dalam menyusun perencanaan kota dalam pengelolaan sampah. Program Adipura harus dapat menjawab (merespon) Jakstranas, sehingga Program Adipura harus dapat mendorong kota-kota di Indonesia pada tahun 2025 sistem pengelolaan sampahnya 100% (30% pengurangan dan 70% penanganan).

Dalam rangka merespon timbulan sampah yang semakin bertambah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada). Di dalam Jakstrada, target pencapaian pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah disusun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Berikut ini adalah target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya yang tercantum dalam Peraturan Gubernur



Nomor 48 Tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Capaian pengelolaan sampah selama ini masih jauh dari target yang ditetapkan dalam peraturan gubernur tersebut. Capaian yang masih jauh dari target ini tentu saja perlu ditindaklanjuti dengan penerapan program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, serta diiringi dengan upaya-upaya tambahan.

Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	216.249,21	220.750,39	225.345,67	230.036,91	234.825,60	239.714,15	244.704,58	249.799,47
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi (Ton/Tahun)	38.924,86	44.150,08	49.576,05	55.208,86	61.054,66	64.722,82	68.517,28	74.939,84

Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	216.249,21	220.750,39	225.345,67	230.036,91	234.825,60	239.714,15	244.704,58	249.799,47
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi (Ton/Tahun)	157.861,93	176.600,32	169.009,25	170.227,31	171.422,69	172.594,19	173.740,25	174.859,63

Gambar 2.5. 34 Target Penanganan dan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya Di Kepulauan Bangka Belitung

b. Peningkatan kinerja fasilitas pengelolaan sampah

Timbulan sampah yang dihasilkan dari setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tren cenderung naik seiring dengan naiknya jumlah penduduk memerlukan tindakan pengelolaan sampah yang baik dan benar sejak dari tempat sumber sampah. Fasilitas pengelolaan sampah berupa bank sampah, rumah kompos, pusat daur ulang dan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce Reuse Recycle* (TPS 3R)



tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika fasilitas pengelolaan sampah tersebut berfungsi secara optimal maka akan mengurangi beban TPA, karena sampah yang masuk ke TPA hanya residu. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kinerja fasilitas pengelolaan sampah, yaitu sebagai berikut:

a) Fasilitas TPS 3R

Salah satu upaya pengurangan sampah yaitu pendauran ulang sampah yang dilakukan di Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R). Fasilitas pengelolaan sampah berupa TPS3R merupakan salah satu upaya pengelolaan sampah yang juga melibatkan masyarakat. Konsep circular economy dalam pengelolaan sampah mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah, dimana sampah yang selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi sehingga memberikan nilai tambah. Berikut ini adalah data persebaran jumlah TPS 3R di kabupaten/kota.

Tabel 2.5. 19 Fasilitas TPS 3R Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/ Kota	Jumlah TPS 3R	Nama TPS 3R
Pangkalpinang	3	Berkah, Kawa Begawe dan Teratai Genas
Bangka	4	Srimenanti Jaya, Kube Radar sejahtera, Bakam dan Pugul
Bangka Tengah	2	Berkah Mandiri dan Timur Sehat
Bangka Selatan	3	Gadung, Terasi dan Delas
Bangka Barat	6	Air Lintang, Air Limau, Bakit Berseri, Tempilang, Lah nyata dan Muara Jepu
Belitung Timur	2	Mempayak dan Padang
Belitung	6	Desa Terong, Padang membalong, berandun berese, selma mandiri, perincong kelekak dan mufakat



b) Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah tentu tidak terlepas dari kebutuhan pendanaan dan kebutuhan sarana prasarana dalam pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat. Berikut ini sarana prasarana yang tersedia untuk pengelolaan sampah di ketujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.5. 20 Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah

Kabupaten	gerobak sampah		motor sampah roda 3		motor sampah roda 3 terpilah		pick up		arm roll truck		arm roll terpilah		dump truck		dump truck terpilah		Truk penyapu jalan		compactor Truck	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Pangkalpinang	14	14	-	-	-	-	86	86	6	6	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-
Bangka	-	-	13	13	-	-	1	1	3	3	-	-	13	13	-	-	-	-	-	-
Bangka Tengah	-	-	126	73	-	-	18	23	4	6	-	-	11	9	-	-	-	-	-	3
Bangka Selatan	-	-	56	56	4	4	2	2	2	2	1	1	9	9	1	1	-	-	-	-
Bangka Barat	-	-	33	33	-	-	-	-	3	3	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-
Belitung Timur	-	-	5	5	-	-	1	1	4	5	-	-	9	10	-	-	-	-	-	-
Belitung	-	-	7	10	-	-	2	2	6	7	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-

Sumber: SIPSN 2022, 2023

Sarana dan prasarana yang digunakan pada pengelolaan sampah kabupaten/kota yaitu gerobak sampah, motor sampah roda tiga, motor sampah roda 3 terpilah, mobil pick-up, arm roll truck, arm roll truck terpilah dan compactor truck. Dengan kapasitas 1m³ untuk motor sampah, kapasitas 3 m³ untuk mobil *pick-up*, kapasitas 6 m³ untuk arm roll truck, kapasitas 7 m³ untuk *dump truck* dengan ritasi per unit rata-rata 3-4 kali.

Seperti yang diketahui bahwa tren timbunan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang cenderung naik seiring dengan naiknya jumlah penduduk dengan estimasi timbunan sampah per orang setiap hari adalah 0,4 Kg pada Kabupaten dan 0,7 Kg/per orang setiap hari di Kota Pangkalpinang, tentu membutuhkan tambahan kuantitas armada pengangkutan sampah. Dari tabel yang disajikan terlihat bahwa sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang digunakan umumnya tidak



ada peningkatan jumlah ataupun kapasitas bahkan ada yang berkurang jumlah armada sampah yang digunakan seperti pada Kabupaten Bangka Tengah untuk unit motor sampah roda tiga dan juga *dump truck*.

c) Program Bank Sampah

Program bank sampah adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan persampahan. Dasar hukum program bank sampah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa paradigma pengelolaan sampah harus berubah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan pada sumbernya dan daur ulang sumber daya. Program bank sampah akan lebih bermanfaat jika dipadukan dengan kreatifitas yang memberi nilai ekonomis bagi sampah sehingga menjadi produk daur ulang yang bermanfaat. Ada cukup banyak bank sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bank sampah digolongkan menjadi dua, yaitu bank sampah unit dan bank sampah induk. Bank sampah unit adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi. Bank sampah induk adalah pengumpulan sampah anorganik yg dilakukan oleh masyarakat, yang nasabahnya dari bank sampah unit maupun perorangan dan menghasilkan nilai ekonomi sehingga akhirnya dibawa ke industri daur ulang.

Bank sampah diharapkan dapat bersemangat kembali dengan diadakannya pembinaan melalui perlombaan Bank Sampah Terbaik Tingkat Provinsi. Penilaian bank sampah tingkat provinsi dilaksanakan untuk menilai kinerja bank sampah yang tersebar di kabupaten/kota tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini adalah data Bank Sampah yang ada di Bangka Belitung hingga tahun 2023.



Tabel 2.5. 21 Daftar Bank Sampah Di Kepulauan Bangka Belitung

No.	Nama Bank Sampah	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)/bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SEPAKAT	65	Aktif	Kecamatan Mentok, Bangka Barat	96	7	916.000
2	WALAH	-	Tidak aktif	Kecamatan Mentok, Bangka Barat	-	-	-
3	UNIT METALURGI	-	Tidak aktif	Kecamatan Mentok, Bangka Barat	-	-	-
4	MUTIK PILAH SAMPAH	-	Tidak aktif	Kecamatan Mentok, Bangka Barat	-	-	-
5	Bank Induk PAPIN	3010	Aktif	Pangkalpinang	533	8	38,000,000
6	Kawabegawe	4030	Aktif	Pangkalpinang	400	4	36,000,000
7	Berkah	-	Tidak aktif	Pangkalpinang	360	3	-
8	Sukun Mandiri	-	Tidak aktif	Pangkalpinang	215	4	-
9	Tua Tunu Indah	-	Tidak aktif	Pangkalpinang	271	5	-
10	Pondok Kreasi	2080	Aktif	Pangkalpinang	54	4	12,000,000
11	Aik Pelempang Jaya	250	Aktif	Desa Aik Pelempang Jaya, Kec Tanjungpandan, Belitung	50	13	500
12	Karya Pemuda	-	TidakAktif	Desa Tanjung Tinggi, Kec. Sijuk, Belitung	-	11	-
13	Desa Keciput	-	TidakAktif	Desa Keciput, Kec. Sijuk, Belitung	-	10	-
14	Akar Berebat	1300	Aktif	DLH Kab. Belitung	170	17	3,869,750
15	Rimbaan Tuan	300	Aktif	Desa Kacang Butor, Kec. Badau, Belitung	50	7	600
16	Beres (Universal)	173.1	Aktif	Sekolah Universal, Belitung	267	7	600
17	RSUD dr.H. Marsidi Judono	300	Aktif	RSUD dr.H. MARSIDI JUDONO, Belitung	40	11	600
18	Bank Sampah Nyiur Karya Lestari (Bank Sampah Unit)	141	Aktif	Dusun Sawah, Dusun Terang Bulan dan Dusun Sekip	289	6	



No.	Nama Bank Sampah	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)/bulan
19	Bank Sampah Pelangi Nusa (Bank Sampah Induk)	1,411	Aktif	Seluruh Wilayah Kabupaten Belitung Timur	3 Bank Sampah Unit	27	
20	Bank Sampah Pelangi SMP Negeri 6 Manggar (Bank Sampah Unit)	2.98	Aktif	KELUBI	78	15	53,28
21	Jalan Samratulangi RT 002 Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat	594	Aktif	Ibukota Kabupaten	65	2	900
22	Jalan Ahmad Yani Jalur II Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat	841.2	Aktif	Ibukota Kabupaten	71	4	1,100,000
23	Jalan Duyung Raya Blok E RT 007 RW 11 Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali	615	Aktif	Ibukota Kabupaten	83	10	1,300,000
24	Temiang Jaya	3644.5	Aktif	Desa Guntung	15	5	400
25	Berpanen	400	Aktif	Desa Terentang III	40	4	200
26	Bejebeu Lilai	3400	Aktif	Desa Penyak	35	2	1,500,000
27	Bersampan	100	Aktif	Desa Kurau Timur	5	4	150
28	Bumbu Masak	400	Aktif	Pasar Modern Koba	10	5	151
29	Bersaung Maju	450	Aktif	Kelurahan Berok	15	4	350
30	Berlilik Berseri	550	Aktif	Desa Belilik	38	2	600
31	Butterfly Sped Bank	1720	Aktif	Desa Bukit Kijang	53	2	1,200,000
32	Teratai	1000	Aktif	Kelurahan Simpang Perlang	21	3	250
33	Teratai	824	Aktif	Desa Benteng	13	4	500
34	Trubus Berjaya	20	Aktif	Desa Trubus	10	10	100



No.	Nama Bank Sampah	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)/bulan
35	Bank Sampah SMK Yapentob	1400	Aktif	Sekolah SMK Yapentob dan sekitarnya	200	9	2,000,000
36	Bank Sampah Gadung Maju	4000	Tidak Aktif	Kecamatan Toboali	111	15	-
37	Bank Sampah Pondok Mandiri	3500	Tidak Aktif	Kelurahan Toboali	125	10	625
38	Bank Sampah Kopi	400	Tidak Aktif	Kompleks Bukit Permai	17	9	625
39	Bank Sampah Kophi	700	Tidak Aktif	Desa Gadung	30	8	1,455,000
40	Bank Sampah Manahula	300	Tidak Aktif	Kelurahan Teladan	50	13	525
41	Bank Sampah SMPN 1	600	Tidak Aktif	Sekolah SMPN 1 Toboali	100	6	975
42	Bank Sampah SMA N 1	500	Tidak Aktif	Sekolah SMA N 1 Toboali	75	4	925
43	Bank Sampah Salima	1000	Tidak Aktif	Kelurahan Toboali	25	3	1,755,000
44	Bank Sampah Kecamatan Toboali	400	Tidak Aktif	Kecamatan Toboali	4		725
45	Bank Sampah De eL Ha	200	Aktif	Komplek Perkantoran	76	17	550

Berdasarkan data di atas, sebanyak 17 bank sampah dari total 45 bank sampah, ternyata tidak aktif. Dalam rangka mengaktifkan kembali bank sampah, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah provinsi adalah memberikan penghargaan pada bank sampah yang aktif dan mandiri. Berikut ini adalah daftar penerima penghargaan bank sampah terbaik 1, 2, dan 3 pada tahun 2023.



Tabel 2.5. 22 Daftar Bank Sampah Penerima Penghargaan Tahun 2023

Nama Bank Sampah	Penghargaan
Bank Sampah Basayan Lestari,Sungailiat Kab.Bangka	Juara 1 Bank Sampah Provinsi
Bank Sampah Sepakat,Mentok Kab.Bangka Barat	Juara 2 Bank Sampah Provinsi
Bank Sampah Beres,Tanjungpandan Kab.Balitung	Juara 3 Bank Sampah Provinsi
Bank Sampah Setara, Sungailiat Kab.Bangka	Juara 1 Bank Sampah Provinsi
Bank Sampah Papin, Pangkalpinang	Juara 2 Bank Sampah Provinsi
Bank Sampah Akar Berebat, Kabupaten Belitung	Juara 3 Bank Sampah Provinsi

c. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Kapasitas/kemampuan masyarakat diartikan sebagai daya atau kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara lebih berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien) secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan, hingga perkuliahan/pengajaran. Penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan (Lucie, 2005).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2023 dalam bentuk kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Pendampingan gerakan Perilaku Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) yang bertujuan agar warga sekolah mampu menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup baik di dalam lingkungan



sekolah maupun di sekitar sekolah serta membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang peduli lingkungan hidup. Berdasarkan data pembatasan timbulan sampah, peran sekolah dalam melakukan pengelolaan sampah perlu menjadi perhatian, mengingat jumlah sekolah dan jumlah siswa yang terlibat cukup besar. Pendampingan yang intens diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya pengurangan timbulan sampah dari sekolah.



Gambar 2.5. 35 Penyuluhan Di Sekolah

2. Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup kepada 300 orang dengan materi pengelolaan sampah seperti pemilahan sampah, pembuatan *ecoenzym*, pengomposan, pembuatan *ecobrick* dan kriya/kreasi dari sampah di acara Jambore Nasional Relawan Lingkungan di Batu Mentas Belitung, Hari Lingkungan Hidup Sedunia, *World Clean UP day* dan acara FORDAS Nasional.
3. Penumbuhan kesadaran keluarga untuk peningkatan kualitas Lingkungan hidup dengan sasaran berjumlah 210 keluarga. Penumbuhan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup perlu dimulai dari tingkat keluarga, dimana lingkungan awal dari pembentukan sikap dan perilaku dimulai dari tahap keluarga.



Tabel 2.5. 23 Workshop Penumbuhan kesadaran keluarga untuk peningkatan kualitas Lingkungan Hidup

Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Peserta
Workshop Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang Sehat	22 Juni 2023	Desa Pergam, Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan	30 orang (PKK Kabupaten Bangka Selatan, BPP Alogegas, PKK Desa Pergam, PKK Desa Bikang, PKK Desa Serdang, PKK Desa Gadung dan Masyarakat Desa Serdang)
	18 Agustus 2023	Kantor Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat	30 orang (masyarakat desa pelangas)
	5 September 2023	Kantor Lurah Lontong Pancur	30 orang masyarakat Kel. Lontong pancur
	12 september 2023	Desa Tanjung ratu Desa Rebo	30 orang masyarakat Dusun Tanjung Ratu Desa Rebo
	9 Oktober 2023	Desa Namang	30 orang Masyarakat Desa Namang
	11 Oktober 2023	Desa Kacang Butor Kecamatan Badau Kab. Belitung	30 orang peserta perwakilan keluarga/Masyarakat Desa Kacang Butor
	29 November 2023.	Desa Mempaya Kabupaten Belitung Timur	30 orang perwakilan keluarga di masyarakat Desa Mempaya

4. Peningkatan kompetensi SDM Bank sampah di wilayah Kepulauan Bangka Belitung berupa *Workshop* Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Pengelolaan Sampah Pada Bank sampah) dan Penginputan Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah (SIMBA) dengan peserta 30 Bank Sampah.



Tabel 2.5. 24 Daftar peserta workshop peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis Masyarakat

No	Daftar Bank Sampah yang hadir	Jumlah orang
1	Bank Sampah Bertambah Kab. Bangka Tengah	2 orang
2	Bank Sampah Besauh Maju Kab. Bangka Tengah	2 orang
3	Bank Sampah Pelawan Kab. Bangka Tengah	2 orang
4	Bank Sampah Belilik Berseri Kab. Bangka Tengah	2 orang
5	Bank Sampah Bumbu Masak Kab. Bangka Tengah	2 orang
6	Bank Sampah Tamiang Jaya Kab. Bangka Tengah	2 orang
7	Bank Sampah Papin Kota Pangkalpinang	2 orang
8	Bank Sampah Opin Pelangi Kota Pangkalpinang	2 orang
9	Bank Sampah Pondok Kreasi Kota Pangkalpinang	2 orang
10	Bank Sampah Seberang Bersinar Kota Pangkalpinang	2 orang
11	Bank Sampah Taman Bunga Kota Pangkalpinang	2 orang
12	Bank Sampah Setara Kab. Bangka	2 orang
13	Bank Sampah Nelayan (Basayan) Berseri Kab. Bangka	2 orang
14	Bank Sampah Karya Mandiri Kab. Bangka	2 orang
15	Bank Sampah La Rimpe Belinyu Kab. Bangka	2 orang
16	Bank Sampah De el Ha Kab. Bangka Selatan	2 orang
17	Bank Sampah Tiga R SMK Yapentob Kab. Bangka Selatan	2 orang
18	Bank Sampah KPH Intan Bersinar Desa Kepoh Kab. Bangka Selatan	2 orang
19	Bank Sampah Selanget Desa Tukak Kab. Bangka Selatan	2 orang
20	Bank Sampah Desa Rias Kab. Bangka Selatan	2 orang
21	Bank Sampah SMP 5 Toboali Kab. Bangka Selatan	2 orang
22	Bank Sampah Akar Berebat Kab. Belitung	2 orang
23	Bank Sampah Beres Kab. Belitung	2 orang
24	Bank Sampah Rimbaan Tuan Desa Kacang Butor Kab. Belitung	2 orang
25	Bank Sampah Digital Desa Air Saga Kab. Belitung	2 orang
26	Bank Sampah Unit Pelangi Nusa Kab. Belitung Timur	2 orang
27	Bank Sampah Nyiur Karya Lestari Kab. Belitung Timur	2 orang
28	Bank Sampah De El Ha Kab. Bangka Barat	2 orang
29	Bank Sampah Sepakat Desa Air Limau Kab. Bangka Barat	2 orang
30	Bank Sampah Mutik Pilah Sampah Kab. Bangka Barat	2 orang



5. Sosialisasi Bank sampah ke beberapa dinas di kompleks perkantoran gubernur



Gambar 2.5. 36 Sosialisasi Bank Sampah

6. Sosialisasi Bank sampah pada acara "Gule Kabung" yang berkolaborasi dengan Sekolah MAN ICE dengan inovasi robot pemilah sampah



Gambar 2.5. 37 Sosialisasi Bank sampah berkolaborasi dengan Sekolah MAN Insan Cendikia (MAN ICE)



7. Penyuluhan pengelolaan sampah dalam bentuk kunjungan belajar dari sekolah



Gambar 2.5. 38 Kunjungan Belajar tentang pengelolaan sampah

8. Kegiatan jumat bersih bersama PUPRPRKP Babel dan turut berpartisipasi SMA 1 Pangkalan Baru, SMADA Pangkalpinang, SMK PGRI Pangkalpinang dan SKO Muhammad Noer.



Gambar 2.5. 39 Aksi Jumat bersih bersama PUPRPRKP Bangka Belitung dan sekolah



9. Kerjasama dengan RRI Sungailiat dalam acara penyuluhan lingkungan hidup setiap 2 minggu sekali



Gambar 2.5. 40 Template siaran penyuluhan kerjasama RRI – DLHK Provinsi Kep. Bangka Belitung

Respon yang diberikan terhadap kendala-kendala yang dihadapi sudah dilakukan sebaik mungkin, walaupun masih ada beberapa *progress* yang membutuhkan waktu untuk teralisasi yaitu pembangunan TPA Regional. Pengelolaan sampah mungkin tidak terlalu dipandang oleh masyarakat mengingat 80% masyarakat Bangka Belitung menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap pengelolaan sampah (berdasarkan nilai ketidakpedulian terhadap lingkungan hidup), karena masih memandang sampah mengikuti pandangan kuno yaitu sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna bukan mencoba memandang mengikuti paradigma baru yaitu memandang sampah sebagai suatu sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.

Pemberian nilai ekonomi/valuasi ekonomi kegiatan pengelolaan sampah dengan menggunakan sistem pengelolaan sampah paradigma baru perlu dilakukan agar sedikit membuka mata masyarakat bahwa sampah dapat menjadi alternatif penghasilan yang cukup menguntungkan. Pendekatan yang berorientasi pasar dimana nilai pemanfaatan sampah



dinilai dengan menggunakan harga aktual barang atau jasa dirasa cukup efektif dalam memberikan gambaran nominal yang dapat diperoleh jika melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan sesuai paradigma baru. Beberapa pemanfaatan sampah yang dapat diberikan penilaian dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pasar contohnya adalah nilai manfaat dari:

1. Sampah organik

- a. Kompos/pupuk organik. Sampah organik dapat menghasilkan kompos sebesar 30-50% berat awal
- b. Maggot BSF. Produk yang dihasilkan adalah berupa maggot segar, maggot kering, tepung maggot dan minyak maggot. Dimana kegunaan maggot basah dan kering adalah sebagai pakan ternak tinggi protein, tepung maggot digunakan sebagai pelet, pakan ternak dan burayak sedangkan minyak maggot digunakan untuk membuat pellet, dan industri kosmetik. 3 kg maggot basah menghasilkan 1 kg maggot kering. 5,5 kg maggot basah menghasilkan 1 kg tepung kering. Minyak 1 liter berasal dari 20 kg maggot kering.



Gambar 2.5. 41 Tepung maggot dan maggot kering



Gambar 2.5. 42 Minyak maggot dan tepung maggot yang sudah dikemas

- c. *Eco-enzym*. Dari 3 kg sampah organik dapur ditambah 1 kg gula merah dan 10 liter air dihasilkan eco-enzym sebanyak 10 liter
- d. Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) dengan penjualan sebesar Rp. 530 perkilo yang dibeli oleh PLN

2. Sampah An-organik

Beberapa jenis sampah an-organik dapat dengan mudah dijual ke pelapak ataupun bank sampah mana saja yang dirasa dekat dengan tempat tinggal. Harga sampah bervariasi tergantung jenis sampah dan kondisi sampah yang diterima. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Meisha (2022) di Kelurahan Bobosan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Jawa Tengah bahwa dari volume sampah per bulan yaitu sebesar 19.408,095 kilogram/bulan dengan pemanfaatan sampah yang dapat diolah menjadi pupuk organik, plastik cacah bahan baku aspal hotmix maka Total nilai ekonomi sampah rumah tangga di Kelurahan Bobosan dalam kurun waktu satu bulan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp157.580.937,00./bulan. Dengan nilai ekonomi manfaat tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa sampah adalah merupakan suatu sumber daya potensial dan diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat terhadap pengelolaan sampah sehingga lingkungan yang terlindungi dan



pembangunan yang berkelanjutan menjadi proses yang berjalan searah, bukan proses yang saling bertentangan.

II.5.5.4 Respon pada *impacts*

Respon yang dilakukan pada kondisi (*states*) di atas cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah terlihat keadaan atau perubahan lingkungan. Sebagaimana respon pada unsur *states*, respon pada unsur *impacts* juga bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah dampak negatif terjadi dan teramati atau dirasakan masyarakat. Respon yang dilakukan berkaitan dengan dampak pemanasan global, di antaranya adalah kegiatan inventarisasi gas rumah kaca, program kampung iklim (yang di dalamnya terdapat berbagai jenis inovasi dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim), dan sinkronisasi dalam perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PRK).

Respon yang dilakukan berkaitan dengan dampak kawasan kumuh, di antaranya adalah dengan penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023. Perencanaan ini tentu saja harus menyesuaikan dengan alokasi ruang untuk permukiman di dalam RTRW, termasuk berbagai Sistem Pusat Permukiman yang telah direncanakan. Perencanaan berkaitan dengan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ini juga perlu mempertimbangkan potensi bencana banjir yang sering terjadi di area perkotaan. Respon untuk menanggapi bencana banjir dibahas lebih detail dalam Subbab Risiko Bencana. Salah satu respon yang telah dilakukan menghadapi dampak banjir ini adalah memperkuat aspek ketahanan terhadap bencana banjir, yang salah satunya dilakukan dengan penyusunan Rencana Kontingensi Banjir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berikut ini beberapa respon pada *impacts* masalah perkotaan yang berkaitan dengan dampak sampah yang tidak terkelola atau terlampauinya kapasitas TPA.



a. TPA Regional

Provinsi Kepulauan belum mempunyai TPA Regional. Perencanaan TPA Regional sudah dilaksanakan sejak tahun 2017, di mana pada saat itu terpilih Desa Jelutong Kabupaten Bangka Tengah sebagai Lokasi TPA Regional dengan pertimbangan lokasi yang cukup strategis untuk keperluan pengelolaan sampah dari 5 Kabupaten/Kota di Pulau Bangka. Namun proses menjadi terhenti karena terkendala dari Masyarakat yang keberatan jika desa mereka menjadi lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional.

Pada Tahun 2023 diadakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah di Pulau Bangka dan juga Rapat koordinasi Pengelolaan sampah di Pulau Belitung yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengundang *stakeholder* antara lain Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota dan balai prasarana permukiman wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil dari rapat koordinasi pengelolaan sampah di Pulau Bangka adalah:

1. Optimalisasi kegiatan-kegiatan pengurangan sampah di masing -masing Kabupaten /Kota dan pelaporan pelaksanaannya
2. Mendorong pembahasan lokasi TPST regional Pulau Bangka kepada pengambil keputusan serta mengakomodir peruntukan ruang pada RTRW kabupaten dan Provinsi
3. Revitalisasi TPA existing kabupaten menjadi TPST
4. Optimalisasi TPA Kabupaten/Kota dengan sistem penutupan zona landfill non aktif dan minning sampah
5. Dukungan pendanaan dan sarana prasarana dari pemerintah pusat dan provinsi
6. Pemerintah Kabupaten/Kota segera menyiapkan teknologi alternatif dalam pengolahan sampah



Sementara itu, hasil Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah di Pulau Belitung disajikan pada gambar berikut.

No	Lokasi	Solusi
1.	Kabupaten Belitung Timur : a. Armada pengangkut sampah minim/rusak b. Anggaran Minim c. Existing landfill di TPA Trafo Mayang hampir overload (usia TPA sisa sekitar 2 tahun) d. Pembangunan TPST Gantung dan TPST Kelapa Kampit tertunda e. Rencana lokasi TPA regional di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Simpang Renggang f. Penyelesaian RTRW	a. Penambahan jumlah armada pengangkut sampah dan Perbaikan armada pengangkut sampah yang rusak b. Dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten c. Perencanaan pembangunan landfill baru di TPA Trafo Mayang d. Review DED TPST Gantung dan TPST Kelapa Kampit dan pengajuan kembali ke Kementerian PUPR e. Sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan TPA Regional melibatkan stakeholder terkait dan menyiapkan anggaran baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dimulai tahun 2024 dan seterusnya f. Mengakomodir lokasi TPA Regional kedalam RTRW Kabupaten Belitung Timur dan berkoordinasi dengan PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.	Kabupaten Belitung : a. Belum terpenuhinya persyaratan untuk	a. Penyiapan alokasi anggaran untuk pemenuhan persyaratan peningkatan TPA



optimalisasi TPA Gunung Sadai	Gunung Sadai
b. Armada pengangkut sampah minim/rusak	b. Penambahan jumlah armada pengangkut sampah dan perbaikan armada pengangkut sampah yang rusak
c. Usia landfill di TPA Gunung Sadai sisa sekitar 5 tahun	c. Perencanaan pembangunan landfill baru dan sarana prasarana pendukung di TPA Gunung Sadai, Review DED dan pengajuan kembali ke Kementerian PUPR
d. Anggaran Minim	d. Dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
e. Rencana lokasi TPA regional di Desa Badau, Kecamatan Badau	e. Sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan TPA Regional melibatkan stakeholder terkait dan menyiapkan anggaran baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Belitung dimulai tahun 2024 dan seterusnya
f. Penyelesaian RTRW	f. Mengakomodir lokasi TPA Regional kedalam RTRW Kabupaten Belitung dan berkoordinasi dengan PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gambar 2.5. 43 Hasil Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah Di Pulau Belitung Tahun 2023

TPA Regional yang direncanakan sebagai salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah khususnya yang diakibatkan beberapa TPA yang telah melebihi kapasitas belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Pemilihan calon lokasi TPA Regional mengalami kendala berupa penolakan masyarakat yang merasa keberatan dan khawatir dengan keberadaan TPA Regional yang dianggap dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar walaupun konsep pengelolaan TPA yang direncanakan mengusung pengelolaan sampah menjadi energi dengan proses *Refuse Derived Fuel* (RDF) atau sumber energi dari sampah.

Berdasarkan hasil rapat pembahasan tentang lokasi TPA Regional yang diselenggarakan pada tahun 2023, alternatif calon lokasi TPA Regional adalah di Desa Sambung Giri Kabupaten Bangka. Penolakan masyarakat terhadap keberadaan TPA Regional perlu disikapi dengan



upaya pendekatan sosial kepada masyarakat sehingga dapat mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap keberadaan TPA Regional.

b. Pengurangan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah terdiri dari upaya pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. SIPSAN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) memasukkan upaya pembatasan timbulan sampah dan pemanfaatan kembali sampah sebagai bentuk dari upaya pengurangan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik itu pemerintah Kabupaten/Kota maupun provinsi. Kegiatan Pembatasan Timbulan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dilakukan di beberapa fasilitas pengelolaan sampah yaitu sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren, perkantoran, pasar, fasilitas pelayanan kesehatan, retail modern/swalayan/minimarket, pertokoan/kios/warung, industri, penginapan/hotel/wisma, rumah makan/restoran, lembaga pemasyarakatan, terminal bus/angkot, stasiun kereta api, pelabuhan penumpang, bandar udara, tempat ibadah, tempat wisata, taman kota, hutan kota, pemukiman, pada kegiatan Bersih sampah (Gerakan Peduli Sampah, HPSN, HLH dan lainnya) serta pada fasilitas lainnya.

Tabel 2.5. 25 Pembatasan sampah pada Ibukota Kabupaten/Kota dengan jumlah sampah dibatasi 3 terbanyak (*top three*)

Kabupaten	Fasilitas pengelolaan sampah	jumlah unit	Jumlah sampah yang dibatasi (ton/tahun)
Pangkalpinang	Rumah Makan	156	1350
	Perkantoran	763	1306,7
	Pasar	7	766
Bangka	Pertokoan	250	99,4
	sekolah	48	69,1



Kabupaten	Fasilitas pengelolaan sampah	jumlah unit	Jumlah sampah yang dibatasi (ton/tahun)
	fasyankes	20	58,5
Bangka Tengah	sekolah	75	45
	perkantoran	47	13,8
	Pertokoan	576	10,5
Bangka Selatan	sekolah	85	256
	perkantoran	20	146
	kegiatan bersih sampah	35	36,5
Bangka Barat	Industri	4	275
	rumah makan/restoran	455	168
	Pertokoan	443	78,5
Belitung	sekolah	169	0,84
	Pasar	4	0,4
	Pertokoan	250	0,4
TOTAL			4.680,64

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pelaksanaan pembatasan timbulan sampah cukup banyak dilakukan disekolah-sekolah, terlihat bahwa ada 377 unit sekolah (yang masuk *top three*) yang melaksanakan pembatasan sampah. Hasil total pengurangan sampah oleh pembatasan yang dilakukan di sekolah adalah sebanyak 370,94 ton/tahun. Jika di rata-ratakan maka setiap unit sekolah membatasi sampah sebanyak 0,98 ton/tahun atau 3,15 kg/hari/unit sekolah dengan asumsi 1 tahun sebanyak 312 hari sekolah.
2. Pembatasan timbulan sampah yang dilakukan oleh pertokoan adalah sebanyak 1519 unit toko, dengan hasil pembatasan sebanyak 188,8 ton/tahun. Rata-rata toko membatasi sampah sebanyak 0,34 kg/hari/unit toko, dengan asumsi 1 tahun sebanyak 365 hari.
3. Pembatasan timbulan sampah yang dilakukan oleh perkantoran adalah sebanyak 830 unit kantor, dengan hasil pembatasan sebanyak 1466,5 ton/tahun. Rata-rata kantor membatasi sampah sebanyak 6,69 kg/hari/unit kantor, dengan asumsi 1 tahun sebanyak 264 hari kerja.



4. Pembatasan timbulan sampah yang dilakukan oleh Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Barat pada fasilitas Rumah makan/restoran memberikan jumlah pembatasan timbulan sampah yang relatif cukup besar. Jumlah unit rumah makan/restoran yang melakukan pembatasan timbulan sampah adalah 611 unit rumah makan/restoran. Dengan rata-rata timbulan sampah yang dibatasi adalah 6,8 kg/hari/unit rumah makan, dengan asumsi 1 tahun sebanyak 365 hari.

Pembatasan jumlah timbulan sampah diawali oleh kegiatan pemilahan. Suatu pengelolaan sampah yang baik pasti akan mengawali pengelolaan dengan melakukan pemilahan sampah. Sampah yang dipilah berdasarkan jenisnya akan mempermudah proses pengelolaan selanjutnya. Pemilahan sampah paling sederhana adalah pemilahan dengan kategori sampah organik dan an-organik.

Keuntungan yang diperoleh jika dilakukan pemilahan sampah, yaitu:

- Mengurangi tumpukan sampah
- meningkatkan mutu sampah yang dihasilkan
- Memberikan nilai jual yang lebih tinggi (keuntungan ekonomi)
- Memudahkan pengolahan kembali
- Mempercepat terurainya sampah organik (dapat dibuat kompos dengan lebih cepat)

Pengelolaan sampah lanjutan dari hasil pemilahan antara lain sebagai berikut :

- Sampah organik dapat dijadikan kompos, ecoenzym, makanan maggot BSF (Black soldier Fly), dan makanan hewan lainnya. Pembatasan timbulan sampah dari rumah makan umumnya merupakan hasil dari kerjasama dengan peternak maggot BSF yang memerlukan sampah organik tinggi protein sebagai pakan maggot BSF
- Penjualan sampah an-organik seperti botol air mineral, tutup botol, kaleng, plastik lainnya, aluminium, kardus dan lain-lain sehingga dapat menambah pendapatan bagi masyarakat. Penjualan sampah an-organik



umumnya melalui bank sampah atau langsung ke pengepul (sektor informal) sampah

c. Pengelolaan TPA Parit Enam Kota pangkalpinang

Kapasitas TPA Parit Enam di wilayah perkotaan Pangkalpinang sebagai ibukota provinsi telah terlampaui sehingga sampah berserakan di area sekitar TPA. Hal tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif, dan yang terasa langsung oleh masyarakat adalah gangguan estetika dan kebauan. Pengelolaan persampahan di perkotaan Pangkalpinang perlu diperbaiki dari berbagai segi. Dalam rangka mengatasi timbulan sampah, Kota Pangkalpinang telah melakukan beberapa upaya pengelolaan sampah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.5. 26 Fasilitas pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang

Fasilitas pengelolaan sampah	Pengurangan
Bank sampah	2 ton/hari
Pelapak/pemulung	13,5 ton/hari
Industri Kreatif	200 kg/hari
Rumah kompos di pasar-pasar	2 ton/hari
Maggot BSF	500 kilo/hari
BBJP (Bahan Bakar Jumputan Padat)	800 kilo/hari
TPS 3R	1 ton/hari

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, 2024

Selain melakukan pengelolaan sampah yang ditimbulkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang merencanakan perluasan lokasi TPA Parit Enam sebanyak 2 Ha pada tahun 2024 dengan rincian perluasan lahan untuk *landfill* seluas 1 Ha, dan Pembangunan TPST seluas 1 Ha, dengan pengelolaan sampah menggunakan metode RDF dan pembuatan *conblok* dari sampah. Pembangunan TPST dianggarkan sebesar 3 milyar rupiah dengan penggunaan dana untuk bangunan dan peralatan.



II.VI Tata Kelola

Tata Kelola Lingkungan Hidup (*Environmental Governance*) merupakan suatu interaksi multilevel antara lokal, nasional, internasional/global, namun tidak terbatas pada interaksi tiga aktor utama yaitu *state*, *private*, dan *civil society* yang dilakukan baik secara formal maupun informal dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan untuk merespons tuntutan dan masukan dari masyarakat terkait lingkungan sehingga tercapai pembangunan berkelanjutan (Chazienul Ulum, M., Ngindana, R, 2017). Selaras dengan pernyataan UNEP, 2023 bahwa "*Environmental governance is a key driver for the achievement of sustainable development.*" Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik (*Good Environmental Governance*) merupakan suatu konsep yang dapat dijalankan jika seluruh *stakeholders* yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berperan aktif dan partisipatif (Anugrah, F.N, 2021). Prinsip-prinsip seperti inklusivitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas serta keadilan sosial membentuk dasar dari *Good Governance*.

Pengelolaan lingkungan hidup yang baik menjadi urgen sifatnya untuk menopang keseimbangan ekosistem saat ini. Negara – negara di dunia pun sudah menyadari dan mengupayakan perbaikan kondisi lingkungan dengan menggelar konsolidasi tingkat dunia dalam hal perubahan iklim. Melalui pembentukan *Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change* (INC/FCCC) sebagai wadah tunggal proses negosiasi antar pemerintah di bawah naungan Majelis Umum PBB. Semua pihak penandatanganan UNFCCC termasuk Indonesia pun menggelar pertemuan tahunan guna membahas strategi menghadapi perubahan iklim. Pertemuan ini disebut *Conference of the Parties* (COP) atau konferensi pihak-pihak terkait dalam UNFCCC. Pada COP ke-27 di Mesir, Menteri LHK Indonesia, Siti Nurbaya menyatakan



bahwa Indonesia dalam NDC akan meningkatkan target menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan upaya sendiri (*unconditional*) dan sebesar 43,20% jika mendapat dukungan dari internasional (*conditional*). NDC atau komitmen kontribusi nasional adalah tugas masing-masing negara untuk menahan pemanasan suhu bumi hingga 1,5°C hingga tahun 2030. Kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

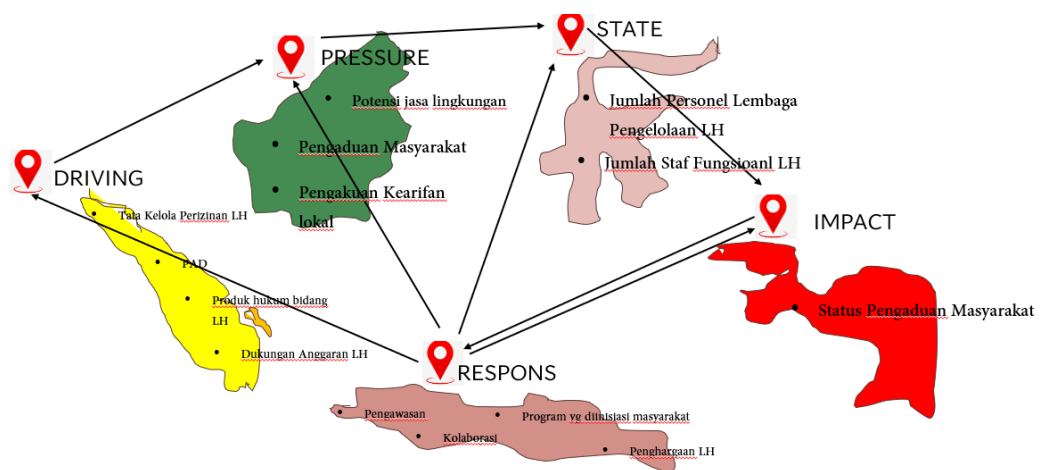
Jika dilihat pencapaian nilai IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, nilai IKLH berada dibawah target yang telah ditetapkan, namun masih berada pada predikat baik. Untuk nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) masih dalam predikat baik dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dalam kondisi baik, namun untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) walaupun terdapat kenaikan indeks dari kondisi eksisting IKTL tahun 2020, nilai IKTL tersebut masih dalam kriteria sangat kurang baik jika dilihat dengan standar Kriteria IKTL pada IKLH. Sehingga upaya- upaya peningkatan nilai IKLH selain mempertahankan kondisi pencapaian IKA dan IKU yang sudah dalam kriteria baik perlu meningkatkan Indeks Tutupan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Salah satu dari enam misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pernyataan misi ini mengandung makna bahwa tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu berada dalam koridor target pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup yang baik dan terjaga. Maknanya adalah kondisi minimal yang perlu dicapai yaitu



kualitas dan kualitas lingkungan hidup berada pada kondisi stabil dan optimum dalam mendukung perikehidupan masyarakat. Indeks kualitas lingkungan hidup dalam jangka panjang dapat berarti menjaga kualitas dan ketersediaan air, udara maupun tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi lingkungan hidup dikatakan layak apabila kualitas air di perkotaan khususnya area permukiman penduduk tidak melebihi ambang batas baku pencemaran, kawasan ruang terbuka hijau perkotaan dapat dipertahankan dan ditingkatkan luasannya, perbaikan sistem tata kelola transportasi seperti pengaturan volume kendaraan di perkotaan dan sistem tata kelola kegiatan ekonomi utama seperti industri, jasa dan perdagangan baik di bidang pariwisata maupun non-pariwisata untuk menghindari terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah serta kawasan rentan dan bernilai penting tetap terjaga. Serta berkurangnya kejadian bencana alam, penyakit dan bencana lain yang disebabkan oleh rusaknya kondisi lingkungan. Penjagaan kualitas air dan udara menjadi bagian terpenting dari target IKLH jangka panjang karena sangat berpengaruh terhadap seluruh kondisi ekosistem di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam mengelola daerah yang bersifat kepulauan dibutuhkan dukungan manajerial baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur, anggaran yang memadai serta inovasi.



Gambar 2.6. 1 Kerangka DPSIR Tata Kelola



II.6.1 Driving force

II.6.1.1 Perizinan

Permasalahan pada tata kelola lingkungan hidup lebih besar difokuskan pada keterbatasan dan lemahnya regulasi pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Masih banyak oknum yang belum memiliki izin tetapi tetap melakukan aktivitas pertambangan dan kegiatan lainnya. Lemahnya regulasi dan hubungan antar stakeholder memicu terjadinya kerusakan lingkungan dan sumber daya alam karena pemerintah daerah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Satgas percepatan investasi bekerjasama dengan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan realisasi investasi, penyelesaian permasalahan dan hambatan sektor usaha terkait perizinan yang rumit, mendorong percepatan usaha dan memberi rekomendasi sanksi/penindakan administrasi.

Penerapan konsep pemerintahan yang bijaksana dan penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip *good governance* merupakan prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan dengan menggunakan azas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektivitas dan efisiensi dan keadilan. Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan setiap individu terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam rangka menghindari dan mencegah kerusakan lingkungan maka perlu adanya penegakan hukum. Tata kelola yang adil adalah ketika undang-undang yang dibentuk dan kebijakan yang sudah ditetapkan hadir untuk melindungi hak dan kepemilikan dan



memastikan bahwa setiap perizinan yang diberikan dengan bebas dan sesuai dengan ketentuan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus merumuskan dan menerapkan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan penegakan hukum yang berdasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan lingkungan dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku. Pengintegrasian perizinan lingkungan ke perizinan berusaha menyebabkan para pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan yang kompleks dan menyulitkan. Perizinan berbasis resiko dalam UUCK berkaitan erat dengan pelaku usaha dan kegiatan yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan sehingga pemberian izin akan semakin diperketat sesuai dengan tingkat resiko yang ditimbulkan. Tingkat resiko pada sistem tersebut terbagi menjadi 4 kategori yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan percepatan layanan persetujuan lingkungan dengan meluncurkan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet dengan berbasis geospasial dengan mengutamakan keterbukaan publik pada tanggal 7 Februari 2023. Hal ini muncul sebagai implikasi dari terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menerbitkan 130 izin lingkungan/persetujuan lingkungan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni dari tahun 2019 hingga 2023. Terlihat kenaikan yang signifikan di tahun 2023 seiring dengan penyederhanaan izin lingkungan



yang memberikan kemudahan perolehan izin serta pengawasan tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan.



Gambar 2.6. 2 Jumlah izin lingkungan/persetujuan lingkungan yang diterbitkan dari tahun 2019 hingga 2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Kep Babel , 2024

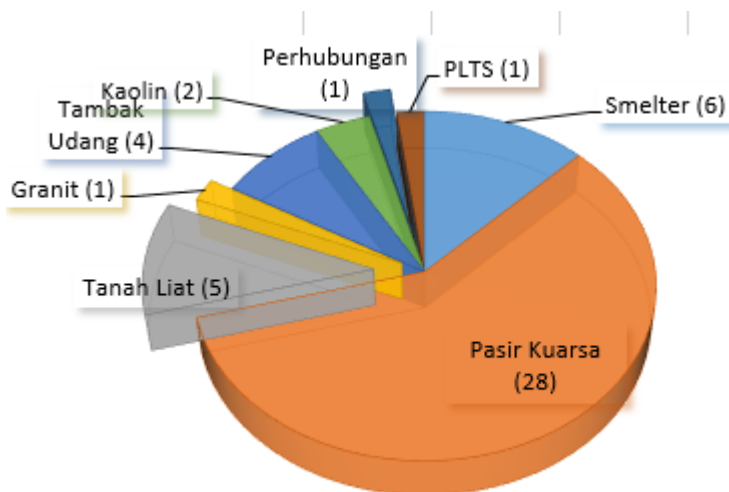
Integrasi persetujuan lingkungan melalui Amdalnet dengan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) menjadi salah satu bentuk penataan birokrasi pemerintah dalam memberikan kemudahan berinvestasi bagi para pelaku usaha dalam proses perizinan berusaha dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian untuk menjamin bahwa aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan pelestarian keanekaragaman hayati sudah terpenuhi.

Dari berbagai jenis usaha/kegiatan yang mengajukan izin, sektor yang paling banyak diterbitkan izinnya adalah penambangan pasir kuarsa yaitu sebanyak 28 izin yang lokasinya berada di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas Yang Tergolong Dalam Klasifikasi Mineral Kritis. Yang dimaksud dengan mineral kritis adalah mineral yang dipandang esensial bagi perekonomian dan pertahanan keamanan negara yang berpotensi mengalami gangguan pasokan dan tidak ada pengganti yang tepat. Pasir kuarsa termasuk salah satu mineral kritis yang banyak dimanfaatkan



sebagai bahan baku pembuatan kaca, bahan bangunan hingga bahan baku semen. Silikon adalah bahan baku utama pembuatan panel surya. Kebutuhan akan energi baru-terbarukan mengalami peningkatan sebagai langkah upaya mengatasi pemanasan global dan mengurangi jejak karbon sehingga berusaha untuk mengalihkan sumber energi berbasis fosil kepada sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan.

Melalui program dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung (LPPM ITB), tim dosen ITB melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Karakterisasi Pasir Kuarsa Di Daerah Bangka Sebagai Bahan Baku Panel Surya. Lokasi pengambilan sampel di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pasir kuarsa tersebut belum memenuhi spesifikasi sebagai bahan baku panel surya sehingga masih memerlukan proses pemurnian lagi. Menurut Xakalashe (2012), silikon yang diambil dari pasir kuarsa memiliki efisiensi konversi energi yang tinggi, biaya produksi relatif rendah, ketersediaannya di alam melimpah, ramah lingkungan dan menunjukkan stabilitas jangka panjang. Pada gambar 2.6.3 menunjukkan bahwa sektor pertambangan masih menjadi andalan perekonomian Bangka Belitung.



Gambar 2.6. 3 Jumlah izin lingkungan yang sudah diterbitkan berdasarkan jenis usaha/kegiatan tahun 2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Kep Babel, 2024



Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah wajib melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3. Dibanding dengan jenis limbah lainnya, limbah B3 memerlukan metode khusus dalam pengelolaannya karena berbahaya dan beracun dan pengelolaannya pun harus dilakukan oleh perusahaan yang sudah memiliki izin khusus untuk mengelola limbah B3. Berdasarkan PP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH), terdapat mekanisme baru dalam melakukan pengelolaan limbah B3 yang pada awalnya dilakukan melalui sistem perizinan berubah menjadi permohonan persetujuan teknis, kelayakan operasi dan rekomendasi dimana prosedur pengajuannya dilakukan secara online. Hingga tahun 2023 sebanyak 17 perusahaan yang sudah memiliki jenis izin pengelolaan limbah B3 yang terdiri dari 15 perusahaan berupa izin penyimpanan sementara dan 2 perusahaan berupa pengumpulan. Adapun perusahaan-perusahaan yang mengantongi izin tersebut bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, pertambangan, jasa pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 dan non B3, jasa pengangkutan minyak dan gas bumi, peleburan dan pemurnian timah (smelter).

Tabel 2.6. 1 Perusahaan Yang Memiliki Izin Limbah B3

No.	Nama Perusahaan	Jenis usaha/kegiatan	Jenis izin
1.	PT. Sarana Telaga Mandiri Utama	Kegiatan Pengumpulan LB3	Izin pengumpulan LB3
2.	PT. Tata Hampan Eka Persada	Agroindustri	Penyimpanan sementara
3.	PT. Timah, Tbk UPDB-Bidang Pengawasan Tambang dan Pengangkutan Bangka Barat	Pertambangan	Penyimpanan sementara
4.	PT. Astika Murni Utama	Jasa	Penyimpanan sementara
5.	PT. Menara Cipta Mulia	Peleburan dan Pemurnian Timah	Penyimpanan sementara
6.	PT. Refined Bangka Tin	Pengolahan Bijih Timah (Smelter)	Penyimpanan sementara



7.	PT. Timah Tbk – Unit Metalurgi	Pertambangan (Pengolahan dan Pemurnian)	Penyimpanan sementara
8.	PT. Belitung Energy	Ketenagalistrikan	Penyimpanan sementara
9.	PT. Steelindo Wahana Perkasa	Perkebunan, Pengolahan Kelapa Sawit, Pengolahan CPO dan Pengolahan Inti Sawit	Penyimpanan sementara
10.	PT. Belitung Industri Sejahtera	Pengolahan Bijih Timah (Smelter)	Penyimpanan sementara
11.	PT. Valten Cahaya Anugrah	Pengelolaan Limbah B3	Kegiatan pengumpulan limbah
12.	PT. Sawindo Kencana	Agroindustri Pabrik Kelapa Sawit	Penyimpanan sementara
13.	PT. Bumi Permai Lestari - PKS	Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan sementara
14.	PT. Gemilang Cahaya Mentari	Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan sementara
15.	PT. Bumi Sawit Sukses Pratama – Palm Oil Mill	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan sementara
16.	PT. Forestalestari Dwikarya	Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan sementara
17.	PT. Timah Tbk – UPDB Pengawasan Produksi dan Pengangkutan Bangka	Pertambangan	Penyimpanan sementara

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Kep Babel, 2024

Sumber daya alam lainnya pada hutan termasuk area yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi untuk kegiatan usaha. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil demi kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Setiap pelaku usaha yang memanfaatkan kawasan hutan lindung wajib memiliki izin usaha tergantung dari jenis pemanfaatannya. Pemanfaatan hasil hutan kayu juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Beberapa perusahaan yang sudah



memiliki surat keputusan terkait dengan pemanfaatan hasil hutan kayu dapat dilihat pada tabel 2.6.2.

Tabel 2.6. 2 Perusahaan Yang Sudah Memiliki Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Nama Perusahaan	Lokasi	Luas (ha)	SK
PT. Agro Pratama Sejahtera	Kab. Bangka dan Kab. Belitung Timur	30.773	SK Menhut No.SK. 208/Menhut-II/2011
PT. Indo Sukses Lestari Makmur	Kab. Belitung Timur	9.994,54	SK Menhut No.SK. 780/Menhut-II/2012
PT. Bangun Rimba Sejahtera	Kab. Bangka Barat	66.460	SK Menhut No.SK. 336/Menhut-II/2013
PT. Agrindo Persada Lestari	Kab. Bangka Tengah	26.259	SK Menhut No.SK. 338/Menhut-II/2014
PT. Andalan Karya Pertiwi	Kab. Belitung Timur	29.140	SK KBKPM No. 8/1/ IUPHHK-HTI/ PMDN/ 2015
PT. Hutan Lestari Raya	Kab. Bangka Selatan	31.630	SK KBKPM No. 19/1/ IUPHHK-HI/PMDN/ 2017

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga terdapat 9 perusahaan yang sudah memiliki izin pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati. Jenis izin yang diberikan berupa ijin pinjam pakai dan pengelolaan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyedia sarana wisata. Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung terdiri dari pemanfaatan aliran air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Jangka waktu pemberian ijin usaha tersebut berbeda-beda tergantung dari jenis pemanfaatannya. IUPJL untuk pemanfaatan air untuk jangka waktu paling lama 10 tahun, untuk wisata alam paling lama 35 tahun dengan ketentuan luas paling banyak 10% dari luas blok pemanfaatan. Sedangkan IUPJL perlindungan keanekaragaman hayati paling lama 50 tahun dan untuk penyerapan dan/atau penyimpanan karbon diberikan waktu paling lama 30 tahun.



Tabel 2.6. 3 Perusahaan Yang Memiliki Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam (IUPJLWA)

No.	Nama Perusahaan	Luas Wisata Alam (ha)	SK
1.	Yayayaan Alam Bukit Betung	30,00	Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/958/Dishut/2016
2.	CV. Panorama Lintas Timur	18,16	Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/1122/Dishut/2018
3.	PT. Pantai Indah Rebo	69,38	Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/694.a/Dishut/2019
4.	PT. Wattana Segar Alam	3,20	Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/1094.k/Dishut/2019
5.	PT. Tunas Propindo Lestari	22,40	Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/1046.a/Dishut/2019
6.	PT. Timah, Tbk	72,00	Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/499/Dishut/2020
7.	CV. Pesona Alam Asri	16,32	Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/703/Dishut/2020
8.	CV. Mulia Asri Sukhitata	26,08	Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/702/Dishut/2020
9.	PT. El John Tirta Emas Wisata	8,30	Keputusan Bupati Bangka

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Lokasi perusahaan yang berada di kawasan hutan lindung dan wilayah pesisir sangat rentan dengan ekosistem yang ada di sekitarnya sehingga meskipun sudah memiliki ijin usaha tetap harus ada pengawasan agar setiap kegiatan tidak merusak *biodiversity* di sekitarnya. Mangrove yang berada di pesisir menjadi ekosistem esensial penyedia berbagai jenis jasa lingkungan yang melindungi kawasan pesisir, tempat hidup biota perairan dan juga penyerap karbon. Disini lah pentingnya peran UPTD KPHP/L untuk melakukan pemantauan dan pengawasan dari kegiatan usaha yang dilakukan. Posisi KPH yang merupakan organisasi pengelolaan hutan di tingkat tapak memungkinkan untuk membangun kerjasama dengan masyarakat setempat dan melakukan kegiatan pemberdayaan kepada



masyarakat yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan dalam kawasan hutan.

II.6.1.2 Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan

Diterbitkannya produk hukum di bidang pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk mengatur penataan hukum tata kelola lingkungan agar pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Tabel 2.6. 4 Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Produk Hukum Bidang Lingkungan	Nomor dan Tanggal	Tentang
Pearturan Gubernur	No. 13 tanggal 21 Mei 2024	Rencana Induk Rencana Aksi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Gugusan Pulau Di Selat Gaspar dan Sekitarnya
Peraturan Daerah	No. 1 tanggal 20 Januari 2023	Penyelenggaraan Pembudidayaan Ikan
Peraturan Daerah	No. 2 tanggal 27 Februari 2023	Pengelolaan Wilayah Konservasi Keanekaragaman Hayati
Peraturan Gubernur	No. 20 tanggal 26 Oktober 2023	Rencana Pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Wilayah Toboali dan Sekitarnya
Peraturan Gubernur	No. 25 tanggal 28 Oktober 2022	Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidro Meteorologi dan Hidrogeologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peraturan Daerah	No. 3 tahun 2020	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040
Peraturan Daerah	No. 10 tahun 2020	Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Sumber : <https://jdih.babelprov.go.id>, 2024

II.6.1.3 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap program-program pengelolaan lingkungan hidup dapat terlihat dari jumlah anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang



tercantum dalam RPJMD. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup tahun 2023 mencapai Rp. 433.150.471.112 dimana angka ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 198.653.032.293, melalui program dan kegiatan di bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang lingkungan hidup, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang pengembangan dan penelitian, bidang penanggulangan bencana serta bidang kelautan dan perikanan. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan melalui program penanaman dan penghijauan, memanfaatkan lahan kritis menjadi perkebunan dan wisata, sarana dan prasarana, dan program lain yang bersentuhan dengan masyarakat di tingkat tapak. Sumber anggaran diperoleh dari pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan dana hibah riset.

Tabel 2.6. 5 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

No.	Peruntukan Anggaran	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Anggaran Tahun 2023 (Rp)
1.	Bidang Kesehatan	35.718.283.751	152.224.563.060
2.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	143.270.002.156	244.241.055.620
3.	Bidang Lingkungan Hidup	7.253.594.406	14.773.760.210
4.	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	126.199.923	879.314.000
5.	Bidang Pengembangan dan Penelitian	491.287.692	225.050.000
6.	Bidang Penanggulangan Bencana	3.856.983.362	5.519.963.016
7.	Bidang Kelautan dan Perikanan	7.936.681.003	15.286.765.206
Total		198.653.032.293	433.150.471.112

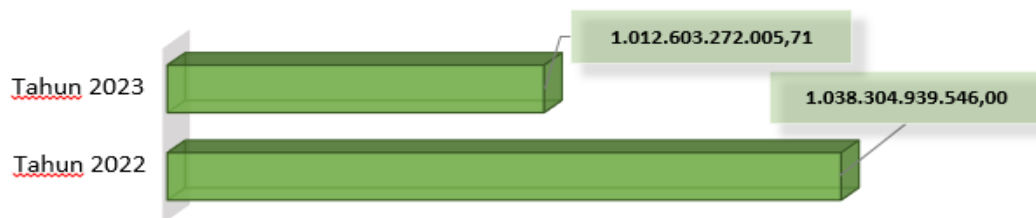
Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2024

II.6.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai modal berhasilnya pembangunan di daerah karena menunjukkan kemandirian dalam membiayai segala kebutuhannya. Komponen PAD meliputi pajak

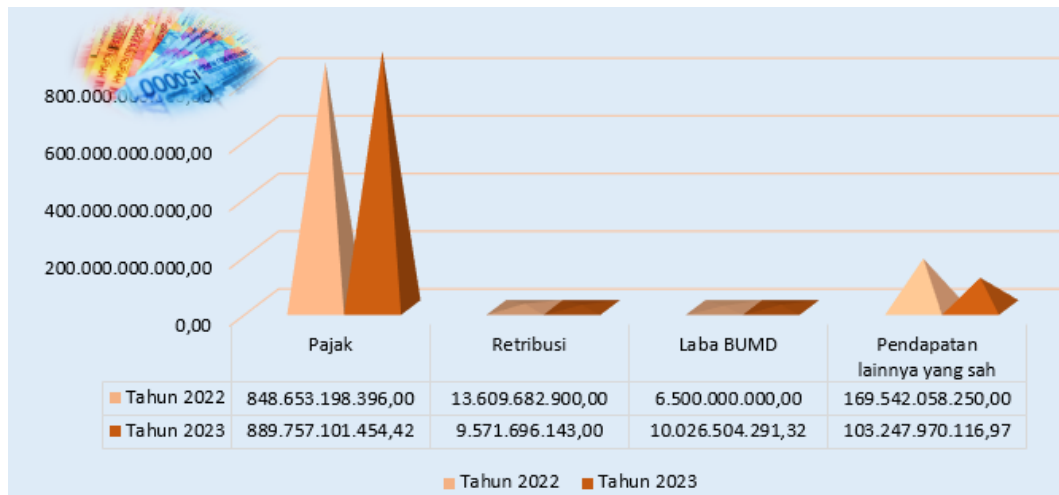


daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tahun 2023 total PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp. 1,01 T dari target yang sudah ditetapkan yaitu 1,04 T. Sumbangan terbesar diperoleh dari sektor pajak yaitu 889,7 M yang meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.



Gambar 2.6. 4 Perbandingan PAD Tahun 2022 dan 2023

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2024



Gambar 2.6. 5 Sumber Penghasilan Pajak Tahun 2022 dan 2023

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2024

II.6.2 Pressure

II.6.2.1 Pengaduan Masyarakat

Kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah menimbulkan konflik sosial dan lingkungan. Persoalan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat dipisahkan



dari aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan, hal ini disebabkan potensi kerusakannya yang ditimbulkan saat aktivitas berlangsung dan saat pasca tambang. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tidak hanya terjadi pada ekosistem lokal tetapi juga berimbas terhadap perubahan iklim, keanekaragaman hayati dan kesehatan masyarakat (F.U.Najicha, 2021). Perijinan yang sudah diterbitkan dan produk hukum yang ada masih berpotensi terhadap timbulnya permasalahan lingkungan. Belum semua pelaku usaha dan/atau kegiatan yang disiplin melaporkan pengelolaan lingkungan hidupnya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat dapat turut berperan dalam menjaga lingkungan dengan melaporkan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terjadi. Hal ini merupakan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sepanjang tahun 2023 terdapat 16 pengaduan masyarakat terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Tabel 2.6. 6 Pengaduan Masyarakat Terkait Permasalahan Lingkungan

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah yang Diadukan
1.	PT. Bangun Rimba Sejahtera	Tambang ilegal di Desa Cupat, Kab. Bangka Barat
2.	LSM Gempur	Pencemaran akibat tambak udang di Dusun Tegek, Kab. Bangka Barat
3.	Laporan UPTD KPHP Sungai Sembulan	Perambahan hutan akibat aktivitas tambang ilegal
4.	DPD Persatuan Wartawan RI	Dugaan perambahan kawasan hutan di Kab. Bangka
5.	Kantor hukum Haris Sucahyo, S.H	Pengerusakan dan aktivitas tambang ilegal di kawasan hutan di Kec. Sungai Selan
6.	Surat dari Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S.208/PPSALHK/PDW/GKM.0/2/2023 tanggal 17 Februari)	Dugaan pengerusakan Bukit Muruf dan hutan di Desa Nangka, Kab. Bangka Selatan
7.	DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia	Aktivitas perkebunan sawit di kawasan hutan di Kab. Belitung
8.	Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Padang Lestari	Penambangan tanpa izin
9.	Surat dari Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dugaan pemanfaatan sumber air baku di hutan lindung Gunung Tajam secara ilegal di Kab. Belitung



	(S873/PPSALHK/PDW/GKM.0/5/2023 tanggal 18 Mei 2023)	
10.	CV. Mulia Asri Sukhitata	Dugaan pencemaran limbah tambak udang di jalan lintas timur Desa Rebo, Kab. Bangka
11.	DLH Kab. Bangka Selatan	Tidak melakukan pengelolaan lingkungan pada aktivitas tambak udang di Desa Rias, Kab. Bangka Selatan
12.	Surat dari Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S1374/PPSALHK/PDW/GKM.0/7/2023 tanggal 28 Juli 2023)	Pembukaan lahan dalam kawasan hutan di Dusun Bukit Luwi, Kab. Bangka
13.	Surat dari Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S1442/PPSALHK/PDW/GKM.0/8/2023 tanggal 2 Agustus 2023)	Dugaan tambang ilegal dan perusakan kawasan hutan di Desa Simpang, Kab. Bangka Tengah
14.	Surat dari Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S1374/PPSALHK/PDW/GKM.0/7/2023 tanggal 2 Agustus 2023)	Dugaan tambang ilegal dan perusakan kawasan hutan di Desa Simpang, Kab. Bangka Tengah
15.	Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pencemaran tambak udang di Desa Tanjung Klumpang, Kab. Belitung Timur
16.	Laporan masyarakat	Permasalahan sawit di sempadan sungai di Desa Jangkang, Kab. Belitung Timur

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Dari 16 pengaduan tersebut, pihak yang mengadukan berbeda-beda, mulai dari masyarakat, pemerintah, pemerhati lingkungan, perusahaan bahkan komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan setiap pengaduan perlu ditindak lanjuti dan mendapatkan penanganan. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi agar semakin mendorong masyarakat melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitarnya.

II.6.2.2 Konflik Manusia dan Satwa Liar

Permasalahan lingkungan yang terjadi di wilayah Provinsi Bangka Belitung seperti dugaan tambang ilegal, pencemaran limbah tambak



udang, perambahan kawasan hutan, perkebunan, pemukiman dan pembangunan infrastruktur mengancam keanekaragaman hayati yang ada dan dapat menimbulkan konflik antara manusia dan satwa liar seperti buaya. Aktivitas tambang ilegal menyebabkan kerusakan habitat buaya dan berkurangnya pakan sehingga buaya bermigrasi ke tempat lain untuk mencari makan bahkan masuk ke pemukiman warga. Berdasarkan data dari *Crocodile Attack Database* melalui <https://crocattack.org/database/> ada 10 kejadian sepanjang tahun 2023 di Bangka Belitung terkait konflik manusia dan buaya.

Incident No.	Species	Species ID Certainty	Location	Lat.	Long.	Province
8484	CPOR	Certain	Nyire River, Batu Nanjung, Delas village, Air Gegas District, South Bangka Regency	-2.681875	106.314843	Bangka-Beli
8473	CPOR	Certain	Air Degong River in oil palm plantation area PT Steelindo Wahana Perkasa, Bentain village, Manggar District, East Belitung Regency	-2.834392	108.191559	Bangka-Beli
8424	CPOR	Certain	Bangka-Belitung	-2.163214	105.881442	Bangka-Beli
8400	CPOR	Certain	Bangka-Belitung	-2.967279	106.346511	Bangka-Beli
8397	CPOR	Certain	Bangka-Belitung	-2.39069	105.993129	Bangka-Beli
8393	CPOR	Certain	Bangka-Belitung	-2.363431	106.005976	Bangka-Beli
8363	CPOR	Certain	Bangka-Belitung	-2.720872	106.293399	Bangka-Beli
8274	CPOR	Certain	Bangka-Belitung	-2.398504	106.029435	Bangka-Beli
8229	CPOR	Certain	Bangka-Belitung	-2.588534	105.898564	Bangka-Beli
8191	CPOR	Certain	Bangka-Belitung	-2.230471	106.212687	Bangka-Beli
8099	CPOR	Certain	Bangka-Belitung	-2.536126	105.955316	Bangka-Beli
8042	CPOR	Certain	Tumpin Beach, Sebangin village, Simpang Rimba District, South Bangka Regency	-2.656509	105.896745	Bangka-Beli
8041	CPOR	Certain	Bangka-Belitung	-2.656509	105.896745	Bangka-Beli

Gambar 2.6. 6 Situs Crocodile Attack Database

Sumber: <https://crocattack.org/database/>, diakses 28 Juni 2024

Penelitian yang dilakukan oleh Fifin Fitirana, dkk menyebutkan bahwa lokasi tempat terjadinya konflik manusia dan buaya sebagian besar berada di lokasi penambangan timah. Terdegradasinya badan air akibat aktivitas pertambangan, pengembangan pembangunan menyebabkan perubahan ekosistem (Munandar, Kurniawan & Afriansyah, 2020). Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dengan menerbitkan peraturan yang mengatur pengelolaan keanekaragaman hayati yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Wilayah Konservasi Keanekaragaman Hayati.



II.6.2.3 Kearifan Lokal

Kearifan lokal mengacu pada pengetahuan masyarakat dan pengetahuan lokal yang dijumpai dalam masyarakat, komunitas dan individu. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan masyarakat antara lain untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup supaya lestari. Dalam konteks adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, masyarakat adat sangat berperan penting, dengan basis pengetahuan lokal dan budaya setempat mereka mampu menjaga kelangsungan ekosistem, memenuhi kehidupan secara berkelanjutan dan berkontribusi pada mencegah hilangnya hutan. Jamilah Cholilah (2017) dalam penelitiannya menyebutkan di Kepulauan Bangka Belitung masih dijumpai pengelolaan hutan oleh masyarakat secara tradisional, dan dikenal dengan beberapa istilah seperti :

1. Rimbek, merupakan hutan belantara yang masih alami dan lebat, seperti Rimbek Mambang di Desa Dalil, Kabupaten Bangka.
2. Hutan Lareng, ada pantangan adat dalam mengolah hutan dan menebang pohon dan kayu seperti Hutan Adat Bukit Tabun di kawasan Benak Pejem Desa Gunung Pelawan Kabupaten Bangka. Dan masih ada beberapa hutan larangan lainnya di daerah Bangka Selatan dan Bangka Barat.
3. Kelekak, seperti Kelekak Lukok di Desa Kemuja dan Kelekak Lubuk Bunter di Desa Kimak.

Salah satu cara konservasi tanaman di Bangka Belitung adalah dengan menjaga 'kelekak'. Sebuah kelekak dimiliki satu keluarga dan diwariskan secara turun temurun biasanya ditanami buah-buahan seperti durian, manggis, duku, binjai, cempedak, dan lainnya. Kelekak ini menjadi penyangga kawasan hutan yang biasanya berada di bukit atau di atasnya, atau dekat dengan pertanian dan pemukiman yang ada di bawah bukit. Namun seiring dengan maraknya pertambangan dan aktivitas perkebunan sawit kearifan lokal yang ada di kawasan hutan akan terancam dan bahkan

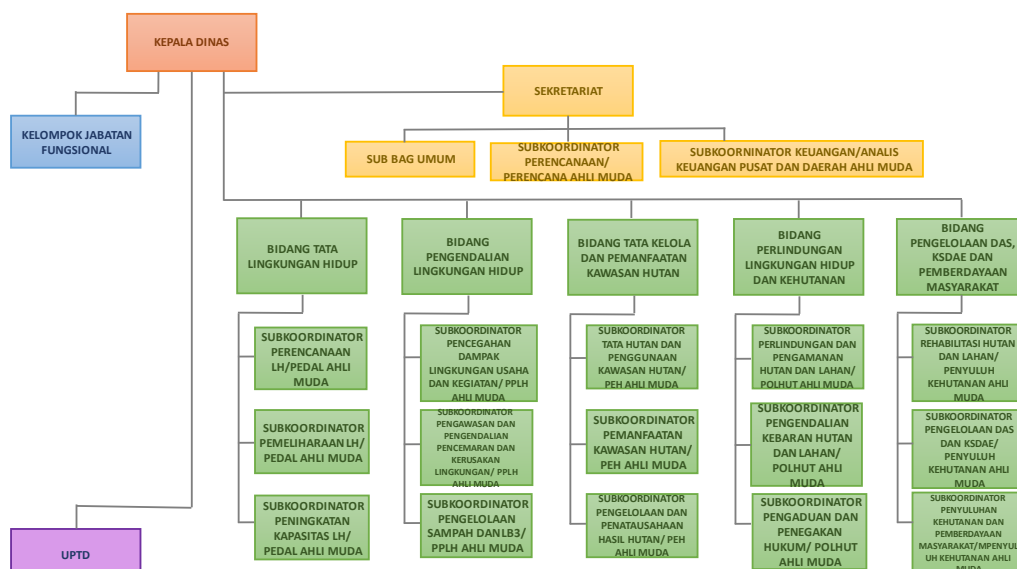


jika dibiarkan akan punah. Seperti yang terjadi pada masyarakat Suku Lom di Dusun Air Abik, lembaga adatnya tidak dapat mempertahankan kehidupan tradisional yang diwarisi leluhur karena masyarakatnya sudah beradaptasi dengan kehidupan modern bahkan sebagian warganya demi meningkatkan pendapatan justru melakukan aktivitas menambang timah dan menebang kayu yang sebenarnya merupakan tantangan adat.

II.6.3 State

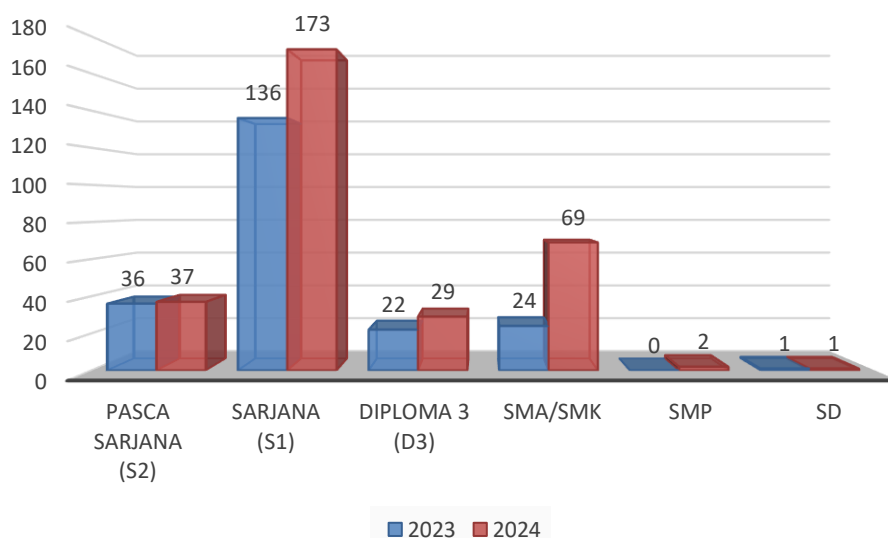
II.6.3.1 Jumlah personel dalam pengelolaan lingkungan hidup

Salah satu unsur penentu keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai budaya kerja yang baik. SDM yang mumpuni adalah SDM yang mempunyai kompetensi dan selalu berkomitmen meningkatkan kualitas diri yang akan mendukung pencapaian target kinerja individu dan organisasi. Budaya Kerja BERAKHLAK yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia agar menjadi fondasi budaya kerja ASN yang professional. BERAKHLAK sendiri merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Dalam konteks pembangunan yang berwawasan lingkungan, respon yang baik, efektif dan efisien dari SDM sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan aktifitas kegiatan yang bermuara pada perwujudan sasaran pembangunan (Nahrudin,2018).



Gambar 2.6. 7 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023



Gambar 2.6. 8 Jumlah Pegawai DLHK Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2023 dan 2024

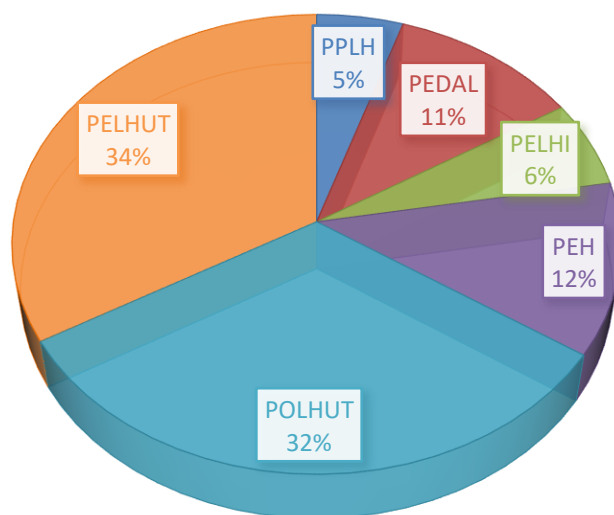
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 219 orang ASN yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi yaitu meningkatkan IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan tingkat pendidikan yang terendah



sampai dengan tertinggi yaitu SD sampai dengan Pasca Sarjana (S2), jumlah ASN dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) merupakan jumlah terbanyak yaitu 136 orang. 1 (satu) orang dengan tingkat pendidikan SD merupakan ASN dengan tugas *Cleaning Service*. Dilihat dari tingkat pendidikan, DLHK merupakan instansi yang mempunyai pondasi yang cukup kuat sebanding dengan tugas dan tanggungjawab organisasi yang cukup berat.

Sulaiman dan Asanudin, 2020 menyimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kinerja pegawai organisasi dan berpengaruh besar dalam organisasi. Suatu organisasi melaksanakan pendidikan dan pelatihan dengan harapan memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kemampuan yang baik. Pengadaan pejabat fungsional dalam formasi perekrutan CPNS sangat diutamakan karena jabatan fungsional sangat dibutuhkan dalam dinamika pelaksanaan program dan kegiatan dengan segala peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh sebuah institusi pemerintahan. Tentu saja pada jabatan fungsional, butir kegiatan dan pembagian kewenangan sangat jelas dan tertata sehingga memudahkan seseorang pegawai untuk membentuk jiwa profesionalisme didalam dirinya untuk memberikan kontribusi dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi dan pembangunan. Namun untuk membentuk profesionalisme pejabat fungsional dibutuhkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan dasar sesuai dengan nomenklatur jabatan.



Gambar 2.6. 9 Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: DLHK, 2023

Jumlah pejabat fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah terbanyak adalah jabatan Penyuluh Kehutanan sebesar 34% diikuti oleh Polisi Hutan sebesar 32%. Jumlah yang besar tersebut jika dibandingkan dengan luas wilayah kerja memang sesuai karena DLHK memiliki 8 UPT KPHP dan KPHL yang tersebar di Kabupaten.

Tabel 2.6. 7 Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan tahun 2023

Jabatan Fungsional	Jumlah pegawai		Sudah Mengikuti Diklat		% yg sudah mengikuti diklat	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
PPLH	5	5	2	2	40	40
PEDAL	10	11	7	8	70	72,73
PELHI	6	6	0	1	0	16,67
PEH	12	12	6	6	50	50
POLHUT	32	32	23	23	71,8	71,875
PELHUT	33	33	32	32	96,96	96,97
JUMLAH	98	99	70	72	71,42	72,73

Sumber: DLHK, 2024



Dalam pengelolaan lingkungan hidup, terdapat 6 (enam) rumpun yaitu PPLH, PEDAL, PELHI, PEH, POLHUT dan PELHUT. Dari 99 jumlah keseluruhan pejabat fungsional yang ada, sebesar 72 orang yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan atau sebesar 72,73%. Persentase tertinggi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan adalah jabatan penyuluh kehutanan (PELHUT) yaitu 96,96% artinya hampir semua PELHUT telah memiliki kompetensi teknis dalam menjalankan tugas penyuluhan dibidang kehutanan. Berbanding terbalik dengan jabatan penyuluh lingkungan hidup (PELHI) yang baru 1 (satu) orang yang sudah mendapatkan pelatihan karena memang jabatan PELHI merupakan rumpun jabatan fungsional baru yang dibuka formasinya oleh KLHK pada awal tahun 2020 mengingat dibutuhkannya penggerak masyarakat dalam meningkatkan indeks kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup terutama pengelolaan sampah dimana indeks ketidakpedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah mencapai angka 0,71 yang artinya ketidakpedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat tinggi mendekati angka 1 (BPS,2018).

II.6.3.2 Jumlah lembaga masyarakat/komunitas pengelolaan lingkungan hidup

Perkembangan pembentukan lembaga masyarakat, komunitas atau kelompok masyarakat dibidang pelestarian lingkungan hidup dalam beberapa tahun terakhir tidak banyak mengalami pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan tidak terlalu tinggi. Organisasi lingkungan hidup memiliki peranan penting dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

1. Sebagai penggerak di masyarakat baik masyarakat umum atau komunitas tertentu
2. Sebagai pengawas kinerja pelaku usaha dalam menjalankan usaha yang ramah lingkungan



3. Sebagai pengawas kinerja pemerintah dalam menjalankan program dan kegiatan, dalam hal ini lembaga dapat melayangkan aduan atau tuntutan hukum bagi siapa saja yang ditengarai melakukan tindakan pencemaran atau merusak lingkungan.
4. Sebagai wadah komunikasi, informasi dan edukasi

Berikut lembaga masyarakat, komunitas atau kelompok masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Tabel 2.6. 8 Daftar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Nama LSM	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	LSM Aliansi Lingkungan Hidup (ALIH) Bangka	-	Jln. Kacang Pedang no. 77A Pangkalpinang
2	Yayasan Lembaga Penelitian, Pengkajian Pembangunan dan Lingkungan Hidup (YP3LH)	-	Jln. Depati Bahrin no. 75 Pangkalpinang
3	Team Operasional Penyelamatan Lingkungan Kep. Bangka Belitung (TOPEL)	-	Jln. Pasar Mambo no. 95 Pangkalpinang
4	Himpunan Pelestari Hutan Andalan (HPMA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	601/BKBPPM/2004	Jalan Irian No. 10 Kel. Asam Pangkalpinang
5	Forum Lingkungan Hidup (FOLHI)	628/BKBPPM/2004	Jln. Pasar Mambo no. 95 Pangkalpinang
6	Yayasan Babel Hijau	677/BKBPPM/2007	Jln. Belibis I no. 167 RT 05 RW 02 Pangkalpinang
7	LSM Garda Lingkungan Hidup (GALIH)	388/BKBPPM/2010	Jl. Belinjo No. 195 Bukit Merapin Gerunggang Pangkalpinang Telp. 0717 434834
8	Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	408/BKBPPM/2010	Jl. Kapt. Munzir Thalib No. 23 Kec. Taman Sari Pangkalpinang
9	Yayasan Bangka Belitung Lestari	19/BKBPPM/2011	Jl. Lumba-Lumba I No.21 A Kel. Gabek I Kec. Gabek Pangkalpinang Telp. (0717) 424570
10	Lembaga Peduli Lingkungan Hidup (LPHP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	220/13/BKBPPM/II/2013	Jl. Kampung Melayu Dalam Rt.07 Rw.03 Kel. Tuatunu Indah Kec.



			Gerunggang Kota Pangkalpinang
11	Yayasan Cinta Lestari Lingkungan Hidup	220/23/BKBPPM/2013	Jl. RE. Martadinata Kel. Opas Indah Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang
12	Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan (GEMPA)	SKT BATENG 200/120/130/0003/VIII/2014	Jln. Soekarno Hatta II Gg. Sukma Rt. 09/12 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
13	Organisasi Pelestarian Flora dan Fauna (Alobi) ¹	Nomor 3 Tanggal 28 September 2017	Jl. Sumedang Gg. H.Sani Rt.001/004 Kel.Kejaksan Kec.Taman Sari Pangkalpinang
14	Wahana Lingkungan Hidup Kepulauan Bangka Belitung ²	-	Jl. Belanak Raya No. 64 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Air Salemba Kecamatan Pangkalbalam, Kota pangkalpinang 33118
15	Yayasan Terumbu Karang Soubad ³	Nomor 2 Tanggal 05 Februari 2020	Jl. Slamet Tikung Yaden RT. 008 RW. 005 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan
16	Perhimpunan Pencinta dan Pelestari Tanaman Bangka (Bangka Flora Society) ⁴	Nomor 2 Tanggal 05 Februari 2020	Jl. Slamet Tikung Yaden RT. 008 RW. 005 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan
17	Yayasan Sayang Babel Kite	Nomor 6 Tanggal 9 November 2011	Jl. Diponegoro No. 59 RT.07 Kel. Bukit Betung, Kec. Sungailiat Kabupaten Bangka
18	Yayasan Ikatan Keluarga Besar Kenanga (IKEBANA) ⁵	AHU-2263.AH.01.04 Tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009	Jl. Raya Kenanga, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka
19	<i>Botanical Group For Environment Project</i>	-	Jln. Desa Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah
20	BECAK BABEL	-	Komplek RSS. Pemda. Sungailiat
21	Forum Koordinasi Daerah Aliran Sungai (FKPDAS) Prov. Kep. Bangka Belitung	-	Pangkalpinang
22	Masyarakat Peduli Sungai dan Kulong "Cerudik Lestari" Kabupaten Bangka	-	Sungailiat
23	Forum Peduli Sungai dan Kulong "Mengkelik Bekawan Lestari" Kabupaten Bangka Tengah	-	












24	Pemuda Peduli lingkungan Asri dan Bersih Indonesia Babel	-	GOR Sahabudin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
----	--	---	--

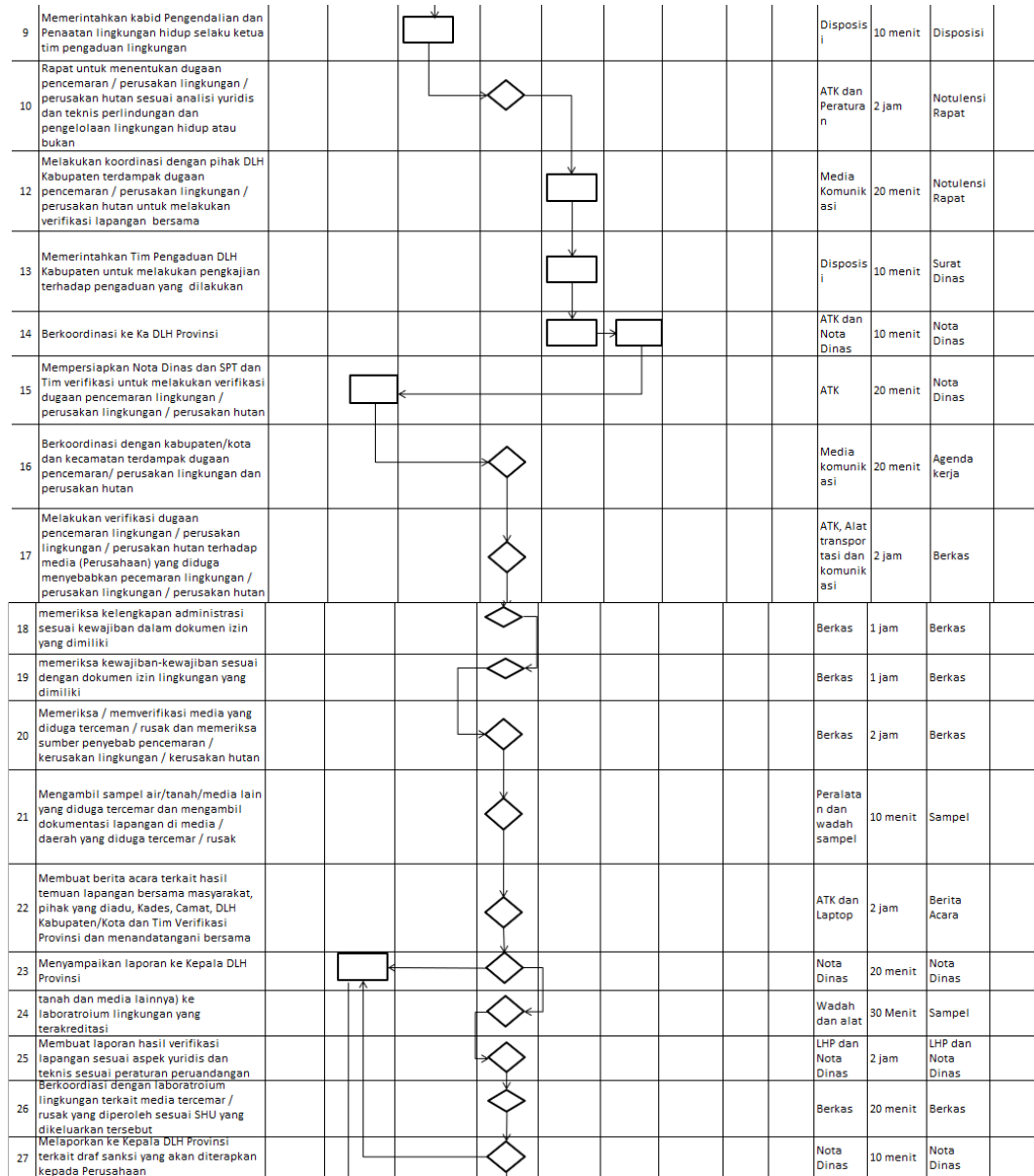
Sumber: DLHK, 2024

II.6.4 Impact

II.6.4.1 Status Pengaduan Masyarakat

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ditandai dengan pelayanan masyarakat yang paripurna termasuk dalam menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain SDM yang kompeten dan professional serta mempunyai integritas, dibutuhkan *tools* berupa peraturan perundangan dan SOP yang jelas untuk melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat yang komprehensif.

No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Ket	
		Masyarakat / Pengadu	Kepala DLH Provinsi	Kabid Pengendalian dan Penataan Lingkungan Hidup	Tim Terpadu	Kepala DLH Kabupaten/ Kota	Tim Kabupaten/ Kota dan Kecamatan	Perusahaan (Terduga) Pencemar/ Perusak	Satker Teknis Lainnya	JFU	Bahan	Waktu		Output
1	Masyarakat / pengadu datang langsung atau melalui media melakukan pengaduan kepada DLH Provinsi dilengkapi dengan bukti foto atau contoh										Surat	10 menit	Surat pengaduan dan media	
2	Menerima surat pengaduan (atau melalui media pengaduan) masyarakat terdampak pencemaran/perusakan lingkungan / perusakan hutan										Agenda kerja	30 menit	Agenda kerja	
3	Ka DLH Provinsi memerintahkan Tim Terpadu										Nota Dinas	10 menit	Disposisi	
4	Mengisi formulir pengaduan sesuai format atau petugas membuat formulir pengaduan (jika melalui media pengaduan)										Formulir	10 menit	Formulir	
5	Mencatat dalam buku register pengaduan dan memberikan tanda terima pengaduan										Formulir	20 menit	Formulir	
6	Melaporkan kepada kepala DLH Provinsi. Kepulauan Babel										Atk	20 menit	Nota Dinas	
7	Meneliti dan menelaah materi surat pengaduan dugaan pencemaran/ perusakan lingkungan / perusakan hutan										ATK dan Peraturan	1 jam	Berkas, Rekomendasi	
8	Dalam hal pengaduan konflik tenurial kawasan hutan instansi penanggung jawab meneruskan pengaduan kepada tim pengelolaan konflik tenurial kawasan hutan										Disposisi	2 jam	Disposisi	



Gambar 2.6. 10 SOP Proses pengaduan masyarakat

Sumber: <http://dlhk.babelprov.go.id>

Pada tahun 2022 terdapat 27 daftar kasus pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan, sebagian besar atau 21 kasus sudah ditangani sampai dengan tahap verifikasi teknis namun belum sampai pada keputusan apakah diberikan sanksi atau tidak. Terdapat 1 (satu) kasus yang sudah berada pada status penindakan yaitu adanya dugaan penambangan dalam kawasan HKM Matras Alami Sejahtera yang termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Sungailiat Mapur. Jenis permasalahan yang diadukan diantaranya terkait dengan pencemaran oleh aktivitas tambak udang,



penambangan dikawasan konservasi dan hutan lindung, penambangan timah ilegal, perambahan kawasan hutan serta menanggapi atau merespon pemberitaan dari media cetak dan elektronik terkait permasalahan lingkungan yang diduga terjadi pencemaran dan pengrusakan. Mengalami penurunan jumlah aduan pada tahun 2023 sebanyak 16 aduan yang sudah pada tahap penyelesaian terdapat 5 kasus aduan.

Tabel 2.6. 9 Data Status Pengaduan Masyarakat Tahun 2023

Status	Jumlah
Tercatat	1
Verifikasi	10
Penyelesaian	5

Sumber: DLHK, 2023

Adapun asal aduan bersumber dari masyarakat, pemerintah, komunitas pemerhati lingkungan, perusahaan dan legislatif. Melihat keterkaitan antara naiknya persentase pejabat fungsional yang mendapatkan diklat dengan turunnya jumlah pengaduan masyarakat maka hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan agar Dinas dapat segera menuntaskan hak pegawai terhadap pengembangan diri dan karirnya. Memang perlu analisa lebih lanjut apakah penurunan jumlah aduan dan persentase penyelesaian kasus betul-betul ada korelasinya dengan meningkatnya jumlah pejabat fungsional yang telah meningkatkan kompetensinya sesuai dengan jabatan yang diemban.

Tabel 2.6. 10 Jenis Kasus Aduan Masyarakat

Jenis kasus pengaduan	Jumlah
Tambang Ilegal	6
Permasalahan Status Lahan	6
Pencemaran air	3
Pemanfaatan SDA tanpa izin	1

Sumber: DLHK, 2023

Sudah tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitas tambang ilegal merupakan masalah yang kompleks, disuatu daerah masyarakat memilih untuk beraktivitas menambang namun di daerah lain tidak sedikit masyarakat yang terganggu dengan aktivitas ataupun dampak lingkungan

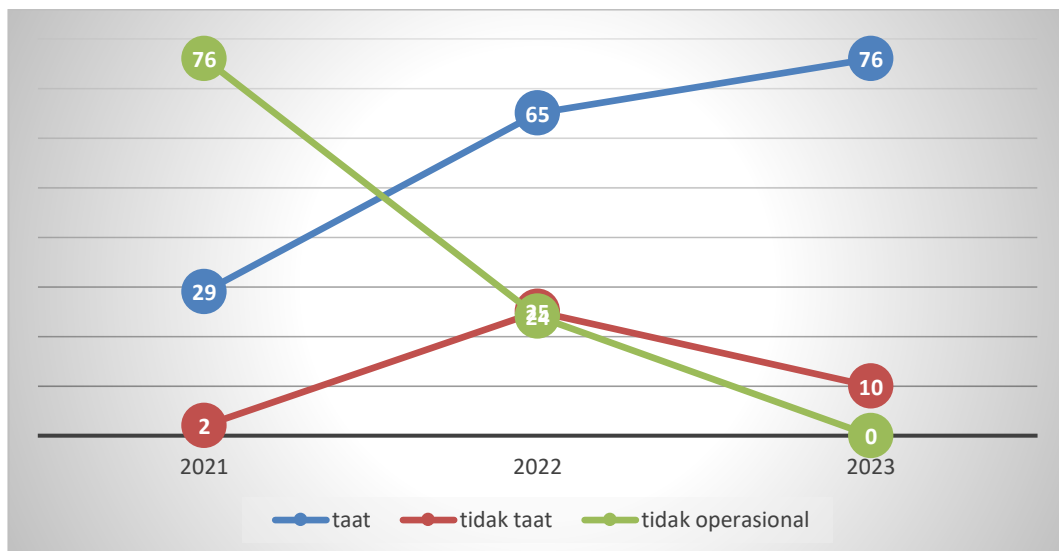


dari tambang ilegal. Belum lagi ditambah oleh pemanfaatan kawasan dengan status yang tidak tervalidasi perizinannya.

II.6.5 Response

II.6.5.1 Pengawasan

Jumlah pelaksanaan pengawasan bergantung pada ketersediaan anggaran karena selain dibutuhkan biaya transportasi juga dibutuhkan jumlah SDM, pelayanan laboratorium yang memadai. Dari 227 jumlah izin lingkungan/ persetujuan lingkungan yang diterbitkan, tidak semua perusahaan yang telah memiliki izin berusaha dan memiliki persetujuan lingkungan dilakukan pengawasan. Namun demikian jumlah pengawasan mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 35 perusahaan yang dilakukan pengawasan, pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebanyak 100 perusahaan yang dilakukan pengawasan. Secara jumlah, perusahaan dengan status taat mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai dengan 2023 diikuti oleh grafik menurun pada kategori tidak taat dan tidak operasional sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut:



Gambar 2.6. 11 Hasil Pengawasan Tahun 2021 s.d 2023

Sumber: DLHK, 2024



Peningkatan jumlah pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki izin lingkungan/persetujuan lingkungan pada tahun 2022 tercapai karena salah satunya adalah faktor penambahan jumlah personel Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang semula hanya ada 1 orang sampai dengan tahun 2021, pada tahun 2022 Jabatan Fungsional Tertentu PPLH bertambah menjadi 5 orang yang didapat melalui jalur invasing dan juga hasil dari penyederhanaan birokrasi.



Gambar 2.6. 12 Kegiatan Pengawasan Lingkungan yang dilakukan oleh DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber: DLHK, 2023

Beberapa hal yang perlu diupayakan agar pengawasan dapat berjalan optimal sehingga efektifitas pengawasan sebagai instrument



pencegahan dampak usaha dan/atau kegiatan meningkat adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan dan peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan pengawasan dan penataan pengelolaan lingkungan hidup mengingat masih banyak jumlah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi sesuai kewenangan akan tetapi belum dapat dilakukan pengawasan sebagaimana ketentuan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Adanya prioritas untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan bagi sumber daya manusia perusahaan dan perlu dibuatkan ruang informasi dan konsultasi lingkungan serta up grade pengetahuan terkait pengelolaan dan penataan lingkungan hidup.

II.6.5.2 Program yang diinisiasi masyarakat

Pengaruh masyarakat sangat besar dalam menentukan status dan kondisi lingkungan. Dimana keadaan orang-orang yang berada didalam sebuah lingkungan tergambarkan dari status lingkungannya. Komponen – komponen yang membentuk sebuah lingkungan saling berkaitan dengan interaksi yang berbeda dan bersinergi agar keseimbangan ekosistem selalu terjaga. Terkait dengan permasalahan lingkungan yang ada maka salah satu cara dalam menanggulangnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat. Dalam Yazid dan Alhidayatillah (2017), Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan mental dan emosi orang-orang untuk menyumbangkan ide-ide dalam proses pembangunan. Keterlibatan secara mental dan emosi muncul dalam bentuk kepedulian, rasa memiliki, aksi nyata, dan perilaku yang mendukung untuk membersihkan lingkungan. Individu yang mau terlibat dalam menjaga kondisi lingkungan akan membuat kegiatan dan terobosan-terobosan baru untuk menjaga lingkungan.



Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berarti masyarakat ikut dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan menikmati hasil pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan program pemerintah tentu saja sangat ditentukan pada kebermanfaatan program yang dapat menyentuh masyarakat secara luas yang berarti pula bahwa tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan dengan baik (*good governance*). Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dilihat dari bagaimana antusias partisipasi dalam pembangunan salah satunya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keswadayaan masyarakat merupakan *important value* bagi pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap program yang dijalankan. Terbentuknya kelompok/individu yang mempunyai kesamaan tujuan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa komunitas yang bergerak dibidang lingkungan hidup ikut aktif melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dengan bantuan maupun swadaya sebagaimana yang dilakukan oleh komunitas BECAK Babel yang mempunyai agenda kegiatan yang sudah diselenggarakan pada tahun 2022 – 2023.

Tabel 2.6. 11 Agenda Kegiatan Yang Sudah Terselenggara oleh BECAK Babel Tahun 2022 – 2023

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
1	2	3	4	5
1	Pengolahan Sampah Organik dan Anorganik harian di Markas BECAK-BABEL	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
2	Budidaya Maggot Black Soldier Fly di Markas BECAK-BABEL	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
3	Pembinaan Rutin Komunitas dan Pemuda Peduli Lingkungan	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024



4	Pembinaan dan Pendampingan Gerakan Sedekah Sampah AL-Bina Bangka Desa Sempnan	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
5	Edukasi Pendidikan dan Sekolah Adiwiyata (Pengolahan Sampah / Perubahan Iklim / Peduli Lingkungan)	BECAK BABEL	Pelajar	2023-2024
6	Edukasi Masyarakat Pengelolaan Sampah rutin berkala	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
7	Aksi Bersih Pantai / Cleanup rutin berkala	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
8	Penghijauan / Penanaman / Rehabilitasi Lahan	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
9	Aksi Bersih Masjid (SIMAS) dan Bantuan peralatan kebersihan di 30 masjid	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
10	Pelestarian Lingkungan dan Edukasi Masyarakat di Pulau Nangka - Bangka Tengah 2023	BECAK BABEL	Penduduk Pulau	2023-2024
11	Pelestarian Lingkungan dan Edukasi Masyarakat di Pulau Semujur - Bangka Tengah 2023	BECAK BABEL	Penduduk Pulau	2023-2024
12	Pelestarian Lingkungan dan Edukasi Masyarakat di Pulau Tinggi - Bangka Selatan 2024	BECAK BABEL	Penduduk Pulau	2023-2024
13	Pemasangan 1000 Lubang Resapan Biopori di Kabupaten Bangka 2023	BECAK BABEL dan BWS Babel	Pelajar	2023-2024
14	Pemasangan 1000 Lubang Resapan Biopori di Kota Pangkalpinang Bangka 2024	BECAK BABEL dan BWS Babel	Pelajar	2023-2024
15	Rembuk Sampah dan Pembentukan Forum Pelajar Peduli Sampah tingkat SLTA se-Sungailiat	BECAK BABEL	Pelajar	2023-2024
16	Peringatan Hari Peduli Sampah 2023 Aksi bersih sungai di Sungailiat	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
17	Peringatan Hari Peduli Sampah 2024 Aksi bersih muara di pesisir nelayan Sungailiat	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
18	"Green Employee Involvement" Aksi bersih sampah memperingati HLH Sedunia 2024	BECAK BABEL dan PT PLN UIW Babel	Karyawan PLN	2023-2024



19	Peringatan World Cleanup Day, Aksi bersih sampah di Pantai Temberan Kab. Bangka 2023	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
20	Sosialisasi dan Edukasi Proklam (Program Kampung Iklim) di Desa Zed Kab. Bangka 2023	BECAK BABEL dan KEMENDESA PD TT	Masyarakat Pedesaan	2023-2024
21	Sosialisasi dan Edukasi Proklam (Program Kampung Iklim) di Desa Gunung Muda Kab. Bangka 2024	BECAK BABEL dan KEMENDESA PD TT	Masyarakat Pedesaan	2023-2024
22	Sosialisasi dan Edukasi Proklam (Program Kampung Iklim) di Desa Balun Ijuk Kab. Bangka 2024	BECAK BABEL dan KEMENDESA PD TT	Masyarakat Pedesaan	2023-2024
23	Sosialisasi dan Edukasi Proklam (Program Kampung Iklim) di Desa Pagarawan Kab. Bangka 2024	BECAK BABEL dan KEMENDESA PD TT	Masyarakat Pedesaan	2023-2024
24	Sosialisasi dan Edukasi Proklam (Program Kampung Iklim) di Desa Kimak Kab. Bangka 2024	BECAK BABEL dan KEMENDESA PD TT	Masyarakat Pedesaan	2023-2024
25	Pembuatan dan Penyerahan Drop Box Bank Sampah di Sungailiat 2023	BECAK BABEL dan DLH Bangka	Pelajar	2023-2024
26	Kemah Tingkat Dasar Relawan Lingkungan 2023-2024	BECAK BABEL	Pemuda/Mahasiswa	2023-2024
27	Pelatihan SDM Pokdarwis Desa Air Anyir terkait Pengolahan ekowisata dan sampah pantai	BECAK BABEL dan PJBS PLTU Bangka	Masyarakat Pesisir	2023-2024
28	Pelatihan Ketahanan Pangan Kelompok Ternak Bebek Desa Air Anyir	BECAK BABEL dan PJBS PLTU Bangka	Masyarakat Pesisir	2023-2024
29	Pelatihan Pembuatan PUPUK dari limbah FABA di Desa Namang-Bangka Tengah	BECAK BABEL dan PJBS PLTU Bangka	Masyarakat Pesisir	2023-2024
30	Pelatihan Masyarakat Pesisir pengolahan sumberdaya kelautan dan perikanan Desa Air Anyir	BECAK BABEL dan PJBS PLTU Bangka	Masyarakat Pesisir	2023-2024
31	Gerakan Qurban minim sampah	BECAK BABEL dan BKPRMI Bangka	Masyarakat	2023-2024
32	Sosialisasi Gerakan Sedekah Sampah dan Barang bekas	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024



33	Festival Tanjung Sunor Lestari, Peringatan Hari Mangrove Se-Dunia di Teluk Kelabat Dalam	BECAK BABEL	Kelompok Nelayan	2023-2024
34	Edukasi mitigasi dan pelaporan bencana bersama petabencana.id	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
35	Pembentukan Masyarakat Peduli Sungai dan Kulong Kabupaten Bangka 2023	KPS BECAK BABEL dan BWS Babel	Masyarakat	2023-2024
36	Pembentukan Forum Peduli Sungai dan Kulong Kabupaten Bangka Tengah 2023	KPS BECAK BABEL dan BWS Babel	Masyarakat	2023-2024
37	Aksi Pembagian 4000 tumbler (botol air minum) kurangi sampah plastik	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
38	Pelatihan Eco-Brick di sekolah dan Kampus	BECAK BABEL	Pelajar/Mahasiswa	2023-2024
39	Sosialisasi Peduli Sampah dan Peduli Sungai di Kelurahan Kenanga	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
40	Peringatan Hari Sungai Internasional (Susur Sungai dan Penghijauan sepadan Sungai) 2023	KPS BECAK BABEL dan BWS Babel	Masyarakat	2023-2024
41	Peringatan Hari Ari Sedunia (Penanaman Pohon di sepadan sungai dan kolong) 2024	KPS BECAK BABEL dan BWS Babel	Masyarakat	2023-2024
42	Pemetaan potensi sampah Laut Kep. Bangka Belitung bersama TKNPSL	BECAK BABEL dan TKNPSL	Instansi Pemerintah dan Swasta	2023-2024
43	Penerbitan Buku "BSF, Integrated Urban Farming Ramah Lingkungan" 2023	BECAK BABEL dan PT RBT	Masyarakat	2023-2024
44	Pelatihan Perikanan Tangkap Kepiting Remangok ramah lingkungan Desa Pagarawan	BECAK BABEL	Kelompok Nelayan dan Pokdakan	2023-2024
45	Ngupi Bekisah "Kaderisasi Generasi Peduli Lingkungan melalui Adiwiyata" SDN 24 Sungailiat 2023	BECAK BABEL	Pelajar	2023-2024
46	Jambore Relawan Lingkungan III FORDAS Babel 2023	BECAK BABEL	Pemuda/Mahasiswa	2023-2024
47	Kampanye Earth Hour di Bangka Belitung	BECAK BABEL	Pemuda/Mahasiswa	2023-2024



48	Kampanye dan MOU Pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan di Pantai Temberan	BECAK BABEL dan UMBB	Masyarakat Pesisir	2023-2024
49	Penanaman 3000 Magrove di Lintas Timur Bangka	BECAK BABEL dan UBB	Masyarakat	2023-2024
50	Sosialisasi Relevansi Hukum Lingkungan dalam Pelestarian Lingkungan	BECAK BABEL dan UBB	Pelajar	2023-2024
51	Beasiswa Kader Konservasi Relawan Lingkungan Prodi KSDA Unmuh Babel 2024	FKPDAS Babel, UMBB, BECAK Babel	Pemuda/Mahasiswa	2023-2024
52	Ngopi Bekisah "Spirit World Water Forum dan Isu Lingkungan-Tambang Bangka" 2024	MLH PW Muhammadiyah Babel	Pemuda/Mahasiswa	2023-2024
53	kumpul dan kelola sampah plastik (grebek sampah) di lingkungan sidodadi, Sungailiat Kab.Bangka	ibu siti januarsih dan masyarakat	masyarakat	2022-2024
55	Budidaya Maggot Black Soldier Fly di Bukit Besar Girimaya Pangkalpinang	Bapak Didit Kelompok Sahabat BSF farms	Masyarakat	2022-2024

Sumber: Data Primer BECAK Babel dan Inventaris Kegiatan Penggiat Lingkungan, 2023-2024

Selain komunitas BECAK BABEL, sekelompok pemuda yang menamakan dirinya **Recycle Generation** juga ikut berpartisipasi melakukan gerakan peduli lingkungan hidup dengan berbagai kegiatan. 27 kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2022 terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Upaya konservasi



Nama Kegiatan : Penyemaian Bibit Mangrove
Waktu Pelaksanaan : 20 Juni 2019, Kelurahan Matras
Peran Peserta : Koordinator Kegiatan
Deskripsi Kegiatan : Propagul yang sudah siap untuk tumbuh akan dimanfaatkan dalam kegiatan penanaman untuk merehabilitasi pesisir pantai yang terkena abrasi



Nama Kegiatan : Memperingati Hari Penanggulangan Degradasi Lahan Dan Kekeringan Internasional
Waktu Pelaksanaan : 20 Juni 2020, Kecamatan Tempilang
Peran Peserta : Koordinator Kegiatan
Deskripsi Kegiatan : Membagikan ribuan bibit tanaman buah bertujuan untuk melakukan pelestarian lingkungan dalam mengajak masyarakat mengkampanyekan budaya bercocok tanam di perkarangan rumah

2. Pengelolaan sampah



Nama Kegiatan : World Clean Up Day
Waktu Pelaksanaan : 25 September 2021, Pantai Rambak Sungailiat
Peran Peserta : Fasilitator
Deskripsi Kegiatan : Melaksanakan Clean Up di Pantai Rambak bersama komunitas lingkungan dalam menyelesaikan kegiatan World Clean Up Day



Nama Kegiatan : Hari Peduli Sampah Nasional 2022
Waktu Pelaksanaan : 25 Februari 2022, Pantai Koala Jembatan Emas
Peran Peserta : Koordinator Kegiatan
Deskripsi Kegiatan : Memperingati HPSN dilakukan dengan kolaborasi bersama komunitas lingkungan yang tergabung dengan kegiatan mutik pilah sampah dan seminar pemuda sadar lingkungan



II.6.5.3 Penghargaan lingkungan hidup

Penghargaan lingkungan hidup dan kehutanan tidak hanya diperuntukan kepada masyarakat namun kepada pemerintah daerah yang berkomitmen tinggi dalam pengelolaan lingkungan juga diberikan penghargaan baik melalui tahapan pengajuan dan pengusulan yang sifatnya *voluntary* maupun yang bersifat *mandatory* seperti ADIPURA. Pentingnya penghargaan sebagai bentuk pembinaan, pendampingan dan motivasi dari pemerintah kepada pemerintah daerah atau masyarakat membangun *image* bahwa pemerintah tidak hanya menghimbau, menginstruksikan atau hanya sekedar mengeluarkan peraturan saja, namun juga dapat memberikan stimulan atau daya ungkit keberhasilan sebuah program pembangunan. Penghargaan juga dilaksanakan sebagai hasil dari monitoring dan evaluasi bahkan sebagai bentuk pengawasan dari pelaksanaan sebuah peraturan atau sebuah program.

II.6.5.3.1. Adipura

Adipura bukan hanya sebuah penghargaan melainkan lebih diposisikan sebagai instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota yang kuat dalam membangun pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau perkotaan yang bersih, teduh, dan berkelanjutan. Pada program Adipura 2022 sd 2023, pengklasifikasian kabupaten/kota dilakukan berdasarkan pada dokumen Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada), kapasitas terpasang sistem pengelolaan sampah dengan basis sistem teruji dan data yang akurat terverifikasi melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Operasional TPA, dan Ruang Terbuka Hijau serta pengintegrasian kuantitas Program Kampung Iklim.

Program Adipura bertujuan untuk mendorong kepemimpinan dan komitmen pemerintah kabupaten/kota serta membangun



partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat untuk berperan menselaraskan pertumbuhan ekonomi hijau, fungsi sosial, dan fungsi ekologis dalam proses pembangunan dengan menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pada tahun 2022 dari 7 kota di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hanya 5 Kota saja yang dilakukan pemantauan dan penilaian yaitu Kota Manggar Kabupaten Belitung Timur, Kota Sungailiat Kabupaten Bangka, Kota Koba Kabupaten Bangka Tengah, Kota Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang. Sedangkan Kota Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan Kota Mentok Kabupaten Bangka Barat tidak dilakukan pemantauan karena kurangnya kelengkapan data yang diinput di SIPSN atau tidak melakukan input data sdan pelaporan jakstrada sama sekali. Kemudian dari 3 Kota yang dipantau, hasil akhir penilaian adalah 1 Kota meraih anugerah adipura yaitu Kota Toboali serta 1 Kota meraih sertifikat adipura yaitu Kota Manggar. Berikut tren peraian anugerah adipura di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014 sampai dengan 2023:

Tabel 2.6. 12 Tren Pencapaian ADIPURA Tahun 2014 – 2023

NO.	KOTA	KABUPATEN/KOTA	TAHUN										JENIS KOTA
			2014	2015	2016	2017	2018						
1	PANGKALPINANG	KOTA PANGKALPINANG	-	-	PIAGAM ADIPURA	-	-	dilakukan pemantauan tetapi tidak ada pengumuman	covid 19, tidak ada pemantauan	covid 19, tidak ada pemantauan	-	-	SEDANG
2	SUNGAILIAT	KAB. BANGKA	-	-	ADIPURA	ADIPURA	ADIPURA				ADIPURA	-	KECIL
3	TANJUNGPANDAN	KAB. BELITUNG	-	-	-	-	-				-	-	KECIL
4	TOBOALI	KAB. BELITUNG TIMUR	-	PIAGAM ADIPURA	ADIPURA	ADIPURA	ADIPURA				ADIPURA	ADIPURA	KECIL
5	MUNTOK	KAB. BANGKA BARAT	-	-	-	-	PIAGAM ADIPURA				-	-	KECIL
6	KOBA	KAB. BANGKA TENGAH	PIAGAM ADIPURA	-	ADIPURA	ADIPURA	ADIPURA				-	-	KECIL
7	MANGGAR	KAB. BELITUNG TIMUR	-	PIAGAM ADIPURA	PIAGAM ADIPURA	-	ADIPURA				PIAGAM ADIPURA	PIAGAM ADIPURA	KECIL



Gambar 2.6. 13 Kabupaten yang Meraih Anugerah Adipura Katagori Kota Kecil yaitu Kota Toboali pada Tahun 2024

II.6.5.3.2. Adiwiyata

Melalui program Adiwiyata, diharapkan perilaku peduli dan berbudaya lingkungan hidup dapat diintegrasikan melalui pendidikan formal dengan sasaran warga sekolah mulai dari tingkat SD/ sederajat sampai dengan SLTA/ sederajat. Adiwiyata merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS). Diharapkan pemberian penghargaan adiwiyata mampu menjadi daya ungkit warga sekolah untuk melaksanakan gerakan PBLHS secara optimal dan berkelanjutan, bukan hanya sekedar mengejar penghargaan saja. Berikut daftar sekolah peraih penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2023:

Tabel 2.6. 13 Daftar Peraihan Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2023

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA
1.	SMP N 1 TANJUNGPANDAN	TANJUNGPANDAN	BELITUNG
2.	SMP KELUARGA UNIVERSAL TANJUNGPANDAN	TANJUNGPANDAN	BANGKA BARAT
3.	SMP N 1 MENTOK	MENTOK	BANGKA BARAT
4.	SMP N 4 MENTOK	MENTOK	BANGKA BARAT
5.	MIS AL ISLAH MENTOK	MENTOK	BANGKA BARAT
6.	SD N 10 PEMALI	PEMALI	BANGKA

Sumber: DLHK, 2023



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan 11 usulan Calon sekolah adiwiyata tingkat nasional dan mandiri pada tahun 2022 ke KLHK yaitu 2 sekolah diajukan sebagai Calon sekolah adiwiyata mandiri dan 9 sekolah diajukan sebagai calon sekolah adiwiyata nasional. Namun setelah melalui verifikasi dokumen dan pemenuhan kriteria sekolah adiwiyata dan yang berhasil menjadi sekolah adiwiyata nasional hanya 5 sekolah dan 2 sekolah yang diajukan menjadi sekolah adiwiyata mandiri belum berhasil mendapatkan predikat tersebut. Pencapaian tersebut ditetapkan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.1176/MENLHK/P2SDM/SDM.2/2022 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Nasional tahun 2022. Menjadi tugas dari tim pembina untuk mengevaluasi serta meningkatkan pelaksanaan Gerakan PBLHS yang dilakukan oleh sekolah. Pendampingan secara intensif juga dibutuhkan untuk menjaga ritme dan motivasi dari warga sekolah dalam melaksanakan Gerakan PBLHS.

Tabel 2.6. 14 Daftar Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023

No	Nama Sekolah	Alamat
1	UPTD SD NEGERI 1 PEMALI	Jl. Dr. Sutomo Air Duren, Air Duren, Kec. Pemali, Kab. Bangka, Kepulauan Bangka Belitung,
2	SD NEGERI 33 TANJUNGPANDAN	Jl. Air Kelubi Air Raya, Perawas, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung Kepulauan Bangka Belitung
3	SD NEGERI 20 TANJUNGPANDAN	Jl. Stadion Barat, PANGKALLALANG, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, kode pos 33412.

Sumber: DLHK, 2023



Tabel 2.6. 15 Daftar Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2023

No	Nama Sekolah	Alamat
1	SMP NEGERI 2 BADAU	Jl.Petikan Km.01, Sungai Samak, Kec. Badau, Kab. Belitung Prov. Kepulauan Bangka Belitung
2	SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN	Jl. Kapten Saridin No 07, Paal Satu, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung Prov. Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: DLHK,2023



Gambar 2.6. 14 Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2022 (atas), Tahun 2023 (bawah)

Sumber: Dokumentasi DLHK,2023

Kriteria untuk mendapatkan sekolah adiwiyata tingkat provinsi memiliki nilai terendah 80,00 untuk aspek konservasi air, pengelolaan sampah, aspek konservasi energi, kegiatan PLH di sekolah ataupun



masyarakat, kerjasama terkait lingkungan hidup. Selain itu juga, terkait tanaman hijau, kantin sehat dan inovasi pembelajaran terkait lingkungan hidup. Penyerahan penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi ini diberikan langsung oleh Bapak Syafrizal ZA Pj. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di halaman Kantor Gubernur Babel pada Senin, 21 November 2023.

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS oleh tim pembina dan/atau pelaksanaan Gerakan PBLHS oleh warga sekolah antara lain:

- Mutasi atau pergantian kepala sekolah mempengaruhi semangat warga sekolah dalam melanjutkan pelaksanaan Gerakan dan menyebabkan tim pembina harus mengulang kembali melakukan pendekatan dan advokasi kepada kepala sekolah terkait pelaksanaan Gerakan dan program adiwiyata.
- Motivasi sekolah untuk melaksanakan gerakan PBLHS masih rendah di beberapa sekolah. Masih banyak sekolah yang berorientasi hanya kepada peraihan penghargaan namun tidak melakukan Gerakan PBLHS dengan sungguh - sungguh.
- Inisiatif dari sekolah untuk melaksanakan Gerakan PBLHS masih rendah karena pola pikir warga sekolah masih beranggapan bahwa sekolah adiwiyata harus baik secara fisik namun sebetulnya perubahan perilaku menjadi ramah lingkungan yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan Gerakan PBLHS. Oleh karena itu banyak sekolah yang merasa tidak mampu melakukan Gerakan dikarenakan keterbatasan anggaran untuk perbaikan kondisi fisik sekolah.
- Masih kurangnya pemahaman dari tim pembina Gerakan PBLHS Kabupaten/Kota dalam hal membina sekolah melaksanakan Gerakan PBLHS.



- Sinergitas dan kolaborasi antar instansi terkait khususnya Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama yang masih kurang dalam pelaksanaan pembinaan dan penguatan Gerakan PBLHS.
- Inovasi dalam upaya peningkatan perilaku ramah lingkungan hidup di sekolah yang masih rendah dan butuh kemitraan dalam pengembangannya.
- Dengan jumlah sekolah yang ada, dibutuhkan lebih banyak SDM untuk membina agar setiap sekolah sasaran mendapatkan informasi dan pembinaan yang adil dan merata.

II.6.5.3.3. Bank Sampah Terbaik

Penilaian lomba Bank Sampah Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dilaksanakan dengan maksud untuk melaksanakan evaluasi kinerja bank sampah sekaligus memberikan motivasi kepada pembina dan pengelola bank sampah yang ada di Kabupaten/Kota. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Pasal 16 bahwa Pemerintah dan/atau melakukan evaluasi kinerja Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pengelola bank sampah kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Selanjutnya berdasarkan pasal 17 bahwa pemerintah dapat memberikan insentif kepada:

- a) Pemerintah Daerah yang dalam wilayah administratifnya terdapat Bank Sampah dengan kinerja baik; dan/atau
- b) Pengelola Bank Sampah dengan kinerja baik.

Insentif dapat berupa penghargaan, publikasi kinerja baik Bank Sampah, pemberian rekomendasi bantuan pembiayaan pengelolaan sampah, pelatihan di bidang pengelolaan sampah dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan penilaian lomba Bank Sampah sebagai wujud pemberian



insentif sebagaimana dimaksud pada peraturan diatas. Tahapan pelaksanaan penilaian lomba Bank Sampah Tingkat Provinsi berpedoman pada Juknis Lomba Bank Sampah Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penilaian lomba diperuntukan kepada Bank Sampah yang aktif keberadaannya paling sedikit 3 bulan terakhir. Setiap Kabupaten/Kota diperkenankan mengirim 3 utusan terbaik sebagai peserta lomba, namun tidak semua Kabupaten/Kota memiliki Bank Sampah dengan kondisi status aktif sehingga ada beberapa Kabupaten/Kota yang hanya mengirimkan 2 atau 1 bank sampah. Jumlah total peserta lomba sebanyak 13 bank sampah. Berdasarkan penilaian yang dilakukan kepada 13 bank sampah di 7 Kabupaten/Kota menggambarkan bahwa sebagian besar bank sampah sempat tidak operasional selama masa pandemi Tahun 2020/2021 sehingga operasional bank sampah pada tahun 2022 belum begitu optimal dengan SDM dan sumber daya lainnya yang ada saat ini *pasca covid 19*. Berdasarkan penilaian langsung ke lapangan terhadap 15 Bank Sampah, didapat resume penilaian sebagai berikut:

- 100% bank sampah dalam status aktif
- Dari segi manajemen operasional bank sampah tercatat bahwa sebagian besar pencatatan masih manual menggunakan buku catatan, sedangkan 4 bank sampah sudah menggunakan komputer antara lain Bank Sampah Setara, Beres, Papin dan Yapentob.
- Semua bank sampah belum berpedoman pada Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 untuk struktur organisasinya.
- Beberapa bank sampah memiliki SDM yang pernah mendapatkan pelatihan tentang pengelolaan bank sampah atau pelatihan lainnya terkait dengan pengelolaan sampah, namun belum semua pengurus mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas pengelolaan bank sampah.



- Sebagian besar sudah mencetak buku tabungan mulai dari buku yang berbentuk modern persis seperti buku bank sampai dengan buku yang dicetak sederhana. Hanya ada 1 bank sampah yang tidak mencetak buku tabungan untuk nasabah yaitu bank sampah Teratai.
- Jumlah nasabah yang paling banyak dari bank sampah Papin sebanyak 447 orang, bank sampah Beres sebanyak 279 orang dan bank sampah akar berebat sebanyak 170 orang, kisaran jumlah nasabah pada 10 bank sampah lainnya mulai dari 12 orang sd 91 orang.
- Seluruh bank sampah memiliki SOP dan jadwal pelayanan bank sampah.
- Seluruh bank sampah memiliki bangunan fisik meskipun beberapa diantaranya masih menggunakan teras rumah dan bangunan masih bersifat semi permanen. Kepemilikan sarpras penunjang seperti timbangan, kendaraan penjemput sampah atau kendaraan roda tiga pun bervariasi, ada yang memiliki dengan kondisi baik dan rusak sedang hingga rusak berat.
- Omset yang didapat perbulan oleh bank sampah juga bervariasi, ada 4 bank sampah dengan omset diatas 1 juta rupiah, sedangkan 9 bank sampah lainnya berkisar 150 ribu rupiah sampai dengan 1 juta.
- Dalam menjalankan operasionalnya, pengurus bank sampah menjalin kemitraan baik kemitraan dalam hal penjualan maupun kemitraan dalam hal penguatan kelembagaan bank sampah. Dalam hal penjualan bank sampah bekerja sama dengan pengepul lokal yang terdekat dengan lokasi bank sampah. Dalam hal penguatan kelembagaan, bank sampah bekerja sama dengan instansi, kelompok masyarakat penggiat lingkungan, dunia usaha dan sekolah terutama sekolah adiwiyata.
- Beberapa media promosi yang digunakan oleh bank sampah antara lain Instagram, youtube, web, poster dan aplikasi whatsapp. Media promosi digunakan untuk menarik minat bank sampah dan menyebarkan informasi terkait pelayanan bank sampah antar nasabah.
- Inovasi yang dilakukan oleh bank sampah antara lain:



Tabel 2.6. 16 Daftar Inovasi Bank Sampah

Nama bank sampah	Inovasi
Setara	Sedekah sampah setiap jumat
Sepakat	Mengelola kebun terintegrasi dengan peternakan oleh pengurus bank sampah, kerajinan, tong sampah, integrasi dengan PKK penyuluhan pengelolaan sampah
Papin	Tukar poin sampah dengan pulsa
Beres	Tukar poin sampah dengan alat tulis
Bertambah	hadiah bibit cabe, sembako, ruang pameran hasil daur ulang sampah
Belilik Berseri	Membuat sabun dr minyak jelantah, ruang pameran daur ulang, kompos
Besauh Maju	Bayar pajak PBB dengan sampah

Sumber: DLHK, 2023

- Kondisi lingkungan sekitar lokasi bank sampah dari semua bank sampah terlihat rapi dan bersih.
- Beberapa kendala yang dihadapi oleh pengurus bank sampah dalam menjalankan operasional bank sampah antara lain kurangnya SDM yang terlatih, keterbatasan sarpras pengangkutan sampah dan pemilahan, ketidakstabilan keberadaan pengepul sebagai *offtaker* sampah terpilah, kesadaran dan kebiasaan pilah sampah dari rumah yang masih rendah oleh masyarakat.

Bagi bank sampah yang mendapatkan peringkat I sampai dengan VI diberikan hadiah uang tunai dan piagam, sedangkan yang tidak mendapatkan peringkat tetap diberikan piagam apresiasi karena bisa mempertahankan keberadaannya meskipun dalam kondisi sulit pasca pandemi. Pembagian hadiah pemenang lomba bank sampah diberikan langsung oleh Penjabat Gubernur pada tanggal 21 November 2023 bertepatan dengan hari jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di halaman Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.



Tabel 2.6. 17 Hasil Penilaian Bank Sampah

NO	Nama Bank Sampah	Kebera dan bank Sampa h	Uraian hasil penilaian											Nilai	Pemen ang		
			sistem pencata tan	Manajemen Bank sampah			bangunan Fisik dan sarpras	Omset	Hubungan Kemitraan		Media promosi	Inovasi /Kreasi/ Nilai Tamba h	kondisi lingkun gan sekitar				
				Struktur Organis asi	pengurus Ketera mpilan Pengur us	buku tabung an			jumlah nasaba h	SOP operasi onal						penjualan	penguata
1	setara	90	93	95	72	95	91	95	93	57	95	95	93	85	97	1246	I
2	Papin	95	95	96	50	95	98	71	91	85	80	80	91	75	98	1200	II
3	Akar Berebat	95	95	91	45	95	94	95	93	75	80	95	61	85	78	1177	III
4	Bertambah	93	93	80	71	75	78	71	93	81	91	78	91	88	90	1173	IV
5	De El Ha bsel	85	85	95	50	85	94	75	93	25	76	77	97	85	91	1113	V
II. Hasil penilaian Bank Sampah dikelola oleh Masyarakat																	
1	Basayan Berseri	80	93	95	90	95	96	95	92	77	92	92	91	85	96	1269	I
2	Sepakat	93	80	80	60	93	91	90	95	75	80	80	91	90	80	1178	II
3	Beres	93	71	80	30	71	98	91	91	81	91	93	91	90	91	1162	III
4	Pelawan	93	80	91	26	75	47	71	91	78	91	25	93	69	90	1020	IV
5	Belilik Berseri	93	91	71	71	75	48	25	91	45	91	91	25	88	90	995	V
6	bersauh maju	93	71	74	26	71	85	91	85		71	69	91	69	90	986	VI
7	OPIN	90	71	91	71	71	49	71	61	71	65	65	65	75	61	977	VII
8	YAPENTOP	65	50	70	26	75	25	71	61	25	76	76	25	25	80	750	VIII
9	Nyiur Karya Lestari	80	75	75	26	25	40	25	75	55	76	76	25	25	25	703	IX
10	Selangket Tukak	55	26	26	26	71	25	25	75	25	25	25	25	25	25	479	X

Sumber: DLHK, 2023

Berdasarkan tabel rekap nilai diatas, berikut nama pemenang dan uang hadiah serta sertifikat yang diberikan :

Untuk kategori yang di inisiasi oleh Pemerintah yaitu:

1. Bank Sampah Setara Sungailiat, Hadiah sebesar Rp. 5.000.000,-
2. Bank Sampah, Papin Pangkalpinang, Hadiah sebesar Rp. 3.000.000,-
3. Bank Sampah Akar Berebat Tanjungpandan, Hadiah sebesar Rp. 2.000.000,-

Untuk kategori yang di inisiasi oleh Masyarakat yaitu:

1. Bank Sampah Nelayan (Basayan) Berseri Kab. Bangka, Hadiah sebesar Rp. 5.000.000,-
2. Bank Sampah Sepakat Kab. Bangka Barat, Hadiah sebesar Rp.3.000.000,-
3. Bank Sampah Beres Tanjunpandan Kab. Belitung, Hadiah sebesar Rp. 2.000.000,-



II.6.5.3.4. Perusahaan yang mendukung kegiatan Literasi Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku perangkat daerah yang menilai kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan penghargaan kepada PT. Refined Bangka Tin (PT. RBT) yang sudah berkontribusi pada kegiatan budidaya dan konservasi anggrek Bangka Belitung yang sudah dan terus dilakukan oleh PT. RBT yang berlokasi di Kawasan Industri Jelitik Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah sejak 3 tahun yang lalu sudah melakukan Kerjasama dengan Bangka Flora Society dalam melakukan budidaya dan pelestarian di Kawasan pabrik dalam bentuk pembuatan *Orchidarium*.



Gambar 2.6. 15 (a) *orchidarium anggrek*, (b) *Peresmian orchidarium*
Sumber: Dokumentasi DLHK, 2023

Orchidarium merupakan tempat untuk menumbuhkan bunga anggrek yang dibangun oleh PT. RBT sudah memiliki berbagai jenis anggrek diantaranya *phalaenopsis sumatrana*, *dipodium seandens*, *coelogyne mayeriana*, anggrek *dendrobium*, anggrek bulan, dan anggrek pensil. Kegiatan budidaya dan konservasi anggrek yang sudah dan terus dilaksanakan oleh PT. RBT di Kawasan pasca pertambangan juga memberikan kontribusi kepada Daerah khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rangka memperingati Hari Konservasi Alam Nasional Tahun 2023 PT. RBT melaksanakan peresmian Orchidarium, yang di resmikan oleh ketua DPP Pecints Anggrek Indonesia, Bapak Dr. Untung Santoso, M.Si, serta di hadiri oleh Ketua DPD Pecinta Anggrek Indonesia Bangka Belitung Ibu Hj. Melati Erzaldi, SH, Guru Besar Bioteknologi Tumbuhan

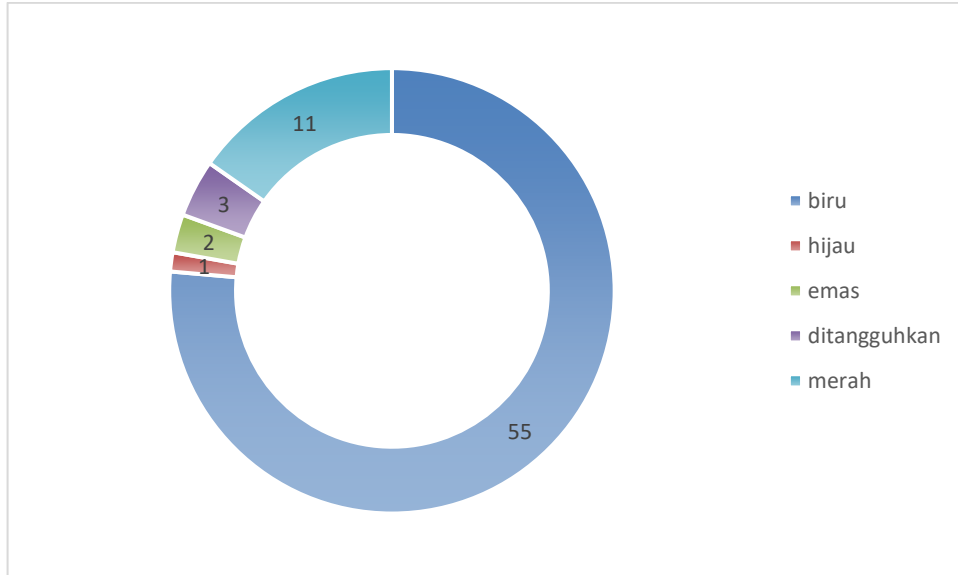


Universitas Gajah Mada Prof. Dr. Endang Semiarti, M.S, M.Sc, Gubernur (Diwakili) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, Mahasiswa UBB, serta siswa SMA dan SMP Kabupaten Bangka.

II.6.5.3.5. Proper

PROPER merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya PROPER juga merupakan perwujudan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Penerapan instrumen ini merupakan upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan. Dalam dalam 1 (satu) dekade, jumlah keikutsertaan perusahaan dalam penghargaan PROPER sangat fluktuatif dari tahun ke tahun.

Proper adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan yang dikembangkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) sejak tahun 1995, untuk mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungannya. Dari penilaian proper, perusahaan akan memperoleh citra/reputasi sesuai bagaimana pengelolaan lingkungannya. Citra tersebut dinilai dengan warna emas, hijau, biru, merah dan hitam. Proper emas merupakan proper yg terbaik, artinya perusahaan tersebut sudah menerapkan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh dan kontinu. Jika sebuah perusahaan mendapat 2x warna hitam secara berturut2, perusahaan tersebut bisa dituntut dan usaha akan dihentikan.



Gambar 2.6. 16 Peraihan Kategori PROPER Tahun 2023

Sumber: DLHK, hasil olah data raport hasil evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan 2023



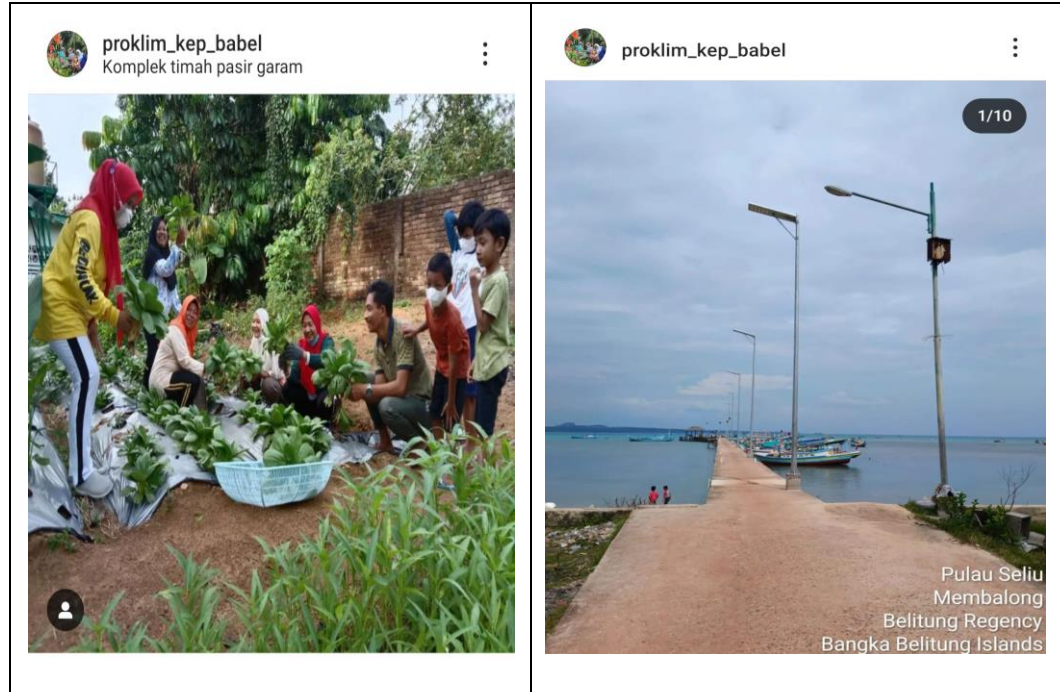
Gambar 2.6. 17 PT.Timah Tbk (atas), PT Sahabat Mewah makmur (bawah) Meraih Proper Emas, 2023



PT. Timah, Tbk -unit Metalurgi Muntok dan PT Sahabat Mewah dan Makmur Meraih PROPER Emas menunjukkan komitmen dan kemajuan dalam aspek pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dimana ada beberapa aspek yang menjadi penilaian seperti tingkat ketaatan perusahaan lingkungan terhadap peraturan lingkungan. dapat terus memacu semangat inovasi perusahaan dalam meningkatkan standar pengelolaan dan pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat dan terus berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan yang tujuannya untuk memperluas cakupan pengelolaan lingkungan ramah lingkungan. Di Babel 1 perusahaan yang Proper Hitam, proper hitam peringkat paling bawah dalam mengelola lingkungan, belum melakukan upaya dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan sehingga berpotensi mencemari lingkungan, dan beresiko untuk ditutup ijin usahanya oleh KLH dalam bidang.

II.6.5.3.6. Proklim

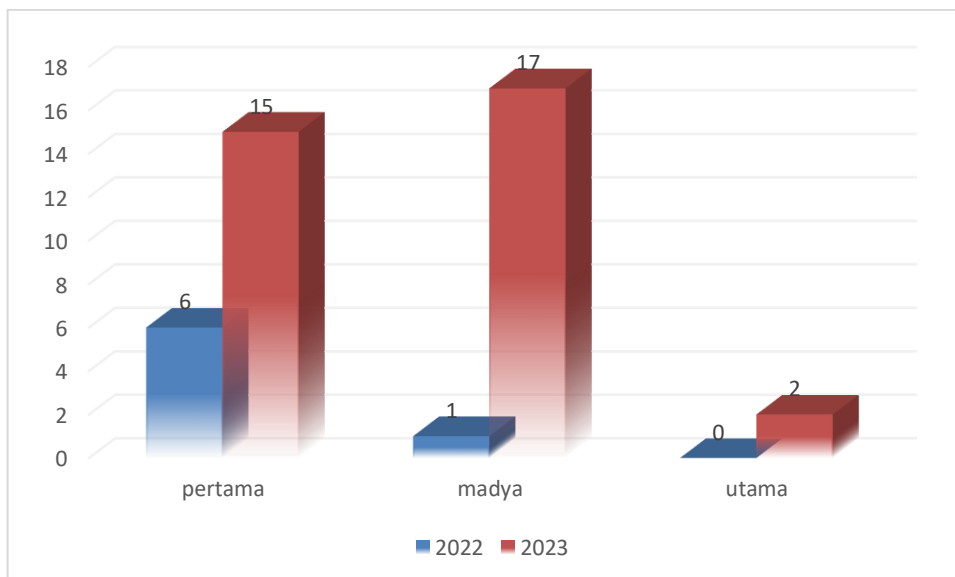
Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan program penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada kelompok masyarakat di tingkat tapak setingkat RW/Dusun atas upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim di lingkungannya baik terhadap komponen kegiatan pengendalian banjir, longsor dan kekeringan, ketahanan pangan dengan pemanfaatan lahan perkarangan rumah ditanami tanaman obat, sayuran dan lainnya, pengendalian penyakit akibat perubahan iklim, pengelolaan sampah, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta upaya penghijauan di area dusun/RW dalam mendukung komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2030 sebesar 29% hingga 41 %.



Gambar 2.6. 18 Kegiatan Proklim Babel

Sumber : DLHK Provinsi Babel 2023

Saat ini untuk program penghargaan terhadap aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat di nilai oleh KLHK bagi lokasi ProKlim yang telah teregistrasi dan terdokumentasi dalam aplikasi Sistem Registrasi Nasional (SRN KLHK). Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Indonesia menargetkan terbentuknya Proklim sejumlah 20.000 unit/lokus pada tahun 2024. Melalui Proklim diharapkan semua individu, masyarakat dapat bersama – sama menjadi pelopor dan penggerak gaya hidup bersih, sehat dan Tangguh bencana di lingkungannya masing-masing. Penting sekali meningkatkan kolaborasi antar semua pihak untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dukungan dari stakeholder seperti pemerintah dan swasta dapat memperkuat pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan menjamin keberlanjutan dari program ini.



Gambar 2.6. 19 Penghargaan Proklam Perkategori Tahun 2022 s.d 2023
Sumber: DLHK, 2023

Dari tahun 2022 s.d. 2023, ada peningkatan penghargaan proklam perkategori pertama 6, Madya 1 tahun 2022, ditahun 2023 ada Peningkatan peningkatan penghargaan proklam perkategori pertama sebanyak 15, madya sebanyak 17, dan utama sebanyak 2. Berikut Daftar Penerima Penghargaan Proklam yang diusulkan tahun 2024 disajikan pada tabel 2.6.18.

Tabel 2.6. 18 Daftar Lokasi Proklam

No.	LOKASI PROKLIM	NOMOR REGISTRASI	NILAI	KATEGORI
A. PENERIMA PIAGAM KATEGORI MADYA				
1	Proklam Desa Pemali, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _ PT. Timah Tbk (Reguler)	11-PK-IV-2024-19416	67,75 %	Madya
2	Proklam Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	11-PK-IV-2024-20064	61,29 %	Madya
3	Proklam Desa Paku, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _ PT. Timah Tbk Wilayah Bangka Selatan (Reguler)	11-PK-IV-2024-20279	59,88 %	Madya



4	ProKlim Dusun 02, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - PT. Timah, Tbk (Reguler)	11-PK-IV-2024-20276	65,40 %	Madya
5	ProKlim Desa Mempaya, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	11-PK-IV-2024-20275	65,57 %	Madya
6	ProKlim Lingkungan Sidodadi Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	11-PK-IV-2024-20273	60,65 %	Madya
7	ProKlim Dusun Sadap, Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	11-PK-IV-2024-19732	73, 31 %	Madya
8	ProKlim Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	11-PK-IV-2024-20245	60,72 %	Madya
9	ProKlim Dusun 4 Pasir Putih, Desa Batu Betumpang, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	11-PK-IV-2024-20248	60,49 %	Madya
10	ProKlim Desa Suak Gual, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	11-PK-IV-2024-20054	51,93 %	Madya
11	ProKlim Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	11-PK-IV-2024-20063	60,10 %	Madya
12	ProKlim RW 03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	11-PK-IV-2024-19489	53,67 %	Madya
13	ProKlim Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	11-PK-IV-2024-19484	55,06 %	Madya
14	ProKlim Desa Lintang, Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	11-PK-IV-2024-19466	76,10 %	Utama



B. PENERIMA SERTIFIKAT KATEGORI UTAMA				
1	ProKlim Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - PT. Timah, Tbk - TB. Batu Besi (Reguler)	11-PK-IV-2024-20169	79,31 %	Utama
2	ProKlim RW.002 Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung - Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Pangkal Balam (Reguler)	11-PK-IV-2024-19938	82,18 %	Utama
3	ProKlim Dusun Namang Barat Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Reguler)	11-PK-IV-2024-19590	77,60 %	Utama
C. LOKASI YANG DIDAFTARKAN OLEH LEMBAGA LAIN				
1	Proklm Dusun Telang Dalam Desa Gunung Muda Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	--	34,56%	Pratama
2	Proklm Dusun Sinchong Desa Gunung Muda Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	--	25,67%	Pratama
3	Proklm Dusun Gunung Muda Desa Gunung Muda Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	--	24,29%	Pratama
4	Proklm Dusun 1 Desa Zed Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	--	41,26%	Pratama
5	Proklm Dusun 3 Desa Zed Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	--	41,61%	Pratama
6	Proklm Dusun 4 Desa Zed Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	--	32,92%	Pratama
D. PENERIMA PENGHARGAAN PENDUKUNG PROKLIM				
NAMA LEMBAGA PENDUKUNG		NAMA LOKASI PROKLIM YANG DIDUKUNG		



1.	PT. Timah Tbk	ProKlim Desa Pemali, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _ PT. Timah Tbk (Reguler)
2.		ProKlim Dusun 02, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - PT. Timah, Tbk (Reguler)
3.		ProKlim Desa Paku, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung _ PT. Timah Tbk Wilayah Bangka Selatan (Reguler)
4.		ProKlim Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - PT. Timah, Tbk - TB. Batu Besi
5	PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Pangkal Balam	ProKlim RW.002 Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung - Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Pangkal Balam (Reguler)

Sumber: DLHK, 2023

II.6.5.3. Kolaborasi

Tata Kelola lingkungan menjadi isu penting karena pengelolaan lingkungan menekankan keterkaitan antar berbagai aktor. Pengelolaan lingkungan tidak bisa dieksekusi secara parsial namun menuntut adanya pengelolaan secara komprehensif dan berkelanjutan. Permasalahan lingkungan yang timbul disuatu daerah bukan tidak mungkin membutuhkan bantuan, komitmen atau upaya stakeholder dari daerah lain yang merupakan hulu atau hilir dari permasalahan lingkungan. Kesamaan persepsi kesamaan tujuan dari stakeholder atau actor penting untuk pencapaian pemecahan masalah lingkungan. Hubungan dan komitmen antar Gubernur dan Bupati/Walikota harus selaras dan sinergi dalam menyusun kebijakan, pengelolaan anggaran, pembagian kewenangan dan tugas. Pemerintah dengan regulasi dan kewenangannya juga tidak mampu dalam menyelesaikan isu – isu lingkungan dengan upaya sendiri. Dibutuhkan kolaborasi bersama masyarakat, dunia usaha, akademisi serta media publikasi.



Gambar 2.6. 20 Model Kolaborasi Pentahelix dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mengacu pada penelitian Nurulwahida, 2020, pemerintah sebagai regulator dan mempunyai fungsi *controler* memiliki peraturan dan melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program, kebijakan publik, fasilitator kemitraan antara publik dan swasta. Sedangkan pebisnis/dunia usaha berperan sebagai *enabler*, dengan memberikan dukungan atau sumbangsih anggaran, perancangan teknologi, infrasturktur yang memberi nilai tambah dalam sebuah program pemerintah. Akademisi dibutuhkan sebagai pengembangan dan inovasi untuk percepatan pencapaian dan efisiensi program. Media dianggap sebagai stakeholder yang sangat berpengaruh dalam membuat *brand* atau *image* sebuah program pemerintah terutama terhadap masyarakat sebagai bahan pertimbangan masyarakat sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Partisipasi dan inisiatif dari masyarakat menjadi poin yang menentukan dalam eksekusi program – program pemerintah. Sosial dan budaya setiap daerah juga mempengaruhi pola pikir dan karakteristik dari masyarakat dalam menerima setiap informasi dan program pembangunan daerah. Sebuah komunitas biasanya sengaja dibentuk atau terbentuk dengan inisiatif sendiri dengan tujuan



menjadi jembatan atau perantara antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengembangan sebuah program.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meluncurkan sebuah program **GULE KABUNG** (*Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Urang Bangka dan Belitung*) yang mengimplementasikan kolaborasi terutama kolaborasi antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sasaran adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Di dalam pelaksanaan kegiatannya pemerintah menggandeng UMKM, Media, masyarakat, kelompok masyarakat peduli lingkungan dan mendapat support dari pihak ketiga dalam hal ini pihak perbankan dan perusahaan. Bentuk kegiatan berupa koordinasi antar pemangku kepentingan dengan membahas permasalahan dan kendala pembangunan di daerah kabupaten/kota dan sinergisitas dengan program yang ada di pemerintah provinsi kemudian dilanjutkan dengan pembukaan stand pelayanan public diantaranya, pelayanan KB, pembuatan KTP elektronik, pemeriksaan Kesehatan, bazar UMKM, sosialisasi Bank Sampah dan penanaman pohon. Lokasi kegiatan bergiliran dari desa ke desa di Kabupaten/Kota.



Gambar 2.6. 21 Kegiatan Pelayanan Publik pada Acara Gule Kabung, 2023

Sumber: DLHK, 2023



BAB III

ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa komponen lingkungan saling berinteraksi membentuk kesatuan dan saling mempengaruhi, termasuk manusia dan perilakunya. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam undang-undang, manusia dan perilakunya dipandang sebagai bagian dari lingkungan. Dengan pemahaman tersebut, maka manusia saling berinteraksi dengan alam sehingga perilakunya bukan hanya berdampak pada alam atau komponen lingkungan lainnya, tetapi juga berdampak pada manusia itu sendiri. Pemahaman seperti ini akan memotivasi manusia untuk mengelola lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya karena dampaknya akan kembali kepada kelangsungan perikehidupan manusia.

Di sisi lain, paham antroposentrisme dalam etika lingkungan menganggap bahwa manusia sebagai pusat alam, sedangkan semua makhluk lain adalah sarana untuk tujuan manusia (Kopnina et al., 2018). Pemahaman ini akan mempengaruhi perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya yang cenderung tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemahaman seperti ini sering memposisikan manusia bukan sebagai bagian dari lingkungan sehingga manusia cenderung untuk mengeksploitasi lingkungan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Paham antroposentrisme sering disalahkan sebagai pendorong terjadinya berbagai kerusakan lingkungan. Terlepas dari berbagai pemahaman tentang etika lingkungan, manusia dan perilakunya yang memanfaatkan sumber daya alam dan jasa-



jasa lingkungan di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk pembangunan ekonomi yang tidak disertai dengan pengelolaan lingkungan yang sesuai memang menjadi penyebab berbagai kerusakan lingkungan.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beberapa isu atau masalah lingkungan hidup bahkan belum dapat diselesaikan dalam kurun waktu bertahun-tahun, seperti masalah pengelolaan sampah dan kerusakan lahan. Isu-isu tersebut sering dibahas dalam berbagai dokumen perencanaan lingkungan selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang selama ini telah dilakukan untuk menangani isu-isu tersebut masih perlu ditingkatkan dan dievaluasi agar lebih efektif/optimal.

Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 diidentifikasi dari hasil analisis yang dilakukan oleh Tim Penulis menggunakan pendekatan DPSIR. Hasil identifikasi tersebut kemudian dibahas bersama secara partisipatif dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen IKPLHD yang komponennya terdiri atas perwakilan dari beberapa perangkat daerah yang terkait, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perwakilan perguruan tinggi (akademisi).

Selanjutnya, daftar isu hasil FGD dinilai menggunakan skala dengan rentang nilai 1–10. Semakin besar nilai yang diberikan, maka isu tersebut semakin diprioritaskan. Penilaian dilakukan oleh responden yang berasal dari berbagai instansi terkait, dengan menggunakan fasilitas *google form* (https://bit.ly/ISU_IKPLHD2024). Kriteria yang digunakan untuk pertimbangan saat dilakukan penilaian adalah:

1. *Urgency* (isu yang dinilai mendesak untuk segera diselesaikan atau ditangani),



2. *Seriousness* (isu yang dinilai menimbulkan dampak serius dan membahayakan),
3. *Growth* (isu yang dinilai terus berkembang dan sulit dicegah),
4. *Rationally* (isu yang dinilai bersifat rasional untuk diselesaikan dengan waktu dan sumber daya yang tersedia).

Daftar isu hasil FGD hasil perumusan sesuai dengan kriteria di atas terdiri atas isu-isu lingkungan hidup yang selanjutnya dikerucutkan sebagai berikut:

1. Alih Fungsi Lahan,
2. Erosi Dan Sedimentasi,
3. Penurunan Kualitas Air,
4. Peningkatan Konsumsi Energi Fosil,
5. Penurunan Kualitas Udara,
6. Bencana Akibat Cuaca Ekstrem (Banjir, Angin Kencang/Puting Beliung),
7. Pengelolaan Sampah Belum Optimal,
8. Masalah Ketahanan Pangan,
9. Tata Kelola Pertambangan,
10. Degradasi Ekosistem Pesisir Dan Laut,
11. Pengelolaan LB3 Belum Optimal




PENARIKAN DAN PERUMUSAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN

B I U

PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

Image title



NAMA *

Short answer text

EMAIL *

Short answer text

INSTANSI *

Short answer text

ISU PRIORITAS 1 BESERTA LOKUSNYA *

Long answer text

Gambar 3. 1 Formulir Penilaian Isu Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024

Gambar di atas menyajikan bentuk formulir penilaian isu lingkungan hidup yang digunakan. Prioritas isu disusun berdasarkan total nilai yang diperoleh dengan menganggap semua kriteria yang digunakan memiliki bobot yang sama dalam penilaian. Hasil rekapitulasi nilai isu-isu lingkungan hidup tersebut sesuai dengan tingkat prioritasnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Nilai Isu Lingkungan Hidup

Isu Lingkungan Hidup	Total Skor				Total	Peringkat Prioritas
	<i>Urgency</i>	<i>Seriousness</i>	<i>Growth</i>	<i>Rationally</i>		
Pengelolaan sampah yang belum optimal	146	149	149	131	575	1



Isu Lingkungan Hidup	Total Skor				Total	Peringkat Prioritas
	<i>Urgency</i>	<i>Seriousness</i>	<i>Growth</i>	<i>Rationally</i>		
Alih Fungsi Lahan	141	143	144	128	556	2
Penurunan Kualitas Air	135	138	140	121	534	3
Tata Kelola Pertambangan	134	138	127	120	519	4
Erosi dan Sedimentasi	119	116	133	119	487	5
Bencana	117	115	135	119	486	6
Degradasi Ekosistem Pesisir dan Laut	110	110	121	108	449	7
Masalah Ketahanan Pangan	105	112	109	113	439	8
Pengelolaan LB3 Belum Optimal	107	108	118	104	437	9
Peningkatan konsumsi energi fosil	105	114	116	99	434	10
Penurunan kualitas udara	100	100	120	102	422	11

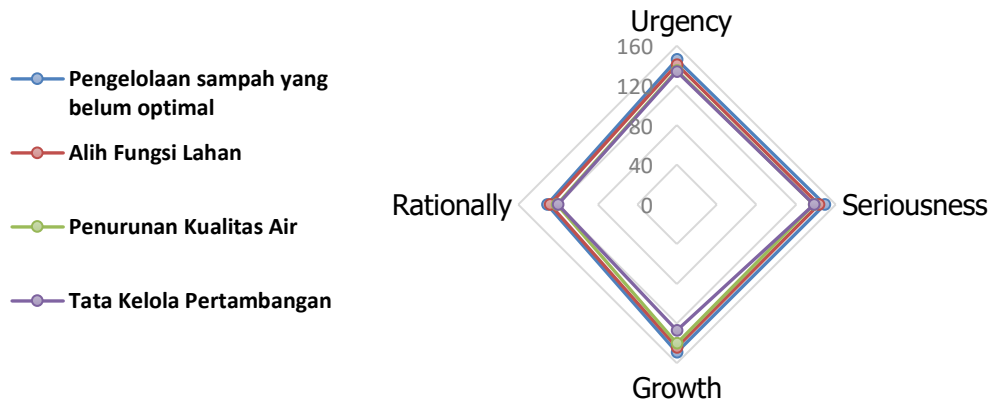
Hasil pengolahan tersebut selanjutnya didiskusikan lebih lanjut oleh Tim Penulis dan Kelompok Kerja sehingga disepakati bersama bahwa masalah ketahanan pangan, yang sebagian besar karena masalah alih fungsi lahan pertanian dan masalah inflasi, akan dikelompokkan menjadi satu kesatuan dengan isu alih fungsi lahan. Demikian pula dengan isu degradasi ekosistem pesisir akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isu alih fungsi lahan. Selanjutnya untuk isu tata kelola pertambangan dipertimbangkan untuk dipisahkan menjadi pembahasan tersendiri karena aspeknya lebih luasa daripada sekedar pembahasan alih fungsi lahan yang merupakan salah satu parameter penting dalam isu tersebut. Dari hasil diskusi, Kelompok Kerja menyetujui empat isu lingkungan hidup daerah sesuai urutan prioritasnya yang akan diangkat pada penyusunan Dokumen IKPLHD tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah yang belum optimal,
2. Alih fungsi lahan,



3. Penurunan kualitas air,
4. Tata kelola pertambangan

Perbandingan skala hasil penilaian keempat isu tersebut berdasarkan empat kriteria yang digunakan disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. 2 Perbandingan Nilai Keempat Kriteria dalam Isu Prioritas Lingkungan Hidup

Berdasarkan gambar di atas, menurut tingkat urgensinya, belum optimalnya pengelolaan sampah memiliki tingkat urgensi yang paling tinggi untuk segera ditangani dibandingkan isu-isu lainnya. Hasil ini dapat dimengerti karena beberapa alasan, seperti kondisi beberapa TPA sampah yang sudah melebihi kapasitasnya dan pengelolaannya yang cenderung menggunakan metode *landfill* yang merupakan bentuk peralihan dari *open dumping* sehingga timbulan sampah yang tidak terkelola terus-menerus bertambah. Kondisi TPA yang sudah tidak layak tersebut sangat terlihat pada TPA Parit Enam di Kota Pangkalpinang yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan masalahnya. Penentuan lokasi TPA Regional yang belum ditetapkan hingga saat ini menaikkan tingkat urgensi pengelolaan sampah di Kepulauan Bangka Belitung. Pemrosesan akhir sampah sangat berperan dalam pengurangan timbulan sampah, selain upaya pengurangan sampah, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah yang bisa dilakukan mulai dari level konsumen.



Selain itu, isu belum optimalnya pengelolaan sampah juga memiliki tingkat *seriousness*, *growth*, dan *rationality* tertinggi. Keseriusan masalah yang timbul sebagai dampak pengelolaan sampah yang kurang tepat ataupun tidak optimal meliputi permasalahan kesehatan masyarakat, estetika & kebauan, banjir, munculnya area kumuh, pencemaran air, kerusakan habitat biota laut, hingga masalah pemanasan global. Timbulan sampah juga tidak terelakkan lagi akan terus bertambah seiring pertambahan penduduk dan aktivitas konsumsinya sehingga memiliki tingkat *growth* yang tinggi. Masalah pengelolaan sampah juga telah banyak diteliti dan dipelajari di berbagai bidang studi sehingga tersedia berbagai macam alternatif solusi untuk penyelesaiannya. Dengan demikian, tingkat *rationality*-nya juga tinggi.

Berikut ini diuraikan secara ringkas hasil analisis masing-masing isu prioritas menggunakan pendekatan DPSIR. Analisis tersebut telah dilakukan di Bab II disertai berbagai macam dukungan data yang terkait.

Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal

Isu Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal kembali mengemuka berdasarkan hasil perumusan isu yang disarikan dari pendapat berbagai *stakeholder*. Dari ulasan pada Bab II, state pada subbab perkotaan telah membahas mengenai permasalahan persampahan yang seiring dengan kenaikan jumlah penduduk khususnya wilayah perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jumlah timbulan sampah juga mengalami peningkatan dari 945 m³/hari menjadi 966,5 m³/hari, sementara itu pelayanan penanganan persampahan masih berkisar pada angka 63,45 persen, belum dapat menjangkau sepenuhnya. Sedangkan capaian pengelolaan persampahan oleh masing-masing kabupaten/kota masih berada pada 71-76 persen saja yang berarti masih dibawah target yang tertuang dalam Jakstrada. Kondisi ini juga didukung oleh perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang diukur dengan Indeks



Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup dimensi Pengelolaan Sampah cukup tinggi yaitu 0,7 yang menunjukkan bahwa dalam proses mengelola sampahnya masyarakat masih memilih cara yang tidak ramah lingkungan dibuang ke sungai/got/selokan, dibakar, ditimbun/dikubur, dibuang sembarangan, atau lainnya. Dalam subbab analisis risiko bencana persoalan penanganan sampah yang tidak ramah lingkungan menjadi *pressure* terhadap kejadian bencana karhutla dengan hasil pengamatan pada penyebab terjadinya karhutla bahwa sebanyak 4 persen disebabkan oleh perilaku warga membakar sampah yang kemudian apinya tidak dapat dikendalikan menyambar objek disekitarnya.

Kondisi terkini dalam pengelolaan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu dari 8 unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai pengendali sebanyak 3 Unit yang berlokasi di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Barat, serta Kabupaten Bangka Tengah. Namun, rencana pendirian TPA Regional belum dapat terlaksana karena mendapat penolakan dari masyarakat yang menganggap negatif kehadiran TPA di lingkungannya, walaupun TPA tersebut direncanakan akan mengusung konsep RDF (*Refuse Derived Fuel*).

Alih Fungsi Lahan

Hasil penjaringan isu dalam *focus group discussion* yang selanjutnya menampilkan isu alih fungsi lahan di peringkat kedua isu prioritas yang diangkat dalam DIKPLHD tahun ini. Alih fungsi lahan yang marak terjadi merupakan salah satu masalah besar dalam tata guna lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Isu ini diperkuat melalui hasil analisis spasial antara peta penutup lahan dari Ditjen Planologi KLHK tahun 2021 dan 2022 yang merupakan data penutup lahan terupdate yang dianalisis menggunakan aplikasi berbasis sistem informasi geografis menunjukkan terjadinya peningkatan luasan yang berhubungan dengan kegiatan antropogenik manusia, diantaranya pertambangan, permukiman serta tambak. Alih fungsi lahan tentunya ditandai oleh adanya peningkatan luasan



penutup lahan yang baru sekaligus penurunan luasan pada penutup lahan sebelumnya.

Jumlah penduduk dan rumah tangga cenderung mengalami pertambahan setiap tahunnya. Hal ini dibarengi oleh meningkatnya kebutuhan akan lahan baik untuk permukiman maupun sebagai mata pencaharian sebagai kebutuhan primer manusia. Selain itu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu sektor yang dipandang masih menyokong kegiatan perekonomian yaitu sektor ekstraktif dalam hal ini pertambangan mineral timah maupun mineral non logam seperti pasir kuarsa. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang dikenal telah menjadi salah satu penyuplai terbesar kebutuhan timah dunia. Faktor ekonomi terkait dengan besarnya keuntungan yang didapatkan dari sektor ini membuat banyaknya penutup lahan utamanya yang bervegetasi yang beralih fungsi menjadi lahan pertambangan illegal. Selain itu aktivitas penambangan illegal juga berlangsung di lahan reklamasi yang seharusnya steril dari kegiatan tersebut.

Hasil analisis spasial antara informasi geospasial tematik (IGT) penutup lahan secara timeseries yang selanjutnya dikombinasikan dengan IGT Pola Ruang Revisi Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperlihatkan terjadinya alih fungsi lahan di tahun 2021 menjadi pertambangan di tahun 2022 yang berada di luar pola ruang kawasan pertambangan energi maupun ketentuan khusus pertambangan dan energi yaitu sebesar 1.623 hektar, selain itu masih berdasarkan hasil analisis spasial diperoleh informasi luasan alih fungsi lahan di tahun 2021 menjadi perkebunan di tahun 2022 yang berada di luar lokasi pola ruang kawasan perkebunan rakyat dan pertanian yaitu sebesar 16.298 hektar, begitu pula dengan luasan tambak mulai terlihat meningkat secara signifikan dalam rentang tahun 2020 hingga 2021 dengan kenaikan luasan mencapai 818 hektar dan pada rentang tahun 2021-2022 peningkatan kembali terjadi hingga mencapai 896 hektar. Aktivitas budidaya tambak udang vaname



yang berlangsung di sekitar wilayah pesisir sangat berpotensi untuk mengalihfungsikan sempadan yang merupakan kawasan perlindungan setempat.

Selanjutnya peningkatan luasan juga ditunjukkan oleh penutup lahan terbangun dan cenderung mengalami peningkatan drastis lebih dari 13.000 dalam rentang waktu tahun 2021 ke 2022. Hal ini menandakan pesatnya kebutuhan akan lahan terbangun sekaligus trend peningkatan pertumbuhan penduduk. Dengan terbatasnya lahan yang tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk tersebut harus menjadi perhatian yang serius apalagi negara kita diprediksi akan mengalami bonus demografi di tahun 2045 yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%nya dalam usia produktif (15-64) sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif (usia di bawah 14 tahun) dan diatas 64 tahun. Berdasarkan hasil analisis spasial perubahan penutup lahan tahun 2021-2022 dengan pola ruang RTRW tersebut maka diketahui terdapat sekitar 1.204 hektar alih fungsi lahan menjadi permukiman di tahun 2022 yang terjadi di luar pola ruang permukiman. Dari angka tersebut paling tinggi alih fungsi lahannya terjadi di Kota Pangkalpinang yaitu sebesar 344 hektar, disusul Kabupaten Bangka sebesar 341 hektar dan sejumlah kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Informasi ini menunjukkan tingginya permintaan lahan terbangun di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka sekaligus menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap pola ruangnya dan beberapa pola ruang lain yang tidak berkesesuaian yaitu pola ruang kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan pertanian hingga kawasan ekosistem mangrove. Peningkatan luasan penutup lahan antropogenik baik itu pertambangan, perkebunan, permukiman maupun tambak yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat diindikasikan terjadi ketidaksesuaian antara eksisting penutup lahan terhadap pola ruangnya.

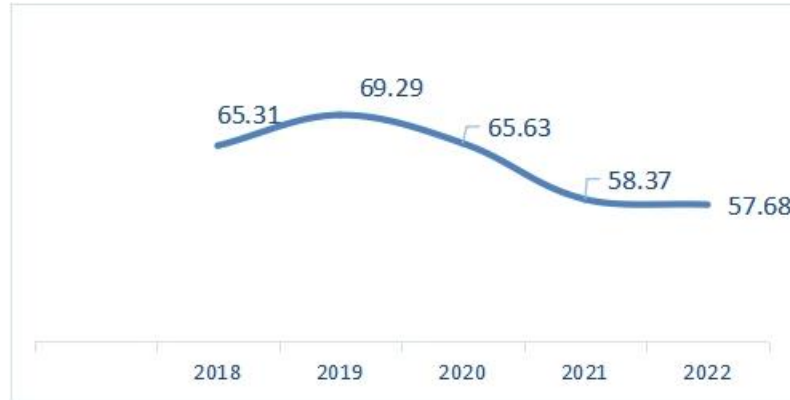
Ketidaksesuaian eksisting penutup lahan dengan peruntukannya berdampak negatif bagi keberlanjutan pemanfaatan ruang di Provinsi



Kepulauan Bangka Belitung. Alih fungsi lahan yang sebelumnya bervegetasi menjadi penutup lahan antropogenik tersebut juga berpotensi untuk meningkatkan luasan lahan kritis. Adanya peningkatan luasan lahan kategori kritis yang sangat signifikan menandakan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun sebelum *review* terbaru, aktivitas antropogenik semakin massif terjadi. Selanjutnya tentu saja peningkatan lahan kritis akan berpengaruh terhadap nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun dalam rentang waktu tahun 2022-2023 pelaporan nilai Indeks Kualitas Lahan menunjukkan adanya trend positif peningkatan nilai indeks tersebut sebesar 0,81 poin dari 39,28 di tahun 2022 menjadi 40,09 di tahun 2023 namun dengan dinamisnya perubahan penutup lahan seperti yang telah dibahas sebelumnya tentunya tetap menjadi ancaman serius dalam menjaga keberlangsungan tutupan lahan alami khususnya hutan dan semak belukar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, apalagi jika lokasinya sendiri berada di luar fungsi kawasan hutan tentunya ancaman konversi semakin besar. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa tidak semua fungsi kawasan hutan penutup lahannya adalah hutan. Diperlukan sinergi dan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lahan sesuai dengan fungsi peruntukan baik secara tata ruang maupun fungsi kawasan hutannya.

Penurunan Kualitas Air

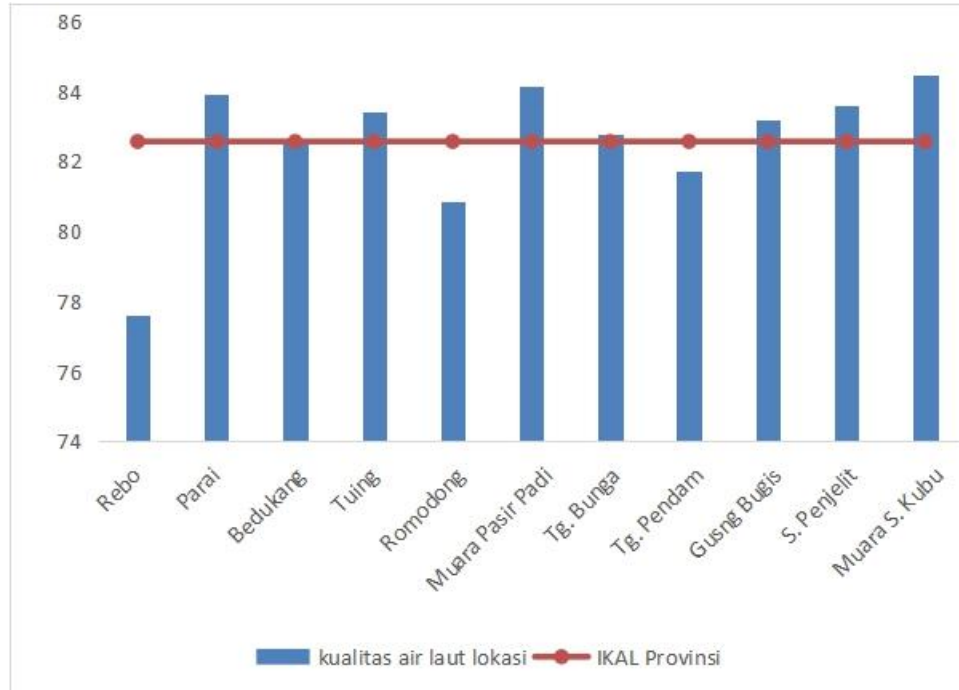
Kualitas air di Kepulauan Bangka Belitung dapat ditandai dengan nilai IKA yang menjadi komponen IKLH. Berikut ini tersaji gambar yang menunjukkan trend penurunan nilai IKA dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Parameter yang banyak melebihi baku mutu adalah parameter BOD, COD, TSS, DO dan Amoniak. Parameter BOD dan COD mengindikasikan bahwa adanya pencemaran namun perlu penelitian lebih lanjut terkait sumber pencemarnya.



Gambar 3. 3 Tren IKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan hasil analisis kualitas air menggunakan pendekatan DPSIR di bab sebelumnya dapat diketahui bahwa aktivitas pemanfaatan air dan tata guna lahan adalah faktor pendorong sekaligus penyebab terjadinya pencemaran air, erosi dan sedimentasi, yang akhirnya menurunkan kualitas air. Hal ini tentu saja menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kesehatan masyarakat, kerugian ekonomi, kerusakan ekosistem, hingga perubahan iklim. Berdasarkan hasil analisis ini terlihat bahwa dampak negatif dari penurunan kualitas air kembali ke manusia ini sendiri sebagai pelaku ekonomi.

Hasil pemantauan kualitas air laut menunjukkan bahwa kualitas air laut pada lokasi pemantauan masih berada pada kondisi baik (70 – 90), dengan nilai IKAL provinsi yang merupakan rerata dari kualitas air laut dari semua lokasi pemantauan sebesar 82,57 (Gambar 3.4).



Gambar 3. 4 Indeks Kualitas Air Laut Tahun 2023

Meskipun kualitas air laut di Bangka Belitung masih menunjukkan nilai yang baik, namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat di pesisir pantai, termasuk kegiatan budidaya udang vaname yang meningkat pesat dan berpotensi menyebabkan terjadinya degradasi kualitas air laut di masa mendatang. Berdasarkan pada data hasil pemantauan, dapat dikatakan bahwa semua sungai yang dipantau di Kepulauan Bangka Belitung ada dalam kondisi tercemar, terlepas dari apapun tingkat tercemarnya. Berdasarkan fakta kondisi IKA dan data kualitas air dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan kualitas air di Kepulauan Bangka Belitung masih sangat kurang, padahal aktivitas antropogenik yang menjadi penyebab penurunan kualitas air sangat banyak dan beragam, baik dari aktivitas rumah tangga, industri, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan sebagainya. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi untuk menyusun strategi dan menerapkan pengelolaan kualitas air yang lebih berkelanjutan.



Tata Kelola Pertambangan

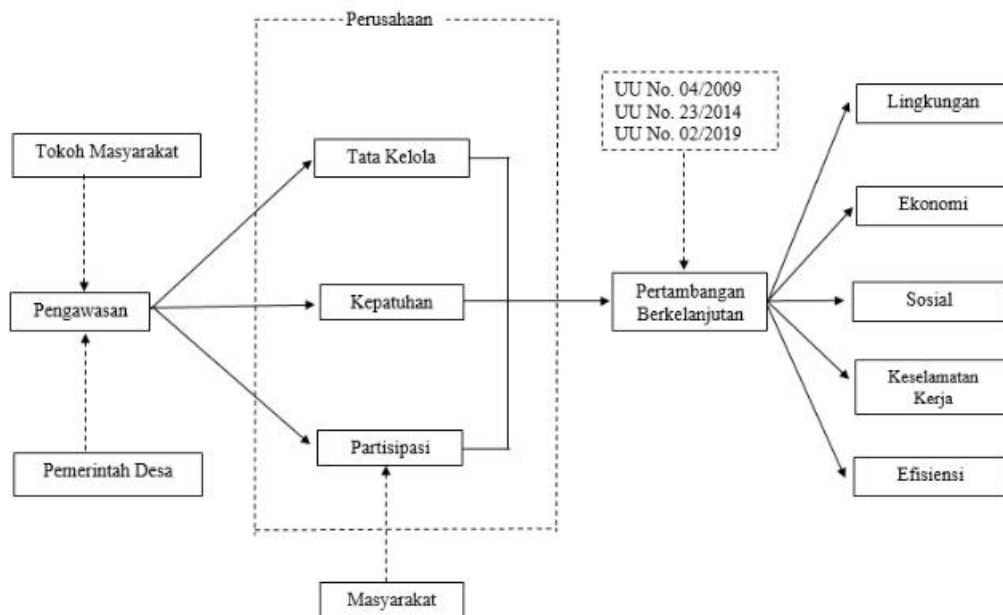
Pengelolaan pertambangan pada prinsipnya bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sehingga negara memiliki kewenangan dalam tata kelola pertambangan. Kegiatan pertambangan selain memberikan dampak ekonomis juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Dampak negatif dari kegiatan pertambangan tersebut perlu dikendalikan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan diluar batas kewajaran, contohnya Perkara dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015-2022 dinilai merugikan negara Rp 271 triliun. Nilai itu berasal dari berbagai jenis kerugian yang perlu ditanggung, yakni kerugian lingkungan dan ekonomi serta biaya pemulihan. Dugaan korupsi tata niaga timah di izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Bangka Belitung dengan nilai kerugian yang fantastis, mencapai Rp 271 triliun.

Peran tata kelola bukan hanya andil pemerintah namun peran masyarakat yang berdampak terhadap kehidupannya serta peran swasta yang memiliki teknologi dan modal. Penyebabnya adalah perubahan paradigma pembangunan, dimana pemerintah yang semula bertindak sebagai regulator dan pengatur pasar seperti bagaimana menciptakan suasana yang kondusif dan berinvestasi pada infrastruktur penunjang. Artinya dalam tata kelola dibutuhkan hubungan yang saling bersinergi dan terorganisir antara pemerintah dengan masyarakat, terutama dunia usaha/swasta, yang mendukung kekuatan sumber daya, pertumbuhan institusi yang sehat dalam menunjang sistem produksi yang efisien (Blanchard *et al*, 2023).

Definisi yang lebih luas melekat pada konsep tata kelola lingkungan (*environmental governance*). Tata kelola lingkungan adalah konsep atau kerangka pikir pengelolaan negara dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup melalui interaksinya dengan rakyat, yang bertujuan untuk memastikan arah dan derajat perubahan lingkungan sesuai dengan yang



bisa ditoleransi oleh ekosistem, bukan kemampuan negara mengubah kondisi bio-fisik (Purniawati et al., 2020). Berdasarkan hasil analisis Tata Kelola Lingkungan di bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa berbagai macam pemanfaatan jasa dan sumber daya lingkungan, serta persetujuan kegiatan/usaha telah mendorong dan memberikan tekanan pada kondisi lingkungan. Dampak dari perubahan kondisi lingkungan (munculnya berbagai permasalahan lingkungan) dirasakan oleh masyarakat sehingga muncul pengaduan dari masyarakat kepada pemerintah daerah. Masalah yang banyak diadukan oleh masyarakat adalah masalah yang terkait dengan dampak kegiatan pertambangan timah ilegal, serta pencemaran dan pembuangan limbah ke laut. secara lebih rinci disajikan pada Gambar 3. 5 Praktik Tata kelola Pertambangan Berkelanjutan



Gambar 3. 5 Praktik Tata kelola Pertambangan Berkelanjutan
Sumber: (Hamartoni Ahadis et al., 2023), telah disusun ulang

Gambar di atas menyajikan alur Tata kelola pertambangan sangat penting sebagai tolak ukur kinerja pemerintah. Tata kelola pertambangan dikatakan baik jika memenuhi semua prinsip-prinsip tata kelola yang dilaksanakan secara optimal (Dewa et al, 2023), yaitu (a) keikutsertaan



masyarakat, artinya semua berhak dalam memutuskan hasil kesepakatan baik langsung maupun perwakilan lembaga. Keikutsertaan tersebut secara komprehensif berdasarkan kemerdekaan berpendapat, dan berkontribusi 4 secara aktif, (b) keterbukaan berdasarkan informasi yang valid, kegiatan pemerintahan tersedianya manajemen informasi yang efektif, (c) perhatian terhadap stakeholder, semua lembaga semaksimal mungkin memberikan pelayanan prima kepada pihak yg memiliki kepentingan. (d) komitmen dan aplikasi prinsip prinsip pertambangan berkelanjutan sangat penting agar pertambangan tetap eksis dan bertahan. Praktik penambangan tanpa izin di wilayah PT Timah Tbk sangat masif sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian negara dan masyarakat. Kalkulasi kerugian negara dari sebuah kasus korupsi mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.



BAB IV

INOVASI DAERAH

DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

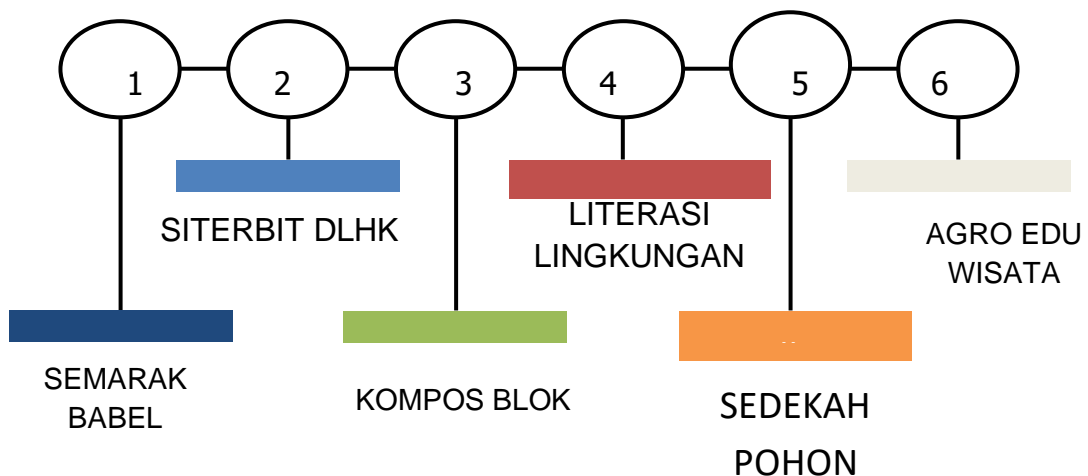
Berbagai permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tergambarkan didalam isu prioritas Dokumen IKPLHD ini tentunya membutuhkan berbagai terobosan baru sebagai upaya untuk meminimalkan dampak yang akan terjadi baik saat ini maupun pada waktu yang akan datang. Peran inovasi sangat diperlukan untuk menciptakan terobosan dan solusi baru untuk mengatasi kondisi eksisting seperti pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup sehingga disatu sisi pertumbuhan ekonomi daerah tetap naik namun degradasi Lingkungan dapat diminimalkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya untuk meminimalkan kerusakan Lingkungan. Tentunya berbagai inovasi ini merupakan upaya pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten /Kota, akademisi, Masyarakat dan pelaku usaha yang secara bersinergi melakukan upaya percepatan pemulihan lingkungan. Esensi sebuah inovasi diantaranya terjadi pertukaran gagasan, ide – ide baru sehingga terjadi perubahan kearah yang lebih baik dan dapat diadopsi oleh masyarakat sehingga terjadi pembelajaran kolektif untuk kearah perubahan yang lebih baik terutama dalam perbaikan lingkungan.

IV.I. Inovasi Pengelolaan Lahan

Sebagai daerah yang mempunyai karakteristik pertambangan, Bangka Belitung dihadapkan dengan berbagai permasalahan terutama alihfungsi lahan yang terus terjadi. Permasalahan Alih fungsi lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi isu prioritas yang harus dilakukan berbagai intervensi kebijakan sehingga degradasi terhadap lahan dapat di minimalkan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menghadapi



berbagai permasalahan kerusakan dan degradasi terhadap lingkungan diantaranya luasnya lahan kritis yang salah satunya disebabkan oleh aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan data lahan kritis yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung total **lahan kritis dan sangat kritis 167.104 Hektar** dengan sebaran lahan kritis hampir di semua Kabupaten/Kota dengan proporsi lahan kritis di Kabupaten Belitung Timur 38.884 Hektar (23,27 % dari total lahan Kritis), Kabupaten Bangka Selatan 31.232 Hektar (18,69 % dari luas total lahan kritis) , Kabupaten Bangka Tengah 30.948 Hektar (18,52 % dari total lahan kritis), Kabupaten Bangka 24.463 Hektar (14,64 % dari luas total lahan kritis), Kabupaten Belitung 21.919 Hektar (13,12 % dari luas total lahan kritis), Kabupaten Bangka Barat 19.592 Hektar (11,71 % dari luas total) dan Kota Pangkalpinang 96 Hektar (0,06 % dari luas total lahan kritis). Selain itu Indeks Kualitas Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami degradasi pada tahun 2022 indeks kualitas lahan sebesar 39,28 dan turun 0,82 poin dari tahun 2021 sebesar 40,1. Tentunya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan berbagai upaya sebagai bentuk tanggung jawab dengan melakukan berbagai perbaikan dan inovasi sebagai berikut:

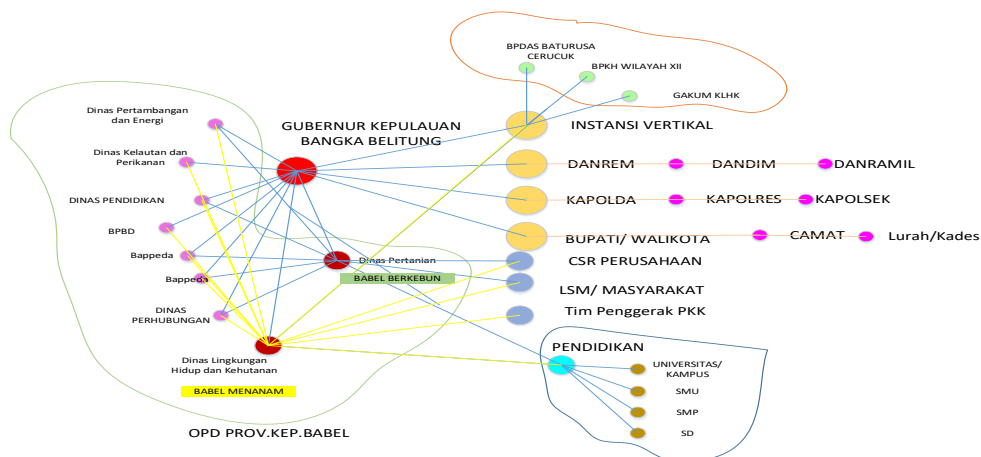


Gambar 4. 1 Visualisasi Skematik Inovasi Pengelolaan Lahan



1. SEMARAK MENANAM MASYARAKAT BANGKA BELITUNG (SEMARAK BABEL)

Program SEMARAK BABEL diinisiasi oleh Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung **BAPAK Dr. SAFRIZAL ZA,M.Si**, berangkat dari kerusakan lingkungan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta upaya untuk peningkatan kualitas tutupan lahan serta program untuk mengurangi inflasi daerah maka di luncurkan Gerakan SEMARAK BABEL (Semangat Menanam Rakyat Bangka Belitung). PJ. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung gerakan SEMARAK BABEL ini selain melakukan berbagai upaya perbaikan kualitas tutupan lahan dengan *leading Sector* Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Babel Menanam) dengan melakukan penanaman di lahan kritis, juga dilakukan penanaman komoditas pertanian untuk mengatasi inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya melakukan penanaman bibit cabe dan buah-buahan secara massif dengan *leading Sector* Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (untuk Babel Berkebun)



Gambar 4. 2 Jejarang Inovasi SEMARAK BABEL



Sejak di *launching* program ini berbagai pihak dilibatkan secara aktif diantaranya Bupati dan Walikota, Kapolda, Danrem serta jajarannya ,peran serta masyarakat secara massif sehingga inovasi yang di inisiasi Gubernur ini dapat diterapkan secara inklusif bagi perbaikan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 4. 3 Berbagai Aksi Gerakan SEMARAK BABEL



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/127 /DLHK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA GERAKAN
MENANAM SATU JUTA POHON PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Program dan Aksi Semangat Menanam Rakyat Bangka Belitung (SEMARAK BABEL) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Gerakan Menanam Satu Juta Pohon Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu membentuk Kelompok Kerja Gerakan Menanam Satu Juta Pohon Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa Kelompok Kerja yang disebutkan namanya dalam Keputusan Gubernur ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Gerakan Menanam Satu Juta Pohon Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);



DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Gerakan Menanam Satu Juta Pohon Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- I. Pelindung, mengarahkan teknis pelaksanaan kegiatan Gerakan Menanam Satu Juta Pohon Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- II. Pengarah, bertanggung jawab secara umum pelaksanaan kegiatan Gerakan Menanam Satu Juta Pohon Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- III. Koordinator mengoordinir pelaksanaan kegiatan Gerakan Menanam Satu Juta Pohon Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Menanam Satu Juta Pohon kepada Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- IV. Ketua untuk memimpin jalannya proses pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Gerakan Menanam Satu Juta Pohon, termasuk tugas-tugas berikut:
 - a. menyiapkan lahan dan langkah-langkah teknis pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Gerakan Menanam Satu Juta Pohon;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Gerakan Menanam Satu Juta Pohon;
 - c. mengedukasi, memantau, dan mengevaluasi sasaran dan realisasi tanam;
 - d. mendampingi dan mengawal kegiatan Kelompok Kerja Gerakan Menanam Satu Juta Pohon;
 - e. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Gerakan Menanam Satu Juta Pohon; dan
 - f. menyampaikan pertimbangan kepada pimpinan terhadap permasalahan serta langkah selanjutnya.
- V. Wakil Ketua, membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas kegiatan Kelompok Kerja Gerakan Menanam Satu Juta Pohon dan mewakili Ketua jika berhalangan dalam memimpin rapat;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 12.7 /DLHK/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA GERAKAN MENANAM
SATU JUTA POHON PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

SUSUNAN KELOMPOK KERJA GERAKAN MENANAM SATU JUTA POHON PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- | | |
|-------------|--|
| Pelindung | : 1. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
2. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung
3. Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Komandan Korem 045/Garuda Jaya
5. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut
6. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara
7. Bupati/Walikota Se-Propinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| Pengarah | : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| Koordinator | : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| Ketua | : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| Wakil Ketua | : 1. Ketua Komisariat Daerah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Direktur Operasional PT. TIMAH, Tbk.
3. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| Sekretaris | : 1. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batursura cerucuk
2. Kepala Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
3. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| Anggota | : 1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lingkungan Hidup se-Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIII Pangkalpinang |

6. Kepala Balai Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan se-Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Ketua Asosiasi Tambang Rakyat Daerah (Astrada) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Direktur Utama PT. Inhutani V Unit Bangka
11. Direktur Utama PT. Agro Pratama Sejahtera
12. Direktur Utama PT. Indo Sukses Lestari Makmur
13. Direktur Utama PT. Bangun Rimba Sejahtera
14. Direktur Utama PT. Andalan Karya Pertiwi
15. Direktur Utama PT. Istana Kawi Kencana
16. Direktur Utama PT. Hutan Lestari Raya
17. Direktur Utama PT. Agrindo Persada Lestari
18. Direktur PT. Timah Tbk
19. Direktur PT. PLN (Persero)
20. Direktur PT. Aditya Busna Inter
21. Direktur PT. Bumi Biliton Raya
22. Direktur PT. Fortuna Tunas Mulya
23. Direktur PT. Karya Cipta Mandiri Persada
24. Direktur PT. Karya Emas Multisani
25. Direktur PT. Karya Mandiri Persada Belitung
26. Direktur PT. Kurnia Mandiri Adiperkasa
27. Direktur PT. Menara Cipta Mulia
28. Direktur PT. Mitra Stania Prima
29. Direktur PT. Mitra Stania Kembangking
30. Direktur PT. Mitra Stania Bemban
31. Direktur PT. Sandier Setia Brothers
32. Direktur PT. Setia Maju Pratama
33. Direktur PT. Steelindo Wahana Perkasa
34. Direktur PT. Sahabat Mewah dan Makmur
35. Direktur PT. Tambang Jaya Indah
36. Direktur PT. Wali Tampas Citratama
37. Direktur CV. Irpau Hero
38. Direktur CV. Tiania Perkasa Prima
39. Direktur CV. 3G Trust
40. Direktur PD. Mustika
41. Direktur PT. Belitung Sand Mining
42. Direktur Utama PT. Pantai Indah Rebo;
43. Direktur Utama PT. Wattana Segar Alam
44. Direktur Utama PT. Tunas Propindo Lestari
45. Direktur Utama CV. Panorama Lintas Timur
46. Direktur Utama CV. Pesona Alam Asri
47. Direktur Utama CV. Mulia Asri Sukhitata
48. Direktur PT. Parit Sembada
49. Direktur PT. Palmindo Biliton Berjaya
50. Direktur PT. Agro Makmur Abadi
51. Direktur PT. Forestalestari Dwikarya
52. Direktur PT. Gunung Pelawan Lestari
53. Direktur PT. Sarana Marindo
54. Direktur PT. Swarna Nusa Sentosa
55. Direktur PT. Tata Hamparan Eka Persada
56. Direktur PT. Putra Bangka Mandiri
57. Direktur PT. Bangka Inti Besaah

58. Direktur PT. Bangka Plasma Besaah
59. Direktur PT. Rehimnas Jaya
60. Direktur PT. Bangka Nesia
61. Direktur PT. Pelalauhan Indonesia II (Persero)
62. Direktur PT. Istana Kawi Kencana
63. Direktur PT. Mitra Stania Prima
64. Direktur PT. Agri Prima
65. Direktur PT. Bangka Prima Tin
66. Direktur PT. Hasil Sawit Bina Sejahtera
67. Direktur PT. Stanindo Inti Perkasa
68. Direktur PT. Bangun Rimba Sejahtera
69. Direktur PT. Kampit Tin Utama
70. Direktur PT. Biliton Jaya Utama
71. Direktur PT. Puncak Prima Lestari
72. Direktur PT. Babel Tinindo
73. Direktur PT. Cirindo Mining Utama
74. Direktur PT. Mitra Abadi Berkatindo
75. Direktur PT. Mitra Sukses Globalindo
76. Direktur PT. Agro Pratama Sejahtera
77. Direktur PT. Bangka Serumpun
78. Direktur PT. Stanindo Inti Perkasa
79. Direktur PT. Tommy Utama
80. Direktur PT. Synergy Maju Bersama
81. Direktur PT. Indosukses Lestari Makmur
82. Direktur CV. Sejahtera Utama
83. Direktur PT. Bumi Makmur Sejahtera Jaya
84. Direktur PT. Sentra Tinindo
85. Direktur PT. Sinar Mutiara Sejahtera
86. Direktur PT. Sumber Jaya Indah
87. Direktur CV. United Smelting
88. Direktur PT. Greenland Diorama
89. Direktur PT. Goshen Bangka Mulia
90. Direktur CV. Tiga Sekawan
91. Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel dan Babel
92. Direktur PT. Bangun Mega Lestari
93. Direktur PT. Silika Tips Mas
94. Direktur PT. Babel Sumber Pratama Mineral
95. Direktur PT. Cipta Mineral Bumi Selaras
96. Direktur PT. Hasil Alam Sukses Pratama
97. Direktur PT. Arsed Indonesia
98. Direktur PT. Mutiara Prima Sejahtera
99. Direktur PT. Biliton Makmur Lestari
100. Direktur PT. Hasil Alam Gemilang Pratama
101. Direktur PT. Menara Cipta Mulia
102. Direktur PT. Lautan Harmonis Sejahtera
103. Direktur PT. Prima Timah Utama
104. Direktur CV. Dua Sekawan
105. Direktur PT. Tinindo Inter Nusa
106. Direktur CV. Bangka Timah Makmur
107. Direktur PT. Donna Kembara Jaya
108. Direktur PT. Bangka Serumpun
109. Direktur PT. Putra Bangka Mandiri
110. Direktur PT. Premium Tin Indonesia
111. Direktur PT. Hutan Lestari Raya
112. Direktur PT. Bangka Belitung Timah Sejahtera
113. Direktur PT. DS. Jaya Abadi
114. Direktur PT. Sahabat Mewah Makmur



115. Direktur Tata Himpunan Eka Persada
116. Direktur PT Kijang Jaya Mandiri
117. Direktur CV Tiga Sekawan
118. Direktur PT Sentra Tin Indo Sentosa
119. Direktur PT Sentra Tin Indo Makmur
120. Direktur PT Sentra Tin Indo Cemerlang
121. Direktur PT Pulomas Sentosa
122. Direktur PT Rajehan Arik
123. Direktur PT Angkasa Pura
124. Direktur CV Venus Inti Perkasa
125. Direktur PT Hero Progres Internasional
126. Direktur PT Agung Persada Sejahtera
127. Direktur PT Permata Indah Menumbing
128. Direktur PT Tin Industri Nasional
129. Direktur PT Tin Industri Abadi
130. Direktur PT Lautan Harmonis Sejahtera
131. Direktur PT Masbro Alam Stania
132. Direktur PT Mitra Sukses Globalindo
133. Direktur PT Rajawali Rimba Perkasa
134. Direktur PT Mitra Bangka Resources
135. Direktur PT Babel Surya Alam Lestari
136. Direktur PT Megah Mineral Sejahtera
137. Direktur PT Refined Bangka Tin
138. Direktur PT Putera Sarana Shakti
139. Direktur PT Lautan Sarana Mandiri
140. Direktur PT Sariwiguna Bina Sentosa
141. Direktur PT Mitra Sukses Globalindo
142. Direktur PT Marindo Sukses Samudera
143. Direktur PT Artha Cipta Langgeng
144. Direktur PT Shrimpi
145. Direktur PT Stanindo Inti Perkasa
146. Direktur PT Anugerah Laut Bangka
147. Direktur PT Bakit Indah Mandiri
148. Direktur PT Pembangkitan Jawa Bali
149. Direktur PT Hoki Alam Semesta Jaya
150. Direktur PT Berkah Bumi Laut Sentosa
151. Direktur PT Rahardja Wirasakti Jaya Mandiri
152. Direktur PT Minabahari Merbau Mandiri
153. Direktur CV Gunung Prima
154. Direktur PT Alfindo Adia Minerals
155. Direktur PT Indomas Bara Prima
156. Direktur PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
157. Direktur PT Menara Cipta Mulia
158. Direktur PT Babel Citra Mandiri
159. Direktur PT Fataha Pasifik Kopan
160. Direktur CV Bangka Sukses Bersama
161. Direktur PT Agro Bahari Nusantara
162. Direktur CV Gelora Sukses Abadi
163. Direktur PT Belitung Mina Bahari
164. Direktur PT Sinar Logindo Alam
165. Direktur PT Sejahtera Logindo Alam
166. Direktur PT Budi Agri Sejahtera
167. Direktur PT Mitra Persada Resources
168. Direktur PT Bahari Bio Makmur
169. Direktur CV Gunung Prima
170. Direktur PT Mutiara Prima Sejahtera
171. Direktur CV Dunia Vaname
172. Direktur PT Fenco Pasifik Indonesia

173. Direktur CV Samudera Terus Jaya
174. Direktur PT Indomakmur Alam Raya
175. Direktur PT Bakit Indah Mandiri
176. Direktur PT Fenco Pasifik Indonesia
177. Direktur PT Indomakmur Alam Raya
178. Direktur PT Bakit Indah Mandiri
179. Direktur CV Sumber Vaname Lestari
180. Direktur PT Bangka Belitung Maritim Sejahtera
181. Direktur PT Agro Bahari Internasional
182. Direktur PT FA Terus Jaya
183. Direktur PT Bangka Aqua Culture
184. Direktur CV Beting Tambak Belijong
185. Direktur CV Rajawali Tukak Sadai
186. Direktur PT Emas Sempurna Anugerah
187. Direktur PT Babasel Mirta Abadi
188. Direktur CV Mavindo Karya Lestari
189. Direktur PT Sarana Telaga Mandiri
190. Direktur CV Bangka Utama Karya
191. Direktur PT Bivanki Jaya Lestari
192. Direktur PT Samator Gas Industri
193. Direktur PT Mitra Graha Raya
194. Direktur PT Hero Progres Internasional
195. Direktur PT Wijaya Mandiri Teknik Kreasi
196. Direktur PT Tanjung Bukit Nunggal
197. Direktur PT Prima Timah Utama
198. Direktur PT Bersahaja Berkah Sahabat Jaya
199. Direktur PT Marian Anugerah Akua
200. Direktur PT Samudra Berhasil Bersama
201. Direktur PT Berkah Akuakultur Bahari
202. Direktur PT PSR Mutiara Abadi
203. Direktur Utama El John Tirta Emas Wisata
204. Ketua Yayasan Alam Bukit Betung
205. Ketua Yayasan Bangka Alam Lestari
206. Bapak Tukimin Foeng (Persorangan)

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SAFRIZAL ZA

PUSAT PERKASIS	
SEKRETARIS DAERAH	R
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	S
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEKAWAHLAN BERHAYAT KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	f

Gambar 4. 4 Surat Keputusan Gubernur Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Menanam satu Juta Pohon Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bapak Safrizal ZA sangat konsen terhadap perbaikan lingkungan terutama perbaikan lahan-lahan kritis. Kegiatan SEMARAK BABEL yang dilaksanakan dengan membentuk Pokja yang melibatkan seluruh stakeholder Bupati, Walikota Danrem, Kapolda dan jajarannya serta pelaku usaha, masyarakat, akademisi tertuang dalam SK Gubernur dan pelaksanaannya dipimpin langsung oleh PJ Gubernur sehingga secara massif memberikan spirit untuk perbaikan lingkungan, perbaikan lingkungan dapat dilaksanakan dengan inisiasi program yang di sampaikan



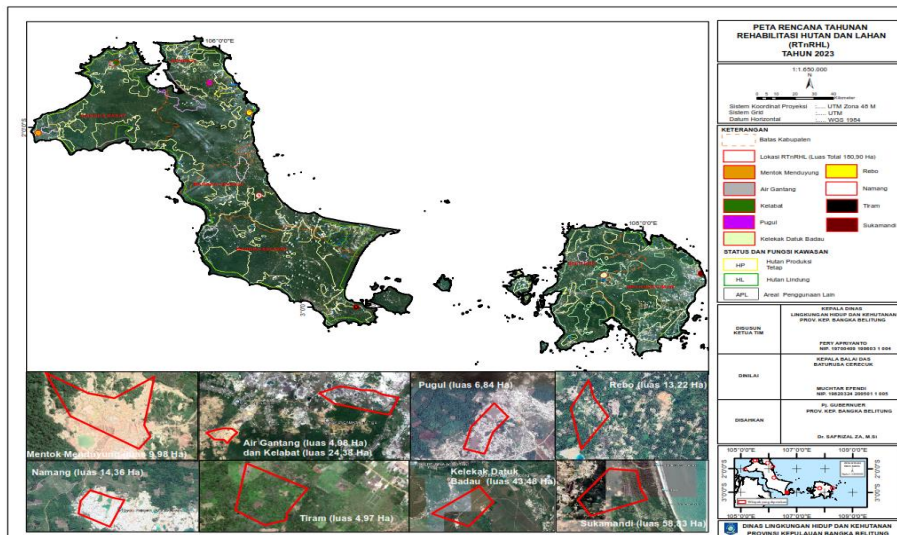
oleh Bapak Pj.Gubernur dan gagasan serta penerapan inovasi untuk perbaikan lahan ini dapat berjalan secara inklusif.

RENCANA KERJA BABEL MENANAM DALAM GERAKAN SEMARAK BABEL TAHUN 2024

A. Kegiatan RTnRHL

Keberlanjutan program penanaman dan rehabilitasi lahan tetap menjadi fokus Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024. Melalui rehabilitasi hutan dan lahan dengan berbagai kegiatan penanaman baik bersumber dari pemerintah pusat melalui kegiatan di Balai Pengelolaan Aliran Sungai Baturusa Cerucuk KLHK, kegiatan serta program di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, program pelibatan masyarakat, dunia Pendidikan, perusahaan melalui CSR tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.

Penanaman melalui Rencana tahunan Rehabilitasi Hutan (RTn-RH) di wilayah BPDAS Baturusa Cerucuk Tahun 2024 adalah seluas 700 hektar dengan sumber anggaran keseluruhannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berikut Peta Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahunan.



Gambar 4. 5 Rencana RTnRL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



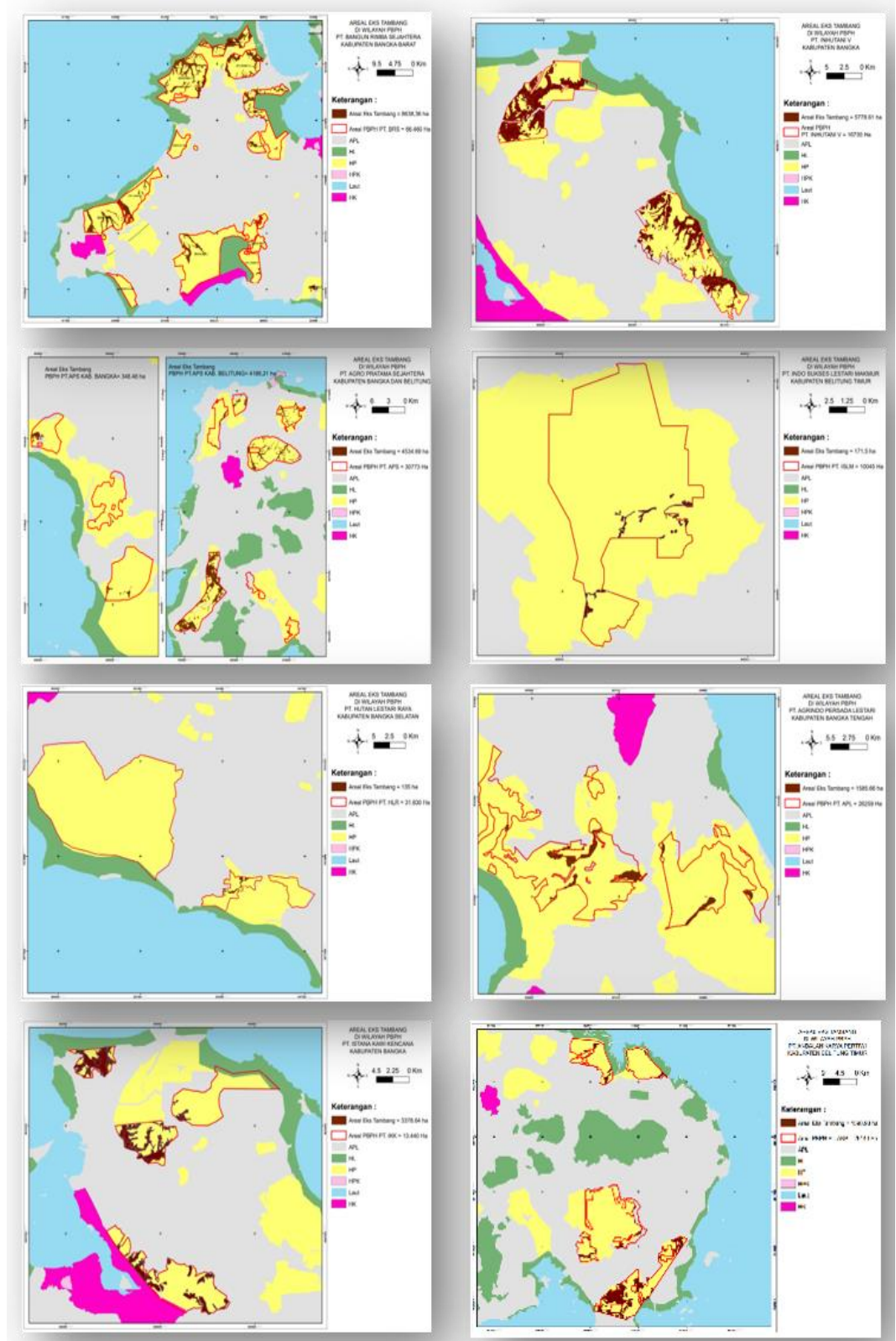
B. Kegiatan Babel Menanam 1 Juta Pohon Tahun 2024

Program ini merupakan inisiasi Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka melestarikan lingkungan, meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup khususnya indeks kualitas lahan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus melanjutkan program Hijau Biru Babelku yang telah dilaksanakan oleh pj gubernur sebelumnya. Seperti halnya kegiatan terdahulu, program ini merupakan kolaborasi dari sejumlah pihak yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini BPDAS Baturusa Cerucuk, Pemerintah Daerah, Perusahaan swasta pemegang Izin Usaha Pertambangan di Areal Penggunaan Lain, Perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) serta perusahaan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

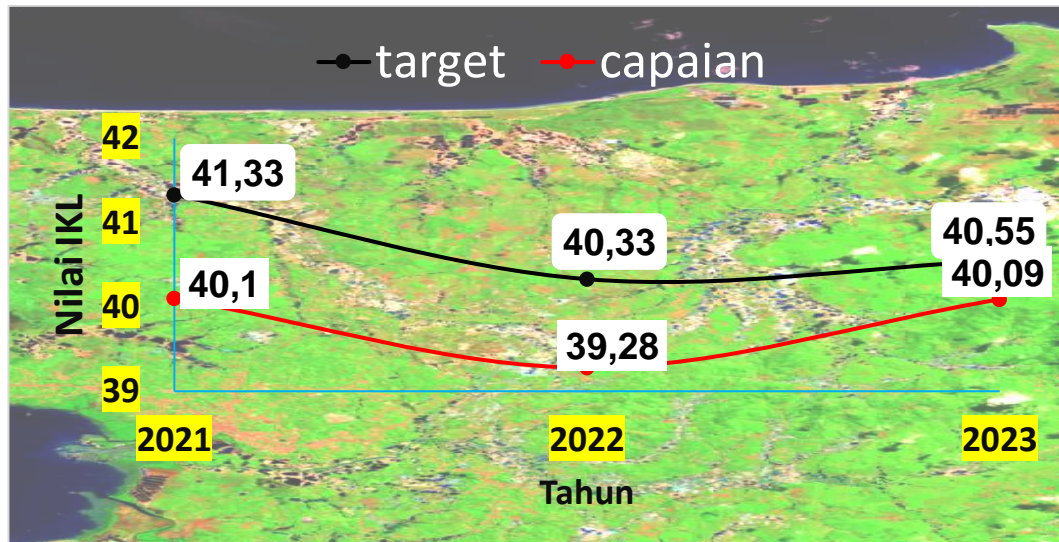
Lokasi penanaman Babel Menanam 1 Juta Pohon tahun 2024 oleh pemegang PBPH yaitu pada areal konsesi PBPH sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024, areal lahan kritis serta areal bekas pertambangan dengan mekanisme penanaman yang berasal dari benih biji, stek maupun penanaman oleh pemegang PBPH dengan melibatkan masyarakat setempat.



Gambar 4. 6 Penanaman yang dilakukan dalam program SEMARAK BABEL

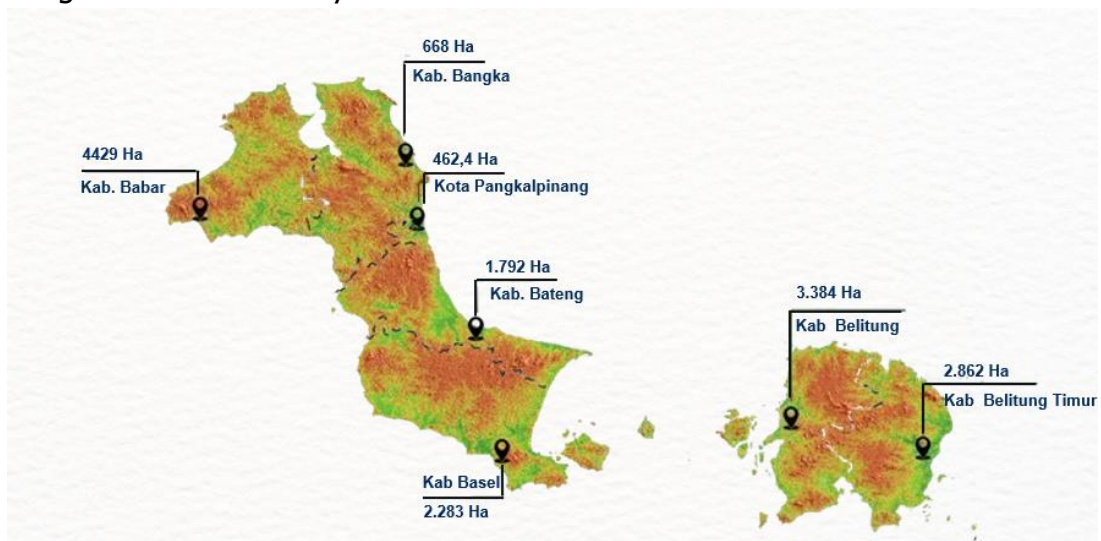


Gambar 4. 7 Lokasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

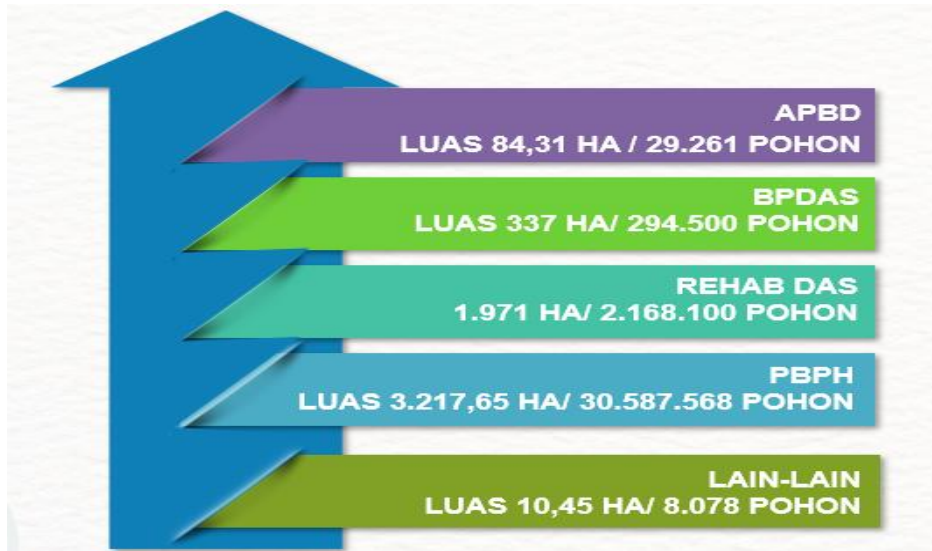


Gambar 4. 8 Tren Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Berbagai upaya dan penerapan inovasi pengelolaan lahan yang dilakukan secara berkelanjutan telah memperlihatkan hasil yang cukup nyata, pada tahun 2023 Indeks Kualitas Lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan 0,81 poin dari tahun 2022. Kenaikan IKTL ini merupakan kontribusi dari meningkatnya luas tutupan hutan seluas 11.184 Hektar serta luas RTH, Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan vegetasi relevan lainnya.



Gambar 4. 9 Kontribusi Luasan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai Tahun 2022



Gambar 4. 10 Realisasai Penanaman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2023.

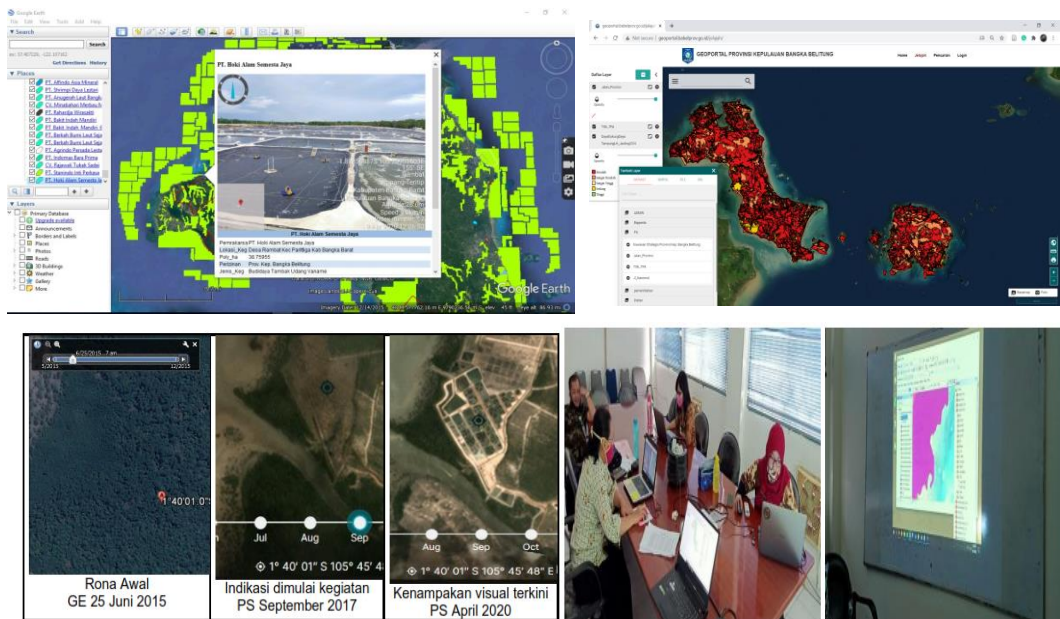
Skenario dan percepatan reklamasi pertambangan dan keberhasilan SEMARAK BABEL tentunya harus dimaksimalkan dan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan: Kewajiban pemulihan dan reklamasi harus dioptimalkan sesuai dengan rencana reklamasi yang tertera pada izin dan persetujuan lingkungan
- (2) Untuk di daerah Area Penggunaan Lain (APL): Perlunya Identifikasi kepemilikan lahan, Pelibatan masyarakat secara massif untuk menjaga reklamasi yang sudah dilaksanakan serta penggunaan tanaman yang ekonomis sehingga bermanfaat bagi masyarakat serta dilaksanakan Rehabilitasi Lahan Diluar Kawasan Hutan Negara
- (3) Untuk dikawasan Hutan: Melakukan koordinasi dengan KLHK terkait Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH), berkoordinasi dengan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Pemenuhan kewajiban PPKH Rehabilitasi DAS dan Reklamasi Hutan
- (4) Perlunya sinkronisasi pemerintah Kabupaten/Kota terkait lahan yang akan dilakukan reklamasi serta komitmen bersama antara pemerintah daerah, lembaga serta *stakeholder* terkait penganggaran dan pelaksanaan reklamasi.



2. Aplikasi “Si Terbit DLHK”

Tentunya permasalahan tata guna lahan dan alih fungsi lahan dimulai dari penggunaan dan pemanfaatan ruang. Selain memastikan berbagai penggunaan dan pemanfaatan ruang melalui fungsi Forum penataan ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga sesuai aturan Rencana Tata Ruang Wilayah baik Provinsi maupun rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan trobosan dengan inovasinya yaitu “Si Terbit DLHK” merupakan inovasi yang dapat digunakan dalam pemberian perizinan, melihat tumpang tindih penggunaan lahan serta perubahan penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Aplikasi ini berbasis “Sistim informasi perizinan lingkungan terintegrasi, mudah diakses masyarakat berbasis teknologi untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas serta Akuntabilitas kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis spasial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”.



Gambar 4. 11 Aplikasi “Si Terbit DLHK” dan proses pengecekan dan pemantauan penggunaan lahan



Dengan penggunaan aplikasi ini selain dimanfaatkan untuk perizinan atau persetujuan izin lingkungan, aplikasi ini dapat digunakan dalam proses perencanaan pengelolaan lingkungan hidup berbasis spasial, sehingga perencanaan lingkungan dapat secara integrative, tematik dan spasial dan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan lingkungan dapat dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pemantauan kerusakan pesisir dan laut juga dapat menggunakan aplikasi ini seperti kerusakan ekosistem mangrove serta alih fungsi kawasan pesisir didukung dengan pengecekan citra satelit sehingga memberikan gambaran yang cukup komprehensif terkait perubahan rona lingkungan dari awal sampai perubahan yang terjadi.

3. KOMPOS BABEL

Permasalahan Degradasi lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akibat berbagai aktifitas menyebabkan makin bertambahnya lahan kritis. Untuk melakukan perbaikan kualitas lahan tentunya membutuhkan usaha yang cukup besar karena lahan kritis membutuhkan treatment lahan sebelum dilakukan proses reklamasi/ penanaman kembali. Kehadiran inovasi kompos Babel menjawab permasalahan ini, inovasi ini memang telah berjalan dan dalam DIKPLHD tahun 2021 ini Kompos Babel masih dipandang sangat penting, karena keberhasilan sebuah inovasi bisa dilihat seberapa inklusif sebuah inovasi tersebut dapat diterapkan dan fungsional sehingga memberikan manfaat yang besar bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hadirnya inovasi kompos blok ini di khususkan pada perbaikan lahan eks tambang. Lahan-lahan bekas tambang ini akan berubah menjadi lahan kritis, yaitu lahan yang tidak produktif lagi karena kandungan unsur haranya yang minim. Pemulihan kualitas lahan kritis bekas tambang memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan tidak mungkin untuk memulihkan kondisi



lahan utuh seperti semula. Langkah-langkah yang mungkin dilakukan, di antaranya adalah melakukan reklamasi atau rehabilitasi terhadap lahan bekas tambang tersebut. Mengingat kondisi lahan kritis yang kandungan haranya sangat sedikit, maka proses penanaman sangat sulit dilakukan. Mengatasi hal tersebut, muncul inovasi pemberian “Kompos Babel” pada lahan-lahan bekas tambang sebelum dilakukan penanaman, yang diinisiasi oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Baturusa Cerucuk.



Gambar 4. 12 Proses Pembuatan Kompos Babel

Kompos Babel ini terbuat dari bahan-bahan utama yang sangat mudah ditemui di lingkungan Bangka Belitung, seperti seresah dan kompos ternak. Seresah merupakan sampah-sampah organik yang berupa tumpukan dedaunan, ranting, dan sisa vegetasi lainnya yang sudah mengering dan berubah dari warna aslinya. Komposisi bahan yang digunakan untuk membuat Kompos Babel adalah 50% seresah dan 50% kompos ternak.

Penggunaan Kompos Babel untuk penanganan lahan bekas tambang memberikan beberapa kelebihan sebagai berikut ini.

1. Lebih praktis karena bentuknya blok dan mudah dibawa ke lokasi penanaman.
2. Komposisi nutrisi bagi tanaman sesuai, dan kebutuhan nutrisi tanaman dapat terpenuhi selama 2 tahun (pertumbuhan tanaman terjamin).



3. Lebih efisien dalam pembiayaan dan pemeliharaan dibanding produk serupa.

Selain Kompos Babel, bentuk inovasi lainnya di bidang pengelolaan lahan di Kepulauan Bangka Belitung yang teridentifikasi adalah proses pemanfaatan kearifan lokal di Desa Jada Barin untuk menjaga dan mengelola lahan-lahan milik desa agar tidak dipergunakan oleh pihak lain, yang selanjutnya lahan-lahan desa ini dimanfaatkan dan diolah untuk perkebunan karet, hutan desa, dan lain-lain demi pelestarian lingkungan. Hasil dari pengolahan lahan desa ini digunakan untuk pembiayaan biaya kesehatan dan pendidikan bagi warga desa yang kekurangan.

4. LITERASI LINGKUNGAN

Program literasi lingkungan ini diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengikut sertakan pihak-pihak swasta untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dengan melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah dalam penyediaan bibit yang akan ditanam, proses pembibitan di lakukan di sekolah-sekolah kemudian bibit tersebut di beli oleh perusahaan unttuk penghijauan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disatu sisi kegiatan ini menimbulkan literasi akan pentingnya pelestarian lingkungan kepada siswa dan sekolah-sekolah dan meningkatkan peran serta masyarakat swasta untuk berkontribusi dalam meminimalkan kerusakan lingkungan, sehingga terjadi *collective learning* dan inovasi yang di hasilkan menimbulkan *added value* untuk perbaikan lingkungan dan masyarakat Bangka Belitung.

Memberikan pemahaman kepada siswa akan pentingnya menjaga lingkungan dengan kegiatan ini, dapat memberikan efek perbaikan jangka Panjang. Bangka Belitung sebagai daerah tambang penting untuk memmperhatikan perkembangan SDM masyarakat sehingga dengan literasi ini anak-anak usia sekolah tidak terjerumus dalam kegiatan pertambangan yang mempunyai dimensi etik pekerja anak pada daerah pertambangan



serta merubah *mindset* anak-anak dari pekerja tambang inkonvensional yang merusak lingkungan kearah perbaikan lingkungan dengan memasukkan unsur ekonomi (*benefit*) dari literasi lingkungan dengan kegiatan pembibitan yang akan dibeli oleh perusahaan.



Gambar 4. 13 MOU Kegiatan Literasi Lingkungan

Sebagai bentuk keberlanjutan inovasi Literasi lingkungan tahun sebelumnya, maka pada tahun 2020 tetap berjalan dengan realisasi pembelian bibit yang sudah ditanam oleh sekolah-sekolah untuk penghijauan dan dibeli oleh perusahaan yang sudah menjalin kerjasama (MOU) pada tahun 2019. Berbagai Benefit di dapatkan dari kegiatan ini diantaranya pemahaman kepada siswa didik akan pentingnya pelestarian lingkungan dengan melakukan pembibitan dan penanaman bibit untuk penghijauan, disisi lain efek ekonomi juga didapatkan sekolah.

5. SEDEKAH POHON

Esensi sebuah inovasi diantaranya yaitu keberlanjutan terhadap gagasan baru dan inovasi yang telah ada. Inovasi selanjutnya dalam pengelolaann lahan yang menjadi isu prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu **SEDEKAH POHON**. Inovasi ini diharapkan mamapu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perbaikan kualitas lahan dengan tigeline "*menanam untutk amal jariah*". Diharapkan timbul kesadaran kolektif masyarakat dalam meningkatkan kegiatan penghijauan dengan menanam pohon sebagai bentuk adopsi dari inovasi ini. Pohon yang



ditanam akan memberikan manfaat secara ekologis dan sedekah jariyah merupakan sedekah yang akan terus mengalir pahalanya. Maka manfaat pohon itu akan terus mengalir pahala sedekah jariyahnya meski si penanam pohon telah meninggal. Tentunya sukses kegiatan ini selain didukung oleh inisiator inovasi seperti Dinas Lingkungan Hidup, LSM lingkungan, masyarakat serta swasta juga harus didukung oleh tokoh-tokoh agama.



Gambar 4.14 Kegiatan Sedekah Pohon

6. Agro Edu Wisata Inovasi Perusahaan Dengan Pemerintah Daerah Bangka Belitung Dan Masyarakat

Selain inovasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah, Keterlibatan masyarakat, pelaku usaha dan perusahaan memegang peranan penting dalam keberhasilan sebuah inovasi, sehingga inovasi bisa diterapkan secara inklusif kesemua lapisan masyarakat dan pertukaran gagasan baru bisa diimplementasikan. Berbagai inovasi juga dilakukan dan diinisiasi oleh berbagai perusahaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengatasi permasalahan lahan. Berbagai inovasi ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap reklamasi lahan dengan memberikan konsep tidak hanya reklamasi secara umum tapi adanya peningkatan ekonomi dari pelaksanaan inovasi yang diterapkan misalnya yang dilakukan oleh PT. Timah dengan sinergitas dengan pemerintah daerah, PT. Sahabat Mewah Makmur (SMM) di Belitung sebagai berikut:

PT. Timah, Tbk Agro Edduwisata Serta Pemanfaatan Kolong Pasca Tambang



Gambar 4.15 Reklamasi PT. Timah Air Jangkang

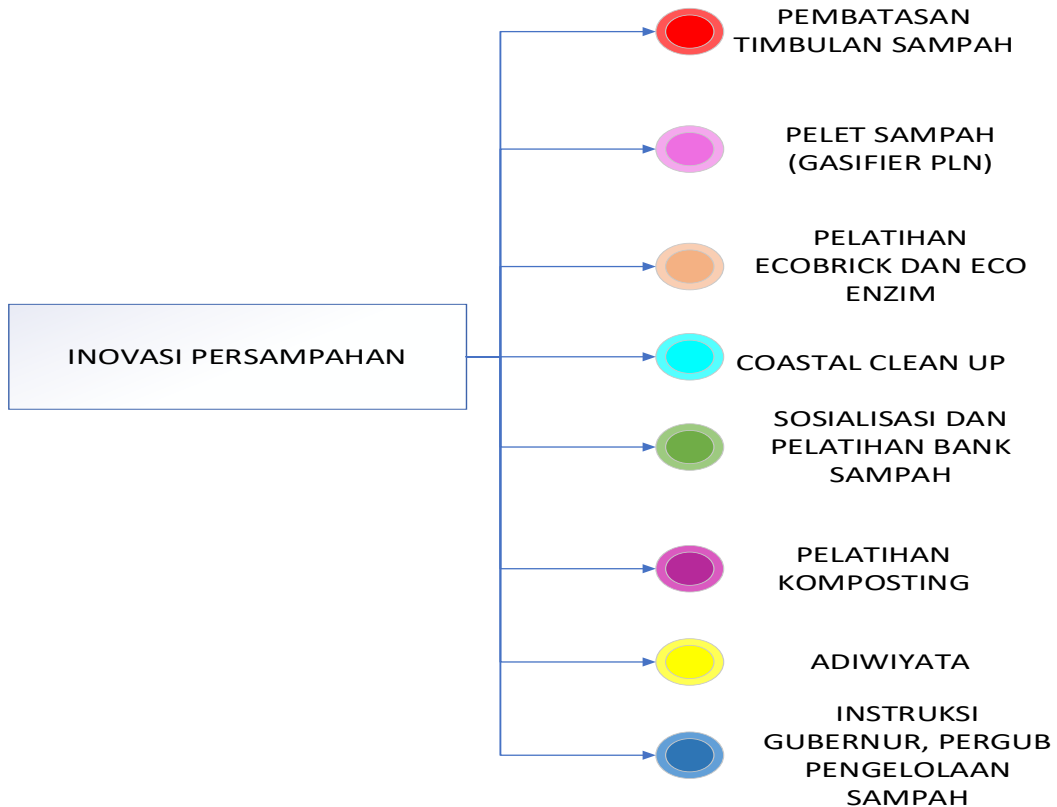
Bentuk inovasi yang ditawarkan yaitu program eduwisata merupakan aksi tindaklanjut pasca tambang, dengan mengembangkan Kawasan reklamasi pasca tambang dengan berbagai berbagai pertanian, perkebunan, peternakan yang terintegrasi. Disatu sisi keberhasilan reklamasi dapat dicapai namun disisi lain peningkatan ekonomi masyarakat juga dapat dikembangkan dan memunculkan destinasi wisata baru.





Gambar 4. 16 Reklamasi Lahan Pasca Tambang Dengan Tanaman Produktif

IV.3. Inovasi Persampahan



Gambar 4. 17 Visualisasi Skematik Inovasi Persampahan

1. Pembatasan Timbulan Sampah

Berbagai upaya untuk pembatasan timbulan sampah dilakukan pada tahun 2023. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai produk hukum tentang pengelolaan sampah skala provinsi yaitu Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam peraturan Gubernur tersebut disebutkan bahwa target pengurangan timbulan sampah pada tahun 2023 adalah 27% dan target penanganan sampah pada tahun 2023 adalah sebesar 72%. Kebijakan yang tercantum



tersebut mengatur tentang pengurangan dan penanganan sampah sampai tahun 2025, dimana pengelolaan sampah yang diharapkan adalah pengurangan sampah sebesar 30 % dan Penanganan sampah sebesar 70%. Selain hal tersebut, pada Tahun 2023 diadakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah di Pulau Bangka dan juga Rapat koordinasi Pengelolaan sampah di Pulau Belitung yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengundang stake holder antara lain Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota dan balai prasarana permukiman wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil dari rapat koordinasi pengelolaan sampah di Pulau Bangka adalah :

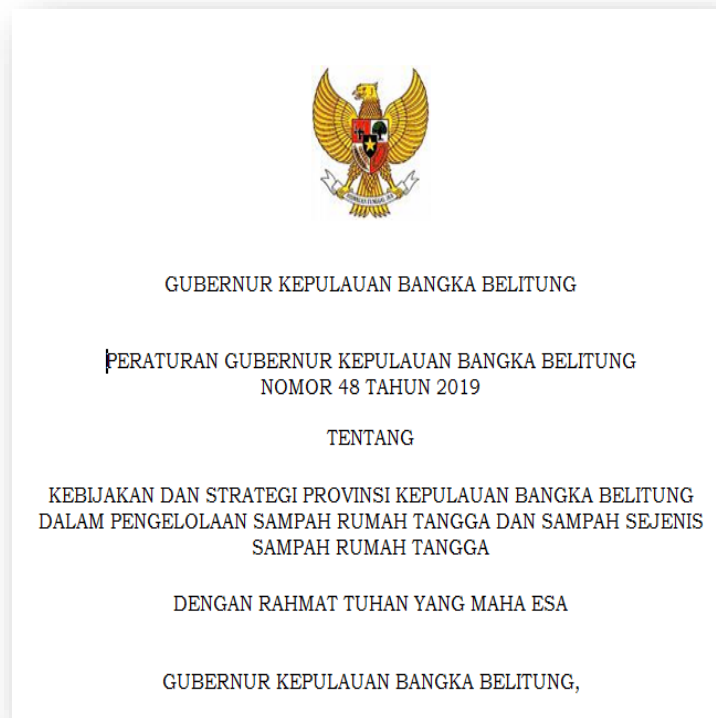
1. Optimalisasi kegiatan-kegiatan pengurangan sampah di masing -masing Kabupaten /Kota dan pelaporan pelaksanaannya
2. Mendorong pembahasan lokasi TPST regional Pulau Bangka kepada pengambil keputusan serta mengakomodir peruntukan ruang pada RTRW kabupaten dan Provinsi
3. Revitalisasi TPA existing kabupaten menjadi TPST
4. Optimalisasi TPA Kabupaten/Kota dengan sistem penutupan zona landfill non aktif dan minning sampah
5. Dukungan pendanaan dan sarana prasarana dari pemerintah pusat dan provinsi
6. Pemerintah Kabupaten/Kota segera menyiapkan teknpologi alternatif dalam pengolahan sampah

2. Instruksi Gubernur, Peraturan Gubernur dalam Pengelolaan Sampah

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan Bangka Belitung dalam pengelolaan persampahan beberapa instruksi Gubernur dan Peraturan Gubernur terkait diantaranya:



- a. Peraturan gubernur No. 48 tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

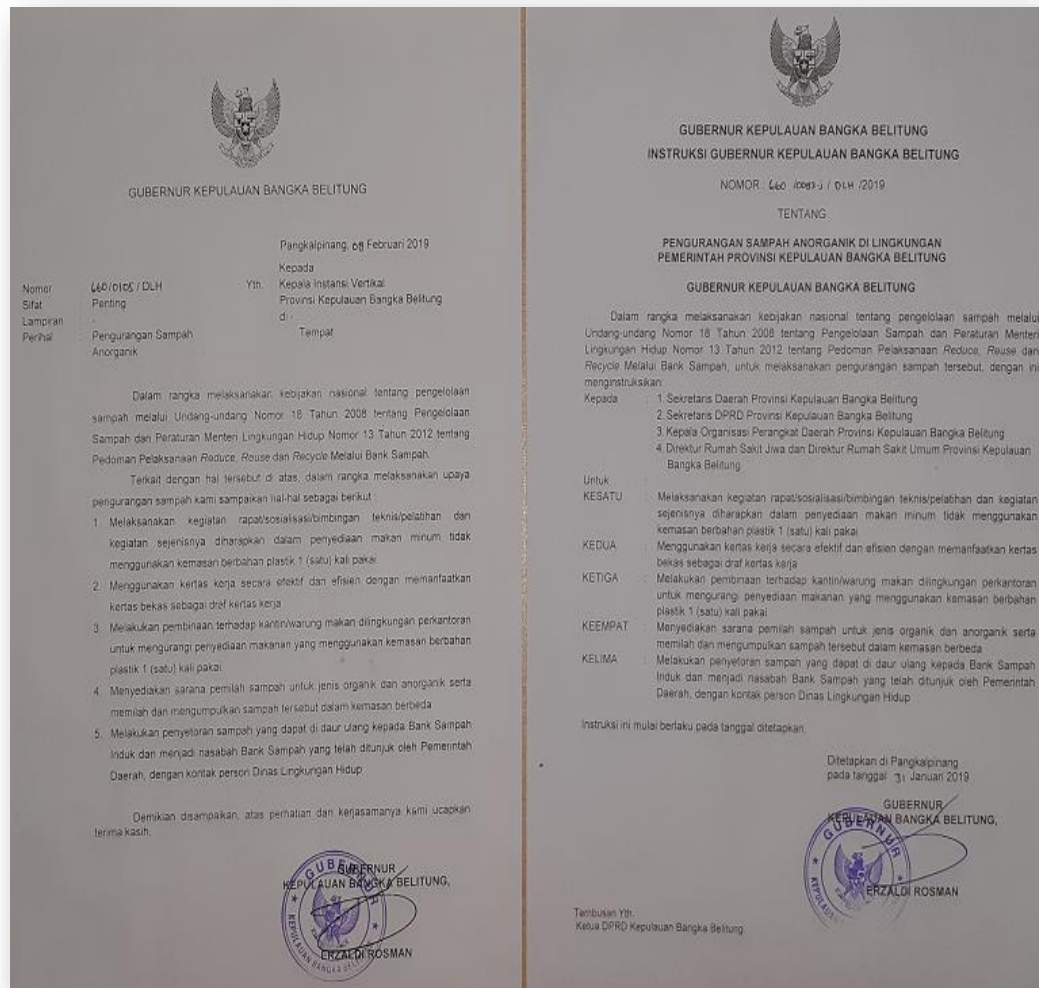


- b. Surat Edaran Pengurangan minuman kemasan plastik di ruang pertemuan dan hotel di Bangka Belitung





C. Instruksi Gubernur Pengurangan sampah Anorganik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Pada tahun 2020, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan TPA regional, tentunya hal ini sebagai wujud pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan persampahan.

D. Himbawan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung kepada Bupati dan Walikota untuk melakukan pengelolaan sampah



GOVERNOR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 6 Februari 2023

Kepada

Nomor : 060 / 0075 / DLHK
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan Pengelolaan Sampah

Yth. Bupati/Walikota
se-Prov. Kep. Bangka Belitung
di-
Tempat

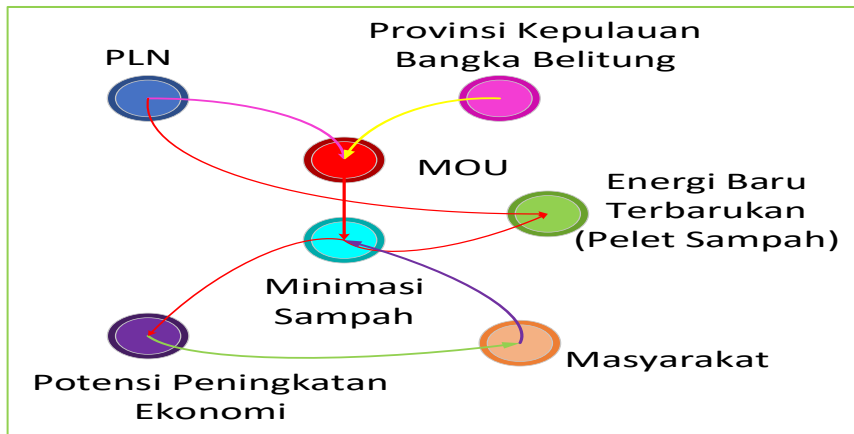
Merujuk pada pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah dan pemerintahan daerah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas dalam rangka mewujudkan target Pengurangan Sampah sebesar 30% dan Penanganan Sampah 70% pada Tahun 2025.

Sehubungan hal tersebut, dihimbau kepada Saudara dapat mengoptimalkan pelaksanaan strategi pengurangan sampah yang berasal dari darat di wilayah yang menjadi kewenangannya dengan melaksanakan hal-hal penting berikut ini :

1. Melakukan pengurangan sampah plastik dari sumbernya (*reduce*);
2. Mengoptimalkan peran bank sampah dan Tempat Pengolahan Sampah-Reduce Reuse Recycle Terpadu (TPST3R) dalam mengelola sampah plastik;
3. Melakukan upaya *waste to energy* dan *waste to product* salah satunya dengan mendaur ulang sampah plastik menjadi pelet sebagai bahan bakar pembangkit energi, *refuse derived fuel* (RDF) dan bentuk daur ulang lainnya;
4. Menggalai dan membudayakan serta mengkampanyekan kembali potensi kearifan local untuk menggantikan penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari;
5. Melakukan program bersih laut (*coastal clean up*) dengan kerjasama berbagai pemangku kepentingan terkait, baik unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
6. Memulai gerakan (*refuse*) tolak plastik sekali pakai yang dimulai di kantor-kantor pemerintah, dalam setiap rapat atau kegiatan pemerintah harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.



3. Pelet sampah (Gasifier PLN)



Gambar 4.18 Jejaring Inovasi Pelet Sampah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bersama PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung mengembangkan energi baru terbarukan. Penandatanganan MOU langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan GM PLN Wilayah Bangka Belitung dilakukan di Ruang Tanjung Pendam Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 4.19 Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam MOU antara PLN dengan Pemprov Babel Tahun 2019

Proses pembuatan pellet sampah ini merupakan terobosan yang diambil untuk mewujudkan *green energy* di Kepulauan Bangka Belitung sekaligus meminimalkan timbulan sampah yang ada. Proses pembentukan



pellet sampah ini dimulai dengan proses pengeringan selama lebih kurang sepuluh hari diberi bioaktivator dicincang kemudian dijadikan pellet untuk digunakan di *reactor gasifier*.

Dengan inovasi ini akan meminimalkan timbunan sampah yang ada terutama sampah rumah tangga serta mengatasi penumpukan sampah yang tidak tertangani. Selain itu terdapat *Added Value* terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, tidak hanya sisi lingkungan yang menerima manfaatnya namun dari sosial ekonomi masyarakat juga dapat meningkat dengan penjualan pellet sampah yang dibeli oleh PLN.

Diharapkan kegiatan ini terus berlanjut untuk menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi yang mengusung *green energy* tidak hanya PLTGs dari sampah kedepan namun akan ada penggunaan energi baru dan terbarukan tentunya.

Sebagai tindak lanjut MOU antara Gubernur dengan PLN, kegiatan inovasi "Peuyemisasi" sampah menjadi pellet sebagai bahan baku pembakar pembangkit tetap dijalankan pada tahun 2020 dengan dibangunnya pembangkit listrik tenaga sampah di Pulau Tinggi Kabupaten Bangka Selatan dengan kapasitas 16 KW dan membutuhkan pellet sampah. Dengan pola operasi 24 jam, dibutuhkan 400 kg pelet sampah per hari, atau 12.000 kg pelet sampah per bulan, atau 144.000 kg pelet sampah per tahun. Hal ini berpotensi mengurangi timbunan sampah yang ada di masyarakat.



Gambar 4.20 Proses Pembuatan Sampah



Gambar 4.21 Proses Pembuatan Pelet Sampah dan Tindak lanjut MOU

4. Pelatihan Ecobrick dan Eco Enzyme

Ecobrick adalah sebuah inovasi visioner yang dikembangkan sebagai solusi pengolahan limbah plastik. Diambil dari dua kata pembentuknya, eco dan brick, secara sederhana didefinisikan sebagai bata ramah lingkungan. *Ecobrick* sendiri diciptakan oleh Rusel Maier seorang seniman dari Kanada di Filipina. Sangat populer di dunia saat ini dan juga sering dikenal dengan nama-nama seperti Bottle Brick atau Ecoladrillo. Dikembangkan dari material plastik atau sampah plastik, *Ecobrick* ini memiliki sifat dasar dari plastik tersebut yaitu kuat, anti air, dan awet. Manfaat ecobrick diketahui sering menjadi material dasar dalam memproduksi sebuah barang. Mulai dari pembuatan furnitur, perabotan indoor, hingga material pembentuk sebuah bangunan semisal dinding sebuah ruang. Meskipun sederhana bentuknya, *Ecobrick* benar-benar dapat menjadi material substitusi bangunan seperti batu bata merah atau batako.



Gambar 4. 22 Pelatihan Pembuatan Ecobrick Sekolah

5. Coastal Clean UP



Gambar 4. 23 Layout Pelaksanaan Coastal Cleanup

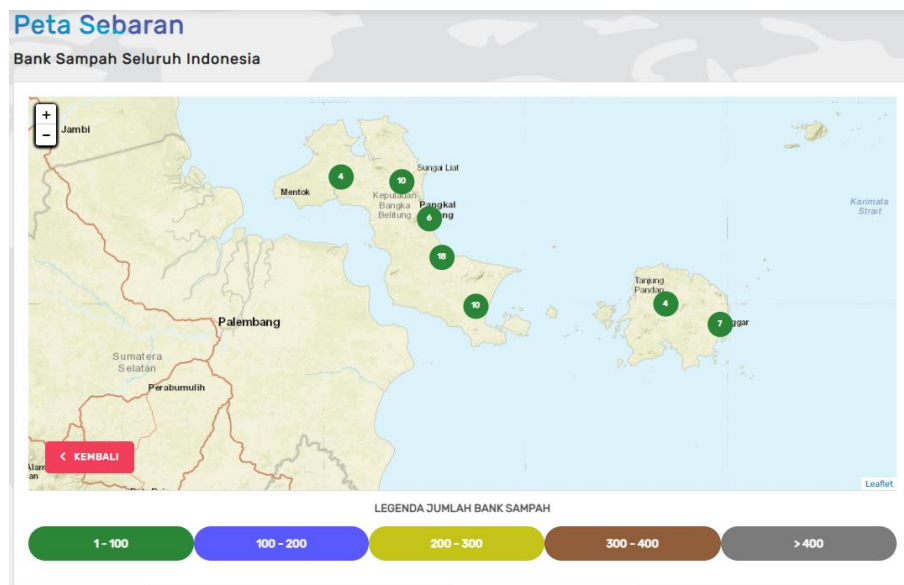


Pada tahun 2023 serangkaian kegiatan *coastal cleanup* dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bentuk komitmen menjaga kebersihan pesisir dan laut. Program ini juga secara tidak langsung memberikan efek terhadap pariwisata di Bangka Belitung.



Gambar 4. 24 Coastal Clean Up

6. Sosialisasi dan Pelatihan Bank Sampah



Gambar 4. 25 Sebaran Bank Sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (aplikasi <https://simba.menlhk.go.id/portal/#peta>)

Berbagai kegiatan dilakukan selama tahun 2023 diantaranya sosialisasi dan pelatihan bank sampah. Untuk meningkatkan keaktifan bank



sampah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 dilaksanakan *Workshop* Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Pengelolaan Sampah Pada Bank sampah) dan Penginputan Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah (SIMBA) dengan peserta yang hadir dari KSM dan Bank Sampah sebanyak 30 kelompok. Adapun tujuan dilaksanakan workshop tersebut adalah untuk menggiatkan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat (pengelolaan sampah pada bank sampah) dan mengenalkan cara penginputan Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah dimana dengan bank sampah rutin menginput sampah yang sudah dikelola ke dalam SIMBA maka data pengurangan sampah akan lebih terukur.

7. Program Adiwiyata Provinsi

Program Adiwiyata merupakan program membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung aktif melakukan pembinaan sekolah adiwiyata. Pada tahun 2023 dilaksanakan pendampingan Gerakan PBLHS dalam upaya meraih penghargaan Adiwiyata. Pendampingan dilakukan oleh tim Pembina Gerakan PBLHS tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembinaan serta koordinasi secara kontinyu dilakukan antara Tim Pembina Gerakan PBLHS Provinsi dengan Tim Pembina Gerakan PBLHS Kabupaten/Kota.

IV.4. INOVASI PLTS ROFTOP DI PERKANTORAN

PLTS Rooftop di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



PLTS Rooftop di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



PLTS Rooftop di Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



PLTS Rooftop di Kantor BAPELITBANGDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



PLTS Rooftop di Kantor PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



PLTS Rooftop di Kantor Kopra dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Gambar 4. 26 Pemasangan PLTS Rooftop di Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Pembangunan PLTS Rooftop ini merupakan terobosan baru di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga dapat menjadi penerapan energi baru dan terbarukan sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap Pembangkit Listrik tenaga uap (PLTU) dan PLTD yang notabennya penghasil limbah dan polusi udara. Pembangunan rooftop PLTS ini sudah dimulai tahun 2020 dan terus dikembangkan terutama di perkantoran Gubernur Bangka Belitung.

IV.4. INOVASI FUEL CARD DAN BBM DARI DINAS ESDM BABEL

Sebagai daerah yang mempunyai karakteristik pertambangan, dan maraknya pertambangan ilegal maka kebutuhan akan BBM terutama solar sangat tinggi selain digunakan untuk kebutuhan transportasi. Di Bangka Belitung sudah menjadi pemandangan umum disaat maraknya pertambangan ilegal, antrian di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) juga terjadi antrian yang begitu Panjang. Berkaca dari fenomena tersebut hadirnya inovasi fuel card dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat memberikan perubahan. Pengaturan distribusi BBM jadi lebih tepat sasaran dan potensi untuk dijual Kembali untuk pertambangan ilegal bisa diminimalkan.

Fuel Card Solar dan BBM dari ESDM Prov Kep. Babel

esdm.babelprov.go.id/app/fuel-card/index.php

SIPKD PEMERINTA... Google Suggested Sites

Fuel Card Solar

BAGI YANG SUDAH MENDAFTAR :

User Name (BN ANDA TANPA SPASI)

Password (NIK PENDAFTAR)

Masukan Kode Di Bawah

J2 IIF

Login

Pendaftaran Baru

Call Center Fuel Card Babel : 0853 6739 5600

SOLAR ADALAH BBM BERSUBSIDI

HANYA UNTUK GOLONGAN YANG TIDAK MAMPU

DILARANG DIPERJUALBELIKAN KEMBALI

Gambar 4. 27 Aplikasi *Feul Card* BBM



BAB V

PENUTUP

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dengan meminimalkan dampak-dampak serta potensi degradasi dan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Dalam proses mewujudkan tujuan tersebut tentunya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan lingkungan hidup di satu sisi tuntutan pemenuhan pertumbuhan ekonomi daerah disisi lain terdapat permasalahan lingkungan hidup dari eksploitasi sumber daya alam dan aktivitas antropogenetik masyarakat terhadap kerusakan lingkungan. Berbagai permasalahan yang terangkum dalam isu prioritas yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dianalisis dengan metode atau kerangka berpikir dengan *Driving Force – Pressure – State – Impact - Response (DPSIR)* dalam Dokumen ini. Terdapat empat isu prioritas yang telah ditetapkan dengan Surat Pernyataan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor: 660/0457 /DLHK dengan isu prioritas sebagai berikut: **(1) Pengelolaan Sampah Yang Belum Optimal, (2) Alih Fungsi Lahan, (3) Penurunan Kualitas Air, (4) Tata Kelola Pertambangan.**

V.1. KESIMPULAN

Isu Lingkungan hidup dan isu Prioritas telah dilakukan proses analisis dengan metodologi DPSIR. Berdasarkan analisis DPSIR terhadap isu-isu prioritas dapat Disimpulkan sebagai berikut:



1. Pengelolaan sampah yang belum optimal

- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi masalah serius di persampahan. Hampir semua TPA sudah mendekati kapasitas optimumnya dan beberapa TPA sudah *Over capacity* diantaranya Kapasitas TPA Parit Enam di Pangkalpinang, sedangkan di Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan juga sudah mendekati kapasitas optimum TPA nya. Timbulan sampah di Bangka Belitung 56,9 % berasal dari rumah tangga, sedangkan Komposisinya 33 % merupakan sampah makanan. Sehingga perlu berbagai upaya pengelolaan sampah domestik rumah tangga.
- Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung persentase wilayah yang terlayani pengelolaan sampah masih menjadi tantangan untuk dilakukan perbaikan. Timbulan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 sebesar 2.133,45 m³/hari. Timbulan sampah terbesar ada di Kota Pangkalpinang sebesar 462 m³/hari dan Kabupaten Bangka 108 m³/hari dengan penduduk yang paling padat. Data tersebut cukup memberi gambaran tentang aktivitas konsumsi di area perkotaan yang relatif lebih tinggi/konsumtif dibandingkan daerah lain.

2. Alih Fungsi Lahan

Peningkatan jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan laju pertumbuhan lahan terbangun. Permintaan akan lahan terbangun yang terus meningkat ini tidak seimbang dengan persediaan lahan yang cenderung terbatas. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu pemicu terjadinya perubahan penutup lahan atau alih fungsi lahan. Kebijakan investasi dan pemenuhan perekonomian juga menjadi faktor terjadinya alih fungsi lahan.

Berdasarkan analisis perubahan penutupan lahan disimpulkan:



- Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami tren penurunan, pada tahun 2023 IKL mengalami kenaikan sebesar 0,81 poin menjadi 40,09.
- Berdasarkan analisis spasial tumpang susun penutup lahan tahun 2021 dan 2022 diketahui bahwa terdapat kenaikan luasan lahan pertambangan sebesar 5.602 hektar, Sepanjang tahun 2016- 2022 terjadi dinamika perubahan luasan perkebunan. Antara tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi peningkatan luasan yang signifikan dari perkebunan yaitu mencapai 40.724 hektar. Sementara itu antara tahun 2020 ke 2021, perkebunan meningkat luasannya hingga mencapai 22.213 hektar. Luasan tambak meningkat secara signifikan terlihat dalam rentang tahun 2020 hingga 2021 dengan kenaikan luasan mencapai 818 hektar.
- Berdasarkan hasil analisis spasial perubahan penutup lahan tahun 2021-2022 dengan pola ruang RTRW tersebut maka diketahui terdapat sekitar 1.204 hektar alih fungsi lahan menjadi permukiman di tahun 2022 yang terjadi di luar pola ruang permukiman
- Penutupan lahan hutan: Terjadi degradasi hutan mangrove ,penurunan terbesar dialami oleh kelas hutan mangrove primer yaitu sebesar 10.858 ha sedangkan penurunan paling kecil dialami oleh kelas hutan lahan kering primer yaitu seluas 45,01 ha. Berdasarkan hasil analisis spasial diketahui bahwa sekitar 9.545,31 ha atau 87,91 % dari penurunan luasan yang terjadi telah berubah menjadi hutan mangrove sekunder.
- Terjadi penurunan kualitas lahan, keanekaragaman hayati serta luasan ekosistem pesisir (mangrove) akibat alih fungsi lahan.
- Lahan Kritis masih cukup tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung total **lahan kritis dan sangat kritis 167.065 Hektar** dengan sebaran lahan kritis hampir di semua Kabupaten/Kota



dengan proporsi lahan kritis di Kabupaten Belitung Timur 38.884 Hektar (23,27 % dari total lahan Kritis), Kabupaten Bangka Selatan 31.232 Hektar (18,69 % dari luas total lahan kritis) , Kabupaten Bangka Tengah 30.948 Hektar (18,52 % dari total lahan kritis), Kabupaten Bangka 24.463 Hektar (14,64 % dari luas total lahan kritis), Kabupaten Belitung 21.919 Hektar (13,12 % dari luas total lahan kritis), Kabupaten Bangka Barat 19.592 Hektar (11,71 % dari luas total) dan Kota Pangkalpinang 96 Hektar (0,06 % dari luas total lahan kritis).

- Deforestasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan hasil alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, pertambangan, permukiman maupun pertanian lahan kering campur semak. Kabupaten Bangka Tengah merupakan wilayah administrasi yang paling banyak mengalami deforestasi hutan dengan luasan sekitar 12.336 hektar disusul oleh Kabupaten Bangka Barat seluas 11.753 hektar; Kabupaten Belitung Timur 11.240 hektar; Kabupaten Bangka Selatan seluas 10.237 hektar; Kabupaten Belitung seluas 10.024 hektar serta Kota Pangkalpinang seluas 220 hektar.
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadikan alih fungsi lahan menjadi prioritas yang harus ditangani. Berbagai aktivitas sebagai bentuk respons dan intervensi pemerintah daerah dilakukan diantaranya: Kebijakan penataan ruang daerah didasarkan pada kesesuaian alokasi ruang RTRW, Pengendalian pemanfaatan ruang dengan membentuk tim penataan ruang daerah dan perizinan pemanfaatan ruang didasarkan pada kesesuaian tata ruang wilayah, penerapan sanksi dan penertiban terhadap pelanggaran tata ruang, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan pada tahun 2023.



3. Penurunan Kualitas Air.

- Pada tahun 2023 Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 57,43, nilai ini menurun sebesar 0,25 poin dari tahun sebelumnya dan masuk dalam kategori sedang. Penurunan nilai IKA menunjukkan bahwa upaya pengelolaan air yang dilakukan selama ini belum cukup optimal.
- Status mutu sungai Batu rusa dan Sungai Buding menunjukkan status cemar ringan hingga cemar sedang (Sungai lintas Kabupaten/Kota yang merupakan kewenangan Provinsi).
- Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 82,57 yang merupakan nilai rerata dari 25 titik sampling, kondisi IKAL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini masih dalam kategori baik.

4. Belum Optimalnya Tata Kelola Pertambangan

Permasalahan tata Kelola pertambangan di Bangka Belitung diantaranya praktik-praktik pertambangan ilegal, kasus korupsi pertambangan yang berakibat buruk terhadap permasalahan sosial, penerimaan negara serta kerusakan Lingkungan yang merupakan dampak dari praktik-praktik lemahnya pengaturan tata Kelola pertambangan yang baik.

Kongkritnya tata Kelola pemanfaatan sumber daya alam dalam hal ini pertambangan layaknya harus dilakukan secara berkelanjutan, bertanggung jawab, dan mengutamakan pelestarian Lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Pada sektor pertambangan, tata Kelola pertambangan yang baik (*good mining practice*) mutlak dilaksanakan sehingga potensi kerusakan Lingkungan dapat diminimalkan dengan dan fungsi pengawasan dijalankan dengan ketat. Partisipatif masyarakat dan berbagai stakeholder diperlukan dalam mewujudkan tata Kelola yang baik dalam pemanfaatan sumber daya alam, didukung dengan keterbukaan informasi publik dan transparansi serta *Good Governance* dijalankan.



V.2. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan data dan analisisnya yang tersaji dalam Dokumen IKPLHD ini, beberapa hal berikut ini menjadi rekomendasi tindak lanjut bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menjaga dan mengatur keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, konkritnya perencanaan, pemanfaatannya harus digunakan untuk keperluan yang strategis. Menjadikan timah menjadi komoditas super strategis perlu didukung oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga dalam pelaksanaan operasionalnya dapat di jalankan dengan regulasi yang baik, transparansi serta efesiensi dan efektifitasnya dapat terukur, mulai dari perencanaan eksplorasi, eksploitasi serta pemanfaatannya untuk pembangunan daerah termasuk pengaturan persetujuan izin lingkungannya serta berbagai regulasi yang lain.
2. Kebijakan penataan ruang, perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang harus diterapkan secara terpadu antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kabupaten/kota yang mempunyai wilayah administratif sehingga pemanfaatan ruang benar-benar didasarkan pada alokasi ruang yang tercantum pada RTRW dan aturan pemanfaatan ruang. Percepatan pengesahan RTRW integrasi perlu dipercepat tentunya dengan sinkronisasi antara Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Jika secara sederhana mensimulasikan perhitungan IKL dengan mengabaikan faktor koreksi kanal gambut maka untuk menaikkan IKL dari 40,10 di tahun 2021 menjadi 43,34 di tahun 2022 sesuai dengan target diatas maka paling tidak dibutuhkan penambahan luasan penutup lahan hutan kurang lebih sebesar 59.000 hektar atau kurang lebih sebesar 98.000 hektar luas RTH atau rehabilitasi hutan dan lahan dalam waktu 1 (satu) tahun, tentunya ini membutuhkan upaya (*effort*) yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk merespons hal tersebut dibutuhkan pendanaan, kebijakan (regulasi), peran aktif



masyarakat, pembenahan tata Kelola baik pertambangan maupun fungsi-fungsi pengawasan dan pengendalian ruang.

4. Pada sektor persampahan, upaya pembatasan dan pengurangan persampahan harus dilakukan secara serempak dan konsisten dengan didukung regulasi yang tepat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mempunyai *blue print* pengelolaan persampahan yang menaungi pengelolaan persampahan kabupaten/kota. Perlu dilaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga dengan intensitas yang lebih sering kepada masyarakat dan pelaku usaha.
5. Penerapan teknologi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, serta mempercepat terwujudnya TPA Regional dan mengatur manajemen pengelolaan TPA Regional. Perlu dilakukan pendekatan dan sosialisasi rutin, baik secara langsung maupun melalui media untuk meningkatkan *acceptability* masyarakat pada keberadaan TPA Regional.
6. Pemberian persetujuan izin lingkungan memperhatikan persetujuan teknis sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021 untuk meminimalkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghitung potensi limbah yang akan dikeluarkan/diemisikan ke lingkungan terutama limbah-limbah outlet IPAL yang masif di Bangka Belitung saat ini yaitu tambak udang.
7. Pengelolaan limbah rumah tangga perlu diterapkan secara menyeluruh menggunakan teknologi tepat guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama di kawasan yang padat penduduk, seperti di kawasan permukiman dan pasar, untuk menjawab tantangan dalam pengembangan wilayah perkotaan.
8. Menciptakan tindakan antisipatif untuk pencegahan kerusakan lahan yang lebih parah. Salah satu upaya yang bisa dilaksanakan adalah dengan mengaplikasikan inovasi-inovasi yang aplikatif untuk merehabilitasi lahan, baik lahan hutan yang mengalami kerusakan



maupun lahan bekas pertambangan tentunya dengan peran aktif pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat.

9. Segera menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat aktivitas pertambangan, terutama pertambangan di wilayah laut yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Perbaikan tata kelola dan manajemen lingkungan terutama pada sektor pertambangan harus terus dilaksanakan. Percepatan hilirisasi produk timah disertai dengan instrumen pasar yang mendukung sangat diperlukan.
10. Diperlukan transformasi pemenuhan ekonomi masyarakat sehingga tidak menggantungkan kepada ekstraksi dan eksplorasi sumber daya alam terutama pertambangan, serta mengembangkan potensi lokal daerah seperti perkebunan dan pariwisata. Kepulauan Bangka Belitung harus mempersiapkan perekonomian yang tidak hanya bertumpu pada pertambangan namun menuju perekonomian yang berbasis industri pengolahan dan jasa berdasarkan potensi daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R. (2022). Permintaan Perumahan di Pangkalpinang Naik Tiap Tahun, Gerus RTH dan Resapan Air. Faktaberita.Co.Id. Diakses pada 7 Agustus 2022.
- Agustika, S. (2022). Listrik di Bangka Sering Padam, GM PLN Bangka Belitung Sebut Ini Penyebabnya. Bangka Pos. Diakses pada 7 Agustus 2022.
- Akib, Muhammad. (2009). Jurnal Media Hukum. Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah. Vol.16 No.3. diakses pada tanggal 23 Juli 2023. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/15378/7483>
- Aliansi Zero Waste Indonesia, 2023, <https://aliansizerowaste.id/2023/11/23/bahaya-di-balik-menumpuknya-gas-metana-di-tpa/> diakses pada tanggal 24 Juni 2024
- Aleva, G.J.J., Bon, E.H., Nossin, J.J., Sluiter, W.J. (1973). A Contribution to the Geology of Part of the Indonesia Tinbelt: the Sea Areas Between Singkep and Bangka Islands and Around the Karimata Islands. Geol. Soc. Malaysia, Bulletin 6, July 1973.
- Anih Sri Suryani. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang) The Significance of Waste Bank in Waste Management Effectiveness (A Case Study of MalangWaste Bank), Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta, Indonesia.
- Anindita Nur Jannah Mega. (2023). Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Maret 2022.
- Antonella, P. (2011). Air Quality indices: A Review. Springer Science and Business. Diakses pada 17 Juli 2023.
- Anugrah, F.N. (2021). Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah dalam Prespektif Otonomi Daerah (*The Authority of Environmental Governance by Regional Governments in the Perspective of Regional Autonomy*). Jendela Informasi dan Gagasan Hukum,p-ISSN No.2337-4667, e-ISSN NO.1359957835.





- Jurnal WASAKA HUKUM Vol.9 No.2, Februari 2021. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/43/40>
- Ardana, P. D. H., Soriarta, I. K., & Harumaja, N. (2023). Evaluasi Kinerja Saluran Drainase Pada Kawasan Permukiman Mekar Jaya, Desa Pemogan, Denpasar Selatan. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 27(1), 28. <https://doi.org/10.24843/JITS.2023.v27.i01.p04>
- Arif, E. (2023). Bangka Belitung Pegang Komitmen, Duduki Peringkat Tertinggi Nasional PPK23 KK. BKPSDMD Kep. Bangka Belitung. <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/bangka-belitung-pegang-komitmen-duduki-peringkat-tertinggi-nasional-ppk23-kk>.
- Asmarhansyah. (2015). Charracteristic of Physical and Chemical Properties of Former-Tin Mining Areas for Crop Production in Bangka Island. *Prosiding Nasional Sistem Informasi dan Pemetaan Sumber Daya Lahan Mendukung Swaseembada Pangan*, 181-190.
- Badan Meteorologi dan Geofisika. (2023). Ekstrem Perubahan Iklim. Retrieved from Badan Meteorologi dan Geofisika: <https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=ekstrem-perubahan-iklim>
- BPS. (2002). Hasil Sensus Penduduk 2000 (Issue 26). Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2010). Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010. In *Badan Pusat Statistik*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/>
- BPS. (2018). Environment Indifferent Behaviour Index Report of Indonesia 2018. In *BPS-Statistics Indonesia: Vol. ISBN: 978-*.
- BPS. (2018b). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2019). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2020). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka. Badan Pusat statistik
- BPS. (2021a). Berita Resmi Statistik: Hasil Sensus Penduduk 2020. In *bps.go.id* (Issue 27). Badan Pusat Statistik. <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/336/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-papua-tahun-2017.html>
- BPS. (2021b). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik.





- BPS. (2022). Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun), 2019-2021. Badan Pusat Statistik. <https://babel.bps.go.id/indicator/26/563/1/rata-rata-lama-sekolah.html>
- BPS. (2022a). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 (Issue 62).
- BPS. (2022b). Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa). Babel.Bps.Go.Id. babel.bps.go.id/indicator/23/573/1/jumlah-penduduk-miskin.html
- BPS. (2022c). Produksi Beras Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Badan Pusat Statistik. <https://babel.bps.go.id/indicator/53/1101/1/produksi-beras-provinsi-kepulauan-bangka-belitung.html>
- BPS. (2022d). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2022e). Rata-rata Konsumsi Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Padi-Padian Per Kabupaten/kota (Satuan Komoditas). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/5/2094/1/rata-rata-konsumsi-perkapita-seminggu-menurut-kelompok-padi-padian-per-kabupaten-kota.html>
- BPS. (2022f). *Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun), 2019-2021*. Badan Pusat Statistik. <https://babel.bps.go.id/indicator/26/563/1/rata-rata-lama-sekolah.html>
- BPS. (2023). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2023.
- BPS. (2024). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2024. In *Badan Pusat Statistik*. Badan Pusat Statistik. <https://indonesia.go.id/province/kepulauan-bangka-belitung>
- Catanese, A. J., & Snyder, J. C. (1988). *Urban Planning* (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
- Chandra, B. (2007). Pengantar Kesehatan Lingkungan. Penerbit Buku Kedokteran. Jakarta, Indonesia.
- Chazienul, Ulum, M., Ngindana, R., (2017). Environmental Governance, Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup. ISBN: 978-602-432-187-1. UB Press. Malang, Indonesia.
- Cholillah, Jamilah. (2017). Pengelolaan Hutan Berbasis Budaya Lokal Di Dusun Pejam Kabupaten Bangka. Jurnal Society Vol.V No.1, Juni 2017.





- Diersing, N. (2009). Water Quality : Frequently Asked Questions. Florida Keys National Marine Sanctuary. Key West. Florida.
- Disperkim Pangkalpinang. (2022). Pelaksanaan Rapat Pleno Pengurangan Luasan Kumuh Di Kota Pangkalpinang. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pangkalpinang. <https://disperkim.pangkalpinangkota.go.id/pelaksanaan-rapat-pleno-pengurangan-luasan-kumuh-di-kota-pangkalpinang/>
- DLHK. (2024). Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2045. In Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepulauan Bangka Belitung. DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Ecoton. (2022). Press Release Perairan Tercemar Mikroplastik Bangka Barat Darurat Pengelolaan Sampah Plastik. Ecoton.or.id. Diakses tanggal 27 Juli 2023.
- EGC. (2007), h. 143. Permintaan Perumahan di Pangkalpinang Naik Tiap Tahun, Gerus RTH dan Resapan Air. Faktaberita.Co.Id. Diakses pada 7 Agustus 2022. Agustika, S. (2022). Listrik di Bangka Sering Padam, GM PLN Bangka Belitung Sebut Ini Penyebabnya. Bangka Pos. Diakses pada 7 Agustus 2022.
- Fandari, A., Daryanto, A., & Suprayitno, G. (2014). Pengembangan Energi Panas Bumi yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Semesta Teknik*, 17(1), 68–82.
- FAO. (2009). Lesson 1 Establishment of a Food Security Policy Framework. In *Food Security Policies Formulation and Implementation*. European Union.
- Fauzi, A. (2004). Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamuna, B., *et al.* (2018). Kajian Kualitas Air Laut dan Indeks Pencemaran Berdasarkan Parameter Fisika - Kimia Di Perairan Distrik Depapre, Jayapura. *Jurnal Ilmu LIngkungan*. 16(1): 35-43.
- Hasanah, A. D. (2024). *Pemkot Pangkalpinang Targetkan 2024 Nihil Kawasan Kumuh, Masih 2 Kelurahan yang Masuk Kawasan Kumuh*. BangkaPos.Com. <https://bangka.tribunnews.com/2024/04/25/pemkot-pangkalpinang-targetkan-2024-nihil-kawasan-kumuh-masih-2->





[kelurahan-yang-masuk-kawasan-kumuh](#)

Hisyam, E. S., Shodiq, F. (2019). Kajian Erosi Dan Sedimentasi Pada Daerah Aliran Sungai Deniang Kabupaten Bangka. *Fropil*. 7 (1).

Horvat, M., Noll, M., Riegler, J., Brink, M., Schylberg, K., Wu, C., Liu, Y., Li, Y., Zhang, J., & Zhu, P. (2018). *Sustainable Urban Development* (Issue May).

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=p3ZODwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=tata+kelola+lingkungan+hidup&ots=tc8pj4VzIL&sig=b gISl_OZjvvz8-w7vRnzHop2yGo&redir_esc=y#v=onepage&q=tata%20kelola%20lingkungan%20hidup&f=false

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9W_sDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR2&dq=tata+kelola+lingkungan+hidup&ots=O8WGVQCsJ4&sig=wpDQ5hGm55pZSDp-f0BAz2Vs4PY&redir_esc=y#v=onepage&q=tata%20kelola%20lingkungan%20hidup&f=false

https://regional.kompas.com/read/2022/12/06/171106678/tambak-udang-di-bangka-belitung-diduga-cemari-pantai?page=all#google_vignette

<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7362160/operasional-tambak-udang-di-basel-yang-cemari-pantai-jibur-disetop>

<https://indonesiabaik.id/infografis/berapa-biaya-pengeluaranmu-dalam-sebulan#:~:text=Rata%2Drata%20pengeluaran%20per%20kapita,s ebesar%20Rp740.588%20per%20bulan> diakses tanggal 24 Juni 2024

<https://www.news-medical.net/health/Water-Borne-Diseases.aspx>

<https://www.universaleco.id/blog/detail/sumber-dan-karakteristik-limbah-domestik/285>

<https://babel.antaranews.com/berita/332820/bps-angka-kelahiran-bayi-di-babel-turun-dratis> . BPS: Angka Kelahiran Bayi di Babel Turun Dratis. Diakses tanggal 21 Juli 2023.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=p3ZODwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=tata+kelola+lingkungan+hidup&ots=tc8pj4VzIL&sig=b gISl_OZjvvz8-w7vRnzHop2yGo&redir_esc=y#v=onepage&q=tata%20kelola%20lingkungan%20hidup&f=false





https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9W_sDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR2&dq=tata+kelola+lingkungan+hidup&ots=O8WGVQCsJ4&sig=wpDQ5hGm55pZSDp-f0BAz2Vs4PY&redir_esc=y#v=onepage&q=tata%20kelola%20lingkungan%20hidup&f=false

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2022). Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. diakses pada tanggal 23 20 Juli 2023. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Kepulauan-Bangka-Belitung-Februari-2022.pdf>

Kaspi, S. R. Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah dengan Pemanfaatan Citra Satelit Resolusi Tinggi (Studi Kasus: Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas) [Internet] [skripsi]. ITN Malang; (2019) [dikutip 20 September 2020]. Tersedia pada: <http://eprints.itn.ac.id/1508/>

Kementerian Pertanian. (2022). *Statistik Ketahanan Pangan Tahun 2022* (Vol. 2, Issue 1). Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Khotimah, S. K., Nasruddin. (2022). Pencemaran Sungai Martapura Akibat Perilaku Masyarakat Membuang Sampah Di Sungai, Limbah Industri Dan Pertambangan (Human Behavior Environmental Analysis). Jurnal Penelitian Multi Disiplin. 1 (2).

Kustiwan, I. (2014). Pengertian Dasar dan Karakteristik Kota, Perkotaan, dan Perencanaan Kota. In *Modul Perencanaan Kota* (p. 535). Universitas Terbuka. <http://repository.ut.ac.id/3999/1/ADPU4433-M1.pdf>

Lestari, R. I., Ramadhani, R., Sherawali., Yudha, A. T. (2021). Air dan Dampak Kelangkaannya Bagi Perekonomian Masyarakat Urban: Studi Pustaka Pulau Jawa. *OECONOMICUS Journal of Economics*. 6 (1).

Lucie. (2005). <http://dinsos.magelangkota.go.id/penyuluhan-sosial-sebuah-strategi-membangun-komunikasi-informasi-motivasi-edukasi/>, 2022

Malgorzata, K., *et.al.* (2009). Air Quality Index and Its Significance in Environmental Health Risk Communication. Researchgate.net. Diakses pada 7 Juli 2023.





- Margiyono, *et al.* (2019). Kerugian Ekologis Dalam Pembangunan Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. 10 (1).
- Marlianto, C. (2022). *Baru Tercapai 11 Persen dari Target, RTH Jadi PR Kota Pangkalpinang*. Bangka Pos.
<https://bangka.tribunnews.com/2022/08/09/baru-tercapai-11-persen-dari-target-rth-jadi-pr-kota-pangkalpinang?page=all>
- Masykur, H. Z., Amin, B., Jasril., Husein, Siregar, S. H. (2018). Analisis Status Mutu Air Sungai Berdasarkan Metode STORET Sebagai Pengendalian Kualitas Lingkungan (Studi Kasus: Dua Aliran Sungai di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau). *Dinamika Lingkungan Indonesia*. 5 (2).
- Meisha, A. R. (2022). Valuasi Ekonomi Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Bobosan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Universitas Jenderal Soedirman.
- Merliyana. (2017). Analisis Status Pencemaran Air Sungai Dengan Makrobentos Sebagai Bioindikator di Aliran Sungai Sumur Putri Teluk Betung. Skripsi. UIN Raden Intan. Lampung : Indonesia.
- Michalina, D., Mederly, P., Diefenbacher, H., & Held, B. (2021). Sustainable Urban Development: A Review of Urban Sustainability Indicator Frameworks. *Sustainability (Switzerland)*, 13(16), 1–20.
<https://doi.org/10.3390/su13169348>
- Millennium Ecosystem Assessment (MEA). (2005). *Ecosystems and Human Well- Being: Synthesis*, Island Press, Washington (USA).
- Miller, G. T., & Spoolman, S. E. (2016). *Environmental Science* (Fifteenth). Cengage Learning.
- Muhsinin, N. (2019). Pengolahan Air Limbah Domestik Secara Fitoremediasi Sistem Constructed Wetland Dengan Tanaman *Pandanus Amaryllifolius* Dan *Azolla Microphilla*. Tesis. Universitas Gajahmada. Yogyakarta : Indonesia.
- Mujiburrahmad, Hamid, A. H., Nufus, T. (2021). Pola Migrasi dan Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Migrasi Penduduk di Kecamatan Padang Tiji. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 10. (03).
- Muryanti. (2022). Masyarakat Transisi : Meleburnya Batas-Batas Desa Kota, Yogyakarta, Bursa Ilmu.





- Nurulwahida, Siti. (2020). Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan Model Pentahelix Dalam Pengembangan Wisata Haritage Kajoetangan Di Kota Malang. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang. <https://eprints.umm.ac.id/59661/>
- Neha, Khanna. (2000). Measuring Environmental Quality : An Index of Pollution. Elsevier Pub. Diakses pada 20 Juli 2023.
- Oesterwind, D., Rau, A., Zaik, A. (2016). Drivers and Pressures e Untangling The Terms Commonly Used In Marine Science and Policy. Journal of Environmental Management. 181.
- Parris, K. M. (2016). *Ecology of Urban Environments*. John Wiley & Sons.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2019-2050, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. (2016). Pemerintah Republik Indonesia.
- Prajati, G., Damanhuri, T. P., & Rahardyan, B. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Dan Kependudukan Terhadap Timbulan Sampah Di Ibu Kota Provinsi Jawa Dan Sumatera. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 21(1), 39–47. <https://doi.org/10.5614/jtl.2015.21.1.5>
- Priyanta, M. (2021). Implikasi Konsep Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan. *Jurnal Wawasan Yuridika*.
- Pujiati, S., Pertiwi, A., Silfia, C. C., Ibrahim, D. M., & Nur Hafida, S. H. (2020). Analisis Ketersediaan, Keterjangkauan Dan Pemanfaatan Pangan Dalam Mendukung Tercapainya Ketahanan Pangan Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 16(2), 123–133. <https://doi.org/10.20956/jsep.v16i2.10493>
- PUPRPRKP. (2023). Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.





- Puspitasari. D. (2020). Pengaruh Tata Kelola Publik, Pendapatan Asli Daerah dan Total Aset Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. AL Tijarah. Vol.6. No.1. (2020) diakses pada 23 Juli 2023.
- Ramos, T. B., Darouich, H., Gonçalves, M. C., Brito, D., Branco, M. A. C., Martins, J. C., Fernandes, M. L., Pires, F. P., Morais, M., & Neves, R. (2018). An Integrated Analysis of The Eutrophication Process in The Enxoé Reservoir within The DPSIR Framework. *Water (Switzerland)*, 10(11), 1–20. <https://doi.org/10.3390/w10111576>
- Richard. C., Flagan., *et al.* (1988). Fundamentals Of Air Pollution Engineering, Pretince Hall, New Jersey, USA.
- Rohmawati, Y dan Kustomo. (2020). Analisis Kualitas Air pada Reservoir PDAM Kota Semarang Menggunakan Uji Parameter Fisika, Kimia, dan Mikrobiologi, serta Dikombinasikan dengan Analisis Kemometri. *Walisono Journal of Chemistry* Vol. 3 (2).
- Sabri, F. (2017). Kajian Erosi & Sedimentasi Akibat Perubahan Tataguna Lahan Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus DAS Betung Sub DAS Pebari-Jelitik Kabupaten Bangka). Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Secara Terpadu 2017.
- Saragih, G. M., Hadrah., Prayoga, Ekki. (2022). Analisis Pengaruh Limbah Domestik terhadap Kualitas Air Anak Sungai Asam. *Jurnal Daur Lingkungan*. 5 (2).
- Sari, N. I. (2013). Konsumsi Air Untuk Industri Dalam Negeri Tidak Wajar. *Merdeka.com*. Diakses pada 21 Juli 2023.
- Sari, E. F., Zulfansyah., Rimrawarman. (2011). Konsumsi Air Dan Potensi Penghematan Pada Proses Produksi CPO PT. Perkebunan Nusantara V Pabrik CPO Sei Galuh. Prosiding SNTK TOPI.
- Sasongko, E. B., Widyastuti, E., Priyono, R. E. (2014). Kajian Kualitas Air Dan Penggunaan Sumur Gali Oleh Masyarakat Di Sekitar Sungai Kaliyasa Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. 12 (2).
- "Sejarah Dunia Memerangi Perubahan Iklim" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151128130323-134-94617/sejarah-dunia-memerangi-perubahan-iklim>
- SDI. (2023). Data Elemen Periode 2023. <https://sdi.babelprov.go.id/sektoral/elemen/periode/61C2802CDB99E/2023#>





- Septiana, F. E., Alnavis, N. B., Gustia, R., Wirawan, R. R., Putri, N. P., Hasibuan, H. S., & Tambunan, R. P. (2020). Dampak Perubahan Tutupan Lahan Pada Sistem Hidrologi Di Jakarta. *Majalah Ilmiah Globe*, 22(1), 51. <https://doi.org/10.24895/mig.2020.22-1.1150>
- Setiadewi, N., *et al.* (2024). Kelimpahan Mikroplastik pada Air Limbah Domestik dan Penyisihannya di IPAL Bojongsoang, Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. 22 (2).
- Setioningrum, R. N. K., Sulistyorini, L., Rahayu, W. I. (2020). Gambaran Kualitas Air Bersih Kawasan Domestik Di Jawa Timur Pada Tahun 2019. *Jurnal Ikesma*. 16 (2).
- Setyowati, R.D. (2011). Studi Literatur Pengaruh Penggunaan Lahan Terhadap Kualitas Air. *Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik - Sistem* , 12 (1).
- SignSmart. (2022a). *Emisi Sektor Energi*. KLHK. <https://signsmart.menlhk.go.id/v2.1/app/chart/energy>
- SignSmart. (2022b). *Emisi Sektor Limbah*. KLHK. <https://signsmart.menlhk.go.id/v2.1/app/chart/waste>
- SIPSN. (2022). *Komposisi Sampah*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>
- SIPSN. (2023a). *Komposisi Sampah*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>
- SIPSN. (2023b). *Timbulan Sampah*. Sipsn.Menlhk.Go.Id. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>
- Soegianto, A. (2010). *Ekologi Perairan Tawar*. Pusat Penerbitan dan percetakan AUP. Jakarta : Indonesia.
- Sosa-Rodriguez, F. S., Tapia Silva, F. O., & Alvarado Arriaga, V. Y. (2020). Urban Water and Sanitation. In *Sustainable Cities and Communities*. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham.
- Suheri, A., Kusmana, C., Purwanto, M.Y., Setiawan, Y. (2019). Model Prediksi Kebutuhan Air Bersih Berdasarkan Jumlah Penduduk di Kawasan Perkotaan Sentul City. *Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan*. 04 (03).
- Sulaiman, Asanudin. (2020). Analisis Peranan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai, *Jurnal Akuntanika*, ISSN 2407 –





1072. Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2020
<file:///C:/Users/HUAWEI/Downloads/140-258-1-SM.pdf>

Supangat, A.B. (2008). Pengaruh Berbagai Penggunaan Lahan Terhadap Kualitas Air Sungai Di Kawasan Hutan Pinus Di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*. V (3).

Suriah, D. (2022, Agustus 8). *Pemanfaatan Kompos Blok dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan*. Retrieved from dlhk.babelprov.go.id.

Suwignyo, N., Firdaus, R., Tono, Andayani, D. W., Hidayat, A., Maheswari, L. D., & Ulfa, N. A. (2022). Indeks Ketahanan Pangan. In *Badan Pangan Nasional*. [https://badanpangan.go.id/storage/app/media/2023/Buku Digital/Buku Indeks Ketahanan Pangan 2022 Signed.pdf](https://badanpangan.go.id/storage/app/media/2023/Buku%20Digital/Buku%20Indeks%20Ketahanan%20Pangan%202022%20Signed.pdf)

Syafaat, M. (2022). Pengaruh Lingkungan Terhadap Perilaku Satwa Liar. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fx3jb>, diakses 28 Juni 2024.

Syari, I. A., Nugraha, M. A., & Hudatwi, M. (2022, April). Dampak Penambangan Timah di Laut Terhadap Ekosistem Terumbu Karang di Pulau Kemuja dan Karang Malang, Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Journal of Tropica Marne Science*, 63-69.

Syaukat Y., Niella M. (2012). Estimasi Nilai Kerugian Ekonomi akibat Pencemaran Air Tanah : Studi kasus di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. *Resources and Environmental Economics*. 247.

Tim Riskesdas 2018. (2018). *Laporan Riskesdas 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.

Ulfa, Farida. (2008). Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah: Studi Pada Pengelolaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Ulfah, A., Purwiyanto A.I.S., Diansyah G. (2017). Penentuan Tingkat Pencemaran Organik Berdasarkan Konsentrasi Bod (*Biological Oxygen Demand*), COD (*Chemical Oxygen Demand*) Dan Tom (*Total Organic Matter*) Di Muara Sungai Lumpur Ogan Komering Ilir. *Maspari Journal*. 9(7).





Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Pemerintah Republik Indonesia.

UNEP. 2023. diakses tanggal 11 Juli 2023. <https://www.unep.org/explore-topics/environmental-governance/about-environmental-governance/environmental-governance>

WHO. (2011). *Human Development Index*. World Health Organization. <https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/human-development-index#:~:text=The HDI is a summary composite measure of a country's,knowledge and standard of living.>

Wicaksana, D. A. (2020). Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi di Sektor Lingkungan Hidup. <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/Kerugian-ekologis DAW.pdf>. Diakses pada 27 Junim2024.

World Meteorological Organization. (2023, January 12). *Past eight years confirmed to be the eight warmest on record*. Retrieved from <https://public.wmo.int/: https://public.wmo.int/en/media/press-release/past-eight-years-confirmed-be-eight-warmest-record>

Yasril, Yazid1)., Nur, Alhidayatillah. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan. Jurnal RISALAH, Vol. 28, No. 1, Juni 2017: 1-9 diakses pada tanggal 23 Juli 2023. <https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/risalah/article/view/5538/3238>

Yuliansyah. (2021). Analysis of The Human Development Index (HDI) in Indonesia. *Cross-Border Journal of Business Management*, 1(2), 244–256.

Živković, J. (2020). Urban Form and Function. In *Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals*. Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-95885-9_78

Zulfan, Nahrudin. (2018). Isu-Isu Strategis Permasalahan Lingkungan Hidup. <file:///C:/Users/HUAWEI/Downloads/ISU-ISU%20STRATEGIS%20PERMASALAHAN%20LINGKUNGAN%20HIDUP.pdf>



LAMPIRAN

PENGOLAHAN DATA ISU



Isu lingkungan hidup daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 diidentifikasi dari hasil analisis yang dilakukan oleh Tim Penulis menggunakan pendekatan DPSIR. Hasil identifikasi tersebut kemudian dibahas bersama secara partisipatif dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen IKPLHD yang komponennya terdiri atas perwakilan dari beberapa perangkat daerah yang terkait, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perwakilan perguruan tinggi (akademisi).

Selanjutnya, daftar isu hasil FGD dinilai menggunakan skala dengan rentang nilai 1–10. Semakin besar nilai yang diberikan, maka isu tersebut semakin diprioritaskan. Penilaian dilakukan oleh responden yang berasal dari berbagai instansi terkait, dengan menggunakan fasilitas *google form* (https://bit.ly/ISU_IKPLHD2024). Kriteria yang digunakan untuk pertimbangan saat dilakukan penilaian adalah:

1. *Urgency* (isu yang dinilai mendesak untuk segera diselesaikan atau ditangani),
2. *Seriousness* (isu yang dinilai menimbulkan dampak serius dan membahayakan),
3. *Growth* (isu yang dinilai terus berkembang dan sulit dicegah),
4. *Rationally* (isu yang dinilai bersifat rasional untuk diselesaikan dengan waktu dan sumber daya yang tersedia).

Daftar isu hasil FGD hasil perumusan sesuai dengan kriteria di atas terdiri atas isu-isu lingkungan hidup yang selanjutnya dikerucutkan sebagai berikut:

1. Alih Fungsi Lahan,
2. Erosi Dan Sedimentasi,
3. Penurunan Kualitas Air,
4. Peningkatan Konsumsi Energi Fosil,
5. Penurunan Kualitas Udara,
6. Bencana Akibat Cuaca Ekstrem (Banjir, Angin Kencang/Puting Beliung),
7. Pengelolaan Sampah Belum Optimal,
8. Masalah Ketahanan Pangan,
9. Tata Kelola Pertambangan,
10. Degradasi Ekosistem Pesisir Dan Laut,
11. Pengelolaan LB3 Belum Optimal

PENARIKAN DAN PERUMUSAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN

B I U G T

PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

Image title



NAMA *

Short answer text

EMAIL *

Short answer text

INSTANSI *

Short answer text

ISU PRIORITAS 1 BESERTA LOKUSNYA *

Long answer text

ISU PRIORITAS 2 BESERTA LOKUSNYA *

Long answer text

ISU PRIORITAS 3 BESERTA LOKUSNYA *

Long answer text

ISU PRIORITAS 4 BESERTA LOKUSNYA *

Long answer text

ISU PRIORITAS 5 BESERTA LOKUSNYA *

Long answer text

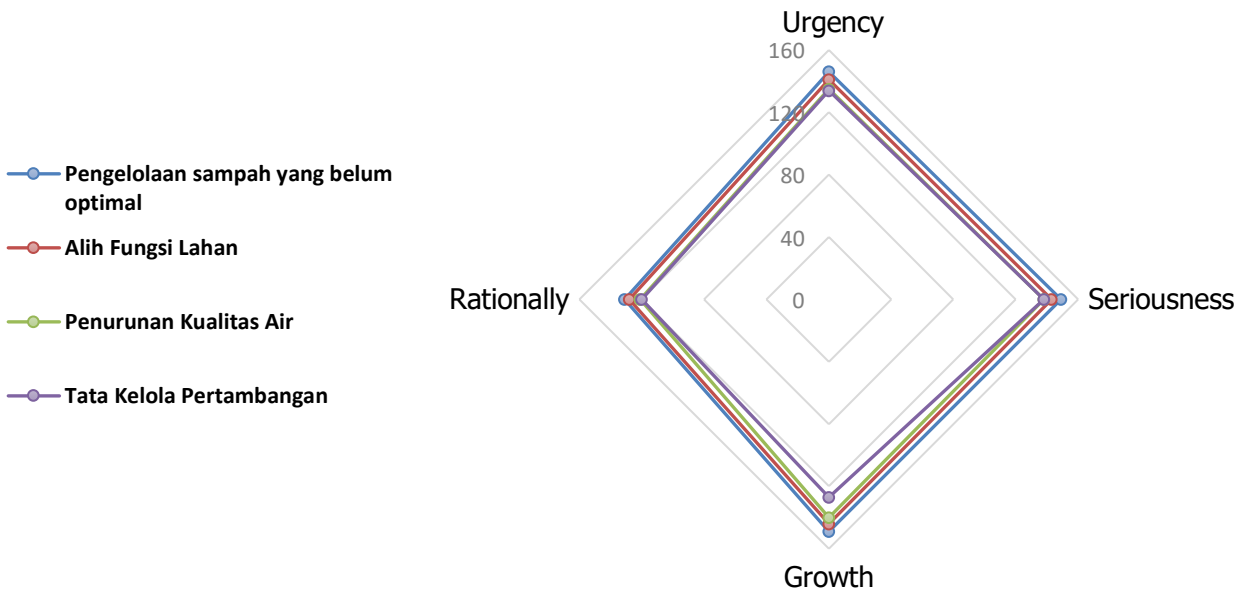
Rekapitulasi Nilai Isu Lingkungan Hidup

Isu Lingkungan Hidup	Total Skor				Total	Peringkat Prioritas
	<i>Urgency</i>	<i>Seriousness</i>	<i>Growth</i>	<i>Rationally</i>		
Pengelolaan sampah yang belum optimal	146	149	149	131	575	1
Alih Fungsi Lahan	141	143	144	128	556	2
Penurunan Kualitas Air	135	138	140	121	534	3
Tata Kelola Pertambangan	134	138	127	120	519	4
Erosi dan Sedimentasi	119	116	133	119	487	5
Bencana	117	115	135	119	486	6
Degradasi Ekosistem Pesisir dan Laut	110	110	121	108	449	7
Masalah Ketahanan Pangan	105	112	109	113	439	8
Pengelolaan LB3 Belum Optimal	107	108	118	104	437	9
Peningkatan konsumsi energi fosil	105	114	116	99	434	10
Penurunan kualitas udara	100	100	120	102	422	11

Dari hasil diskusi, Kelompok Kerja menyetujui empat isu lingkungan hidup daerah sesuai urutan prioritasnya yang akan diangkat pada penyusunan Dokumen IKPLHD tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- 1. Pengelolaan sampah yang belum optimal,**
- 2. Alih fungsi lahan,**
- 3. Penurunan kualitas air,**
- 4. *Tata kelola pertambangan***

Perbandingan skala hasil penilaian keempat isu tersebut berdasarkan empat kriteria yang digunakan disajikan pada gambar berikut.



LAMPIRAN



TABEL DATA ALAM DIKPLHD





Tabel - 1 Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2023

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kawasan Lindung	Kawasan Lindung terhadap Kawasan Bawahannya	1. Kawasan Hutan Lindung		185.885	168.897	1.262	14.259	1.468
		2. Kawasan Bergambut						
		3. Kawasan Resapan Air						
	Kawasan Perlindungan Setempat	1. Sempadan Pantai		1.850	1.021	5	42	782
		2. Sempadan Sungai						
		3. Kawasan Sekitar Danau						
		4. Ruang Terbuka Hijau						
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	1. Kawasan Suaka Alam		39.658	34.912	120	1.665	2.961
		2. Kawasan Suaka Laut dan Perairannya						
		3. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut						
		4. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut						
		5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau						
		6. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut						
		7. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut						
		8. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan						
	Kawasan Rawan Bencana	1. Kawasan Rawan Tanah Longsor	Kategori ketentuan khusus (ketsus)	1.423.950	1.273.219	51.402	87.591	11.518



Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kawasan Lindung Geologi	2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang						
		3. Kawasan Rawan Banjir						
		1. Kawasan Cagar Alam	i. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	2.622	2.249	5	132	235
			ii. Kawasan Keunikan Bentang Alam					
			iii. Kawasan Keunikan Proses Geologi					
		2. Kawasan Rawan Bencana	i. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi					
			ii. Kawasan Rawan Gempa Bumi					
			iii. Kawasan Rawan Gerakan Tanah					
			iv. Kawasan yang Terletak di Zona Patahan Aktif					
			v. Kawasan Rawan Tsunami					
			vi. Kawasan Rawan Abrasi					
			vii. Kawasan Rawan Gas Beracun					
		3. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah	i. Kawasan Imbuhan Air Tanah					
			ii. Sempadan Mata Air					
		1. Cagar Biosfir		0,00				

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kawasan Lindung Lainnya	2. Ramsar		0,00				
		3. Taman Buru		0,00				
		4. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah		0,00				
		5. Kawasan Pengungsian Satwa		0,00				
		6. Terumbu Karang		0,00				
		7. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi		0,00				
		8. Badan Air		3.047	278	47	48	2.673
		9. Kawasan Ekosistem Mangrove		16.933	16.116	141	474	202
Kawasan Budidaya				1.421.495	1.202.131	50.648	155.339	5.948

Sumber :

IGT Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044- DPUPRPRKP Prov Kep Babel; IGT Penutup Lahan Tahun 2022 - BPKHTL Wilayah XIII, data diolah 2024

Keterangan : Diisi dengan berdasarkan SK versi terbaru (SK RTRW)



Tabel - 2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2023

No.	Kabupaten/	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	BANGKA	43.203	1.123	163.949	55.953	25.162	3.427
2	BANGKA BARAT	33.603	1.423	148.155	55.066	35.435	1.531
3	BANGKA SELATAN	28.712	8.289	231.225	26.461	38.015	4.344
4	BANGKA TENGAH	34.217	61	110.973	39.697	23.041	516
5	BELITUNG	32.904	143	94.224	44.03	40.965	825
6	BELITUNG TIMUR	48.005	730	88.109	53.224	44.917	5.200
7	KOTA PANGKAL PINANG	5.960,4	0	3.355	5	574	497
	JUMLAH	226.604	11.769	839.991	274.434	208.110	16.340

Sumber data: IGT Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044- DPUPRPRKP Prov Kep Babel; IGT Penutup Lahan Tahun 2022 - BPKHTL Wilayah XIII, data diolah



Tabel-2. A. Perubahan Penutup Lahan Bervegetasi pada Tahun 2015 Menjadi Penutup Lahan Non Vegetasi di Tahun 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2022

Nama Penutup Lahan	Luas (ha)	Stok Karbon (ton C/ha)	Total Stok Karbon (Ton C)	Emisi Karbon (Ton CO ₂)
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	111	30	3,335	12,230
Total	111	30	3,335	12,230

Sumber: Peta Penutup Lahan Skala 1:250.000, BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, SK 6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA/10/2021 BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang

Tabel – 2. B. Perubahan PL vegetasi di tahun 2015 menjadi PL Lahan Terbuka di tahun 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2022

Nama Penutup Lahan	Luas (ha)	Stok Karbon (ton C/ha)	Total Stok Karbon (Ton C)	Emisi Karbon (Ton CO ₂)
Belukar	1,948	30	58,427	214,231
Belukar Rawa	442	30	13,259	48,616
Hutan Mangrove	158	227	35,924	131,723
Hutan Mangrove Sekunder	196	53	10,396	38,120
Hutan Rawa Primer	26	110	2,839	10,410
Hutan Rawa Sekunder	813	76	61,562	225,726
Hutan Sekunder	1,512	91	137,784	505,208
Pemukiman	58	4	233	856
Perkebunan	77	63	4,826	17,695
PLK	14	10	137	502
PLKCS	1,524	30	45,730	167,676
Savana	99	4	395	1,449
Total	6,867	729	371,512	1,362,211

Sumber: Peta Penutup Lahan Skala 1:250.000, BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, SK 6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA/10/2021 BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang



Tabel – 2. C. Perubahan PL vegetasi di tahun 2015 menjadi PL Permukiman di tahun 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2022

Nama Penutup Lahan	Luas (ha)	Stok Karbon (ton C/ha)	Total Stok Karbon (Ton C)	Emisi Karbon (Ton CO ₂)
Belukar	1,097	30	32,898	120,625
Belukar Rawa	126	30	3,776	13,845
Hutan Mangrove	34	227	7,630	27,977
Hutan Mangrove Sekunder	50	53	2,632	9,651
Hutan Sekunder	47	91	4,254	15,599
Pemukiman	26,316	4	105,265	385,973
Perkebunan	216	63	13,605	49,885
Pertanian Lahan Kering	3,817	10	38,169	139,953
PLKCS	7,284	30	218,506	801,190
Savana	75	4	300	1,100
Total	39,060	542	427,036	1,565,799

Sumber: Peta Penutup Lahan Skala 1:250.000, BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, SK 6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA/10/2021 BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang



Tabel – 2. D. Perubahan PL vegetasi di tahun 2015 menjadi PL Pertambangan di tahun 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2021

Nama Penutup Lahan	Luas (ha)	Stok Karbon (ton C/ha)	Total Stok Karbon (Ton C)	Emisi Karbon (Ton CO ₂)
Belukar	2,455.55	30.00	73,666.37	270,110.03
Belukar Rawa	1,133.89	30.00	34,016.56	124,727.38
Hutan Mangrove	1.73	227.30	393.24	1,441.89
Hutan Mangrove Sekunder	734.86	52.98	38,932.96	142,754.20
Hutan Rawa Sekunder	48.65	75.70	3,682.90	13,503.96
Hutan Sekunder	103.25	91.12	9,408.13	34,496.49
Lahan Terbuka	204.31	2.50	510.78	1,872.85
Pemukiman	1,524.42	4.00	6,097.67	22,358.13
Perkebunan	6,409.39	63.00	403,791.71	1,480,569.59
Pertanian Lahan Kering	398.20	10.00	3,982.03	14,600.77
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	3,703.07	30.00	111,092.17	407,337.94
Sawah	92.78	2.00	185.57	680.41

Sumber: Peta Penutup Lahan Skala 1:250.000, BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, SK 6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA/10/2021 BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, data diolah



Tabel – 2. E. Perubahan PL vegetasi di tahun 2015 menjadi PL Pertambangan di tahun 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2021

E. Perubahan PL vegetasi di tahun 2015 menjadi PL Tambak di tahun 2021					Grand Total
Belukar	137.49				253.793243
Belukar Rawa	101.95				306419.822
Hutan Mangrove Sekunder	11.01				73470.02809
Hutan Rawa Sekunder	39.25				487.2873871
Lahan Terbuka	239.27				83909.49304
Pemukiman	4.67				22155.93967
Pertambangan	65.53				39776.19918
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	188.85				0.153966413
Rawa	3.34				277.808105
Sawah	56.33				49247.37961
Tambak	472.22				8391.854781

Sumber: Peta Penutup Lahan Skala 1:250.000, BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, SK 6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA/10/2021 BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, data diolah

Tabel – 2. F. Stock Karbon dan emisi karbon Emisi Karbon (Ton CO₂) dari perubahan Penutupan Lahan Vegetasi tahun 200- tahun 2021

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2021

A. Perubahan PL vegetasi di tahun 2020 menjadi PL Lahan Terbuka di tahun 2021				
Nama Penutup Lahan	Luas (ha)	Stok Karbon (ton C/ha)	Total Stok Karbon (Ton C)	Emisi Karbon (Ton CO ₂)
Belukar	1819.289291	30	54,579	200,122
Belukar Rawa	403.9178425	30	12,118	44,431
Hutan Lahan Kering Sekunder	632.0040521	91	57,588	211,157
Hutan Mangrove Sekunder	49.37072474	53	2,616	9,591
Hutan Rawa Sekunder	1178.481329	76	89,211	327,107
Perkebunan	128.8414974	63	8,117	29,762
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	1042.178988	30	31,265	114,640
Savana	53.35705653	4	213	783
Total	5,307	377	255,707	937,592
B. Perubahan PL vegetasi di tahun 2020 menjadi PL Permukiman di tahun 2021				
Nama Penutup Lahan	Luas (ha)	Stok Karbon (ton C/ha)	Total Stok Karbon (Ton C)	Emisi Karbon (Ton CO ₂)
Belukar	419.6	30	12,588	46,156
Belukar Rawa	26.9	30	808	2,964
Hutan Lahan Kering Sekunder	5.8	91	526	1,928
Hutan Mangrove Sekunder	3.1	53	167	611

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



Perkebunan	206.7	63	13,023	47,750
Pertanian Lahan Kering	289.3	10	2,893	10,607
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	3703.1	30	111,092	407,337
Savana	42.2	4	169	618
Total	4,697	311	141,265	517,971
C. Perubahan PL vegetasi di tahun 2020 menjadi PL Pertambangan di tahun 2021				
Nama Penutup Lahan	Luas (ha)	Stok Karbon (ton C/ha)	Total Stok Karbon (Ton C)	Emisi Karbon (Ton CO ₂)
Belukar	3089.9	30	92697.4	339890.6
Belukar Rawa	1323.6	30	39708.3	145597.2
Hutan Lahan Kering Sekunder	461.8	91.12	42075.4	154276.5
Hutan Mangrove Primer	39.6	227.3	8996.2	32986.0
Hutan Mangrove Sekunder	131.0	52.98	6941.1	25450.6
Hutan Rawa Sekunder	51.5	75.7	3900.8	14303.0
Perkebunan	921.6	63	58063.6	212899.7
Pertanian Lahan Kering	514.3	10	5143.1	18858.2
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	3649.0	30	109469.2	401387.2
Savana	156.5	4	626.1	2295.7
Total	10,339	614	367,621	1,347,944
D. Perubahan PL vegetasi di tahun 2020 menjadi PL Tambak di tahun 2021				



Nama Penutup Lahan	Luas (ha)	Stok Karbon (ton C/ha)	Total Stok Karbon (Ton C)	Emisi Karbon (Ton CO ₂)
Belukar	175.4	30	5262.0	19294.2
Belukar Rawa	92.4	30	2770.6	10158.7
Hutan Mangrove Sekunder	11.0	52.98	584.9	2144.6
Hutan Rawa Sekunder	100.6	75.7	7618.2	27933.2
Perkebunan	22.8	63	1435.4	5263.0
Pertanian Lahan Kering	119.8	10	1198.1	4392.9
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	187.5	30	5623.8	20620.6
Total	709	292	24,493	89,807
Total A+B+C+D (Ton CO ₂)				2,893,315

Sumber: Peta Penutup Lahan Skala 1:250.000, BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, SK 6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA/10/2021 BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, data diolah



Tabel-3. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2023

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1.	Hutan Produksi	435.197,38
2.	Hutan Lindung	186.26,25
3.	Taman Nasional	17.244,84
4.	Taman Wisata Alam	7.155
5.	Taman Buru	
6.	Cagar Alam	
7.	Suaka Margasatwa	
8.	Taman Hutan Raya	11.953,89
B. Berdasarkan Status Hutan		
1.	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	
2.	Hutan Hak/Hutan Rakyat	
3.	Hutan Kota	
4.	Taman Hutan Raya	
5.	Taman Keanekaragaman Hayati	63,65

Sumber :

SK .6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2020

Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/331.3/BLH/2016 Tentang Penetapan Kawasan Kalung Desa Namang Menjadi Taman Keanekaragaman Hayati "Hutan Pelawan" Kabupaten Bangka Tengah

Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 620/032/KEP/I/2013 Tentang Penetapan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Belitung



Tabel-3.A Fungsi Kawasan Hutan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2022

Fungsi Kawasan								
APL	HL	HP	HPK	Tahura	TN	TORA	TWA	Grand Total
2341	1227	1112	2		109		123	4914
257								257
73786	21463	52802	219	2410	3274	70	121	154146
24625	14966	35127	95		1060	23	1891	77787
2210	18354	3220	0		750	13	1304	25852
11105	15756	11525	29		2202	14	141	40771
322		165						487
104		277						381
8714	7743	33626			52	10		50145
19158	34522	28730		1231	2106	6	1577	87329
3930	935	3311			44	13	4	8236
39086	1082	1223		11	25	268	5	41701
231705	14281	28186		1437	8	137		275755
88717	12191	53746	44	1307	306	220		156531
30885	4301	16153	213	64	573	355	219	52763
452566	34121	162258	79	5493	6733	614	1769	663633
8365	705	1422	13					10505
2484	4452	1785				24		8744
7439	195	93						7726



Fungsi Kawasan								
APL	HL	HP	HPK	Tahura	TN	TORA	TWA	Grand Total
1147	129	64						1340
		374						374
1008947	186421	435197	695	11954	17242	1767	7155	1669379

Sumber : SK .6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2020, data diolah

Tabel-3.B Luas Tutupan Hutan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2021

Tutupan	APL	HL	HP	HK	TORA
Hutan Mangrove	2,210.5	18,354.2	3,220.5	2,054.3	12.7
Hutan Mangrove Sekunder	11,105.1	15,755.5	11,524.5	2,343.0	14.0
Hutan Primer	321.9		164.9	0.0	
Hutan Rawa Primer	103.5		277.3	0.0	
Hutan Rawa Sekunder	8,713.9	7,743.3	33,626.0	51.6	9.9
Hutan Sekunder	19,158.2	34,521.6	28,729.7	4,914.2	5.6

Sumber : SK .6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2020, data diolah



Tabel-4. Keadaan Flora dan Fauna
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2023

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
1	2	3	4	5	6	7
Tumbuhan	<i>Tristania whiteana</i> Griff	Pelawan air	ya			
Tumbuhan	<i>Tristannia obovata</i>	pelawan sungon	ya			
Tumbuhan	<i>Tristania maingayi</i>	pelawan merah	ya			
Tumbuhan	<i>Cantleya corniculata</i> Howard	Bedaru				
Tumbuhan	<i>Hopea sangal</i>	Cengal				
Tumbuhan	<i>Rhodernia sp</i>	Kayu Batu				
Tumbuhan	<i>Palaquium spp</i>	Nyato				
Tumbuhan	<i>Ficus benjamina</i>	Beringin				
Tumbuhan	<i>Termanila catappa</i>	Ketapang				
Tumbuhan	<i>Schima wallichii</i>	Seru				
Tumbuhan	<i>Macaranga gigantea</i>	Mahang				
Tumbuhan	<i>Durio zibethinus</i>	Durian				
Tumbuhan	<i>Melaleuca leucacendra</i>	Gelam				
Tumbuhan	<i>Calophyllum inophyllum</i>	Bintangur				
Tumbuhan	<i>Nepenthes sp</i>	Kantong semar				
Tumbuhan	<i>Melastoma affine</i>	Karamunting				
Tumbuhan	<i>Imperata cylindrical</i>	Alang-alang				
Tumbuhan	<i>Rhizophora sp</i>	Bakau				
Tumbuhan	<i>Bruguiera sp</i>	Putut				
Tumbuhan	<i>Sonneratia sp</i>	Perepat				
Tumbuhan	<i>Avicenia sp</i>	Api-api				
Tumbuhan	<i>Syzigium bankense</i>	Pratima				
Mamalia	<i>Macaca fascicularis</i>	Monyet Ekor			Tidak	Ya
Mamalia	<i>Sus scrofa</i>	Babi hutan			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Varanus sp</i>	Biawak			Tidak	Ya



Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
1	2	3	4	5	6	7
Reptilia	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya muara			Ya	Tidak
Mamalia	<i>Cephalopacus bancanus</i>	Mentilin	Ya		Ya	Tidak
Mamalia	<i>Nycticebus bancanus</i>	Kukang	Ya		Ya	Tidak
Reptilia	<i>Varanus dumerilii</i>	Biawak Dumeril			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Naja sumatrana</i>	Kobra Sumatera			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Naja sputarix</i>	Kobra Jawa			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Varanus rudicollis</i>	Biawak Serunai			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Gekko gecko</i>	Tokek Rumah			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Cyclemys dentata</i>	Kura-kura bergerigi			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Notochelys platynota</i>	Kura-kura punggung datar			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Siebenrockiella crassicolis</i>	Kura-kura pipi putih			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Ahaetulla prasina</i>	Ular Gadung			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Acrochordus javanicus</i>	Ular Kadus Jawa			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Bungarus candidus</i>	Ular Weling			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Craspedocephalus borneensis</i>	Ular Punai Kalimantan			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Craspedocephalus puniceus</i>	Ular Bandotan Pohon			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Reticulated phyton</i>	Ular Sanca Kembang			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Phyton brongersmai</i>	Ular Gedang Merah			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Dendrelaphis pictus</i>	Ular Tambang			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Enhydryn enhydryn</i>	Ular Air Pelangi			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Gonyosoma oxycephalum</i>	Ular Bajing			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Homalopsis buccata</i>	Ular Air Belang			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Lycodon capucinus</i>	Ular Cecak			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Ptyas korros</i>	Ular Koros			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Cryptelytrops albolabris</i>	Ular Bangkai Laut			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Trimeresurus hageni</i>	Ular Beludak Hagen			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Trimeresurus popeiorum</i>	Ular Beludak Pope			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Trimeresurus sumatranus</i>	Ular Punai Sumatera			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Tropidolaemus wagleri</i>	Ular Bandotan Candi			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Xenochrophis vittatus</i>	Ular Kisik			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Eutropis multifasciata</i>	Kadal Kebun			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Takydromus sexlineatus</i>	Kadal Rumput			Tidak	Ya

TABEL DATA - DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
1	2	3	4	5	6	7
Reptilia	<i>Draco melanopogon</i>	Kadal Meluncur Berjanggut Hitam			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Draco obscurus</i>	Kadal Terbang			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Gonocephalus chameleontinus</i>	Bunglon Hutan			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Gonocephalus kuhlii</i>	Kadal Agamid			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Hemidactylus platyurus</i>	Cicak Rumah			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Cyrtodactylus consobrinus</i>	Tokek Berjari Peters			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Gehyra mutilata</i>	Cecak Gula			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Gekko smithi</i>	Tokek Hutan			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Hemidactylus frenatus</i>	Cecak Kayu			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Gecko kuhlii</i>	Tokek Terbang Kuhi			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Duttaphynus melanostictus</i>	Bangkong Kolong			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Fejervarya cancrivora</i>	Kodok Sawah			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Fejervarya limnocharis</i>	Kodok Tegalan			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Kaloula baleata</i>	Belentung			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Kaloul pulchra</i>	Belentung Kembang			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Occidozyga lima</i>	Bancet Hijau			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Polypedates coletti</i>	Katak Pohon Coletti			Tidak	Ya
Reptilia	<i>Polypedates leucomystax</i>	Katak Pohon Bergaris			Tidak	Ya

Sumber : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, 2024

Tabel-5. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tahun Data : 2023

No.	Nama Perusahaan	SK	Jenis Satwa yang Ditangkarkan
1	2	3	4
1	Wijaya, SH	SK.22/IV-K.8/2015 tanggal 14 Januari 2015	Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), rusa totol (<i>Axis axis</i>)
2	Danny Widjaya	SK.44/IV-K.8/2015 tanggal 25 Februari 2015	Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), rusa totol (<i>Axis axis</i>)
3	PD. Budiman	SK.106/IV-SET/2015 tanggal 9 April 2015	Buaya muara (<i>Crocodylus porosus</i>), Buaya senyulong (<i>Tomistoma schlegelii</i>)
4	PT. Timah (Persero), Tbk	SK.76/IV-K.8/2015 tanggal 15 April 2015	Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>)
5	Hero Tio	SK.103/IV-K.8/2015 tanggal 11 Juni 2015	Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), rusa timor (<i>Rusa timorensis</i>), kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), rusa totol (<i>Axis axis</i>)
6	Benny Setiawan	SK.129/IV-K.8/2015 tanggal 28 Juli 2015	Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>)
7	Reva Vergano	SK.146/IV-K.7/2015 tanggal 2 Oktober 2015	Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), rusa totol (<i>Axis axis</i>)
8	M. Hasbi JR	SK.25/K.12/TU/KSA/3/2017 tanggal 7 Maret 2017	Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Rusa Totol (<i>Axis axis</i>)
9	Agita Sulistiana Permadi	SK.29/K.12/TU/KSA/3/2017 tanggal 8 Maret 2017	Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>)
10	Andy Evans Gunady	SK.85/K.12/TU/KSA/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017	Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), Rusa Totol (<i>Axis axis</i>)
11	Yanti Lioe	SK.33/K.12/TU/KSA/1/2018 tanggal 22 Januari 2018	Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Rusa Totol (<i>Axis axis</i>)
12	Gun An	SK.71/K.12/TU/KSA/3/2018 tanggal 5 Maret 2018	Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), Rusa Totol (<i>Axis axis</i>)
13	Zunaria	SK.72/K.12/TU/KSA/3/2018 tanggal 5 Maret 2018	Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), Rusa Totol (<i>Axis axis</i>)



14	Muhamad Adystia Sunggara	SK.188/K.12/TU/KSA/7/2018 tanggal 13 Juli 2018	Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), Rusa Totol (<i>Axiz axis</i>)
15	Indra Setiawan	SK.193/K.12/TU/KSA/7/2018 tanggal 18 Juli 2018	Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), Rusa Totol (<i>Axiz axis</i>)
16	Dawin	SK.208/K.12/TU/KSA/7/2018 tanggal 30 Juli 2018	Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), Rusa Totol (<i>Axiz axis</i>)
17	Budiman	SK.344/K.12/TU/KSA/8/2018 tanggal 23 Agustus 2018	Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), Rusa Totol (<i>Axiz axis</i>)
18	Hendry	SK.347/K.12/TU/KSA/8/2018 tanggal 24 Agustus 2018	Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>), Rusa Totol (<i>Axiz axis</i>)
19	Replianto	SK.20/K.12/TU/KSA/1/2019 tanggal 10 Januari 2019	Rusa Timor (<i>Rusa timorensis</i>), Rusa Totol (<i>Axiz axis</i>)
20	Ongky Budiato Tjhin	SK. 26/K.12/TU/KUM/1/2022 Tanggal 21 Januari 2020	Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>), Rusa Timor (<i>Rusa timorensis</i>), Rusa Totol (<i>Axiz axis</i>) dan Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>)
21	PT. Timah Tbk	SK.845/KSDAE/SET.3/KSA.2/8/2021 Tanggal 4 Agustus 2021	Rusa Sambar (<i>Rusa unicolor</i>) dan Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>)

Keterangan: Laporan Inventarisasi Potensi Kawasan dan Patroli Kawasan Tahun 2023

Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, 2024

Tabel-6. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2023



No.	Kabupaten/Kota	Kritis (Ha)		Sangat Kritis (Ha)		Potensial Kritis (Ha)		Agak Kritis (Ha)		Tidak Kritis (Ha)	
		Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	8	4	203	19	30	127	3	4	52	61,33
2	Bangka Barat	10,134	1,456	0	0	26,678	98,287	1,613	1,456	77,95	59,194
3	Bangka Selatan	17,682	4,741	323	20	65,857	173,372	2,738	4,741	53,125	38,41
4	Bangka Tengah	20,213	2,406	696	3	44,022	58,811	3,673	2,406	55,773	20,373
5	Belitung	7,828	2,223	0	0	25,347	49,316	5,984	2,223	45,389	75,907
6	Belitung Timur	9,307	2,561	34	0	21,696	63,588	4,144	2,561	65,025	64,581
7	Pangkalpinang	0	1,2	0	0	0	5,018	0	1,2	0	4,255

Keterangan:

Sumber :

SK .6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2020
SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022



Tabel 7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun : 2019

No.	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000) (mm/10 tahun)	Besaran erosi (mm/10 tahun)	Status Melebihi/Tidak
1	< 20 cm	0,2 - 1,3	NA	NA
2	20 - < 50 cm	1,3 - < 4	NA	NA
3	50 - < 100 cm	4,0 - < 9,0	NA	NA
4	100 - 150	9,0 - 12	NA	NA
5	> 150 cm	> 12	NA	NA

Keterangan : Tidak dilakukan pemantauan akibat erosi

Sumber: DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel-8. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering
Provinsi : Kepulauan Bangka Tengah (Bangka Tengah)
Tahun : 2022

No	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a	Perkebunan Karet di Desa Air Mesu, Kabupaten Bangka Tengah				
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	< 40 %	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	71 % pasir*	Melebihi
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	0,5 g/cm ³	Tidak
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam	-	-
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	5.0	Melebihi
8		Daya Hantar Listrik /DHL	> 4,0 mS/cm	0.030	Melebihi
9		Redoks	< 200 mV	491	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1,08 x 10 ⁷	Melebihi
b	Perkebunan Singkong di Desa Puput, Kabupaten Bangka Tengah				
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	0	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	70 % pasir*	Melebihi
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	0,5 g/cm ³	Tidak
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-



No	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
6		Derajat Pelulutan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam	-	-
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4.8	Melebihi
8		Daya Hantar Listrik /DHL	> 4,0 mS/cm	0.090	Melebihi
9		Redoks	< 200 mV	500	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1,96 x 10 ⁷	Melebihi
c	Perkebunan Kopi di Desa Teru, Kabupaten Bangka Tengah				
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	0	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	52 % pasir*	Melebihi
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	0,5 g/cm ³	Tidak
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6		Derajat Pelulutan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam	-	-
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	5.0	Melebihi
8		Daya Hantar Listrik /DHL	> 4,0 mS/cm	0.050	Melebihi
9		Redoks	< 200 mV	489	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1,14 x 10 ⁷	Melebihi
d	Perkebunan Lada di Desa Pinang Sebatang, Kabupaten Bangka Tengah				
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	37.50%	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	33 % pasir*	Melebihi
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	0,5 g/cm ³	Tidak
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6		Derajat Pelulutan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam	-	-
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4.5	Melebihi
8		Daya Hantar Listrik /DHL	> 4,0 mS/cm	0.063	Melebihi
9		Redoks	< 200 mV	496	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	1,52 x 10 ⁷	Melebihi
e	Perkebunan Singkong di Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah				
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	18.75%	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	69 % pasir*	Melebihi
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	0,5 g/cm ³	Tidak
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6		Derajat Pelulutan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam	-	-
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	4.8	Melebihi
8		Daya Hantar Listrik /DHL	> 4,0 mS/cm	0.036	Melebihi
9		Redoks	< 200 mV	457	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	2,76 x 10 ⁷	Melebihi
f	Hutan Taman Industri Bangkanesia di Desa				
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	> 20 cm	Melebihi
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	12.50%	Tidak
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	49 % pasir*	Melebihi
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik		



No	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
4	Perlang, Kabupaten Bangka Tengah	Berat Isi	$> 1,4 \text{ g/cm}^3$	$0,5 \text{ g/cm}^3$	Tidak
5		Porositas Total	$< 30 \% ; > 70 \%$	-	-
6		Derajat Pelulusan air	$< 0,7 \text{ cm/jam} ; > 8,0 \text{ cm/jam}$	-	-
7		pH (H_2O) 1 : 2,5	$< 4,5 ; > 8,5$	4.8	Melebihi
8		Daya Hantar Listrik /DHL	$> 4,0 \text{ mS/cm}$	0.029	Melebihi
9		Redoks	$< 200 \text{ mV}$	426	Melebihi
10		Jumlah Mikroba	$< 10^2 \text{ cfu/g tanah}$	$1,36 \times 10^7$	Melebihi

Keterangan : Inventarisasi dan Pengelolaan Lahan Kritis Kabupaten Bangka Tengah

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Tabel 9. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun : 2022

No	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persawahan Namang di Desa Namang	Subsidensi Gambut di Atas Pasir Kuarsa	$> 35 \text{ cm/tahun}$ untuk ketebalan gambut $\geq 3 \text{ m}$ atau $10\% / 5 \text{ tahun}$ untuk ketebalan gambut $< 3 \text{ m}$	-	-
2	Persawahan Namang di Desa Namang	Kedalaman Lapisan Berpirit dari Permukaan Tanah	$< 25 \text{ cm}$ dengan $\text{pH} \leq 2,5$	0	Tidak melebihi
3	Persawahan Namang di Desa Namang	Kedalaman Tanah Air Dangkal	$> 25 \text{ cm}$	22 cm	Tidak melebihi
4	Perkebunan Kelapa di Desa Kurau	Subsidensi Gambut di Atas Pasir Kuarsa	$> 35 \text{ cm/tahun}$ untuk ketebalan gambut $\geq 3 \text{ m}$ atau $10\% / 5 \text{ tahun}$ untuk ketebalan gambut $< 3 \text{ m}$	-	-
5	Perkebunan Kelapa di Desa Kurau	Kedalaman Lapisan Berpirit dari Permukaan Tanah	$< 25 \text{ cm}$ dengan $\text{pH} \leq 2,5$	0	Tidak melebihi
6	Perkebunan Kelapa di Desa Kurau	Kedalaman Tanah Air Dangkal	$> 25 \text{ cm}$	25 cm	Melebihi

Keterangan : Kegiatan Pemantauan Kualitas Tanah Tahun 2021

Sumber : DIKPLHD Kabupaten/Kota 2021



Tabel 10. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove
Provinsi : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun : 2023

No	Lokasi	Luas Lokasi (Ha)	Persentase tutupan (%)	Kerapatan (pohon/Ha)
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Bangka	10.260,2	≥ 75%	≥ 1500
2	Kabupaten Bangka Barat	359,5	≥ 75%	≥ 1500
3	Kabupaten Bangka Barat	63,7	≥ 50% - < 75%	≥ 1000 - < 1500
4	Kabupaten Bangka Selatan	107,0	≥ 75%	≥ 1500
5	Kabupaten Bangka Selatan	19.925,4	≥ 50% - < 75%	≥ 1000 - < 1500
6	Kabupaten Bangka Tengah	164,4	≥ 75%	≥ 1500
7	Kabupaten Bangka Tengah	8.612,8	≥ 50% - < 75%	≥ 1000 - < 1500
8	Kabupaten Belitung	56,0	≥ 75%	≥ 1500
9	Kabupaten Belitung	13,0	≥ 50% - < 75%	≥ 1000 - < 1500
10	Kabupaten Belitung	6.119,4	< 50%	< 1000
11	Kabupaten Belitung Timur	85,0	≥ 75%	≥ 1500
12	Kabupaten Belitung Timur	32,1	≥ 50% - < 75%	≥ 1000 - < 1500
13	Kabupaten Belitung Timur	10.819,1	< 50%	< 1000
14	Pangkalpinang	45,7	≥ 75%	≥ 1500
15	Pangkalpinang	11,2	≥ 50% - < 75%	≥ 1000 - < 1500
16	Pangkalpinang	8.058,4	< 50%	< 1000

Keterangan :

Sumber: IGT Mangrove Update 2023, BPDAS Baturusa Cerucuk; Batas Administrasi RTRW Prov Kep Babel, 2023, data diolah

Tabel 11. Luas dan Kerusakan Padang Lamun
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2022

No	Kabupaten	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
1	2	3	4
	Kabupaten Bangka Tengah		
1	Pulau Ketawai	-	0,59
2	Pulau Semujur	-	0,26
	Kabupaten Bangka Selatan		
3	Pulau Kelapan	-	0,04
4	Pulau Seniur	-	0,01
5	Pulau Seniur	-	0,03
6	Pulau Ibul	-	0,03
7	Pulau Lepar (Penutuk)	-	0,55
8	Desa Tukak	-	0,05
9	Desa Tukak	-	0,27
	Kabupaten Belitung		



No	Kabupaten	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
1	2	3	4
10	Pantai Bukit Berahu	-	0,48
11	Pantai Bukit Berahu	-	0,02
12	Pantai Tanjung Binga (Pelabuhan)	-	0,18
13	Pantai Tanjung Binga (PT.Belpi)	-	0,18
14	Pantai Tanjung Binga (PT.Belpi)	-	0,16
15	Pantai Tanjung Kelayang	-	0,28
16	Pantai Tanjung Kelayang	-	0,08
17	Pulau Seliu, Membalong	-	0,42
18	Pulau Seliu, Membalong	-	0,18
19	Pulau Buloh	-	0,06
20	Selat Nasik	-	0,38
21	Selat Nasik	-	0,3
22	Selat Nasik	-	0,37
23	Selat Nasik	-	0,38
	Belitung Timur		
24	Pantai Aik Lanun	-	0,05
25	Pantai Aik Lanun	-	0,15
26	Pantai Aik Lanun	-	0,15
27	Pantai Aik Lanun	-	0,36
28	Pantai Aik Lanun	-	0,27
29	Pantai Aik Lanun	-	0,17
30	Pantai Aik Lanun	-	0,23
31	Pantai Aik Lanun	-	0,1
32	Pantai Aik Lanun	-	0,1
33	Pantai Aik Lanun	-	0,04
34	Pantai Aik Lanun	-	0,08
35	Pantai Aik Lanun	-	0,04
36	Pantai Aik Lanun	-	0,05
37	Pantai Aik Lanun	-	0,05
38	Pantai Aik Lanun	-	0,03
39	Pantai Aik Lanun	-	0,12
40	Pantai Aik Lanun	-	0,04
41	Pantai Aik Lanun	-	0,17
42	Pantai Aik Lanun	-	0,16
43	Pantai Setinggi	-	0,12
44	Pulau Melidang, Gantong	-	0,04
45	Pulau Melidang, Gantong	-	0,05
46	Pulau Melidang, Gantong	-	0,01
47	Pulau Melidang, Gantong	-	0,15

Keterangan:

Sumber : DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tabel-12. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang
Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2017

No.	Kab./Kota	Luas Tutupan (Ha)	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
1	Kabupaten Bangka	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Bangka Barat	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Bangka Tengah	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Bangka Selatan	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Belitung	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Belitung Timur	-	-	-	-	-
7	Kota Pangkalpinang	-	-	-	-	-

Keterangan : Hanya dilakukan pengambilan sampel pada beberapa titik, sesuai format Tabel 10.A.

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



Tabel 12.a Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2018

Nomor	Waktu Pengambilan Data	Koordinat		Lokasi	Hard Coral life (%)	Dead Coral (%)	Algae (%)	Other (%)	Sand/Rubble (%)	Soft Coral	Sponge	Fleshy Seaweed	Kategori
		Lintang	Bujur										
1	17 Oktober 2018	-27.093	1.084.335	Utara Pulau Memperak	85,43%	8,34%	6,23%	0,00%	0,00%	-	-	-	sangat baik
2	18 Oktober 2018	-27,112	1.084.399	Timur Pulau Memperak	77,97%	11,80%	4,97%	2,10%	3,17%	-	-	-	sangat baik
3	19 Oktober 2018	-27.187	1.084.398	Timur Pulau Memperak	28,40%	14,70%	48,80%	4,40%	2,47%	-	-	-	sedang
4	20 Oktober 2018	-2.714	1.084.308	Selatan Pulau Memperak	48,23%	20.702	9.235	0,33%	0	-	-	-	baik
5	12-20 November 2018	-2.492	1.085.406	Utara Pulau Nangka	69,20%	0,13%	25,73%	0,27%	2,60%	0,6			
6	12-20 November 2018	-25.046	1.085.512	Selatan Pulau Nangka	39,80%	0,00%	41,60%	0,67%	14,60%	2,20%	0,20%	0,93%	baik
7	12-20 November 2018	-27.095	1.084.335	Pulau Memperak (Timur)	54,67%	0,00%	40,53%	0,80%	1,33%	0,00%	0,20%	2,47%	baik
8	12-20 November 2018	-27.229	1.084.242	Karang Nenek	67,27%	0,00%	27,20%	1.205	3,53%	0,40%	0,27%	0,13%	baik
9	12-20 November 2018	-30.496	1.073.592	Pulau Bangkai (Timur)	59,84%	0,07%	28,69%	0,40%	6,47%	0,07%	0,40%	4,07%	baik
10	12-20 November 2018	-3.053	1.073.659	Pulau Buntar (Barat)	65,18%	0,00%	31,29%	0,80%	1,93%	0,00%	0,73%	0,07%	baik
11	12-20 November 2018	-30.591	1.073.692	Pulau Buntar (Timur)	51,47%	0,00%	41,93%	1,67%	4,47%	0,07%	0,20%	0,20%	baik
12	12-20 November 2018	-2.876	1.073.485	Pulau Mendanau (Barat)	35,87%	0,00%	56,87%	0,13%	3,47%	0,00%	0,93%	2,73%	cukup baik
13	12-20 November 2018	-28.108	1.074.483	Pulau Mendanau (Utara)	61,67%	0,00%	35,80%	1,20%	0,53%	0,00%	0,47%	0,33%	baik
14	12-20 November 2018	-27.774	1.075.279	Kali Mambang	27,87%	0,00%	57,07%	3,47%	10,54%	0,00%	0,20%	0,87%	cukup baik

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



No.	Waktu Pengambilan Data	Koordinat		Lokasi	Hard Coral Life	Dead Coral	Algae	Other	Sand/Rubble	Kategori
					(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	18-11-2016	2° 51' 48.934" S	106° 44' 8.770" E	Timur Laut P. Burung	23,92%	1,80%	0,00%	18,50%	55,78%	BURUK
2	18-11-2016	2° 52' 31.994" S	106° 44' 55.885" E	Utara P. Burung	27,80%	1,50%	9,90%	5,30%	55,50%	SEDANG
3	18-11-2016	2° 52' 51.272" S	106° 48' 1.480" E	Tanjung Sangkar	24,14%	0,90%	48,88%	0,30%	25,78%	BURUK
4	18-11-2016	2° 50' 42.480" S	106° 47' 8.330" E	Barat Daya P. Seniur	0,00%	1,76%	27,08%	1,68%	69,48%	BURUK
5	18-11-2016	2° 49' 58.590" S	106° 47' 5.370" E	Karang Aji	58,06%	20,74%	0,00%	3,90%	17,30%	BAIK
6	18-11-2016	2° 50' 18.740" S	106° 48' 17.580" E	Tanjung Ular	24,88%	0,00%	0,00%	2,86%	72,26%	BURUK
7	18-11-2016	2° 51' 4.388" S	106° 49' 34.871" E	Karang Gajah Mas	28,50%	6,22%	43,60%	0,48%	21,20%	SEDANG
8	21 - 11 - 2016	2° 50' 35.167" S	106° 51' 15.167" E	Timur Laut P. Kelapan	60,34%	35,72%	0,00%	3,54%	0,40%	BAIK
9	20-11-2016	2° 51' 28.627" S	106° 51' 25.884" E	Barat P. Kelapan	18,78%	21,56%	45,50%	0,40%	13,76%	BURUK
10	21 - 11 - 2016	2° 54' 46.278" S	106° 50' 54.002" E	Timur Laut P. Lepar	20,02%	38,06%	22,84%	9,44%	9,64%	BURUK
11	21 - 11 - 2016	2° 55' 38.867" S	106° 53' 3.977" E	Timur Laut P. Lepar	51,26%	40,82%	2,20%	2,70%	3,02%	BAIK
12	21 - 11 - 2016	2° 55' 57.338" S	106° 54' 11.966" E	Selatan P. Ketawai	19,72%	55,14%	14,36%	7,98%	2,80%	BURUK
13	19-11-2016	2° 51' 44.809" S	107° 0' 53.168" E	Barat Daya P. Gusung Asam	47,04%	4,30%	22,96%	5,56%	20,14%	SEDANG
14	20-11-2016	2° 48' 45.583" S	107° 3' 15.224" E	Barat P. Ketawai	60,16%	31,14%	1,24%	6,02%	1,44%	BAIK
15	20-11-2016	2° 49' 32.074" S	107° 4' 16.745" E	Utara P. Ketawai	38,86%	24,66%	27,44%	4,68%	4,36%	SEDANG
16	20-11-2016	2° 52' 31.548" S	107° 5' 54.546" E	Timur P. Pongok	17,04%	4,90%	11,60%	22,96%	43,50%	BURUK
17	20-11-2016	2° 55' 16.324" S	107° 4' 55.834" E	Selatan P. Pongok	19,72%	51,52%	25,62%	3,14%	0,00%	BURUK
18	19-11-2016	2° 53' 38.774" S	107° 1' 52.590" E	Barat daya P. Pongok	7,64%	29,44%	42,22%	4,10%	16,60%	BURUK
19	21-11-2016	2° 53' 55.086" S	106° 50' 9.593" E	Timur Laut P. Lepar	4,50%	0,00%	60,26%	3,16%	32,08%	BURUK
20	19-11-2016	2° 54' 50.501" S	107° 3' 5.818" E	Selatan P. Kelapan	75,80%	23,32%	0,00%	0,62%	0,26%	SANGAT BAIK
21	20-11-2016	2° 50' 43.768" S	107° 5' 22.682" E	Timur P. Kelapan	63,68%	19,14%	14,16%	0,44%	2,58%	BAIK
22	19-11-2016	2° 50' 15.950" S	107° 2' 1.198" E	Barat P. Kelapan	57,56%	13,04%	25,58%	0,56%	3,26%	BAIK
23	21-11-2016	2° 55' 33.262" S	106° 52' 30.590" E	Mayora P. Lepar	16,88%	27,64%	14,98%	6,64%	33,86%	BURUK
24	18-11-2016	2° 50' 27.540" S	106° 50' 13.960" E	Utara P. Kelapan	8,10%	6,92%	75,26%	0,00%	9,72%	BURUK
25	18-11-2016	2° 51' 48.934" S	106° 44' 8.770" E	Timur Laut P. Burung	20,94%	76,88%	0,00%	0,98%	1,20%	BURUK
26	18-11-2016	2° 52' 31.994" S	106° 44' 55.885" E	Utara P. Burung	57,32%	9,38%	28,90%	4,40%	0,00%	BAIK

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Waktu Pengambilan Data	Koordinat		Lokasi	Hard Coral Life	Dead Coral	Algae	Other	Sand/Rubble	Kategori
					(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
27	18-11-2016	2° 52' 51.272" S	106° 48' 1.480" E	Tanjung Sangkar	54,02%	32,98%	2,16%	0,56%	10,28%	BAIK
28	18-11-2016	2° 50' 42.480" S	106° 47' 8.330" E	Barat Daya P. Seniur	58,96%	0,00%	30,40%	0,42%	10,22%	BAIK
29	18-11-2016	2° 49' 58.590" S	106° 47' 5.370" E	Karang Aji	72,74%	15,90%	2,60%	0,90%	7,86%	BAIK
30	18-11-2016	2° 50' 18.740" S	106° 48' 17.580" E	Tanjung Ular	70,10%	29,90%	0,00%	0,00%	0,00%	BAIK
31	18-11-2016	2° 51' 4.388" S	106° 49' 34.871" E	Karang Gajah Mas	58,60%	41,40%	0,00%	0,00%	0,00%	BAIK
32	21 - 11 - 2016	2° 50' 35.167" S	106° 51' 15.167" E	Timur Laut P. Kelapan	31,60%	52,80%	0,60%	0,00%	15,00%	SEDANG
33	20-11-2016	2° 51' 28.627" S	106° 51' 25.884" E	Barat P. Kelapan	57,00%	39,00%	0,60%	1,10%	2,30%	BAIK
34	21 - 11 - 2016	2° 54' 46.278" S	106° 50' 54.002" E	Timur Laut P. Lepar	75,46%	18,18%	3,70%	0,00%	2,66%	SANGAT BAIK
35	21 - 11 - 2016	2° 55' 38.867" S	106° 53' 3.977" E	Timur Laut P. Lepar	65,30%	22,62%	9,64%	0,36%	2,08%	BAIK
36	21 - 11 - 2016	2° 55' 57.338" S	106° 54' 11.966" E	Selatan P. Ketawai	66,58%	32,96%	0,00%	0,46%	0,00%	BAIK
37	19-11-2016	2° 51' 44.809" S	107° 0' 53.168" E	Barat Daya P. Gusung Asam	34,42%	31,50%	21,14%	0,26%	12,68%	SEDANG
38	20-11-2016	2° 48' 45.583" S	107° 3' 15.224" E	Barat P. Ketawai	42,86%	54,64%	0,00%	1,98%	0,52%	SEDANG
39	20-11-2016	2° 49' 32.074" S	107° 4' 16.745" E	Utara P. Ketawai	72,94%	24,52%	0,00%	1,30%	1,24%	BAIK
40	20-11-2016	2° 52' 31.548" S	107° 5' 54.546" E	Timur P. Pongok	27,96%	63,44%	3,86%	0,38%	4,36%	SEDANG
41	20-11-2016	2° 55' 16.324" S	107° 4' 55.834" E	Selatan P. Pongok	70,80%	28,70%	0,00%	0,50%	0,00%	BAIK
42	19-11-2016	2° 53' 38.774" S	107° 1' 52.590" E	Barat daya P. Pongok	69,44%	29,14%	0,00%	1,42%	0,00%	BAIK
43	21-11-2016	2° 53' 55.086" S	106° 50' 9.593" E	Timur Laut P. Lepar	76,38%	14,40%	2,92%	1,82%	4,48%	SANGAT BAIK
44	19-11-2016	2° 54' 50.501" S	107° 3' 5.818" E	Selatan P. Kelapan	14,00%	54,90%	0,00%	0,00%	31,10%	BURUK
45	20-11-2016	2° 50' 43.768" S	107° 5' 22.682" E	Timur P. Kelapan	40,58%	45,12%	3,92%	0,30%	10,08%	SEDANG
46	19-11-2016	2° 50' 15.950" S	107° 2' 1.198" E	Barat P. Kelapan	21,00%	1,36%	51,14%	1,26%	25,24%	BURUK
47	21-11-2016	2° 55' 33.262" S	106° 52' 30.590" E	Mayora P. Lepar	14,98%	13,46%	52,00%	1,10%	18,46%	BURUK
48	18-11-2016	2° 50' 27.540" S	106° 50' 13.960" E	Utara P. Kelapan	51,26%	43,96%	0,00%	0,60%	4,18%	BAIK
49	18-11-2016	2° 51' 48.934" S	106° 44' 8.770" E	Timur Laut P. Burung	12,94%	40,18%	37,10%	0,74%	9,04%	BURUK
50	18-11-2016	2° 52' 31.994" S	106° 44' 55.885" E	Utara P. Burung	86,90%	12,08%	0,00%	0,44%	0,58%	SANGAT BAIK
51	18-11-2016	2° 52' 51.272" S	106° 48' 1.480" E	Selatan P. Memperak	68,80%	28,72%	0,70%	0,00%	1,78%	BAIK
52	18-11-2016	2° 50' 42.480" S	106° 47' 8.330" E	P. Bakau	69,88%	20,46%	4,78%	3,26%	1,62%	BAIK
53	18-11-2016	2° 49' 58.590" S	106° 47' 5.370" E	Karang Aji	61,40%	37,90%	0,00%	0,00%	0,70%	BAIK

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2023



No.	Waktu Pengambilan Data	Koordinat		Lokasi	Hard Coral Life	Dead Coral	Algae	Other	Sand/Rubble	Kategori
					(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
54	18-11-2016	2° 50' 18.740" S	106° 48' 17.580" E	Tanjung Ular	62,90%	31,90%	0,00%	0,60%	4,60%	BAIK
55	18-11-2016	2° 51' 4.388" S	106° 49' 34.871" E	Karang Gajah Mas	62,90%	31,90%	0,00%	0,60%	4,60%	BAIK
56	21 - 11 - 2016	2° 50' 35.167" S	106° 51' 15.167" E	Timur Laut P. Kelapan	36,10%	45,52%	16,34%	0,00%	2,04%	SEDANG
57	20-11-2016	2° 51' 28.627" S	106° 51' 25.884" E	Barat P. Kelapan	35,54%	61,70%	0,00%	1,02%	1,74%	SEDANG
58	21 - 11 - 2016	2° 54' 46.278" S	106° 50' 54.002" E	Selatan Pulau kera	45,88%	50,74%	1,62%	1,12%	0,64%	SEDANG
59	21 - 11 - 2016	2° 55' 38.867" S	106° 53' 3.977" E	Karang Tengah Selat Nasik	11,08%	6,30%	35,12%	3,32%	44,18%	BURUK
60	21 - 11 - 2016	2° 55' 57.338" S	106° 54' 11.966" E	Selatan P. Ketawai	16,90%	23,80%	50,60%	0,00%	8,70%	BURUK

Keterangan: -

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 12.b Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2023

No.	Luas Tutupan (ha)	Kondisi (ha)				Kondisi (%)			
		Baik	Sedang	Rusak	Tidak Teridentifikasi	Baik	Sedang	Rusak	Tidak Teridentifikasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	17.744,85	12.474,54		5.270,31		70		30	

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



Tabel 13. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2023

No.	Jenis PenggunaanBaru	Luas Lama (Ha)	Luas Baru (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Permukiman	17.928	19.814
2.	Industri	0	0
3.	Tanah kering	0	0
4.	Perkebunan	51.789	61.352
5.	Semak belukar	86.180	33.241
6.	Tanah kosong	0	0
7.	Perairan/kolam	4.064	4.330
8.	Lahan Terbuka	2.019	1.449
9	Tambak	305	457
10	Pertambangan	50.633	50.562

Keterangan

Sumber:

IGT Pola Ruang Kawasan Pertanian RTRW Prov Kep Bangka Belitung Tahun 2014-2034, IGT Penutup Lahan Tahun 2020 dan 2021- BPKH Wil XIII Pangkalpinang, data diolah (luas lama) ; IGT Pola Ruang RTRW 2024-2044, IGT Penutup Lahan Tahun 2022 - BPKHTL XIII Pangkalpinang (luas baru)

Tabel-14. Jenis Pemanfaatan Lahan
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun : 2019

No.	Jenis Pemanfaatan	Jumlah	Skala Usaha	Luas (Ha)	Keterangan
1.	Tambang		Besar		
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat		
2.	Perkebunan		Besar	391,064	
			Menengah		



No.	Jenis Pemanfaatan	Jumlah	Skala Usaha	Luas (Ha)	Keterangan
			Kecil		
			Rakyat		
3.	Pertanian		Besar		
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat	151,531	
4.	Pemanfaatan		Besar		
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat	43,315	

Keterangan : Data yang tersedia tidak dikelompokkan menjadi skala besar, sedang, kecil, atau rakyat

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2019

Tabel-14.a Luas Lahan Menurut Penggunaan Per Kabupaten/Kota
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2022

Penggunaan Lahan/ <i>land use</i>	Luas
I. Lahan Pertanian/ Agriculture Area:	
I.1 Lahan Sawah/ <i>Paddy wetfield</i>	4.705,22
I.2 Lahan Tegalan/ Ladang	601.351,49
II. Lahan Bukan Pertanian	
II.1 Perkebunan	253.359,81
II.2 Pertambangan	155.168,33
II.3 Permukiman	38.845,94
II.4 Tambak	522,24
II.5 Bandara/ Pelabuhan	253,51



Penggunaan Lahan/ <i>land use</i>	Luas
II.6 Transmigrasi	2.416,80

Sumber : Data Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang Tahun 2021, Data diolah 2022

Tabel-15. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2022

No	Lokasi		Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Luas Areal Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
	Kabupaten/Kota	Desa/Kecamatan					
1	Belitung Timur	Desa Limbongan Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Hamparan Mineralindo Abadi	198,00		
2	Bangka Tengah	Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar	Pasir Kuarsa	PT. Mitra Persada Resources	71,00	0	0
3	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Kaolin	CV. Putra Belitung Mandiri	38,07		
4	Belitung Timur	Desa Lilangan Kec. Gantung,	Pasir Kuarsa	PT. Kurnia Mandiri Adiperkasa	362,00	4,5	174,793
5	Bangka Selatan	Desa Pasir Putih Kec. Tukak Sadai	Pasir Kuarsa	PT. Babel Pasir Persada	135,20		
6	Bangka	Desa Gunung Pelawan, Kec. Belinyu	Kaolin	CV. Gunung Lebak	4,82	0,5	5,097
7	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Koalin	CV. Mitra Maju Bersama	117,90		
8	Bangka Tengah	Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar	Pasir Kuarsa	PT. Walie Tampas Citratama	150,40	0,3	63,182
9	Bangka Tengah	Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar	Pasir Kuarsa	PT. Walie Tampas Citratama	46,20	0	0
10	Bangka Tengah	Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar	Pasir Kuarsa	PT. Mitra Persada Resources	32,84	0,86	53,704
11	Bangka Tengah	Lubuk Besar	Pasir Kuarsa	PT. Tambang Jaya Indah	189,30	0	0
12	Bangka Barat	Desa Kelabat Kecamatan Jebus	Kaolin	PT. Putra Kusuma Abadi	10,00		
13	Bangka Selatan	Desa Sebagin Kec. Simpang Rimba	Pasir Kuarsa	CV. Prima Sari Utama	120,00		
14	Belitung Timur	Desa Dukong Kec Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Belitung Sand Mining	186,00	0	0
15	Belitung Timur	Desa Dukong Kec Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Belitung Sand Mining	192,00	5,04	321,341
16	Belitung Timur	Desa Simpang Pesak, Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Belitung Sand Mining	71,30	0	0
17	Belitung Timur	Desa Limbongan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Belitung Sand Mining	1.088,00	9,49	967,326
18	Belitung Timur	Desa Limbongan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Belitung Sand Mining	539,70	0	0
19	Belitung Timur	Desa Limbongan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT Sriyudi Alam Antarnusa	164,10		
20	Belitung Timur	Desa Lenggang, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Pacific Dipta Karya	197,00	0,26	10
21	Belitung Timur	Desa Jangkar Asam, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Hero Progres International	198,00	0,66	26,592
22	Belitung Timur	Desa Jangkar Asam, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Hero Progres International	180,00	0,2	15



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No	Lokasi		Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Luas Areal Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
	Kabupaten/Kota	Desa/Kecamatan					
23	Belitung Timur	Desa Jangkar Asam, Kec. Gantung	Kaolin	CV. Irpau Hero	188,00		
24	Belitung Timur	Desa Jangkar Asam, Kec. Gantung	Kaolin	CV. Irpau Hero	181,50	0,8	28,889
25	Belitung Timur	Desa Lilangan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Karya Cipta Lahanindo	43,00	0,4	4,574
26	Belitung Timur	Desa Lilangan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Karya Cipta Lahanindo	132,40	0,23	4,01
27	Belitung Timur	Desa Limbongan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Karya Emas Multisani	487,00		
28	Belitung Timur	Desa Lilangan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Sejahtera Utama Mitra Jaya	190,00	0,05	3,688
29	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	kaolin	CV. Dua Satu	49,52	0,5	10,472
30	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Kaolin	PT. Arya Prima Sentosa	46,20		
31	Belitung	Desa Mentigi, Kec. Membalong	Kaolin	PT. Prima Bundiarta Nusa	69,80	0	0
32	Belitung	Desa Air Seruk, Kec. Sijuk	kaolin	PT. Bumi Sentosa Progress	33,20	0,05	3
33	Belitung	Desa Membalong, Kec. Membalong	Kaolin	PT. Sandeir Setia Brothers	162,60	0,96	45,349
34	Belitung	Desa Aik Rayak, Kec. Tanjungpandan	Kaolin	CV. Bonanza	60,00	0,1	5,484
35	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Kaolin	PT. Belitung Kaolin Murni	47,00		
36	Belitung	Desa Air Seruk, Kec. Sijuk	Kaolin	PT. Garuda Artha Resources	199,20	1,2	22,702
37	Belitung	Desa Aik Rayak, Kec. Tanjungpandan	Kaolin	PT. Aneka Kaolin Utama	66,00		
38	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Kaolin	PT. Stepa Wirausaha Adiguna	48,53	1,4	51,292
39	Belitung	Desa Cerucuk, Kec. Badau	Kaolin	PT. Intisuperindo Pratama	197,00		
40	Belitung	Desa Perawas, Kec. Tanjungpandan	Kaolin	PT. Kaolin Belitung Utama	103,50	0	0
41	Belitung	Desa Seruk, Kec. Sijuk	Kaolin	PT. Alter Abadi Tbk	709,52	0,3	73,197
42	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Kaolin	PT. Nippindo Kaolin Abadi	233,80	0,3	15204
43	Belitung	Desa Air Seruk, Kec. Sijuk	Kaolin	PT. Kaolindo Sakti Perkasa	281,10		
44	Belitung	Desa Cerucuk, Kec. Badau	Kaolin	PT. Mitra Kaolin Mujur Selalu	117,90	0	0
45	Belitung	Desa Ibul, Kec. Badau	Kaolin	PT. Mineral Putra Belitung Mandiri	25,00		
46	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Kaolin	PT. Sriyudi Globalindo Perkasa	199,70	0	0
47	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Kaolin	PT. Belitung Cinindo Antarbuana	199,70		
48	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Kaolin	PT. Kian Sukses Mandiri	78,00	0,22	10,9
49	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Kaolin	PT. Xinrun Sukses International	177,70	0,5	240
50	Bangka Selatan	Desa Sebagian Kec. Simpang Rimba	Pasir Kuarsa	CV. Bumi Bangka Jaya Perkasa	115,00		
51	Bangka Selatan	Desa Sebagian Kec. Simpang Rimba	Pasir Kuarsa	PT. Rumpun Alam Sinergi	28,50		
52	Bangka Selatan	Desa Sebagian Kec. Simpang Rimba	Pasir Kuarsa	PT. Bangka Belitung Mineral Sejalan	50,00		
53	Belitung Timur	Desa Lilangan dan Limbongan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Wijaya Mandiri Teknik Kreasi	565,50	1,5	40
54	Belitung Timur	Desa Limbongan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Belitung Sand Mining	186,00		

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No	Lokasi		Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Luas Areal Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
	Kabupaten/Kota	Desa/Kecamatan					
55	Belitung Timur	Desa Lilangan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	CV. Selingsing Anugerah Mining	100,00		
56	Belitung Timur	Desa Simpang Pesak, Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	CV. Babel Makmur Sedjahtra	135,60		
57	Belitung	Desa Mentigi, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Mitra Pasir Berlian	43,00		
58	Belitung	Desa Air Seruk, Kec. Sijuk	Pasir Kuarsa	CV. Harapan Rejeki Bungsu	83,50	0	0
59	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Pasir Kuarsa	CV. Belitung Berehun Barokah	43,05		
60	Bangka Tengah	Desa Jelutung, Kecamatan Namang	Pasir Kuarsa	PT. Alam Sinergi Sebalai	76,98		
61	Belitung	Desa Mentigi, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Sriyudi Alam Perkasa	39,40	2,24	124,543
62	Bangka	Desa Mapur, Kec. Riau Silip	Pasir Kuarsa	PT. Mitra Persada Resources	85,11	0,05	4,689
63	Belitung Timur	Desa Limbongan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Sumber Alam Antarnusa	164,10	1,89	120,518
64	Bangka	Desa Mapur, Kec. Riau Silip	Pasir Kuarsa	PT. Cinta Mapur Indonesia	137,00	0,05	34,643
65	Bangka	Desa Mapur, Kec. Riau Silip	Pasir Kuarsa	PT. Kwarsa Lampur Pratama	76,43		
66	Belitung	Desa Tanjung Rusa, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Sinar Kuarsa Utama	27,6		
67	Belitung	Desa Air Seruk, Kec. Sijuk	Pasir Kuarsa	CV. Billiton Jaya	9,86		
68	Belitung	Desa Sungai Samak, Kec. Badau	Pasir Kuarsa	CV. Bersatu Bangun Pertiwi	79,16	0,56	70
69	Belitung	Desa Padang Kandis, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	CV. Iripau Hero	91,59	5,26	227,358
70	Belitung	Desa Membalong, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	CV. Iripau Hero	49,50	1,73	51,9
71	Belitung Timur	Desa Batu Itam, Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	CV. Dhika Yogatama	152,70		
72	Bangka Tengah	Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar	Pasir Kuarsa	PT. Walie Tampas Citratama	26,20	0	0
73	Bangka Tengah	Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar	Pasir Kuarsa	PT. Walie Tampas Citratama	82,50	1,1	63,271
74	Belitung Timur	Desa Lilangan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Sejahtera Utama Mitra Jaya	165,20	0,11	3,686
75	Belitung	Desa Cerucuk, Kec. Badau	Pasir Kuarsa	CV. Cahaya Bumi Resource	44,40		
76	Belitung	Desa Mentigi, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Jabel Tri Bersaudara	54,12		
77	Belitung	Desa Mentigi, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Jabel Tri Bersaudara	35,55		
78	Belitung Timur	Desa Simpang Pesak, Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Mitra Bumi Utama	197,72		
79	Bangka	Desa Pugul, Kec. Riau Silip	Kaolin	PT. Kaolino Bangka Sejahtera	12,71	0,2	5,7
80	Bangka	Desa Mapur, Kec. Riau Silip	Pasir Kuarsa	PT. Timah Investasi Mineral	157,42	0	0
81	Belitung Timur	Desa Dukong, Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Bumi Pasundan Mining	98,70		
82	Bangka	Desa Pugul, Kec. Riau Silip	Kaolin	PT. Telaga Intan Putih	44,00	0,5	7,474
83	Bangka Selatan	Kelurahan Gunung Namak, Kec. Toboali	Pasir Kuarsa	PT. Dua Karya Sukses	62,51		



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No	Lokasi		Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Luas Areal Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
	Kabupaten/Kota	Desa/Kecamatan					
84	Bangka	Desa Bantam, Kec. Belinyu	Zirkon	PT. Putraprima Mineral Mandiri	112,50	3,19	16,632
85	Belitung Timur	Desa Sukamandi, Kecamatan Damar	Pasir Kuarsa	CV. Putra Maju Kamex	49,80	-	-
86	Belitung	Desa Cerucuk, Kec. Badau	Pasir Kuarsa	CV. Mandiri Sejahtera Abadi	105,00		
87	Belitung Timur	Desa Tanjung Batu Itam, Kecamatan Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Prima Bundiarta Nusa	92,00	1,69	69,562
88	Belitung	Desa Air Seruk, Kec. Sijuk	Pasir Kuarsa	CV. Lestari Alam Semesta	9,74		
89	Belitung	Desa Sijuk Kec. Sijuk	Zirkon	PT. Mualim Putra Pratama	15,62	0,6	2,249
90	Belitung Timur	Desa Sukamandi, Kecamatan Damar	Pasir Kuarsa	CV. Alfindo	114,70		
91	Belitung Timur	Desa Limbongan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Berkah Sumber Alam	151,40	5,7	172,263
92	Belitung	Desa Lasar, Kec. Membalong, Belitung	Pasir Kuarsa	PT. Belitung Jaya Gemilang	198,90		
93	Belitung	Desa Gunung Riting Kec Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Royal Artha Pratama	87,00		
94	Belitung	Desa Gunung Riting Kec Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Karunia Alam Bangka Belitung	27,44		
95	Bangka Tengah	Kel. Nibung Kecamatan Koba	Zirkon	PT. Bangka Cipta Pratama	120,49	0	0
96	Belitung Timur	Desa Sukamandi, Kec Damar	Pasir Kuarsa	PT. Timah Investasi Mineral	198,40	11,5	248,753
97	Bangka Tengah	Desa Perlang Kec Lubuk Besar	Zirkon	PT. Putraprima Mineral Mandiri	74,99	0	0
98	Belitung Timur	Desa Simpang Pesak dan Tanjung Kelumpang Kec Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Mundu Cirebon Mining	114,00		
99	Belitung	Desa Membalong dan Padang Kandis, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Parit Mujur Sejahtera	94,20	0	0
100	Belitung	Desa Simpang Pesak Kec Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Karya Putera Bangka Belitung	153,50	0	0
101	Belitung Timur	Desa Tg Kelumpang dan Tg Batu Itam, Kec. Simpang Pesak Kab Belitung Timur	Pasir Kuarsa	PT. Bintang Maju Raharja	195,37	0	0
102	Belitung	Desa Sungai Samak, Kec. Badau	Pasir Kuarsa	CV. Cahaya Mandiri Abadi	18,66		
103	Belitung	Desa Padang Kandis, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Prima Bundiarta Nusa	49,64	3,76	57,314
104	Belitung Timur	Desa Batu Penyuh, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Karya Emas Multisani	49,58		
105	Belitung Timur	Desa Limbongan, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Prima Bundiarta Nusa	68,00	0,94	55,088
106	Belitung	Desa Air Seruk dan Air Merbau Kecamatan Sijuk dan Tanjungpandan	Kaolin	PT. Kaolin Indonesia Belitung	36,60		
107	Belitung Timur	Desa Tanjung Kelumpang Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	CV. Permata Batu Hitam	40,80		
108	Belitung Timur	Desa Batu Penyuh Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Bintang Delapan Enam	455,00	0	0
109	Belitung Timur	Desa Simpang Pesak dan Tanjung Batu Itam Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Bintang Delapan Enam	622,00	0	0



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No	Lokasi		Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Luas Areal Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
	Kabupaten/Kota	Desa/Kecamatan					
110	Belitung Timur	Desa Gantung dan Desa Batu Penyau Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Bintang Delapan Enam	49,5	0	0
111	Belitung	Desa Membalong Kec. Membalong	Zirkon	PT. Prima Zircon Mineral	49,00	0	0
112	Belitung	Desa Bantan, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Timah Investasi Mineral	60,56		
113	Belitung	Desa Sijuk Kec. Sijuk	Pasir Kuarsa	PT. Timah Investasi Mineral	24,48		
114	Belitung	Desa Sijuk Kec. Sijuk	Pasir Kuarsa	PT. Timah Investasi Mineral	82,67		
115	Belitung	Desa Bantan, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Timah Investasi Mineral	96,68		
116	Bangka	Kel. Bukit Ketok Kec. Belinyu	Zirkon	PT. Prima Zircon Mineral	48,90	0,9	660
117	Bangka	Kel. Bantam Kec. Belinyu	Zirkon	PT. Silika Utama Sejahtera	48,50		
118	Bangka Selatan	Desa Air Gegas Kecamatan Air Gegas	Zirkon	PT. Bangka Mineral Abadi	193,70	0	0
119	Belitung	Desa Mentigi, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Sriyudi Alam Perkasa	49,47		
120	Belitung Timur	Desa Jangkar Asam, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Timah Investasi Mineral	144,10		
121	Bangka	Desa Mapur Kec. Riau Silip	Pasir Kuarsa	CV. Sejahtera Mineral Babel	44,00		
122	Belitung Timur	Desa Tanjung Kelumpang Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Karya Melati Belitung	49,50	2,3	60,732
123	Belitung	Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk	Kaolin	PT. Intan Alam Abadi	49,80		
124	Belitung	Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk	Kaolin	PT. Mega Alam Makmur	24,03	0	0
125	Belitung	Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk	Kaolin	CV. Kaolindo Investama Sentosa	46,55		
126	Belitung Timur	Desa Lilangan Kec. Gantung	Operasi Produksi	CV. 3G Trust	123,90		
127	Belitung Timur	Desa Tanjung Batu Itam, Kecamatan Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Oetama Konstruksi Energy	234,30		
128	Belitung Timur	Desa Simpang Pesak dan Tanjung Batu Itam Kec. Simpang Pesak	Zirkon	CV. Berkat Sahabat Jaya	161,00		
129	Belitung	Desa Mentigi, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Usaha Mandiri Persada	147,50		
130	Belitung	Desa Padang Kandis dan Membalong	Pasir Kuarsa	PT. Hero Progres International	28,021		
131	Belitung	Desa Mentigi, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	CV. Elyska Indo Plantation	89,40	0,51	47,655
132	Pangkalpinang	Temberan Bukit Intan	Zirkon	PT. Sundaland Internusa			
133	Pangkalpinang	Temberan Bukit Intan	Zirkon	PT. Megah Mineral Sejahtera			
134	Pangkalpinang	Ketapang	Zirkon	PT. Indomas Bara Prima			
135	Bangka Selatan	Laut Sadai	Pasir Kuarsa	PT. Cahaya Bangun Pelangi			
136	Belitung Timur	Desa Gantung Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Mega Mandiri Resource			
137	Bangka Selatan	Laut Sadi	Pasir Kuarsa	PT. Nusa Inti Internasional			
138	Bangka	Pelabuhan Jelitik Sungailiat	Pasir Kuarsa	PT. Pulomas Sentosa			
139	Bangka	Dusum Batu Rusa II Desa Batu Rusa Kec. Merawang	Zirkon	PT. Bersahaja Berkat Sahabat Jaya			



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No	Lokasi		Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Luas Areal Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
	Kabupaten/Kota	Desa/Kecamatan					
140	Belitung	Desa Bintet dan Bukit Lepang Kec. Belinyu Kab. Bangka	Zirkon	PT. Mineral Alam Babel	198,7		
141	Belitung Timur	Simpang Pesak dan Tanjung Batu Itam Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	CV. Berkah Sahabar Jaya	161		
142	Belitung Timur	Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT. Cinta mapur Indonesia	550,93		
143	Belitung	Desa Air Selumar Kec. Sijuk	Kaolin	PT. Kencana Koalin Industri	85,9		
144	Belitung Timur	Desa Limbongan Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT. Prima Bundiarta Nusa	66		
145	Belitung	Desa Sungai Samak Kec. Tanjung Pandan	Kaolin	PT. Hasil Alam Murni			
146	Belitung Timur	Desa Sukamandi Kec. Damar	Pasir Kuarsa	PT. Rimbunan Makmur			
147	Belitung	Desa Banten, Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	CV. Garuda Belitung Berehun	178,4		
148	Bangka	Desa/Kel. Cit Kec. Riau Silip	Pasir Kuarsa	PT Horizon Energi Nusantara	599,76		
149	Belitung Timur	Desa/Kel. Jangkar Asam Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT Satunusa Cakra Mineral	540		
150	Belitung Timur	Desa Sukamandi, Desa/Kelurahan Sukamandi, Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Pasir Kuarsa	PT Bumi Ore Sejahtera	49,91		
151	Belitung Timur	Desa Mengkubang Kec. Damar	Pasir Kuarsa	PT Amin Makmur Bersama	73,56		
152	Belitung Timur	Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT Sumber Alam Antarnusa	787,25		
153	Belitung Timur	Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT Bersahaja Berkat Sahabat jaya	121,4		
154	Belitung Timur	Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT Bersahaja Berkat Sahabat jaya	270,2		
155	Belitung	Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	CV Irpau Hero	49,7		
156	Belitung Timur	Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT Hero Progres International	37,32		
157	Belitung	Kec. Membalong	Kaolin	PT Sandeir Setia Brothers	47,36		
158	Belitung	Kec. Membalong	Kaolin	PT Irpau Hero Progres	20,57		
159	Belitung	Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	CV Silica Jaya Utama	44,7		
160	Belitung	Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	CV Silica Jaya Sejahtera	98		
161	Belitung	Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	CV Silica Jaya	40		
162	Belitung Timur	Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	CV Berkah Bangka Maju	117,5		
163	Bangka	Kec. Belinyu	Kaolin	CV Gunung Lebak	6,3		
164	Belitung Timur	Kec. Kelapa Kampit	Pasir Kuarsa	PT Indahsana Lestari Jaya	205		
165	Belitung Timur	Kec. Kelapa Kampit	Pasir Kuarsa	PT Archie Experenza Manunggal	49,5		
166	Bangka	Kec. Belinyu	Pasir Kuarsa	PT Bangka Samudra Pratama	98		
167	Bangka Selatan	Kec. Tukak Sadai	Pasir Kuarsa	PT Mutiara Lautan Bangka	98,00		
168	Bangka Selaatan	Kec. Pangkalan Baru	Pasir Kuarsa	PT PSR Mutiara Abadi	98		
169	Bangka	Kec. Sungailiat	Pasir Kuarsa	PT Lautan Cahaya Silica	98		
170	Belitung Timur	Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	CV Cahaya Surya Mentari	99		
171	Bangka	Kec. Sungailiat	Pasir Kuarsa	PT Baskara Silica Makmur	98		

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No	Lokasi		Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Luas Areal Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
	Kabupaten/Kota	Desa/Kecamatan					
172	Belitung Timur	Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT Kurnia Mandiri Adiperkasa	98,88		
173	Bangka Tengah	Kec. Namang	Pasir Kuarsa	PT Silica Lautan Mutiara	98		
174	Belitung	Kec. Membalong	Pasir Kuarsa	PT Industri Mineral Belitung	99		
175	Belitung Timur	Kec. Kelapa Kampit	Pasir Kuarsa	PT Indahsana Lestari Jaya	36,84		
176	Bangka	Kec. Sungailiat	Pasir Kuarsa	PT Swaminindo Sntosa Abadi	244		
177	Belitung Timur	Desa Tanjung kelumpang, Desa/Kelurahan Tanjung Kelumpang, Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT Beltim Makmur Jaya	168,41		
178	Belitung Timur	Desa Gantung, Desa/Kelurahan Gantung, Kec. Gantung	Pasir Kuarsa	PT Perkasa Parama Biliton	198,73		
179	Belitung Timur	Dusun Sekip, Desa/Kelurahan Lalang, Kec. Manggar	Pasir Kuarsa	PT Kemilau Kursu Utama	196,81		
180	Bangka Tengah	Desa Lubuk Besar, Desa/Kelurahan Lubuk Besar, Kec. Lubuk Besar	Pasir Kuarsa	PT Bimbim Trasmineratama Sejahtera	340,06		
181	Belitung	Desa Air Selumar, Desa/Kelurahan Air Selumar, Kec. Sijuk	Kaolin	PT Kaolin Belitung Perkasa	99,7		
182	Belitung Timur		Silika	PT Prosper Karya Mandiri	99,54		
183	Belitung Timur	Dusun Batu Belida, Desa/Kelurahan Tanjung Kelumpang, Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT Belantara Jaya Lestari	98		
184	Belitung Timur	Desa Tanjung Kelumpang dan Desa Tanjung Batu Itam Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT Albeta Sukses Makmur	49,15		
185	Belitung Timur	Desa Batu Penyau, Kecamatan Gantung,	Pasir Kuarsa	PT Duta Watu Geotek	99,5		
186	Belitung Timur	Desa Sukamandi, Desa/Kelurahan Sukamandi, Kec. Damar,	Pasir Kuarsa	PT Putera Sukses Mineral	99,7		
187	Bangka Selatan	Desa Sebagin, Kec. Simpang Rimba	Batuan (Tanah Urug)	CV. Cahaya Permis Gemilang	48,66		
188	Belitung	Desa Membalong Kec. Membalong, Belitung	Batuan (Tanah Liat)	CV. Tiana Perkasa Prima	188,70		
189	Belitung	Desa Padang Kandis Kec. Membalong	Batuan (Pasir Bangunan)	PT. Karya Mandiri Persada Belitung	187,10		
190	Belitung	Desa Padang Kandis Kec. Membalong, Belitung	Batuan (Tanah Liat)	PT. Karya Cipta Mandiri Persada	190,70		
191	Belitung Timur	Desa Lenggag Kec. Gantung Kab. Beltim	Batuan (Tanah Liat)	PT. Hero Ceramas	195,00	0,93	34,205
192	Belitung Timur	Desa Kelumpang dan Tanjung Batu Itam Kec. Simpang Pesak	Batuan (Tanah Liat)	PT. Setia Maju Pratama	196,00		
193	Bangka	Desa Jurung, Kec. Merawang	Batuan (Granit)	PT. Aditya Buana Inter	12,86	0	29,376
194	Bangka	Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu	Batuan (Granit)	CV. Karya Mulya	50,00		
195	Belitung Timur	Desa Tanjung Kelumpang, Kec. Simpang Pesak	Pasir Bangunan	PT. Bina Usaha Cipta Pratama	189,20	0	0
196	Belitung Timur	Desa Lilangan, Kec. Gantung	Pasir Bangunan	PT. Karya Cipta Lahanindo	64,00	0,2	4,003



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No	Lokasi		Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Luas Areal Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
	Kabupaten/Kota	Desa/Kecamatan					
197	Belitung Timur	Desa Limbongan, Kec. Gantung	Tanah Liat	PT. Roda Tatamas	151,40	0	0
198	Belitung Timur	Desa Lilangan, Kec. Gantung	Tanah Liat	PT. Sejahtera Utama Mitra Mandiri	389,70		
199	Belitung Timur	Desa Lilangan, Kec. Gantung	Tanah Liat	PT. Sejahtera Utama Mitra Jaya	181,50		
200	Belitung Timur	Desa Selingsing, Kec. Gantung	Pasir Bangunan	Wahyu Epan Yudhistira	5,00		
201	Belitung	Desa Mentigi Kec. Membalong	Pasir Bangunan	PT. Jabel Tri Bersaudara	151,64	2,62	116,929
202	Belitung	Desa Padang Kandis, Kec. Membalong	Pasir Bangunan	PT. Prima Bundiarta Nusa	123,10	5,88	226,641
203	Belitung	Desa Air Seruk, Kec. Sijuk	Pasir Bangunan	PT. Bumi Sentosa Progress	18,20		
204	Belitung	Desa Buluh Tumbang, Kec. Tanjungpandan	Pasir Bangunan	CV. Irpau Hero	35,40	0,7	29,058
205	Belitung	Desa Membalong, Kec. Membalong	Tanah Liat	CV. Irpau Hero	70,76		
206	Belitung	Desa Sungai Samak, Kec. Badau	Tanah Liat	PT. Irpau Hero Progres	150,00	1,23	77,745
207	Belitung	Desa Kacang Butor, Kec. Badau	Batu Granit	PT. Anugerah Kreatif Mandiri	105,26	0	19,604
208	Belitung	Desa Kacang Butor, Kec. Badau	Batu Granit	PT. Belitung Cipta Mandiri	151,82		
209	Belitung	Desa Kacang Butor, Kec. Badau	Batu Granit	PT. Belitung Mitra Mandiri	135,90		
210	Belitung	Desa Perepat, Kec. Membalong	Tanah Liat	CV. Sriyudi Litajaya	500,00	0	0
211	Belitung	Desa Mentigi, Kec. Membalong	Tanah Liat	PT. Sriyudi Alam Perkasa	88,89	0,87	8,903
212	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau	Pasir Bangunan	CV. Putra Belitung Perkasa	61,40		
213	Belitung	Desa Membalong, Kec. Membalong	Pasir Bangunan	CV. Sriyudi Alam Lestari	162,90		
214	Belitung	Desa Membalong, Kec. Membalong	Batu Granit	PT. Gerabelindo	178,35		
215	Belitung	Desa Mentigi, Kec. Membalong	Batu Granit	PT. Ludai Gede Billitonite	138,00		
216	Belitung	Desa Lassar, Kec. Membalong	Tanah Liat	PT. Makin Maju Makmur	199,40		
217	Belitung	Desa Cerucuk, Kec. Badau	Pasir Bangunan	PT. Mitra Cinindo Perkasa	51,30		
218	Bangka Selatan	Desa Gadung, Kec. Toboali	Pasir Bangunan	CV. Empat Bersaudara	18,60		
219	Belitung Timur	Desa Limbongan, Kec. Gantung	Tanah Liat	PT. Prima Bundiarta Nusa	46,00		
220	Belitung Timur	Desa Mentigi Kec. Membalong	Tanah Liat	PT. Prima Bundiarta Nusa	106,00	2,54	97,466
221	Belitung Timur	Desa Limbongan, Kec. Gantung Kab Belitung Timur	Tanah Liat	PT. Jabel Tri Bersaudara	187,80	1,39	43,604
222	Belitung	Desa Mentigi, Kec. Membalong	Tanah Liat	CV. Tunas Mandiri	106,80	0,65	95,956
223	Belitung	Desa Air Seruk Kec. Sijuk	Batuan	CV. Lestari Alam Semesta	9,74		
224	Belitung Timur	Desa Dukong, Kec. Simpang Pesak Kab Belitung Timur	Pasir Bangunan	PT. Prima Sumber Alam Makmur	18,05		



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No	Lokasi		Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas IUP (Ha)	Luas Areal Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
	Kabupaten/Kota	Desa/Kecamatan					
225	Belitung	Desa Padang Kandis, Kec. Membalong	Tanah Liat	PT. Hero Progres International	49,89	0,15	13,571
226	Belitung Timur	Desa Tanjung Kelumpang dan Tanjung Batu Itam, Kec. Simpang Pesak	Tanah Liat	PT. Albeta Maju Sukses	129,70	1,69	24
227	Belitung Timur	Desa Limbongan Kec. Gantung	Tanah Liat	PT. Sumber Alam Antar Nusa	49,60		
228	Belitung Timur	Desa Batu Itam dan Tanjung Kelumpang	Tanah Liat	PT. Albeta Maju Sukses	40,80		
229	Belitung	Desa Padang Kandis Kec. Membalong	Tanah Urug	PT Sandeir Setia Brother	42,51		
230	Belitung Timur	Desa Simpang Pesak dan Desa Dukong Kec. Simpang Pesak	Penggalian Tanah dan Tanah Liat	PT. Albeta Maju Sukses	192,50		
231	Bangka Tengah	Desa Air Mesu Timur Kec. Pangkalan Baru	Granit	PT Tanjung Bukit Menunggal	46,77		
232	Bangka	Kec. Sungailiat	Pasir	Primer Koperasi Angkatan Laut Lanal Bangka Koperasi			
233	Belitung Timur	Kec. Gantung	Tanah Liat	PT Hero Progres International	200,15		
234	Bangka	Kec. Sungailiat	Pasir	PT Adara Jala Samudera	28,00		
235	Bangka	Kec. Riau Silip	Granit	PT Babelindo Trijaya Perkasa	23,00		
236	Belitung Timur	Desa Tanjung kelumpang, Desa/Kelurahan Tanjung Kelumpang, Kec. Simpang Pesak	Pasir Kuarsa	PT Beltim Makmur Jaya	168,41		
237	Kab. Bangka	Desa Cambai, Desa/Kelurahan Cambai, Kec. Namang	Granit	PT Arventa Karya Gemilang	49,52		
238	Bangka Tengah	Desa Jeruk, Desa/Kelurahan Jeruk, Kec. Pangkalan Baru	Granit	PT Lotus Esge Sejahtera	76,80		

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023



Tabel-15. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2022

No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pasir Bangunan	CV. HARAPAN REZEKI BUNGSU		83,5	180.000
2	Pasir Bangunan	PT. PRIMA BUNDIARTA NUSA		123,1	444.000
3	Pasir Bangunan	PT. JABEL TRI BERSAUDARA		151,64	440.000
4	Pasir Bangunan	CV. Irpau Hero		35,40	114.227
5	Pasir Bangunan	CV. Irpau Hero		91,59	122.247
6	Pasir Bangunan	CV. DHIKA YOGATAMA		152,7	228.000
7	Pasir Bangunan	PT. DAGO PASIR ALAM		80,3	408.000
8	Pasir Bangunan	CV. ALFINDO		114,7	180.000
9	Pasir Bangunan	CV. BUMI PASUNDAN		98,7	240.000
10	Pasir Bangunan	PT. SEJAHTERA UTAMA MITRA JAYA		165,2	300.000
11	Pasir Kuarsa	PT. SRIYUDI ALAM PERKASA		39,2	120.000
12	Pasir Kuarsa	PT. SRIYUDI ALAM PERKASA		23,65	300.000
13	Pasir Kuarsa	PT. PRIMA BUNDIARTA NUSA		49,64	240.000
14	Pasir Kuarsa	PT. MITRA PASIR BERLIAN		30,6	180.000
15	Pasir Kuarsa	CV. HARAPAN REJEKI Bungsu		83,5	480.000
16	Pasir Kuarsa	PT. KURNIA MANDIRI ADIPERKASA		190	331.500



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
17	Pasir Kuarsa	PT SUMBER ALAM ANTARNUSA		164,1	180.000
18	Pasir Kuarsa	PT. KARYA CIPTA LAHANINDO		132,4	360.000
19	Pasir Kuarsa	PT. BELITUNG SAND MINING		177,9	200.000
20	Pasir Kuarsa	PT. BELITUNG SAND MINING		192	400.000
21	Pasir Kuarsa	PT. BELITUNG SAND MINING		71,3	200.000
22	Pasir Kuarsa	PT. HAMPARAN MINERALINDO ABADI		198	277.500
23	Pasir Kuarsa	PT. SEJAHTERA UTAMA MITRA JAYA		190	300.000
24	Pasir Kuarsa	PT. Pacific Dipta Karya		197	92.000
25	Tanah Liat	PT. Hero Ceramas		195,00	81.473
26	Pasir Kuarsa	PT. Hero Progres Internasional		198	101.728
27	Pasir Kuarsa	PT. Hero Progres Internasional		180	89.229
28	Pasir Kuarsa	PD. DUTA LESTARI		1,3	1.300
29	Pasir Kuarsa	PT. MITRA PERSADA RESOURCES		82,31	71.001
30	pasir kuarsa	PT.CINTA MAPUR INDONESIA		137	172.872
31	pasir kuarsa	CV. Dersan Silica Indonesia		40,00	371.250
32	pasir kuarsa	PT. MITRA PERSADA RESOURCES		32,84	135.000
33	pasir kuarsa	PT. MITRA PERSADA RESOURCES		71	127.008
34	Pasir Kuarsa	PT. WALIE TAMPAS CITRATAMA		150,4	149.940
35	Pasir Kuarsa	PT. WALIE TAMPAS CITRATAMA		46,2	780.000
36	Pasir Kwarsa	PT. MUTIARA TERANG RESOURCES		170	100.000
37	Batu Granit	PT. ANUGERAH KREATIF MANDIRI		105,261	23.750

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
38	Granit	PT. Ludai Gede Bilitonite		138,00	86.262
39	Batu Granit	PT. ADITYA BUANA INTER		12,86	180.000
40	Batu Granit	PT. MANDIRI KARYA MAKMUR		150	360.000
41	Granit	PT. BUMIWARNA AGUNG PERKASA		150	480.000
42	Tanah Liat	PT. SRIYUDI ALAM PERKASA		88,89	48.000
43	Tanah liat	PT. PRIMA BUDIARTA NUSA		106	160.000
44	Tanah Liat	CV. SRIYUDI LITA JAYA		500	15.000
45	Tanah Liat	CV. Harapan Aldi Sejahtera		150,00	86.632
46	Tanah Liat	CV. Iripau Hero		28,3	110.000
47	Tanah Liat	PT. JABEL TRI BERSAUDARA		92	80.000
48	Tanah Liat	PT. Hero Ceramas		195,00	81.473
49	Tanah Liat	PT. Setia Maju Pratama		196,00	96.000

Sumber: Dinas ESDM, 2020

Tabel-15A. Pertambangan yang Belum/Tidak Beroperasi
Kabupaten: Bangka Tengah
Tahun Data: 2019

No	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Areal (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)



1	Timah	PT. Bangka Timah Utama Sejahtera	114.00
2	Timah	PT. Sarana Marindo	519.70
3	Timah	PT. Mutiara Prima Sejahtera	1,220.00
4	Timah	PT. Mitra Stania Prima	1,648.00
5	Timah	CV. Serumpun Sebalai	441.63
6	Timah	PT. Bangka Belitung Timah Sejahtera	164.00
7	Timah	PT. Teluk Kijing Energi	182.70
8	Timah	PT. Lumbung Mineral Alam	2,305.00
9	Timah	CV. Dua Sekawan	66.00
10	Timah	PT. Timah (Persero) Tbk	32,110.34
11	Granit	PT. Mandiri Karya Makmur	150.00
12	Pasir Kuarsa	PT. Tri Bintang Abadi	20.00
13	Pasir Kuarsa	PT. Wali Tampas Citratama	196.60
14	Pasir Kuarsa	PT. Tambang Jaya Indah	189.30
15	Pasir Kuarsa	PT. Mitra Persada Resources	32.84
16	Pasir Kuarsa	PT. Vitrama Properti	32.84
Keterangan :			

Tidak beroperasi dikarenakan : untuk jenis galian batuan (sirtukil) disebabkan karena air sungai yang dalam alasan karena tidak potensial lagi karena biaya operasional sudah tidak ada

Tabel 16. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2023



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi Penanaman	Penghijauan				Reboisasi		
			Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Jumlah Pohon Hidup (batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bangka Selatan	Desa Payung, Kec. Payung	60	60	64000	17941			
2	Bangka Selatan	Desa Payung, Kec. Payung	25	25	30000	13880			
3	Bangka Tengah	Desa Puput, Kec. Simpang Katis	50	50	60000	21089			
4	Bangka Tengah	Desa Celuak, Kec. Simpang Katis	25	25	30000	6220			
5	Bangka Tengah	Desa Namang, Kec. Namang	25	25	30000	12344			
6	Bangka	Desa Pugul, Kec. Riau Silip	25	25	30000	4310			
7	Belitung	Desa Badau, Kec. Badau					150	150	165000
8	Belitung Timur	Desa Dendang, Kec. Nyuruk					40	40	44000
9	Belitung Timur	Desa Simpang Renggang, Kec. Simpang Tiga					30	30	33000

Keterangan:

Sumber: Sumber : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk, 2024



Tabel 16. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 203

NO	NAMA INSTANSI	TANGGAL	LOKASI PENANAMAN			STATUS LAHAN		JENIS TANAMAN	JUMLAH TANAMAN (Batang)	LUAS PENANAMAN (Ha)
			Administrasi	x	y	Kawasan Hutan	Areal penggunaan Lain			
1	UPTD KPHP Rambat Menduyung	- 20 Juni 2023	Desa Belo Laut	522585	9771115	HL Tanjung Punai		Rizhopora	4,000	1
		- 20 Mar 2023	Desa Pelangas	541674	9786733		APL	Alpukat	100	0,5
	Jumlah								4,100	1.5
2	POLDA Babel	20-06-2023	Desa Rebo, Kec. Merawang, Kab. Bangka	627281.4855	9779005.965	Eks Tambang		Kayu Putih	2,000	7
		20-06-2023	Pantai Pait, Desa Belo Laut, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat	5222585	9771115	HL		Rizhopora	4,000	5
		20-06-2023	Pantai Tanjung Bunga	630741.8052	9763456.293	Eks Tambang		Mangrove	1,000	1
			Kel. Temberan,							
			Pangkalpinang							
		20-06-2023	Desa Penyak, Kec. Koba				pantai	Prepat	1,000	2
			Kab. Bangka Tengah							



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



NO	NAMA INSTANSI	TANGGAL	LOKASI PENANAMAN			STATUS LAHAN		JENIS TANAMAN	JUMLAH TANAMAN (Batang)	LUAS PENANAMAN (Ha)
			Administrasi	x	y	Kawasan Hutan	Areal penggunaan Lain			
		20-06-2023	Parit 3 Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan	666104.5243	9664854.437	Eks Tambang		Jambu Mete	1,500	3
		20-06-2023	Dusun Teluk Dalam, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung	790762.3485	9664617.876	Eks Tambang		- Kayu Putih	1,000	4
								- Jambu Mete	1,000	
		20-06-2023	Desa Mengkubang, Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	790762.3485	9664617.876	Eks Tambang		Mangrove	2,500	4
	Jumlah								14,000	26
3	UPTD KPHP Muntai	23-06-2023	Kelurahan Toboali	666072	9664885	HL		Jambu Mete	3,000	1
	Palas									
	Jumlah								3,000	1
4	DLH Kab. Bangka	19-05-2023	Kelurahan Toboali	790762.3485	9664617.876		Hutan Kota	- Jambu Mete	500	2.88
	Selatan							- Alpukat	500	
								- Durian	500	
								- Pucuk Merah	250	



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



NO	NAMA INSTANSI	TANGGAL	LOKASI PENANAMAN			STATUS LAHAN		JENIS TANAMAN	JUMLAH TANAMAN (Batang)	LUAS PENANAMAN (Ha)
			Administrasi	x	y	Kawasan Hutan	Areal penggunaan Lain			
								- Ketapang Kencana	250	
		26-06-2023	Desa Tukak	790762.3485	9664617.876		Hutan Mangrove	Mangrove	2,000	2
	Jumlah								4,000	4.88
5	DLH Kab. Belitung	20-03-2023	Desa Dukong, Kec.	795519	9691586		APL	Tanaman Berkayu	1,000	0.5
			Tanjungpandan							
	Jumlah								1,000	0.5
	Jumlah keseluruhan								26,100	33.88

Lampiran 2 : Data Penanaman Pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PHHK)/Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023

NO	NAMA PERUSAHAAN	TANGGAL	LOKASI PENANAMAN			STATUS LAHAN		JENIS TANAMAN	JUMLAH TANAMAN (Batang)	LUAS PENANAMAN (Ha)
			Administrasi	x	y	Kawasan Hutan	Areal penggunaan Lain			
1	PT. Indo Sukses Lestari	31-01-2023	- Jangkar Asam	166576.2635	9668022.666	HP		Karet	13,176	25.83
	Makmur	30-04-2023	- Dendang	831669.7792	9664707.86	HP		Karet	3,425	6.84
		31-05-2023	- Sp. Pesak	166506.9845	9662780.58	HP		Karet	1,628	3.46
	Jumlah								18,229	36.13
2	PT. Hutan Lestari Raya	Jan 2023		604328.2927	9699367.964	HP		- Kaliandra	200	0,6



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



NO	NAMA INSTANSI	TANGGAL	LOKASI PENANAMAN			STATUS LAHAN		JENIS TANAMAN	JUMLAH TANAMAN (Batang)	LUAS PENANAMAN (Ha)
			Administrasi	x	y	Kawasan Hutan	Areal penggunaan Lain			
								- Akasia	500	
		Feb 2023		604065.2472	9699618.558	HP		- Akasia	700	0,6
		Maret 2023		578715.0668	9700641.728	HP		- Akasia	5,650	4.5
		April 2023		602606.2999	9700915.07	HP		- Akasia	1,486	1.2
	Jumlah								8,536	6.9
3	PT. Inhutani V Unit		Desa Cit, Kab. Bangka	602606.2999	9700915.07	HP Sungailiat Mapur		- Jengkol	4,403	29
	Bangka							- Agroforestry Singkong	400,000	40
			Desa Bintet, Kab. Bangka	602606.2999	602606.2999	HP Sungailiat Mapur		- MPTS	28,232	71
				602606.2999	9700915.07	HP Sungailiat Mapur		- Karet	18,414	17
	Jumlah								451,049	157
4	PT. Istana Kawi Kencana	Maret 2023	Desa Pugul, Kec. Riau	602606.2999	602606.2999			- Akasia	1,000	1.5
			Silip, Kab. Bangka	602606.2999	602606.2999			- Kaliandra	356	0.5
				602606.2999	602606.2999			- Lamtoro	725	1



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



NO	NAMA INSTANSI	TANGGAL	LOKASI PENANAMAN			STATUS LAHAN		JENIS TANAMAN	JUMLAH TANAMAN (Batang)	LUAS PENANAMAN (Ha)
			Administrasi	x	y	Kawasan Hutan	Areal penggunaan Lain			
		Mei 2023	Desa Gunung Pelawan	602606.2999	602606.2999			- Lamtoro	556	0.5
			Kab. Bangka	602606.2999	602606.2999			- Akasia	460	0.5
	Jumlah								3,097	4
	Jumlah Keseluruhan								480,911	204.03

abel-17 Luas dan Kerusakan Lahan Gambut

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2023

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	Luas (Ha)	Kedalaman (m)	Persentase Kerusakan (%)	Penyebab Kerusakan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangka	Bukit Layang	0,2	< 3	0,01	Pertambangan
2		Kota Waringin	312,5	< 3	11,34	Perkebunan
3			50,6	< 3	1,84	Pertambangan
4		Pangkal Niur	8,3	< 3	0,30	Perkebunan
5		Penagan	4,7	< 3	0,17	Lahan Terbuka
6			2,9	< 3	0,11	Perkebunan
7			24,1	< 3	0,88	Pertambangan
8			291,0	< 3	10,56	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
9		Pugul	51,9	< 3	1,88	Perkebunan
10			65,6	< 3	2,38	Pertambangan



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	Luas (Ha)	Kedalaman (m)	Persentase Kerusakan (%)	Penyebab Kerusakan
1	2	3	4	5	6	7
11	Bangka Barat	Rebo	245,1	< 3	8,89	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
12			78,3	< 3	2,84	Pemukiman
13			58,1	< 3	2,11	Perkebunan
14			24,5	< 3	0,89	Pertambangan
15			395,2	< 3	14,34	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
16		Riau Silip	129,7	< 3	4,71	Perkebunan
17			10,6	< 3	0,38	Pertambangan
18			79,4	< 3	2,88	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
19		Air Menduyung	15,9	< 3	0,18	Pertanian Lahan Kering
20		Air Nyatoh	27,0	< 3	0,30	Lahan Terbuka
21		Berang	15,8	< 3	0,18	Perkebunan
22			392,6	< 3	4,40	Pertanian Lahan Kering
23			117,3	< 3	1,32	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
24		Ibul	23,6	< 3	0,26	Perkebunan
25			271,1	< 3	3,04	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
26		Limbang	74,2	< 3	0,83	Pertambangan
27			193,2	< 3	2,17	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
28		Pangkal Beras	50,0	< 3	0,56	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
29		Pusuk	41,4	< 3	0,46	Pertanian Lahan Kering
30			48,9	< 3	0,55	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
31		Ranggi Asam	1,7	< 3	0,02	Perkebunan
32			49,7	< 3	0,56	Pertambangan



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	Luas (Ha)	Kedalaman (m)	Persentase Kerusakan (%)	Penyebab Kerusakan
1	2	3	4	5	6	7
33		Rukam	79,5	< 3	0,89	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
34			127,6	< 3	1,43	Lahan Terbuka
35			37,6	< 3	0,42	Perkebunan
36			146,6	< 3	1,64	Pertambangan
37			330,6	< 3	3,71	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
38		Simpang Tiga	65,5	< 3	0,73	Pertanian Lahan Kering
39			33,9	< 3	0,38	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
40		Sinar Surya	1,2	< 3	0,01	Pemukiman
41			398,2	< 3	4,46	Perkebunan
42			147,3	< 3	1,65	Pertambangan
43			113,3	< 3	1,27	Pertanian Lahan Kering
44		Tuik	4,4	< 3	0,05	Pemukiman
45			347,5	< 3	3,90	Pertanian Lahan Kering
46			137,6	< 3	1,54	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
47	Bangka Selatan	Batu Betumpang	259,3	< 3	1,96	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
48		Gadung	13,3	< 3	0,10	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
49		Kepoh	4839,6	< 3	36,64	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
50		Keposang	46,9	< 3	0,35	Perkebunan
51			258,2	< 3	1,95	Pertambangan
52			210,1	< 3	1,59	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
53		Pergam	3,3	< 3	0,03	Lahan Terbuka
54			241,4	< 3	1,83	Pertanian Lahan Kering



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	Luas (Ha)	Kedalaman (m)	Persentase Kerusakan (%)	Penyebab Kerusakan
1	2	3	4	5	6	7
55	Bangka Tengah	Tanjunglabu	868,8	< 3	6,58	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
56			403,2	< 3	3,05	Perkebunan
57			51,8	< 3	0,39	Pertanian Lahan Kering
58			171,1	< 3	1,30	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
59		Tepus	6,4	< 3	0,05	Pertambangan
60			700,9	< 3	5,31	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
61		Toboali	65,1	< 3	0,49	Perkebunan
62			367,6	< 3	2,78	Pertambangan
63			84,9	< 3	0,64	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
64			85,1	< 3	0,48	Perkebunan
65		Batu Beriga	390,0	< 3	2,20	Pertambangan
66			201,3	< 3	1,13	Pertanian Lahan Kering
67			91,9	< 3	0,52	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
68			80,8	< 3	0,46	Perkebunan
69		Belilik	15,5	< 3	0,09	Pertambangan
70			4,0	< 3	0,02	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
71			88,9	< 3	0,50	Pemukiman
72		Lubuk Besar	148,8	< 3	0,84	Perkebunan
73			170,5	< 3	0,96	Pertambangan
74			137,6	< 3	0,78	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
75		Lubuk Lingkok	40,6	< 3	0,23	Pemukiman
76			330,3	< 3	1,86	Perkebunan



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	Luas (Ha)	Kedalaman (m)	Persentase Kerusakan (%)	Penyebab Kerusakan
1	2	3	4	5	6	7
77		Melabun	115,5	< 3	0,65	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
78			1,7	< 3	0,01	Perkebunan
79			0,0	< 3	0,00	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
80		Munggu	19,7	< 3	0,11	Lahan Terbuka
81			24,1	< 3	0,14	Perkebunan
82			0,1	< 3	0,00	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
83		Sungai Selan	184,2	< 3	1,04	Lahan Terbuka
84			3,0	< 3	0,02	Pemukiman
85			605,8	< 3	3,41	Perkebunan
86			14,8	< 3	0,08	Pertambangan
87			48,7	< 3	0,27	Pertanian Lahan Kering
88			1502,7	< 3	8,47	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
89		Sungai Selan Atas	119,3	< 3	0,67	Perkebunan
90			45,0	< 3	0,25	Pertambangan
91			87,7	< 3	0,49	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
92		Tanjung Pura	240,3	< 3	1,35	Lahan Terbuka
93			7,6	< 3	0,04	Pemukiman
94			24,0	< 3	0,14	Perkebunan
95			137,7	< 3	0,78	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
96	Pangkalpinang	Air Itam	12,5	< 3	0,57	Pemukiman
97		Air Mawar	235,5	< 3	10,70	Pemukiman
98			26,1	< 3	1,19	Pertambangan
99			0,3	< 3	0,01	Pertanian Lahan Kering Campur Semak



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	Luas (Ha)	Kedalaman (m)	Persentase Kerusakan (%)	Penyebab Kerusakan
1	2	3	4	5	6	7
100		Ampui	35,2	< 3	1,60	Pemukiman
101		Bacang	51,4	< 3	2,34	Pemukiman
102			18,5	< 3	0,84	Pertambangan
103			4,9	< 3	0,22	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
104		Gabek Dua	83,5	< 3	3,79	Pemukiman
105		Gabek Satu	26,3	< 3	1,20	Pemukiman
106		Jerambah Gantung	0,0	< 3	0,00	Pemukiman
107		Ketapang	61,4	< 3	2,79	Pemukiman
108			0,7	< 3	0,03	Pertambangan
109		Lontong Pancur	92,5	< 3	4,20	Pemukiman
110		Opas Indah	13,7	< 3	0,62	Pemukiman
111		Pasir Garam	61,8	< 3	2,81	Pemukiman
112		Rejo Sari	39,6	< 3	1,80	Pemukiman
113		Selindung	242,2	< 3	11,01	Pemukiman
114			28,2	< 3	1,28	Tambak
115		Selindung Baru	120,9	< 3	5,50	Pemukiman
116		Sinar Bulan	104,1	< 3	4,73	Pemukiman
117			13,6	< 3	0,62	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
118		Temberan	261,8	< 3	11,90	Pemukiman
119			96,0	< 3	4,36	Pertanian Lahan Kering Campur Semak
120			59,8	< 3	2,72	Tambak

Keterangan:

Sumber: IGT Lahan Gambut Kementan, IGT Penutup Lahan tahun 2022, BPKHTL Wilayah XIII, data diolah



Tabel-18. Jumlah dan Produksi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2023

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kabupaten Bangka	PT. Inhutani V Unit Bangka		16.73	SK.377/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009
2	Kabupaten Bangka	PT. Istana Kawi Kencana		13.44	SK.136/Menhut-II/2010 tanggal 25 Maret 2010
3	Kabupaten Bangka	KTH Panca Lestari II		405	SK.1615/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2020
4	Kabupaten Bangka	KTH Plasma Nutfah		29	SK.688/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2018
5	Kabupaten Bangka	KTH Panca Indah Lestari		11	SK.2040/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017
6	Kabupaten Bangka	KTH Panca Lestari		680	SK.1714/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2020 jo
7	Kabupaten Bangka	Deniang Lestari		330	SK.1616/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2020
8	Kabupaten Belitung	KTH Lestari		81	SK.768/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2018
9	Kabupaten Belitung	KTH Lestari		149	SK.5631/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018
10	Kabupaten Belitung	KTH Maju Jaya		53	SK.770/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2018
11	Kabupaten Belitung	KTH Bukit Harapan		27	SK.767/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2018
12	Kabupaten Belitung	Maju Bersama		420	SK.4801/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2019
13	Kabupaten Belitung	Gapoktan Kembiri Lestari		837	SK.7114/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2018
14	Kabupaten Belitung	KTH Mekar Jaya		244	SK.6841/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2018
15	Kabupaten Belitung	KTH Libut Jaya		127	522/536.a/DPK/2013
16	Kabupaten Belitung	KTH Padang Jaya		107	522/803/DPK/2013
17	Kabupaten Belitung	KTH Simpor Lestari		81	SK.4003/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Kabupaten Belitung	KTH Berutak Angus		47	SK.4004/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017
19	Kabupaten Belitung	Gamalina		87	406/SK/DTPHP2KKP
20	Kabupaten Belitung	Kelompok Tani Hutan Sengkelik		320	SK.7059/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017
21	Kabupaten Belitung	Kelompok Tani Hutan Aik Kemang		418	SK.7060/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017
22	Kabupaten Belitung	KTH Sumber Rezeki		34	SK.4006/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017
23	Kabupaten Belitung	Kelompok Tani Hutan Tunas Mekar		28	SK.7058/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017
24	Kabupaten Belitung	KTH Nyurok Jaya		47	SK.4005/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017
25	Kabupaten Belitung	KTH Tunas Jaya		25	522/802/DPK/2013
26	Kabupaten Belitung	Kan Jaya		31	404/SK/DTPHP2KKP
27	Kabupaten Belitung	Akasia Mangium		85	403/SK/DTPHP2KKP
28	Kabupaten Belitung	Mahoni		110	402/SK/DTPHP2KKP
29	Kabupaten Belitung	Sengon		75	405/SK/DTPHP2KKP
30	Kabupaten Belitung	KTH Maju Bersama		420	SK. 5781/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018
31	Kabupaten Bangka Barat	PT. Bangun Rimba Sejahtera		57.235	SK.336/Menhut-II/2013 tanggal 16 Mei 2013 jo SK.639/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2018
32	Kabupaten Bangka Barat	Salimin Tandan (KTH Air Belo I)		1,28	188.45/361/2.02.01/2012
33	Kabupaten Bangka Barat	Hariyadi (KTH Air Belo I)		2,50	188.45/385/2.02.01/2012
34	Kabupaten Bangka Barat	KTH Mayang I		28,24	SK.2045/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017
35	Kabupaten Bangka Barat	Awin (KTH Air Belo I)		1,11	188.45/391/2.02.01/2012
36	Kabupaten Bangka Barat	Dona (KTH Air Belo I)		0,95	188.45/377/2.02.01/2012
37	Kabupaten Bangka Barat	Muszul (KTH Air Belo I)		1,07	188.45/390/2.02.01/2012
38	Kabupaten Bangka Barat	Sahrul Umar (KTH Air Belo I)		0,53	188.45/384/2.02.01/2012
39	Kabupaten Bangka Barat	Saldin (KTH Air Belo I)		2,50	188.45/389/2.02.01/2012
40	Kabupaten Bangka Barat	Asmadi (KTH Air Belo I)		1,17	188.45/383/2.02.01/2012
41	Kabupaten Bangka Barat	Rusduan (KTH Air Belo I)		13,80	188.45/388/2.02.01/2012
42	Kabupaten Bangka Barat	Falen Atma Sagita (KTH Air Belo I)		2,15	188.45/376/2.02.01/2012
43	Kabupaten Bangka Barat	Jufri (KTH Air Belo I)		1,99	188.45/387/2.02.01/2012

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44	Kabupaten Bangka Barat	Amadin (KTH Air Belo I)		2,30	188.45/382/2.02.01/2012
45	Kabupaten Bangka Barat	Kud (KTH Air Belo I)		0,69	188.45/365/2.02.01/2012
46	Kabupaten Bangka Barat	Abil (KTH Air Belo I)		2,00	188.45/386/2.02.01/2012
47	Kabupaten Bangka Barat	Daini (KTH Air Belo I)		1,80	188.45/367/2.02.01/2012
48	Kabupaten Bangka Barat	Gapar (KTH Air Belo I)		0,78	188.45/375/2.02.01/2012
49	Kabupaten Bangka Barat	Agus (KTH Air Belo I)		0,80	188.45/381/2.02.01/2012
50	Kabupaten Bangka Barat	Nasran (KTH Air Belo I)		5,70	188.45/380/2.02.01/2012
51	Kabupaten Bangka Barat	Arli (KTH Air Belo I)		1,06	188.45/374/2.02.01/2012
52	Kabupaten Bangka Barat	KSU Penyambung Permai		90,27	SK.2044/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017
53	Kabupaten Bangka Barat	Samin (KTH Air Belo I)		1,90	188.45/379/2.02.01/2012
54	Kabupaten Bangka Barat	Jais (KTH Air Belo I)		3,75	188.45/366/2.02.01/2012
55	Kabupaten Bangka Barat	Waris (KTH Air Belo I)		0,30	188.45/378/2.02.01/2012
56	Kabupaten Bangka Barat	Kimin (KTH Air Belo I)		2,70	188.45/373/2.02.01/2012
57	Kabupaten Bangka Barat	Jamisa (KTH Air Belo I)		0,82	188.45/372/2.02.01/2012
58	Kabupaten Bangka Barat	Amin (KTH Air Belo I)		3,30	188.45/371/2.02.01/2012
59	Kabupaten Bangka Barat	Zulhaidir (KTH Air Belo I)		1,52	188.45/370/2.02.01/2012
60	Kabupaten Bangka Barat	Panudin (KTH Air Belo I)		1,21	188.45/369/2.02.01/2012
61	Kabupaten Bangka Barat	Rima Melati (KTH Air Belo I)		8,00	188.45/368/2.02.01/2012
62	Kabupaten Bangka Barat	KSU Sekar Biru Sejahtera		308,54	SK.2043/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017
63	Kabupaten Bangka Barat	Sakirin (KTH Air Belo I)		1,00	188.45/364/2.02.01/2012
64	Kabupaten Bangka Barat	Sarli (KTH Air Belo I)		1,38	188.45/363/2.02.01/2012
65	Kabupaten Bangka Barat	Sadimin Dul Hadi (KTH Air Belo I)		4,00	188.45/362/2.02.01/2012
66	Kabupaten Bangka Barat	Eva Afriani (KTH Air Belo I)		14,00	188.45/392/2.02.01/2012
67	Kabupaten Bangka Barat	KTH Air Menduyung II		50,15	188.45/205/2.02.02/2014
68	Kabupaten Bangka Barat	KTH Air Menduyung I		49,98	188.45/206/2.02.02/2014
69	Kabupaten Bangka Barat	KTH Air Belo II		37,10	188.45/207/2.02.02/2014
70	Kabupaten Bangka Barat	KTH Air Menduyung III		45,62	188.45/462/2.02.02/2014
71	Kabupaten Bangka Tengah	PT. Agrindo Persada Lestari		26.259,00	SK.338/Menhut-II/2014 tanggal 27 Maret 2014

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
72	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Beruang Abadi		142,02	SK. 3741/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2017
73	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Katis Maju		27,33	188.45/618/DPK/2015
74	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Tunas Harapan		18,8	188.45/621/DPK/2015
75	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Kawa Bae		86,41	SK. 3743/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2017
76	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Selan Jaya II		16,51	SK. 3746/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2017
77	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Selan Jaya II		9,75	SK. 3745/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2017
78	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Laju Mandiri		23,22	SK. 3744/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2017
79	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Bejunjung		14,72	SK. 3742/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2017
80	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Selan Jaya		3,29	188.45/622/DPK/2015
81	Kabupaten Bangka Selatan	PT. Hutan Lestari Raya		31.630,00	19/1/IUPPHK-HI/PMDN/2017
82	Kabupaten Bangka Selatan	KSU Mandiri Bina Pribumi Permai		2045	SK. 1204/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018
83	Kabupaten Belitung Timur	PT. Indo Sukses Lestari Makmur		10.025,19	SK. 114/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2019
84	Kabupaten Belitung Timur	PT. Andalan Karya Pertiwi		29,14	SK.8/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2015
85	Kabupaten Belitung Timur	Ahidin Said (KTH Aik Kubing)		2,30	503/ 022/ IUPHHK-HTR/ BPMPPT-BELTIM/ IV/ 2013
86	Kabupaten Belitung Timur	Jemahi		5,73	503/023/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
87	Kabupaten Belitung Timur	Suryadin (Senyubuk II)		3,00	503/103/IUPHHK-HTR/BPMPPT-BELTIM/VII/2013
88	Kabupaten Belitung Timur	Tami		0,26	503/003/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
89	Kabupaten Belitung Timur	Jahatim		3,43	503/011/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
90	Kabupaten Belitung Timur	Arpendi		0,71	503/004/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
91	Kabupaten Belitung Timur	Rahmadani Saputra		3,42	503/005/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
92	Kabupaten Belitung Timur	Timan		2,83	503/012/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
93	Kabupaten Belitung Timur	Satia Raharja		4,11	503/001/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
94	Kabupaten Belitung Timur	Musliadi		1,49	503/006/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
95	Kabupaten Belitung Timur	Rohandi		3,98	503/002/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
96	Kabupaten Belitung Timur	Tri Sutrisno		2,01	503/021/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
97	Kabupaten Belitung Timur	Darsono		0,36	503/013/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
98	Kabupaten Belitung Timur	Buhri		3,95	503/007/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
99	Kabupaten Belitung Timur	Rohani		3,81	503/008/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
100	Kabupaten Belitung Timur	Indratno		1,05	503/014/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
101	Kabupaten Belitung Timur	Irwandi		3,64	503/009/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
102	Kabupaten Belitung Timur	Narjo		7,11	503/022/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
103	Kabupaten Belitung Timur	Zulkarnaen		3,23	503/010/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
104	Kabupaten Belitung Timur	Agus Setiawan		0,09	503/015/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
105	Kabupaten Belitung Timur	Rosmidi		2,13	503/016/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
106	Kabupaten Belitung Timur	Hasnuri		1,69	503/017/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
107	Kabupaten Belitung Timur	Leo Sulastrio		2,59	503/018/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
108	Kabupaten Belitung Timur	Basri		0,80	503/019/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
109	Kabupaten Belitung Timur	Rustadi		0,33	503/020/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
110	Kabupaten Belitung Timur	Belihan (KTH Karya Luhur Lestari)		3,70	503/ 037/ IUPHHK-HTR/ BPMP-BELTIM/ IV/ 2013
111	Kabupaten Belitung Timur	Amran		1,76	503/024/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
112	Kabupaten Belitung Timur	Anto		2,13	503/025/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
113	Kabupaten Belitung Timur	Suriyalan		2,30	503/026/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
114	Kabupaten Belitung Timur	Herman Sawiran		2,49	503/027/IUPHHK-HTR/BPPT-BELTIM/IX/2012
115	Kabupaten Belitung Timur	Hariadi (KTH Aik Kubing)		1,60	503/ 001/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
116	Kabupaten Belitung Timur	Sudarjo (KTH Aik Kubing)		1,40	503/ 002/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
117	Kabupaten Belitung Timur	Hartanto (KTH Aik Kubing)		3,20	503/ 003/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
118	Kabupaten Belitung Timur	Dewi (KTH Aik Kubing)		0,60	503/ 004/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
119	Kabupaten Belitung Timur	Karyadi (KTH Aik Kubing)		6,70	503/ 005/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
120	Kabupaten Belitung Timur	Marzuli (KTH Aik Kubing)		3,70	503/ 006/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
121	Kabupaten Belitung Timur	Jemaer Jahan (KTH Aik Kubing)		2,60	503/ 007/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
122	Kabupaten Belitung Timur	Rosdianto (KTH Aik Kubing)		2,70	503/ 008/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
123	Kabupaten Belitung Timur	Juriandi (KTH Aik Kubing)		0,30	503/ 009/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
124	Kabupaten Belitung Timur	Junaidi Jenamin (KTH Aik Kubing)		1,20	503/ 010/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
125	Kabupaten Belitung Timur	Juherman (KTH Aik Kubing)		2,20	503/ 011/ IUPHHK-HTR/ BPMPT BELTIM/ IV/ 2013
126	Kabupaten Belitung Timur	Ridwan (KTH Aik Kubing)		3,20	503/ 012/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
127	Kabupaten Belitung Timur	Karyandi (KTH Aik Kubing)		0,60	503/ 013/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
128	Kabupaten Belitung Timur	Supardi (KTH Aik Kubing)		1,70	503/ 014/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
129	Kabupaten Belitung Timur	Sumadi (KTH Aik Kubing)		0,80	503/ 015/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
130	Kabupaten Belitung Timur	Ardia Yansah (KTH Aik Kubing)		1,00	503/ 016/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
131	Kabupaten Belitung Timur	Suparjo (KTH Aik Kubing)		0,80	503/ 017/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
132	Kabupaten Belitung Timur	Sobli Sapa (KTH Aik Kubing)		1,20	503/ 018/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
133	Kabupaten Belitung Timur	Yaman (KTH Aik Kubing)		3,60	503/ 019/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
134	Kabupaten Belitung Timur	Hamija (KTH Aik Kubing)		7,20	503/ 020/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
135	Kabupaten Belitung Timur	Muslin (KTH Aik Kubing)		5,10	503/ 021/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
136	Kabupaten Belitung Timur	Suyudi (KTH Aik Kubing)		3,00	503/ 023/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
137	Kabupaten Belitung Timur	Herwanto (KTH Karya Luhur Lestari)		5,00	503/ 024/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
138	Kabupaten Belitung Timur	Hikardi (KTH Karya Luhur Lestari)		1,50	503/ 025/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
139	Kabupaten Belitung Timur	Hisno (KTH Karya Luhur Lestari)		3,30	503/ 026/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
140	Kabupaten Belitung Timur	Espandi (KTH Karya Luhur Lestari)		1,70	503/ 027/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
141	Kabupaten Belitung Timur	Arjani (KTH Karya Luhur Lestari)		2,60	503/ 028/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
142	Kabupaten Belitung Timur	Aridi (KTH Karya Luhur Lestari)		1,00	503/ 029/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
143	Kabupaten Belitung Timur	Syahriandi Ali (KTH Karya Luhur Lestari)		2,20	503/ 030/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
144	Kabupaten Belitung Timur	Zuhirman (KTH Karya Luhur Lestari)		2,80	503/ 031/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
145	Kabupaten Belitung Timur	Atrisno (KTH Karya Luhur Lestari)		2,20	503/ 032/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
146	Kabupaten Belitung Timur	Ahrozi (KTH Karya Luhur Lestari)		1,70	503/ 033/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
147	Kabupaten Belitung Timur	Darmawan (KTH Karya Luhur Lestari)		0,50	503/ 034/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
148	Kabupaten Belitung Timur	Hendri Gunawan (KTH Karya Luhur Lestari)		0,60	503/ 035/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
149	Kabupaten Belitung Timur	Asnawi (KTH Karya Luhur Lestari)		1,70	503/ 036/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
150	Kabupaten Belitung Timur	Supran (KTH Karya Luhur Lestari)		2,50	503/ 038/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
151	Kabupaten Belitung Timur	Hartoni (KTH Karya Luhur Lestari)		1,20	503/ 039/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
152	Kabupaten Belitung Timur	Yusman (KTH Karya Luhur Lestari)		1,90	503/ 040/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
153	Kabupaten Belitung Timur	Donny (KTH Karya Luhur Lestari)		1,40	503/ 043/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
154	Kabupaten Belitung Timur	Wasri (KTH Karya Luhur Lestari)		1,60	503/ 042/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
155	Kabupaten Belitung Timur	Sutrisno (KTH Karya Luhur Lestari)		2,00	503/ 041/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
156	Kabupaten Belitung Timur	Agung Budi Laksono (KTH Karya Luhur Lestari)		0,90	503/ 045/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
157	Kabupaten Belitung Timur	Sarwandi (KTH Anugrah Alam)		0,80	503/ 047/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
158	Kabupaten Belitung Timur	Saharoni (KTH Karya Luhur Lestari)		1,50	503/ 044/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
159	Kabupaten Belitung Timur	Yayat (KTH Anugrah Alam)		4,60	503/ 056/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
160	Kabupaten Belitung Timur	Hardiyanto (KTH Karya Luhur Lestari)		1,60	503/ 046/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
161	Kabupaten Belitung Timur	Bahasa (KTH Anugrah Alam)		1,40	503/ 050/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
162	Kabupaten Belitung Timur	Sanan (KTH Anugrah Alam)		5,70	503/ 048/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
163	Kabupaten Belitung Timur	Johandi (KTH Anugrah Alam)		1,20	503/ 053/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
164	Kabupaten Belitung Timur	Bahara (KTH Anugrah Alam)		5,30	503/ 049/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
165	Kabupaten Belitung Timur	Supardi (KTH Anugrah Alam)		0,60	503/ 051/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
166	Kabupaten Belitung Timur	Samsani (KTH Aik Kayu Kubor)		5,10	503/ 060/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
167	Kabupaten Belitung Timur	Juriadi (KTH Anugrah Alam)		2,50	503/ 052/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
168	Kabupaten Belitung Timur	Samsuli (KTH Anugrah Alam)		4,20	503/ 054/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
169	Kabupaten Belitung Timur	Zulkarnaen (KTH Anugrah Alam)		2,10	503/ 057/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
170	Kabupaten Belitung Timur	Elwita (KTH Anugrah Alam)		3,00	503/ 055/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
171	Kabupaten Belitung Timur	Sadri Sani (KTH Air Ketiau)		4,90	503/ 070/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
172	Kabupaten Belitung Timur	Marzono (KTH Aik Kayu Kubor)		5,00	503/ 061/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
173	Kabupaten Belitung Timur	Muhammad DS (KTH Aik Kayu Kubor)		5,00	503/ 058/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
174	Kabupaten Belitung Timur	Junaidi S (KTH Aik Kayu Kubor)		7,80	503/ 065/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
175	Kabupaten Belitung Timur	Siswadi (KTH Aik Kayu Kubor)		5,00	503/ 059/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
176	Kabupaten Belitung Timur	Sadikin (KTH Air Ketiau)		2,90	503/ 076/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
177	Kabupaten Belitung Timur	Jupri (KTH Aik Kayu Kubor)		7,70	503/ 062/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
178	Kabupaten Belitung Timur	Susino (KTH Aik Kayu Kubor)		5,00	503/ 066/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
179	Kabupaten Belitung Timur	Pirdaus YZ (KTH Aik Kayu Kubor)		5,00	503/ 063/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
180	Kabupaten Belitung Timur	Sumini (KTH Air Ketiau)		1,10	503/ 071/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
181	Kabupaten Belitung Timur	Kadri Umar (KTH Aik Kayu Kubor)		5,10	503/ 064/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
182	Kabupaten Belitung Timur	Zulliadi (KTH Aik Kayu Kubor)		5,00	503/ 067/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
183	Kabupaten Belitung Timur	Kadarusmadi (Segantang Lestari)		2,70	503/083/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
184	Kabupaten Belitung Timur	Eddy Harun (KTH Aik Kayu Kubor)		4,90	503/ 068/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
185	Kabupaten Belitung Timur	Muhaizir (KTH Air Ketiau)		0,90	503/ 072/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
186	Kabupaten Belitung Timur	Suherman Salam (KTH Aik Kayu Kubor)		5,00	503/ 069/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
187	Kabupaten Belitung Timur	Malori (KTH Air Ketiau)		2,10	503/ 077/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
188	Kabupaten Belitung Timur	Kamsul (Senyubuk I)		0,30	503/091/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
189	Kabupaten Belitung Timur	Maryono (KTH Air Ketiau)		3,50	503/ 073/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
190	Kabupaten Belitung Timur	Maidi (KTH Air Ketiau)		2,10	503/ 078/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
191	Kabupaten Belitung Timur	Teli Melinda (KTH Air Ketiau)		3,90	503/ 074/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
192	Kabupaten Belitung Timur	Poniman (Segantang Lestari)		1,90	503/084/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
193	Kabupaten Belitung Timur	Alek (KTH Air Ketiau)		3,20	503/ 075/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
194	Kabupaten Belitung Timur	Dalima Dulhamat (KTH Air Ketiau)		0,90	503/ 079/ IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013
195	Kabupaten Belitung Timur	Ramli (Segantang Lestari)		2,30	503/085/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
196	Kabupaten Belitung Timur	Asri (Segantang Lestari)		1,60	503/080/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
197	Kabupaten Belitung Timur	Kuncoro Gairudin (Senyubuk I)		2,00	503/092/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
198	Kabupaten Belitung Timur	Cuaidi (Segantang Lestari)		2,30	503/081/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
199	Kabupaten Belitung Timur	Suwandi (Segantang Lestari)		1,90	503/086/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
200	Kabupaten Belitung Timur	Edy Saputra (Segantang Lestari)		1,70	503/082/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
201	Kabupaten Belitung Timur	Yuli Supratno (Senyubuk II)		2,10	503/101/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
202	Kabupaten Belitung Timur	Lupito (Senyubuk I)		0,40	503/093/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
203	Kabupaten Belitung Timur	Yetno (Segantang Lestari)		2,00	503/087/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
204	Kabupaten Belitung Timur	Asrin (Senyubuk I)		0,30	503/088/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
205	Kabupaten Belitung Timur	Maswan (Senyubuk I)		0,70	503/094/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
206	Kabupaten Belitung Timur	Edy Pratama (Senyubuk I)		1,10	503/089/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
207	Kabupaten Belitung Timur	Syurman (Senyubuk II)		0,70	503/102/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
208	Kabupaten Belitung Timur	Fatimah (Senyubuk I)		1,80	503/090/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
209	Kabupaten Belitung Timur	Rusman (Senyubuk I)		1,60	503/095/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
210	Kabupaten Belitung Timur	Selani (Senyubuk I)		0,80	503/096/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
211	Kabupaten Belitung Timur	Sugianur (Senyubuk I)		0,80	503/097/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
212	Kabupaten Belitung Timur	Sumardi M (Senyubuk I)		0,30	503/098/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
213	Kabupaten Belitung Timur	Yeyensi (Senyubuk I)		0,50	503/099/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
214	Kabupaten Belitung Timur	Sukardi HJ (Senyubuk II)		1,20	503/100/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
215	Kabupaten Belitung Timur	Yulianto (Maju Makmur Lestari)		1,90	503/144/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
216	Kabupaten Belitung Timur	Rizani (Senyubuk II)		1,20	503/104/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
217	Kabupaten Belitung Timur	Idwar (Senyubuk II)		0,10	503/105/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
218	Kabupaten Belitung Timur	Haryanto Supendi (Senyubuk II)		0,70	503/106/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
219	Kabupaten Belitung Timur	Firman Saputra (Senyubuk II)		1,70	503/107/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
220	Kabupaten Belitung Timur	Haidir (Senyubuk II)		0,20	503/108/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
221	Kabupaten Belitung Timur	Edi Sopian (Senyubuk II)		1,20	503/109/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
222	Kabupaten Belitung Timur	Darmawan (Senyubuk II)		0,70	503/110/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
223	Kabupaten Belitung Timur	Abidin Duahid (Senyubuk II)		0,60	503/111/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
224	Kabupaten Belitung Timur	Arie (Jangkar Mandiri)		2,50	503/112/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
225	Kabupaten Belitung Timur	Dedy (Jangkar Mandiri)		2,00	503/113/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
226	Kabupaten Belitung Timur	Farto (Jangkar Mandiri)		1,80	503/114/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
227	Kabupaten Belitung Timur	Haryono (Jangkar Mandiri)		2,10	503/115/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
228	Kabupaten Belitung Timur	Irfandi (Jangkar Mandiri)		1,90	503/116/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
229	Kabupaten Belitung Timur	Iryanto (Jangkar Mandiri)		2,30	503/117/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
230	Kabupaten Belitung Timur	Maryadi (Jangkar Mandiri)		2,10	503/118/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
231	Kabupaten Belitung Timur	Sukri Tutok (Jangkar Mandiri)		1,70	503/119/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
232	Kabupaten Belitung Timur	Yusri (Jangkar Mandiri)		2,30	503/120/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
233	Kabupaten Belitung Timur	Andri (Rimba Lestari)		2,80	503/121/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
234	Kabupaten Belitung Timur	Harni (Rimba Lestari)		3,00	503/122/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
235	Kabupaten Belitung Timur	Marhazan (Rimba Lestari)		3,00	503/123/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
236	Kabupaten Belitung Timur	Maryadi (Rimba Lestari)		3,00	503/124/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
237	Kabupaten Belitung Timur	Sobri (Rimba Lestari)		2,90	503/125/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
238	Kabupaten Belitung Timur	Sandri (Rimba Lestari)		2,90	503/126/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
239	Kabupaten Belitung Timur	Solihin (Rimba Lestari)		3,00	503/127/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
240	Kabupaten Belitung Timur	Surmiwati (Rimba Lestari)		2,90	503/128/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
241	Kabupaten Belitung Timur	Abdul Hasyim (Maju Makmur Lestari)		1,00	503/129/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
242	Kabupaten Belitung Timur	Aris Dinata (Maju Makmur Lestari)		1,10	503/130/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
243	Kabupaten Belitung Timur	Darwin (Maju Makmur Lestari)		0,40	503/131/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
244	Kabupaten Belitung Timur	Fredy Utoyo (Maju Makmur Lestari)		3,00	503/132/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
245	Kabupaten Belitung Timur	Hanitun (Maju Makmur Lestari)		1,30	503/133/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
246	Kabupaten Belitung Timur	Karidi (Maju Makmur Lestari)		2,90	503/134/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
247	Kabupaten Belitung Timur	Kusmawan (Maju Makmur Lestari)		0,90	503/135/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
248	Kabupaten Belitung Timur	Kerli (Maju Makmur Lestari)		1,30	503/136/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
249	Kabupaten Belitung Timur	Megiyarto (Maju Makmur Lestari)		0,50	503/137/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
250	Kabupaten Belitung Timur	Muhari (Maju Makmur Lestari)		1,30	503/138/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
251	Kabupaten Belitung Timur	Mulyadi (Maju Makmur Lestari)		1,10	503/139/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
252	Kabupaten Belitung Timur	Mislam (Maju Makmur Lestari)		1,30	503/140/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
253	Kabupaten Belitung Timur	Salman (Maju Makmur Lestari)		1,70	503/141/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
254	Kabupaten Belitung Timur	Suriono (Maju Makmur Lestari)		0,50	503/142/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
255	Kabupaten Belitung Timur	Wedi Darsono (Maju Makmur Lestari)		1,50	503/143/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
256	Kabupaten Belitung Timur	Yandi (Maju Makmur Lestari)		0,90	503/145/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
257	Kabupaten Belitung Timur	Yukasiwi (Maju Makmur Lestari)		1,20	503/146/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
258	Kabupaten Belitung Timur	Ardawi (Bersatu)		2,74	503/147/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
259	Kabupaten Belitung Timur	Fengky F (Bersatu)		2,50	503/150/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
260	Kabupaten Belitung Timur	Surian (Bersatu)		2,00	503/149/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
261	Kabupaten Belitung Timur	Subandi (Bersatu)		1,30	503/148/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013
262	Kabupaten Belitung Timur	Sofriadi (Bersatu)		2,80	503/152/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/X/2013
263	Kabupaten Belitung Timur	Fredy (Bersatu)		0,50	503/151/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/X/2013
264	Kabupaten Belitung Timur	Zuhardin (Bersatu)		1,50	503/153/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/X/2013
265	Kabupaten Belitung Timur	Edi Sopyan		63,90	503/153/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/XII/2013
266	Kabupaten Belitung Timur	KTH Jawa I		15,17	503/014/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/2014
267	Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan	PT. Bangkanesia		51205	SK.639/Menhut-II/2009 tanggal 9 Oktober 2009

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
268	Kabupaten Bangka dan Belitung	PT. Agro Pratama Sejahtera		30773	SK.208/Menhut-II/2011 tanggal 12 April 2011

Sumber :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023
2. Buku Basis Data Geospasial KLHK 2021

Tabel-19 Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data: 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Bangka (KPH Bubus Panca)	KTH Remodong Bersatu	47	Izin Perhutanan Sosial
2		KTH Citra Maju	255	Izin Perhutanan Sosial
3		KTH Sukses Makmur	20	Izin Perhutanan Sosial
4		KTH Penyusuk Permai	35	Izin Perhutanan Sosial
5		KTH Kapitan Hijau	39	Izin Perhutanan Sosial
6		KTH Mangrove Lestari	94	Izin Perhutanan Sosial
7		KTH Mapur Jaya Bersama	50	Izin Perhutanan Sosial
8		KTH Padang Lestari	50	Izin Perhutanan Sosial
9		KTH Karya Abadi	90	Izin Perhutanan Sosial
10		KTH Alam Jaya Mandiri	31	Izin Perhutanan Sosial
11		KTH Taruna Tani Bantam	98	Izin Perhutanan Sosial
12		KTH Penyusuk Timur	110	Izin Perhutanan Sosial
13	Bangka (KPH Sigambir Kota waringin)	KTH Pantai Tanjung Karang Lestari	59	Izin Perhutanan Sosial
14		KTH Cahaya Mandiri	140	Izin Perhutanan Sosial
15		KTH Wanamina	244	Izin Perhutanan Sosial
16		KTH Penagan Hijau	23	Izin Perhutanan Sosial
17		KTH Penagan Lestari	50	Izin Perhutanan Sosial
18		KTH Hijau Bumi Babel	30	Izin Perhutanan Sosial
19		KTH AN. Nihlah	72	Izin Perhutanan Sosial
20		KTH Mutiara Timur	13	Izin Perhutanan Sosial
21	Bangka Tengah (KPH Sungai Sembulan)	KTH Junjung Besauh	205	Izin Perhutanan Sosial
22		KTH Gempita	148	Izin Perhutanan Sosial
23		KTH Gempa 01	213	Izin Perhutanan Sosial
24		KTH Belilik Jaya	128	Izin Perhutanan Sosial
25		KTH Karomah	295	Izin Perhutanan Sosial
26		Gapoktan Tani Makmur	2819	Izin Perhutanan Sosial
27		KTH Tunas Harapan	300	Izin Perhutanan Sosial
28		KTH Nadi Lestari	191	Izin Perhutanan Sosial
29	Bangka Selatan (KPH Muntai Palas)	Pokdarwis Sadar Wisata Tanjung Labun	72	Izin Perhutanan Sosial



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5
30		Pokdarwis Sadar Wisata Bukit Gebang	21	Izin Perhutanan Sosial
31		KTH Tanjung Batu Bedaun	41	Izin Perhutanan Sosial
32	Bangka Barat (Jebu Bembang Antan)	KTH Gunung Tujuh	39.00	Izin Perhutanan Sosial
33		Gapoktan Tumbek Bulun	234.00	Izin Perhutanan Sosial
34	Bangka Barat (Rambat Menduyung)	Gapoktan Nibung Barokah	471.00	Izin Perhutanan Sosial
35	Belitung (Belantu Mendanaw)	KTH Rimba Petaling	1919	Izin Perhutanan Sosial
36		KTH Bukit Bujang	2252	Izin Perhutanan Sosial
37		KTH Moyang Gersik	805	Izin Perhutanan Sosial
38		KTH Air Buntar	120	Izin Perhutanan Sosial
39		KTH Suka Maju	303	Izin Perhutanan Sosial
40		KTH Air Terjun Linsum Kawai	177	Izin Perhutanan Sosial
41		KTH Kelekak Duren Gunung Sang	203	Izin Perhutanan Sosial
42		KTH Belantu Jaye	995	Izin Perhutanan Sosial
43		KTH Gual Lestari	2639	Izin Perhutanan Sosial
44		KTH Senas Community	1160	Izin Perhutanan Sosial
45		Gapoktan Batu Bedil	933	Izin Perhutanan Sosial
46		KTH Padang Samak	187	Izin Perhutanan Sosial
47		KTH Seberang Bersatu	757	Izin Perhutanan Sosial
48		KTH Gunong Tajam	228	Izin Perhutanan Sosial
49		KTH Gurok Beraye	120	Izin Perhutanan Sosial
50		KTH Bukit Tembali Simpor Laki	62	Izin Perhutanan Sosial
51		KTH Mitra Tebalu Betua	41	Izin Perhutanan Sosial
52		KTH Arsel Community	115	Izin Perhutanan Sosial
53		KTH Bakau Pemuda Nelayan Pecinta Alam	205	Izin Perhutanan Sosial
54		KTH Teluk Munsang	460	Izin Perhutanan Sosial
55	Belitung Timur (Gunung Duren)	Gapoktan Mangjaya	597	Izin Perhutanan Sosial
56		KTH Aik Ruak I	107	Izin Perhutanan Sosial
57		KTH Aik Ruak II	1120	Izin Perhutanan Sosial
58		KT Aik Kunyit Cemerlang	682	Izin Perhutanan Sosial
59		KEPPAK	385	Izin Perhutanan Sosial
60		KTH Harapan Bersama	571	Izin Perhutanan Sosial
61		Bangek Gurok Meranti	433	Izin Perhutanan Sosial
62		Pokdarwis GEMA	96	Izin Perhutanan Sosial



No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5
63		Gapoktan Air Sambar	244	Izin Perhutanan Sosial
64		KTH Teluk Balok	298	Izin Perhutanan Sosial
65		Gapoktan Balok Bersatu	323	Izin Perhutanan Sosial
66		KTH Gunung Legau	1148	Izin Perhutanan Sosial
67	Jumlah Total		26412	

Sumber : DLHK 2023 dan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keterangan : NA = Tidak ada ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dikeluarkan

Tabel-20. Perdagangan Satwa dan Tumbuhan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2023

No.	Nama Spesies	Bagian-bagian yang diperdagangkan	Status menurut CITES
1	2	3	4
1	Labi-labi/Bulus	Seluruh bagian	Apendix II
2	Kura Kura Ambon	Seluruh bagian	Apendix II
3	Ular Gendang Merah	Kulit	Apendix II
4	Ular Sanca Kembang	Kulit	Apendix II
5	Biawak Air	Kulit	Apendix II
6.	Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>)	Utuh/Kg	Not Evaluated

Sumber : Balai Konservasi Sumbar Daya Alam Resort Bangka, 2024



Tabel 21. Jumlah dan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2023

No.	Jenis IUPJLWA							SK
	Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Pemanfaatan Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PDAM Tirta Bangka		9.00					Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/205/Hutbun/2010 Tanggal 11 Januari 2010
2	Yayasan Alam Bukit Betung			30.00				Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/958/Dishut/2016 Tanggal 19 Oktober 2016
3	CV. Panorama Lintas Timur			18.16				Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1122/Dishut Tanggal 31 Desember 2018
4	PT. Pantai Indah Rebo			69.38				Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/694.a/Dishut/2019 Tanggal 17 Juli 2019
5	PT. Wattana Segar Alam			3.20				Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1094.k /Dishut/2019 Tanggal 30 Desember 2019



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Jenis IUPJLWA							SK
	Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Pemanfaatan Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PT. Tunas Propindo Lestari			25.72				Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1046.a/Dishut/2019 Tanggal 13 Desember 2019
7	PT. Timah Tbk			72.00				Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/499/Dishut/2020 Tanggal 28 Juli 2020
8	CV. Pesona Alam Asri			16.32				Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/703/Dishut/2020 Tanggal 17 September 2020
9	CV. Mulia Asri Sukhitata			26.08				Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/702/Dishut/2020 Tanggal 17 September 2020

Keterangan :

Sumber: DLHK Babel, 2024



Tabel-22. Kualitas Air Sumur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2022

No	Lokasi Sumur Kabupaten Bangka Tengah	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS
			Lintang	Bujur							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Sumur Lubuk Besar	3/16/2022	2° 33' 19,4195"	106° 38' 21,4541"	29	5.35	-	jernih	-	tidak ada	30
2	Sumur Simpangkatis	3/17/2022	2° 11' 34,0821"	106° 04' 09,7163"	-	-	-	jernih	-	tidak ada	-
3	Sumur Namang	3/18/2022	2° 21' 34,6852"	106° 12' 53,9233"	28.6	6.09	-	jernih	-	tidak ada	574
4	Sumur Koba	3/21/2022	2° 32' 10,1439"	106° 25' 02,6790"	27.6	4.94	-	jernih	-	tidak ada	17
5	Sumur Pangkalanbaru	3/22/2022	2° 09' 13,1795"	106° 07' 50,4062"	28.6	5.48	-	jernih	-	tidak ada	96

No	Lokasi Sumur	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Total Phosphat sebagai P (mg/L)	NO ₃ sebagai N (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Sumur Lubuk Besar	2.49	22.7	-	-	-	0.181	-	-	-	-
2	Sumur Simpangkatis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumur Namang	2.84	-	-	< 0,0312	0.7	0.1	-	-	-	-



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No	Lokasi Sumur	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Total Phosphat sebagai P (mg/L)	NO ₃ sebagai N (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)
4	Sumur Koba	-	-	-	-	0.545	-	-	-	-	-
5	Sumur Pangkalanbaru	2.88	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Lokasi Sumur	Selenium (mg/L)	Kadmium (mg/L)	Khrom (VI) (mg/L)	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Klorida (mg/L)
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
1	Sumur Lubuk Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumur Simpangkatis	-	-	-	-	-	< 1.610	-	-	-	-
3	Sumur Namang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sumur Koba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sumur Pangkalanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Lokasi Sumur	Sianida (mg/L)	Flourida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin Bebas (mg/L)	Belarang sebagai H ₂ S(mg/L)	Fecal Colliform (jml/100ml)	Total Colliform (jml/100ml)	Gross-A(Bq/L)	Gross-B (Bq/L)
(1)	(2)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)
1	Sumur Lubuk Besar	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	-
2	Sumur Simpangkatis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3	Sumur Namang	0.004	-	< 0,00632	-	-	-	-	-	-	-
4	Sumur Koba	0.004	-	-	-	-	-	-	8.1	-	-
5	Sumur Pangkalanbaru	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-

No	Lokasi Sumur	Minyak dan Lemak	TSS (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sumur Lubuk Besar	-	-
2	Sumur Simpangkatis	< 1.610	-
3	Sumur Namang	-	7.0
4	Sumur Koba	-	-
5	Sumur Pangkalanbaru	-	3.0

Keterangan : 1. Sertifikat Hasil Uji Tahun 2022

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah, 2022

Tabel-22. A Kualitas Air Sumur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2020

No	Lokasi Sumur	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Lintang	Bujur	Tempelatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)
1	Kabupaten Bangka	11 Maret 2020	-2.05381	106.1001	28.6	5.83	0.75	<25,0	Tidak berasa	Tidak berbau	108	2.01	4.33	4.23
2	Kabupaten Belitung	20 Februari 2020	-2.73246	107.6288	28.8	6.44	0.4	<25,0	Tidak berasa	Tidak berbau	229	1.91	4.18	4.13



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No	Lokasi Sumur	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Lintang	Bujur	Tempelatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)
3	Kabupaten Bangka Barat	12 Maret 2020	-2.05456	105.1759	28.9	4.23	0.36	<25,0	Tidak berasa	Tidak berbau	197	2.11	5.48	4.23
4	Kabupaten Bangka Tengah	12 Maret 2020	-2.48992	106.4124	27.2	6.07	1.64	<25,0	Tidak berasa	Tidak berbau	184	1.91	3.9	4.23
5	Kabupaten Bangka Selatan	17 Maret 2020	-3.01258	106.4506	27.4	5.87	0.34	<25,0	Tidak berasa	Tidak berbau	134	2.11	5.48	4.53
6	Kabupaten Belitung Timur	20 Februari 2020	-2.96905	108.1621	29.7	5.73	0.6	<25,0	Tidak berasa	Tidak berbau	68.6	1.71	3.69	4.03
7	Kota Pangkalpinang	13 Maret 2020	-2.13793	106.1548	30.7	4.86	0.58	<25,0	Tidak berasa	Tidak berbau	110	2.32	3.11	4.13

No	Lokasi Sumur	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Lintang	Bujur	Total Fosfat sbg P (mg/L)	NO 3 sebagai N (mg/L)	NH3-N (mg/L)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)	Selenium (mg/L)
1	Kabupaten Bangka	11 Maret 2020	-2.05381	106.1001	<0,0316	1.02	0.0322	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Belitung	20 Februari 2020	-2.73246	107.6288	0.15	0.665	<0,0172	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Bangka Barat	12 Maret 2020	-2.05456	105.1759	<0,0316	0.655	0.815	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Bangka Tengah	12 Maret 2020	-2.48992	106.4124	<0,0316	0.78	0.128	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Bangka Selatan	17 Maret 2020	-3.01258	106.4506	<0,0316	0.68	0.0178	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Belitung Timur	20 Februari 2020	-2.96905	108.1621	<0,0316	0.735	<0,0172	-	-	-	-	-
7	Kota Pangkalpinang	13 Maret 2020	-2.13793	106.1548	<0,0316	0.66	0.71	-	-	-	-	-



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No	Lokasi Sumur	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Lintang	Bujur	Kadmium (mg/L)	Khrom (VI) (mg/L)	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/l)
1	Kabupaten Bangka	11 Maret 2020	-2.05381	106.1001	<0,00456	-	<0,0164	<0,0113	<0,0250	0.0522	-	<0,00676	0.5
2	Kabupaten Belitung	20 Februari 2020	-2.73246	107.6288	<0,00456	-	<0,0164	0.136	<0,0250	0.0331	-	<0,00676	17.5
3	Kabupaten Bangka Barat	12 Maret 2020	-2.05456	105.1759	<0,00456	-	<0,0164	0.166	<0,0250	<0,0197	-	<0,00676	31.2
4	Kabupaten Bangka Tengah	12 Maret 2020	-2.48992	106.4124	<0,00456	-	<0,0164	0.0894	<0,0250	<0,0197	-	0.0087	41
5	Kabupaten Bangka Selatan	17 Maret 2020	-3.01258	106.4506	<0,00456	-	<0,0164	0.0165	<0,0250	<0,0197	-	<0,00676	16.5
6	Kabupaten Belitung Timur	20 Februari 2020	-2.96905	108.1621	<0,00456	-	<0,0164	0.166	<0,0250	0.0352	-	0.0275	0.75
7	Kota Pangkalpinang	13 Maret 2020	-2.13793	106.1548	<0,00456	-	0.0174	0.0518	<0,0250	<0,0197	-	<0,00676	55.7

No	Lokasi Sumur	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Lintang	Bujur	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)	Belereng sebagai H ₂ S (mg/L)	Fecal coliform (jml/100 ml)	Total coliform (jml/100 ml)	Gross-A (Bq /L)	Gross-B (Bq /L)
1	Kabupaten Bangka	11 Maret 2020	-2.05381	106.1001	0.0075	-	0.0124	15	<0,02	-	22	24	-	-
2	Kabupaten Belitung	20 Februari 2020	-2.73246	107.6288	0.003	-	0.122	<3,18	0.02	-	11	430	-	-
3	Kabupaten Bangka Barat	12 Maret 2020	-2.05456	105.1759	0.002	-	0.0213	35.9	<0,02	-	<1,80	2	-	-
4	Kabupaten Bangka Tengah	12 Maret 2020	-2.48992	106.4124	0.0035	-	0.00786	52	<0,02	-	14	17	-	-
5	Kabupaten Bangka Selatan	17 Maret 2020	-3.01258	106.4506	<0,002	-	0.0178	31.3	<0,02	-	15	22	-	-
6	Kabupaten Belitung Timur	20 Februari 2020	-2.96905	108.1621	<0,002	-	0.0101	<3,18	<0,02	-	<1,80	18.9	-	-
7	Kota Pangkalpinang	13 Maret 2020	-2.13793	106.1548	<0,002	-	0.00537	20.4	<0,02	-	<1,8	<1,8	-	-

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



Keterangan: tanda - menunjukkan bahwa tidak dilakukan pengujian terhadap parameter dimaksud
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep. Bangka Belitung, 2020

Tabel-23. Kualitas Air Laut
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2023

No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	Warna (Mt)	Bau	Kecerahan (M)	Kekeruhan (NTU)	TSS (mg/l)
			Lintang	Bujur						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pertambangan	17/03/2022	1°54'42,480"	106°12'28,390"	Pantai Rebo	-	Tidak berbau	2,00	1,60	9,03
2	Pertambangan	18/03/2022	1°50'48,620"	106°9'2,002"	Batu Bedaon	-	Tidak berbau	3,50	1,25	8,55
3	Pariwisata	18/03/2022	1°48'16,240"	106°8'18,532"	Pantai Parai	-	Tidak berbau	3,50	0,45	9,34
4	Pertambangan	18/03/2022	1°44'19,849"	106°4'54,250"	Bedukang	-	Tidak berbau	8,50	0,34	8,15
5	Pertambangan	18/03/2022	1°33'29,048"	106°2'32,168"	Pantai Tuing	-	Tidak berbau	8,00	0,24	8,13
6	Pertambangan	18/03/2022	1°32'36,539"	106°33'16,409"	Romodong	-	Tidak berbau	1,00	7,54	8,78
7	Pertambangan	18/3/2022	1°36'44,050"	106°41'1,298"	Pelabuhan Belinyu	-	Tidak berbau	1,00	8,90	9,00
8	Pertambangan	17/03/2022	2°8'26,272"	106°12'16,369"	Muara Pasirpadi	-	Tidak berbau	2,50	3,01	9,80
9	Pelabuhan	17/03/2022	2°5'32,910"	106°11'21,581"	Tanjungbunga	-	Tidak berbau	2,50	1,69	10,81



No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	Warna (Mt)	Bau	Kecerahan (M)	Kekeruhan (NTU)	TSS (mg/l)
			Lintang	Bujur						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Perikanan tangkap	17/03/2022	2°4'29,392"	106°12'35,881"	Air Anyir	-	Tidak berbau	3,50	0,35	10,31
11	Pelabuhan	15/03/2022	2°44'48,804"	107°37'55,272"	Pelabuhan Kapal Ikan	-	Tidak berbau	1,00	3,82	9,73
12	Pelabuhan	15/03/2022	2°44'31,416"	107°36'24,732"	Pantai Tanjungpendam	-	Tidak berbau	2,00	1,36	9,00
13	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°45'49,464"	107°34'10,668"	Gusong Bugis	-	Tidak berbau	2,50	0,89	10,27
14	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°49'19,668"	107°34'18,516"	Sungai Penjelit	-	Tidak berbau	6,00	0,18	9,38
15	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°42'59,328"	107°36'25,920"	Muara Sungai Kubu	-	Tidak berbau	3,00	0,72	9,13
16	Pariwisata	15/03/2022	2°35'50,964"	107°37'20,244"	Tempat Pengolahan ikan	-	Tidak berbau	4,00	0,73	9,65
17	Pariwisata	15/03/2022	2°35'30,696"	107°37'51,420"	Teluk Binga	-	Tidak berbau	3,00	0,70	10,58
18	Pelabuhan	15/03/2022	2°52'49,548"	107°33'15,228"	PLTU Suge	-	Tidak berbau	5,50	0,13	8,28
19	Pelabuhan	15/03/2022	2°53'10,572"	107°32'56,400"	Tanjungbatu	-	Tidak berbau	6,50	0,11	8,55
20	Pariwisata	15/03/2022	2°54'40,356"	107°31'56,892"	Tanjungular	-	Tidak berbau	3,50	0,43	10,45
21	Pertambangan	18/03/2022	1°31'23,700"	106°42'33,660"	Batu Atap	-	Tidak berbau	1,50	4,62	9,79
22	Perikanan budidaya	18/03/2022	1°47'29,904"	106°6'22,680"	Sinar Baru	-	Tidak berbau	1,00	5,65	8,10
23	Pertambangan	17/03/2022	1°58'34,118"	106°9'36,342"	Batu Ampar	-	Tidak berbau	6,00	0,64	10,50
24	Pertambangan	17/03/2022	2°14'17,844"	106°13'15,708"	Cambai	-	Tidak berbau	3,50	1,77	8,69

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	Warna (Mt)	Bau	Kecerahan (M)	Kekeruhan (NTU)	TSS (mg/l)
			Lintang	Bujur						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
25	Pariwisata	17/03/2022	2°10'17,400"	106°11'30,048"	Batu Belubang	-	Tidak berbau	1,00	9,35	9,03

No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	Sampah	Lapisan Minyak	Temperatur (°C)*	pH*	Salinitas (‰)	DO(mg/l)
			Lintang	Bujur							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Pertambangan	17/03/2022	1°54'42,480"	106°12'28,390"	Pantai Rebo	nihil	nihil	30,60	8,00	32,90	3,10
2	Pertambangan	18/03/2022	1°50'48,620"	106°9'2,002"	Batu Bedaon	nihil	nihil	29,00	8,10	33,70	5,90
3	Pariwisata	18/03/2022	1°48'16,240"	106°8'18,532"	Pantai Parai	nihil	nihil	29,00	8,00	25,70	5,40
4	Pertambangan	18/03/2022	1°44'19,849"	106°4'54,250"	Bedukang	nihil	nihil	29,80	7,90	33,00	8,10
5	Pertambangan	18/03/2022	1°33'29,048"	106°2'32,168"	Pantai Tuing	nihil	nihil	29,30	7,50	32,70	5,50
6	Pertambangan	18/03/2022	1°32'36,539"	106°33'16,409"	Romodong	nihil	nihil	29,20	7,70	35,70	4,70
7	Pertambangan	18/3/2022	1°36'44,050"	106°41'1,298"	Pelabuhan Belinyu	nihil	nihil	30,10	7,00	33,20	4,50
8	Pertambangan	17/03/2022	2°8'26,272"	106°12'16,369"	Muara Pasirpadi	nihil	nihil	35,60	7,70	20,40	4,70
9	Pelabuhan	17/03/2022	2°5'32,910"	106°11'21,581"	Tanjungbunga	nihil	nihil	30,10	7,80	25,30	5,80
10	Perikanan tangkap	17/03/2022	2°4'29,392"	106°12'35,881"	Air Anyir	nihil	nihil	34,90	8,00	28,00	5,30
11	Pelabuhan	15/03/2022	2°44'48,804"	107°37'55,272"	Pelabuhan Kapal Ikan	nihil	nihil	30,90	6,10	31,50	4,70

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	Sampah	Lapisan Minyak	Temperatur (°C)*	pH*	Salinitas (‰)	DO(mg/l)
			Lintang	Bujur							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
12	Pelabuhan	15/03/2022	2°44'31,416"	107°36'24,732"	Pantai Tanjungpendam	nihil	nihil	29,30	6,20	33,30	4,90
13	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°45'49,464"	107°34'10,668"	Gusong Bugis	nihil	nihil	29,60	6,20	31,30	4,80
14	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°49'19,668"	107°34'18,516"	Sungai Penjelit	nihil	nihil	32,00	6,80	33,70	5,70
15	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°42'59,328"	107°36'25,920"	Muara Sungai Kubu	nihil	nihil	28,00	6,30	33,80	4,60
16	Pariwisata	15/03/2022	2°35'50,964"	107°37'20,244"	Tempat Pengolahan ikan	nihil	nihil	27,70	7,50	34,30	6,50
17	Pariwisata	15/03/2022	2°35'30,696"	107°37'51,420"	Teluk Binga	nihil	nihil	27,60	7,60	34,50	5,40
18	Pelabuhan	15/03/2022	2°52'49,548"	107°33'15,228"	PLTU Suge	nihil	nihil	28,70	7,00	33,10	5,20
19	Pelabuhan	15/03/2022	2°53'10,572"	107°32'56,400"	Tanjungbatu	nihil	nihil	28,80	7,10	33,60	5,40
20	Pariwisata	15/03/2022	2°54'40,356"	107°31'56,892"	Tanjungular	nihil	nihil	27,80	7,10	34,00	5,20
21	Pertambangan	18/03/2022	1°31'23,700"	106°42'33,660"	Batu Atap	nihil	nihil	28,00	7,60	36,20	5,00
22	Perikanan budidaya	18/03/2022	1°47'29,904"	106°6'22,680"	Sinar Baru	nihil	nihil	29,30	7,90	32,50	5,00
23	Pertambangan	17/03/2022	1°58'34,118"	106°9'36,342"	Batu Ampar	nihil	nihil	34,20	7,80	48,00	4,80
24	Pertambangan	17/03/2022	2°14'17,844"	106°13'15,708"	Cambai	nihil	nihil	35,80	7,50	32,70	4,60
25	Pariwisata	17/03/2022	2°10'17,400"	106°11'30,048"	Batu Belubang	nihil	nihil	35,30	7,60	29,60	5,90



No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	Amonia total (mg/l)	NO2-N (mg/l)	NO3-N (mg/l)
			Lintang	Bujur						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Pertambangan	17/03/2022	1°54'42,480"	106°12'28,390"	Pantai Rebo	2,52	-	<0,016	-	0,02
2	Pertambangan	18/03/2022	1°50'48,620"	106°9'2,002"	Batu Badaon	2,67	-	<0,016	-	0,02
3	Pariwisata	18/03/2022	1°48'16,240"	106°8'18,532"	Pantai Parai	2,67	-	<0,016	-	0,02
4	Pertambangan	18/03/2022	1°44'19,849"	106°4'54,250"	Bedukang	2,37	-	<0,016	-	0,02
5	Pertambangan	18/03/2022	1°33'29,048"	106°2'32,168"	Pantai Tuing	2,22	-	<0,016	-	0,02
6	Pertambangan	18/03/2022	1°32'36,539"	106°33'16,409"	Romodong	2,82	-	<0,016	-	0,02
7	Pertambangan	18/3/2022	1°36'44,050"	106°41'1,298"	Pelabuhan Belinyu	2,67	-	<0,016	-	0,02
8	Pertambangan	17/03/2022	2°8'26,272"	106°12'16,369"	Muara Pasirpadi	2,82	-	<0,016	-	0,02
9	Pelabuhan	17/03/2022	2°5'32,910"	106°11'21,581"	Tanjungbunga	2,37	-	<0,016	-	0,02
10	Perikanan tangkap	17/03/2022	2°4'29,392"	106°12'35,881"	Air Anyir	2,22	-	<0,016	-	0,02
11	Pelabuhan	15/03/2022	2°44'48,804"	107°37'55,272"	Pelabuhan Kapal Ikan	2,97	-	<0,016	-	0,02
12	Pelabuhan	15/03/2022	2°44'31,416"	107°36'24,732"	Pantai Tanjungpendam	2,82	-	<0,016	-	0,02
13	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°45'49,464"	107°34'10,668"	Gusong Bugis	2,67	-	<0,016	-	0,02
14	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°49'19,668"	107°34'18,516"	Sungai Penjelit	2,37	-	<0,016	-	0,02
15	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°42'59,328"	107°36'25,920"	Muara Sungai Kubu	2,67	-	<0,016	-	0,02
16	Pariwisata	15/03/2022	2°35'50,964"	107°37'20,244"	Tempat Pengolahan ikan	2,52	-	<0,016	-	0,02

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	Amonia total (mg/l)	NO2-N (mg/l)	NO3-N (mg/l)
			Lintang	Bujur						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
17	Pariwisata	15/03/2022	2°35'30,696"	107°37'51,420"	Teluk Binga	3,27	-	<0,016	-	0,02
18	Pelabuhan	15/03/2022	2°52'49,548"	107°33'15,228"	PLTU Suge	2,82	-	<0,016	-	0,02
19	Pelabuhan	15/03/2022	2°53'10,572"	107°32'56,400"	Tanjungbatu	2,52	-	<0,016	-	0,02
20	Pariwisata	15/03/2022	2°54'40,356"	107°31'56,892"	Tanjungular	3,27	-	<0,016	-	0,02
21	Pertambangan	18/03/2022	1°31'23,700"	106°42'33,660"	Batu Atap	2,52	-	<0,016	-	0,02
22	Perikanan budidaya	18/03/2022	1°47'29,904"	106°6'22,680"	Sinar Baru	2,37	-	<0,016	-	0,02
23	Pertambangan	17/03/2022	1°58'34,118"	106°9'36,342"	Batu Ampar	2,52	-	<0,016	-	0,02
24	Pertambangan	17/03/2022	2°14'17,844"	106°13'15,708"	Cambai	2,52	-	<0,016	-	0,02
25	Pariwisata	17/03/2022	2°10'17,400"	106°11'30,048"	Batu Belubang	2,97	-	<0,016	-	0,02

No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	PO4-P (mg/l)	Sianida (CN-) (mg/l)	Sulfida (H2S) (mg/l)	Klor (mg/l)	Minyak bumi (mg/l)	Fenol (mg/l)	Pestisida (mg/l)	PCB (mg/l)
			Lintang	Bujur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
1	Pertambangan	17/03/2022	1°54'42,480"	106°12'28,390"	Pantai Rebo	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
2	Pertambangan	18/03/2022	1°50'48,620"	106°9'2,002"	Batu Badaon	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
3	Pariwisata	18/03/2022	1°48'16,240"	106°8'18,532"	Pantai Parai	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005



No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	PO4-P (mg/l)	Sianida (CN-) (mg/l)	Sulfida (H ₂ S) (mg/l)	Klor (mg/l)	Minyak bumi (mg/l)	Fenol (mg/l)	Pestisida (mg/l)	PCB (mg/l)
			Lintang	Bujur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
4	Pertambangan	18/03/2022	1°44'19,849"	106°4'54,250"	Bedukang	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
5	Pertambangan	18/03/2022	1°33'29,048"	106°2'32,168"	Pantai Tuing	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
6	Pertambangan	18/03/2022	1°32'36,539"	106°33'16,409"	Romodong	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
7	Pertambangan	18/3/2022	1°36'44,050"	106°41'1,298"	Pelabuhan Belinyu	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
8	Pertambangan	17/03/2022	2°8'26,272"	106°12'16,369"	Muara Pasirpadi	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
9	Pelabuhan	17/03/2022	2°5'32,910"	106°11'21,581"	Tanjungbunga	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
10	Perikanan tangkap	17/03/2022	2°4'29,392"	106°12'35,881"	Air Anyir	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
11	Pelabuhan	15/03/2022	2°44'48,804"	107°37'55,272"	Pelabuhan Kapal Ikan	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
12	Pelabuhan	15/03/2022	2°44'31,416"	107°36'24,732"	Pantai Tanjungpendam	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
13	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°45'49,464"	107°34'10,668"	Gusong Bugis	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
14	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°49'19,668"	107°34'18,516"	Sungai Penjelit	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
15	Perikanan tangkap	15/03/2022	2°42'59,328"	107°36'25,920"	Muara Sungai Kubu	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
16	Pariwisata	15/03/2022	2°35'50,964"	107°37'20,244"	Tempat Pengolahan ikan	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
17	Pariwisata	15/03/2022	2°35'30,696"	107°37'51,420"	Teluk Binga	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
18	Pelabuhan	15/03/2022	2°52'49,548"	107°33'15,228"	PLTU Suge	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No	Nama Lokasi/Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	PO4-P (mg/l)	Sianida (CN-) (mg/l)	Sulfida (H ₂ S) (mg/l)	Klor (mg/l)	Minyak bumi (mg/l)	Fenol (mg/l)	Pestisida (mg/l)	PCB (mg/l)
			Lintang	Bujur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
19	Pelabuhan	15/03/2022	2°53'10,572"	107°32'56,400"	Tanjungbatu	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
20	Pariwisata	15/03/2022	2°54'40,356"	107°31'56,892"	Tanjungular	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
21	Pertambangan	18/03/2022	1°31'23,700"	106°42'33,660"	Batu Atap	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
22	Perikanan budidaya	18/03/2022	1°47'29,904"	106°6'22,680"	Sinar Baru	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
23	Pertambangan	17/03/2022	1°58'34,118"	106°9'36,342"	Batu Ampar	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
24	Pertambangan	17/03/2022	2°14'17,844"	106°13'15,708"	Cambai	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005
25	Pariwisata	17/03/2022	2°10'17,400"	106°11'30,048"	Batu Belubang	<0,005	<0,005	<0,0022	-	-	<0,0002	-	<0,005

Keterangan :

Sumber: DLHK, 2023

Tabel-24. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2023

No.	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Titik Koordinat		Bulan											
		Latitude	Longitude	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang	-2,163	106,137	243,0	180,0	243,5	186,7	276,3	126,5	215,7	26,0	10,3	18,0	207,1	221,8



No.	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Titik Koordinat		Bulan											
		Latitude	Longitude	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	Stasiun Meteorologi Kelas III Hanandjoedin Tanjung Pandan Kabupaten Belitung	-2,518	106,42	346,5	178,5	384,1	162	336,3	222,4	178,1	5,1	0,6	248,5	505,6	726,6
3.	Stasiun Klimatologi Koba - Bangka Belitung	-2,75389	107,75	280,3	148,8	312,1	255,8	131,2	98,2	106,3	26	0	44,9	187,6	154,5

Keterangan :

Sumber: Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir, 2023

Tabel-24a. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun: 2022

No.	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Titik Koordinat		Bulan											
		Latitude	Longitude	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang	-2,163	106,137	260,2	147,3	328,6	238,0	156,5	201,1	136,3	282,5	213,7	378,1	412,9	215,7
2	Stasiun Meteorologi Kelas III Hanandjoedin Tanjung Pandan Kabupaten Belitung	-2,518	106,42	198,1	126,0	192,8	341,8	257,4	478,9	239,3	425	434,5	666,5	380	389,1



Tahun: 2021

No.	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Titik Koordinat		Bulan											
		Latitude	Longitude	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Stasiun Meteorologi Depati Amir Pangkalpinang	-2,163	106,137	152,8	38,3	306,4	185,0	218,7	83,3	152,5	185,5	176,4	152,0	530,2	328,2
2	Stasiun Meteorologi HAS Hanandjoeddin Tanjungpandan	-2,518	106,42	516,9	14,0	303,0	239,9	215,3	474,9	257,8	271,4	292,5	292,6	155,7	409,7
3	Mentok			362,5	34,7	169,5	122,5	356,5	110	181,2	179	142	88	182	667
4	Sungailiat			355,9	32,3	378,3	183,1	172,6	158	69,0	237,4	261	138,5	541,8	250,7
5	Koba	2,75389	107,75	318,7	39,5	338,3	211,7	273,2	212,8	154,1	231	236,9	302,8	153,8	540,9
6	Lubuk Besar			211	15	206	151,5	194,5	100	118	269	177,5	136	247,5	323,5
7	Rias			172,5	121,9	149	88,2	249,6	357,4	200,8	214,9	186	191	197,1	264,6
8	Sijuk			616	0	141	254	185	242	212	367	203	256	343	370
9	Simpang Renggang			303,6	0	209,4	76	108	103,7	173,7	216,1	298,5	178,2	444,5	265,2



Tabel-25. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2021

No.	Kabupaten/Kota	Mata air	Ledeng/PAM	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan (liter)	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kabupaten Bangka	630	2,442	19,335	136	0	45,852	16,697
2	Kabupaten Belitung	942	0	6,042	14	217	37,602	3,429
3	Kabupaten Bangka Barat	584	346	18,805	622	0	21,656	12,086
4	Kabupaten Bangka Tengah	252	213	11,184	359	0	25,952	10,544
5	Kabupaten Bangka Selatan	765	296	10,419	0	158	30,569	8,792
6	Kabupaten Belitung Timur	308	208	3,685	80	0	25,668	3,551
7	Kota Pangkalpinang	0	49	2,802	0	0	41,836	9,413

Keterangan:

Sumber: BPS Babel, 2022, diolah



Tabel-26. Kualitas Air Hujan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2023

Lokasi Pemantauan	Titik koordinat		Waktu Pemantauan	pH	DHL ($\mu\text{s}/\text{cm}$)	SO ₄ (mg/L)	NO ₃ (mg/L)	Cr	NH ₄ (mg/L)	Na	Ca ²⁺	Mg ²⁺
	Latitude	Longitude										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kota Pangkalpinang	-2.156395	106.162623	Jan									
Kota Pangkalpinang	-2.156395	106.162623	Feb									
Kota Pangkalpinang	-2.156395	106.162623	Mar									
Kota Pangkalpinang	-2.156395	106.162623	Apr									
Kota Pangkalpinang	-2.156395	106.162623	Mei									
Kota Pangkalpinang	-2.156395	106.162623	Jun									
Kota Pangkalpinang	-2.156395	106.162623	Jul									
Kota Pangkalpinang	-2.156395	106.162623	Ags	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Pangkalpinang	-2.156395	106.162623	Sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Pangkalpinang	-2.156395	106.162623	Okt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Pangkalpinang	-2.156395	106.162623	Nop	5.63	25.1	3.42	0.600		0.177			
Kota Pangkalpinang	-2.156395	106.162623	Des	5.29	13.1	6.60	0.157		0.157			

Sumber: DLHK Babel, 2023



Tabel-26.A Kualitas Air Hujan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2022

Lokasi Pemantauan	Titik koordinat		Waktu Pemantauan	pH	DHL (μ s/cm)	SO4 (mg/L)	NO3 (mg/L)	Cr	NH4 (mg/L)	Na	Ca2+	Mg2+
	Latitude	Longitude										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Jan	5,16	21,2	5,17	0,5		<0,0351			
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Feb	5,01	25,0	8,80	0,565		0,184			
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Mar									
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Apr	5,91	25,9	8,45	0,6		0,175			
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Mei	5,50	24,3	4,43	0,585		0,195			
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Jun	5,76	19,9	5,25	0,6		<0,0377			
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Jul	5,91	9,65	2,66	0,3		<0,0377			
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Ags	5,13	20,1	2,81	0,6		0,0697			



Lokasi Pemantauan	Titik koordinat		Waktu Pemantauan	pH	DHL (µs/cm)	SO4 (mg/L)	NO3 (mg/L)	Cr	NH4 (mg/L)	Na	Ca2+	Mg2+
	Latitude	Longitude										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Sep	5,23	24	2,48	0,3		<0,0377			
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Okt	5,76	7,62	3,77	0,8		0,00403			
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Nop	5,85	2,3	3,93	<0,230		<0,0377			
Kota Pangkalpinang	-2,156395	106,162623	Des	5,5	8,06	5,19	0,4		0,138			

Keterangan:

Sumber: DLHK Babel, 2023

Tabel-27. Kondisi Sungai
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2022

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
	Kab. Bangka Barat						
1	Sungai Sekip	2000	2	2	-	-	-
2	Sungai Kampung Ulu	2000	5	5	-	-	-
3	Sungai Air Kemang	4200	5	5	-	-	-



No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
4	Sungai Kampak	12000	34	15	15	163.2	108.8
5	Sungai Kerenah	6000	10	10	-	-	-
6	Sungai Kayu Arang	1000	50	50	-	-	-
7	Sungai Suntai	8000	6	6	-	-	-
8	Sungai Peradong	9000	8	8	-	-	-
9	Sungai Jering	8000	10	10	-	-	-
10	Sungai Sukal	6000	10	10	-	-	-
11	Sungai Menduyung	7000	8	8	-	-	-
12	Sungai PLN	3000	5	5	-	-	-
13	Sungai Muntok	-	5	-	1.5	-	-
	Kab. Bangka Selatan	-	-	-		-	-
1	Sungai Gusung	-	6.5	-	7.5	-	-
2	Sungai Nyirih	-	4	-	6	-	-
3	Sungai Kepoh	-	30	-	7.5	-	-
4	Sungai Pinang	-	5	-	1	-	-
5	Sungai Air Timur	-	6	-	1	-	-
6	Sungai Acau	-	5	-	2	-	-
7	Sungai Melanau	-	2	-	2	-	-
	Kab. Bangka Tengah (Kec. Sungai Selan)	-	-	-	-	-	-
1	Sungai Tanjung	7228	-	-	-	-	-
2	Sungai Tawar	1507	-	-	-	-	-
3	Sungai Pelabur	16253	-	-	-	-	-
4	Sungai Bedengung	13372	-	-	-	-	-



No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
5	Sungai jirak	3921	-	-	-	-	-
6	Sungai Sisil	9978	-	-	-	-	-
7	Sungai Petaling	2832	-	-	-	-	-
8	Sungai Kabung	14189	-	-	-	-	-
9	Sungai Selan	129082	-	-	-	-	-
10	Sungai Tiangtara	5250	-	-	-	-	-
11	Sungai Kambu	4482	-	-	-	-	-
12	Sungai Kurau	37027	-	-	-	-	-
13	Sungai Puput	3747	-	-	-	-	-
14	Sungai Seruk	17644	-	-	-	-	-
15	Sungai Buah	22318	-	-	-	-	-
16	Sungai Tjelau	15327	-	-	-	-	-
17	Sungai gelang	14347	-	-	-	-	-
18	Sungai Kambuk	15176	-	-	-	-	-
19	Sungai Mengkuang	3855	-	-	-	-	-
20	Sungai Parak	7683	-	-	-	-	-
21	Sungai Kepuh	14048	-	-	-	-	-
22	Sungai Bangkakota	70076	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka Tengah (Kec. Simpangkatis)	-	-	-	-	-	-
1	Sungai Puput	5217	-	-	-	-	-
2	Sungai Jirak	6430	-	-	-	-	-
3	Sungai Kabung	10883	-	-	-	-	-
4	Sungai Liba	3842	-	-	-	-	-
5	Sungai Kambu	10894	-	-	-	-	-



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
	Kab. Bangka Tengah (Kec. Pangkalan Baru)	-	-	-	-	-	-
1	Sungai Lantai	3538	-	-	-	-	-
2	Sungai Pelawan	5952	-	-	-	-	-
3	Sungai Mesu	3441	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka Tengah (Kec. Namang)	-	-	-	-	-	-
1	Sungai Benuang	1181	-	-	-	-	-
2	Sungai Pelawan	19619	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka Tengah (Kec. Koba)	-	-	-	-	-	-
1	Sungai Tempurung	1929	-	-	-	-	-
2	Sungai Duren	3546	-	-	-	-	-
3	Sungai Kengkanang	2280	-	-	-	-	-
4	Sungai Risi	11759	-	-	-	-	-
5	Sungai Menyarut	5654	-	-	-	-	-
6	Sungai Melansat	7960	-	-	-	-	-
7	Sungai Tamiang	10279	-	-	-	-	-
8	Sungai Lubuk	4157	-	-	-	-	-
9	Sungai Jering	1549	-	-	-	-	-
10	Sungai Kabung	3306	-	-	-	-	-
11	Sungai Gemuru	2121	-	-	-	-	-
12	Sungai Bakung	2888	-	-	-	-	-
13	Sungai Sabut	12201	-	-	-	-	-



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
14	Sungai Cambai	5660	-	-	-	-	-
15	Sungai Mesirak	3495	-	-	-	-	-
16	Sungai Manggis	6157	-	-	-	-	-
17	Sungai Bedaru	5131	-	-	-	-	-
18	Sungai Kurau	37027	-	-	-	-	-
19	Sungai ketera	3282	-	-	-	-	-
20	Sungai Binjaimasem	2492	-	-	-	-	-
21	Sunga Lemateng	5100	-	-	-	-	-
22	Sungai bara	13809	-	-	-	-	-
23	Sungai Palas	7822	-	-	-	-	-
24	Sungai bansir	2551	-	-	-	-	-
25	Sungai Bunsir	3194	-	-	-	-	-
26	Sungai Paku	3385	-	-	-	-	-
27	Sungai Katel	2406	-	-	-	-	-
28	Sungai Bemban	16406	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka Tengah (Kec. Lubuk Besar)	-	-	-	-	-	-
1	Sungai Titimalu	7514	-	-	-	-	-
2	Sungai Tubur	5724	-	-	-	-	-
3	Sungai Talau	1568	-	-	-	-	-
4	Sungai Terentang	2155	-	-	-	-	-
5	Sungai Pelekat	3835	-	-	-	-	-
6	Sungai Pasir	1840	-	-	-	-	-
7	Sungai Merbak	2828	-	-	-	-	-
8	Sungai Mempatang	4197	-	-	-	-	-



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
9	Sungai Bakong	5320	-	-	-	-	-
10	Sungai malang	5550	-	-	-	-	-
11	Sungai Tempilang	3120	-	-	-	-	-
12	Sungai Lambar	7569	-	-	-	-	-
13	Sungai Kayuara	11773	-	-	-	-	-
14	Sungai Liat	8363	-	-	-	-	-
15	Sungai Murem	3246	-	-	-	-	-
16	Sungai Rangkeru	1603	-	-	-	-	-
17	Sungai Bunut	1330	-	-	-	-	-
18	Sungai Gelam	3269	-	-	-	-	-
19	Sungai Kulit	2133	-	-	-	-	-
20	Sungai Palas	13896	-	-	-	-	-
21	Sungai Macan	1796	-	-	-	-	-
22	Sungai lobang	5824	-	-	-	-	-
23	Sungai Hijau	1815	-	-	-	-	-
24	Sungai Makie	1462	-	-	-	-	-
25	Sungai Putih	2393	-	-	-	-	-
26	Sungai Menggin	2434	-	-	-	-	-
27	Sungai Paya adep	4817	-	-	-	-	-
28	Sungai karusuk	2182	-	-	-	-	-
29	Sungai Tilang	2080	-	-	-	-	-
30	Sungai Sabu	1351	-	-	-	-	-
31	Sungai Sadap	5238	-	-	-	-	-
32	Sungai Perlang Kecil	5650	-	-	-	-	-
33	Sungai Cingkaro	1275	-	-	-	-	-



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
34	Sungai Malik ecil	3550	-	-	-	-	-
35	Sungai Meringau	5755	-	-	-	-	-
36	Sungai Batangraya	8997	-	-	-	-	-
37	Sungai Papan	2444	-	-	-	-	-
38	Sungai Kayuasanggar	1756	-	-	-	-	-
39	Sungai Trubus	5407	-	-	-	-	-
40	Sungai Payamalu	5089	-	-	-	-	-
41	Sungai Payakuku	2071	-	-	-	-	-
42	Sungai Lubang	2176	-	-	-	-	-
43	Sungai Lengko	5563	-	-	-	-	-
44	Sungai Tekung	1757	-	-	-	-	-
45	Sungai Bakas	4154	-	-	-	-	-
46	Sungai Sampur	2170	-	-	-	-	-
47	Sungai bumbun	2020	-	-	-	-	-
48	Sungai Rangau	18333	-	-	-	-	-
49	Sungai Payalutung	3241	-	-	-	-	-
50	Sungai Lekang	5917	-	-	-	-	-
51	Sungai Perlang	8128	-	-	-	-	-
52	Sungai ketiak	1991	-	-	-	-	-
53	Sungai Goang	2023	-	-	-	-	-
54	Sungai Risi	9867	-	-	-	-	-
55	Sungai Nadi	11479	-	-	-	-	-
56	Sungai Lingkuk	3506	-	-	-	-	-
57	Sungai Merapin	8194	-	-	-	-	-
58	Sungai Payalangka	1672	-	-	-	-	-



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
59	Sungai Binjai	4107	-	-	-	-	-
60	Sungai Mendulang	2429	-	-	-	-	-
61	Sungai Batang	3932	-	-	-	-	-
62	Sungai Raya	7900	-	-	-	-	-
63	Sungai Malik	8351	-	-	-	-	-
64	Sungai beringin	3773	-	-	-	-	-
65	Sungai kekuru	2670	-	-	-	-	-
66	Sungai Telang	2228	-	-	-	-	-
67	Sungai Belimbing	6387	-	-	-	-	-
68	Sungai Kulur	12584	-	-	-	-	-
69	Sungai Ketiak	40772	-	-	-	-	-
70	Sungai Kelup	2078	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka (Kec. Belinyu)		-	-	-	-	-
1	Sungai Panji	10000	-	-	-	-	-
2	Sungai Pasir	4724	-	-	-	-	-
3	Sungai Pejem	4500	-	-	-	-	-
4	Sungai Tengkalak	2000	-	-	-	-	-
5	Sungai Jeliti	3000	-	-	-	-	-
6	Sungai Bayat	9000	-	-	-	-	-
7	Sungai Layang	12000	-	-	-	-	-
8	Sungai Jelutung	12000	-	-	-	-	-
9	Sungai Belinyu	6000	-	-	-	-	-
10	Sungai Berok	6000	-	-	-	-	-
11	Sungai Romodong	3000	-	-	-	-	-



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
12	Sungai Bubus	4000	-	-	-	-	-
13	Sungai Sembuang	5000	-	-	-	-	-
14	Sungai Sekak	5000	-	-	-	-	-
15	Sungai Buntang	1500	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka (Kec. Riau Silip)		-	-	-	-	-
1	Sungai Tengkalak	5000	-	-	-	-	-
2	Sungai Bedukang	900	-	-	-	-	-
3	Sungai Deniang Laut	1300	-	-	-	-	-
4	Sungai Mapur	21250	-	-	-	-	-
5	Sungai Semubur	3000	-	-	-	-	-
6	Sungai Perimping	2750	-	-	-	-	-
7	Sungai Layang	32500	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka (Kec. Bakam)		-	-	-	-	-
1	Sungai Telang	5000	-	-	-	-	-
2	Sungai Mabat	15000	-	-	-	-	-
3	Sungai Layang	32500	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka (Kec. Merawang)		-	-	-	-	-
1	Sungai Baturusa	31250	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka (Kec. Puding Besar)		-	-	-	-	-
1	Sungai Perai	10000	-	-	-	-	-
2	Sungai Kerang	800	-	-	-	-	-



No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
3	Sungai Kotawaringin	20000	-	-	-	-	-
4	Sungai Air Pandan	20000	-	-	-	-	-
5	Sungai Kayubesi	500	-	-	-	-	-
6	Sungai Jeruk	15000	-	-	-	-	-
7	Sungai Lubang	6000	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka (Kec. Mendo Barat)		-	-	-	-	-
1	Sungai Menduk	26500	-	-	-	-	-
2	Sungai Rukan	20000	-	-	-	-	-
3	Sungai Sembilang	2000	-	-	-	-	-
4	Sungai Penagan	2500	-	-	-	-	-
5	Sungai Penjirang	5000	-	-	-	-	-
6	Sungai Kelapbingil	3000	-	-	-	-	-
	Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur		-	-	-	-	-
1	Sungai Buding	10400	-	-	-	-	-
2	Sungai Cerucuk	16720	-	-	-	-	-
3	Sungai Pela	14440	-	-	-	-	-
4	Sungai Bepang	10620	-	-	-	-	-
5	Sungai Cerucuk	16720	-	-	-	-	-
6	Sungai Air Raya	5030	-	-	-	-	-
7	Sungai Dendang	7930	-	-	-	-	-
8	Sungai Kampit	12780	-	-	-	-	-
9	Sungai Manggar	26190	-	-	-	-	-
10	Sungai Membalong	11410	-	-	-	-	-



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
11	Sungai Padang	2270	-	-	-	-	-
12	Sungai Purang	9950	-	-	-	-	-
13	Sungai Samak	23170	-	-	-	-	-
14	Sungai Sembuluh	11640	-	-	-	-	-
15	Sungai Sijuk	1690	-	-	-	-	-

Keterangan

: Sebagian belum dilakukan pendataan

Sumber:

Data DIKPLHD Kabupaten/Kota

Tabel- 28 Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung

Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2022

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Luas (Ha)	Volume (m3)
1	Embung Air Baku Gunung Mentas	9,34	720.000
2	Embung Bhay Park Kolong Polda	2,40	0
3	Kolam Retensi Pasar Ikan, Sungai Pedindang	3,63	20.000
4	Kolong Air Besar	2,60	90.000
5	Kolong Air Kelubi	10,44	480.000
6	Kolong Babi	2,00	50.000
7	Kolong Bacang	6,00	240.000
8	Kolong Bahar	6,00	240.000
9	Kolong Bakam	1,07	15.000
10	Kolong Beguruh	7,50	80.000
11	Kolong Bikang	0,10	150.000
12	Kolong Celuak	2,18	70.000
13	Kolong Dam Jepang	6,44	188.000
14	Kolong Dendang	4,12	102.500
15	Kolong Dukong	8,49	240.000
16	Kolong Enam Sungai Mayang	5,77	50.000
17	Kolong Gantung	0,00	600.000
18	Kolong Genangan Mentukul	12,00	2.592.000
19	Kolong Gudang Padi	4,36	120.000
20	Kolong Juru Seberang	14,00	240.000
21	Kolong Kacang Pedang	39,09	1.104.000
22	Kolong Kace Kab. Bangka	2,68	60.000
23	Kolong Kampit	3,12	480.000
24	Kolong Kebintik	1,85	62.000
25	Kolong Kepoh	1,80	55.000
26	Kolong Kerang	0	60.000
27	Kolong Kerasak	2,23	59.750
28	Kolong Lalang	4,22	320.000
29	Kolong Manggar 1	21,06	1.250.000
30	Kolong Manggar 2/Pancur	0	900.000
31	Kolong Mempadin	4,86	137.500
32	Kolong Mempayak	4,12	960.000
33	Kolong Menjelang	1,80	320.000
34	Kolong Mentabak	0	20.000
35	Kolong Merawang	5,89	600.000
36	Kolong Mingki	0	100.000
37	Kolong Muis	2,41	180.000



No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Luas (Ha)	Volume (m3)
38	Kolong Namang	2,07	60.000
39	Kolong Nangka	0,30	30.000
40	Kolong Nibung	34,06	60.000
41	Kolong Nona	10,54	125.000
42	Kolong Pasar ikan	0	120.000
43	Kolong Pasir Merah	19,95	262.500
44	Kolong Pedindang	4,69	120.000
45	Kolong Pemali Dam 3	55,90	1.200.000
46	Kolong Penganak	2,54	61.000
47	Kolong Perawas	4,15	0
48	Kolong Pice Besar	2128,19	77.192.000
49	Kolong PLN	8,42	15.000
50	Kolong Pumpung	5,56	267.000
51	Kolong Ramadan	0,00	25.000
52	Kolong Rindik	2,55	70.000
53	Kolong Sekar Biru	4,22	62.500
54	Kolong Sekuk 1 & 2	4,39	250.000
55	Kolong Selumar	0,23	7.500
56	Kolong Senyubuk	34,71	450.000
57	Kolong Simpur	18,65	495.000
58	Kolong Sinar jaya	6,06	150.000
59	Kolong Sinar Surya	2,89	52.500
60	Kolong Spritus	2,60	85.000
61	Kolong Sungai Selan	0	150.000
62	Kolong Tebat Gadung	23,14	320.000
63	Kolong Teluk Dalam	4,12	75.000
64	Kolong Terabek	0,56	75.000
65	Kolong Teru	2,83	37.500
66	Kolong Tujuh Sungai Mayang	5,77	85.000
67	Kolong Tukak Sadai	2,06	53.000
68	Kolong Yamin	9,60	331.000
69	T.O. Pemali	18,6	120.000

Sumber: BBWS Sumatera VIII dan hasil pengelolaan data spasial, 2022



Tabel 29- Kualitas Air Sungai

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2023

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (OC)	pH	DHL (μS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)
				Lintang	Bujur						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sungai Semenduk	Kabupaten Bangka	Hulu Sungai Semenduk	2°9'32,479"	105°56'48,99"	15 Maret 2023		5,58			28,0
2	Sungai Semenduk	Kabupaten Bangka	Tengah Sungai Semenduk	2°9'48,0"	105°52'50,399"	15 Maret 2023		4.12			10.0
3	Sungai Semenduk	Kabupaten Bangka	Hilir Sungai Semenduk	2°13'11,303"	105°49'34,697"	15 Maret 2023		5.40			12.0
4	Sungai Rangkui	Kota Pangkalpinang	Hulu Sungai Rangkui	2°8'8,0"	106°4'36,998"	16 Maret 2023		5.17			11.0
5	Sungai Rangkui	Kota Pangkalpinang	Tengah Sungai Rangkui	2°7'53,0"	106°6'18,997"	16 Maret 2023		5.40			10.0
6	Sungai Rangkui	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Rangkui	2°7'38,002"	106°7'6,999"	16 Maret 2023		5.9			9.00
7	Sungai Selan	Kabupaten Bangka Tengah	Hulu Sungai Selan	2°18'9,002"	106°2'43,999"	16 Maret 2023		5.58			3.00
8	Sungai Selan	Kabupaten Bangka Tengah	Tengah Sungai Selan	2°23'8,810"	106°3'4,012"	16 Maret 2023		5.13			21.0
9	Sungai Selan	Kabupaten Bangka Tengah	Hilir Sungai Selan	2°23'9,001"	105°58'47,0"	16 Maret 2023		5.42			26.0
10	Sungai Mancung	Kabupaten Bangka Barat	Hulu Sungai	2°55'28,697"	105°40'54,457"	17 Maret 2023		5.43			5.00
11	Sungai Mancung	Kabupaten Bangka Barat	Tengah Sungai (Jembatan Mancung)	1°55'16,061"	105°37'40,115"	17Maret 2023		5.3			4.00
12	Sungai Mancung	Kabupaten Bangka Barat	Hilir Sungai (dermaga Kayu ara)	1°58'59,855"	105°36'5,096"	17 Maret 2023		6.62			4.00
13	Sungai Bangka Kota	Kabupaten Bangka Selatan	Hulu Sungai Bangka Kota	2°25'39,795"	106°7'52,391"	18 Maret 2023		5.28			8.00



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (OC)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)
				Lintang	Bujur						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Sungai Bangka Kota	Kabupaten Bangka Selatan	Tengah Sungai Bangka Kota	2°30'38,594"	106°1'9,496"	20 Maret 2023		4.34			4.00
15	Sungai Bangka Kota	Kabupaten Bangka Selatan	Hilir Sungai Bangka Kota	2°29'58,317"	106°1'2,539"	20 Maret 2023		4.47			3.00
16	Sungai Cerucuk	Kabupaten Belitung Timur	Hulu sungai Cerucuk	2°50'15,111"	107°47'38,76"	20 Maret 2023		5.14			25.0
17	Sungai Cerucuk	Kabupaten Belitung Timur	Tengah sungai Cerucuk	2°48'56,198"	107°43'13,366"	20 Maret 2023		5.42			18.0
18	Sungai Cerucuk	Kabupaten Belitung Timur	Hilir sungai Cerucuk	2°46'57,613"	107°38'15,791"	20 Maret 2023		6.25			5.00
19	Sungai Lenggang	Kabupaten Belitung	Hulu Sungai Lenggang	2°52'4,5"	107°47'56,7"	20 Maret 2023		5.06			5.00
20	Sungai Lenggang	Kabupaten Belitung	Tengah Sungai Lenggang	2°54'21,913"	107°55'44,9"	20 Maret 2023		5.15			8.00
21	Sungai Lenggang	Kabupaten Belitung	Hilir Sungai Lenggang	2°57'54,1"	107°49'51,4"	20 Maret 2023		5.24			12.0

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (OC)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	NO2 (mg/l)	NO3 (mg/l)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)
				Lintang	Bujur													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
1	Sungai Semenduk	Kabupaten Bangka	Hulu Sungai Semenduk	2°9'32,479"	105°56'48,99"	15 Maret 2023		5,58			28,0	4.60	2,48	12,6	0.0116		0.0722	
2	Sungai Semenduk	Kabupaten Bangka	Tengah Sungai Semenduk	2°9'48,0"	105°52'50,399"	15 Maret 2023		4.12			10.0	4.12	2.88	23,5	0.00355		0.0583	
3	Sungai Semenduk	Kabupaten Bangka	Hilir Sungai Semenduk	2°13'11,303"	105°49'34,697"	15 Maret 2023		5.40			12.0	4.20	2.76	21.4	<0,00332		0.0403	

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (OC)	pH	DHL (μS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	NO2 (mg/l)	NO3 (mg/l)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)
				Lintang	Bujur													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
4	Sungai Rangkui	Kota Pangkalpinang	Hulu Sungai Rangkui	2°8'8,0"	106°4'36,998"	16 Maret 2023		5.17			11.0	4.78	2.54	20.9	0.00378		0.0389	
5	Sungai Rangkui	Kota Pangkalpinang	Tengah Sungai Rangkui	2°7'53,0"	106°6'18,997"	16 Maret 2023		5.40			10.0	4.35	2.62	23.3	0.0145		0.1110	
6	Sungai Rangkui	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Rangkui	2°7'38,002"	106°7'6,999"	16 Maret 2023		5.9			9.00	4.25	2.74	24.0	0.0386		0.1960	
7	Sungai Selan	Kabupaten Bangka Tengah	Hulu Sungai Selan	2°18'9,002"	106°2'43,999"	16 Maret 2023		5.58			3.00	4.55	2.42	18.9	0.0086		0.0662	
8	Sungai Selan	Kabupaten Bangka Tengah	Tengah Sungai Selan	2°23'8,810"	106°3'4,012"	16 Maret 2023		5.13			21.0	4.05	2.86	21.6	<0,00332		0.0675	
9	Sungai Selan	Kabupaten Bangka Tengah	Hilir Sungai Selan	2°23'9,001"	105°58'47,0"	16 Maret 2023		5.42			26.0	3.85	3.23	29.0	<0,00332		0.104	
10	Sungai Mancung	Kabupaten Bangka Barat	Hulu Sungai	2°55'28,697"	105°40'54,457"	17 Maret 2023		5.43			5.00	4.35	2.58	19.2	0.00370		0.0391	
11	Sungai Mancung	Kabupaten Bangka Barat	Tengah Sungai (Jembatan Mancung)	1°55'16,061"	105°37'40,115"	17Maret 2023		5.3			4.00	4.22	2.74	21.6	<0,00332		<0,0377	
12	Sungai Mancung	Kabupaten Bangka Barat	Hilir Sungai (dermarga Kayu ara)	1°58'59,855"	105°36'5,096"	17 Maret 2023		6.62			4.00	4.05	2.86	24.6	0.0599		0.120	
13	Sungai Bangka Kota	Kabupaten Bangka Selatan	Hulu Sungai Bangka Kota	2°25'39,795"	106°7'52,391"	18 Maret 2023		5.28			8.00	3.12	3.72	31.1	0.0107		0.278	
14	Sungai Bangka Kota	Kabupaten Bangka Selatan	Tengah Sungai	2°30'38,594"	106°1'9,496"	20 Maret 2023		4.34			4.00	4.25	2.67	20.5	<0,00332		0.0898	

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (OC)	pH	DHL (μS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	NO2 (mg/l)	NO3 (mg/l)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)
				Lintang	Bujur													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
			Bangka Kota															
15	Sungai Bangka Kota	Kabupaten Bangka Selatan	Hilir Sungai Bangka Kota	2°29'58,317"	106°1'2,539"	20 Maret 2023		4.47			3.00	4.50	2.55	18.1	0.0373		0.265	
16	Sungai Cerucuk	Kabupaten Belitung Timur	Hulu sungai Cerucuk	2°50'15,111"	107°47'38,76"	20 Maret 2023		5.14			25.0	4.15	2.77	21.6	<0,00332		0.217	
17	Sungai Cerucuk	Kabupaten Belitung Timur	Tengah sungai Cerucuk	2°48'56,198"	107°43'13,366"	20 Maret 2023		5.42			18.0	4.15	2.69	15.1	<0,00332		0.116	
18	Sungai Cerucuk	Kabupaten Belitung Timur	Hilir sungai Cerucuk	2°46'57,613"	107°38'15,791"	20 Maret 2023		6.25			5.00	4.65	2.29	17.1	<0,00332		<0,0377	
19	Sungai Lenggang	Kabupaten Belitung	Hulu Sungai Lenggang	2°52'4,5"	107°47'56,7"	20 Maret 2023		5.06			5.00	4.45	2.57	11.1	0.00436		0.190	
20	Sungai Lenggang	Kabupaten Belitung	Tengah Sungai Lenggang	2°54'21,913"	107°55'44,9"	20 Maret 2023		5.15			8.00	4.45	2.57	20.5	<0,00332		<0,0377	
21	Sungai Lenggang	Kabupaten Belitung	Hilir Sungai Lenggang	2°57'54,1"	107°49'51,4"	20 Maret 2023		5.24			12.0	4.55	2.33	17.4	<0,00332		<0,0377	



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	T.P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	F. Coli (jml/100 ml)	T. Coli (jml/100ml)	Sianida (mg/l)	H2S (mg/l)
				Lintang	Bujur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1	Sungai Mabet	Kabupaten Bangka	Hulu Sungai Mabet	1°54'57.802"	105°55'50,401"	1 Juni 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	70	120	<0,0033	-
2	Sungai Mabet	Kabupaten Bangka	Hulu Sungai Mabet	1°54'57.802"	105°55'50,401"	23 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,30	0,005	170	220	<0,0033	-
3	Sungai Mabet	Kabupaten Bangka	Hulu Sungai Mabet	1°54'57.802"	105°55'50,401"	5 Oktober 2022	0,067	<0,0010	0,30	<0,0031	210	320	<0,0033	-
4	Sungai Kayu Besi	Kabupaten Bangka	Tengah Sungai Kayu Besi	1° 54' 57,8"	105° 59' 22,4"	1 Juni 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	110	170	<0,0033	-
5	Sungai Kayu Besi	Kabupaten Bangka	Tengah Sungai Kayu Besi	1° 54' 57,8"	105° 59' 22,4"	25 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,20	0,0055	240	350	<0,0033	-
6	Sungai Kayu Besi	Kabupaten Bangka	Tengah Sungai Kayu Besi	1° 54' 57,8"	105° 59' 22,4"	5 Oktober 2022	0,0480	<0,0010	0,20	<0,0031	310	380	<0,0033	-
7	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Limbung, Desa Limbung	02° 00' 46,4"	106° 02' 07,8"	1 Juni 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	150	210	<0,0033	-
8	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Limbung, Desa Limbung	02° 00' 46,4"	106° 02' 07,8"	24 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,30	0,006	400	470	<0,0033	-
9	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Limbung, Desa Limbung	02° 00' 46,4"	106° 02' 07,8"	6 Oktober 2022	0,080	<0,0010	0,20	0,0063	470	540	<0,0033	-
10	Sungai Baturusa	Kabupaten Bangka	Hilir Sungai Baturusa	02° 01' 44,0"	106° 06' 42,90"	31 Mei 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	220	280	<0,0033	-
11	Sungai Baturusa	Kabupaten Bangka	Hilir Sungai Baturusa	02° 01' 44,0"	106° 06' 42,90"	25 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,30	0,0083	320	390	<0,0033	-
12	Sungai Baturusa	Kabupaten Bangka	Hilir Sungai Baturusa	02° 01' 44,0"	106° 06' 42,90"	25 Juli 2022	0,056	<0,0010	0,30	0,0083	700	940	<0,0033	-
13	Sungai Selindung	Kota Pangkalpinang	Muara Sungai Selindung	2° 3' 48,20"	106° 7' 19,39"	31 Mei 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	350	540	<0,0033	-

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	T.P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	F. Coli (jml/100 ml)	T. Coli (jml/100ml)	Sianida (mg/l)	H2S (mg/l)
				Lintang	Bujur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
14	Sungai Selindung	Kota Pangkalpinang	Muara Sungai Selindung	2° 3' 48,20"	106° 7' 19,39"	24 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,30	0,0067	450	630	<0,0033	-
15	Sungai Selindung	Kota Pangkalpinang	Muara Sungai Selindung	2° 3' 48,20"	106° 7' 19,39"	6 Oktober 2022	0,072	<0,0010	0,30	<0,0031	940	1200	<0,0033	-
16	Sungai Pangkalbalam	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Pangkalbalam	2° 5' 37,41"	106° 8' 23,34"	31 Mei 2022	<0,14	<0,0010	0,30	<0,0031	2400	3500	<0,0033	-
17	Sungai Pangkalbalam	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Pangkalbalam	2° 5' 37,41"	106° 8' 23,34"	24 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,40	0,010	3500	5400	<0,0033	-
18	Sungai Pangkalbalam	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Pangkalbalam	2° 5' 37,41"	106° 8' 23,34"	6 Oktober 2022	0,094	<0,0010	0,30	0,0070	1100	1700	<0,0033	-
19	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Selindung Hilir	02° 3' 56,90"	106° 7' 3,40"	31 Mei 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	240	350	<0,0033	-
20	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Selindung Hilir	02° 3' 56,90"	106° 7' 3,40"	24 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,30	0,011	350	540	<0,0033	-
21	Sungai Limbung	Kabupaten Bangka	Sungai Selindung Hilir	02° 3' 56,90"	106° 7' 3,40"	6 Oktober 2022	0,060	<0,0010	0,20	<0,0031	840	1200	<0,0033	-
22	Sungai Rangkui	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Rangkui	2° 6' 2,00"	106° 8' 19,00"	31 Mei 2022	<0,14	<0,0010	0,30	<0,0031	450	840	<0,0033	-
23	Sungai Rangkui	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Rangkui	2° 6' 2,00"	106° 8' 19,00"	24 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,40	0,0083	1600	2400	<0,0033	-
24	Sungai Rangkui	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Rangkui	2° 6' 2,00"	106° 8' 19,00"	6 Oktober 2022	0,082	<0,0010	0,30	<0,0031	920	1100	<0,0033	-
25	Sungai Aik Batu Buding	Kabupaten Belitung	Hulu Sungai Aik Batu Buding	2° 44' 27,56"	107° 55' 22,55"	2 Juni 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	94	150	<0,0033	-
26	Sungai Aik Batu Buding	Kabupaten Belitung	Hulu Sungai Aik Batu Buding	2° 44' 27,56"	107° 55' 22,55"	21 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	140	200	<0,0033	-
27	Sungai Aik Batu Buding	Kabupaten Belitung	Hulu Sungai Aik Batu Buding	2° 44' 27,56"	107° 55' 22,55"	8 Oktober 2022	0,054	<0,0010	0,20	<0,0031	200	240	<0,0033	-



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	T.P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	F. Coli (jml/100 ml)	T. Coli (jml/100ml)	Sianida (mg/l)	H2S (mg/l)
				Lintang	Bujur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
28	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 1	02° 42' 55,04"	107° 59' 16,51"	2 Juni 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	170	280	<0,0033	-
29	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 1	02° 42' 55,04"	107° 59' 16,51"	21 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,30	0,0047	400	470	<0,0033	-
30	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 1	02° 42' 55,04"	107° 59' 16,51"	8 Oktober 2022	0,092	<0,0010	0,20	<0,0031	350	540	<0,0033	-
31	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 2	02° 41' 46,30"	107° 59' 16,90"	2 Juni 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	1600	3500	<0,0033	-
32	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 2	02° 41' 46,30"	107° 59' 16,90"	21 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,30	0,005	3500	5400	<0,0033	-
33	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 2	02° 41' 46,30"	107° 59' 16,90"	8 Oktober 2022	0,069	<0,0010	0,20	<0,0031	1700	2800	<0,0033	-
34	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 3	02° 41' 46,10"	107° 59' 17,15"	3 Juni 2022	<0,14	<0,0010	0,30	<0,0031	2400	5400	<0,0033	-
35	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 3	02° 41' 46,10"	107° 59' 17,15"	20 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,40	0,0082	4500	6300	<0,0033	-
36	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 3	02° 41' 46,10"	107° 59' 17,15"	8 Oktober 2022	0,092	<0,0010	0,30	<0,0031	840	1200	<0,0033	-
37	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 4	02° 41' 0,67"	108° 0' 14,90"	3 Juni 2022	<0,14	<0,0010	0,30	<0,0031	2800	9200	<0,0033	-
38	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 4	02° 41' 0,67"	108° 0' 14,90"	20 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,30	0,0068	5400	9200	<0,0033	-
39	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding 4	02° 41' 0,67"	108° 0' 14,90"	8 Oktober 2022	0,089	<0,0010	0,30	<0,0031	3500	5400	<0,0033	-
40	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding	02° 38' 56,60"	108° 1' 50,60"	3 Juni 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	280	350	<0,0033	-

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	T.P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	F. Coli (jml/100 ml)	T. Coli (jml/100ml)	Sianida (mg/l)	H2S (mg/l)
				Lintang	Bujur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
41	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding	02° 38' 56,60"	108° 1' 50,60"	20 Juli 2022	<0,14	<0,0010	0,20	0,004	630	840	<0,0033	-
42	Sungai Aik Buding	Kabupaten Belitung Timur	Tengah Sungai Aik Buding	02° 38' 56,60"	108° 1' 50,60"	8 Oktober 2022	0,087	<0,0010	0,20	<0,0031	540	920	<0,0033	-
43	Sungai Aik Jangkat	Kabupaten Belitung Timur	Hilir Muara Aik Jangkat	02° 41' 22,20"	107° 59' 26,20"	3 Juni 2022	<0,14	<0,0010	0,20	<0,0031	1600	2400	<0,0033	-

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (OC)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BO D (mg/l)	CO D (mg/l)	NO2 (mg/l)	NO3 (mg/l)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T.P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	F. Coli (jml/100 ml)	T. Coli (jml/100 ml)
				Lintang	Bujur																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(20)	(21)	(22)
1	Sungai Semenduk	Kabupaten Bangka	Hulu Sungai Semenduk	2°9'32,479"	105°56'48,99"	15 Maret 2023		5,58			28,0	4.60	2,48	12,6	0.0116		0.0722		<0,0328		< 5,00	<0,00971	26.0	350
2	Sungai Semenduk	Kabupaten Bangka	Tengah Sungai Semenduk	2°9'48,0"	105°52'50,399"	15 Maret 2023		4.12			10.0	4.12	2.88	23,5	0.00355		0.0583		<0,0328		< 5,00	0.0115	16.5	26.0
3	Sungai Semenduk	Kabupaten Bangka	Hilir Sungai Semenduk	2°13'11,303"	105°49'34,697"	15 Maret 2023		5.40			12.0	4.20	2.76	21.4	<0,00332		0.0403		<0,0328		< 5,00	0.0124	4.50	1.3
4	Sungai Rangku	Kota Pangkalpinang	Hulu Sungai Rangku	2°8'8,0"	106°4'36,998"	16 Maret 2023		5.17			11.0	4.78	2.54	20.9	0.00378		0.0389		<0,0328		< 5,00	0.0189	21.9	140
5	Sungai Rangku	Kota Pangkalpinang	Tengah Sungai Rangku	2°7'53,0"	106°6'18,997"	16 Maret 2023		5.40			10.0	4.35	2.62	23.3	0.0145		0.1110		0.0355		< 5,00	0.0100	52.6	920
6	Sungai Rangku	Kota Pangkalpinang	Hilir Sungai Rangku	2°7'38,002"	106°7'6,999"	16 Maret 2023		5.9			9.00	4.25	2.74	24.0	0.0386		0.1960		0.0940		< 5,00	<0,00977	9.20	220

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (OC)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BO D (mg/l)	CO D (mg/l)	NO2 (mg/l)	NO3 (mg/l)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T.P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	F. Coli (jml/100 ml)	T. Coli (jml/100 ml)
				Lintang	Bujur																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(20)	(21)	(22)
7	Sungai Selan	Kabupaten Bangka Tengah	Hulu Sungai Selan	2°18'9,002"	106°2'43,999"	16 Maret 2023		5.58			3.00	4.55	2.42	18.9	0.0086		0.0662		<0,0328		<5,00	0.0114	28.6	35.9
8	Sungai Selan	Kabupaten Bangka Tengah	Tengah Sungai Selan	2°23'8,810"	106°3'4,012"	16 Maret 2023		5.13			21.0	4.05	2.86	21.6	<0,00332		0.0675		<0,0328		<5,00	0.0121	14.0	42.40
9	Sungai Selan	Kabupaten Bangka Tengah	Hilir Sungai Selan	2°23'9,001"	105°58'47,0"	16 Maret 2023		5.42			26.0	3.85	3.23	29.0	<0,00332		0.104		<0,0328		<5,00	0.0127	39.0	280
10	Sungai Mancung	Kabupaten Bangka Barat	Hulu Sungai	2°55'28,697"	105°40'54,457"	17 Maret 2023		5.43			5.00	4.35	2.58	19.2	0.00370		0.0391		<0,0328		<5,00	0.0105	11.2	12.5
11	Sungai Mancung	Kabupaten Bangka Barat	Tengah Sungai (Jembatan Mancung)	1°55'16,061"	105°37'40,115"	17Maret 2023		5.3			4.00	4.22	2.74	21.6	<0,00332		<0,0377		<0,0328		<5,00	0.0112	17.1	22.0
12	Sungai Mancung	Kabupaten Bangka Barat	Hilir Sungai (dermarga Kayu ara)	1°58'59,855"	105°36'5,096"	17 Maret 2023		6.62			4.00	4.05	2.86	24.6	0.0599		0.120		<0,0328		<5,00	0.0123	17.0	79.0
13	Sungai Bangka Kota	Kabupaten Bangka Selatan	Hulu Sungai Bangka Kota	2°25'39,795"	106°7'52,391"	18 Maret 2023		5.28			8.00	3.12	3.72	31.1	0.0107		0.278		0.613		<5,00	<0,00977	9.99	24
14	Sungai Bangka Kota	Kabupaten Bangka Selatan	Tengah Sungai Bangka Kota	2°30'38,594"	106°1'9,496"	20 Maret 2023		4.34			4.00	4.25	2.67	20.5	<0,00332		0.0898		<0,0328		<5,00	0.0101	<1.80	1.8
15	Sungai Bangka Kota	Kabupaten Bangka Selatan	Hilir Sungai Bangka Kota	2°29'58,317"	106°1'2,539"	20 Maret 2023		4.47			3.00	4.50	2.55	18.1	0.0373		0.265		<0,0328		<5,00	0.0105	<1.80	2.00
16	Sungai Cerucuk	Kabupaten Belitung Timur	Hulu sungai Cerucuk	2°50'15,111"	107°47'38,76"	20 Maret 2023		5.14			25.0	4.15	2.77	21.6	<0,00332		0.217		<0,0328		<5,00	<0,00977	110	920

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (OC)	pH	DHL (μS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BO D (mg/l)	CO D (mg/l)	NO2 (mg/l)	NO3 (mg/l)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T.P (mg/L)	Fenol (μg/L)	Minyak dan Lemak (μg/L)	Detergen (μg/L)	F. Coli (jml/100 ml)	T. Coli (jml/100 ml)
				Lintang	Bujur																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(20)	(21)	(22)
17	Sungai Cerucuk	Kabupaten Belitung Timur	Tengah sungai Cerucuk	2°48'56,198"	107°43'13,366"	20 Maret 2023		5.42			18.0	4.15	2.69	15.1	<0,00332		0.116		<0,0328		<5,00	<0,00977	31.0	46
18	Sungai Cerucuk	Kabupaten Belitung Timur	Hilir sungai Cerucuk	2°46'57,613"	107°38'15,791"	20 Maret 2023		6.25			5.00	4.65	2.29	17.1	<0,00332		<0,0377		<0,0328		<5,00	<0,00977	79.0	350
19	Sungai Lenggang	Kabupaten Belitung	Hulu Sungai Lenggang	2°52'4,5"	107°47'56,7"	20 Maret 2023		5.06			5.00	4.45	2.57	11.1	0.00436		0.190		<0,0328		<5,00	<0,00978	6.80	50.4
20	Sungai Lenggang	Kabupaten Belitung	Tengah Sungai Lenggang	2°54'21,913"	107°55'44,9"	20 Maret 2023		5.15			8.00	4.45	2.57	20.5	<0,00332		<0,0377		<0,0329		<5,00	<0,00979	79.0	2.00
21	Sungai Lenggang	Kabupaten Belitung	Hilir Sungai Lenggang	2°57'54,1"	107°49'51,4"	20 Maret 2023		5.24			12.0	4.55	2.33	17.4	<0,00332		<0,0377		<0,0328		<5,00	<0,00977	70.0	2400

Keterangan:

Sumber: IKLH KLHK, 2023



Tabel-30 Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun : 2022

No	Nama	Lokasi	Titik Koordinat		Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Danau Linau	Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar	2°37' 26,19 "	106°31' 38,29"	-	-	-	5.13	-	-
2	Kolong Block 8	Desa Lubuk Lingkok, Kecamatan Lubuk Besar	2°34' 13,23"	106°39' 35,58"	-	-	-	5.91	-	-
3	Kolong Sarkawi	Desa Nibung, Kecamatan Koba	2°19' 52,07"	106°13' 59,93"	-	-	-	5.21	-	-
4	Embung Namang	Desa Namang, Kecamatan Namang	2°19' 15,82"	106°11' 05,49"	-	-	-	5.01	-	-
5	Embung Teru	Desa Teru, Kecamatan Simpangkatis	2°25' 25,39"	106°07' 51,16"	-	-	-	5.61	-	-
6	Kolong Mentabak	Desa Keretak Atas, Kecamatan Sungaiselan	2°17' 05,08 "	106°02' 57,96"	-	-	-	5.09	-	-



No	Nama	Lokasi	Titik Koordinat		TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)
			Lintang	Bujur				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Danau Linau	Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar	2°37' 26,19 "	106°31' 38,29"	5	4.3	2.73	12.6
2	Kolong Block 8	Desa Lubuk Lingkok, Kecamatan Lubuk Besar	2°34' 13,23"	106°39' 35,58"	6	4.58	2.49	21.5
3	Kolong Sarkawi	Desa Nibung, Kecamatan Koba	2°19' 52,07"	106°13' 59,93"	5	4.05	2.97	23
4	Embung Namang	Desa Namang, Kecamatan Namang	2°19' 15,82"	106°11' 05,49"	8	4.85	2.56	22.1
5	Embung Teru	Desa Teru, Kecamatan Simpangkatis	2°25' 25,39"	106°07' 51,16"	45	4.25	2.88	22.4
6	Kolong Mentabak	Desa Keretak Atas, Kecamatan Sungaiselan	2°17' 05,08 "	106°02' 57,96"	3	4.20	2.72	18.9



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No	Nama	Lokasi	Titik Koordinat		NO ₂ (mg/L)	NO ₃ (mg/L)	NH ₃ (mg/L)	Klorin Bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (mg/L)	Minyak dan lemak (mg/L)	Detergen (mg/L)	Fecal Colliform (Jmlh/100 ml)	Total Colliform (Jmlh/100 ml)	Sianida (mg/L)	H ₂ S (mg/L)
			Lintang	Bujur												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1	Danau Linau	Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar	2°37' 26,19 "	106°31' 38,29"	-	0.695	-	-	<0,0312	-	-	-	32.1	-	-	-
2	Kolong Block 8	Desa Lubuk Lingguk, Kecamatan Lubuk Besar	2°34' 13,23"	106°39' 35,58"	-	0.650	-	-	<0,0312	-	-	-	11	-	-	-
3	Kolong Sarkawi	Desa Nibung, Kecamatan Koba	2°19' 52,07"	106°13' 59,93"	-	0.650	-	-	0.0329	-	-	-	<1,80	-	-	-
4	Embung Namang	Desa Namang, Kecamatan Namang	2°19' 15,82"	106°11' 05,49"	-	0.555	-	-	<0,0312	-	-	-	17	-	-	-
5	Embung Teru	Desa Teru, Kecamatan Simpangkatis	2°25' 25,39"	106°07' 51,16"	-	0.600	-	-	0.0431	-	-	-	6.1	-	-	-
6	Kolong Mentabak	Desa Keretak Atas, Kecamatan Sungaiselan	2°17' 05,08 "	106°02' 57,96"	-	0.680	-	-	0.108	-	-	-	<1,80	-	-	-

Keterangan:

Sumber : Data DIKPLHD Kabupaten/Kota 2022



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



Tabel-30.A Kualitas Air Kolong
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2023

No.	Nama	Lokasi	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/100 ml)	Total coliform (jmlh/100 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
				Lintang	Bujur																						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1.	Air kolong	Air kolong simpur sungai liat, Kabupaten Bangka	30 Oktober 2023				27.6	12.0	5.65	47.6	27.6	12.0	4.5	2.34	20.4	0.000345	0.600	0.152	0.0200	0.0214		< 5.00	0.0123	280	540	0.00700	< 0.00500
2.	Air kolong	Jalan TK Lama sungai liat, Kabupaten Bangka	30 Oktober 2023				84.8	52.0	5.95	153	84.8	52.0	4.14	2.74	23.7	< 0.00313	0.500	0.0739	0.0200	0.234		< 5.00	0.0123	350	540	0.00900	< 0.00500
3	Air kolong	Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah	31 Oktober 2023				187	7.00	5.58	340	187	7.00	4.1	2.9	22.5	0.000328	0.600	0.0996	0.0200	0.0214		< 5.00	0.0123	32	170	0.00900	< 0.00500
4	Air kolong	Kolong Air bakung, Bangka Selatan	1 November 2023				83.9	6.00	6.12	151	83.9	6.00	3.90	3.21	26.3	0.000927	0.600	0.0905	0.0200	0.0214		< 5.00	0.0123	280	1600	0.00700	< 0.00500
5	Air kolong	Kolong air temberan	3 November 2023				80.9	16.1	5.81	144	80.9	16.1	3.70	3.3	29.6	0.00694	0.500	0.127	0.0200	0.0214		< 5.00	0.0123	540	920	0.005	< 0.00500



Tabel-30 A Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun : 2020

No.	Nama	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Lintang	Bujur	Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/ L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)
1	Kolong Bangka	11/3/2020	-1,93294	106,1564	32,7	126	3,5	6,91	225	126	3,5
2	Kolong Biru	12/3/2020	-2,54894	106,3524	31,6	8,5	2	4,19	15,9	8,5	2
3	Kolong PDAM	17/03/2020	-3,03009	106,6946	29,8	9,83	40	4,29	18,2	9,83	40

No.	Nama	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Lintang	Bujur	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin Bebas (mg/L)	T-P (mg/L)
1	Kolong Bangka	11/3/2020	-1,93294	106,1564	4,13	2,52	17,6	< 0.00495	0,59	0,0461	< 0.02	0,104
2	Kolong Biru	12/3/2020	-2,54894	106,3524	4,13	2,72	14,2	< 0.00495	0,675	0,0449	< 0.02	< 0.0316
3	Kolong PDAM	17/03/2020	-3,03009	106,6946	4,43	2,52	16,3	0,014	0,7	0,0636	< 0.02	< 0.0316



No.	Nama	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Lintang	Bujur	Fenol (ug/L)	Minyak dan Lemak (ug/L)	Detergen (ug/L)	Fecal coliform (jmlh / 100 ml)	Total coliform (jmlh / 100 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
1	Kolong Bangka	11/3/2020	-1,93294	106,1564	0	< 943	0	10	24	0,005	0
2	Kolong Biru	12/3/2020	-2,54894	106,3524	0	< 943	0	< 1,80	< 1.80	0,004	0
3	Kolong PDAM	17/03/2020	-3,03009	106,6946	0	< 943	0	2	7,8	0,016	0

Keterangan: tanda - menunjukkan tidak dilakukan pengujian terhadap parameter dimaksud

Sumber: Dinas Lingkungan dan Kehutanan Hidup Prov. Kep. Bangka Belitung, 2023

Tabel-31. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2021

No.	Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota/Kec.	Jumlah KK	Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
			Sendiri	Bersama	Umum	Sungai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kabupaten Bangka	85,100	81449	706	247	2689
2	Kabupaten Belitung	48,300	44388	1420	193	2294
3	Kabupaten Bangka Barat	54,100	50281	1114	298	2402
4	Kabupaten Bangka Tengah	48,500	44853	1023	640	1984
5	Kabupaten Bangka Selatan	51,000	44457	1275	5141	128



No.	Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota/Kec.	Jumlah KK	Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
			Sendiri	Bersama	Umum	Sungai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Kabupaten Belitung Timur	33,500	28612	1658	660	2573
7	Kota Pangkalpinang	54,100	52466	1217	200	216

Keterangan:

Sumber: BPS Babel, 2022, diolah

Tabel-32. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2018

No.	Kabupaten	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2 & S3			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Bangka	19,14	21,32	26,64	21,4	21,99	23,59	24,49	26,28	3,01	2,05	4,24	5,33	0,49	0,12		
2	Belitung	18,45	19,82	26,11	28,42	20,05	19,94	25,36	24,17	4,57	2,59	5,12	4,87	0,34	0,19		
3	Bangka Barat	21,85	26,06	29,35	25,87	19,28	21,15	22,57	19,7	2,15	2,86	4,8	4,14	0	0,22		
4	Bangka Tengah	30,39	31,7	27,6	24,65	18,01	17,29	19,26	20,24	2,26	2,2	2,42	3,83	0,06	0,09		
5	Bangka Selatan	28,45	29,6	31,57	34,07	15,25	15,95	20,06	16,18	0,91	1,12	3,63	3,08	0,13	0		
6	Belitung Timur	15,65	19,42	26,57	28,5	24,78	20,84	26,84	22,42	2,63	3,47	3,44	5,24	0,09	0,11		
7	Pangkalpinang	12,26	14,05	14,26	17,91	19,64	18,1	41,06	36,15	2,73	3,9	9,42	9,27	0,63	0,62		



No.	Kabupaten	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2 & S3			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	Kepulauan Bangka Belitung	20,91	23,01	26	25,22	19,81	19,86	25,59	24,03	2,63	2,5	4,78	5,18	0,28	0,2		

Sumber Data : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keterangan : Data jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan S3 menjadi satu dengan tingkat pendidikan S2

Tabel-32. A Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun: 2021

No.	Kabupaten/Kota	Tidak/belum Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2	S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Kabupaten Bangka	90,382	82,804	40,912	59,029	5,602	9,524	489	28
2.	Kabupaten Belitung	33,995	44,637	25,863	36,323	4,146	6,094	204	3
3.	Kabupaten Bangka Barat	33,803	67,642	31,808	34,369	2,805	4,603	108	5
4.	Kabupaten Bangka Tengah	39,503	71,467	22,043	27,999	2,293	4,903	171	7
5.	Kabupaten Bangka Selatan	48,106	77,440	20,553	24,336	1,944	4,207	126	3
6.	Kabupaten Belitung Timur	26,055	34,355	17,915	21,470	2,410	3,536	107	5
7.	Kota Pangkalpinang	51,251	34,218	26,958	62,721	7,792	14,915	1,246	70

Keterangan :

Sumber: Kemendagri, 2022



Tabel-33. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2022

No.	Lokasi	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bangka Belitung	Hipertensi	248.104
2	Bangka Belitung	Diabetes Melitus	28.555
3	Bangka Belitung	Kanker Serviks dan Payudara	26.387
4	Bangka Belitung	HIV	276
5	Bangka Belitung	AIDS	42

Keterangan :

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Tabel-34. Jumlah Rumah Tangga Miskin

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2021

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga (Keluarga)	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Prosentase Rumah Tangga Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	85,100	3,550	4.17
2	Kabupaten Belitung	48,300	2,967	6.14



No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga (Keluarga)	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Prosentase Rumah Tangga Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Kabupaten Bangka Barat	54,100	1,283	2.37
4	Kabupaten Bangka Tengah	48,500	2,200	4.54
5	Kabupaten Bangka Selatan	51,000	1,693	3.32
6	Kabupaten Belitung Timur	33,500	2,037	6.08
7	Kota Pangkalpinang	54,100	2,215	4.09

Keterangan:

Sumber: Kemendagri, 2022; BPS, 2022 (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2022), data diolah



Tabel-34. A Jumlah Penduduk Miskin

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Kabupaten Bangka	14,50	4,26
2	Kabupaten Belitung	12,34	6,45
3	Kabupaten Bangka Barat	5,30	2,46
4	Kabupaten Bangka Tengah	9,61	4,86
5	Kabupaten Bangka Selatan	6,81	3,22
6	Kabupaten Belitung Timur	8,47	6,49
7	Kota Pangkalpinang	9,76	4,55

Keterangan:

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka, 2023



Tabel-35. Jumlah Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber pencemaran

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data: 2022

No	Sumber Pencemaran	Lokasi	Tipe/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m ³ /hari)	Volume Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m ³ /tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	Bergerak	-	-	-	-	-	-	-
1	PT. Angkasa Pura	Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalanbaru	Bandar Udara	152.8	2.0827	-	-	-
B.	Tidak Bergerak							
1	CV. Mutiara Alam Lestari	Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba	Perkebunan dan PKS	752	-	387.21	1.094	-
2	PT. Putera Bangka Tani	Desa Belilik, Kecamatan Namang	Perkebunan dan PKS	767.08	-	335.493	0.394	-
3	PT. Mutiara Hijau Lestari	Desa Guntung, Kecamatan Koba	Perkebunan dan PKS	1240.9	-	419.46	-	-
4	R.S. Siloam	Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalanbaru	Rumah Sakit	12.5366	-	30	15.5538	-
5	RSUD Koba	Kelurahan Koba, Kecamatan Koba	Rumah Sakit	5.7828	0.07	69	14.77	-
6	Rumah Sakit Pratama	Desa Namang, Kecamatan Namang	Rumah Sakit	2.6642	0.065	-	0.41	-



No	Sumber Pencemaran	Lokasi	Tipe/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m ³ /hari)	Volume Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m ³ /tahun)
7	PLTD Koba	Kelurahan Koba, Kecamatan Koba	Pembangkit Listrik	0.9375	-	0.12	1.37	-

Sumber : Data DIKPLHD Kabupaten Kota 2022

Tabel-36. Suhu Udara Rata-Rata Bulanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2022

No.	Nama dan Lokasi Stasiun	Lokasi	Titik Koordinat		Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (°C)											
			Latitude	Longitude	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)											
1	Stasiun Meteorologi Depati Amir	Pangkalpinang	-2.163	106.137	26,4	26,7	26,7	27,1	27,5	26,3	27,2	27,0	26,7	26,1	26,3	26,2
2	Stasiun Meteorologi Hanandjoedin	Tanjung Pandan Kabupaten Belitung	-2,75	107,75	26,5	26,5	26,8	26,5	27,1	26,0	26,6	26,5	26,5	26,0	26,3	26,3

Keterangan :

Sumber: Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir, 2022; Data Online BMKG, diakses 2023

Tabel-37. Kualitas Udara Ambien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2022



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



Lokasi	Titik koordinat		Lama Pengukuran	SO2 (µg/Nm3)	CO (µg/Nm3)	NO2 (µg/Nm3)	O3 (µg/Nm3)
	Latitude	Longitude					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Transportasi, Jl. Jenderal Sudirman, Sungailiat, Kabupaten Bangka	-1,855510	106,117953	14 hari	8,02	-	7,53	-
Transportasi, Jl. Jenderal Sudirman, Sungailiat, Kabupaten Bangka	-1,855510	106,117953	14 hari	9,08	-	6,14	-
Industri/Agroindustri, PT. Refined Bangka Tin, Kasawan Industri Jelitik, Kabupaten Bangka	-1,860922	106,133660	14 hari	12,90	-	7,87	-
Industri/Agroindustri, PT. Refined Bangka Tin, Kasawan Industri Jelitik, Kabupaten Bangka	-1,860922	106,133660	14 hari	12,76	-	11,41	-
Pemukiman, Rumah Bapak Sugianto, Kampung Jawa, Kabupaten Bangka	-1,860838	106,112848	14 hari	8,07	-	7,11	-
Pemukiman, Rumah Bapak Sugianto, Kampung Jawa, Kabupaten Bangka	-1,860838	106,112848	14 hari	6,50	-	8,87	-
Perkantoran/Komersial, Kantor DLH Kabupaten Bangka	-1,895509	106,105630	14 hari	12,05	-	8,55	-
Perkantoran/Komersial, Kantor DLH Kabupaten Bangka	-1,895509	106,105630	14 hari	8,03	-	6,60	-
Transportasi, Terminal Bis Tanjung Pandan, Jl. Jend. Sudirman, Kabupaten Belitung	-2,747972	107,655361	14 hari	7,55	-	4,00	-



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



Lokasi	Titik koordinat		Lama Pengukuran	SO2 (µg/Nm3)	CO (µg/Nm3)	NO2 (µg/Nm3)	O3 (µg/Nm3)
	Latitude	Longitude					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Transportasi, Terminal Bis Tanjung Pandan, Jl. Jend. Sudirman, Kabupaten Belitung	-2,747972	107,655361	14 hari	7,14	-	5,96	-
Industri/Agroindustri, Kawasan Industri Suge Jl. TS RUU, Kabupaten Belitung	-2,857556	107,599139	14 hari	4,31	-	5,84	-
Industri/Agroindustri, Kawasan Industri Suge Jl. TS RUU, Kabupaten Belitung	-2,857556	107,599139	14 hari	6,27	-	1,63	-
Pemukiman, Kantor Desa Aik Palembang Jl. Nusantara RT 04 RW 02, Kabupaten Belitung	-2,7195	107,651083	14 hari	10,2	-	7,14	-
Pemukiman, Kantor Desa Aik Palembang Jl. Nusantara RT 04 RW 02, Kabupaten Belitung	-2,7195	107,651083	14 hari	7,27	-	6,09	-
Perkantoran/Komersial, Puskesmas Air Saga Jl. Pattimura, Kabupaten Belitung	-2,722778	107,630083	14 hari	5,1	-	11,91	-
Perkantoran/Komersial, Puskesmas Air Saga Jl. Pattimura, Kabupaten Belitung	-2,722778	107,630083	14 hari	5,1	-	11,47	-
Transportasi, Jl KejaksaanTaman Locomobil Muntok, Kabupaten Bangka Barat	-2,062719	105,164269	14 hari	12,18	-	6,94	-
Transportasi, Jl KejaksaanTaman Locomobil Muntok, Kabupaten Bangka Barat	-2,062719	105,164269	14 hari	6,51	-	9,21	-

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



Lokasi	Titik koordinat		Lama Pengukuran	SO2 (µg/Nm3)	CO (µg/Nm3)	NO2 (µg/Nm3)	O3 (µg/Nm3)
	Latitude	Longitude					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Industri/Argoindustri, UNMET PT Timah Persero, Tbk., Peltim Muntok, Kabupaten Bangka Barat	-2,07263	105,177129	14 hari	12,14	-	0	-
Industri/Argoindustri, UNMET PT Timah Persero, Tbk., Peltim Muntok, Kabupaten Bangka Barat	-2,07263	105,177129	14 hari	11,38	-	6,35	-
Pemukiman, Komplek Perumahan Peltim, Masjid Al- Huda Muntok, Kabupaten Bangka Barat	-2,06886	105,183923	14 hari	5,71	-	5,23	-
Pemukiman, Komplek Perumahan Peltim, Masjid Al- Huda Muntok, Kabupaten Bangka Barat	-2,06886	105,183923	14 hari	6,5	-	3,89	-
Perkantoran/komersial, Dinas Komunikasi dan Informatika Komplek Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat, Muntok	-2,056887	105,203015	14 hari	7,76	-	5,8	-
Perkantoran/komersial, Dinas Komunikasi dan Informatika Komplek Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat, Muntok	-2,056887	105,203015	14 hari	7,4	-	5,43	-
Transportasi, Belakang Pos Polisi depan Pasar Modern, Koba, Kabupaten Bangka Tengah	-2,48825	106,407056	14 Hari	4,17	-	7,28	-



Lokasi	Titik koordinat		Lama Pengukuran	SO2 (µg/Nm3)	CO (µg/Nm3)	NO2 (µg/Nm3)	O3 (µg/Nm3)
	Latitude	Longitude					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Transportasi, Belakang Pos Polisi depan Pasar Modern, Koba, Kabupaten Bangka Tengah	-2,48825	106,407056	13 Hari	5,82	-	6,67	-
Industri/Argoindustri, Unit PLTD Koba PLN Rayon, Kabupaten Bangka Tengah	-2,499889	106,401194	14 Hari	3,06	-	11,07	-
Industri/Argoindustri, Unit PLTD Koba PLN Rayon, Kabupaten Bangka Tengah	-2,499889	106,401194	13 Hari	3,5	-	9,32	-
Pemukiman, Jl. Syafri Rahman, Koba, Kabupaten Bangka Tengah	-2,489361	106,412722	14 Hari	4,79	-	5,95	-
Pemukiman, Jl. Syafri Rahman, Koba, Kabupaten Bangka Tengah	-2,489361	106,412722	13 Hari	6,26	-	6,72	-
Perkantoran/komersial, Gedung Serba Guna, Kabupaten Bangka Tengah	-2,516806	106,4225	14 Hari	7,42	-	3,47	-
Perkantoran/komersial, Gedung Serba Guna Kabupaten Bangka Tengah	-2,516806	106,4225	13 Hari	5,25	-	4,11	-
Transportasi, Jl. Jend. Sudirman, Bank Sumsel Babel, Kabupaten Bangka Selatan	-3,010585	106,456728	13 Hari	11,28	-	8,47	-
Transportasi, Jl. Jend. Sudirman, Bank Sumsel Babel, Kabupaten Bangka Selatan	-3,010585	106,456728	13 Hari	7,02	-	10,14	-



Lokasi	Titik koordinat		Lama Pengukuran	SO2 (µg/Nm3)	CO (µg/Nm3)	NO2 (µg/Nm3)	O3 (µg/Nm3)
	Latitude	Longitude					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Industri/Argoindustri, Kawasan Industri Sadai, Kabupaten Bangka Selatan	-3,013567	106,741833	13 Hari	7,69	-	4,35	-
Industri/Argoindustri, Kawasan Industri Sadai, Kabupaten Bangka Selatan	-3,013567	106,741833	13 Hari	10,59	-	5,04	-
Pemukiman, Perumahan Bukit Permai Jl. Kampung Bukit, Kabupaten Bangka Selatan	-3,0117	106,4601	13 Hari	8,9	-	12,13	-
Pemukiman, Perumahan Bukit Permai Jl. Kampung Bukit, Kabupaten Bangka Selatan	-3,0117	106,4601	13 Hari	8,43	-	4,95	-
Perkantoran/komersial, Jl. Perkantoran Pemkab Bangka Selatan	-3,02185	106,511617	13 Hari	6,67	-	0,31	-
Perkantoran/komersial, Jl. Perkantoran Pemkab Bangka Selatan	-3,02185	106,511617	13 Hari	8,36	-	2,43	-
Transportasi, depan Pos Polisi Jl. Jendral Sudirman, Manggar, Kabupaten Belitung Timur	-2,857372	108,286529	14 Hari	7,48	-	5,05	-
Transportasi, depan Pos Polisi Jl. Jendral Sudirman, Manggar, Kabupaten Belitung Timur	-2,857372	108,286529	14 Hari	5,98	-	3,29	-



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



Lokasi	Titik koordinat		Lama Pengukuran	SO2 (µg/Nm3)	CO (µg/Nm3)	NO2 (µg/Nm3)	O3 (µg/Nm3)
	Latitude	Longitude					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Industri/Argoindustri, area Pabrik CPO PT. Steelindo Wahana Perkasa, Kabupaten Belitung Timur	-2,724195	108,066353	14 Hari	9,6	-	3,26	-
Industri/Argoindustri, area Pabrik CPO PT. Steelindo Wahana Perkasa, Kabupaten Belitung Timur	-2,724195	108,066353	14 Hari	2,47	-	4,7	-
Pemukiman, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	-2,851768	108,295059	14 Hari	4,85	-	5,24	-
Pemukiman, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	-2,851768	108,295059	14 Hari	6	-	2,67	-
Perkantoran/komersial, Kompleks Perkantoran Manggarawan Jl. Raya Manggara-Gantung Desa Padang, Kabupaten Belitung Timur	-2,88442	108,238686	14 Hari	5,24	-	4,46	-
Perkantoran/komersial, Kompleks Perkantoran Manggarawan Jl. Raya Manggara-Gantung Desa Padang, Kabupaten Belitung Timur	-2,88442	108,238686	14 Hari	6,38	-	2,69	-
Transportasi, Klinik Lany Jl. MS. Rahman, Kota Pangkalpinang	-2,13225	106,117	14 Hari	11,85	-	17,66	-
Transportasi, Klinik Lany Jl. MS. Rahman, Kota Pangkalpinang	-2,13225	106,117	14 Hari	10,04	-	20,22	-



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



Lokasi	Titik koordinat		Lama Pengukuran	SO2 (µg/Nm3)	CO (µg/Nm3)	NO2 (µg/Nm3)	O3 (µg/Nm3)
	Latitude	Longitude					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Industri/Argoindustri, Perum Air Mangkok Jl. Air Mawar, Kota Pangkalpinang	-2,114222	106,136472	14 Hari	6,9	-	9,08	-
Industri/Argoindustri, Perum Air Mangkok Jl. Air Mawar, Kota Pangkalpinang	-2,114222	106,136472	14 Hari	8,03	-	7,58	-
Pemukiman, Perum Bukit Merapin Masjid Al-Fitrah, Kota Pangkalpinang	-2,117444	106,093333	14 Hari	6,65	-	5,03	-
Pemukiman, Perum Bukit Merapin Masjid Al-Fitrah, Kota Pangkalpinang	-2,117444	106,093333	14 Hari	5	-	3,57	-
Perkantoran/komersial, UPTD. Laboratorium Jl. Delima Siam VI Kota Pangkal Pinang	-2,143944	106,117139	14 Hari	6,88	-	7,11	-
Perkantoran/komersial, UPTD. Laboratorium Jl. Delima Siam VI Kota Pangkal Pinang	-2,143944	106,117139	14 Hari	8,25	-	6,3	-

Keterangan :

Sumber : IKLH, KLHK, 2023



Tabel-38. Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2023

No.	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah (KL)	Gas	Batubara	LPG (MT)	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Industri											
1.	Pembangkit Listrik					511,262				100,387		230,232
B	Rumah Tangga			5,866			43,264					
C	Transportasi										290,486	142,042

Keterangan :

Sumber: signsmart.menlhk.go.id, diakses pada 13 Juli 2022



Tabel-38a. Penggunaan Bahan Bakar untuk Transportasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2023

No	Kabupaten/Kota	2023											
		RON 88 (Kilo Liter)	RON 90 (Kilo Liter)	RON 92 (Kilo Liter)	RON 95 (Kilo Liter)	solar (Kilo Liter)	Bio Solar (Kilo Liter)	Marine Fuel Oil (kilo liter)	BBG (MMSCF)	Avgas (kilo liter)	Minyak Tanah (kilo liter)	Avtur (kilo liter)	Bio Diesel (kilo liter)
1	Kabupaten Bangka	-	69,224	4,624	40	-	40,536	-	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Bangka Barat	-	49,116	3,016	-	-	23,340	-	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Bangka Selatan	-	43,928	817	-	-	18,840	-	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Tengah Tengah	-	66,846	3,099	-	-	18,363	-	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Belitung	-	52,411	4,380	-	-	27,287	-	-	-	44	-	-
6	Kabupaten Belitung Timur	-	35,313	1,963	-	-	18,053	-	-	-	-	-	-
7	Kota PangkalPinang	-	46,550	5,720	72	-	19,557	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	363,388	23,619	112	-	165,976	-	-	-	44	-	-



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No	Kabupaten/Kota	2022											
		RON 88 (Kilo Liter)	RON 90 (Kilo Liter)	RON 92 (Kilo Liter)	RON 95 (Kilo Liter)	solar (Kilo Liter)	Bio Solar (Kilo Liter)	Marine Fuel Oil (kilo liter)	BBG (MMSCF)	Avgas (kilo liter)	Minyak Tanah (kilo liter)	Avtur (kilo liter)	Bio Diesel (kilo liter)
1	Kabupaten Bangka	-	76,363	5,161	40	-	39,900	-	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Bangka Barat	-	48,532	3,623	-	-	23,485	-	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Bangka Selatan	-	48,240	1,382	8	-	19,840	-	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Tengah Tengah	-	66,952	3,769	-	-	18,840	-	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Belitung	-	52,091	7,055	32	-	29,143	-	-	-	44	-	-
6	Kabupaten Belitung Timur	-	33,773	3,753	-	-	18,107	-	-	-	-	-	-
7	Kota PangkalPinang	-	53,421	4,887	48	-	19,425	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	379,372	29,630	128	-	168,740	-	-	-	44	-	-



No	Kabupaten/Kota	2021											
		RON 88 (Kilo Liter)	RON 90 (Kilo Liter)	RON 92 (Kilo Liter)	RON 95 (Kilo Liter)	solar (Kilo Liter)	Bio Solar (Kilo Liter)	Marine Fuel Oil (kilo liter)	BBG (MMSCF)	Avgas (kilo liter)	Minyak Tanah (kilo liter)	Avtur (kilo liter)	Bio Diesel (kilo liter)
1	Kabupaten Bangka	-	43,500	4,296	112	-	36,974	-	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Bangka Barat	-	25,132	2,363	-	-	23,438	-	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Bangka Selatan	-	29,040	1,058	200	-	19,368	-	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Tengah Tengah	-	42,495	3,146	-	-	19,348	-	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Belitung	-	28,495	3,330	-	1,228	29,830	-	-	-	385	-	-
6	Kabupaten Belitung Timur	-	15,178	1,848	-	637	17,134	-	-	-	-	-	-
7	Kota PangkalPinang	-	54,868	4,233	152	-	19,180	-	-	-	5	-	-
	Jumlah	-	238,728	20,274	464	1,865	165,272	-	-	-	390	-	-



Tabel-38.a Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun : 2021

No.	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah (kL)	Gas	Batubara (ton)	LPG (ton)	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Industri											
1.	Pembangkit Listrik					579.939						252.807
B	Rumah Tangga			390			46.446					
C	Transportasi										373.487	

Keterangan:

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Tabel-38b. Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

I. Pembakaran Bahan Bakar di Pembangkit Listrik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pembangkit)							
TAHUN	HSD (Kilo Liter)	Solar B30 (Kilo Liter)	IDO (Kilo Liter)	MFO (Kilo Liter)	Batu Bara (Ton)	Gas Alam (MMSCF)	Other Biomassa (Ton)
2023							
2022							



2021	100,109	152,698			579,939		
2020	96,480	133,752			511,262		
2019	60,621	148,314			355,314		

II. Data Bahan Bakar Untuk Transportasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Transport)

TAHUN	RON 88 (Kilo Liter)	RON 90 (Kilo Liter)	RON 92 (Kilo Liter)	RON 95 (Kilo Liter)	Bio + solar (Kilo Liter)	CN 48 Bio Solar (Kilo Liter)	CN 51 Dexlite (Kilo Liter)	CN 53 Pertamina Dex (Kilo Liter)
2023		363,388	23,619	112				
2022		379,345	29,630	128				
2021	114,485	238,728	20,274	464		167,137	18,989	915
2020	165,014	117,363	8,109		142,042			

III. Pembakaran Bahan Bakar di Rumah Tangga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TAHUN	Minyak Tanah (Kilo Liter)	LPG (Ton)	Gas Alam (MMSCF)	Kayu Bakar (Ton)
2023				
2022				
2021	390	46,446		
2020				
2019				



Tabel 39. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang di gunakan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2023

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)				Listrik
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sepeda Motor	343.055	342.943	-	-	112
2	Mobil Penumpang	75.722	71.550	4.151	-	21
3	Mobil Bus	786	23	763	-	-
4	Mobil Barang	30	15	15	-	-
5	Kendaraan Khusus	396	230	166	-	-

Keterangan : *) Data diolah dari Database Samsat Online
Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov Kep Babel 2024

Tabel 40. Tabel Perubahan Penambahan Ruas Jalan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2023

No.	Kelas Jalan	Panjang Jalan dua tahun terakhir (km)	
		(3)	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jalan Bebas Hambatan		
2	Jalan Raya		
3	Jalan Sedang		
4	Jalan Kecil		
5	Jalan Nasional	600,4	600,4
6	Jalan Provinsi	850,99	850,99

Ket: Sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan pasal 31 ayat 3 menyatakan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang dan jalan kecil
Sumber: Open Data KemenPUPR, 2023, DPUPRPRKP Babel, 2023



Tabel-41. Dokumen Izin Lingkungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2023

No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2002	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sahabat Mewah dan Makmur	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/504/Bapedalda/2002 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 13 Desember 2002 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
2	2003	AMDAL	Pembangunan Komplek Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Air Itam, Kecamatan Pangkalan Baru dan Bukit Intan, Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/145/BAPEDALDA/2003 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 30 Mei 2003 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	2004	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pelabuhan di Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Steelindo Wahana Perkasa	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/215/Bapedalda/2004 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal : 30 Juni 2004 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
4	2004	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Parit Sembada	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/262/Bapedalda/2004 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal : 11 Agustus 2004 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
5	2005	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV PLTU Air Anyir, Gardu Induk Pangkalpinang – Gardu Induk Sungailiat	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. PLN (Persero) Wilayah BABEL	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/302/BAPEDALDA/2005 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 28 Februari 2005 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	2006	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan di Kecamatan Membalong dan Badau Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Palmindo Billiton Berjaya	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/459/Bapedalda/2006 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 7 November 2006 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
7	2007	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Sijuk dan Badau, Kabupaten Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Agro Makmur Abadi	Surat Keputusan. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/186/BAPEDALDA/2007 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 14 Mei 2007 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
8		AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Membalong dan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Forestalestari Dwikarya	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/450.C/BAPEDALDA/2007 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 28 September 2007 (SK Kelayakan LH yang



DOKUMEN

INFORMASI
KINERJA
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
9	2008	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Riau Silip dan Belinyu Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Gunung Pelawan Lestari	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/195.A/Bapedalda/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 28 Maret 2008 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
10	2008	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Timah Lepas Pantai (offshore) di Laut Tanjung Penyusuk, Simping, S. Belinyu, Danta, Kabupaten Bangka dan Laut Rambat, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sarana Marindo	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/270/Bapedalda/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 5 Mei 2008 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	2008	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan dan Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Swarna Nusa Sentosa	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/313/Bapedalda/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 19 Mei 2008 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
12	2008	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Desa Pugul, Riau dan Silip, Kecamatan Riausilip, Kabupaten Bangka	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Tata Hampanan Eka Persada	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/428/BLHD/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Juli 2008 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
13	2008	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka dan Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Putra Bangka Mandiri	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/473/BLHD/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 25 Agustus 2008 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	2008	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa di Kecamatan Air Gegas dan Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Inti Besaoh	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/688/BLHD/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2008 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
15	2008	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Payung dan Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Plasma Besaoh	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/689/BLHD/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2008 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
16	2008	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Badau, Sijuk dan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung serta di Kecamatan Gantung dan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Rebinmas Jaya	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/717/BLHD/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 19 November 2008 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	2009	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK – HTI) di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah serta Kecamatan Air Gegas dan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Nesia	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/029/BLHD/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 23 Januari 2009 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
18		AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK – HTI) di Kecamatan Belinyu, Sungailiat dan Riausilip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Inhutani V SPHK-BABEL	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/094/BLHD/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 24 Februari 2009 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
19		AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Timah (Persero) Tbk	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 / 381 / BLHD / 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Juli 2009 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20		DPPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pelabuhan Pangkalbalam di Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pangkalbalam	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 / 387.E/ BLHD / 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Juli 2009 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
21		AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) di Kecamatan Belinyu dan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Istana Kawi Kencana	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 / 432 / BLHD / 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Agustus 2009 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
22		AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peningkatan Jalan Toboali – Sadai ± 44.55 Km di Kecamatan Toboali dan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas PU Provinsi Kep. Bangka Belitung - Satuan Kerja SNVT P2JJ BABEL	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 / 532/ BLHD / 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 30 Oktober 2009 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Berbasis Kompetensi Inti Industri Daerah di Kelurahan Bacang dan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pangkalpinang	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 / 020/ BLHD / 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 14 Januari 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
24	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah di Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Prov. Kep. Babel.	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Mitra Stania Prima	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 / 091/ BLHD / 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 4 Maret 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
25	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah di Perairan Laut Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Aega Prima	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 / 316/ BLHD / 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Maret 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Desa Rajik dan Permis, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Prima Tin	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 / 320/ BLHD / 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Maret 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
27	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit ± 10.101 Ha di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Hasil Sawit Bina Sejahtera	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 / 434 / BLHD / 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 14 Mei 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
28	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peleburan dan Pemurnian Bijih Timah di Kawasan Industri Ketapang Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Stanindo Inti Perkasa	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 / 443 / BLHD / 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 18 Mei 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (UPHHK-HTI) di Kec. Simpang Rimba, Payung, Air Gegas dan Pulau Besar, Kabupaten Basel dan di Kecamatan Muntok, Simpang Teritip, Jebus, Kelapa dan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangun Rimba Sejahtera	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/555/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 7 Juli 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
30	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut di Desa Air Kelik dan Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Halaban Primavestama	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/635/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 18 Agustus 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
31	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut di Desa Air Kelik dan Desa Mayang, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur, Prov. Kep. Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Kampit Tin Utama	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/637/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 18 Agustus 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut di Desa Air Kelik dan Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Billiton Jaya Utama	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/636/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 18 Agustus 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
33	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Kompleks Olahraga (Sport Center) dan Fasilitasnya di Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/677/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 30 Agustus 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
34	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Puncak Hall (Pembangunan Hotel dan Parkir) di Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Puncak Prima Lestari	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/678/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 30 Agustus 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Kab. Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Babel Tinindo	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/775/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 19 Oktober 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
36	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Kabupaten Bangka Barat, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Cirindo Mining Utama	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/776/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 19 Oktober 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
37	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Kabupaten Bangka Barat, Bangka dan Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Mitra Abadi Berkatindo	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/777/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 19 Oktober 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Biji Timah Lepas Pantai di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Mitra Sukses Globalindo	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/778/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 19 Oktober 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
39	2010	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (UPHHK-HTI) di Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, dan di Kecamatan Sijuk dan Membalong, Kabupaten Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Agro Pratama Sejahtera	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/897/BLHD/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 21 Desember 2010 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
40	2011	DPLH	Usaha dan/atau Kegiatan PLTD di Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat; di Kelurahan koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah; di Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung; di Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. PLN (PERSERO) Wilayah Bangka Belitung	Surat Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/495/BLHD/2010 tentang Rekomendasi atas DPLH kegiatan PLTD dan Perkantoran PT. PLN (Persero) Wilayah Babel, tanggal 23 Desember 2010 (Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Belitung dipersamakan dengan SKIL)
41	2011	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Operasi Produksi Penambangan Bahan Galian Timah di Kecamatan Payung, Kecamatan Air Gegas dan Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Serumpun	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/106/BLHD/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 21 Februari 2011 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
42	2011	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Wilayah Laut Pasir Padi, Kota Pangkalpinang	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Stanindo Inti Perkasa	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/198/BLHD/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 22 Maret 2011 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43	2011	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Laut Kelambui, Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Prima Tin	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/199/BLHD/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 22 Maret 2011 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
44	2011	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pabrik Peleburan Bijih Timah (Smelter) di Desa Batu Peny, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Tommy Utama	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/362/BLHD/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 18 Mei 2011 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
45	2011	AMDAL	Rencana usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (offshore) di Desa Rajik dan Permis, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Synergy Maju Bersama	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/460/BLHD/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 20 Juni 2011 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46	2011	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan UPHHK – HTI di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Indosukses Lestari Makmur	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/597.b/BLHD/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 27 Juli 2011 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
47	2011	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan Pembangunan T/L 70 kV Dukong-Manggar dan Gardu Induk Terkait di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II	Surat Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/319/BLHD/2011 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL, tanggal 16 Agustus 2011 (Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipersamakan dengan SKIL)



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
48	2011	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Operasional Pelabuhan Khusus di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	CV. Sejahtera Utama	Surat Keputusan Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/371.a/BLHD/2011 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Pelabuhan Khusus di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Oleh CV. Sejahtera utama, tanggal 30 September 2011 (Keputusan Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipersamakan dengan SKIL)
49	2012	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bumi Makmur Sejahtera Jaya	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/029/BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 10 Januari 2012 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	2012	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Laut Rambat dan Keranji, di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sentra Tinindo	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/061/BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 24 Januari 2012 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
51	2012	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan UPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi di Kecamatan Koba, Namang, Simpang Katis dan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Agrindo Persada Lestari	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/078/BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 25 Januari 2012 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)
52	2012	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Timah Lepas Pantai di Tanjung Pemuja Desa Tayu Ketap, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sinar Mutiara Sejahtera	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/079/BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 25 Januari 2012 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
53	2012	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan T/L 150 kV Pangkalpinang-Kelapa-Mentok dan Gardu Induk Terkait	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II	Surat Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/098/BLHD/2012 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL, tanggal 3 Februari 2012 (Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipersamakan dengan SKIL)
54	2012	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Oli Bekas sebagai Bahan Bakar Tanur untuk Peleburan Timah di Unit Metalurgi di Desa Sungai Baru, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Timah (Persero) Tbk	Surat Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/129/BLHD/2012 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL, tanggal 10 Februari 2012 (Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipersamakan dengan SKIL)
55	2012	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) di Desa Air Gantang dan Desa Kelabat, Kabupaten Bangka Barat	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sumber Jaya Indah	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/331/BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 22 Juni 2012 (SK Kelayakan LH yang dipersamakan dengan SK Izin Lingkungan)



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
56	2012	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan T/L 150 kV Pangkalpinang-Koba-Toboali dan Gardu Induk Terkait	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II	Surat Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/528/BLHD/2012 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL, tanggal 22 Juni 2012 (Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipersamakan dengan SKIL)
57	2012	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peleburan dan Pemurnian Timah (Smelter) di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	CV. United Smelting	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/475/BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 18 September 2012; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/698/BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 17 Oktober 2012



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
58	2012	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan UPHHK-HTI di Kecamatan Dendang dan Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur seluas ±9.485 Ha	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Greenland Diorama	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/716.n/BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2012; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/794/BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 30 November 2012
59	2012	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan T/L 150 kV Pangkalpinang-Koba-Toboali dan Gardu Induk Terkait	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/528/BLHD/2012 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL, tanggal 22 Juni 2012; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/852/BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 26 Desember 2012



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60	2013	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jembatan Teluk Belinyu yang menghubungkan Tanjung Gudang Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas PU Provinsi Kep. Bangka Belitung	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/133.d/BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 28 Maret 2013; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/341/BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 25 April 2013
61	2013	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri di Tanjung Ular, di Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Timah (Persero) Tbk	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/337/BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 25 April 2013; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/385/BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 16 Mei 2013
62	2013	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Goshen Bangka Mulia	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/201.n/BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 15 April 2013; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/580/BLHD/2013



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 27 Juni 2013
63	2013	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) di Kabupaten Bangka Selatan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Goshen Bangka Mulia	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/201.L/BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 15 April 2013; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/581/BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 27 Juni 2013
64	2013	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan UPHHK-HTI di Kec. Kelapa Kampit, Gantung, Simpang Pesak, Dendang dan Simpang Renggiang, Kab. Belitung Timur seluas ± 29.418 Ha	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Andalan Karya Pertiwi	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/577/BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 27 Juni 2013; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/672/BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 4 Juli 2013



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
65	2013	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah (Smelter) di Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	CV. Tiga Sekawan	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1192 /BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 9 Desember 2013; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1193/BLHD/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 9 Desember 2013
66	2014	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran di Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel dan Babel	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/040/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 27 Januari 2014; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/039/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 27 Januari 2014



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
67	2014	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Swiss-Bel Hotel di Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangun Mega Lestari	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/080.c/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 7 Februari 2014; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/080.d/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 7 Februari 2014
68	2014	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Prima Tin	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/271/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 1 Juli 2014; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/272/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 1 Juli 2014



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
69	2014	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Sarana Penunjang Tambang di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Silika Tiga Mas	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/645.a/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 21 Oktober 2014; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/645.b/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 21 Oktober 2014
70	2014	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) di Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Babel Sumber Pratama Mineral	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/698.a/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2014; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/698.c/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2014



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
71	2014	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Cipta Mineral Bumi Selaras	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/698.b/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2014; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/698.d/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2014
72	2014	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Hasil Alam Sukses Pratama	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/698.e/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2014; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/698.f/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2014



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
73	2014	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Arsed Indonesia	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/698.h/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2014; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/698.g/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2014
74	2014	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandar Udara H.A.S Hanandjoeddin di Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/698.i/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2014; - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/698.j/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Oktober 2014



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75	2015	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Mutiara Prima Sejahtera	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/380/BLHD/2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 18 Mei 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/33.a/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 18 Mei 2015
76	2015	AMDAL	Rencana kegiatan pembangunan Bendungan Pice Besar Daerah Irigasi Selingsing dengan luas tampungan 3.182,40 Ha di Desa Lenggang dan Desa Selingsing, Kecamatan Gantong, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1044/BLHD/2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 23 Oktober 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/68.b/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 23 Oktober 2015



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
77	2015	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Peleburan Bijih Timah dengan kapasitas produksi tambahan 10 ton/hari di Dusun Bangek, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Billitin Makmur Lestari	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/018/BLHD/2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 19 Januari 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/24/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 30 Maret 2015
78	2015	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah dengan Tambahan Kegiatan Ponton Isap Produksi (PIP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Timah (Persero) Tbk	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/401/BLHD/2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 29 Mei 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/38/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 19 Juni 2015



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
79	2015	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	rencana usaha pembangunan mill-plant pengolahan mineral logam timah (relokasi) dengan kapasitas pengolahan 100 ton ore (bongkah)/hari pada lahan seluas 3,3, Ha di Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Menara Cipta Mulia	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/766/BLHD/2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 14 Agustus 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/52/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 26 Agustus 2015
80	2015	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Usaha Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) dengan Tambahan Kapasitas Produksi 7.000 ton/tahun di Kawasan Industri Jelitik, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Mitra Stania Prima	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/543/BLHD/2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 26 Juni 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/64/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 28 Agustus 2015



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
81	2015	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Lepas Pantai (Offshore) di Perairan Laut Bubus, Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu dan Kabupaten Bangka	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Hasil Alam Gemilang Pratama	- Surat Keputusan Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/969/BLHD/2015 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Lepas Pantai (Offshore) di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Oleh PT. Hasil Alam Gemilang Pratama, 3 September 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/65/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 25 September 2015



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
82	2015	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Kepelabuhan Pangkalbalam di Jl. Yos Sudarso No. 1 Kel. Lontong Pancur, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Pangkalbalam	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/985/BLHD/2015 tentang Rekomendasi atas DPLH kegiatan Kepelabuhan Pangkalbalam oleh PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Pangkalpinang, 7 September 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/68/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 30 September 2015
83	2015	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana usaha pengolahan dan pemurnian bijih timah (mill plant dan smelter) dengan kapasitas terpasang 100 ton ore/hari untuk mill plant dan kapasitas tanur terpasang 2 x 20 ton/heat/hari untuk smelter dalam areal seluas 3,3 Ha di Dusun Gumbak, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Menara Cipta mulia	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1025/BLHD/2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 22 Oktober 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/68.a/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 22 Oktober 2015



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
84	2015	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana usaha pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) dengan kapasitas tanur terpasang 4 x 6 ton konsentrat/heat pada lahan seluas 15.721 m ² di Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Synergy Maju Bersama	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1100/BLHD/2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 28 Oktober 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/76/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 13 November 2015
85	2015	AMDAL	Rencana perubahan usaha pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) dengan kapasitas tanur terpasang 4 x 6 ton konsentrat/heat pada lahan seluas 15.721 m ² di Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa perubahan kepemilikan dari PT. Synergy Maju Bersama menjadi PT. Lautan Harmonis Sejahtera	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Lautan Harmonis Sejahtera	Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/85/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 18 Desember 2015



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
86	2015	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Prima Timah Utama	- Surat Keputusan Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/1377/BLHD/2015 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Oleh PT. Prima Timah Utama, 23 Desember 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/109/LH/BP2TPM/2015 tentang Izin Lingkungan, tanggal 31 Desember 2015
87	2016	Laporan Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan luas HGU 11.337,582 Ha dan kapasitas pabrik 60 ton TBS/jam di Kecamatan Membalong, Badau dan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Forestalestari Dwikarya	Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/21.A/LH/BP2TPM/2016 tentang Izin Lingkungan, tanggal 26 Februari 2016



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
88	2016	DELH	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah (Smelter) di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	CV. Dua Sekawan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/259/BLHD/2016 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah (Smelter) di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh CV. Dua Sekawan, tanggal 11 Februari 2016; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/22/LH/BP2TPM/2016 tentang Izin Lingkungan, tanggal 29 Februari 2016
89	2016	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana usaha peleburan dan pemurnian bijih timah (smelter) dengan perubahan kapasitas produksi sebesar 38,4 ton/hari di Kawasan Industri Ketapang, Jl. TPI Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Tinindo Inter Nusa	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/184/BLHD/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 29 Februari 2016; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/45/LH/BP2TPM/2016 tentang Izin Lingkungan, tanggal 14 April 2016



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
90	2016	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Peleburan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Desa Kayu Besi, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	CV. Bangka Timah Makmur	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/1381/BLHD/2015 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Kabupaten Bangka Tengah, Prov Kep Babel Oleh CV. Bangka Timah Makmur, tanggal 23 Desember 2015; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/93.A/LH/BP2TPM/2016 tentang Izin Lingkungan, tanggal 27 Juni 2016
91	2016	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan dermaga dengan panjang ± 102 m dan lapangan penumpukan seluas $\pm 5.265 \text{ m}^2$ di Desa Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Pelindo II (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Rekomendasi Kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 651/865/BLHD/2016 tentang Rekomendasi UKL-UPL, 8 Agustus 2016; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/109/LH/BP2TPM/2016 tentang Izin Lingkungan, tanggal 18 Agustus 2016



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
92	2016	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Perubahan usaha dan/atau kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa perubahan mengganti teknologi produksi dari tanur pendam menjadi tanur listrik dengan kapasitas produksi 30 ton/hari dan perubahan nama perusahaan dari CV. Donna Kembara Jaya menjadi PT. Donna Kembara Jaya	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Donna Kembara Jaya	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/772.F/BLHD/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 29 Agustus 2016; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 117.A/LH/BP2TPM/2016 tentang Izin Lingkungan, tanggal 29 Agustus 2016
93	2016	AMDAL	Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang berupa perubahan kepemilikan dari PT. Donna Kembara Jaya menjadi PT. Bangka Serumpun	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Serumpun	Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/132/LH/BP2TPM/2016 tentang Izin Lingkungan, tanggal 11 Oktober 2016



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
94	2016	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Perubahan usaha dan/atau kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Desa Pelempang, Desa Air Bulu, Desa Rukam, Desa Cengkong Abang, Desa Kota Kapur, Desa Petaling, dan Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, berupa perubahan kapasitas produksi dari 60 ton/hari menjadi 120 ton/hari dan penambahan unit pengolahan kernel	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Putra Bangka Mandiri	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1139/BLHD/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 25 Oktober 2016; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/163/LH/BP2TPM/ 2016 tentang Izin Lingkungan, tanggal 25 Oktober 2016
95	2016	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Embung Air Baku dengan luas 12,6 Ha, kedalaman 6 m dan daya tampung 720.000.000 m ³ di Desa Kacang Butor, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas PU Kab. Belitung Timur	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1077/BLHD/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 25 Oktober 2016; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/142.A/LH/BP2TPM/ 2016 tentang Izin Lingkungan, tanggal 25 Oktober 2016



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
96	2016	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambahan Kapasitas Produksi Pembangkit PLTD Muntok-Padang dengan kapasitas 25.285 KW dan 31.040 KW berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 94 PAL II, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dan di Jalan Simpang Renggang-Manggar, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. PLN (Persero) Wilayah Babel	- Surat Rekomendasi Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/153/BP2TPM/2016 tentang Rekomendasi UKL-UPL, 15 November 2016; - Surat Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/158/LH/BP2TPM/2016 tentang Izin Lingkungan, tanggal 15 November 2016
97	2017	UKL -UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV Pkp-Kelapa-Mentok dan SUTT Pangkalpinang-Koba-Toboali dan Gardu Induk Terkait di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Basel	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan	- Surat Rekomendasi Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/09/DPMPTSP/2017 tentang Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 17 Januari 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/10/LH/PMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 17 Januari 2017



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
98	2017	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah (Smelter) di Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah berupa perubahan kepemilikan dari CV. Serumpun Sebalai menjadi PT. Premium Tin Indonesia	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Premium Tin Indonesia	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/16/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 27 Januari 2017
99	2017	AMDAL	Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) seluas ± 33,494 Ha di Desa Pergam, Kec. Air Gegas, di Desa Bedengung, Irat, Kecamatan Payung, di Desa Jelutung II, Gudang, Kecamatan Simpang Rimba, dan di Desa Batu Betumpang, Panca Tunggal, Fajar Indah, Suka Jaya, Sumber Jaya Permai, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Hutan Lestari Raya	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/379/DLH/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 30 Maret 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/148.A/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 4 April 2017



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
100	2017	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) dengan luas areal $\pm 4.482 \text{ m}^2$ dan kapasitas tanur terpasang 3.600 Ton Ore/Tahun di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Belitung Timah Sejahtera	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/387/DLH/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 30 Maret 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/49/LH/DPMPTSP/ 2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 13 April 2017
101	2017	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Jln. Ketapang, Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang berupa perubahan peningkatan kapasitas tanur terpasang 2 x 15 ton/hari menjadi 2 x 20 ton/hari dan perubahan jenis tanur bakar menjadi tanur listrik.	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. DS Jaya Abadi	- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/376/DLH/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 29 Maret 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/50/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 18 April 2017



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
102	2017	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengerukan Alur Sungai Manggar dengan volume kerukan 279.308,48 m ³ dan dumping area 2051'18,65"S 108028'1,74"E serta dengan kedalaman 20 m oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur di Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	- Surat Rekomendasi Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/56/DPMPTSP/2017 tentang Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 12 Mei 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/60/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 12 Mei 2017
103	2017	Laporan Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa perubahan pengelolaan lingkungan hidup dengan bertambahnya kerjasama kemitraan dengan BUMD, BUMDes, CV. Koperasi dan bentuk kemitraan lainnya	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Timah (Persero) Tbk Perubahan Pengelolaan	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/61/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 22 Mei 2017



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
104	2017	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Instalasi Karantina Hewan (IKH) Pengamanan Maksimum Pulau Naduk seluas ± 206,23 Ha di Desa Petaling, Kecamatan Selat Nasik, Kab. Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/64/LH/DPMPTSP/ 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Mei 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/65/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 31 Mei 2017
105	2017	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Embung Jernang dengan daya tampung embung sebesar 510.383,59 m ³ di Desa Batu Betumpang, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VIII Prov. Bangka Belitung Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/66/LH/DPMPTSP/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Mei 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/67/LH/DPMPTSP/ 2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 31 Mei 2017



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
106	2017	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jalan Angkut Produksi dan Peningkatan Dermaga Terminal Khusus Tanjung Resing untuk Menunjang Kegiatan Operasional Kebun dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan luas areal jalan 4,5 Ha (Kawasan Hutan : 3,92 Ha dan areal peruntukan lain : 0,58 Ha) dan luas areal terminal khusus (APL) : 14,96 Ha di Desa Dendang, Kec. Dendang, Kab. Beltim	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sahabat Mewah Makmur	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/74/LH/DPMPTSP/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 14 Juni 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/75/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 14 Juni 2017
107	2017	DPLH	kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 529,93 ha di Desa Berang-Ibul dan Pelangas, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat dan Desa Balunujuk dan Merawang, Kecamatan Merawang serta Desa Air Duren-Bukit Tabir, Kecamatan Pemali, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Tata Hampanan Eka Persada	- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/734/DLH/2017 tentang Rekomendasi atas DPLH kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. THEP di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka, tanggal 14 Juni 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/76/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 14 Juni 2017



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
108	2017	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambahan Kapasitas Produksi Pembangkit PLTD Koba dari 8.836 KW menjadi 13.854 KW dan PLTD Selat Nasik dari 400 KW menjadi 2.670 KW di Jalan Listrik Nomor 1, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dan Kelurahan Selat Nasik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung Sektor Pembangunan Bangka Belitung	- Surat Rekomendasi Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/85/DPMPTSP/2017 tentang Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 25 Juli 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/86/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 25 Juli 2017
109	2017	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di di Laut Pasir Padi, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang berupa perubahan penggunaan kapal isap dengan metode Bore Hole Mining (BHM) (2 Unit) yang operasinya mampu mencapai target solid sebesar 60.000 m3/bulan dan tidak melakukan cut and fill pada dasar laut dengan luas 238,84 Ha	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Stanindo Inti Perkasa	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/94/LH/DPMPTSP/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 9 Agustus 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/95/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 9 Agustus 2017



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
110	2017	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Jl. Raya Pangkalpinang-Sungailiat Km 18,5, Desa Merawang No. 449, Kec. Merawang, Kab. Bangka berupa rencana perubahan status badan usaha CV. Keranji Jaya Mandiri PT. Kijang Jaya Mandiri, pembangunan dan peningkatan tanur terpasang dari 6.000 ton/tahun menjadi 11.700 ton/tahun, peningkatan luas areal dari 2,3 ha menjadi 12,4 Ha dan perubahan teknologi tanur bakar menjadi tanur listrik	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Kijang Jaya Mandiri	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/114/LH/DPMPTSP/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 30 September 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/115/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 30 September 2017
111	2017	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah Jl. Air Mawar Dalam RT. 001, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kawasan Industri Ketapang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh CV Tiga Sekawan berupa rencana perubahan kapasitas tanur terpasang dari 3.500 ton/tahun menjadi 6.900 ton/tahun dan perubahan jenis tanur bakar menjadi tanur listrik	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	CV. Tiga Sekawan	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/119/LH/DPMPTSP/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Oktober 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/120/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 11 Oktober 2017



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
112	2017	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut dengan luas 143 ha di Laut Penyusuk, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT. Sentra Tin Indo menjadi PT. Sentra Tin Indo Sentosa	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sentra Tin Indo Sentosa	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/121/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 11 Oktober 2017
113	2017	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut dengan luas 57 ha di Laut Penyusuk, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT Sentra Tin Indo menjadi PT Sentra Tin Indo Makmur	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sentra Tin Indo Makmur	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/122/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 11 Oktober 2017
114	2017	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut dengan luas 118,61 ha di Laut Bubus, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT. Sentra Tin Indo menjadi PT. Sentra Tin Indo Cemerlang	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sentra Tin Indo Cemerlang	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/123/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 11 Oktober 2017



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
115	2017	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Nusantara Sungailiat dengan jumlah estimasi volume yang dikeruk pada alur muara sungai dan perairan laut sungailiat sebesar 34.299,040 m ³ dan jumlah estimasi volume yang dikeruk pada alur dan kolam pelabuhan perikanan nusantara sungailiat sebesar 900.000 m ³	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT Pulomas Sentosa	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/1249/DLH/2017 tentang Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), tanggal 26 Oktober 2017; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 2 November 2017
116	2017	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah Jl. Air Mawar Dalam RT. 001, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kawasan Industri Ketapang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh CV Tiga Sekawan berupa rencana perubahan kepemilikan dari CV. Tiga Sekawan menjadi PT. Rajehan Ariq	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Rajehan Ariq	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/133/LH/DPMPTSP/2017 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 7 November 2017



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
117	2017	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandara Depati Amir di Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka dan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Angkasa Pura II	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 /196/ BLHD/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 26 Maret 2012; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/163/LH/DPMPTSP/ 2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 28 Desember 2017
118	2017	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peleburan dan Pemurnian Timah (Smelter) di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	CV. Venus Inti Perkasa	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/255.T/ BLHD / 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 23 April 2012; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/165/LH/DPMPTSP/ 2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 28 Desember 2017



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
119	2017	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Khusus seluas 0,3 Ha di Desa Gantong, Kecamatan Gantong, Kabupaten Belitung Timur	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Hero Progres Internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/620/BLHD/2012 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL, tanggal 24 Juli 2012; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/164/LH/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan, tanggal 28 Desember 2017
120	2018	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Timah Lepas Pantai (Offshore) dengan luas 247 Hektar di Laut Rambat, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat berupa perubahan kepemilikan dari PT. Sarana Marindo menjadi PT. Jelajah Marindo Persada	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Jelajah Marindo Persada	Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/06/LH/DPMPTSP/2018 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 31 Januari 2018



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
121	2018	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah di laut dengan metode Bore Hole dengan luas area 108.753 Ha di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Timah (Persero) Tbk	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/23/LH/DPMPTSP/2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 21 Februari 2018; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/24/LH/DPMPTSP/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 21 Februari 2018
122	2018	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) dengan luas 778 Hektar di Laut Penganak, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Rencana perubahan kepemilikan dari PT Goshen Bangka Mulia menjadi PT. Agung Persada	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Agung Persada Sejahtera	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/26/LH/DPMPTSP/2018 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 26 Februari 2018
123	2018	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) dengan luas 3.295 Hektar di Laut Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Permata Indah Menumbing	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/27/LH/DPMPTSP/2018 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 26 Februari 2018



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			berupa Rencana perubahan kepemilikan dari PT Goshen Bangka Mulia menjadi PT. Permata Indah Menumbing			
124	2018	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai dengan luas 200 Hektar di Laut Pasir Padi, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT. Tinindo Inter Nusa menjadi PT. Tin Industri Nasional	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Tin Industri Nasional	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/35/LH/DPMPTSP/2018 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 05 Maret 2018
125	2018	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) dengan luas 2.099 Hektar di Laut Sebagian, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT Tinindo Inter Nusa menjadi PT Tin Industri Abadi	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Tin Industri Abadi	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/36/LH/DPMPTSP/2018 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 05 Maret 2018



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
126	2018	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kapasitas tanur terpasang dari 4 x 6 ton/heat menjadi 20 ton/hari (1 x 20 ton/hari) dan perubahan teknologi tanur bakar menjadi tanur listrik	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Lautan Harmonis Sejahtera	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/41/LH/DPMPTSP/2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 26 Maret 2018; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/42/LH/DPMPTSP/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 26 Maret 2018
127	2018	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Jl. TPA Kenanga RT 01 Lingkungan Air Kenanga, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari CV. Dua Sekawan menjadi PT Masbro Alam Stania dan perubahan jenis tanur dari tanur bakar menjadi tanur listrik dengan kapasitas produksi tetap 3.500 ton/tahun serta perubahan unit genset dari	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Masbro Alam Stania	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/54/LH/DPMPTSP/2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 30 April 2018; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/55/LH/DPMPTSP/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 30 April 2018



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2 unit genset kapasitas @ 150 kVA menjadi 2 unit genset kapasitas @ 1.100 kVA			
128	2018	AMDAL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Pabrik Peleburan Bijih Timah (Smelter) Di Kota Pangkalpinang berupa perubahan kepemilikan dari PT Alam Lestari Kencana menjadi PT Mitra Sukses Globalindo	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Mitra Sukses Globalindo	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/58/LH/DPMPTSP/2018 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 30 April 2018
129	2018	UKL - UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 70 kV Dukong – Manggar dan Gardu Induk Terkait di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan	- Surat Rekomendasi Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/56/DPMPTSP/2018 tentang Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 30 April 2018; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/57/LH/DPMPTSP/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 30 April 2018



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
130	2018	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Desa Pasir Putih, Kec. Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan berupa rencana perubahan kepemilikan dari CV Sabang Tin Industries menjadi PT Rajawali Rimba Perkasa dan perubahan peningkatan kapasitas tanur terpasang 28 ton/hari menjadi 43 ton/hari serta perubahan teknologi tanur bakar menjadi tanur listrik	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Rajawali Rimba Perkasa	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/60/LH/DPMPTSP/2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 07 Mei 2018; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/61/LH/DPMPTSP/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 07 Mei 2018
131	2018	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pengerukan pasir laut seluas 1.800 Ha di Perairan Selat Lepar, Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan berupa perubahan judul dokumen lingkungan hidup dari pendalaman alur pelayaran pelabuhan sadai menjadi pengerukan pasir laut serta perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Mitra Bangka Resources	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/69/LH/DPMPTSP/2018 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 31 Mei 2018



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
132	2018	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pabrik Peleburan Timah di Dusun Kelekak Datuk, Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung berupa rencana perubahan penggunaan alat-alat produksi	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Babel Surya Alam Lestari	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/73.A/LH/DPMPTSP/2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 7 Juni 2018; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/73.B/LH/DPMPTSP/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 7 Juni 2018
133	2018	UKL-UPL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam (Zirkon dan Kuarsa) di Jl. Ketapang Kawasan Industri RT/RW. 01/01, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Megah Mineral Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Rekomendasi Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/74/DPMPTSP/2018 tentang Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 08 Juni 2018; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/75/LH/DPMPTSP/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 08 Juni 2018
134	2018	DELH	Usaha dan/atau kegiatan Ruas-Ruas Jalan yang telah beroperasi (Eksisting), sepanjang 570,56 Km di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Sumatera Selatan dan	- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/693/DLH/2018 tentang



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				UPL, DELH, dan DPLH)	Bangka Belitung	Pengesahan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), tanggal 14 Mei 2018; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/65/LH/DPMPTSP/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 25 Mei 2018
135	2018	UKL-UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Air Anyir - Pangkalpinang 2 dan GI 150 kV Pangkalpinang 2, di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumbagsel	- Surat Rekomendasi Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/105/DPMPTSP/2018 tentang Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 20 September 2018; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 8120003820135, tanggal 20 September 2018
136	2018	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah (Smelter) di Kawasan Industri Jelitik, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka berupa rencana perubahan teknologi dari 5 tanur pantul menjadi 2 tanur pantul dan 3	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Refined Bangka Tin	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/120/LH/DPMPTSP/2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 21 November 2018; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			tanur listrik, perubahan peningkatan sistem pengelolaan limbah domestik dan sirkulasi air proses serta pemisahan kajian smelter dan tambang dari dokumen AMDAL sebelumnya (terpadu) menjadi tersendiri/terpisah			Bangka Belitung Nomor 188.4/121/LH/DPMPTSP/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 21 November 2018
137	2019	Amdal	Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Lepas Pantai dengan luas 258 Hektar di Laut Bubus, Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, berupa perubahan kepemilikan dari PT Sarana Marindo menjadi PT Putera Sarana Shakti	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT Putera Sarana Shakti	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/05/LH/DPMPTSP/2019 tentang Izin Lingkungan, tanggal 15 Januari 2019
138	2019	Amdal	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Penambangan Bahan Galian Timah Lepas Pantai (Offshore) dengan luas 108 Hektar di Laut Sungai Belinyu, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, berupa perubahan kepemilikan dari PT Sarana Marindo menjadi PT Lautan Sarana Mandiri	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT Lautan Sarana Mandiri	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/22.a/LH/DPMPTSP/2019 tentang Izin Lingkungan, tanggal 29 Maret 2019



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
139	2019	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) di Jalan Raya Ketapang, RT.001/001, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kawasan Industri Ketapang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan peningkatan kapasitas tanur terpasang yang semula 15.000 ton/tahun dengan menggunakan 6 unit tanur bakar menjadi 20.000 ton/tahun dengan menggunakan 6 unit tanur bakar dan dengan menambah 2 unit tanur listrik, peningkatan luas areal yang semula 5.740 m ² menjadi 58.825 m ² dan peningkatan luas bangunan yang semula 3.312 m ² menjadi 8.526 m ²	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sariwiguna Bina Sentosa	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/22.b/LH/DPMPTSP/2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 29 Maret 2019; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/22.c/LH/DPMPTSP/2019 tentang Izin Lingkungan, tanggal 29 Maret 2019



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
140	2019	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) yang berada di Jalan Ketapang Raya, Kawasan Industri Ketapang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT. Bangka Timah Utama Sejahtera menjadi PT Mitra Sukses Globalindo dan perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yaitu perubahan kapasitas tanur bakar terpasang sebesar 3.000 Ton/Tahun dan penambahan tanur listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 12.000 Ton/Tahun	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Mitra Sukses Globalindo	<ul style="list-style-type: none">- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/39/LH/DPMPTSP/2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Mei 2019;- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/40/LH/DPMPTSP/2019 tentang Izin Lingkungan, tanggal 31 Mei 2019



141	2019	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	<p>Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan pertambangan timah di Prov. Kep. Bangka Belitung berupa perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penambangan Timah di darat di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, yang kegiatannya berupa:<ol style="list-style-type: none">a) Tambang Kecil Terintegrasi (TKT) menggunakan bore hole miningb) Pengoperasian gudang bijih timah sementara yang selanjutnya disebut stasiun pengumpulc) Pengoperasian gudang biji timah2. Penambangan timah di perairan laut di Pulau Bangka, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a) Kapal produksi yang peralatan pencuciannya menjadi satu dengan peralatan penambanganb) Kapal produksi yang peralatan pencuciannya terpisah dengan peralatan penambangan3. Pengolahan bijih timah dengan sistem mekanik di tambang darat Pulau Bangka dan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT Timah, Tbk	<p>- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/43/LH/DPMPTSP/2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Mei 2019;</p> <p>- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/44/LH/DPMPTSP/2019 tentang Izin Lingkungan, tanggal 31 Mei 2019</p>
-----	------	---------------------------------	---	---	---------------	---



			<p>Belitung</p> <p>4. Pengolahan bijih timah dengan sistem basah dan kering di PPBT Pulau Bangka dan Pulau Belitung meliputi:</p> <p>a) PPBT di Muntok, di Jebus dan Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat</p> <p>b) PPBT di Pemali, di Batu Rusa dan Belinyu Kabupaten Bangka</p> <p>c) PPBT di Kabupaten Bangka Tengah</p> <p>d) PPBT di Toboali Kabupaten Bangka Selatan</p> <p>e) PPBT di Selingsing Kabupaten Belitung Timur</p> <p>5. Pembangunan dan pengoperasian Fuming dan Ausmelt di Unmet Muntok Kabupaten Bangka Barat, berupa:</p> <p>a) Pembangunan dan pengoperasian Fuming</p> <p>b) Pembangunan dan pengoperasian Ausmelt</p> <p>6. Pembangunan dan pengoperasian PPBT dan peleburan di Kabupaten Belitung Timur, yang kegiatannya meliputi:</p> <p>a) Pembangunan dan</p>			
--	--	--	--	--	--	--



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



			<p>pengoperasian PPBT (Pusat Pencucian Bijih Timah)</p> <p>b) Pembangunan dan pengoperasian peleburan bijih timah</p> <p>c) Laboratorium</p>			
--	--	--	--	--	--	--



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
142	2019	Amdal	Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Timah Lepas Pantai (Offshore) dengan luas 30 Hektar di Laut Danta, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka berupa perubahan kepemilikan dari PT Sarana Marindo menjadi PT Marindo Sukses Samudera	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Marindo Sukses Samudera	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/45/LH/DPMPTSP/2019 tentang Izin Lingkungan, tanggal 29 Maret 2019
143	2019	UKL-UPL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Kelapa-Belinyu serta Gardu Induk 150 kV Belinyu di Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat dan Kec. Bakam dan Kec. Riau Silip, Kab. Bangka	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Rekomendasi Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/48/DPMPTSP/2019 tentang Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 17 Juni 2019; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 8120003820135, tanggal 17 Juni 2019



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
144	2019	Amdal	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah (Smelter) di Kawasan Industri Jelitik, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Putera Sarana Shakti	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/59/LH/DPMPTSP/2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 26 Juli 2019; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/70/LH/DPMPTSP/2019 tentang Izin Lingkungan, tanggal 26 Juli 2019
145	2019	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Usaha dan/atau kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) di Jalan Ketapang Raya, Kawasan Industri Ketapang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang berupa perubahan kepemilikan dari PT. Bangka Putra Karya menjadi CV Venus Inti Perkasa dan perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang meliputi peningkatan kapasitas tanur terpasang (total) : 25.000 ton/tahun, penggunaan tanur tetap (tanur bakar) kapasitas terpasang : 11.000 ton/tahun dan penambahan tanur listrik	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	CV. Venus Inti Perkasa	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/69/LH/DPMPTSP/2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 2 Agustus 2019; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/70/LH/DPMPTSP/2019 tentang Izin Lingkungan, tanggal 2 Agustus 2019



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			(kapasitas terpasang) : 14.000 ton/tahun			
146	2019	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) di Jl. TPA Kenanga Permai, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka berupa rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang meliputi rencana perubahan penggantian 2 unit tanur bakar menjadi 2 unit tanur listrik, peningkatan kapasitas tanur terpasang dari 3.000 ton/tahun menjadi 12.000 ton/tahun dan durasi operasi 1 x 18 jam/hari menjadi 2 x 12 jam/hari	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Artha Cipta Langgeng	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/71/LH/DPMPTSP/2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 2 Agustus 2019; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/72/LH/DPMPTSP/2019 tentang Izin Lingkungan, tanggal 2 Agustus 2019



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
147	2019	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah (Smelter) di Kawasan Industri Jelitik, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang meliputi perubahan penggantian 2 unit tanur pantul menjadi 2 unit tanur listrik.	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Refined Bangka Tin	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/116/LH/DPMPTSP/2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 22 Oktober 2019; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/117/LH/DPMPTSP/2019 tentang Izin Lingkungan, tanggal 22 Oktober 2019
148	2019	UKL-UPL	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Tambak Udang Vannamei di Jalan Raya Koba, Desa Penyak, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. SHRIMPI	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/118/LH/DPMPTSP/2019 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 25 Oktober 2019; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 9120104450782, tanggal 25 Oktober 2019



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
149	2020	DELH	Usaha dan/atau kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Kelurahan Air Itam, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Stanindo Inti Perkasa	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/181/DLH/2020 tentang Pengesahan DELH, 20 Januari 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/007/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 27 Januari 2020
150	2020	Adendum ANDAL dan RKL-RPL Tipe B	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang meliputi perubahan penggunaan metode carbon, dioxide (CO2) racker dan metode static expansion pada penambangan timah di darat (TN-TSK/TK) di Desa Paku, Kec. Payung, Kab. Bangka Selatan dan Desa Tempilang, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat serta Sambung Giri, Kec. Merawang, Kab. Bangka	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Timah, Tbk	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/008/LH/DPMPTSP/2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 27 Januari 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/009/LH/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 27 Januari 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
151	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname, Luas Area \pm 48 Ha di Desa Penyak, Kec. Koba, Kab Bangka Tengah	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Anugerah Laut Bangka	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/010/LH/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 27 Januari 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 9120104522995, tanggal 27 Januari 2020
152	2020	AMDAL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Balunijuk (UBB) – Pelempang sepanjang \pm 34,3 Km di Kota Pangkalpinang dan Kab. Bangka	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/012/DPMPTSP/2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 31 Januari 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/013/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 31 Januari 2020
153	2020	AMDAL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Trans Belitung sepanjang 357,357 Km	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/021/DPMPTSP/2020 tentang Kelayakan Lingkungan



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			di Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur		Kepulauan Bangka Belitung	Hidup, tanggal 18 Februari 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/024/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 18 Februari 2020
154	2020	AMDAL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Pangkalpinang – Batu Beriga – Sadai sepanjang 190 Km di Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka Tengah dan Kab. Bangka Selatan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/023/DPMPTSP/2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 18 Februari 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/024/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 18 Februari 2020
155	2020	AMDAL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Trans Bangka sepanjang 447,49 Km di Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah dan Kab. Bangka Selatan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/025/DPMPTSP/2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 18 Februari 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						188.4/026/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 18 Februari 2020
156	2020		Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah di Kota Pangkalpinang berupa perubahan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan yaitu perubahan penanggung jawab		PT. Rajehan Ariq	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/045/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 11 Maret 2020
157	2020	DPLH	Usaha dan/atau kegiatan Perkantoran, Pembenihan, Produksi dan Pembesaran Udang pada lahan seluas ± 62.500 m2 di Desa Pasir Putih, Kec. Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN, DKP PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/1606/DLH/2019 tentang Pengesahan DPLH, tanggal 26 Desember 2019; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/044/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 11 Maret 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
158	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname ± 16,7 Ha dan ± 6,5 Ha dengan total ± 23,2 Ha di Desa Bakit, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Prov. Kep Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. BAKIT INDAH MANDIRI	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/051/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 08 April 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 9120218001506, tanggal 08 April 2020
159	2020	AMDAL	Rencana usaha dan/atau kegiatan PLTU-4 Bangka Belitung (PLTU Suge Belitung) dengan kapasitas 2 x 16,5 MW dan luas lahan 20 Ha di Dusun Suge, Desa Pegantungan, Kec. Badau, Kab. Belitung	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB) Unit Bisnia Jasa Operation & Maintenance Luar Jawa – 2	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/052/DPMPTSP/2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 09 April 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 8120002971007, tanggal 09 April 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
160	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan Luas Area \pm 40.000 m ² di Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Tukimin Foeng (Perseorangan)	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/054/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 17 April 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 9120401733514, tanggal 17 April 2020
161	2020	UKL-UPL Non OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular dengan panjang dermaga 80 m dan luas dermaga 800 m ² di Dusun Tj. Ular, Desa Air Putih, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/056/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 06 Mei 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/057/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 06 Mei 2020



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
162	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname ± 30,3 Ha di Dusun I Rambat, Desa Rambat, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Hoki Alam Semesta Jaya	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/058/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 06 Mei 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 9120201581864, tanggal 06 Mei 2020
163	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Eko-Wisata seluas ± 15 Ha dan Budidaya Tambak Udang Vaname seluas ± 10,98 Ha dengan luas total ± 25,98 Ha di Desa Penyak, Kecamatan Koba, Kab. Bangka Tengah	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Berkah Bumi Laut Sentosa	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/063/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 29 Mei 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 9120201762031, tanggal 29 Mei 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
164	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangun Dermaga Jetty (Tipe Dolpin) (Sarana Prasarana Terminal Tengki Penampungan BBM Solar Industri) dengan panjang trestle dermaga ± 215 m, panjang dermaga ± 174 m, kedalaman tambatan – 6,5 LWS dan bobot maksimal kapal sandar 15.000 DWT di Jl. Yos Sudarso, Kawasan Pelabuhan Tanjung Gudang, Desa Air Jangkung, Kec. Belinyu, Kab. Bangka	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Rahardja Wirasakti Jaya Mandiri	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/065/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 02 Juni 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 9120017021573, tanggal 02 Juni 2020
165	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname ± 12,2934 Ha di Dusun Merbau, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Prov Kepulauan Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Minabahari Merbau Mandiri	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/066/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 05 Juni 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 9120109821159, tanggal 05 Juni 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
166	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname ± 6,99 Ha di Desa Batu Beriga, Kec. Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	CV. Gunung Prima	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/071/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 30 Juni 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 8120216131665, tanggal 30 Juni 2020
167	2020	DPLH	Usaha dan/atau kegiatan Terminal Khusus (Tersus) dengan fasilitas dermaga dengan bentuk konstruksi massif dengan panjang dermaga 190 m dan luas 1.900 m ² di Tanjung Batu Burok, Desa Mengkubang, Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Alfindo Asia Minerals	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/752/DLH/2020 tentang Pengesahan DPLH, tanggal 18 Juni 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/070/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 23 Juni 2020



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
168	2020		Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Jalan Ketapang RT/RW 19/02, Kel. Bacang, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang berupa perubahan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan yaitu perubahan kepemilikan dari PT. DS. Jaya Abadi menjadi PT. Stanindo Inti Perkasa		PT. Stanindo Inti Perkasa	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/074/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 14 Juli 2020
169	2020	DELH	Usaha dan/atau kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Ikutan Timah (Peningkatan Kadar Zirkon dan Ilmenit) dengan luas lahan 18.293 m2 di Kawasan Industri Ketapang, Kel. Air Mawar, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Indomas Bara Prima	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/212/DLH/2020 tentang Pengesahan DELH, tanggal 24 Januari 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/081/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 04 Agustus 2020



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
170	2020	DELH	Usaha dan/atau kegiatan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kalian dengan fasilitas dermaga bentuk konstruksi sheet pile dengan luas dermaga ± 17.806 m2 dan luas pelabuhan 25.855 m2 di Jalan Raya Tanjung Kalian, Kec. Muntok, Kab. Babar	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	<ul style="list-style-type: none">- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/482/DLH/2020 tentang Pengesahan DELH, tanggal 11 Maret 2020;- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/080/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 04 Agustus 2020



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
171	2020	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) di Dusun Padang, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang meliputi rencana perubahan penambahan 2 unit tanur listrik, penambahan kapasitas produksi 10.000 ton/tahun, penggantian genset kapasitas 2 x 275 KVA dengan genset yang berkapasitas 2 x 1.250 KVA dan penambahan sumber daya energi listrik,	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Menara Cipta Mua	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/091/LH/DPMPTSP/2020 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/1025/BLHD/2015 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Mill-Plant dan Smelter) di Kabupaten Belitung Timur oleh Perseroan Terbatas (PT.) Menara Cipta Mulia, tanggal 23 September 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/093/DPMPTSP/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/68.a/LH/BP2TPM/2015 tentang Pemberian Izin Lingkungan Rencana Usaha Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Mill-Plant dan Smelter) di Kabupaten Belitung



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Timur oleh Perseroan Terbatas (PT.) Menara Cipta Mulia, tanggal 23 September 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
172	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang seluas ± 36,52 hektar (dengan rincian luas lahan darat 36 hektar dan luas area laut 0,52 hektar) di Jalan Raya Air Anyir (Lintas Timur), Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Babel Citra Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/092/LH/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 23 September 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 912031309288, tanggal 23 September 2020
173	2020		Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah di Desa Kayu Besi, Kec. Namang, Kab. Bangka Tengah berupa perubahan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan yaitu perubahan kepemilikan dari CV. Bangka Timah Makmut menjadi PT. Fataba Pasifik Kopan		PT. Fataba Pasifik Kopan	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/099/DPMPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan, tanggal 07 Oktober 2020



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
174	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang seluas ± 31,86 Hektar (dengan rincian luas lahan darat ± 31,61 Hektar dan luas area laut 0,26 Hektar) di Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	CV. Bangka Sukses Bersama	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/104/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 16 Oktober 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 9120411112504, tanggal 16 Oktober 2020
175	2020	Laporan Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah berupa Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yaitu perubahan jumlah ponton isap produksi (PIP) yang beroperasi di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi Perseroan Terbatas (PT) Timah Tbk yang sudah ada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) berlaku sebagaimana tercantum dalam dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL dengan Surat Keputusan Kelayakan Nomor :		PT. Timah Tbk	Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/108/DPMPTSP/2020 Tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/381/BLHD/2009 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Perseroan Terbatas (PT.) Timah,Tbk, tanggal 26 Oktober 2020



DOKUMEN

INFORMASI
KINERJA
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			188.44/401/BLHD/2015, tanggal 29 Mei 2015 dan Surat Keputusan Izin Lingkungan Nomor : 503/38/LH/BP2TPM/2015, tanggal 19 Juni 2015			
176	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname seluas ± 3,41 Hektar (dengan rincian luas lahan darat 2,99 Hektar dan luas area laut 0,42 Hektar) di Dusun Sika, Desa Tanjung Niur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Agro Bahari Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/104/DPMPSTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 16 Oktober 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 9120411112504, tanggal 16 Oktober 2020



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
177	2020	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Peleburan Bijih Timah (Sn) di Jl. TPA Kenanga, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka berupa perubahan usaha dan/atau kegiatan berpengaruh terhadap lingkungan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Artha Cipta Langgeng	<ul style="list-style-type: none">- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/119/DPMPTSP/2020 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/471/LH/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Peleburan Bijih Timah (Sn) PT. Artha Cipta Langgeng, tanggal 03 Desember 2020;- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/120/DPMPTSP/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Izin Lingkungan Kegiatan Peleburan Bijih Timah (Sn) PT. Artha Cipta Langgeng, tanggal 03 Desember 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
178	2020	UKL-UPL Non OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi Sungai Buleng seluas ± 688,01 Ha di Desa Pangkalniur dan Desa Banyuasin, Kec. Riau Silip, Kab. Bangka dan Desa Kelapa, Beruas dan Tuik, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/117/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 03 Desember 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/118/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 03 Desember 2020
179	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname seluas ± 30,20 Hektar (dengan rincian luas lahan darat ± 30 Hektar dan luas area laut 0,20 Hektar) di Dusun Pesaren, Desa Bintet, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	CV. Gelora Sukses Abadi	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/131/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 15 Desember 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 9120000772479, tanggal 15 Desember 2020



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
180	2020	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan teknologi intensif seluas ±35,8 Hektar (dengan rincian luas lahan darat ± 35,6 Hektar dan luas area laut 0,20 Hektar) di Desa Sukamandi, Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Belitung Mina Bahari	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/132/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 23 Desember 2020; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 0281000912494, tanggal 23 Desember 2020
181	2020	UKL-UPL Non OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Dermaga Jetty dengan panjang dermaga 180 m dan lebar dermaga 3 m di Desa Air Menduyung, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/140/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 28 Desember 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/141/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 28 Desember 2020



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
182	2020	UKL-UPL Non OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Dermaga Jetty dengan panjang dermaga 150 m dan lebar dermaga 3 m di Dusun Sukal, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/133/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 28 Desember 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/134/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 28 Desember 2020
183	2020	UKL-UPL Non OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Dermaga Jetty dengan panjang dermaga ± 150 m dan lebar dermaga ± 3 m di Desa Tanjung Binga, Kec. Sijuk, Kab. Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/135/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 28 Desember 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/136/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 28 Desember 2020
184	2020	UKL-UPL Non OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Dermaga Jetty dengan panjang	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			dermaga ± 93 m dan lebar dermaga 3 m di Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah	Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Kepulauan Bangka Belitung	188.4/137/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 28 Desember 2020; - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/139/DPMPTSP/2020 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 28 Desember 2020
185	2021	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut dengan luas 40 Hektar di Perairan Laut Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Rencana perubahan penciutan/pengurangan luas areal usaha dan/atau kegiatan	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sinar Logindo Alam	Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 188.4/01/DPMPTSP/2021 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 20 Januari 2021
186	2021	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut dengan luas 40 Hektar di Perairan Laut Air Kantung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Rencana perubahan kepemilikan dari PT Sinar	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sejahtera Logindo Alam	Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 188.4/02/DPMPTSP/2021 Tentang Izin Lingkungan, tanggal 20 Januari 2021



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Logindo Alam menjadi PT. Sejahtera Logindo Alam			
187	2021	Laporan Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yaitu Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah berupa perubahan jumlah ponton isap produksi (PIP) yang beroperasi di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi Perseroan Terbatas (PT.) Timah Tbk yang sudah ada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) berlaku sebagaimana tercantum dalam dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL dengan Surat Keputusan Kelayakan Nomor : 188.44/401/BLHD/2015, tanggal 29 Mei 2015 dan Surat Keputusan Izin Lingkungan Nomor : 503/38/LH/BP2TPM/2015, tanggal 19 Juni 2015 serta Surat Keputusan Izin Lingkungan Nomor :		PT. Timah, Tbk	Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/03/DPMPTSP/2021 Tentang Perubahan Ketujuh atas Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Perseroan Terbatas (PT) Timah,Tbk, tanggal 29 Januari 2021



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			503/108/DPMPTSP/2020, tanggal 26 Oktober 2020			
188	2021	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan teknologi intensif seluas ± 24,28 Hektar (dengan rincian luas lahan darat ± 23,96 Hektar dan luas area laut 0,32 Hektar) di Dusun Sika, Desa Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Budi Agri Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/04/DPMPTSP/2021 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 19 Februari 2021; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 8120004900585, tanggal 19 Februari 2021
189	2021	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan terminal khusus dan stockpile dengan panjang dermaga ± 50 Hektar dan lebar ± 10 Hektar, stockpile dengan luas ± 18.000 m ² (1,8 Ha), jalan darat dengan panjang ± 710 m dan lebar ± 10 m di Desa Mapur dan Desa Deniang, Kec. Riau Silip, Kab. Bangka	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Mitra Persada Resources	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/05/DPMPTSP/2001 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, tanggal 19 Februari 2021; - Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, dengan : Nomor Induk Berusaha 0264010281855, tanggal 19 Februari 2021



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
190	2021	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan teknologi intensif seluas \pm 4,04 Hektar (dengan rincian luas lahan darat \pm 4 Ha dan luas area laut 0,04 Hektar) di Dusun Sika, Desa Tanjung Niur, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Bahari Bio Makmur	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/06/DPMPTSP/2021 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 05 Maret 2021
191	2021	UKL-UPL dengan OSS	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan teknologi intensif seluas 63,22 Hektar (dengan rincian luas lahan darat 62,32 Ha dan luas area laut 0,45 Hektar) di Desa Penyak, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	CV. Gunung Prima	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/07/DPMPTSP/2021 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 16 Maret 2021
192	2021	AMDAL	Rencana usaha dan/atau kegiatan peningkatan jalan ruas Lumut-Puding Gebak sepanjang \pm 7,6 Km di Desa Berbura, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumsel	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/09/DPMPTSP/2021 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 07 Juni 2021



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
193	2021	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan pemgolahan dan pemurnian bijih timah (Smelter) di Jl. Ketapang Dalam, Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang berupa rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan pada penggunaan alat produksi, kapasitas tanur terpasang dan produksi, penggunaan sumber daya pada genset, penggunaan bahan bakar	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Mutiara Prima Sejahtera	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/08/DPMPTSP/2021 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup, tanggal 07 Juni 2021
194	2021	DPLH	Rencana usaha dan/atau kegiatan kawasan pelabuhan perikanan pantai (PPP) muara Sungai Baturusa dengan luas dermaga ± 5,22 Ha (termasuk perairan ± 1 Ha) dan dengan fasilitas dermaga bentuk konstruksi sheet pile dengan panjang dermaga 50 m, lebar dermaga 10 m dan panjang trestle 5 m di Jl. PPI, kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/10/DPMPTSP/2021 tentang Persetujuan DPLH, tanggal 07 Juli 2021
195	2021	SPPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan budidaya tambak udang vaname dengan luas 9,5 Ha di Jl. Mayor Syafri Rahman, Kel.		CV. Dunia Vaname	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Tanjung Ketapang, Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan			660/706/DLHK/2021, tanggal 7 Juli 2021
196	2021	DPLH	Rencana usaha dan/atau kegiatan Operasional Dermaga Tambat Labuh Perahu seluas 200 m2 dengan panjang dermaga 100 meter dan lebar dermaga 2 meter di Dusun Tanjung Berikat, Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/12/DPMPTSP/2021 tentang Persetujuan DPLH, tanggal 14 Juli 2021
197	2021	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Pelabuhan Pulau Kuil seluas 2,3 Hektar dengan panjang dermaga 112,5 meter dan lebar dermaga 3 meter di Pulau Kuil, Dusun Kuil, Desa Gersik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/13/DPMPTSP/2021 tentang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 20 Agustus 2021



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
198	2021	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muara Sungai Baturusa dengan luas lahan 5,22 Hektar, luas bangunan 0,9 Hektar dan tinggi bangunan 9 meter di Jalan PPI, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/14/DPMPTSP/2021 tentang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 20 Agustus 2021
199	2021	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan budidaya tambak udang vaname dengan teknologi intensif seluas 31,92 Hektar dengan rincian luas lahan darat ± 31,60 Hektar dan luas area laut ± 0,32 Hektar di Desa Tanjung Niur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Fenco Pasifik Indonesia	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/15/DPMPTSP/2021 tentang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 06 Oktober 2021
200	2021	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan budidaya tambak udang vaname dengan teknologi intensif seluas 45,41 Hektar dengan rincian luas lahan darat ± 45,15 Hektar dan luas area laut ± 0,26 Hektar di Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	CV. Samudera Terus Jaya	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/16/DPMPTSP/2021 tentang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 06 Oktober 2021



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
201	2021	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Meditasi Center (Wisata Rohani) seluas 4,89 Hektar di Kawasan Hutan Lindung Bukit Rebo, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	Yayasan Bangka Alam Lestari	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/17/DPMPTSP/2021 tentang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 19 Oktober 2021
202	2021	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan budidaya tambak udang vaname dengan teknologi intensif seluas 49,29 Hektar di darat dan 3,28 Hektar di perairan ruang laut di Jalan Raya Tanjung Kelumpang, Desa Tanjung Kelumpang, Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Indomakmur Alam Raya	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/18/DPMPTSP/2021 tentang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 01 November 2021
203	2021	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan teknologi intensif dengan luas lahan darat ± 66.55 Ha dan luas area pemanfaatan laut ± 0,35 Ha di Desa Bakit, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Bakit Indah Mandiri	Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/19/DPMPTSP/2021 tentang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 04 November 2021



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
204	2021	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan teknologi intensif dengan luas lahan darat 55,76 Ha dan luas area pemanfaatan laut \pm 0,02 Ha di Jl. Pantai Kerasak, Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	CV. Sumber Vaname Lestari	Surat Keputusan Kepala DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/20/DPMPSTSP/2021 tentang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 15 November 2021
205	2022	DELH	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan luas area total 18,407 Ha di Dusun Bintet, Desa Bintet, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Prov. Kep. Babel	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	CV. Mavindo Karya Lestari	Keputusan Kepala DPMPSTSP Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/04/DPMPSTSP/2022 Tentang : Persetujuan DELH Tanggal : 18 April 2022
206	2022	AMDAL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Kurau di Desa Kurau dan Desa Kurau Barat, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	Komisi Penilai Amdal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung	Kepala DPMPSTSP Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/06/DPMPSTSP/2022 Tentang : Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Tanggal : 01 Agustus 2022



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
207	2022	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname seluas ± 16 Hektar di Desa Pasir Piutih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kep. Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. BANGKA BELITUNG MARITIM SEJAHTERA	Keputusan Kepala DPMPTSP Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/01/DPMPTSP/2022 Tentang : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanggal : 03 Januari 2022
208	2022	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname seluas ± 50 Hektar di Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	CV. RAJAWALI TUKAK SADAI	Keputusan Kepala DPMPTSP Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/02/DPMPTSP/2022 Tentang : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanggal : 31 Januari 2022
209	2022	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan luas lahan 29 Ha di Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Prov. Kep. Babel	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Babasel Mitra Abadi	Keputusan Kepala DPMPTSP Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/03/DPMPTSP/2022 Tentang : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanggal : 16 Maret 2022
210	2022	UKL-UPL	Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dengan luas bangunan ± 10.000 m2, luas bangunan ± 300 m2, dan tinggi bangunan ± 10 m2 di Jalan Pasir RT 005, RW 002, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Provinsi Kep Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Sarana Telaga Mandiri	Kepala DPMPTSP Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/05/DPMPTSP/2022 Tentang : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanggal : 17 Mei 2022



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
211	2022	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan teknologi semi intensif seluas lahan 45,77 Ha (dengan rincian luas lahan darat ± 45,54 Ha dan luas area laut 0,23 Ha) Di Jln Raya Teluk Gembira RT. 004, RW. 002 di Desa Membalong, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Bivanky Jaya Sejahtera	Kepala DPMPSTSP Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/07/DPMPSTSP/2022 Tentang : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanggal : 14 Oktober 2022
212	2022	UKL-UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Pabrik Pemisah Udara (Air Separation Plant) dengan luas lahan ± 2.500 m2 dan kapasitas produksi terpasang sebesar 14.400.000 Nm3/Tahun Di Komplek Peleburan Timah, Jl Raya Peltim No. 1, RT. 001, RW.001 Kel. Sungai Baru, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL, DELH, dan DPLH)	PT. Samator Gas Industri	Kepala DPMPSTSP Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/08/DPMPSTSP/2022 Tentang : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanggal : 14 Oktober 2022



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
213	2022	SPPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname seluas 3,30 Hektar di Desa Tanjung Nyiur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kep. Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup	PT AGRO BAHARI INTERNASIONAL	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 660/86/DLHK Tentang : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal : 17 Januari 2022 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 660/86/DLHK Tentang : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal : 17 Januari 2022
214	2022	SPPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname seluas 2,98 Hektar di Kelurahan Benteng Kota, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kep. Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup	FA TERUS JAYA	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 660/87/DLHK Tentang : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal : 17 Januari 2022
215	2022	SPPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname seluas 7,76 Hektar di Kelurahan Benteng Kota, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kep. Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup	PT BANGKA AQUA CULTURE	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 660/88/DLHK Tentang : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal : 17 Januari 2022
216	2022	SPPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan teknologi intensif dengan luas lahan efektif 7,88 Ha dan luas area pemanfaatan laut 0,11 Ha di Dusun Bukit Beting, Desa Bintet, Kec. Belinyu, Kab. Bangka,, Prov. Kep. Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup	CV. Beting Tambak Belijong	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 660/1517DLHK/2022 Tentang : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal : 27 Januari 2022
217	2022	SPPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Budidaya Tambak Udang Vaname dengan luas lahan 9,2 Ha di Jalan Raya Teluk Limau, Desa Teluk Limau, Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat, Prov. Kep. Bangka Belitung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup	PT. Emas Sempurna Anugerah	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 660/357/DLHK/2022 Tentang : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal : 14 Februari 2022
218	2022	SPPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Penggalian Pasir di Jalan Simpang Jurung Kep. Babel. Merawang Jurung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup	CV. Bangka Utama Karya	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung Tentang : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal : 24 Januari 2022



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
219	2022	SPPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Penggalian Pasir di Jalan Simpang Jurung Kep. Babel. Merawang Jurung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup	CV. Bangka Utama Karya	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung Tentang : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal : 24 Januari 2022
220	2022	SPPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Penggalian Pasir di Jalan Simpang Jurung Kep. Babel. Merawang Jurung	Tim Penilai dan Pemeriksa Dokumen Lingkungan Hidup	CV. Bangka Utama Karya	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung Tentang : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal : 24 Januari 2022

Keterangan:

Sumber: DLHK Babel, 2022



Tabel-42. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2023

No	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/U saha	Jenis Izin	Nomor SK	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2018	PT. Tata Hampanan Eka Persada	Desa Puding, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka	Agroindustri	Penyimpanan Sementara	188.4/04/PY-LB3/DINPMP2KUKM/V/2018	DPLH
2	2017	PT. Forestalestari Dwikarya (Tanjung Kembiri Mill)	Desa Tanjung Kembiri, Kabupaten Belitung	Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.46/002/KEP/LB3/DMPPTSPP/2017	UKL-UPL
4	2018	PT. Timah, Tbk UPDB-Bidang Pengawasan Tambang dan Pengangkutan Bangka Barat	Kabupaten Bangka Barat	Pertambangan	Penyimpanan Sementara	188.45/269/2.12.1.1/2018	AMDAL
7	2018	PT. Astika Murni Utama	Jln. Yos sudarso no. 302 rt. 007 rw,002 Tanjung Pandan, Belitung	Jasa	Penyimpanan Sementara	188.46/004/KEP/LB3/DPMPTSPP/2018	UKL-UPL
10	2018	PT. Menara Cipta Mulia	Dusun Padang Desa Mentawak Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	Peleburan dan Pemurnian Timah	Penyimpanan Sementara	503/05/IPSLB3/DPMPTSP/VIII/2018	Adendum ANDAL dan RKL-RPL



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/U saha	Jenis Izin	Nomor SK	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	2018	PT. Refined Bangka Tin	Kawasan Industri Jelitik 33215 Sungailiat Kepulauan Bangka Belitung	Pengolahan Bijih Timah (smelter)	Penyimpanan Sementara	188.4/02/PY-LB3/DINPMP2KUKM/IV/2018	Adendum ANDAL dan RKL-RPL
14	2018	PT. Timah Tbk - Unit Metalurgi	Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat	Pertambangan (Pengolahan dan Pemurnian)	Penyimpanan Sementara	188.45/255/2.12.1.1/2018	UKL-UPL
15	2018	PT. Belitung Energy	Desa Mempaya, Kecamatan Damar, Belitung Timur	Ketenagalistrikan	Penyimpanan Sementara	503/04/IPSLB3/DPMPTSP/II/2018	UKL-UPL
18	2017	PT. Timah Tbk - UPDB Pengawasan Produksi dan Pengangkutan Bangka	Kabupaten Bangka	Pertambangan	Penyimpanan Sementara	188.4/36/PY-LB3/DINLH/VII/2017	
21	2018	PT. Steelindo Wahana Perkasa	Desa Senyubuk, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	Perkebunan, Pengolahan Kelapa Sawit, Pengolahan CPO, dan Pengolahan Inti Sawit	Penyimpanan Sementara	503/02/IPSLB3/DPMPTSP/II/2018	AMDAL
22	2017	PT. Sawindo Kencana	Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	Agroindustri Pabrik Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.45/20.A/2.5.1.1/2017	Adendum ANDAL dan RKL-RPL



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/U saha	Jenis Izin	Nomor SK	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
26	2018	PT. Belitung Industri Sejahtera	Air Merbau (Jalan Sijuk KM 4) Tanjung Pandan Kabupaten Belitung	Pengolahan Bijih Timah (smelter)	Penyimpanan Sementara	188.46/001/Kep/LB3/DPMPTSP/2018	UKL-UPL
30	2017	PT. Bumi Permai Lestari - PKS Bukit Perak	Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	Perkebuna n dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.45/287/2.12.1.1/2017	AMDAL
33	2017	PT. Gemilang Cahaya Mentari	Desa Tiangtara, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka	Perkebuna n dan Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.4/32/PY-LB3/DINLH/VI/2017	AMDAL
35	2017	PT. Bumi Sawit Sukses Pratama - Palm Oil Mill	Desa Malik, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.45/219/DPKPLH/2017	UKL-UPL
36	2018	PT. Valten Cahaya Anugrah	Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka	Pengelolaan Limbah B3 Kegiatan Pengumpul an Limbah B3	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3	188.4/22/DINLH/2018	UKL-UPL
37.	2021	PT. Sarana Telaga Mandiri Utama	Jalan Pasir, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Kegiatan Pengumpul an LB3	Izin pengumpulan LB3		UKL-UPL

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2024



No	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/U saha	Jenis Izin	Nomor SK	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan:

Sumber: DLHK Babel, 2022

Tabel-43 Pengawasan Izin Lingkungan(AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung

Tahun : 2023

No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Bangka	2023	PT Timah (Persero), Tbk. - Keteknikan dan Sarana (Balaikarya)	2023	Taat
2	Kab. Bangka	2023	PT Fajar Berseri	2023	Tidak Taat
3	Kab. Bangka	2023	PT Karini Utama	2023	Taat
4	Kab. Bangka	2023	PT Bangka Biogas Synergy	2023	Taat
5	Kab. Bangka	2023	PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Merawang	2023	Taat
6	Kab. Bangka	2023	PT PLN Batam - PLTG MPP Air Anyir Bangka	2023	Taat
7	Kab. Bangka	2023	PT PLN (Persero) - Wilayah Bangka Bangka Belitung Sektor Pembangkitan PLTU 3 Babel	2023	Taat
8	Kab. Bangka	2023	PT Fenyen Agro Lestari	2023	Tidak Taat
9	Kab. Bangka	2023	PT Gemilang Cahaya Mentari	2023	Taat
10	Kab. Bangka	2023	PT Gunung Maras Lestari	2023	Taat
11	Kab. Bangka	2023	PT Gunung Pelawan Lestari	2023	Taat
12	Kab. Bangka	2023	PT Putra Bangka Mandiri	2023	Taat
13	Kab. Bangka	2023	PT Tata Hampan Eka Persada	2023	Taat
14	Kab. Bangka	2023	PT Mitra Stania Prima	2023	Taat
15	Kab. Bangka	2023	PT Timah (Persero), Tbk. - Unit Tambang Darat Sungailiat	2023	Taat



No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Kab. Bangka	2023	PT Timah Tbk - Unit Penambangan Timah Primer Pemali	2023	Taat
17	Kab. Bangka	2023	PT Artha Cipta Langgeng	2023	Taat
18	Kab. Bangka	2023	PT ATD Makmur Mandiri	2023	Taat
19	Kab. Bangka	2023	PT Mitra Stania Prima	2023	Taat
20	Kab. Bangka	2023	PT Refined Bangka Tin	2023	Taat
21	Kab. Bangka	2023	PT. Putera Sarana Shakti	2023	Taat
22	Kab. Bangka	2023	PT. Bangka Asindo Agri	2023	Tidak Taat
23	Kab. Bangka	2023	PT. Tata Hampanan Eka Persada	2023	Tidak Taat
24	Kab. Bangka	2023	PT. Rahardja Wirasakti Jaya Mandiri	2023	Tidak Taat
25	Kab. Bangka	2023	PT Sinar Baturusa Prima	2023	Tidak Taat
26	Kab. Bangka Tengah	2023	PT Grand Cirindo (Novotel Bangka Hotel & Convention Centre)	2023	Tidak Taat
27	Kab. Bangka Tengah	2023	PT. Shrimpi Daya Lestari	2023	Tidak Taat
28	Kab. Bangka Tengah	2023	PT Pertamina Patra Niaga - Regional Sumbagsel DPPU Depati Amir	2023	Taat
29	Kab. Bangka Tengah	2023	PT PLN (Persero)-Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Koba	2023	Taat
30	Kab. Bangka Tengah	2023	PT Bangka Agro Mandiri	2023	Taat
31	Kab. Bangka Tengah	2023	CV Mutiara Alam Lestari	2023	Taat
32	Kab. Bangka Tengah	2023	PT Mutiara Hijau Lestari	2023	Taat
33	Kab. Bangka Tengah	2023	PT Putra Bangka Tani	2023	Taat
34	Kab. Bangka Tengah	2023	PT. Swarna Nusa Sentosa	2023	Tidak Taat



No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35	Kab. Bangka Tengah	2023	PT. Bangka Prima Tin	2023	Tidak Taat
36	Kab. Bangka Tengah	2023	Hotel Aston Soll Marina	2023	Tidak Taat
37	Kab. Bangka Tengah	2023	PT. Agrindo Persada Lestari	2023	Tidak Taat
38	Kab. Bangka Barat	2023	PT. Bangun Rimba Sejahtera	2023	Taat
39	Kab. Bangka Barat	2023	PT. Timah Nusantara	2023	Taat
40	Kab. Bangka Barat	2023	PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Muntok	2023	Taat
41	Kab. Bangka Barat	2023	PT Bumi Permai Lestari	2023	Tidak Taat
42	Kab. Bangka Barat	2023	PT Gunung Sawit Bina Lestari	2023	Taat
43	Kab. Bangka Barat	2023	PT MP Ledong West Indonesia	2023	Taat
44	Kab. Bangka Barat	2023	PT Mutiara Agro Sejahtera	2023	Tidak Taat
45	Kab. Bangka Barat	2023	PT Payung Mitra Jaya Mandiri	2023	Tidak Taat
46	Kab. Bangka Barat	2023	PT Sawindo Kencana	2023	Taat
47	Kab. Bangka Barat	2023	PT Timah (Persero), Tbk. - UPDB BPP Bangka Barat	2023	Taat
48	Kab. Bangka Barat	2023	PT Timah (Persero), Tbk. - Unit Metalurgi Muntok	2023	Taat
49	Kab. Bangka Selatan	2023	PT Artha Prima Nusa Jaya	2023	Taat
50	Kab. Bangka Selatan	2023	PT Artha Prima Nusa Jaya Sembilan	2023	Taat
51	Kab. Bangka Selatan	2023	PT Prisma Multi Karya	2023	Taat
52	Kab. Bangka Selatan	2023	PT Prisma Multi Karya III	2023	Taat
53	Kab. Bangka Selatan	2023	PT PLN (Persero)-Sektor Pembangkitan Babel-PLTD Toboali	2023	Taat



No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
54	Kab. Bangka Selatan	2023	PT Sari Bumi Mulia	2023	Tidak Taat
55	Kab. Bangka Selatan	2023	PT Bumi Sawit Sukses Pratama	2023	Taat
56	Kab. Bangka Selatan	2023	PT Timah (Persero), Tbk - Wilasi II Bangka Selatan	2023	Taat
57	Kab. Bangka Selatan	2023	PT Timah, Tbk – UPTP Wilayah Bangka TB Paku	2023	Taat
58	Kab. Bangka Selatan	2023	CV. Venus Inti Permata	2023	Taat
59	Kab. Bangka Selatan	2023	PT. Samudera Berhasil Bersama	2023	Tidak Taat
60	Kab. Bangka Selatan	2023	PT. Rajawali Rimba Perkasa	2023	Taat
61	Kab. Belitung	2023	PT Belitung Permai Abadi/BW Suite Belitung	2023	Tidak Taat
62	Kab. Belitung	2023	PT Hatika Wisata Makmur (Hotel Grand Hatika)	2023	Tidak Taat
63	Kab. Belitung	2023	PT Pertamina Patra Niaga - Regional Sumbagsel Fuel Terminal Tanjung Pandan Belitung	2023	Tidak Taat
64	Kab. Belitung	2023	PT PLN (Persero)-Sektor Pembangkitan Babel-PLTD Pilang	2023	Taat
65	Kab. Belitung	2023	PT PLN (Persero) - PLTU Suge	2023	Taat
66	Kab. Belitung	2023	PT Pratama Unggul Sejahtera	2023	Taat
67	Kab. Belitung	2023	PT Rebinmas Jaya	2023	Taat
68	Kab. Belitung	2023	PT Bumi Hero Perkasa	2023	Taat
69	Kab. Belitung	2023	PT Babel Surya Alam Lestari	2023	Taat
70	Kab. Belitung	2023	PLTG Suge Belitung	2023	Taat
71	Kab. Belitung	2023	PT Pelindo (Persero) Regional 2 Tanjungpandan	2023	Taat
72	Kab. Belitung	2023	PT.Talu Belitung Resort _Hotel Santika	2023	Tidak Taat
73	Kab. Belitung	2023	PT. Sukses Inti Makmur	2023	Taat



No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
74	Kab. Belitung Timur	2023	PT Tommy Utama	2023	Taat
75	Kab. Belitung Timur	2023	PT PLN (Persero) - Wilayah Bangka Belitung Sub Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Padang	2023	Taat
76	Kab. Belitung Timur	2023	PT Foresta Lestari Dwikarya	2023	Taat
77	Kab. Belitung Timur	2023	PT Parit Sembada	2023	Taat
78	Kab. Belitung Timur	2023	PT Sahabat Mewah dan Makmur	2023	Taat
79	Kab. Belitung Timur	2023	PT Steelindo Wahana Perkasa	2023	Taat
80	Kab. Belitung Timur	2023	PT Timah (Persero), Tbk. - Wilasi Belitung	2023	Taat
81	Kab. Belitung Timur	2023	PT Timah, Tbk. -UPTP Batu Besi	2023	Taat
82	Kab. Belitung Timur	2023	PT Menara Cipta Mulia	2023	Taat
83	Kab. Belitung Timur	2023	PT Menara Cipta Mulia	2023	Taat
84	Kab. Belitung Timur	2023	PT Tommy Utama	2023	Taat
85	Kab. Belitung Timur	2023	PT. Babel Inti Perkasa	2023	Tidak Taat
86	Kab. Belitung Timur	2023	PT. Fortuna Tunas Mulya	2023	Taat
87	Kab. Belitung Timur	2023	PT. Indomakmur Alam Raya	2023	Tidak Taat



No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
88	Kota Pangkal Pinang	2023	PT Dok dan Perkapalan Air Kantung Unit Galangan Selindung	2023	Tidak Taat
89	Kota Pangkal Pinang	2023	PT Pahala Harapan Lestari	2023	Taat
90	Kota Pangkal Pinang	2023	PT Pertamina Patra Niaga - Regional Sumbagsel Fuel Terminal Pangkal Balam	2023	Taat
91	Kota Pangkal Pinang	2023	CV Venus Inti Perkasa	2023	Taat
92	Kota Pangkal Pinang	2023	PT Prima Timah Utama	2023	Taat
93	Kota Pangkal Pinang	2023	PT Sariwiguna Bina Sentosa	2023	Taat
94	Kota Pangkal Pinang	2023	PT Stanindo Inti Perkasa	2023	Taat
95	Kota Pangkal Pinang	2023	PT. Bukit Timah	2023	Taat
96	Kota Pangkal Pinang	2023	PT. Tinindo Internusa	2023	Taat
97	Kota Pangkal Pinang	2023	PT. Mitra Sukses Globalindo	2023	Taat
98	Kota Pangkal Pinang	2023	PT. Rajehan Ariq	2023	Taat
99	Kota Pangkal Pinang	2023	PT. Bangka Serumpun	2023	Taat
100	Kota Pangkal Pinang	2023	PT Pelindo II (Persero) - Cabang Pangkalbalam	2023	Taat

Keterangan :



Sumber: DLHK Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2024

No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pangkalpinang	2021	PT. STANINDO INTI PERKASA	14/04/2021	Taat
2	Pangkalpinang	2021	PT.BUKIT TIMAH	22/04/2021	Taat
3	Pangkalpinang	2021	PT. MITRA SUKSES GLOBALINDO	23/04/2021	Taat
4	Pangkalpinang	2021	CV. VENUS INTI PERKASA	26/04/2021	Taat
5	Pangkalpinang	2021	PT.INDOMAS BARA	26/04/2021	Tidak Operasional
6	Pangkalpinang	2021	PT.MEGAH MINERAL SEJAHTERA	26/04/2021	Tidak Operasional
7	Pangkalpinang	2021	PT. SARIWIGUNA BINA SENTOSA	22/04/2021	Taat
8	Pangkalpinang	2021	PT.PRIMA TIMAH UTAMA	23/04/2021	Taat
9	Pangkalpinang	2021	PT.COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA	04/05/2021	Taat
10	Pangkalpinang	2021	PT.DEWA PUTRA BANGKA	27/04/2021	Tidak Operasional
11	Pangkalpinang	2021	PT. PELINDO II CABANG PELABUHAN PANGKAL BALAM	27/04/2021	Taat
12	Pangkalpinang	2021	PT.SARIWIGUNA BINA SENTOSA	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat
13	Pangkalpinang	2021	PT. DOK DAN PERKAPALAN AIR KANTUNG UNIT GALANGAN SELINDUNG	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat
14	Pangkalpinang	2021	PT.SUNDALAND INTERNUSA	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat
15	Kabupaten Bangka	2021	PT.BANGKA TIN INDUSTRY	28/10/2021	Taat
16	Kabupaten Bangka	2021	PT. PUTRA BANGKA MANDIRI	02/11/2021	Taat
17	Kabupaten Bangka	2021	PT. INHUTANI V SPHK-BABEL	02/11/2021	Taat
18	Kabupaten Bangka	2021	PT.ISTANA KAWI KENCANA	04/11/2021	Taat
19	Kabupaten Bangka	2021	PT.SEMESTA SURYA PERSADA	08/11/2021	Taat



No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Kabupaten Bangka	2021	PT.MITRA SUKSES GLOBALINDO	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Tidak Operasional
21	Kabupaten Bangka	2021	PT.PLN (PERSERO) PLTU AIR ANYIR	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat
22	Kabupaten Bangka	2021	PT.MITRA STANIA PRIMA	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat
23	Kabupaten Bangka	2021	PT. PLN (Persero)-PLTD MERAWANG	09/11/2021	Taat
24	Kabupaten Bangka	2021	PT. REFINED BANGKA TIN	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat
25	Kabupaten Bangka	2021	PT. TIMAH (Persero), Tbk. - KETEKNIKAN DAN SARANA (BALAIKARYA)	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat
26	Kabupaten Bangka	2021	PT. TIMAH, Tbk. - UPTP PEMALI	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat
27	Kabupaten Bangka	2021	PT.ARTHA CIPTA LANGGENG	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat
28	Kabupaten Bangka	2021	PT.BANGKA BIOGAS SYNERGY	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat
29	Kabupaten Bangka Tengah	2021	PT. SWARNA NUSA SENTOSA	03/11/2021	Tidak Taat (Sanksi Administrasi)
30	Kabupaten Bangka Tengah	2021	CV. MUTIARA ALAM LESTARI	27/04/2021	Taat
31	Kabupaten Bangka Barat	2021	PT. BANGUN RIMBA SEJAHTERA	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat
32	Kabupaten Bangka Barat	2021	PT. SINAR MUTIARA SEJAHTERA	11/11/2021	Taat
33	Kabupaten Bangka Barat	2021	PT. BAKIT INDAH MANDIRI	24/09/2021	Taat
34	Kabupaten Bangka Selatan	2021	PT.RAJAWALI RIMBA PERKASA	21/04/2021	Taat
35	Kabupaten Bangka Selatan	2021	PT.BANGKA BELITUNG MARITIM SEJAHTERA dan PT. SEJAHTERA INDAH PERKASA	04/02/2021	Tidak Taat (Sanksi Administrasi)



No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tahun: 2023					
No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pangkalpinang	2022	PT. STANINDO INTI PERKASA	04-Apr-22	Taat (proper biru)
2	Pangkalpinang	2022	PT.BUKIT TIMAH	11 Pebruari 2022	Taat (proper biru)
3	Pangkalpinang	2022	PT. MITRA SUKSES GLOBALINDO	22-Apr-22	Taat (proper biru)
4	Pangkalpinang	2022	CV. VENUS INTI PERKASA	19-Apr-22	Taat (proper biru)
5	Pangkalpinang	2022	PT. SARIWIGUNA BINA SENTOSA	08 Pebruari 2022	Taat (proper biru)
6	Pangkalpinang	2022	PT.PRIMA TIMAH UTAMA	18 Pebruari 2022	Taat (proper biru)
7	Pangkalpinang	2022	PT. Dok dan Perkapalan Air Kantung Unit Galangan Selindung	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
8	Pangkalpinang	2022	PT.BUKIT TIMAH	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
9	Pangkalpinang	2022	PT.TININDO INTERNUSA	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
10	Pangkalpinang	2022	RS. BHAKTI TIMAH	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
11	Pangkalpinang	2022	PT. BANGUN MEGA LESTARI/HOTEL SWISS BELL	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Tidak Taat (SA.Paksaan Pemerintah)
12	Pangkalpinang	2022	PT. Pertamina (Persero) M.O. Region II TBBM Pangkal Balam	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper hijau)
13	Pangkalpinang	2022	PT. Pahala Harapan Lestari	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper hijau)
14	Pangkalpinang	2022	PT. Pelindo II Cab.Pangkalbalam	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper hijau)
15	Kabupaten Bangka	2022	PT. Gunung Maras Lestari	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)



No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Kabupaten Bangka	2022	PT. Karini Utama	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
17	Kabupaten Bangka	2022	PT. ARTHA CIPTA LANGGENG	01-Apr-22	Taat (proper biru)
18	Kabupaten Bangka	2022	PT. BANGKA BIOGAS SYNERGY	18-Apr-22	Taat (proper biru)
19	Kabupaten Bangka	2022	PT. TIMAH, Tbk- UPTP PEMALI	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
20	Kabupaten Bangka	2022	PT Fajar Berseri	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Tidak Taat (SA. Paksaan Pemerintah)
21	Kabupaten Bangka	2022	PT Fenyen Agro Lestari	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Tidak Taat (SA. Paksaan Pemerintah)
22	Kabupaten Bangka	2022	PT. SINAR BATU RUSA PRIMA	09 Pebruari 2022	
23	Kabupaten Bangka	2022	PT Mitra Stania Prima	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
24	Kabupaten Bangka	2022	PT ATD Makmur Mandiri	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
25	Kabupaten Bangka	2022	PT Sinar Baturusa Prima	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Tidak Taat (SA. Paksaan Pemerintah)
26	Kabupaten Bangka	2022	PT Mutiara Agro Sejahtera	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Tidak Taat (SA. Paksaan Pemerintah)
27	Kabupaten Bangka	2022	PT Payung Mitra Jaya Mandiri	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Tidak Taat (SA. Paksaan Pemerintah)
28	Kabupaten Bangka	2022	PT. PLN (PERSERO) PLTU AIR ANYIR	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
29	Kabupaten Bangka	2022	PT. BANGKA TIN INDUSTRY	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)



No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	Kabupaten Bangka	2022	PT. TIMAH Tbk.UPLB-_PENAMBANGAN KIP DI TELUK KELABAT DALAM	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
31	Kabupaten Bangka	2022	PT.MAS BRO	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Tidak Taat (SA.Paksaan Pemerintah)
32	Kabupaten Bangka	2022	PT.SINAR LOGINDO ALAM	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Tidak Taat (SA.Paksaan Pemerintah)
33	Kabupaten Bangka	2022	DPUPR _Provinsi Kep.Babel	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Tidak Taat (SA.Paksaan Pemerintah)
34	Kabupaten Bangka	2022	PT.MITRA STANIA PRIMA	22 March 2022	Taat (proper biru)
35	Kabupaten Bangka	2022	PT. TIMAH (Persero), Tbk. - KETEKNIKAN DAN SARANA (BALAIKARYA)	07 June 2022	Taat (proper biru)
36	Kabupaten Bangka	2022	PT. TIMAH Tbk.-UPTP TB.PAKU	14 Pebruari 2022	Taat (proper biru)
37	Kabupaten Bangka	2022	PT. TIMAH Tbk.UPLB-_PENAMBANGAN KIP DI TELUK KELABAT DALAM	19-21 Januari 2022	Taat (proper biru)
38	Kabupaten Bangka	2022	PT. GUNUNG PELAWAN LESTARI	14 March 2022	Taat (proper biru)
39	Kabupaten Bangka	2022	PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Merawang	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
40	Kabupaten Bangka	2022	PT. Timah (Persero), Tbk. - Keteknikan dan Sarana (Balaikarya)	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
41	Kabupaten Bangka	2022	PT. Timah (Persero), Tbk. - Unit Tambang Darat Bangka	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
42	Kabupaten Bangka	2022	PT.MAS BRO	20-Apr-22	
43	Kabupaten Bangka	2022	PT. Gemilang Cahaya Mentari	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
44	Kabupaten Bangka	2022	PT. Gunung Pelawan Lestari	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
45	Kabupaten Bangka	2022	PT. Tata Hampanan Eka Persada (d/h. PT. Palmindo Mitra Lestari)	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)



No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46	Kabupaten Bangka	2022	PT. Putra Bangka Mandiri	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
47	Kabupaten Bangka	2022	PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Merawang	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
48	Kabupaten Bangka Tengah	2022	PT. SWARNA NUSA SENTOSA	19 May 2022	Tidak Taat (SA.Paksa Pemerintah)
49	Kabupaten Bangka Tengah	2022	Hotel Grand Cirindo (Hotel Novotel)	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Tidak Taat (SA.Paksa Pemerintah)
50	Kabupaten Bangka Tengah	2022	PT. BANGKA PRIMA TIN	25 March 2022	Tidak Taat (SA.Paksa Pemerintah)
51	Kabupaten Bangka Tengah	2022	CV. MUTIARA ALAM LESTARI	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
52	Kabupaten Bangka Tengah	2022	CV. MUTIARA HIJAU LESTARI	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
53	Kabupaten Bangka Tengah	2022	PT.PUTRA BANGKA TANI	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Tidak Taat (SA.Paksa Pemerintah)
54	Kabupaten Bangka Tengah	2022	PT.BANGKA AGRO MANDIRI	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Tidak Taat (SA.Paksa Pemerintah)
55	Kabupaten Bangka Tengah	2022	PT.FATABA PASIFIK KOPAN	2 December 2022	Tidak Taat (SA.Paksa Pemerintah)
56	Kabupaten Bangka Tengah		PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II DPPU Depati Amir	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
57	Kabupaten Bangka Tengah		PT. PLN (Persero)-Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Koba	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)



No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58	Kabupaten Bangka Barat	2022	PT.BANGKA AQUA CULTURE	12 January 2022	Tidak Operasional
59	Kabupaten Bangka Barat	2022	FA.TERUS JAYA	11 January 2022	Tidak Operasional
60	Kabupaten Bangka Barat	2022	PT.HASIL ALAM SUKSES PRATAMA	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Tidak Operasional
61	Kabupaten Bangka Barat	2022	PT. ARSED INDONESIA	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Tidak Operasional
62	Kabupaten Bangka Barat	2022	PT. SINAR MUTIARA SEJAHTERA	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Tidak Operasional
63	Kabupaten Bangka Barat	2022	PT. HOKI ALAM SEJAHTERA JAYA	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
64	Kabupaten Bangka Barat	2022	PT. Gunung Sawit Bina Lestari	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
65	Kabupaten Bangka Barat	2022	PT. MP Ledong West Indonesia	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
66	Kabupaten Bangka Barat	2022	PT. BAKIT INDAH MANDIRI	25 May 2022	Taat (proper biru)
67	Kabupaten Bangka Barat	2022	PT. SEJAHTERA INDAH PERKASA	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Tidak Taat (SA.Paksaan Pemerintah)
68	Kabupaten Bangka Barat	2022	PT.SAWINDO KENCANA	24 March 2022	Taat (proper biru)
69	Kabupaten Bangka Barat	2022	PT. Bumi Permai Lestari	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
70	Kabupaten Bangka Barat	2022	PT. Timah (Persero), Tbk - Unit Metalurgi Muntok	21 March 2022	Taat (proper EMAS)
71	Kabupaten Bangka Barat		PT. Timah (Persero), Tbk. - UPDB BPP Bangka Barat	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)



No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
72	Kabupaten Bangka Selatan	2022	PT.BANGKA BELITUNG MARITIM SEJAHTERA dan PT. SEJAHTERA INDAH PERKASA	10 January 2022	Tidak Taat (SA.Paksa Pemerintah)
74	Kabupaten Bangka Selatan	2022	PT Artha Prima Nusa Jaya Sembilan	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
75	Kabupaten Bangka Selatan	2022	PT Prisma Multi Karya	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
76	Kabupaten Bangka Selatan	2022	PT Prisma Multi Karya III	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
77	Kabupaten Bangka Selatan	2022	CV Sari Bumi Mulia	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Tidak Taat (SA.Paksa Pemerintah)
78	Kabupaten Bangka Selatan	2022	PT Timah, Tbk – UPTP Wilayah Bangka TB Paku	10 Pebruari 2022	Taat (proper biru)
79	Kabupaten Bangka Selatan	2022	PT. SAMUDERA BERHASIL BERSAMA	02 June 2022	Tidak Taat (SA.Paksa Pemerintah)
80	Kabupaten Bangka Selatan	2022	PT.SABANG MITRA SUKSES	14 October 2022	Tidak Operasional
81	Kabupaten Bangka Selatan	2022	PT. Bumi Sawit Sukses Pratama	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
82	Kabupaten Bangka Selatan		PT. PLN (Persero)-Sektor Pembangkitan Babel-PLTD Toboali	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
83	Kabupaten Bangka Selatan		PT. Timah (Persero) Tbk - Wilasi II Bangka Selatan	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
84	Kabupaten Belitung	2022	Hotel Grand Hatika	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Tidak Taat (SA.Paksa Pemerintah)
85	Kabupaten Belitung	2022	Hotel Aston Belitung (BW SUITE)	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Tidak Taat (SA.Paksa Pemerintah)



No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
86	Kabupaten Belitung	2022	PT.BABEL SURYA ALAM LESTARI	21 Pebruari 2022	Taat (proper biru)
87	Kabupaten Belitung	2022	PT.PELINDO (Persero) REGION 2_TANJUNGPANDAN	25 Pebruari 2022	Tidak Taat (SA.Paksa Pemerintah)
88	Kabupaten Belitung	2022	PT.BUMI HERO PERKASA	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
89	Kabupaten Belitung	2022	PT. PLN (Persero)-Sektor Pembangkitan Babel-PLTD Pilang	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
90	Kabupaten Belitung	2022	PT. Pratama Unggul Sejahtera	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
91	Kabupaten Belitung	2022	PT. Rebinmas Jaya	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper hijau)
92	Kabupaten Belitung Timur	2022	PT.PERTAMINA(Persero) fuel TJg.PANDAN_BELTUNG (Ex. PT. Astika Murni Utama)	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
93	Kabupaten Belitung Timur	2022	PT. MENARA CIPTA MULIA	27 January 2022	Tidak Taat (SA.Paksa Pemerintah)
94	Kabupaten Belitung Timur	2022	PT. TOMMY UTAMA	24 Pebruari 2022	Taat (proper biru)
95	Kabupaten Belitung Timur	2022	PT. PARIT SEMBADA	16 March 2022	Taat (proper biru)
96	Kabupaten Belitung Timur	2022	PT. TIMAH Tbk.UNIT PENAMBANGAN BELITUNG_TB.BATU BESI	22 Pebruari 2022	Taat (proper hijau)
97	Kabupaten Belitung Timur	2022	PT. Steelindo Wahana Perkasa	28 January 2022	Taat (proper biru)
98	Kabupaten Belitung Timur	2022	PT. Foresta Lestari Dwikarya	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)
99	Kabupaten Belitung Timur	2022	PT. PLN (Persero) - Wilayah Bangka Belitung Sub Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Padang	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper biru)



No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
100	Kabupaten Belitung Timur	2022	PT. Sahabat Mewah dan Makmur	Evaluasi Pasif (Akun Sempel)	Taat (proper EMAS)

Keterangan :

Tabel ini merupakan hasil penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012. Izin lingkungan terdiri dari AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.

Sumber: DLHK Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2022

Tabel-44. Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2023

No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Areal Terdampak (Ha)	Jumlah Korban	
					Mengungsi	Meninggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN CEMARA 1 DESA KURNIA JAYA KEC.MANGGAR	KEBAKARAN	-	-	0
2	KAB.BANGKA BARAT	RT 06 DESA PERADONG KEC.SIMPANG TERITIP	KEBAKARAN	-	-	0
3	KAB.BANGKA BARAT	DESA DENDANG KEC.KELAPA	ANGIN PUTING BELIUNG	-	-	0
4	KAB.BANGKA TENGAH	DUSUN NUNGGAL RT 007 RW 003 DESA KEMINGKING KEC.SUNGAI SELAN	KEBAKARAN	-	-	0
5	KAB.BANGKA BARAT	JL.PENGHUBUNG ANTARA DESA LIMBUNG - DESA TUMBAK PETAR KEC.JEBUS	BANJIR ROB	-	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
6	KAB.BANGKA BARAT	JL.KAMPUNG BARU DESA MANIK KEC.PARITTIGA	BANJIR ROB	-	-	0
7	KAB.BANGKA BARAT	DESA PUPUT PASAR PARITTIGA KEC.PARITTIGA	BANJIR ROB	-	-	0
8	KAB.BANGKA TENGAH	KAMPUNG JAWA RT 010 RW 003 KEL.KOBA KEC.KOBA	CUACA EKSTRIM	-	-	0
9	KAB.BANGKA BARAT	KAMPUNG TANJUNG, KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN MUNTOK	BANJIR ROB	-	-	0
10	KOTA PANGKALPINANG	KEL.GENAS KEC.TAMAN SARI,KEL.OPAS INDAH KEC.TAMAN SARI, KEL.PASIR PUTIH KEC.BUKIT INTAN, KEL.REJOSARI KEC.PANGKALBALAM	BANJIR ROB	-	-	0
11	KAB.BANGKA	DESA SEMPAN KEC.PEMALI	BANJIR ROB	-	-	0
12	KAB.BANGKA	JL.MUHIDIN NO.87 SUNGAILIAT	KEBAKARAN	-	-	0
13	KAB.BANGKA	RT 02,RT 03,RT04,RT 08 LINGKUNGAN PARIT PEKIR KEL.SUNGAILIAT KEC.SUNGAILIAT	BANJIR ROB	-	-	0
14	KAB.BANGKA	RT 001 RT 002 LINGK.AIR HANYUT KEL.SUNGAILIAT KEC.SUNGAILIAT	BANJIR ROB	-	-	0
15	KAB.BANGKA	DESA AIR DUREN PEMALI	BANJIR ROB	-	-	0
16	KAB.BANGKA BARAT	KAMPUNG TANJUNG, KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN MUNTOK	BANJIR ROB	-	-	0
17	KAB.BANGKA BARAT	KAMPUNG TANJUNG,KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN MUNTOK	BANJIR ROB	-	-	0
18	KAB.BANGKA BARAT	KAWASAN WISATA PANTAI ASMARA KEC.MUNTOK	ABRASI PANTAI	-	-	0
19	KAB.BANGKA	DESA KEMUJA KEC.MENDO BARAT	ANGIN PUTING BELIUNG	-	-	0
20	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN BIRA DESA KELUBI KEC.MANGGAR	KEBAKARAN	-	-	0
21	KAB.BANGKA SELATAN	PERAIRAN PULAU MASPARI	LAKA TRANSPORTASI	-	-	0
22	KAB.BANGKA SELATAN	TRAN SPA	KEBAKARAN	-	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
23	KAB.BANGKA BARAT	JL.PENGHUBUNG ANTARA DESA LIMBUNG - DESA TUMBAK PETAR KEC.JEBUS	BANJIR	-	-	0
24	KAB.BANGKA BARAT	DESA SINAR MANIK JL.KAMPUNG BARU KEC.JEBUS	BANJIR	-	-	0
25	KAB.BANGKA BARAT	RT 02 DESA SUNGAI BULUH KEC.JEBUS	BANJIR	-	-	0
26	KAB.BANGKA BARAT	RT 04 DESA SUNGAI BULUH KEC.JEBUS	BANJIR	-	-	0
27	KAB.BANGKA BARAT	DESA PUPUT PASAR PARITTIGA KEC.PARITTIGA	BANJIR	-	-	0
28	KAB.BANGKA	DUSUN GEDONG DESA LUMUT KEC. BELINYU	BANJIR ROB	-	-	0
29	KAB.BANGKA	DUSUN KD DESA LUMUT KEC. BELINYU	BANJIR ROB	-	-	0
30	KAB.BANGKA	DUSUN PARIT KELAPA DESA LUMUT KEC. BELINYU	BANJIR ROB	-	-	0
31	KAB.BANGKA SELATAN	RT 07 DUSUN SPA DESA TRAN RIAS KEC. TOBOALI	KEBAKARAN	-	-	0
32	KAB.BANGKA	DESA AIR RUAY KEC.PEMALI	KEBAKARAN	-	-	0
33	KAB.BANGKA BARAT	DESA PUPUT KEC.PARITTIGA	CUACA EKSTRIM	-	-	0
34	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.GENAYUN DSN. URISAN JAYA DESA PADANG KEC MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
35	KAB.BANGKA BARAT	DESA BENTENG KOTA KEC.TEMPILANG	KEBAKARAN	-	-	0
36	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN CEMARA RT 03 RW 05 DESA KURNIA JAYA KEC. MANGGAR	KEBAKARAN	-	-	0
37	KAB.BELITUNG TIMUR	JLN. KUBURAN CEMPAKE DUSUN RASAU (DEKAT PERUMAHAN RASAU RESIDENCE)	KARHUTLA	1	-	0
38	KAB.BANGKA TENGAH	DESA TANJUNG BERIKAT KEC.LUBUK BESAR	KEBAKARAN	-	-	0
39	KAB.BANGKA	RT 17 DESA AIR JUKUNG KEC.BELINYU	ANGIN PUTING BELIUNG	-	-	0
40	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN SINAR SETIONG DESA LILANGAN KEC.GANTUNG	CUACA EKSTRIM	-	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
41	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN AIK NYUROK DESA DUKONG KEC.SIMPANG PESAK	CUACA EKSTRIM	-	-	0
42	KAB.BANGKA SELATAN	SPBU PRUMNAS UPTD	KARHUTLA	-	-	0
43	KAB.BANGKA TENGAH	DUSUN SIMPAN RT 05 DESA LUBUK BESAR KEC. LUBUK BESAR	CUACA EKSTRIM	-	-	0
44	KAB.BANGKA BARAT	GG. LEDENG, KEBUN NANAS SUNGAI DAENG MUNTOK	KARHUTLA	1	-	0
45	KAB.BANGKA BARAT	BELAKANG GEDUNG DIKLAT PEMDA BANGKA BARAT DESA BELO LAUT MUNTOK	KARHUTLA	1,5	-	0
46	KOTA PANGKALPINANG	JLN. RAYA TUA TUNU (SAMPING SEKOLAH ALBINA) RT 09 RW 03 KEL. TUA TUNU INDAH KEC.	KARHUTLA	0,5	-	0
47	KAB.BANGKA SELATAN	GG. INTI SARI DESA TELADAN	KARHUTLA	-	-	0
48	KAB.BELITUNG TIMUR	PANTAI MUDONG DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	2	-	0
49	KAB.BELITUNG TIMUR	PANTAI TANJUNG MIRANG DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	4	-	0
50	KAB.BANGKA BARAT	JL. TEMBUS PAL 4 DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,5	-	0
51	KAB.BANGKA BARAT	THE BUKIT SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,5	-	0
52	KAB.BANGKA BARAT	PAL 3 DI GG. CAMPUR SARI DESA BELO LAUT KEC MUNTOK	KARHUTLA	0,3	-	0
53	KAB.BANGKA BARAT	DESA BAKIK KEC. PARIT TIGA	ANGIN PUTING BELIUNG	-	-	0
54	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,02	-	0
55	KAB.BELITUNG	JL. SIJUK DESA KECIPUT KEC.SIJUK	KARHUTLA	0,1	-	0
56	KAB.BANGKA	LINGKUNGAN LIMBANG JAYA, KEL.SURYA TIMUR KEC.SUNGAILIAT	KEBAKARAN	-	-	1
57	KAB.BANGKA	LINGKUNGAN AIR HANYUT KEC.SUNGAILIAT	KEBAKARAN	-	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
58	KAB.BANGKA TENGAH	DESA PENYAK RT.002 KEC.KOBA	KEBAKARAN		-	0
59	KOTA PANGKALPINANG	KEL.AIR MAWAR RT 04 RW 02 KEC.BUKIT INTAN	KEBAKARAN	-	-	0
60	KOTA PANGKALPINANG	PASAR MODERN KEL.SEMABUNG LAMA KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	-	-	0
61	KAB.BANGKA BARAT	DI BELAKANG SDN 7 PAL 1 RT.003 RW. 002 SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KEBAKARAN	0,5	-	0
62	KAB.BANGKA BARAT	PAL 2 KEL.SUNGAI DAENG KEC.MUNTOK	KEBAKARAN	-	-	0
63	KAB.BANGKA SELATAN	DESA JERIJI KEC.TOBOALI	ANGIN PUTING BELIUNG	-	-	0
64	KAB.BANGKA BARAT	TANJUNG ULAR DESA AIR PUTIH KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
65	KAB.BANGKA TENGAH	PERUMAHAN BUKIT GELASE KEL.DUL KEC.PANGKALAN BARU	CUACA EKSTRIM	-	-	0
66	KAB.BANGKA	JL.RAYA DESA KEMUJA KEC.MENDO BARAT	CUACA EKSTRIM	-	-	0
67	KOTA PANGKALPINANG	JL.BATU NIRWANA IV RT 05 RW 02 KEL.SEMABUNG LAMA	CUACA EKSTRIM	-	-	0
68	KOTA PANGKALPINANG	KEL.BUKIT BESAR KEC.GIRIMAYA	CUACA EKSTRIM	-	-	0
69	KAB.BANGKA TENGAH	SILOK KEL.DUL KEC.PANGKALAN BARU	CUACA EKSTRIM	-	-	0
70	KAB.BANGKA SELATAN	KEL.TELADAN	KEBAKARAN	-	-	0
71	KAB.BANGKA	DUSUN AIR HANTU RT 03 DENIANG	ANGIN PUTING BELIUNG	-	-	0
72	KAB.BANGKA	DESA AIR JUKUNG RT.001 KEC.BELINYU	ANGIN PUTING BELIUNG	-	-	0
73	KAB.BANGKA BARAT	DI DEPAN KANTOR POLRES BABAR DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
74	KAB.BANGKA SELATAN	PARIT 9	KEBAKARAN	-	-	0
75	KAB.BELITUNG	JL.AIR RANGGONG RT 27 RW 12 DESA AIR SAGA KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1,5	-	0
76	KAB.BANGKA TENGAH	DESA PENYAK KEC.KOBA	CUACA EKSTRIM	-	-	0
77	KAB.BANGKA BARAT	DUSUN KEMANG MASAM DESA AIR PUTIH KEC.MUNTOK	CUACA EKSTRIM	-	-	0
78	KAB.BANGKA BARAT	DUSUN RUMPIS DESA BERANG KEC.SIMPANG TERITIP	CUACA EKSTRIM	-	-	0
79	KAB.BANGKA BARAT	DUSUN TAMBANG 25 DESA CUPAT KEC.PARITTIGA	CUACA EKSTRIM	-	-	0
80	KAB.BANGKA SELATAN	DESA PERGEM	KEBAKARAN	-	-	0
81	KAB.BANGKA BARAT	DI DEPAN KANTOR BKPSDMD DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
82	KAB.BANGKA BARAT	BELAKANG KANTOR DINAS PARIWISATA DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,5	-	0
83	KAB.BELITUNG	JL.SIJUK DESA KECIPUT KEC.SIJUK	KARHUTLA	2	-	0
84	KAB.BANGKA TENGAH	DESA KURAU, KEC.KOBA	KARHUTLA	1	-	0
85	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT AIR TERJUN PAIT JAYA DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,7	-	0
86	KOTA PANGKALPINANG	JL.AIR MAWAR DAN JL.BACANG KEL.AIR MAWAR KEC.BUKIT INTAN	CUACA EKSTRIM	-	-	0
87	KAB.BANGKA SELATAN	BELAKANG KANTOR BAKUDA PARIT 3	KARHUTLA	0,01	-	0
88	KAB.BANGKA BARAT	BELAKANG BLK DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,5	-	0
89	KAB.BANGKA	DESA RUKAM KEC.MENDO BARAT	CUACA EKSTRIM	-	-	0
90	KAB.BANGKA	DESA SEMPAN KEC.PEMALI	CUACA EKSTRIM	-	-	0
91	KAB.BANGKA	DESA MERAWANG KEC.MERAWANG	CUACA EKSTRIM	-	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
92	KAB.BANGKA	LINGKUNGAN PARIT PEKIR KEL.SUNGAILIAT KEC.SUNGAILIAT	CUACA EKSTRIM	-	-	0
93	KAB.BANGKA	KAMPUNG LIMBANG JAYA KEL. SURYA TIMUR KEC.SUNGAILIAT	CUACA EKSTRIM	-	-	0
94	KAB.BANGKA	KEL. KENANGA ASRI KEC.SUNGAILIAT	CUACA EKSTRIM	-	-	0
95	KAB.BANGKA	KEL. PARIT PADANG KEC.SUNGAILIAT	CUACA EKSTRIM	-	-	0
96	KAB.BANGKA	DESA CIT KEC. RIAU SILIP	CUACA EKSTRIM	-	-	0
97	KAB.BANGKA BARAT	PANTAI BATU BERANI TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
98	KAB.BANGKA BARAT	LAPANGAN GOLF SUNGAI BARU KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,5	-	0
99	KAB.BANGKA TENGAH	RSUD Drs.H.ABU HANIFAH	CUACA EKSTRIM	-	-	0
100	KAB.BANGKA BARAT	THE BUKIT SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,8	-	0
101	KAB.BANGKA BARAT	GANG KENARI, PAIT JAYA DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,5	-	0
102	KAB.BANGKA BARAT	THE BUKIT SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	7	-	0
103	KAB.BANGKA TENGAH	DESA KURAU KEC.KOBA	KARHUTLA	1	-	0
104	KAB.BANGKA SELATAN	PARIT 2	KEBAKARAN	-	-	0
105	KAB.BANGKA BARAT	THE BUKIT SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
106	KAB.BANGKA	JL.BUKIT SEKIP KEC.PEMALI	CUACA EKSTRIM	-	-	0
107	KAB.BANGKA BARAT	BELAKANG SLB BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	7	-	0
108	KAB.BANGKA BARAT	PANTAI TANJUNG KALIAN TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	3	-	0
109	KAB.BANGKA BARAT	THE BUKIT SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,5	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
110	KAB.BANGKA BARAT	THE BUKIT SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	2	-	0
111	KAB.BANGKA BARAT	BATU BERANI TANJUNG KALIAN TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	2	-	0
112	KAB.BANGKA BARAT	JALAN TANJUNG ULAR DESA AIR PUTIH KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
113	KAB.BANGKA BARAT	GG. SKIP SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
114	KAB.BANGKA BARAT	BPM TANJUNG ULAR DESA AIR PUTIH KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,5	-	0
115	KAB.BANGKA BARAT	BELAKANG GEDUNG DIKLAT PEMDA BANGKA BARAT DESA BELO LAUT MUNTOK	KARHUTLA	0,5	-	0
116	KAB.BANGKA BARAT	THE BUKIT SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,5	-	0
117	KAB.BANGKA	DESA PANGKAL NIUR KEC.RIAU SILIP	ANGIN PUTING BELIUNG	-	-	0
118	KAB.BANGKA SELATAN	SIMPANG KEPO PERUMNAS UPTB	KEBAKARAN	-	-	0
119	KAB.BANGKA SELATAN	PARIT 2	KEBAKARAN	-	-	0
120	KAB.BANGKA BARAT	MENJELANG KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,8	-	0
121	KAB.BELITUNG	JL.SERMAH ABDULLAH DESA AIR RAYA DAN JL.AIR KETEKOK DESA AIR KETEKOK KEC.TANJUNG	ANGIN PUTING BELIUNG	-	-	0
122	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN. BAN MOTOR RT 02 RW 01 DS.LALANG KECAMATAN MANGGAR	CUACA EKSTRIM	-	-	0
123	KAB.BANGKA BARAT	DI BELAKAN SMPN 2 MUNTOK TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	2	-	0
124	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN SAMAK DESA LALANG KEC.MANGGAR	CUACA EKSTRIM	-	-	0
125	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN LAHAN PANTAI KUALE TAMBAK DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	1	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
126	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT PAIT JAYA DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
127	KAB.BANGKA SELATAN	AMPERA	KEBAKARAN	-	-	0
128	KAB.BANGKA BARAT	DI BELAKANG SMPN 2 MUNTOK TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
129	KAB.BANGKA BARAT	MUSOLA PERUMNAS MENJELANG KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,8	-	0
130	KAB.BANGKA BARAT	GG. KENARI SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	3	-	0
131	KAB.BANGKA BARAT	MENTOK ASIN DI SIMPANG BATU BERANI TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,5	-	0
132	KAB.BANGKA BARAT	JALAN RAYA MENUMBING MENJELANG KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
133	KAB.BANGKA SELATAN	DESA RINDIK	KEBAKARAN	-	-	0
134	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT PANTAI TANJUNG KALIAN TANJUNG	KARHUTLA	1	-	0
135	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT MENTOK ASIN TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
136	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT JL. THE BUKIT SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,75	-	0
137	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT GG. CAMPUR SARI DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,5	-	0
138	KAB.BELITUNG TIMUR	MIRANG DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1,5	-	0
139	KAB.BELITUNG TIMUR	MIRANG DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1,5	-	0
140	KAB.BANGKA SELATAN	SAMPING SMA 1 TOBOALI	KARHUTLA	0,01	-	0
141	KAB.BANGKA SELATAN	JL.PUPUT DESA TOBOALI KEC.TOBOALI	KARHUTLA	0,09	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
142	KAB.BANGKA SELATAN	PERUMNAS UPTB	KEBAKARAN	-	-	0
143	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT KOMPLEK PERUMAHAN PEMDA DESA BELO LAUT KEC MENTOK	KARHUTLA	2	-	0
144	KAB.BANGKA BARAT	TANJUNG KALIAN TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,5	-	0
145	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT JALAN TEMBUS DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
146	KAB.BANGKA SELATAN	KEL TELADAN	KEBAKARAN	-	-	0
147	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.MADURA RT 07 DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	12	-	0
148	KAB.BANGKA TENGAH	ALUN-ALUN TAMAN KOBA KEC. KOBA	KARHUTLA	1	-	0
149	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT RANGGAM DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
150	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.PULAU DAPOR DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,01	-	0
151	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.TAMAN ABADI DUSUN RASAU DESA GANTUNG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	2	-	0
152	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.SUDIRMAN DESA KURNIA JAYA KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,08	-	0
153	KOTA PANGKALPINANG	JL. PAHLAWAN 12 KEC.RANGKUI	CUACA EKSTRIM	-	-	0
154	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT KOMPLEK PERUMAHAN PEMDA DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	2,5	-	0
155	KAB.BANGKA BARAT	BELAKANG SMAN 1 DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,5	-	0
156	KAB.BANGKA SELATAN	KOMPLEK PERKANTORAN PARIT 3	KARHUTLA	0,01	-	0
157	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT THE BUKIT SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,5	-	0



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
158	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN PADANG I DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,04	-	0
159	KAB.BANGKA BARAT	JL. LEDENG SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,5	-	0
160	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT GG. SKIP SUNGAI DAENG KEC.MUNTOK	KARHUTLA	0,5	-	0
161	KAB.BANGKA BARAT	DESA BERUAS KEC. KELAPA	ANGIN PUTING BELIUNG	-	-	0
162	KAB.BANGKA BARAT	BELAKANG SMPN 2 TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	2	-	0
163	KAB.BANGKA TENGAH	DESA TANJUNG GUNUNG JL.PASIR RAYA RT 08 KEC.PANGKALAN BARU	CUACA EKSTRIM	-	-	0
164	KAB.BANGKA BARAT	LINGKUNGAN BEDENG AKE KEL.SINAR JAYA	KARHUTLA	2	-	0
165	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT PAL 9 DESA AIR BELO KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,5	-	0
166	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT KOMPLEK PERUMAHAN PEMDA DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,5	-	0
167	KAB.BANGKA BARAT	DI DEPAN BATU BALAI MENJELANG KEC.MENTOK	KARHUTLA	2,5	-	0
168	KAB.BELITUNG TIMUR	MUDONG DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1	-	0
169	KAB.BANGKA BARAT	DESA REBO KEL.KENANGA	KARHUTLA	1	-	0
170	KAB.BANGKA BARAT	LINGKUNGAN SINAR BARU KEC. SUNGAILIAT	KARHUTLA	0,5	-	0
171	KAB.BANGKA BARAT	DI SAMPING YASMIN HOTEL DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,5	-	0
172	KAB.BANGKA BARAT	GG. SKIP SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
173	KAB.BANGKA SELATAN	DI BUKIT GANG TODAL	KARHUTLA	0,01	-	0
174	KAB.BANGKA BARAT	JALAN TEMBUS DEKAT PERUMAHAN DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,01	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
175	KAB.BELITUNG TIMUR	KULONG KERO DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
176	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA BURUNG MANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	1	-	0
177	KAB.BANGKA BARAT	TANJUNG KALIAN DEKAT PONDOK SANTAI	KARHUTLA	0,5	-	0
178	KAB.BANGKA BARAT	TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,5	-	0
179	KAB.BANGKA SELATAN	DISAMPING KANTOR NASDEM DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,01	-	0
180	KAB.BANGKA BARAT	JL.PESIDAN	KARHUTLA	1	-	0
181	KAB.BANGKA BARAT	JALAN TEMBUS , GG SISWA DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
182	KAB.BANGKA BARAT	DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
183	KAB.BANGKA BARAT	KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	ANGIN PUTING BELIUNG	-	-	0
184	KAB.BANGKA BARAT	KP.MENTOK ASIN RT 004 RW 10 KEL.TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	3,5	-	0
185	KAB.BANGKA TENGAH	TANJUNG KALIAN PANTAI BATU RAKIT TANJUNG KEC.MENTOK	ANGIN PUTING BELIUNG	-	-	0
186	KAB.BANGKA TENGAH	RT 12 & RT 02 DESA BATU BELUBANG KEC PANGKALAN BARU	CUACA EKSTRIM	-	-	0
187	KAB.BANGKA BARAT	RT 03 DESA BATU BELUBANG KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	1	-	0
188	KAB.BELITUNG TIMUR	DEPAN HOTEL YASMIN STAR DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,08	-	0
189	KAB.BELITUNG TIMUR	KULONG KERO DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	5	-	0
190	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.SIRKUIT PULAU DAPOR DESA SELINSING KEC GANTUNG	KARHUTLA	0,02	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
191	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.PANTAI MUDONG DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	2,25	-	0
192	KAB.BELITUNG TIMUR	JL. KULONG KERO DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
193	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA SUKA MANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	1,5	-	0
194	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN PANCUR DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
195	KAB.BANGKA BARAT	KULONG KERO DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
196	KAB.BANGKA BARAT	SINAR MENUMBING AIR BELO KEC.MENTOK	KARHUTLA	3,75	-	0
197	KAB.BANGKA BARAT	JALAN TEMBUS GG. KENARI DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	2	-	0
198	KAB.BANGKA	JALAN SKIP SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	CUACA EKSTRIM	-	-	0
199	KAB.BANGKA SELATAN	JL. CENDANA RT 05 DUSUN REBO KEC.SUNGAILIAT	KARHUTLA	0,01	-	0
200	KAB.BANGKA BARAT	PARIT 3 KOMP.PERKANTORAN PARIT 3	KARHUTLA	0,5	-	0
201	KAB.BELITUNG TIMUR	SINAR MENUMBING AIR BELO KEC.MENTOK	KARHUTLA	4	-	0
202	KAB.BELITUNG	JL.AIK PISANG DESA BATU PENYU KEC.GANTUNG	KARHUTLA	5	-	0
203	KAB.BANGKA SELATAN	JL.ANWAR RT 49 RW 20 KEL.PANGKAL LALANG KEC.TANJUNG PANDAN	CUACA EKSTRIM	-	-	0
204	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA PERMIS DUSUN 2 DAN DUSUN 6 KEC.SIMPANG RIMBA	KARHUTLA	1	-	0
205	KAB.BANGKA TENGAH	JL.JENDERAL SUDIRMAN DUSUN SELUMAR DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	2	-	0
206	KAB.BELITUNG TIMUR	BELAKANG PUSKESMAS DESA PERLANG KEC.LUBUK BESAR	KARHUTLA	1	-	0
207	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.SIMPANG RANGGIANG DESA LENGANG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,05	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
208	KOTA PANGKALPINANG	MIRANG DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	10	-	0
209	KAB.BELITUNG	JL.LINTAS TIMUR KEC.GABEK KOTA PANGKALPINANG	KARHUTLA	0,08	-	0
210	KAB.BANGKA BARAT	JL.ARD RT 18 RW 09 DESA AIR SAGA KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
211	KAB.BELITUNG TIMUR	DEKAT SIMPANG BELO DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,5	-	0
212	KAB.BANGKA SELATAN	KULONG KERO DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,01	-	0
213	KAB.BANGKA TENGAH	HUTAN TUMPUKAN SAMPAJ KOMP.PARIT 3	KARHUTLA	3	-	0
214	KAB.BANGKA TENGAH	BELAKANG SPBU PENYAK KEC.KOBA KEL.PADANG MULYA KEC.KOBA	KARHUTLA	3	-	0
215	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA SUKA MANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	5	-	0
216	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,03	-	0
217	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN JAYA DESA LENGANG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	5	-	0
218	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN GANGSE DESA GANTUNG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	3	-	0
219	KOTA PANGKALPINANG	JL.H UMAR KAMPAK DALAM RT 07 RW 02 KEL.JERAMBAH GANTUNG KEC.GABEK	KARHUTLA		-	0
220	KAB.BANGKA BARAT	RAMBAT DESA MAYANG KEC. SIMPANG TERITIP KEC.SIMPANG TERITIP	KARHUTLA	9	-	0
221	KOTA PANGKALPINANG	JL.PADAT KARYA GG MUNCEN RT 03 RW 01 KEL.JERAMBAH GANTUNG KEC.GABEK	KARHUTLA		-	0
222	KAB.BANGKA TENGAH	KUBURAN DESA KURAU KEC.KOBA	KARHUTLA	1	-	0
223	KAB.BANGKA TENGAH	ALUN-ALUN KOBA KEC.KOBA	KARHUTLA	1	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
224	KAB.BELITUNG	JL. AIK RANGGONG RT 23 RW 10 DESA AIR SAGA	KARHUTLA	2	-	0
225	KAB.BELITUNG	JL. TANJUNG TINGGI DESA KECIPUT KEC.SIJUK	KARHUTLA	2	-	0
226	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.SIMPANG RENGGIANG RT 27 DESA LINTANG KEC.SIMPANG RENGGIANG	KARHUTLA	3	-	0
227	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN MIRANG DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
228	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.TANJUNG MUDONG DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
229	KAB.BELITUNG	JL.RAYA SIJUK RT 25 RW 09 DESA AIR SIJUK KEC.SIJUK	KARHUTLA	0,01	-	0
230	KAB.BANGKA TENGAH	PANTAI TANJUNG LANGKAH KEL.PADANG MULYA KEC. KOB	KARHUTLA	0,5	-	0
231	KAB.BANGKA BARAT	BELAKANG PERPUSDA MENTOK PAL 2 SUNGAI BARU KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,5	-	0
232	KAB.BELITUNG TIMUR	PANTAI TAMBAK KEC.DAMAR	KARHUTLA	4	-	0
233	KAB.BELITUNG TIMUR	BUKIT SAMAK KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,05	-	0
234	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.BANDARA DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	1	-	0
235	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN SEKIP DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	3	-	0
236	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN MANGGRAWAN DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
237	KAB.BELITUNG TIMUR	KULONG KERO, DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	5	-	0
238	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.PANTAI TAMBAK DESA SUKAMANDI KEC. DAMAR	KARHUTLA	0,3	-	0
239	KAB.BANGKA TENGAH	DESA KURAU TIMUR KEC.KOBA	KARHUTLA	7	-	0
240	KAB.BANGKA TENGAH	TANJUNG LANGKA KEC.KOBA	KARHUTLA	4	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
241	KAB.BANGKA BARAT	JLN. TANJUNG ULAR DESA AIR PUTIH KEC.MENTOK	KARHUTLA	5	-	0
242	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.PANTAI TAMBAK DESA SUKAMANDI KEC. DAMAR	KARHUTLA	3	-	0
243	KAB.BELITUNG	DESA JURU SEBRANG RT 06 RW 02 KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0
244	KAB.BANGKA TENGAH	BARITO KEC.KOBA	KARHUTLA	1	-	0
245	KAB.BELITUNG TIMUR	KULONG KERO DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,05	-	0
246	KAB.BANGKA BARAT	JL. RAYA MENUMBING DEKAT GAPURA MENUMBING MENJELANG KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,5	-	0
247	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.PANTAI MUDONG, MIRANG DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,5	-	0
248	KOTA PANGKALPINANG	GG.PELANGI FATMAWATI RT 09 RW 03 KEC.GERUNGANG	KARHUTLA	16	-	0
249	KAB.BANGKA BARAT	BELAKANG TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
250	KOTA PANGKALPINANG	JL.GUSUNG LAMA KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	244	-	0
251	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN TANAH TEBOK DESA BURUNG MANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	3	-	0
252	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN BAN MOTOR DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,07	-	0
253	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA MEKAR JAYA KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,02	-	0
254	KOTA PANGKALPINANG	RT 02 RW 01 KEL.TEMBERAN KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	-	-	0
255	KAB.BELITUNG	JL.BUNGA DESA, DESA AIR SAGA RT 12 RW 06 KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0
256	KAB.BANGKA TENGAH	KEL.SINAR LAUT KEC.KOBA	KARHUTLA	0,5	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
257	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.TRANS MERANTEH DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	6	-	0
258	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.JENDERAL SUDIRMAN DUSUN SELUMAR DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,5	-	0
259	KAB.BELITUNG TIMUR	TRANS MERANTEH DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1	-	0
260	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN MIRANG DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
261	KAB.BELITUNG	JL. GANG KELUARGA DALAM DESA PILANG RT 4 RW 1 KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
262	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN SEKIP DESA LALANG JAYA KEC.MANGGAR	KARHUTLA	5	-	0
263	KAB.BANGKA BARAT	JL. SUNGAI BABI SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	5	-	0
264	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN RASAU DESA GANTUNG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	15	-	0
265	KAB.BANGKA BARAT	BELAKANG SLB MENTOK DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	3	-	0
266	KAB.BELITUNG TIMUR	WARKOP TOWER DESA SUKA MANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	0,02	-	0
267	KAB.BELITUNG	JLN SIJUK KEC.SIJUK	KARHUTLA	2	-	0
268	KOTA PANGKALPINANG	JL.BECADE KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	0,02	-	0
269	KOTA PANGKALPINANG	PERUMAHAN BHAYANGKARA POLDA BABEL KEL.TEMBERAN KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	0,01	-	0
270	KAB.BANGKA TENGAH	DESA KURAU KEC.KOBA	KARHUTLA	0,5	-	0
271	KAB.BANGKA TENGAH	DESA KURAU KEC.KOBA	KARHUTLA	0,5	-	0
272	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN URISAN JAYA DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,5	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
273	KAB.BANGKA BARAT	BELAKANG RUMAH BPK TAMPUBOLON JL. LEDENG NO.1 SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,8	-	0
274	KAB.BELITUNG TIMUR	JL. MADURA DESA BARU KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,5	-	0
275	KAB.BELITUNG TIMUR	JL. TEMPAYAN 1 DESA MANGKUBANG KEC.DAMAR	KARHUTLA	0,5	-	0
276	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN URISAN JAYA DESA PADANG KEC.MANGGAR (BELAKANG PLTD PADANG)	KARHUTLA	1	-	0
277	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.TANJUNG KELAYANG RT 05 RW 02 DESA KECIPUT	KARHUTLA	5	-	0
278	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN URISAN JAYA DESA PADANG KEC.MANGGAR (PLTD PADANG)	KARHUTLA	1	-	0
279	KAB.BELITUNG	JL.MUALIM JAYA 01 RT 16 RW 04 DESA AIR PELEMPANG JAYA	KARHUTLA	2,5	-	0
280	KAB.BELITUNG	JL.TANJUNG KELAYANG RT 05 RW 02 DESA KECIPUT	KARHUTLA	5	-	0
281	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.SUMPING TIMUR DESA BATU PENYU KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,01	-	0
282	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.RAYA MANGGAR DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	5	-	0
283	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA LENGANG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	9	-	0
284	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	7	-	0
285	KOTA PANGKALPINANG	JL.KANTOR GUBERNUR KEL.SINAR BULAN KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	0,02	-	0
286	KOTA PANGKALPINANG	JL.RAWA INDAH KEL.KACANG PEDANG KEC.GERUNGANG	KARHUTLA	15	-	0
287	KOTA PANGKALPINANG	JL.PINANG PURA PADANG BARU KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	-	-	0
288	KOTA PANGKALPINANG	JL.PASIR PADI KEL.TEMBERAN KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	0,05	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
289	KAB.BELITUNG	JL.RAYA PILANG RT 19 RW 05 DESA DUKONG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	15	-	0
290	KAB.BELITUNG	JL.RAYA TANJUNG TINGGI DESA TANJUNG TINGGI KEC.SIJUK	KARHUTLA	0,01	-	0
291	KAB.BANGKA BARAT	JALAN RAYA TANJUNG ULAR DEKAT PABRIK SMELTER DESA AIR PUTIH KEC.MENTOK	KARHUTLA	7	-	0
292	KAB.BANGKA BARAT	JALAN RAYA BELO LAUT DEKAT LAPANGAN BOLA DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
293	KAB.BELITUNG	JL.BUKIT RAWE DESA PELEMPANG JAYA KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,01	-	0
294	KAB.BELITUNG	JL.AIR SAGA DEPAN KANTOR DESA AIR SAGA KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
295	KAB.BELITUNG	JL.SIJUK DESA AIR MERBAU	KARHUTLA	2	-	0
296	KAB.BELITUNG	JL.PENGHULU DESA SIJUK KEC.SIJUK	KARHUTLA	2	-	0
297	KAB.BELITUNG TIMUR	LAP.BOLA PEROL DESA LENGANG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	5	-	0
298	KAB.BELITUNG TIMUR	PANTAI TAMBAK KEC.DAMAR	KARHUTLA	1,5	-	0
299	KAB.BANGKA BARAT	SIMPANG BELO DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,6	-	0
300	KAB.BELITUNG TIMUR	PANTAI GELOMBANG DESA KURNIA KEC.DAMAR	KARHUTLA	5	-	0
301	KAB.BELITUNG TIMUR	GEOSITE GARUMEDANG DESA SUKA MANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	3,5	-	0
302	KOTA PANGKALPINANG	JL.H SALEH III KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	2	-	0
303	KAB.BELITUNG	RT 25 RW 09 DESA AIK SERUK (DESA SIJUK) KEC.SIJUK	KARHUTLA	0,05	-	0
304	KAB.BELITUNG	JL.RAYA BADAU RT 05 RW 02 DESA PERAWAS KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,05	-	0
305	KAB.BANGKA BARAT	GG CEK DAUD KEL.SUNGAI BARU KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,5	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
306	KAB.BELITUNG	DEPAN HOTEL SANTIKA DESA SIJUK KEC.SIJUK	KARHUTLA	1	-	0
307	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	1	-	0
308	KAB.BANGKA	LAHAN LINTAS TIMUR DESA REBO KEC.SUNGAILIAT	KARHUTLA	10	-	0
309	KOTA PANGKALPINANG	GG MIRAH DELIMA 1 AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	2	-	0
310	KAB.BANGKA SELATAN	PARIT 5 DESA KAPOSANG KEC.TOBOALI	KARHUTLA	0,01	-	0
311	KAB.BANGKA SELATAN	PARIT 5 JL. MASUKM PIJAT	KARHUTLA	0,01	-	0
312	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT SKIP 1 SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,01	-	0
313	KAB.BANGKA SELATAN	PT SAWIT RANGGAS	KARHUTLA	0,01	-	0
314	KAB.BANGKA SELATAN	GEDUNG SERBAGUNA JL.KOMPLEK PARIT 3 KEC.TOBOALI	KARHUTLA	0,01	-	0
315	KAB.BANGKA SELATAN	BELAKANG GEDUNG SERBA GUNA	KARHUTLA	1	-	0
316	KAB.BANGKA SELATAN	JL. PEMDAM BASEL	KARHUTLA	1	-	0
317	KAB.BANGKA BARAT	DESA MAYANG KEC. SIMPANG TERITIP KEC.MENTOK	KARHUTLA	2,5	-	0
318	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN URISAN JAYA DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
319	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.RAYA MANGGAR DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	5	-	0
320	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.PANTAI TANJUNG MUDONG DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	2	-	0
321	KOTA PANGKALPINANG	JL.GUSONG LAMA KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	-	-	0
322	KAB.BELITUNG	JL.RAYA SIJUK DEPAN RESORT WATUDAYA DUSUN ULU DESA SIJUK KEC.SIJUK	KARHUTLA	1	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
323	KAB.BELITUNG TIMUR	KERAMAT LAIS DUSUN JAYA DESA LENGANG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,01	-	0
324	KAB.BANGKA BARAT	KEBUN JATI KEL.KERANGGAN KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,5	-	0
325	KAB.BELITUNG TIMUR	MIRANG, DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,03	-	0
326	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN SEBERANG DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	4	-	0
327	KAB.BELITUNG	JL.KELUBI DESA LESUNG BATANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
328	KAB.BELITUNG	JL.DUKONG DESA DUKONG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
329	KAB.BELITUNG	JL.TANJUNG KELAYANG RT 97 RW 03 KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	3	-	0
330	KAB.BELITUNG	JL.GANG BULO DESA AIR KETEKOK KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,05	-	0
331	KOTA PANGKALPINANG	TAMAN MANDARA KEC.TAMAN SARI KOTA PANGKALPINANG	KARHUTLA	2	-	0
332	KAB.BANGKA SELATAN	PERUMAHAN GADING PERMAI	KARHUTLA	0,01	-	0
333	KAB.BELITUNG	JL.AIR KELUBI DALAM RT 27 RW 10	KARHUTLA	1	-	0
334	KAB.BELITUNG TIMUR	LASKAR PELANGI DESA LENGANG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,25	-	0
335	KAB.BELITUNG TIMUR	TANAH TEBOK DESA BURUNG MANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	5	-	0
336	KAB.BANGKA TENGAH	LAHAN EX KOBATIN KEC.KOBA	KARHUTLA	2	-	0
337	KAB.BANGKA BARAT	KEBUN KELAPA SAWIT JL. RAYA BELO LAUT RANGGAM DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	5	-	0
338	KAB.BANGKA BARAT	BELAKANG PERUMAHAN RSUD DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
339	KOTA PANGKALPINANG	AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	2	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
340	KAB.BELITUNG TIMUR	BUKIT SAMAK DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,02	-	0
341	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.BANDARA DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	0,04	-	0
342	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.PDAM DUSUN URISAN JAYA DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,01	-	0
343	KAB.BELITUNG TIMUR	JL. GG SEMUTOK DESA LALANG JAYA KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,05	-	0
344	KAB.BANGKA SELATAN	DESA BIKANG BELAKANG PASAR	KARHUTLA	0,01	-	0
345	KAB.BANGKA TENGAH	BEROK KEC.KOBA	KARHUTLA	1	-	0
346	KOTA PANGKALPINANG	JL.RAYA PASIR PADI RT 01 RW 01 KEL.TEMBERAN KEC. BUKIT INTAN	KARHUTLA	-	-	0
347	KOTA PANGKALPINANG	PERUMAHAN TANJUNG BUNGA KEL. TEMBERAN KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	-	-	0
348	KAB.BELITUNG	JL.ASTIKA RT 34 RW 04 KEL.SATU KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,01	-	0
349	KAB.BELITUNG	JL.PILANG KUBURAN DESA PILANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	3	-	0
350	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN MANGGRAWAN DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	9	-	0
351	KAB.BANGKA	JL.LINTAS TIMUR KEC.MERAWANG	KARHUTLA	0,5	-	0
352	KAB.BANGKA BARAT	DI DEPAN KANTOR BATU RAKIT KEL.TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
353	KAB.BANGKA	JL.LINTAS TIMUR SEBELUM RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI KEC.MERAWANG	KARHUTLA	0,5	-	0
354	KAB.BANGKA	JL.LINTAS TIMUR SEBELUM JEMBATAN EMAS KEC.MERAWANG	KARHUTLA	3	-	0
355	KOTA PANGKALPINANG	JL.GANDARIA 1 GG TOHPATI RT 07 RW 03 KEL. TUATUNU KEC. GERUNGGANG	KARHUTLA	-	-	0
356	KAB.BELITUNG	GANG ABADI KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
357	KAB.BELITUNG	DESA JURU SEBRANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0
358	KAB.BELITUNG	JL.AIR RAYA SIJUK KEC.SIJUK	KARHUTLA	3	-	0
359	KAB.BANGKA SELATAN	BELAKANG GEDUNG SLB	KARHUTLA	0,01	-	0
360	KAB.BANGKA BARAT	JLN. RAYA PELABUHAN TANJUNG KALIAN PANTAI BATU BERAHU KEL.TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	5	-	0
361	KAB.BELITUNG	JL.AIR KELUBI DALAM RT 23 RW 10 DESA LALANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	3	-	0
362	KAB.BANGKA BARAT	JLN. RAYA BELO LAUT BLKG SMPN 4 MENTOK DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	2	-	0
363	KAB.BELITUNG	JL.NANAS PERAWAS KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
364	KAB.BANGKA BARAT	JLN. RAYA BELO LAUT BLKG SMPN 4 MENTOK DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	2	-	0
365	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.AIK PISANG DESA BATU PENYU KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1	-	0
366	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	5	-	0
367	KOTA PANGKALPINANG	JL.CEMPAKA KEL.DUL KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	-	-	0
368	KAB.BANGKA SELATAN	BELAKANG PUSKESMAS TOBOALI	KARHUTLA	0,01	-	0
369	KAB.BELITUNG TIMUR	PANTAI TEROPONG DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
370	KAB.BANGKA	LINGKUNGAN RAMBAK RT 05 KEC.SUNGAILIAT	CUACA EKSTRIM	-	-	0
371	KAB.BANGKA TENGAH	JL.RAYA DESA GUNTUNG KEC.KOBA	KARHUTLA	0,4	-	0
372	KOTA PANGKALPINANG	JL. LINGKAR BARAT (GREENHILL RESIDENCE III KEL.TUATUNU KEC.GERUNGANG	KARHUTLA	-	-	0
373	KAB.BELITUNG TIMUR	LAHAN BELAKANG KAWASAN PERUMAHAN ISTANA PADANG DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	7	-	0
374	KAB.BELITUNG TIMUR	LAHAN KAWASAN DESA AIK KELIK KEC.DAMAR	KARHUTLA	2	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
375	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1	-	0
376	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN BELAKANG PLTD PADANG DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
377	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.DEWI SARTIKA RT 07 DUSUN CANGGU DESA LENGANG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1,5	-	0
378	KAB.BELITUNG	JL.SERMA ABDULLAH GANG BELIDA RT 16 RW 06 DESA AIR RAYA KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,5	-	0
379	KAB.BELITUNG	JL.RAYA PILANG PERUMAHAN PELANGI RESIDENCE RT 16 RW 04 DESA DUKONG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,5	-	0
380	KAB.BELITUNG	JIMBARAN JL.RAYA SIJUK DUSUN ULU DESA SIJUK KEC.SIJUK	KARHUTLA	2	-	0
381	KAB.BELITUNG	RT 18 RW 09 DESA AIR SAGA KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0
382	KAB.BELITUNG	VILLAGE TERUNTUM RT 06 RW 02 JL TANJUNG KELAYANG DESA KECIPUT KEC.SIJUK	KARHUTLA	1	-	0
383	KAB.BELITUNG	JL TARUNA RT 012 RW 06 (DEPAN POLSEK SIJUK LAMA)	KARHUTLA	2	-	0
384	KAB.BELITUNG	JL RAYA MEMBALONG DUSUN AIK MALIK DESA BANTAN KEC.MEMBALONG	KARHUTLA	1	-	0
385	KAB.BELITUNG	JL MUALIM 2 DUSUN AIK REDUNDONG RT 14 RW 5 DESA AIR MERBAU KEC TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,5	-	0
386	KAB.BANGKA SELATAN	DESA KAPOSONG JL.WORTEL	KARHUTLA	0,01	-	0
387	KAB.BELITUNG TIMUR	ISTANA PADANG DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,01	-	0
388	KAB.BELITUNG TIMUR	TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	15	-	0
389	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.RAYA MANGGAR DEPAN PT ILSM KEC.DAMAR	KARHUTLA	0,03	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
390	KAB.BANGKA BARAT	JLN. PAL 6 DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	2,5	-	0
391	KAB.BANGKA BARAT	DEPAN KANTOR SKB KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,5	-	0
392	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN SEBERANG DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	2,5	-	0
393	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN JAYA DESA LENGANG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	2	-	0
394	KAB.BANGKA SELATAN	BELAKANG PUSKESMAS TOBOALI	KARHUTLA	0,01	-	0
395	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN CANGGU DESA LENGANG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,03	-	0
396	KAB.BANGKA BARAT	SEBERANG JL.SPBUS DESA KACE KEC.MENDO	KARHUTLA	4	-	0
397	KAB.BELITUNG	JL.RAYA SIJUK KEC.SIJUK	KARHUTLA	1	-	0
398	KAB.BELITUNG	JL.POLSEK SIJUK LAMA DUSUN SIMPANG 4 DESA SIJUK KEC.SIJUK	KARHUTLA	2	-	0
399	KAB.BELITUNG	DESA JURU SEBRANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0
400	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN CANGGU DESA LENGANG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	25	-	0
401	KAB.BELITUNG TIMUR	SIMPANG JL.PAM DUSUN PANCUR 1 RT 4 RW 2 DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1,5	-	0
402	KAB.BELITUNG TIMUR	BUKIT SAMAK DUSUN BAN MOTOR DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1,2	-	0
403	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN BAN MOTOR DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	2	-	0
404	KAB.BELITUNG TIMUR	SABANG RUK DESA PEMBAHARUAN KEC.KELAPA KAMPIT	KARHUTLA	5	-	0
405	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN JEMBATAN AIR SANGOR DUSUN MANGGARAWAN DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	2	-	0
406	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN AIK RUAK DESA SIMPANG TIGA KEC.SIMPANG RENGGIANG	KARHUTLA	1	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
407	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN JAMBU BULOK DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	1	-	0
408	KAB.BELITUNG TIMUR	WILAYAH TANAH TEBOK DESA MANGKUBANG KEC.DAMAR	KARHUTLA	0,04	-	0
409	KAB.BELITUNG TIMUR	JL DAMAR DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	0,03	-	0
410	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.MANGGAR DUSUN DAMAR DESA PADANG KEC. MANGGAR	KARHUTLA	0,01	-	0
411	KAB.BELITUNG	JL. RANATI DESA TANJUNG TINGGI KEC.SIJUK	KARHUTLA	2	-	0
412	KAB.BELITUNG	DUSUN AIR RAYAK TIMUR 1 RT 28 RW 10 KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
413	KAB.BELITUNG	KAWASAN HKM DESA JURU SEBRANG KAB.BELITUNG	KARHUTLA	1	-	0
414	KOTA PANGKALPINANG	JL.KETAPANG RAYA, BACANG KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	2	-	0
415	KAB.BANGKA SELATAN	JL.CROSS KOLONG 2 KEL.TOBOALI KEC.TOBOALI (BELAKANG PUSKESMAS TOBOALI)	KARHUTLA	2	-	0
416	KAB.BANGKA SELATAN	BELAKANG PUSKEMAS TOBOALI	KARHUTLA	0,01	-	0
417	KAB.BANGKA SELATAN	PARIT 6	KARHUTLA	0,01	-	0
418	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN TANAH TEBOK DESA BURUNG MANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	3	-	0
419	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN SUMPING DESA BATU PENYU KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1,5	-	0
420	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.RAYA - MANGGAR KEC.DAMAR (BELAKANG GUDANG ACANG)	KARHUTLA	2	-	0
421	KAB.BELITUNG	DESA DUKONG JL.PASAR JOHAN KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
422	KAB.BELITUNG	TANJUNG TINGGI DESA KECIPUT KEC.SIJUK	KARHUTLA	3	-	0
423	KAB.BANGKA	JL.SINAR BARU TELAGA EMAS KEC.SUNGAILIAT	KARHUTLA	0,5	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
424	KAB.BANGKA SELATAN	JL.MAHONI	KARHUTLA	1	-	0
425	KAB.BANGKA SELATAN	JL.SMP MUHAMMADIYAH	KARHUTLA	1	-	0
426	KAB.BANGKA SELATAN	SAMPING SD DAN SMP MUHAMMADIYAH	KARHUTLA	0,01	-	0
427	KAB.BANGKA SELATAN	JALAN MAHONI TANAH MERAH LAPANGAN BOLA	KARHUTLA	0,02	-	0
428	KAB.BANGKA SELATAN	GANG KAPUK DEPAN DR. ANDRIAN	KARHUTLA	0,01	-	0
429	KAB.BANGKA SELATAN	BELAKANG SD 7 TOBOALI	KARHUTLA	0,01	-	0
430	KAB.BANGKA SELATAN	KAMPUNG SERDANG	KEBAKARAN	-	-	0
431	KOTA PANGKALPINANG	JL. PULAU PELEPAS KEL.PADANG BARU KEC. PANGKALAN BARU	KARHUTLA	-	-	0
432	KAB.BANGKA SELATAN	JL. MAHONI BELAKANG RUMAH ZAIKA	KARHUTLA	0,01	-	0
433	KAB.BANGKA SELATAN	JL.MAHONI ARAH KE LAPANGAN BOLA TIKUNG	KARHUTLA	0,02	-	0
434	KAB.BANGKA SELATAN	DI KUBURAN CINA DEPAN SPBU PUPUT	KARHUTLA	0,03	-	0
435	KAB.BANGKA BARAT	JLN. RAYA TANJUNG KALIAN BATU RAKIT KEL.TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	2,5	-	0
436	KAB.BANGKA SELATAN	DI GANG KAPUK DEPAN DR. ANDRIAN	KARHUTLA	0,01	-	0
437	KAB.BANGKA BARAT	JLN. LAPANGAN GOLF PAL 2 DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	3,5	-	0
438	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN LAP. GOLF MANGGAR, DUSUN BAN MOTOR DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
439	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN GANSE DESA GANTUNG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
440	KAB.BANGKA	KELURAHAN LUBUK KELIK KEC.SUNGAILIAT	KARHUTLA	2	-	0
441	KAB.BANGKA BARAT	SENANG HATI SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,01	-	0
442	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT SMK MUHAMMADIYAH SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
443	KAB.BANGKA BARAT	JLN. LAPANGAN GOLF (DISAMPING CAFE AL) DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,03	-	0
444	KAB.BANGKA BARAT	DESA MAYANG KEC. SIMPANG TERITIP KEC.MENTOK	KARHUTLA	2,3	-	0
445	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN PANCUR 1 DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	15	-	0
446	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.RAYA MANGGAR-GANTUNG DUSUN MANGGARAWAN DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,05	-	0
447	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.MANGGAR-DAMAR DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	0,04	-	0
448	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN AIR KELUMPANG DESA TANJUNG KELUMPANG KEC.SIMPANG PESAK	KARHUTLA	5	-	0
449	KAB.BELITUNG TIMUR	LAHAN KAWASAN EX DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1,2	-	0
450	KAB.BELITUNG	DESA PERAWAS RT 03 RW 01 KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0
451	KAB.BELITUNG	JL.PILANG DUSUN TELOK DALAM JURU SEBRANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
452	KAB.BELITUNG	JL. RANATI DEKAT LAPANGAN GOLF BLACK ROCKS DESA TANJUNG TINGGI KEC.SIJUK	KARHUTLA	1	-	0
453	KAB.BELITUNG	JL.PENGAYOMAN DESA PERAWAS SEBELUM MAKO BRIMOB KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,5	-	0
454	KAB.BELITUNG	JL.RAYA SIJUK SEBELAH NGELAKAR BEACH DUSUN ULU KEC.SIJUK	KARHUTLA	1	-	0
455	KAB.BANGKA	HUTAN LINDUNG LAHAN GAMBUT DUSUN TUING SEBELAH PT GPL MAPUR DESA MAPUR KEC.RIAU SILIP	KARHUTLA	7	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
456	KAB.BANGKA SELATAN	SAMPING SMA 1 TBI	KARHUTLA	0,01	-	0
457	KAB.BANGKA SELATAN	SAMPING SAWIT	KARHUTLA	0,01	-	0
458	KAB.BANGKA SELATAN	BELAKANG PUSKESMAS DESA	KARHUTLA	0,01	-	0
459	KOTA PANGKALPINANG	JL.PANTAI PASIR PADI KEL.TEMBERAN KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	20	-	0
460	KOTA PANGKALPINANG	JL.PASIR PADI KEL.TEMBERAN KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	-	-	0
461	KOTA PANGKALPINANG	JL.TAYIB KEL.DUL KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	-	-	0
462	KAB.BANGKA TENGAH	DESA BUKIT KIJANG KEC.NAMANG	KARHUTLA	20	-	0
463	KAB.BELITUNG TIMUR	WILAYAH PLTU MERAK DESA MEMPAYA KEC.DAMAR	KARHUTLA	1,5	-	0
464	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.BUJE DUSUN SUMPING DESA BATU PENYU KEC.GANTUNG	KARHUTLA	3	-	0
465	KAB.BELITUNG TIMUR	AREA DEPAN SMA PERGIB MANGGAR KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
466	KAB.BELITUNG	JL.BICONG DESA AIR MERBAU KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	3	-	0
467	KAB.BANGKA BARAT	GANG SKIP SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	6	-	0
468	KAB.BELITUNG	TANJUNG TINGGI BLACK ROCK KEC.SIJUK	KARHUTLA	1	-	0
469	KAB.BELITUNG	JALAN LETTDA ZAINUDIN ABA RT 18 RW 04 KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,04	-	0
470	KAB.BANGKA SELATAN	DESA TEMAYENG	KARHUTLA	0,01	-	0
471	KAB.BANGKA SELATAN	BELAKANG RUMAH SAKIT GADUNG	KARHUTLA	0,01	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
472	KAB.BANGKA SELATAN	BELAKANG KANTOR DEWAN BASEL	KEBAKARAN	0,05	-	0
473	KAB.BANGKA SELATAN	DESA AIR BARA	KEBAKARAN	-	-	0
474	KAB.BANGKA SELATAN	BAHER	KEBAKARAN	-	-	0
475	KAB.BANGKA TENGAH	DUSUN MULIA PENYAK KEC.KOBA	KARHUTLA	2	-	0
476	KOTA PANGKALPINANG	JL. KETAPANG KEC.PANGKAL BALAM	KARHUTLA	1	-	0
477	KOTA PANGKALPINANG	BELAKANG KANTOR LURAH AIR MAWAR KEL.AIR MAWAR KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	-	-	0
478	KOTA PANGKALPINANG	PERUMAHAN DEALOVA BLOK G KEL.TUATUNU KEC.GERUNGANG	KARHUTLA	-	-	0
479	KOTA PANGKALPINANG	JL.BATU KALDERA 1 BELAKANG GBC KEL.SEMABUNG LAMA KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	-	-	0
480	KAB.BELITUNG	DESA AIR SAGA GANG ARDI RT 18 RW 05 KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0
481	KAB.BELITUNG	JL.AIK BULO DESA AIR MERBAU KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0
482	KAB.BANGKA BARAT	DEPAN PERUMAHAN RSUD DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	3	-	0
483	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT KOLONG ARGO TIRTO SUNGAI BABI KEC.MENTOK	KARHUTLA	3,5	-	0
484	KAB.BANGKA BARAT	PAL 2 DEKAT PERPUSDA SUNGAI DAENG KEL.SUNGAI BARU KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,5	-	0
485	KAB.BANGKA BARAT	JL. LEDENG KEL.SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,5	-	0
486	KAB.BELITUNG	SAMPING PAMANDIAN DAYANG SERI PINAI JL.MELATI KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,04	-	0
487	KAB.BELITUNG	BALAI LATIHAN KERJA TANJUNG KELAYANG DESA KECIPUT KEC.SIJUK	KARHUTLA	5	-	0



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Bencana	Areal Terdampak (Ha)	Jumlah Korban	
					Mengungsi	Meninggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
488	KAB.BELITUNG	DUSUN RASAU DESA GANTUNG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	2	-	0
489	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN LAHAN PT SMM DESA SIMPANG TIGA KEC.SIMPANG RENGGIANG	KARHUTLA	125	-	0
490	KAB.BELITUNG TIMUR	GUNONG SERUK LIRING DUSUN LIRING DESA RENGGIANG KEC.SIMPANG RENGGIANG	KARHUTLA	5	-	0
491	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN JAMBU BULOK DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	1	-	0
492	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN LAHAN PELABUHAN SABANG RU DESA PEMBAHARUAN KEC.KELAPA KAMPIT	KARHUTLA	5	-	0
493	KAB.BANGKA SELATAN	PARIT 2 LEWAT SAMPING LINGKUP	KARHUTLA	0,02	-	0
494	KAB.BANGKA SELATAN	LAPANGAN BOLA MY MUZIR	KARHUTLA	0,01	-	0
495	KAB.BANGKA BARAT	DI SAMPING SDN 9 DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,7	-	0
496	KAB.BANGKA TENGAH	SAMPING STADION PEMDA KEC.KOBA	KARHUTLA	0,5	-	0
497	KOTA PANGKALPINANG	JL.FAJAR DALAM RT 02 RW 01 KEL. TEMBERAN KEC. BUKIT INTAN	KARHUTLA	-	-	0
498	KAB.BELITUNG	JL.NELOK KAWASAN BLK TANJUNG KELAYANG DESA KECIPUT KEC. SIJUK	KARHUTLA	3	-	0
499	KAB.BANGKA BARAT	BELAKANG SMKN 1 KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,5	-	0
500	KAB.BELITUNG	JL.RAYA PEGANTUNGAN PELABUHAN TANJUNG BATU DUSUN SUGE DESA PERGANTUNGAN KEC.BADAU	KARHUTLA	1	-	0
501	KAB.BELITUNG	PERUNAHAN BILITON REGENCY JL CEMPEDAK RT 42 RW 14 DESA AIK RAYAK KEC.TANUNG PANDAN	KARHUTLA	0,5	-	0
502	KAB.BELITUNG TIMUR	LAHAN KAWASAN DESA LENGGANG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	4	-	0
503	KAB.BELITUNG TIMUR	LAHAN KAWASAN BELAKANG PERUMAHAN SUBRISE GARDEN DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	3	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
504	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN TANGSI DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,01	-	0
505	KAB.BELITUNG TIMUR	AIK RUTAN DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	0,01	-	0
506	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.PANTAI MIRANG DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,01	-	0
507	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN URISAN JAYA DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,01	-	0
508	KOTA PANGKALPINANG	JL.KEMANG PERMATA KOMPLEKS PNS TAMPUK PINANG PURA KEL.AIR KEPALA TUJUH KEC.GERUNGGANG	KARHUTLA	-	-	0
509	KOTA PANGKALPINANG	JL.KEMANG PERMATA RT 08 RW 03 KEL.AIR KEPALA 7 KEL.SRIWIJAYA	KARHUTLA	0,02	-	0
510	KAB.BELITUNG	PEGARUN DESA SELUMAR KEC.SIJUK	KARHUTLA	3	-	0
511	KAB.BELITUNG	MARTAPURA GG CENGKEH 2 KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0
512	KAB.BELITUNG	DUSUN PANCUR DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
513	KAB.BELITUNG	JL.JAGUNG 2 BICONG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
514	KAB.BELITUNG	LAHAN TNI AD KERAMIK KEL.LESUNG BATANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
515	KAB.BANGKA BARAT	GG LEDENG RT. 04 SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,83	-	0
516	KAB.BANGKA BARAT	DI DEKAT GANG LAPANGAN TEMBAK THE BUKIT SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
517	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT BELO KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
518	KOTA PANGKALPINANG	JL.AIR MAWAR KEL.AIR MAWAR KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	-	-	0
519	KOTA PANGKALPINANG	JL.PULAU BANGKA KEL.BACANG KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	-	-	0
520	KOTA PANGKALPINANG	KEL.AIR KEPALA TUJUH KEC.GERUNGGANG	KARHUTLA	-	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
521	KOTA PANGKALPINANG	KEL.AIR KEPALA TUJUH KEC.GERUNGGANG	KARHUTLA	-	-	0
522	KAB.BELITUNG	LAHAN KAPLING PILANG JL.KELUARGA KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,05	-	0
523	KAB.BELITUNG	PERUMAHAN PERMATA JL.PERMATA 2 KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,06	-	0
524	KAB.BELITUNG	AIK RANGGONG RT 25 RW 15 DESA AIR SAGA KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0
525	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN MANGGARAWAN BELAKANG SMKN 1 MANGGAR DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,5	-	0
526	KAB.BELITUNG TIMUR	PERUMAHAN TRANSMIGRASI DANAU NUJAU DSN GANSE DESA GANTUNG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1,5	-	0
527	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.MANGGAR DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	3	-	0
528	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA LIMBUNGAN KEC.GANTUNG	KARHUTLA	-	-	0
529	KAB.BANGKA TENGAH	DESA KURAU KEC.KOBA KAB.BANGKA TENGAH	KARHUTLA	3	-	0
530	KAB.BANGKA TENGAH	DESA PENYAK KEC.KOBA	KARHUTLA	5	-	0
531	KAB.BANGKA BARAT	JL. JENDERAL SUDIRMAN KANTOR SAMPING SYAHBANDAR KEL.TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	2	-	0
532	KAB.BANGKA BARAT	DUSUN 02 DESA BELO LAUT KEC.MENTOK BARAT	KARHUTLA	1	-	0
533	KOTA PANGKALPINANG	JL.PULAU KETAWAI KEL.SINAR BULAN KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	-	-	0
534	KOTA PANGKALPINANG	KELURAHAN TUATUNU KEC.GERUNGGANG	KARHUTLA	-	-	0
535	KAB.BELITUNG	JL. RAYA MEMBALONG DUSUN AIK MALIK DESA BANTAN RT 08 KEC.MEMBALONG	KARHUTLA	1	-	0
536	KAB.BELITUNG	KAMPUNG ILIR DESA BANTAN KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
537	KAB.BELITUNG	PERUMAHAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA JL.TPA GUNUNG SADAI DESA JURU SEBRANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
538	KAB.BELITUNG	AIR BULO RT 21 RW 04 DESA AIR PELEMPANG JAYA KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,5	-	0
539	KAB.BELITUNG	JL.RAYA DESA JURU SEBRANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	3	-	0
540	KAB.BELITUNG	JL.KELAPA GADING RT 19 RW 08 KEL.PANGKAL LALANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,5	-	0
541	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.SIMPANG RENGGIANG DESA LENGANG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	-	-	0
542	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN DAMAI BARU DESA MANGKUBANG KEC.DAMAR	KARHUTLA	1	-	0
543	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.TENGAH DUSUN PANCUR DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,5	-	0
544	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.PARIT GARAM DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,3	-	0
545	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.PARIT TEBU DUSUN LIDUN DESA BATU PENYU KEC.GANTUNG	KARHUTLA	-	-	0
546	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.SIMPANG RENGGIANG DESA LENGANG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	2	-	0
547	KAB.BANGKA TENGAH	SINAR LAUT KEL.PADANG MULIA KEC.KOBA	KARHUTLA	2,5	-	0
548	KAB.BANGKA TENGAH	KOBATIN KEC.KOBA	KARHUTLA	2	-	0
549	KAB.BANGKA TENGAH	BELAKANG PASAR MODERN KEC.KOBA	KARHUTLA	5	-	0
550	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT KOLAM PDAM KEL.SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	2,2	-	0
551	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT KUBURAN KERAMAT KEL.TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,3	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
552	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT KEBUN SIMPANG TERABEK DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	5	-	0
553	KAB.BANGKA BARAT	DI DEPAN KANTOR SKB DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,9	-	0
554	KAB.BANGKA BARAT	JALAN RAYA TERABEK DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,9	-	0
555	KOTA PANGKALPINANG	JL.KULAN KAMPAK KEL.TUATUNU KEC.GERUNGGANG	KARHUTLA	-	-	0
556	KOTA PANGKALPINANG	KEL.PASIR PUTIH KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	-	-	0
557	KOTA PANGKALPINANG	JL.TAIB KEL.DUL KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	-	-	0
558	KAB.BELITUNG	JL.BLK TANJUNG KELAYANG KEC.SIJUK	KARHUTLA	2	-	0
559	KAB.BELITUNG	JL.GUNUNG SADAI PILANG DESA DUKONG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
560	KAB.BELITUNG	JL.AIK RANGGONG DESA PELEMPANG JAYA KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	3	-	0
561	KAB.BELITUNG	DESA JURU SEBRANG RT 07 RW 04 KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
562	KAB.BELITUNG	JL.RAYA BADAU KEC.BADAU	KARHUTLA	20	-	0
563	KAB.BELITUNG	PERUMAHAN KODIM KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,01	-	0
564	KAB.BELITUNG	JL.GUNUNG SADAI PILANG DESA DUKONG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
565	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA SUKAMANDI DEKAT SLB KEC.DAMAR	KARHUTLA	0,1	-	0
566	KAB.BELITUNG TIMUR	AIK CEMANG DUSUN BARU DESA BARU KEC.GANTUNG	KARHUTLA	2,5	-	0
567	KAB.BELITUNG TIMUR	MODONG DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	2	-	0
568	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.MANGGAR DAMAR LAHAN KOSONG DEPAN SLB KEC. DAMAR	KARHUTLA	3	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
569	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN TANAH TEBOK DESA BURUNG MANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	0,7	-	0
570	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN PADANG 1 DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
571	KAB.BANGKA BARAT	DI DEPAN GOR GRAHA APARATUR PEMDA DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,5	-	0
572	KAB.BANGKA BARAT	JALAN RAYA TERABEK DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,5	-	0
573	KAB.BANGKA BARAT	JALAN DUSUN 4 RANGGAM DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,5	-	0
574	KAB.BANGKA BARAT	KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA	KARHUTLA	1	-	0
575	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT DUSUN PAL 4 DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
576	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT SKIP SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	2	-	0
577	KOTA PANGKALPINANG	JL.SALAM RT 003 RW 001 KEL.KACANG PEDANG KEC.GERUNGGANG	KARHUTLA	-	-	0
578	KAB.BANGKA TENGAH	SAMPING SMKN 2 KOBA KEC.KOBA	KARHUTLA	1,5	-	0
579	KAB.BELITUNG	JL.GUNUNG SADAI PILANG DESA DUKONG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
580	KAB.BELITUNG	JL.MEMBALONG KELEKAK USANG DESA PERAWAS KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,05	-	0
581	KAB.BELITUNG	JL. TANJUNG KELAYANG KEC.SIJUK	KARHUTLA	1	-	0
582	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA BURUNG MANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	0,5	-	0
583	KAB.BELITUNG TIMUR	LAHAN BENDUNGAN PICE KECIL DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	15	-	0
584	KAB.BELITUNG TIMUR	BUKIT SAMAK DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,5	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
585	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN MIRANG DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,5	-	0
586	KAB.BELITUNG TIMUR	GARUMEDANG DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	1	-	0
587	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN SEBRANG DESA SELINSING LAHAN DEPAN STADION BOLA KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,2	-	0
588	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,2	-	0
589	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT KUBURAN BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
590	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT SKIP PAL 2 SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	2	-	0
591	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT SKIP SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
592	KAB.BANGKA BARAT	DI BELAKANG SD IT, DUSUN PAL 4 DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,5	-	0
593	KAB.BANGKA	JL.RAWA INDAH (DEKAT PDAM LAMA) DESA KACE KEC.MENDO BARAT	KARHUTLA		-	0
594	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN GANG LIBUT DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	0,1	-	0
595	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.PERSIKAL DESA MENTAWAK KEC.KELAPA KAMPIT	KARHUTLA	0,2	-	0
596	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.MERANTIK DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,1	-	0
597	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.A.YANI DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,1	-	0
598	KAB.BANGKA BARAT	JALAN TANJUNG KALIAN, DISAMPING SMPN 2 KEL.TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,1	-	0
599	KAB.BANGKA BARAT	DI DEPAN GORONG GORONG, PANTAI BATU RAKIT KEL.TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	4	-	0
600	KAB.BANGKA BARAT	BELAKANG GARDU INDUK PT. WIKA GG. ASMARA KEL.TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	1,7	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
601	KAB.BANGKA BARAT	JALAN RAYA TANJUNG KALIAN, MENTOK ASIN KEL.TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	2	-	0
602	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN SUKAMANDI RT 07 DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	0,05	-	0
603	KAB.BANGKA BARAT	PAL 2 GG. SKIP SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
604	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT JALAN LAPANGAN GOLF, PAL 2 BELAKANG SLB DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
605	KAB.BELITUNG	JL.SEBERANG DESA JURU SEBERANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0
606	KAB.BELITUNG	JL.MELATI GUNONG KELIS AIK PASER DESA DUKONG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
607	KOTA PANGKALPINANG	JL.KETAPANG RAYA KEL.BACANG KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	2	-	0
608	KAB.BELITUNG TIMUR	KULONG KERO DESA PADANG KEC.MANGGAR (DEKAT PERUMAHAN ISTANA PADANG	KARHUTLA	0,5	-	0
609	KAB.BELITUNG	JL.SKIP 2 RT 05 RW 02 DESA AIR MERBAU KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,01	-	0
610	KAB.BELITUNG	JL.JEND. SUDIRMAN DESA PERAWAS KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	3	-	0
611	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT JALAN RANGGM DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	3,8	-	0
612	KAB.BANGKA BARAT	JALAN KERAMAT, PAIT JAYA KEL.TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	1	-	0
613	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT JALAN SKIP SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,7	-	0
614	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT GG. ASMARA KEL.TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	3	-	0
615	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.PANTAI TANJUNG MIRANG DESA LALANG JAYA KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
616	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.DEWI SARTIKA DESA LENGANG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
617	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.PANTAI MUDONG DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
618	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN LAHAN TPA TRAFU MAYANG DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	4	-	0
619	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.AIK PIRIT DESA MAYANG KEC.KELAPA KAMPIT	KARHUTLA	1	-	0
620	KAB.BELITUNG	JL.AIR PELEMPANG RT 20 RW 03 DESA PELEMPANG JAYA KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,5	-	0
621	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT JALAN TANJUNG KALIAN KEL.TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	2	-	0
622	KAB.BELITUNG TIMUR	PULAU DAPOR RT 08 DUSUN SELUMAR DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	9,6	-	0
623	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.AIK PIRIT DUSUN PENIROKAN DESA MAYANG KEC.KELAPA KAMPIT	KARHUTLA	0,7	-	0
624	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.TELKOM DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,1	-	0
625	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.PARIT GARAM DESA SELINGSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,4	-	0
626	KAB.BELITUNG	JL.PINTAS AIR SERU KE BANDARA DESA AIR SERU KEC.SIJUK	KARHUTLA	3	-	0
627	KAB.BELITUNG	JL.AIR BULO DESA AIR MERBAU KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
628	KAB.BANGKA TENGAH	DANAU KAOLIN DESA NIBUNG KEC.KOBA	KARHUTLA	1,5	-	0
629	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT TANGGA SERIBU KEL.TANJUNG KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,7	-	0
630	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT PAL 2 KEL.SUNGAI BARU KEC.MENTOK	KARHUTLA	4,7	-	0
631	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT KADUR DESA BELO LAUT KEC.MENTOK	KARHUTLA	0,8	-	0
632	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT JALAN SUNGAI BABI SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	2	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
633	KAB.BANGKA BARAT	DEKAT THE BUKIT BELAKANG GARDU INDUK SUNGAI DAENG KEC.MENTOK	KARHUTLA	3	-	0
634	KAB.BELITUNG	JL.RAYA SIJUK PERUMAHAN GRIYA PERMATA KEC.SIJUK	KARHUTLA	3	-	0
635	KAB.BELITUNG	JL.RAYA MEMBALONG DESA BANTAN KEC.MEMBALONG	KARHUTLA	10	-	0
636	KAB.BELITUNG	JL.DUREN RT 19 RW 05 DUSUN KAYU MANIS DESA AIR KETEKOK KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	3	-	0
637	KAB.BELITUNG	JL.MURAI DESA AIK RAYAK KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,01	-	0
638	KAB.BELITUNG	JL.RAYA MEMBALONG DESA BANTAN	KARHUTLA	10	-	0
639	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN BATU BESI DAMAR DESA BURUNG MANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	0,5	-	0
640	KAB.BELITUNG TIMUR	RT 02 DUSUN BAN MOTOR DESA LALANG KEC.MANGGAR (BELAKANG SDN 1 MANGGAR)	KARHUTLA	0,2	-	0
641	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN JAMBU BULOK DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	0,2	-	0
642	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA KURNIA JAYA KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,5	-	0
643	KAB.BELITUNG	SAMPING PAM DESA AIR SAGA KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
644	KAB.BELITUNG	PERUMAHAN PELANGI RESIDENCE RT 19 RW DESA DUKONG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	4	-	0
645	KAB.BELITUNG	TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA GUNUNG SADAI) DESA JURU SEBRANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
646	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.RAYA MANGGAR-GANTUNG DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,5	-	0
647	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA SIMPANG PESAK KEC.SIMPANG PESAK	KARHUTLA	4	-	0
648	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA BATU PENYU KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,5	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
649	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.KUNDOR DUSUN SAMBONG DESA BATU PENYU KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,5	-	0
650	KAB.BELITUNG TIMUR	TRAFO MAYANG DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	1	-	0
651	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.BUJE RT 09 DESA BATU PENYU KEC.GANTUNG	KARHUTLA	2	-	0
652	KAB.BELITUNG TIMUR	JAMBU MENTE DESA SUKA MANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	1	-	0
653	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN MANGGARAWAN DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,1	-	0
654	KAB.BELITUNG	JL.TEMBUS BICONG DESA AIR MERBAU KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	5	-	0
655	KAB.BELITUNG	JL.AIR RANGGONG DESA AIR SAGA KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	10	-	0
656	KAB.BELITUNG	JL.TANJUNG KELAYANG DESA BATU ITAM KEC.SIJUK	KARHUTLA	1	-	0
657	KAB.BELITUNG	JL.TANJUNG KELAYANG DESA BATU ITAM KEC.SIJUK	KARHUTLA	1	-	0
658	KAB.BELITUNG	JL.PADAT KARYA DALAM DESA AIR MERBAU KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
659	KAB.BELITUNG	DESA DUKONG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
660	KAB.BANGKA SELATAN	DESA RANGGAS KEC.AIR GEGAS	KARHUTLA	3	-	0
661	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN MIRANG DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,02	-	0
662	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.BANDARA DESA MEMPAYA KEC.DAMAR	KARHUTLA	1	-	0
663	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA LALANG KEC.MANGGAR (DEKAT TANJAKAN EC MANGGAR)	KARHUTLA	0,06	-	0
664	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.RAYA MANGGAR GANTUNG DUSUN MANGGARAWAN DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
665	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN SELUMAR DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,5	-	0
666	KAB.BANGKA TENGAH	PINGGIR JALAN DESA KAYU BESI KEC.NAMANG	KARHUTLA	1	-	0
667	KAB.BELITUNG	JL.BUKIT RT 02 RW 03 KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
668	KAB.BELITUNG	JL.RAYA BADAU KEC.MEMBALONG	KARHUTLA	2	-	0
669	KAB.BELITUNG	JL.PEMUDA RT 15 RW 04 KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
670	KAB.BELITUNG	JL.RANATI TANJUNG TINGGI KEC.SIJUK	KARHUTLA	5	-	0
671	KAB.BELITUNG	JL.BUKIT BERAHU RT 06 RW 02	KARHUTLA	3	-	0
672	KAB.BELITUNG	JL.RANATI TANJUNG TINGGI KEC.SIJUK	KARHUTLA	4	-	0
673	KAB.BELITUNG	DUSUN MUNSANG DESA SUNGAI PADANG KEC.SIJUK	KARHUTLA	4	-	0
674	KAB.BELITUNG	JL.SIJUK DUSUN MUNSANG DESA SUNGAI PADANG KEC.SIJUK	KARHUTLA	2	-	0
675	KAB.BANGKA SELATAN	JL.SIMPANG TIGA DESA PASIR PUTIH KEC.TUKAK SADAI	KARHUTLA	0,5	-	0
676	KAB.BANGKA SELATAN	JL GG GARUDA KEC.TOBOALI	KARHUTLA	2	-	0
677	KAB.BANGKA SELATAN	JL. PARIT TIGA	KARHUTLA	15	-	0
678	KAB.BANGKA SELATAN	JL.RIAS KEC.TOBOALI	KARHUTLA	1	-	0
679	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1	-	0
680	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.AIK SAGU DESA MAYANG KEC.KELAPA KAMPIT	KARHUTLA	0,02	-	0
681	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.RAYA MANGGAR - GANTUNG DSN.MANGGARAWAN DESA PADANG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	2	-	0
682	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.RAYA MANGGAR - GANTUNG DESA PADANG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	2	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
683	KAB.BANGKA TENGAH	DESA PEDINDANG KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	5	-	0
684	KAB.BANGKA TENGAH	DESA BELULUK KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	3	-	0
685	KAB.BELITUNG	JL.RANATI (SEBELUM SAUNG 99) DESA TANJUNG TINGGI KEC.SIJUK	KARHUTLA	4	-	0
686	KAB.BELITUNG	JL.PELABUHAN TANJUNG BATU DESA PEGANTUNGAN KEC.BADAU	KARHUTLA	1	-	0
687	KOTA PANGKALPINANG	JL. TELUK BAYUR RT 09 RW 03 KEL.PASIR PUTIH KEC.RANGKUI	KARHUTLA	6	-	0
688	KOTA PANGKALPINANG	JL.TELUK BAYUR RT 009 RW 003 KEL.PASIR PUTIH KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	2	-	0
689	KAB.BANGKA SELATAN	DESA RIAS KEC.TOBOALI	KARHUTLA	35	-	0
690	KAB.BANGKA SELATAN	SAMPING RUMAH DINAS SEKDA KOMPLEKS PERKANTORAN PARIT 3 KEC.TOBOALI	KARHUTLA		-	0
691	KAB.BANGKA SELATAN	SAMPING KANTOR DPRD KOMPLEKS PERKANTORAN PARIT 3 KEC.TOBOALI	KARHUTLA		-	0
692	KOTA PANGKALPINANG	KETAPANG KEC.PANGKAL BALAM	KARHUTLA	7	-	0
693	KOTA PANGKALPINANG	PERUMAHAN TAMAN TANJUNG BUNGA CLUSTER ANGGREK KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	0,5	-	0
694	KOTA PANGKALPINANG	JL.TELUK BAYUR RT 009 RW 003 KEL.PASIR PUTIH KEC.RANGKUI	KARHUTLA	0,5	-	0
695	KAB.BELITUNG	JL.DUKONG DALAM RT 08 RW 05 DESA DUKONG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,04	-	0
696	KAB.BELITUNG	JL KAYU MANIS DESA AIR MERBAU KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	5	-	0
697	KAB.BELITUNG	JL.AIR RANGGONG DESA AIR SAGA KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,1	-	0
698	KAB.BELITUNG	JL.AIR LENGKUAS RT 11 RW 04 DUSUN AIR RAYA UJUNG I DESA PERAWAS KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
699	KAB.BELITUNG	JL.PANTAI SUNGAI SAMAK DESA SUNGAI SAMAK KEC.BADAU	KARHUTLA	0,01	-	0
700	KAB.BELITUNG	JL.MUALIM DALAM DESA AIR MERBAU KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,5	-	0
701	KAB.BELITUNG	JL.SEBRANG DEKAT GERBANG HKM DESA JURU SEBRANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	6	-	0
702	KAB.BELITUNG TIMUR	KAMPUNG REKLAMASI DUSUN SELUMAR DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,3	-	0
703	KAB.BANGKA TENGAH	DESA KP.JERUK KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	2	-	0
704	KOTA PANGKALPINANG	BELAKANG PERUMAHAN CLUSTER ANGGREK KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	4,5	-	0
705	KOTA PANGKALPINANG	KAWASAN PERUMAHAN DAMAI LESTARI 6 KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	5	-	0
706	KAB.BANGKA	LAHAN BUKIT SAKBUK LINGKUNGAN TELUK UBER KEC.SUNGAILIAT	KARHUTLA	4	-	0
707	KAB.BANGKA TENGAH	JL.PINGGIR PANTAI SUMUR 7 KEC.KOBA	KARHUTLA	0,5	-	0
708	KAB.BANGKA SELATAN	KAWASAN KANTOR DPRD KEC.TOBOALI	KARHUTLA	1	-	0
709	KOTA PANGKALPINANG	JL.PULAU GELASA AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	3	-	0
710	KOTA PANGKALPINANG	JL. TUATUNU KEC.GERUNGANG	KARHUTLA	0,02	-	0
711	KOTA PANGKALPINANG	BELAKANG BPK KEL.SINAR BULAN KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	1	-	0
712	KOTA PANGKALPINANG	SAMPING BI KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	2	-	0
713	KAB.BANGKA TENGAH	JL.DUSUN PAL 4 KEC.KOBA	KARHUTLA	15	-	0
714	KOTA PANGKALPINANG	JL.KAMPAK DALAM KEL.TUATUNU KEC.GERUNGANG	KARHUTLA	1	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
715	KOTA PANGKALPINANG	JL.RAYA PASIR PADI KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	7	-	0
716	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN BARU DESA GANTUNG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,2	-	0
717	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN JAYA DESA LENGANG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1	-	0
718	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN PADANG DESA JANGKAR ASAM KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,1	-	0
719	KAB.BELITUNG TIMUR	PANTAI LALANG DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,5	-	0
720	KAB.BELITUNG	JL.SIJUK DEKAT HOTEL SANTIKA DESA TANJUNG TINGGI KEC.SIJUK	KARHUTLA	1	-	0
721	KAB.BANGKA TENGAH	LAHAN SAWIT RT 4 DESA NIBUNG KEC.KOBA	KARHUTLA	2	-	0
722	KAB.BANGKA TENGAH	KOLONG MERBUK KEL.BEROK KEC.KOBA	KARHUTLA	1	-	0
723	KAB.BANGKA TENGAH	KEL.DUL KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	1	-	0
724	KAB.BANGKA TENGAH	JL KEARAH KULUR KEL.PADANG MULIA KEC.KOBA	KARHUTLA	1	-	0
725	KAB.BANGKA TENGAH	LAHAN PINGGIR JL KULUR KEC.KOBA	KARHUTLA	0,5	-	0
726	KOTA PANGKALPINANG	JL. PERUMAHAN PNS TUATUNU KEL.TUATUNU INDAH KEC.GERUNGANG	KARHUTLA	6	-	0
727	KAB.BANGKA TENGAH	BELAKANG PASAR MODERN KEC.KOBA	KARHUTLA	0,5	-	0
728	KAB.BANGKA TENGAH	BELAKANG KANTOR BAZNAS KEC.KOBA	KARHUTLA	0,5	-	0
729	KOTA PANGKALPINANG	JL.PULAU GELASA KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	2	-	0
730	KOTA PANGKALPINANG	BELAKANG VIHARA SATYA DHARMA TANJUNG BUNGA KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	2	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
731	KOTA PANGKALPINANG	BELAKANG VIHARA SATYA DHARMA TANJUNG BUNGA KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	0,01	-	0
732	KOTA PANGKALPINANG	KANTOR BPPW BABEL JL.PULAU BANGKA PADANG BARU KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	1	-	0
733	KOTA PANGKALPINANG	JALUR 2 ARAH PERKANTORAN PROVINSI KEP.BANGKA BELITUNG	KARHUTLA	5	-	0
734	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA AIK MADU KEC.SIMPANG RENGGIANG	KARHUTLA	5	-	0
735	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN MIRANG DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
736	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA RENGGIANG KEC.SIMPANG RENGGIANG	KARHUTLA	0,5	-	0
737	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.DUSUN BAN MOTOR RT 004 DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
738	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.LASKAR PELANGI RT 03 DESA LENGANG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1,5	-	0
739	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.PDAM DUSUN PANCUR DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
740	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.PADAT KARYA RT 08 DUSUN RASAU KEC.GANTUNG	KARHUTLA	5	-	0
741	KAB.BANGKA TENGAH	DESA KAMPUNG JERUK KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	1	-	0
742	KAB.BANGKA TENGAH	JL.PULAU PELEPAS DESA BELULUK KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	6	-	0
743	KAB.BANGKA TENGAH	DESA NIBUNG KEC.KOBA	KARHUTLA	1	-	0
744	KAB.BANGKA TENGAH	BELAKANG PASAR KOBA KEC.KOBA	KARHUTLA	0,5	-	0
745	KAB.BELITUNG TIMUR	MIRANG,DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	3,5	-	0
746	KAB.BELITUNG TIMUR	EKS.GALANGAN KAPAL (dok) DESA BARU KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
747	KAB.BELITUNG TIMUR	SMA PERGIB MANGGAR DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,1	-	0
748	KAB.BELITUNG TIMUR	RT 09 DUSUN SELUMAR DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1	-	0
749	KAB.BANGKA TENGAH	DUSUN SILOK KEL.DUL KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	0,05	-	0
750	KAB.BANGKA TENGAH	JL.KELENTENG DESA PEDINDANG KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	4	-	0
751	KAB.BANGKA TENGAH	HUTAN PINGGIR JALAN DI DESA KURAU KEC.KOBA	KARHUTLA	4	-	0
752	KAB.BELITUNG	BELAKANG TK NEGERI PEGANTUNGAN KM 30 DESA PEGANTUNGAN KEC.BADAU	KARHUTLA	2	-	0
753	KAB.BELITUNG	LAHAN GANG BELIDA RT 16 RW 06 DESA AIR RAYAK KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,05	-	0
754	KOTA PANGKALPINANG	BELAKANG VIHARA SATYA DHARMA TANJUNG BUNGA KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	2	-	0
755	KOTA PANGKALPINANG	BELAKANG VIHARA SATYA DHARMA TANJUNG BUNGA KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	1	-	0
756	KOTA PANGKALPINANG	BELAKANG BI KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	0,5	-	0
757	KAB.BANGKA TENGAH	SIMPANG JONGKONG KEC.KOBA	KARHUTLA	0,5	-	0
758	KAB.BELITUNG TIMUR	LAHAN PERTANIAN PT.SMM DESA BALOK KEC.DENDANG	KARHUTLA	5	-	0
759	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN SEBRANG DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,04	-	0
760	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN LAHAN 1.7 DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	12	-	0
761	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN PAYAK 1 DESA MEMPAYA KEC.DAMAR	KARHUTLA	8	-	0
762	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.TENGAH TANJUNG PANDAN - MANGGAR, DESA AIR MADU KEC.SIMPANG RENGGIANG	KARHUTLA	10	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
763	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.BANDARA - MANGGAR DESA AIR KELIK KEC.DAMAR (DEKAT SMPN2 DAMAR)	KARHUTLA	2	-	0
764	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN LAHAN 1.7 DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,5	-	0
765	KAB.BELITUNG	RT 017 RW 004 JL.MUALIM 2 GANG MUALIM 1 DESA AIR PELEMPANG JAYA	KARHUTLA		-	0
766	KAB.BELITUNG	JL.GUNUNG KELIS RT 009 RW 003 DESA DUKONG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
767	KAB.BELITUNG	PERKEBUNAN SAWIT PT REBINMAS JAYA DESA AIR BATU BUDING KEC.BADAU	KARHUTLA	4	-	0
768	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN DANAU NUJAU DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1	-	0
769	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN JL RAYA MANGGAR DESA SELINSING KEC.GANTUNG (BELAKANG BENGKEL ASEN)	KARHUTLA	0,01	-	0
770	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN JL.MERANTIH DUSUN SELUMAR DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	3	-	0
771	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN JL.MUTEN DESA MENGKUBANG KEC.DAMAR	KARHUTLA	1	-	0
772	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN JL.EX TAMBANG 1.7 DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,5	-	0
773	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN JL.LUBUK TAPA DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1	-	0
774	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN DESA MENGKUBANG KEC.DAMAR	KARHUTLA	0,5	-	0
775	KAB.BANGKA TENGAH	DUSUN SADAP KEC.LUBUK BESAR	KARHUTLA	1,5	-	0
776	KAB.BANGKA TENGAH	JL.LINGKAR KAPLING KEC.KOBA	KARHUTLA	7	-	0
777	KAB.BANGKA TENGAH	JEMBATAN NIBUNG KEC.KOBA	KARHUTLA	1	-	0
778	KAB.BELITUNG TIMUR	KAMPUNG REKLAMASI DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
779	KAB.BELITUNG TIMUR	TOWER DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	3	-	0
780	KAB.BELITUNG TIMUR	SAMPING KANTOR CAMAT KEC.DAMAR	KARHUTLA	1,5	-	0
781	KAB.BELITUNG TIMUR	RT 09 DUSUN SELUMAR DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1	-	0
782	KAB.BANGKA TENGAH	JL.TAIB KEL.DUL KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	0,5	-	0
783	KAB.BANGKA TENGAH	DESA PENYAK KEC.KOBA	KARHUTLA	2	-	0
784	KAB.BANGKA SELATAN	DEPAN SDN 15 DESA SERDANG KEC.TOBOALI	KARHUTLA	0,5	-	0
785	KAB.BELITUNG	JL.MUALIM 2 DESA AIR MERBAU KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
786	KAB.BELITUNG	MUNSANG, JL.SUNGAI PADANG DESA SUNGAI PADANG KEC.SIJUK	KARHUTLA	2	-	0
787	KAB.BELITUNG	JL.AIR BULO DESA PERAWAS KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,08	-	0
788	KAB.BELITUNG	JL.KAPTEN SARIDIN KEL.PAAL SATU KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,06	-	0
789	KAB.BELITUNG	SIMPANG BICONG DESA AIR MERBAU KEC.TANJUNG	KARHUTLA	0,01	-	0
790	KAB.BELITUNG	LAHAN JL.KEMANG MANIS RT 5 RW 20 KEL.PANGKAL LALANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,05	-	0
791	KAB.BELITUNG	JL.RAYA MEMBALONG RT 01 RW 02 DESA CERUCOK KEC.BADAU	KARHUTLA	1	-	0
792	KAB.BANGKA TENGAH	KELURAHAN ARUNG DALAM KEC.KOBA	KARHUTLA	0,5	-	0
793	KAB.BANGKA TENGAH	JL.CEMPAKA KEL.DUL KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	0,5	-	0
794	KAB.BANGKA TENGAH	SIMPANG JONGKONG KEC.KOBA	KARHUTLA	3	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
795	KAB.BANGKA TENGAH	LAHAN BELAKANG PABRIK UBI KEC.KOBA	KARHUTLA	2	-	0
796	KAB.BANGKA TENGAH	JL.PULAU PELEPAS DEPAN BANDARA BARU KEC.PADANG BARU	KARHUTLA	5	-	0
797	KOTA PANGKALPINANG	JL.NILAM RAYA KEL.BACANG KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	0,1	-	0
798	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN LAHAN STADION RIMBA PELAWAN JL.BANDARA MANGGAR DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	8	-	0
799	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN HUTAN KOTA JL.BANDARA MANGGAR DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	5	-	0
800	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.BANDARA-MANGGAR DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR (SAMPING SLB NEGERI MANGGAR)	KARHUTLA	2	-	0
801	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA PEMBAHARUAN KEC.KELAPA KAMPIT	KARHUTLA	2	-	0
802	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.TEUKU UMAR DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,3	-	0
803	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN.SEBRANG DESA SELINSING KEC.GANTUNG (DEPAN PAUD ARWANA)	KARHUTLA	1	-	0
804	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN.SEKIP DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
805	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.BANDARA - MANGGAR DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	0,04	-	0
806	KAB.BANGKA TENGAH	JL.TAYIB KAMPUNG DUL KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	3	-	0
807	KOTA PANGKALPINANG	JL.AIR MAWAR GG JAGUNG KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	0,5	-	0
808	KAB.BELITUNG	JL.AIR KELUBI RT 04 RW 16 KEL.PANGKAL LALANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,5	-	0
809	KAB.BELITUNG	JL.DANAU BIRU DALAM DESA AIR RAYA RT 24 RW 10 KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
810	KAB.BELITUNG	JL.RAYA PEGANTUNGAN DESA SUNGAI SAMAK KEC.BADAU	KARHUTLA	4	-	0
811	KAB.BELITUNG	LAHAN SAMPING PERUMAHAN PELANGI RESIDEN DUKONG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0
812	KAB.BELITUNG	PANTAI TANJUNG TINGGI SEBELAH HOTEL LOR IN KEC.SIJUK	KARHUTLA	4	-	0
813	KAB.BELITUNG	JL.RAYA PEGANTUNGAN DESA SUNGAI SAMAK KEC.BADAU	KARHUTLA	4	-	0
814	KAB.BANGKA TENGAH	JL.TAIB KEL.DUL KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	1	-	0
815	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN BUKIT SAMAK RT 02 RW 01 DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,05	-	0
816	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.MERANTEH DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1	-	0
817	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN LAHAN KAMPONG ULIN DESA LENGGANG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,05	-	0
818	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN URISAN JAYA DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,05	-	0
819	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN PADANG 1 RT4 RW 2 DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,05	-	0
820	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN URISAN JAYA RT 2 RW 1 DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,05	-	0
821	KAB.BELITUNG	JL.RAYA PEGANTUNGAN DESA SUNGAI SAMAK KEC.BADAU	KARHUTLA	10	-	0
822	KOTA PANGKALPINANG	GG MIRAH DELIMA IV KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	6	-	0
823	KOTA PANGKALPINANG	JL.CITRA LAND KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	6	-	0
824	KAB.BELITUNG	JL.MURAI PERUMAHAN MURAI RESIDEN KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0
825	KAB.BELITUNG	JL.TANJUNG KELAYANG DESA TANJUNG KELAYANG KEC.SIJUK	KARHUTLA	0,01	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
826	KAB.BELITUNG	JL.BLK TANJUNG KELAYANG KEC.SIJUK	KARHUTLA	1	-	0
827	KAB.BELITUNG	JL.KEBUN JERUK DESA AIR MERBAU KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0
828	KAB.BELITUNG	BLCK ROCK DEKAT AREA GOLF DESA TANJUNG TINGGI KEC.SIJUK	KARHUTLA	0,01	-	0
829	KAB.BANGKA TENGAH	DESA PADANG BARU KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	2	-	0
830	KAB.BANGKA TENGAH	BELAKANG CITRA LAND KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	1	-	0
831	KAB.BANGKA TENGAH	PERUMAHAN CERIA VILLAGE RT 01 RW 02 KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	4	-	0
832	KAB.BANGKA TENGAH	SAMPING KANTOR GERINDRA DESA PADANG BARU KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	1	-	0
833	KAB.BELITUNG TIMUR	AIK JENJANG DESA LENGANG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1	-	0
834	KAB.BELITUNG TIMUR	GG SEMUTOK DESA LALANG JAYA KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,5	-	0
835	KAB.BELITUNG	JL.MURAI DEPAN KONGJI DANAU BIRU KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
836	KOTA PANGKALPINANG	SAMPING BANK INDONESIA KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	6	-	0
837	KAB.BELITUNG	JL.PILANG GG KELUARGA	KARHUTLA	10	-	0
838	KOTA PANGKALPINANG	JL.PULAU BANGKA AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	2	-	0
839	KAB.BELITUNG	JL.AIK RANGGUNG DESA AIR SAGA	KARHUTLA	1	-	0
840	KAB.BELITUNG	JL.PELABUHAN TANJUNG RUU	KARHUTLA	6	-	0
841	KAB.BELITUNG	JL.AHMAD DAHLAN RT 27 RW 09	KARHUTLA	0,25	-	0
842	KAB.BELITUNG	JL.RAYA PERAWAS DESA PERAWAS BELAKANG KANTOR DESA PERAWAS	KARHUTLA	1,5	-	0
843	KAB.BELITUNG	JL.MELATI RT 08 RW 02 DESA DUKONG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
844	KAB.BELITUNG	JL.MELATI RT 09 RW 02 DESA DUKONG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
845	KAB.BANGKA TENGAH	KELURAHAN ARUNG DALAM KEC.KOBA	KARHUTLA	2	-	0
846	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.BANDARA-MANGGAR DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	0,5	-	0
847	KAB.BANGKA BARAT	DESA PANGKAL BERAS KEC.KELAPA	KARHUTLA	-	-	0
848	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN JAMBU BULOK DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	1,5	-	0
849	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN MEMPAYA 1 RT 001 RW 001 DESA MEMPAYA KEC.DAMAR	KARHUTLA	1	-	0
850	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN LAHAN PLTU MERAK DESA MEMPAYA KEC.DAMAR	KARHUTLA	0,05	-	0
851	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.PLAMBOYAN II DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,08	-	0
852	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.RAYA MANGGAR-GANTUNG PERUMAHAN KOTA BARU RT 04 RW 02 DSN MANGGARAWAN DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1,5	-	0
853	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.SELINDANG DESA MENTAWAK KEC.KELAPA KAMPIT	KARHUTLA	0,05	-	0
854	KAB.BELITUNG	JEMBATAN PILANG DESA DUKONG	KARHUTLA	1	-	0
855	KAB.BELITUNG	PELABUHAN TANJUNG BATU DESA PEGANTUNGAN KEC.BADAU	KARHUTLA	4	-	0
856	KAB.BELITUNG	GG KELUARGA DESA DUKONG RT 08 RW 02 KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA		-	0
857	KAB.BELITUNG	JL. BICONG RT 21 RW 28 DESA AIR MERBAU KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0
858	KAB.BELITUNG	JL.PADAT KARYA II DESA AIR MERBAU KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
859	KAB.BELITUNG	JL.SERMA ABDULLAH DESA AIR RAYA KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
860	KAB.BELITUNG	JL.FAJAR AIR RAYA TIMUR II DESA AIR RAYA KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	10	-	0
861	KOTA PANGKALPINANG	JL.PULAU BANGKA AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	1	-	0
862	KOTA PANGKALPINANG	JL.MASJID AL HUSNA AIR ITAM KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	1	-	0
863	KAB.BANGKA TENGAH	JL.LINGKAR DESA TERENTANG KEC.KOBA	KARHUTLA	5	-	0
864	KOTA PANGKALPINANG	JL.PULAU GELASA BELAKANG BI KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	1,5	-	0
865	KAB.BELITUNG	AIR REMBIKANG DEPAN LAPANGAN FUTSAL BAKRIE DESA AIR SERUK KEC.SIJUK	KARHUTLA	0,01	-	0
866	KAB.BELITUNG	JL.SMPN 3 SIJUK DESA AIR SERUK KEC.SIJUK	KARHUTLA	0,1	-	0
867	KAB.BELITUNG	JL.RAYA TANJUNG KELAYANG DUSUN 1 DESA TERONG KEC.SIJUK	KARHUTLA	0,5	-	0
868	KAB.BELITUNG	JL.TPA GUNUNG SADAY DESA JURU SEBERANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	-	-	0
869	KAB.BELITUNG	JL.RAYA PEGANTUNGAN DESA SUNGAI SAMAK KEC.BADAU	KARHUTLA	-	-	0
870	KAB.BELITUNG	JL.AIR KELUBI RT 40 KELURAHAN PANGKALLALANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
871	KAB.BELITUNG TIMUR	AREA PLTU MERAK DESA MEMPAYA KEC.DAMAR	KARHUTLA	2	-	0
872	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.RAYA MANGGAR-DAMAR DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	0,5	-	0
873	KOTA PANGKALPINANG	PANTAI PASIR PADI DEKAT ALFAMART KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	1	-	0
874	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.MASJID AL HIDAYAH KAMPONG CEMARE DESA KURNIA JAYA KEC.MANGGAR (BELAKANG MTSN 1 BELITUNG TIMUR	KARHUTLA	0,08	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
875	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.AIK MERANTIK DSN SELINSING RT 18 DESA SELINSING KEC.GANTUNG (BELAKANG BKJM BELITUNG TIMUR)	KARHUTLA	0,01	-	0
876	KAB.BELITUNG	JL.PERMATA 6 RT 16 RW 06 KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	10	-	0
877	KAB.BELITUNG	JL.PADAT KARYA KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	3	-	0
878	KAB.BELITUNG	JL.AKIL ALI RT 48 RW 19 KEL.PANGKAL LALANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	3	-	0
879	KAB.BELITUNG	JL.BICONG DESA AIR RAYA KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0
880	KAB.BELITUNG	JL. GANG KELUARGA DESA PILANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0
881	KAB.BELITUNG	JL.TPA GUNUNG SADAY KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0
882	KAB.BELITUNG	DESA JURU SEBERANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	4	-	0
883	KAB.BELITUNG	JL.GANG KELUARGA DUSUN PILANG DESA DUKONG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
884	KOTA PANGKALPINANG	PANTAI PASIR PADI DEKAT ALFAMART KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	1	-	0
885	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN GANSE DESA GANTUNG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	2	-	0
886	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN GANSE DESA GANTUNG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,5	-	0
887	KAB.BANGKA TENGAH	DEPAN POLTEKKES DESA PADANG BARU KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	0,03	-	0
888	KAB.BANGKA TENGAH	JL.POLWAN KEL.DUL KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	0,05	-	0
889	KAB.BANGKA TENGAH	JL.DAHLIA KEL. DUL KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	0,05	-	0
890	KAB.BANGKA TENGAH	BELAKANG SKO PADANG BARU KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	0,05	-	0
891	KAB.BELITUNG	KAWASAN MANGROVE RT 03 RW 01 DESA TERONG KEC.SIJUK	KARHUTLA	2	-	0
892	KAB.BELITUNG	DESA JURU SEBERANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	4	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
893	KAB.BELITUNG	JL. JAWA DUSUN PERAWAS DESA BULUH TUMBANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,5	-	0
894	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN LAHAN KULONG KERO DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	4	-	0
895	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN LAHAN DANAU NUJAU DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,05	-	0
896	KAB.BELITUNG TIMUR	RT 01 BUKIT SAMAK DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,1	-	0
897	KAB.BELITUNG	DESA JURU SEBERANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	7	-	0
898	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA KELUBI KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,1	-	0
899	KAB.BELITUNG	JL.BLK TANJUNG KELAYANG KEC.SIJUK	KARHUTLA	5	-	0
900	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN MANGGARAWAN DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	12	-	0
901	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN URISAN JAYA DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,2	-	0
902	KAB.BANGKA TENGAH	JL. BY PASS KEC.KOBA	KARHUTLA	78	-	0
903	KAB.BANGKA TENGAH	JL. TERENTANG KEC.KOBA	KARHUTLA	1	-	0
904	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN RASAU DESA GANTUNG KEC.SIMPANG RENGGIANG	KARHUTLA	0,5	-	0
905	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN MANGGARAWAN DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,02	-	0
906	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN BAN MOTOR DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1,5	-	0
907	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.LASKAR PELANGI RT 01 DSN JAYA DESA LENGANG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1,5	-	0
908	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN BAN MOTOR DESA LALANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1,5	-	0
909	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN DUSUN GANSE DESA GANTUNG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,08	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
910	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN LAHAN BELAKANG PERUMAHAN SUNRISE GARDEN KULONG KERO DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1,6	-	0
911	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN JL.PANTAI TANJUNG MIRANG DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,04	-	0
912	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN PANTAI TANJUNG MIRANG DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,03	-	0
913	KOTA PANGKALPINANG	KEL.TEMBERAN KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	10	-	0
914	KAB.BELITUNG	JL.AIR SERUK TEMBUSAN KE BULU TUMBANG DESA AIR SERUK KEC.SIJUK	KARHUTLA	0,02	-	0
915	KAB.BELITUNG	JL. MELATI, GUNUNG KERIS, PULANG, DESA DUKUNG, KEC. TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
916	KAB.BELITUNG	JL.TANJUNG KELAYANG RT O6 RW O2 DESA KECIPUT KEC. SIJUK	KARHUTLA	1	-	0
917	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA BUDING KEC.KELAPA KAMPIT	KARHUTLA	1,2	-	0
918	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN MANGGARAWAN DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,5	-	0
919	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN MANGGARAWAN DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,6	-	0
920	KAB.BELITUNG TIMUR	RT 02 DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	0,2	-	0
921	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN PADANG II DESA PADANG (BELAKANG EKS TOKO BUKU WIDODO) KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
922	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.RAYA BANDARA-MANGGAR DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	6	-	0
923	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR	KARHUTLA	0,5	-	0
924	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA PADANG (BELAKANG MASJID ISLAMIC CENTER) KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,5	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
925	KAB.BANGKA TENGAH	DESA PENYAK KEC.KOBA	KARHUTLA	2	-	0
926	KAB.BELITUNG	JL.GUSONG BUGIS DESA JURU SEBRANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	3	-	0
927	KAB.BELITUNG	JL.RAYA SIJUK SEBELAH RM SELERA KITE KEC.SIJUK	KARHUTLA	10	-	0
928	KAB.BELITUNG	JL.MUFAKAT DESA AIR MERBAU KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	5	-	0
929	KAB.BELITUNG	JL.BICONG RT 29 RW 08 KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0
930	KAB.BELITUNG	DESA AIR SAGA RT 20 RW 19 KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
931	KAB.BELITUNG	JL.PASIR PT ALTER ABADI RT 25 RW 09 DESA AIR SERUK KEC.SIJUK	KARHUTLA	2	-	0
932	KAB.BELITUNG	JL.AIK KERJAN 1 RT 23 RW 01 DESA AIR MERBAU KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,5	-	0
933	KAB.BELITUNG	JL.DANAU BIRU DESA AIR RAYA KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	3	-	0
934	KAB.BELITUNG	JL.AIK RANGGONG DESA AIR SAGA RT 25 RW 05 KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,05	-	0
935	KAB.BANGKA TENGAH	DESA PENYAK (LAHAN DEPAN TAMBAK UDANG PENYAK) KEC.KOBA	KARHUTLA	3	-	0
936	KAB.BANGKA TENGAH	GG BOUGENVILE PADANG MULIA KEC.KOBA	KARHUTLA	3	-	0
937	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN LAHAN PANTAI TANJUNG MUDONG DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1,3	-	0
938	KAB.BANGKA TENGAH	KEL.SIMPANG JONGKONG KEC.KOBA	KARHUTLA	2	-	0
939	KAB.BANGKA TENGAH	KEL.PADANG MULYA KEC.KOBA	KARHUTLA	1	-	0
940	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA BUDING KEC.KELAPA KAMPIT	KARHUTLA	8	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
941	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN SELINSING DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,1	-	0
942	KAB.BELITUNG	JL. RENATI TANJUNG TINGGI KEC.SIJUK	KARHUTLA	2	-	0
943	KAB.BELITUNG	LAPANGAN TEMBAK LANUD DESA AIR BATU BUDING KEC. BADAU	KARHUTLA	5	-	0
944	KOTA PANGKALPINANG	JL.SENIMAN KEL.TUATUNU KEC.GERUNGGANG	KARHUTLA	5	-	0
945	KAB.BELITUNG	JL.RAYA KAMPIT RT 05 RW 02 DUSUN KEPAYANG	KARHUTLA	2	-	0
946	KAB.BELITUNG	DESA KACANG BUTOR KEC.BADAU	KARHUTLA	0,5	-	0
947	KAB.BELITUNG	JL.AIR SERUK RT 2 RW 1 DESA AIR SAGA KEC TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	3	-	0
948	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.MEMBALONG DESA LASAR SDN 09 KEC MAMBELONG	KARHUTLA	0,06	-	0
949	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN PADANG II DESA PADANG KEC.MANGGAR (BELAKANG EKS TOKO BUKU WIDODO)	KARHUTLA	3	-	0
950	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.BANDARA -MANGGAR DESA SUKAMANDI KEC.DAMAR (SAMPING SLB N MANGGAR)	KARHUTLA	4	-	0
951	KAB.BANGKA TENGAH	DESA PENYAK KEC.KOBA	KARHUTLA	2	-	0
952	KAB.BANGKA TENGAH	BAWAH KAKI BUKIT KEJORA DESA BELULUK KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	2	-	0
953	KAB.BANGKA TENGAH	DEPAN HOTEL SOLL MARINA JL.PULAU PELEPAS KEC PANGKALANBARU	KARHUTLA	0,04	-	0
954	KAB.BELITUNG	JL.BUNGA DESA GANG ARDI RT 18 RW 09 DUSUN TANJUNG KUBU DESA AIR SAGA KEC TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	5	-	0
955	KAB.BELITUNG	JL.KAMPONG ILER DESA BANTAN DESA MEMBALONG KEC.MEMBALONG	KARHUTLA	10	-	0
956	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.AIK PISANG DESA BATU PENYU KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1	-	0
957	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN SUMPING DESA BATU PENYU KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,7	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
958	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN SAGU DESA MAYANG KEC.KELAPA KAMPIT	KARHUTLA	1,5	-	0
959	KAB.BELITUNG TIMUR	PUKESMAS KELAPA KAMIT KEC.KELAPA KAMPIT	KARHUTLA	0,5	-	0
960	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA MENGKUBANG KEC. DAMAR	KARHUTLA	1,2	-	0
961	KAB.BELITUNG	JL.SEBELAH SMA N 2 TANJUNG PANDAN,DESA PERAWAS KEC. TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,5	-	0
962	KAB.BELITUNG	JL.DUKONG DESA DUKONG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	5	-	0
963	KAB.BELITUNG	KAOLIN BONANZA JL.DANAU BIRU, DESA AIR RAYA, KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0
964	KAB.BELITUNG	KAMPONG ILER KEC. MEMBALONG PT MPL	KARHUTLA	5	-	0
965	KAB.BELITUNG	JL.AIK RANGGONG DESA AIR SAGA KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
966	KAB.BELITUNG	JL.AIR SAGA RT 17 DESA AIR SAGA KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
967	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN SELUMAR DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1	-	0
968	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.SIMPANG RENGGIANG -GANTUNG DESA LENGANG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1	-	0
969	KAB.BELITUNG TIMUR	KAMPONG REKLAMASI SELINSING DSN SELUMAR DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1	-	0
970	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN SUMPING RT 03 DESA BATU PENYU KEC.GANTUNG (DEKAT SDN 14 GANTUNG)	KARHUTLA	1	-	0
971	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN SELUMAR DESA SELINSING KEC.GANTUNG (DEKAT KAMPUNG REKLAMASI SELINSING)	KARHUTLA	1	-	0
972	KAB.BELITUNG	JL.AIR RANGGONG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	0,5	-	0
973	KAB.BELITUNG	RT 22 RW 08 DUSUN KELEKAK USANG DESA PERAWAS KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	0
974	KAB.BELITUNG	AIR KELUBI KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	2	-	0
975	KAB.BELITUNG	JL.KIK KARAK RT 05 RW 03 DESA PERAWAS KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	3	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
976	KAB.BANGKA TENGAH	DESA TERENTANG KEC.KOBA	KARHUTLA	2	-	0
977	KAB.BANGKA TENGAH	BUKIT PAO DESA TERAK KEC.SIMPANG KATIS	KARHUTLA	5	-	0
978	KAB.BANGKA BARAT	DESA TEMPILANG KEC.TEMPILANG	KARHUTLA	-	-	0
979	KAB.BANGKA TENGAH	BUKIT MERBAUNG KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	3	-	0
980	KAB.BANGKA TENGAH	BUKIT KEJORA KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	0,05	-	0
981	KOTA PANGKALPINANG	JL.RAYA KETAPANG SIMPANG TPI KEL.KETAPANG KEC.PANGKALBALAM	KARHUTLA	1	-	0
982	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN GANSE DESA GANTUNG KEC.GANTUNG (DANAU NUJAU)	KARHUTLA	0,2	-	0
983	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.BUJE DESA BATU PENYU KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1	-	0
984	KAB.BANGKA	DESA PENAGAN KEC.MENDO BARAT	KARHUTLA	-	-	0
985	KOTA PANGKALPINANG	PASIR PADI BELAKANG BELITONG RESORT KEC.BUKIT	KARHUTLA	1,5	-	0
986	KOTA PANGKALPINANG	JL.PASIR PADI PERUMAHAN DAMAI LESTARI 6 KEL.TEMBERAN KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	2	-	0
987	KOTA PANGKALPINANG	JL.PASIR PADI BELAKANG PESANTREN HIDAYATUSSALIKIN KEL. AIK ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	2	-	0
988	KOTA PANGKALPINANG	KEL.PASIR PUTIH JL.TANJUNG BUNGA 2 KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	2	-	0
989	KAB.BANGKA BARAT	DUSUN BAGINDA DESA PANGKAL BERAS KEC.KELAPA	KARHUTLA	-	-	0
990	KAB.BELITUNG	JL.PEGARUN RT 06 RW 03 DESA AIR SELUMAR KEC.SIUK	KARHUTLA	1	-	0
991	KOTA PANGKALPINANG	JL.TANJUNG BUNGA 2 KEL.TEMBERAN KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	2	-	0



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
992	KOTA PANGKALPINANG	DEPAN BI KEL.AIR ITAM KEC.BUKIT INTAN	KARHUTLA	5	-	0
993	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.PANTAI MUDONG DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,03	-	0
994	KAB.BANGKA	DESA PAYA BENUA KEC.MENDO BARAT	KARHUTLA	-	-	0
995	KAB.BANGKA TENGAH	AIR PASIR RT 21 DESA LAMPUR KEC.SUNGAI SELAN	KARHUTLA	-	-	0
996	KAB.BANGKA	DESA PANGKAL NIUR KEC.RIAU SILIP	KARHUTLA	-	-	0
997	KAB.BELITUNG	JL.AIR KELUBI DALAM RT 24 RW 10 LESUNG BATANG KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	-	-	0
998	KAB.BELITUNG TIMUR	JL RAYA MANGGAR-GANTUNG DESA PADANG KEC.MANGGAR (AYAM KARAWITAN)	KARHUTLA	25	-	0
999	KAB.BANGKA	JL.LINTAS TIMUR AIR ANYIR KEC.MERAWANG	KARHUTLA	100	-	0
1000	KOTA PANGKALPINANG	JL.LINTAS TIMUR GG PELUNGOR GG GELAM GG BEJO DAN KAMPUNG PADANG KEL.SELINDUNG LAMA KEC.GABEK	KARHUTLA	90	-	0
1001	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.PANTAI MUDONG DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	2	-	0
1002	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA LILANGAN KEC.GANTUNG (AIK SAMBAR)	KARHUTLA	4,5	-	0
1003	KAB.BANGKA TENGAH	LAHAN DEPAN KANTOR PLN KOBAB KEC.KOBAB	KARHUTLA	0,5	-	0
1004	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN PERUMAHAN PADANG PELANGI GARDEN JL.KULONG KERO DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	3,5	-	0
1005	KAB.BANGKA SELATAN	SEPUTARAN KOMPLEKS PERKANTORAN PARIT 3 KEC.TOBOALI	KARHUTLA	15	-	0
1006	KAB.BANGKA TENGAH	LAHAN BELAKANG ALFAMART BEROK KEC.KOBAB	KARHUTLA	0,5	-	0
1007	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN SELUMAR DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1	-	0



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
1008	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.FLAMBOYAN II DSN PADANG II DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	0
1009	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN SUMPING RT 03 DESA BATU PENYU KEC.GANTUNG	KARHUTLA	5	-	0
1010	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN AIK RUTAN DESA DENDANG KEC.DENDANG	KARHUTLA	3	-	0
1011	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.AIK PISANG DSN SUMPING RT 03 DESA BATU PENYU KEC.GANTUNG	KARHUTLA	1	-	0
1012	KAB.BELITUNG TIMUR	DSN SELUMAR DESA SELINSING KEC.GANTUNG (DEKAT SDN 10 GANTUNG)	KARHUTLA	0,5	-	0
1013	KAB.BANGKA TENGAH	TANJUNG LANGKA KEC.KOBA	KARHUTLA	5	-	0
1014	KAB.BELITUNG TIMUR	JALAN TAMAN ABADI DUSUN BARU, DESA GANTUNG KEC.GANTUNG	KARHUTLA	2,5	-	0
1015	KAB.BANGKA BARAT	DESA KACUNG KEC.KELAPA	ANGIN PUTING BELIUNG	-	-	-
1016	KAB.BANGKA TENGAH	JL.PESANTREN KEL.SIMPANG PERLANG KEC.KOBA	KARHUTLA	4	-	-
1017	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN LAHAN DUSUN PANCOR I DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	5	-	-
1018	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN MANGGARAWAN DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	4	-	-
1019	KAB.BELITUNG TIMUR	AREA KULONG KERO DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	8	-	-
1020	KAB.BANGKA TENGAH	JL.RAYA DESA AIR MESU KEC.PANGKALAN BARU	KARHUTLA	1	-	-
1021	KAB.BANGKA TENGAH	PADANG MULIA KEC.KOBA	KARHUTLA	1	-	-
1022	KAB.BANGKA TENGAH	JL.PANTAI SUMUR 7 PADANG MULIA KEC.KOBA	KARHUTLA	1	-	-
1023	KAB.BANGKA TENGAH	RT 01/RW 08 KEL.SUNGAI SELAN KEC.SUNGAI SELAN	ANGIN PUTING BELIUNG	-	-	-



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
1024	KAB.BANGKA TENGAH	KEL.PADANG MULYA KEC.KOBA	KARHUTLA	1	-	-
1025	KAB.BELITUNG TIMUR	AREA BELAKANG KANTOR DISPORA	KARHUTLA	0,1	-	-
1026	KAB.BELITUNG TIMUR	AREA BELAKANG KANTOR DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	4	-	-
1027	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.RAYA MANGGAR DESA SUKAMANDI KEC.MANGGAR	KARHUTLA	2	-	-
1028	KAB.BANGKA TENGAH	DESA PERLANG KEC.LUBUK BESAR	KARHUTLA	2	-	-
1029	KAB.BANGKA TENGAH	BUKIT DAERAH MESU KEC.PANGKAL BARU	KARHUTLA	2	-	-
1030	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN SUMPING DESA BATU PENYU KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,5	-	-
1031	KAB.BANGKA TENGAH	DESA PERLANG KEC.LUBUK BESAR	CUACA EKSTRIM	-	-	1
1032	KOTA PANGKALPINANG	JL KH. CHOLID SAMID NO 281 RT 003 RW 001 KWL.GWNAS KEC.TAMAN SARI	CUACA EKSTRIM	-	-	-
1033	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.KOKARTIM DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,1	-	-
1034	KAB.BELITUNG	KAMPUNG DAMAI KEC.TANJUNG DAMAI	BANJIR	-	-	-
1035	KAB.BELITUNG TIMUR	JL.MADUR, DUSUN PADANG DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,05	-	-
1036	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN LAHAN JL.MADUR DUSUN PADANG DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	-
1037	KOTA PANGKALPINANG	JL.TAPAK JALAK 1 KEL.BUKIT BESAR	KARHUTLA	1	-	-
1038	KOTA PANGKALPINANG	GG BELANAK 1 KEL.AIR SALEMBA KEC.GABEK	CUACA EKSTRIM	-	-	-
1039	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN KULONG KERO DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,3	-	-



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
1040	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN KULONG KERO DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	1	-	-
1041	KAB.BELITUNG TIMUR	TRANS MERANTEH DESA SELINSING KEC.GANTUNG	KARHUTLA	2	-	-
1042	KAB.BANGKA TENGAH	TANJUNG LANGKA KEC.KOBA	KARHUTLA	1	-	-
1043	KAB.BELITUNG TIMUR	RT 06 DUSUN SEBRANG DESA SELINSING KEC.GANTUNG	ANGIN PUTING BELIUNG	-	-	-
1044	KAB.BELITUNG TIMUR	DUSUN BUKIT JAYA RT 011 RW 004 DESA BUDING KEC.KELAPA KAMPIT	ANGIN PUTING BELIUNG	-	-	-
1045	KAB.BELITUNG TIMUR	DESA LILANGAN KEC.GANTUNG	KARHUTLA	0,1	-	-
1046	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN PANTAI SERDANG DSN BARU DESA BARU KEC.MANGGAR	CUACA EKSTRIM	-	-	-
1047	KAB.BANGKA TENGAH	DEPAN SD NEGERI 4 PADANG BARU KEC.PANGKALAN BARU	CUACA EKSTRIM	-	-	-
1048	KAB.BELITUNG TIMUR	KAWASAN PANTAI MANARA DSN BARU TENGAH DESA BARU KEC.MANGGAR	CUACA EKSTRIM	-	-	-
1049	KAB.BANGKA	KAMPUNG NELAYAN 1 KEC.SUNGAILIAT	ANGIN PUTING BELIUNG	-	-	-
1050	KAB.BELITUNG TIMUR	AREA MASJID KH.AHMAD DAHLAN DESA PADANG KE	KARHUTLA	0,1	-	-
1051	KOTA PANGKALPINANG	JL.KH AHMAD DAHLAN RT 009 RW 003 KEL.KERAMAT KEC.RANGKUI	CUACA EKSTRIM	-	-	-
1052	KOTA PANGKALPINANG	JL.KH. KHOLID SAMID RT 003 RW 001 KEL.GENAS KEC.TAMAN BUNGA	CUACA EKSTRIM	-	-	-
1053	KAB.BELITUNG	JL.PERUMAHAN AL RADINA RT 26 RW 12 AIR SEKUK DESA AIR SAGA KEC.TANJUNG PANDAN	KARHUTLA	1	-	-
1054	KAB.BELITUNG TIMUR	KULONG KERO DESA PADANG KEC.MANGGAR	KARHUTLA	0,1	-	-



No (1)	Kabupaten (2)	Lokasi (3)	Jenis Bencana (4)	Areal Terdampak (Ha) (5)	Jumlah Korban	
					Mengungsi (6)	Meninggal (7)
1055	KAB.BANGKA TENGAH	DEPAN KANTOR ASRAMA HAJI	CUACA EKSTRIM	-	-	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Tabel-45 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun: 2024

No. (1)	Kabupaten/Kota (2)	Luas (km2) (3)	Jumlah Penduduk (4)	Pertumbuhan Penduduk (%) (5)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2) (6)
1	Bangka	3.016,85	342.100	1,21	113,38
2	Belitung	2.270,71	191.400	1,28	84,29
3	Bangka Barat	2.851,41	215.800	1,37	59,98
4	Bangka Tengah	2.259,98	210.500	1,45	93,13
5	Bangka Selatan	3.598,24	208.500	1,3	73,12
6	Belitung Timur	2.588,40	132.800	1,15	51,31
7	Pangkalpinang	104,54	230.400	1,36	2204,33

Keterangan:

Sumber: Bangka Belitung dalam angka, BPS 2024



Tabel-45a. Timeseries Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Penduduk Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	Luas (km2)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bangka	3.016,85	326.300	329.900	334.300	337.900	342.100
2	Belitung	2.270,71	182.100	184.000	186.300	189.200	191.400
3	Bangka Barat	2.851,41	204.600	206.700	209.400	212.900	215.800
4	Bangka Tengah	2.259,98	198.900	201.800	205.500	207.400	210.500
5	Bangka Selatan	3.598,24	198.200	200.300	202.300	205.800	208.500
6	Belitung Timur	2.588,40	127.000	128.500	130.500	131.300	132.800
7	Pangkalpinang	104,54	218.600	221.900	226.300	227.300	230.400

Keterangan:
Sumber: Bangka Belitung dalam Angka Tahun 2020-2024



Tabel-45b. Timeseries Pertumbuhan Penduduk per Tahun
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun: 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	1,54	1,49	1,41	1,21	1,21
2	Belitung	1,46	1,41	1,33	1,33	1,28
3	Bangka Barat	1,46	1,42	1,33	1,36	1,37
4	Bangka Tengah	2,00	1,96	1,87	1,44	1,45
5	Bangka Selatan	1,31	1,25	1,17	1,3	1,3
6	Belitung Timur	1,67	1,63	1,54	1,15	1,15
7	Pangkalpinang	2,13	2,09	2,01	1,36	1,36
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1,64	1,60	1,52	1,31	1,31

Keterangan:

Sumber: Bangka Belitung dalam Angka Tahun 2020-2024



Tabel 46. Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2023

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	Nama TPA	Jenis TPA	Luas TPA (Ha)	Kapasitas (m3)	Volume Eksisting (m3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bangka	Kenanga	Kenanga	Sanitary Landfill	4.95	540,000	125,925
2	Bangka	Belinyu	Belinyu	Sanitary Landfill	1.2	300,000	19,710
3	Bangka Selatan	Kepoh	Junjung Besaoh	Control Landfill	11	80,000	85,350
4	Bangka Selatan	Kepoh	Junjung Besaoh	Control Landfill	5	47,375	340
5	Bangka Tengah	Koba	Simpang Jongkong	Sanitary Landfill	40	70,000	90,000
6	Bangka Barat	Muntok	Air Belo	Sanitary Landfill	4.2	115,875	140,919
7	Pangkalpinang	Pangkalpinang	Parit Enam	Open dumping	4.9	216,000	>216.000
8	Belitung	Tanjungpandan	Gunung Sadai	Sanitary Landfill	8.5	500,000	305,220
9	Belitung Timur	Manggar	Trafo Mayang	Sanitary Landfill	12	120,000	33,000

Keterangan:

Sumber: DLH Kabupaten/Kota, 2023 (telah diolah kembali)



Tabel-47 : Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2023

No	Kabupaten	Lokasi	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m3/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bangka	Bangka	337.900	405.27
2	Belitung	Belitung	189.200	223.04
3	Bangka Barat	Bangka Barat	212.900	255.42
4	Bangka Tengah	Bangka Tengah	207.400	249.57
5	Bangka Selatan	Bangka Selatan	205.800	346.61
6	Belitung Timur	Belitung Timur	131.300	156.61
7	Pangkalpinang	Pangkalpinang	227.300	496.94

Keterangan :

Sumber: BPS, 2024; SIPSN, 2023 (data telah diolah)



Tabel-47. A : Perkiraan Jumlah Timbunan Sampah per Hari 2020-2021

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2021

No	Kabupaten/Kota	Lokasi	Jumlah Penduduk		Timbunan Sampah (m3/hari)	
			2020	2021	2020	2021
1	Kabupaten Bangka	Bangka	326,265	329911	389.76	399.89
2	Kabupaten Belitung	Belitung	182,079	184004	215.12	223.04
3	Kabupaten Bangka Barat	Bangka Barat	204,612	206786	264.85	267.66
4	Kabupaten Bangka Tengah	Bangka Tengah	198,946	201861	242.09	244.68
5	Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan	198,189	200051	241.24	242.49
6	Kabupaten Belitung Timur	Belitung Timur	127,018	128564	152.94	155.84
7	Kota Pangkalpinang	Pangkalpinang	218,569	221988	460.09	470.88

Keterangan: Estimasi timbunan sampah di kabupaten 0,4 kg/orang/hari, di kota 0,7 kg/orang/hari

Sumber: BPS, 2022; Hasil Perhitungan



Tabel. 48 Jumlah Bank Sampah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2022

No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (kg/bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung (Orang)	Jumlah Karyawan (Orang)	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SEPAKAT	188.45/464/2.5.1.1/2019	65	Aktif	Kecamatan Mentok, Bangka Barat	96	7	916.000/bulan
2	WALAH	188.45/524/2.5.1.1/2017	-	Tidak aktif	Kecamatan Mentok, Bangka Barat	-	-	-
3	UNIT METALURGI	188.45/525/2.5.1.1/2017	-	Tidak aktif	Kecamatan Mentok, Bangka Barat	-	-	-
4	MUTIK PILAH SAMPAH	-	-	Tidak aktif	Kecamatan Mentok, Bangka Barat	-	-	-
5	Bank Induk PAPIN	-	3010	Aktif	Pangkalpinang	533	8	38,000,000
6	Kawabegawe	07/SKBS/kel-sld/XII/2017	4030	Aktif	Pangkalpinang	400	4	36,000,000
7	Berkah	-	-	Tidak aktif	Pangkalpinang	360	3	-
8	Sukun Mandiri	11/SKM/Kel-BST/V/2010	-	Tidak aktif	Pangkalpinang	215	4	-
9	Tua Tunu Indah	14/PTtn/Kel-TT/VII/2013	-	Tidak aktif	Pangkalpinang	271	5	-
10	Pondok Kreasi	016/SK/AKT-GTG/IV/2021	2080	Aktif	Pangkalpinang	54	4	12,000,000
11	Aik Pelempang Jaya	141/II/KEP/APJ/XII/2015	250	Aktif	Desa Aik Pelempang Jaya, Kec Tanjungpandan, Belitung	50	13	500,000



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (kg/bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung (Orang)	Jumlah Karyawan (Orang)	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Karya Pemuda	018/ TAHUN 2015	-	TidakAktif	Desa Tanjung Tinggi, Kec. Sijuk, Belitung	-	11	-
13	Desa Keciput	014/KPTS/KC/2016	-	TidakAktif	Desa Keciput, Kec. Sijuk, Belitung	-	10	-
14	Akar Berebat	188.46/140/KEP/DLH/2021	1300	Aktif	DLH Kab. Belitung	170	17	3,869,750
15	Rimbaan Tuan	188.46/150/KEP/DLH/2021	300	Aktif	Desa Kacang Butor, Kec. Badau, Belitung	50	7	600,000
16	Beres (Universal)	050/SK/YKUB/III/2020	173.1	Aktif	Sekolah Universal, Belitung	267	7	600,000
17	RSUD dr.H. Marsidi Judono	445/0354/KEP/RSUD dr. H.M.JD/I/2018	300	Aktif	RSUD dr.H. MARSIDI JUDONO, Belitung	40	11	600,000
18	Bank Sampah Nyiur Karya Lestari (Bank Sampah Unit)	Keputusan Kepala Desa Lalang Nomor 37 Tahun 2021	141	Aktif	Dusun Sawah, Dusun Terang Bulan dan Dusun Sekip	289	6	
19	Bank Sampah Pelangi Nusa (Bank Sampah Induk)	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2013	1,411	Aktif	Seluruh Wilayah Kabupaten Belitung Timur	3 Bank Sampah Unit	27	
20	Bank Sampah Pelangi SMP Negeri 6 Manggar (Bank Sampah Unit)	Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 6 Manggar Nomor :422/063/SK/SMPN 6 MANGGAR/II/2022	2.98	Aktif	KELUBI	78	15	53,280



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (kg/bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung (Orang)	Jumlah Karyawan (Orang)	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	Jalan Samratulangi RT 002 Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat	188.45/1065/DINLH/2017	594	Aktif	Ibukota Kabupaten	65	2	900,000
22	Jalan Ahmad Yani Jalur II Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat	188.45/732/DINLH/2019	841.2	Aktif	Ibukota Kabupaten	71	4	1,100,000
23	Jalan Duyung Raya Blok E RT 007 RW 11 Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali	-	615	Aktif	Ibukota Kabupaten	83	10	1,300,000
24	Temiang Jaya	188.4/15/19.04.01.2006/2019 tanggal 02 Januari 2019	3644.5	Aktif	Desa Guntung	15	5	400,000
25	Berpanen	188/57/19.04.01.2008/2019 tanggal 02 Januari 2019	400	Aktif	Desa Terentang III	40	4	200,000
26	Bejebeu Lilai	188.45/007.sk/19.04.01.07/2016 tanggal 4 Januari 2016	3400	Aktif	Desa Penyak	35	2	1,500,000
27	Bersampan	141/54/19.04.01.2003/2019 tanggal 12 Februari 2019	100	Aktif	Desa Kurau Timur	5	4	150,000
28	Bumbu Masak	188.4/03/19.04.01.1003/2019 tanggal 02 Januari 2019	400	Aktif	Pasar Modern Koba	10	5	151,000
29	Bersaung Maju	188.4/38/19.04.01.1003/2020 tanggal 08 Januari 2020	450	Aktif	Kelurahan Berok	15	4	350,000



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (kg/bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung (Orang)	Jumlah Karyawan (Orang)	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
30	Berlilik Berseri	188.4/037/19.04..20005/2021 tanggal 04 Januari 2021	550	Aktif	Desa Belilik	38	2	600,000
31	Butterfly Sped Bank	188.45/6a/19.04.05.2007/2018 tanggal 31 Januari 2019	1720	Aktif	Desa Bukit Kijang	53	2	1,200,000
32	Teratai	188.5/50/19.04.01.1005/2018	1000	Aktif	Kelurahan Simpang Perlang	21	3	250,000
33	Teratai	188.45/45/19.04.02.2010/2019 tanggal 03 Januari 2019	824	Aktif	Desa Benteng	13	4	500,000
34	Trubus Berjaya	188.4/39/19.04.06.2007/2022	20	Aktif	Desa Trubus	10	10	100,000
35	Bank Sampah SMK Yapentob	188.45/15/BLH/2016	1400	Aktif	Sekolah SMK Yapentob dan sekitarnya	200	9	2,000,000
36	Bank Sampah Gadung Maju	188.45/15/BLH/2016	4000	Tidak Aktif	Kecamatan Toboali	111	15	-
37	Bank Sampah Pondok Mandiri	188.45/15/BLH/2016	3500	Tidak Aktif	Kelurahan Toboali	125	10	625,000
38	Bank Sampah Kopi	188.45/15/BLH/2016	400	Tidak Aktif	Kompleks Bukit Permai	17	9	625,000
39	Bank Sampah Kophi	188.45/15/BLH/2016	700	Tidak Aktif	Desa Gadung	30	8	1,455,000
40	Bank Sampah Manahula	188.45/15/BLH/2016	300	Tidak Aktif	Kelurahan Teladan	50	13	525,000
41	Bank Sampah SMPN 1	188.45/35.A/BLH/2017	600	Tidak Aktif	Sekolah SMPN 1 Toboali	100	6	975,000
42	Bank Sampah SMA N 1	188.45/35.A/BLH/2017	500	Tidak Aktif	Sekolah SMA N 1 Toboali	75	4	925,000
43	Bank Sampah Salima	188.45/35.A/BLH/2017	1000	Tidak Aktif	Kelurahan Toboali	25	3	1,755,000



No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (kg/bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung (Orang)	Jumlah Karyawan (Orang)	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
44	Bank Sampah Kecamatan Toboali	188.45/35.A/BLH/2017	400	Tidak Aktif	Kecamatan Toboali	4		725,000
45	Bank Sampah De eL Ha	188.4/33.a/DLH/2022	200	Aktif	Komplek Perkantoran	76	17	550,000

Keterangan :

Sumber: DLHK Babel, 2022

Tabel-49. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2023

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kegiatan Aksi bersih Peringatan Hari Ozon	Taman Dealova Pangkalpinang	DLHK dengan kolaborasi PEPELINGASIH Bangka Belitung
2	Lomba Bank Sampah Tingkat Provinsi	Bank sampah di 7 Kab/Kota	DLHK
3	workshop pengelolaan sampah dan penanaman pohon bersama pramuka	Bukit Baru	DLHK (Pinsaka Kalpataru Tk Daerah)
4	Giat bakti lingkungan dengan mengelola sampah plastik menjadi ecobrick	SMP N 9 Pangkalpinang (pramuka)	DLHK (Pinksaka Kalpataru Tk Daerah)
5	Peransaka Nasional	Bumi Perkemahan Kwarda Bangka Belitung, balun Ijuk	Kwarnas, Kwarda, 11 pinsaka Tk daerah Bangka Belitung
6	Pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (PBLHS)	sekolah - sekolah calon adiwiyata dan sekolah adiwiyata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DLHK



7	Gerakan Jumat bersih (2023)	lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan bangka Belitung	Seluruh Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung , Siswa siswi SMA/SMK /sederajat
8	Gule Kabung	7 Kabupaten/Kota	Seluruh Instansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keterangan : -

Sumber : DLHK Prov. Kep. Babel dan website babelprov.go.id, 2023

Tabel-50. Status Pengaduan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2023

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PT. Bangun Rimba Sejahtera - 5 januari 2023	Respon pemberitaan media Suara Melayu & babel news Update, terkait tambang Ilegal di Desa Cupat Bangka Barat	Tercatat dan sudah dilakukan verifikasi
2	DPD Gerakan pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM-Gempur) - 02 Januari 2023	Pencemaran air akibat adanya aktifitas tambak udang (berupa intrusi air asin ke sumber air/sumur warga di Dusun tegek, Desa Benteng Kota kecamatan Tempilang Kab. Bangka Barat	Verifikasi dan sudah dilakukan penyelesaian dengan penggantian air bersih dan pengurusan air yang tercemar
3	UPTD KPHP Sembulan - Januari 2023	Perambahan Hutan berupa aktivitas tambang ilegal (TI Rajuk)	terverifikasi



No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)
4	DPD Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Bangka Belitung a.n : Mayrest Kurniawan A.Md alamat : Jl. Belibis No. 185 Bukit merapin Pangkalpinang No Hp: 082279788182 (mayrestk@gmail.com) 7 Februari 2024	Pengaduan Dugaan Perambahan Kawasan Hutan. Kawasan Hutan Lindung Kota Waringin Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka dan kawasan Hutan Produksi Kota Waringin Bangka Koordinat 2°10.365'S-105°46.437'E (-2.1169330, 105.7414220) Jenis Kegiatan : Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang beralih fungsi menjadi kebun sawit dalam wilayah kebun sawit dalam wilayah yang berada dalam wilayah Kelompok Tani Hutan Cahaya Mandiri milik Sdr. Upe Setiadi maupun Wilayah yang diakui oleh KTH Tunas Kelapa sejak tahun 2016 sampai sekarang	Sudah diselesaikan dan laporan sudah di kirim ke Kemen LHK
5	Kantor Hukum Haris Sucahyo SH - 14 Februari 2023	Laporan Pengaduan adanya pengrusakan dan Kegiatan Tambang Ilegal di Hutan Kawasan HP. Sungai Sembulan kelurahan Sungai Selan Atas Kecamatan Sungai Selan	Sudah dilakukan patroli
6	Surat dari Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.208/PPSALHK/PDW/GKM.0/2/2023 tanggal 17 february 2023 Tentang Penyerahan penanganan Pengaduan Dugaan perusakan bukit Muruf dan Hutan di Desa nangka Kecamatan Air Gegas Kabupaten bangka Selatan - 17 Februari 2023	Pengaduan Dugaan perusakan bukit Muruf dan Hutan di Desa nangka Kecamatan Air Gegas Kabupaten bangka Selatan	Sudah dilakukan verifikasi dan penyelesaian, laporan sudah dikirim ke Kementerian LHK



No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)
7	DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia - 07 Maret 2023	Sawit diduga mengelola hutan lindung di Belitung	Sudah dilakukan Verifikasi dan pendataan
8	Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan PADANG LESTARI - 22 Mei 2013	Penambangan Tanpa izin di Lokasi Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan padang Lestari seluas ±50 Ha di Kelurahan Air Jukung (Kelurahan Mantung) kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung	Sudah dilakukan patrol oleh Tim pengamanan Hutan
9	Surat dari Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S873/PPSALHK/PDW/GKM.0/5/2023 tanggal 18 Mei 2023 Tentang Dukungan Pengawasan - 18 Mei 2023	Dugaan pemanfaatan sumber air baku di Hutan Lindung Gunung Tajam secara ilegal oleh perusahaan Air Minum dalam kemasan PT. Agunta di Kabupaten Belitung	Sudah dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan Kementerian LHK
10	CV. Mulia Asri Sukhitata Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka - 25 Mei 2023	Laporan Pengaduan Pencemaran Limbah Tambak Dugaan Pencemaran limbah tambak udang di Jalan Lintas Timur Desa Rebo Kecamatan Sungai Liat yang diduga dilakukan oleh Tambak Udang (berupa pembiaran kelalaian oleh pengelola tambak udang sehingga terjadi kebocoran IPAL	Sudah dilakukan verifikasi aduan lapangan. Saat ini dalam proses pemeriksaan
11	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan - Juli 2023	aktivitas Tambak Udang CV. Samudera Terus Jaya berdasarkan aduan yang beroperasi di Temayang Desa Rias Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dengan dugaan tidak melakukan pengelolaan lingkungan (IPAL) dalam pengelolaan limbahnya	Sudah Dilakukan verifikasi dan pengambilan sampel air limbah



No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Surat dari Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S1374/PPSALHK/PDW/GKM.0/7/2023 tanggal 28 Juli 2023 Tentang Permohonan Informasi	Aduan dari PT. APS (Agro Pratama Sejahtera) terkait pembukaan yang dilakukan oleh oknum masyarakat warga Dusun Bukit Luwi, Desa Penagan, kecamatan mendo Barat yang digunakan untuk Kebun Sawit di lokasi di duga masuk ke dalam kawasan Hutan produksi Sungai Sembulan dan termasuk dalam areal IUPHHK HTI PT. APS diperkirakan seluas 1000 Ha	Tercatat
13	Surat dari Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S1442/PPSALHK/PDW/GKM.0/8/2023 tanggal 02 Agustus 2023 Hal Penyerahan Penanganan Pengaduan atas nama Ahda Mutaqin Jalan mawar Kampak RT. 09 RW 03 Kelurahan tuatunu Kecamatan Gerungggang Pangkalpinang	Dugaan Tambang Ilegal dan Perusakan Kawasan Hutan menggunakan alat berat di Wilayah Air Lambar Desa Simpang kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka tengah yang diduga dilakukan oleh Saudara Asiong alias Bohot, Saudara Bujang als Budung, Saudara Andrean serta Saudara lin. Yang diduga dilaksanakan sejak 17 April 2023	Verifikasi lapangan-kegiatan sudah tidak ada
14	Surat dari Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S1374/PPSALHK/PDW/GKM.0/7/2023 tanggal 02 Agustus 2023 Hal Informasi Penanganan Pengaduan atas nama Ahda Mutaqin Jalan mawar Kampak RT. 09 RW 03 Kelurahan tuatunu Kecamatan Gerungggang Pangkalpinang	Dugaan Tambang Ilegal dan Perusakan Kawasan Hutan menggunakan alat berat di Wilayah Air Lambar Desa Simpang kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka tengah yang diduga dilakukan oleh Saudara Asiong alias Bohot, Saudara Bujang als Budung, Saudara Andrean serta Saudara lin. Yang diduga dilaksanakan sejak 17 April 2023	Verifikasi lapangan-kegiatan sudah tidak ada
15	Laporan dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Komisi III - Oktober 2023	Laporan terkait pencemaran tambak Udang di Desa Tanjung Klumpang Kabupaten Belitung Timur Kecamatan Simpang Pesak Kabupten Belitung Timur	Sudah dilaksanakan verifikasi



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Laporan masyarakat	Aduan terkait permasalahan sawit di sempadan sungai PT. Sahabat Mewah dan Makmur (SMM) di Jangkang, Kec. Dendang, Kabupaten Belitung Timur	Sudah dilaksanakan verifikasi

Keterangan :

Sumber: DLHK Babel, 2023



Tabel-51. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup Provinsi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2023

No.	Nama LSM	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	LSM Aliansi Lingkungan Hidup (ALIH) Bangka	-	Jln. Kacang Pedang no. 77A Pangkalpinang
2	Yayasan Lembaga Penelitian, Pengkajian Pembangunan dan Lingkungan Hidup (YP3LH)	-	Jln. Depati Bahrin no. 75 Pangkalpinang
3	Team Operasional Penyelamatan Lingkungan Kep. Bangka Belitung (TOPEL)	-	Jln. Pasar Mambo no. 95 Pangkalpinang
4	Himpunan Pelestari Hutan Andalan (HPMA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	601/BKBPPM/2004	Jalan Irian No. 10 Kel. Asam Pangkalpinang
5	Forum Lingkungan Hidup (FOLHI)	628/BKBPPM/2004	Jln. Pasar Mambo no. 95 Pangkalpinang
6	Yayasan Babel Hijau	677/BKBPPM/2007	Jln. Belibis I no. 167 RT 05 RW 02 Pangkalpinang
7	LSM Garda Lingkungan Hidup (GALIH)	388/BKBPPM/2010	Jl. Belinjo No. 195 Bukit Merapin Gerunggang Pangkalpinang Telp. 0717 434834
8	Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	408/BKBPPM/2010	Jl. Kapt. Munzir Thalib No. 23 Kec. Taman Sari Pangkalpinang
9	Yayasan Bangka Belitung Lestari	19/BKBPPM/2011	Jl. Lumba-Lumba I No.21 A Kel. Gabek I Kec. Gabek Pangkalpinang Telp. (0717) 424570
10	Lembaga Peduli Lingkungan Hidup (LPHP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	220/13/BKBPPM/II/2013	Jl. Kampung Melayu Dalam Rt.07 Rw.03 Kel. Tuatunu Indah Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang
11	Yayasan Cinta Lestari Lingkungan Hidup	220/23/BKBPPM/2013	Jl. RE. Martadinata Kel. Opas Indah Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang



DOKUMEN

INFORMASI
KINERJA
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama LSM	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan (GEMPA)	SKT BATENG 200/120/130/0003/VIII/2014	Jln. Soekarno Hatta II Gg. Sukma Rt. 09/12 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
13	Organisasi Pelestarian Flora dan Fauna (Alobi) ¹	Nomor 3 Tanggal 28 September 2017	Jl. Sumedang Gg. H.Sani Rt.001/004 Kel.Kejaksan Kec.Taman Sari Pangkalpinang
14	Wahana Lingkungan Hidup Kepulauan Bangka Belitung ²	-	Jl. Belanak Raya No. 64 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Air Salemba Kecamatan Pangkalbalam, Kota pangkalpinang 33118
15	Yayasan Terumbu Karang Soubad ³	Nomor 2 Tanggal 05 Februari 2020	Jl. Slamet Tikung Yaden RT. 008 RW. 005 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan
16	Perhimpunan Pencinta dan Pelestari Tanaman Bangka (Bangka Flora Society) ⁴	Nomor 2 Tanggal 05 Februari 2020	Jl. Slamet Tikung Yaden RT. 008 RW. 005 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan
17	Yayasan Sayang Babel Kite	Nomor 6 Tanggal 9 November 2011	Jl. Diponegoro No. 59 RT.07 Kel. Bukit Betung, Kec. Sungailiat Kabupaten Bangka
18	Yayasan Ikatan Keluarga Besar Kenanga (IKEBANA) ⁵	AHU-2263.AH.01.04 Tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009	Jl. Raya Kenanga, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka
19	<i>Botanical Group For Environment Project</i>	-	Jln. Desa Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah
20	BECAK BABEL	-	Komplek RSS. Pemda. Sungailiat
21	Forum Koordinasi Daerah Aliran Sungai (FKPDAS) Prov. Kep. Bangka Belitung		
22	Masyarakat Peduli Sungai dan Kulong "Cerudik Lestari" Kabupaten Bangka		
23	Forum Peduli Sungai dan Kulong "Mengkelik Bekawan Lestari" Kabupaten Bangka Tengah		



No.	Nama LSM	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
24	Pemuda Peduli lingkungan asri dan bersih Indonesia_Babel	-	GOR Sahabudin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keterangan :

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel-52. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2023

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Grand Total
1	Pasca Sarjana (S2)	18	19	37
2	Sarjana (S1)	117	56	173
3	Diploma 3 (D3)	16	13	29
4	SMA/SMK	55	14	69
5	SMP	2	0	2
5	SD	1	0	1
	Jumlah	209	102	311

Sumber : DLHK Prov.Kep.Babel 2024

Tabel-52.a Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pasca Sarjana (S2)	18	18	36
2	Sarjana (S1)	98	38	136
3	Diploma 3 (D3)	13	9	22
4	SMA/SMK	20	4	24
5	SD	1		1
	Jumlah	150	69	219

Keterangan :

Sumber : DLHK 2023



Tabel-53. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan Dan Staf Yang Telah Mengikuti Diklat

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2024

No	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengawas Lingkungan Hidup	5	0	5	0
		Pengendali Dampak Lingkungan	3	7	3	7
		Pengendali Ekosistem Hutan	3	2	0	0
		Penyuluh Kehutanan	2	1	1	1
		Penyuluh Lingkungan Hidup	0	6	0	0
		Polisi Kehutanan	4	1	3	1
2	UPTD Laboratorium Lingkungan	Pengendali Dampak Lingkungan	1	0	0	0
3	UPTD KPHP Rambat Menduyung (Unit I)	Pengendali Ekosistem Hutan	0	1	0	1
		Penyuluh Kehutanan	1	1	1	1
		Polisi Kehutanan	1	1	1	1
4	UPTD KPHP Jebu Bembang Antan (Unit II)	Pengendali Ekosistem Hutan	0	1	0	0
		Penyuluh Kehutanan	4	0	3	0
		Polisi Kehutanan	1	0	1	0
5	UPTD KPHP Bubus Panca (Unit III)	Pengendali Ekosistem Hutan	0	0	0	0
		Penyuluh Kehutanan	3	0	3	0
		Polisi Kehutanan	1	0	1	0
6	UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin (Unit IV)	Pengendali Ekosistem Hutan	0	1	0	1
		Penyuluh Kehutanan	2	2	2	2
		Polisi Kehutanan	2	0	2	0
7	UPTD KPHP Sungai Sembulan (Unit V)	Pengendali Ekosistem Hutan	1	0	1	0



No	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
		Penyuluh Kehutanan	3	1	3	1
		Polisi Kehutanan	2	0	2	0
8	UPTD KPHP Muntai Palas (Unit VIII)	Pengendali Ekosistem Hutan	1	0	1	0
		Penyuluh Kehutanan	3	0	3	0
		Polisi Kehutanan	3	0	3	0
9	UPTD KPHL Belantu Mendanau (Unit X)	Pengendali Ekosistem Hutan	1	0	1	0
		Penyuluh Kehutanan	2	4	2	4
		Polisi Kehutanan	8	1	8	0
10	UPTD KPHP Gunung Duren (Unit XIII)	Pengendali Ekosistem Hutan	0	1	0	1
		Penyuluh Kehutanan	3	1	4	1
		Polisi Kehutanan	7	0	7	0
		Jumlah	67	32	61	22

Sumber : DLHK Prov.Kep.Babel 2024

Tabel-54. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data: 2023

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	Adipura	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
2	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Sertifikat Adipura	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
3	SMPN 2 Badau Kabupaten Belitung	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023



No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	SMPN 2 Tanjungpadang Kabupaten Belitung	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
5	UPTD SDN 1 Pemali Kabupaten Bangka	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
6	SDN 33 Tanjungpandan Kabupaten Belitung	Sekolah Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
7	SMPN 1 Tanjungpadan Kabupaten Belitung	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur	2023
8	SMP Keluarga Universal Kabupaten Belitung	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur	2023
9	SMPN 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur	2023
10	SMPN 4 Mentok Kabupaten Bangka Barat	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur	2023
11	MIS AL Islah Mentok Kabupaten Bangka Barat	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur	2023
12	SDN 10 Pemali Kabupaten Bangka	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur	2023
13	SMA Negeri 3 Pangkalpinang	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur	2023-2027
14	SMP Negeri 1 Pemali	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur	2023-2027
15	SMP Negeri Koba	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur	2023-2027
16	SMP Negeri Tanjungpandan	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur	2023-2027
17	SD Negeri 24 Sungailiat	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur	2023-2027
18	SD Negeri 1 Koba	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur	2023-2027
19	SD Negeri 8 Sungailiat	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur	2023-2027
20	SD Negeri 9 Mendo Barat	Sekolah Adiwiyata Provinsi	Gubernur	2023-2027
	Bank Sampah Basayan Lestari,Sungailiat Kab.Bangka	Juara 1 Bank Sampah Provinsi	Gubernur	2023
	Bank Sampah Sepakat,Mentok Kab.Bangka Barat	Juara 2 Bank Sampah Provinsi	Gubernur	2023



No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Bank Sampah Beres, Tanjungpandan Kab. Belitung	Juara 3 Bank Sampah Provinsi	Gubernur	2023
	Bank Sampah Setara, Sungailiat Kab. Bangka	Juara 1 Bank Sampah Provinsi	Gubernur	2023
	Bank Sampah Papin, Pangkalpinang	Juara 2 Bank Sampah Provinsi	Gubernur	2023
	Bank Sampah Akar Berebat, Kabupaten Belitung	Juara 3 Bank Sampah Provinsi	Gubernur	2023
21	PT Sahabat Mewah dan Makmur	Proper Emas	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
22	PT Timah, Tbk. -UPTP Batu Besi	Proper Emas	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
23	PT PLN (Persero) - Wilayah Bangka Bangka Belitung Sektor Pembangkitan PLTU 3 Babel	Proper Hijau	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
24	PT PLN (Persero) - Wilayah Bangka Bangka Belitung Sektor Pembangkitan PLTU 4 Babel	Proper Hijau	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
25	PT Timah Tbk - Unit Penambangan Timah Primer Pemali	Proper Hijau	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
26	PT Mitra Stania Prima	Proper Hijau	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
27	PT Refined Bangka Tin	Proper Hijau	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
28	PT Timah (Persero), Tbk. - Unit Metalurgi Muntok	Proper Hijau	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
29	PT Timah, Tbk – UPTP Wilayah Bangka TB Paku	Proper Hijau	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
30	PT PLN (Persero) - PLTU Suge	Proper Hijau	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
31	PT Pertamina Patra Niaga - Regional Sumbagsel Fuel Terminal Pangkal Balam	Proper Hijau	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
32	PT Sariwiguna Bina Sentosa	Proper Hijau	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
33	PLTG Suge Belitung	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023



No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	PT Pelindo II (Persero) - Cabang Pangkalbalam	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
35	PT Pelindo (Persero) Regional 2 Tanjungpandan	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
36	PT Timah (Persero), Tbk. - Keteknikan dan Sarana (Balaikarya)	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
37	PT Karini Utama	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
38	PT Bangka Biogas Synergy	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
39	PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Merawang	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
40	PT PLN Batam - PLTG MPP Air Anyir Bangka	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
41	PT Gemilang Cahaya Mentari	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
42	PT Gunung Maras Lestari	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
43	PT Gunung Pelawan Lestari	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
44	PT Putra Bangka Mandiri	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
45	PT Tata Hamparan Eka Persada	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
46	PT Mitra Stania Prima	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
47	PT Timah (Persero), Tbk. - Unit Tambang Darat Sungailiat	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
48	PT Artha Cipta Langgeng	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
49	PT ATD Makmur Mandiri	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
50	PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Muntok	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023



No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
51	PT Gunung Sawit Bina Lestari	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
52	PT MP Ledong West Indonesia	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
53	PT Sawindo Kencana	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
54	PT Timah (Persero), Tbk. - UPDB BPP Bangka Barat	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
55	PT Artha Prima Nusa Jaya	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
56	PT Artha Prima Nusa Jaya Sembilan	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
57	PT Prisma Multi Karya	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
58	PT Prisma Multi Karya III	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
59	PT PLN (Persero)-Sektor Pembangkitan Babel-PLTD Toboali	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
60	PT Bumi Sawit Sukses Pratama	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
61	PT Timah (Persero), Tbk - Wilasi II Bangka Selatan	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
62	PT Pertamina Patra Niaga - Regional Sumbagsel DPPU Depati Amir	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
63	PT PLN (Persero)-Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Koba	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
64	PT Bangka Agro Mandiri	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
65	CV Mutiara Alam Lestari	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
66	PT Mutiara Hijau Lestari	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
67	PT Putra Bangka Tani	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023



No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
68	PT PLN (Persero)-Sektor Pembangkitan Babel-PLTD Pilang	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
69	PT Pratama Unggul Sejahtera	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
70	PT Rebinmas Jaya	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
71	PT Bumi Hero Perkasa	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
72	PT Babel Surya Alam Lestari	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
73	PT Tommy Utama	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
74	PT PLN (Persero) - Wilayah Bangka Belitung Sub Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Padang	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
75	PT Foresta Lestari Dwikarya	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
76	PT Parit Sembada	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
77	PT Steelindo Wahana Perkasa	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
78	PT Timah (Persero), Tbk. - Wilasi Belitung	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
79	PT Menara Cipta Mulia	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
80	PT Menara Cipta Mulia	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
81	PT Tommy Utama	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
82	PT Pahala Harapan Lestari	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
83	CV Venus Inti Perkasa	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
84	PT Prima Timah Utama	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023



No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
85	PT Stanindo Inti Perkasa	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
86	PT. Bukit Timah	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
87	PT. Tinindo Internusa	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
88	PT. Rajawali Rimba Perkasa	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
89	PT. Sukses Inti Makmur	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
90	PT. Rajehan Ariq	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
91	PT. Fortuna Tunas Mulya	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
92	PT. Timah Nusantara	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
93	PT. Bangka Serumpun	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
94	CV. Venus Inti Permata	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
95	PT. Bangun Rimba Sejahtera	Proper Biru	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2023
96	PT. Sahabat Mewah dan Makmur	Apresiasi Penyelamat Lingkungan	KLHK	2020
97	ALOB	Apresiasi Penyelamat Lingkungan	KLHK	2020
98	Bangka Flora Society	Apresiasi Penyelamat Lingkungan	KLHK	2020
99	Dedy Ilhamsyah	Apresiasi Pengabdian Lingkungan	KLHK	2020
100	Arsel Community	Nominasi Penyelamat Lingkungan	KLHK	2020
101	Yasir	Nominasi Perintis Lingkungan	KLHK	2018



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
102	Ir. Dian Rosana Anggraini	Piala Perintis Lingkungan	KLHK	2015
103	Johan (Bangka Botanical Garden)	Piala Perintis Lingkungan	KLHK	2010
104	Muhammad Arinda Unigraha Utama	Pemuda Pelopor Bidang Pengelolaan SDA, Lingkungan, dan Pariwisata	Gubernur	2023
105	Muhammad Arinda Unigraha Utama	Penghargaan Bupati Bangka Tokoh Masyarakat di bidang Lingkungan	Bupati	2017
106	Muhammad Arinda Unigraha Utama	Pemuda Teladan Bidang Lingkungan Hidup	Bupati	2023
107	BECAK-BABEL	Komunitas Peduli Sungai Beprestasi	Balai Wilayah Sungai Babel	2023

Keterangan : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.1353/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2023 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2022 – 2023, 2. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1233.a/DLHK/2023, Tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, 3. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1250/DLHK/2023, Tentang Perpanjangan Masa Berlaku Sekolah Adiwiyata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Tabel-55. Kegiatan/Program Yang Diinisiasi Masyarakat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2022-2023

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengolahan Sampah Organik dan Anorganik harian di Markas BECAK-BABEL	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
2	Budidaya Maggot Black Soldier Fly di Markas BECAK-BABEL	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
3	Pembinaan Rutin Komunitas dan Pemuda Peduli Lingkungan	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
4	Pembinaan dan Pendampingan Gerakan Sedekah Sampah AL-Bina Bangka Desa Sempan	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
5	Edukasi Pendidikan dan Sekolah Adiwiyata (Pengolahan Sampah / Perubahan Iklim / Peduli Lingkungan)	BECAK BABEL	Pelajar	2023-2024
6	Edukasi Masyarakat Pengelolaan Sampah rutin berkala	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
7	Aksi Bersih Pantai / Cleanup rutin berkala	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
8	Penghijauan / Penanaman / Rehabilitasi Lahan	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
9	Aksi Bersih Masjid (SIMAS) dan Bantuan peralatan kebersihan di 30 masjid	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Pelestarian Lingkungan dan Edukasi Masyarakat di Pulau Nangka - Bangka Tengah 2023	BECAK BABEL	Penduduk Pulau	2023-2024
11	Pelestarian Lingkungan dan Edukasi Masyarakat di Pulau Semujur - Bangka Tengah 2023	BECAK BABEL	Penduduk Pulau	2023-2024
12	Pelestarian Lingkungan dan Edukasi Masyarakat di Pulau Tinggi - Bangka Selatan 2024	BECAK BABEL	Penduduk Pulau	2023-2024
13	Pemasangan 1000 Lubang Resapan Biopori di Kabupaten Bangka 2023	BECAK BABEL dan BWS Babel	Pelajar	2023-2024
14	Pemasangan 1000 Lubang Resapan Biopori di Kota Pangkalpinang Bangka 2024	BECAK BABEL dan BWS Babel	Pelajar	2023-2024
15	Rembuk Sampah dan Pembentukan Forum Pelajar Peduli Sampah tingkat SLTA se-Sungailiat	BECAK BABEL	Pelajar	2023-2024
16	Peringatan Hari Peduli Sampah 2023 Aksi bersih sungai di Sungailiat	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
17	Peringatan Hari Peduli Sampah 2024 Aksi bersih muara di pesisir nelayan Sungailiat	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
18	"Green Employee Involvement" Aksi bersih sampah memperingati HLH Sedunia 2024	BECAK BABEL dan PT PLN UIW Babel	Karyawan PLN	2023-2024
19	Peringatan World Cleanup Day, Aksi bersih sampah di Pantai Tembran Kab. Bangka 2023	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Sosialisasi dan Edukasi Proklam (Program Kampung Iklim) di Desa Zed Kab. Bangka 2023	BECAK BABEL dan KEMENDES PDDT	Masyarakat Pedesaan	2023-2024
21	Sosialisasi dan Edukasi Proklam (Program Kampung Iklim) di Desa Gunung Muda Kab. Bangka 2024	BECAK BABEL dan KEMENDES PDDT	Masyarakat Pedesaan	2023-2024
22	Sosialisasi dan Edukasi Proklam (Program Kampung Iklim) di Desa Balun Ijuk Kab. Bangka 2024	BECAK BABEL dan KEMENDES PDDT	Masyarakat Pedesaan	2023-2024
23	Sosialisasi dan Edukasi Proklam (Program Kampung Iklim) di Desa Pagarawan Kab. Bangka 2024	BECAK BABEL dan KEMENDES PDDT	Masyarakat Pedesaan	2023-2024
24	Sosialisasi dan Edukasi Proklam (Program Kampung Iklim) di Desa Kimak Kab. Bangka 2024	BECAK BABEL dan KEMENDES PDDT	Masyarakat Pedesaan	2023-2024
25	Pembuatan dan Penyerahan Drop Box Bank Sampah di Sungailiat 2023	BECAK BABEL dan DLH Bangka	Pelajar	2023-2024
26	Kemah Tingkat Dasar Relawan Lingkungan 2023-2024	BECAK BABEL	Pemuda/Mahasiswa	2023-2024
27	Pelatihan SDM Pokdarwis Desa Air Anyir terkait Pengolahan ekowisata dan sampah pantai	BECAK BABEL dan PJBS PLTU Bangka	Masyarakat Pesisir	2023-2024
28	Pelatihan Ketahanan Pangan Kelompok Ternak Bebek Desa Air Anyir	BECAK BABEL dan PJBS PLTU Bangka	Masyarakat Pesisir	2023-2024
29	Pelatihan Pembuatan PUPUK dari limbah FABA di Desa Namang-Bangka Tengah	BECAK BABEL dan PJBS PLTU Bangka	Masyarakat Pesisir	2023-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	Pelatihan Masyarakat Pesisir pengolahan sumberdaya kelautan dan perikanan Desa Air Anyir	BECAK BABEL dan PJBS PLTU Bangka	Masyarakat Pesisir	2023-2024
31	Gerakan Qurban minim sampah	BECAK BABEL dan BKPRMI Bangka	Masyarakat	2023-2024
32	Sosialisasi Gerakan Sedekah Sampah dan Barang bekas	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
33	Festival Tanjung Sunor Lestari, Peringatan Hari Mangrove Se-Dunia di Teluk Kelabat Dalam	BECAK BABEL	Kelompok Nelayan	2023-2024
34	Edukasi mitigasi dan pelaporan bencana bersama petabencana.id	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
35	Pembentukan Masyarakat Peduli Sungai dan Kulong Kabupaten Bangka 2023	KPS BECAK BABEL dan BWS Babel	Masyarakat	2023-2024
36	Pembentukan Forum Peduli Sungai dan Kulong Kabupaten Bangka Tengah 2023	KPS BECAK BABEL dan BWS Babel	Masyarakat	2023-2024
37	Aksi Pembagian 4000 tumbler (botol air minum) kurangi sampah plastik	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
38	Pelatihan Eco-Brick di sekolah dan Kampus	BECAK BABEL	Pelajar/Mahasiswa	2023-2024
39	Sosialisasi Peduli Sampah dan Peduli Sungai di Kelurahan Kenanga	BECAK BABEL	Masyarakat	2023-2024
40	Peringatan Hari Sungai Internasional (Susur Sungai dan Penghijauan sepadan Sungai) 2023	KPS BECAK BABEL dan BWS Babel	Masyarakat	2023-2024
41	Peringatan Hari Ari Sedunia (Penanaman Pohon di sepadan sungai dan kolong) 2024	KPS BECAK BABEL dan BWS Babel	Masyarakat	2023-2024



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42	Pemetaan potensi sampah Laut Kep. Bangka Belitung bersama TKNPSL	BECAK BABEL dan TKNPSL	Instansi Pemerintah dan Swasta	2023-2024
43	Penerbitan Buku "BSF, Integrated Urban Farming Ramah Lingkungan" 2023	BECAK BABEL dan PT RBT	Masyarakat	2023-2024
44	Pelatihan Perikanan Tangkap Kepiting Remangok ramah lingkungan Desa Pagarawan	BECAK BABEL	Kelompok Nelayan dan Pokdakan	2023-2024
45	Ngupi Bekisah "Kaderisasi Generasi Peduli Lingkungan melalui Adiwiyata" SDN 24 Sungailiat 2023	BECAK BABEL	Pelajar	2023-2024
46	Jambore Relawan Lingkungan III FORDAS Babel 2023	BECAK BABEL	Pemuda/Mahasiswa	2023-2024
47	Kampanye Earth Hour di Bangka Belitung	BECAK BABEL	Pemuda/Mahasiswa	2023-2024
48	Kampanye dan MOU Pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan di Pantai Temberan	BECAK BABEL dan UMBB	Masyarakat Pesisir	2023-2024
49	Penanaman 3000 Magrove di Lintas Timur Bangka	BECAK BABEL dan UBB	Masyarakat	2023-2024
50	Sosialisasi Relevansi Hukum Lingkungan dalam Pelestarian Lingkungan	BECAK BABEL dan UBB	Pelajar	2023-2024
51	Beasiswa Kader Konservasi Relawan Lingkungan Prodi KSDA Unmuh Babel 2024	FKPDAS Babel, UMBB, BECAK Babel	Pemuda/Mahasiswa	2023-2024
52	Ngupi Bekisah "Spirit World Water Forum dan Isu Lingkungan-Tambang Bangka" 2024	MLH PW Muhammadiyah Babel	Pemuda/Mahasiswa	2023-2024



Sumber: Laporan Kegiatan Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi, DLH Prov. Kep. Bangka Belitung

Tabel-56. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2024

No.	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya, 2022* (juta rupiah)	Satu Tahun Sebelumnya, 2023** (juta rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PERTANIAN	18.275.260	20.006.090
	a. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasling	10.720.770	12.059.070
	- Tanaman Pangan	475.990	425.500
	- Tanaman Hortikultura	1.662.710	1.842.930
	- Tanaman Perkebunan	7.285.850	8.387.660
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya	1.079.380	1.157.570
	- Jasa Pertanian dan Perburuan	216.840	245.400
	b. Kehutanan	257.670	303.780
	c. Perikanan	7.296.820	7.643.240
2.	Pertambangan dan Penggalian	8.220.120	7.846.480
	a. Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi	618.200	498.800
	b. Pertambangan Biji Logam	5.073.860	4.691.130
	c. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	2.528.050	2.656.550
3.	Industri Pengolahan	20.808.970	21.704.970
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	109.050	112.300
	a. Ketenagalistrikan	100.740	103.180
	b. Pengadaan Gas dan Produksi Es	8.310	9.120
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.650	19.380
6.	Konstruksi	8.661.290	9.746.190
7.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	15.003.700	16.102.830
	a. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2.120.270	1.847.660



No.	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya, 2022* (juta rupiah)	Satu Tahun Sebelumnya, 2023** (juta rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	12.883.430	14.255.170
8.	Transportasi dan Pergudangan	4.194.850	4.961.830
	a. Angkutan Darat	1.478.130	1.767.850
	b. Angkutan Laut	609.710	672.020
	c. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	63.010	72.020
	d. Angkutan Udara	1.459.290	1.774.240
	e. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	584.720	675.710
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.934.850	3.281.890
	a. Penyediaan Akomodasi	105.580	116.160
	b. Penyediaan Makan Minum	2.829.270	3.165.730
10.	Informasi dan Komunikasi	1.988.100	2.290.130
11.	Real Estate	3.260.530	3.479.540
12.	Jasa Perusahaan	268.480	305.640
13.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.044.490	5.408.440
14.	Jasa Pendidikan	2.656.350	2.987.670
15.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.280.430	1.416.430
16.	Jasa Lainnya	777.880	891.470
PRODUK DOMESTIK BRUTO		95.295.600	102.635.650

Keterangan: * angka sementara; ** angka sangat sementara; satuan dalam juta rupiah

Sumber: BPS, 2024

<https://babel.bps.go.id/indicator/52/8/1/-tahunan-pdrb-menurut-lapangan-usaha-atas-dasar-harga-berlaku.html>



Tabel-57. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2024

No.	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya, 2022* (juta rupiah)	Satu Tahun Sebelumnya, 2023** (juta rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10.875.680	11.285.100
1.	a. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasling	7.064.930	7.455.130
	- Tanaman Pangan	306.470	255.730
	- Tanaman Hortikultura	1.020.090	1.096.740
	- Tanaman Perkebunan	4.990.360	5.331.540
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya	616.660	629.040
	b. Kehutanan	137.120	147.390
	c. Perikanan	3.673.630	3.682.580
2.	Pertambangan dan Penggalian	6.483.730	6.406.140
	a. Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi	241.680	233.420
	b. Pertambangan Biji Logam	4.696.860	4.596.060
	c. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.545.190	1.576.660
3.	Industri Pengolahan	12.484.640	12.724.360
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	58.960	60.370
	a. Ketenagalistrikan	53.470	54.430
	b. Pengadaan Gas dan Produksi Es	5.490	5.940
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.610	10.680
6.	Konstruksi	4.845.590	5.278.870
7.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	8.488.840	8.687.320
	a. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1.274.850	1.078.430
	b. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	7.214.000	7.608.890
8.	Transportasi dan Pergudangan	2.273.520	2.488.100
	a. Angkutan Darat	809.630	886.840
	b. Angkutan Laut	400.530	412.300
	c. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	32.890	34.360



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya, 2022* (juta rupiah)	Satu Tahun Sebelumnya, 2023** (juta rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Angkutan Udara	705.670	812.840
	e. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	324.790	341.770
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.561.970	1.716.940
	a. Penyediaan Akomodasi	63.400	68.630
	b. Penyediaan Makan Minum	1.498.580	1.648.310
10.	Informasi dan Komunikasi	1.726.630	1.965.180
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.027.000	1.169.790
12	Real Estate	2.027.310	2.111.160
13	Jasa Perusahaan	139.300	151.640
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.094.320	3.299.530
15	Jasa Pendidikan	1.446.430	1.601.730
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	821.940	894.450
17	Jasa Lainnya	438.700	486.810
PRODUK DOMESTIK BRUTO		57.805.150	60.338.140



Tabel-58. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data: 2023

No.	Jenis Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peraturan Daerah		No. 3 Tahun 2020	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040
2	Peraturan Daerah		No. 10 Tahun 2020	Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
3	Peraturan Daerah		No. 5 Tahun 2021	Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan Taman Bumi (Geopark)
4	Peraturan Gubernur		No. 32 Tahun 2020	Pedoman Pengendalian Pencemaran Air Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Budidaya Tambak Udang
5	Peraturan Gubernur		No. 33 Tahun 2020	Pendanaan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Kewenangan Provinsi Yang Dibebankan Kepada Pemrakarsa/Pelaku Usaha
6	Peraturan Gubernur		No. 37 tahun 2020	Pedoman Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7	Peraturan Gubernur		No. 52 Tahun 2020	Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022
8	Peraturan Gubernur		No. 48 Tahun 2020	Pedoman Umum Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Masa Pandemicorona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020

Sumber: jdih.babelprov.go.id, 2023



Tabel-59. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2024

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2023(Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2024(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		BIDANG KESEHATAN	152,224,563,060	
	PAD	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	120,839,726,023	
	DAK Non Fisik - BOKB-KB			
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan			
	PAD, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	802,372,487	
	PAD	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	30,582,464,550	
2		BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	244,241,055,620	
	PAD, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	47,718,101,313	
	PAD	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	249,998,500	
	PAD	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	473,991,619	
	PAD	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2,854,343,719	



No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2023(Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2024(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PAD	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1,556,619,288	
	PAD	Program Pengembangan Perumahan	718,298,000	
	PAD	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	3,885,909,734	
	PAD	Program Penyelenggaraan Jalan	166,254,819,099	
	PAD	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,803,624,000	
	PAD	Program Penatagunaan Tanah	0	
	PAD	Program Penataan Bangunan Gedung	18,725,350,348	
3		BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	14,773,760,210	
	PAD	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	1,142,609,500	
	PAD	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4,052,180,980	
	PAD	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	131,500,000	
	PAD	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	309,777,020	
	PAD	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	449,892,700	
	PAD	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	83,600,000	
	PAD	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	101,999,600	



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2023(Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2024(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PAD	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	584,869,836	
	PAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	229,228,800	
		Program Pengelolaan Hutan	5,797,080,620	
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	647,069,200	
		Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	729,963,454	
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	513,988,500	
4		BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	879,314,000	
	PAD	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	368,339,000	
	PAD	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	401,000,000	
	PAD	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	109,975,000	
5		BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN	225,050,000	
	PAD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	35,000,000	
	DANA HIBAH RISET		149,050,000	
	DANA ALOKASI RISET DARI PENELITIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		41,000,000	
6		Bidang Penanggulangan Bencana	5,519,963,016	
	PAD	Program Penanggulangan Bencana	5,519,963,016	



No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2023(Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2024(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7		Bidang Kelautan dan Perikanan	15,286,765,206	
	PAD	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil	1,240,710,380	
	PAD	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	11,633,954,173	
	PAD	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	773,437,800	
	PAD	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1,168,852,003	
	PAD	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	469,810,850	
		TOTAL	433,150,471,112	

Keterangan : *)Data diolah dari sistem SIPD APBD induk TA. 2023

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel-59.A Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2024

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2022(Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PAD	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	34,143,043,750	120,839,726,023
	DAK Non Fisik - BOKB-KB			
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan			
	PAD, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	62,348,841	802,372,487
	PAD	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,512,891,160	30,582,464,550
	PAD, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	22,778,750,383	47,718,101,313
	PAD	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7,533,062,000	249,998,500
	PAD	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0	473,991,619
	PAD	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	598,720,000	2,854,343,719
	PAD	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1,198,950,000	1,556,619,288
	PAD	Program Pengembangan Perumahan	441,089,873	718,298,000
	PAD	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	3,369,709,414	3,885,909,734



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2022(Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PAD	Program Penyelenggaraan Jalan	105,160,574,193	166,254,819,099
	PAD	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2,189,146,293	1,803,624,000
	PAD	Program Penatagunaan Tanah	0	0
	PAD	Program Penataan Bangunan Gedung	0	18,725,350,348
	PAD	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	935,240,200	1,142,609,500
	PAD	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4,334,204,024	4,052,180,980
	PAD	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	0	131,500,000
	PAD	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	54,003,600	309,777,020
	PAD	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	69,737,006	449,892,700
	PAD	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0	83,600,000
	PAD	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	55,205,240	101,999,600
	PAD	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	584,869,836
	PAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0	229,228,800
		Program Pengelolaan Hutan	1,496,468,538	5,797,080,620



No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2022(Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	88,247,669	647,069,200
		Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	82,148,000	729,963,454
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	138,340,129	513,988,500
	PAD	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	42,497,359	368,339,000
	PAD	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	41,825,564	401,000,000
	PAD	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	41,877,000	109,975,000
	PAD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	491,287,692	35,000,000
	DANA HIBAH RISET			149,050,000
	DANA ALOKASI RISET DARI PENELITIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			41,000,000
	PAD	Program Penanggulangan Bencana	3,856,983,362	5,519,963,016
	PAD	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil	138,998,209	1,240,710,380
	PAD	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7,014,397,422	11,633,954,173
	PAD	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	352,835,056	773,437,800
	PAD	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	430,450,316	1,168,852,003
	PAD	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	0	469,810,850



DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024



No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2022(Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		TOTAL	198,653,032,293	433,150,471,112

Tabel-60. Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2023

No.	Sumber	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pajak	889.757.101.454,42
2	Retribusi	9.571.696.143,00
3	Laba BUMD	10.026.5504.291,32
4	Pendapatan lainnya yang Sah	103.247.970.116,97
5	Jumlah	1.012.603.272.005,71

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov.Kep.Babel, 2024
Penjelasan isi tabel:



Tabel-60. A Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2022

No.	Sumber	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pajak	848.653.198.396,00
2	Retribusi	13.609.682.900,00
3	Laba BUMD	6.500.000.000,00
4	Pendapatan lainnya yang Sah	169.542.058.250,00
5	Jumlah	1.038.304.939.546,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov.Kep.Babel, 2023
Penjelasan isi tabel:



Tabel-61. Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2023

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
1	2	3	4	5
1	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota	Semarak Menanam Rakyat BABEL (SEMARAK BABEL)	Program SEMARAK BABEL diinisiasi oleh Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung BAPAK Dr. SAFRIZAL ZA,M.Si , berangkat dari kerusakan lingkungan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta upaya untuk peningkatan kualitas tutupan lahan serta program untuk mengurangi inflasi daerah	
2.	Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang	Pengolahan sampah menjadi pelet sebagai bahan bakar energi listrik	Sampah diolah menjadi bahan bakar energi listrik dengan proses Peuyeumisasi. Peuyeumisasi sampah dilakukan dengan persiapan cara Probiotik, fermentasi dan pemrosesan secara komposting serta peragian. Pelet sampah yang dihasilkan dari proses tersebut kemudian mengalami proses gasifikasi menghasilkan gas bahan bakar untuk generator engine	Kesepakatan bersama antara Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung NOMOR: 671.11/13/DLH/2019 NOMOR: 002.MOU/HKM.00.01/UIW.BABEL/2019 tentang Pengembangan Energi Listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
3.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DLHK)	Aplikasi “Si Terbit DLH”	Merupakan inovasi yang dapat digunakan dalam pemberian perizinan, melihat tumpang tindih penggunaan lahan serta perubahan penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	
4.	BPDAS/ Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kompos BABEL	Kompos blok ini di khususkan pada perbaikan lahan eks tambang, untuk percepatan reklamasi lahan eks tambang	
5.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DLHK)	Sedekah Pohon	Inovasi ini diharapkan mamapu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perbaikan kualitas lahan dengan tigeline “ <i>menanam untutk amal jariah</i> ”. Diharapkan timbul kesadaran kolektif masyarakat dalam meningkatkan kegiatan penghijauan dengan menanam pohon sebagai bentuk adopsi dari inovasi	
6.	Kabupaten Bangka Tengah	Abang Timah untuk Bu Disa	Lahan bekas tambang timah untuk budidaya padi sawah, memanfaatkan lahan kritis bekas tambang timah menjadi lahan produktif dengan menggunakan pendekatan kongkrit dan holistik-sistemik.	
7.	PT.Timah,Tbk dan PT.SMM	Inovasi perusahaan dengan pemerintah daerah bangka belitung dan masyarakat	Inovasi pengelolaan lahan, Energi dan pesisir dan laut	



DOKUMEN

INFORMASI
KINERJA
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH TAHUN 2024



No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
9.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DLHK)	Literasi Lingkungan	Program literasi lingkungan ini diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengikut sertakan pihak-pihak swasta untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dengan melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah dalam penyediaan bibit yang akan ditanam, proses pembibitan di lakukan di sekolah-sekolah kemudian bibit tersebut di beli oleh perusahaan unttuk penghijauan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
10.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Inovasi pembangkit listrik tenaga surya (plts) energi baru terbarukan	Pemasangan PLTS Rooftop di Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
11.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BPBD)	siTangguh GIMA	Kehadiran aplikasi ini sangat membantu karena fitur kebencanaan menampilkan variable waktu bencana, titik koordinat, jenis bencana, kronologis serta kerugian, bantuan, luas terdampak dan korban jiwa serta informasi pendukung seperti profil desa dan kelurahan disertai parameter RT/RW/KK , luas wilayah, populasi , jenis kelamin, penduduk rentan maupun informasi rawan bencana	



No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
12.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Eco Brick	Metode eco brik ini merupakan metode untuk mengurangi sampah plastik serta mendaur ulangnya dengan metode botol plastik di jadikan benda lain yang lebih berguna.	
13.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pembuatan BBM dengan teknologi pirolisis sampah	Pengolahan sampah plastik menjadi BBM dilakukan menggunakan metode pirolisis, yaitu proses degradasi suatu material dengan suplai panas yang berjalan tanpa melibatkan oksigen atau dengan oksigen namun dengan jumlah sangat sedikit menghasilkan produk dalam bentuk padat, cair, dan gas	
14	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kampung Keluarga Cikar	Inovasi ini diinisiasi oleh DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk peningkatan kesejahteraan dan sumber daya manusia di desa-desa. Adanya Kampung Keluarga Cikar ini, pendataan akte kelahiran meningkat, jumlah industri rumahan meningkat, jumlah perlindungan anak terpadu serta keikutsertaan program Keluarga Berencana juga meningkat	Pergub Nomor 40 Tahun 2018, kemudian disempurnakan kembali melalui Pergub No 56 tahun 2020.
15	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kampung bebas malaria Kampung Sinergi Bebas Malaria (KAMPUNG SIBEMA)	Inisiasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
16	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Si Centing (siap cegah stunting)	Diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk pencegahan stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
17.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Babel Menanam	Inisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung, 2023

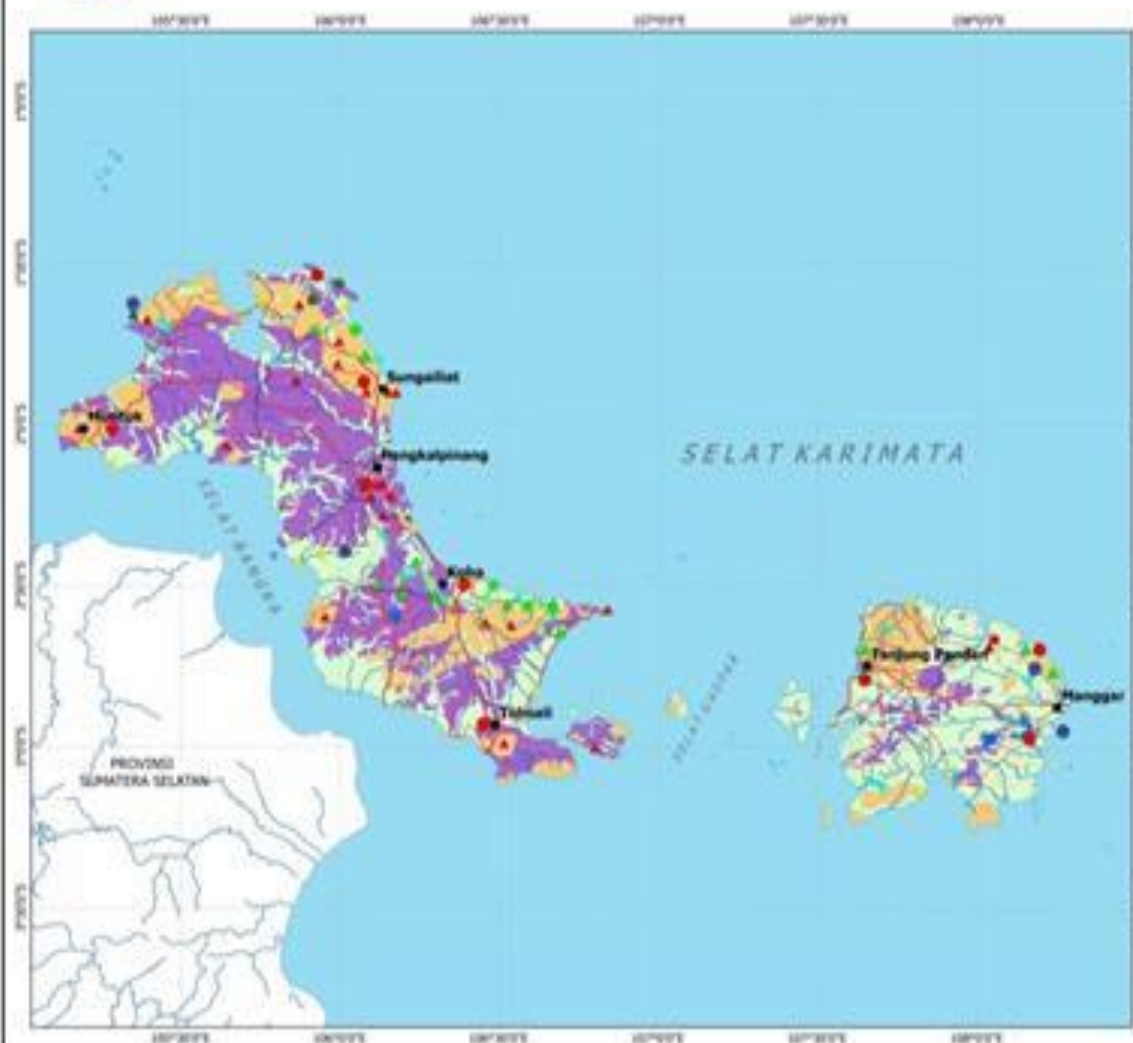
LAMPIRAN

PETA TEMATIK





**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**PETA SEBARAN POTENSI MINERAL DAN BATUAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017**

Proyek : Pengantar Mineral
Nama : [Blank]
Tanggal : 15 Mei 2017



Keterangan

— Batas Kabupaten — Jalan Utama — Kutung
■ Lokasi Kabupaten/Kota — Jalan Penghubung — Sungai

Geologi Sederhana

— Satuan Batuan Teras/Prefomer
— Satuan Batuan Sedimen/Mesozoik
— Satuan Batuan Vulkanik Kuarter

Komoditas	Potensi (Ton)	Komoditas	Potensi (Ton)
Orasit	51.665.063.465	Bauksit	852.500
Granit	106.933.616.668	Besi Primer	18.524.952
Kalsit	737.877.040	Marsat	182.219
Lampung	19.800.000	Pirit	720
Min	3.338.001.690	Seng	10.231
Ball / Bond Clay	260.000	Timah	1.832.839
Pasir Zirkon	35.327	Tembak	488.200
Merakujana	7.196.103.582	Titan Pasir	10.765
		Kandak	20.754

Sumber Data:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia 1:50.000 (2005)
2. ProfilKasir : Peta Geologi Lantai Bangka Belitung (1994), Bangka Belitung (1995) dan Belitung (1995)
3. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2014)
4. Data Dinas Pertambangan dan Energi Kota Bangka (2005)

Index Peta



DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



PEMERINTAH PROVINSI
BANGKA BELITUNG



KAJIAN STRATEGI PENGEMBANGAN
DESTINASI UNGGULAN DAN DESA WISATA
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PETA
STRUKTUR PERWILAYAHAN PARIWISATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Proyeksi
Sistem Grid
Datum Horizontal

Transverse Mercator
Grid Universal Transverse Mercator
WGS 84 Zone 48 Selatan

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

BATAS ADMINISTRATIF
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan

IBUKOTA ADMINISTRATIF
Kabupaten Kepulauan
Kabupaten Kecamatan

PERHUBUNGAN
Jalan Utama
Jalan Kolektor
Jalan Lain

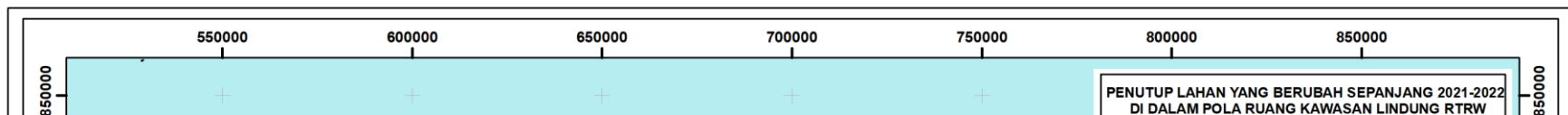
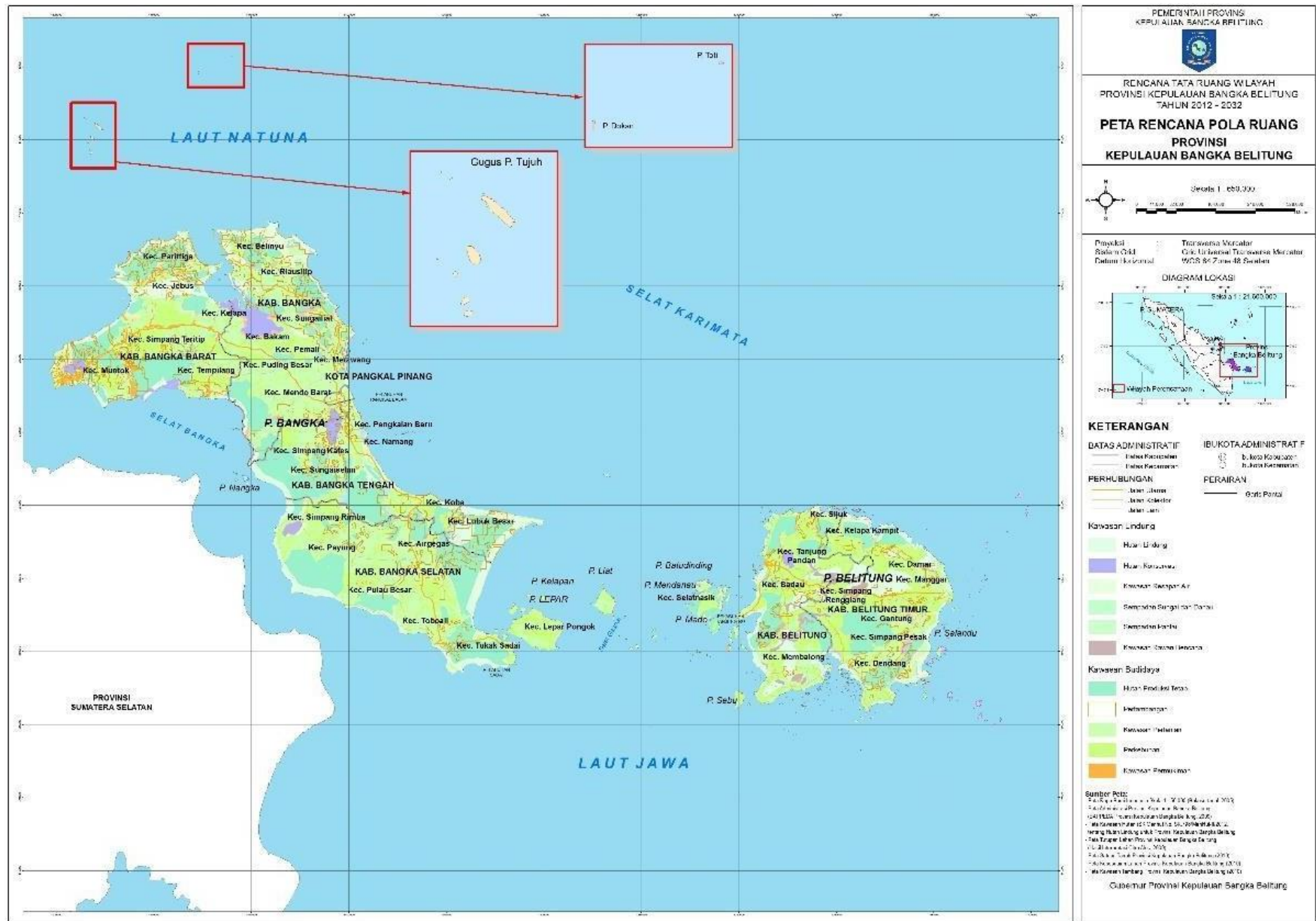
PERAIRAN
Garis Pantai

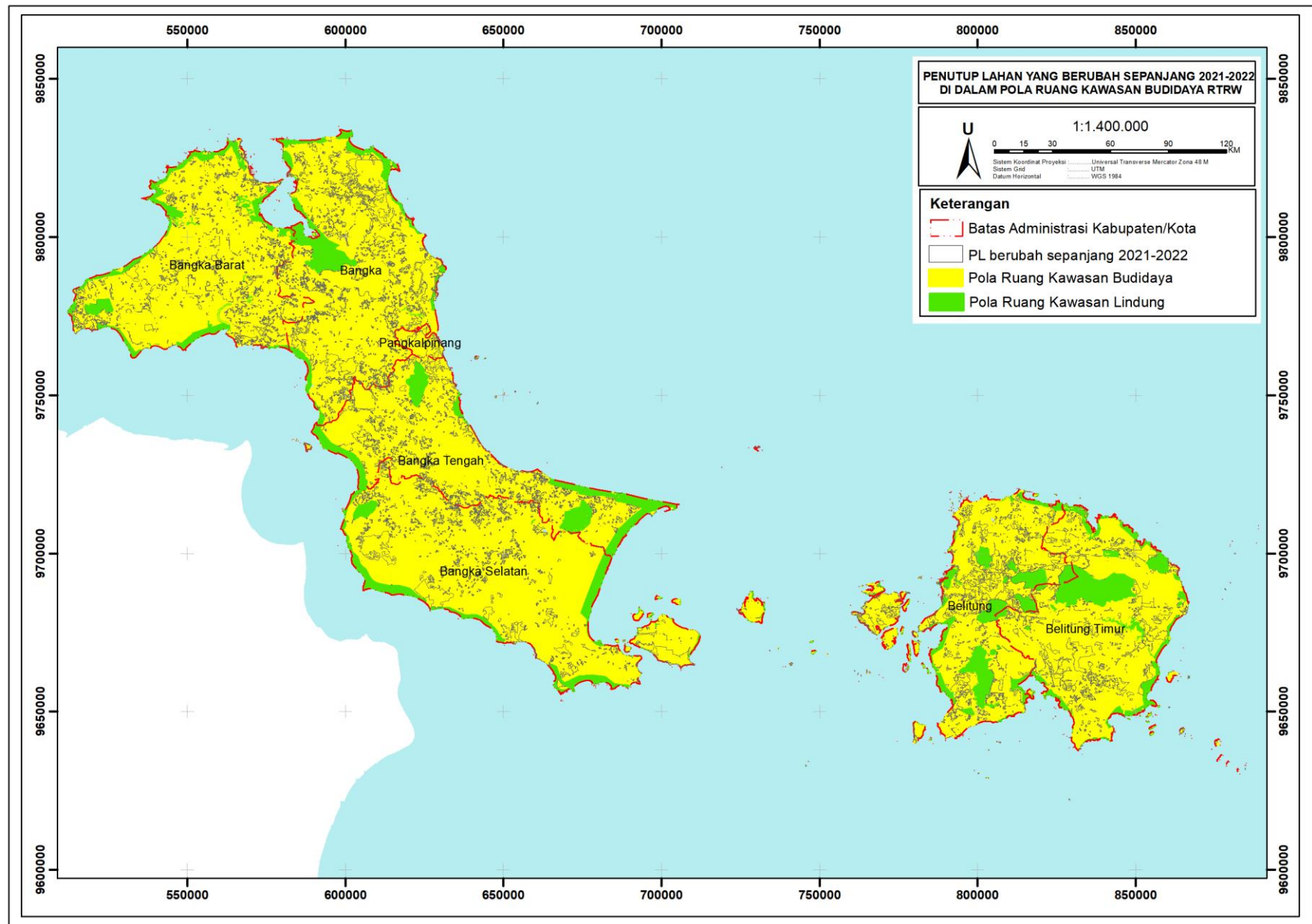
- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Pantai dan Mercusuar Tanjung Kalian | 21 Agrowisata Desa Nyelanding |
| 2 Kota Tua Muntok | 22 Pantai Tanjung Kerak |
| 3 Pesanggrahan Menumbing | 23 Pulau Lepar |
| 4 Pembuatan empe-empe Desa Bello Laut | 24 Pantai Liat |
| 5 Pantai Romodong | 25 Pulau Mendanau |
| 6 Pantai Penyusuk | 26 Kepulauan Salaman |
| 7 Kampung Gedong | 27 Kota Tanjung Pandan |
| 8 Pantai Parai Tenghi | 28 Pantai Bukit Baratu dan Desa Tanjung Binga |
| 9 Pantai Tanjung Pasena | 29 Pantai Tanjung Kelayang |
| 10 Pantai Matras | 30 Pantai Tanjung Tinggi |
| 11 Pantai Air Anyer | 31 Pulau Lengkuas |
| 12 Civic Centre | 32 Pantai Buning Mandi |
| 13 Pantai Pasir Padi | 33 Kepulauan Mempelak |
| 14 Hulian Kota Tuatunu | 34 Desa Lenggang Laskar Pelangi |
| 15 Museum Timah | 35 Pantai Punal |
| 16 Situs Kota Kapur | 36 Pantai Penyabong |
| 17 Agrowisata Desa Namang | 37 Tampak Batu Mentas |
| 18 Desa Nelayan Kurau | |
| 19 Pulau Ketawai | |

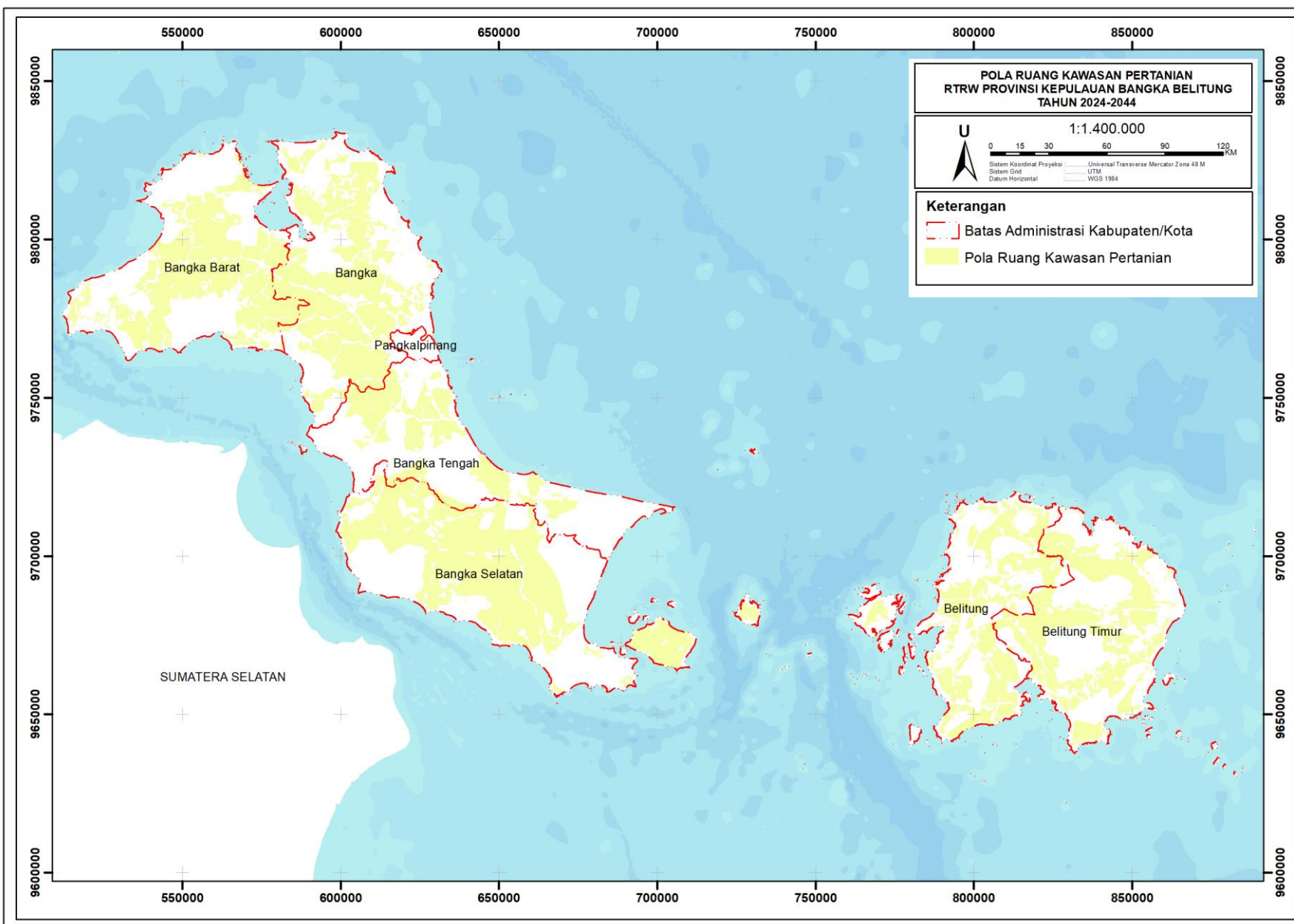
- Destinasi primer
- Destinasi sekunder
- Pusat Pelayanan Pariwisata Provinsi
- Pusat Pelayanan Destinasi Unggulan

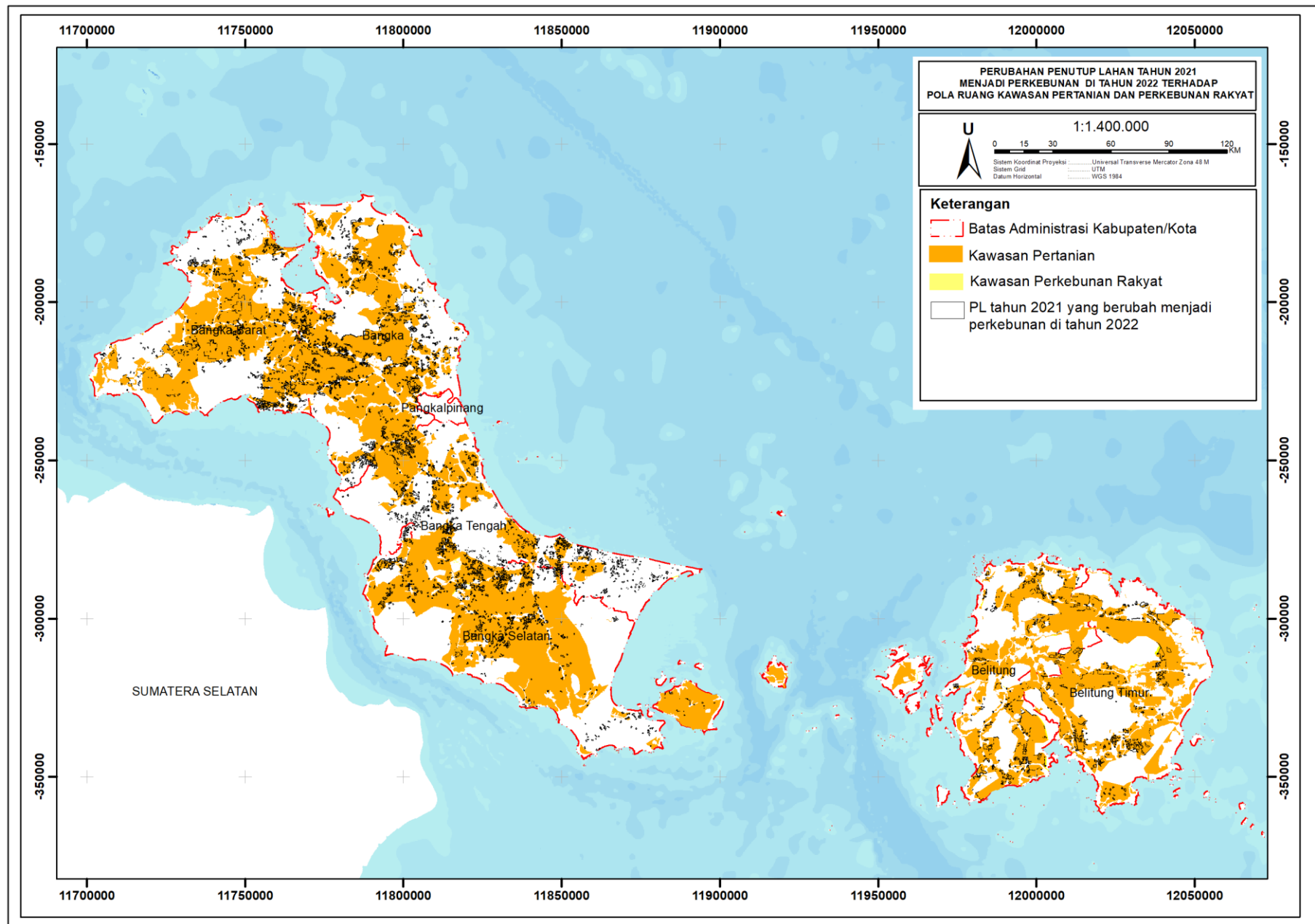
Sumber peta dasar:
RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010-2030

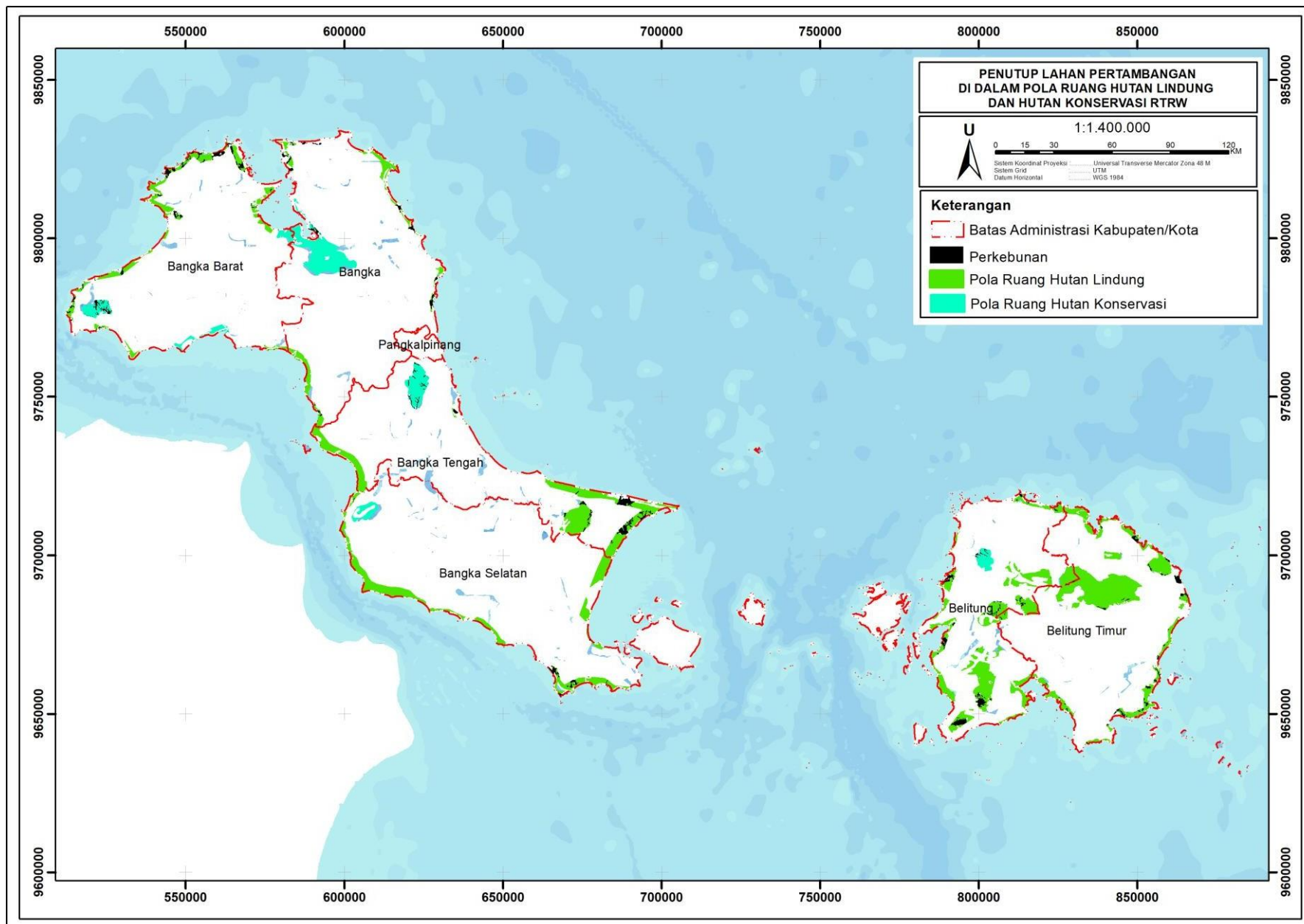
COME & EXPLORE
Bangka Belitung

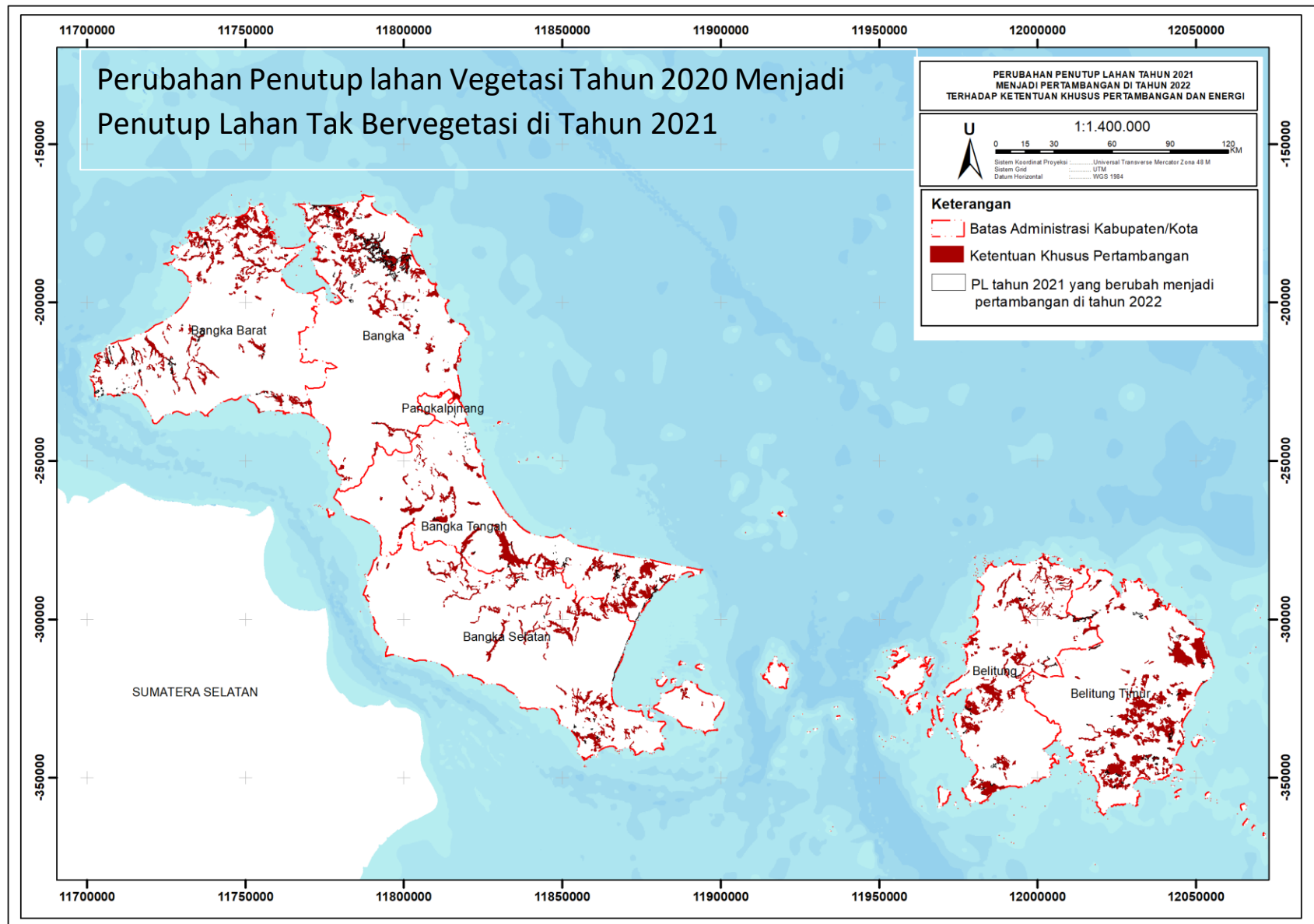


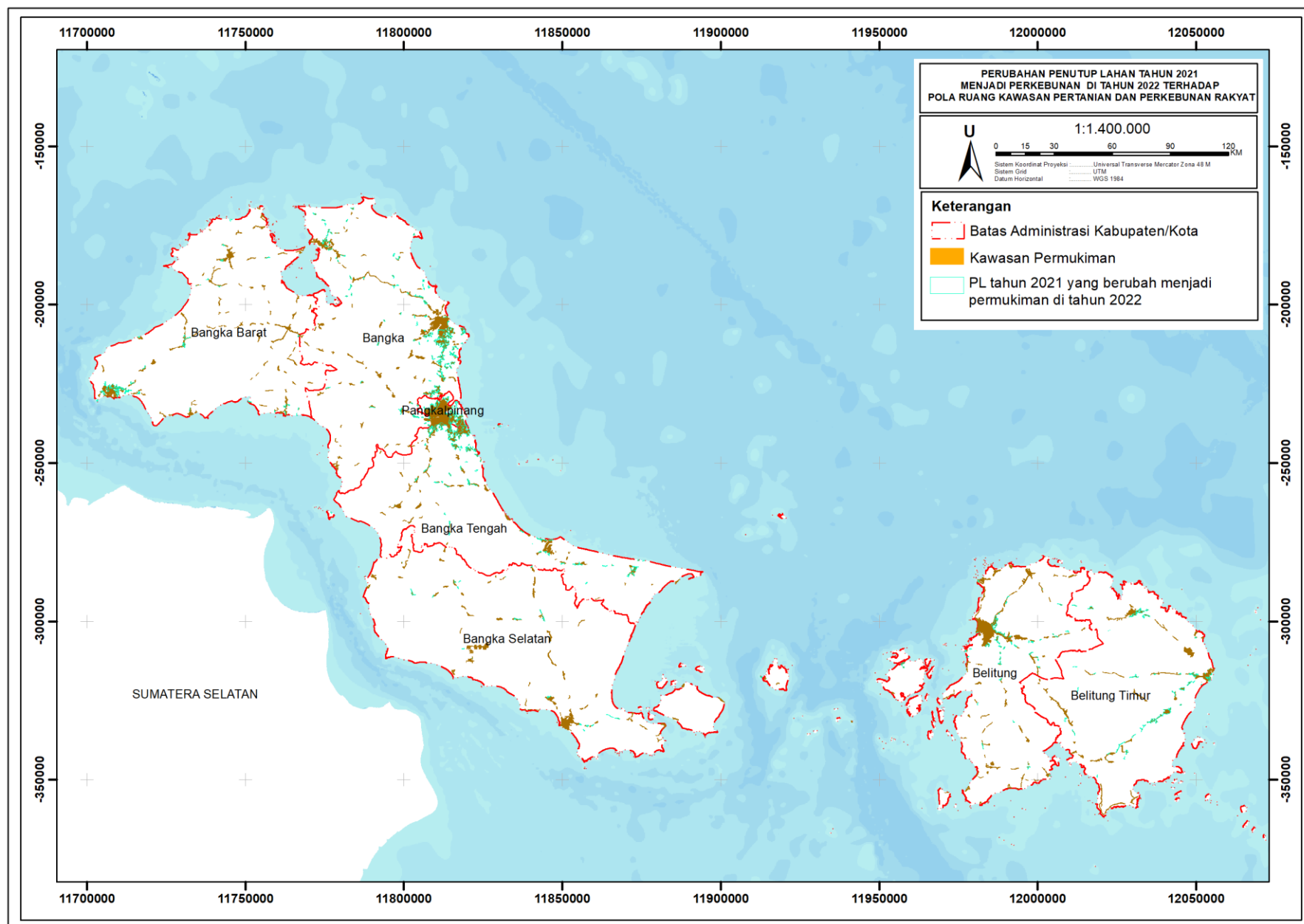


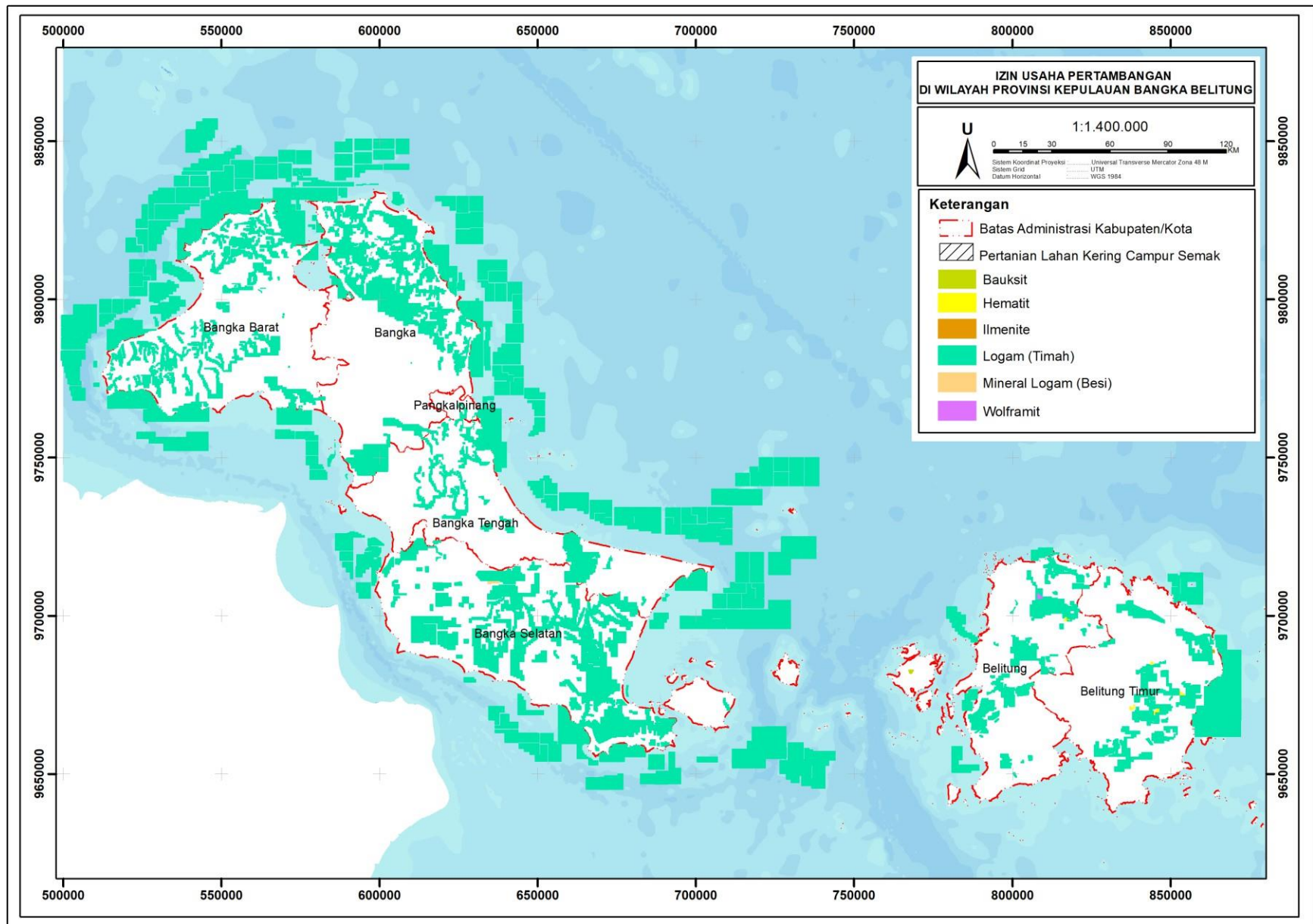


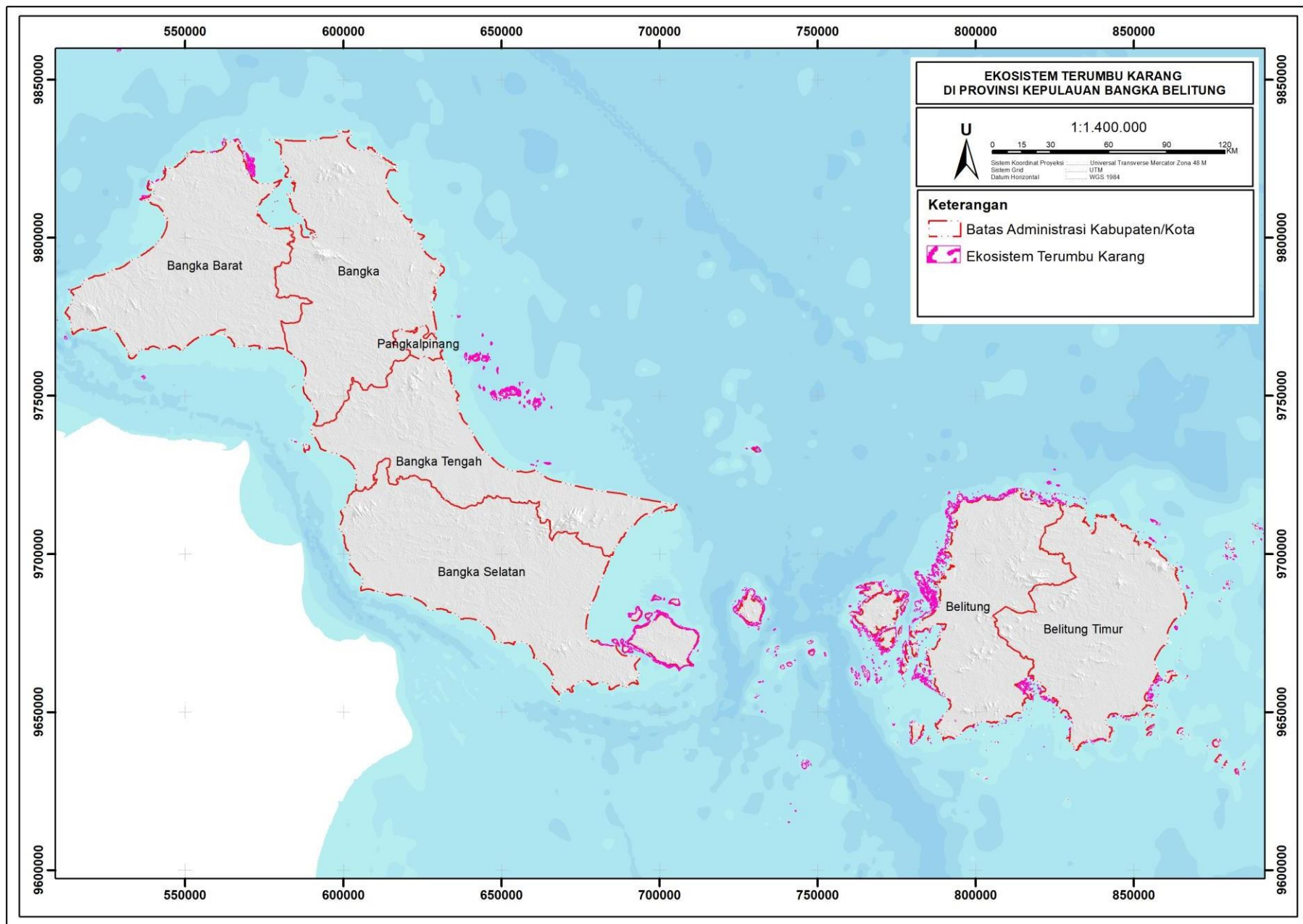


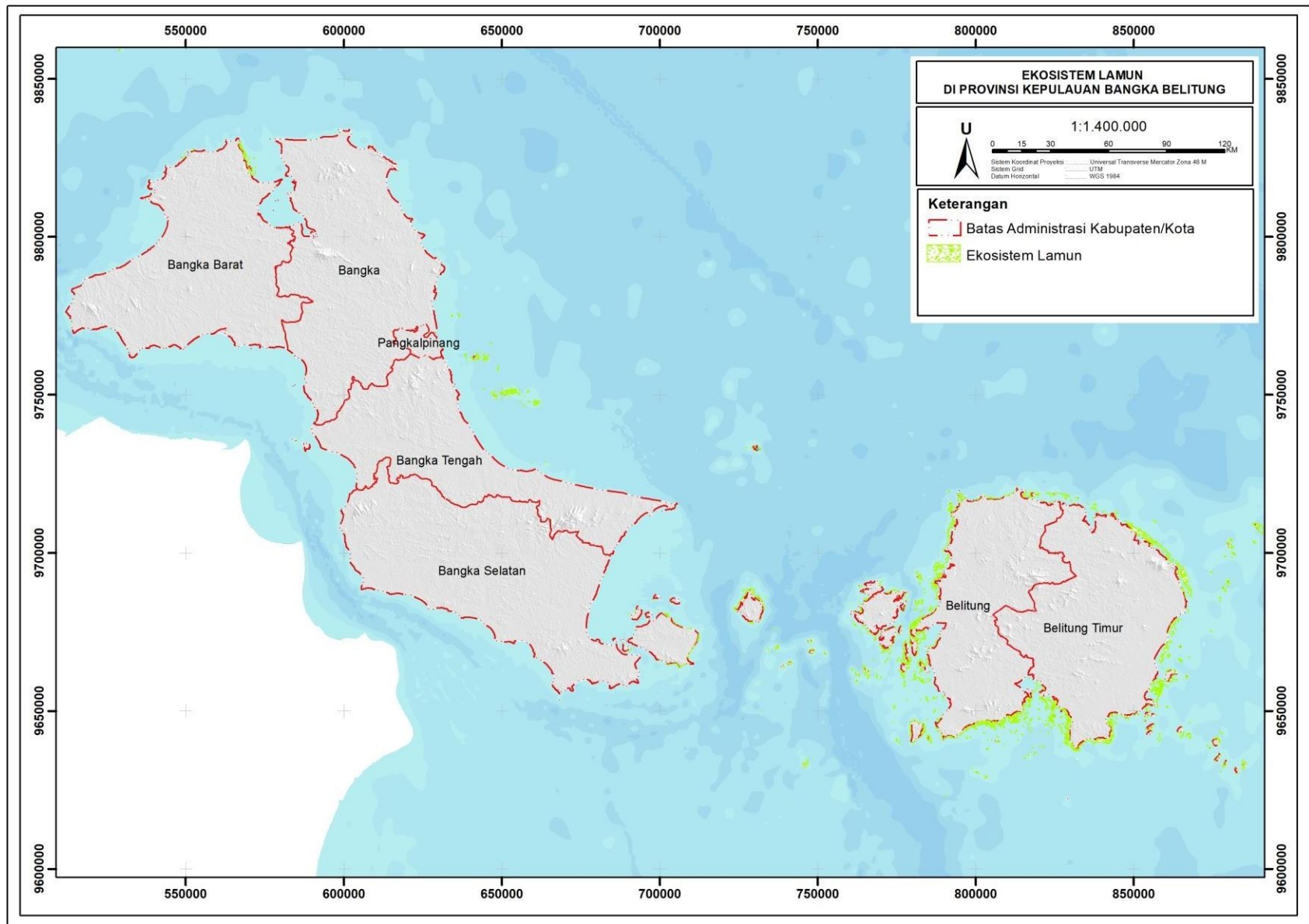


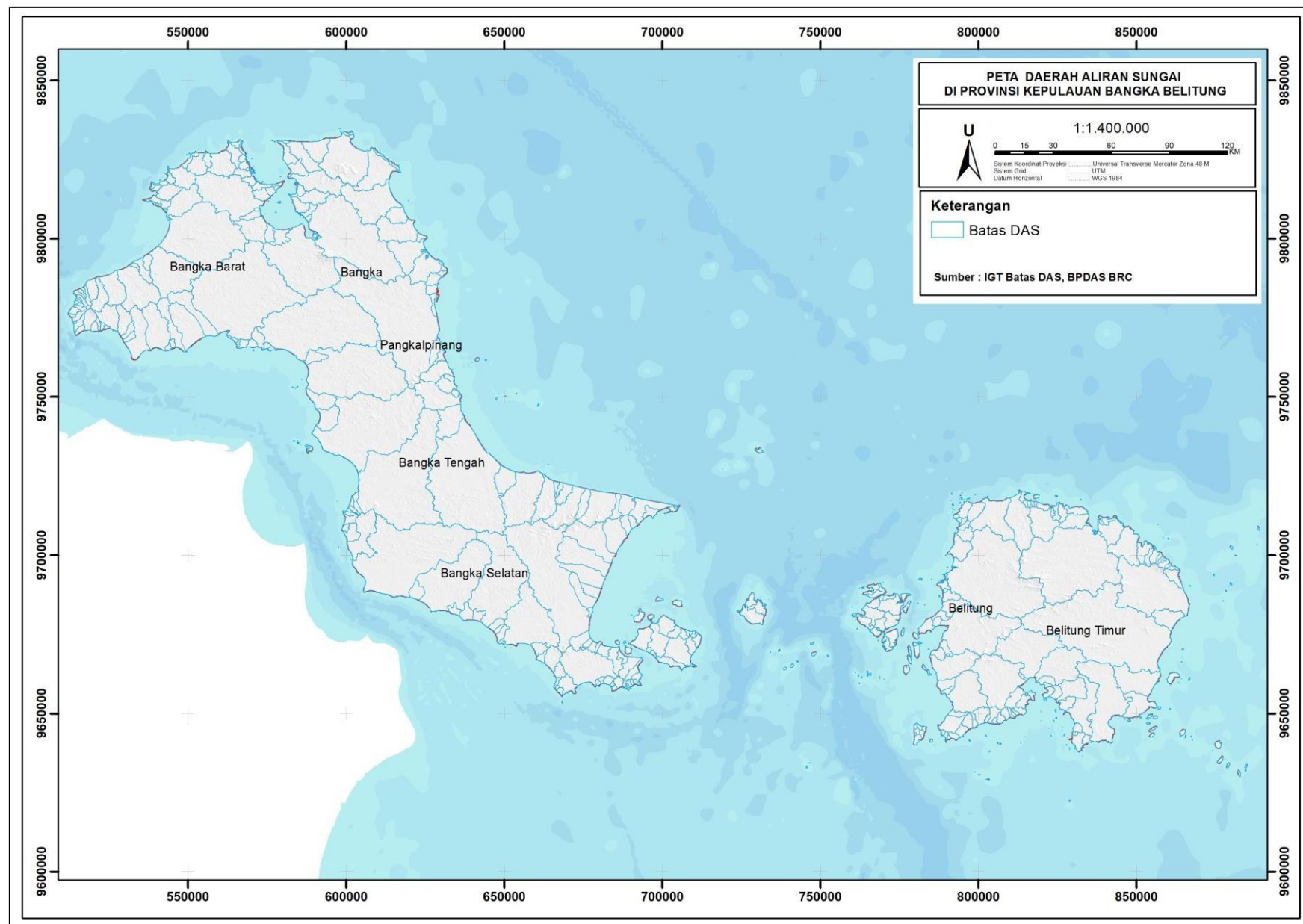


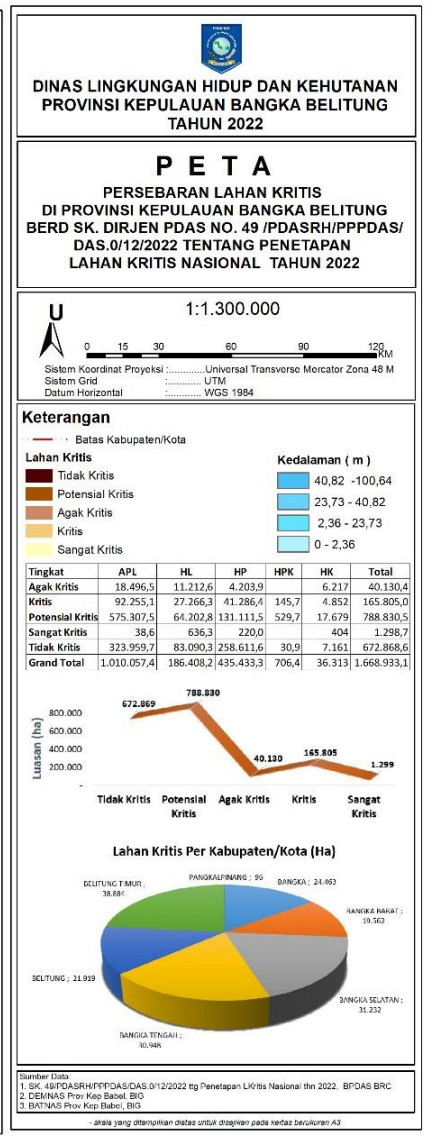
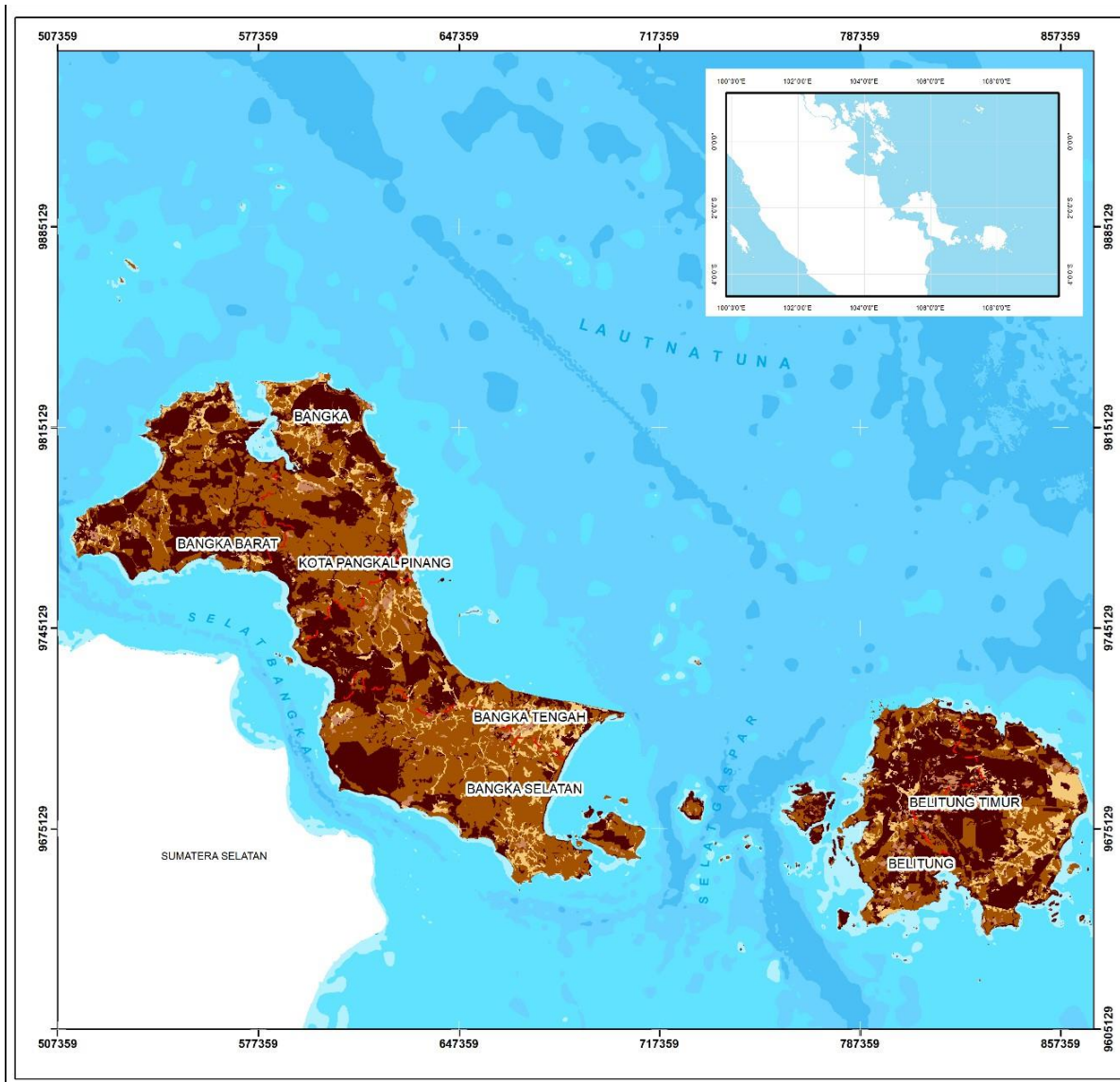


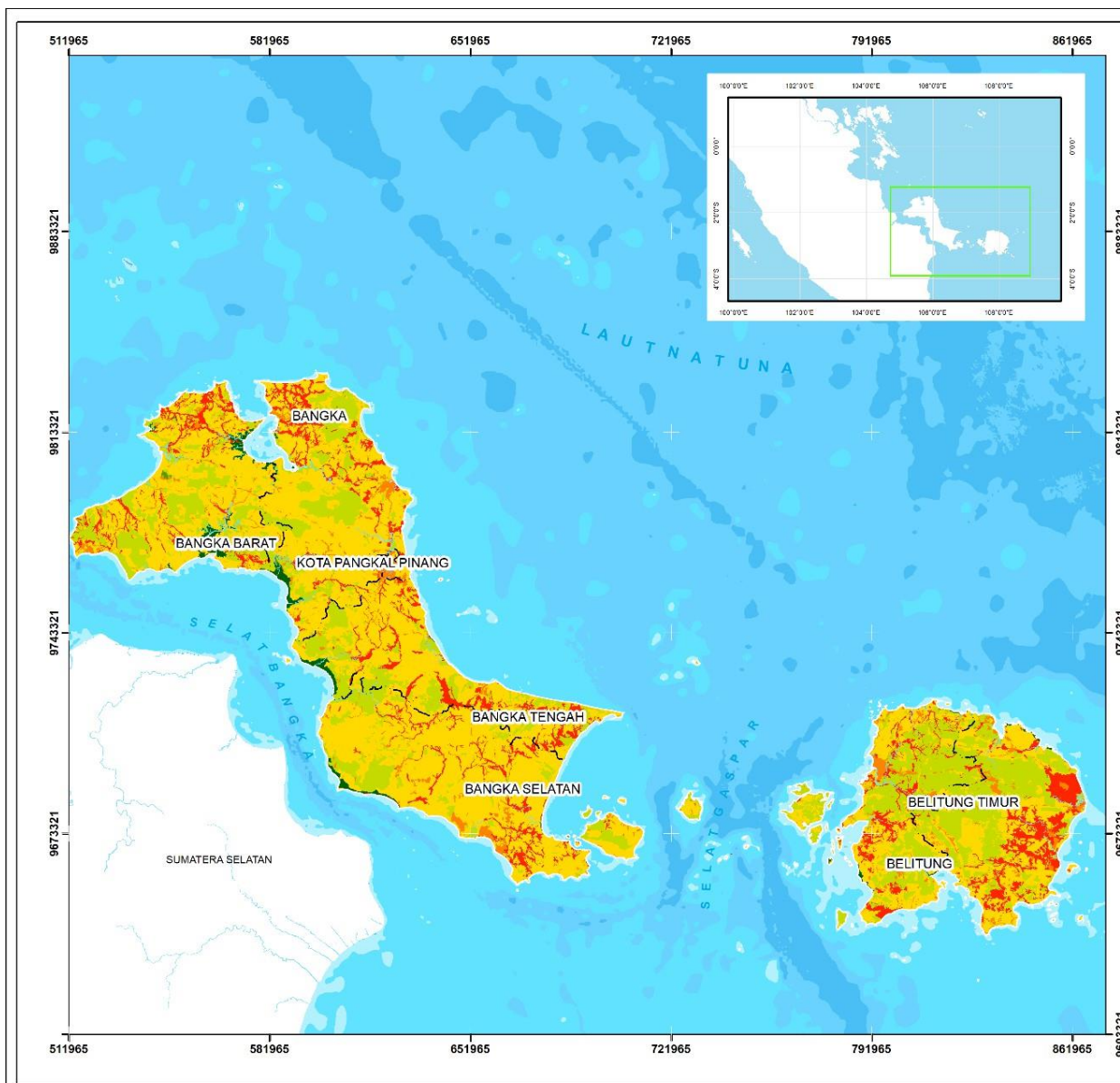















**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023**

P E T A
PETA STOK KARBON
BERDASARKAN PENUTUP LAHAN TAHUN 2021
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

U 1:1.300.000

0 15 30 60 90 120 Km

Sistem Koordinat Proyeksi : Universal Transverse Mercator Zona 48 M
Sistem Grid : UTM
Datum Horizontal : WGS 1984

Keterangan

----- Batas Kabupaten/Kota
Jaringan Sungai

Stok Karbon (C per hektar)

- C ton per ha >=200
- 100 <= C ton per ha <200
- 50 <= C ton per ha <100
- 10 <= C ton per ha <50
- 0 <= C ton per ha <10
- Stok C per ha = 0

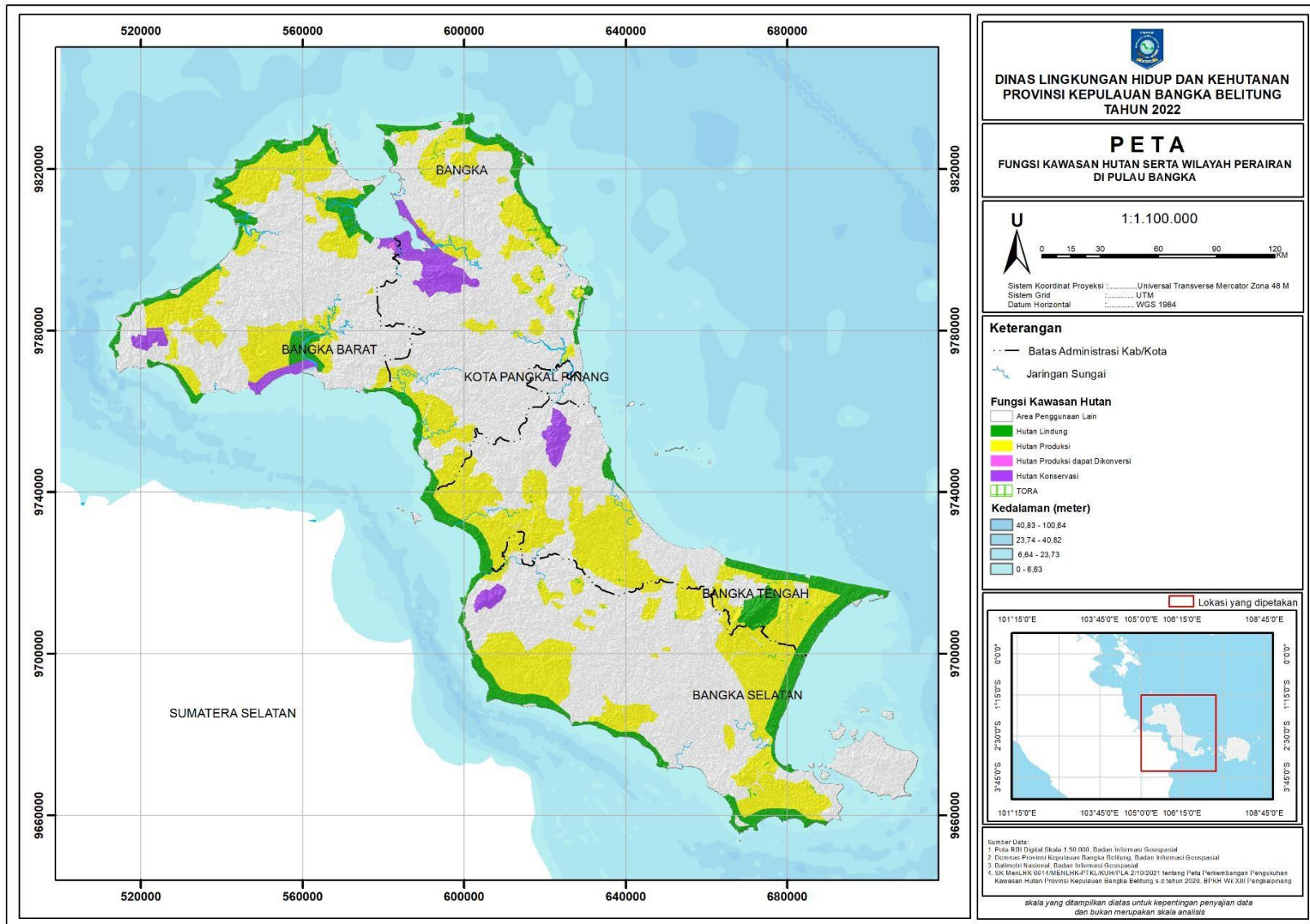
Kedalaman laut (m)

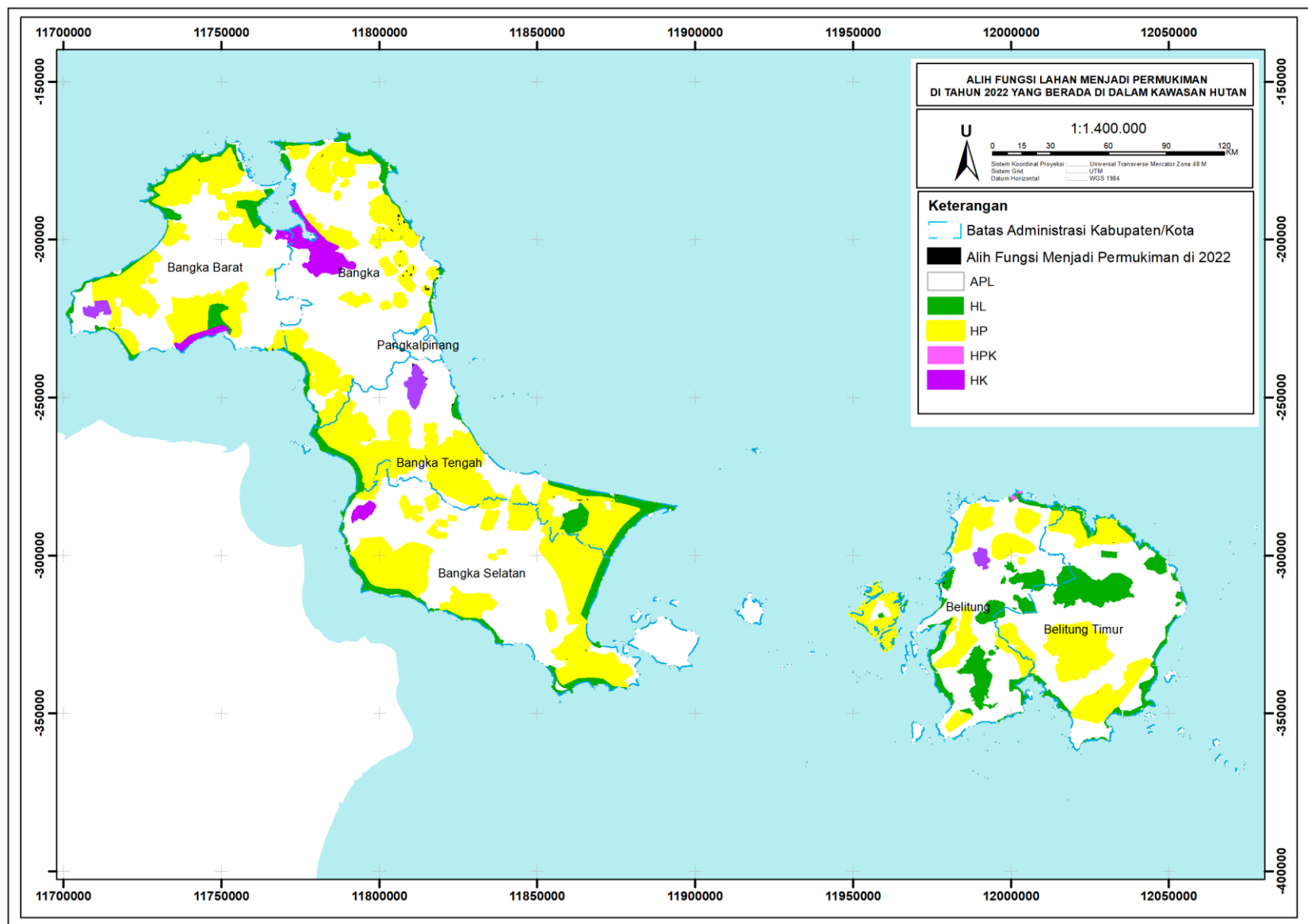
- 40,82 -100,64
- 23,73 - 40,82
- 2,36 - 23,73
- 0 - 2,36

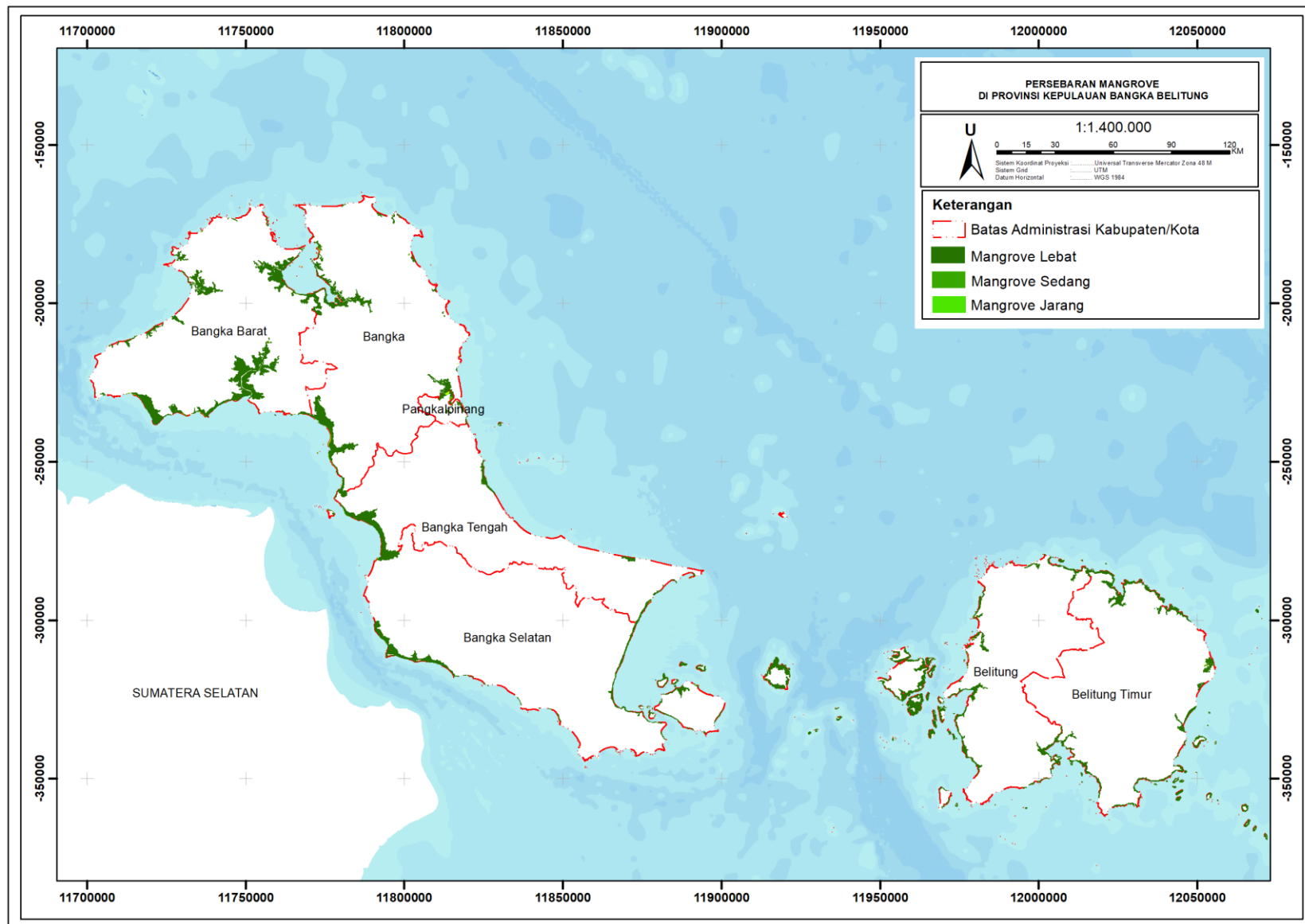
Tutupan	Luas (ha)	Stok C per ha	Total Stok Karbon
Air	4.914,52	0	0,00
Bundara	257,27	0	0,00
Belukar	154.146,17	30	4.624.383,57
Belukar Rawa	77.787,18	30	2.333.616,34
Hutan Mangrove	25.852,47	227,3	5.876.267,71
Hutan Mangrove Sekunder	40.771,21	52,9	2.160.058,67
Hutan Primer	486,77	134,2	65.367,90
Hutan Rawa Primer	380,79	110,4	42.046,80
Hutan Rawa Sekunder	50.144,72	75,6	3.795.959,27
Hutan Sekunder	87.337,64	91,1	7.958.276,47
Lahan Terbuka	8.235,89	2,5	20.589,73
Pemukiman	41.700,83	4	166.803,28
Perkebunan	275.755,00	63	17.372.568,04
Pertambangan	156.531,29	0	0,00
Pertanian Lahan Kering	52.769,07	10	527.690,66
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	663.633,17	30	19.908.985,53
Rawa	10.504,60	0	0,00
Savana	8.744,35	4	34.977,39
Sawah	7.775,96	3	15.451,93
Tambak	1.340,45	0	0,00
Transmigrasi	374,28	10	3.742,83
Grand Total	1.669.387,81	877,00	64.906.675,88

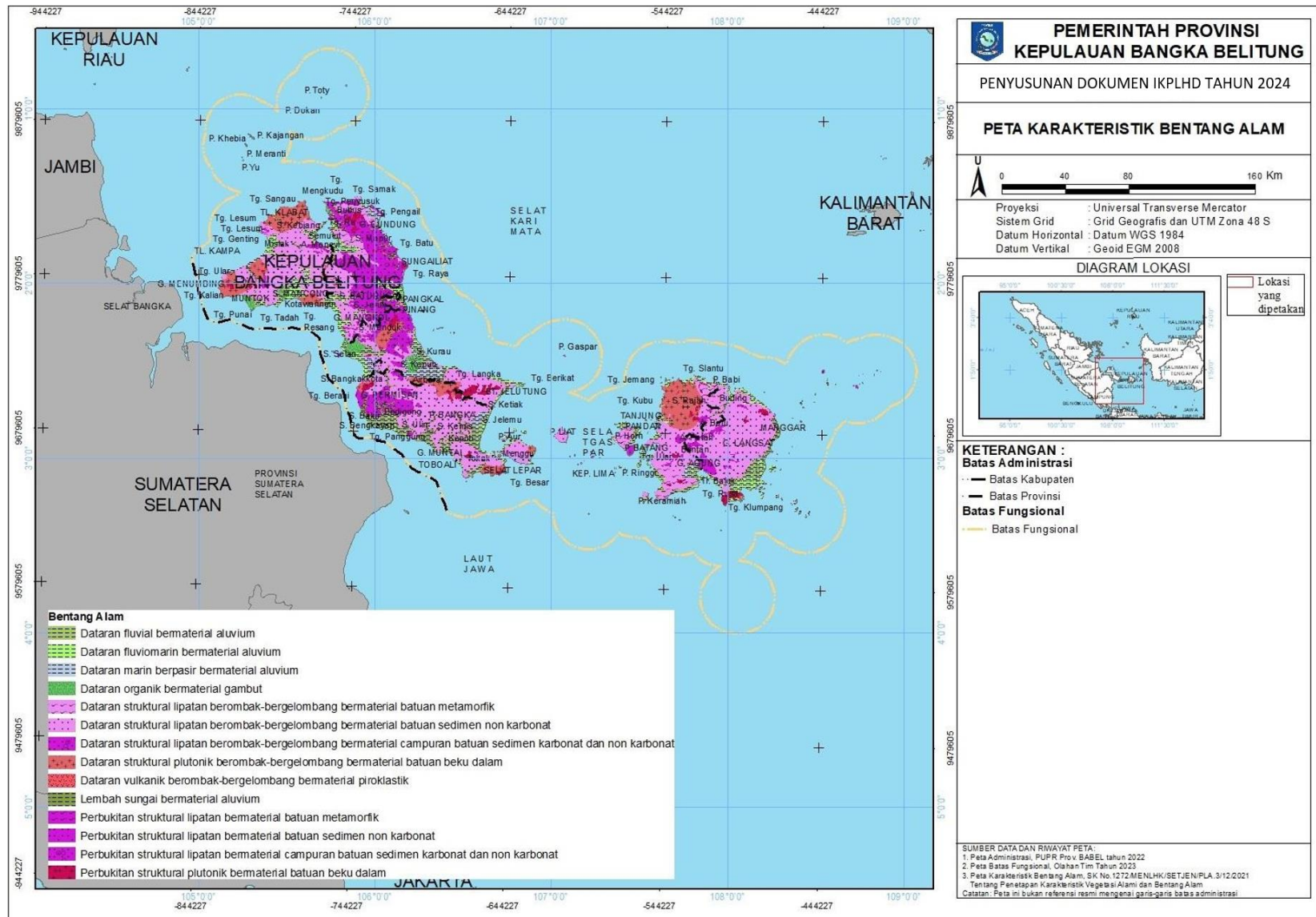
Sumber Data:
1. Penutup Lahan Skala 1:50.000 Tahun 2021, BPKHTL XII
2. Batas Administrasi Prov Kep Babel, DPU/PRPKP, 2022
3. Serapan dan Emisi Karbon, KLHK 2014
4. DEMNAS Prov Kep Babel, B/G
5. BATNAS Prov Kep Babel, B/G
6. Pengolahan data, 2023

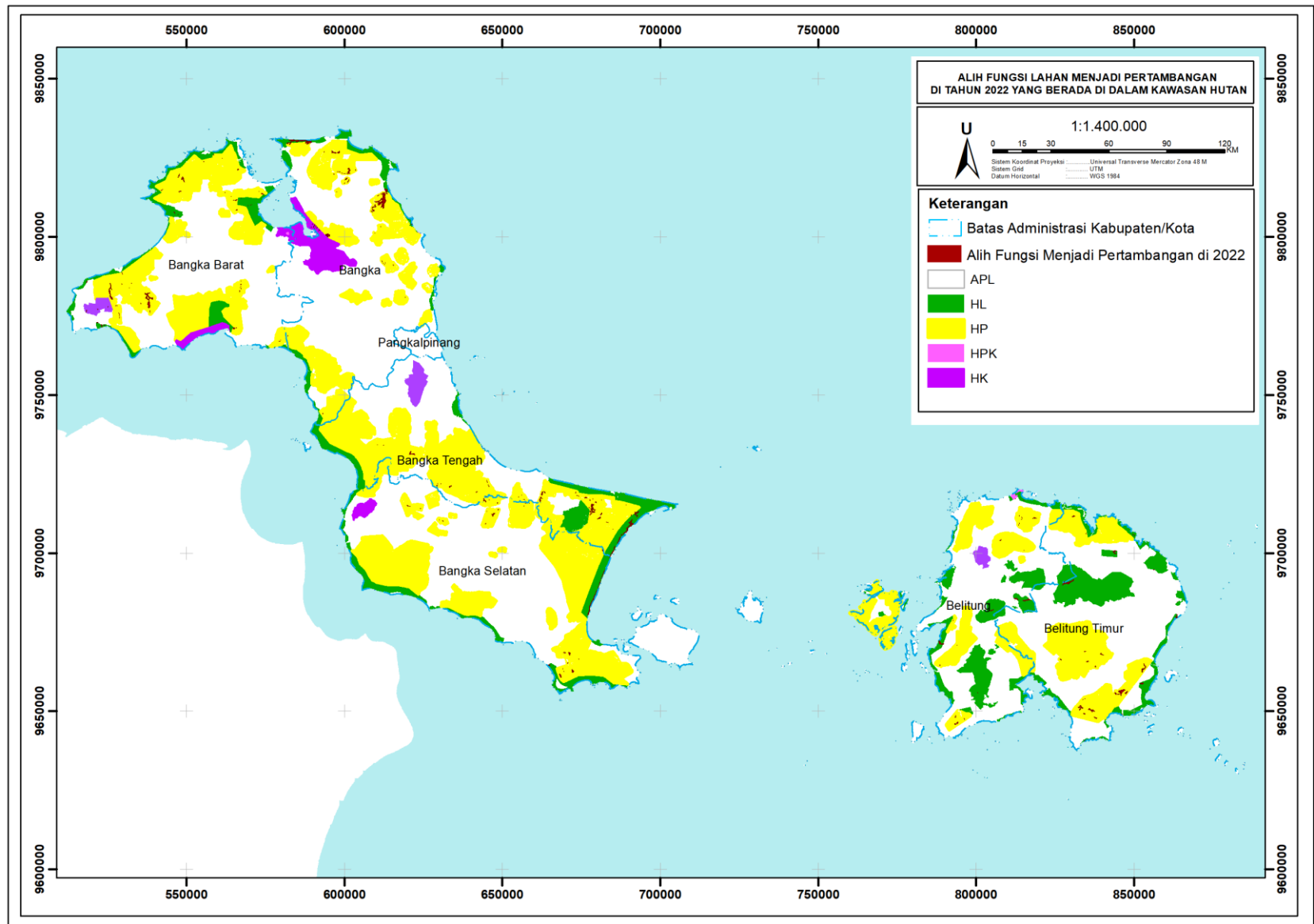
-Aneka yang ditampilkan diatas untuk diapakan pada kertas berukuran A3-

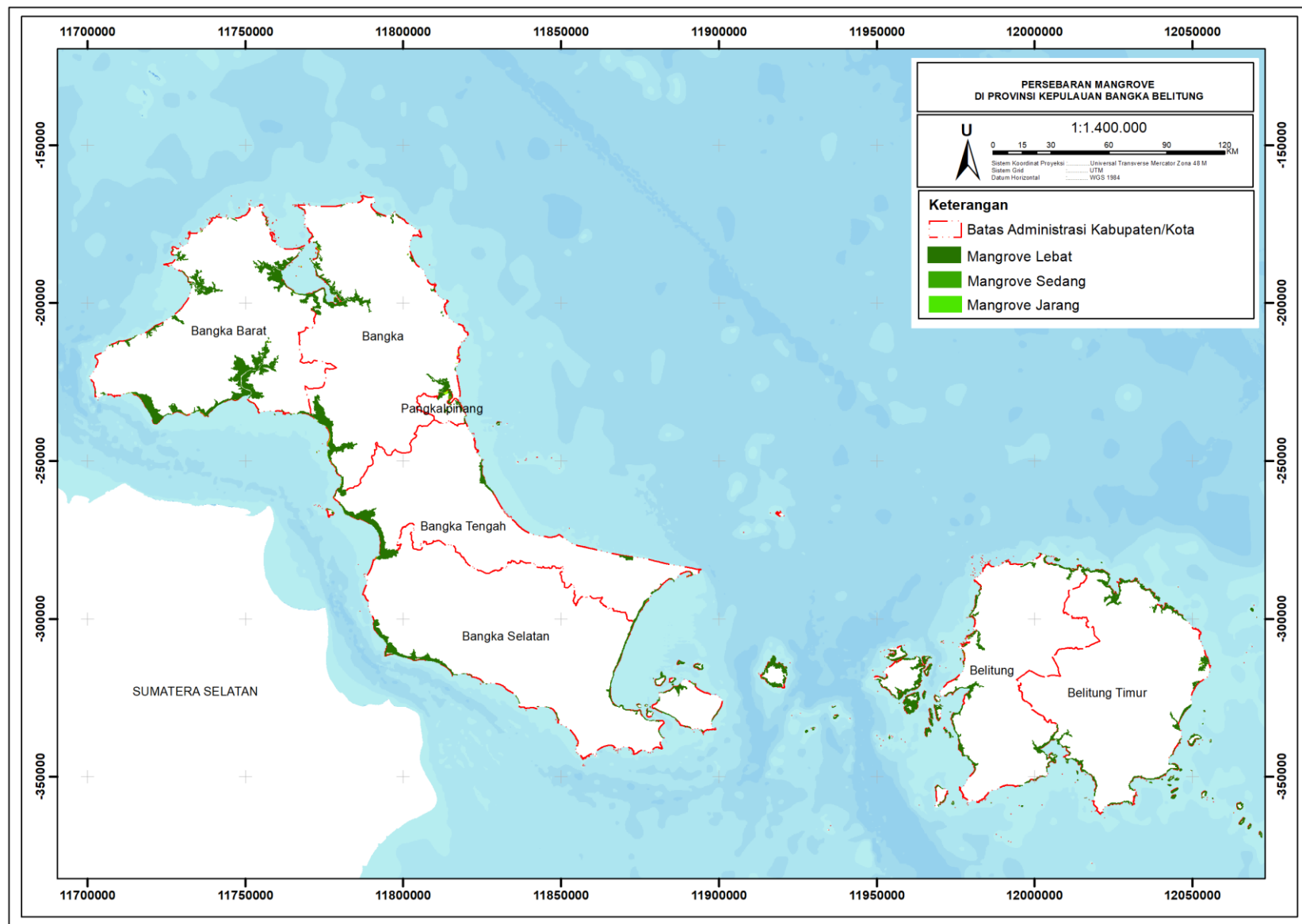


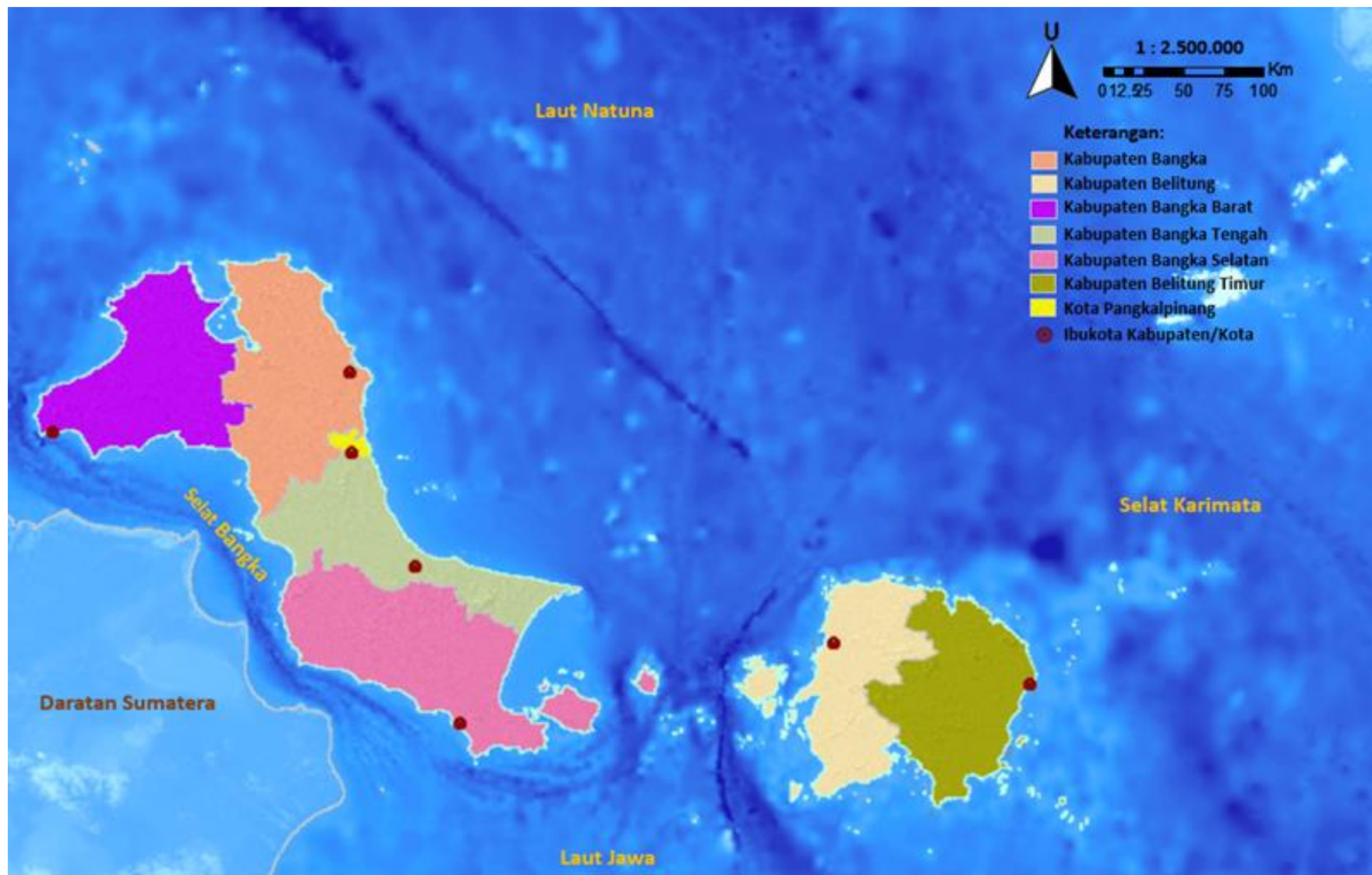


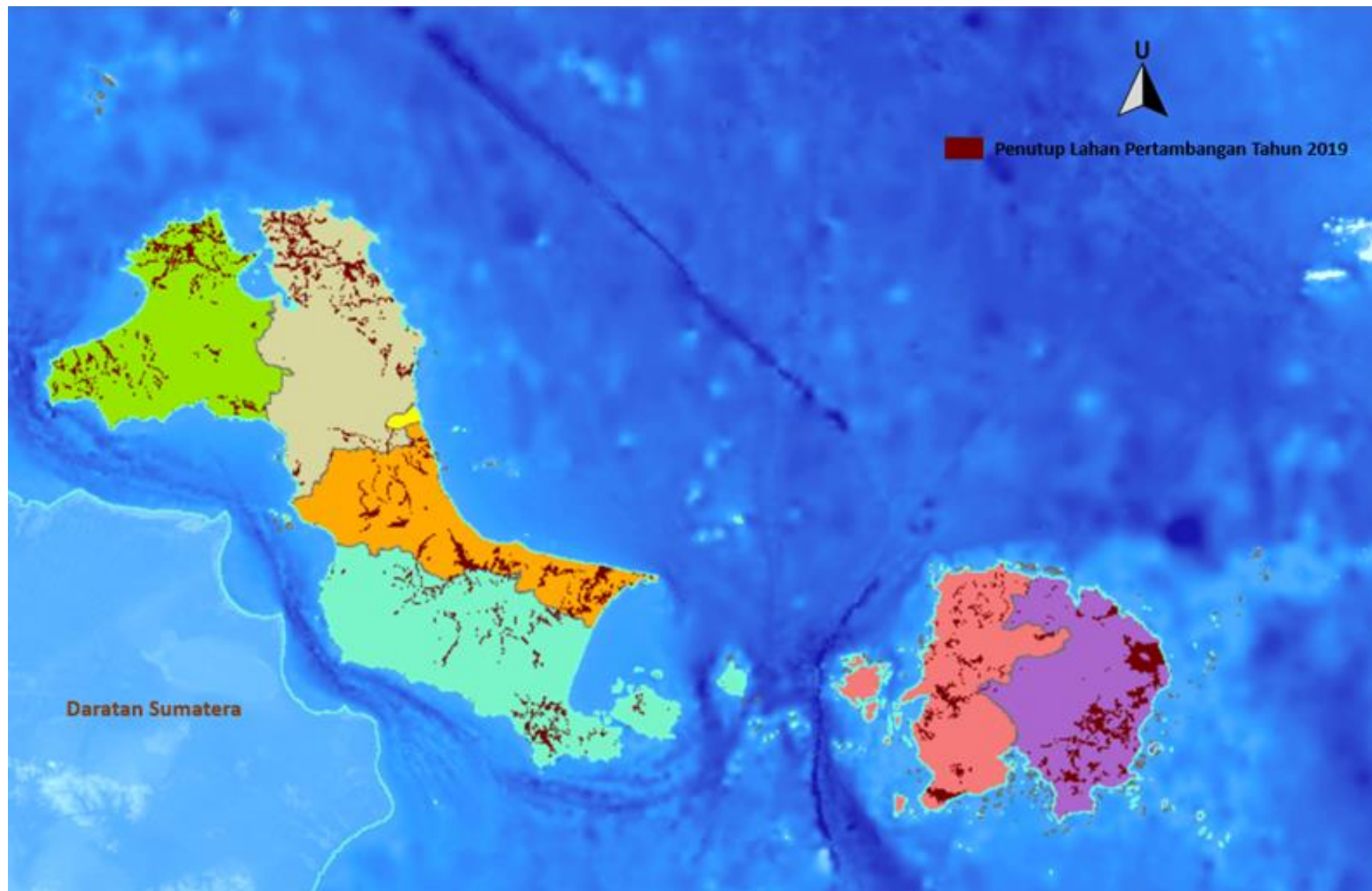


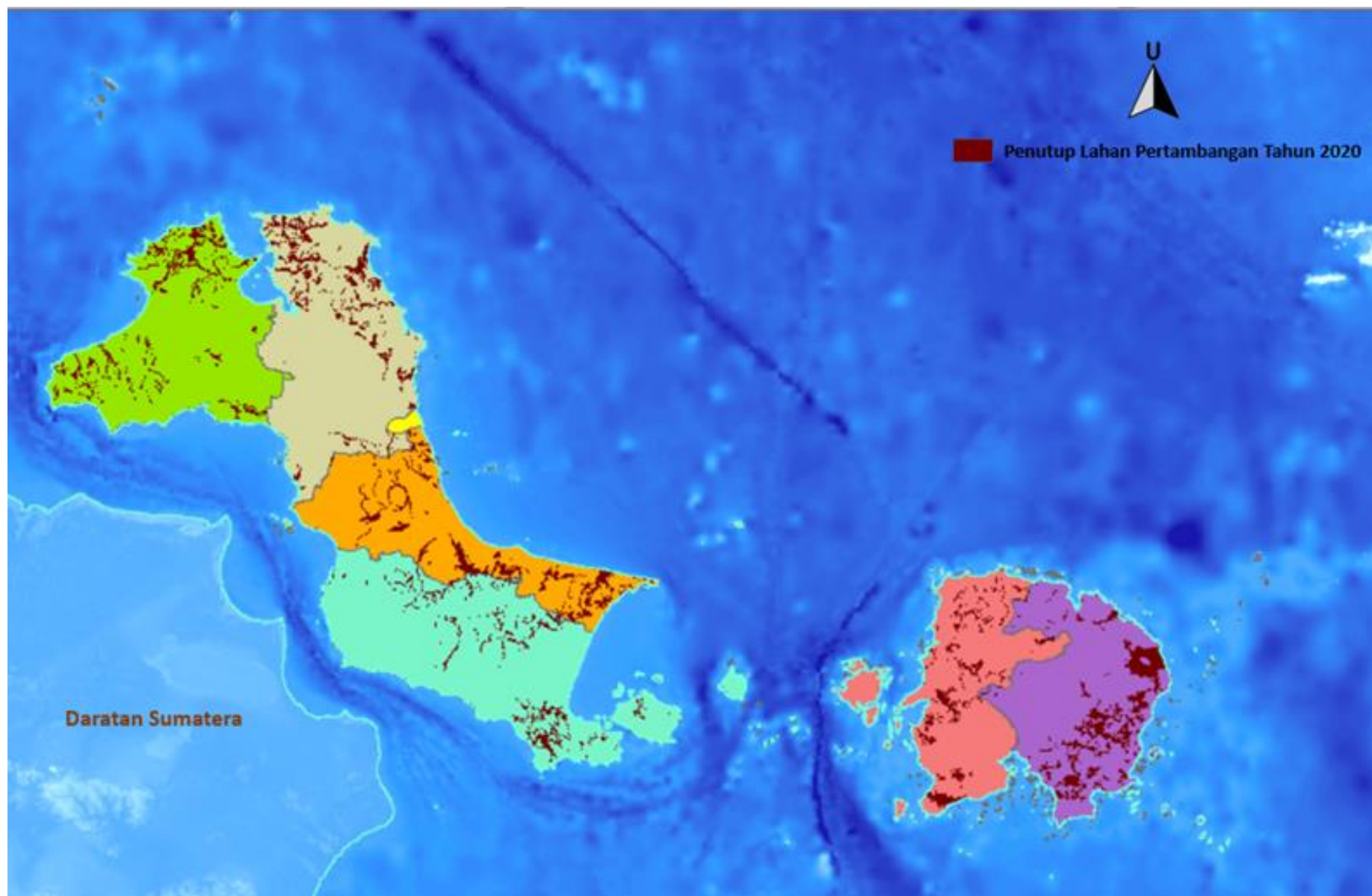


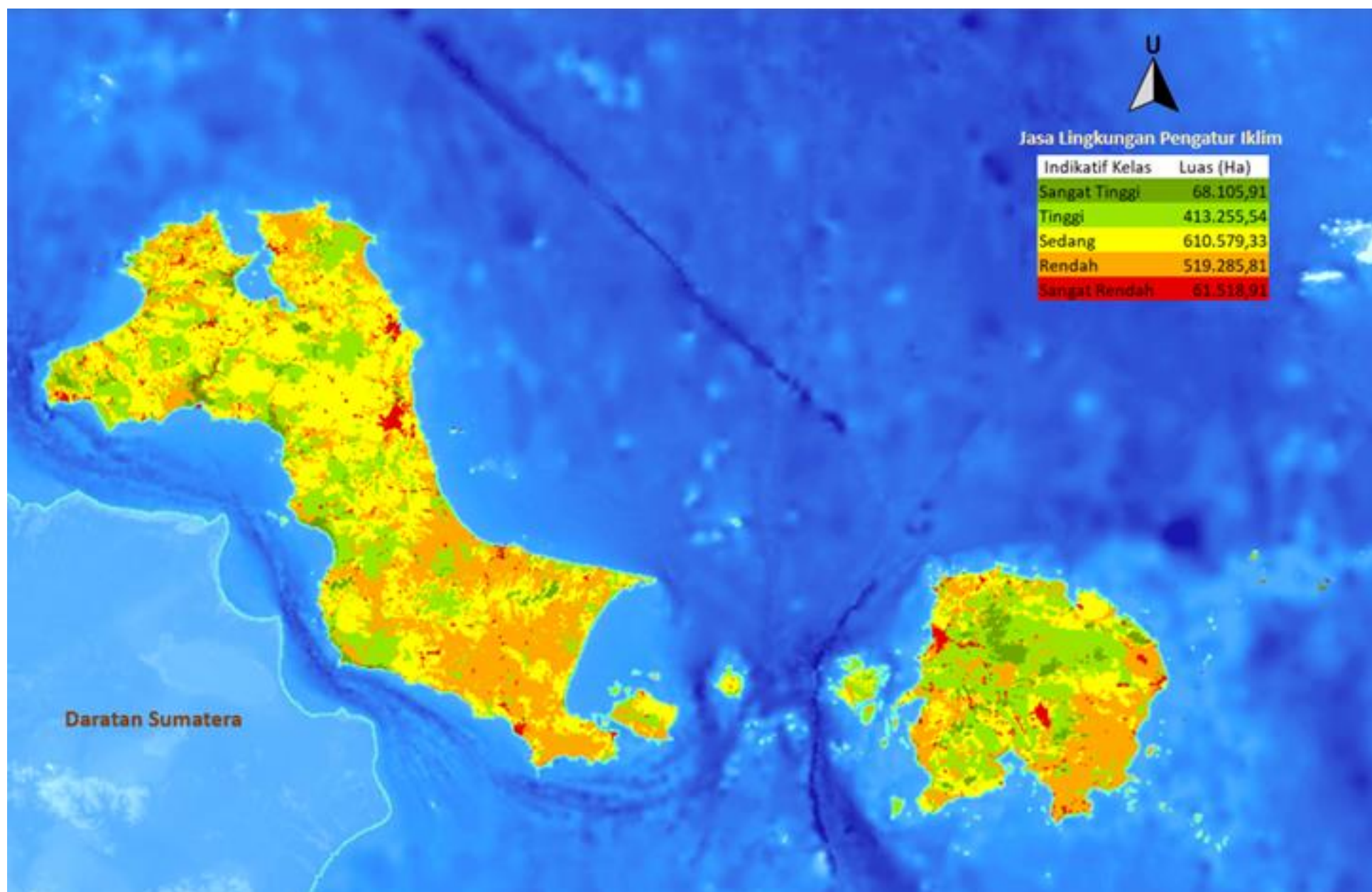


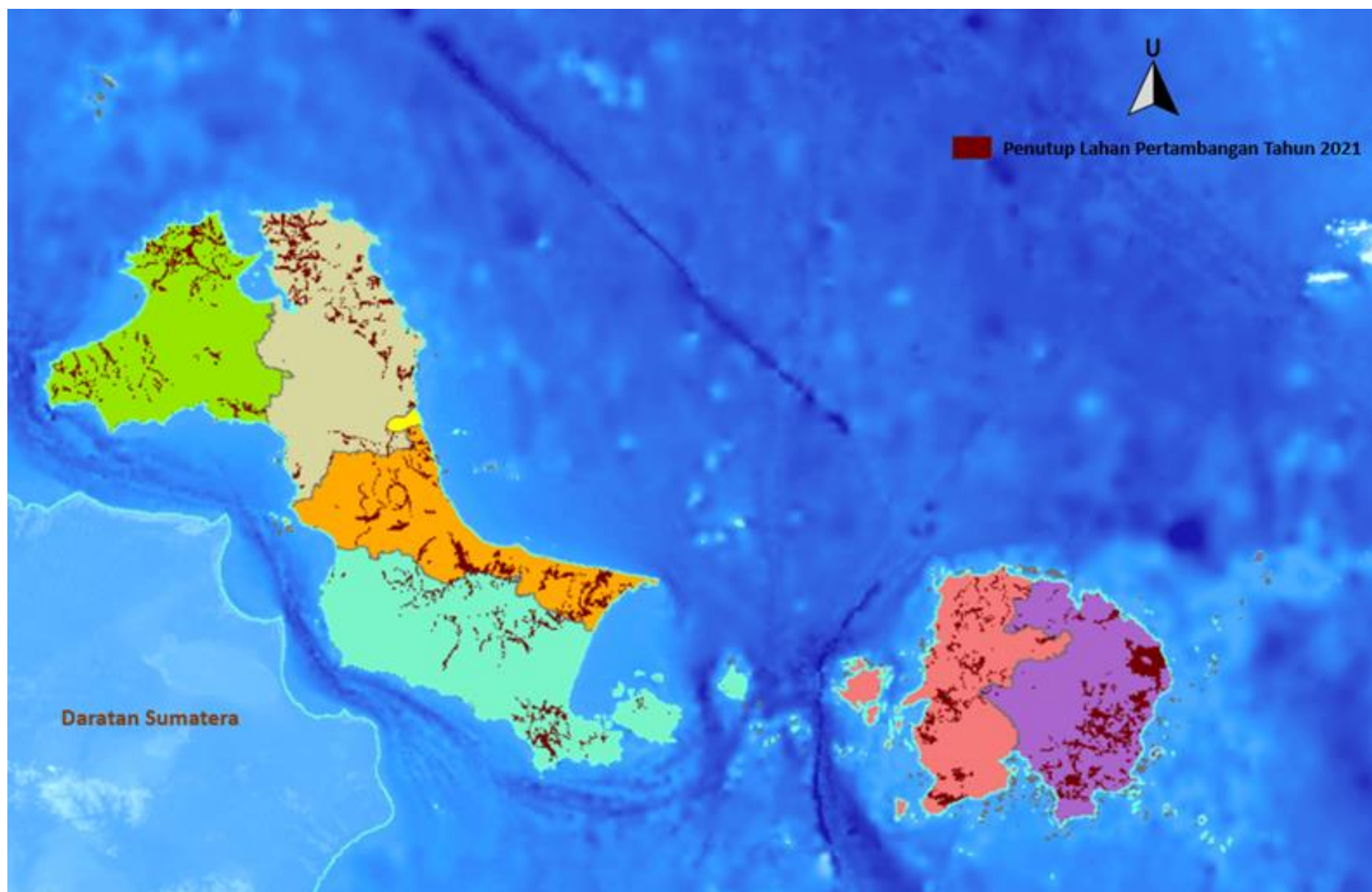


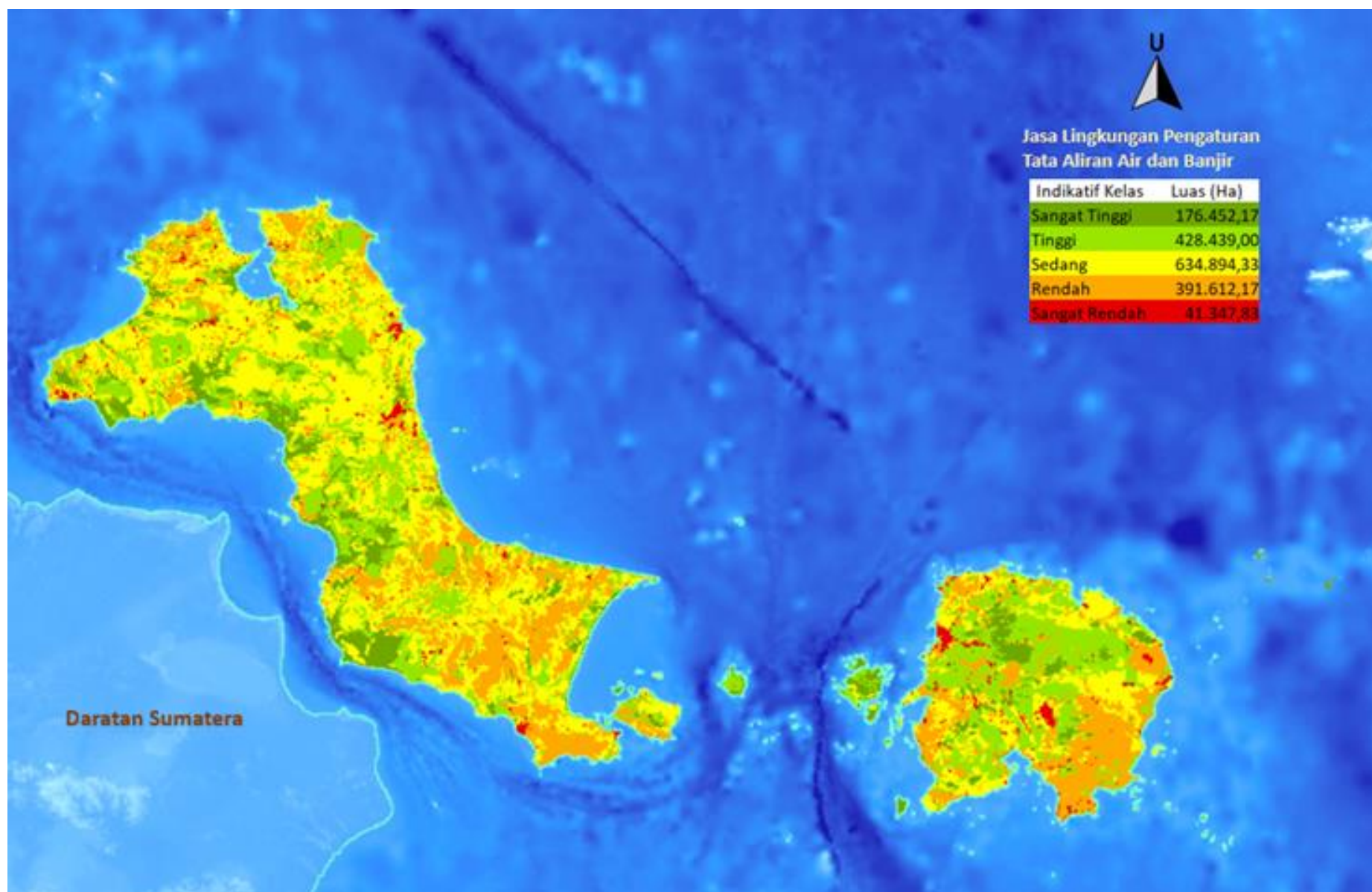


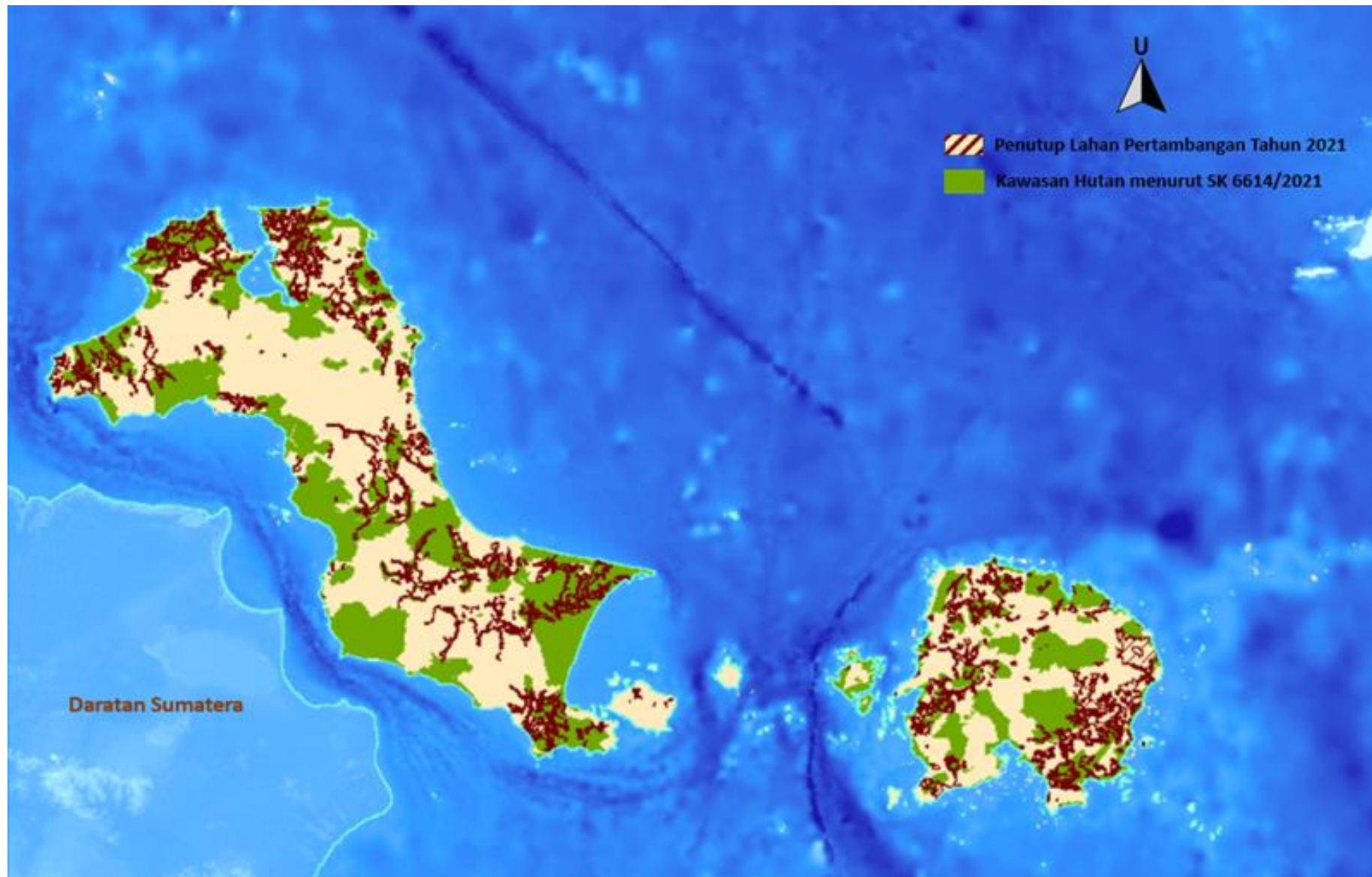












LAMPIRAN

SK TIM KELOMPOK KERJA

PENYUSUNAN DOKUMEN IKPLHD

TAHUN 2024





GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG

GOVERNOR'S DECISION OF BANGKA BELITUNG

NUMBER: 188.44/224/DLHK/2024

ABOUT

FORMATION OF THE WORK GROUP FOR THE DOCUMENT INFORMATION PERFORMANCE MANAGEMENT OF THE LIVING ENVIRONMENT REGIONAL GOVERNMENT OF BANGKA BELITUNG 2024

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung pengembangan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;
 - b. bahwa Tim yang disebutkan namanya dalam Keputusan Gubernur ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 5 Seri E;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 1 seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. Pengarah, mengarahkan pelaksanaan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;
 - b. Penanggung jawab, mengemban tanggung jawab dalam hal pelaksanaan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;
 - c. Ketua, memimpin seluruh jalannya proses Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;
 - d. Sekretaris, membantu ketua dan bertanggungjawab dalam hal mengadministrasi serta hal-hal operasional proses Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;
 - e. Anggota:
 1. menetapkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) isu prioritas yang didasarkan proses secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan dan analisis menggunakan pendekatan *Driving Force, Pressure, State, Impact and Response* (DPSIR);
 2. menginventarisasi dan menginput data terbaru dari stakeholder terkait yang diperlukan untuk penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;
 3. melakukan analisis data dengan pendekatan *Driving Force, Pressure, State, Impact and Response* di dalam sebuah *focus group discussion*;
 4. merangkum inovasi yang telah dilakukan daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup;

5. menyusun Buku Ringkasan Eksekutif dan Buku Laporan Utama Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;
6. berkoordinasi dan menyampaikan hasil penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 kepada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera untuk memperoleh rekomendasi penilaian;
7. memberikan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan kepatuhan terhadap Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota;
8. mengikuti dan berkoordinasi pada setiap tahapan kegiatan Tim Kelompok Kerja.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pj. Gubernur.

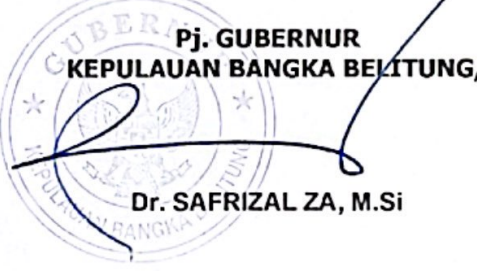
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 6 Mei 2024

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

Lampiran I :
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nomor : 188.44/224/DLHK/2024
Tanggal : 6 Mei 2024
Tentang : Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyusunan
Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2024

**TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- III. Ketua : Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- IV. Anggota :
1. Olmet Zonni Buddin, S.Hut
Kepala Seksi Sumberdaya Hutan dan Tata Lingkungan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIII Pangkalpinang
 2. Kartini Eko Wiharjo, S.Hut., M.E., MPP
Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk
 3. Jamik Safitri, S.ST
Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 4. Zainal Mutaqin A.R., S.Hut
Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan
 5. Akhmad Fadoli, S.ST., M.Sc
Pengamat Meteorologi Geofisika Ahli Madya pada Unit Pelaksana Teknis Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang
 6. Yuliani, S.T
Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 7. Yudistira, S.Kom
Pranata Komputer Pelaksana Mahir pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 8. Ervina Puri Utami, S.T
Penyelidik Bumi Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

9. Jimmy Margomgom Tambunan, S.Pi., M.Si
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Nades Triyani, S.Si., M.Si
Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11. Ricky Nawawi, S.H
Pengawas Pupuk dan Pestisida pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12. Dr. Ir. Ismed Inonu, M.Si
Universitas Bangka Belitung
13. Muhammad Arinda Unigraha Utama
Komunitas Bangka Environment Creative Activist of Kawa (BECAK) Babel
14. Sri Lestari Mahmubah, S.T., M.I.L
Penyuluh Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15. Edwin Setiady, S.T., M.T
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16. Harfiyanto, S.Si
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17. Fianda Revina Widyastuti, S.KM., M.Si
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
18. Elza Rizkiawalia, S.T., M.Si
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
19. Fentinur Evida Septriana, S.T., M.Si
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
20. Refa Riskiana, S.Si., M.Si
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
21. Ningsih Tassri, S.T., M.Sc.
Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LAMPIRAN

DOKUMENTASI TAHAPAN PENYUSUNAN





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam, Bukit Intan - Pangkalpinang 33418
Telp/Fax. (0717) 436975, email : dlh@babelprov.go.id , website : dlh.babelprov.go.id

Pangkalpinang, 25 Maret 2024

Nomor : 660 / 400 /DLHK
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Undangan *Workshop*
Penyusunan Dokumen
IKPLHD Tahun 2024

Kepada
Yth. (Daftar Terlampir)
di -
Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 63 ayat 2 (o) bahwa "dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah provinsi bertugas dan berwenang mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi", serta memperhatikan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SE.4/SETJEN/DATIN/DTN.0/4/2023 perihal Penyampaian Pedoman Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali akan menyusun Dokmen IKPLHD pada tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas sebagai pendahuluan akan dilaksanakan workshop penyusunan dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/ Ibu pada acara tersebut yang akan diselenggarakan secara virtual dengan *zoom meeting* pada:

Hari/tanggal : Senin/ 1 April 2024
Waktu : Pukul 08.30 WIB s.d selesai
Acara : Workshop Penyusunan Dokumen IKPLHD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024
Tautan Zoom : https://bit.ly/workshop_ikplhd2024
Meeting id : 804 726 6880
Passcode : 123456

Koordinasi dan informasi lebih lanjut berkenaan dengan acara ini dapat menghubungi sdri. Ningsih Tassri, S.T., M.Sc. dengan nomor HP/WA 0812-7300- 040.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


FERY AFRIYANTO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700409 199603 1 004

Kepada Yth.

1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIII Pangkalpinang
2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk
4. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resort Insitu Wilayah XVII Bangka
5. Kepala Stasiun Meteorologi Depati Amir Pangkalpinang
6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13. Rektor Universitas Bangka Belitung
14. Ketua Yayasan Pelestarian Flora Fauna Alobi Bangka Belitung
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang
22. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
23. Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
24. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
25. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung
26. Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
27. Kepala Bidang Tata Kelola Kawasan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
28. Kepala UPT KPHP Rambat Menduyung
29. Kepala UPT KPHP Jebu Bembang Antan
30. Kepala UPT KPHP Bubus Panca
31. Kepala UPT KPHP Sigambir Kotawaringin
32. Kepala UPT KPHP Sungai Sembulan
33. Kepala UPT KPHP Muntai Palas
34. Kepala UPT KPHL Belantu Mendanau
35. Kepala UPT KPHP Gunung Duren
36. Rektor Universitas Bangka Belitung
37. Ketua Yayasan Pelestarian Flora Fauna Alobi Bangka Belitung
38. Darman Suriah, S.Hut, Penyuluh Kehutanan Ahli Madya pada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
39. Slamet Riyanto, S.Hut Perencana Ahli Muda pada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

40. Edwin Setiady, S.T., M.T, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
41. Harfiyanto, S.Si, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
42. Fianda Revina Widyastuti, S.KM.,M.Si, Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
43. Elza Rizkiawalia, S.T.,M.Si, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
44. Fentinur Evida Septriana, S.T.,M.Si, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
45. Tutun Ermawati, S.Si, M.M, Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
46. Fira Eryani, S.T, Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
47. Muhammad Irwan Effendi, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
48. Refa Riskiana, S.Si.,M.Si, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
49. Silvia Rivanda, S.T, Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
50. Ningsih Tassri, S.T.,M.Sc., Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
51. Feranita, S.Si., M.Sc, Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
52. Aryudi, Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
53. Sri Karyati, A.Md, Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
54. Lorri Prahara, S.Si.,M.T, Analis Lingkungan Hidup pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
55. Yurzam Abdillah, S.T, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
56. Mahendra, A.Md, Pengelola Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
57. Sonia Fatiani S.H, Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

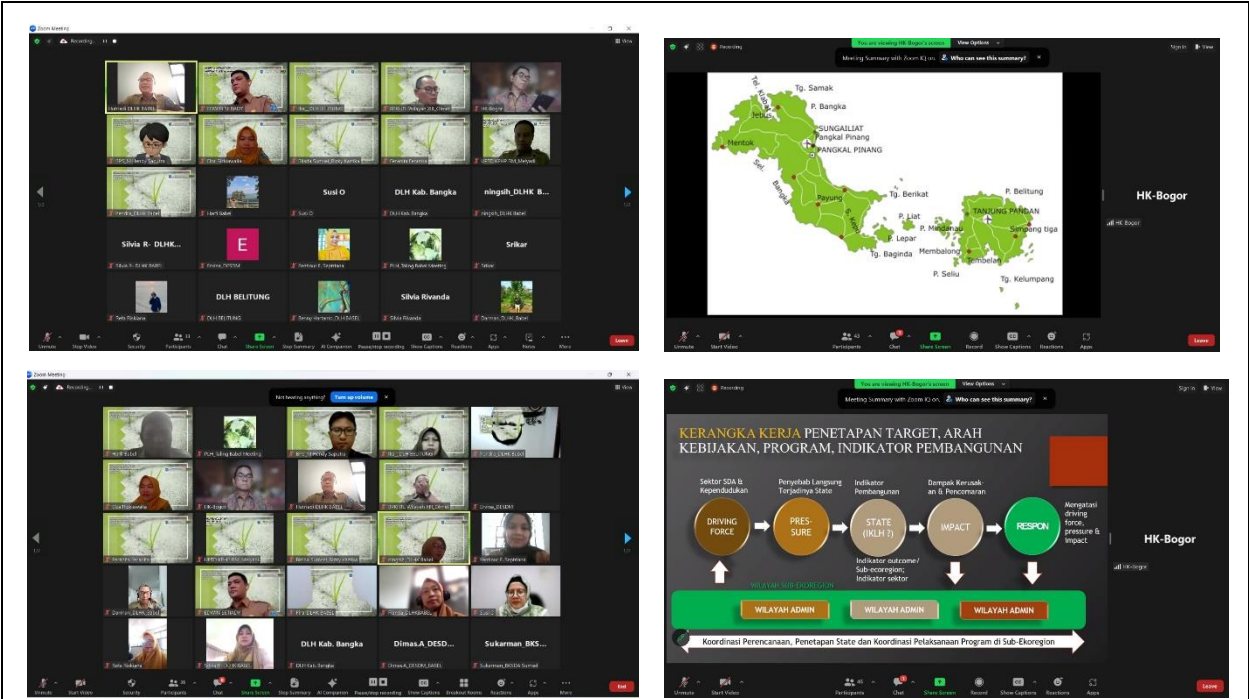
Lampiran II
Surat Nomor : 660 / 400 /DLHK
Tanggal : 25 Maret 2024

**AGENDA PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024**
Pangkalpinang, Senin 1 April 2024

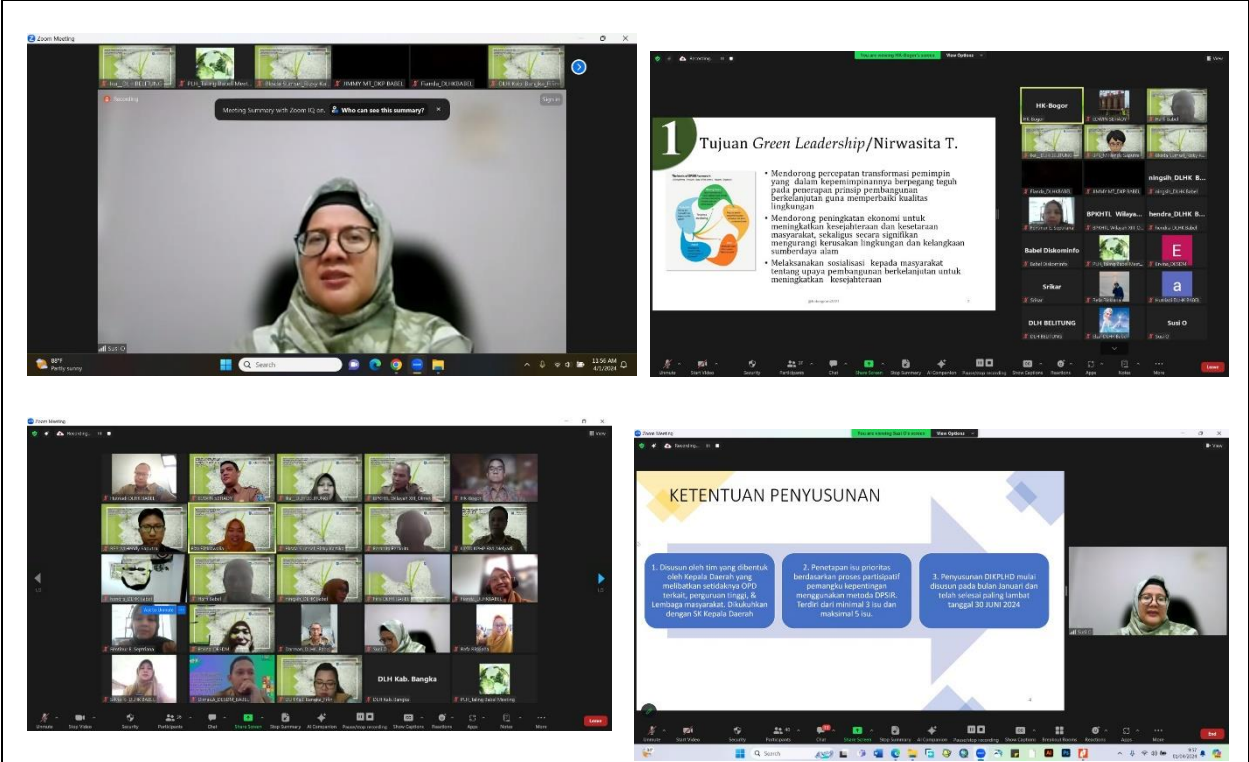
No	Waktu	Materi	Pengisi Acara
1.	08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
2.	08.30 – 09.00	Pembukaan: a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya b. Doa c. Sambutan	Panitia Panitia Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.	09.00 – 12.00	Filosofi Penyusunan Dokumen IKPLHD, Tata Cara Analisis Data dan Arahan Penyusunan Dokumen dari Tim Panelis Nirwasita Tantra	Hariadi Kartodiharjo (Ketua Tim Panelis Nirwasita Tantra)
4.	12.00 – 13.00	ISHOMA	
5.	13.00 – 16.00	Kebijakan Penyusunan Dokumen IKPLHD, Teknis, Input Data IKPLHD serta diskusi Kabupaten/Kota	Pusdatin KLHK

Catatan: Jadwal tentatif

Dokumentasi Workshop Penyusunan Dokumen IKPLHD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024
Provinsi Pelaksanaan secara daring melalui Zoom Meeting, pada tanggal 01 April 2024



Narasumber Prof. Dr. Ir. HARIADI KARTODIHARDJO, MS (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)



Narasumber Susi Oktalina, S. Hut., M.Si (Kepala Sub Bidang Basis Data Pusat Data dan Informasi, Sekjen. KLHK RI)



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang 33148
Telp/Fax. (0717) 436975, email: dlhk@babelprov.go.id, website: dlhk.babelprov.go.id

Pangkalpinang, 31 Mei 2024

Nomor : 660 / 666 / DLHK
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan FGD Analisis DPSIR

Yth. Daftar Terlampir
di -
Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Pasal 63 ayat (2) huruf o bahwa "dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah provinsi bertugas dan berwenang mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi", serta memperhatikan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.237/SETJEN/DATIN/DTN.2.1/B/04/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2024, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Tahun 2024.

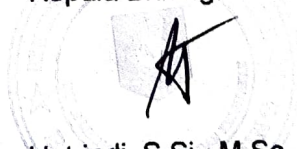
Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka akan dilaksanakan *Focus Group Discussion Analisis Driving Force, Pressure, State, Impact dan Responses (DPSIR)* Isu Lingkungan Hidup Daerah, untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/ Ibu pada:

Hari/ tanggal	:	Selasa/ 4 Juni 2024
Waktu	:	Pukul 08:00 WIB s.d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Agenda	:	<i>Focus Group Discussion Analisis Driving Force, Pressure, State, Impact dan Responses (DPSIR)</i> Isu Lingkungan Hidup Daerah Penyusunan Dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Koordinasi dan informasi lebih lanjut berkenaan dengan acara ini dapat menghubungi sdri. Ningsih Tassri S.T., M.Sc, nomor HP/WA 0812 7300040.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n Plh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup,


Hutriadi, S.Si., M.Sc.
Pembina Tk I/IVb
NIP 19770814 200212 1 004

Kepada Yth.

1. Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung
4. Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Kepala Bidang Tata Kelola Kawasan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Olmet Zonni Buddin, S.Hut, Kepala Seksi Sumberdaya Hutan dan Tata Lingkungan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIII Pangkalpinang
7. Kartini Eko Wiharjo, S.Hut., M.E., MPP, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk
8. Jamik Safitri, S.ST, Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Zainal Mutaqin A.R., S.Hut, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan
10. Akhmad Fadoli, S.ST., M.Sc, Pengamat Meteorologi Geofisika Ahli Madya pada Unit Pelaksana Teknis Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang
11. Yuliani, S.T, Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12. Yudistira, S.Kom, Pranata Komputer Pelaksana Mahir pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13. Ervina Puri Utami, S.T, Penyelidik Bumi Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14. Jimmy Margomgom Tambunan, S.Pi., M.Si, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15. Nades Triyani, S.Si., M.Si, Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16. Ricky Nawawi, S.H, Pengawas Pupuk dan Pestisida pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17. Dr. Ir. Ismed Inonu, M.Si, Universitas Bangka Belitung
18. Muhammad Arinda Unigraha Utama, Komunitas Bangka Environment Creative Activist of Kawa (BECAK) Babel
19. Sri Lestari Mahmubah, S.T., M.I.L, Penyuluh Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
20. Edwin Setiady, S.T., M.T, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
21. Harfiyanto, S.Si, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
22. Fianda Revina Widyastuti, S.KM.,M.Si, Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
23. Elza Rizkiawalia, S.T.,M.Si, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

24. Fentinur Evida Septriana, S.T.,M.Si, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
25. Refa Riskiana, S.Si.,M.Si, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
26. Ningsih Tassri, S.T.,M.Sc, Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
27. Feranita, S.Si., M.Sc, Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
28. Silvia Rivanda, S.T, Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
29. Meri Nopriani, S.T., M.Si, Analis Lingkungan Hidup pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
30. Mahendra, A.Md, Pengelola Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
31. Sonia Fatiani, S.H, Analis Lingkungan Hidup pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

AGENDA FOCUS GROUP DISCUSSION
ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT DAN RESPONSES (DPSIR)
ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN IKPLHD
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024

Selasa, 4 Juni 2024

No	Waktu	Materi	Pengisi Acara
1.	08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
2.	08.30 – 09.00	Pembukaan: Kata Sambutan	Plh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.	09.00 – 12.00	Penyampaian Kerangka Singkat DPSIR masing-masing Sub Tema Dokumen IKPLHD Tahun 2024	Tim Penulis
4.	12.00 – 13.00	ISHOMA	
5.	13.00 – 16.00	Diskusi	Tim Pokja

Catatan: Jadwal tentatif

**FOTO PESERTA FGD ANALISIS DPSIR ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN
IKPLHD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024 HARI SELASA, TANGGAL 04 JUNI
2024, DI RUANG RAPAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



Gambar. Peserta rapat Fgd Analisis DPSIR Isu Lingkungan Hidup Daerah Penyusunan Dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang 33148
Telp/Fax. (0717) 436975, email: dlhk@babelprov.go.id, website: dlhk.babelprov.go.id

Pangkalpinang, 7 Juni 2024

Nomor : 660 / 713 /DLHK
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan FGD Pembahasan dan Penetapan
Isu Prioritas Dokumen IKPLHD 2024

Yth. Daftar Terlampir
di -
Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Pasal 63 ayat (2) huruf o bahwa "dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah provinsi bertugas dan berwenang mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi", serta memperhatikan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.237/SETJEN/DATIN/DTN.2.1/B/04/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2024, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, setelah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) analisis *Driving Force, Pressure, State, Impact dan Responses* (DPSIR) isu lingkungan hidup daerah pada tanggal 4 Juni 2024 yang lalu, berikutnya akan dilaksanakan FGD lanjutan untuk membahas dan menetapkan isu prioritas lingkungan hidup daerah. Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari/ tanggal : Selasa/ 11 Juni 2024
Waktu : Pukul 08:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Agenda : Focus Group Discussion Pembahasan dan Penetapan Isu
Prioritas Lingkungan Hidup Daerah Penyusunan Dokumen
IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Koordinasi dan informasi lebih lanjut berkenaan dengan acara ini dapat menghubungi sdr. Ningsih Tassri S.T., M.Sc, nomor HP/WA 0812 7300040.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n Plh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup,



Retnadi, S. Si M.Sc.
Penjabat DLHK / IVb
NIP 19770814 200212 1 004

Kepada Yth.

1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung
5. Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Kepala Bidang Tata Kelola Kawasan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Olmet Zonni Buddin, S.Hut, Kepala Seksi Sumberdaya Hutan dan Tata Lingkungan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIII Pangkalpinang
8. Kartini Eko Wiharjo, S.Hut., M.E., MPP, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk
9. Jamik Safitri, S.ST, Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Zainal Mutaqin A.R., S.Hut, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan
11. Akhmad Fadoli, S.ST., M.Sc, Pengamat Meteorologi Geofisika Ahli Madya pada Unit Pelaksana Teknis Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang
12. Yuliani, S.T, Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13. Yudistira, S.Kom, Pranata Komputer Pelaksana Mahir pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14. Ervina Puri Utami, S.T, Penyelidik Bumi Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15. Jimmy Margomgom Tambunan, S.Pi., M.Si, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16. Nades Triyani, S.Si., M.Si, Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17. Ricky Nawawi, S.H, Pengawas Pupuk dan Pestisida pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
18. Dr. Ir. Ismed Inonu, M.Si, Universitas Bangka Belitung
19. Muhammad Arinda Unigraha Utama, Komunitas Bangka Environment Creative Activist of Kawa (BECAK) Babel
20. Sri Lestari Mahmubah, S.T., M.I.L, Penyuluh Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
21. Edwin Setiady, S.T., M.T, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
22. Harfiyanto, S.Si, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
23. Fianda Revina Widyastuti, S.KM., M.Si, Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
24. Elza Rizkiawalia, S.T., M.Si, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

25. Fentinur Evida Septriana, S.T.,M.Si, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
26. Refa Riskiana, S.Si.,M.Si, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
27. Ningsih Tassri, S.T.,M.Sc, Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
28. Feranita, S.Si., M.Sc, Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
29. Silvia Rivanda, S.T, Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
30. Meri Nopriani, S.T., M.Si, Analis Lingkungan Hidup pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
31. Mahendra, A.Md, Pengelola Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
32. Sonia Fatiani, S.H, Analis Lingkungan Hidup pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33. Tutun Ermawati, S.Si., M.Si., Penyuluh Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
34. Fira Eryani, S.T, Penyuluh Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
35. M. Irwan Effendi, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
36. Aryudi, Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
37. Sri Karyati, A.Md, Pengelola Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
38. Fenti Halida, S.T., Penyuluh Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
39. Moris Purnama, Staf Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
40. Lorri Prahara, S.Si., M.T, Analis Lingkungan Hidup pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

AGENDA FOCUS GROUP DISCUSSION
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN PENYUSUNAN
DOKUMEN IKPLHD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024

Selasa, 11 Juni 2024

No.	Waktu	Materi	Pengisi Acara
1.	08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
2.	08.30 – 09.00	Pembukaan: Sambutan sekaligus Pengantar Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah	Plh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	09.00 – 11.00	Pengumpulan Isu Lingkungan Hidup dari peserta	Panitia
5.	11.00 – 12.00	Diskusi dan Pembahasan Isu Lingkungan Hidup	Panitia dan Peserta
5.	12.00 – 13.00	I S H O M A	
6.	13.00 – 15.45	Penetapan Isu Prioritas Lingkungan Hidup	Panitia dan Peserta
7.	15.45 – 16.00	Penutupan	Panitia

Catatan: Jadwal tentatif

FOTO PESERTA *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) PEMBAHASAN DAN PENETAPAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN IKPLHD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024, TANGGAL 11 JUNI 2024, DI RUANG RAPAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Gambar. Peserta Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan dan Penetapan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah Penyusunan Dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

22. Feranita, S.Si., M.Sc
Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
23. Silvia Rivanda, S.T
Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
24. Meri Nopriani, S.T., M.Si
Analisis Lingkungan Hidup pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
25. Mahendra, A.Md
Pengelola Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

LAMPIRAN

CV TIM PENYUSUN





EDWIN SETIADY

Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda

DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Jl. Basuki Rachmat No.288,
Kec . Girimaya Pangkalpinang
33143



08176443446



edwinblhd@gmail.com

PENGALAMAN KERJA

- **2005-2007** Indo Keramik Intiwiidya -*Division Head*
Indokeramik Inti Widya, Tangerang
- **2007-2010 Petrochemical P T. Gajah Tunggal,Tbk Div. Styrene Butadiene Rubber – Supervisor Produksi**
- **2010 -2013** PNS BLHD Kota Pangkalpinang
- **2013-2018** PNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pengendali Dampak Lingkungan
- **2018- Februari 2020** PNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung- Kasi Perencanaan Lingkungan Hidup
- **Februari 2020-sekarang** PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung – Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda

PENDIDIKAN

- 2016-2018 – Institut Teknologi Bandung (ITB) Studi
Pembangunan- SAPPK (S2)
- 2000-2005 – Institut Teknologi Nasional Bandung -
Teknik Kimia (S1)

PELATIHAN PROFESIONAL

- 2007 - Waste Water Treatment Plant- Nalco Indonesia
- 2007 Healt Saefty Environment, Polymerization, Utility, Reverse Osmosis (RO), Coagulation Process, GT SBR- Merak
- 2011 – Pelatihan Pengendalian Pencemaran Udara-KLH Serpong
- 2011 - Pelatihan pemantauan kerusakan tanah untuk produksi biomassa, Batam
- 2011- Pelatihan Dasar-Dasar Pengawas Lingkungan Angkatan VII, KLH-Serpong
- 2013- Peningkatan Kapasitas Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kegiatan Pengelolaan Limbah, KLHK-Bandung
- 2013- Pelatihan Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Sungai dengan menggunakan Qual2K serta Inventarisasi Sumber Pencemaran, PPE Sumatera KLHK- Batam
- 2014 -Praktek Kerja Iso 17025 tingkat lanjut-2, Pusarpedal KLHK-Serpong
- 2014- Pelatihan Pejabat Pengendali Dampak Lingkungan Angkatan XIII Tahun 2014, Pusarpedal KLHK- Serpong Tangerang Selatan
- 2018- Bimbingan Teknis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Regional Sumatera, KLKHK-Batam
- 2020- Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, PSLH ITB-Bandung



EDWIN SETIADY

Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda

DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 2020-Pemanfaatan Teknologi Pengindraan Jauh Dalam Pengelolaan Sumber Daya Indonesia- Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
- 2020- Pelatihan System Dynamics, System Dynamics Bandung BootCamp-Bandung
- 2020- Bimbingan Teknis Penyusunan KLHS RPJMD, KLHK
- 2022- Pelatihan Perencana Lingkungan dalam Pembangunan-Bappenas- Magister Ilmu Lingkungan UNDIP.
- 2023- Bimtek Pertek Pembuangan Emisi, PT Sinergi Enviro Nusantara
- 2023- Bimbingan Teknis Pengisian Indeks Respon Kinerja Daerah (IRKD) Program Langit Biru dan Sosialisasi Aplikasi Uji Emisi Nasional (SI-UMI).
- 2023- Pelatihan Daya Tampung Sumber Pencemar dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Indonesia-KLHK
- 2024- Bimbingan Teknis Penyusunan KLHS RPJMD Wilayah Sumatera-KLHK

PUBLIKASI

- 2018- Analisis Revitalisasi Lada Putih Sebagai Program Penggerak Perekonomian Pasca Tambang Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Menggunakan Sistem Dynamics- Jurnal SAPPK ITB
- 2007 – Perancangan Heatexchanger 501 PT.Gajah Tunggal TBK

PENGALAMAN PENYUSUNAN KLHS:

- KLHS RRTR KSP KIPT Sadai, Tahun 2018
- KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-22022, Tahun 2019
- KLHS RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2019
- KLHS RRTR Kawasan Strategis Provinsi KIPT Tanjung Ular, Tahun 2019
- KLHS Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate, Tahun 2021- 2022.
- KLHS RTRW Prov. Kep.Babel Tahun 2023-2043
- KLHS RPJPD Provinsi Kep.Bangka Belitung Tahun 2025-2045
- KLHS RPJMD Provinsi Kep.Bangka Belitung Tahun 2025-2009



FIANDA REVINA W

Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda

DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Pangkalpinang



08122573163



fiandawidyastuti@gmail.com

PENGALAMAN KERJA

- **2009 – Juni 2018**
Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Penyuluh Keluarga Berencana - Dinas Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Prov Kep. Bangka Belitung
- **Juli 2018 – Februari 2020**
Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Kasi Kajian Dampak Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung
- **Maret 2020 – Juni 2021**
Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Kasi Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung
- **Juli 2021 – sekarang**
Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda (Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup) - Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung

PENDIDIKAN

- 2014 - Universitas Diponegoro S2 Ilmu Lingkungan
- 2005 - Universitas Dian Nuswantoro S1 Kesehatan masyarakat

PELATIHAN PROFESIONAL

- 2018 – Diklat Dasar – Dasar AMDAL, PPLH UNDIP
- 2024 – Diklat Video Production for Government Campaign, Kominfo

PUBLIKASI

- 2013- Biogas Potential from the Treatment of Solid Waste of Dairy Cattle: Case Study at Bangka Botanical Garden Pangkalpinang- International Journal of Waste Resources 03(02) DOI:10.4172/2252-5211.1000128
- 2013-Analisis penerapan produksi bersih pada usaha pertanian terpadu: studi kasus Bangka Botanical Garden pangkalpinang



HARFIYANTO

*Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*



Jl. Gegading No. 58
Kelurahan Melintang,
Kecamatan Rangkui, Kota
Pangkalpinang



+62 812 9016 2004



harfie.babel@gmail.com

PENGALAMAN KERJA

- **2009 – Januari 2020**
Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Analis Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung
- **Januari 2020 - Juni 2021**
Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Kasi Kajian Dampak Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung
- **Juli 2021 - Sekarang**
Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Subkoordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup) - Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung

PENDIDIKAN

- 2008 - Bidang Studi MIPA Biologi (S1) - Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

PELATIHAN PROFESIONAL

- 2009 – Diklat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, KLH - Serpong
- 2010 – Diklat Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, KLH -Serpong
- 2013 – Diklat Dasar – Dasar AMDAL, UGM – Yogyakarta
- 2013 – Bimbingan Teknis Sistem Dokumentasi AMDAL dan UKL-UPL, KLHK
- 2014 – Diklat Pembentukan PPPNS Lingkungan Hidup Angkatan XIII, Pusdik Reskrim Polri-Megamendung
- 2022 - Training GIS Monitoring Kerusakan Hutan (Deforestasi, Degradasi Hutan Dan Dekomposisi Gambut) Emisi Karbon Dioksida (CO₂) Potensi/Stok Karbon Potensi Emisi Karbon Dioksida (CO₂) – Indonesia Mapping Community
- 2023 - Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC) Mitigation and Adaptation Trainings and Technical Assistances for Pangkalpinang City between 2021 and 2024, UCLG ASPAC - IPB
- 2024 – Bimbingan Teknis Bagi Calon Enumerator ProKlim di Regional Sumatera - KLHK



NINGSIH TASSRI

Analisis Lingkungan Hidup

DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Jl. Gang Nasir RT 09 RW 002
Kel. Sinar Bulan, Kec Bukit
Intan Pangkalpinang 33149



0812 – 7300040



ningsihtassri10@gmail.com

PENGALAMAN KERJA

- Februari 2020 – Sekarang : Analisis Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung
- 2010 - Januari 2020 : Pengelola Laboratorium - Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung
- 2006 – 2009: *Quality Control Analyst* - PT Surya Utama Sawit - Prov Sumatera Selatan

PENDIDIKAN

- 2019 - Universitas Gadjah Mada S2 Penginderaan Jauh
- 2005 - Universitas Sriwijaya S1 Teknik Kimia

PELATIHAN PROFESIONAL

- 2024 - Diklat Junior Graphic Design Government Transformation Academy (GTA) Kominfo
- 2023 – Pelatihan Sertifikasi Asesor Kompetensi Lingkungan LSP Pengendalian Pencemaran Lingkungan
- 2023 - Pelatihan Software Pengendalian Pencemaran Udara Aermod Batch 1, Smart Eduplex
- 2023 - Sistem Dinamik Untuk Pengelolaan Sumber Daya Hutan Tingkat Dasar - Indonesia Mapping Community
- 2022 – Pelatihan pemetaan menggunakan drone level basic - Indonesia Mapping Community
- 2022 – Training GIS Monitoring Kerusakan Hutan (Deforestasi, Degradasi Hutan Dan Dekomposisi Gambut) Emisi Karbon Dioksida (CO₂) Potensi/Stok Karbon Potensi Emisi Karbon Dioksida (CO₂) – Indonesia Mapping Community
- 2022 Diklat GTA Data Science - BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2021 – Diklat Perencanaan Lingkungan Kerjasama Bappenas dan Universitas Diponegoro
- 2021 - Diklat Dasar Manajemen Bencana – BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2021 - Training Pemodelan Bencana Longsor dengan GIS – Universitas Mulawarman
- 2020 – Pelatihan Aplikasi Google Earth Engine
- 2020 - Penentuan Titik *Ground Control Point* (GCP) - DPUPR Prov Kep. Bangka Belitung
- 2018 - Penulisan Artikel Ilmiah – Fakultas Geografi UGM
- 2017 - ESA *Sentinel Application Platform Introduction and Processing* - Institut of Applied Geosciences, Berlin - UGM
- 2017 - Bimtek Penyusunan Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup – Pusat Pengelola Ekoregion Sumatera - DLH Prov Kep. Bangka Belitung



NINGSIH TASSRI

Analisis Lingkungan Hidup

DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 2016 - Prosedur Pengecekan Antara dan Verifikasi Spektrofotometer - PT Akurasi Prima
- 2014 - Shimadzu AAS *Operational Training* - PT Ditek Jaya
- 2013 - Pengambilan Contoh Uji Air - BLHD Prov Kep. Bangka Belitung
- 2013 - *Laboratory Proficiency Training* - Sinergi Prima Inti
- 2013 - Analisis Kualitas Air Parameter Lingkungan - Fak MIPA UGM
- 2013 - Diklat Pengelolaan Laboratorium Lingkungan - Pusdiklat KLHK
- 2011 - Metode Pengujian dan Validasi/Verifikasi Metode Sesuai Dengan ISO 17025 : 2008 - BLHD Prov Kep. Bangka Belitung
- 2011 - Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Sesuai ISO 17025 : 2008 - BLHD Prov Kep. Bangka Belitung
- 2010 - Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota Tingkat Menengah I - BLHD Prov Kep. Bangka Belitung

PUBLIKASI

- 2021 – Pemetaan Tambak Udang Vaname di Pesisir Kepulauan Bangka Belitung Menggunakan Citra Sentinel 2A MSI – Prosiding BIG
- 2019 - *Changes in Carbon Dioxide Sequestration as an Impact of Tin Mining Based on Remote Sensing Imagery* - RTA - Universitas Gadjah Mada
- 2019 - *Multitemporal Analysis of Vegetated Land Cover Changes Related to Tin Mining Activities in Bangka Regency Using Multitemporal Landsat Imagery* – Proceeding SPIE
- 2019 - Proyeksi Serapan Emisi Karbondioksida Berdasarkan Analisis Citra Landsat dalam Perubahan Penutup Lahan Bervegetasi Terkait Aktivitas Penambangan di Sebagian Wilayah Kabupaten Bangka – Program Tubel - APBD Prov Kep. Bangka Belitung (Tesis)



SILVIA RIVANDA

Analisis Lingkungan Hidup

DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

➤ PENGALAMAN KERJA

- **April 2023 - Sekarang** : Analisis Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung
- **31 Agustus 2021- 30 Maret 2023** : Kabid. Pembinaan dan Pengawasan LH - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah
- **Januari 2017-31 Agustus 2021** : Kabid. Penataan dan Petaan LH - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah
- **03 November 2014-Januari 2017** : Kabid. Pengawasan Lingkungan Hidup Kabid. Konservasi, Pemantuan dan Pengawasan Lingkungan Hidup - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah
- **09 Agustus 2009 - 03 November 2014** : Kasi Pemantuan dan Pemulihan lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah
- **06 Juli 2006 – 09 Agustus 2009** : Plt. Kasi Pemantuan dan Pemulihan lingkungan – Dinas Pertambangan, energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah
- **02 Januari 2005 -06 Juli 2006** : Perencanaan Lingkungan Hidup Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah

PENDIDIKAN

2003-Teknik Lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) "YLH" Yogyakarta

PELATIHAN PROFESIONAL

- 2024-Diklat Junior Graphic Design Government Transformation Academy (GTA) Kominfo
- 2024-Bimbingan Teknis Penyusunan KLHS RPJMD Wilayah Sumatera
- 2022-Bimbingan Teknis Dasar-dasar Pengawasan Pasca UUCK kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup se-Indonesia"
- 2011- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD di KLHK RI Jakarta
- 2011 – Diklat Penilaian AMDAL di PSLH UGM Yogyakarta
- 2011 – Diklat Limbah LB3 di KLHK RI Jakarta
- 2011 – Diklat Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup



Jl. Sumedang no.132 Gang ikhlas
RT.003/RW.002, Kel.Kejaksan,Kec.
Taman Sari,Pangkalpinang Provinsi
Kep. Bangka Belitung



0813– 73168852



silviarivanda3@gmail.com



ELZA RIZKIAWALIA

*Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*



0813 6719 6665



elza.rizkiawalia@gmail.com



Gg. Masjid Jl. Stania No.
202, Kel. Taman Bunga,
Kec. Gerunggang,
Pangkalpinang, 33122



PENGALAMAN KERJA

- 2021-sekarang: Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda DLHK Prov. Kep. Bangka Belitung
- 2019-2021: Analis Lingkungan Hidup DLH Prov. Kep. Bangka Belitung
- 2013-2019: Analis pada UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Prov. Kep. Bangka Belitung
- 2010-2013: Staf Data dan Informasi BNN Prov. Kep. Bangka Belitung



PENDIDIKAN

- 2017: Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang
- 2003: Teknik Kimia UPN 'Veteran' Yogyakarta



PELATIHAN PROFESIONAL

- 2023: Diklat Sistem Informasi Geospasial Tingkat Dasar - BIG
- 2022: Pelatihan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 & Sertifikasi - PSLH UGM
- 2021: Diklat Dasar Manajemen Bencana - BPBD Babel dan BKPSDMD Babel
- 2020: Sistem Informasi Geografis untuk Analisis Lingkungan Hidup - PSLH ITB
- 2019: Kajian Lingkungan Hidup Strategis - PSLH ITB
- 2018: Dokumentasi sesuai ISO/IEC 17025:2017 - SPIN
- 2016: Dasar-dasar AMDAL - PSLH UNDIP



PENGALAMAN PENELITIAN

2017 - Kajian Peluang dan Kelayakan Penerapan Produksi Bersih di Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung



FENTINUR EVIDA SEPTRIANA

*Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*



0822 8062 5554



fentinur.evida@ui.ac.id



Perum Tirta Perdana
Permai, Padang Baru,
Pangkalan Baru, Bangka
Tengah 33684



PENGALAMAN KERJA

- *2022-sekarang: Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda DLHK Prov. Kep. Bangka Belitung*
- *2016-2022: Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama DLHK Prov. Kep. Bangka Belitung*
- *2015-2016: Calon Pengendali Dampak Lingkungan BLHD Prov. Kep. Bangka Belitung*
- *2014-2015: Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kep. Bangka Belitung*



PENDIDIKAN

- *Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia*
- *Sarjana Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada*



PELATIHAN PROFESIONAL

- *Pengendalian Dampak Lingkungan – 2015 oleh Pusdiklat KLHK*
- *Pelatihan Dasar-dasar AMDAL – 2015 oleh Pusdiklat KLHK*
- *Pelatihan Penilaian AMDAL – 2016 oleh Pusdiklat KLHK*
- *Pelatihan KLHS – 2017 oleh PSLH UGM*
- *Pelatihan System Dynamics – 2020 oleh Asosiasi Sistem Dinamik Indonesia (ASDI)*
- *Pelatihan System Dynamics Tingkat Madya – 2021 oleh PPSML UI*
- *Bimbingan Teknis Penyusunan Peta DDDTLH – DLHK & P3ES 2021*

- *Pelatihan GIS Perhitungan Emisi CO₂, Stok Karbon, dan Potensi Emisi Deforestasi, Degradasi Hutan, dan Dekomposisi Gambut – 2022 oleh Indonesia Mapping Community*
- *Perencanaan Lingkungan Dalam Pembangunan – 2022 oleh Bappenas dan Undip*
- *Clean Energy and Emission Reduction – Singapore Cooperation Programme, 2022*
- *Bimbingan Teknis Penyelenggaraan KLHS untuk Wilayah Regional Sumatera – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023*
- *Analisis Kota Cerdas (Smart City) – Government Transformation Academy, 2024*
- *Pelatihan Life Cycle Assessment (LCA) Dalam Environment Social Governance (ESG) – Kementerian Koordinator Perekonomian, 2024*



PUBLIKASI

- *Dampak Perubahan Tutupan Lahan pada Sistem Hidrologi di Jakarta (The Effect of Land Cover Change to Hydrological System in Jakarta)*
Majalah Ilmiah Globe, Geospatial Information Agency of Indonesia, 2020
- *Sustainability Indicators for Biogas Production from Palm Oil Mill Effluent: A Case Study in Indonesia*
Lecture Notes in Civil Engineering, SPRINGER, 2021
- *Biogas Power Generation from Palm Oil Mill Effluent (POME): Techno-Economic and Environmental Impact Evaluation*
Energies, MDPI, 2022
- *Social change and community perceptions on change environment due to sand mining*
Interaction, Community Engagement, and Social Environment, Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future, 2024



REFA RISKIANA

*Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama
DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*



0815 3294 5344



refariskiana@gmail.com



Jl. Letkol Soleh Ode
Gang Merak
Pangkalpinang



PENGALAMAN KERJA

- 2021-sekarang: PNS – Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2010-2021: PNS – Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



PENDIDIKAN

Institut Pertanian Bogor, Bogor

- 2018-2021 – Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Sekolah Pasca Sarjana (S2)
- **Universitas Sriwijaya, Inderalaya**
- 2002-2006 – Biologi, Fakultas MIPA (S1)



PELATIHAN PROFESIONAL

- 2012 – Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca dan Penghitungan BaU Baseline – KLHK, Bandung
- 2012 – The EUMRVCB Project, in collaboration with Indonesia's Ministry of the Environment – GIZ dan KLH, Bali
- 2013 – Pelatihan Dasar-Dasar Pengawas Lingkungan Hidup – PPE Sumatera, Pekanbaru
- 2013 – Pelatihan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan – KLH, Serpong
- 2014 – Peningkatan kapasitas penilaian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim bagi pemangku kepentingan daerah – KLH, Tanjung Pandan
- 2015 – Training of Trainer (TOT) PROPER – KLH, Jakarta Selatan
- 2016 – workshop pendampingan dan percepatan penyusunan laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) dan Rencana Kaji Ulang RAD-GRK – Bappenas RI, Medan
- 2017 – workshop pembuatan DRKPL dan Dokumen Hijau PROPER – BENEFITA, Jakarta
- 2019 – Mentoring program in scientific career development – IPB University & DAAD long term lecturer, Bogor
- 2023 – Blue Carbon Accounting Training level 1

➤ **PENGHARGAAN/BEASISWA**

- 2013 – Peserta terbaik I Pelatihan Dasar – Dasar Pengawas Lingkungan Hidup
- 2018 – Beasiswa pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

➤ **PENGALAMAN PUBLIKASI**

- Selamat datang Nirwasita Tantra, penghargaan green leadership bagi pemerintah daerah.
<https://serumpun.babelprov.go.id/selamat-datang-nirwasita-tantra-penghargaan-green-leadership-bagi-pemerintah-daerah>. 22 Juli 2022
- Mendulang berkah, mengembalikan marwah kelapa – Surat Kabar Harian Rakyat Pos edisi 24 Maret 2022
- 2021 – Abundance and distribution of microplastics in Baturusa Watershed of Bangka Belitung Islands Province – IOP Conference series : Earth and environmental science
- 2020 – Kelimpahan dan komposisi sampah plastik di DAS Baturusa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung – JPSSL. Vol. 10/Edisi 4
- 2012 – Pertambangan Timah dan Polemiknya dipublikasikan pada Majalah Suara Bumi Th. VIII/Edisi 1
- 2011 – Ekowisata Sisi Lain Pariwisata Bangka Belitung – Suara Bumi Th. VII/Edisi 6



FERANITA

Analisis Lingkungan Hidup

DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PENGALAMAN KERJA

- *2021-sekarang: Analisis Lingkungan Hidup
DLHK Prov. Kep. Bangka Belitung*
- *2020-2021: Analisis Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan DLH Prov. Kep. Bangka
Belitung*
- *2010-2020: Pengelola Laboratorium
pada UPTD Laboratorium Lingkungan
DLH Prov. Kep. Bangka Belitung*

PENDIDIKAN

- *2019 - Universitas Gadjah Mada,
Fakultas Geografi Prodi Penginderaan
Jauh*
- *2003: Universitas Sriwijaya,
Fakultas MIPA - Kimia*

PELATIHAN PROFESIONAL

- *2024: Pelatihan Penerapan Analisis Life
Cycle Assessment (LCA) – Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian*
- *2024 : Data Science Fundamental –
Government Transformation Academy
(GTA) Pusdiklat Kominfo*
- *2023: Bimbingan Teknis Pembangunan
Taman Keanekaragaman Hayati –
Direktorat Jenderal KSDAE Direktorat
Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem*
- *2023: Pelatihan Kewirausahaan Bidang
Keterampilan Usaha Produktif/Pembuatan
Minyak Atsiri Sapu-sapu*
- *2022: Training GIS Monitoring Kerusakan
Hutan – Indonesia Mapping Community*



0813 1149 1907



feranita340@yahoo.com



Taman Gandaria Mas 3 No.
B38 Jl. Lingkar Barat
Gg. Melati
Kel. Jerambah Gantung
Pangkalpinang



- *2022: Analis Media Sosial - Government Transformation Academy (GTA) BKPSDMD Prov.Kep.Babel*
- *2021: Pelatihan Perencanaan Lingkungan dan Pembangunan - Bappenas*
- *2021: Diklat Dasar Manajemen Bencana BKPSDMD Prov. Kep. Babel*

PENGALAMAN PENELITIAN

- *2019 – Analisis Sebaran Total Suspended Solid Kolong Kacang Pedang dengan Citra PlanetScope – Seminar Nasional Geografi III Fak. Geografi UGM*



SRI LESTARI MAHMUBA

*Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda
DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*



0813 79225242



mahmubasrilestari@gmail.com



Jl. Murai Blok A. No. 14
Komp. Bhayangkara
Temberan Kec. Bukit
Intan Pangkalpinang,
33147



PENGALAMAN KERJA

▪ Mei 2022 – sekarang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kep. Bangka Belitung

▪ 2019 – April 2022

Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi – Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kep. Bangka Belitung

▪ 2014 – 2018

Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Analis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kep. Bangka Belitung

▪ 2009 – 2014

Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Analis Laboratorium LPPMHP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Bangka Belitung

▪ 2004 – 2009

Honorer – Analis Laboratorium LPPMHP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Bangka Belitung



PENDIDIKAN

▪ 2014 - Universitas Padjajaran S2 Ilmu Lingkungan

▪ 2003 - Universitas Sriwijaya S1 Teknik Kimia



PELATIHAN PROFESIONAL

▪ 2024 – Diklat Dasar – Dasar AMDAL, KLHK

▪ 2015 – Bimtek Pengujian Kualitas Air

▪ 2015 – Bimtek Peningkatan kapasitas aparat pemda dalam penentuan daya tampung Sungai

▪ 2015 – Bimtek EK Pengujian dan K3 Laboratorium

▪ 2010 – Bimtek Pengujian Organoleptik dan Mikrobiologi, BBP2HP

▪ 2009 – Pelatihan Sistem manajemen Mutu

Laboaratoium ISO/IEC 17025 : 2005



PUBLIKASI

□ 2013- Analisis ekonomi manfaat ekosistem terumbu karang di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



MERI NOPRIANI

*Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan
DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

➤ PENGALAMAN KERJA

- 2013 – sekarang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kep. Bangka Belitung
- 2010 – 2013
Pegawai Negeri Sipil (PNS) – Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Prov. Kep. Bangka Belitung

➤ PENDIDIKAN

- 2019 – Institut Pertanian Bogor, S2 Program Studi Ilmu Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
- 2001 - Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan, S1 Program Studi Teknik Kimia

➤ PELATIHAN PROFESIONAL

- 2024 – Diklat Teknis Validasi dan Verifikasi Metoda, serta Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan – KAN
- 2023 – Sertifikasi Petugas Pengambilan Contoh Uji Air – LSP Kimia Industri, Jawa Barat
- 2023 – Pelatihan ISO 13528 – SPIN Bandung
- 2022 – Sertifikasi Ahli K3 Muda (SKKNI 2008-042) – Unilab Perdana, Jakarta
- 2022 – Pelatihan “Machine Learning untuk Pengambilan Kebijakan” – IONIA, Bogor
- 2020 – Pelatihan “Prospective Analysis II (Smic-Probe dan Multipol) dan Dynamic Modeling, IONIA Bogor
- 2016 – Diklat Teknis Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan, Pusarpedal KLH, Serpong

➤ PUBLIKASI

- 2021 - Multi Actor Issues in Defining Sustainability of 3R-Temporary Shelter (TPS-3R) at Pangkal Pinang: A Prospective Analysis using MACTOR



0812 7200 070



meri.nopriani@gmail.com



Jl. Depati Hamzah Gg. Bedade
Kel. Sinar Bulan Kec. Bukit
Intan Pangkalpinang 33148